PEMERINTAH
PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

RKPD NTB 2027

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT









BERKELANJUTAN INKLUSIF KOLABORATIF BERDAYA SAING

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

Menimbang :

a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat, perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai pedoman dan arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

9. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6809);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor ..... Tahun 2026 tentang Peraturan Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;
16. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022 Nomor 2);
17. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5);
18. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 20025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 207);
19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Barat.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2027, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2027 adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2027 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2027.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang memuat prioritas pembangunan yang merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
11. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat RAPBD adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas bersama oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
12. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat RAPBN adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana tahunan keuangan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara selanjutnya disingkat APBN adalah rencana tahunan keuangan pemerintah negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan ditetapkan dengan undang-undang.
15. Plafon anggaran adalah patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah setelah disepakati Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

16. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

17. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran, yang selanjutnya disingkat DIPA atau dokumen lain yang disamakan dengan DIPA, adalah suatu dokumen pelaksanaan anggaran yang dibuat oleh menteri/pimpinan lembaga serta disahkan oleh Menteri Keuangan dan berfungsi sebagai dokumen pelaksanaan pendanaan kegiatan serta dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah.

18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.

Pasal 2

1) RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, kebijakan keuangan daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan pembangunan daerah dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah untuk mendorong partisipasi masyarakat.
2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
BAB III	KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV	SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BAB V	ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA
BAB VI	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH
BAB VIII	PENUTUP

3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan Peraturan Gubernur ini.

Pasal 3

RKPD sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 digunakan sebagai :

a. Pedoman Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Barat dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
b. Pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD lingkup Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Barat; dan

c. Acuan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam menyusun RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2027.

Pasal 4

Dalam rangka penyusunan RAPBD Tahun 2027:

a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2027, sebagai bahan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara di DPRD;

b. Perangkat Daerah lingkup Provinsi Nusa Tenggara Barat menggunakan RKPD Tahun 2027 sebagai bahan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dengan DPRD.

Pasal 5

Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menelaah kesesuaian Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2027 dengan RKPD Tahun 2027.

Pasal 6

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Ditetapkan di Mataram,
Pada Tanggal, Juni 2026
GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT

LALU MUHAMAD IQBAL

Diundangkan di Mataram
pada tanggal, Mei 2026
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB,

ABUL CHAIR, AK

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2026 NOMOR

Salinan Sesuai dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Dr. HUBAIDI, S.H.,M,H
NIP.19790607 200501 1 012

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i
DAFTAR TABEL iv
DAFTAR GRAFIK xiv
DAFTAR GAMBAR iv
KATA PENGANTAR v
BAB I PENDAHULUAN I-1
1.1 Latar Belakang I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan I-4
1.3 Hubungan Antar Dokumen I-6
1.4 Maksud dan Tujuan I-8
1.5 Sistematika I-8
BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH II-10
2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah II-10
2.1.1 Evaluasi Terhadap Capaian Indkator Makro Daerah Berdasarkan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah II-10
2.1.2 Evaluasi Terhadap Capaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Daerah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 ..... II-28
2.1.3 Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB II-13
2.1.4 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2025 ..... II-16
2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah II-17
2.2.1 Aspek Geografi dan Demografi II-17
2.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat II-63
2.2.3 Aspek Pelayanan Umum II-74
2.2.4 Aspek Daya Saing Daerah II-202
2.2.5 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi NTB II-223
2.3 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal II-235
2.4 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah II-246
2.4.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah II-246
2.4.2 Rumusan Permasalahan Daerah Tahun 2027 ..... II-282
2.4.3 Isu Strategis Daerah II-290
2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD II-297
2.6 Inovasi Daerah II-301

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH III-1
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah III-1
3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah III-3
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah III-7
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah III-9
3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah III-24
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah III-30
3.3 Sumber Pembiayaan Alternatif III-32
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH IV-34
4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan IV-35
4.1.1 Penelaahan Sasaran Pembangunan Nasional serta Kebijakan Strategis Lainnya IV-35
4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat .. IV-40
4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan IV-1
4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional IV-1
4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat IV-6
BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA V-147
5.1 Arahan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Nasional V-149
5.2 Arahan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi NTB V-153
5.2.1 Isu-isu Pembangunan kewilayahan V-154
5.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah di Provinsi NTB V-164
5.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota di Pulau Lombok V-2
5.2.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa ... V-9
BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH V-1
6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD V-1
6.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN V-46
6.3 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional (PN) .. V-48
6.4 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) V-62
6.5 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Mitra Pembangunan. V-64
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH V-1
7.1 Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB V-1
7.2 Indikator Kinerja Utama V-2

7.3 Indikator Kinerja Daerah V-3

BAB VIII PENUTUP V-1

8.1 KAIDAH PELAKSANAAN V-1

8.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan V-1

8.1.2 Kerangka Pengendalian V-2

8.1.3 Sistem Insentif V-4

8.1.4 Mekanisme perubahan V-4

8.2 SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN V-5

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Makro Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 ..... II-10
Tabel 2. 2 Laju Pertumbuhan Menurut Jenis Lapangan Usaha Tahun 2023-2025 ..... II-14
Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2023-2025 ..... II-15
Tabel 2. 4 Perkembangan IPM Provinsi NTB 2021-2025 ..... II-20
Tabel 2. 5 Penurunan Emisi GRK tahunan tahun 2025 menurut subsektor II-21
Tabel 2. 6 Capaian Tujuan dan Sasaran Periode Tahun 2025 RPJMD NTB Tahun 2025-2029 ..... II-32
Tabel 2. 7 capaian kinerja masing-masing perangkat daerah pada tahun 2025 ..... II-16
Tabel 2. 8 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2025 ..... II-18
Tabel 2. 9 Jumlah Sungai Dirinci Menurut Wilayah Sungai II-20
Tabel 2. 10 Potensi Ketersediaan, Kebutuhan dan Proyeksi Kebutuhan Air II-21
Tabel 2. 11 Rencana Sistem Perkotaan II-27
Tabel 2. 12 Rencana Pelabuhan Pengumpan di Provinsi NTB II-31
Tabel 2. 13 Luas Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (Hutan Lindung) di Provinsi NTB Tahun 2022 ..... II-36
Tabel 2. 14 Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut Provinsi NTB II-38
Tabel 2. 15 Penduduk Provinsi NTB Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa) Tahun 2021-2025 ..... II-46
Tabel 2. 16 Jumlah penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten-Kota se-NTB Tahun 2025 ..... II-48
Tabel 2. 17 Jumlah dan Persentase Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di NTB Tahun 2025 ..... II-49
Tabel 2. 18 KSN dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi II-50
Tabel 2. 19 KSN dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup.. II-50
Tabel 2. 20 KSN dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan II-51
Tabel 2. 21 KSNT di Wilayah Provinsi NTB II-51
Tabel 2. 22 PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021 - 2025 (Rp.Milyar) II-64
Tabel 2. 23 PDRB ADHK Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021 - 2025 (Rp.Milyar) II-65
Tabel 2. 24 Klasifikasi Pencapaian IPM II-72
Tabel 2. 25 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB, Kabupaten/kota dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-74
Tabel 2. 26 Progres Ketersediaan Satuan Pendidikan 2021 s.d 2025 ..... II-75
Tabel 2. 27 Rasio Guru per Jenjang Terhadap Peserta Didik Tahun 2021 s.d 2025 ..... II-76
Tabel 2. 28 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-77
Tabel 2. 29 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2021 -2025 ..... II-78
Tabel 2. 30 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-79
Tabel 2. 31 Angka Melanjutkan dari Lulusan SMA ke Perguruan Tinggi II-80
Tabel 2. 32 Angka Putus Sekolah (DO) SMA dan SMK Provinsi NTB dari Tahun 2020/2021 s.d 2024/2025 ..... II-81
Tabel 2. 33 Harapan Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-82
Tabel 2. 34 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-83
Tabel 2. 35 Capaian 29 Indikator SPM Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-85
Tabel 2. 36 Umur Harapan Hidup Per Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 ..... II-87

Tabel 2. 37 Jumlah Kasus Kematian Bayi (AKB) di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 .. II-88
Tabel 2. 38 Proporsi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-89
Tabel 2. 39 Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) di Provinsi NTB Tahun 2021-2025..... II-89
Tabel 2. 40 Proporsi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-90
Tabel 2. 41 Capaian Indikator Pendukung Kematian Bayi dan Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2021 – 2025 (dalam %)..... II-91
Tabel 2. 42Prevalensi Stunting Kab./Kota se-NTB Tahun 2021-2025 ..... II-92
Tabel 2. 43 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2021-2025 .. II-92
Tabel 2. 44 Capaian UHC Kabupaten/Kota s.d. Desember 2025 ..... II-93
Tabel 2. 45 Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang telah di sepakati di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Tahun 2025..... II-97
Tabel 2. 46 Data Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2025 ..... II-98
Tabel 2. 47 Persentase Kemantapan Sistem Irigasi Tahun 2021-2025..... II-98
Tabel 2. 48 Backlog Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi NTB II-99
Tabel 2. 49 Jumlah Rumah Tangga Yang Menempati Rumah Layak Huni di NTB Tahun 2021-2025 ..... II-100
Tabel 2. 50 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi NTB Tahun 2021–2025 ..... II-102
Tabel 2. 51 Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Sampai Dengan Tahun 2020-2021 Di Provinsi NTB..... II-103
Tabel 2. 52 Data Pelanggaran Atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Provinsi NTB Tahun 2020-2025 ..... II-104
Tabel 2. 53 Jumlah Bencana yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-105
Tabel 2. 54 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2020-2024 ..... II-106
Tabel 2. 55 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi NTB Tahun 2024 ..... II-107
Tabel 2. 56 TPAK dan TPT di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-109
Tabel 2. 57 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota (Persen) II-111
Tabel 2. 58 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-112
Tabel 2. 59 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-113
Tabel 2. 60 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020-2024 ..... II-113
Tabel 2. 61 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) Tahun 2021-2025 ..... II-114
Tabel 2. 62 Perkembangan kasus kekerasan terhadap anak menurut kabupaten/kota Tahun 2021-2025 ..... II-115
Tabel 2. 63 Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024 ..... II-116
Tabel 2. 64 Kasus Perkawinan Anak Berdasarkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025..... II-116

Tabel 2. 65 Situasi Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk NTB Tahun 2025 ..... II-117
Tabel 2. 66 Perkembangan Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB berdasarkan Kelompok Bahan Pangan Tahun 2020 - 2025 ..... II-118
Tabel 2. 67 Perkembangan Tingkat Konsumsi Protein Penduduk NTB Tahun 2021-2024 ..... II-120
Tabel 2. 68 Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi Penduduk NTB Tahun 2021- 2025 ..... II-121
Tabel 2. 69 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2025 ..... II-122
Tabel 2. 70 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan Tahun 2024 ..... II-124
Tabel 2. 71 Rekapitulasi konflik Pertanahan yang difasilitasi Biro Pemerintahan Tahun 2025 ..... II-125
Tabel 2. 72 Rekapitulasi Tanah Terindikasi Terlantar Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) s.d Tahun 2025..... II-126
Tabel 2. 73 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-NTB Sampai Dengan Desember 2025..... II-127
Tabel 2. 74 Indeks Desa Membangun di NTB Tahun 2025..... II-128
Tabel 2. 75 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Adat di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 II-128
Tabel 2. 76 Posyantek yang telah terbentuk di Provinsi NTB II-129
Tabel 2. 77 Rekapitulasi Perkembangan BUMDes Aktif di NTB 2019-2024 ..... II-130
Tabel 2. 78 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB Tahun 2021-2025 ..... II-130
Tabel 2. 79 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan Provinsi NTB Tahun 2020-2024 ..... II-132
Tabel 2. 80 Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2021-2025 ..... II-134
Tabel 2. 81 Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2021 – 2025 ..... II-134
Tabel 2. 82 Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2021-2025..... II-137
Tabel 2. 83 Jumlah UMKM Provinsi NTB Berdasarkan Penetapan Kategori Usaha Berdasarkan Nilai Penjualan Tahun 2025 ..... II-138
Tabel 2. 84 Capaian Nilai Realisasi Investasi Provinsi NTB Tahun 2021 – 2025..... II-139
Tabel 2. 85 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB Tahun 2021–2025 ..... II-140
Tabel 2. 86 Realisasi Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota..... II-140
Tabel 2. 87 Realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2021-2025 ..... II-142
Tabel 2. 88 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Periode Tahun 2021–2025.. II-143
Tabel 2. 89 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Tahun 2021–2025 ..... II-144
Tabel 2. 90 Jumlah Bidang Perizinan (Izin dan Non Izin) yang Diterbitkan Tahun 2021-2025 ..... II-145
Tabel 2. 91 Prestasi Olahraga Atlet Provinsi NTB Tahun 2021 – 2025 ..... II-146
Tabel 2. 92 Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2020 – 2025..... II-151
Tabel 2. 93 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-152
Tabel 2. 94 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan Tahun 2022 – 2025 ..... II-153
Tabel 2. 95 Jumlah Perpustakaan Komunitas Di NTB Tahun 2021-2025..... II-154
Tabel 2. 96 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2021 – 2025 ..... II-154

Tabel 2. 97 Jumlah Tamu Menginap Pada Hotel Berbintang dan Non Berbintang Tahun 2021-2025 ..... II-161
Tabel 2. 98 Data dan Informasi Wilayah Usaha Perizinan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pada Balai KPH (L/P) II-167
Tabel 2. 99 Kondisi Tutupan Lahan Berdasarkan 22 Kelas Tutupan Lahan II-168
Tabel 2. 100 Rincian Luas Areal Kegiatan RHL Tahun 2022 ..... II-169
Tabel 2. 101 Sebaran Desa Berlistrik di Provinsi NTB Tahun 2025 ..... II-170
Tabel 2. 102 Pemasangan Listrik Murah dan Hemat Tahun 2012-2025 ..... II-171
Tabel 2. 103 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-174
Tabel 2. 104 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor NTB Tahun 2021-2025 ..... II-175
Tabel 2. 105 Pertumbuhan Industri Provinsi NTB tahun 2021 – 2025 ..... II-177
Tabel 2. 106 Perkembangan Transmigran Keluar Provinsi NTB dan Tujuan Daerah Tahun 2018 – 2025 ..... II-178
Tabel 2. 107 Target Peningkatan Prosentase Desa Maju dan Mandiri Di Kawasan Transmigrasi Tahun 2025 ..... II-179
Tabel 2. 108 Nama - Nama Desa Maju dan Mandiri di Kawasan Transmigrasi II-180
Tabel 2. 109 Capaian Indek Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2025 ..... II-182
Tabel 2. 110 Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2025 ..... II-183
Tabel 2. 111 Jumlah Produk hukum yang dihasilkan Tahun 2021 – 2025 ..... II-183
Tabel 2. 112 Jumlah Perda/Perbup/Perwal yang Difasilitasi dan Dievaluasi Pada Tahun 2024-2025 185
Tabel 2. 113 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Provinsi NTB Tahun 2025 186
Tabel 2. 114 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Non Litigasi Provinsi NTB Tahun 2025 ..... II-189
Tabel 2. 115 Capaian IPPN dan Pembentuk Komponen SAKIP Bappeda Provinsi NTB Tahun 2023-2025 ..... II-190
Tabel 2. 116 Capaian Indikator Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 ..... II-192
Tabel 2. 117 Opini BPK RI Tahun 2021-2025 ..... II-193
Tabel 2. 118 Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD Tahun 2020-2024 ..... II-193
Tabel 2. 119 Rentang dan Kategori Indeks Kapasitas Fiskal Daerah II-194
Tabel 2. 120 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepagawaian Tahun 2024 ..... II-195
Tabel 2. 121 Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB Tahun 2024 ..... II-197
Tabel 2. 122 Capaian Indeks Sistem Merit unsur Pengembangan Kompetensi Provinsi NTB tahun 2024-2025 ..... II-198
Tabel 2. 123 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 Kategori Provinsi II-201
Tabel 2. 124 Kawasan Rawan Banjir di Provinsi NTB II-210
Tabel 2. 125 Kawasan Rawan Kekeringan di Provinsi NTB II-211
Tabel 2. 126 Jumlah Bank, Kantor Bank dan Kantor Cabang Serta Jumlah Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Status Kepemilikan dan Kegiatan Usaha di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-212
Tabel 2. 127 Jumlah Restoran di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-213
Tabel 2. 128 Jumlah Hotel Bintang Tahun 2021 -2025 ..... II-214

Tabel 2. 129 Jumlah Hotel Non Bintang Tahun 2021 -2025 ..... II-214
Tabel 2. 130 Skor Indikator Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi NTB Tahun 2025.. II-219
Tabel 2. 131 Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2025..... II-224
Tabel 2. 132 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi NTB II-237
Tabel 2. 133 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi NTB II-238
Tabel 2. 134 Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Provinsi NTB II-240
Tabel 2. 135 Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Provinsi NTB..... II-241
Tabel 2. 136 Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2021-2025..... II-243
Tabel 2. 137 Capaian SPM Bidang Urusan Bidang Sosial Provinsi NTB II-244
Tabel 2. 138 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang Pendidikan II-246
Tabel 2. 139 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kesehatan..... II-247
Tabel 2. 140 Permasalahan pembangunan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang II-249
Tabel 2. 141 Permasalahan pembangunan pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman..... II-251
Tabel 2. 142 Permasalahan pembangunan pada Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat..... II-252
Tabel 2. 143 Permasalahan pembangunan pada urusan sosial..... II-253
Tabel 2. 144 Permasalahan pembangunan pada urusan Tenaga Kerja..... II-253
Tabel 2. 145 Permasalahan pembangunan pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak..... II-255
Tabel 2. 146 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang Pangan II-256
Tabel 2. 147 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang lingkungan hidup.. II-256
Tabel 2. 148 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pertanahan..... II-257
Tabel 2. 149 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil..... II-258
Tabel 2. 150 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pemberdayaan masyarakat desa..... II-258
Tabel 2. 151 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga..... II-259
Tabel 2. 152 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang perhubungan II-259
Tabel 2. 153 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang Komunikasi dan Informatika..... II-260
Tabel 2. 154 Permasalahan pembangunan pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah . II-261
Tabel 2. 155 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang penanaman modal II-262
Tabel 2. 156 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kepemudaan dan olah raga..... II-262
Tabel 2. 157 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang statistika..... II-263
Tabel 2. 158 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kebudayaan..... II-264
Tabel 2. 159 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kebudayaan..... II-265
Tabel 2. 160 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang perpustakaan II-266
Tabel 2. 161 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kearsipan II-266
Tabel 2. 162 Permasalahan pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan II-267
Tabel 2. 163 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pariwisata..... II-268

Tabel 2. 164 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pertanian..... II-268
Tabel 2. 165 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kehutanan..... II-270
Tabel 2. 166 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang energi dan sumber daya mineral..... II-270
Tabel 2. 167 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang perdagangan..... II-272
Tabel 2. 168 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang perindustrian II-273
Tabel 2. 169 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang transmigrasi..... II-274
Tabel 2. 170 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pemerintahan..... II-275
Tabel 2. 171 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang perencanaan II-276
Tabel 2. 172 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang perencanaan II-278
Tabel 2. 173 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang keuangan..... II-279
Tabel 2. 174 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kepegawaian..... II-280
Tabel 2. 175 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pendidikan dan pelatihan..... II-280
Tabel 2. 176 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang penelitian dan pengembangan..... II-281
Tabel 3. 1 Realisasi dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2024-2027 ..... III-2
Tabel 3. 2 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2026 dan 2027 ..... III-6
Tabel 3. 3 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD) III-8
Tabel 3. 4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah NTB III-23
Tabel 3. 5 Realisasi Belanja Daerah NTB III-24
Tabel 3. 5 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah NTB Tahun 2024 – 2027...III-27
Tabel 3. 6 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah NTB.....III-31
Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027 ..... IV-1
Tabel 4. 2 Indikator dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif Tahun 2027.....IV-10
Tabel 4. 3 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB Tahun 2027.....IV-11
Tabel 4. 4 Highlight Intervensi kebijakan Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB Tahun 2027.....IV-12
Tabel 4. 5 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2027 .....IV-13
Tabel 4. 6 Highlight Intervensi kebijakan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat IV-14
Tabel 4. 7 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender Tahun 2027 .....IV-15
Tabel 4. 8 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender.....IV-18
Tabel 4. 9 Indikator dan Target Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah Tahun 2027 .....IV-19
Tabel 4. 10 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan Tahun 2027.....IV-20
Tabel 4. 11 *Highlight* Intervensi Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan di NTB Tahun 2027.....IV-22

Tabel 4. 12 Indikator dan Target Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat Tahun 2027 ..... IV-24
Tabel 4. 13 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran Tahun 2027 ..... IV-24
Tabel 4. 14 Highlight Intervensi Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran di NTB Tahun 2027 ..... IV-26
Tabel 4. 15 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan Tahun 2027 ..... IV-27
Tabel 4. 16 Highlight Intervensi Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan di NTB Tahun 2027 ..... IV-28
Tabel 4. 17 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali Tahun 2027 ..... IV-30
Tabel 4. 18 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat di Provinsi NTB Tahun 2027 ..... IV-31
Tabel 4. 19 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat di Provinsi NTB Tahun 2027 ..... IV-32
Tabel 4. 20 Indikator dan dan Target Sasaran Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan IV-34
Tabel 4. 21 Highlight Intervensi Kebijakan Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan di Provinsi NTB Tahun 2027 ..... IV-36
Tabel 4. 22 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan di NTB Tahun 2027 ..... IV-37
Tabel 4. 23 *Highlight* Intervensi Kebijakan Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan IV-39
Tabel 4. 24 Indikator dan Target Sasaran Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi Tahun 2027 ..... IV-40
Tabel 4. 25 Highlight Intervensi Kebijakan Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi IV-41
Tabel 4. 26 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan IV-43
Tabel 4. 27 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim Tahun 2027 ..... IV-44
Tabel 4. 28 Highlight Intervensi Kebijakan Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim Tahun 2027 ..... IV-45
Tabel 4. 29 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) Tahun 2027 ..... IV-46
Tabel 4. 30 Highlight Intervensi Kebijakan Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) Tahun 2027 ..... IV-48
Tabel 4. 31 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif Tahun 2027 ..... IV-50
Tabel 4. 32 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di NTB Tahun 2027 ..... IV-51
Tabel 4. 33 Highlihgt Intervensi kebijakan Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2027 ..... IV-52

Tabel 4. 34 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya Tahun 2027 .....IV-53
Tabel 4. 35 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya di NTB Tahun 2027 .....IV-54
Tabel 4. 36 Highlight Intervensi Kebijakan Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya Tahun 2027 .....IV-56
Tabel 4. 37 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2027.....IV-57
Tabel 4. 38 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga di NTB Tahun 2027 .....IV-58
Tabel 4. 39 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga Tahun 2027.....IV-59
Tabel 4. 40 Indikator dan Target Tujuan Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana Tahun 2027.....IV-60
Tabel 4. 41 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana di NTB Tahun 2027 .....IV-61
Tabel 4. 42 Highlight Intervensi Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana di NTB Tahun 2027 .....IV-62
Tabel 4. 43 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Tahun 2027.....IV-64
Tabel 4. 44 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas Tahun 2027.....IV-64
Tabel 4. 45 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas Tahun 2027.....IV-66
Tabel 4. 46 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Tahun 2027 .....IV-67
Tabel 4. 47 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Tahun 2027 .....IV-68
Tabel 4. 48 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan Tahun 2027 .....IV-69
Tabel 4. 49 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan Tahun 2027 .....IV-71
Tabel 4. 50 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Investasi Berkelanjutan Tahun 2027 .....IV-71
Tabel 4. 51 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Tahun 2027 .....IV-72
Tabel 4. 52 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Realisasi Investasi Tahun 2027 .....IV-73
Tabel 4. 53 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan.....IV-75
Tabel 4. 54 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi Tahun 2027.....IV-76
Tabel 4. 55 Highlight Intervensi kebijakan Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Terintegrasi Tahun 2027.....IV-78
Tabel 4. 56 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan Tahun 2027 .....IV-79

Tabel 4. 57 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2027 ..... IV-79
Tabel 4. 58 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2027 ..... IV-81
Tabel 4. 59 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif Tahun 2027 ..... IV-82
Tabel 4. 60 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2027 ..... IV-83
Tabel 4. 61 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2027 ..... IV-84
Tabel 4. 62Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas Tahun 2027 ..... IV-85
Tabel 4. 63 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas Tahun 2027 ..... IV-87
Tabel 4. 64 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah Tahun 2027 ..... IV-87
Tabel 4. 65 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah Tahun 2027 ..... IV-89
Tabel 4. 66 Keterkaitan Subtema dengan Fokus Pembangunan dan Program Kerja Prioritas Daerah Tahun 2027 ..... IV-101
Tabel 5. 1 Sebaran Daerah Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana V-148
Tabel 5. 2 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang berlaku secara nasional dan/atau seluruh provinsi V-149
Tabel 5. 3 Lokasi Prioritas dan Highlight Intervensi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027 ..... V-151
Tabel 5. 4 Perkembangan Peta Kapasitas Fiskal di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2025 ..... V-162
Tabel 5. 5 Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021-2025 ..... V-163
Tabel 5. 6 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kewilayahan Kabupaten/kota Tahun 2027 ..... V-1
Tabel 5. 16 Arah Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan V-4
Tabel 5. 17 KSP di Pulau Lombok V-8
Tabel 5. 18 KSP di Pulau Sumbawa V-12
Tabel 6. 1 Rekapitulasi Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 ..... V-1
Tabel 6. 2 Program Prioritas Daerah Tahun 2027 ..... V-4
Tabel 6. 3 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah V-18
Tabel 6. 4 Program Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2027 ..... V-19
Tabel 6. 5 Proyeksi Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2027 ..... V-47
Tabel 6. 6 Rencana Program Dan Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Dana APBN (Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Tahun 2026 ..... V-48
Tabel 6. 7 Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional V-48

Tabel 6. 8 Dukungan Program Daerah Terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN) dan Tematik Tahun 2027 ..... V-49
Tabel 6. 9 Dukungan Program Daerah Terhadap Outcome Prioritas Tahun 2027 ..... V-55
Tabel 6. 8 Mitra Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat V-64
Tabel 7. 1 Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2027 ..... V-1
Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2027 ..... V-2
Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027 ..... V-3

DAFTAR GRAFIK

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi NTB Dengan Tambang Provinsi NTB Tahun 2025 ..... II-11
Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tanpa Tambang Provinsi NTB Tahun 2025 ..... II-12
Grafik 2. 3 PDRB Per Kapita Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-16
Grafik 2. 4 Kontribusi PDRB Menurut Provinsi Tahun 2025 ..... II-17
Grafik 2. 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin NTB Tahun 2021-2025 ..... II-18
Grafik 2. 6 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-19
Grafik 2. 7 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB dan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-23
Grafik 2. 8 Perkembangan Kontribusi Industri Pengolahan NTB Tahun 2021-2025 ..... II-24
Grafik 2. 9 Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Regional NTB-Bali-NTT II-26
Grafik 2. 10 Kategori Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2025 (Jumlah Indikator: 13) II-28
Grafik 2. 11 Kategori Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Tahun 2025 (Jumlah Indikator: 25) II-30
Grafik 2. 12 Kategori Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pembangunan Tahun 2025 (Jumlah Indikator: 53) II-30
Grafik 2. 13 Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 (Jumlah Indikator : 24) II-13
Grafik 2. 14 Rata-Rata Curah Hujan Menurut Stasiun di NTB Tahun 2013-2024 ..... II-22
Grafik 2. 15 Rata-Rata Temperatur Menurut Stasiun di NTB Tahun 2013-2024 ..... II-23
Grafik 2. 16 Kelembaban udara Pada 3 Stasiun Pengamatan di Provinsi NTB Tahun 2013-2024 ..... II-24
Grafik 2. 17 Penyinaran Matahari (%) Pada 3 Stasiun Pengamatan Provinsi NTB Tahun 2013-2024 ..... II-25
Grafik 2. 18 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTB Tahun 2021-2025 II-46
Grafik 2. 19 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-64
Grafik 2. 20 PDRB Per Kapita Tahun 2021-2025 (Rp. Ribu) II-66
Grafik 2. 21 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTB Tahun 2021–2025 ..... II-67
Grafik 2. 22 Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB dan Nasional Per Septembear Tahun 2021-2025 ..... II-68
Grafik 2. 23 Jumlah (Ribu Jiwa) dan Persentase (%) Penduduk Miskin NTB Tahun 2021-2025 ..... II-69
Grafik 2. 24 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 (Persen) II-71
Grafik 2. 25 Tingkat Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2021-2025 ..... II-94
Grafik 2. 26 Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-94
Grafik 2. 27 Panjang Jalan Kabupaten/Kota (km) Kewenangan Provinsi NTB II-95
Grafik 2. 28 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2025 ..... II-96
Grafik 2. 29 Realisasi Cakupan Air Minum Tahun 2021-2025 ..... II-96

Grafik 2. 30 Capaian Rumah Layak Huni (RLH) Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-101
Grafik 2. 31 Jumlah Konflik Sosial di Provinsi NTB Tahun 2021-2025..... II-103
Grafik 2. 32 Perkembangan Indeks Demokrasi Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-106
Grafik 2. 33 Tingkat Kemiskinan (P0) di Provinsi Tahun 2016-2025..... II-108
Grafik 2. 34 Target dan Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2021-2025..... II-118
Grafik 2. 35 Perkembangan Konsumsi Beras Penduduk NTB Periode Tahun 2021-2025 ..... II-120
Grafik 2. 36 Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate II-131
Grafik 2. 37 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan menggunakan KB di Provinsi NTB 2019-2024 ..... II-131
Grafik 2. 38 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)..... II-133
Grafik 2. 39 Perbandingan Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2019-2023 ..... II-136
Grafik 2. 40 Nilai dan Kontribusi Sub-Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-156
Grafik 2. 41 Perkembangan Nilai Tukar Pertanian Sub-Sektor Perikanan..... II-157
Grafik 2. 42 Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Tahun 2021 – 2025 ..... II-158
Grafik 2. 43 Perkembangan Produksi Garam (Ton) NTB Tahun 2021-2025 ..... II-159
Grafik 2. 44 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2021-2025 ..... II-163
Grafik 2. 45 Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2021-2025 ..... II-165
Grafik 2. 46 Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Tahun 2021 -2025 ..... II-167
Grafik 2. 47 Nilai Ekspor Provinsi NTB Tahun 2021-2025 (USD) II-172
Grafik 2. 48 PDRB sektor Industri Provinsi NTB tahun 2021 – 2025..... II-176
Grafik 2. 49 Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB Tahun 2021-2025 II-194
Grafik 2. 50 Usulan inovasi dan predikat yang diterima Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021-2025. ..... II-200
Grafik 2. 51 Pengeluaran Per Kapita Provinsi NTB Tahun 2021-2025..... II-203
Grafik 2. 52 Nilai Tukar Petani NTB tahun 2021-2025 ..... II-204
Grafik 2. 53 Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Provinsi NTB Tahun 2021–2025 ..... II-205
Grafik 2. 54 Nilai Ekspor Barang dan Jasa Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-206
Grafik 2. 55 Nilai Impor Barang dan Jasa Provinsi NTB Tahun 2021-2025..... II-207
Grafik 2. 56 Jumlah Kendaraan di NTB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025 ..... II-208
Grafik 2. 57 Jumlah Penumpang Provinsi NTB Tahun 2021-2025 ..... II-209
Grafik 2. 58 Proporsional Jumlah Penduduk Pengguna Layanan Air Bersih Tahun 2025 ..... II-216
Grafik 2. 59 Jumlah Pelanggan Listrik Dari PLN Cabang Mataram, Sumbawa dan Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2025..... II-217
Grafik 2. 60 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2020-2025..... II-217
Grafik 2. 63 Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Provinsi NTB Tahun 2020-2024..... II-218
Grafik 2. 64 Angka Kejahatan Tahun 2019-2024 ..... II-219
Grafik 2. 65 Jumlah Penduduk Berumur 15+ dengan Pendidikan Tertinggi Universitas Tahun 2021-2025 ..... II-222
Grafik 2. 66 Tingkat Ketergantungan (Dependency Ratio) NTB Tahun 2017-2024 . II-223

Grafik 2. 67 Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 ..... II-224
Grafik 3. 18 Perkembangan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB III-9
Grafik 3. 19 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2025 ..... III-10
Grafik 3. 20 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah III-10
Grafik 3. 21 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020-2025 ..... III-11
Grafik 3. 22 Realisasi PAD dan Komponennya Tahun 2020 - 2025 ..... III-12
Grafik 3. 23 Realisasi Pajak Daerah dan Komponennya Tahun 2020 - 2025 ..... III-13
Grafik 3. 24 Realisasi Retribusi Daerah dan Komponennya Tahun 2020-2023 ..... III-15
Grafik 3. 24 Realisasi Retribusi Daerah dan Komponennya Tahun 2024-2025 ..... III-16
Grafik 3. 25 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021-2025 ..... III-17
Grafik 3. 26 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020-2025 ..... III-18
Grafik 3. 27 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2025 ..... III-19
Grafik 3. 28 Realisasi Dana Perimbangan dan Komponennya Tahun 2020 – 2025 ..... III-20
Grafik 3. 29 Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya Tahun 2020-2025 ..... III-20
Grafik 3. 30 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi NTB Tahun 2020-2025 ..... III-22
Grafik 3. 32 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Kom[onen Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2025 ..... III-25
Grafik 3. 33 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2025 ..... III-30
Grafik 5. 1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-NTB V-147
Grafik 5. 2 Jumlah Kecamatan dan Keluarahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota se-NTB V-147
Grafik 5. 3 Persentase Penduduk Miskin d Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021-2025. V-155
Grafik 5. 4 Jumlah dan Persentase Balita Stunting di Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2023 ..... V-158
Grafik 5. 5 IPM Menurut Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021-2025 ..... V-160
Grafik 5. 6 Capaian SPM pada Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2025 ..... V-161
Grafik 6. 1 Persentase Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027 ..... V-2
Grafik 6. 3 Perkembangan APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Pada Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi V-46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan I-7
Gambar 2. 1 Peta Wilayah Perencanaan Provinsi NTB II-18
Gambar 2. 2 Peta Jalan Tol Rencana di Provinsi NTB Berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 ..... II-29
Gambar 2. 3 Peta 1 Multi Rawan Bencana Provinsi NTB II-44
Gambar 2. 4 Peta 2 Multi Rawan Bencana Provinsi NTB II-44
Gambar 2. 5 Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) di Provinsi NTB II-52
Gambar 2. 6 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) NTB II-55
Gambar 2. 7 Tantangan perencanaan dan penganggaran daerah II-276
Gambar 4. 1 Kerangka Pikir Perumusan Prioritas Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2027 ..... IV-35
Gambar 4. 2 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027 ..... IV-37
Gambar 4. 3 Pemetaan PSN Per Wilayah IV-39
Gambar 4. 4 Sapta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Daerah IV-9
Gambar 4. 5 Sepuluh Program Unggulan Provinsi NTB IV-90
Gambar 5. 5 Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Menurut Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2020-2024 ..... V-156
Gambar 5. 6 Sebaran Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota V-159
Gambar 5. 7 Potensi Unggulan Wilayah Menurut Kabupaten/Kota se-NTB V-1
Gambar 5. 8 Lokasi Prioritas Pembangunan RPJMN Tahun 2025-2029 di Provinsi NTB ..... **Error! Bookmark not defined.**
Gambar 5. 1 Dasar Pemikiran Konsep *Lombok Eco City and Resilient Island* V-4
Gambar 5. 2 Rencana Pengembangan KSP Pulau Lombok V-8
Gambar 5. 3 Dasar Pemikiran Pendekatan *Sumbawa Sustainable Economic Zone* V-11
Gambar 5. 4 Peta KSP Pulau Sumbawa V-13
Gambar 8. 1 Kerangka Pengendalian RKPD 2027 ..... V-3
Gambar 8. 2 Kerangka Alternatif Pendanaan untuk RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 .. V-5

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, karunia, dan ridha-Nya sehingga Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027 dapat disusun sebagai pedoman pembangunan daerah Tahun Anggaran 2027. RKPD Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki posisi strategis sebagai penjabaran tahun ketiga pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi instrumen untuk memastikan keterpaduan antara arah kebijakan pembangunan nasional, pembangunan daerah, serta perencanaan dan penganggaran di seluruh perangkat daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan berjalan secara terarah, terukur, efektif, dan berkelanjutan.

Mengusung tema pembangunan "Penguatan Upaya Transformasi dalam Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Ekosistem Industri Agromaritim serta Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan," RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mempercepat transformasi pembangunan melalui penguatan sektor-sektor strategis yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Tema tersebut menjadi landasan dalam merumuskan prioritas pembangunan, sasaran, program, dan kegiatan yang responsif terhadap tantangan pembangunan sekaligus mampu mengoptimalkan potensi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan secara sistematis dengan menerapkan pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, serta perpaduan pendekatan top-down dan bottom-up. Seluruh proses penyusunan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, memperhatikan hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya, serta mengintegrasikan aspirasi masyarakat dan pemangku kepentingan melalui berbagai forum perencanaan pembangunan. Dengan demikian, RKPD diharapkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara adaptif dan akuntabel.

Selanjutnya, kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih kepada seluruh perangkat daerah, pemerintah kabupaten/kota, instansi vertikal, DPRD, akademisi, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, serta seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan, data, pemikiran, dan masukan selama proses penyusunan RKPD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027.

Mataram, Juni 2026

Kepala Bappeda
Provinsi Nusa Tenggara Barat

Baiq Nelly Yuniarti, Ap., M.Si

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR
NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR :
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI NTB TAHUN 2027

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang memiliki peran strategis sebagai instrumen operasional pelaksanaan tahun ketiga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Penyusunan RKPD ini tidak hanya dimaksudkan untuk memastikan tercapainya sasaran pembangunan jangka menengah, tetapi juga berfungsi sebagai landasan penting dalam memperkuat arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2025–2045. RKPD Tahun 2027 menjadi panduan penting dalam mengintegrasikan tujuan pembangunan jangka menengah dan visi pembangunan jangka panjang, sehingga terwujud kesinambungan, konsistensi, serta efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dalam fase pembangunan daerah, penyusunan RKPD Tahun 2027 menjadi langkah strategis untuk mengonsolidasikan arah pembangunan yang selaras dengan visi, misi, serta agenda kepemimpinan daerah yang merupakan pelaksanaan tahun ketiga RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029 dan sebagai pedoman operasional yang memastikan bahwa kebijakan tahunan tidak hanya konsisten dengan mandat kepala daerah terpilih, tetapi juga tetap berada dalam koridor perencanaan yang telah dirumuskan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Seluruh prioritas pembangunan yang dituangkan dalam RKPD Tahun 2027 dirancang dengan mengedepankan harmonisasi terhadap prioritas utama RPJMD, sehingga pelaksanaan pembangunan daerah tetap berjalan secara terarah dan berkesinambungan. Integrasi ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas pencapaian target-target pembangunan jangka menengah, sekaligus memastikan bahwa dinamika politik pascatransisi tidak mengganggu stabilitas perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan.

Sebagai tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029, RKPD Tahun 2027 memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi fase konsolidasi sekaligus penajaman implementasi seluruh kebijakan pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD. Tahun 2027 merupakan titik kritis dalam perjalanan pembangunan jangka menengah karena capaian kinerja pada tahun ini akan menjadi dasar utama dalam pelaksanaan evaluasi paruh waktu (mid-term review) RPJMD Tahun 2025–2029. Evaluasi tersebut menjadi instrumen penting untuk menilai tingkat keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan, efektivitas pelaksanaan program prioritas, serta mengidentifikasi berbagai tantangan, hambatan, dan kebutuhan penyesuaian kebijakan guna memastikan target-target pembangunan jangka menengah dapat dicapai secara optimal hingga akhir periode RPJMD. Oleh karena itu, RKPD Tahun 2027 diarahkan tidak hanya sebagai dokumen perencanaan tahunan, tetapi juga sebagai instrumen percepatan pencapaian target pembangunan melalui penguatan kualitas

perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah.

Dalam konteks tersebut, Tahun 2027 juga merupakan tahun penajaman implementasi Triple Agenda pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai fokus utama pembangunan daerah dalam mewujudkan visi "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia." Triple Agenda tersebut meliputi: (1) Pengentasan Kemiskinan, terutama Kemiskinan Ekstrem; (2) Penguatan Ketahanan Pangan melalui Pembangunan Ekosistem Industri Pertanian dan Subsektornya; serta (3) Menjadikan NTB sebagai Destinasi Wisata Berkelas Dunia. Ketiga agenda tersebut menjadi prioritas pembangunan yang saling terintegrasi dalam mempercepat transformasi ekonomi daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat daya saing wilayah, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, seluruh kebijakan, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk menghasilkan dampak pembangunan yang lebih nyata melalui penguatan sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas belanja daerah, penguatan tata kelola pemerintahan, percepatan investasi, pengembangan inovasi daerah, serta optimalisasi kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan. Penajaman implementasi Triple Agenda pada Tahun 2027 diharapkan mampu memberikan akselerasi terhadap pencapaian target RPJMD sekaligus menjadi fondasi utama dalam keberhasilan evaluasi paruh waktu RPJMD Tahun 2025–2029.

RKPD Tahun 2027 mengusung tema "Penguatan Upaya Transformasi dalam Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Ekosistem Industri Agromaritim serta Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan." Tema ini mencerminkan arah strategis pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam merespons berbagai tantangan sosial, ekonomi, dan lingkungan pada tahun perencanaan. Melalui tema tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menegaskan komitmennya dalam mendorong transformasi struktural yang diperlukan untuk menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, memperkuat ketahanan pangan daerah, serta mengembangkan ekosistem industri agromaritim sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah. Penguatan sektor-sektor tersebut dipandang strategis dalam meningkatkan daya saing dan kemandirian ekonomi wilayah.

Di sisi lain, penekanan pada pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan menjadi elemen penting dalam memperkuat struktur perekonomian NTB yang berbasis potensi wilayah. Fokus ini tidak hanya diarahkan untuk mendorong pertumbuhan sektor pariwisata, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutannya melalui pengelolaan lingkungan yang bertanggung jawab dan pemberdayaan masyarakat setempat. Secara keseluruhan, tema pembangunan RKPD Tahun 2027 menjadi pengejawantahan operasional dari Triple Agenda pembangunan daerah sekaligus menjadi fondasi konseptual dalam merumuskan prioritas pembangunan, penyusunan program dan kegiatan strategis, serta pengalokasian sumber daya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pertumbuhan ekonomi yang inklusif, pengurangan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, dan peningkatan daya saing destinasi pariwisata daerah.

Selaras dengan arah kebijakan nasional yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, penyusunan RKPD Tahun 2027 dilaksanakan melalui pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta proses perencanaan yang terintegrasi antara mekanisme top-down dan bottom-up.

Pendekatan ini diterapkan untuk memastikan terwujudnya sinergi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Seluruh program dan kegiatan yang dirumuskan dalam RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja utama daerah yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Selanjutnya, RKPD ini juga berfungsi sebagai instrumen penting untuk memastikan kontribusi daerah terhadap pencapaian target sasaran pembangunan nasional sesuai prioritas yang ditetapkan dalam RPJMN.

Dalam rangka menyiapkan landasan transformasi menuju NTB Emas 2045 serta memastikan arah pembangunan tahunan Provinsi Nusa Tenggara Barat berjalan sejalan dengan visi RPJMD Tahun 2025–2029, yaitu "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia", RKPD Tahun 2027 turut mendorong penguatan nilai tambah pada berbagai sektor strategis daerah. Penguatan nilai tambah tersebut diwujudkan melalui pengembangan rantai nilai sektor agromaritim yang lebih terintegrasi, mulai dari tahap produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran, sehingga produk-produk lokal NTB memiliki daya saing yang lebih tinggi dan memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat.

Dalam sektor ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah dilakukan melalui peningkatan produktivitas, diversifikasi komoditas unggulan, pemanfaatan teknologi pertanian modern, serta penguatan sistem logistik pangan daerah untuk memastikan ketersediaan, keterjangkauan, dan stabilitas pangan. Upaya ini diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan rumah tangga dan memberikan kontribusi langsung pada penurunan kemiskinan. Sementara itu, pada sektor pariwisata, nilai tambah diciptakan melalui pengembangan destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan dengan mengutamakan keaslian budaya, kelestarian lingkungan, peningkatan standar layanan, serta pemberdayaan masyarakat lokal. Pendekatan ini bertujuan meningkatkan daya tarik wisata NTB sekaligus menjamin agar manfaat ekonomi pariwisata dirasakan secara lebih merata di seluruh wilayah.

Secara keseluruhan, penciptaan nilai tambah dalam RKPD Tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat transformasi struktural daerah, mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan Provinsi NTB pada tahun perencanaan dapat berlangsung lebih efektif, berkelanjutan, dan berdaya saing sebagai bagian dari langkah strategis menuju terwujudnya NTB Emas 2045.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD Tahun 2027 menjadi dasar utama dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2027, serta menjadi landasan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang digunakan dalam proses penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2027. Dengan peran tersebut, RKPD Tahun 2027 memiliki fungsi yang sangat krusial dalam memastikan bahwa keseluruhan proses pembangunan daerah berlangsung secara terarah, terukur, dan selaras dengan tujuan pembangunan jangka menengah sebagaimana ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029.

Selain menjadi pedoman pembangunan di tingkat provinsi, RKPD Tahun 2027 juga disusun dengan memperhatikan arah pembangunan kabupaten/kota sebagai bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan daerah, sekaligus menjadi dasar dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2027.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 75);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesiatahun 2022 Nomor 143);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6805);
12. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
13. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesta Tahun 2OI8 Nomor 2);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
21. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
22. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
23. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
24. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
25. Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2026 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 346);
26. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20I9 Nomor 1447);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 845);
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2026 tentang Reviu Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Dan Dokumen Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 73);
35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 395);
36. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
37. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 5 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (4-121/2024); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2010 Nomor 205);
38. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 9 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (8-283/2024); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024 Nomor 207);
39. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 5 Noreg Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (4-63/2025)); dan
40. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 Nomor 6 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat : (7-136/2025); Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 213).

1.3 Hubungan Antar Dokumen

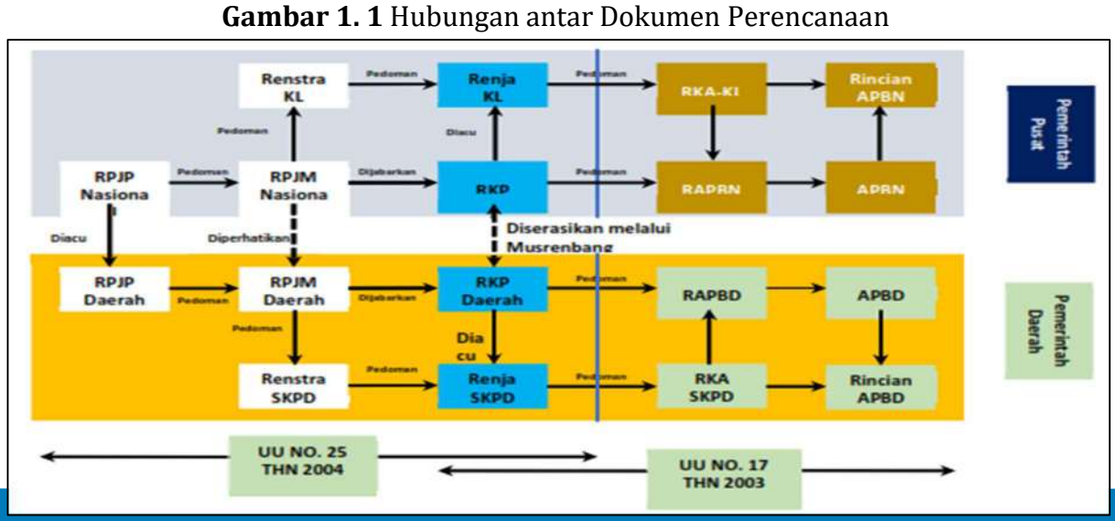
Dalam menyusun RKPD Provinsi NTB Tahun 2027, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan adanya keterkaitan dan konsistensi antara proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Penyusunan RKPD ini merupakan bagian integral dari penerapan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional serta implementasi sistem perencanaan dan penganggaran terpadu yang mengedepankan sinkronisasi antarlevel pemerintahan. Pada tingkat nasional, penyusunan RKPD Tahun 2027 memperhatikan arah kebijakan pembangunan yang tercantum dalam Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, serta selaras

dengan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga (K/L) dan kebijakan Pemerintah Non-Kementerian. Penyesuaian ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa prioritas pembangunan daerah sejalan dengan target dan arah pembangunan nasional.

Dalam konteks daerah, penyusunan RKPD Tahun 2027 juga berpedoman pada RPJPD Provinsi NTB Tahun 2025–2045 serta RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 sebagai dokumen pembangunan jangka panjang dan menengah yang telah menetapkan arah, sasaran, dan program prioritas pembangunan daerah. Selain itu, penyusunan RKPD turut memperhatikan Renstra Perangkat Daerah, agar program dan kegiatan yang dirumuskan mencerminkan mandat, tugas, dan fungsi masing-masing perangkat daerah. RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 menjadi pedoman utama dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) yang memuat program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat daerah. Dokumen RENJA-PD tersebut selanjutnya menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai bagian dari proses penyusunan APBD Provinsi NTB Tahun Anggaran 2027.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, RKPD menjadi pedoman bagi penyusunan KUA dan PPAS, yang kemudian diterjemahkan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) perangkat daerah hingga penyusunan Rancangan APBD (RAPBD). Dengan demikian, RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 merupakan dokumen strategis yang tidak terpisahkan dari keseluruhan siklus perencanaan dan penganggaran daerah.

Gambar 1. 1 Hubungan antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Bappeda NTB (Data diolah), 2025

1.4 Maksud dan Tujuan

Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027 dimaksudkan sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan yang menjadi penjabaran operasional dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Dokumen ini berperan penting dalam mengarahkan penyelenggaraan pembangunan daerah oleh seluruh Perangkat Daerah agar berjalan secara sinergis, terukur, dan konsisten, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan. Penyusunan RKPD Tahun 2027 juga bertujuan untuk memastikan terwujudnya efisiensi dalam penggunaan berbagai sumber daya pembangunan sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Secara khusus, penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan pencapaian sasaran pembangunan daerah sesuai arah strategis yang telah ditetapkan dalam RPJMD, guna memperkuat transformasi menuju NTB Emas 2045.
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan tahun 2027 yang menjadi acuan seluruh Perangkat Daerah dalam menyusun Renja-PD dan menjadi dasar penyusunan KUA-PPAS serta RAPBD.
3. Mewujudkan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi pembangunan baik antarwilayah, antarwaktu, antarurusan pemerintahan, antar-Perangkat Daerah, maupun antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, komunitas, dan pemerintah daerah lainnya dalam proses perencanaan, sehingga pembangunan daerah dapat mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dan mendorong kolaborasi multipihak.
5. Mengoptimalkan pemanfaatan berbagai sumber daya pembangunan secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing daerah.

1.5 Sistematika

Sistematika dokumen RKPD Tahun 2027, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN
- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
- 2.1. Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah
- 2.2. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah
- 2.3. Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal
- 2.4. Permasalahan Pembangunan Daerah dan Isu Strategis Daerah
- 2.5. Penelaahan Pokok-pokok Pikiran DPRD
- 2.6. Inovasi Daerah

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
- 3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah
3.3. Sumber Pembiayaan Alternatif

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan
4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTA

5.1. Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional
5.2. Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB
5.3. Isu-isu Pembangunan Kewilayahan
5.4. Potensi Pengembangan Wilayah di Provinisi NTB
5.5. Prioritas Pengembangan Wilayah Tahun 2027

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

6.1. Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD
6.2. Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN
6.3. Rencana Program Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional (PN)
6.4. Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)
6.5. Rencana Program Kegiatan yang Bersumber dari Mitra Pembangunan

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

7.1. Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB
7.2. Indikator Kinerja Utama
7.3. Indikator Kinerja Daerah

BAB VIII PENUTUP

Bagian ini menyampaikan secara singkat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, proses pelaksanaan pengendalian dan evaluasi dalam Dokumen RKPD sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1 Evaluasi Capaian Kinerja Pembangunan Daerah

2.1.1 Evaluasi Terhadap Capaian Indkator Makro Daerah Berdasarkan Sasaran Pokok Pembangunan Daerah

Tahun 2025 merupakan tahun pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2045 serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029. Pada tahun ini, Pemerintah Daerah mulai mengakselerasi pencapaian sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan sebagai fondasi awal dalam mewujudkan pembangunan jangka menengah yang berkelanjutan.

Berdasarkan dokumen perencanaan tersebut, telah ditetapkan 13 (tiga belas) indikator makro pembangunan yang menjadi tolok ukur utama dalam mengukur capaian Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029. Indikator-indikator ini mencerminkan kinerja pembangunan secara komprehensif yang mencakup lima sasaran pembangunan daerah, yaitu:

1. Meningkatnya pendapatan per kapita menuju setara dengan daerah maju;
2. Meningkatnya daya saing sumber daya manusia;
3. Menurunnya tingkat kemiskinan menuju kemiskinan ekstrem nol serta berkurangnya ketimpangan;
4. Menurunnya intensitas bencana lingkungan dan emisi gas rumah kaca (GRK) menuju Net Zero Emission (NZE); dan
5. Terwujudnya kepemimpinan pemerintahan daerah yang semakin efektif dalam mendorong inovasi serta meningkatkan daya saing daerah.

Kelima sasaran tersebut menjadi kerangka utama dalam mengarahkan kebijakan pembangunan daerah yang terukur, terintegrasi, dan berorientasi pada hasil (outcome). Adapun capaian 13 indikator makro pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 1 Capaian Indikator Makro Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,30	6,00	3,22	53,67
2	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	32,28	35,80	33,67	94,05
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,83	0,84	0,84	100,00
4	Tingkat Kemiskinan	%	11,91	11,68-12,18	11,38	102,57
5	Rasio Gini	Poin	0,364	0,369-0,373	0,364	101,36
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54 (2023)	0,56	NA	NA

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2024	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	NA	15,31	4,4	28,74
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75,78	76,19	77,40	101,59
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73	2,19-2,79	3,05	90,68
10	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	3,87	4,21	6,69	158,91
11	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63,40	76,50	73,25	95,75
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,50	3,55	3,53	99,44
13	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	NA	54,53	50,73	93,03

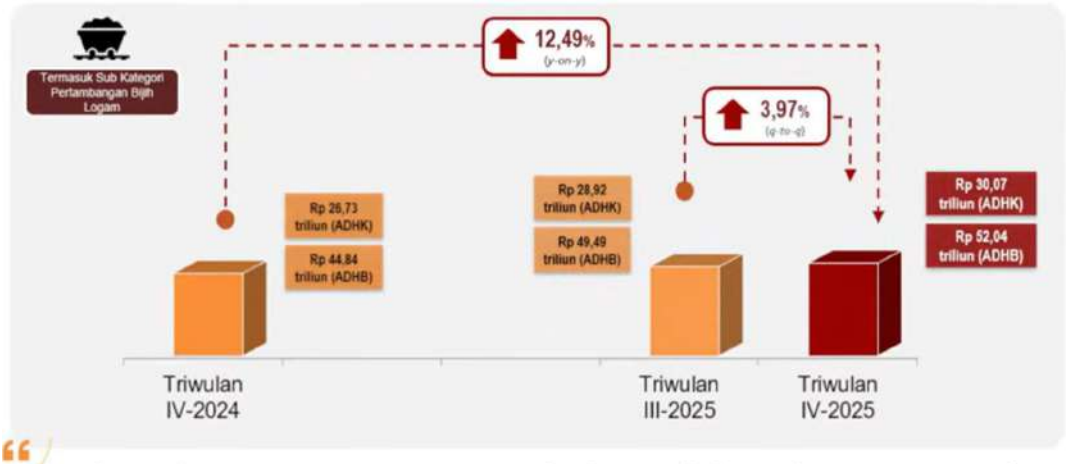
Sumber : Bappeda NTB, 2026 (data diolah)

Adapun capaian sasaran pokok pembangunan tersebut, sebagaimana diukur dengan capaian indikator kinerja sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi NTB dengan tambang, secara c to c (*cumulative to cumulative*), ekonomi NTB tumbuh sebesar 3,22 persen dari tahun 2024 ke 2025. Capaian ini belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 6 persen. Selanjutnya secara *years on years* (y on y) pada triwulan IV 2024 menunjukkan tanda pemulihan di triwulan IV tahun 2025 dengan lonjakan 12,49 persen. Sedangkan pertumbuhan ekonomi secara q to q (*quarter to quarter*), kinerja ekonomi mengalami pertumbuhan sebesar 3,97 persen dari triwulan III ke triwulan IV tahun 2025.

Grafik 2. 1 Pertumbuhan Ekonomi NTB Dengan Tambang Provinsi NTB Tahun 2025



Perekonomian Nusa Tenggara Barat mengalami pertumbuhan sebesar 3,97 persen (*q-to-q*) 12,49 persen (*y-on-y*) dan 3,22 persen (*c-to-c*).

Sumber : BPS NTB, 2026

Faktor terbesar yang menyebabkan perlambatan tersebut adalah kontraksi tajam pada sektor pertambangan dan penggalian yang mencatat penurunan hingga kontraksi 20,05 persen sepanjang tahun 2025. Penurunan ini disebabkan oleh dua hal utama yaitu drastisnya penurunan produksi tambang serta kebijakan larangan ekspor konsentrat tembaga oleh pemerintah pusat dalam rangka mendukung agenda hilirisasi mineral nasional. Pada beberapa triwulan awal tahun, produksi tambang bahkan anjlok hingga 50 persen, dipengaruhi oleh pembatasan ekspor serta kendala operasional smelter yang belum berfungsi optimal.

Selama ini, sektor pertambangan merupakan salah satu pendorong utama roda perekonomian NTB, berkontribusi besar pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) daerah dengan posisinya sebagai penyumbang terbesar kedua setelah sektor pertanian. Nilai kontribusinya mencapai puluhan triliun rupiah per tahun. Tambang tembaga, khususnya yang dikelola oleh perusahaan besar di wilayah Sumbawa, tidak hanya menjadi penggerak utama lewat produksi dan ekspor tetapi juga memberikan dampak ganda yang luas. Dampak tersebut meliputi penyerapan tenaga kerja yang signifikan, peningkatan pendapatan masyarakat di sekitar area tambang hingga penguatan berbagai sektor penunjang seperti transportasi, perdagangan, akomodasi dan jasa keuangan.

Ketika sektor tambang mengalami gangguan, efeknya langsung terasa di berbagai aspek ekonomi daerah. Penurunan produksi dan ekspor yang terjadi menyebabkan dampak signifikan pada pendapatan asli daerah (PAD), aktivitas logistik di pelabuhan menurun serta konsumsi dan investasi di wilayah penyangga tambang melemah. Bahkan, pada triwulan pertama dan kedua tahun 2025, ekonomi NTB sempat masuk ke fase kontraksi sebelum mulai membaik secara bertahap di semester kedua, berkat kebijakan pengembalian izin ekspor konsentrat dan penguatan sektor domestik yang ada.

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi tanpa tambang justru mengalami pertumbuhan cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi tanpa tambang secara y on y mencapai 13,70 persen sedangkan secara q to q sebesar 0,70 persen. Kemudian secara c to c mencapai 8,33 persen, melebihi target yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 6,00 – 6,50 persen.

Grafik 2. 2 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tanpa Tambang Provinsi NTB Tahun 2025



Sumber : BPS NTB, 2026

Capaian kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif didorong oleh berbagai intervensi antara lain Perkembangan pertumbuhan sektoral pada Triwulan IV-2024 hingga Triwulan IV-2025 menunjukkan dinamika struktur ekonomi yang cukup tajam, dengan pergeseran sumber pertumbuhan yang semakin terkonsentrasi pada sektor tertentu. Pada periode ini, sektor industri pengolahan tampil sebagai penggerak utama dengan lonjakan yang sangat signifikan, dari hanya 2,49 persen pada Triwulan IV-2024 meningkat drastis menjadi 66,58 persen pada Triwulan III-2025 dan kembali melonjak hingga 137,78 persen pada Triwulan IV-2025. Kinerja ini mengindikasikan adanya akselerasi aktivitas industri berskala besar, yang kemungkinan dipengaruhi oleh penguatan hilirisasi maupun peningkatan kapasitas produksi. Namun demikian, tingginya pertumbuhan ini juga perlu dicermati karena berpotensi menciptakan ketergantungan pada sektor tertentu serta belum tentu berdampak merata terhadap perekonomian masyarakat secara luas.

Di sisi lain, sektor pertambangan dan penggalian menunjukkan pola pemulihan yang cukup kuat setelah mengalami kontraksi dalam dua periode sebelumnya. Dari minus 16,84 persen pada Triwulan IV-2024 dan kembali terkontraksi sebesar minus 21,53 persen pada Triwulan III-2025, sektor ini mampu berbalik tumbuh positif sebesar 4,85 persen pada Triwulan IV-2025. Kondisi ini mencerminkan adanya perbaikan aktivitas produksi maupun pengaruh eksternal seperti harga komoditas global, meskipun karakteristiknya yang fluktuatif menunjukkan bahwa sektor ini masih rentan terhadap dinamika eksternal.

Sementara itu, sektor perdagangan besar dan eceran memperlihatkan penguatan yang cukup berarti, dari 6,31 persen pada Triwulan IV-2024 menjadi 12,29 persen pada Triwulan IV-2025, meskipun sempat melambat pada Triwulan III-2025. Peningkatan ini mengindikasikan mulai pulihnya daya beli masyarakat serta meningkatnya aktivitas distribusi barang dan jasa. Hal serupa juga terlihat pada sektor jasa keuangan yang mengalami lonjakan signifikan dari minus 8,91 persen menjadi 28,12 persen pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya aktivitas intermediasi keuangan, baik melalui penyaluran kredit maupun peningkatan investasi dan konsumsi berbasis pembiayaan.

Adapun sektor-sektor lain seperti pertanian, kehutanan, dan perikanan; konstruksi; serta transportasi dan pergudangan cenderung menunjukkan pertumbuhan yang relatif stabil meskipun tidak terlalu tinggi. Sektor pertanian, misalnya, bergerak dalam kisaran 2–3 persen, mencerminkan perannya sebagai penopang stabilitas ekonomi, terutama dalam menjaga ketahanan pangan. Sektor konstruksi dan transportasi juga menunjukkan fluktuasi moderat yang menandakan adanya aktivitas pembangunan dan mobilitas ekonomi yang tetap berjalan, meskipun belum menjadi pendorong utama pertumbuhan.

Di sisi lain, sektor administrasi pemerintahan mengalami perlambatan dari 9,44 persen pada Triwulan IV-2024 menjadi 3,67 persen pada Triwulan IV-2025. Hal ini dapat mengindikasikan adanya penyesuaian belanja pemerintah atau pergeseran prioritas fiskal. Sementara itu, sektor jasa pendidikan juga menunjukkan pola yang relatif stagnan dengan pertumbuhan yang sempat menurun tajam sebelum kembali meningkat.

Secara keseluruhan, kondisi ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada periode tersebut cenderung tinggi namun belum sepenuhnya merata, dengan dominasi yang sangat kuat dari sektor industri pengolahan dan mulai menguatnya sektor jasa keuangan serta perdagangan. Oleh karena itu, ke depan diperlukan upaya untuk mendorong keterkaitan antar sektor (linkages), terutama agar pertumbuhan sektor industri dapat memberikan efek pengganda yang lebih luas terhadap sektor lain seperti pertanian, UMKM, dan jasa, sehingga tercipta pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, seimbang, dan berkelanjutan.

Struktur ekonomi Provinsi NTB tahun 2023–2025 masih didominasi oleh sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Pertambangan dan Penggalian. Sektor pertanian menjadi penyumbang terbesar PDRB dengan kontribusi sekitar 21–22 persen dan menunjukkan pertumbuhan yang kembali menguat pada 2025 sebesar 5,03 persen. Hal ini menegaskan bahwa sektor pertanian tetap menjadi penopang utama ekonomi dan sumber penghidupan masyarakat NTB.

Sektor pertambangan mengalami fluktuasi yang cukup tajam, dari kontraksi pada 2023, tumbuh pada 2024, kemudian kembali terkontraksi sebesar -20,05 persen pada 2025. Penurunan ini menyebabkan kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB turun menjadi 16,51 persen, sehingga menunjukkan bahwa ekonomi NTB masih dipengaruhi dinamika sektor tambang.

Di sisi lain, sektor Industri Pengolahan mengalami pertumbuhan sangat tinggi sebesar 76,37 persen pada 2025 dengan kontribusi meningkat menjadi 6,69 persen. Pertumbuhan ini didorong oleh mulai beroperasinya fasilitas smelter dan meningkatnya aktivitas hilirisasi hasil tambang di NTB. Kondisi tersebut menunjukkan adanya transformasi ekonomi menuju industri pengolahan yang lebih bernilai tambah dan berorientasi pada penguatan industri domestik.

Secara keseluruhan, ekonomi NTB tumbuh 1,80 persen pada 2023, meningkat menjadi 5,30 persen pada 2024, kemudian melambat menjadi 3,22 persen pada 2025 akibat kontraksi sektor pertambangan. Namun demikian, pertumbuhan sektor non-tambang, khususnya industri pengolahan, menunjukkan adanya penguatan struktur ekonomi yang lebih beragam, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 2 Laju Pertumbuhan Menurut Jenis Lapangan Usaha Tahun 2023-2025

Lapangan Usaha	Pertumbuhan 2023 (%)	Pertumbuhan 2024 (%)	Pertumbuhan 2025 (%)	Distribusi 2023 (%)	Distribusi 2024 (%)	Distribusi 2025 (%)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2,05	1,54	5,03	22,23	21,45	21,89
Pertambangan dan Penggalian	-10,39	11,66	-20,05	17,93	20,12	16,51
Industri Pengolahan	2,51	4,19	76,37	3,86	3,87	6,69
Pengadaan Listrik dan Gas	5,04	9,08	5,44	0,08	0,08	0,09
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	1,85	0,77	3,91	0,08	0,07	0,07
Konstruksi	10,87	2,93	3,32	9,62	9,11	9,01
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6,94	5,87	6,15	14,46	14,2	14,53

Lapangan Usaha	Pertumbuhan 2023 (%)	Pertumbuhan 2024 (%)	Pertumbuhan 2025 (%)	Distribusi 2023 (%)	Distribusi 2024 (%)	Distribusi 2025 (%)
Transportasi dan Pergudangan	8,14	4,21	3,45	5,89	5,83	5,83
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,97	8,37	7,42	1,73	1,75	1,81
Informasi dan Komunikasi	4,88	4,34	3,02	2,09	2	1,95
Jasa Keuangan dan Asuransi	-1,2	5,72	9,02	3,92	3,83	4,04
Real Estat	4,4	4,02	3,73	3,01	2,89	2,86
Jasa Perusahaan	7,4	5,24	4,02	0,18	0,18	0,18
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	0,55	6,56	3,59	5,89	5,82	5,77
Jasa Pendidikan	5,12	3,46	2,1	4,91	4,77	4,7
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6,03	6,19	2,38	1,97	1,93	1,91
Jasa Lainnya	6,5	4,81	4,55	2,13	2,1	2,16
PDRB	**1,8**	**5,3**	**3,22**	**100**	**100**	**100**

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026

Selanjutnya pertumbuhan ekonomi bila dilihat dari pendekatan pengeluaran, diketahui bahwa penyumbang terbesar dari pertumbuhan berasal dari Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (4,49%) diikuti Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang mencapai 2,99 persen.

Tabel 2. 3 Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Pengeluaran Tahun 2023-2025

Komponen	Triw III-2025 terhadap Triw II-2025 (Q-to-Q) (%)	Triw IV-2025 terhadap Triw III-2025 (Q-to-Q) (%)	Triw III-2025 terhadap Triw III-2024 (Y-on-Y) (%)	Triw IV-2025 terhadap Triw IV-2024 (Y-on-Y) (%)	Tahun 2025 terhadap Tahun 2024 (C-to-C) (%)
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	-0,28	2,31	4,51	5,18	4,49
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	-1,84	-2,78	1,12	0,38	0,55
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	0,11	11,16	5,89	3,05	2,99
Pembentukan Modal Tetap Bruto	5,29	0,77	3,31	2,37	1,89
Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
Ekspor Barang dan Jasa	24,97	64,09	-26,49	103,11	-10,82
Dikurangi Impor Barang dan Jasa	14,1	30,44	-18,89	27,34	-11,66
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	**3,91**	**3,97**	**2,82**	**12,49**	**3,22**

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026

Capaian kinerja pertumbuhan ekonomi yang positif didorong oleh berbagai intervensi yang sifatnya bersifat fasilitatif dan koordinati diantaranya:

a. koordinasi intensif dengan PT AMNT dan Kementerian ESDM Pusat untuk memperoleh izin relaksasi ekspor konsentrat tembaga;
b. Memfasilitasi operasional smelter yang berfokus pada hilirisasi tambang sekaligus diversifikasi ke pengolahan pangan/UMKM;
c. Mendukung resiliensi sektor primer melalui program peningkatan produksi padi. Intervensi berupa optimalisasi lahan dan bantuan benih/irigasi, sehingga sektor ini menjadi penyangga saat tambang fluktuatif;

d. Revitalisasi BUMD untuk mendukung jasa keuangan dan perdagangandengan memprioritaskan BUMD sebagai katalisator nilai tambah produksi lokal;
e. Memfasilitasi realisasi investasi Rp61,1 triliun sepanjang 2025 (melampaui target nasional). Fokus pada investasi smelter dan pendukungnya serta konstruksi dan pariwisata yang berdampak langsung pada PMTB dan ekspor;
f. Mendorong aktivitas perdagangan besar-eceran domestik melalui stabilisasi harga dan promosi produk lokal, mendukung konsumsi rumah tangga yang selalu tumbuh posistif;

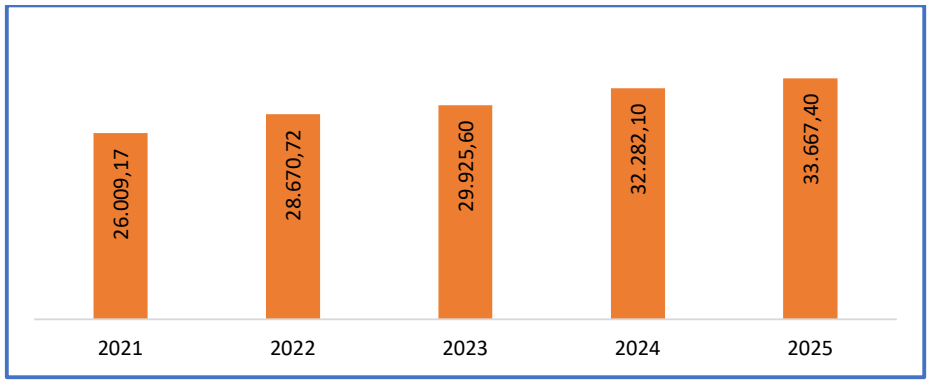
Program perlindungan sosial dan peningkatan daya beli masyarakat (melalui BUMD dan bansos tepat sasaran) menjaga konsumsi rumah tangga agar tidak tergerus fluktuasi tambang.

2. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita adalah indikator ekonomi yang dihitung dengan membagi total Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) suatu wilayah dengan jumlah penduduknya pada periode tertentu. Ini menggambarkan rata-rata pendapatan atau nilai tambah yang dihasilkan per orang. Pada tahun 2025, nilai PDRB Per Kapita Provinsi NTB telah mencapai sebesar Rp.33,28 juta atau meningkat 4,30% jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar Rp.32,28 juta, ini artinya rata-rata pendapatan atau nilai tambah yang dihasilkan setiap orang di NTB telah mencapai Rp.33,280 juta. Capaian PDRB per kapita NTB Rp33,67 juta pada 2025 adalah kemajuan nyata meskipun pertumbuhan tahunan secara keseluruhan moderat (3,22%).

Meskipun ada peningkatan tetapi belum memenuhi target nasional yang diharapkan PDRB Per Kapita penduduk NTB pada tahun 2025 sebesar Rp.35,80 juta. Hal ini dipengaruhi pertumbuhan ekonomi, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi, maka semakin tinggi PDRB per Kapita.

Grafik 2. 3 PDRB Per Kapita Provinsi NTB Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

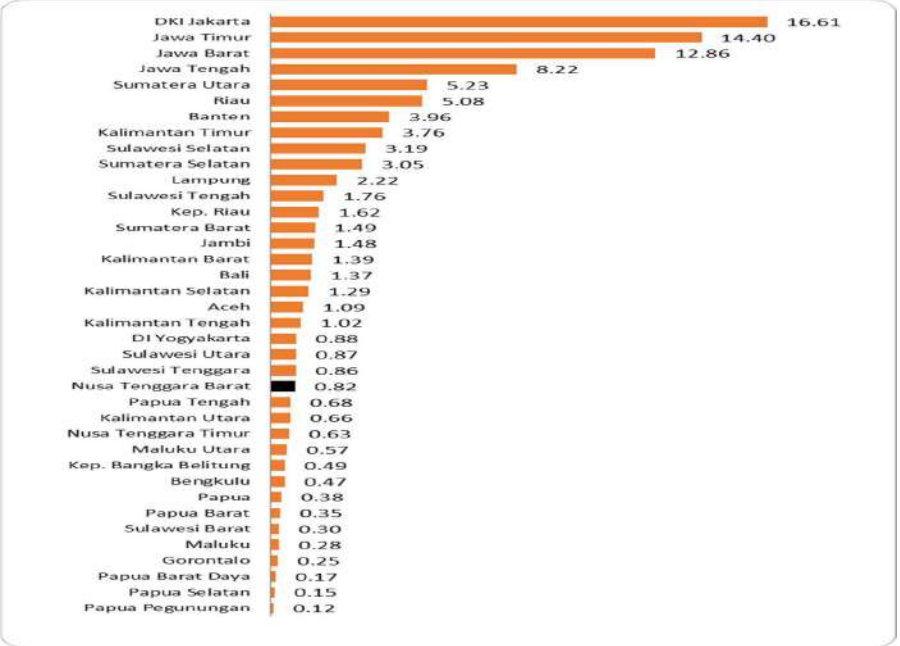
3. Kontribusi PDRB Provinsi

Produk Domestik Regional Bruto Provinsi NTB pada tahun 2025 mencatatkan capaian penting meskipun pertumbuhan ekonomi secara kumulatif belum signifikan. Kontribusi NTB terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional tetap relatif kecil,

mencerminkan posisi provinsi ini sebagai salah satu penyumbang di bawah rata-rata nasional tetapi dengan potensi akselerasi yang tinggi berkat hilirisasi tambang.

Sampai dengan tahun 2025, kontribusi PDRB NTB terhadap PDB nasional tahun 2025 sebesar 0,82 persen masih tergolong kecil. Angka ini menempatkan NTB di kelompok provinsi dengan kontribusi kecil (peringkat bawah secara nasional), jauh di bawah provinsi-provinsi besar seperti Jawa Barat, Jawa Timur atau DKI Jakarta yang masing-masing berkontribusi di atas 10–20 persen. Secara regional, Bali dan Nusa Tenggara, NTB masih kalah jauh dari provinsi tetangga seperti Bali yang mencapai 1,37 persen namun lebih tinggi dari NTT yang sebesar 0,63 persen.

Grafik 2. 4 Kontribusi PDRB Menurut Provinsi Tahun 2025



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

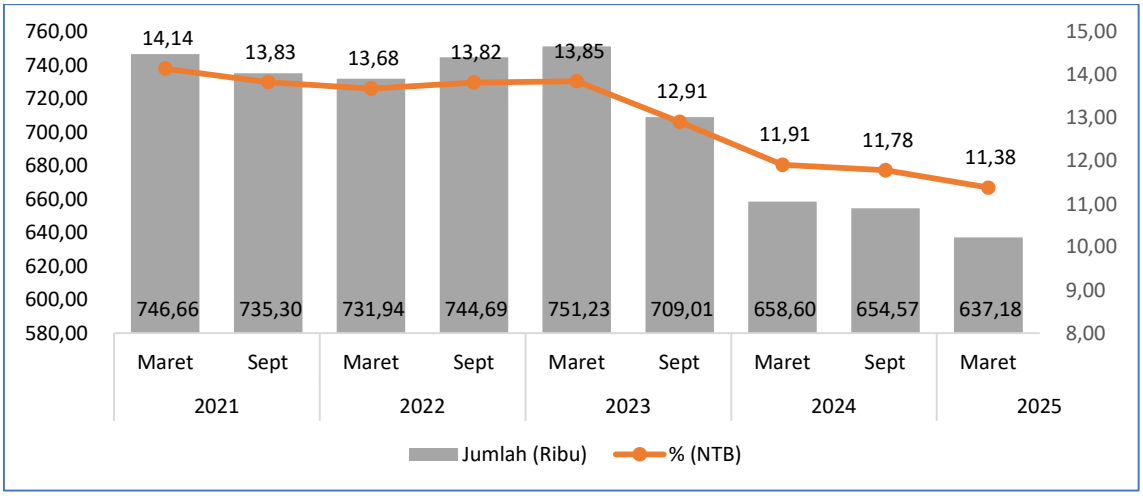
4. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada September 2025 sebesar 11,38 persen dengan jumlah penduduk miskin sebesar 637.180 jiwa, menurun 0,40 persen poin atau 17.390 jiwa terhadap Maret 2025 yang mencapai 11,78 persen (654.570 jiwa) dan menurun 0,53 persen poin atau 21.420 jiwa terhadap September 2024 yang mencapai 11,91 persen. Penurunan persentase kemiskinan pada tahun 2025 sangat signifikan bila dibandingkan penurunan dalam 5 (lima) tahun terakhir rata-rata berkisar 0,1-0,2 persen. Penurunan persentase kemiskinan juga melampui target nasional yang ditetapkan untuk provinsi NTB pada tahun 2025 berkisar pada angka 11,68-12,18%.

Pencapaian ini didukung oleh berbagai intervensi dari pemerintah diantaranya dengan pendekatan 3 (tiga) strategi utama yaitu untuk mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin melalui program bantuan sosial berupa bantuan jaminan kesehatan nasional dan daerah dalam bentuk (PBI JK), Bantuan peralatan sekolah dan beasiswa bagi

siswa miskin melalui program Indonesia pintar, program keluarga harapan (PKH), dan bantuan pangan non tunai, pemasangan listrik murah, peningkatan kualitas rumah layak huni, serta bantuan sembako. Untuk meningkatkan pendapatan penduduk miskin, dilakukan dalm bentuk bantuan benih, ternak dan hijauan pakan ternak, pelatihan olahan pakan ternak, pelatihan keterampilan dan bantuan alat, pengembangan ekonomi sirkuler, serta kegiatan-kegiatan pemberdayaan lainnya yang merupakan kolaboratif yang bersumber dari dana APBN, APBD Kabupaten/Kota se NTB serta mitra pembangunan di provinsi NTB, serta mengurangi kantong-kantong kemiskinan melalui peningkatan kualitas jalan dan jembatan, peningkatan konektivitas antar wilayah, peningkatan sarana dan prasarana irigasi, peningkatan kualitas lingkungan, peningkatan kualitas sarana dan prasarana Pendidikan dan kesehatan, serta infrastruktur dasar lainnya.

Grafik 2. 5 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin NTB Tahun 2021-2025



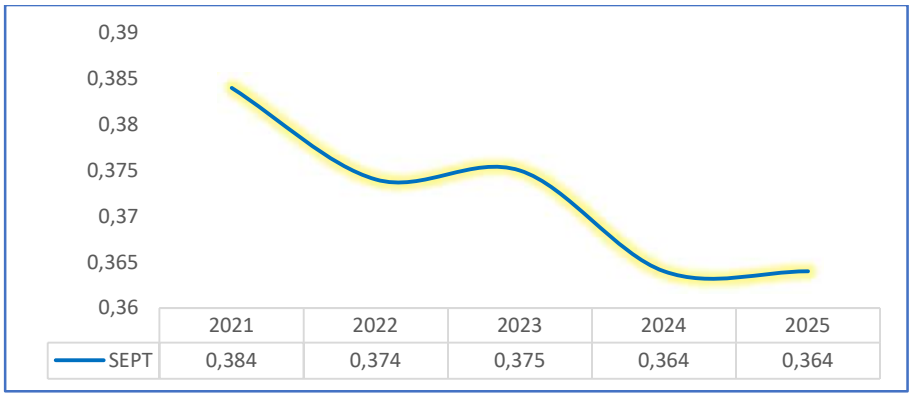
Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

5. RASIO GINI

Rasio Gini *(Gini Ratio)* adalah indikator tingkat ketimpangan pengeluaran atau pendapatan penduduk suatu wilayah, bernilai antara 0 hingga 1. Mendekati 0 berarti distribusi pendapatan semakin merata (setara), sementara mendekati 1 berarti ketimpangan tinggi. Pada September 2025, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Nusa Tenggara Barat yang diukur oleh *gini ratio* adalah sebesar 0,364. Angka ini menurun 0,005 poin jika dibandingkan dengan *gini ratio* Maret 2025 yang sebesar 0,369 dan sama jika dibandingkan dengan *gini ratio* September 2024 yang sebesar 0,364. Berdasarkan daerah tempat tinggal, *gini ratio* di daerah perkotaan pada September 2025 adalah sebesar 0,386 turun dari Maret 2025 yang sebesar 0,397. Sebaliknya, *gini ratio* di daerah perdesaan pada September 2025 adalah sebesar 0,328, lebih tinggi dari Maret 2025 yang sebesar 0,323. Jika dilihat secara keseluruhan, sepanjang periode September 2018 sampai September 2025, *gini ratio* di daerah perkotaan selalu lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan.

Menurut ukuran ketimpangan Bank Dunia, distribusi pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di provinsi NTB adalah sebesar 19,23 persen. Hal ini berarti pengeluaran penduduk provinsi NTB pada September 2025 berada pada kategori tingkat ketimpangan rendah. Jika dirinci berdasarkan daerah, di daerah perkotaan tercatat sebesar 18,50 persen, sedangkan di daerah perdesaan sebesar 20,51 persen. Ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan pengeluaran baik di perkotaan maupun perdesaan termasuk kategori ketimpangan rendah.

Grafik 2. 6 Perkembangan Ketimpangan Pendapatan (Rasio Gini) Provinsi NTB Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

Capaian angka ketimpangan pendapatan (rasio gini) di provinsi NTB sebesar 0,364 poin pada tahun 2025 termasuk kategori ketimpangan rendah dan melampaui target nasional yang ditetapkan untuk provinsi NTB sebesar 0,369-0,373 poin.

6. INDEKS MODAL MANUSIA (IMM)/ INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Modal Manusia atau *Human Capital Index* (HCI) adalah indikator yang dikeluarkan oleh Bank Dunia untuk mengukur kontribusi kesehatan dan pendidikan terhadap produktivitas generasi pekerja mendatang. HCI menilai potensi ekonomi dengan melihat probabilitas hidup, kualitas pendidikan, dan kesehatan (termasuk *stunting*) di suatu negara. Di Indonesia, penggunaan indikator Indeks Modal Manusia sebagai ukuran keberhasilan pembangunan manusia terutama pada bidang pendidikan dan kesehatan mulai diterapkan tahun 2025 ini sebagaimana telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2025-20245 dan RPJPD Provinsi NTB 2025-2045 serta RPJMD Provinsi NTB 2025-2029.

Indeks Modal Manusia diukur melalui beberapa komponen utama: 1. Probabilitas bertahan hidup (survival) hingga usia 5 tahun: Probabilitas bahwa seorang anak yang baru lahir akan bertahan hingga usia 5 tahun. Data dihitung dari angka kematian balita. 2. Pendidikan: Akses pendidikan diukur melalui harapan lama sekolah. Kualitas pendidikan diukur melalui harmonized test scores. Data akses dan kualitas pendidikan ditransformasikan menjadi pengukuran Learning-Adjusted Years of Schooling menggunakan metrik konversi. 3. Kesehatan: Mencakup berbagai indikator kesehatan, termasuk stunting, yang merupakan kondisi di mana pertumbuhan anak terhambat

karena malnutrisi kronis. 2 proksi yang digunakan adalah (1) adult survival rate yang didefinisikan sebagai proporsi penduduk usia 15 tahun yang hidup hingga 60 tahun; dan (2) prevalensi stunting. Komponen-komponen ini digabungkan untuk menghasilkan skor Indeks Modal Manusia, yang berkisar dari 0 hingga 1. Skor ini mengukur produktivitas tenaga kerja di masa depan dari anak yang dilahirkan saat ini, relatif terhadap patokan kesehatan penuh dan pendidikan lengkap.

Pada tahun 2025, Indeks Modal Manusia Provinsi NTB ditargetkan meningkat menjadi 0,56 poin, yang berarti anak yang lahir di NTB saat ini diperkirakan hanya akan mencapai 56% dari produktivitas penuhnya saat dewasa. Meskipun belum ada rilis capaian tahun 2025, Indeks Modal Manusia Provinsi NTB telah mencapai 0,54 tahun 2023, akan terus meningkat seiring dengan peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM NTB pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,19% atau 0,87 poin sehingga menjadi 73,97 poin jika dibandingkan dengan tahun 2024 sebesar 73,10 poin dengan kategori **Tinggi**. Peningkatan IPM Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025 terjadi pada semua dimensi, baik umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dua indikator mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 4,32% dibanding tahun sebelumnya dan pengeluaran riil per kapita sebesar 2,72% dibanding tahun sebelumnya . Sementara itu Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) pertumbuhannya mencapai 0,48%. Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya mencapai 0,07%.

Tabel 2. 4 Perkembangan IPM Provinsi NTB 2021-2025

Dimensi/Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Umur Panjang dan Hidup Sehat						
Umur Harapan Hidup (UHH) saat Lahir	Tahun	71,33	71,66	72,02	72,25	72,60
Pengetahuan						
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,90	13,96	13,97	13,98	13,99
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	7,38	7,61	7,74	7,87	8,21
Standar Hidup Layak						
Pengeluaran Riil per Kapita (yang disesuaikan)	Rp.000	10.377	10.681	11.095	11.606	11.922
IPM		**70,86**	**71,65**	**72,73**	**73,10**	**73,97**

Sumber : BPS NTB, 2026

7. PENURUNAN INTENSITAS EMISI GAS RUMAH KACA (GRK)

Intensitas emisi Gas Rumah Kaca (GRK) adalah ukuran jumlah emisi karbon yang dihasilkan per satuan aktivitas tertentu. Indikator ini digunakan untuk mengukur efisiensi karbon dan keberlanjutan ekonomi, di mana penurunan intensitas mengindikasikan upaya dekarbonisasi. Pemerintah Indonesia menargetkan penurunan intensitas emisi GRK yang signifikan melalui kebijakan Pembangunan Rendah Karbon (PRK), dengan target kumulatif penurunan emisi GRK mencapai 30,1% pada 2029, sedangkan pemerintah provinsi NTB target kumulatif penurunan emisi GRK mencapai 15,09% dan target tahunan sebesar 26,48% pada 2029.

Pada tahun 2025 Provinsi NTB menargetkan penurunan emisi GRK sebesar 15,31%, berdasarkan hasil perhitungan sementara, Pemerintah Provinsi NTB telah berhasil menurunkan intensitas emisi GRK sebesar 4,40% dan persentase penurunan emisi GRK tahunan sebesar 4,891% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 5 Penurunan Emisi GRK tahunan tahun 2025 menurut subsektor

Tahun	Subsektor	Baseline Tahunan	Penurunan Emisi Tahunan (ton CO2 eq)	% Penurunan Emisi GRK tahunan	Andil Penurunan Emisi per subsektor (%)
1	2	3	4	5=4/3*100	6
2025*		17.926.377,90	876.805,64	4,891	4,891
	Persampahan		644.785,26		3,597
	Pertanian		223.006,40		1,244
	Kehutanan		6.447,50		0,036
	Air Limbah		1.347,32		0,008
	Energi		762,68		0,004
	Blue Carbon		431,12		0,002
	Transportasi		25,35		0,000

Sumber : Bappeda NTB, 2026 (diolah)

- Baseline Tahunan sesuai dengan Hasil Pemodelan Dinamika Sistem.
- Penurunan Emisi Tahunan sesuai dengan Aplikasi Aksara dengan status disetujui/difinalkan.

Catatan: *Angka sementara

Angka ini berpotensi terus naik mengingat beberapa terobosan telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui kerjasama Pembangunan Rendah Karbon dengan *Low Carbon Development Initiative* - Bappenas yang ditandatangani Tahun 2023 dan mitra pembangunan lainnya dalam usaha penurunan emisi gas rumah kaca. Selain itu rencana aksi pembangunan rendah karbon sudah diselaraskan dalam RPJMD 2025 – 2029 dan Renstra OPD sesuai sector. Hal ini menjadi faktor kunci penurunan intensitas emisi Gas Rumah Kaca.

8. INDEKS KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP (IKLH)

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) adalah nilai komposit yang mengukur kualitas lingkungan suatu wilayah, menggabungkan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Kualitas Lahan (IKTL). Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Air (IKA) provinsi NTB telah mencapai sebesar 71,24 poin, Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) sebesar 81,14 poin, Indeks Kualitas Udara (IKU) telah mencapai 81,41 poin, dan Indeks Kualitas Lahan (IKTL) mencapai 77,36 poin, sehingga membentuk nilai komposit Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi NTB sebesar 77,40 poin.

Capaian Nilai IKLH Provinsi NTB sebesar 77,40 poin pada tahun 2025 mengalami peningkatan sebesar 2,14% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2024 sebesar 75,78 poin. Capaian tahun 2025 ini bahkan melampui target nasional untuk NTB sebesar 76,19 poin. Keberhasilan provinsi NTB untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup oleh beberapa terobosan diantaranya:

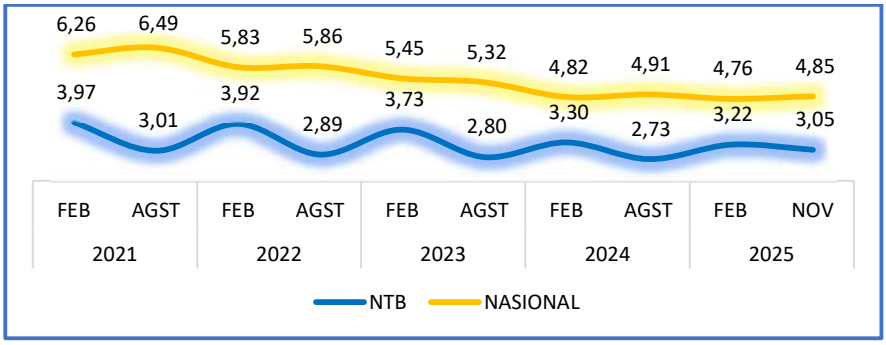
a. Pembinaan dan penguatan kapasitas kelompok Program Kampung Iklim (Proklim). Pembinaan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas pelaporan kegiatan, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal
b. Pendampingan sekolah adiwiyata. Sekolah Adiwiyata berperan aktif dalam pengendalian pencemaran air melalui penerapan program-program konservasi dan pengelolaan limbah cair berbasis partisipatif. Tujuan utamanya adalah mengurangi pemborosan air, mencegah pencemaran sumber air (tanah dan sungai), serta meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk menghemat dan menjaga kebersihan air.
c. Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi PROPER. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat pengendalian kualitas lingkungan khususnya terhadap kualitas air, serta penegakan hukum lingkungan.
d. Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office)
e. Pengendalian pencemaran udara melalui KLHS dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) pemerintah
f. Fasilitasi perizinan lingkungan sebagai upaya ini dilakukan sebagai instrumen preventif yang krusial untuk memastikan setiap aktivitas usaha/kegiatan di pesisir dan laut mematuhi standar lingkungan hidup. Perizinan ini mewajibkan pelaku usaha untuk mengelola limbah dan dampak sebelum operasional dimulai
g. Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan lingkungan
h. Patroli pencegahan dan pengamanan hutan
i. Monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pemanfataan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu
j. Rehabilitasi hutan dan lahan

9. TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Pengangguran terbuka adalah angkatan kerja (usia 15 tahun ke atas) yang benar-benar tidak bekerja, sedang aktif mencari pekerjaan, sedang mempersiapkan usaha atau sudah memiliki pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Berdasarkan rilis BPS Provinsi NTB dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) pada November 2025, jumlah penduduk usia kerja di provinsi NTB sebanyak 4.229.010 jiwa atau 73,78 persen dari total penduduk NTB sebanyak 5.731.107 jiwa. Dari jumlah tersebut, termasuk angkatan kerja sebanyak 3.235,02 jiwa sedangkan yang bukan angkatan kerja sebanyak 993.990 jiwa.

Jumlah penduduk yang bekerja di NTB mencapai 3.136.300 jiwa atau 74,23 persen dari total penduduk usia kerja dan atau 54,72 persen dari total penduduk NTB. Sedangkan jumlah penduduk yang tidak bekerja atau pengangguran sebanyak 98.720 jiwa atau 3,05 persen dari total Angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di NTB mengalami peningkatan pada November tahun 2025 dengan kenaikan sebesar 0,32 persen jika dibandingkan dengan keadaan bulan Agustus 2024.

Grafik 2. 7 Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka di NTB dan Nasional Tahun 2021-2025



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

Adanya kenaikan TPT dipicu ketidakseimbangan antara pertumbuhan angkatan kerja dan lapangan kerja yang tersedia. Meningkatnya lulusan SMP, SMK dan Perguruan Tinggi yang mencari pekerjaan. Disisi lain daya tampung lapangan usaha terbatas. Namun demikian berbagai upaya telah dilakukan untuk mengatasi pengangguran di NTB diantaranya pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi, optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas, melaksanakan Job Fair/Bursa Kerja, pemberdayaan pekerja migran indonesia purna penempatan serta Pelatihan keterampilan dan bantuan alat untuk wirausaha.

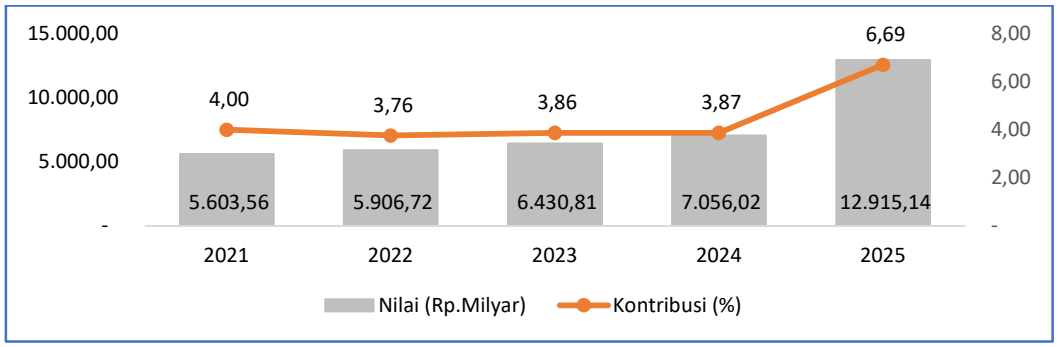
10. KONTRIBUSI PDRB INDUSTRI PENGOLAHAN

Industri pengolahan (manufaktur) adalah sektor ekonomi yang mengubah bahan mentah/baku menjadi barang setengah jadi atau jadi melalui proses fisik, kimia, atau biologis. Industri ini meningkatkan nilai tambah produk, mencakup berbagai sektor seperti makanan, minuman, kimia, dan tekstil, serta merupakan kontributor utama PDB. Sektor Industri Pengolahan menjadi salah satu pilihan dalam transformasi ekonomi sesuai dengan RPJPN 2025-2045, RPJMD Provinsi NTB 2025-2045 dan RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 melalui pembangunan ekosistem industri komoditas unggulan daerah diarahkan untuk meningkatkan ekspor barang dan jasa terutama dalam upaya mengembangkan diversifikasi ekonomi untuk mengoptimalkan pengembangan potensi agromaritim. Prioritas lokasi untuk pengembangan ekosistem ini dilaksanakan pada kawasan pertumbuhan, kawasan komunitas unggulan (kawasan perkebunan, kawasan peternakan, kawasan sentra garam, kawasan perikanan dan sentra rumput laut, kawasan akua kultur, kawasan perkembangan sentra berbasi perikanan tangkap, kawasan transmigrasi, serta kawasan strategis provinsi.

Pada tahun 2025, sudah mulai terlihat pergeseran struktur perekonomi Provinsi NTB, dimana kontribusi sektor industri pengolahan berkisar antara 3-4%, namun sekarang telah meningkat menjadi 6,69%, dari Rp.4.839,21 Miliar menjadi Rp.8.534,85

Miliar, jauh melampaui target nasional untuk NTB sebesar 4,21%. Salah satu sub sektor yang menonjol adalah sub sektor industri logam dengan nilai PDRB sebesar Rp. 9,39 miliar tahun 2024 menjadi Rp.3.485,38 Miliar. Hal ini sejalan dengan penetapan NTB sebagai salah satu Kawasan Industri Prioritas Nasional dengan titik berat pada Kawasan smelter yang terletak di Kabupaten Sumbawa Barat. Berikut tren perkembangan kontribusi industri pengolahan di NTB dalam 5 tahun terakhir.

Grafik 2. 8 Perkembangan Kontribusi Industri Pengolahan NTB Tahun 2021-2025



Sumber : BPS NTB, 2026

Selain mengandalkan industri smelter, pemerintah provinsi saat ini sedang mengembangkan industri agro maritim dengan melalukan hilirisasi komoditas unggulan daerah yang terintegrasi dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah tersebar pada enam sektor utama, yakni tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan, serta kehutanan.

Terdapat beberapa komoditas unggulan daerah yang menjadi perhatian antara lain padi, jagung, kedelai, dan singkong. Sementara sektor hortikultura meliputi cabai, bawang merah, tomat, pisang, dan nangka. Untuk sektor perkebunan, komoditas unggulan yang didorong hilirisasinya antara lain kopi, tembakau, tebu, vanili, kakao, kelapa, cengkeh, aren, dan porang. Di sektor perikanan dan kelautan, NTB menargetkan pengembangan ikan jenis pelagis dan demersal, seperti tuna, cakalang, kakap, kerapu, rajungan, udang vaname, lobster, rumput laut, hingga teripang.

Sektor peternakan mencakup sapi, ayam, telur, kambing, serta produk turunan seperti kerupuk kulit dan sarang walet. Sedangkan sektor kehutanan diarahkan pada pengembangan komoditas kemiri, madu, rotan, jahe, serta hasil hutan bukan kayu dan kerajinan ketak.

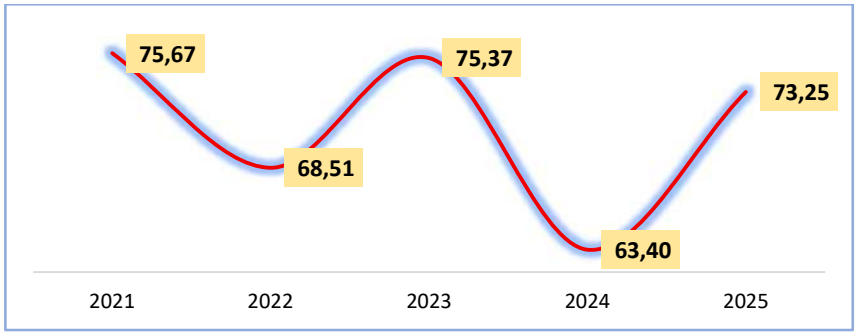
11. INDEKS INOVASI DAERAH

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah menjelaskan bahwa indeks inovasi daerah adalah seperangkat variabel dan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat inovasi daerah berdasarkan periode tertentu yang mencakup pembaharuan tata kelola pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan yang

dilaporkan pemerintah daerah, dengan kategori: Sangat Inovatif (65,01-100), Inovatif (40,01-65), dan Kurang Inovatif (0,01-40).

Berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor: 400.10.11-6097 Tahun 2025 Tentang Indeks Inovasi Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2025 menetapkan Provinsi NTB sebagai salah satu Provinsi dari 8 provinsi se Indonesia yang masuk kategori Provinsi Sangat Inovatif dengan indeks sebesar 73,25 poin. Dengan demikian Provinsi NTB mampu mempertahankan secara terus menerus untuk masuk kategori Provinsi Sangat Inovatif dari sejak dimulainya penilaian oleh Kementerian Dalam Negeri Tahun 2019 hingga sekarang.

Gambar 1 Indeks Inovasi Daerah Provinsi NTB



Sumber : Keputusan Menteri Dalam Negeri RI, 2026 (data diolah)

Berbagai terobosan telah dilakukan oleh pemerintah provinsi NTB untuk mempertahankan masuk kategori Provinsi Sangat Inovatif diantaranya Komitmen Kepala Daerah merupakan hal paling penting dalam mendorong ekosistem inovasi daerah, menjaring potensi terdapatnya inovasi seperti inovasi destinasi wisata, inovasi SMK, inovasi tata kelola pemerintahan dan inovasi ASN personal bahkan inovasi masyarakat pada umumnya. Penting dilaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis secara masif terhadap terik dalam meciptakan inovasi dan terakhir penting dilaksanakan lomba inovasi dimana strategi ini memicu dan mengembangkan target serta menjaring seberapa besarnya inovasi yang ada di Provinsi NTB, dan terakhir penting pemberian REWARD terhadap inovator Inovasi dan pelapor inovasi yang telah berkontribusi terhadap Provinsi NTB.

12. INDEKS DAYA SAING DAERAH

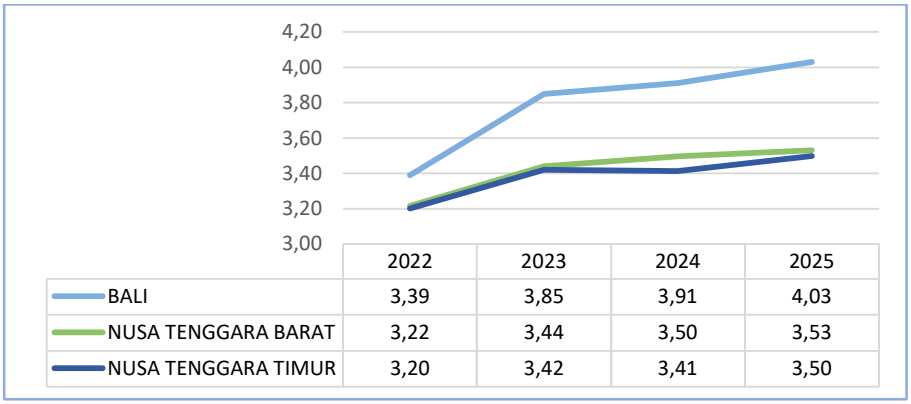
Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) adalah instrumen pengukuran komprehensif untuk menilai produktivitas, kemandirian dan kemampuan suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota) dalam meningkatkan kesejahteraan secara berkelanjutan melalui berbagai pilar, seperti SDM, kelembagaan, infrastruktur dan inovasi. Pengukuran Indeks Daya Saing Daerah dilakukan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) yang berfungsi sebagai potret objektif untuk melihat kemajuan dan area yang perlu diperbaiki dalam tata kelola pemerintahan dan ekonomi.

NTB menunjukkan performa yang stabil dan positif selama empat tahun terakhir. Nilai IDSD NTB naik secara konsisten dari 3,22 (2022) menjadi 3,53 (2025), atau meningkat 0,31 poin (+9,6 persen). Meskipun pertumbuhannya moderat, NTB berhasil

keluar dari posisi di bawah rata-rata dan mendekati kelompok menengah atas secara nasional. NTB berhasil "mengejar" dan bahkan sedikit melebihi rata-rata nasional mulai 2024.

Ini menandakan bahwa pembangunan daya saing di NTB berjalan lebih cepat dibandingkan rata-rata provinsi di Indonesia terutama setelah 2023. Konsistensi peningkatan setiap tahun dan kemampuan mengalahkan rata-rata nasional di dua tahun terakhir. NTB berhasil memanfaatkan potensi pariwisata (Mandalika), pertanian, dan pertambangan dengan baik. NTB masih kalah jauh dari Bali (selisih 0,50 poin pada 2025) dan sedikit di bawah NTT. Daya saing regional Bali-Nusra sangat didominasi oleh Bali, sehingga NTB dan NTT tampak "tertarik" ke bawah oleh rata-rata regional. Jika tren ini berlanjut, NTB berpotensi menjadi penyumbang kedua terbesar di kawasan Bali-Nusra setelah Bali, terutama jika program hilirisasi, infrastruktur, dan investasi pariwisata terus dipercepat.

Grafik 2. 9 Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah Regional NTB-Bali-NTT



	2022	2023	2024	2025
BALI	3,39	3,85	3,91	4,03
NUSA TENGGARA BARAT	3,22	3,44	3,50	3,53
NUSA TENGGARA TIMUR	3,20	3,42	3,41	3,50

Sumber : BRIN, 2026 (data diolah)

13. INDEKS EKONOMI BIRU INDONESIA

Provinsi NTB merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki karakteristik geografis kepulauan. Wilayah NTB terdiri dari dua pulau utama yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta 401 pulau kecil yang tersebar di sekitarnya dengan luas wilayah kurang lebih 4.758.132 hektare, terbagi menjadi dua yakni wilayah darat dengan luas kurang lebih 1.966.639 hektare (41 persen); dan wilayah laut dengan luas kurang lebih 2.791.492 hektare (59 persen) serta panjang garis pantai mencapai kurang lebih 2.999,54 Km2. Kondisi geografis ini bukan sekedar angka statistik melainkan representasi potensi ekonomi yang dapat dioptimalkan produktivitasnya terutama dari sisi kelautan. Ekonomi biru menekankan pada pemanfaatan sumber daya laut yang tidak hanya produktif secara ekonomi namun juga menjaga integritas ekosistem dan memastikan distribusi manfaat yang berkeadilan. Ekonomi biru merupakan salah satu dari delapan transformasi ekonomi utama pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, RPJPD Provinsi NTB 2025-2045 serta RPJMD Provinsi NTB 2025-2029.

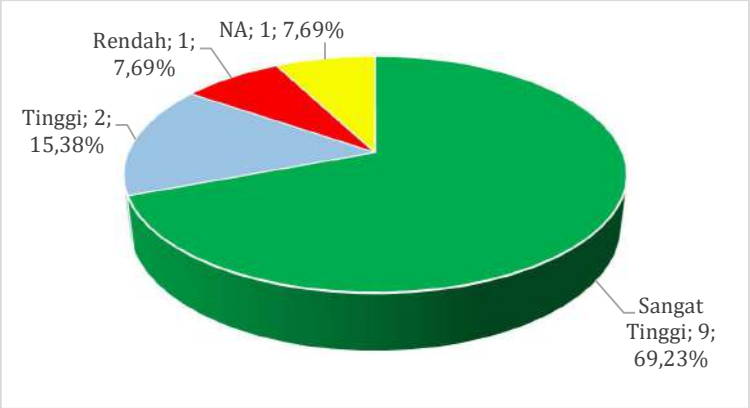
Indeks Ekonomi Biru Indonesia atau Indonesia Blue Economy Index (IBEI) berfungsi sebagai alat pengukuran komprehensif dan panduan kebijakan yang mengevaluasi perkembangan ekonomi biru melalui tiga pilar utama yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial. Indeks Ekonomi Biru Provinsi NTB sampai saat ini telah mencapai 50,73 poin. Capaian ini lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi NTT dan Bali. Capaian ini didukung oleh pencapaian pada indeks pilar lingkungan sebesar 47,43 poin terutama pada subpilar energi terbarukan yang terus meningkat dan indeks pilar sosial sebesar 51,14 poin terutama pada subpilar Pendidikan dan kesehatan yang meningkat cukup signifikan sedangkan indeks pilar ekonomi baru mencapai 16,91 poin yang dipengaruhi belum optimalnya pada subpilar perikanan tangkap dan budidaya, industri berbasis kelautan serta perdagangan, transport dan logistik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja sasaran pokok pembangunan daerah tahun 2025, terlihat bahwa mayoritas indikator menunjukkan capaian yang sangat baik. Hal ini tercermin dari dominasi kategori berkinerja sangat tinggi yang mencapai sekitar 69,23 persen dari total indikator yang diukur. Sementara itu, sebagian kecil indikator berada pada kategori tinggi (15,38 persen), serta masing-masing 7,69 persen berada pada kategori rendah dan tidak tersedia (NA). Komposisi ini menunjukkan bahwa secara umum kinerja pembangunan daerah telah berjalan dengan efektif dan memberikan hasil yang optimal.

Indikator-indikator yang masuk dalam kategori berkinerja sangat tinggi mencakup aspek yang cukup luas, mulai dari dimensi sosial seperti tingkat kemiskinan, rasio gini, indeks modal manusia, dan tingkat pengangguran terbuka; dimensi lingkungan seperti penurunan intensitas emisi gas rumah kaca dan indeks kualitas lingkungan hidup; hingga dimensi ekonomi dan daya saing seperti PDRB per kapita, kontribusi PDRB terhadap nasional, kontribusi industri pengolahan, indeks inovasi daerah, indeks daya saing daerah, serta indeks ekonomi biru Indonesia. Capaian ini menunjukkan bahwa pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada pertumbuhan ekonomi semata, tetapi juga telah memperhatikan aspek pemerataan, kualitas sumber daya manusia, serta keberlanjutan lingkungan.

Secara keseluruhan, kinerja pembangunan daerah tahun 2025 dapat disimpulkan berada pada kondisi yang sangat positif, dengan fondasi yang cukup kuat untuk mendorong pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan ke depan. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa indikator yang perlu mendapat perhatian lebih, khususnya yang berada pada kategori tinggi dan rendah, agar dapat ditingkatkan secara optimal. Upaya perbaikan yang lebih terarah, sinergis, dan berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan bahwa seluruh indikator pembangunan dapat mencapai kinerja yang merata dan semakin berkualitas di masa yang akan datang.

Grafik 2. 10 Kategori Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Pokok Pembangunan Daerah Tahun 2025 (Jumlah Indikator: 13)



Sumber : Bappeda NTB, 2026 (diolah)

2.1.2 Evaluasi Terhadap Capaian Tujuan Dan Sasaran Strategis Daerah Tahun 2025 Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2025 menandai fase awal yang sangat strategis, karena merupakan tahun pertama implementasi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB Tahun 2025–2045 sekaligus Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025–2029. Momentum ini menjadi titik awal dalam meletakkan fondasi arah pembangunan jangka panjang daerah yang lebih terarah, terukur, dan berkelanjutan. Pelaksanaan pembangunan tersebut juga telah diselaraskan melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 16 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2025.

Dalam rangka memastikan pencapaian tujuan pembangunan daerah secara optimal, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan tujuh prioritas pembangunan daerah tahun 2025 yang menjadi fokus utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Penetapan prioritas ini merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan, sekaligus mengoptimalkan potensi daerah yang dimiliki. Melalui prioritas-prioritas tersebut, diharapkan pembangunan tidak hanya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperkuat daya saing daerah, serta menjaga keberlanjutan lingkungan secara seimbang.

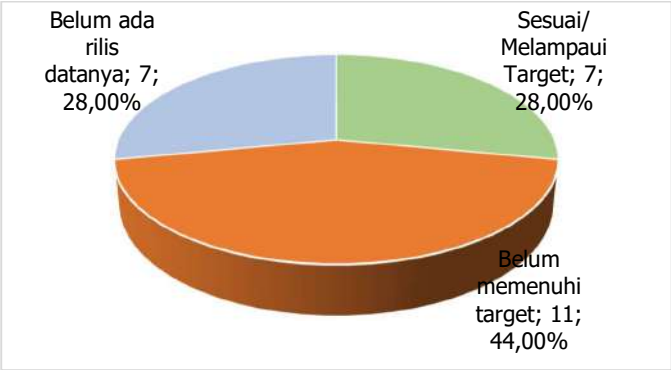
Ketujuh prioritas pembangunan daerah tersebut menjadi pedoman bagi seluruh perangkat daerah dalam menyusun dan melaksanakan program kerja, sehingga tercipta sinergi dan keterpaduan pembangunan lintas sektor dan wilayah. Dengan demikian, arah pembangunan Provinsi NTB pada tahun 2025 diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta memperkuat fondasi menuju visi pembangunan jangka panjang daerah. Terdapat 7 (tujuh) prioritas daerah pembangunan daerah tahun 2025 sebagai berikut:

1. Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif, dengan tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya sumber daya manusia yang berkarakter unggul, sehat, produktif, dan kompetitif. sedangkan sasaran strategisnya yaitu (a) Meningkatnya akses dan layanan pendidikan berkualitas yang merata di NTB; (b) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; dan (c) Meningkatnya penguatan ketahanan dan keharmonisan keluarga, serta kesetaraan gender.
2. Transformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan, melalui 2 tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya peningkatan produktifitas dan daya saing ekonomi daerah, dan Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat. Sedangkan sasaran strategisnya yaitu (a) Meningkatnya produktivitas UMKM, Koperasi, dan nilai tambah perdagangan; (b) Meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya tingkat pengangguran; (c) Meningkatnya ketersediaan akses keuangan; (d) Meningkatnya taraf hidup masyarakat; (e) Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan; (f) Meningkatnya pemerataan pembangunan di wilayah pedesaan; dan (g) Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi.
3. Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan, dengan tujuan pembangunan Terwujudnya pembangunan ekosistem industri komoditi unggulan daerah yang berkelanjutan. Adapun sasaran strategisnya yaitu (a) Meningkatnya kontribusi industri agromaritim; dan (b) Meningkatnya produktivitas sektor agromaritim (pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, dan kehutanan).
4. Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi, dengan 3 tujuan pembangunan yaitu (a) Terwujudnya pariwisata NTB yang berkualitas dan industri ekonomi kreatif, (b) Terwujudnya pengembangan kebudayaan daerah dan ketahanan sosial budaya, dan (c) Terwujudnya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga. Sedangkan sasaran strategisnya yaitu (a) Meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif; (b) Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya; dan (c) Meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga
5. Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim, dengan 3 tujuan pembangunan yaitu (a) Terwujudnya peningkatan resiliensi terhadap bencana; (b) Terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan; dan (c) Terwujudnya investasi berkelanjutan.
6. Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan, dengan tujuan yaitu Terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah yang berwawasan lingkungan, dan Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan. Adapun sasaran strategisnya yaitu Meningkatnya pembangunan infrastruktur dan konektifitas antar wilayah yang terintegrasi, dan Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang
7. Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif, dengan tujuan pembangunan yaitu Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih dan inovatif serta kepemimpinan daerah yang kolaboratif. Adapun sasaran strategisnya yaitu (a) Meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah daerah; (b) Meningkatnya penegakan hukum yang adil dan terpeliharanya stabilitas keamanan

untuk mendukung demokrasi yang berkualitas; dan (c) Meningkatnya keunggulan riset dan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah.

Seluruh indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian prioritas daerah, diukur melalui pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah Tahun 2025. Capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah NTB tahun 2025 dapat disajikan sebagai berikut:

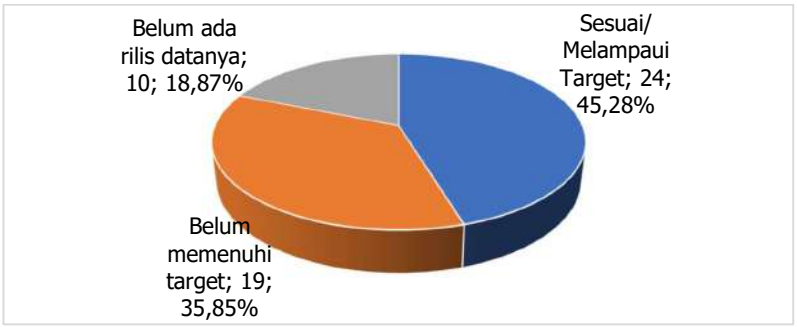
Grafik 2. 11 Kategori Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Tujuan Pembangunan Tahun 2025 (Jumlah Indikator: 25)



Sumber : Bappeda NTB, 2026 (diolah)

Berdasarkan tingkat ketercapaian indikator kinerja tujuan, dari 25 indikator kinerja, sebanyak 7 indikator atau 28,00 persen telah sesuai bahkan memenuhi target dan 11 indikator atau 44,00 persen belum memenuhi target, sedangkan 7 indikator lainnya belum ada rilis data dari lembaga terkait. Indikator yang sesuai bahkan melampaui target yaitu Tingkat Inflasi, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku, Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang

Grafik 2. 12 Kategori Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Pembangunan Tahun 2025 (Jumlah Indikator: 53)



Sumber : Bappeda NTB, 2026 (diolah)

Sementara itu, berdasarkan tingkat ketercapaian indikator kinerja sasaran strategis pembangunan daerah, dari 53 indikator kinerja, sebanyak 24 indikator atau 45,28 persen telah sesuai dan bahkan melampaui target dan 19 indikator atau 35,85 persen belum

memenuhi target, dan sebanyak 10 indikator belum tersedia datanya karena belum ada rilis dari Lembaga terkait.. Indikator kinerja yang telah sesuai bahkan melampaui target yaitu Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa, Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik, Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan, Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja, Reformasi Birokrasi General, Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun, Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif, Rasio Konektivitas, Rasio kewirausahaan Daerah, Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional, Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim, Persentase Kebijakan Berbasis Bukti, Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah, Nilai Realisasi Investasi, Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB, Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara , Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU), Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga), Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), Indeks Kesejahteraan Sosial, dan Indeks Desa

Adapun indikator kinerja sasaran strategis pembangunan daerah yang belum memenuhi target yaitu Usia Harapan Hidup (UHH), Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda, Reformasi Birokrasi Tematik, Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB, Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum, Rasio Kapasitas Fiskal Daerah, Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan, Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah, Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang, Konsumsi Listrik per kapita, Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi, Intensitas energi primer, Inklusi Keuangan, Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi, Indeks Ketahanan Pangan, Indeks Ketahanan Daerah, Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI), Harapan Lama Sekolah

Tabel 2. 6 Capaian Tujuan dan Sasaran Periode Tahun 2025 RPJMD NTB Tahun 2025-2029

PRIORITAS DAERAH/ TUJUAN/ SASARAN		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)		*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Prioritas Daerah ke-1: Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif								
Tujuan 1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif**	**1**	**Indeks Modal Manusia (IMM)**	**Indeks**	**0,54 (2023)**	**0.56**	**NA**	**NA**
		2	**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	**Indeks**	**65.51**	**66.71**	**63.70**	**95.49**
Sasaran 1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	7.87	8,6-8,63	8.87	102.78
		2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.98	14,1-14,13	13.99	99.22
		3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9.44	10.02	11.63	116.07
		4	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					
			a) Literasi Membaca	%	NA	10	NA	NA
			b) Numerasi	%	NA	0,00-10,00	NA	NA
		5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					
			a) Literasi Membaca	%	NA	26,24-28,74	NA	NA
			b) Numerasi	%	NA	22,68-25,18	NA	NA
Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72.25	72.92	72.60	99.56

PRIORITAS DAERAH/ TUJUAN/ SASARAN		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)		*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	29.8	21.7	13.39	138.29
Sasaran 3	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.53	0.517	0.515	100.39
		2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	60.02	61.70	63.70	103.24
Prioritas Daerah ke-2: Transformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan								
Tujuan 2	**Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah**	**1**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi :**					
		1a	**- Dengan Tambang**	**%**	**5.30**	**6.00**	**3.22**	**53.67**
		1b	**- NonTambang**	**%**	**3.87**	**6,00 - 6,50**	**8.33**	**128.15**
		2	**Kontribusi PDRB Provinsi**	**%**	**0.83**	**0.84**	**0.82**	**97.16**
Sasaran 4	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	1	Rasio kewirausahaan Daerah	%	0.12	2.37	10.03	423.40
		2	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0.95	0.97	0.93	95.97
		3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14.20	14.27	14.67	102.80
Tujuan 3	**Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat**	**1**	**PDRB Per Kapita**	**Juta Rupiah**	**32.28**	**35.80**	**33.67**	**94.05**
Sasaran 5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/ Tenaga Kerja	35,182.00	35,408.24	36,010.28	101.70
		2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.73	2,19-2,79	3.05	90.68
Sasaran 6	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	1	Inklusi Keuangan	%	NA	88.70	80.51	90.77
Tujuan 4	**Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali**	**1a**	**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**11.91**	**11,68-12,18**	**11.38**	**102.57**
		1b	**Tingkat Kemiskinan Ekstrem NTB**	**%**	**2.04**	**1.64**	**0.40**	**175.61**

PRIORITAS DAERAH/ TUJUAN/ SASARAN		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)		*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		2	**Rasio Gini**	**Poin**	**0.364**	**0,369-0,373**	**0.364**	**101.36**
		3	**Tingkat Inflasi**	**%**	**1,28**	**3-3,7**	**3.01**	**100.00**
Sasaran 7	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	NA	46.00	49.21	106.98
Sasaran 8	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.44	78.8322	74.70	94.76
Sasaran 9	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	1	Indeks Desa	(%)	77.08	77.88	78.57	100.89
Sasaran 10	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	NA	7.30	16.21	-22.05
Prioritas Daerah ke-3: Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan								
Tujuan 5	**Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan**	**1**	**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan**	**%**	**3.87**	**4.21**	**6.69**	**158.91**
Sasaran 11	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	1	Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	%	5.30	5,3 - 6,4	9.80	153.13
Sasaran 12	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	1	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1.54	3.20	5.03	157.19
Prioritas Daerah ke-4: Transformasi pariwisata								
Tujuan 6	**Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif**	**1**	**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku**	**%**	**11.45**	**11.64**	**11.75**	**100.96**
		2	**Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional**	**%**	**NA**	**0.39**	**NA**	**NA**
Sasaran 13	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349,447	382,813	509,171	133.01
		2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.75	2.03	1.81	89.16
		3	Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	%	3.72	3.76	4.33	115.25

PRIORITAS DAERAH/ TUJUAN/ SASARAN		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)		*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Tujuan 7	**Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya**	**1**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	**Indeks**	**57,37 (2023)**	**58,64-58,78**	**NA**	**NA**
Sasaran 14	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	1	Indeks budaya literasi	Indeks	(2023) 61.20	64.42	NA	NA
		2	Indeks ekspresi budaya	Indeks	39.74 (2023)	44.48	NA	NA
		3	Indeks warisan budaya	Indeks	48.37 (2023)	50.17	NA	NA
		4	Indeks ekonomi budaya	Indeks	41.92 (2023)	44.26	NA	NA
Tujuan 8	**Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga**	**1**	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**	**Indeks**	**53,67 (2023)**	**53.94**	**55.50**	**102.90**
		2	**Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)**	**Indeks**	**0.345**	**0.346**	**NA**	**NA**
Sasaran 15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%	69.68	70.18	69.97	99.70
		2	Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)	(43 medali)	9,3 (47 medali)	23,40 (58 medali)	251.61
		3	Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa	%	100	100	100	100
Prioritas Daerah ke-6: Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan								
Tujuan 9	**Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana**	**1**	**Indeks Risiko Bencana (IRB)**	**Indeks**	**113.64**	**135.41**	**156.02**	**84.78**
Sasaran 16	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.56	0.59	0.55	93.22
Tujuan 10	**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan**	**1**	**Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Indeks**	**NA**	**0.536**	**NA**	**NA**
		2	**Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**	**%**	**NA**	**15.31**	**4.40**	**28.74**
Sasaran 17	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75.78	76.19	77.40	101.59

PRIORITAS DAERAH/ TUJUAN/ SASARAN		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)		*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
Sasaran 18	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks	0.327	0.331	0.331	100.00
		2	Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik	%	0.05	0.10	0.10	100.00
Sasaran 19	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan	1	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	192.23	123.53	64.26
		2	Konsumsi Listrik per kapita	kWh	709.00	751.00	747.74	99.57
Tujuan 11	**Terwujudnya Investasi Berkelanjutan**	**1**	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**% PDRB**	**31.8**	**36.9**	**34.31**	**92.98**
Sasaran 20	Meningkatnya Realisasi Investasi	1	Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	54.55	61.09	61.10	100.02
Prioritas Daerah ke-5: Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim								
Tujuan 12	**Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan**	**1**	**Indeks Kemantapan Infrastruktur**	**Indeks**	**74.96**	**76.35**	**74.90**	**98.11**
Sasaran 21	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	75.83	76.21	70.12	92.01
		2	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	67.74	71,68-71,7	71.49	99.73
		3	Rasio Konektivitas	Rasio	0.82	0.83	0.83	100.12
Tujuan 13	**Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan**		**Persentase capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang**	**%**	**62.17**	**63.05**	**62.17**	**98.60**
Sasaran 22	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang		Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang	%	83.13	83.38	83.13	99.70
Prioritas Daerah ke-7: Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif								
Tujuan 14	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif**	**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**Indeks (Kategori)**	**77,99 (BB)**	**78,77 (BB)**	**77.46**	**98.34**
		2	**Indeks Ketahanan Nasional**	**Indeks**	**3.01**	**3.03**	**NA**	**NA**

PRIORITAS DAERAH/ TUJUAN/ SASARAN		Indikator Kinerja		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
						Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)		*(2)*		*(3)*	*(4)*	*(5)*	*(6)*	*(7)*
		3	**Indeks Inovasi Daerah**	**Indeks**	**63.40**	**76.50**	**73.25**	**95.75**
Sasaran 23	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1a	Reformasi Birokrasi General	Skor	68.8	69.49	70.50	101.46
		1b	Reformasi Birokrasi Tematik	Skor	9.19	9.28	6.96	74.98
		2	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	1.241	1.100	0.598	54.36
		3	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	91.47	91.50	87.39	95.51
Sasaran 24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76.37	75,37-78,63	75.27	99.87
		2	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	NA	65.00	59.00	90.77
		3	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	49.76	75.00	83.08	110.77
Sasaran 25	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	NA	50	60	120.00
		2	Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah	%	94.63	95.58	100.00	104.63

Sumber : Bappeda NTB, 2026 (diolah)

Keterangan:

NA = Data belum tersedia/rilis

Keberhasilan dalam mewujudkan target-target pembangunan daerah pada tahun 2025, didukung oleh pelaksanaan program prioritas/program unggulan daerah. Dalam RPJMD 2025-2029 sebagaimana telah dijabarkan ke dalam Perubahan RKPD Provinsi NTB tahun 2025, terdapat 10 program unggulan yaitu NTB SEHAT DAN CERDAS, DESA BERDAYA, NTB INKLUSIF, NTB AGRO MARITIM, NTB PARIWISATA BERKUALITAS, E-MANIA (EKRAF MENDUNIA), NTB TERAMPIL DAN TANGKAS, NTB LESTARI BERKELANJUTAN, NTB GOOD and SMART GOVERNANCE, dan NTB CONNECTED. Deskripsi pelaksanaan Program Unggulan tersebut pada tahun 2025 dapat diuraikan sebagai berikut:

1. NTB SEHAT DAN CERDAS

Program Unggulan NTB Sehat dan Cerdas dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk memperkuat fondasi pelayanan dasar bidang kesehatan dan pendidikan, memastikan kemudahan akses dan peningkatan kualitas pelayanan dengan perbaikan sarana prasarana serta kualitas SDM pengelola kesehatan dan pendidikan, pengingkatan kualitas pelayanan Rumah Sakit Provinsi, Membangun dua rumah sakit rujukan utama (*Mega Hospital*) masing-masing di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, dan mengembangkan Telemedicine yang menghubungkan rumah sakit rujukan utama dengan seluruh Puskesmas di NTB.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB Sehat dan Cerdas diantaranya sebagai berikut:

a. Optimalisasi Layanan Kesehatan antara lain melalui :
   - Pengembangan layanan rumah sakit, seperti peningkatan kelas RS HL Manambai Abdulkadir dari kelas C menjadi kelas B, Perubahan status RS Jiwa Mutiara Sukma menjadi RS Mutiara Sukma dengan pengembangan layanan selain kesehatan jiwa;
   - Penguatan akreditasi rumah sakit dan puskesmas, dengan melakukan pendampingan, pembinaan dan pemantauan.
   - Penguatan layanan *telemedicine* / Layanan medis terpercaya yang dapat mewujudkan akses kesehatan terjangkau secara online melalui pembinaan dan pendampingan rumah sakit, puskesmas, klinik dan puskesmas pembantu.
   - Peningkatan cakupan dan keaktifan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
b. Memperkuat strategi penanganan stunting dengan pendekatan promotif dan preventif yang mencakup seluruh siklus hidup. Intervensi tidak hanya menyasar balita, tetapi dimulai sejak remaja putri sebagai calon ibu, ibu hamil, ibu menyusui, hingga anak usia sekolah.melalui Aksi Bergizi di sekolah yang menyasar remaja putri untuk mencegah kekurangan gizi sejak dini. Program ini tidak hanya berisi edukasi, tetapi juga intervensi gizi, penguatan pengetahuan, sikap, dan perilaku hidup sehat. Program Makan Bergizi Gratis juga diiriskan untuk mendukung pemenuhan gizi anak dan remaja. Selain itu, edukasi gizi diperkuat hingga ke tingkat keluarga dengan memanfaatkan jejaring Posyandu yang saat ini berjumlah sekitar 7.800 unit dengan lebih dari 41 ribu kader di seluruh NTB. Jejaring ini menjadi kekuatan utama dalam pemantauan pertumbuhan balita, penyebaran informasi, serta deteksi dini risiko stunting.

c. Memperkuat sistem rujukan bagi balita yang membutuhkan penanganan lanjutan agar intervensi yang diberikan sesuai standar layanan kesehatan
d. Mengintegrasikan program untuk anak-anak, termasuk inisiatif gizi (MBG/Makanan Bergizi Gratis) agar anak sehat dan cerdas, mendukung Program Strategis Nasional
e. Peningkatan cakupan penemuan penderita TB dan keberhasilan pengobatan penderita TB melalui active case finding (ACF) dan skrining TBC di daerah-daerah berisiko tinggi. Investigasi kontak juga dilakukan pada kasus indeks dengan melibatkan kader kesehatan dan penemuan aktif dari fasyankes swasta yang terlibat dalam kegiatan DPPM (distric public private mix). Untuk pencegahan, sudah dilakukan pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) kepada orang berisiko seperti pada Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA) dan anak yang kontak serumah dengan pasien TB terkonfirmasi bakteriologis.
f. Peningkatan akses pendidikan pada jenjang SMA, SMK, dan SLB
g. Pendataan Anak Tidak Sekolah (ATS)
h. Penangan DO SMA melalui SMA Terbuka
i. Peningkatan Mutu melalui sertifikasi SP
j. Pengadaan Perlengkapan Peserta didik siswa miskin pada jenjang SMA, SMK, dan SBL
k. Pemberian makanan dan minuman ke peserta didik SLB yang tinggal d asrama

2. DESA BERDAYA

Program Unggulan DESA BERDAYA dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk penguatan pembangunan desa melalui dukungan bantuan teknis, bantuan pendampingan, bantuan keuangan dan bantuan sosial untuk memperkuat fondasi pembangunan desa/ kelurahan dan memastikan agar potensi sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, layanan dasar dan tata kelola pemerintahan desa terkelola dengan baik, modal sosial terjaga, ketahanan pangan terjamin dan jumlah angka kemiskinan berkurang.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi Desa Berdaya diantaranya sebagai berikut:

a. Penetapan regulasi untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam Program Desa Berdaya melalui Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2025 Tentang Desa Berdaya;
b. Penetapan Desa Berdaya Transformatif sebanyak 40 Desa sesuai dengan Surat Kepetusan Gubernur NTB Nomor: 100.3.3.1-50/Tahun 2025 Tentang Penetapan Desa Berdaya Transformatif Provinsi NTB Tahun 2026
c. Penetapan Lokasi Prioritas Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Provinsi NTB Tahun 2025 sebanyak 106 Desa berdasarkan Surat Kepetusan Gubernur NTB Nomor: 100.3.3.1-569/Tahun 2025 Tentang Lokasi Prioritas Pelaksanaan Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrim Provinsi NTB Tahun 2025
d. Perekrutan Tenaga Pedamping Desa yang tersebar 40 Desa Berdaya

3. NTB INKLUSIF

Program Unggulan NTB INKLUSIF dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk memperkuat fondasi pembangunan sistem perlindungan social dengan mengedepankan kesetaraan dan keadilan yang proporsional, serta memastikan NTB

menjadi "rumah bersama" untuk semuanya sehingga terwujud kohesi sosial yang kuat antar lapisan dan kelompok masyarakat.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB Inklusif diantaranya sebagai berikut:

a. Melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tematik Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial (GEDSI) untuk mendorong pengarusutamaan isu-isu GEDSI ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah, yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2026.
b. Penyelenggaraan rehabilitasi sosial dalam panti bagi disabilitas terlantar, anak terlantar, disabilitas terlantar dan gelandangan pengenis.
c. Pemenuhan kebutuhan spesifik kelompok rentan ketika terjadi bencana
d. Pemberdayaan masyarakat rentan seperti perempuan, remaja dan disabilitas melalui pelatihan keterampilan usaha dan pemberian Toolkit atau alat usaha.

4. NTB AGRO MARITIM

Program Unggulan NTB AGRO MARITIM dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk mengurangi angka kemiskinan dan membuka sebanyak mungkin kesempatan kerja baru melalui pembangunan ekosistem yang kuat bagi industrialisasi berbasis pertanian, peternakan dan kelautan perikanan, serta menjadikan NTB sebagai Kawasan Industri Agromaritim yang tangguh, inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB Agro Maritim diantaranya sebagai berikut:

a. Penyusunan Roadmap Industri Agromaritim NTB 2025–2029 sebagai pedoman strategis pembangunan industri daerah berbasis potensi unggulan daerah serta sebagai arah pengembangan industri hulu hingga hilir yang terintegrasi.
b. Memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pelaku Industri Kecil dan Menengah (IKM) antara lain Pelatihan Proses Produksi Primer dan Sekunder Olahan Tembakau, Bimtek Pembuatan Olahan Kelapa dan Turunannya, Bimtek Pengolahan Bambu, Industri Turunan Tembakau, Pelatihan Tenun dan Desain bagi IKM Tenun, Bimtek Manajemen Pengelolaan Sentra Industri Hasil Tembakau (SIHT)/APHT, serta Bimtek Pemantapan Mesin Kemasan.
c. Melaksanakan fasilitasi sertifikasi halal bagi produk IKM, serta pendampingan peningkatan kualitas kemasan produk dan promosi produk industri daerah untuk memperkuat daya saing produk lokal di pasar regional maupun nasional.
d. Penguatan dan revitalisasi Rumah Produksi Balai Kemasan Produk Daerah NTB sebagai pusat layanan kemasan, desain produk, standarisasi mutu, serta inkubasi pengembangan produk IKM agar memiliki nilai tambah dan daya saing pasar.
e. Pengembangan sentra-sentra industri berbasis komoditas unggulan daerah, seperti industri olahan tembakau, kelapa, bambu, rumput laut, hasil perikanan, dan komoditas agro lainnya yang memiliki potensi besar dalam mendukung industrialisasi daerah.
f. Fasilitasi penggunaan teknologi dan mesin produksi bagi IKM, termasuk bantuan dan pelatihan penggunaan mesin pengolahan dan pengemasan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi proses produksi.

g. Penguatan jejaring kemitraan industri dan promosi produk industri daerah, melalui pameran industri, promosi produk unggulan daerah, serta pengembangan akses pasar bagi IKM NTB di tingkat nasional maupun internasional.
h. Penguatan ekosistem inovasi industri dan hilirisasi komoditas unggulan daerah, melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas industri guna meningkatkan nilai tambah produk agromaritim NTB.
i. Penyusunan dan penguatan kebijakan pengembangan kawasan dan sentra industri baru serta Perencanaan Pembangunan Industri Kab/ Kota berbasis potensi lokal, sebagai upaya mendorong pemerataan pembangunan industri serta menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah

5. NTB PARIWISATA BERKUALITAS

Program Unggulan NTB Pariwisata Berkualitas dalam periode 2025–2030 diarahkan untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan berkualitas, yaitu wisatawan yang memiliki lama tinggal (length of stay) lebih panjang dan tingkat pengeluaran (spending) yang lebih tinggi, dengan tetap menjaga biaya sosial dan lingkungan yang rendah (low social cost) bagi masyarakat dan kawasan destinasi. Pendekatan ini sejalan dengan arah kebijakan pembangunan pariwisata daerah yang menekankan konsep quality tourism, yaitu pembangunan pariwisata yang berorientasi pada nilai tambah ekonomi, keberlanjutan lingkungan, serta pemerataan manfaat bagi masyarakat.

Dalam kerangka tersebut, strategi pembangunan pariwisata NTB diarahkan melalui beberapa pendekatan utama, antara lain penguatan segmen MICE (Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition) sebagai pasar wisata bernilai ekonomi tinggi, pengembangan segmen wisata minat khusus seperti Muslim-Friendly Tourism, serta pengembangan kawasan wisata tersegmentasi sesuai dengan karakteristik pasar wisatawan. Selain itu, pemerintah daerah juga terus mendorong pengembangan destinasi wisata baru di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa, sekaligus memperkuat aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi pariwisata guna memperluas sebaran kunjungan wisatawan serta meningkatkan daya saing pariwisata daerah.

Dalam rangka mewujudkan target tersebut, pada tahun 2025 telah melaksanakan berbagai kegiatan sebagai bagian dari implementasi Program NTB Pariwisata Berkualitas, antara lain sebagai berikut:

a. Penyusunan Pedoman Implementasi Pariwisata Berkualitas
Penyusunan pedoman implementasi pariwisata berkualitas sebagai instrumen evaluasi dan pengukuran kualitas pariwisata daerah, yang mencakup aspek pengelolaan destinasi, kualitas layanan, keberlanjutan lingkungan, serta dampak ekonomi bagi masyarakat lokal. Pedoman ini menjadi acuan dalam memastikan bahwa pengembangan pariwisata NTB berjalan sesuai dengan prinsip sustainable dan quality tourism.
b. Pemanfaatan Kawasan Mandalika untuk Sport Tourism Internasional
Optimalisasi pemanfaatan Sirkuit Mandalika sebagai pusat kegiatan sport tourism internasional yang mampu meningkatkan citra destinasi NTB di tingkat global. Penyelenggaraan berbagai event olahraga internasional di kawasan ini memberikan dampak ekonomi langsung terhadap masyarakat, terutama pada sektor UMKM, transportasi lokal, kuliner, serta akomodasi penginapan.

c. Peningkatan Konektivitas Transportasi Udara
   Peningkatan aksesibilitas pariwisata melalui penambahan rute penerbangan baru, antara lain Labuan Bajo – BIZAM, Banyuwangi – Lombok, serta Lombok – Malang, serta inisiasi pembukaan rute internasional seperti Lombok – Darwin (Australia) dan Lombok – Bangkok (Thailand). Peningkatan konektivitas ini diharapkan dapat memperluas pasar wisatawan serta meningkatkan daya saing destinasi NTB di kawasan regional.
d. Inisiasi Pengembangan Transportasi Seaplane
   Pengembangan konektivitas wisata melalui inisiasi transportasi seaplane menuju destinasi wisata unggulan yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat maupun udara. Dalam mendukung rencana tersebut, Bendungan Batujai dipersiapkan sebagai salah satu lokasi pelabuhan seaplane (water aerodrome) yang dapat menghubungkan berbagai destinasi wisata di NTB secara lebih cepat dan efisien.
e. Peningkatan Kompetensi SDM Pariwisata
   Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata melalui berbagai program pelatihan dan sertifikasi kompetensi, serta penerapan standar CHSE (Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Sustainability) pada hotel dan destinasi wisata guna menjamin kualitas layanan serta meningkatkan kepercayaan wisatawan.
f. Peningkatan Kualitas Destinasi Unggulan
   Peningkatan kualitas destinasi pariwisata melalui penataan kawasan, peningkatan amenitas, serta penguatan tata kelola destinasi pada beberapa kawasan strategis, antara lain Senggigi, kawasan tiga Gili (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air), kawasan Sembalun, kawasan Mandalika, serta kawasan Kota Mataram sebagai pusat layanan pariwisata.
g. Peningkatan Kualitas Penyelenggaraan Event Pariwisata
   Penyelenggaraan berbagai event pariwisata sebagai strategi peningkatan kunjungan wisatawan serta promosi destinasi NTB di tingkat nasional dan internasional. Pada tahun 2025, event yang dilaksanakan didominasi oleh sport tourism event, antara lain Senggigi Surfing Event, Selong Selo Event, Rinjani Thril Run, Sky Lancing Paragliding serta Merumatta Thrill Run. Selain itu, Dinas Pariwisata juga menyelenggarakan berbagai event budaya dan promosi destinasi, seperti Festival Bau Nyale, Khazanah Ramadan, Senggigi Festival, Museum Lombok Sumbawa Civilization, Lombok Sumbawa Festival, serta Live Cooking Event yang menampilkan kekayaan kuliner lokal NTB.
   Pelaksanaan berbagai event tersebut dilakukan melalui kolaborasi multipihak (pentahelix) antara pemerintah daerah, pelaku industri pariwisata, komunitas kreatif, media, serta sektor swasta. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan dampak yang lebih luas terhadap peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, peningkatan lama tinggal wisatawan, serta peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Secara keseluruhan, implementasi program NTB Pariwisata Berkualitas menunjukkan bahwa arah pembangunan pariwisata daerah tidak lagi hanya berorientasi pada kuantitas kunjungan wisatawan, tetapi lebih menekankan pada peningkatan kualitas pengalaman wisata, nilai tambah ekonomi, serta keberlanjutan lingkungan dan budaya lokal. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat posisi

NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

6. E-MANIA (EKRAF MENDUNIA)

Program Unggulan NTB E-Mania (Ekonomi Kreatif Mendunia) dalam periode 2025–2030 diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, inovatif, dan berkelanjutan guna mendorong pertumbuhan UMKM dan industri kreatif di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program ini memberikan ruang yang luas bagi generasi muda, komunitas kreatif, serta pelaku usaha lokal untuk berkreasi dan berinovasi dalam menghasilkan produk dan jasa kreatif yang berkualitas, kompetitif, serta mampu menembus pasar nasional maupun global.

Pengembangan ekonomi kreatif di NTB juga didorong untuk memperkuat posisi daerah sebagai bagian dari super hub pariwisata dan ekonomi kreatif kawasan Bali–Nusra, sebagaimana arah kebijakan pembangunan nasional dalam RPJMN 2025–2029. Dengan potensi budaya, kreativitas masyarakat, serta dukungan sektor pariwisata yang kuat, ekonomi kreatif diharapkan dapat menjadi mesin pertumbuhan ekonomi baru (new engine of growth) bagi daerah, sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi generasi muda.

Secara nasional terdapat 17 subsektor ekonomi kreatif, dengan beberapa subsektor prioritas yang relevan untuk dikembangkan di NTB, seperti kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, serta subsektor kreatif berbasis digital dan media. Pengembangan subsektor tersebut diarahkan untuk memperkuat rantai nilai ekonomi kreatif mulai dari proses kreasi, produksi, distribusi, konsumsi hingga konservasi, sehingga mampu menciptakan nilai tambah ekonomi yang berkelanjutan.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bagian dari implementasi Program NTB E-Mania (Ekraf Mendunia) antara lain sebagai berikut:

a. Penyusunan Kajian Pengembangan Ekonomi Kreatif Provinsi Nusa Tenggara Barat
   Penyusunan kajian pengembangan ekonomi kreatif dilakukan sebagai dasar dalam memetakan potensi dan sektor unggulan subsektor ekonomi kreatif di NTB, sehingga dapat menjadi acuan dalam perumusan kebijakan, program, serta strategi pengembangan ekonomi kreatif daerah secara lebih terarah dan berbasis data.
b. Validasi dan Verifikasi Data Pelaku Ekonomi Kreatif
   Dinas Pariwisata melakukan koordinasi dengan Dinas Pariwisata Kabupaten/Kota se-NTB untuk melakukan validasi dan verifikasi data pelaku ekonomi kreatif di seluruh wilayah NTB. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh basis data pelaku ekonomi kreatif yang akurat dan terintegrasi, sehingga dapat menjadi dasar dalam perumusan kebijakan pengembangan ekonomi kreatif daerah.
c. Penguatan Basis Data Pelaku Ekonomi Kreatif
   Penguatan data pelaku ekonomi kreatif dilakukan sebagai pondasi awal dalam peningkatan kelas UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, khususnya dalam mendorong pelaku usaha untuk memperoleh perlindungan hukum melalui Hak

Kekayaan Intelektual (HKI), peningkatan akses pembiayaan, serta pengembangan pasar.

d. Peningkatan Pemahaman Pelaku Ekonomi Kreatif terhadap Hak Kekayaan Intelektual
   Upaya peningkatan literasi pelaku ekonomi kreatif dilakukan melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan pendampingan mengenai pentingnya sertifikasi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atas produk atau jasa yang dihasilkan. Perlindungan HKI diharapkan dapat meningkatkan nilai ekonomi produk kreatif serta memperkuat identitas dan daya saing produk lokal di pasar nasional maupun global.
e. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang Kreatif
   Pemerintah daerah mendorong optimalisasi pemanfaatan ruang kreatif (creative space) melalui fasilitasi penyelenggaraan berbagai event kreatif bagi UMKM dan komunitas ekonomi kreatif, khususnya pada subsektor kriya, fesyen, kuliner, dan seni pertunjukan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperluas ruang ekspresi, memperkuat jejaring komunitas kreatif, serta meningkatkan eksposur produk kreatif NTB kepada masyarakat dan wisatawan.

Arah Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif NTB

Dalam rangka memperkuat implementasi Program NTB E-Mania (Ekraf Mendunia) pada periode mendatang, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat akan melaksanakan beberapa kebijakan strategis sebagai berikut:

a. Penguatan Data dan Informasi Ekonomi Kreatif (Ekraf Data)
   Pengembangan sistem basis data ekonomi kreatif yang terintegrasi sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, serta pengambilan keputusan pembangunan ekonomi kreatif berbasis data.
b. Penguatan Regulasi dan Kelembagaan Ekonomi Kreatif (Ekraf Bijak)
   Penguatan kebijakan daerah serta pengembangan kelembagaan ekonomi kreatif untuk menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pertumbuhan industri kreatif di NTB.
c. Pengembangan Talenta dan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif (Talenta Ekraf)
   Peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, inkubasi bisnis, mentoring, serta peningkatan kompetensi kewirausahaan bagi generasi muda dan komunitas kreatif.
d. Pengembangan Infrastruktur dan Ruang Kreatif (Infra Ekraf)
   Pengembangan dan optimalisasi ruang kreatif, creative hub, serta fasilitas produksi dan pemasaran produk kreatif untuk mendukung aktivitas komunitas dan pelaku usaha kreatif.
e. Penguatan Kolaborasi Ekosistem Ekonomi Kreatif (Sinergi Ekraf)
   Penguatan kolaborasi hexahelix antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, media, dan investor dalam pengembangan produk kreatif serta penguatan ekosistem ekonomi kreatif daerah.
f. Perluasan Pasar Produk Kreatif (Pasar Ekraf)
   Penguatan strategi pemasaran produk ekonomi kreatif melalui promosi digital, pameran, festival kreatif, serta integrasi produk ekonomi kreatif dengan sektor pariwisata.

g. Pengembangan Akses Pendanaan dan Investasi (Dana Ekraf) Fasilitasi akses pembiayaan bagi pelaku ekonomi kreatif melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, investor, serta program pembiayaan berbasis kewirausahaan kreatif.
h. Penguatan Ekosistem Kekayaan Intelektual (Ekraf Kaya) Peningkatan jumlah produk kreatif yang memiliki perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, sebagai upaya meningkatkan nilai tambah, perlindungan hukum, serta daya saing produk kreatif NTB di pasar global.

7. NTB TERAMPIL DAN TANGKAS

Program Unggulan NTB TERAMPIL DAN TANGKAS dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk memperkuat pondasi pembangunan sektor tenaga kerja dengan meningkatkan ketersediaan tenaga terampil, meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga terampil di dalam dan luar negeri, serta meningkatkan akses dan perlindungan bagi pekerja migran, serta meningkatkan prestasi olahraga kaum muda NTB, dan memastikan NTB sukses prestasi dan penyelenggaraan pada PON 2028.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB TERAMPIL DAN TANGKAS diantaranya sebagai berikut:

a. Tersusunnya Buku Roadmap Rencana Tenaga Kerja Daerah (RRTKD), sebagai dokumen perencanaan sistematis yang disusun pemerintah daerah untuk mengatur kebijakan, strategi, dan program ketenagakerjaan dalam jangka menengah
b. Pembangunan Aplikasi Sistem Informasi Ketenagakerjan (SIK)
c. Pembentukan Lembaga Sertifikasi Profesi Pihak Kedua (LSP P2)
d. peningkatan kualitas pelatihan vokasi, evaluasi dan penguatan koordinasi Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV)
e. Fasilitasi perekrutan magang jepang
f. Pendidikan dan pelatihan tenaga kerja berbasis kompetensi di BLK (skill Center)
g. Akreditasi Lembaga Pelatihan kerja
h. Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
i. Pelaksanaan *Business matching* (1. Mempertemukan pencari kerja dengan pemberi kerja untuk berdialog langsung dengan pemerintah dan memberikan masukan sebagai umpan balik dalam pengambilan keputusan dan 2. Mendorong peningkatan pelayanan dan jumlah penempatan tenaga kerja dalam rangka mengurangi pengangguran)
j. Pembinaan Hubungan Industrial
k. Pelaksanaan Job fair
l. Penempatan tenaga kerja melalui Antar Kerja Daerah (AKD), Antar Kerja Lokal (AKL) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)
m. Peningkatan Pengawasan Ketenagakerjaan Pada Perusahaan Strategis Nasional
n. Pemberian BPJS ketenagakerjaan untuk JKK dan JKM bagi pekerja baik dalam dan luar negeri.
o. Peningkatan Kompetensi pendidik SMA, SMK, dan SLB
p. Fasilitasi sertifikasi pendidik
q. Relisensi lembaga LSP- P1 di sekolah
r. Pembinaan kelembagaan SMK

8. NTB LESTARI BERKELANJUTAN

Program Unggulan NTB LESTARI DAN BERKELANJUTAN dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk memastikan terselenggaranya pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup dengan penguatan sektor kehutanan, pelestarian lingkungan di kawasan pesisir, meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi bencana dan pengarusutamaan pemanfaatan energi ramah lingkungan di berbagai sektor pembangunan.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB LESTARI DAN BERKELANJUTAN diantaranya sebagai berikut:

a. Pembinaan dan penguatan kapasitas kelompok Program Kampung Iklim (Proklim). Pembinaan tersebut bertujuan untuk menjaga keberlanjutan aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim, meningkatkan kualitas pelaporan kegiatan, serta memperkuat peran masyarakat dalam pengendalian perubahan iklim di tingkat lokal
b. Pendampingan sekolah adiwiyata. Sekolah Adiwiyata berperan aktif dalam pengendalian pencemaran air melalui penerapan program-program konservasi dan pengelolaan limbah cair berbasis partisipatif. Tujuan utamanya adalah mengurangi pemborosan air, mencegah pencemaran sumber air (tanah dan sungai), serta meningkatkan kesadaran warga sekolah untuk menghemat dan menjaga kebersihan air.
c. Pembinaan, Penilaian, dan Evaluasi PROPER. Pelaksanaan PROPER diharapkan dapat memperkuat pengendalian kualitas lingkungan khususnya terhadap kualitas air, serta penegakan hukum lingkungan.
d. Penerapan Kantor Ramah Lingkungan (Eco Office)
e. Pengendalian pencemaran udara melalui KLHS dilakukan dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan ke dalam Kebijakan, Rencana, dan/atau Program (KRP) pemerintah
f. Fasilitasi perizinan lingkungan sebagai upaya ini dilakukan sebagai instrumen preventif yang krusial untuk memastikan setiap aktivitas usaha/kegiatan di pesisir dan laut mematuhi standar lingkungan hidup. Perizinan ini mewajibkan pelaku usaha untuk mengelola limbah dan dampak sebelum operasional dimulai
g. Pengawasan terhadap pemenuhan komitmen perizinan lingkungan
h. Patroli pencegahan dan pengamanan hutan
i. Monitoring Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) dan Perizinan Berusaha Pemanfataan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu
j. Rehabilitasi hutan dan lahan
k. Mendorong kerjasama Pembangunan Rendah Karbon dengan *Low Carbon Development Initiative* - Bappenas yang ditandatangani sejak tahun 2023 dan mitra pembangunan lainnya dalam usaha penurunan emisi gas rumah kaca
l. Mendorong peningkatan bauran energi terbarukan yang sampai saat ini telah mencapai 25,07%.

9. NTB GOOD & SMART GOVERNANCE

Program Unggulan NTB GOOD & SMART GOVERNANCE dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk Reformasi Birokrasi Menuju Pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (good government) melalui pembangunan sistem karir yang meritokratis, memastikan pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), peningkatan transparansi serta efektifitas dalam pengelolaan asset dan sumberdaya Iainnya, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan

sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif, peningkatan kualitas pelayanan publik ke arah pelayanan publik yang prima serta transformasi digital secara gradual dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB GOOD & SMART GOVERNANCE diantaranya sebagai berikut:

a. Meningkatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk mendukung efisiensi pelayanan, melalui:
   1) Melakukan FGD Reviu Tata Kelola dan Manajemen SPBE
   2) Melakukan FGD Reviu Kebijakan Internal SPBE
   3) Penyusunan Turunan Kebijakan Internal SPBE
   4) Melaksanakan Audit TIK (Infrastruktur dan Aplikasi SPBE)
   5) Penyusunan Dokumen Manajemen Risiko SPBE
   6) Penyiapan integrasi layanan SPBE melalui Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)
b. Meningkatkan implementasi Kebijakan Arsitekrur SPBE, melalui:
   1) Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 31 Tahun 2024 Pasal 12 ayat (4) tentang Penyelenggaraan SPBE
   2) rapat koordinasi tetang perencanaan dan penganggaran SPBE secara terintegrasi
c. Mendorong integrasi tata kelola data perencanaan, keuangan, dan SDM untuk pembangunan berbasis bukti melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD), melalui:
   1) Asistensi laporan keuangan perangkat daerah
   2) Reviu laporan keuangan
   3) Penyusunan LKPD berbasis bukti yang memadai
d. Menerapkan sistem karier meritokrasi dan meningkatkan integritas ASN dengan menyelenggarakan Beauty Contest untuk menjaring jabatan administrator (eselon III), dan seleksi terbuka untuk jabatan tinggi pratama (eselon II)
e. Mempermudah akses layanan publik melalui platform digital (SPAN LAPOR), melalui:
   1) Melakukan Sosialisasi Keputusan Gubernur NTB Nomor: 047 - 299 Tahun 2024 tentang Rencana Aksi Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemprov NTB
   2) pembentukan Tim Pengelola Pengaduan Tingkat Provinsi NTB
   3) Melakukan Rakor Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Tahun 2025
   4) Melakukan Sosialisasi Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat
   5) Pemantauan dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan Lingkup Pemerintah Provinsi NTB
f. Meningkatkan pelayanan publik melalui:
   1) Melakukan Pemantauan Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) mandiri di Provinsi NTB
   2) Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) mandiri di Provinsi NTB
   3) Melaksanakan pendampingan proses pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) pada Perangkat Daerah yang ditetapkan secara nasional sebagai locus penilaian

4) Melaksanakan sosialisasi instrumen penilaian tingkat kepatuhan penyelenggara pelayanan public
5) Memetakan kepuasan masyarakat atas pelayanan publik melalui aplikasi SiMASKOT

g. Meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah melalui:
1) Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi evaluator Kementerian PAN RB untuk perbaikan implementasi SAKIP
2) Membentuk Tim Implementasi SAKIP Pemerintah Provinsi NTB
3) Pemanfataan aplikasi e-SAKIP dalam perencanaan pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja
4) *Focus Group Discussion* Praktik Baik Implementasi SAKIP dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan DIY.
5) Monitoring dan evaluasi implementasi SAKIP Perangkat Daerah

h. Meningkatkan keberhasilan pembangunan Zona Integritas melalui:
1) Menetapkan *pilot project* ZI dan tim penilai internal
2) Menindaklanjuti catatan dan rekomendasi evaluator untuk perbaikan implementasi pembangunan zona integritas
3) Melakukan asistensi Pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK WBBM)
4) Melakukan evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK WBBM

i. Meningkatkan maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) melalui:
1) Melaksanakan Evaluasi Manajemen Risiko Pemda dan OPD
2) Melaksanakan Reviu Manajemen Risiko Pemda dan OPD
3) Melaksanakan Pendampingan Penilaian Mandiri SPIP
4) Melaksanakan Penilaian Mandiri SPIP
5) Melaksanakan Penjaminan Kualitas SPIP

j. Mengawal Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI), melalui:
1) Penanganan pengaduan masyarakat
2) Monitoring dan evaluasi atas implementasi Monitoring Center for Prevention (MCP)
3) Monitoring dan Evaluasi Survei Penilaian Integritas (Melaksanakan sosialisasi SPI dan mengumpulkan data responden untuk dikirimkan ke KPK atau Tim surveyor)
4) Melaksanakan Koordinasi Pengaduan Masyarakat yang berindikasi korupsi

k. Meningkatkan kualitas kebijakan melalui:
1) Melakukan Identifikasi dan Analisis Peraturan Daerah
2) Melakukan Revisi Peraturan Daerah
3) Melakukan Evaluasi, Transparansi dan Partisipasi dalam rangka tercapainya Indeks Kualitas Kebijakan (IKK)
4) Meningkatkan reformasi hukum melalui penguatan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM, peningkatan kompetensi perancang perundang-undangan, pemetaan peraturan yang berpotensi untuk deregulasi.

l. Meningkatkan digitalisasi arsip, melalui:
1) Menetapkan Kebijakan Kearsipan
2) Menetapkan Kelembangaan pengelolaan Simpul Jaringan Kearsipan Nasional (SIKN)
3) Melakukan alih media arsip statis
4) Mengimplementasikan aplikasi SRIKANDI ke seluruh Proses Bisnis Kearsipan

5) Meningkatkan Kompetensi SDM Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaring Informasi Kearsipan Nasional (JIKN)

m. Meningkatkan pembangunan statistik, melalui:
   1) Penyusunan Metadata dan Instrumen Pengumpulan Data
   2) Rapat Forum Data: Perencanaan Data Tahun 2025
   3) Penyusunan Daftar Data dan Finalisasi Daftar Data Daerah
   4) Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Nusa Tenggara Barat Satu Data Tahun 2025

n. Meningkatkan tata kelola pengadaan, melalui:
   1) Pemenuhan Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) level proaktif pada variabel- variabel pendukung tingkat kematangan
   2) Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang/Jasa melalui Uji Kompetensi Perpindahan Jabatan berdasarkan Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa
   3) Meningkatkan Pemanfaatan Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dalam pelaksanaan pengadaaan Barang/Jasa
   4) Meningkatkan pemanfaatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa (PBJ)

o. Internalisasi implementasi Budaya Kerja ASN BerAKHLAK (Beroritentasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif).

10. NTB *CONNECTED*

Program Unggulan NTB *CONNECTED* dalam jangka waktu 2025-2030 diarahkan untuk percepatan pemantapan infrastruktur mendukung industrialisasi, pariwisata dan arus barang jasa, termasuk pembangunan jalan lintas NTB/ Trans-NTB (Lembar-Sape) dan peningkatan Pelabuhan Lembar, Badas, Bima serta Pembangunan pelabuhan khusus komoditi di Pulau Sumbawa, serta memastikan pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar lainnya yang mencakup air bersih, rumah layak huni, jaringan listrik dan telekomunikasi.

Pada tahun 2025, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai wujud implementasi NTB *CONNECTED* diantaranya sebagai berikut:

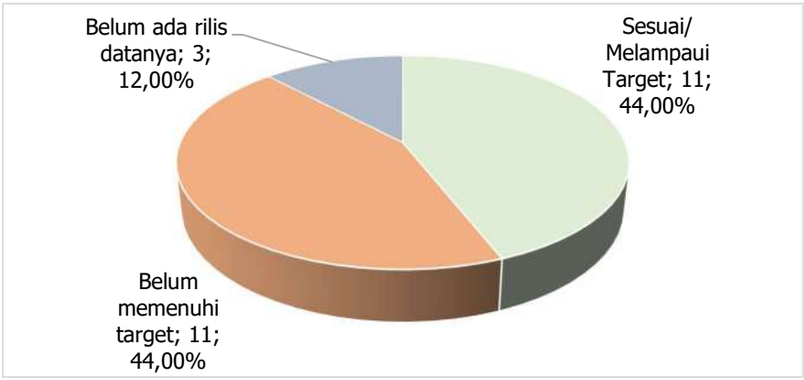
a. Melakukan Studi Kelayakan (*Feasibility Study*) jalan *Bypass Port to Port* (P2P) yang menghubungkan Pelabuhan Lembar (Lombok Barat) hingga Pelabuhan Kayangan (Lombok Timur). Proyek ini bertujuan utk meningkatkan konektivitas, mempercepat pertumbuhan ekonomi serta solusi mengatasi kepadatan lalu lintas di jalur tengah, dan mengurangi waktu tempuh menjadi 1 jam 45 menit - 2 jam.
b. Pembukaan tujuh rute penerbangan baru, yakni Banjarmasin, Palangkaraya, Labuan Bajo, Malang, Banyuwangi, Waingapu, dan Tambolaka, serta peningkatan Frekuensi Penerbangan ke Sumbawa ditingkatkan dari satu menjadi dua kali sehari, dan Bima dari dua menjadi tiga kali sehari.
c. Penguatan akses laut dengan membuka jalur kapal dari Bali ke Kuta Mandalika (NTB) hingga Labuan Bajo (NTT)
d. Peningkatan kemantapan jalan melalui penanganan Long Segmen Ruas Jalan Lenangguar-Lunyuk, Rekonstruksi Ruas Jalan Tanjung-Pohgading-Pringgabaya, serta Rekonstruksi Ruas Jalan SImpang Tano-Simpang Seteluk
e. Peningkatan kualitas layanan irigasi melalui rehabilitasi jaringan irigasi D.I. Maronggek Kompleks
f. Optimalisasi infrastruktur layanan persampahan di TPA regional kebon kongok

g. Pembangunan Rumah Layak Hun
h. Penyediaan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum sebagai Penunjang Kualitas Kawasan Permukiman
i. Penanganan Kumuh Kewenangan Provinsi pada Kawasan Permukiman.

2.1.3 Evaluasi Terhadap Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah didukung oleh pencapaian kinerja perangkat daerah. Kinerja ini diukur berdasarkan pencapaian indikator kinerja utama (IKU) yang telah ditentukan oleh masing-masing perangkat daerah berdasarkan cascading tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah. Pada tahun 2025, jumlah Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi NTB sebanyak 24 indikator. Sebanyak 15 indikator (62 persen) dengan kategori tingkat ketercapaian "sangat tinggi", 3 indikator (13 persen) dengan kategori tingkat ketercapaian "tinggi", 1 indikator (4 persen) dengan kategori tingkat ketercapaian "rendah", 1 indikator (4 persen) dengan kategori tingkat ketercapaian "sangat rendah", dan 4 indikator (17 persen) masih belum tersedia datanya *(Not Available)*.

Grafik 2. 13 Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025 (Jumlah Indikator : 24)



Sumber : Bappeda NTB, 2026 (data diolah)

Adapun rincian capaian kinerja dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi NTB tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1 Target dan Capaian Indikator Kinerja Utama Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54 (2023)	0.56	NA	NA
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.53	0.517	0.515	100.39
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi :					
	- Dengan Tambang	%	5.30	6.00	3.22	53.67

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Non Tambang	%	3.87	6,00 - 6,50	8.33	128.15
4	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.83	0.84	0.82	97.16
5	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.5	3.55	3.53	99.44
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32.28	35.80	33.67	94.05
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2.73	2,19-2,79	3.05	90.68
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	35,182.00	35,408.24	36,010.28	101.70
9	Inklusi Keuangan	%	NA	88.70	80.51	90.77
10	Tingkat Kemiskinan	%	11.91	11,68-12,18	11.38	102.57
11	Rasio Gini	Poin	0.364	0,369-0,373	0.364	101.36
12	Tingkat Inflasi	%	1,28	3-3,7	3.01	100.00
13	Indeks Desa	(%)	77.08	77.88	78.57	100.89
14	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.44	78.83	74.70	94.76
15	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3.87	4.21	6.69	158.91
16	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	NA	0.39	NA	NA
17	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349,447	382,813	509,171	133.01
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,37 (2023)	58,64-58,78	NA	NA
19	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	113.64	135.41	156.02	84.78
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75.78	76.19	77.40	101.59
21	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	NA	15.31	4.40	28.74
22	Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	54.55	61.09	61.10	100.02

No	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
23	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks (Kategori)	77,99 (BB)	78,77 (BB)	77.46	98.34
24	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63.4	76.50	73.25	95.75

Sumber : data diolah, 2026

Pada tahun 2025, terdapat 39 perangkat daerah dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak 158 indikator. Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja dengan rata-rata pencapaian sebesar 98,19 persen. Sementara itu, capaian kinerja setiap perangkat daerah pada tahun 2025 dapat disajikan dalam rekapitulasi capaian IKU sebagai berikut:

Tabel 2 Predikat Kinerja Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

NO	NAMA OPD	RATA-RATA CAPAIAN IKU OPD TAHUN 2025	PREDIIKAT KINERJA	HASIL PENILAIAN KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024	
				NILAI CAPAIAN	PREDIKAT KINERJA
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	105,18	ISTIMEWA	92,87	BAIK
2	DINAS KESEHATAN	181,45	ISTIMEWA	85,41	BAIK
3	KESBANGPOL	99,02	BAIK	89,12	BAIK
4	BPBD	92,77	BAIK	83,49	BAIK
5	BPKAD	101,35	ISTIMEWA	101,35	ISTIMEWA
6	BAPPENDA	101,79	ISTIMEWA	100,79	ISTIMEWA
7	BPSDM	90,20	BAIK	81,18	BAIK
8	PENGHUBUNG	101,05	ISTIMEWA	90,95	BAIK
9	BAPPEDA	94,58	BAIK	94,58	BAIK
10	BRIDA	111,80	ISTIMEWA	96,12	BAIK
11	ESDM	125,76	ISTIMEWA	94,16	BAIK
12	DISLUTKAN	102,54	ISTIMEWA	102,54	ISTIMEWA
13	DKP	97,11	BAIK	94,43	BAIK
14	DISKOMINFO	104,80	ISTIMEWA	102,86	ISTIMEWA
15	DISKOP	132,37	ISTIMEWA	87,87	BAIK
16	DLHK	746,79	ISTIMEWA	87,45	BAIK
17	DISPAR	116,36	ISTIMEWA	104,20	ISTIMEWA
18	PUPR	99,38	BAIK	89,44	BAIK
19	DPMPDes	109,45	ISTIMEWA	105,17	ISTIMEWA
20	DP3AP2KB	91,23	BAIK	82,10	BAIK
21	DISPORA	109,89	ISTIMEWA	86,09	BAIK
22	DPMPTSP	97,12	BAIK	87,41	BAIK
23	DISDAG	10.372,47	ISTIMEWA	105,04	ISTIMEWA
24	DISHUB	101,63	ISTIMEWA	101,63	ISTIMEWA
25	DISPERIN	1.041,41	ISTIMEWA	110,00	ISTIMEWA
26	DISPERPUS	98,39	BAIK	98,39	BAIK
27	DISTANBUN	347,31	ISTIMEWA	106,93	ISTIMEWA
28	PERKIM	100,02	ISTIMEWA	100,02	ISTIMEWA
29	DISNAKESWAN	102,72	ISTIMEWA	92,45	BAIK
30	DINSOS	105,21	ISTIMEWA	84,07	BAIK
31	DISNAKER	217,42	ISTIMEWA	104,46	ISTIMEWA

NO	NAMA OPD	RATA-RATA CAPAIAN IKU OPD TAHUN 2025	PREDIIKAT KINERJA	HASIL PENILAIAN KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN FORMULA PERMENPAN 22 TAHUN 2024	
				NILAI CAPAIAN	PREDIKAT KINERJA
32	INSPEKTORAT	86,15	BAIK	86,15	BAIK
33	BKD	94,55	BAIK	85,09	BAIK
34	SATPOLPP	105,26	ISTIMEWA	103,55	ISTIMEWA
35	SETDA	93,15	BAIK	83,84	BAIK
36	SETWAN	100,00	BAIK	90,00	BAIK

Sumber : data diolah, 2026

2.1.4 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Program RKPD sampai dengan Tahun 2025

Keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kinerja perangkat daerah sebagai pelaksana utama program dan kegiatan pembangunan. Kinerja tersebut diukur melalui pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan oleh masing-masing perangkat daerah, yang disusun secara berjenjang (*cascading*) dari tujuan dan sasaran strategis pembangunan daerah.

Pada tahun 2025, terdapat 39 perangkat daerah dengan jumlah indikator kinerja utama sebanyak … indikator yang menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan pembangunan. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian IKU perangkat daerah mencapai 98,19 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah telah berjalan sangat baik dan mendekati target yang telah ditetapkan.

Tingginya capaian kinerja ini mencerminkan adanya sinergi yang kuat antar perangkat daerah, perencanaan yang semakin terarah, serta efektivitas dalam pelaksanaan program pembangunan. Meskipun demikian, evaluasi dan peningkatan kinerja tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap perangkat daerah tidak hanya mencapai target secara kuantitatif, tetapi juga mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Adapun gambaran lebih rinci mengenai capaian kinerja masing-masing perangkat daerah pada tahun 2025 disajikan dalam rekapitulasi capaian IKU sebagai berikut:

Tabel 2. 7 capaian kinerja masing-masing perangkat daerah pada tahun 2025

NO	NAMA OPD	RATA-RATA CAPAIAN IKU OPD TAHUN 2025	PREDIIKAT KINERJA	HASIL PENILAIAN KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN FORMULA PERMENPAN NO. 22 TAHUN 2024	
				NILAI CAPAIAN	PREDIKAT KINERJA
1	DINAS DIKBUD	105,18	ISTIMEWA	92,87	BAIK
2	DINAS KESEHATAN	181,45	ISTIMEWA	85,41	BAIK
3	BADAN KESBANGPOL	99,02	BAIK	89,12	BAIK
4	BPBD	92,77	BAIK	83,49	BAIK
5	BPKAD	101,35	ISTIMEWA	101,35	ISTIMEWA
6	BAPPENDA	101,79	ISTIMEWA	100,79	ISTIMEWA
7	BPSDM	90,20	BAIK	81,18	BAIK
8	BADAN PENGHUBUNG	101,05	ISTIMEWA	90,95	BAIK
9	BAPPEDA	90,38	BAIK	90,38	BAIK
10	BRIDA	111,80	ISTIMEWA	96,12	BAIK
11	DINAS ESDM	125,76	ISTIMEWA	94,16	BAIK
12	DISLUTKAN	102,54	ISTIMEWA	102,54	ISTIMEWA

NO	NAMA OPD	RATA-RATA CAPAIAN IKU OPD TAHUN 2025	PREDIIKAT KINERJA	HASIL PENILAIAN KINERJA ORGANISASI BERDASARKAN FORMULA PERMENPAN NO. 22 TAHUN 2024	
				NILAI CAPAIAN	PREDIKAT KINERJA
13	DINAS KETAHANAN PANGAN	97,11	BAIK	94,43	BAIK
14	DINAS KOMINFOTIK	104,80	ISTIMEWA	102,86	ISTIMEWA
15	DISKOP UKM	132,37	ISTIMEWA	87,87	BAIK
16	DINAS LHK	853,47	ISTIMEWA	87,45	BAIK
17	DINAS PARIWISATA	116,36	ISTIMEWA	104,20	ISTIMEWA
18	DINAS PUPR	99,38	BAIK	89,44	BAIK
19	DPMPDes	109,45	ISTIMEWA	105,17	ISTIMEWA
20	DP3AP2KB	91,23	BAIK	82,10	BAIK
21	DISPORA	109,89	ISTIMEWA	86,09	BAIK
22	DPMPTSP	97,12	BAIK	87,41	BAIK
23	DINAS PERDAGANGAN	10372,47	ISTIMEWA	105,04	ISTIMEWA
24	DINAS PERHUBUNGAN	101,63	ISTIMEWA	101,63	ISTIMEWA
25	DINAS PERINDUSTRIAN	196,57	ISTIMEWA	95,50	BAIK
26	DINAS PERPUSDA	98,39	BAIK	98,39	BAIK
27	DISTANBUN	347,31	ISTIMEWA	106,93	ISTIMEWA
28	DINAS PERKIM	100,02	ISTIMEWA	100,02	ISTIMEWA
29	DISNAKESWAN	103,40	ISTIMEWA	93,06	BAIK
30	DINAS SOSIAL	105,21	ISTIMEWA	84,07	BAIK
31	DINAS NAKERTRANS	217,42	ISTIMEWA	104,46	ISTIMEWA
32	INSPEKTORAT	87,78	BAIK	87,78	BAIK
33	BKD	94,55	BAIK	85,09	BAIK
34	SATPOLPP	105,26	ISTIMEWA	103,55	ISTIMEWA
35	SEKREARIAT DAERAH	95,10	BAIK	84,38	BAIK
36	SEKREARIAT DPRD	100	BAIK	90	BAIK

Sumber : Bappeda NTB, 2026 (diolah)

2.2 Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Daerah

2.2.1 Aspek Geografi dan Demografi

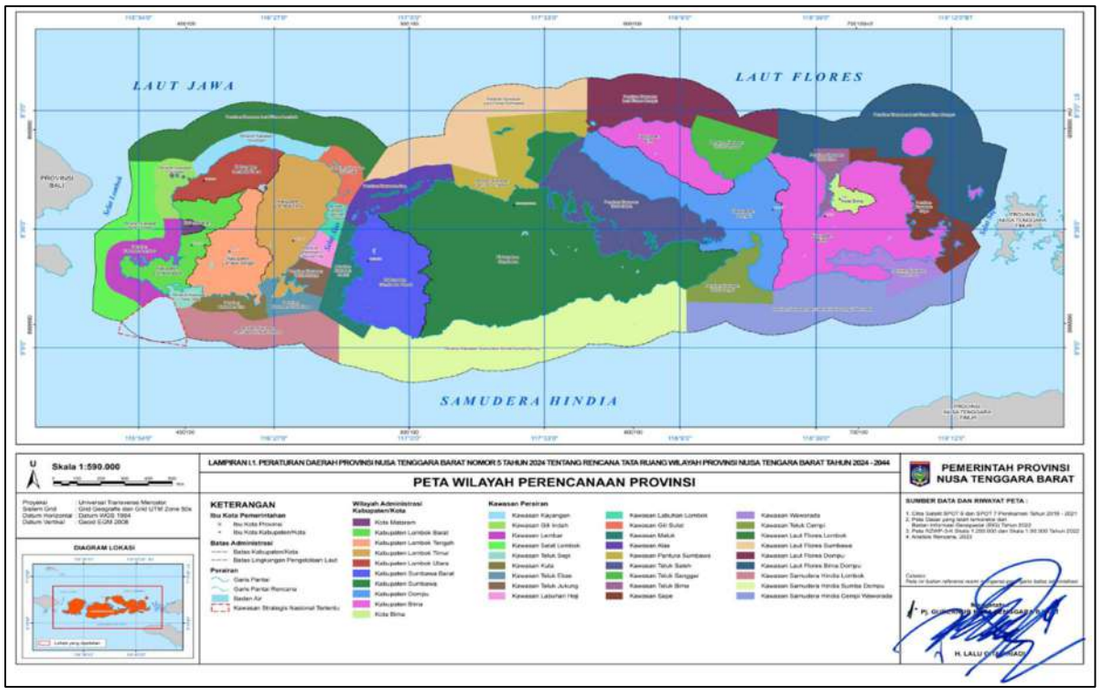
A. Letak dan Kondisi Geografis

Secara geografis, Provinsi NTB terletak antara 115°46’ - 119°05’ Bujur Timur dan 8°10’- 9°5’ Lintang Selatan dengan batas wilayah:

sebelah utara : Laut Jawa dan Laut Flores;
sebelah selatan : Samudra Hindia;
sebelah barat : Selat Lombok & Provinsi Bali;
sebelah timur : Selat Sape & Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2024-2044 menyebutkan bahwa luas wilayah perencanaan NTB kurang lebih 4.758.132 hektare. Wilayah perencanaan ini terbagi menjadi dua yakni wilayah darat dengan luas kurang lebih 1.966.639 hektare (41 persen); dan wilayah laut dengan luas kurang lebih 2.791.492 hektare (59 persen). Adapun panjang garis pantai mencapai kurang lebih 2.999,54 km.

Gambar 2. 1 Peta Wilayah Perencanaan Provinsi NTB



Sumber: Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB 2024-2044

Dengan luas wilayah yang didominasi oleh perairan, NTB memiliki peluang besar dalam pengembangan Ekonomi Agro-Maritim seperti perikanan tangkap, budidaya laut serta industri garam dan perkapalan; Ekowisata Bahari dan Pesisir dengan destinasi unggulan seperti Gili Trawangan, Pantai Kuta Mandalika dan perairan Pulau Moyo; dan Keamanan dan Pengelolaan Sumber Daya Laut, mengingat besarnya luas laut yang memerlukan perlindungan dari eksploitasi berlebihan dan aktivitas ilegal.

Sementara itu, luas wilayah darat yang mencapai 41 persen tetap menjadi faktor penting dalam pengembangan sektor pertanian, perkebunan, peternakan serta pembangunan infrastruktur yang menunjang pertumbuhan ekonomi daerah. Untuk batas-batas wilayah Provinsi NTB adalah: Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Flores dan Laut Jawa; Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia; Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Bali; dan Sebelah Timur berbatasan dengan Provinsi NTT.

Secara administratif, Provinsi NTB memiliki 8 (delapan) kabupaten, 2 (dua) kota, 117 wilayah kecamatan dan 1180 desa/kelurahan. Kabupaten Sumbawa memiliki jumlah kecamatan terbanyak, yakni 24 Kecamatan. Lombok Timur merupakan kabupaten dengan jumlah desa terbanyak yaitu 254 desa/kelurahan. Sedangkan, Kabupaten Lombok Utara dan Kota Mataram memiliki jumlah kecamatan terkecil yakni masing – masing 5 (lima) kecamatan. Kota Mataram merupakan Ibukota Provinsi NTB. Tabel berikut memperlihatkan jumlah kecamatan, desa/kelurahan serta luas wilayah masing-masing kabupaten/kota di Provinsi NTB secara rinci Tahun 2025. Gambaran perbandingan luas wilayah menurut kabupaten/kota di NTB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 8 Luas Wilayah Menurut Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Total Luas Area (km2)
1	Kabupaten Lombok Barat	10	122	923,06
2	Kabupaten Lombok Utara	5	43	811,19
3	Kabupaten Lombok Tengah	12	168	1.169,52
4	Kabupaten Lombok Timur	21	254	1.606,47

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Total Luas Area (km2)
5	Kabupaten Sumbawa	24	81	6.655,92
6	Kabupaten Dompu	8	165	2.281,75
7	Kabupaten Bima	18	81	4.216,09
8	Kabupaten Sumbawa Barat	8	191	1.743,58
9	Kota Mataram	6	50	60,42
10	Kota Bima	5	41	207,89
Provinsi Nusa Tenggara barat		117	1.180	19.675,89

Sumber: LKPJ Tahun 2025 Provinsi NTB, 2026

B. Topografi

Kondisi topografi wilayah Provinsi NTB bervariasi dari 0 s.d 3.726 meter dpl untuk Pulau Lombok, dan 0 s.d 2.755 meter dpl untuk Pulau Sumbawa. Berdasarkan ketinggian wilayah tersebut, fisiografi Provinsi NTB dapat diklasifikasikan datar, landai, perbukitan dan pegunungan. Di Pulau Lombok terdapat jajaran gunung seperti Gunung Rinjani, Mareje, Timanuk, Nangi, Perigi, Plawangan, dan Gunung Baru. Sedangkan di Pulau Sumbawa terdapat Gunung Batu Lanteh, Tukan, Jaran Pusang, Soromandi/Donggo, Tambora, Dadu, Pajo dan Gunung Sambi.

Bila ditinjau dari klasifikasi ketinggian wilayah, maka wilayah yang memiliki ketinggian 0 s.d 100 m dpl sekitar 478,911 Ha; ketinggian 100 s.d 500 m dpl sekitar 753,612 Ha; ketinggian 500 s.d 1.000 m dpl sekitar 307,259 Ha; dan 1.000 m dpl ke atas sekitar 475,533 Ha.

Kemiringan tanah di wilayah Provinsi NTB didominasi oleh kemiringan tanah antara 15 persen sampai dengan 40 persen seluas 704.619 Ha (34,96 persen), sedangkan klasifikasi kemiringan tanah hingga 2 persen seluas 338.552 Ha (16,80 persen). Di Pulau Lombok klasifikasi kemiringan antara 2 persen s.d 15 persen seluas 198.616 Ha (9,85 persen) sedangkan klasifikasi kemiringan tanah lebih dari 40 persen seluas 20.175 Ha (1,01 persen). Adapun di Pulau Sumbawa klasifikasi kemiringan tanah antara 15 persen s.d 40 persen seluas 573.903 Ha (28,48 persen) dan kemiringan tanah hingga 2 persen seluas 214.194 Ha (10,63 persen).

C. Geologi dan Geomorfologi

Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa termasuk ke dalam gugusan Kepulauan Sunda Kecil, bersama-sama dengan Pulau Bali, Pulau Sumba, Pulau Flores dan Pulau Timor, serta sebagai bagian dari Sistem Pegununggan Sunda. Evolusi orogenesa di kawasan berhubungan dengan Busur Banda. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa merupakan dua pulau oseanik. Penyusun busur volkanik dalam disistem Busur Sunda paling timur yang berasal dari subduksi antara kerak oseanik Hindia dengan kerak oseanik yang membatasi Sundaland di sebelah tenggara. Sedangkan Pulau Bali merupakan hasil dari subduksi kerak oseanik di bawah tepi kerak benua-transisi Eurasia. Batas antara kerak kontinental-transisi Eurasia dengan kerak oseanik yang membatasi Sundaland di sebelah tenggaranya adalah selat sangat dalam, yaitu Selat Lombok. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, karena posisinya paling barat sebagai pulau volkanik di Nusa Tenggara maka paling tua umurnya sebab dari Busur Sunda ke Busur Banda cenderung material penyusunnya semakin muda bergerak ke timur. Sementara itu, berdasarkan tatanan geologi Indonesia, wilayah NTB terletak pada pertemuan dua lempeng besar (Lempeng Hindia-Australia dan Lempeng Eurasia) yang berinteraksi dan saling berbenturan satu dengan yang lain. Batas kedua lempeng ini merupakan daerah yang sangat labil ditandai dengan munculnya tiga gunungapi aktif tipe A yaitu Gunung Rinjani, Gunung Tambora dan Gunung Sangiang Api).

Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagaimana halnya pulau-pulau di kawasan Wallacea secara geologis termasuk masih sangat muda (1-15 juta tahun) dan tidak pernah merupakan bagian dari massa daratan lain yang lebih besar sehingga kawasan ini tidak pernah menjadi jembatan darat yang berkelanjutan antara Asia dan Australia dan semua penyebaran flora, fauna dan manusia yang melaluinya tentunya harus melalui air. Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa merupakan pulau pada busur vulkanik dalam. Pulau-pulau pada busur vulkanik dalam pada dasarnya adalah pulau vulkanik samudra yang terbentuk dari serpihan kerak samudra yang tersubduksi kedalam mantel lempeng yang ada di atasnya. Adanya tambahan takanan akibat pemanasan pada proses subduksi ini menyebabkan munculnya gunung berapi yang terus bertambah tinggi hingga muncul ke permukaan laut akibat adanya kegiatan vulkanik.

Pulau yang terbentuk dari busur vulkanik dalam sering di kelilingi oleh karang dari batu kapur atau bahan sedimen lainnya yang tererosi dari pulau induknya dan terletak antara aliran lava dan luapan batuan lainnya. Gunung-gunung berapi ini keluar menembus batuan sedimen dari periode tersier. Contoh lainnya adalah terumbu karang yang ada di sekitar daerah pesisir gunung berapi atau di antara aliran lava yang memasuki laut kemudian menumpuk di dasar lereng pesisir atau lepas pantai.

Geologi wilayah Provinsi NTB didominasi oleh batuan gunung api serta aluvium (resent). Batuan tertua berumur tersier sedangkan yang termuda berumur kuarter. Batuan tersier di Pulau Lombok terdiri dari perselingan batupasir kuarsa, batulempung, breksi, lava, tufa dengan lensa-lensa batugamping, batugamping, dan dasit. Batuan tersier di Pulau Sumbawa terdiri dari lava, breksi, tufa, andesit, batupasir tufan, batulempung, dasit, tonalit, tufa dasitan, batugamping berlapis, batugamping tufan, dan lempung tufan.

D. Hidrologi

Kondisi hidrologi yang mencakup tentang pergerakan, distribusi, dan kualitas air termasuk siklus hidrologi dan sumberdaya air sangat penting untuk menjaga dan melestarikan air yang ada di Bumi sehingga air tetap ada secara terus menerus dan dapat dimanfaatkan untuk keberlangsungan hidup mahluk hidup. Pergerakan air dalam tanah yang disebut gradien aliran air tanah yang merupakan proses aliran yang terjadi dibawah air tanah dari satu titik elevasi ke titik elevasi lainnya yang lebih rendah hingga kemudian menuju sungai atau laut. Pergerakan air dalam tanah yang disebut gradien aliran air tanah yang merupakan proses aliran yang terjadi dibawah air tanah dari satu titik elevasi ke titik elevasi lainnya yang lebih rendah hingga kemudian menuju sungai atau laut.

Kondisi hidrologi di NTB mencerminkan tantangan dan potensi yang dipengaruhi oleh faktor geografis, iklim, serta pengelolaan sumber daya air. Provinsi NTB memiliki dua Wilayah Sungai (WS) strategis nasional yaitu WS Lombok dan WS Sumbawa berdasarkan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 04/PRT/M/2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai di Provinsi NTB. Wilayah Sungai Lombok mencakup 197 Daerah Aliran Sungai (DAS) dengan luas total 4.738 Km^2 dan WS Sumbawa memiliki 555 DAS dengan luas 15.095 Km^2. Pemanfaatan air di WS Lombok terjadi pada 53 DAS dan WS Sumbawa mencapai 105 DAS. Gambaran jumlah sungai di wilayah NTB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 9 Jumlah Sungai Dirinci Menurut Wilayah Sungai

Kategori Wilayah Sungai	Wilayah Sungai	
	Lombok	Sumbawa
Sungai Kecil (Lua Daerah Aliran Sungai)		

Kategori Wilayah Sungai	Wilayah Sungai	
	Lombok	Sumbawa
- Luas (A) ≤ 10 km^2	127	289
- 10 km^2 <Luas (A) ≤ 50 km^2	48	212
- 50 km^2 <Luas (A) ≤ 100 km^2	12	29
- 100 km^2 <Luas (A) ≤ 500 km^2	9	22
Sungai Besar (Lua Daerah Aliran Sungai)		
- Luas (A)> 500 km^2	1	3

Sumber : Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Wilayah Sungai

Sistem hidrologi di Pulau Lombok dipengaruhi oleh keberadaan Gunung Rinjani. Aliran sungai cenderung radial, mengalir dari pusat gunung menuju ke arah pantai. Untuk Pulau Lombok, beberapa sungai besar lainnya di Lombok termasuk Sungai Meninting dan Sungai Jangkok. Potensi WS Lombok di tahun 2025 sebesar 2.819,94 Juta m^3/tahun dengan kebutuhan air saat ini sebesar 2.060,71 Juta m^3/tahun dan diperkirakan akan meningkat menjadi 2.553,47 Juta m^3/tahun.

Selanjutnya, untuk Pulau Sumbawa, yang memiliki topografi lebih bervariasi dengan pegunungan dan dataran rendah dimana sungai umumnya lebih pendek dan memiliki debit yang fluktuatif terutama saat musim hujan. Potensi ketersediaan air WS Sumbawa di tahun 2025 sebesar 153,59 Juta m^3/tahun dengan kebutuhan air total sebesar 60,24 Juta m^3/tahun dan diperkirakan akan meningkat menjadi 70,95 Juta m3/tahun di tahun 2035.

Meningkatnya kebutuhan air memberikan tantangan tersendiri, jika tren pertumbuhan populasi, pertanian dan industri terus meningkat tanpa strategi konservasi yang efektif, WS Lombok dan WS Sumbawa berisiko mengalami defisit air dalam jangka panjang. Tantangan dalam menjaga ketersediaan air di NTB dihadapkan pada perubahan iklim dan degradasi lingkungan seperti penebangan hutan, meningkatkan risiko bencana hidrologi. Banjir dan longsor kerap terjadi saat musim hujan, sementara kekeringan mengancam di musim kemarau. Secara keseluruhan, kondisi hidrologi NTB menunjukkan potensi sumber daya air yang besar dan saat ini mencukupi tetapi juga rentan terhadap variabilitas iklim dan tekanan antropogenik. Upaya pengelolaan terpadu seperti rehabilitasi jaringan irigasi dan modernisasi sistem hidrologi menjadi kunci untuk menjaga keseimbangan antara ketersediaan air dan kebutuhan masyarakat sekaligus meminimalkan risiko bencana.

Tabel 2. 10 Potensi Ketersediaan, Kebutuhan dan Proyeksi Kebutuhan Air

Wilayah Sungai	Potensi Ketersedian Air (Juta m3/tahun)	Kebutuhan Air 2025 (Juta m3/tahun)	Proyeksi Kebutuhan Air di Tahun 2034/2035 (Juta m3/tahun)
Lombok	2.819,94	2.060,71	2.553,47
Sumbawa	153,59	60,24	70,95

Sumber : Bappeda NTB (Data diolah), 2025

E. Klimatologi

Curah hujan di Provinsi NTB diamati melalui 3 (tiga) titik stasiun pengamatan, yaitu di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Stasiun Pengamatan Kota Mataram

Curah hujan di stasiun pengamatan Kota Mataram pada tahun 2013 menunjukkan jumlah curah hujan sebanyak 1586 mm atau dalam kategori menengah. Selama tahun 2013-2024 jumlah curah hujan fluktuatif, dimana pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2016 cenderung meningkat, namun dari tahun 2016 ke 2018 menurun. Pada tahun 2018 ke 2022 mengalami peningkatan, namun dari tahun 2022 ke tahun 2023 mengalami penurunan yang cukup tajam, yaitu dari 2.649,2 mm ke 1.632 mm atau menurun sebesar1.017,2 mm dan kembali meningkat pada tahun 2024 yaitu sebesar 1.796 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 2.834 mm dan curah hujan terendah pada tahun 2014, yaitu sebesar 1.563 mm. Secara umum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024, curah hujan berdasarkan stasiun pengamatan Kota Mataram meningkat dari 1.586 mm menjadi 1.796 mm atau mengalami peningkatan namun sangat kecil, yaitu sebanyak 210 mm saja.

2. Stasiun Pengamatan Kabupaten Sumbawa

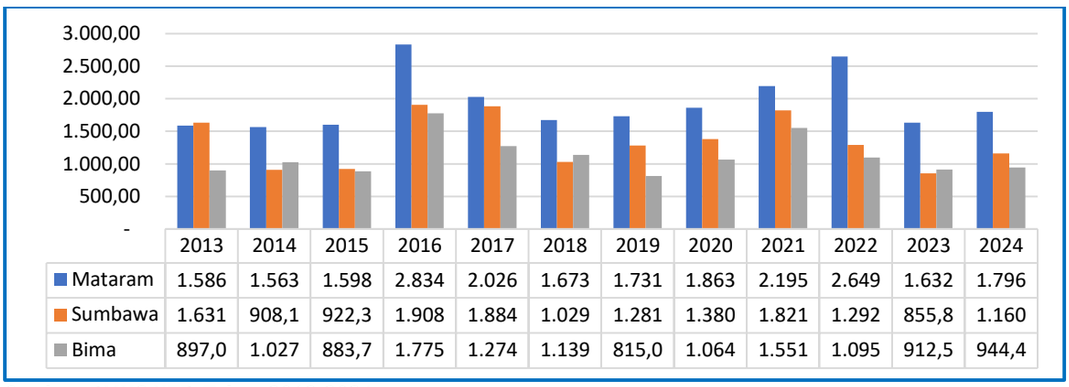
Curah hujan di stasiun pengamatan Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 menunjukkan jumlah curah hujan sebanyak 1.631,1 mm atau dalam kategori menengah. Selama tahun 2013-2024 jumlah curah hujan fluktuatif, dimana pada tahun 2013 ke 2014 mengalami penurunan, namun dari tahun 2014 ke 2016 mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 ke 2018 mengalami penurunan, namun dari tahun 2018 ke tahun 2022 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan cukup signifikan, yaitu dari 1.292,3 mm menjadi 855,8 mm atau menurun sebesar 436,5 mm dan kembali meningkat pada tahun 2024 yaitu sebesar 1.160,20 mm. Curah hujan tertinggi terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 1.908 mm dan curah hujan terendah pada tahun 2023, yaitu sebesar 855,8 mm. Secara umum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2023, curah hujan berdasarkan stasiun pengamatan Kabupaten Sumbawa menurun dari 1.631,1 mm menjadi 1.160,20 mm atau mengalami penurunan sebanyak 470,90 mm.

3. Stasiun Pengamatan Kabupaten Bima

Curah hujan di stasiun pengamatan Kabupaten Bima pada tahun 2013 menunjukkan jumlah curah hujan sebanyak 897 mm atau dalam kategori rendah. Selama tahun 2013-2024 jumlah curah hujan fluktuatif, dimana pada tahun 2013 ke 2014 mengalami peningkatan, namun dari tahun 2014 ke 2015 mengalami penurunan. Kemudian meningkat lagi dari tahun 2015 ke 2016, dan mengalami penurunan dari tahun 2016 ke tahun 2019. Pada tahun 2019 ke 2021 mengalami peningkatan dan dari tahun 2021 ke tahun 2024 kembali mengalami penurunan. Sama dengan di Kota Mataram dan Kabupaten Sumbawa, curah hujan tertinggi di Kabupaten Bima terjadi pada tahun 2016, yaitu sebesar 1.775 mm dan curah hujan terendah pada tahun 2019, yaitu sebesar 815 mm. Secara umum dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2024, curah hujan berdasarkan stasiun pengamatan Kabupaten Bima meningkat dari 897 mm menjadi 944,40 mm atau mengalami peningkatan namun sangat kecil, yaitu sebanyak 47,40 mm saja.

Secara keseluruhan, curah hujan di ketiga stasiun menunjukkan fluktuasi dari tahun ke tahun. Stasiun Mataram cenderung memiliki curah hujan tertinggi di antara ketiganya, dengan puncak mencapai 2.834 mm pada tahun 2016 dan 2.649 mm pada tahun 2022. Sumbawa menunjukkan pola yang lebih bervariasi, dengan curah hujan tertinggi sebesar 1.908 mm pada tahun 2016, tetapi mengalami penurunan signifikan pada tahun 2014 (908,10 mm) dan 2023 (855,80 mm). Sementara itu, Bima umumnya memiliki curah hujan yang lebih rendah dan stabil, dengan nilai tertinggi 1.775 mm pada tahun 2016 dan penurunan tajam menjadi 944,40 mm pada tahun 2024.

Grafik 2. 14 Rata-Rata Curah Hujan Menurut Stasiun di NTB Tahun 2013-2024



	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Mataram	1.586	1.563	1.598	2.834	2.026	1.673	1.731	1.863	2.195	2.649	1.632	1.796
Sumbawa	1.631	908,1	922,3	1.908	1.884	1.029	1.281	1.380	1.821	1.292	855,8	1.160
Bima	897,0	1.027	883,7	1.775	1.274	1.139	815,0	1.064	1.551	1.095	912,5	944,4

Sumber: BMKG NTB, Tahun 2013-2024

Temperatur udara di Provinsi NTB diamati melalui 3 (tiga) titik stasiun pengamatan, yaitu di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Stasiun Pengamatan Kota Mataram

Pengamatan di stasiun Kota Mataram pada tahun 2013 menunjukkan angka temperatur minimum sebesar 20,40 ˚C, maksimum 32,50 ˚C dan rata-rata 27,08 ˚C. Sedangkan pada tahun 2024, Suhu rata-rata berkisar antara 25,72°C (2013) hingga 27,40°C (2020), dengan suhu maksimum 35,00°C (2024) dan minimum 19,00°C (2024). Secara keseluruhan, suhu cenderung stabil dengan peningkatan kecil seiring waktu.

2. Stasiun Pengamatan Kabupaten Sumbawa

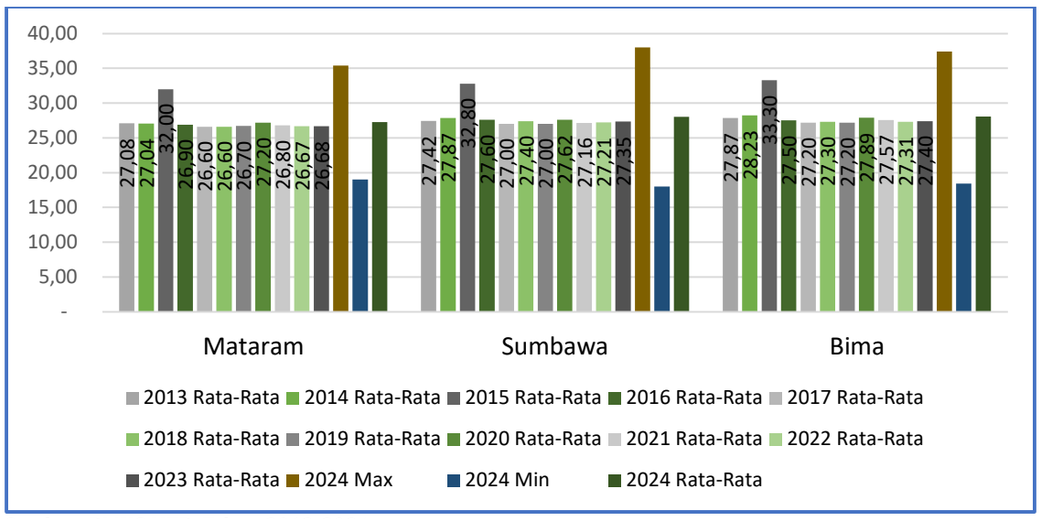
Pengamatan di stasiun Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 menunjukkan angka temperatur minimum sebesar 20,00 ˚C, maksimum 35,60 ˚C dan rata-rata 27,42 ˚C. Sedangkan pada tahun 2024, Suhu rata-rata berkisar antara 27,27°C (2013) hingga 28,70°C (2023), dengan suhu maksimum 37,00°C (2024) dan minimum 19,00°C (2024). Sumbawa menunjukkan suhu rata-rata yang lebih tinggi dibandingkan Mataram, dengan puncaknya pada 2023

3. Stasiun Pengamatan Kabupaten Bima

Pengamatan di stasiun Kabupaten Bima pada tahun 2013 menunjukkan angka temperatur minimum sebesar 18,8˚C, maksimum 36,20 ˚C dan rata-rata 27,87 ˚C. Sedangkan pada tahun 2024, Suhu rata-rata berkisar antara 27,16°C (2013) hingga 30,00°C (2024), dengan suhu maksimum 38,00°C (2024) dan minimum 19,00°C (2024). Bima memiliki suhu rata-rata tertinggi di antara ketiga stasiun, dengan kenaikan signifikan pada 2024

Berdasarkan rata-rata pada 3 stasiun pengamatan, temperatur minimum di Provinsi NTB tahun 2013 hingga 2023, termasuk data maksimum dan minimum tahun 2024. Temperatur rata-rata berkisar antara 25°C hingga 28°C, dengan variasi kecil antar tahun. Sumbawa memiliki temperatur tertinggi, mencapai 35°C pada maksimum 2024, sedangkan Mataram dan Bima menunjukkan temperatur lebih stabil di kisaran 27°C-30°C. Data minimum 2024 menunjukkan suhu terendah sekitar 18°C-20°C di ketiga lokasi.

Grafik 2. 15 Rata-Rata Temperatur Menurut Stasiun di NTB Tahun 2013-2024



Sumber: BMKG NTB, Tahun 2013-2024

Kelembaban udara di Provinsi NTB diamati melalui 3 (tiga) titik stasiun pengamatan, yaitu di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Stasiun Pengamatan Kota Mataram

Pengamatan di stasiun Kota Mataram pada tahun 2013-2024 menunjukkan angka Kelembaban maksimum berkisar 80-90%, dengan sedikit penurunan pada 2016 (70-80%). Kelembaban minimum stabil di 60-70%, dan rata-rata sekitar 70-80%. Pola menunjukkan stabilitas dengan fluktuasi kecil tahunan.

2. Stasiun Pengamatan Kabupaten Sumbawa

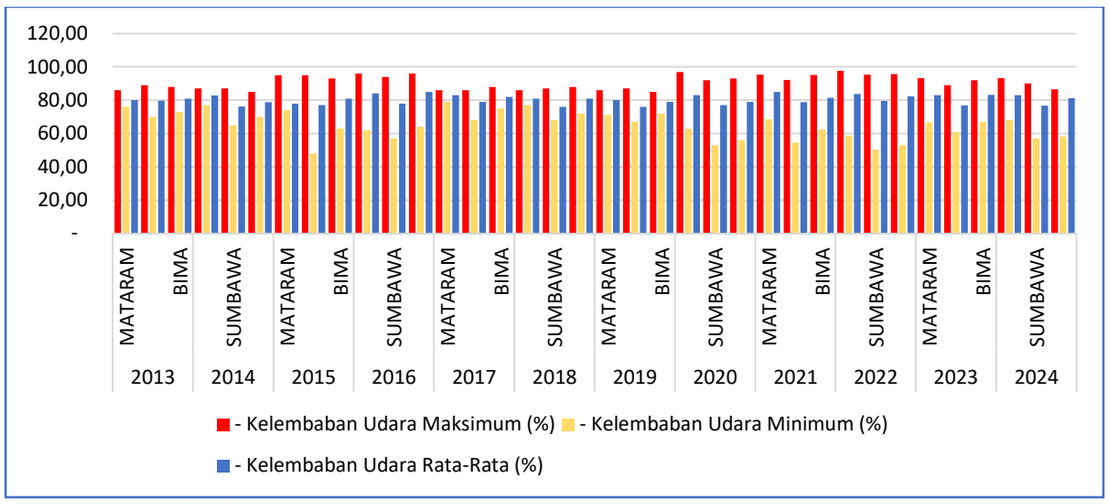
Pengamatan di stasiun Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013-2024 menunjukkan angka Kelembaban maksimum konsisten tinggi, mendekati atau mencapai 100% setiap tahun. Kelembaban minimum stabil di 60%, dan rata-rata berkisar 70-80%. Stasiun ini menunjukkan variasi kelembaban yang lebih ekstrem dibandingkan Mataram.

3. Stasiun Pengamatan Kabupaten Bima

Pengamatan di stasiun Kabupaten Bima pada tahun 2013-2024 menunjukkan angka Kelembaban maksimum bervariasi antara 80-100%, dengan puncak tertinggi terlihat pada tahun-tahun seperti 2014, 2017, dan 2020. Kelembaban minimum sekitar 60%, dan rata-rata berkisar 70-80%. Pola mirip dengan Sumbawa, tetapi dengan sedikit variasi tahunan

Berdasarkan rata-rata pada 3 stasiun pengamatan, rata-rata kelembaban berada di kisaran 60-80%, yang mencerminkan iklim tropis. Di Sumbawa, nilai ini cenderung stabil dan konsisten mendekati 70-80% sepanjang periode, menunjukkan kondisi udara yang relatif lembap. Di Mataram, rata-rata kelembaban bervariasi lebih banyak, berkisar antara 60-75%, dengan penurunan sesekali yang mencerminkan perubahan iklim yang lebih dinamis. Pada tahun 2024, rata-rata kelembaban di kedua wilayah mendekati 70-75%, menunjukkan kondisi yang seimbang menjelang pertengahan tahun.

Grafik 2. 16 Kelembaban udara Pada 3 Stasiun Pengamatan di Provinsi NTB Tahun 2013-2024



Sumber: BMKG NTB, Tahun 2013-2024

Penyinaran matahari di Provinsi NTB diamati melalui 3 (tiga) titik stasiun pengamatan, yaitu di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima. Dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Stasiun Pengamatan Kota Mataram

Pengamatan di stasiun Kota Mataram pada tahun 2013 menunjukkan angka penyinaran matahari sebesar 68%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 69,42% atau mengalami kenaikan 1,42 point dari tahun 2013. Penyinaran matahari terendah pada tahun 2022 sebesar 65,83% dan tertinggi terjadi pada tahun 2015, 2018, 2019, 2020 dan 2021 sebesar 77%. Rata-rata penyinaran matahari dalam kurun waktu tahun 2013-2024 sebesar 72,85%.

2. Stasiun Pengamatan Kabupaten Sumbawa

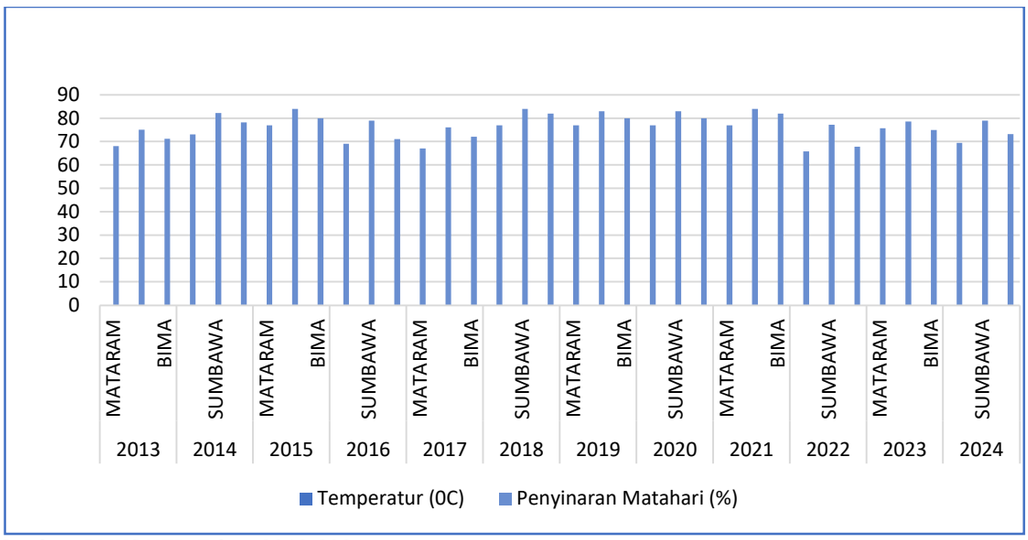
Pengamatan di stasiun Kabupaten Sumbawa pada tahun 2013 menunjukkan angka penyinaran matahari sebesar 75%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 79% atau mengalami kenaikan 4 point dari tahun 2013. Tahun 2013 juga menjadi penyinaran matahari terendah, dan yang tertinggi terjadi pada tahun 2015, 2018, dan 2021 sebesar 84%. Rata-rata penyinaran matahari dalam kurun waktu tahun 2013-2024 sebesar 80,42%.

3. Stasiun Pengamatan Kabupaten Bima

Pengamatan di stasiun Kabupaten Bima pada tahun 2013 menunjukkan angka penyinaran matahari sebesar 71,17%, sedangkan pada tahun 2024 sebesar 73,17% atau mengalami kenaikan 2 point dari tahun 2013. Sama seperti yang terjadi di Kabupaten Sumbawa, penyinaran matahari terendah juga terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 67,75%. Untuk yang tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2021 sebesar 82%. Rata-rata penyinaran matahari dalam kurun waktu tahun 2013-2024 sebesar 76,02%.

Berdasarkan rata-rata pada 3 stasiun pengamatan, penyinaran matahari rata-rata di Provinsi NTB dari tahun 2013 ke tahun 2024 mengalami kenaikan sebanyak 5 point dari 71,39% menjadi 76,39%. Penyinaran matahari tertinggi terjadi pada tahun 2018 dan 2021, yaitu sebesar 81% dan terendah terjadi pada tahun 2022, yaitu sebesar 70,25%. Sepanjang tahun 2013 sampai dengan 2023, penyinaran matahari di Provinsi NTB sebesar 76,43%.

Grafik 2. 17 Penyinaran Matahari (%) Pada 3 Stasiun Pengamatan Provinsi NTB Tahun 2013-2024



Sumber: BMKG NTB, Tahun 2013-2024

F. Struktur Ruang Wilayah

Provinsi NTB diarahkan menjadi wilayah yang memiliki karakteristik khusus, namun tidak terlepas dari fungsi dan pelayanan prasarana - sarana yang ditetapkan. Fungsi dan peran wilayah dalam melayani penduduk yang ada di dalamnya tidak terlepas dari penetapan pusat pelayanan secara berjenjang dalam sistem pusat permukiman. Pusat pelayanan ini haruslah dapat mendukung dan melayani sub- sistem kehidupan kawasan beserta segala keserasian dan keseimbangannya secara keseluruhan. Pusat pelayanan ini sekaligus sebagai unsur pengikat dan pusat orientasi penduduk permukiman yang ada dalam wilayah tersebut, yang tercermin di dalam Struktur Ruang Wilayah Provinsi sebagai berikut:

a) Sistem Pusat Permukiman
b) Sistem pusat permukiman di wilayah provinsi dirumuskan secara berjenjang mulai dari skala nasional, provinsi, hingga kabupaten/kota, yaitu:
   a. Pusat kegiatan skala nasional, meliputi: Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW);
   b. Pusat kegiatan skala provinsi adalah Pusat Kegiatan Lokal (PKL).

Di dalam sistem pusat permukiman Provinsi NTB yang bersinggungan dengan perairan laut terdapat pengembangan pusat pertumbuhan kelautan dan perikanan yang terdiri dari pelabuhan perikanan, sentra kegiatan usaha pergaraman, sentra kegiatan perikanan tangkap, dan sentra kegiatan perikanan budidaya. Termasuk juga sentra-sentra nelayan yang lokasinya berada di daerah pesisir.

Pengelolaan sektor kelautan dan perikanan didorong melalui pemanfaatan potensi nilai ekonomi perikanan dan kelautan sehingga mampu memberikan kontribusi lebih besar lagi terhadap perekonomian wilayah, salah satunya dalam bentuk industrialisasi sektor kelautan dan perikanan. Industri kelautan dan perikanan di Provinsi NTB dikembangkan dengan menitikberatkan pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan pembudidaya. Selain itu, penyediaan bahan baku, penyediaan logistik, penyerapan tenaga kerja, dan keberlangsungan lingkungan hidup perlu menjadi perhatian. Untuk Provinsi NTB, pengembangan pusat Industri Kelautan dan perikanan adalah: 1) Sentra Industri Bioteknologi Kelautan diarahkan di Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Sumbawa Barat; 2) Sentra Industri Maritim diarahkan di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa.

Sistem Pusat Permukiman terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional atau beberapa provinsi. PKN diarahkan sebagai kawasan perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat jasa- jasa keuangan dengan cakupan pelayanan nasional atau beberapa provinsi, pusat pengolahan atau pengumpul barang dalam skala nasional atau beberapa provinsi, simpul transportasi skala nasional atau beberapa provinsi, pusat jasa pemerintahan dan jasa publik lainnya dengan skala nasional atau beberapa provinsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), PKN di Provinsi NTB diarahkan di Kawasan Perkotaan Mataram Raya.

Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota. Dalam kacamata nasional, guna mendukung keberadaan kawasan andalan, maka sinergitas dengan PKW perlu ditingkatkan. Sebagai kawasan perkotaan yang mempunyai potensi untuk mendorong pertumbuhan daerah sekitarnya, pusat koleksi dan distribusi, pusat pengolahan atau pengumpul barang, simpul transportasi, dan pusat jasa publik dengan skala skala regional, maka PKW perlu dikembangkan infrastruktur dan pelayanan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN), PKW di Provinsi NTB diarahkan di Praya (Kabupaten Lombok Tengah), Sumbawa Besar (Kabupaten Sumbawa) dan Raba (Kota Bima).

Ibukota kabupaten lainnya dijadikan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) untuk mendukung kegiatan PKW dan membantu pergerakan dari pusat produksi yang ada di desa langsung ke PKN. Desa pusat produksi diarahkan menjadi pusat- pusat perdesaan yang menjadi basis produksi di setiap kawasan andalan. Dalam kaitanya dengan hal tersebut, PKL diharapkan mampu menjadi pusat koleksi dan distribusi lokal di setiap kabupaten dan/atau beberapa kecamatan terdekat yang didukung dengan keberadaan fasilitas minimum. Peningkatan fasilitas tersebut perlu dilengkapi dengan peningkatan kualitas pelayanan fasilitas bagi masyarakat. Penetapan PKL di Provinsi NTB didasarkan pada pemusatan kegiatan, kecenderungan perkembangan, serta memperhatikan faktor fisik wilayah provinsi. PKL di Provinsi NTB ditetapkan sebanyak 23 yang melayani beberapa kabupaten/kota atau satu provinsi.

Tabel 2. 11 Rencana Sistem Perkotaan

No	Hirarki	Rencana Sistem Pusat Perkotaan	Wilayah Pengembangan
A.	**Sistem Nasional**		
1.	Pusat Kegiatan Nasional (PKN)	PKN Kawasan Perkotaan Mataram Raya	Wilayah Pengembangan Pulau Lombok
2.	Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	PKW Praya (Kabupaten Lombok Tengah)	Wilayah Pengembangan Pulau Lombok
		PKW Sumbawa Besar (Kabupaten Sumbawa)	Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Barat
		PKW Raba (Kota Bima)	Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Timur
B.	**Sistem Provinsi**		
3.	Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	**Kabupaten Lombok Barat** a. Gerung b. Lembar	Wilayah Pengembangan Pulau Lombok

No	Hirarki	Rencana Sistem Pusat Perkotaan	Wilayah Pengembangan
		c. Narmada	
		Kabupaten Lombok Utara a. Tanjung b. Pemenang c. Kayangan	Wilayah Pengembangan Pulau Lombok
		Kabupaten Lombok Tengah a. Kopang b. Sengkol	Wilayah Pengembangan Pulau Lombok
		Kabupaten Lombok Timur a. Selong b. Keruak c. Labuhan Lombok	Wilayah Pengembangan Pulau Lombok
		Kabupaten Sumbawa Barat a. Taliwang b. Poto Tano c. Maluk	Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Barat
		Kabupaten Sumbawa a. Alas b. Lunyuk c. Plampang	Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Barat
		Kabupaten Dompu a. Dompu b. Kempo c. Hu'u	Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Timur
		Kabupaten Bima a. Woha b. Kore c. Sape	Wilayah Pengembangan Pulau Sumbawa Bagian Timur

Sumber : Dokumen RTRW Provinsi NTB, Tahun 2024

c) Sistem Jaringan Transportasi

Pengembangan sistem jaringan transpotasi berhubungan dengan pembangunan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara beserta sarana-prasarana yang handal dan terintegrasi. Pembangunan dilakukan melalui pendekatan wilayah pengembangan, agar keseimbangan dan pemerataan pembangunan antar-daerah dapat terwujud serta mampu mendukung pusat-pusat pertumbuhan. Sistem transportasi terdiri dari sistem jaringan jalan, sistem jaringan sungai, danau, dan penyeberangan, sistem jaringan transportasi laut, bandar udara umum dan bandar udara khusus, serta jalur pendaratan dan penerbangan di laut.

1. Sistem Jaringan Jalan. Pengembangan transportasi darat meliputi sistem jaringan jalan dan prasarana jaringan jalan berupa terminal penumpang, jembatan timbang, dan jembatan, yang terdiri atas:
   a. Jalan Umum, meliputi: (i) Jalan Arteri Primer (JAP), menghubungkan secara berdaya guna antar-PKN atau antara PKN dengan PKW dan antar-kota yang melayani kawasan berskala besar (kawasan primer) dan/atau cepat berkembang dan/atau pelabuhan-pelabuhan utama dalam hal distribusi barang dan jasa; (ii) Jalan Kolektor Primer (JKP), menghubungkan secara berdaya guna antar PKW atau antara PKW dengan PKL dan/atau kawasan-kawasan berskala kecil dan/atau pelabuhan regional dan pelabuhan pengumpan lokal; (iii) Jalan Lokal/Jalan Khusus, merupakan jalan yang dibangun oleh instansi, badan usaha, perseorangan, atau kelompok masyarakat untuk kepentingan sendiri. Pengembangan jalan khusus di

Provinsi NTB yakni jalan khusus di dalam kawasan pertambangan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu; serta jalan khusus di dalam kawasan industri di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa.

b. Jalan Tol, adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol. Rencana jalan tol di Provinsi NTB merujuk pada lampiran peta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya Sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1 yang arahan lokasi melewati Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur (Gambar 2.9). Ruas ini juga disebut ruas port to port karena menghubungkan Pelabuhan Lembar di Kabupaten Lombok Barat dengan Pelabuhan Kayangan di Kabupaten Lombok Timur.

Gambar 2. 2 Peta Jalan Tol Rencana di Provinsi NTB Berdasarkan Kepmen PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022



Sumber: Keputusan Menteri PUPR Nomor 430/KPTS/M/2022 tentang Penetapan Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri Primer dan Jalan Kolektor Primer-1

c. Terminal Penumpang, berfungsi untuk memadukan intramoda dan antarmoda di pusat-pusat kegiatan, pusat pertumbuhan dan kawasan strategis. Pengembangan terminal penumpang di Provinsi NTB meliputi: (i) Terminal Penumpang Tipe A yang melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota antar provinsi dan/atau angkutan lintas batas negara, angkutan antar kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan. Rencana pengembangan terminal Tipe A di Provinsi NTB merujuk pada Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. KM. 109 Tahun 2019 tentang Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe A di Seluruh Wilayah Indonesia, yaitu Terminal Mandalika di Kota Mataram, Terminal Sumer Payung di Kabupaten Sumbawa dan Terminal Dara di Kota Bima; (ii) Terminal Penumpang Tipe B berfungsi melayani kendaraan umum untuk angkutan antar kota dalam provinsi, serta angkutan kota dan/atau angkutan perdesaan,

antara lain Terminal Tanjung di Kabupaten Lombok Utara, Terminal Renteng di Kabupaten Lombok Tengah, Terminal Pringgabaya/Selong/Pancor di Kabupaten Lombok Timur, Terminal Tana Mira di Kabupaten Sumbawa Barat, Terminal Ginte di Kabupaten Dompu dan Terminal Woha di Kabupaten Bima.

d. Jembatan Timbang, saat ini berada di bawah wewenang Pemerintah Pusat. Dengan merujuk pada Keputusan Menteri Nomor KP 529 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor di Seluruh Wilayah Indonesia, maka penetapan jembatan timbang di Provinsi NTB diarahkan pada Jembatan Timbang Bertais di Kecamatan Narmada Kabupaten Lombok Barat, dan Jembatan Timbang Poto Tano di Kecamatan Poto Tano Kabupaten Sumbawa Barat.

e. Jembatan di Provinsi NTB disesuaikan dengan rencana jaringan jalan dengan kewenangan nasional dan kewenangan provinsi, antara lain Jembatan Lintas Lewamori dan Jembatan pada ruas Jalan Umum.

2. Sistem Jaringan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP), terdiri atas:
   a. Lintas Penyeberangan Antarprovinsi, meliputi Lintas Penyeberangan NTB - Jawa Timur, Lintas Penyeberangan NTB – Bali dan Lintas Penyeberangan NTB – NTT.
   b. Lintas Penyeberangan Antarkabupaten/Kota dalam Provinsi, yaitu Lintas Penyeberangan Kabupaten Lombok Timur - Kabupaten Sumbawa Barat.
   c. Pelabuhan Penyeberangan, meliputi (a) Pelabuhan Penyeberangan Kelas I di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima; (b) Pelabuhan Penyeberangan Kelas II di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima; dan (c) Pelabuhan Penyeberangan Kelas III di Kabupaten Sumbawa.
3. Sistem Jaringan Transportasi Laut, terdiri dari:
   a. Pelabuhan Laut, meliputi:
      (i) Pelabuhan Pengumpul, merupakan pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah menengah, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan antarprovinsi. Pelabuhan pengumpul di Provinsi NTB diarahkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima;
      (ii) Pelabuhan Pengumpan adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam provinsi. Pelabuhan pengumpan di Provinsi NTB dibagi menjadi Pelabuhan Pengumpan Regional dan Pelabuhan Pengumpan Lokal (Tabel 2.13). Pelabuhan pengumpan melayani kegiatan pelayaran dan alih muat angkutan laut nasional dan regional, pelayaran rakyat, angkutan sungai, dan angkutan perintis dalam jumlah menengah, dan menjangkau wilayah pelayanan menengah. Pelabuhan ini juga merupakan simpul pendukung pemasaran produk kawasan andalan ke

pasar regional, sekaligus memberikan akses bagi pengembangan kawasan andalan laut, kawasan pedalaman sungai, dan pulau- pulau kecil, termasuk pengembangan kawasan tertinggal.

Tabel 2. 12 Rencana Pelabuhan Pengumpan di Provinsi NTB

Pelabuhan Pengumpan			
Pengumpan Regional		Pengumpan Lokal	
A.	**Kabupaten Lombok Barat**		
	-	1.	Pelabuhan Senggigi
	-	2.	Pelabuhan Teluk Sepi
	-	3.	Pelabuhan Tawun
	-	4.	Pelabuhan Tembowong
	-	5.	Pelabuhan Labuhan Poh - Sekotong
B.	**Kabupaten Lombok Utara**		
1.	Pelabuhan Pemenang	1.	Pelabuhan Khayangan / Bandar Kayangan
2.	Pelabuhan Carik		
C.	**Kabupaten Lombok Tengah**		
	-	1.	Pelabuhan Teluk Awang
D.	**Kabupaten Lombok Timur**		
	-	1.	Pelabuhan Tanjung Luar
	-	2.	Pelabuhan Labuhan Haji
	-	3.	Pelabuhan Telong Elong
E.	**Kabupaten Sumbawa Barat**		
	-	1.	Pelabuhan Poto Tano
		2.	Pelabuhan Labuhan Lalar
F.	**Kabupaten Sumbawa**		
	-	1.	Pelabuhan Ai Limung
	-	2.	Pelabuhan Alas
	-	3.	Pelabuhan Pernang / Mapin
	-	4.	Pelabuhan Labu Pade
	-	5.	Pelabuhan Sangoro
	-	6.	Pelabuhan Labuhan Ijuk
	-	7.	Pelabuhan Labangka
	-	8.	Pelabuhan Labuhan Jambu
	-	9.	Pelabuhan Labuhan Sebotok Pulau Moyo
	-	10.	Pelabuhan Labuhan Aji
	-	11.	Pelabuhan Teluk Santong
	-	12.	Pelabuhan Pulau Medang
G.	**Kabupaten Dompu**		
1.	Pelabuhan Calabai	1.	Pelabuhan Santonda
2.	Pelabuhan Kilo	2.	Pelabuhan Teluk Cempi
		3.	Pelabuhan Kempo
		4.	Pelabuhan Soroadu
H.	**Kabupaten Bima**		
1.	Pelabuhan Sape	1.	Pelabuhan Kore
2.	Pelabuhan Waworada	2.	Pelabuhan Oituiwera / Sangiang Wera
		3.	Pelabuhan Rompo Langgudu
		4.	Pelabuhan KTM Tambora

Sumber: Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 432 Tahun 2017 tentang Rencana Induk Pelabuhan Nasional dan Hasil Rencana

(iii) Terminal Umum biasanya merupakan bagian dari wilayah kerja pelabuhan untuk melayani pelabuhan laut. Rencana terminal umum di

Provinisi NTB berada di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Bima dan Kota Bima;

(iv) Terminal Khusus di Provinsi NTB diarahkan untuk usaha pokok pertambangan, energi, perikanan, industri, pariwisata, untuk menunjang kegiatan penelitian, serta kegiatan lainnya yang memerlukan fasilitas dermaga yang tersebar di seluruh kabupaten/kota;

(v) Pelabuhan Perikanan diperuntukan guna mendukung kegiatan perikanan. Merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 109 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pelabuhan Perikanan Nasional, Perlabuhan Perikanan di Provinsi NTB meliputi: Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Teluk Awang di Kabupaten Lombok Tengah; Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu; dan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) di Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Bima.

b. Alur-Pelayaran di Laut, adalah perairan yang dari segi kedalaman, lebar, dan bebas hambatan pelayaran lainnya dianggap aman dan selamat untuk dilayari oleh kapal di laut. Alur pelayaran di wilayah laut Provinsi NTB terbagi menjadi: (i) Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan yaitu Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II di Selat Lombok serta Alur-Pelayaran Umum dan Perlintasan Pelabuhan lainnya; (ii) Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan meliputi Alur-Pelayaran Masuk Pelabuhan Lembar, Pemenang, Carik, Labuhan Lombok, Badas, Sape, Pelabuhan Bima; dan (iii) Alur-Pelayaran Khusus yaitu alur pelayaran yang diselenggarakan oleh Badan Usaha.

4. Bandar Udara Umum dan Bandar Udara Khusus, terdiri dari:
   a. Bandar Udara Pengumpul, meliputi: (a) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Primer yaitu Bandar Udara Internasional Zainuddin Abdul Madjid atau yang dikenal dengan nama Bandar Udara Internasional Lombok di Kabupaten Lombok Tengah; dan (b) Bandar Udara Pengumpul Skala Pelayanan Tersier yaitu Bandar Udara Sultan Muhammad Salahuddin di Kabupaten Bima.
   b. Bandar Udara Pengumpan, yaitu Bandar Udara Sultan Muhammad Kaharuddin di Kabupaten Sumbawa.
   c. Bandar Udara Khusus, yaitu Bandar Udara Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat, Bandar Udara Sekongkang di Kabupaten Sumbawa Barat dan Bandar Udara Lunyuk di Kabupaten Sumbawa.
5. Jalur pendaratan dan penerbangan di laut
   Jalur Pendaratan dan Penerbangan di Laut berupa sealine/waterbase untuk pendaratan dan penerbangan seaplane yang dikembangkan di:
   a. Gili Gede pada Kawasan Perairan Lembar;
   b. Gili Trawangan pada Kawasan Perairan Gili Indah;
   c. Gili Air pada Kawasan Perairan Gili Indah;
   d. Gili Meno pada Kawasan Perairan Gili Indah;
   e. Selatan Lombok Tengah pada Kawasan Perairan Teluk Sepi;
   f. Kuta Mandalika pada Kawasan Perairan Kuta;
   g. Gili Bidara pada Kawasan Perairan Gili Sulat;
   h. Benete pada Kawasan Perairan Maluk;
   i. Pulau Moyo pada Kawasan Perairan Pantura Sumbawa; dan
   j. Teluk Cempi pada Perairan Teluk Cempi.

d) Sistem Jaringan Energi, terdiri dari:

1. Jaringan infrastruktur minyak dan gas bumi, meliputi:
   a. Infrastruktur Minyak dan Gas Bumi, yang terdiri atas: (a) Kilang Pengolahan yang dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; dan (b) Tempat Penyimpanan berupa terminal BBM/terminal BBG dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, dan Kota Bima.
   b. Jaringan Minyak dan Gas Bumi, terdiri atas: (a) SPL Fuel Terminal Ampenan di Perairan Kawasan Lembar; (b) Pipa Gas Pembangkit Listrik Jeranjang di Perairan Kawasan Lembar; (c) Pipa Gas Pembangkit Listrik Sumbawa di Perairan Kawasan Pantura Sumbawa; (d) SPL Integrated Terminal Bima di Perairan Kawasan Teluk Bima; dan (e) Pipa Gas Pembangkit Listrik Kota Bima di Perairan Kawasan Teluk Bima.
2. Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, meliputi:
   a. Infrastruktur pembangkitan tenaga listrik dan sarana pendukungnya mencakup pembangkit tenaga listrik dengan sumber energi tak terbarukan, energi terbarukan dan sumber energi lainnya, meliputi: PLTP dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu; PLTA dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima; PLTMH dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; PLTGL dan PLTAL dikembangkan di seluruh wilayah perairan laut Provinsi berdasarkan potensi dan karakteristik wilayah; dan PLTB dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur; PLTBm dan/atau PLTBg dikembangkan di seluruh Kabupaten/ Kota termasuk pulau-pulau kecil berdasarkan potensinya; PLTS dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima; PLTD dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima; PLTU dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, dan Kota Bima; PLTG dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat; PLTMG dikembangkan di Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kota Bima; PLTMGU dikembangkan di Kota Mataram; PLTBm dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu; PLTSa dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat; PLTBg dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota termasuk Pulau-Pulau Kecil berdasarkan potensinya; serta Pembangkit Listrik yang bersumber dari LNG yang dikembangkan di Kabupaten Dompu.
   b. Infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukungnya, terdiri dari:
      (i) Pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem, meliputi SUTT yang dikembangkan di seluruh Kabupaten/Kota; dan saluran transmisi lainnya berupa SKTT yang dikembangkan di Kota Mataram.
      (ii) Jaringan distribusi tenaga listrik adalah SUTM atau yang dikenal dengan nama Jaringan Tegangan Menengah (JTM), yang terdiri atas: (a) JTM

Pulau Lombok, meliputi Sistem Ampenan, Sistem Cakra, Sistem Tanjung, Sistem Praya, Sistem Selong, dan Sistem Pringgabaya; (b) JTM Kabupaten Sumbawa Barat dan Sumbawa, meliputi Sistem Samawa, Sistem Empang, Sistem Alas, dan Sistem Taliwang; dan (c) JTM Kabupaten Bima dan Kota Bima, meliputi Sistem Dompu, Sistem Woha, Sistem Sape, dan Sistem Kota Bima.

(iii) Jaringan pipa/kabel bawah laut penyaluran tenaga listrik diarahkan di seluruh perairan laut Provinsi.

(iv) Gardu listrik adalah Gardu Induk (GI) yang dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

e) Sistem Jaringan Telekomunikasi, terdiri dari:
   1. Jaringan tetap terdiri atas jaringan serat optik (SO) dikembangkan dalam bentuk sistem telematika/internet di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kota Bima, dan Kabupaten Bima termasuk jaringan kabel bawah laut; jaringan terestrial dikembangkan dalam bentuk gelombang radio yang dikembangkan berupa jaringan televisi lokal dengan jangkauan siaran ke seluruh Kabupaten/Kota dan jaringan radio lokal hingga ke seluruh pelosok pedesaan dan pulau-pulau kecil.
   2. Infrastruktur jaringan tetap terdiri atas STO yang dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima. Infrastruktur Jaringan Tetap lainnya berupa landing point jaringan kabel bawah laut yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.
   3. Jaringan bergerak meliputi jaringan bergerak terestrial berupa stasiun transmisi (sistem televisi) yang terdapat di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

f) Sistem Jaringan Sumberdaya Air
   1. Sistem Jaringan Irigasi, meliputi:
      a. Jaringan irigasi primer yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur.
      b. Jaringan irigasi sekunder atau yang dikenal dengan nama saluran irigasi sekunder. Jaringan irigasi primer dan sekunder terdapat di DI Nasional yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, serta dan DI Provinsi yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
   2. Sistem Pengendalian Banjir berupa Bangunan Pengendalian Banjir, terdiri atas:
      a. Bangunan Pengendali Banjir diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota yang rawan bencana banjir;
      b. Bangunan Pengendali Sedimen diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota yang rawan banjir dan erosi/longsor;
      c. Bangunan Pengaman Pantai diarahkan di seluruh Kabupaten/Kota yang tsunami, gelombang pasang, dan/atau banjir rob di Perairan Kawasan Gili

Indah, Perairan Kawasan Lembar, Perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu.

3. Bangunan sumber daya air, meliputi:
   a. Bendungan, yang terdiri atas bendungan dan embung di WS Lombok, meliputi bendungan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur; serta bendungan dan embung di WS Sumbawa meliputi bendungan di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.
   b. Prasarana irigasi terdiri atas bendung pada pelayanan DI di atas 1.000 (seribu) Ha, meliputi bendung di WS Lombok, yang tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah dan Kabupaten Lombok Timur; serta Bendung di WS Sumbawa meliputi bendung di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.

g) Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

1. Sistem Pengolahan Air Minum (SPAM) terdiri dari:
   a. Jaringan Perpipaan meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi berupa reservoir utama dan pipa bawah laut sesuai dengan potensi dan karakteristiknya yang terdiri atas:
      (i) SPAM Regional Pulau Lombok diarahkan sesuai ketersediaan potensi sumber air baku untuk melayani seluruh Pulau Lombok;
      (ii) SPAM Regional Pulau Sumbawa diarahkan sesuai ketersediaan potensi sumber air baku di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan/atau Kota Bima; dan
      (iii) SPAM bawah laut terdapat di Kabupaten Lombok Barat (Gili Tangkong, Gili Kedis, Gili Sudak), Kabupaten Lombok Utara (Gili Trawangan), Kabupaten Lombok Timur (Gili Belek), Kabupaten Bima (Bajo Pulo).
   b. Bukan Jaringan Perpipaan, meliputi:
      (i) Teknologi Instalasi Reverse Osmosis (RO) diarahkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima termasuk pada Pulau-Pulau Kecil berpenghuni; dan
      (ii) Instalasi Pengolahan Air Minum Sederhana (IPAS) diarahkan pulau-pulau kecil berpenghuni di Kabupaten Lombok Barat (Gili Gede dan Gili Asahan), Kabupaten Lombok Utara (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air), Kabupaten Lombok Timur (Gili Belek, Pulau Meringkik, dan Gili Ree), Kabupaten Sumbawa (Pulau Bungin, Pulau Kaung, dan Pulau Moyo), dan Kabupaten Bima (Bajo Pulo dan Pulau Nisa Nae).
2. Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL) meliputi:
   a. SPAL Domestik, terdiri dari:
      (i) SPAL Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat;
      (ii) SPAL Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat;
      (iii) SPAL Moyo Hulu di Kabupaten Sumbawa;
      (iv) SPAL Plampang di Kabupaten Sumbawa;
      (v) PAL Woha/Rasanae Timur di Kabupaten Bima / Kota Bima; dan
      (vi) SPAL Domestik untuk Pulau-Pulau Kecil terdapat di Kabupaten Lombok Barat (Gili Gede dan Gili Asahan), Kabupaten Lombok Utara (Gili Trawangan, Gili Meno, dan Gili Air), Kabupaten Lombok Timur (Gili Belek, Pulau Meringkik, dan Gili Ree), Kabupaten Sumbawa (Pulau Bungin, Pulau Kaung, dan Pulau Moyo), dan Kabupaten Bima (Bajo Pulo dan Pulau Nisa Nae).

b. SPAL Non Domestik, terdiri dari:
   (i) SPAL Kayangan di Kabupaten Lombok Utara;
   (ii) SPAL Maluk di Kabupaten Sumbawa Barat;
   (iii) SPAL Hu'u di Kabupaten Dompu; dan
   (iv) SPAL Bima di Kabupaten Bima

3. Sistem Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) terdiri atas:
   a. Sistem Pengelolaan Limbah B3 PPST Lemer di Kabupaten Lombok Barat;
   b. Sistem Pengelolaan Limbah B3 Raberas di Kabupaten Sumbawa;
   c. Sistem Pengelolaan Limbah B3 Waduwani di Kabupaten Bima; dan
   d. Sistem Pengelolaan Limbah B3 bawah laut berupa pipa tailing diarahkan di Kawasan Perairan Maluk Kabupaten Sumbawa Barat dan Kawasan Perairan Teluk Cempi Kabupaten Dompu.
4. Sistem Jaringan Persampahan, meliputi:
   a. TPA Regional yang terdiri atas: (a) TPA Regional Kebon Kongok di Kabupaten Lombok Barat; (b) TPA Regional / PPST Lemer di Kabupaten Lombok Barat; (c) TPA Regional Rincung di Kabupaten Lombok Barat; (d) TPA Regional Lekong-Alas di Kabupaten Sumbawa; (e) TPA Regional Waduwani di Kabupaten Bima; dan (f) dan TPA Regional Rasanae di Kota Bima.
   b. TPST Regional terdiri atas: (a) TPST Regional Lingsar di Kabupaten Lombok Barat; (b) TPST Regional Pemenang di Kabupaten Lombok Utara; (c) TPST Regional Kopang di Kabupaten Lombok Tengah; (d) TPST Regional Jerowaru di Kabupaten Lombok Timur; (e) TPST Regional Sembalun di Kabupaten Lombok Timur; (f) TPST Regional Poto Tano di Kabupaten Sumbawa Barat; (g) TPST Regional Jereweh di Kabupaten Sumbawa Barat; dan (h) TPST Regional Tambora di Kabupaten Bima.

G. Pola Ruang Wilayah

Pola ruang wilayah provinsi NTB meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

a) Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumberdaya alam, sumberdaya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan. Kawasan lindung perlu dikelola dengan bijak guna mewujudkan kelestarian fungsi lingkungan hidup, meningkatkan daya dukung lingkungan dan menjaga keseimbangan ekosistem antar wilayah guna mendukung proses pembangunan berkelanjutan di NTB. Kawasan lindung, meliputi:

a. Badan Air yang terdiri dari danau di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Dompu, serta waduk pada bendungan di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima.
b. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, terdiri dari kawasan hutan lindung yang di dalamnya terdapat zona tunda (holding zone) pelepasan kawasan hutan menjadi kawasan pemukiman di Kabupaten Lombok Barat. Kawasan hutan lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan lindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah, terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Bima dan Kota Bima.

Tabel 2. 13 Luas Kawasan yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya (Hutan Lindung) di Provinsi NTB Tahun 2022

No.	Kabupaten/ Kota	Luas Kawasan Hutan Menurut SK. 2021 (± Ha)	Kelompok Pengelolaan Hutan (KPH)	
			Nama dan RTK	Luas Indikatif (± Ha)
A.	**Pulau Lombok**			
1.	Kota Mataram	-	-	-
2.	Lombok Barat		Gunung Rinjani (1)	17.038,00
			Gunung Sasak (3)	492,00
			Ranget (6)	2,70
			Pelangan (7)	5.671,83
			Marejabonga (13)	1.874,00
3.	Lombok Utara		Gunung Rinjani (1)	10.568,00
			Pandan Mas (3)	630,22
4.	Lombok Tengah		Gunung Rinjani (1)	8.082,41
			Pelangan (7)	383,00
			Marejabonga (13)	727,44
			Gunung Pepe (13)	404,00
5.	Lombok Timur		Gunung Rinjani (1)	27.319,67
			Gong (8)	33,60
			Petandakan (9)	82,90
			Kedatu (RTK. 10)	13,80
			Rebanbela (11)	8,50
			Gili Lawang, Sulat, Petagan (14)	1.206,00
			Sekaroh (RTK. 15)	2.834,200
B.	**Pulau Sumbawa**			
6.	Sumbawa Barat		Selalu Legini (59)	49.941,81
			Klongkang Pucak Ngengas (60)	8.062,50
			Pantai Alas Dsk (74)	447,50
			Olat Lemusung (91)	7.778,90
7.	Sumbawa		Pelaning (5)	1.537,00
			Pusuk Pao (38)	5.368,60
			Buin Soway (57)	1.788,80
			Selalu Legini (59)	24.251,90
			Klongkang Pucak Ngengas (60)	24.187,50
			Batulanteh (61)	19.779,70
			Dodo Jaranpusang (64)	61.233,70
			Ampang Kampaja (70)	29.103,47
			Pulau Panjang Dsk (73)	3.185,94
			Pantai Alas Dsk (74)	422,41
			Pulau Ngali (92)	994,60
8.	Dompu		Riwo (43)	16.497,65
			Tambora (53)	3.305,70
			Soromandi (55)	19.365,94
			Toffo Rompu (65)	12.313,30
9.	Bima		Maria (25)	9.949,40
			Pamali (52)	1.275,00
			Tambora (53)	6.611,20
			Soromandi (55)	14.351,36
			Toffo Rompu (65)	24.884,67
			Nipa Pusu (66)	3.171,88
			Kota Donggomassa (67)	22.946,40
10.	Kota Bima		Maria (25)	323,80

Sumber: Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 6598/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi NTB Sampai Dengan Tahun 2020

c. Kawasan konservasi merupakan kawasan yang mempunyai ciri khas tertentu yang sebagai satu kesatuan ekosistem yang dilindungi, dilestarikan, dan dimanfaatkan secara berkelanjutan, terdiri atas:
   i. Kawasan Suaka Alam (KSA), meliputi KSA Jereweh di Kabupaten Sumbawa Barat dan KSA Danuera di Kabupaten Bima; serta Cagar Alam (CA) yang dikembangkan di Kabupaten Sumbawa, Kota Bima, dan Kabupaten Bima.
   ii. Kawasan Pelestarian Alam (KPA), meliputi: Taman Nasional yang dikembangkan di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; Taman Hutan Raya (TAHURA) yang dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Tengah; Taman Wisata Alam (TWA) dan yang dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Dalam KPA terdapat zona tunda (holding zone) pelepasan Kawasan Konservasi menjadi Kawasan Pariwisata di Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Bima.
   iii. Suaka yang dikembangkan yaitu Suaka Alam Perairan Teluk Cempi di Perairan Teluk Cempi / Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa.
   iv. Taman terdiri atas Taman Wisata Perairan (TWP) yang dikembangkan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima.

d. Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut merupakan kawasan yang akan dicadangkan sebagai kawasan konservasi yang statusnya masih belum dan/atau dalam proses penetapan oleh menteri. Melalui Keputusan Gubernur Provinsi NTB Nomor 523-640 Tahun 2018, Pemerintah Provinsi NTB sudah menetapkan perairan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai kawasan pencadangan konservasi di laut yang dikembangkan di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima, seperti terlihat pada table berikut:

Tabel 2. 14 Kawasan Pencadangan Konservasi di Laut Provinsi NTB

No.	Kawasan Konservasi Perairan	Kabupaten	Luas (± Ha)	
			SK. Penetapan	Pola Ruang
1.	Teluk Bumbang	Lombok Tengah	6.310,00	6.314,27
2.	Pulau Kramat, Bedil dan Temudong	Sumbawa Barat	2.000,00	1.937,27
3.	Penyu Tatar Sepang – Lunyuk	Sumbawa Barat / Sumbawa	72.415,29	72.453,50
4.	Pulau Lipan dan Pulau Rakit	Sumbawa	26.640,81	26.656,53
5.	Pulau Panjang		22.138,47	22.169,93
6.	Pulau Medang		11.339,56	11.336,80
7.	Pulau Kelapa	Bima	6.947,28	6.890,87
8.	Pulau Sangiang		48.610,01	48.494,82
Total			**196.401,42**	**196.254,14**

Sumber: Keputusan Gubernur Provinsi NTB Nomor 523-640 Tahun 2018 dan Peta Intepretasi RZWP3K Provinsi NTB

e. Kawasan ekosistem Mangrove di Provinsi NTB merupakan Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) yang membutuhkan pengelolaan ekosistem yang berkelanjutan. Kawasan ini ditetapkan pada kawasan pantai yang memiliki tingkat salinitas 2,5% - 4,0%, fluktuasi pasang-surut air laut < 1 meter, dan kedalaman laut < 0,5 meter. Kawasan ekosistem mangrove lebar minimal 130 kali nilai rata-rata perbedan air pasang tertinggi dan terendah tahunan yang diukur dari garis air surut terendah ke arah darat, yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Kawasan ekosistem mangrove termasuk dalam ekosistem karbon biru (blue carbon) yang ditetapkan dalam rangka mendukung pembangunan rendah karbon serta peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Mengingat ekosistem karbon biru berpotensi menyerap 50% karbon di atmosfer, maka luas ekosistem mangrove di Provinsi NTB akan dipertahankan dan bahkan direncanakan untuk ditambah luasannya guna mengatasi degradasi ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil.

b) Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di dalam wilayah Provinsi NTB, terbagi menjadi:

1. Kawasan Hutan Produksi terdapat zona tunda (holding zone) pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang belum ditentukan fungsinya yang terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima; serta holding zone pelepasan Kawasan Hutan Produksi yang sudah ditentukan fungsinya yang terdapat di Kabupaten Dompu, dan Kota Bima.
2. Kawasan Pertanian meliputi Kawasan Tanaman Pangan, Kawasan Hortikultura, Kawasan Perkebunan, dan Kawasan Peternakan yang terdapat di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.
3. Kawasan Perikanan yang terdiri dari: (a) Kawasan Perikanan Tangkap, meliputi Kawasan Perairan Kayangan, Kawasan Perairan Gili Indah, Kawasan Perairan Lembar, Kawasan Perairan Teluk Sepi, Kawasan Perairan Kuta, Kawasan Perairan Teluk Ekas, Kawasan Perairan Teluk Jukung, Kawasan Perairan Labuhan Haji, Kawasan Perairan Labuhan Lombok, Kawasan Perairan Gili Sulat, Kawasan Perairan Maluk, Kawasan Perairan Alas, Kawasan Perairan Pantura Sumbawa, Kawasan Perairan Teluk Saleh, Kawasan Perairan Teluk Sanggar, Kawasan Perairan Teluk Bima, Kawasan Perairan Sape, Kawasan Perairan Wawodara, Kawasan Perairan Teluk Cempi, Kawasan Perairan Selat Lombok, Kawasan Perairan Laut Flores Lombok, Kawasan Perairan Laut Flores Sumbawa, Kawasan Perairan Laut Flores Dompu, Kawasan Perairan Laut Flores Bima Dompu, Kawasan Perairan Samudera Hindia Lombok, Kawasan Perairan Samudera Hindia Sumba Dompu, dan Kawasan Perairan Cempi Wawodara; serta (b) Kawasan Perikanan Budidaya Air Laut yang terdapat di Kawasan Perairan Kayangan, Kawasan Perairan Gili Indah, Kawasan Perairan Teluk Sepi, Kawasan Perairan Teluk Ekas, Kawasan Perairan Teluk Jukung, Kawasan Perairan Labuhan Lombok, Kawasan Perairan Gili Sulat, Kawasan Perairan Maluk, Kawasan Perairan Alas, Kawasan Perairan Pantura Sumbawa, Kawasan Perairan Teluk Saleh, Kawasan Perairan Teluk Sanggar, Kawasan Perairan Teluk Bima, Kawasan Perairan Sape, Kawasan Perairan Waworada, Kawasan Perairan Teluk

Cempi, Kawasan Perairan Laut Flores Dompu, Kawasan Perairan Samudera Hindia Sumba Dompu; dan (c) Perikanan Budi Daya Air Payau terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

4. Kawasan Pergaraman tersebar di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Bima.
5. Kawasan Pertambangan dan Energi adalah Kawasan Pembangkitan Tenaga Listrik yang terdapat di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.
6. Kawasan Peruntukan Industri terdapat di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Berdasarkan rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)
7. Kawasan Pariwisata dikembangkan di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima.
8. Kawasan Permukiman tersebar di seluruh wilayah kabupaten/kota.
9. Kawasan Pembuangan Hasil Pengerukan di Laut terdapat di Kawasan Perairan Maluk.
10. Kawasan Transportasi terdapat di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima. Dalam Kawasan Transportasi terdapat reklamasi di Kota Bima.

c) Potensi Wilayah

Sektor unggulan ekonomi wilayah Provinsi NTB berdasarkan hasil analisis perekonomian antara lain sektor pertanian, kehutanan, perikanan dengan pertumbuhan rata-rata 4% setiap tahun. Tipologi klassen menunjukkan sektor ini adalah sektor maju dan dapat tumbuh dengan pesat. Sektor prospektif dan dapat menjadi sektor basis. Di sektor pertambangan & penggalian pertumbuhan rata-rata 32% setiap tahun. Sesuai tipologi klassen, sektor ini termasuk sektor maju namun tertekan/jenuh. Sektor prospektif dan dapat menjadi prime mover (penggerak utama). Untuk sektor industri pengolahan pertumbuhan rata-rata 4% setiap tahun. Sektor potensial atau dapat berkembang dengan pesat. Sektor prospektif dan dapat menjadi sektor basis.

Pengembangan kawasan unggulan agribisnis, pariwisata dan industri yang berdaya saing, yang diwujudkan melalui:

1. Revitalisasi sektor-sektor unggulan, meliputi pertanian, perikanan dan kelautan, pariwisata, industri, dan pertambangan;
2. Akselerasi kawasan unggulan, pada kawasan pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, kawasan pariwisata dan budaya;
3. Akselerasi pengembangan infrastruktur transportasi, energi, telekomunikasi, sumberdaya air, sanitasi dan persampahan; dan
4. Pemulihan dan pelestarian kawasan lindung.

H. Wilayah Rawan Bencana

Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat. Selanjutnya Rawan bencana adalah kondisi atau

karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

Potensi kebencanaan di Provinsi NTB, meliputi:

a) Potensi Bencana Banjir, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota. Kawasan-kawasan yang mempunyai kerentanan banjir kategori tinggi terdapat di Kota Mataram, Lombok Timur, Kecamatan Sumbawa, Kota Dompu dan Kota Bima. Daerah-daerah tersebut termasuk mempunyai kerentanan tinggi karena terkandung nilai sensitivitas yang tinggi, faktornya meliputi kepadatan penduduk yang tinggi serta banyak aset-aset sosial dan ekonomi serta infrastruktur yang sensitif terdampak oleh kejadian banjir. Beberapa daerah yang mempunyai sejarah banjir dengan kategori ancaman tinggi tidak termasuk mempunyai kerentanan tinggi karena tidak terdapat penduduk atau penduduknya jarang dan tidak terdapat aset yang terdampak jika terjadi banjir. Kawasan yang memiliki potensi bencana banjir harus memperhatikan manajemen banjir berbasis DAS, penjagaan lahan hijau vital yang berada di area hulu sampai hilir sungai, pengendalian banjir dengan melakukan determinasi di area aliran sungai, penyediaan bangunan pengendali banjir, penyediaan sistem peringatan dini banjir, rambu peringatan, jalur evakuasi, dan tempat evakuasi bencana.
b) Potensi Bencana Tsunami, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota. Wilayah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa terletak sangat dekat dengan zona tumbukan antara Lempeng Indo-Australia (selatan) dan Lempeng Eurasia (utara). Zona subduksi tersebut merupakan daerah sumber utama untuk tsunami yang mungkin melanda bagian selatan pulau. Tak jauh di lepas pantai utara Lombok, patahan busur belakang merupakan area sumber tsunami local lain. Menurut Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTB, daerah Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa yang rawan terhadap ancaman bencana alam tsunami meliputi daerah pantai selatan dan barat Pulau Lombok, di selatan Sumbawa meliputi Kecamatan Lunyuk dan Labangka, Teluk Cempi dan Teluk Waworada; di utara Pulau Sumbawa meliputi Teluk Bima, Teluk Saleh, Labuhan Sumbawa dan kawasan Alas dan sekitranya. Kesimpulannya adalah hampir seluruh pesisir Lombok dan Sumbawa memiliki kerawanan tsunami dengan tinggi rendaman lebih dari 5 m. Di daerah NTB tercatat paling tidak dua kali terlanda tsunami yaitu pada tahun 1815 akibat letusan Gunung Tambora dan pada tahun 1977. Tsunami tahun 1977 terjadi pada tanggal 19/08/1977 diakibatkan oleh gempa tektonik 6.1 SR, intensitas VII MMI, kedalaman 33 km, episenter pada 11.1 LS - 119 BT dengan tinggi landaan tsunami mencapai 10 meter. Untuk itu, kawasan yang memiliki potensi Bencana Tsunami harus memperhatikan penyediaan sarana dan prasarana proteksi kebencanaan, penanaman dan perlindungan terhadap mangrove serta tanaman pantai lainnya, pelarangan kegiatan yang mengganggu jalur evakuasi dan kegiatan yang dapat mengubah pola arus laut serta bentang alam garis pantai serta kawasan sempadan pantai.
c) Potensi Bencana Gempa Bumi, terdapat di seluruh Kabupaten/Kota. Berdasarkan karakteristik kegempaan dan tektonik serta ditunjang dengan karakteristik data geofisika yang ada, maka Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa dapat dibagi atas dua zona generator pembangkit gempa, yaitu zona benturan lempeng (subduksi) (Indo-Australia di selatan dan patahan aktif di utara. Dari selatan Lempeng Indo-Australia menyusup ke bawah lempeng Euro-Asia secara relatif, zona tumbukan terjadi di Samudera Hindia selatan Pulau Lombok. Akibat hujaman lempeng tersebut, di utara Pulau Bali sampai Flores muncul patahan-patahan naik aktif (back arc thrust) yang merupakan generator gempa merusak di Bali dan Nusa Tenggara. Kawasan Rawan

Bencana Gempa Bumi harus memperhatikan konstruksi bangunan yang didirikan harus tahan getaran/gempa dan perkuatan bangunan dengan mengikuti standard kualitas bangunan, penyediaan sistem peringatan dini bencana, papan informasi, jalur evakuasi, dan ruang evakuasi bencana, pelarangan kegiatan permukiman, pariwisata, industri pada daerah batuan dasar berupa endapan lepas seperti endapan sungai, endapan pantai dan batuan lapuk, kawasan lembah bertebing curam yang disusun batuan mudah longsor, jalur patahan dan rekahan geologi bumi.

d) Potensi Bencana Gunung Berapi, terdapat di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan daerah sekitar yang terkena dampak. Gunung Rinjani adalah gunung berapi di Pulau Lombok yang merupakan gunung berapi kedua tertinggi di Indonesia dengan ketinggian 3.726 m dpl. Letusan Gunung Rinjani yang tercatat pertama adalah pada tahun 1846. Sedangkan yang terakhir diketahui tahun 2009. Dikutip dari situs Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG), dalam kurun 1846-2009, diketahui ada 11 kali Gunung Rinjani meletus. Letusan umumnya menghasilkan lava dan jatuhan piroklastik. Piroklastik adalah bebatuan clastic semata-mata atau terutama terdiri dari material vulkanik. Sedangkan gunung berapi di Pulau Sumbawa adalah Gunung Tambora yang merupakan salah satu gunung yang paling membawa dampak besar jika meletus. Gunungapi Tambora pernah meletus dahsat 180 tahun yang lalu. Sejarah letusan pada tahun 1815 merupakan terdasyat sepanjang sejarah letusan gunungapi dan menelan korban 92.000 jiwa, penduduk di kaki gunungapi Tambora tercatat hampir tidak ada yang selamat. Seperti dilansir oleh volcanodiscovery.com, letusan Gunung Tambora menyebabkan sebagian Eropa tertutup awan gelap. Sebab, sebagian besar abu dan aerosol dari letusan tersebut menembus hingga bagian stratosfer. Efek letusan tambora tak hanya berdampak di dataran saja, tetapi juga membawa dampak pada perubahan iklim yang drastis. Kerusakan iklim global saat itu bahkan terjadi selama satu tahun. Selama satu tahun, di dataran Eropa dan Asia bahkan tak memiliki musim panas. Pada tahun 1913 Gunung Tambora meletus hingga terbentuk kerucut parasit Doro Afi Toi (Gunung Api Kecil). Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi dengan tingkat kerentanan tinggi merupakan kawasan yang dilindungi secara mutlak dan tidak diperkenankan adanya kegiatan terbangun dan/atau kegiatan binaan di dalamnya. Kawasan Rawan Bencana Gunung Berapi harus memperhatikan penempatan kegiatan penting dan infrastuktur vital menghindari tempat-tempat yang cenderung dialiri lava/lahar, penyediaan sarana dan prasarana evakuasi bencana, seperti jalur evakuasi bencana, ruang evakuasi atau barak pengungsian yang permanen, pemantauan ancaman bencana, peta jalur aliran lava atau lahar, sistem peringatan dini bencana yang harus diketahui penduduk.

e) Potensi Bencana Likuifaksi yang terdapat di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Utara. Kawasan Rawan Bencana Likuifaksi harus memperhatikan ketentuan terhadap kekuatan sistem pondasi dan struktur bangunan, densifikasi pada tanah yang cenderung berpasir, pada kawasan yang belum terbangun maka tetap dibiarkan seperti kondisi eksisting atau dapat diarahkan menjadi Ruang Terbuka Hijau (RTH).

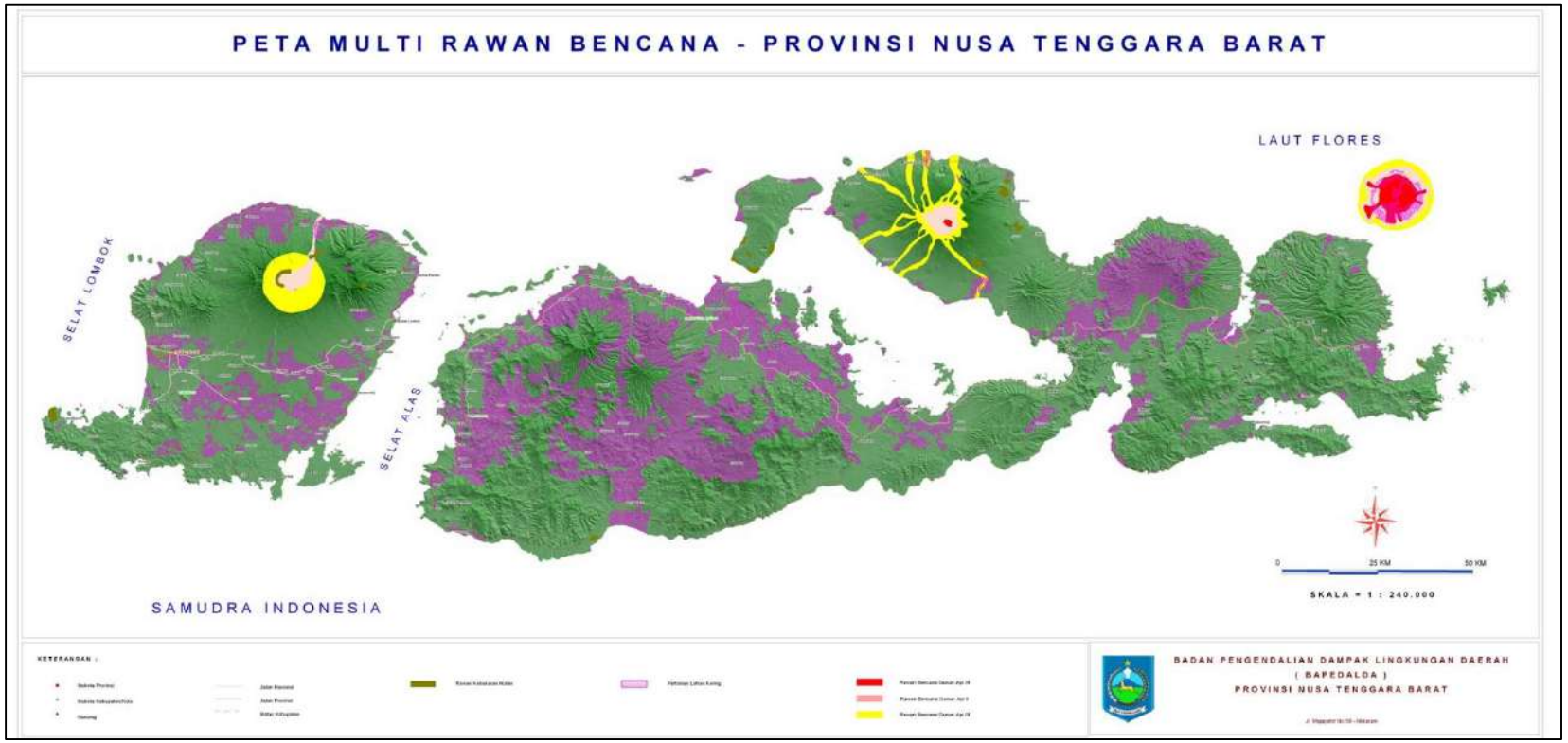
f) Potensi Bencana Gerakan Tanah, pada tingkat kerentanan tinggi, daerah dengan tingkat kemiringan terjal, dan daerah rekahan tanah harus dibebaskan dari permukiman penduduk atau bangunan dan dibatasi untuk berbagai jenis kegiatan yang mengganggu kestabilan lereng. Selain itu pada Kawasan Rawan Bencana Gerakan Tanah harus memperhatikan pemanfaatan teknologi penguatan tebing, pelarangan terhadap penggundulan hutan pada daerah hulu dan dataran banjir, rehabilitasi, reboisasi, penanaman, dan perlindungan vegetasi pada kawasan hutan

lindung yang mulai kritis, penyediaan struktur alami (penanaman vegetasi) dan struktur buatan untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor, utilitas yang ada di dalam tanah harus bersifat fleksibel, mengatur aliran air permukaan agar air tidak meresap ke bawah permukaan yang dapat mempercepat terjadi gerakan tanah, pembangunan sarana dan prasarana untuk kepentingan kebencanaan, seperti bangunan pemantauan bencana, lokasi dan jalur evakuasi bencana, sistem peringatan dini yang harus diketahui oleh penduduk.

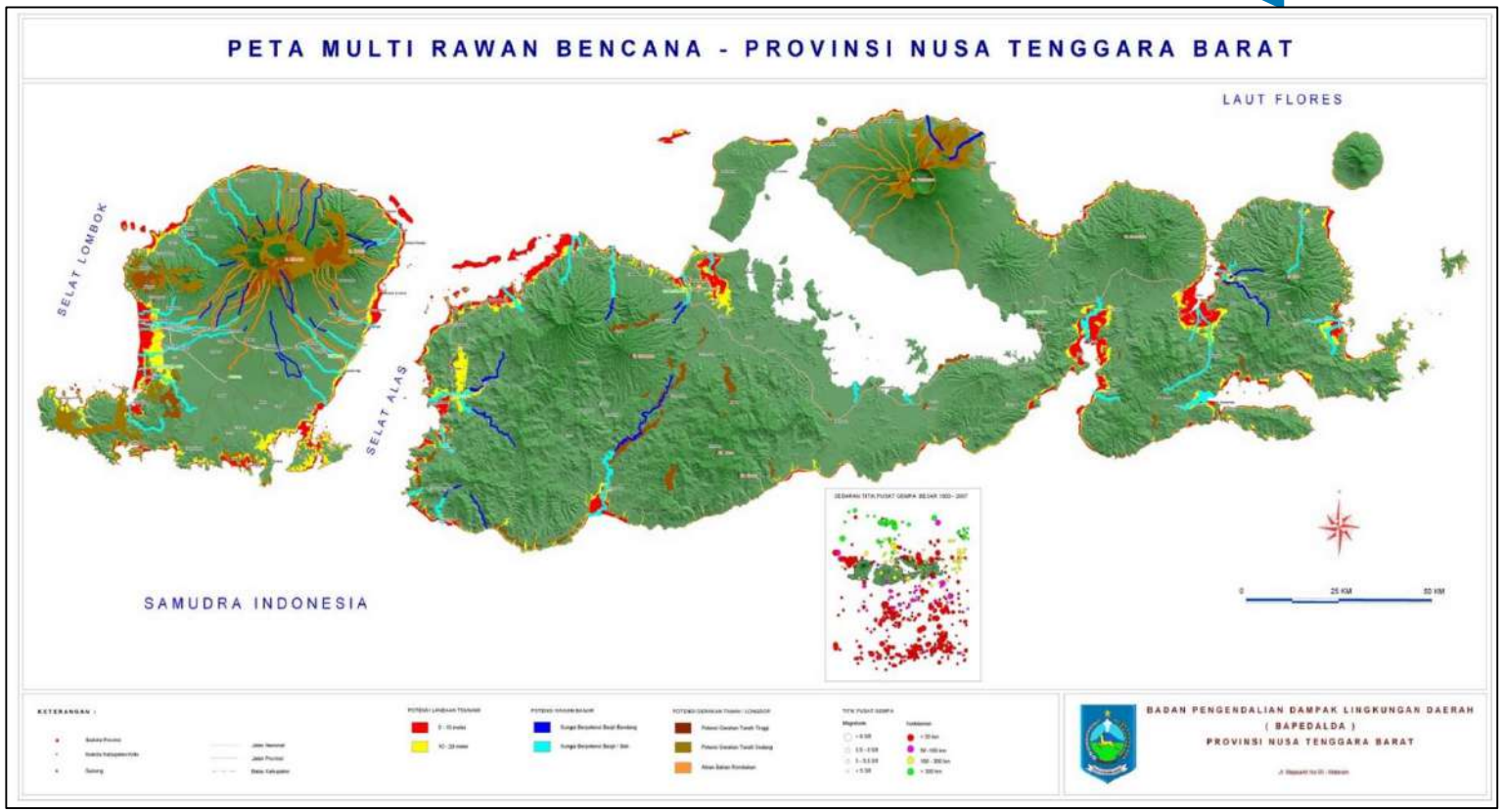
g) Potensi Bencana Kekeringan, harus memperhatikan konservasi tanah dan pengurangan tingkat erosi dengan pembuatan check dam dan reboisasi, pengelolaan lahan, pengelolaan hutan, waduk peresapan dan irigasi pada daerah yang tandus, pengelolaan air secara bijaksana dengan mengganti penggunaan air tanah dengan penggunaan air permukaan dengan cara pembuatan waduk, pembuatan saluran distribusi yang efisien, konservasi tanah dan pengurangan tingkat erosi dengan pembuatan prasarana pengendali daya rusak air, pengelolaan air secara bijaksana dengan mengganti penggunaan air tanah dengan penggunaan air permukaan dengan cara pembuatan waduk, serta pembatasan pengambilan air tanah secara besar-besaran.

Secara spasial, kawasan yang memiliki potensi rawan bencana di Provinsi NTB dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 2. 3 Peta 1 Multi Rawan Bencana Provinsi NTB



Gambar 2. 4 Peta 2 Multi Rawan Bencana Provinsi NTB

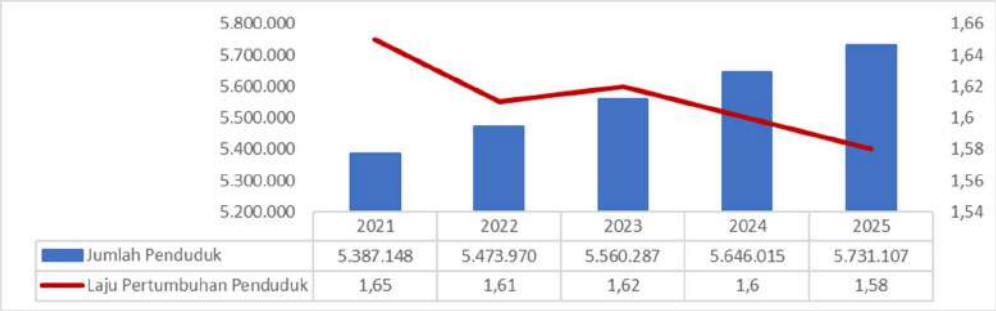

PETA MULTI RAWAN BENCANA - PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
LAUT FLORES
SELAT LOMBOK
SELAT ALAS
SAMUDRA INDONESIA
0
25 KM
50 KM
KETERANGAN :
BADAN PENGENDALIAN DAMPAK LINGKUNGAN DAERAH
(BAPEDALDA)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

I. Aspek Demografi

Aspek demografi memberikan gambaran kondisi kependudukan dari sisi kuantitas dan sisi kualitas. Keduanya digambarkan melalui trend, persebaran, pertumbuhan, dan komposisi kependudukan. Dinamika kependudukan ini dipengaruhi oleh nilai fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Kualitas penduduk mencakup derajat kesehatan, pendidikan, pengeluaran per kapita, pekerjaan, angka kemiskinan. Jumlah penduduk yang besar dengan kualitas yang baik, maju, produktif dan mandiri akan menjadi modal dasar pembangunan Provinsi NTB.

Perkembangan jumlah penduduk Provinsi NTB cenderung mengalami peningkatan selama kurun tahun 2021-2025. Hal ini disebabkan oleh kelahiran alamiah dan migrasi. Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020 (BPS Provinsi NTB, 2024) menggambarkan jumlah penduduk NTB selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan. Faktor kelahiran dan migrasi mendukung laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,60 persen pada tahun 2024. Jumlah penduduk terbesar berada di Kabupaten Lombok Timur sebesar 1.414.461 jiwa dan jumlah penduduk terkecil berapa di Kota Bima sebesar 163.604 jiwa. Hal ini menggambarkan distribusi penduduk NTB tidak merata, dimana luas wilayah tidak berbanding lurus dengan jumlah penduduk. Gambaran jumlah dan laju pertumbuhan penduduk Provinsi NTB Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 18 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk Provinsi NTB Tahun 2021-2025



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2026

Berdasarkan jenis kelamin, penduduk NTB pada tahun 2025 lebih banyak laki-laki lebih dibandingkan perempuan. Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin berkaitan erat dengan kebijakan pembangunan berbasis gender seperti sarana prasarana kesehatan, ketenagakerjaan, dan sarana infrastruktur lainya. Gambaran penduduk NTB Tahun 2021-2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 15 Penduduk Provinsi NTB Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin (Ribu Jiwa) Tahun 2021-2025

Tahun	Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)			Dependency Ratio
		0 - 14	15 - 64	65+	
2021	Laki-Laki	757,8	1,800,0	135,3	49.62
	Perempuan	724,7	1,822,5	146,8	47.82
	Total	**1.482,5**	**3.622,5**	**282.01**	**48.71**

Tahun	Jenis Kelamin	Kelompok Umur (Tahun)			Dependency Ratio
		0 - 14	15 - 64	65+	
2022	Laki-Laki	765,5	1,832,8	141,6	49.49
	Perempuan	732,9	1,846,2	154,9	48.09
	Total	**1.498,4**	**3.679,0**	**296,5**	**48.79**
2023	Laki-Laki	772,5	1,865,7	148,3	49.35
	Perempuan	740,5	1,869,7	163,6	48.35
	Total	**1.513,0**	**3.735,4**	**311,9**	**48.85**
2024	Laki-Laki	778,1	1,899,2	155,4	49.16
	Perempuan	746,6	1,893,8	172,9	48.55
	Total	**1.524,7**	**3.793,0**	**328,3**	**48.85**
2025	Laki-Laki	782,1	1933,8	163,1	48,88
	Perempuan	750,7	1918,8	182,8	48,65
	Total	**1.532,8**	**3.852,6**	**345,9**	**48,76**

Sumber: BPS NTB Provinsi NTB, 2026

Berdasarkan data kependudukan Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) tahun 2026 dari BPS, jumlah penduduk provinsi ini telah menyentuh angka 5.731.100 jiwa dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 1,58% dan tingkat kepadatan wilayah 291 jiwa/km^2. Sebaran penduduk di wilayah ini memperlihatkan ketimpangan spasial yang sangat mencolok, di mana Pulau Lombok menjadi pusat konsentrasi utama masyarakat. Kabupaten Lombok Timur menjadi wilayah dengan populasi terbesar yang mencakup seperempat dari total penduduk provinsi (25,08% atau 1.437.400 jiwa), disusul oleh Lombok Tengah (19,71%). Sebaliknya, wilayah Pulau Sumbawa cenderung memiliki populasi yang renggang, dengan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai daerah berpenduduk paling sedikit, yakni hanya sebesar 2,76% dari total populasi NTB.

Dari aspek dinamika pertumbuhan dan kepadatan, Kabupaten Lombok Tengah mencatatkan laju pertumbuhan penduduk tertinggi sebesar 1,86%, sedangkan Kota Mataram menjadi yang terendah dengan pertumbuhan hanya 0,92%. Meskipun laju pertumbuhannya melambat, Kota Mataram mengalami tekanan spasial yang ekstrem sebagai pusat urban dengan tingkat kepadatan mencapai 7.428 jiwa/km^2, angka yang sangat kontras jika dibandingkan dengan Kabupaten Sumbawa yang menjadi wilayah paling renggang dengan kepadatan hanya 82 jiwa/km^2. Sementara itu, rasio jenis kelamin (sex ratio) provinsi berada di angka 100,90 yang menunjukkan jumlah laki-laki sedikit lebih mendominasi, dengan proporsi tertinggi berada di Lombok Tengah (102,00) dan proporsi perempuan terbanyak berada di Kabupaten Sumbawa (98,40) serta Kota Mataram (99,10). Gambaran kependudukan Menurut Kabupaten-Kota se-NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 16 Jumlah penduduk, Pertumbuhan Penduduk, Kepadatan penduduk, dan Rasio Jenis Kelamin (Sex Ratio) Menurut Kabupaten-Kota se-NTB Tahun 2025

Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa)	Pertumbuhan Penduduk	Persentase	Kepadatan (jiwa/km)	Rasio Jenis kelamin
Lombok Barat	776,30	1,55	13,55	841	101,10
Lombok Tengah	1.129,80	1,86	19,71	966	102,00
Lombok Timur	1.437,40	1,72	25,08	894	101,80
Sumbawa	543,70	1,37	9,49	82	98,40
Dompu	254,70	1,56	4,44	112	101,10
Bima	551,40	1,49	9,62	131	100,90
Sumbawa Barat	158,10	1,72	2,76	91	101,00
Lombok Utara	265,20	1,47	4,63	327	100,70
Kota Mataram	448,80	0,92	7,83	7428	99,10
Kota Bima	165,80	1,41	2,89	797	98,50
Nusa Tenggara Barat	**5.731,10**	**1,58**	**100,00**	**291**	**100,90**

Sumber: BPS NTB, 2026

Semangat pembangunan saat ini mengalami dinamika yang terus menerus berkembang menyentuh semua aspek kehidupan tak terkecuali isu gender. Dengan melihat perkembangan sex ratio di NTB dan kabupaten/kota, kebijakan pembangunan dapat mempertimbangkan isu gender diantaranya peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, kesempatan kerja yang sama serta kesetaraan dalam pengambilan keputusan dan partisipasi perempuan dalam ekonomi serta politik.

Berdasarkan data penduduk menurut kelompok umur, jumlah penduduk mencapai 5.731,11 ribu jiwa, terdiri atas 2.878,75 ribu jiwa laki-laki (50,23%) dan 2.852,36 ribu jiwa perempuan (49,77%), sehingga komposisi penduduk relatif seimbang. Struktur penduduk masih didominasi oleh usia produktif (15–64 tahun) yang berjumlah 3.397,56 ribu jiwa atau sekitar 59,28% dari total penduduk. Kondisi ini menunjukkan bahwa NTB masih memiliki peluang memanfaatkan bonus demografi sebagai modal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penciptaan lapangan kerja.

Di sisi lain, penduduk usia 0–14 tahun masih cukup besar, yaitu 1.532,74 ribu jiwa (26,75%), sehingga kebutuhan terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan anak tetap menjadi prioritas. Sementara itu, penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) mencapai 345,92 ribu jiwa (6,04%), yang menunjukkan perlunya penguatan layanan kesehatan dan perlindungan sosial bagi lansia seiring dengan proses penuaan penduduk.. Gambaran Persentase Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur (Usia Produktif /Non Produktif) NTB Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 17 Jumlah dan Persentase Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur di NTB Tahun 2025

Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah Total
0–4	262,86	251,80	514,66
5–9	257,17	246,92	504,09
10–14	261,95	252,04	513,99
15–19	230,16	217,40	447,56
20–24	225,15	213,74	438,90
25–29	231,89	223,02	454,91
30–34	228,78	222,18	450,96
35–39	223,78	222,12	445,90
40–44	208,61	210,25	418,86
45–49	190,80	195,02	385,82
50–54	163,26	169,34	332,60
55–59	130,24	137,25	267,49
60–64	101,00	108,46	209,46
65–69	71,76	78,52	150,27
70–74	47,84	53,51	101,34
75+	43,51	50,80	94,31
	2.878,75	**2.852,36**	**5.731,11**

Sumber: BPS NTB, 2025

Pemerintah Provinsi NTB menghadapi tantangan terkait dengan bertambahnya jumlah penduduk, ketidakmerataan sebaran penduduk antara Pulau Lombok dengan Pulau Sumbawa, meningkatnya tingkat kepadatan dan semakin bertambahnya penduduk kelompok umur produktif. Situasi dan kondisi ini telah mendorong pemerintah daerah untuk merumuskan kebijakan komprehensif kaitannya dengan strategi pembangunan yang tidak hanya mampu menyerap tenaga kerja melainkan juga memiliki daya ungkit dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga diharapkan dapat berkontribusi nyata bagi perbaikan kesejahteraan masyarakat.

J. Pengembangan Wilayah

Provinsi NTB terletak pada posisi geografis yang strategis, dilintasi oleh jalur ”Sabuk Selatan Transnasional Banda Aceh-Kupang" merupakan jalur transportasi darat nasional yang terpadat. Selain itu, Provinsi NTB juga diapit dua Alur Pelayaran Internasional (API), alur pertama yang melintasi Selat Lombok dan alur kedua yang melintasi Selat Timor. Provinsi NTB juga masuk dalam wilayah “Segi tiga emas tujuan wisata dunia "Bali-Komodo-Tana Toraja". Dengan posisi geografis yang sangat strategis tersebut, pemerintah Provinsi NTB akan terus mendorong dan memfasilitasi pengembangan pembangunan kawasan-kawasan strategis yang ada di Provinsi NTB.

Pendekatan pengembangan wilayah Provinsi NTB difokuskan pada konektivitas wilayah untuk pemerataan (pengembangan sistem jaringan transportasi utama),

pengurangan resiko bencana (perencanaan adaptif dan tanggap bencana), pemulihan dan pelestarian kawasan lindung, pemanfaatan kegiatan budidaya di darat dan di laut secara selektif dan ramah lingkungan, koordinasi dan kerjasama antar wilayah dalam hal pembagian peran, serta pelibatan sektor-sektor informal yang sudah ada di dalam masyarakat.

1. Kawasan Strategis Nasional

Untuk melaksanakan pengembangan wilayah perlu memperhatikan berbagai Kawasan Strategis di Provinsi NTB yang terdiri atas terdiri atas Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) di wilayah provinsi, serta Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki cakupan wilayah darat dan wilayah laut.

KSN adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia serta pendayagunaan sumberdaya alam dan/atau teknologi tinggi. KSN di Provinsi NTB dapat dilihat dari sudut kepentingan:

a. Pertumbuhan Ekonomi, dengan kriteria memiliki potensi ekonomi cepat tumbuh, memiliki sektor unggulan yang dapat menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional, serta memiliki potensi ekspor.

Tabel 2. 18 KSN dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

No	KSN	Tema Penanganan	Lokasi
1.	Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika	Pengembangan/ Peningkatan Pariwisata	Kabupaten Lombok Tengah
2.	Kawasan Bima	Pengembangan/ Peningkatan	Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional

b. Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup, dengan kriteria merupakan tempat perlindungan keanekaragaman hayati, memberikan perlindungan keseimbangan tata guna air yang setiap tahun berpeluang menimbulkan kerugian negara, memberikan perlindungan terhadap keseimbangan iklim makro, rawan bencana alam nasional, serta sangat menentukan dalam perubahan rona alam dan mempunyai dampak luas terhadap kelangsungan kehidupan.

Tabel 2. 19 KSN dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

No	KSN	Tema Penanganan	Lokasi

1.	Kawasan Rinjani dan Sekitarnya	Rehabilitasi/ revitalisasi kawasan	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Tengah
2.	Kawasan Taman Nasional Komodo	Rehabilitasi/ revitalisasi kawasan	Kabupaten Bima (bersama Provinsi NTT)

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional

c. Pertahanan dan Keamanan, dengan kriteria diperuntukkan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategis nasional, serta merupakan wilayah kedaulatan negara termasuk pulau- pulau kecil terluar yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan/atau laut lepas.

Tabel 2. 20 KSN dari Sudut Kepentingan Pertahanan dan Keamanan

No	KSN	Tema Penanganan	Lokasi
1.	Kawasan Perbatasan Negara di Laut Lepas	Pengembangan/ Peningkatan kualitas kawasan	Wilayah selatan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional

Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) merupakan suatu kawasan dalam lingkup wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dipandang memiliki nilai-nilai strategis tertentu dimana pengembangannya diprioritaskan bagi kepentingan nasional yang berfungsi untuk pertahanan keamanan, kesejahteraan dan lingkungan. KSNT di Provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 21 KSNT di Wilayah Provinsi NTB

No	KSNT	Nama	Lokasi
1.	Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT)	Gili Sepatang / Pulau Sophia-louisa	Samudera Hindia (08□55'20"S -116□00'08"BT)
2.	KSNT yang terkait PengendalianLingkungan Hidup berupa Kawasan yang Signifikan SecaraEkologis dan Biologis	Zona Upwelling	Perairan Nusa Tenggara

Sumber: Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Laut dan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar

Gambar 2. 5 Kawasan Strategis Nasional (KSN) dan Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT) di Provinsi NTB



Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dikembangkan Kawasan Andalan Nasional di Provinsi NTB. Kawasan Andalan ini mencakup (a) Kawasan Lombok dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan laut, pariwisata, industri, pertambangan dan panas bumi; (b) Kawasan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata; (c) Kawasan Sumbawa dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan perikanan; (d) Kawasan Bima dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan pertambangan; (e) Kawasan Andalan Lombok Utara - Bandar Kayangan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, serta panas bumi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas), terdapat 2 (dua) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) di Provinsi NTB, yaitu Lombok-Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air) dan sekitarnya dan Moyo-Tambora dan sekitarnya. Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) mencakup KSPN Rinjani dsk, KSPN Pantai Selatan Lombok dsk, KSPN Gili Tramena dsk, KSPN Moyo dsk, dan KSPN Tambora dsk. Dalam Ripparnas juga disebutkan terdapat 9 (sembilan) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang terdiri dari KPPN Rinjani dsk, KPPN Gili Tramena dsk, KPPN Mataram Kota dsk, KPPN Pantai Selatan Lombok dsk, KPPN Praya-Sade dsk, KPPN Sumbawa Barat dsk, KPPN Moyo dsk, KPPN Tambora dsk, dan KPPN Bima dsk.

2. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi (KSP) terdiri dari KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi serta KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang dirincikan sebagai berikut:

1. KSP dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi:

a. Kawasan Mataram Raya - Gili Tramena dan sekitarnya, meliputi: wilayah administrasi Kota Mataram, Kecamatan Batulayar, Kecamatan Senggigi, Kecamatan Lingsar, Kecamatan Narmada, Kecamatan Kediri, dan Kecamatan Labuapi di Kabupaten Lombok Barat, serta Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara dengan sektor unggulan perdagangan-jasa, industri, pariwisata, dan perikanan.
b. Kawasan Kuta Mandalika dan sekitarnya, meliputi: wilayah Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Lombok Timur dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, dan industri. Bentuk penangananya adalah akselerasi sektor-sektor unggulan. Pada Kawasan strategis tersebut, terdapat Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika. Kawasan ini merupakan satu diantara 10 Destinasi Wisata Proritas Nasional. Ground Breaking telah dilakukan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada tanggal 20 Oktober 2017. Berlokasi di Pulau Lombok tepatnya di Kabupaten Lombok Tengah, dengan lahan seluas 1,250 ha. Kawasan ini merupakan daerah pantai berpasir putih sepanjang 7.5 km menghadap ke Samudera Hindia.
c. Beberapa fasilitas yang telah dibangun di KEK Mandalika di antaranya: masjid, Kuta Beach Park, dan 538 lot dan kios untuk usaha mikro, kecil, dan menengah yang diberi nama kawasan Bazaar Mandalika. Sementara pembangunan fisik untuk infrastruktur besar seperti akses jalan dari Bandara Internasional Lombok menuju Mandalika hingga pembuatan sirkuit jalanan (street circuit).

   Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya meliputi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dengan sektor unggulan pertambangan dan industri turunannya, perikanan, dan pariwisata. Bentuk penanganannya adalah akselerasi pengembangan sektor-sektor unggulan. Pada Kawasan tersebut terdapat Kawasan Industri (KI) Sumbawa Barat seluas 1200 hektar, yang tertuang dalam RPJMN Tahun 2020-2024 (Perpres Nomor 18 Tahun 2020). KI Sumbawa Barat direncanakan untuk pembangunan industri hasil tambang (smelter) dan industri turunannya seperti: pupuk, semen, kabel, dan lain-lain. Smelter yang dibangun pada KI Sumbawa Barat berkapasitas Dua juta konsentrat tembaga per tahun. Konstruksi smelter ditargetkan selesai akhir tahun 2023 dan operasionalnya direncanakan awal tahun 2024.
d. Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya meliputi wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan sektor unggulan dengan sektor unggulan agroindustri, perikanan, peternakan, dan pariwisata. Bentuk penanganannya adalah pengembangan/peningkatan dan konservasi kawasan.
e. Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya meliputi wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu beserta wilayah perairannya yang berfungsi sebagai kawasan cagar biosfer dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri

(minaindustri, agroindustri, dan energi). Bentuk penanganannya adalah akselerasi sektor-sektor unggulan beserta wilayah perairannya.

SAMOTA memiliki sumber daya alam potensial dan prospektif untuk dikelola secara berkelanjutan (seperti untuk: Taman Buru, Taman Wisata Alam Laut, Taman Nasional Gunung Tambora, Kelautan dan Perikanan, Agroindustri dan Agrowisata). Teluk Saleh merupakan "Aquarium Terbesar di Dunia", diapit Pulau Moyo dan Gunung Tambora, dengan 49 pulau kecil yang mengitarinya, dengan luas 2.132 km2, sangat potensial dikembangkan menjadi kawasan ekonomi maritim unggulan. Pulau Moyo dengan luas 350 km2, mempunyai pantai indah, alam menawan dan hutan perawan. Gunung Tambora menyimpan keragaman hayati yang unik dan sangat cocok bagi pengembangan agroindustri pertanian, perkebunan dan pariwisata.

f. Kawasan Teluk Cempi - Hu'u meliputi wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Dompu dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, industri, pertambangan dan energi. Bentuk penanganannya adalah pengembangan/peningkatan sektor-sektor unggulan dan konservasi kawasan.
g. Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya meliputi wilayah Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima dengan sektor unggulan pariwisata, perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa. Bentuk penanganannya adalah pengembangan/peningkatan sektor-sektor unggulan dan konservasi kawasan.
h. Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya meliputi wilayah Kabupaten Bima dengan sektor unggulan perikanan, pariwisata, dan industri. Bentuk penanganannya adalah pengembangan/peningkatan sektor-sektor unggulan.

2. KSP dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup:
   a. Kawasan ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini berada di Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Sumbawa dengan fungsi pelestarian ekosistem hutan.
   b. Kawasan ekosistem Gunung Tambora berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, yang merupakan kawasan cagar biosfer.
   c. Kawasan ekosistem Hutan Parado berada di Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima, dengan fungsi pelestarian ekosistem hutan.

Gambar 2. 6 Kawasan Strategis Provinsi (KSP) NTB



Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi diarahkan untuk mengakselerasi sektor-sektor unggulan kawasan, meliputi:

1. Pelestarian dan peningkatan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup untuk mempertahankan dan meningkatkan keseimbangan ekosistem, melestarikan keanekaragaman hayati, mempertahankan dan meningkatkan fungsi perlindungan kawasan, melestarikan keunikan bentang alam dan melestarikan warisan budaya daerah, terdiri dari:
   a. pelestarian ekosistem hutan yang meliputi konservasi dan preservasi ekosistem, rehabilitasi hutan, serta pengelolaan hutan;
   b. mencegah pemanfaatan ruang di KSP yang berpotensi mengurangi fungsi kawasan lindung;
   c. membatasi pengembangan sarana dan infrastruktur di dalam dan di sekitar KSP yang memicu perkembangan kawasan budi daya;
   d. mengembangkan kegiatan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis provinsi yang berfungsi sebagai zona penyangga yang memisahkan kawasan lindung dengan kawasan budi daya terbangun;
   e. merehabilitasi fungsi lindung kawasan yan menurun akibat dampak kegiatan pemanfaatan ruang yang berkembang di dalam dan di sekitar KSP; dan
   f. mengembangkan dan memanfaatkan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang menerapkan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
2. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan dalam pengembangan perekonomian daerah yang produktif, efisien dan berdaya saing sesuai potensi lokal dan daya dukung lingkungan, terdiri dari:
   a. mengembangkan dan meningkatkan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan penggerak utama pengembangan wilayah yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung;

b. mengelola pemanfaatan sumber daya alam agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan; dan
c. mengembangkan kawasan strategis provinsi berorientasi industrialisasi yang mengakomodir kepentingan hulu dan hilir.

3. Pengembangan sarana dan infrastruktur pendukung serta teknologi secara berkelanjutan pada kawasan strategis provinsi, terdiri dari:
   a. mengembangkan dan meningkatkan pelayanan sarana dan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi secara terpadu yang berkelanjutan dan berbasis mitigasi bencana;
   b. meningkatkan peran serta swasta dan masyarakat dalam penyediaan dan pemeliharaan sarana dan infrastruktur; dan
   c. memanfaatkan teknologi tepat guna ramah lingkungan guna mencegah dampak negatif bagi fungsi lingkungan hidup, dan keselamatan masyarakat.
4. Pengembangan kawasan strategis untuk percepatan pembangunan kawasan tertinggal dan mengurangi kesenjangan tingkat perkembangan antar kawasan, terdiri dari:
   a. meningkatkan dan mengembangkan aksesibilitas antara kawasan strategis dengan kawasan tertinggal di sekitarnya;
   b. meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan infrastruktur pada kawasan tertinggal.

Selain kawasan strategis di atas, juga terdapat kawasan andalan nasional di Provinsi NTB sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) antara lain: (a) Kawasan Lombok dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, perikanan laut, pariwisata, industri, pertambangan dan panas bumi; (b) Kawasan Laut Selat Lombok dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut dan pariwisata; (c) Kawasan Sumbawa dan Sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, industri, pertambangan dan perikanan; (d) Kawasan Bima dengan sektor unggulan pertanian, pariwisata, perikanan, industri dan pertambangan; (e) Kawasan Andalan Lombok Utara - Bandar Kayangan dan Sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan laut, pariwisata, industri, perdagangan dan jasa, serta panas bumi.

Bandar Kayangan terletak di salah satu dari sepuluh lokasi lintasan strategis dunia (UNCTAD, 2009). Terletak di Jalur Laut II Kepulauan Nusantara, “Jalur Tol Laut” yang didedikasikan bagi dunia, sehingga kapal kapal dari Eropa, Afrika, Asia Tengah, Australia, Asia Tenggara dan Asia Timur Jauh bahkan dari negaranegara Pasifik dapat melalui jalur-jalur tersebut dengan aman. Berada di jalur ALKI II (Alur Laut Kepulauan Indonesia) yang menjadi “highway” bagi kapal kapal “extra large” dunia, rata-rata 40 kapal melewati selat Lombok per hari. Hasil kajian Bappenas 2009, Indonesia berpeluang mengembangkan global hub baru, untuk memenuhi kebutuhan kapal-kapal extra large dunia, dan Pulau Lombok merupakan lokasi paling potensial. Lombok Utara merupakan lokasi terbaik, karena memenuhi persyaratan pelabuhan laut dalam. Di samping itu, sudah tersedia ijin

lokasi dari Kementerian ATR/BPN seluas 7.373 ha serta telah ditetapkan sebagai prioritas pusat pertumbuhan baru berbasis investasi swasta sesuai Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN) 2029-2024.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional (Ripparnas), terdapat 2 (dua) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) di Provinsi NTB, yaitu Lombok-Gili Tramena (Trawangan, Meno, Air) dsk dan Moyo-Tambora dsk. Selain itu terdapat 5 (lima) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN), yaitu KSPN Rinjani dsk, KSPN Pantai Selatan Lombok dsk, KSPN Gili Tramena dsk, KSPN Moyo dsk, dan KSPN Tambora dsk. Dalam Ripparnas juga disebutkan terdapat 9 (sembilan) Kawasan Pengembangan Pariwisata Nasional (KPPN) yang terdiri dari KPPN Rinjani dsk, KPPN Gili Tramena dsk, KPPN Mataram Kota dsk, KPPN Pantai Selatan Lombok dsk, KPPN Praya-Sade dsk, KPPN Sumbawa Barat dsk, KPPN Moyo dsk, KPPN Tambora dsk, dan KPPN Bima dsk.

3. Kawasan Strategis Kabupaten/Kota

1. Kota Mataram

   Kota Mataram ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Kawasan Strategis Provinsi (KSP) serta bagian dari Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) Pulau Lombok, maka fungsi dan peran dari Kota Mataram adalah sebagai berikut:

   i. Pusat Pemerintahan Kota Mataram dan Pusat Pemerintahan Provinsi NTB;
   ii. Simpul koleksi distribusi barang dan jasa regional, serta penduduk di Provinsi NTB;
   iii. Pusat pengolahan hasil-hasil pertanian dan kelautan;
   iv. Pusat kegiatan pelayanan umum, seperti pendidikan, kesehatan, dan peribadatan;
   v. Mempunyai Daya tarik terhadap kota-kota daerah sekitar (hinterland) secara khusus dan kota-kota kabupaten di Provinsi NTB pada umumnya; dan
   vi. Salah satu daerah tujuan wisata di Provinsi NTB.

2. Kabupaten Lombok Utara

   Kawasan Strategis Kabupaten Lombok Utara dari Sudut Kepentingan Fungsi Dan Daya Dukung Lingkungan Hidup adalah Kawasan Strategis Pandan Mas meliputi seluruh kawasan hutan Pandan Mas yang terdapat di Desa Bentek Kecamatan Gangga;

   a. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :
      (a) Kawasan Strategis Sire - Medane meliputi sebagian Kecamatan Tanjung (Desa Sigar Penjalin, dan Desa Medana) dengan sektor unggulan Pariwisata;
      (b) Kawasan Strategis Perkotaan Tanjung meliputi sebagian Kecamatan Tanjung (Desa Sokong, Desa Tanjung, dan Desa Jenggala) dan Sebagian

Kecamatan Gangga (Desa Bentek, Desa Gondang dan Desa Genggelang); dengan sektor unggulan Perdagangan dan Jasa;

(c) Kawasan Strategis Gangga terdapat di Desa Genggelang Kecamatan
(d) Gangga seluas kurang lebih 589 Ha. Dengan sektor unggulan Perkebunan dan Agro Industri;
(e) Kawasan Strategis Agropolitan Kayangan terdapat di Kecamatan Kayangan meliputi Desa Kayangan, Desa Sesait, Desa Santong, Desa Gumantar, Desa Dangiang, dan Desa Pendua dengan sector unggulan Perkebunan dan Agropolitan; dan
(f) Kawasan Strategis Carik yang terdapat di Kecamatan Bayan meliputi Desa Sukadana dan Desa Anyar perdagangan dan jasa.

b. Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut Kepentingan Sosial Budaya adalah Kawasan Situs Budaya Masyarakat Adat Bayan yang terdapat di Kecamatan Bayan meliputi Desa Bayan, Desa Senaru dan Desa Sukadana (Dusun Segenter).

3. Kabupaten Lombok Barat

Kawasan strategis kabupaten Lombok Barat terdiri atas :

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
(a) Tunggal Kendali meliputi sebagian wilayah Kecamatan Batulayar, Gunung Sari, Lingsar, Narmada, Kediri, Labuapi dengan sektor unggulan perdagangan jasa, industri dan pariwisata;
(b) Gerung sebagai pusat pemerintahan, dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa;
(c) Sekotong dan sekitarnya meliputi seluruh wilayah Kecamatan Sekotong dan sebagian wilayah Kecamatan Lembar dengan sektor unggulan pariwisata, pertambangan, industri, perdagangan dan jasa, perikanan dan pertanian;
(d) Agropolitan Lebah Sempage di Kecamatan Narmada dengan sektor unggulan pertanian dan agrowisata; dan
(e) Senggigi di Kecamatan Batulayar dengan sektor unggulan pariwisata dan perikanan.

b. kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya, meliputi :
(a) Kediri sebagai Pusat Kajian Islam dan Pusat Pesantren dengan sektor unggulan pendidikan santri; dan
(b) Narmada sebagai Pusat Kajian dan Inventarisasi Seni-Budaya Lombok dengan sektor unggulan pariwisata budaya.

c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup, meliputi :
(a) Hutan Sesaot dan sekitarnya berada di Kecamatan Narmada dan Lingsar; dan
(b) Hutan Pusuk Pass dan sekitarnya berada di Kecamatan Batulayar dan Gunung Sari.

4. Kabupaten Lombok Tengah

Berdasarkan Perda Kabupaten Lombok Tengah No.7 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Lombok Tengah telah ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) dari kepentingan pertumbuhan ekonomi yaitu : (i) Kawasan Kuta dsk; (ii) Kawasan Selong Belanak dsk; (iii) Kawasan Sade dsk; (iv) Kawasan Perkotaan Praya; dan (v) Kawasan Agropolitan Aik Meneng; (vi) Kawasan Minapolitan Gerupuk dan Awang.

5. Kabupaten Lombok Timur

   Kawasan Strategis Kabupaten Lombok Timur berdasarkan kepentingan, terdiri dari:

   a. KSK untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi,meliputi :
      (a) Kawasan pengembangan perkotaan Selong merupakan pusat permukiman dan industri, meliputi Kecamatan Selong, sebagian Kecamatan Labuhan Haji, sebagian Kecamatan Sukamulia, dan sebagian Kecamatan Masbagik, sebagian Kecamatan Pringgasela dan sebagian Kecamatan Sakra;
      (b) Penetapan kawasan agropolitan Sembalun meliputi Kecamatan Sembalun dengan sektor unggulan hortikultura;
      (c) Kawasan sentra produksi peternakan dan pertanian Aikmel-Wanasaba meliputi Kecamatan Aikmel dan sebagian Kecamatan Wanasaba dengan sektor unggulan ternak sapi dan sektor unggulan jagung; dan
      (d) Penetapan kawasan minapolitan Keruak-Jerowaru meliputi wilayah Kecamatan Keruak dan Kecamatan Jerowaru dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
   b. KSK untuk kepentingan sosial budaya meliputi:
      (a) Kawasan makam Selaparang di Kecamatan Suela dan kawasan Makam Kenaot di Kecamatan Sakra; dan
      (b) Kawasan rumah adat tradisional di Kecamatan Sembalun dan Kecamatan Suela.
   c. KSK untuk kepentingan lingkungan hidup meliputi:
      (a) Kawasan Kebun Raya Lombok di Lemor Kecamatan Suela; dan
      (b) Kawasan ekosistem hutan Sambelia di Kecamatan Sambelia.

6. Kota Bima

   Berdasarakan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bima Tahun 2011-2031 penetapan Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

   a. Kawasan Pantai Teluk Bima yang meliputi Pantai Amahami-Ni'u di Kelurahan Dara, Pantau Ule – Songgela di Kelurahan Jatiwangi dan Pantai Bonto – So Ati di Kelurahan Kolo dengan Sektor Unggulan Pariwisata;
   b. Kawasan Pasar Raya yang meliputi kelurahan Tanjung, Kelurahan Dara, dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa;
   c. Kawasan Oi Fo'o yang meliputi kelurahan Oi Fo'o, kelurahan Nitu dan Kelurahan Rontu dengan sektor unggulan industry dan pertambangan.

Selanjutnya Kawasan strategis kota berdasarkan kepentingan sosial budaya meliputi Kawasan Asi Mbojo dan sekitarnya meliputi Kelurahan Paruga, Kelurahan Sarae, Kelurahan Melayu dan Kelurahan Dara. Adapun Kawasan strategis kota berdasarkan fungsi dan dayadukung lingkungan hidup adalah Kawasan hutan maria di Kelurahan Lampe dan Kawasan Nanga Nae Kapenta di Kelurahan Jatibaru dan Kelurahan Kolo yang berfungsi konservasi.

7. Kabupaten Bima

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009-2029 dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bima Tahun 2011-2031, Kawasan Strategis Kabupaten Bima dengan sudut kepentingan ekonomi :

a. Kawasan Lewamori, meliputi Kecamatan Woha sebagai ibukota Kabupaten Bima dengan fungsi utama sebagai pusat pemerintahan serta perdagangan dan jasa, Kawasan Minapolitan, yang berpusat di Desa Penapali Kecamatan Woha dan Kawasan Pariwisata di Pantai Kalaki;
b. Kawasan Strategis Kota Terpadu Mandiri (KTM) Tambora dengan sektor unggulan pertanian, pertenakan dan perkebunan;
c. Kawasan Strategis Wera yang meliputi Pai dan Oi Tui dengan sektor unggulan peternakan (sapi), perikanan (rumput laut), dan Pariwisata.
d. Kawasan Strategis Monta yang meliputi Wilamaci, Laju, Doro O'o, Waworada, Tolo Uwi, dan sekitarnya dengan sektor unggulan perikanan (rumput laut), perikanan tangkap, dan pariwisata (pantai wane dan pantai rontu).
e. Kawasan Strategis Lambu yang meliputi Sumi dan Nggelu dengan sektor unggulan peternakan (sapi), pertanian (jagung), dan perikanan tangkap.

Kawasan strategis dengan sudut Kepentingan Lingkungan Hidup adalah Kawasan Konservasi Laut Daerah (KKLD) Gili Banta;

Kawasan strategis dengan sudut kepentingan sosial budaya adalah kawasan Strategis Cagar Budaya yang meliputi :

a. Kompleks rumah adat-Wawo;
b. Perkampungan tradisional Sambori;
c. Perkampungan tradisional Mbawa-Donggo;
d. Kompleks Dana Mbojo-Donggo; dan
e. Situs Wadu Pa'a-Soromandi

Kawasan strategis dengan sudut kepentingan pertahanan dan keamanan yang meliputi :

a. Kawasan peruntukan bagi kepentingan pemeliharaan keamanan dan pertahanan negara berdasarkan geostrategi nasional;
b. Kawasan peruntukan basis militer, daerah ujicoba sistem persenjataan dan /atau kawasan industri sistem persenjataan;
c. Pembatasan dan penataan antara lahan terbangun disekitar pertahanan dan keamanan; dan
d. Penetapan jarak bebas aman kawasan pertahanan dan keamanan.

8. Kabupaten Dompu

   Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Dompu Tahun 2012-2032 kawasan strategis Kabupaten Dompu sebagai berikut :

   a. Kawasan strategis untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi terdiri atas Kawasan kempo, pekat dan sekitarnya dengan sektor unggulan pertanian, peternakan, perikanan, perkebunan dan pertambangan.
   b. Kawasan Teluk Cempi dan sekitarnya dengan sektor pariwisata, perikanan dan pertambangan energi.
   c. Kawasan Industri terpadu Manggalewa dengan sektor unggulan industry pengolahan; dan Kawasan dompu mandiri dan sekitranya degan sektor unggulan perdagangan dan jasa serta sebagai pusat pemerintahan.
   d. Selanjutnya Kawasan strategis kabupaten dari sudut kepentingan sosial budaya meliputi situs nangasia, desa budaya ronggo, situs dorobata dan arena pacuan kuda tradisional lepadi. Untuk Kawasan strategis kabupaten dari sudut lingkungan hidup yaitu Kawasan konservasi laut daerah (KKLD) Pulau Satonda.

9. Kabupaten Sumbawa

   Dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumbawa 2011-2031 mempunyai Kawasan strategis kabupaten sebagai berikut :

   a. Kawasan strategis dengan sudut pandang pertumbuhan ekonomi meliputi Kawasan Kota Samawa Rea dengan sektor unggulan perdagangan, jasa-jasa dan industry; Kawasan Kota Mandiri Labangka dengan sektor unggulan pertanian, peternakan dan industry; Kawasan agropolitan emparano dengan sektor unggulan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dan pariwisata; Kawasan agropolitan sumbawa selatan dengan sektor unggulan perdagangan, jasa, industry, pertanian, perkebunan, peternakan, kelautan dan perikanan, pertambangan, pariwisata; Kawasan sili-maci-panobu dengan sektor unggulan pariwisata.
   b. Kawasan strategis dengan sudut kepentingan lingkungan hidup yang meliputi Brangpelat Batu Lanteh.
   c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosialn budaya meliputi Kawasan sekitar istana dalam loka/wisma praja, Bala Kuning merupakan Kawasan konservasi budaya di Sumbawa Besar.

10. Kabupaten Sumbawa Barat

    Kawasan Strategis Kabupaten dari sudut kepentingan dari pertumbuhan ekonomi terdiria atas :

    a. Kawasan strategis perkotaan Taliwang yang merupakan Ibukota Kabupaten;
    b. Kawasan Strategis Agro Industri Pototano dikecaatan Pototano dengan sektor unggulan pertanian, industry dan pariwisata.

c. Kawasan strategis agropolitan kemutar telu meliputi kecamatan seteluk, kecamatan jereweh dan kecamatan Brang Rea dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan.
d. Kawasan strategis sekongkang dengan sektor unggulan pertanian, perkebunan, pariwisata dan pertambangan.
e. Kawasan strategis Labuhan Lalar dengan sektor unggulan budidaya laut, budidaya air payau/tambak, pariwisata bahari, pelestarian ekosistem dan Kawasan Pelabuhan.
f. Kawasan strategis sekitar Kawasan industry sumbawa barat dengan sektor unggulan industri, perikanan tangkap, budidaya laut, pertambangan, wisata bahari, pelestarian ekosistem dan Kawasan Pelabuhan.
g. Kawasan strategis minapolitan teluk kertasari dengan sektor unggulan perikanan tangkap, perikanan budidaya, pertanian dan wisata bahari.
h. Kawasan strategis agropolitan Brang Ene dengan sektor unggulan pertanian, peternakan dan perkebunan.
i. Selanjutnya Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya adalah Kawasan desa Mantar di Kecamatan Poto Tano.
j. Serta Kawasan strategis dari kepentingan lingkungan hidup meliputi Kawasan strategis Danau Lebo Taliwang sebagai Kawasan konservasi nasional dan kawasan strategis perbukitan di kecamatan Taliwang sebagai Kawasan lindung.

4. Kawasan Geopark

4.1 Geopark Rinjani

Kawasan Rinjani dan sekitarnya memiliki keragaman geologi, keragaman hayati, dan keragaman budaya yang bernilai internasional. Selain merupakan KSN, Kawasan Rinjani dan sekitarnya juga merupakan KSPN, KPPN dan telah diakui sebagai Taman Bumi dunia UNESCO (UNESCO Global Geopark). Potensi Geopark Rinjani Lombok dari yang sudah diidentifikasi terdiri dari 22 situs Geologi (Geo Herritage), 8 Situs Biologi (Bio Herritage), dan 17 situs budaya (Culture Herritage). Persebarannya meliputi wilayah Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Mataram. Salah satu pesona unggulan Geopark Rinjani adalah Danau Segara Anak yang berada pada ketinggian 2.010 meter dari permukaan laut, Kaldera Samalas memiliki ukuran sekitar 6 km x 8,5 km dan tinggi 800 meter yang dihasilkan dari letusan gunung berapi Samalas pada 1257. Dalam pengembangannya Rinjani-Lombok UNESCO Global Geopark (UGG) selalu berpijak pada 3 pilar utama yaitu konservasi, pendidikan dan pembangunan perekonomian berkelanjutan masyarakat. Dengan pembangunan KSPN diharapkan dapat meningkatkan konektivitas, aksesbilitas, dan mobilitas serta dapat mendukung pertumbuhan kepariwisataan dan ekonomi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

4.2 Geopark Tambora

Geopark Tambora resmi menjadi Geopark Nasional sejak tahun 2017. Geopark Tambora terletak di Pulau Sumbawa mencakup Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kabupaten Sumbawa. Geopark Tambora juga mencakup Samota Biosphere Reserve, sebagai cagar biosper samota yang ditetapkan UNESCO pada tahun 2019. Geosite yang terdapat di Kawasan Geopark Tamboora antara lain Kaldera Gunung Tambora, Danau Kawah Tambora, Doro Afi To'I, Oi Panihi, Oi Marai, Pulau Satonda, Danau satonda, Fosil Kima, Doro Peti, Doro Ncanga, Doro Bente dan Doro Tabe. Hal yang sangat strategis dari Geopark Tambora adalah akibat letusan Gunung Tambota yang dahsyat pada tahun 1815, geopark ini memiliki geodiversity, biodiversity dan culture diversity yang unit. Saat ini Geopark Tambora berupaya untuk menjadi bagian dari UNESCO Global Geopark.

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

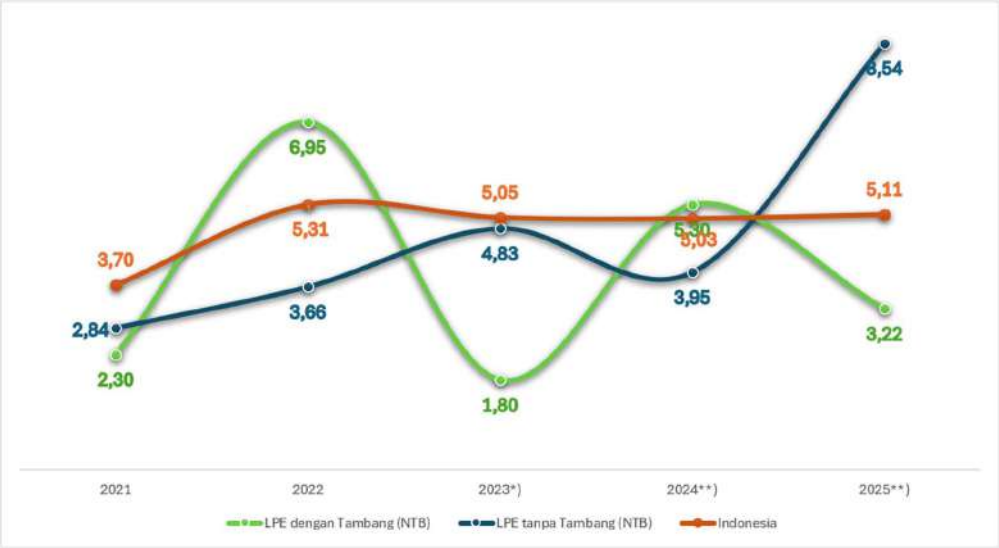
Aspek kesejahteraan masyarakat bertujuan memberikan gambaran kondisi masyarakat NTB dari berbagai dimensi yang mempengaruhi kualitas hidup dan kebahagiaan masyarakat. Aspek ini menjadi tujuan akhir dari penyelenggaraan pembangunan daerah yaitu upaya menciptakan kondisi kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

2.1.2.1 Pertumbuhan dan Distribusi Produk Domestik Regional Bruto

Selama periode 2021–2025, perekonomian Provinsi NTB masih sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor pertambangan sebagai motor utama pertumbuhan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi NTB melonjak signifikan saat sektor pertambangan mengalami peningkatan produksi dan ekspor, seperti pada tahun 2022. Tingginya ketergantungan terhadap sektor tambang menyebabkan pertumbuhan ekonomi NTB menjadi fluktuatif dan rentan terhadap dinamika pasar global, produksi, dan harga komoditas tambang.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi dari sektor non-tambang mulai bergerak lebih stabil dan berkelanjutan. Tingkat pertumbuhan sektor pertanian, perdagangan, pariwisata, konstruksi, industri pengolahan, dan jasa mampu menjadi penopang utama ekonomi masyarakat secara lebih inklusif. Tahun 2025, pertumbuhan ekonomi sektor non-tambang menunjukkan peningkatan yang sangat kuat, menandakan bahwa struktur ekonomi NTB mulai bergerak menuju penguatan sektor-sektor produktif non-ekstraktif. Hal ini menjadi indikasi berjalannya transformasi ekonomi daerah melalui penguatan hilirisasi, diversifikasi sektor unggulan, serta peningkatan investasi pada sektor non-tambang. Harapannya, pertumbuhan ekonomi NTB menjadi lebih stabil, berkualitas, inklusif dan berkelanjutan.

Grafik 2. 19 Pertumbuhan Ekonomi NTB Tahun 2021-2025



Sumber: BPS NTB, 2026

Dilihat dari PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) kabupaten/kota di Provinsi NTB tahun 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang konsisten di seluruh wilayah. Kondisi ini mencerminkan adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi, peningkatan produksi barang dan jasa, serta meningkatnya nilai transaksi ekonomi daerah dari tahun ke tahun. Secara agregat, PDRB NTB meningkat dari Rp140,12 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp192,95 triliun pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 37,7 persen selama lima tahun terakhir. Kenaikan tersebut menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi terus berlangsung dan ditopang oleh sektor unggulan daerah seperti pertambangan, perdagangan, pertanian, pariwisata, industri pengolahan, dan jasa.

Kabupaten Sumbawa Barat memiliki nilai PDRB terbesar yang didorong oleh sektor pertambangan dan industri pengolahan. Sementara itu, Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Mataram juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi utama melalui sektor perdagangan, jasa, pariwisata, dan pertanian.

Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa, Bima, dan Dompu menunjukkan pertumbuhan yang stabil dengan dukungan sektor pertanian, perdagangan, dan jasa. Adapun Kota Bima dan Lombok Utara memiliki nilai PDRB relatif lebih kecil, meskipun tetap mengalami peningkatan setiap tahun.

Tabel 2. 22 PDRB ADHB Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021 - 2025 (Rp.Milyar)

No	Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Rp.Milyar				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	15.407,26	16.561,85	18.121,01	19.159,98	20.583,19
2	Lombok Tengah	17.686,60	19.243,33	21.250,62	22.604,87	24.165,32
3	Lombok Timur	21.053,65	22.599,76	24.577,74	26.292,68	28.234,56
4	Sumbawa	15.021,40	16.107,72	17.510,43	18.517,44	19.753,29

No	Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Rp.Milyar				
		2021	2022	2023	2024	2025
5	Dompu	7.339,20	7.856,00	8.510,66	9.064,03	9.705,25
6	Bima	11.856,10	12.734,25	13.946,66	14.756,77	15.612,85
7	Sumbawa Barat	23.758,07	31.512,49	29.641,67	36.564,87	37.349,02
8	Lombok Utara	4.706,60	5.050,98	5.558,79	5.982,72	63.71,54
9	Kota Mataram	19.691,62	21.182,26	22.780,96	24.200,34	26.069,8
10	Kota Bima	4.300,51	4.571,61	4.986,32	5.313,65	5.641,13
11	NTB	140.115,27	156.942,67	166.395,45	182.265,62	192.951,54

Sumber : BPS NTB, 2026

Secara umum, pertumbuhan ekonomi NTB masih didominasi wilayah berbasis pertambangan dan perkotaan, sehingga diperlukan pemerataan investasi, penguatan hilirisasi, dan pengembangan sektor unggulan daerah agar pertumbuhan ekonomi lebih merata antarwilayah.

Selanjutnya, PDRB NTB Atas Dasar Harga Konstan tahun 2010 mengalami peningkatan signifikan dari Rp95,44 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp112,94 triliun pada tahun 2025, yang menunjukkan adanya peningkatan kapasitas produksi barang dan jasa. Peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan ekonomi yang cukup stabil di seluruh wilayah NTB. Kabupaten Sumbawa Barat masih menjadi daerah dengan nilai PDRB terbesar, didorong oleh sektor pertambangan. Namun, terjadi fluktuasi pada beberapa tahun akibat dinamika produksi tambang, sehingga pertumbuhan ekonomi wilayah ini sangat dipengaruhi kinerja sektor ekstraktif.

Lombok Timur, Lombok Tengah, dan Kota Mataram menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Lombok Timur didukung sektor pertanian dan perdagangan, Lombok Tengah berkembang melalui pariwisata dan pembangunan kawasan strategis, sedangkan Kota Mataram bertumpu pada sektor perdagangan dan jasa. Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa, Bima, Dompu, Lombok Utara, dan Kota Bima juga mengalami peningkatan ekonomi secara bertahap, terutama dari sektor pertanian, perdagangan, dan jasa lokal. Secara umum, data ADHK menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi NTB terus meningkat, meskipun masih terdapat ketimpangan antarwilayah karena dominasi sektor pertambangan dan pusat perkotaan

Tabel 2. 23 PDRB ADHK Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021 - 2025 (Rp.Milyar)

No	Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Rp.Milyar				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	10.473,21	10.834,22	11.379,48	11.723,12	12.280,94
2	Lombok Tengah	12.037,48	12.464,40	13.183,34	13.624,03	14.287,28
3	Lombok Timur	14.410,21	14.867,66	15.508,94	16.160,30	16.956,31
4	Sumbawa	10.220,82	10.548,58	10.929,06	11.269,83	11.752,86
5	Dompu	4.979,08	5.125,83	5.288,43	5.479,92	5.740,37
6	Bima	8.085,69	8.314,35	8.640,92	8.884,21	9.170,05
7	Sumbawa Barat	16.415,89	20.379,44	18.265,35	20.458,11	19.842,09
8	Lombok Utara	3.262,15	3.376,02	3.548,23	3.699,96	3.853,89

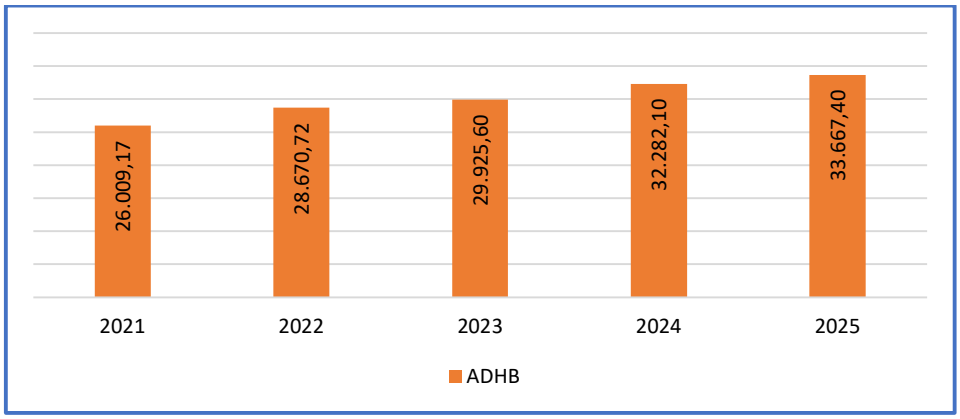
No	Kabupaten/Kota	Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Rp.Milyar				
		2021	2022	2023	2024	2025
9	Kota Mataram	13.475,87	13.951,85	14.581,39	15.182,76	16.007,54
10	Kota Bima	2.938,98	3.018,40	3.174,09	3.302,30	3.432,89
11	NTB	95.437,86	102.073,66	103.906,22	109.415,25	112.939,04

Sumber : BPS NTB, 2026

2.1.2.2 PDRB Per Kapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut.

Grafik 2. 20 PDRB Per Kapita Tahun 2021-2025 (Rp. Ribu)



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

PDRB per kapita Provinsi NTB atas dasar harga berlaku (ADHB) selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat. Pada tahun 2021, PDRB per kapita tercatat sebesar Rp26,01 juta per penduduk dan meningkat menjadi Rp28,67 juta pada tahun 2022. Selanjutnya pada tahun 2023 kembali naik menjadi Rp29,93 juta, kemudian mencapai Rp32,28 juta pada tahun 2024, dan meningkat lagi menjadi Rp33,67 juta pada tahun 2025.

Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa secara rata-rata kemampuan ekonomi dan pendapatan masyarakat NTB terus mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Kenaikan PDRB per kapita juga mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, baik yang berasal dari sektor unggulan seperti pertambangan, industri pengolahan, pertanian, perdagangan, pariwisata, maupun jasa lainnya. Beroperasinya industri pengolahan dan smelter turut memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan nilai tambah ekonomi daerah sehingga berdampak pada meningkatnya PDRB per kapita NTB.

Secara umum, pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2023–2024, peningkatan PDRB per kapita mencapai lebih dari Rp 2 juta. Terjadi akselerasi pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, tahun 2025 pertumbuhan masih berlanjut meskipun dengan laju yang lebih moderat dan kondisi perekonomian mulai bergerak lebih stabil. Meningkatnya PDRB per kapita menjadi indikator positif bagi pembangunan daerah, karena menggambarkan adanya peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Peningkatan ini perlu diimbangi dengan pemerataan hasil pembangunan. Untuk menjamin manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemerintah Provinsi NTB berupaya untuk melakukan penguatan sektor UMKM, penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

2.1.2.3 Inflasi

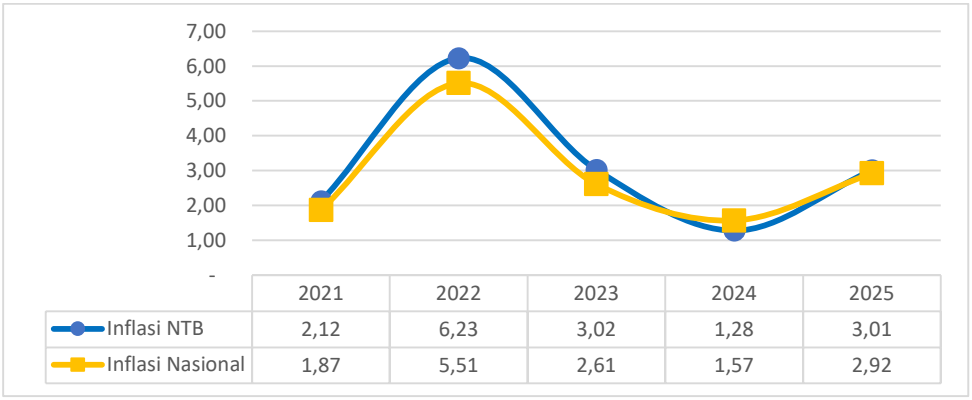
Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Andil Inflasi merupakan besarnya sumbangan setiap komoditas yang mengalami fluktuasi harga terhadap inflasi atau deflasi yang terjadi di suatu kota atau secara nasional. Besarnya nilai perubahan indeks (*inflasi/deflasi*) yang terjadi setiap bulan, merupakan gabungan andil dari jenis barang/jasa yang mengalami fluktuasi harga pada bulan yang bersangkutan.

Perkembangan inflasi Provinsi NTB selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang relatif fluktuatif, namun secara umum masih berada dalam rentang yang terkendali dan sejalan dengan dinamika inflasi nasional. Pada tahun 2025 inflasi NTB tercatat sebesar 3,01 persen, sedikit di atas rata-rata nasional 2,92 persen. Capaian ini masih berada dalam koridor sasaran inflasi nasional yang ditetapkan Bank Indonesia, sehingga dapat dimaknai sebagai indikator bahwa pengendalian harga pada level provinsi cukup efektif.

Secara keseluruhan, perkembangan inflasi NTB selama 2021–2025 menunjukkan bahwa perekonomian daerah mampu menjaga stabilitas harga meskipun menghadapi tekanan eksternal dan dinamika ekonomi global. Stabilitas inflasi yang terjaga menjadi faktor penting dalam mendukung daya beli masyarakat, menjaga iklim investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Ke depan, penguatan ketahanan pangan daerah, kelancaran distribusi logistik, serta sinergi pengendalian inflasi antara pemerintah daerah dan pemangku kepentingan perlu terus diperkuat agar inflasi tetap terkendali dan tidak mengganggu kesejahteraan masyarakat.

Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTB Tahun 2021–2025 adalah sebagai berikut:

Grafik 2. 21 Perkembangan Inflasi Nasional dan Provinsi NTB Tahun 2021–2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Inflasi NTB	2,12	6,23	3,02	1,28	3,01
Inflasi Nasional	1,87	5,51	2,61	1,57	2,92

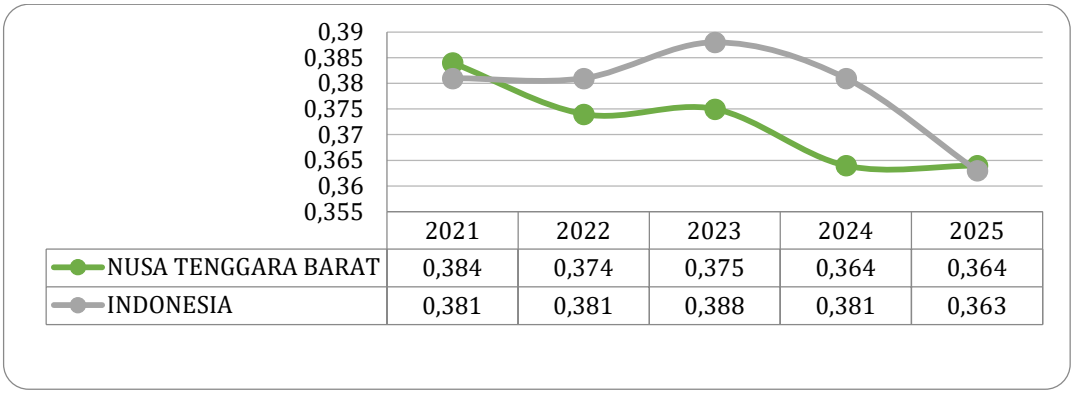
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

2.1.2.4 Indeks Gini

Salah satu ukuran ketimpangan yang sering digunakan adalah Gini Ratio, nilai Gini Ratio berkisar antara 0 - 1. Nilai Indeks Gini 0 (nol) menunjukkan distribusi pendapatan "merata sempurna", Nilai Indeks Gini 1 (satu) menunjukkan distribusi pendapatan "timpang sempurna". Semakin besar nilai Indeks Gini, semakin tinggi pula tingkat ketimpangan pendapatan/pengeluaran antar kelompok penduduk berdasarkan golongan pengeluaran.

Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya perbaikan tingkat pemerataan pendapatan masyarakat. Nilai Gini Ratio NTB mengalami tren menurun dari 0,384 pada tahun 2021 menjadi 0,364 pada tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di NTB semakin mengecil dan hasil pembangunan mulai lebih merata dirasakan oleh masyarakat.

Grafik 2. 22 Perkembangan Gini Ratio Provinsi NTB dan Nasional Per Septembear Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
NUSA TENGGARA BARAT	0,384	0,374	0,375	0,364	0,364
INDONESIA	0,381	0,381	0,388	0,381	0,363

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Secara umum, dibandingkan capaian Nasional, NTB berhasil menunjukkan tren penurunan ketimpangan yang lebih konsisten dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa hasil pembangunan ekonomi di NTB mulai lebih inklusif dan

mampu menjangkau kelompok masyarakat yang lebih luas. Meski demikian, pemerintah daerah tetap perlu memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah, peningkatan kualitas lapangan kerja, penguatan UMKM, serta akses pendidikan dan layanan dasar agar capaian pemerataan tersebut dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan.

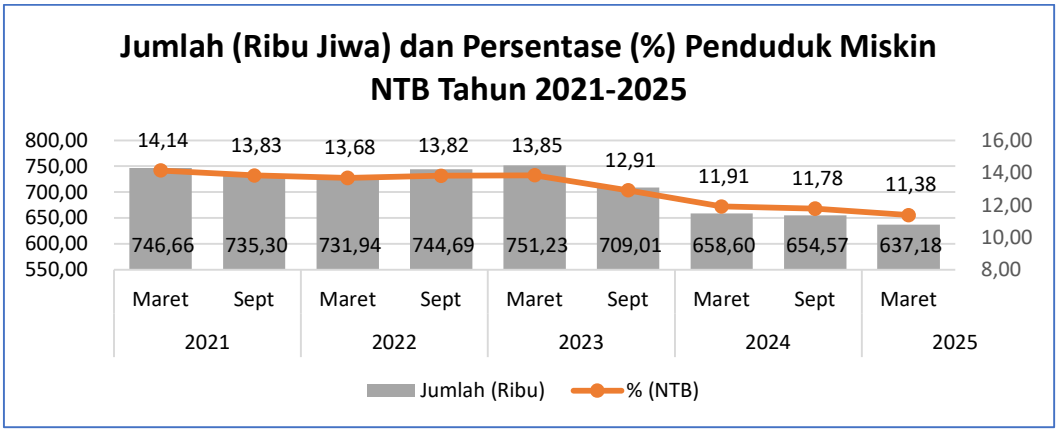
2.1.2.5 Jumlah dan Tingkat Kemiskinan Penduduk

Kemiskinan di suatu daerah merujuk pada kondisi dimana sebagian besar penduduk dalam daerah tersebut mengalami keterbatasan akses terhadap kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal yang layak, pendidikan, dan layanan kesehatan. Kemiskinan sering kali diukur dengan menggunakan ambang batas kemiskinan, yaitu tingkat pendapatan di bawah standar yang dianggap cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar tersebut. Kemiskinan bukan hal yang terbentuk dengan sendirinya, tidak melekat dari aspek lain, kemiskinan merupakan interaksi dalam kehidupan manusia yaitu dari beberapa aspek utamanya yang berkaitan dengan aspek sosial serta aspek ekonomi.

Jumlah dan persentase penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2025, terlihat bahwa tingkat kemiskinan mengalami tren penurunan secara bertahap. Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin tercatat sebesar 746,66 ribu jiwa dengan persentase kemiskinan mencapai 14,14 persen. Selanjutnya, pada September 2021 hingga Maret 2023, angka kemiskinan cenderung berfluktuasi namun masih berada pada tingkat yang relatif tinggi. Bahkan pada Maret 2023 jumlah penduduk miskin sempat meningkat menjadi 751,23 ribu jiwa, meskipun persentasenya sedikit lebih rendah dibanding tahun 2021, yaitu 13,85 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi masyarakat pada periode tersebut belum berlangsung secara merata.

Penurunan yang cukup signifikan mulai terlihat pada September 2023. Jumlah penduduk miskin turun menjadi 709,01 ribu jiwa dengan persentase sebesar 12,91 persen. Tren penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2024 hingga 2025. Pada Maret 2024 jumlah penduduk miskin tercatat 658,60 ribu jiwa dengan persentase 11,91 persen, kemudian kembali menurun pada September 2024 menjadi 654,57 ribu jiwa atau 11,78 persen. Penurunan paling rendah terjadi pada Maret 2025, yaitu sebesar 637,18 ribu jiwa dengan persentase kemiskinan 11,38 persen.

Grafik 2. 23 Jumlah (Ribu Jiwa) dan Persentase (%) Penduduk Miskin NTB Tahun 2021-2025



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2026

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa kondisi kemiskinan di NTB mengalami perbaikan yang cukup positif selama periode 2021–2025. Dalam kurun waktu tersebut, jumlah penduduk miskin berhasil berkurang lebih dari 100 ribu jiwa, sementara persentase kemiskinan turun sekitar 2,76 poin persen. Penurunan ini mengindikasikan adanya peningkatan kondisi ekonomi masyarakat yang kemungkinan didukung oleh pertumbuhan ekonomi daerah, meningkatnya kesempatan kerja, pemulihan sektor usaha dan pariwisata, serta berbagai program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan dan perlindungan sosial masyarakat.

Berdasarkan Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021–2025", secara umum jumlah penduduk miskin di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren menurun hampir di seluruh kabupaten/kota. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi sosial ekonomi masyarakat dari tahun ke tahun, meskipun pada beberapa daerah sempat terjadi kenaikan pada tahun tertentu.

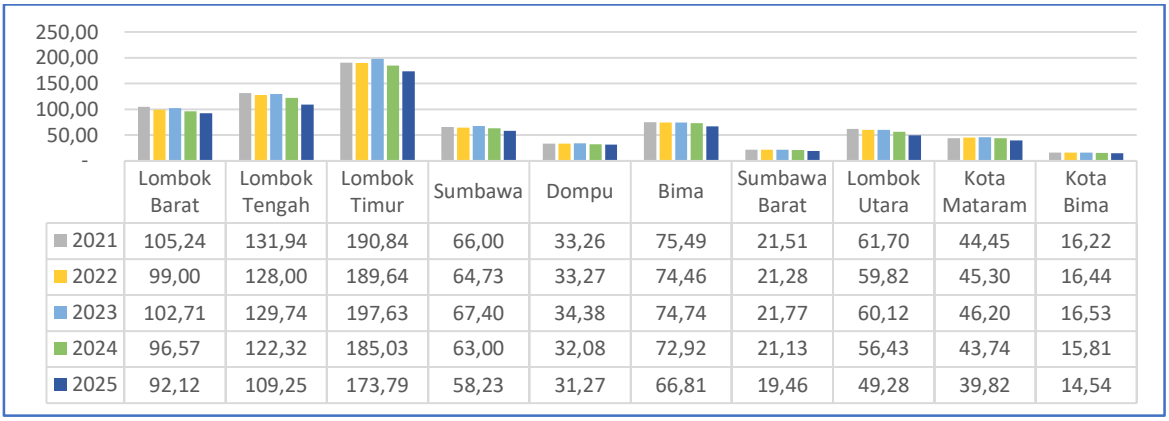
Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 jumlah penduduk miskin di daerah ini mencapai 190,84 ribu jiwa dan sempat meningkat menjadi 197,63 ribu jiwa pada tahun 2023. Namun demikian, angka tersebut kemudian menurun menjadi 173,79 ribu jiwa pada tahun 2025. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat yang menunjukkan penurunan cukup signifikan. Lombok Tengah turun dari 131,94 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 109,25 ribu jiwa pada tahun 2025, sedangkan Lombok Barat menurun dari 105,24 ribu jiwa menjadi 92,12 ribu jiwa.

Di Pulau Sumbawa, Kabupaten Bima masih memiliki jumlah penduduk miskin tertinggi dibanding daerah lainnya, meskipun angkanya juga mengalami penurunan dari 75,49 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 66,81 ribu jiwa pada tahun 2025. Kabupaten Sumbawa mengalami penurunan dari 66,00 ribu jiwa menjadi 58,23 ribu jiwa, sementara Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan penurunan yang relatif kecil namun tetap stabil.

Sementara itu, daerah perkotaan seperti Kota Mataram dan Kota Bima memiliki jumlah penduduk miskin yang lebih rendah dibanding kabupaten lainnya. Kota Mataram

mengalami penurunan dari 44,45 ribu jiwa pada tahun 2021 menjadi 39,82 ribu jiwa pada tahun 2025. Adapun Kota Bima menjadi daerah dengan jumlah penduduk miskin paling rendah setiap tahunnya, yaitu dari 16,22 ribu jiwa pada tahun 2021 turun menjadi 14,54 ribu jiwa pada tahun 2025.

Grafik 2. 24 Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025 (Persen)



	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Lombok Utara	Kota Mataram	Kota Bima
2021	105,24	131,94	190,84	66,00	33,26	75,49	21,51	61,70	44,45	16,22
2022	99,00	128,00	189,64	64,73	33,27	74,46	21,28	59,82	45,30	16,44
2023	102,71	129,74	197,63	67,40	34,38	74,74	21,77	60,12	46,20	16,53
2024	96,57	122,32	185,03	63,00	32,08	72,92	21,13	56,43	43,74	15,81
2025	92,12	109,25	173,79	58,23	31,27	66,81	19,46	49,28	39,82	14,54

Sumber : BPS NTB, 2026 (data diolah)

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di Provinsi NTB telah memberikan hasil yang cukup baik. Meskipun demikian, beberapa daerah seperti Lombok Timur masih memerlukan perhatian lebih besar karena jumlah penduduk miskinnya masih relatif tinggi dibanding kabupaten/kota lainnya.

2.1.2.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks yang mengukur pencapaian perkembangan pembangunan non-fisik suatu daerah dalam jangka panjang yang direpresentasikan oleh tiga dimensi meliputi: umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kualitas hidup yang layak. IPM memiliki banyak manfaat baik bagi penyelenggaraan pemerintahan maupun bagi masyarakat sebagai objek dan subjek dari pembangunan. Selain sebagai indikator penting dalam mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia, manfaat dari IPM antara lain:

1. IPM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan manusia suatu wilayah.
2. Bagi pemerintah daerah, IPM digunakan sebagai salah satu alokator untuk menghitung Dana Alokasi Umum (DAU).
3. Pemerintah mengunakan IPM sebagai salah satu indikator untuk menentukan target pembangunan dalam pembahasan alokasi makro di DPR RI.
4. Komponen IPM Harapan Lama Sekolah, Rata-rata Lama Sekolah dan Pengeluaran digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah

Mengikuti konsep UNDP, IPM mengukur capaian pembangunan manusia dengan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Untuk itu IPM dibangun menggunakan pendekatan tiga dimensi dasar yaitu: (1) Umur panjang dan hidup sehat *(a long and healthy life)*, (2) Pengetahuan *(knowledge)*, dan (3) Standar hidup layak *(decent standard of living)*. Ketiga dimensi tersebut telah digunakan dalam penghitungan baik IPM metode lama maupun metode baru, namun dalam metode baru telah dimutakhirkan komponen penyusunnya. Pada penghitungan metode lama untuk dimensi Umur panjang dan hidup sehat digunakan komponen Angka Harapan Hidup saat lahir, Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah. Adapun untuk mengukur standar hidup layak digunakan komponen Produk Domestik Bruto (PDB) per kapita. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi indeks komposit digunakan rata-rata aritmatik. Karena terdapat dua komponen dalam dimensi pengetahuan digunakan bobot dalam penghitungan dimensi tersebut, angka melek huruf diberi bobot satu pertiga dan rata-rata lama sekolah diberi bobot dua per tiga.

Untuk penghitungan metode baru diperkenalkan dua komponen baru untuk menghitung dimensi pendidikan yaitu Harapan Lama Sekolah (*Expected Years of Schooling*) sebagai pengganti Angka Melek Huruf. Komponen Rata-Rata Lama Sekolah (*Mean Year of Schooling*) tetap digunakan namun, dimutakhirkan dengan mengunakan penduduk usia 25 tahun ke atas. PNB per kapita yang tidak tersedia hingga level kabupaten/kota diproksi menggunakan pengeluaran per kapita disesuaikan menggunakan data Susenas. Untuk menghitung ketiga dimensi menjadi indeks komposit digunakan rata-rata geometrik. Rata- rata geometrik memiliki keunggulan dalam mendeteksi ketimpangan dibandingkan dengan rata-rata aritmatik. Rata-rata aritmatik yang digunakan dalam metode lama memiliki kelemahan dimana capaian dimensi yang rendah dapat ditutupi oleh capaian dimensi yang tinggi sehingga seolah-olah tidak terjadi ketimpangan. Berbeda dengan rata-rata aritmatik, rata-rata geometrik menuntut keseimbangan ketiga dimensi IPM agar capaian IPM menjadi optimal.

Secara umum ada dua hal mendasar dalam perubahan metode baru yaitu dalam aspek indikator dan aspek penghitungan indeks. Dengan berubahnya metode penghitungan IPM ada dampak yang ditimbulkan yaitu dalam hal perubahan level dan perubahan peringkat IPM. Secara umum level IPM metode baru bernilai lebih rendah dari level IPM metode lama. Perubahan IPM juga mempengaruhi perubahan peringkat terutama antar provinsi. Sehingga perlu digarisbawahi bahwa peringkat IPM pada metode lama tidak dapat dibandingkan degan peringkat hasil IPM metode baru, karena kedua metode tidak sama

UNDP kemudian mengkategorikan capaian pembangunan manusia di setiap daerah ke dalam empat kelompok IPM (UNDP, 2009). Empat kategori tersebut adalah kategori dengan capaian IPM sangat tinggi, tinggi, sedang, dan rendah.

Tabel 2. 24 Klasifikasi Pencapaian IPM

NO	KATEGORI	NILAI
1	Sangat Tinggi	> 80.00
2	Tinggi	70-79
3	Sedang	60-70
4	Rendah	< 60

Sumber : UNDP

Jika pada metode lama Reduksi Shortfall digunakan untuk melihat kecepatan perkembangan IPM suatu daerah dalam kurun waktu tertentu. Pada metode baru digunakan laju pertumbuhan IPM sebagai alat ukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian pada tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan semakin cepat IPM suatu wilayah mencapai nilai maksimalnya. Seiring dengan berjalannya waktu, tantangan yang dihadapi dalam meningkatkan IPM semakin beragam dan multi dimensi. Keterkaitan antara IPM dengan kemiskinan, ketenagakerjaan bahkan perekonomian semakin tampak dan dapat dijadikan strategi khusus untuk mencapai masyarakat yang sejahtera.

Berbagai kendala yang dihadapi dalam implementasi program yang dicanangkan pemerintah dapat dilihat dari perkembangan setiap komponen pembentuk IPM. Selain itu, kita juga dapat melihat potensi yang dimiliki wilayah untuk meningkatkan pembangunan manusia dari masing-masing komponen IPM dan memberikan masukan bagi pembangunan daerah di masa mendatang. Dengan program dan kebijakan daerah yang tepat sasaran akan mampu meningkatkan capaian pembangunan manusia.

Berdasarkan data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) tahun 2021–2025, pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren yang terus meningkat baik pada tingkat provinsi maupun seluruh kabupaten/kota. Secara umum, peningkatan IPM ini mencerminkan adanya perbaikan pada aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup masyarakat selama periode tersebut.

Pada tingkat provinsi, IPM NTB meningkat dari 70,86 pada tahun 2021 menjadi 73,97 pada tahun 2025. Kenaikan sebesar 3,11 poin ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di NTB mengalami perkembangan yang cukup baik dan konsisten setiap tahunnya. Namun demikian, capaian IPM NTB masih berada di bawah rata-rata nasional yang pada tahun 2025 mencapai 75,90. Selisih antara IPM NTB dan nasional juga masih cukup terlihat, meskipun tren pertumbuhan NTB relatif positif.

Di tingkat kabupaten/kota, Kota Mataram menjadi daerah dengan IPM tertinggi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2025, IPM Kota Mataram mencapai 82,37, meningkat dari 80,24 pada tahun 2021. Tingginya IPM Kota Mataram menunjukkan bahwa akses pendidikan, layanan kesehatan, dan kondisi ekonomi masyarakat di wilayah perkotaan relatif lebih baik dibandingkan daerah lainnya di NTB. Selain Kota Mataram, Kota Bima juga memiliki capaian IPM yang tinggi, yaitu 79,41 pada tahun 2025.

Sementara itu, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi kabupaten dengan IPM tertinggi di antara seluruh kabupaten di NTB. IPM daerah ini meningkat dari 73,54 pada tahun 2021 menjadi 76,46 pada tahun 2025, bahkan telah melampaui rata-rata IPM Provinsi NTB dan berada di atas angka nasional tahun 2021–2023. Hal ini menunjukkan keberhasilan pembangunan manusia yang cukup baik di wilayah tersebut.

Di sisi lain, Kabupaten Lombok Utara masih menjadi daerah dengan IPM terendah di NTB, meskipun mengalami peningkatan dari 66,14 pada tahun 2021 menjadi 69,63 pada tahun 2025. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih terdapat kesenjangan pembangunan antarwilayah di NTB, terutama antara daerah perkotaan dan daerah yang relatif tertinggal.

Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima juga menunjukkan peningkatan IPM yang stabil setiap tahunnya. Peningkatan tersebut menandakan bahwa pembangunan manusia di NTB berlangsung secara merata meskipun dengan tingkat capaian yang berbeda-beda.

Secara keseluruhan, perkembangan IPM NTB tahun 2021–2025 menunjukkan arah yang positif dengan pertumbuhan yang konsisten di seluruh kabupaten/kota. Namun demikian, pemerintah daerah masih perlu meningkatkan pemerataan pembangunan, terutama pada daerah dengan IPM rendah, agar kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi dan kualitas hidup masyarakat NTB semakin mendekati capaian nasional.

Tabel 2. 25 Indeks Pembangunan Manusia Provinsi NTB, Kabupaten/kota dan Nasional Tahun 2021-2025

NO	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	70,64	71,44	72,18	72,70	73,52
2	Lombok Tengah	68,7	69,57	70,41	71,19	72,07
3	Lombok Timur	68,9	69,83	70,65	71,48	72,35
4	Sumbawa	69,82	70,71	71,68	72,36	73,27
5	Dompu	70,27	70,96	71,77	72,59	73,58
6	Bima	68,72	69,63	70,33	70,99	71,97
7	Sumbawa Barat	73,54	74,34	74,84	75,52	76,46
8	Lombok Utara	66,14	67,09	68,02	68,64	69,63
9	Kota Mataram	80,24	80,67	81,15	81,64	82,37
10	Kota Bima	77,03	77,75	78,24	78,91	79,41
	NTB	**70,86**	**71,65**	**72,37**	**73,10**	**73,97**
	Nasional	**73,16**	**73,77**	**74,39**	**75,02**	**75,90**

Sumber : Berita Resmi Statistik BPS NTB, 2026

2.2.3 Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan bertujuan untuk menjadikan masyarakat memiliki kecakapan hidup (*life skills*) yang dapat mendorong pelaksanaan

pembangunan. Guna pemenuhan hal tersebut, pemerintah berupaya melakukan jumlah fasilitas pendidikan, peningkatan mutu dan peningkatan pemerataan layanan pendidikan berkualitas bagi masyarakat. Salah satu indikator untuk menilai akses pendidikan adalah partsipasi sekolah. Indikator partisipasi sekolah merupakan gambaran pemerataan akses dan perluasan pelayanan pendidikan terhadap penduduk.

Tabel 2. 26 Progres Ketersediaan Satuan Pendidikan 2021 s.d 2025

Tahun	SMA		SMK		SLB	
	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta	Negeri	Swasta
2021	154	176	99	228	16	29
2022	150	192	100	237	19	31
2023	150	192	100	239	19	31
2024	150	229	100	236	21	34
2025	150	270	100	266	21	33

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2026

Progres ketersediaan satuan pendidikan SMA, SMK, dan SLB pada periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang cukup signifikan, terutama didorong oleh pertumbuhan sekolah swasta, sementara jumlah sekolah negeri cenderung stagnan. Pada jenjang SMA, jumlah sekolah negeri mengalami sedikit penurunan dari 154 unit pada tahun 2021 menjadi 150 unit pada tahun 2022 dan kemudian tidak mengalami perubahan hingga tahun 2025. Sebaliknya, SMA swasta meningkat pesat dari 176 unit menjadi 270 unit dalam periode yang sama, atau tumbuh lebih dari 50 persen. Kondisi ini mencerminkan bahwa perluasan akses pendidikan menengah atas lebih banyak ditopang oleh partisipasi masyarakat dan sektor swasta dibandingkan intervensi langsung pemerintah.

Pada jenjang SMK, pola yang sama juga terlihat, di mana jumlah SMK negeri relatif stagnan di kisaran 99–100 unit, sedangkan SMK swasta mengalami peningkatan bertahap dari 228 unit pada tahun 2021 menjadi 266 unit pada tahun 2025. Meskipun pertumbuhannya tidak setinggi SMA swasta, tren ini tetap menunjukkan dominasi peran swasta dalam pengembangan pendidikan vokasi. Sementara itu, pada jenjang SLB, baik negeri maupun swasta menunjukkan peningkatan, meskipun dalam skala yang lebih terbatas. SLB negeri bertambah dari 16 unit menjadi 21 unit, sedangkan SLB swasta meningkat dari 29 unit menjadi 33 unit, meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan adanya upaya peningkatan layanan pendidikan inklusif, namun kapasitasnya masih relatif terbatas dibandingkan kebutuhan.

Secara keseluruhan, perkembangan ini menegaskan adanya ketimpangan antara peran pemerintah dan swasta dalam penyediaan layanan pendidikan, di mana swasta menjadi aktor utama dalam ekspansi jumlah satuan pendidikan. Kondisi ini berimplikasi pada potensi ketimpangan akses dan mutu pendidikan, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada sekolah negeri. Oleh karena itu, ke depan diperlukan kebijakan yang lebih seimbang melalui peningkatan kapasitas sekolah

negeri secara selektif, penguatan regulasi dan pembinaan terhadap sekolah swasta, serta peningkatan pemerataan akses dan kualitas pendidikan, termasuk dalam pengembangan pendidikan vokasi dan layanan pendidikan inklusif.

Isu penting tentang keberadaan seorang guru dalam mendukung proses pembelajaran tercantum dalam salah satu target Sustainable Development Goals (SDG's) 4.c yaitu pada tahun 2030, secara signifikan meningkatkan pasokan guru yang berkualitas.

Tabel 2. 27 Rasio Guru per Jenjang Terhadap Peserta Didik Tahun 2021 s.d 2025

Tahun	Rasio Guru terhadap Peserta Didik SMA		Rasio Guru terhadap Peserta Didik SMK		Rasio Guru terhadap Peserta Didik SLB	
	Standar Nasional	NTB	Standar Nasional	NTB	Standar Nasional	NTB
2021	01:20	01:18	01:15	01:18	01:05	01:10
2022	01:20	01:11	01:15	01:11	01:05	01:07
2023	01:20	01:10	01:15	01:11	01:05	01:05
2024	01:20	01:12	01:15	01:12	01:05	01:07
2025	1:20	1:12	1:15	1:12	1:5	1:17

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2026

Rasio guru terhadap peserta didik pada jenjang SMA, SMK, dan SLB di Provinsi NTB selama periode 2021–2025 secara umum menunjukkan kondisi yang relatif baik bahkan melampaui standar nasional, meskipun terdapat beberapa fluktuasi yang perlu menjadi perhatian. Pada jenjang SMA, standar nasional ditetapkan sebesar 1:20, sementara rasio di NTB berada pada kisaran 1:18 (2021) dan membaik menjadi 1:10–1:12 pada periode 2022–2025. Hal ini mengindikasikan bahwa ketersediaan guru di SMA tergolong cukup memadai, bahkan cenderung lebih banyak dibandingkan kebutuhan ideal, sehingga secara teoritis dapat mendukung proses pembelajaran yang lebih efektif. Namun demikian, kondisi ini juga berpotensi mencerminkan adanya ketidakseimbangan distribusi guru antar wilayah atau sekolah.

Pada jenjang SMK, standar nasional sebesar 1:15 juga berhasil dilampaui oleh NTB dengan rasio berkisar antara 1:18 (2021) hingga membaik menjadi 1:11–1:12 pada tahun 2022–2025. Tren ini menunjukkan adanya peningkatan ketersediaan guru terhadap peserta didik, yang merupakan sinyal positif bagi penguatan pendidikan vokasi. Meski demikian, mengingat karakteristik SMK yang membutuhkan guru dengan kompetensi keahlian spesifik, rasio yang baik secara kuantitatif belum tentu sepenuhnya mencerminkan kesesuaian kualitas dan kompetensi guru dengan kebutuhan dunia kerja.

Sementara itu, pada jenjang SLB, standar nasional sebesar 1:5 pada umumnya telah terpenuhi pada tahun 2023 (1:5), namun pada tahun-tahun lainnya rasio NTB berada di atas standar, seperti 1:10 (2021), 1:7 (2022), dan 1:7 (2024), yang menunjukkan masih terbatasnya jumlah guru dibandingkan kebutuhan peserta didik berkebutuhan khusus. Bahkan pada tahun 2025 terjadi anomali dengan rasio 1:17, yang

mengindikasikan adanya penurunan signifikan dalam ketersediaan guru SLB atau peningkatan jumlah peserta didik yang tidak diimbangi penambahan tenaga pendidik. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena pendidikan inklusif membutuhkan rasio guru yang lebih kecil untuk menjamin layanan yang optimal.

Secara keseluruhan, rasio guru terhadap peserta didik di NTB menunjukkan capaian yang baik pada jenjang SMA dan SMK, namun masih menghadapi tantangan pada jenjang SLB serta potensi ketimpangan distribusi dan kualitas guru. Oleh karena itu, kebijakan ke depan perlu difokuskan pada pemerataan distribusi guru, peningkatan kompetensi terutama pada pendidikan vokasi, serta penguatan penyediaan guru pendidikan khusus guna memastikan kualitas layanan pendidikan yang inklusif dan merata.

Selanjutnya pada Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan proporsi anak sekolah pada suatu jenjang tertentu terhadap penduduk pada kelompok usia tertentu, baik pada pendikan formal (SD, SMP dan SMA/SMK) maupun pendidikan nonformal (Paket A, Paket B, dan Paket C). APK yang tinggi menunjukkan tingkat partisipasi sekolah tinggi. Perkembangan APK pada jenjang SD/sederajat, SMP/sederajat dan SMA/sederajat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 28 Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Tahun	APK SD/MI/ Paket A (%)	APK SMP/MTS/ Paket B (%)	APK SMA/MA/SMK/ Paket C (%)
1	2021	107,23	93,72	93,75
2	2022	107,21	92,59	93,68
3	2023	107,07	93,32	93,23
4	2024	105,8	92,28	95,79
5	2025	106,15	92,28	91,23

Sumber: BPS (Statistik Pendidikan Indonesia)

Angka Partisipasi Kasar (APK) di Provinsi NTB selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang berbeda antar jenjang pendidikan, dengan capaian relatif tinggi pada pendidikan dasar namun cenderung fluktuatif pada jenjang menengah. Pada jenjang SD/MI/Paket A, APK secara konsisten berada di atas 100 persen, yakni berkisar antara 105,8 hingga 107,23. Kondisi ini mengindikasikan bahwa akses pendidikan dasar di NTB sudah sangat luas dan bahkan mencakup peserta didik di luar usia sekolah resmi, seperti anak yang masuk sekolah lebih awal atau terlambat. Meski demikian, tren yang sedikit menurun dari 107,23 (2021) menjadi 105,8 (2024) sebelum naik kembali ke 106,15 (2025) menunjukkan perlunya perhatian terhadap kesinambungan partisipasi dan dinamika demografi usia sekolah.

Pada jenjang SMP/MTs/Paket B, APK berada pada kisaran 92,28 hingga 93,72, yang relatif stabil namun belum mencapai cakupan universal. Angka ini menunjukkan masih terdapat sebagian anak usia SMP yang belum terjangkau pendidikan, dengan kecenderungan stagnasi bahkan sedikit menurun pada periode akhir (2024–2025). Hal

ini mengindikasikan adanya tantangan dalam transisi dari pendidikan dasar ke menengah pertama, yang bisa dipengaruhi oleh faktor ekonomi, geografis, maupun sosial.

Sementara itu, pada jenjang SMA/MA/SMK/Paket C, APK menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah relatif stabil di kisaran 93 persen pada 2021–2023, terjadi peningkatan pada tahun 2024 menjadi 95,79, namun kembali menurun cukup tajam pada tahun 2025 menjadi 91,23. Pola ini mengindikasikan bahwa partisipasi pendidikan menengah atas masih rentan terhadap berbagai faktor, seperti kemampuan ekonomi keluarga, aksesibilitas wilayah, serta daya tarik untuk langsung bekerja. Penurunan pada tahun 2025 menjadi sinyal penting adanya potensi meningkatnya angka putus sekolah atau tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, capaian APK di NTB menunjukkan keberhasilan dalam menjamin akses pendidikan dasar, namun masih menghadapi tantangan dalam menjaga keberlanjutan partisipasi pada jenjang pendidikan menengah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang mendorong transisi antar jenjang, seperti bantuan pendidikan, perluasan akses sekolah menengah, serta peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan agar mampu menahan peserta didik tetap berada dalam sistem pendidikan.

Selanjutnya pada Angka Partisipasi Murni (APM) adalah persentase jumlah anak pada kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai dengan usianya terhadap jumlah seluruh anak pada kelompok usia sekolah yang bersangkutan, baik pada pendidikan formal maupun nonformal. Perkembangan APM di Provinsi NTB tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 29 Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB Tahun 2021 -2025

No	Tahun	APM SD/MI/Paket A (%)	APM SMP/ MTS/Paket B (%)	APM SMA/MA/SMK/ Paket C (%)
1	2021	98,81	85,28	67,09
2	2022	98,83	86,05	67,61
3	2023	98,76	84,03	68,04
4	2024	98,57	83,55	71,09
5	2025	97.62	82.54	70.43

Sumber: BPS (Statistik Pendidikan Indonesia)

Angka Partisipasi Murni (APM) Provinsi NTB selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang semakin menegaskan adanya kesenjangan partisipasi antar jenjang pendidikan, khususnya antara pendidikan dasar dan menengah. Pada jenjang SD/MI/Paket A, APM berada pada tingkat yang sangat tinggi dan relatif stabil di kisaran 97,62–98,83 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah mengakses pendidikan sesuai kelompok umurnya. Meskipun demikian, tren yang sedikit menurun sejak 2022 hingga 2025 perlu dicermati sebagai sinyal awal potensi penurunan partisipasi, meskipun masih dalam kategori sangat baik.

Pada jenjang SMP/MTs/Paket B, APM berada pada kisaran 82,54–86,05 persen dengan kecenderungan menurun dalam tiga tahun terakhir. Setelah mencapai 86,05 persen pada tahun 2022, angka ini turun menjadi 82,54 persen pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa masih terdapat sekitar 14–17 persen anak usia SMP

yang belum bersekolah sesuai usia, sehingga mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga keberlanjutan pendidikan setelah jenjang dasar, baik karena faktor ekonomi, geografis, maupun sosial.

Sementara itu, pada jenjang SMA/MA/SMK/Paket C, APM berada pada level yang paling rendah dibandingkan jenjang lainnya, yaitu berkisar antara 67,09 persen pada tahun 2021 dan meningkat hingga 71,09 persen pada tahun 2024 sebelum sedikit menurun menjadi 70,43 persen pada tahun 2025. Meskipun terdapat tren peningkatan hingga 2024, capaian ini tetap menunjukkan bahwa hampir 30 persen anak usia sekolah menengah atas belum mengakses pendidikan sesuai usia. Hal ini menandakan adanya tantangan serius dalam transisi dari pendidikan menengah pertama ke menengah atas, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akses wilayah, serta pilihan untuk bekerja.

Secara keseluruhan, APM NTB menggambarkan keberhasilan dalam pemerataan akses pendidikan dasar, namun sekaligus menyoroti persoalan utama pada jenjang menengah, terutama SMA/SMK. Kesenjangan yang cukup lebar antar jenjang ini mengindikasikan perlunya intervensi kebijakan yang lebih kuat untuk mendorong keberlanjutan pendidikan, seperti penguatan bantuan pendidikan, peningkatan akses dan pemerataan sekolah menengah, serta peningkatan relevansi pendidikan agar lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.

Untuk Angka Partisipasi Sekolah (APS) yang merupakan proporsi dari semua anak yang masih sekolah pada suatu kelompok umur tertentu terhadap penduduk dengan kelompok umur yang sesuai, baik pada pendidan formal maupun non formal. APS yang tinggi menunjukkan terbukanya peluang yang lebih besar dalam mengakses pendidikan secara umum. Perekembangan APS disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 30 Angka Partisipasi Sekolah Provinsi NTB Tahun 2021-2025

Tahun	7-12 Tahun	13-15 Tahun	16-18 Tahun	19-24 Tahun
2021	99,52	98,34	77,49	26,22
2022	99,17	97,74	77,43	25,64
2023	99,46	97,95	77,46	28,48
2024	99,47	97,86	77,81	28,88
2025	99,35	96,92	79,21	28,88

Sumber: BPS (Statistik Pendidikan Indonesia), 2025

APS di Provinsi NTB selama periode 2021–2025 menunjukkan capaian yang sangat tinggi pada kelompok usia pendidikan dasar, namun mengalami penurunan seiring bertambahnya usia. Pada kelompok usia 7–12 tahun, APS berada pada tingkat yang sangat tinggi dan stabil di kisaran 99,17–99,52 persen. Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh anak usia sekolah dasar telah bersekolah, mencerminkan keberhasilan program wajib belajar serta pemerataan akses pendidikan dasar di NTB. Pada kelompok usia 13–15 tahun, APS juga tergolong tinggi dengan kisaran 96,92–98,34 persen. Meskipun demikian, terdapat kecenderungan penurunan secara bertahap hingga tahun 2025. Hal ini mengindikasikan mulai adanya tantangan dalam mempertahankan

partisipasi sekolah pada jenjang menengah pertama, walaupun secara umum masih dalam kondisi baik.

Pada kelompok usia 16–18 tahun, APS berada pada kisaran 77,43–79,21 persen. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan dua kelompok usia sebelumnya, yang berarti sekitar 20 persen lebih anak usia sekolah menengah atas tidak bersekolah. Meskipun terdapat sedikit peningkatan pada tahun 2025, kondisi ini menunjukkan adanya kendala dalam transisi dari SMP ke SMA/SMK, yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, akses wilayah, maupun pilihan untuk bekerja. Kesenjangan paling besar terlihat pada kelompok usia 19–24 tahun, dengan APS hanya berkisar antara 25,64–28,88 persen. Walaupun terdapat peningkatan pada beberapa tahun terakhir, angka ini menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk usia pendidikan tinggi tidak melanjutkan pendidikan formal. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan akses pendidikan tinggi, biaya pendidikan, serta kecenderungan untuk langsung masuk ke dunia kerja.

Secara keseluruhan, APS di NTB menunjukkan keberhasilan yang sangat baik pada pendidikan dasar dan relatif baik pada jenjang menengah pertama, namun masih menghadapi tantangan besar dalam menjaga keberlanjutan pendidikan pada jenjang menengah atas dan pendidikan tinggi. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih kuat untuk meningkatkan partisipasi pada usia 16 tahun ke atas, melalui peningkatan akses, bantuan pendidikan, serta penguatan keterkaitan antara pendidikan dan dunia kerja.

Perkembangan terhadap angka melanjutkan sekolah dan angka drop out di Provinsi NTB cenderung membaik yang merupakan alat untuk mengukur kinerja pembangunan bidang pendidikan yang berimplikasi pada pencapaian rata-rata lama sekolah dan meningkatnya APK, APM dan APS pendidikan menengah.

Tabel 2. 31 Angka Melanjutkan dari Lulusan SMA ke Perguruan Tinggi Provinsi NTB Tahun 2025

No.	Kabupaten / Kota	Jumlah Siswa	Angka Melanjutkan	(%)
1.	Kabupaten Lombok Barat	2.750	1.324	48.15
2.	Kabupaten Lombok Tengah	4.650	2.130	45.81
3.	Kabupaten Lombok Timur	6.780	4.371	64.47
4.	Kabupaten Lombok Utara	1.773	741	41.79
5.	Kabupaten Sumbawa	3.456	1.934	55.96
6.	Kabupaten Sumbawa Barat	1.265	680	53.75
7.	Kabupaten Dompu	2.789	1.424	51.06
8.	Kabupaten Bima	5.079	2.300	45.28
9.	Kota Mataram	2.967	1.757	59.22
10.	Kota Bima	1.537	953	62.00
JUMLAH		**33.046**	**17.614**	

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2026

Berdasarkan Angka Melanjutkan dari lulusan SMA ke Perguruan Tinggi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2025, terlihat bahwa minat dan akses lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi cukup beragam antar kabupaten/kota. Dari total 33.046 lulusan SMA di NTB, sebanyak 17.614 siswa

melanjutkan ke perguruan tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa sekitar setengah dari lulusan SMA di NTB telah melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Secara keseluruhan, hal ini menunjukkan bahwa partisipasi lulusan SMA untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi di NTB sudah cukup baik, namun masih terdapat kesenjangan antarwilayah. Daerah perkotaan dan beberapa kabupaten dengan akses pendidikan yang lebih baik cenderung memiliki angka melanjutkan lebih tinggi dibandingkan daerah yang relatif tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah perlu memperkuat program bantuan pendidikan, beasiswa, peningkatan akses perguruan tinggi, serta sosialisasi pentingnya pendidikan tinggi agar kesempatan melanjutkan pendidikan dapat lebih merata di seluruh wilayah NTB.

Selanjutnya Berdasarkan Angka Putus Sekolah (Drop Out/DO) jenjang SMA dan SMK di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun ajaran 2020/2021 sampai dengan 2024/2025, terlihat adanya penurunan yang sangat signifikan baik dari jumlah siswa maupun persentase angka putus sekolah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kualitas layanan pendidikan menengah di NTB semakin membaik dan upaya pemerintah dalam menekan angka putus sekolah berjalan cukup efektif.

Tabel 2. 32 Angka Putus Sekolah (DO) SMA dan SMK Provinsi NTB dari Tahun 2020/2021 s.d 2024/2025

No.	Tahun	Angka Putus Sekolah (DO) SMA dan SMK			
		SMA	%	SMK	%
1.	2020/2021	972	0,92	1.241	1,91
2.	2021/2022	157	0,15	172	0,23
3.	2022/2023	117	0,1	157	0,15
4.	2023/2024	28	0,03	41	0,06
5.	2024/2025	25	0	36	0.047

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, 2025

Pada jenjang SMA, jumlah siswa putus sekolah turun drastis dari 972 siswa atau 0,92 persen pada tahun ajaran 2020/2021 menjadi hanya 25 siswa pada tahun 2024/2025. Penurunan ini menunjukkan adanya peningkatan keberhasilan sekolah dan pemerintah dalam mempertahankan siswa agar tetap melanjutkan pendidikan hingga tamat. Tren penurunan terjadi secara konsisten setiap tahun, yakni menjadi 157 siswa pada 2021/2022, 117 siswa pada 2022/2023, 28 siswa pada 2023/2024, hingga mencapai titik terendah pada 2024/2025. Persentase DO SMA bahkan mendekati nol persen pada tahun terakhir, yang menunjukkan tingkat keberlangsungan pendidikan yang semakin baik.

Hal serupa juga terjadi pada jenjang SMK. Jumlah siswa putus sekolah menurun dari 1.241 siswa atau 1,91 persen pada tahun 2020/2021 menjadi 36 siswa atau sekitar 0,047 persen pada tahun 2024/2025. Meskipun angka DO SMK masih lebih tinggi dibandingkan SMA, tren penurunannya sangat signifikan. Pada tahun 2021/2022 jumlah DO SMK turun

menjadi 172 siswa, kemudian 157 siswa pada 2022/2023, 41 siswa pada 2023/2024, dan terus menurun pada tahun 2024/2025.

Secara keseluruhan, kondisi pendidikan menengah di NTB selama tahun ajaran 2020/2021 hingga 2024/2025 menunjukkan perkembangan yang sangat baik. Angka putus sekolah baik di SMA maupun SMK berhasil ditekan hingga mendekati nol persen. Ke depan, pemerintah daerah perlu mempertahankan capaian ini melalui penguatan layanan pendidikan yang inklusif, peningkatan dukungan ekonomi bagi siswa kurang mampu, serta penguatan kualitas pendidikan agar seluruh siswa dapat menyelesaikan pendidikan menengah secara optimal.

Selanjutnya berdasarkan Harapan Lama Sekolah (HLS) tahun 2021–2025, kualitas pembangunan pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren yang terus meningkat, baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Harapan Lama Sekolah menggambarkan rata-rata lamanya pendidikan yang diharapkan dapat ditempuh oleh anak usia sekolah di masa mendatang. Semakin tinggi angka HLS, semakin besar peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan yang lebih tinggi.

Tabel 2. 33 Harapan Lama Sekolah Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Harapan Lama Sekolah				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Mataram	15,64	15,65	15,67	15,68	15.69
2	Kota Bima	15,04	15,05	15,06	15,08	15.21
3	Lombok Timur	13,90	14,05	14,06	14,07	14.08
4	Lombok Barat	13,95	13,96	13,98	13,99	14.17
5	Lombok Tengah	13,85	13,86	13,87	13,89	13.90
6	Dompu	13,53	13,69	13,83	13,84	14.01
7	Sumbawa Barat	13,64	13,65	13,66	13,68	13.84
8	Bima	13,39	13,58	13,65	13,66	13.67
9	Sumbawa	13,07	13,23	13,24	13,34	13.35
10	Lombok Utara	12,76	12,77	13,01	13,02	13.16
Nusa Tenggara Barat		**13.90**	**13.96**	**13.97**	**13.98**	**13.99**
Indonesia		**13.08**	**13.10**	**13.15**	**13.21**	**13.3**

Sumber : BPS NTB, 2026 (diolah).

Secara provinsi, HLS NTB meningkat dari 13,90 tahun pada 2021 menjadi 13,99 tahun pada 2025. Meskipun peningkatannya relatif kecil, kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan akses dan keberlanjutan pendidikan di NTB. Selain itu, capaian HLS NTB juga berada di atas rata-rata nasional yang pada tahun 2025 sebesar 13,3 tahun. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum peluang anak-anak di NTB untuk mengenyam pendidikan relatif lebih baik dibandingkan rata-rata Indonesia.

Kota Mataram menjadi daerah dengan HLS tertinggi di NTB selama periode 2021–2025. Pada tahun 2025, HLS Kota Mataram mencapai 15,69 tahun. Angka ini menunjukkan bahwa anak-anak di Kota Mataram memiliki peluang untuk menempuh

pendidikan hingga jenjang perguruan tinggi. Tingginya HLS di Kota Mataram dipengaruhi oleh ketersediaan fasilitas pendidikan yang lebih lengkap, akses pendidikan yang mudah, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif lebih baik. Selain Kota Mataram, Kota Bima juga memiliki HLS yang tinggi, yaitu 15,21 tahun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa wilayah perkotaan di NTB umumnya memiliki akses pendidikan yang lebih baik dibandingkan daerah lainnya.

Di tingkat kabupaten, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Barat memiliki capaian HLS yang cukup tinggi, masing-masing sebesar 14,08 tahun dan 14,17 tahun pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa masyarakat di kedua daerah tersebut memiliki peluang pendidikan hingga jenjang menengah atas bahkan perguruan tinggi awal. Sementara itu, Kabupaten Lombok Utara menjadi daerah dengan HLS terendah di NTB, meskipun mengalami peningkatan dari 12,76 tahun pada 2021 menjadi 13,16 tahun pada 2025. Rendahnya HLS di daerah ini menunjukkan bahwa akses dan keberlanjutan pendidikan masih perlu ditingkatkan, terutama terkait pemerataan fasilitas pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat, dan akses geografis. Kabupaten lainnya seperti Kabupaten Dompu, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Bima, dan Kabupaten Sumbawa juga menunjukkan tren peningkatan HLS yang stabil. Hal ini menandakan adanya perbaikan akses pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan.

Berdasarkan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) tahun 2021–2025, kualitas pendidikan penduduk di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan perkembangan yang terus membaik. RLS merupakan indikator yang menggambarkan rata-rata jumlah tahun pendidikan formal yang telah ditempuh oleh penduduk usia 15 tahun ke atas. Semakin tinggi nilai RLS, semakin tinggi pula tingkat pendidikan masyarakat di suatu wilayah.

Tabel 2. 34 Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Rata-rata Lama Sekolah				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Bima	10,65	10,94	10,95	10,96	10.97
2	Kota Mataram	9,54	9,55	9,56	9,58	9.89
3	Sumbawa Barat	8,72	8,90	8,98	8,99	9.35
4	Dompu	8,72	8,73	8,97	9,04	9.38
5	Sumbawa	8,15	8,21	8,52	8,59	8.88
6	Bima	7,91	8,17	8,29	8,30	8.61
7	Lombok Timur	6,71	7,04	7,12	7,36	7.71
8	Lombok Barat	6,42	6,60	6,87	6,88	7.15
9	Lombok Tengah	6,29	6,44	6,61	6,73	7.08
10	Lombok Utara	6,04	6,30	6,39	6,40	6.75
Nusa Tenggara Barat		**8,13**	**8,31**	**8,39**	**8,50**	**8.87**
Indonesia		**8,97**	**9,08**	**9,13**	**9,22**	**9.41**

Sumber : BPS RI dan BPS NTB, 2026 (diolah)

Secara provinsi, RLS NTB meningkat dari 8,13 tahun pada tahun 2021 menjadi 8,87 tahun pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan pembangunan pendidikan dan semakin besarnya akses masyarakat terhadap pendidikan formal. Meskipun demikian, capaian RLS NTB masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 9,41 tahun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pendidikan penduduk NTB masih berada pada jenjang sekolah menengah pertama menuju awal sekolah menengah atas, sementara secara nasional sudah mendekati jenjang pendidikan menengah atas. Di tingkat kabupaten/kota, Kota Bima menjadi daerah dengan RLS tertinggi selama periode 2021–2025. Pada tahun 2025, RLS Kota Bima mencapai 10,97 tahun, yang berarti rata-rata penduduk usia 15 tahun ke atas di wilayah tersebut telah menempuh pendidikan hingga kelas XI SMA. Tingginya capaian ini menunjukkan bahwa akses pendidikan, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, dan keberlanjutan sekolah di Kota Bima relatif lebih baik dibandingkan daerah lain di NTB.

Selain Kota Bima, Kota Mataram juga memiliki RLS yang tinggi, yaitu 9,89 tahun pada tahun 2025. Sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, dan ekonomi di NTB, Kota Mataram memiliki fasilitas pendidikan yang lebih lengkap dan akses pendidikan yang lebih mudah dijangkau masyarakat. Di tingkat kabupaten, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Sumbawa Barat menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2025, RLS Kabupaten Dompu mencapai 9,38 tahun, sedangkan Kabupaten Sumbawa Barat mencapai 9,35 tahun. Angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di kedua daerah tersebut telah menempuh pendidikan hingga jenjang sekolah menengah pertama menuju sekolah menengah atas.

Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima juga menunjukkan perkembangan positif dengan RLS masing-masing sebesar 8,88 tahun dan 8,61 tahun pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan adanya perbaikan akses pendidikan dan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan formal. Sementara itu, Kabupaten Lombok Utara masih menjadi daerah dengan RLS terendah di NTB, yaitu sebesar 6,75 tahun pada tahun 2025. Meskipun meningkat dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 6,04 tahun, angka tersebut menunjukkan bahwa rata-rata penduduk di daerah ini baru menyelesaikan pendidikan hingga tingkat sekolah dasar menuju sekolah menengah pertama. Kondisi ini menunjukkan masih adanya tantangan dalam pemerataan akses pendidikan, kondisi ekonomi masyarakat, serta faktor geografis yang memengaruhi keberlanjutan pendidikan.

Kabupaten lain seperti Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Barat, dan Kabupaten Lombok Tengah juga mengalami peningkatan RLS secara bertahap, namun capaian ketiga daerah tersebut masih relatif rendah dibandingkan rata-rata provinsi dan nasional. Secara keseluruhan, perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah di NTB selama tahun 2021–2025 menunjukkan arah yang positif dengan peningkatan di seluruh kabupaten/kota. Hal ini mencerminkan adanya kemajuan pembangunan pendidikan dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pendidikan. Namun

demikian, kesenjangan pendidikan antarwilayah masih cukup terlihat, terutama antara wilayah perkotaan dan daerah yang relatif tertinggal. Oleh karena itu, pemerintah perlu terus memperkuat pemerataan akses pendidikan, meningkatkan kualitas layanan sekolah, menekan angka putus sekolah, memperluas program pendidikan kesetaraan, serta memberikan dukungan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu agar tingkat pendidikan masyarakat NTB dapat terus meningkat dan semakin mendekati rata-rata nasional.

Untuk menjamin pemenuhan kebutuhan dasar di bidang pendidikan bagi peserta didik secara berkualitas, terukur, cepat, dan terjangkau, diperlukan standar teknis pelayanan minimal pendidikan yang sesuai jenjang dan jalur pendidikannya. Standar teknis ini untuk membantu pemerintah daerah memahami indikator Standar Pelayanan Minimum (SPM) di bidang pendidikan. Secara keseluruhan, capaian 29 indikator SPM bidang pendidikan Provinsi NTB tahun 2021–2025 menunjukkan adanya kemajuan yang cukup signifikan dalam pembangunan pendidikan. NTB berhasil meningkatkan akses pendidikan, kualitas lulusan SMK, partisipasi sekolah, serta berbagai indikator kompetensi peserta didik. Namun demikian, kualitas literasi dan numerasi yang masih berada di bawah nasional, fluktuasi iklim keamanan sekolah, serta tantangan dalam penguatan pendidikan inklusif dan kebinekaan menjadi pekerjaan rumah yang perlu terus diperbaiki.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat kualitas pembelajaran, meningkatkan kompetensi tenaga pendidik, memperluas pemerataan akses pendidikan, memperkuat pendidikan karakter dan budaya sekolah, serta meningkatkan dukungan terhadap pendidikan inklusif agar kualitas pendidikan di NTB dapat semakin meningkat dan mampu bersaing pada tingkat nasional.

Tabel 2. 35 Capaian 29 Indikator SPM Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No.	Indikator	Realisasi									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		NAS	NTB	NAS	NTB	NAS	NTB	NAS	NTB	NAS	NTB
1	Rerata Kompetensi Literasi SMA	62,78	56,99	62,95	55,31	68,38	61,98	71,99	64,78	72.03	63.91
2	Rerata Kompetensi Literasi SMK	60,11	53,68	59,06	51,13	64,4	56,97	67,3	58,58	67.36	58.09
3	Rerata Kompetensi Literasi SDLB	55,88	51,85	58,21	46,02	61,39	49,69	65,59	54,18	63.21	49.96
4	Rerata Kompetensi Literasi SMPLB	60,97	57,95	60,81	55,56	62,74	53,60	71,31	61,53	74.09	64.98
5	Rerata Kompetensi Literasi SMLB	59,11	53,19	55,40	50,62	59,6	53,08	68,33	61,92	68.54	62.76
6	Rerata kompetensi Numerasi SMA	50,67	47,64	53,20	48,43	58,18	53,48	60,54	55,43	59.61	54.45
7	Rerata Kompetensi Numerasi SMK	49,45	47,04	50,60	46,09	55,1	50,44	56,91	51,58	56.22	51.24
8	Rerata Kompetensi Numerasi SDLB	45,85	41,49	48,54	38,26	54,4	42,02	62,17	50,79	58.53	45.77
9	Rerata Kompetensi Numerasi SMPLB	55,38	53,49	56,04	50,78	61,03	54,93	66,75	59,4	70.25	60.7

No.	Indikator	Realisasi									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		NAS	NTB	NAS	NTB	NAS	NTB	NAS	NTB	NAS	NTB
10	Rerata Kompetensi Numerasi SMLB	49,86	48,69	51,37	45,31	55,44	49,31	63,34	59,22	61.99	54.56
11	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	29,93	34,01	87,07	86,56	85,62	84,94	84,64	84,07	87.59	86.71
12	Tingkat Kepuasan dunia kerja terhadap budaya kerja lulusan SMK	70,90	100,00	70,90	100,00	80,5	91,87	81,1	86,21	82.07	85.44
13	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16-18	73,09	77,50	73,15	77,43	73,42	77,46	74,64	77,81	77.86	79.21
14	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 4-18 Penyandang Disabilitas	28,31	29,89	26,03	25,66	56,39	48,86	58,06	48,86	61.6	53.86
15	Indeks Iklim Keamanan SMA	74,26	74,68	69,09	78,09	71,83	69,04	71,33	68,18	71.6	67.61
16	Indeks Iklim Keamanan SMK	71,87	67,49	66,83	73,89	68,94	65,26	68,28	63,82	68.34	63.47
17	Indeks Iklim Keamanan SDLB	80,06	78,00	76,12	76,88	74,77	70,89	76,53	71,03	76.59	73.36
18	Indeks Iklim Keamanan SMPLB	79,48	75,07	72,46	76,89	71,53	68,65	72,27	71,91	73.16	69.13
19	Indeks Iklim Keamanan SMALB	78,23	74,28	70,79	77,13	70,77	67,07	70,75	70,8	71.71	70.1
20	Indeks Iklim Kebinekaan SMA	61,56	63,08	67,68	73,82	73,85	71,78	71,9	68,53	67.84	64.28
21	Indeks Iklim Kebinekaan SMK	60,15	58,87	65,23	66,50	70,75	67,70	68,6	65,18	64.12	60.54
22	Indeks Iklim Kebinekaan SDLB	60,38	61,05	70,18	78,34	66,35	62,66	69,78	63,87	63.27	59.27
23	Indeks Iklim Kebinekaan SMPLB	60,46	57,55	66,89	71,59	66,38	64,17	69,47	63,52	65.07	61.51
24	Indeks Iklim Kebinekaan SMALB	60,97	66,76	66,41	68,43	66,57	60,71	69,99	65,6	63.75	63.13
25	Indeks Iklim Inklusivitas SMA	53,42	65,39	56,27	73,68	58,9	55,46	59,98	56,31	60.99	57.16
26	Indeks Iklim Inklusivitas SMK	52,67	62,80	54,90	69,76	56,19	52,85	56,63	52,99	57.66	53.84
27	Indeks Iklim Inklusivitas SDLB	58,31	75,93	59,94	69,60	60,17	53,76	67,66	61,34	66.09	61.92
28	Indeks Iklim Inklusivitas SMPLB	58,18	70,80	62,58	74,25	65,05	60,58	68,71	63,06	68.94	63.4
29	Indeks Iklim Inklusivitas SMALB	58,77	70,08	61,93	74,40	64,54	56,07	67,21	64,03	68.21	67.32

Sumber: Data Kemdikdasmen, Tahun 2026

2. Kesehatan

Berdasarkan data Umur Harapan Hidup (UHH) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2025, kualitas kesehatan masyarakat secara umum menunjukkan tren yang meningkat. Umur Harapan Hidup merupakan indikator penting dalam pembangunan manusia yang menggambarkan rata-rata perkiraan usia hidup penduduk sejak lahir. Semakin tinggi angka UHH, semakin baik kondisi kesehatan, pelayanan kesehatan, kualitas gizi, dan kesejahteraan masyarakat di suatu wilayah. Secara provinsi, UHH NTB meningkat dari 71,33 tahun pada tahun 2021 menjadi 72,60 tahun pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi

kesehatan masyarakat, peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, serta membaiknya kualitas hidup masyarakat NTB. Namun demikian, capaian UHH NTB masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 74,47 tahun pada tahun 2025. Selisih ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan masyarakat NTB masih perlu terus ditingkatkan agar mampu mendekati capaian nasional.

Di tingkat kabupaten/kota, Kota Mataram menjadi daerah dengan Umur Harapan Hidup tertinggi pada tahun 2025, yaitu mencapai 75,12 tahun. Tingginya UHH di Kota Mataram menunjukkan bahwa masyarakat di wilayah perkotaan memiliki akses yang lebih baik terhadap fasilitas kesehatan, layanan medis, sanitasi, serta pola hidup yang lebih sehat. Selain itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang relatif lebih baik turut mendukung tingginya kualitas kesehatan masyarakat. Kota Bima juga memiliki UHH yang cukup tinggi. Pada tahun 2025, UHH Kota Bima mencapai 73,45 tahun. Meskipun mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2024, secara umum kondisi kesehatan masyarakat di daerah ini masih tergolong baik dibandingkan sebagian besar kabupaten lainnya di NTB.

Di tingkat kabupaten, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan UHH tertinggi, yaitu 73,44 tahun pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut relatif lebih baik. Selain itu, Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Sumbawa juga menunjukkan capaian UHH yang tinggi dengan angka masing-masing sebesar 73,03 tahun.

Sementara itu, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Tengah memiliki UHH yang relatif lebih rendah dibandingkan daerah lain di NTB, yaitu masing-masing sebesar 71,88 tahun dan 71,89 tahun pada tahun 2025. Meskipun demikian, kedua daerah tersebut tetap menunjukkan tren peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menandakan adanya perbaikan kondisi kesehatan masyarakat secara bertahap. Secara keseluruhan, perkembangan Umur Harapan Hidup di NTB tahun 2021–2025 menunjukkan arah yang positif dan mencerminkan meningkatnya kualitas hidup masyarakat. Dengan upaya pembangunan kesehatan yang berkelanjutan dan merata, diharapkan UHH NTB dapat terus meningkat dan semakin mendekati bahkan melampaui rata-rata nasional.

Tabel 2. 36 Umur Harapan Hidup Per Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025

KABUPATEN/ KOTA	UMUR HARAPAN HIDUP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lombok Barat	67,19	67,63	72,37	72,64	73.03
Lombok Tengah	67,36	66,75	71,39	71,59	71.89
Lombok Timur	66,38	66,55	71,72	71,95	72.29
Sumbawa	66,16	68,12	72,41	72,67	73.03
Dompu	68,31	67,36	71,54	71,76	72.09
Bima	67,73	66,87	71,65	71,88	72.22
Sumbawa Barat	66,99	68,74	72,65	72,97	73.44

KABUPATEN/ KOTA	UMUR HARAPAN HIDUP KABUPATEN/KOTA TAHUN 2021-2025				
	2021	2022	2023	2024	2025
Lombok Utara	66,5	67,75	71,26	71,52	71.88
Kota Bima	71,88	71,76	74,65	74,83	73.45
Kota Mataram	70,5	70,83	72,97	73,15	75.12
PROVINSI NTB	**71,33**	**71,66**	**72,02**	**72,25**	**72.6**
NASIONAL	**73,46**	**73,70**	**73,93**	**74,15**	**74,47**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2026

Gambaran perkembangan AKB dan AKI di Provinsi NTB tahun 2021-2025 disajikan pada tabel-tabel berikut. Berdasarkan jumlah kasus kematian bayi (AKB) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2025, secara umum terjadi tren penurunan jumlah kasus kematian bayi hingga tahun 2024, meskipun pada tahun 2025 kembali mengalami peningkatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak di NTB telah memberikan dampak positif, namun masih terdapat tantangan dalam menurunkan angka kematian bayi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu terus memperkuat pelayanan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan kualitas layanan neonatal, memperbaiki gizi ibu dan bayi, meningkatkan cakupan imunisasi, serta memperkuat deteksi dini risiko kehamilan dan persalinan agar angka kematian bayi di NTB dapat terus ditekan secara berkelanjutan.

Tabel 2. 37 Jumlah Kasus Kematian Bayi (AKB) di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	46	43	116	75	71
2	Lombok Tengah	189	192	128	110	141
3	Lombok Timur	237	219	172	155	179
4	Sumbawa	64	59	60	63	90
5	Dompu	44	65	43	55	23
6	Bima	83	71	76	85	88
7	Sumbawa Barat	13	18	12	19	13
8	Lombok Utara	60	60	53	33	30
9	Kota Mataram	56	45	63	61	52
10	Kota Bima	19	16	19	23	27
NTB		**811**	**788**	**742**	**679**	**714**

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2026

Capaian ini cukup akseleratif untuk mendukung pencapaian umur harapan hidup (UHH). Kabupaten Lombok Timur dan Lombok Tengah menjadi kabupaten dengan kasus kematian bayi tertinggi, sedangkan Sumbawa Barat dan Kota Bima merupakan kabupaten dengan kasus kematian bayi terendah. Penyebab kematian bayi terbanyak tahun 2024 dengan jumlah kasus kematian 679 adalah penyebab lain-lainnya (174 kasus), BBLR (158 kasus) dan Afiksia (150 kasus), Infeksi (136 kasus), Penyebab lain adalah kelainan bawaan (46 kasus), RDS Berat (30 kasus), Pneumonia (28 kasus), dan Sepsis (20 kasus) dan Faktor jumlah penduduk dan sosial budaya adalah sebagian faktor di luar kesehatan yang berpengaruh terhadap jumlah kasus kematian bayi.

Tabel 2. 38 Proporsi Angka Kematian Bayi per 1.000 Kelahiran Hidup Provinsi NTB Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi (per 1.000 KH)	8,23	7,92	8,36	8,37	8,83

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan data Proporsi Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2025, kondisi kesehatan bayi di NTB menunjukkan fluktuasi yang relatif kecil, namun secara umum masih berada pada tingkat yang perlu mendapat perhatian dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan ibu dan anak. Pada tahun 2025, proporsi AKB kembali meningkat menjadi 8,83 per 1.000 kelahiran hidup, yang merupakan angka tertinggi selama periode pengamatan.

Peningkatan proporsi AKB pada tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat berbagai tantangan dalam penanganan kesehatan bayi baru lahir di NTB. Tingginya angka kematian bayi umumnya dipengaruhi oleh beberapa faktor utama seperti Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), asfiksia, infeksi, prematuritas, kelainan bawaan, serta kualitas pelayanan kesehatan neonatal. Selain faktor medis, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan ibu, pola asuh, status gizi, dan akses terhadap layanan kesehatan juga turut memengaruhi risiko kematian bayi.

Selanjutnya berdasarkan jumlah kasus kematian ibu (AKI) di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2025, secara umum terjadi tren penurunan kasus kematian ibu yang cukup signifikan. Kondisi ini menunjukkan adanya perbaikan kualitas pelayanan kesehatan ibu, peningkatan akses layanan persalinan, serta efektivitas program kesehatan maternal di NTB. Penurunan kasus kematian ibu di NTB menunjukkan adanya peningkatan kualitas layanan kesehatan ibu dan anak, termasuk pelayanan antenatal care, persalinan di fasilitas kesehatan, penanganan komplikasi kehamilan, serta peningkatan peran tenaga kesehatan. Namun demikian, masih terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi tingginya kasus kematian ibu, seperti keterlambatan penanganan medis, anemia pada ibu hamil, komplikasi persalinan, perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Tabel 2. 39 Jumlah Kasus Kematian Ibu (AKI) di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	12	8	16	6	12
2	Lombok Tengah	33	19	22	21	19
3	Lombok Timur	45	34	22	24	20
4	Sumbawa	9	8	6	8	3
5	Dompu	7	2	3	1	4
6	Bima	12	10	9	8	12
7	Sumbawa Barat	2	2	1	4	1
8	Lombok Utara	3	3	2	3	2
9	Kota Mataram	15	8	5	5	4
10	Kota Bima	6	3	5	2	4

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
NTB		144	97	91	82	81

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2025

Selanjutnya berdasarkan Proporsi Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 kelahiran hidup di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2025, kondisi kesehatan ibu di NTB menunjukkan tren yang cenderung fluktuatif meskipun secara umum mengalami perbaikan dibandingkan tahun awal pengamatan. Kematian ibu disebabkan oleh komplikasi selama masa kehamilan, persalinan, dan masa nifas. Faktor-faktor utama penyebab kematian ibu antara lain perdarahan, hipertensi dalam kehamilan, infeksi, komplikasi persalinan, anemia, serta keterlambatan penanganan medis. Selain faktor medis, kondisi sosial ekonomi, tingkat pendidikan ibu, status gizi, akses terhadap fasilitas kesehatan, dan faktor geografis juga sangat memengaruhi tingginya risiko kematian ibu.

Fluktuasi angka kematian ibu juga memiliki hubungan erat dengan kondisi kesehatan bayi dan capaian UHH. Semakin rendah angka kematian ibu dan bayi, maka kualitas kesehatan masyarakat akan semakin baik dan berdampak positif terhadap peningkatan UHH di NTB. Oleh karena itu, pemerintah daerah terus memperkuat pelayanan kesehatan ibu secara komprehensif, mulai dari pemeriksaan kehamilan, peningkatan kualitas persalinan di fasilitas kesehatan, penanganan komplikasi secara cepat, peningkatan kualitas tenaga kesehatan, hingga edukasi kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Selain itu, pemerataan fasilitas kesehatan dan akses layanan di daerah terpencil juga perlu terus ditingkatkan agar risiko kematian ibu dapat ditekan secara lebih optimal.

Tabel 2. 40 Proporsi Angka Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Proporsi (per 100.000 KH)	146.69	85.3	102.51	97.91	100.21

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2025

Secara keseluruhan, capaian indikator pendukung kematian bayi dan kematian ibu di NTB tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan ibu dan anak masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait penurunan cakupan pelayanan dasar seperti pemeriksaan kehamilan, persalinan di fasilitas kesehatan, kunjungan nifas, dan pelayanan neonatal. Kondisi ini dapat berpengaruh terhadap tingginya risiko kematian ibu dan bayi di NTB.

Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu memperkuat sistem pelayanan kesehatan maternal dan neonatal melalui peningkatan akses layanan kesehatan, penguatan peran tenaga kesehatan, peningkatan kualitas fasilitas kesehatan, perluasan edukasi kesehatan kepada masyarakat, serta penguatan sistem rujukan terutama di wilayah terpencil dan sulit dijangkau. Dengan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak secara

menyeluruh, diharapkan angka kematian ibu dan bayi di NTB dapat terus ditekan dan kualitas kesehatan masyarakat semakin meningkat.

Tabel 2. 41 Capaian Indikator Pendukung Kematian Bayi dan Kematian Ibu di Provinsi NTB Tahun 2021 – 2025 (dalam %)

Indikator	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
K1	100	101,8	100	97,05	90	98,9	100	73,67	88	86.6
K4	98	93,4	98	88,05	92	81,9	95	73,08	80	75.6
Komplikasi Maternal	90	119,5	90	131,51	20	27,66	20	30,09		
Persalinan oleh Nakes	90	96,7	90	92,45	90	86,4	90	71,44		
Persalinan di Faskes	97	95,1	85	91,44	90	70,3	95	69,41	88	80.7
Kunjungan Ibu Nifas	95	91,9	95	87,67	92	79,83	95	71,4	35	77.69
Kunjungan Neonatal 1	96	100,1	96	95,19	96	90,02	96	75,95		88.25
Kunjngan Neonatal 3	96	97,8	96	92,96	93	88,4	95	74,95	91	89.82
Komplikasi Neonatal	84	65,1	84	63,69	15	6,58	15	5,79		
Kunjungan Bayi IV	96	99,8	96	97,12	96	67,01	96	77,94		
Kunjungan Balita II	85	74,62	85	82,97	80	83	85	85,81		

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2025

Kinerja penyelenggaraan pelayanan kesehatan, mencakup data/informasi kesehatan ibu dan anak, data kekurangan gizi, khususnya stunting, merupakan data strategis dalam analisis pembangunan kualitas sumber daya manusia. Berdasarkan data prevalensi stunting kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2025 yang bersumber dari SSGI dan SKI, terlihat bahwa prevalensi stunting di NTB secara umum menunjukkan tren penurunan, meskipun masih mengalami fluktuasi di beberapa kabupaten/kota di Provinsi NTB.

Fluktuasi angka prevalensi stunting di Provinsi NTB memberikan gambaran permasalahan stunting di NTB, yang menjadi tantangan serius dalam pembangunan daerah. Penanganan stunting ini memerlukan kolaborasi lintas pemerintahan dan lintas sektor dengan pendekatan sensitif dan pendekatan spesifik. dan memerlukan upaya penanganan yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Secara provinsi, prevalensi stunting NTB mengalami peningkatan dari 31,4 persen pada tahun 2021 menjadi 32,7 persen pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 24,6 persen. Selanjutnya pada tahun 2024 prevalensi stunting kembali meningkat menjadi 29,8 persen, namun turun menjadi 13, 38 persen pada tahun 2025.

Di tingkat kabupaten/kota, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu menjadi daerah dengan prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2025. Tingginya prevalensi stunting di beberapa kabupaten ini menunjukkan masih adanya tantangan terkait status gizi anak, pola asuh, sanitasi, dan kondisi sosial ekonomi masyarakat. Di sisi lain, beberapa daerah menunjukkan perkembangan yang cukup baik dalam menurunkan prevalensi stunting. Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan prevalensi stunting terendah pada tahun 2025, yaitu sebesar 7,02 persen. Capaian ini menunjukkan keberhasilan program penanganan stunting yang didukung oleh peran aktif kader Posyandu, kolaborasi lintas sektor, dan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung untuk pencegahan prevalensi stunting di Kabupaten Sumbawa Barat. Gambaran prevalensi stunting kabupaten/kota se-NTB dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 42 Prevalensi Stunting Kab./Kota se-NTB Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	28,9	34	19,9	27,3*	9.58
2	Lombok Tengah	32,1	37	17,6	24,9*	10
3	Lombok Timur	37,6	35,6	27,6	33	22.36
4	Sumbawa	29,7	29,7	25,7	29,8	10.69
5	Dompu	31,5	34,50	12,4	19,8	12.65
6	Bima	30,4	29,5	36,7	23,8*	12.2
7	Sumbawa Barat	23,6	13,9	10,5	18,2*	7.02
8	Lombok Utara	34	35,9	33,5	35,3	14.18
9	Kota Mataram	25,3	25,8	25,6	23,5	6.57
10	Kota Bima	23,7	31,2	31,8	28,4	9.44
	NTB	**31,4**	**32,7**	**24,6**	**29,8**	**13.38**

Sumber : Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Kemenkes, 2025 (diolah).
Data Tahun 2025 bersumber dari Aplikasi ePPGBM (data per 31 Desember 2025)

Selama kurun waktu 2021-2025, perkembangan proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak memberikan gambaran peningkatan tren mencapai 88,28 pada tahun 2025. Kondisi sanitasi lingkungan sangat mendukung daerah untuk mengurangi prevalensi stunting di Provinsi NTB. Gambaran Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 43 Proporsi Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Layak Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun									
	2021		2022		2023		2024		2025	
	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
Proporsi RT dengan Akses Sanitasi Layak	80,1	80,5	80,91	81,83	82,46	83,12	87,06	85,45	87,27	88,28

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2024.

Secara provinsi, proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 80,5 persen pada tahun 2021 menjadi 88,28 persen pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pembangunan infrastruktur sanitasi dan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya lingkungan sehat. Namun demikian, pada periode yang sama prevalensi stunting di NTB masih berada pada angka yang cukup tinggi, yaitu 31,4 persen pada tahun 2021, meningkat menjadi 32,7 persen pada tahun 2022, kemudian turun menjadi 24,6 persen pada tahun 2023, dan kembali meningkat menjadi 29,8 persen pada tahun 2024.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan akses sanitasi layak belum sepenuhnya mampu menurunkan prevalensi stunting secara konsisten. Hal ini disebabkan karena stunting merupakan masalah multidimensional yang tidak hanya dipengaruhi oleh sanitasi, tetapi juga oleh status gizi ibu dan anak, pola asuh, kualitas konsumsi pangan, akses layanan kesehatan, kemiskinan, pendidikan keluarga, dan kondisi lingkungan. Sehingga penanganan stunting di NTB perlu dilakukan secara

komprehensif melalui kolaborasi lintas sektor agar perbaikan sanitasi dapat berjalan seiring dengan peningkatan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

Selanjutnya, Secara keseluruhan capaian UHC di NTB hingga Desember 2025 menunjukkan keberhasilan yang sangat baik dalam memperluas perlindungan jaminan kesehatan masyarakat. Ke depan, tantangan utama tidak hanya menjaga cakupan kepesertaan tetap tinggi, tetapi juga memastikan kualitas pelayanan kesehatan yang merata, berkelanjutan, dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat di NTB.

Tabel 2. 44 Capaian UHC Kabupaten/Kota s.d. Desember 2025

NO	KAB/KOTA	Jumlah Penduduk (SMT I 2024)	Segmen Peserta						Cakupan Peserta UHC	%	% Dibayar Pemerintah (APBN& APBD)
			PB JK	PBP PEMDA	PPU BU	PPU PN	PBPU	BP			
1	KAB. LOMBOK BARAT	771.858	438.273	140.839	72.695	56.881	49.589	6.916	765.193	99,14	75,03
2	KAB. LOMBOK UTARA	272.058	203.821	33.088	14.967	19.699	1.807	1.292	274.674	100,96	87,08
3	KOTA MATARAM	464.566	164.732	104.230	72.954	74.076	36.695	16.323	469.010	100,96	57,90
4	KAB. LOMBOK TENGAH	1.142.173	596.506	323.566	88.526	77.514	34.751	9.738	1.130.601	98,99	80,55
5	KAB. LOMBOK TIMUR	1.449.920	867.304	289.339	106.680	85.289	70.515	12.427	1.431.554	98,73	79,77
6	KAB. BIMA	545.571	301.161	127.832	28.456	53.350	22.949	6.396	540.144	99,01	78,63
7	KAB. DOMPU	279.884	145.287	65.558	14.452	35.053	11.932	4.595	276.877	98,93	75,33
8	KAB. SUMBAWA BARAT	157.335	76.561	29.039	26.133	22.714	2.061	1.183	157.691	100,23	67,12
9	KAB. SUMBAWA	529.234	263.202	125.453	40.963	52.362	34.002	7.108	523.090	98,84	73,44
10	KOTA BIMA	166.114	67.113	38.281	15.815	32.375	6.821	5.702	166.107	100,00	63,45
NTB		**5.778.713**	**3.123.960**	**1.277.225**	**481.641**	**509.313**	**271.122**	**71.680**	**5.734.941**	**99,24**	**76,16**

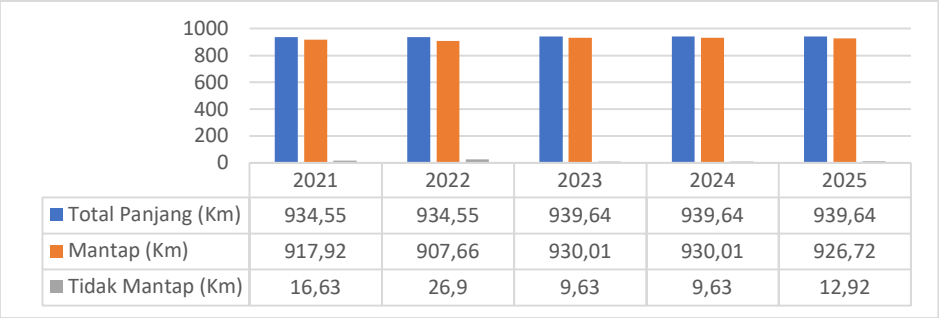
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi NTB, 2025 (diolah).

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator keberhasilan dari sektor infrastruktur adalah Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi. Indikator ini menggambarkan persentase kondisi jalan dalam keadaan baik dan sedang berdasarkan pelaksanaan survey kondisi jalan yang dilakukan dengan metode Indeks Kondisi Perkerasan (IKP) atau dengan Analisis Perhitungan *Survey Distress Index* (SDI) yang merupakan parameter ukur kondisi fungsional permukaan jalan berdasarkan metode Bina Marga.

Tingkat kemantapan jalan nasional di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2025 menunjukkan kondisi yang sangat baik dan relatif stabil. Sebagian besar ruas jalan nasional berada dalam kondisi mantap dengan panjang rata-rata di atas 900 km setiap tahunnya. Angka ini mencerminkan perhatian pemerintah pusat terhadap infrastruktur jalan nasional yang berfungsi sebagai penghubung antar daerah. Meskipun sebagian besar jalan nasional berada dalam kondisi baik, perhatian terus-menerus diperlukan untuk meningkatkan dan memelihara infrastruktur ini agar tetap dapat diakses dan berfungsi dengan optimal bagi masyarakat.

Grafik 2. 25 Tingkat Kemantapan Jalan Nasional Tahun 2021-2025



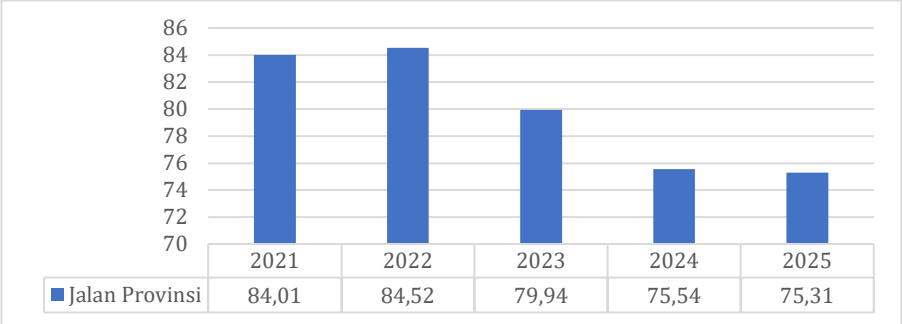
	2021	2022	2023	2024	2025
Total Panjang (Km)	934,55	934,55	939,64	939,64	939,64
Mantap (Km)	917,92	907,66	930,01	930,01	926,72
Tidak Mantap (Km)	16,63	26,9	9,63	9,63	12,92

Sumber : Sumber : BPJN NTB, 2026

Tingkat kemantapan jalan provinsi di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang cenderung menurun. Pada tahun 2021 tingkat kemantapan jalan provinsi mencapai 84,01 persen dan meningkat menjadi 84,52 persen pada tahun 2022. Namun setelah itu mengalami penurunan cukup signifikan menjadi 79,94 persen pada tahun 2023, kemudian kembali turun menjadi 75,54 persen pada tahun 2024 dan 75,31 persen pada tahun 2025.

Penurunan tingkat kemantapan jalan ini menunjukkan bahwa kondisi sebagian ruas jalan provinsi mulai mengalami kerusakan atau penurunan kualitas yang dipengaruhi oleh tingginya beban lalu lintas, faktor cuaca, usia jalan, serta keterbatasan penanganan pemeliharaan dan peningkatan jalan. Penyebab lainnya adalah belum optimalnya pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan, yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran. Selain itu, masih banyak pelanggaran terhadap pembatasan dimensi dan muatan kendaraan (overdimension overloading/ODOL), serta kerusakan dini akibat bencana alam seperti curah hujan tinggi dan perubahan tata guna lahan.

Grafik 2. 26 Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi NTB Tahun 2021-2025

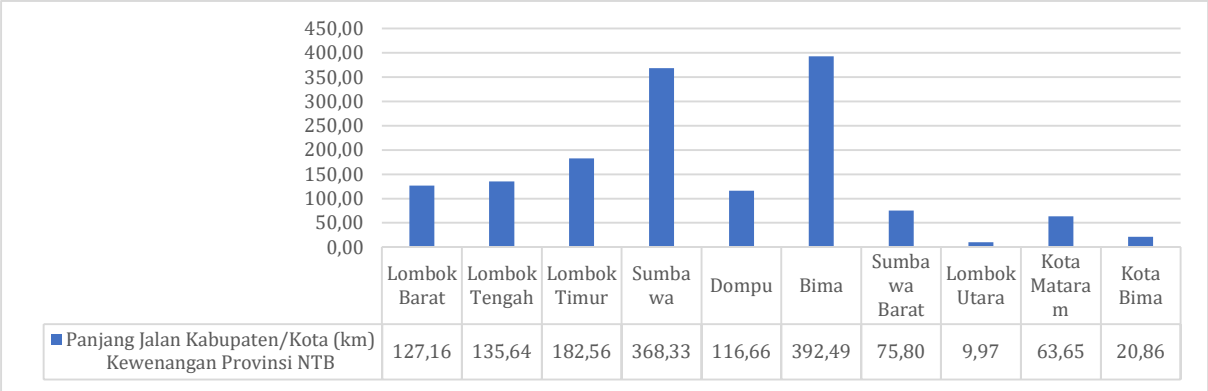


	2021	2022	2023	2024	2025
Jalan Provinsi	84,01	84,52	79,94	75,54	75,31

Sumber : Dinas PUPR PKP, 2026

Panjang jalan provinsi di Nusa Tenggara Barat (NTB) sesuai dengan SK Gubernur NTB Nomor 620-335 Tahun 2024 tanggal 24 Mei 2024 adalah 1.493,12 km, yang bertambah 8,69 km akibat adanya ruas jalan nasional yang turun status menjadi jalan provinsi. Penanganan jalan provinsi dilakukan melalui dana dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Grafik 2. 27 Panjang Jalan Kabupaten/Kota (km) Kewenangan Provinsi NTB



	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Lombok Utara	Kota Mataram	Kota Bima
Panjang Jalan Kabupaten/Kota (km) Kewenangan Provinsi NTB	127,16	135,64	182,56	368,33	116,66	392,49	75,80	9,97	63,65	20,86

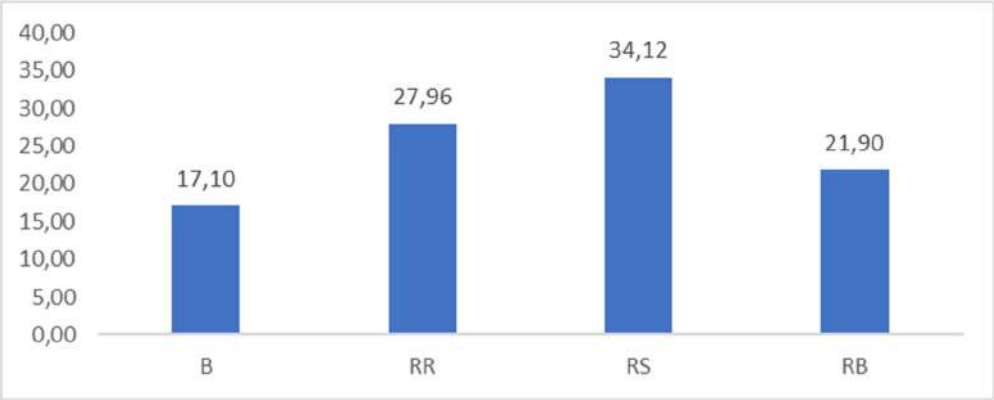
Sumber : Dinas PUPR PKP, 2026

Selain pembangunan infrastruktur jalan, peningkatan kualitas jaringan irigasi juga menjadi aspek penting dalam mendukung konektivitas ekonomi dan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Provinsi Nusa Tenggara Barat memiliki kewenangan sesuai Permen PUPR Nomor 14/PRT/M tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi bahwa tanggungjawab dan pengelolaan sistem irigasi terbagi menjadi 3 kewenangan yaitu daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 Ha (kewenangan pemerintah pusat), daerah irigasi yang luasnya 1.000 Ha – 3.000 Ha (kewenangan pemerintah provinsi) dan daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1.000 Ha (kewenangan pemerintah kabupaten).

Kondisi jaringan irigasi kewenangan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar saluran irigasi berada pada kategori rusak. Berdasarkan grafik, kondisi rusak sedang (RS) menjadi proporsi terbesar yaitu sebesar 34,12%, disusul rusak ringan (RR) sebesar 27,96% dan rusak berat (RB) sebesar 21,90%. Sementara itu, saluran irigasi dengan kondisi baik (B) hanya mencapai 17,10%. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat kemantapan jaringan irigasi masih perlu mendapat perhatian serius, mengingat lebih dari separuh jaringan berada dalam kondisi rusak sedang hingga rusak berat. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi efektivitas distribusi air irigasi, terutama pada wilayah pertanian yang sangat bergantung pada ketersediaan air untuk mendukung produktivitas pertanian. Kerusakan jaringan irigasi juga dapat menyebabkan kehilangan air, menurunkan efisiensi layanan irigasi, serta meningkatkan risiko terganggunya pola tanam dan hasil produksi pertanian.

Pemerintah Provinsi NTB mengupayakan percepatan rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi secara berkelanjutan, terutama pada saluran dengan kondisi rusak sedang dan rusak berat. Peningkatan kualitas infrastruktur irigasi diharapkan mampu mendukung ketahanan pangan daerah, meningkatkan produktivitas pertanian, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat, khususnya petani di Provinsi NTB.

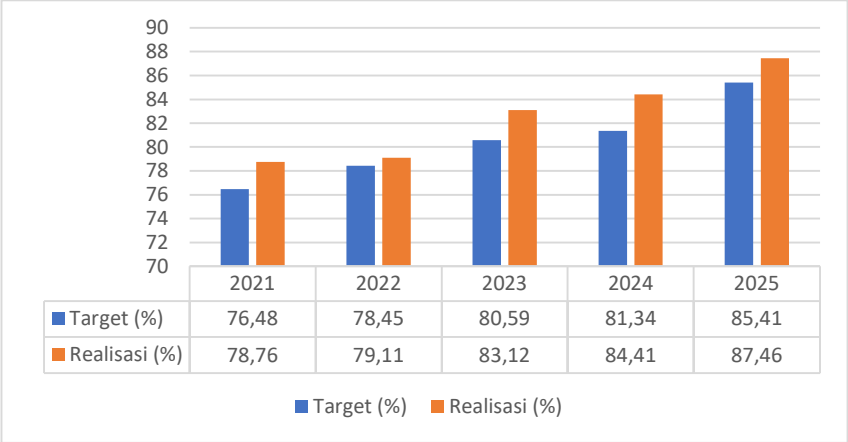
Grafik 2. 28 Kondisi Jaringan Irigasi Kewenangan Provinsi Tahun 2025



Sumber : Dinas PUPR PKP, 2026

Selanjutnya pada cakupan air minum di Provinsi NTB selama tahun 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang sangat baik dengan tren peningkatan yang konsisten dan selalu melampaui target yang ditetapkan. Realisasi cakupan meningkat dari 78,76% pada tahun 2021 menjadi 87,46% pada tahun 2025. Capaian ini mencerminkan keberhasilan pembangunan dan penguatan infrastruktur air bersih, optimalisasi layanan air minum, serta dukungan pengelolaan sumber daya air dan saluran irigasi. Ke depan, diperlukan upaya lanjutan untuk memperluas akses di wilayah terpencil dan rawan kekeringan guna mewujudkan pelayanan air minum yang merata, aman, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat NTB.

Grafik 2. 29 Realisasi Cakupan Air Minum Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Target (%)	76,48	78,45	80,59	81,34	85,41
Realisasi (%)	78,76	79,11	83,12	84,41	87,46

Sumber : Dinas PUPR PKP, 2026

Peningkatan yang signifikan dalam realisasi cakupan air minum dapat didistribusikan kepada berbagai faktor, termasuk peningkatan infrastruktur, program penyuluhan kepada masyarakat, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga non-pemerintah. Program-program ini berfokus pada penyediaan akses air bersih yang lebih baik, terutama di daerah-daerah yang sebelumnya kurang terlayani.

Namun, meskipun ada kemajuan, tantangan tetap ada. Perbedaan antara target dan realisasi menunjukkan bahwa masih ada ruang untuk perbaikan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi program yang ada, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang dapat menghambat pencapaian target.

Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), sebagai prasarana untuk mendukung penyimpanan dan pendistribusian air maupun prasarana untuk pengendalian daya rusak air. Irigasi merupakan suatu bangunan yang berfungsi untuk menyalurkan dan mendistribusikan air persawahan yang ada diseluruh Provinsi NTB. Jaringan irigasi adalah saluran (saluran primer dan sekunder), bangunan (bangunan utama, bangunan bagi, bangunan bagisadap, dan bangunan sadap), dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan.

Tabel 2. 45 Jumlah Sarana dan Prasarana Sumber Daya Air yang telah di sepakati di Lingkungan Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I Tahun 2025

No.	Aset / Infrastruktur	Kewenangan	Jumlah	Satuan
1	Wilayah Sungai	Pusat	2	Buah
2	Daerah Aliran Sungai	Pusat	752	Buah
3	Daerah Irigasi	Pusat	16	Buah
	a. Panjang Saluran Primer		241	km
	b. Panjang Saluran Sekunder		724	km
	c. Panjang Saluran Tersier		311	km
3	Daerah Irigasi	Provinsi	35	Buah
	a. Panjang Saluran Primer		360	km
	b. Panjang Saluran Sekunder		731	km
4	Embung	Pusat	224	Buah
5	Bendungan	Pusat	66	Buah
6	Pompa Banjir	Pusat	1	Buah

Sumber : Dinas PUPR PKP, 2026

Potensi air tanah di NTB terdiri dari potensi Cekungan Air Tanah (CAT) dan sumur bor sebagai sumber air baku. Pemunculan air tanah secara alamiah dapat berupa mata air, rembesan yang berasal dari air hujan dan air magmatik atau air fosil. CAT merupakan suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepasan air tanah.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 14/PRT/M/2015, tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, Tanggal 21 April 2015 menjelaskan bahwa irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan, dan pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Daerah Irigasi (DI) adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

Jaringan irigasi terdiri dari saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan dalam penyediaan, pembangunan, pemberian, penggunaan, dan pembuangan irigasi.

Kriteria pembagian tanggung jawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi yaitu:

1. Pemerintah Pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000 ha, daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional.
2. Pemerintah daerah provinsi mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya 1000 ha-3000 ha, dan daerah irigasi lintas daerah kabupaten/kota.
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnnya kurang dari 1000 ha dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota.

Tabel 2. 46 Data Daerah Irigasi Berdasarkan Kewenangan Tahun 2025

No	Kewenangan	Jumlah D.I.		Jumlah Total	Luas DI (Ha)		Luas Total (Ha)
		Utuh Kab/Kota	Lintas Kab/Kota		Utuh Kab/Kota	Lintas Kab/Kota	
1	Pemerintah (Pusat)	15	1	16	67.285	3.589	70.874
2	Provinsi	33	2	35	53.095	5.010	58.105
3	Kabupaten	440	-	440	101.780	-	101.780

Sumber : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2015 Tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi

Persentase kemantapan sistem irigasi di Provinsi NTB selama tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang meningkat secara positif. Secara keseluruhan, perkembangan ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur sumber daya air guna mendukung sektor pertanian dan menjaga keberlanjutan pasokan air, baik untuk kebutuhan irigasi maupun pemenuhan kebutuhan air masyarakat di Provinsi NTB.

Tabel 2. 47 Persentase Kemantapan Sistem Irigasi Tahun 2021-2025

No	Indikator Kinerja	Satuan	Capaian				
			2021	2022	2023	2024	2025
1	Persentase Kemantapan Sistem Irigasi	%	50,88	52.91	56,87	56,87	65,59

Sumber : Dinas PUPR PKP, 2026

Kinerja sistem irigasi adalah tingkat keberhasilan sistem irigasi dalam menjalankan fungsi penyediaan dan pengelolaan air irigasi untuk mendukung usaha pertanian secara berkelanjutan. Nilai Persentase Kinerja Sistem Irigasi pada 35 Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi NTB mencapai 60,25 pada Tahun 2024, dan meningkat menjadi 65,59 pada tahun 2025. Peningkatan kinerja ini didukung oleh perbaikan database sistem irigasi kewenangan Provinsi, penguatan perencanaan tata kelola sumber daya air, dan partisipasi masyarakat berbasis kelompok P3A dan GP3A.

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Urusan perumahan sebagai urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar menjadi amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, mengharuskan setiap tingkatan pemerintahan untuk menyelenggarakan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman bertindak sebagai pembina penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman. Peran strategisnya adalah melakukan pembinaan dalam perencanaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan.

Terpenuhinya kebutuhan rumah sangat bergantung pada sisi kebutuhan (*demand*) dan sisi penyediaan (*supply*). Sisi kebutuhan dipengaruhi oleh kemampuan pendapatan rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan rumah. Sedangkan sisi penyediaan ditentukan oleh kemampuan badan usaha/lembaga untuk membangun rumah. Masih terjadinya kesenjangan antara sisi kebutuhan dan penyediaan atau dikenal dengan istilah backlog rumah memberikan gambaran adanya masyarakat yang masih belum terpenuhi kebutuhan perumahan pada kawasan permukiman. Backlog dapat diartikan sebagai kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat. Backlog terbagi menjadi 2 (dua) yaitu backlog kepemilikan dan backlog kepenghunian.

Tabel 2. 48 Backlog Kepenghunian dan Kepemilikan Di Provinsi NTB Tahun 2022–2025

No	KABUPATEN/ KOTA	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024	
		Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian
1	Lombok Barat	25.675	22.987	26.695	23.848	26.411	23.575	27,957	24,987
2	Lombok Tengah	28.832	27.145	29.388	27.672	28.945	27.182	29,325	27,548
3	Lombok Timur	63.897	60.013	64.702	60.858	64.017	60.155	65,505	61,388
4	Sumbawa	16.270	14349	18.769	16459	19.308	16838	20,388	17,833
5	Dompu	7.174	6.227	7.502	6.575	7.756	6.860	8,219	7,172
6	Bima	13.739	12.509	14.292	13.036	14.206	12.967	15,156	13,766
7	Sumbawa Barat	6.271	4.945	7.385	5.543	7.402	5.699	8,521	6,716
8	Lombok Utara	4.842	4.394	5.198	4.650	5.255	4.709	6,391	5,533
9	Kota Mataram	28.227	22.120	30.831	24.325	32.089	25.705	34,803	28,371

No	KABUPATEN/ KOTA	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2024	
		Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian	Backlog Kepemilikan	Backlog Kepenghunian
10	Kota Bima	7.646	6.047	8.538	6.547	8.465	6.459	9,865	7,506
NTB		**202.573**	**180.736**	**213.300**	**189.513**	**213.854**	**190.149**	**226.130**	**200.820**

Sumber : BKKBN Provinsi NTB, 2025

Secara umum, perkembangan backlog perumahan di NTB menunjukkan perlunya penguatan kebijakan penyediaan rumah layak huni melalui pembangunan perumahan bersubsidi, peningkatan akses pembiayaan perumahan, penataan kawasan permukiman, serta kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam mendukung percepatan penyediaan hunian yang terjangkau dan berkelanjutan. Salah satu bentuk fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi NTB adalah menyediakan rumah yang layak huni dengan menyediakan bantuan stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dalam bentuk rumah subsidi, dalam rangka pemenuhan backlog kepemilikan di Provinsi NTB.

Rumah yang layak huni menurut penjelasan pasal 24 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah rumah yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, dan kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Dalam definsi lain, Sebuah rumah dikatakan layak huni jika kualitas atap, dinding dan lantainya baik, alat penerangan yang bersumber dari listrik serta memiliki akses air bersih dan sanitasi yang baik.

Sejak tahun 2019, rumah tangga diklasifikasikan memiliki akses terhadap hunian/rumah layak huni apabila memenuhi 4 (empat) kriteria rumah layak huni yang disesuaikan indikator *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yakin ketahanan bangunan (*durable housing*), memiliki akses terhadap air minum layak (*access to improved water*), memiliki akses terhadap sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (*sufficient living space*). Perubahan indikator rumah layak huni tersebut juga berpengaruh terhadap jumlah rumah layak huni di NTB seperti Tabel di bawah ini.

Tabel 2. 49 Jumlah Rumah Tangga Yang Menempati Rumah Layak Huni di NTB Tahun 2021-2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	Rumah Tangga yang Menempati RTLH (ruta)				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Mataram	29.598	31.966	26.437	28.272	21,099
2	Lombok Barat	98.250	95.837	86.872	88.590	95,905
3	Lombok Tengah	129.962	141.176	142.470	131.677	115,204
4	Lombok Timur	136.030	148.284	143.075	129.433	120,978
5	Lombok Utara	37.064	34.432	31.563	28.894	18,631
6	Sumbawa	50.553	51.283	46.744	42.802	35.230
7	Sumbawa Barat	12.433	9.760	8.392	8.839	6,247
8	Dompu	20.094	21.758	20.278	19.823	17,996
9	Bima	40.173	36.186	36.391	32.091	27,417
10	Kota Bima	7.635	8.549	6.984	6.753	7,693

NO	KABUPATEN/ KOTA	Rumah Tangga yang Menempati RTLH (ruta)				
		2021	2022	2023	2024	2025
NTB		561.792	579.231	539.845	509.645	458.972

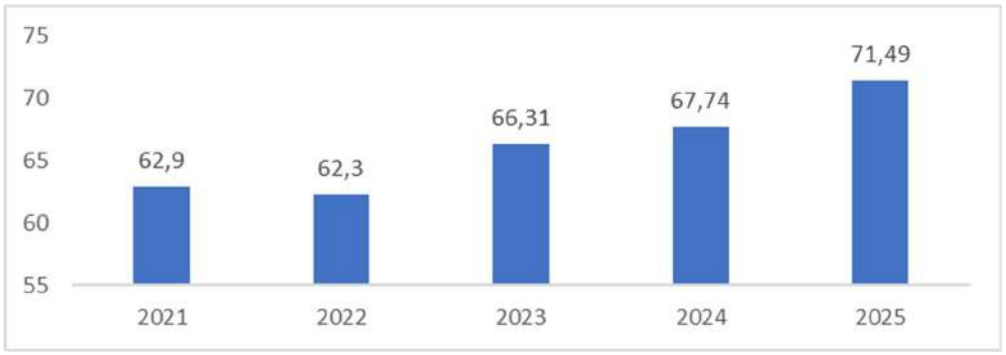
Sumber : Dinas PUPR PKP, 2026

Perkembangan indikator Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Provinsi Nusa Tenggara Barat periode 2021-2025 menunjukkan tren perbaikan yang positif. Secara agregat, jumlah RTLH berhasil ditekan dari 561.792 rumah tangga pada tahun 2021 menjadi 458.972 rumah tangga pada tahun 2025, kendati sempat mengalami peningkatan menjadi 579.231 rumah tangga pada tahun 2022.

Berdasarkan distribusi kewilayahan, beban RTLH tertinggi terpusat di Pulau Lombok. Pada tahun 2025, Kabupaten Lombok Timur (120.978 rumah tangga) dan Kabupaten Lombok Tengah (115.204 rumah tangga) mencatatkan angka tertinggi, meskipun keduanya konsisten menunjukkan tren penurunan sejak 2023. Capaian kinerja yang paling signifikan terlihat di Kabupaten Lombok Utara, yang berhasil menurunkan jumlah RTLH secara berkelanjutan dari 37.064 menjadi 18.631 rumah tangga.

Sementara itu, Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima menjadi wilayah dengan beban penanganan terendah, masing-masing mencatatkan 6.247 dan 7.693 rumah tangga pada tahun 2025. Secara keseluruhan, penurunan akumulatif angka RTLH ini mengindikasikan efektivitas program penataan kawasan permukiman serta peningkatan kualitas hunian masyarakat di NTB.

Grafik 2. 30 Capaian Rumah Layak Huni (RLH) Provinsi NTB Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas PUPR PKP, 2026

Pada Capaian Rumah Layak Huni (RLH) di Provinsi NTB selama periode 2020–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat, terutama dalam tiga tahun terakhir. Mulai tahun 2023, capaian RLH menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan menjadi 66,31%, kemudian terus meningkat menjadi 67,74% pada tahun 2024 dan mencapai 71,49% pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan adanya percepatan program pembangunan dan rehabilitasi rumah layak huni, termasuk dukungan program perumahan pemerintah, penataan kawasan permukiman, bantuan stimulan perumahan swadaya, serta peningkatan kualitas infrastruktur dasar permukiman.

Meskipun demikian, capaian sebesar 71,49% pada tahun 2025 menunjukkan bahwa masih terdapat sebagian masyarakat yang belum menempati rumah layak huni.

Oleh karena itu, diperlukan upaya lanjutan melalui penguatan program perumahan terjangkau, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pengurangan kawasan kumuh, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat agar akses terhadap hunian layak dapat semakin merata di seluruh wilayah NTB.

Selanjutnya pada Perkembangan penanganan RTLH dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 di NTB, jumlah RTLH yang masih cukup besar menunjukkan perlunya penguatan kebijakan dan dukungan pembiayaan yang lebih berkelanjutan. Ke depan, diperlukan sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mempercepat rehabilitasi rumah tidak layak huni, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan wilayah dengan tingkat kerentanan sosial ekonomi yang tinggi. dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 50 Penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi NTB Tahun 2021–2025

NO	KABUPATEN/KOTA	TAHUN				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Mataram	2	6	0	8	16
2	Lombok Barat	18	3	30	10	16
3	Lombok Tengah	30	80	26	14	17
4	Lombok Timur	76	20	42	30	16
5	Lombok Utara	6	4	5	23	9
6	Sumbawa	50	1	18	25	26
7	Sumbawa Barat	9	0	6	14	21
8	Dompu	5	10	14	20	22
9	Bima	1	6	4	15	29
10	Kota Bima	2	2	4	16	0
NTB		**199**	**132**	**149**	**175**	**172**

Sumber : Dinas PUPR PKP, 2026

Selanjutnya Pemerintah Daerah wajib menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk pemenuhan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 terdapat 2 jenis layanan terkait Standar Pelayanan Minimal Bidang Perumahan yaitu: Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana Provinsi; dan Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Provinsi.

Provinsi NTB termasuk daerah dengan tingkat kerawanan bencana tinggi yang terdiri dari 7 kawasan rawan bencana. Salah satu bencana yang terjadi di NTB pada tahun 2018 yang berdampak pada 7 Kabupaten/Kota dengan kerusakan bangun sebanyak 243.195 unit, dengan rinciang rusak berat (RB) 83.751 unit, rusak sedang (RS) sebanyak 38.764 unit dan rusak ringan (RR) sebanyak 120.680 unit.

Kawasan Kumuh

Rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran hukum terhadap kelestarian lingkungan menjadi salah satu faktor tumbuhnya kawasan permukiman kumuh. Perkembangan pusat pusat pertumbuhan baru yang

disertai dengan peningkatan pemanfaatan lahan permukiman secara swadaya masyarakat khususnya kategori masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) seringkali tidak difasilitasi dengan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang memadai, seperti tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik, mengakibatkan penurunan kualitas kawasan permukiman yang dibangun pengembang dan munculnya kawasan permukiman kumuh baru yang dibangun MBR.

Penanganan permukiman kumuh diawali dengan identifikasi lokasi permukiman kumuh dan penetapan lokasi permukiman kumuh melalui SK Walikota/Bupati. Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembagian urusan luasan kawasan kumuh dibagi menjadi 3 kewenangan yaitu luasan kumuh dibawah 10 ha menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota, luasan kumuh 10-15 ha merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi, serta luasan kumuh di atas 15 ha merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

Luas Kawasan kumuh di NTB berdasarkan SK Bupati/walikota se-NTB adalah 612,83 Ha yang tersebar di 10 kabupaten/kota sedangkan capaian penataan kawasan kumuh tahun 2025 baru seluas 309,67 Ha di seluruh kawasan kumuh kabupaten/kota se NTB sebagaimana tabel berikut.

Tabel 2. 51 Luasan Kawasan Permukiman Kumuh Yang Tertangani Sampai Dengan Tahun 2020-2021 Di Provinsi NTB

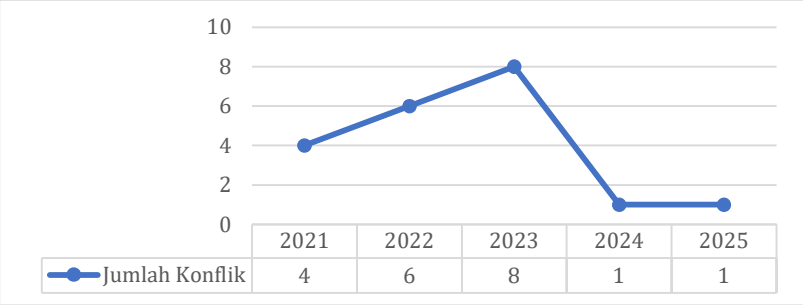
NO	KABUPATEN/ KOTA	Target Penanganan Kawasan Kumuh (Ha)	Kawasan Kumuh Tertangani 2020-2021 (Ha)	Kawasan Kumuh Tertangani 2022 (Ha)	Kawasan Kumuh Tertangani 2023 (Ha)	Kawasan Kumuh Tertangani 2024 (Ha)	Kawasan Kumuh Tertangani 2025 (Ha)	Total Kawasan Kumuh Yang Tertangani (Ha)
1	Kota Mataram	12,04	3,86	1,65	1,48	3,39	0,16	10,54
2	Kota Bima	24,65	1,55	2,08	6,45	9,75	0,93	20,76
3	Lombok Barat	37,64	8,12	3,73	17,03	5,44	0,16	34,48
4	Lombok Tengah	29,11	34,79	9,25	6,92	6,46	0,17	57,59
5	Lombok Timur	64,68	25,73	4,49	8,62	9,66	0,16	48,66
6	Sumbawa	200,82	10,67	6,23	16,1	20,76	3,95	57,71
7	Sumbawa Barat	18,72	1,39	0,47	0	1,74	0,21	3,81
8	Bima	63,4	5,82	2,18	4,94	4,88	0,84	18,66
9	Lombok Utara	78,07	1,8	2,49	10,68	19,46	3,91	38,34
10	Dompu	91,9	1,29	0,61	7,46	8,06	1,69	19,11
NTB		**621,03**	**95,03**	**33,18**	**79,68**	**89,6**	**12,18**	**309,67**

Sumber : Dinas PUPR PKP, 2026

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Salah satu faktor penentu keberhasilan pelaksanaan pembangunan adalah terwujudnya ketenteraman dan ketertiban umum. Selama tahun 2021- 2025, jumlah konflik di Provinsi NTB menunjukkan trend penurunan kecuali pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan, tetapi pada tahun 2024 dan 2025 kembali mengalami penurunan. Peningkatan konflik merupakan kasus yang bersifat fluktuatif, menyikapi hal tersebut Pemerintah Provinsi NTB tetap melakukan berbagai macam pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya kasus konflik, untuk menimbulkan rasa aman pada masyarakat.

Grafik 2. 31 Jumlah Konflik Sosial di Provinsi NTB Tahun 2021-2025



Sumber: Bakesbangpoldagri Provinsi NTB, 2025

Upaya penurunan konflik di Provinsi NTB dilakukan melalui koordinasi dengan aparat keamanan dan organisasi (mitra kerja) yang dibentuk untuk keperluan tersebut seperti: Forum Koordinasi Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem), dan Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT). Sekecil apapun isu yang berpotensi menimbulkan konflik yang berdasarkan hasil deteksi dini akan ditindaklanjuti dengan berbagai kegiatan atau aksi dalam pencegahan dini.

Upaya lainnya juga dilakukan seperti halnya melakukan edukasi, sosialisasi dan kampanye literasi demokrasi dan penghormatan hak asasi manusia, pengamalan nilai-nilai pancasila, pendidikan politik, pendidikan karakter bangsa, pemberdayaan ormas serta melakukan mediasi sebagai sarana untuk menyelesaikan konflik secara damai dan mencegah eskalasi konflik semakin melebar .

Terkait penanganan terhadap pelanggaran atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, telah dilakukan secara preventif. Selama tahun 2020-2025, jumlah pelanggaran terhadap PERDA dan Peraturan Gubernur sebanyak 52 kasus dan telah tertangani seluruhnya, sebagaimana digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 52 Data Pelanggaran Atas Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di Provinsi NTB Tahun 2020-2025

NO.	JENIS PERATURAN	TAHUN						TOTAL
		2020	2021	2022	2023	2024	2025	
1	PERATURAN DAERAH	6	7	8	5	5	2	33
2	PERATURAN GUBERNUR	6	6	1	1	2	3	19

Sumber : SATPOL PP Provinsi NTB, 2025

Selanjutnya ketentraman dan ketertiban umum diukur dari pencegahan, penanganan dan pengendalian bencana. Bencana yang terjadi di Provinsi NTB selama tahun 2021-2025 sebagian besar berupa gejala alam antara lain: banjir/bandang, cauaca ekstrim, gelombang pasang/banjir ROB, Gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor, Tsunami, epidemic/wabah penyakit, pabndemi covid-19, likuifaksi, letusan gunung api. Jenis dan jumlah bencana tersebut disajikan pada tabel berikut. Jenis dan jumlah bencana tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 53 Jumlah Bencana yang Terjadi di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Banjir	75	32	52	50	95
2	Banjir Bandang	14	14	11	12	15
3	Cuaca Ekstrim	17	30	27	62	70
4	Gelombang Pasang/Abrasi	10	7	-	6	2
5	Gempa Bumi	-	-	-	4	2
6	Kebakaran Hutan dan Lahan	-	-	3	7	3
7	Kekeringan	9	10	9	10	-
8	Tanah Longsor	25	10	22	22	24
9	Tsunami	-	-	-	-	-
10	Epidemi/Wabah Penyakit	-	-	-	-	2
11	Pandemi Covid-19	-	-	-	-	-
12	Likuifaksi	-	-	-	-	-
13	Letusan Gunung Api	-	-	-	-	-
Total Kejadian Bencana		**150**	**103**	**124**	**173**	**213**

Sumber: Pusdalop PB BPBD Provinsi NTB: 2025

Pada periode 1 Januari – 31 Desember 2025 telah terjadi bencana alam sebanyak 213 kejadian. Dari jumlah tersebut, bencana yang paling sering terjadi yaitu bencana banjir/ banjir bandang dengan 62 kejadian, kemudian cuaca ekstrim (angin puting beliung) 62 kejadian, gelombang pasang/abrasi 6 kejadian, tanah longsor 22 kejadian, 10 kejadian kekeringan, gempa bumi 4 kejadian dan 7 kejadian karhutla di seluruh Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Barat.

Berdasarkan Sistem Informasi Data Indeks Kerentanan Perubahan Iklim (SIDIK) yang dipublikasi oleh KLHK, pada suatu daerah dapat diketahui tingkat kerentanan terhadap bencana terkait dengan kondisi iklim di daerah tersebut. Wilayah Provinsi NTB cukup rentan terhadap bencana alam terutama banjir, gempa bumi, angin kencang/puting beliung, dan tanah longsor. Hal ini disebabkan oleh perubahan cuaca dan musim (faktor iklim). Permasalahan bencana di Nusa Tenggara Barat sangat kompleks dari segi jenis, kerentanan hingga dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, diperlukan sistem penanggulangan bencana yang komprehensif dengan didukung kelembagaan yang kuat agar bencana dapat ditangani dengan terarah dan terpadu.

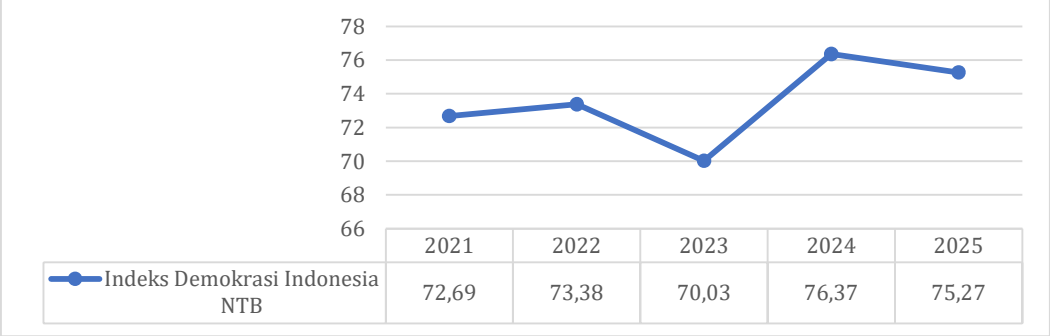
Salah satu upaya pemerintah daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam upaya mengurangi resiko bencana dengan meningkatkan kapasitas daerah. Indeks Kapasitas Daerah mengukur kemampuan daerah dalam hal penanggulangan bencana, mulai dari kesiapsiagaan, persiapan, hingga respons dan pemulihan. IKD juga dapat digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana penanggulangan bencana dan kajian risiko bencana.

Selanjutnya dalam pengukuran demokrasi yang berbasis provinsi yang disebut Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Pada dasarnya IDI bertujuan untuk mengukur secara

kuantitatif tingkat perkembangan demokrasi. Dari indeks tersebut akan terlihat perkembangan demokrasi sesuai dengan ketiga aspek yang diukur. Di samping level nasional, IDI juga dapat memberikan gambaran perkembangan demokrasi di provinsi-provinsi seluruh Indonesia. IDI Provinsi NTB selama tahun 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif, namun secara umum berada pada kategori sedang hingga baik

Tingkat demokrasi dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni 'rendah' (indeks < 60), 'sedang' (indeks 60 – 80), dan 'tinggi' (indeks >80). Sejak tahun 2009 IDI NTB mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pada tahun 2025, nilai IDI sedikit menurun menjadi 75,27, namun masih berada pada level yang lebih baik dibandingkan tahun-tahun awal periode pengamatan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas demokrasi di NTB relatif tetap terjaga meskipun masih terdapat beberapa tantangan dalam penguatan tata kelola demokrasi yang inklusif dan partisipatif. Ke depan, diperlukan penguatan pendidikan politik masyarakat, peningkatan partisipasi publik, perlindungan kebebasan sipil, serta penguatan kapasitas lembaga demokrasi agar kualitas demokrasi di Provinsi NTB semakin stabil dan berkualitas.

Grafik 2. 32 Perkembangan Indeks Demokrasi Provinsi NTB Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks Demokrasi Indonesia NTB	72,69	73,38	70,03	76,37	75,27

Sumber: BPS Provinsi NTB

6. Sosial

Pemerintah Provinsi NTB telah masih menghadapi tantangan dalam menangani permasalahan sosial yaitu penanganan dan pemberdayaan fakir miskin dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) serta penyedian sarana prasarana sosial (seperti Pusat Pelayanan Sosial Penyandang Disabilitas, Lanjut Usia, Anak Terlantar, Gelandangan dan Pengemis serta Pusat Pelayanan Sosial Wanita Rawan sosial Ekonomi). Jumlah lembaga kesejahteraan sosial di Provinsi NTB tahun 2024 sebanyak 354 LKS dari pihak swasta dan 8 LKS/Pusat Pelayanan Sosial dari pemerintah provinsi NTB. Penanganan PPKS lebih besar berasal dari pihak swasta yang tersebar di 10 Kabupaten/kota di NTB, terbanyak terdapat di Kabupaten Lombok timur dengan jumlah 137 LKS dan terendah di kabupaten Lombok Utara sebanyak 4 LKS, seperti disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 54 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) menurut Kabupaten/Kota di Provinsi NTB Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/ Kota	Jumlah LKS									
		2020		2021		2022		2023		2024	
		Swasta	Pemerintah	Swasta	Pemerintah	Swasta	Pemerintah	Swasta	Pemerintah	Swasta	Pemerintah
1	Lombok Barat	28	-	21	-	32	-	32	-	41	-
2	Lombok Tengah	65	-	43	-	78	-	77	-	86	-
3	Lombok Timur	88	-	79	-	100	-	113	-	137	-
4	Sumbawa	11	-	9	-	9	-	11	-	6	-
5	Dompu	16	-	6	-	20	-	23	-	29	-
6	Bima	16	-	7	-	12	-	13	-	13	-
7	Sumbawa Barat	2	-	1	-	5	-	5	-	5	-
8	Lombok Utara	4	-	2	-	3	-	4	-	4	-
9	Kota Mataram	12	-	10	-	11	-	12	-	13	-
10	Kota Bima	13	-	8	-	17	-	17	-	20	-
	Provinsi NTB	255	8	186	8	287	8	307	8	354	8

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2024.
Catatan : Data tersebut adalah jumlah LKS yang bermitra dengan Dinsos, belum dilakukan pendataan jumlah LKS secara menyeluruh pada tahun 2025 karena keterbatasan sumber daya untuk pendataan di tingkat kabupaten/kota.

Pemerintah Provinsi NTB melakukan penanganan terhadap Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) melalui berbagai cara, diantaranya pendampingan dan pemberian bantuan aksesibilitas agar dapat menjalankan fungsi sosialnya. Pada Tahun 2024 jumlah PPKS di NTB sebanyak 163.336 dan yang diberikan pelayanan tahun 2024 sebanyak 54.419 atau sebesar 33,32 % dari total jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di NTB. Jenis Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) l di Provinsi NTB tahun 2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 55 Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) di Provinsi NTB Tahun 2024

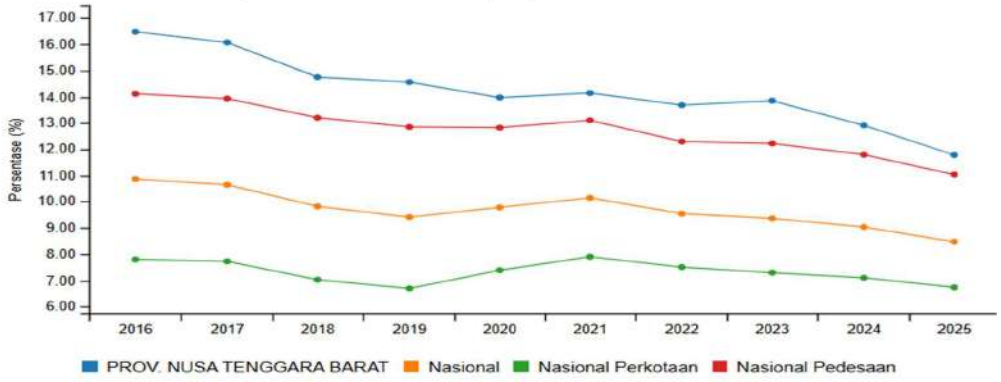
NO	JENIS PPKS	JUMLAH		YANG SDH DIBERIKAN PELAYANAN		%
1	Anak Balita Terlantar	2.308	Jiwa		Jiwa	0
2	Anak Terlantar	57.085	Jiwa	20.748	Jiwa	36,35
3	Anak Nakal/Anak Berhadapan dengan Hukum	859	Jiwa		Jiwa	0,00
4	Anak Jalanan	3.286	Jiwa		Jiwa	0,00
5	Anak Dengan Kedisabilitasan	4.830	Jiwa		Jiwa	0,00
6	Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan	471	Jiwa		Jiwa	0,00
7	Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		Jiwa		Jiwa	0,00
8	Lanjut Usia Terlantar	45.496	Jiwa	130	Jiwa	0,29
9	Penyandang Disabilitas	28.652	Jiwa	335	Jiwa	1,17
10	Tuna Susila		Jiwa		Jiwa	0,00
11	Gelandangan	200	Jiwa	122	Jiwa	61,00
12	Pengemis		Jiwa		Jiwa	0,00
13	Pemulung	310	Jiwa		Jiwa	0,00
14	Kelompok Minoritas	55	Jiwa		Jiwa	0,00
15	Bekas Warga Binaan Lembaga	6.430	Jiwa		Jiwa	0,00
16	Orang dengan HIV/AIDS (ODHA)	212	Jiwa		Jiwa	0,00
17	Korban Penyalahgunaan Napza	551	Jiwa		Jiwa	0,00
18	Korban Traficking		Jiwa		Jiwa	0,00
19	Korban Tindak Kekerasan		Jiwa		Jiwa	0,00
20	Pekerja Migran Bermasalah (PMB)		Jiwa		Jiwa	0,00
21	Korban Bencana Alam		KK	33.014	KK	100,00

NO	JENIS PPKS	JUMLAH		YANG SDH DIBERIKAN PELAYANAN		%
22	Korban Bencana Sosial		KK		KK	0,00
23	Wanita Rawan Sosial Ekonomi	10.280	Jiwa	70	Jiwa	0,68
25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis		KK		KK	0,00
26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	2.311	KK		KK	0,00
	JUMLAH	**163.336**		**54.419**		**33,32**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2024

Tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2025 tercatat sebesar 11,78%, mengalami penurunan sebesar 1,13% dari tahun sebelumnya. Tingkat penurunan ini lebih tinggi dibandingkan tren tahun lalu. Meski demikian, angka tersebut masih berada di atas tingkat kemiskinan nasional. Dengan proporsi wilayah perkotaan dan perdesaan yang relatif seimbang, tingkat kemiskinan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga masih lebih tinggi dibandingkan tingkat kemiskinan nasional, baik di kawasan perkotaan maupun perdesaan.

Grafik 2. 33 Tingkat Kemiskinan (P0) di Provinsi Tahun 2016-2025



Sumber : SEPAKAT-BAPPENAS, 2026

Beranjak dari kondisi tahun sebelumnya, Koefisien Gini Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang semula tercatat sebesar 0,36 pada tahun 2024, mengalami peningkatan sebesar 0,01 menjadi 0,37 pada tahun 2025. Peningkatan ini mengindikasikan tren ketimpangan pengeluaran di tengah masyarakat yang semakin melebar. Dengan karakteristik proporsi wilayah perkotaan dan perdesaan yang relatif seimbang, tingkat ketimpangan NTB ini tercatat lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional kawasan perkotaan, namun masih lebih tinggi bila dibandingkan dengan rata-rata nasional khusus kawasan perdesaan. Bergeraknya angka ketimpangan ke arah yang lebih tinggi dari tahun lalu ini menjadi catatan strategis bagi arah pembangunan daerah. Hal ini mengisyaratkan bahwa nilai tambah dari pertumbuhan ekonomi belum terdistribusi secara merata, sehingga memerlukan intervensi kebijakan yang lebih spesifik guna mengejar ketertinggalan di kawasan perdesaan. Lebih jauh, melebarnya kesenjangan ini patut diwaspadai karena berpotensi meningkatkan kerentanan sosial-ekonomi masyarakat kelas bawah, khususnya dalam merespons dan bertahan terhadap berbagai guncangan ekonomi maupun risiko bencana di masa depan.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Berdasarkan data BPS Provinsi NTB bahwa selama tahun 2021-2025 jumlah tenaga kerja, angkatan kerja dan pengangguran mengalami fluktuasi, sehingga berdampak kepada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), seperti disajikan pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2. 56 TPAK dan TPT di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

Tenaga Kerja	2021	2022	2023	2024	2025
Penduduk Usia Kerja	3.882.460	3.946.546	4.059.604	4.133.780	4.229.010
Angkatan Kerja	2.739.890	2.799.178	2.976.225	3.192.560	3.235.020
Bekerja	2.657.395	2.718.345	2.892.982	3.105.550	3.136.300
Pengangguran	82.495	80.833	83.243	87.010	98.720
Bukan Angkatan Kerja	1.142.570	1.147.368	1.083.379	941.220	993.990
TPT	**3,01**	**2,89**	**2,80**	**2,73**	**3,05**
- Perkotaan	3,85	3,52	3,27	2,91	3,17
- Perdesaan	2,18	2,28	2,32	2,53	2,90
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	**70,57**	**70,93**	**73,31**	**77,23**	**76,50**
- Laki-laki	82,58	83,27	84,18	86,47	85,09
- Perempuan	59,18	59,16	62,54	68,04	67,92

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2026.

Berdasarkan data ketenagakerjaan tahun 2021–2025, kondisi tenaga kerja di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terutama dari sisi peningkatan jumlah angkatan kerja dan penduduk yang bekerja. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi kenaikan pengangguran yang perlu menjadi perhatian pemerintah daerah. Jumlah penduduk usia kerja terus meningkat dari 3,88 juta orang pada tahun 2021 menjadi 4,23 juta orang pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bertambahnya jumlah penduduk yang berpotensi masuk ke pasar kerja. Sejalan dengan itu, jumlah angkatan kerja juga mengalami peningkatan signifikan dari 2,74 juta orang menjadi 3,24 juta orang selama periode tersebut. Kondisi ini menandakan semakin banyak masyarakat yang aktif mencari pekerjaan atau terlibat dalam kegiatan ekonomi.

Dari sisi penyerapan tenaga kerja, jumlah penduduk yang bekerja meningkat cukup besar, yaitu dari 2,66 juta orang pada tahun 2021 menjadi 3,14 juta orang pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa perekonomian daerah mampu menciptakan lapangan kerja baru dan menyerap tambahan tenaga kerja setiap tahunnya. Meski demikian, jumlah pengangguran juga mengalami fluktuasi. Setelah sempat menurun pada tahun 2022 menjadi 80,8 ribu orang, angka pengangguran kembali meningkat hingga mencapai 98,7 ribu orang pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja belum sepenuhnya diimbangi dengan penyediaan lapangan kerja yang memadai.

Kondisi tersebut tercermin pada Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang sempat turun dari 3,01 persen pada tahun 2021 menjadi 2,73 persen pada tahun 2024, namun kembali meningkat menjadi 3,05 persen pada tahun 2025. Kenaikan TPT tahun 2025 mengindikasikan adanya tekanan di pasar kerja, baik akibat meningkatnya jumlah pencari kerja maupun ketidaksesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan dunia usaha. Dilihat berdasarkan wilayah, TPT di perkotaan cenderung lebih tinggi dibandingkan perdesaan. Pada tahun 2025, TPT perkotaan mencapai 3,17 persen, sedangkan perdesaan sebesar 2,90 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa persaingan kerja di wilayah perkotaan lebih ketat karena tingginya konsentrasi pencari kerja dan terbatasnya kesempatan kerja formal.

Sementara itu, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengalami peningkatan cukup signifikan dari 70,57 persen pada tahun 2021 menjadi 76,50 persen pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan meningkatnya keterlibatan masyarakat usia kerja dalam aktivitas ekonomi. Peningkatan TPAK terutama terlihat pada perempuan, yang naik dari 59,18 persen menjadi 67,92 persen. Kondisi ini menunjukkan semakin besarnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja dan aktivitas produktif. Namun demikian, TPAK laki-laki masih lebih tinggi, yaitu mencapai 85,09 persen pada tahun 2025.

Secara keseluruhan, kondisi ketenagakerjaan di NTB selama tahun 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang positif dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja dan partisipasi masyarakat dalam kegiatan ekonomi. Akan tetapi, kenaikan pengangguran pada tahun 2025 menjadi tantangan yang perlu diantisipasi melalui penciptaan lapangan kerja baru, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pelatihan keterampilan kerja, serta penguatan sektor-sektor ekonomi produktif agar mampu menyerap tenaga kerja secara lebih optimal.

Selanjutnya sebaran TPT berdasarkan Kabupaten/Kota lima tahun terakhir TPT seluruh kabupaten/kota yang ada di Provinsi NTB mengalami fluktuasi. Pada tingkat kabupaten/kota, Kota Mataram secara konsisten memiliki TPT tertinggi di NTB selama periode 2021–2025. Pada tahun 2025, TPT Kota Mataram mencapai 4,80 persen. Tingginya angka pengangguran di wilayah perkotaan ini disebabkan oleh tingginya konsentrasi pencari kerja, urbanisasi, serta dominasi sektor formal yang lebih kompetitif. Selain Kota Mataram, Kota Bima juga mencatat TPT yang relatif tinggi, yaitu sebesar 4,28 persen pada tahun 2025. Kabupaten Sumbawa Barat juga termasuk daerah dengan tingkat pengangguran tinggi. TPT daerah ini sempat turun dari 5,52 persen pada tahun 2021 menjadi 3,10 persen pada tahun 2024, namun kembali meningkat cukup tajam menjadi 4,13 persen pada tahun 2025. Fluktuasi ini kemungkinan dipengaruhi oleh dinamika sektor pertambangan dan industri yang menjadi basis ekonomi utama daerah tersebut.

Sementara itu, daerah dengan TPT terendah pada tahun 2025 adalah Kabupaten Bima sebesar 2,13 persen. Rendahnya tingkat pengangguran di Kabupaten Bima menunjukkan bahwa sebagian besar angkatan kerja terserap dalam aktivitas ekonomi, terutama di sektor pertanian dan sektor informal. Selain itu, Kabupaten Sumbawa juga

menunjukkan kondisi ketenagakerjaan yang cukup baik dengan TPT sebesar 2,60 persen pada tahun 2025. Beberapa daerah lain seperti Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Lombok Utara menunjukkan fluktuasi TPT yang relatif kecil dengan kisaran 2–3 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pasar kerja di wilayah tersebut relatif stabil, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam penyediaan lapangan kerja baru.

Secara keseluruhan, analisis TPT kabupaten/kota di NTB menunjukkan bahwa kondisi ketenagakerjaan di NTB relatif lebih baik dibandingkan rata-rata nasional. Namun demikian, masih terdapat kesenjangan antarwilayah, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan. Kota-kota besar cenderung memiliki tingkat pengangguran lebih tinggi akibat persaingan kerja yang ketat, sedangkan daerah berbasis pertanian memiliki TPT yang lebih rendah. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih merata, seperti pengembangan sektor ekonomi produktif, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja khususnya di wilayah perkotaan dan daerah dengan TPT tinggi.

Tabel 2. 57 Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota (Persen)

Kabupaten/Kota	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Kabupaten Lombok Barat	3,32	4,16	3,12	2,75	2,82
Kabupaten Lombok Tengah	2,33	3,02	2,78	2,55	3,36
Kabupaten Lombok Timur	2,79	1,51	2,47	2,53	2,82
Kabupaten Sumbawa	3,39	2,11	2,79	2,67	2,60
Kabupaten Dompu	3,02	2,50	2,36	2,7	2,84
Kabupaten Bima	1,58	2,28	2,15	2,19	2,13
Kabupaten Sumbawa Barat	5,52	4,56	3,54	3,10	4,13
Kabupaten Lombok Utara	1,75	0,38	1,40	1,85	2,68
Kota Mataram	5,19	6,03	4,78	4,85	4,80
Kota Bima	3,56	3,73	3,57	3,27	4,28
Nusa Tenggara Barat	**3,01**	**2,89**	**2,80**	**2,73**	**3,05**
Nasional	**6,6**	**5,83**	**5,32**	**4,91**	**4,85**

Sumber : BPS NTB, 2026 (data diolah)

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Keberhasilan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melalui pengarusutamaan gender di Provinsi NTB dapat dilihat dari dua indikator makro yaitu: Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu, rata-rata usia kawin pertama perempuan, partisipasi perempuan dalam pembangunan dan cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak juga merupakan indikator pencapaian urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Provinsi NTB.

IPG merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG di bawah 100 menunjukan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu

pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Perkembangan kedua indikator tersebut disajikan pada tabel-tabel berikut.

Tabel 2. 58 Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021-2025

Keterangan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
NTB	90,53	91,08	91,39	91,54	91.91
Indonesia	91,27	91,63	91,85	91,85	92.69
Kabupaten Lombok Barat	89,22	90,41	90,65	90,66	90.44
Kabupaten Lombok Tengah	87,19	88,33	88,72	88,78	89.03
Kabupaten Lombok Timur	91,33	92,53	92,25	92,39	92.62
Kabupaten Sumbawa	93,48	94,59	94,79	94,96	94.8
Kabupaten Dompu	90,66	91,17	91,33	91,52	91.65
Kabupaten Bima	91,87	92,44	92,20	92,33	92.58
Kabupaten Sumbawa Barat	92,8	93,82	93,48	93,61	93.89
Kabupaten Lombok Utara	85,54	86,33	85,88	86,04	86.33
Kota Mataram	92,79	93,04	93,30	93,32	94.22
Kota Bima	96,41	96,95	96,90	96,88	96.96

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2026

Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi NTB selama tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat dan semakin mendekati capaian nasional. Nilai IPG NTB meningkat dari 90,53 pada tahun 2021 menjadi 91,91 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin baiknya kesetaraan pembangunan antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam aspek kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Meskipun mengalami peningkatan setiap tahun, capaian IPG NTB masih sedikit berada di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2025, IPG Indonesia mencapai 92,69 sedangkan NTB berada pada angka 91,91. Namun demikian, selisih tersebut semakin kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yang menunjukkan adanya kemajuan pembangunan gender di daerah.

Berdasarkan perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2021–2025, secara umum terlihat adanya kecenderungan penurunan tingkat ketimpangan gender di sebagian besar wilayah. Hal ini menunjukkan bahwa kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi di pasar kerja semakin mengecil. Semakin rendah nilai IKG, semakin baik kondisi kesetaraan gender yang dicapai.

Selama periode 2021–2025, Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren perbaikan dalam pengurangan ketimpangan gender. Nilai IKG Provinsi NTB menurun dari 0,653 pada tahun 2021 menjadi 0,515 pada tahun 2025, atau turun sebesar 0,138 poin. Penurunan paling signifikan terjadi pada tahun 2024 ketika nilai IKG turun menjadi 0,530 setelah relatif stagnan pada periode 2021–2023. Kondisi tersebut menunjukkan adanya peningkatan akses dan kesempatan perempuan dalam berbagai aspek pembangunan, meskipun hasilnya masih belum optimal.

Meskipun mengalami perbaikan, capaian IKG Provinsi NTB masih berada di atas rata-rata nasional. Pada tahun 2025, IKG nasional tercatat sebesar 0,402, sedangkan NTB masih berada pada angka 0,515, sehingga terdapat selisih sebesar 0,113 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat ketimpangan gender di NTB masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata Indonesia, sehingga diperlukan upaya yang lebih terarah untuk mempercepat peningkatan kesetaraan gender.

Pada tingkat kabupaten/kota, sebagian besar daerah menunjukkan tren penurunan IKG selama lima tahun terakhir. Perbaikan paling besar terjadi di Kabupaten Sumbawa Barat, yang berhasil menurunkan nilai IKG dari 0,561 pada tahun 2021 menjadi 0,399 pada tahun 2025 atau turun sebesar 0,162 poin. Capaian tersebut menjadikan Kabupaten Sumbawa Barat sebagai satu-satunya kabupaten di NTB yang telah berada di bawah rata-rata nasional. Penurunan yang cukup besar juga terjadi di Kabupaten Bima (0,587 menjadi 0,463), Kota Mataram (0,423 menjadi 0,384), Kota Bima (0,495 menjadi 0,412), serta Kabupaten Lombok Utara (0,567 menjadi 0,503).

Tabel 2. 59 Perkembangan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kab. Lombok Barat	0,574	0,549	0,565	0,538	0,527
2	Kab. Lombok Tengah	0,597	0,601	0,603	0,544	0,541
3	Kab.Lombok Timur	0,584	0,568	0,576	0,551	0,543
4	Kab. Sumbawa	0,315	0,432	0,350	0,373	0,322
5	Kab. Dompu	0,551	0,537	0,534	0,513	0,540
6	Kab. Bima	0,587	0,589	0,560	0,479	0,463
7	Kab. Sumbawa Barat	0,561	0,545	0,526	0,482	0,399
8	Kab. Lombok Utara	0,567	0,560	0,581	0,573	0,503
9	Kota Mataram	0,423	0,476	0,465	0,444	0,384
10	Kota Bima	0,495	0,480	0,482	0,458	0,412
	NTB	**0,653**	**0,648**	**0,650**	**0,530**	**0,515**
	Nasional	**0,465**	**0,459**	**0,447**	**0,421**	**0,402**

Sumber: BPS RI, 2026

Selanjutnya pada Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang terbentuk oleh tiga komponen, yaitu keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga professional dan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga. IDG dihitung untuk melihat sejauh mana keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi. Capaian IDG antar provinsi cenderung merata dan tidak menunjukan disparitas yang berarti antara Kawasan Barat Indonesia maupun Kawasan Timur Indonesia.

Tabel 2. 60 Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2020-2024

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
NTB	51,96	52,54	53,47	53,28	64,44
Indonesia	75,57	76,26	76,59	76,9	71,58

Keterangan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Kabupaten Lombok Barat	55,91	57,56	59,68	62,03	62,49
Kabupaten Lombok Tengah	57,53	60,13	61,76	60,45	63,6
Kabupaten Lombok Timur	65,52	65,99	67,44	66,81	71,24
Kabupaten Sumbawa	69,41	70,15	69,58	69,54	72,58
Kabupaten Dompu	64,17	64,45	64,58	63,95	61,57
Kabupaten Bima	52,62	53,26	53,78	53,43	64,63
Kabupaten Sumbawa Barat	49,07	49,22	48,61	48,84	53,49
Kabupaten Lombok Utara	47,22	47,4	43,45	48,52	47,67
Kota Mataram	76,23	76,42	76,26	77,00	77,02
Kota Bima	69,58	70,16	69,86	70,76	77,48

Sumber: BPS Nasional, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi NTB tahun 2020-2024 masih jauh berada di bawah IDG nasional. Komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), yaitu Keterlibatan perempuan di parlemen di Provinsi NTB, selama periode 2021–2025 menunjukkan adanya peningkatan. Namun, capaian IDG ini masih jauh di bawah rata-rata nasional. Pada tahun 2021 hingga 2023, keterlibatan perempuan di parlemen NTB relatif stagnan pada kisaran 1,54–1,59%. Kondisi ini menunjukkan bahwa representasi perempuan dalam lembaga legislatif daerah masih sangat terbatas dan belum mencerminkan keterwakilan gender yang seimbang.

Tabel 2. 61 Keterlibatan Perempuan di Parlemen (Persen) Tahun 2021-2025

Uraian	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
NTB	1.59	1.59	1.54	10.77	10.77
Indonesia	21.89	21.74	22.14	22.46	22.28
Kabupaten Lombok Barat	8.89	8.89	11.11	11.11	8.89
Kabupaten Lombok Tengah	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00
Kabupaten Lombok Timur	10.00	10.00	10.00	14.00	12.00
Kabupaten Sumbawa	13.33	13.33	13.33	15.56	15.56
Kabupaten Dompu	10.00	10.00	10.00	6.67	6.67
Kabupaten Bima	6.67	6.67	6.67	17.78	17.78
Kabupaten Sumbawa Barat	8.00	8.00	8.00	12.00	12.00
Kabupaten Lombok Utara	3.33	3.33	3.33	3.33	3.33
Kota Mataram	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00
Kota Bima	16.00	16.00	16.67	24.00	24.00

Sumber: BPS NTB, 2026 (data diolah)

Dari tabel di atas, diketahui bahwa seluruh capaian dari komponen pembentuk IDG Provinsi NTB masih lebih rendah dari capaian nasional, terutama untuk komponen keterlibatan perempuan di parlemen. Pada tahun 2025, persentase perempuan sebagai anggota parlemen hanya 10,77% jauh dibawah capaian nasional sebesar 22,28% dan merupakan capaian komponen IDG terendah di Indonesia.

Selanjutnya, Hal lain yang menjadi bagian urusan wajib non pelayanan dasar adalah perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak. Hal tersebut, merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang wajib dipenuhi dan dilindungi agar masa

pertumbuhan anak dapat berjalan dengan optimal. Pentingnya pemenuhan hak-hak anak dikarenakan anak yang akan melanjutkan perjuangan bangsa. Upaya perlindungan dan pemenuhan hak bagi setiap anak merupakan kewajiban bagi negara. Upaya pemenuhan hak anak sudah dimulai sejak anak belum dilahirkan melalui pemenuhan gizi bagi ibu hamil. Pemenuhan hak dasar juga menjadi sangat penting dalam menjamin kelangsungan hidup, tumbuh dan kembang anak.

Keberhasilan pemenuhan hak anak dan perlindungan anak dapat diukur dari capaian peringkat Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Penilaian KLA ini meliputi penilaian aspek kelembagaan yang meliputi kebijakan daerah tentang KLA, kelembagaan KLA dan keterlibatan masyarakat, dunia usaha dan media massa serta 5 klaster KLA yang meliputi perlindungan dan pemenuhan hak anak. Saat ini, pencegahan perkawinan anak, peningkatan peran orang tua dalam pengasuhan anak, penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan penurunan pekerja anak menjadi prioritas isu dalam pemenuhan hak anak dan perlindungan anak di Provinsi NTB.

Kasus kekerasan terhadap anak di Provinsi NTB selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang fluktuatif dengan jumlah kasus yang masih relatif tinggi. Secara total, jumlah kasus meningkat dari 598 kasus pada tahun 2021 menjadi 640 kasus pada tahun 2022, kemudian menurun menjadi 607 kasus pada tahun 2023 dan kembali turun menjadi 549 kasus pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 jumlah kasus kembali meningkat menjadi 637 kasus. Kondisi ini menunjukkan bahwa permasalahan kekerasan terhadap anak masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan sosial di Provinsi NTB. Adapun perkembangan kasus kekerasan terhadap anak menurut Kabupaten/Kota sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 62 Perkembangan kasus kekerasan terhadap anak menurut kabupaten/kota Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Kasus kekerasan terhadap anak				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Mataram	22	35	36	84	55
2	Kabupaten Lombok Barat	73	66	79	55	68
3	Kabupaten Lombok Tengah	28	66	42	22	166
4	Kabupaten Lombok Timur	205	179	156	189	8
5	Kabupaten Lombok Utara	96	104	95	115	89
6	Kabupaten Sumbawa Barat	11	24	20	20	54
7	Kabupaten Sumbawa	51	45	39	15	36
8	Kabupaten Dompu	46	64	37	28	72
9	Kabupaten Bima	28	36	68	85	72
10	Kota Bima	38	21	35	20	17
	JUMLAH	**598**	**640**	**607**	**549**	637

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2026

Kasus kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran dan kasus kekerasan lainnya. Dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak tersebut, angka tertinggi pada bentuk kekerasan yang dialami anak-anak yaitu kekerasan seksual. Selain kekerasan terhadap anak, kekerasan terhadap

perempuan juga menjadi salah satu masalah dalam isu perlindungan perempuan di Provinsi NTB. Angka kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lima tahun terakhir masih tinggi dan mengalami fluktuasi. Rincian perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan menurut Kabupaten/Kota disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 63 Perkembangan kasus kekerasan terhadap perempuan menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2024

No	Kabupaten/Kota	Kasus Kekerasan terhadap perempuan				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Kota Mataram	57	32	26	24	31
2	Kabupaten Lombok Barat	74	67	53	57	52
3	Kabupaten Lombok Tengah	18	10	35	26	19
4	Kabupaten Lombok Timur	59	185	51	48	88
5	Kabupaten Lombok Utara	17	28	14	51	28
6	Kabupaten Sumbawa Barat	11	10	15	16	16
7	Kabupaten Sumbawa	19	28	19	9	13
8	Kabupaten Dompu	26	22	67	54	17
9	Kabupaten Bima	14	53	44	58	52
10	Kota Bima	68	27	20	22	26
	JUMLAH	**363**	**462**	**344**	**365**	**312**

Sumber: Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, 2024

Tingginya kasus kekerasan anak dan perempuan menunjukan bahwa sistem perlindungan anak dan perempuan di NTB masih lemah. Selain itu, tinggi nya kasus dari tahun ke tahun dapat pula menunjukan bahwa kesadaran masyarakat atau korban untuk melaporkan kekerasan ini semakin tinggi, karena data yang ditampilkan adalah data kekerasan yang dilaporkan. Partisipasi masyarakat pada tingkat pemerintahan terendah seperti di desa memiliki peranan yang sangat penting dalam` pencegahan kasus kekerasan pada anak dan perempuan, selain itu peranan UPT PPA dalam penanganan kasus juga sangat strategis di setiap Kabupaten/Kota dan juga Provinsi.

Hal lain yang manjadi isu utama pada perlindungan perempuan dan anak adalah perkawinan anak. Masalah perkawinan anak menjadi sangat penting di dan membutuhkan perhatian khusus di Provinsi NTB, dikarenakan prevalensi nya tertinggi kedua di Indonesia dan dampak dari perkawinan anak ini pada seluruh sektor pembangunan manusia. Kasus perkawinan anak membutuhkan kontribusi seluruh pihak, karena merupakan masalah lintas sektor dan mempunyai dampak yang luas dalam pembangunan manusia.

Tabel 2. 64 Kasus Perkawinan Anak Berdasarkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Tinggi Agama Provinsi NTB Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Kasus Perkawinan Anak				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Kota Mataram	12	3	5	5	5
2	Kabupaten Lombok Barat	79	39	56	12	55
3	Kabupaten Lombok Tengah	307	47	40	16	16
4	Kabupaten Lombok Timur	141	31	29	36	3

No	Kabupaten/Kota	Kasus Perkawinan Anak				
		2021	2022	2023	2024	2025
5	Kabupaten Lombok Utara	-	-	-	63	-
6	Kabupaten Sumbawa Barat	27	21	3	0	2
7	Kabupaten Sumbawa	163	122	87	59	81
8	Kabupaten Dompu	138	171	194	148	87
9	Kabupaten Bima	249	276	309	162	262
10	Kota Bima	-	-	-	53	-
	JUMLAH	**1.116**	**710**	**723**	**554**	**511**

Sumber: Dinas Sosial Provinsi NTB, 2024

Secara umum, penurunan kasus perkawinan anak di NTB mencerminkan semakin meningkatnya perhatian pemerintah dan masyarakat terhadap perlindungan anak serta pentingnya pendidikan dan kesehatan reproduksi remaja. Namun demikian, masih tingginya kasus di beberapa daerah menunjukkan bahwa faktor budaya, ekonomi, pendidikan, dan pola pikir masyarakat masih menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan anak.

3. Pangan

Sektor ketahanan pangan menjadi prioritas pembangunan yang tercantum dalam Sustainable Development Goals melalui tujuan 2 yaitu mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan.

Ketersediaan luas lahan pertanian menghasilkan produksi pertanian yang berdampak pada meningkatnya cadangan pangan mencapai swasembada pangan.

Keberhasilan penyelenggaraan urusan wajib bukan pelayanan dasar bidang pangan diukur melalui indikator Pola Pangan Harapan (PPH). PPH Konsumsi merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya, dan agama. Adapun kelompok pangan tersebut mencakup (1) padi-padian, (2) umbi-umbian, (3) pangan hewani, (4) minyak dan lemak, (5) buah/biji berminyak, (6) kacang-kacangan, (7) gula, (8) sayur dan buah, serta (9) lain-lain.

Situasi konsumsi pangan penduduk diukur dari kondisi kecukupan konsumsi energi dan kecukupan konsumsi protein. Situasi Kecukupan Konsumsi Pangan Penduduk Nusa Tenggara Barat Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 65 Situasi Kecukupan Konsumsi Energi dan Protein Penduduk NTB Tahun 2025

No	Kelompok Pangan	Konsumsi (gram/kap/ hari)	Energi (kkal/kap/ hari)	% AKE	Protein (Gr/kap/hari)	% AKP	Skor Riil
1	Padi-padian	368.43	1442.19	68.7	32.55	57.11	25
2	Umbi-umbian	39.19	54.12	2.6	0.56	0.98	1.29
3	Pangan Hewani	144.67	327.35	15.6	26.74	46.91	24
4	Minyak dan Lemak	25.27	227.15	10.8	0.02	0.04	5
5	Buah/biji Berminyak	2.84	15.53	0.7	0.19	0.33	0.37
6	Kacang-Kacangan	28.77	83.18	4.0	6.23	10.93	7.92

7	G u l a	21.21	73.79	3.5	0.59	1.04	1.76
8	Sayur dan buah	278.69	163.61	7.8	5.86	10.28	30
9	Lain-Lain	114.28	60.98	2.9	1.93	3.39	0
	J u m l a h		**2,447.90**	**116.6**	**74.67**	**131.00**	**95.34**
	Standar Konsumsi Energi		**2,100.00**	**100**	**57**	**100**	

Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2025

Situasi kecukupan konsumsi energi dan protein penduduk Provinsi NTB tahun 2025 menunjukkan bahwa secara umum konsumsi masyarakat telah melampaui standar Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP) nasional. Total konsumsi energi masyarakat NTB mencapai 2.447,90 kkal/kapita/hari atau sebesar 116,6% dari standar kebutuhan energi sebesar 2.100 kkal/kapita/hari. Sementara itu, konsumsi protein mencapai 74,67 gram/kapita/hari atau 131% dari standar kebutuhan protein sebesar 57 gram/kapita/hari. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, konsumsi pangan masyarakat NTB sudah tergolong cukup baik dalam memenuhi kebutuhan dasar energi dan protein. Perkembangan skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Penduduk NTB dari tahun 2019-2025 dapat dilihat pada Grafik dan tabel berikut:

Grafik 2. 34 Target dan Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2026.

Sedangkan perkembangan kualitas konsumsi pangan penduduk Nusa Tenggara Barat berdasarkan kelompok bahan pangan dari tahun 2020 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. 66 Perkembangan Kualitas Konsumsi Pangan Penduduk NTB berdasarkan Kelompok Bahan Pangan Tahun 2020 - 2025

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal (gr/kap/hari)	Konsumsi Aktual (gr/kap/hari)						Skor PPH					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Padi-padian	275	392.2	393	391	395	389.4	368.43	25	25	25	25	25	25

No	Kelompok Pangan	Konsumsi Ideal (gr/kap/hari)	Konsumsi Aktual (gr/kap/hari)						Skor PPH					
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024	2025
2	Umbi-umbian	100	34.7	40.4	41.5	42.6	31.62	39.19	1.1	1.1	1.1	1.2	0.9	1.29
3	Pangan Hewani	150	127.7	153	132	136	141.13	144.67	24	24	24	24	24	24
4	Minyak dan Lemak	20	23.3	25.9	25.3	24.5	23.71	25.27	5	5	5	5	5	5
5	Buah/biji berminyak	10	3.7	3.7	3.1	3.5	2.83	2.84	0.5	0.5	0.5	0.4	0.37	0.37
6	Kacang-kacangan	35	22.9	23.9	26.3	21.1	24.06	28.77	6.2	6.2	6.2	7.7	6.9	7.92
7	Gula	30	17	17.5	17.2	15.2	12.28	21.21	1.5	1.5	1.5	1.4	1.1	1.76
8	Sayuran dan buah	250	276.9	298	294	310	287.55	278.69	30	30	30	30	30	30
9	Lain-lain	0	0	0	0	135	133.67	114.28	-	-	-	-		0
	Jumlah								**90.4**	**93.3**	**94.4**	**94.7**	**93.27**	**95.34**

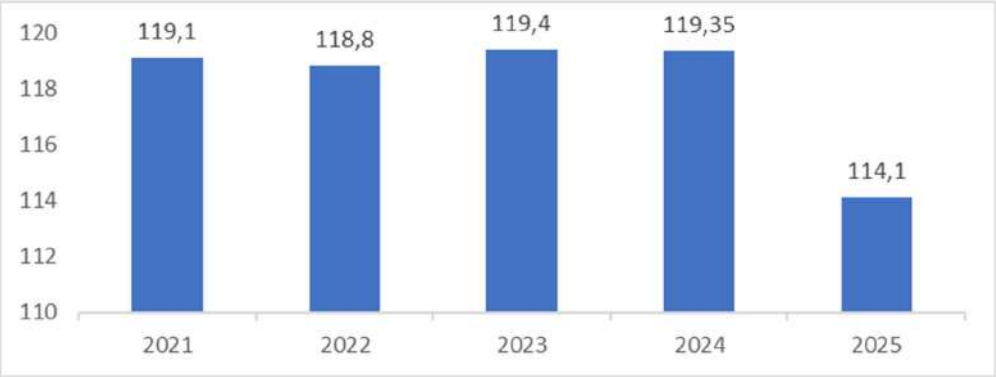
Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2024

Data kualitas konsumsi pangan penduduk Provinsi NTB menggambarkan skor PPH Konsumsi Penduduk NTB Tahun 2025 mencapai 95,34, meningkat dari tahun 2024 sebesar 93,27 point. Hal ini disebabkan karena peningkatan konsumsi kelompok pangan: umbi-umbian, kacang-kacangan, dan gula. Capaian Skor PPH Konsumsi Tahun 2025 ini masih lebih rendah dari skor ideal yang dipersyaratkan sebesar 100 point.

Permasalahan yang masih dihadapi adalah tingginya konsumsi padi-padian khususnya beras yang dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain : a) perilaku masyarakat yang menjadikan beras sebagai makanan pokok/sumber karbohidrat utama; b) masih rendahnya daya beli masyarakat; c) rendahnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam, bergizi seimbang, dan masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan; d) kurang berkembangnya teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non-beras dan non-terigu.

Tingkat konsumsi beras penduduk NTB Tahun 2025 sebesar 114,1 Kg/Kap/Tahun. Capaian ini masih sangat tinggi jika dibandingkan dengan standar ideal yang dipersyaratkan sebesar 100,4 Kg/Kap/Tahun. Konsumsi beras tahun 2025 ini juga mengalami penurunan sebesar 5,25 Kg/Kap/Tahun (4,4%) dibandingkan dengan konsumsi beras tahun 2024 sebesar 119,35 Kg/Kap/Tahun. Perkembangan tingkat konsumsi beras penduduk NTB selama kurun waktu tahun 2019-2025 dapat dilihat pada grafik berikut:

Grafik 2. 35 Perkembangan Konsumsi Beras Penduduk NTB Periode Tahun 2021-2025



Sumber : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2024

Indikator Tingkat Konsumsi Protein merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja sasaran ke-3 Dinas Ketahanan Pangan Provinsi NTB, yaitu Meningkatnya Konsumsi Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi Seimbang dan Aman (B2SA). Terpenuhinya konsumsi pangan secara kuantitas dicerminkan dari tingkat konsumsi energi dan protein penduduk. Tingkat konsumsi protein adalah perbandingan antara banyaknya protein yang dikonsumsi (gram) terhadap kecukupan protein, dalam satuan % AKP. Konsumsi protein per kapita per hari didefinisikan sebagai nilai pangan yang dikonsumsi per kapita per hari dengan satuan gram.

Tingkat konsumsi protein penduduk Nusa Tenggara Barat tahun 2025 mencapai 74,66, meningkat dari tahun 2024 sebesar 74,50 gram/kap/hari. Tingkat konsumsi protein ini diperhitungkan sebagai persentase dari 57 gram/kap/hari. Sesuai dengan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X Tahun 2012, Angka Kecukupan Protein (AKP) adalah sebesar 57 gram/kapita/hari. Konsumsi protein per kapita per hari dihitung dengan cara membagi total konsumsi protein rumah tangga per hari dengan jumlah Anggota Rumah Tangga (ART). Perkembangan Tingkat Konsumsi Protein Penduduk NTB tahun 2021-2025 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 67 Perkembangan Tingkat Konsumsi Protein Penduduk NTB Tahun 2021-2024

No	Uraian	Tahun					Rata-rata	Laju Pertumbuhan (%)
		2021	2022	2023	2024	2025		
1	Konsumsi Protein (gr/kapita/hari)	74	74.8	76.12	74.5	74.66	75.46	-0.81
2	Tingkat Konsumsi Protein (% dari 57 gram/kap/hari)	135.44	131.23	133.54	130.7	130.98	132.38	-0.81

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2026

Sedangkan Tingkat Konsumsi Energi adalah perbandingan antara banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) terhadap kecukupan energi, dalam satuan % AKE. Konsumsi energi per kapita per hari didefinisikan sebagai nilai pangan yang dikonsumsi

per kapita per hari dengan satuan kkal. Sesuai dengan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG ke X Tahun 2012, Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari. Konsumsi energi per kapita per hari dihitung dengan cara membagi total konsumsi energi rumah tangga per hari dengan jumlah anggota rumah tangga (ART).

Tingkat konsumsi energi adalah perbandingan antara banyaknya energi yang dikonsumsi (kalori) terhadap kecukupan energi, dalam satuan % AKE. Konsumsi energi per kapita per hari didefinisikan sebagai nilai pangan yang dikonsumsi per kapita per hari dengan satuan kkal. Sesuai dengan rekomendasi Widya Karya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) ke X Tahun 2012, Angka Kecukupan Energi (AKE) adalah sebesar 2.150 Kkal/kapita/hari. Konsumsi energi per kapita per hari dihitung dengan cara membagi total konsumsi energi rumah tangga per hari dengan jumlah anggota rumah tangga (ART).

Tabel 2. 68 Perkembangan Tingkat Konsumsi Energi Penduduk NTB Tahun 2021- 2025

Uraian	2021	2022	2023	2024	2025	Rata-rata
Konsumsi Energi (kkal/kapita/hari)	2543	2460.4	2484.92	2418	2448	2470.86
Tingkat Konsumsi Energi (% dari 2.150 kkal/kap/hari untuk tahun 2019-2022 Tahun 2023 menggunakan 2.100 kkal/kap/hari)	118.28	114.44	118.33	115.14	116.57	117.66

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTB, 2026

Selama periode 2021–2025, konsumsi energi penduduk Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berfluktuasi namun secara umum tetap berada di atas standar Angka Kecukupan Energi (AKE). Rata-rata konsumsi energi masyarakat NTB mencapai 2.470,86 kkal/kapita/hari, lebih tinggi dibandingkan standar AKE yang digunakan, yaitu 2.150 kkal/kapita/hari pada tahun 2021–2022 dan 2.100 kkal/kapita/hari mulai tahun 2023.

Secara keseluruhan, tingkat konsumsi energi masyarakat NTB selama lima tahun terakhir memiliki rata-rata sebesar 117,66 persen terhadap standar kecukupan energi. Kondisi ini menunjukkan bahwa secara kuantitas, kebutuhan energi masyarakat telah terpenuhi bahkan berada di atas standar yang ditetapkan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketersediaan pangan dan akses masyarakat terhadap sumber energi pangan relatif terjaga.

Meskipun demikian, tingginya tingkat konsumsi energi belum sepenuhnya mencerminkan kualitas konsumsi pangan masyarakat. Pemenuhan kebutuhan gizi tidak hanya ditentukan oleh jumlah energi yang dikonsumsi, tetapi juga oleh keberagaman dan keseimbangan zat gizi yang berasal dari berbagai kelompok pangan, seperti protein hewani dan nabati, sayur, buah, serta sumber vitamin dan mineral. Oleh karena itu, peningkatan konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA) tetap menjadi prioritas dalam pembangunan ketahanan pangan daerah.

4. Lingkungan Hidup

Urusan lingkungan hidup diukur melalui pengukuran nilai IKLH (indeks kualitas air, indeks kualitas udara, dan indeks kualitas air laut) serta neraca pengelolaan sampah (persentase penanganan sampah dan persentase pengurangan sampah) dan disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2. 69 Capaian Indikator Kinerja Daerah Bidang Urusan Lingkungan Hidup Tahun 2021 - 2025

No	Indikator Bidang Urusan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Indeks Kualitas Air	45,1	43,39	47,78	47	71.24
2	Indeks Kualitas Air Laut	80,22	89,48	82,88	85,83	81.14
3	Indeks Kualitas Udara	88,52	89,3	90,21	93,1	81.44
4	Neraca Pengelolaan Persampahan	49,02	54,98	64,25	74,15	34,14
	- Persentase Penanganan Sampah	*39,68*	*42,2*	*48,58*	*53,20*	*29.87*
	- Persentase Pengurangan Sampah	*9,34*	*12,78*	*15,67*	*20,95*	*4.27*

Sumber : - 1 s/d 3 Website Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan KLHK (ppkl.menlhk.go.id)
- 4 Dinas LHK NTB, 2025

Kualitas lingkungan hidup merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan berkelanjutan. Peningkatan kualitas lingkungan mencerminkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam, pengendalian pencemaran, serta upaya pelestarian lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat. Indikator yang digunakan meliputi Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Air Laut (IKAL), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Neraca Pengelolaan Persampahan.

Selama periode 2021–2025, Indeks Kualitas Air (IKA) menunjukkan kecenderungan membaik meskipun mengalami fluktuasi. Nilai indeks meningkat dari 45,10 pada tahun 2021 menjadi 71,24 pada tahun 2025 atau naik sebesar 26,14 poin. Setelah mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 43,39, kualitas air berangsur membaik pada tahun 2023 dan 2024 sebelum mengalami peningkatan yang cukup signifikan pada tahun 2025. Perkembangan ini mengindikasikan adanya peningkatan efektivitas pengendalian pencemaran air dan pengelolaan sumber daya air di Provinsi NTB.

Indeks Kualitas Air Laut (IKAL) secara umum berada pada kategori baik dengan nilai yang relatif tinggi sepanjang periode pengamatan. Nilai indeks meningkat dari 80,22 pada tahun 2021 menjadi 89,48 pada tahun 2022, kemudian berfluktuasi menjadi 82,88 pada tahun 2023, 85,83 pada tahun 2024, dan 81,14 pada tahun 2025. Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai IKAL tetap menunjukkan bahwa kondisi kualitas perairan laut NTB relatif terjaga. Fluktuasi tersebut dapat dipengaruhi oleh aktivitas pesisir, tekanan pembangunan wilayah pantai, serta faktor alam yang memengaruhi kualitas perairan.

Perkembangan Indeks Kualitas Udara (IKU) menunjukkan kondisi yang cukup baik pada periode 2021–2024. Nilai indeks meningkat secara bertahap dari 88,52 pada tahun 2021 menjadi 93,10 pada tahun 2024, yang mengindikasikan kualitas udara berada pada kondisi sangat baik. Namun, pada tahun 2025 nilai IKU tercatat sebesar 81,44, mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Meskipun demikian, nilai tersebut masih menunjukkan kualitas udara yang relatif baik dan perlu dipertahankan melalui pengendalian emisi dari sektor transportasi, industri, maupun kebakaran lahan.

Sementara itu, Neraca Pengelolaan Persampahan menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dari 49,02 pada tahun 2021 menjadi 74,15 pada tahun 2024. Peningkatan tersebut didorong oleh membaiknya kinerja penanganan maupun pengurangan sampah. Persentase penanganan sampah meningkat dari 39,68 persen menjadi 53,20 persen, sedangkan persentase pengurangan sampah meningkat dari 9,34 persen menjadi 20,95 persen. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi penurunan yang cukup tajam, di mana nilai Neraca Pengelolaan Persampahan turun menjadi 34,14, dengan persentase penanganan sampah sebesar 29,87 persen dan persentase pengurangan sampah sebesar 4,27 persen. Penurunan ini perlu menjadi perhatian karena dapat mengindikasikan adanya perubahan metode pengukuran, keterbatasan cakupan pelayanan persampahan, atau penurunan kinerja pengelolaan sampah di daerah. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi lebih lanjut terhadap penyebab penurunan tersebut agar dapat dirumuskan langkah-langkah perbaikan yang tepat.

Secara keseluruhan, indikator kualitas lingkungan hidup di Provinsi NTB menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terutama pada aspek kualitas air dan kualitas udara yang relatif terjaga. Namun demikian, masih diperlukan upaya yang lebih konsisten dalam pengelolaan lingkungan, khususnya pada sektor persampahan yang mengalami penurunan kinerja pada tahun 2025. Ke depan, penguatan pengelolaan sampah berbasis ekonomi sirkular, peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan sampah dari sumbernya, pengembangan fasilitas pengolahan sampah, pengendalian pencemaran air, serta perlindungan kawasan pesisir dan laut perlu terus ditingkatkan guna mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

5. Pertanahan

Pemerintah NTB telah melakukan rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai upaya percepatan Reforma Agraria di wilayah hutan, transmigrasi, Hak Guna Usaha yang habis, dan pengembangan penataan akses ketahanan pangan. Rapat Koordinasi membahas tentang pelaksanaan legalisasi aset yang meliputi redistribusi tanah yang bersumber dari kawasan hutan, legalisasi aset berupa pensertifikatan tanah transmigrasi dan masyarakat, serta redistribusi tanah kepada masyarakat yang berasal dari penyelesaian konflik antara masyarakat dengan badan hukum (HGU). Selanjutnya terkait penataan akses, dibahas aspek-aspek dalam membangun dan meningkatkan

kapasitas UMKM. Dalam Rakor GTRA Provinsi NTB terdapat tiga pokja yang terbagi dalam tiga kelompok kerja. Pokja I membahas tentang penataan aset reform dan potensinya sebagai sumber TORA serta penyelesaian penguasaan tanah dalam kawasan hutan dan penyelesaiaan sengketa konflik. Pokja II membahas tentang penataan aset reform dan potensinya sebagai sumber TORA yang berasal dari lahan transmigrasi, perpanjangan HGU, Perubahan HGU Menjadi HGB dan Tanah Terlantar. Pokja III membahas tentang pelaksanaan penataan akses reform dan pencanangan Kampung Reforma Gemilang.

Batas daerah adalah suatu yang hal penting untuk disegerakan penegasan legalitas hukumnya. Penegasan Batas Daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah. Batas wilayah yang dimaksud dijelaskan di dalam Pasal 35 UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, harus dibuktikan dengan titik koordinat pada peta dasar. Bahwa sejak tahun 1999, dari 33 provinsi, baru 11 di antaranya yang menyelesaikan atau melaksanakan penegasan batas daerah dan 50 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota yang ada. Penegasan batas daerah tersebut berlaku untuk wilayah di seluruh Indonesia.

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 11 mengamanatkan bahwa urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan. Urusan Pertanahan adalah Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Capaian indikator kinerja daerah urusan pertanahan tahun 2024 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 70 Capaian Indikator Kinerja Daerah Urusan Pertanahan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam pola pikir, kelembagaan, regulasi dan perundangundangan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan dan pelayanan public	Persentase fasilitasi penyelesaian tanah objek reforma agraria (TORA)	100%	100%	100%
	Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi	100%	100%	100%

Sumber : Biro Pemerintahan & Otda Setda Provinsi NTB, 2025

Indikator kinerja daerah urusan pertanahan merupakan Persentase Fasilitasi Penyelesaian Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dengan target 100 persen dan Cakupan konflik pertanahan yang difasilitasi target 100 persen, sebagaimana tabel diatas terealisasi 100 persen, artinya semua konflik pertanahan dapat difasilitasi secara keseluruhan, sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2. 71 Rekapitulasi konflik Pertanahan yang difasilitasi Biro Pemerintahan Tahun 2025

NO	KABUPATEN	LOKASI KONFIK	PERMASALAHAN	KET
1.	Kabupaten Lombok Barat	Desa Golong Kec. Narmada	Hasil rapat GTRA Kab. Lombok Barat tertuang dalam Rakor GTRA Lobar Nomor : 399.1/BA-52.01.NT/XII/2024 tanggal 18 Desember 2024 merekomendasikan tanah seluas 6.92 Ha sejumlah 152 bidang yang terletak di Desa Golong Kec. Narmada Kab. Lobar sebagaimana disebut pada berita acara untuk menjadi lokasi alternatif pengganti potensi TORA berasal dari penyelesaian konflik agraria non kawasan hutan, untuk selanjutnya ditindaklanjuti dengan penataan aset dan kegiatan pertanahan berupa program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL)	
2.	Kabupaten Lombok Utara	Bukit Penggolong	Permohonan dilakukan perubahan / Reviu Tata Ruang Wilayah Provinsi untuk bukit / Gunung Penggolong (RTK.22) seluas ± 80 H (Pet Penguasaan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah, terlampir) dari total luas 132,60 H.	
3.	Kabupaten Lombok Timur	Lombok Timur	Sehubungan dengan adanya gugatan dari masyarakat di Pengadilan Negeri Selong terhadap aset Milik Pemerintah Provinsi NTB dalam perkara Nomor 19/Pdt.G/2025/PN.Sli. Dan menindaklanjuti hasil rapat yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 14 April 2025 di Ruang Rapat BPKAD Provinsi NTB	
4.	Kabupaten Lombok Tengah	Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang	Masyarakat Desa Karang Sidemen Kec. Batukliang Utara Kab. Loteng menolak dan menyampaikan permohonan agar pemerintah atau pihak terkait melakukan pengusutan terhadap segala bentuk kegiatan penebangan pohon yang terindikasi sebagai Illegal logging di kawasan HKM Desa Karang Sidemen dan KHDTK Rarung	
5.	Kabupaten Sumbawa Barat	Kecamatan Poto Tano	Permohonan HGU/HGB tanah di wilayah hukum Kecamatan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat	
6.	Kabupaten Lombok Timur	Desa Sekaroh Kecamatan Jerowaru	Pembahasan status sebagian bidang tanah/lahan atas nama PT. Lombok Luxury Property di Desa Sekaroh (pemekaran dari Desa Pemokong) Kec. Jerowaru Kab. Lombok Timur Provinsi NTB yang terindikasi berada di dalam Hutan Lindung Kelompok Hutan Sekaroh (RTK. 15)	

Sumber : Biro Pemerintahan & Otda Setda Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB, tanah terindikasi terlantar sesuai jenis Hak Guna Usaha (HGU) di Kabupaten/Kota Se NTB seluas 166.027.457 Ha. Semuanya telah masuk dalam kegiatan penertiban dan sudah diberi peringatan. Sebagian diusulkan menjadi tanah bermasalah, berlokasi di Kabupaten/Kota se NTB seluas 1.607.377 Ha, termasuk di dalamnya badan usaha yang

diberi kesempatan, dan ada yang sudah keluar dari database dapat dipergunakan oleh negara, secara rinci disajikan sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 72 Rekapitulasi Tanah Terindikasi Terlantar Berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) s.d Tahun 2025

NO.	KABUPATEN	NAMA PERUSAHAAN	JENIS HAK NO.TGL	LOKASI DESA, KECAMATAN	LUAS TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	KET
1	Dompu	PT Atlantik Graha	HGB No.3		10 Ha	Sejak 1993 belum ada bangunan dan diindikasikan dijadikan agunan pada Bank Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dan melakukan penyitaan seluas 10 Ha (2023)
		PT Aria Alir	HGB No.2			
		PT Bagas Alir	HGB No. 1			
2	Lombok Tengah	PT Tresno Kenangan	Hak Erfpacht Nomor A.6/9/2 tanggal 2 Maret 1992	desa lantan	178,70 Ha	PT Tresno kenangan masih mencoba memperbaharui HGU
				desa karangsidemen	185,38 Ha	
3	Lombok Barat	PT Lingga Permata Utama	HGB Nomor 2	Sekotong tengah	58,55 Ha	GTRA Lombok Barat tidak akan melaksanakan penerbitan TORA Redistribusi tanah

Sumber: Biro Pemerintahan & Otda Setda Provinsi NTB, 2025

Persoalan tanah bukan persoalaan sederhana jika tidak mempunyai kemampuan dan kesabaran di atas orang rata-rata. Dengan bekal itu persoalan tanah ini bisa selesai dengan baik di NTB ini. Meski demikian persoalan tanah di NTB masih banyak pekerjaan yang harus diselesaikan. Masih ada sedikit masalah tersisa di Gili Trawangan, Mandalika, Rinjani dan berbagai tempat di NTB. Melalui pola kerjasama yang baik dengan Kantor Wilayah BPN/ATR NTB akan bisa selesaikan permaslahan dan konflik pertanahan di kemudian hari. Diharapkan beban berat yang menghadang bisa diurai satu per satu untuk kemudian bisa menghadirkan kemaslahatan bersama. Rapat koordinasi Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) sebagai upaya percepatan Reforma Agraria di wilayah hutan, transmigrasi, Hak Guna Usaha yang habis, dan pengembangan penataan akses ketahanan pangan di Kecamatan Labangka, Sumbawa.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelaksanaan administrasi kependudukan di Provinsi NTB sampai dengan Desember 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik, khususnya dalam perekaman dan pencetakan KTP elektronik (KTP-el). Dari total jumlah penduduk sebanyak

5.778.713 jiwa, terdapat 4.126.735 jiwa yang wajib memiliki KTP. Dari jumlah tersebut, sebanyak 4.027.694 jiwa telah melakukan perekaman KTP-el atau mencapai 97,60%, sedangkan pencetakan KTP-el telah mencapai 3.979.327 jiwa atau sebesar 98,80% dari hasil perekaman. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan di NTB berjalan cukup optimal dan mampu menjangkau sebagian besar penduduk wajib KTP. Ke depan, pemerintah daerah perlu terus meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui digitalisasi pelayanan, jemput bola perekaman di wilayah terpencil, peningkatan integrasi data kependudukan, serta percepatan pencetakan KTP-el bagi masyarakat yang belum terlayani agar cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dapat mencapai target yang lebih optimal dan merata di seluruh wilayah NTB.

Tabel 2. 73 Rekapitulasi Pelaksanaan Administrasi Kependudukan di Kabupaten/Kota Se-NTB Sampai Dengan Desember 2025

NO	KAB. / KOTA	JUMLAH PENDUDUK	WAJIB KTP	PEREKAMAN		CETAK KTP	
		DKB SMSTR I 2024	DKB SMSTR I 2024	JUMLAH	%	JUMLAH	%
1	2	3	4	5		6	
1	**NUSA TENGGARA BARAT**	**5,778,713**	**4,126,735**	**4,027,694**	**97.60**	**3,979,327**	**98.80**
2	KAB. LOMBOK BARAT	771,858	552,963	543,405	98.27	534,081	98.28
3	KAB. LOMBOK TENGAH	1,142,173	811,102	798,542	98.45	784,458	98.24
4	KAB. LOMBOK TIMUR	1,449,920	1,012,638	994,736	98.23	1,001,600	100.69
5	KAB. SUMBAWA	529,234	393,845	370,176	93.99	366,722	99.07
6	KAB. DOMPU	279,884	199,779	196,062	98.14	193,859	98.88
7	KAB. BIMA	545,571	396,706	378,272	95.35	361,881	95.67
8	KAB. SUMBAWA BARAT	157,335	111,242	109,370	98.32	108,036	98.78
9	KAB. LOMBOK UTARA	272,058	193,347	190,428	98.49	187,463	98.44
10	KOTA MATARAM	464,566	336,151	330,361	98.28	325,752	98.60
11	KOTA BIMA	166,114	118,962	116,342	97.80	115,475	99.25

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2025

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan komposit dari Ketahanan Sosial, Ketahanan Ekonomi serta Ketahanan Ekologi Desa yang dikembangkan lebih lanjut melalui 22 variabel dan 52 indikator. IDM ditujukan untuk mengetahui tingkat kemajuan dan kemandirian desa serta informasi tentang pembangunan desa. IDM mengklasifikasikan desa dalam 5 satus yaitu Desa Sangat Tertinggal, Desa Tertinggal, Desa Berkembang, Desa Maju dan Desa Mandiri.

Indeks Desa Membangun (IDM) Provinsi NTB Tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang sangat positif dalam pembangunan desa. Dari total 1.021 desa di NTB, tidak terdapat lagi desa dengan status sangat tertinggal maupun tertinggal. Kondisi ini mencerminkan keberhasilan pembangunan desa yang semakin merata serta meningkatnya kualitas pelayanan dasar, infrastruktur, ekonomi, dan tata kelola pemerintahan desa di seluruh wilayah NTB.

Sebagian besar desa di NTB telah berada pada kategori maju dan mandiri. Desa mandiri tercatat sebanyak 498 desa atau sekitar 48,78% dari total desa, sedangkan desa

maju sebanyak 405 desa atau sekitar 39,67%. Sementara itu, desa berkembang tersisa sebanyak 118 desa atau sekitar 11,56%. Tingginya jumlah desa mandiri dan maju menunjukkan bahwa kapasitas pembangunan desa di NTB semakin kuat, baik dari aspek ketahanan sosial, ekonomi, maupun lingkungan.

Ke depan, tantangan pembangunan desa di NTB diarahkan pada peningkatan kualitas desa mandiri agar lebih berdaya saing dan berkelanjutan. Pemerintah Provinsi NTB berupaya mendorong desa berkembang agar dapat naik status menjadi desa maju dan mandiri melalui penguatan ekonomi produktif, digitalisasi desa, peningkatan kualitas SDM, serta pengembangan potensi unggulan desa berbasis lokal.

Tabel 2. 74 Indeks Desa Membangun di NTB Tahun 2025

Kategori	Tahun 2025
Sangat Tertinggal	0
Tertinggal	0
Berkembang	118
Maju	405
Mandiri	498
Jumlah Desa	1021

Sumber : Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2025

Lembaga Adat yang terbentuk dan aktif adalah salah satu indikator program prioritas yang digunakan untuk mengukur kinerja DPMPD Dukcapil Provinsi NTB. Lembaga Adat merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat desa. Sampai dengan akhir Desember 2025, jumlah lembaga adat yang telah terbentuk sebanyak 786 lembaga adat dari 1.166 desa/kelurahan di NTB.

Tabel 2. 75 Rekapitulasi Jumlah Lembaga Adat di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

NO	KAB. / KOTA	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa dan Kelurahan	Jumlah Lembaga Adat				
						2021	2022	2023	2024	2025
	NTB	**117**	**1021**	**145**	**1166**	**786**	**786**	**786**	**786**	**786**
1	LOMBOK BARAT	10	119	3	122	50	50	50	50	50
2	LOMBOK TENGAH	12	142	12	154	131	131	131	131	131
3	LOMBOK TIMUR	21	239	15	254	232	232	232	232	232
4	SUMBAWA	24	157	8	165	151	151	151	151	151
5	DOMPU	8	72	9	81	23	23	23	23	23
6	BIMA	18	191	0	191	66	66	66	66	66
7	SUMBAWA BARAT	8	58	7	65	64	64	64	64	64
8	LOMBOK UTARA	5	43	0	43	32	32	32	32	32
9	KOTA MATARAM	6	0	50	50	29	29	29	29	29
10	KOTA BIMA	5	0	41	41	8	8	8	8	8

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2025

Meskipun lembaga adat yang terbentuk sudah cukup banyak, namun legalitas dan penyiapan perangkat kelembagaannya belum sepenuhnya terpenuhi. Upaya legalisasi

dan penyiapan perangkat lembaga adat sudah dan sedang berproses sampai dengan saat ini. Pembentukan lembaga adat juga bertujuan menghidupkan kembali nilai-nilai luhur adat/budaya lokal atau local wisdom sebagai landasan utama kehidupan bermasyarakat termasuk dalam merencanakan dan melaksanakan berbagai program pembangunan yang dimulai dari desa dengan masyarakat sebagai subyek pembangunannya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Dan Penerapan Teknologi Tepat Guna dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam Desa, Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) merupakan lembaga pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG) antar desa yang berkedudukan di kecamatan yang memberikan pelayanan teknis, informasi dan orientasi berbagai jenis TTG. Tahun 2024, posyantek baru terbentuk di 77 kecamatan (65,81%) dari 117 kecamatan yang ada. Dari 10 Kab/Kota se-NTB, hanya ada 1 kabupaten yang belum membentuk posyantek yaitu Kabupaten Lombok Tengah.

Tabel 2. 76 Posyantek yang telah terbentuk di Provinsi NTB

No	Kabupaten / Kota	Jumlah Posyantek		Kecamatan	No. / Tanggal SK
1.	Kota Mataram	6	Posyantek	Cakranegara, Ampenan, Selaparang, Sekarbela, Sandubaya, Mataram	Keputusan Walikota Mataram Nomor: 157 / II / 2018, Tanggal: 2 Pebruari 2018
2.	Kabupaten Lombok Utara	5	Posyantek	Bayan, Pemenang, Tanjung, Gangga, Kayangan	Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 74/05/DP2KBPMD/2017, Tanggal: 1 Pebruari 2017
3.	Kabupaten Sumbawa Barat	8	Posyantek	Jereweh, Maluk, Sekongkang, Brang Rea, Brang Ene, Seteluk, Poto Tano, Taliwang	Keputusan Bupati Sumbawa Barat Nomor: 4012 tahun 2017 Tanggal: 23 November 2017
4.	Kabupaten Lombok Barat	1	Posyantek	Kecamatan Labuapi	Keputusan Bupati Lombok Barat Nomor: 414.3/52/DPMPD/2010; Tanggal: 6 mei 2010
5	Kabupaten Sumbawa	24	Posyantek	Empang, Torano, Plampang, Labangka, Maronge, Lape, Moyo Hilir, Unter Iwes, Utan, Alas, Alas Barat	Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 51 Tahun 2011 Tanggal: 31 Januari 2011
				Sumbawa, Ropang, Lunyuk, Orong Telu, Moyo Hulu, Moyo Utara	Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 1254 Tahun 2011, Tanggal: 17 Oktober 2011
				Buer, Labuan Badas, Lopak, Batu Lanteh, Lenangguar, Lantung, Rhee	Keputusan Bupati Sumbawa Nomor: 1130 Januari 2012, Tanggal: 10 September 2012
6	Kabupaten Bima	9	Posyantek	Soromandi, PAlibelo, LAnggudu, Wera, Ambalawi, Sanggar, Lambitu, Madapangga, Bolo	Keputusan Bupati Bima Nomor: 188.45/276/06.16/tahun2021 Tanggal: 2 Oktober 2021
7	Kota Bima	1	Posyantek	Mpunda	Keputusan Walikota Bima Nomor: 188.45/183/050/II/2020 Tanggal: 21 Februari 2020
8	Kabupaten Lombok timur	21	Posyantek	Keruak, Sakra, Terara, Sikur, Mssbagik, Sukamulia, Selong, Pringgabaya, Aikmel, Sembalun, Sambalia, Montong Gading, Pringgasela, Suralaga, Wanasaba, Suela, Labuahn Haji, Sakra Barat, Sakra Timur, Jerowaru, Lenek	Keputusan Bupati Lombok Timur Nomor : 188.45/64/PMD/2021 Tanggal: 22 Januari 2021
9	Kabupaten Dompu	2	Posyantek	Kempo, Pajo	Keputusan Bupati Dompu Nomor: 43 Tahun 2022
Total		**77**	**Posyantek**		

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2024

Dalam program penanggulangan kemiskinan yakni melalui program Pemberdayaan BUMDes dimana program ini merupakan salah satu prioritasnya. Program ini dilaksanakan dalam bentuk pemberian bantuan modal. BUMDes merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagaian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan modal secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. BUMDes dimaksudkan untuk menampung seluruh kegiatan masyarakat di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan atau kerjasama antar desa.

Dari 1.021 Desa di NTB, sampai tahun 2024 telah terbentuk 1.005 BUMDes aktif. BUMDes berkembang baik di NTB salah satunya didorong oleh adanya kebijakan penggunaan Dana Desa untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes. Capaian yang cukup tinggi untuk program ini, salah satunya disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah desa, dimana salah satu kebijakannya adalah penggunaan Dana Desa untuk membentuk dan mengembangkan BUMDes.

Tabel 2. 77 Rekapitulasi Perkembangan BUMDes Aktif di NTB 2019-2024

No	Kabupaten	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa	Jumlah BUMDes					
				2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lombok Timur	21	239	181	239	239	239	239	239
2	Lombok Tengah	12	142	125	127	127	127	127	127
3	Lombok Barat	10	119	118	116	116	119	119	119
4	Lombok Utara	5	43	28	33	33	43	43	43
5	Sumbawa	24	157	157	154	157	157	157	157
6	Dompu	8	72	72	72	72	72	72	72
7	Bima	18	191	148	189	189	191	191	191
8	Sumbawa Barat	8	58	41	54	55	57	57	57
JUMLAH		**106**	**1021**	**870**	**984**	**988**	**1005**	**1005**	**1005**

Sumber: Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTB, 2024

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Laju Pertumbuhan penduduk alamiah dipengaruhi oleh dua komponen utama yaitu tingkat kelahiran (fertilitas) dan tingkat kematian (mortalitas). Fertilitas dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti jumlah penduduk perempuan, jumlah penduduk usia produktif, status perkawinan, dan usia pada perkawinan pertama.

Tabel 2. 78 Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk NTB Tahun 2021-2025

Keterangan	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Penduduk	5.390,00	5.473,70	5.560,29	5.646,0	5,731.1
Laju Petumbuhan Penduduk	1,76	1,64	1,62	1,60	1.58

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025.

Penduduk NTB terus bertambah setiap tahun dengan laju pertumbuhan penduduk yang menurun dari 2021 (1,76%) sampai 2025 (1,58%). Penurunan laju pertumbuhan penduduk per tahun juga inline dengan angka total fertility rate (TFR) NTB yang sejak Sensus Penduduk 1971 (6,66%) terus menurun sampai Sensus Penduduk 2020 (2,43%). Pengendalian penduduk ini sangat perlu untuk dilakukan mengingat keterbatasan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali sangat berdampak negatif pada aspek sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Jumlah penduduk yang terus meningkat sementara ruang untuk menampung penduduk terbatas sehingga perlu program pengendalian penduduk salah satunya adalah program Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, harapannya jumlah penduduk dapat terkendali, lingkungan dapat terjaga kelestariannya dan kualitas penduduk yang ada terjamin.

Grafik 2. 36 Angka Kelahiran Total / Total Fertility Rate

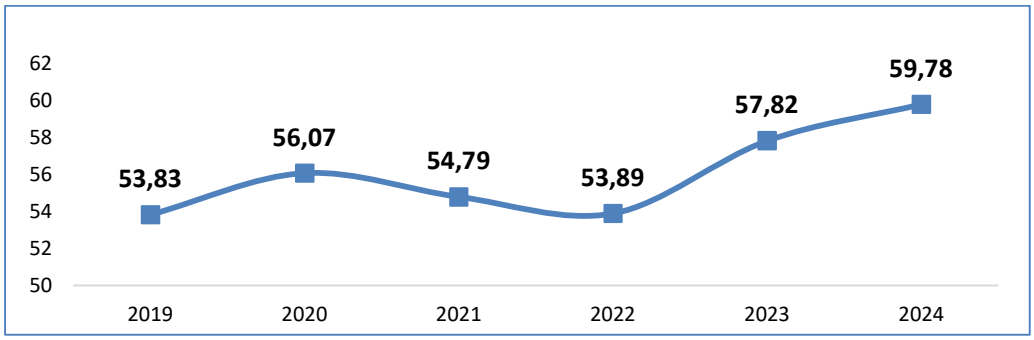


	SP1971	SP1980	SP1990	SP2000	SP2010	LF SP2020	SUPAS2025
Nusa Tenggara Barat	6,66	6,49	4,98	2,92	2,59	2,43	2,38
Nusa Tenggara Timur	6	5,55	4,6	3,2	3,8	2,9	2,72
Bali	6	4	2,22	1,9	2,2	2	2,02
Indonesia	5,61	4,68	3,33	2,34	2,41	2,18	2,13

Sumber : BPS NTB Tahun 2026

Berdasarkan data BPS NTB tahun 2024, persentase wanita berumur 15-49 tahun yang berstatus kawin dan menggunakan KB pada tahun 2024 mencapai 59,78 persen, angka ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2023 sebesar 57,82%. Hal ini menunjukkan bahwa kesertaan ber KB di NTB sudah cukup tinggi. Hal ini berdampak pada penurunan laju pertumbuhan penduduk NTB sebesar 1,58 pada tahun 2025. Peningkatan kesadaran masyarakat akan manfaat KB dilaksanakan dengan upaya preventif untuk menjaga jarak kehamilan, untuk mencegah kematian bayi dan kematian ibu saat melahirkan. Kegiatan ini digalakan berkolaborasi dengan dengan seluruh lapisan masyarakat melalui berbagai kegiatan Posyandu, PKK, dan organisasi kemasyarakatan lainnya.

Grafik 2. 37 Persentase Wanita Berumur 15-49 Tahun yang Berstatus Kawin dan menggunakan KB di Provinsi NTB 2019-2024



Sumber : BPS NTB, DP3AP2KB Provinsi NTB, 2025

Capaian indikator Median Usia Kawin Pertama (MUKP) Perempuan di Provinsi NTB tahun 2024 adalah 2,80* tahun (angka sementara). Capaian ini masih di bawah target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. DP3AP2KB terus mendorong peningkatan MUKP Perempuan salah satunya melalui program peningkatan keluarga sejahtera (KS) dengan kegiatan "Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling – Remaja (PIK-R)" di Kampung KB. Kegiatan fasilitasi tersebut dilakukan untuk menguatkan kelompok PIK-R dalam menyampaikan informasi mengenai pendewasaan usia perkawinan, pemberian keterampilan hidup, pelayanan konseling, serta rujukan bagi penyiapan kehidupan berkeluarga untuk Remaja. Di samping itu, kegiatan tersebut juga bertujuan untuk mencegah stunting, perilaku bullying, dan mendeteksi persoalan yang dihadapi oleh remaja.

Jika melihat rata-rata usia kawin pertama perempuan di NTB lima tahun terakhir tahun 2020-2025 mengalami fluktuasi dan masih berkisar di usia 20,56 tahun. Data menunjukkan bahwa rata-rata usia kawin pertama perempuan di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Lombok Utara, masih berkisar 19-20 tahun. Rata-rata usia kawin pertama perempuan di 4 kabupaten tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata usia kawin pertama perempuan di Kabupaten Sumbawa, Dompu, Bima, Sumbawa Barat, Kota Mataram, dan Kota Bima. Untuk terus meningkatkan rata-rata usia kawin pertama perempuan harus kolaborasi lintas sektor dan lintas program, keterlibatan pemerintah pusat sampai dengan pemerintahan desa termasuk kesadaran masyarakat akan dampak negatif perkawinan usia anak menjadi modal dasar bagi peningkatan usia kawin pertama perempuan di NTB.

Tabel 2. 79 Rata-Rata Usia Kawin Pertama Perempuan Provinsi NTB Tahun 2020-2024

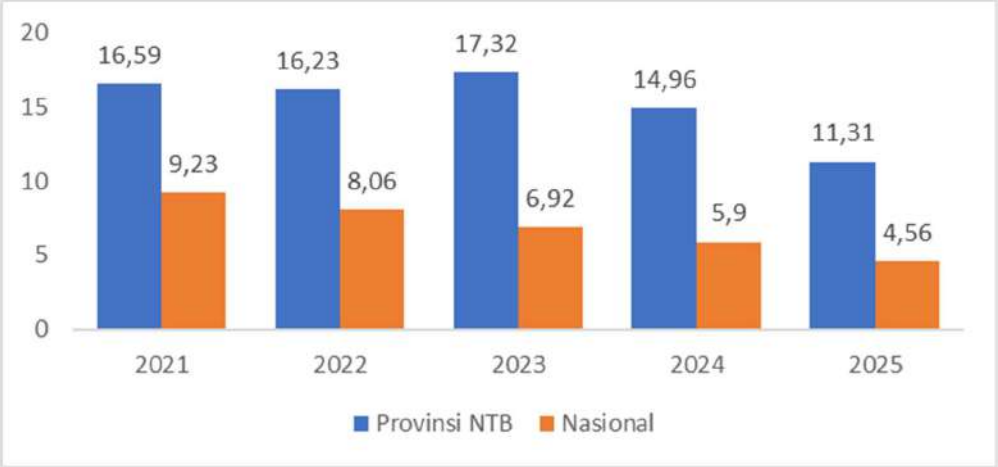
No	Keterangan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	20,14	20,05	19,92	19,90	20.02
2	Lombok Tengah	19,61	19,38	19,08	19,27	19.56
3	Lombok Timur	19,49	19,52	19,5	19,66	19.59
4	Sumbawa	21,49	21,63	21,92	21,94	22.13
5	Dompu	21,3	21,55	21,33	21,44	21.89

No	Keterangan	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
6	Bima	21,57	21,36	21,63	21,38	21.88
7	Sumbawa Barat	22,36	22,25	22,46	22,29	22.73
8	Lombok Utara	19,97	19,81	19,59	19,74	19.84
9	Mataram	21,25	21,27	20,72	21,11	21.6
10	Kota Bima	22,51	22,64	22,49	22,10	22.17
	NTB	**20,39**	**20,37**	**20,25**	**20,35**	**20.56**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025
Catatan : Sumber Data Tahun 2025 Hasil Olah Data Susenas Maret 2025

Rata-rata usia kawin pertama perempuan tersebut tersebut inline dengan data proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun. Data BPS NTB menunjukkan proporsi perempuan 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 18 tahun di NTB tahun 2025 sebesar 11,31 persen, menurun dibandingkan tahun 2024 sebesar 14,96 persen. Ini menunjukkan bahwa berkurangnya jumlah perempuan muda yang menikah atau hidup bersama sebelum usia 18 tahun, atau dengan kata lain, angka perkawinan anak mengalami penurunan.

Grafik 2. 38 Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahun Menurut Provinsi (Persen)



Sumber : BPS RI, 2026

9. Perhubungan

Meningkatnya jumlah penduduk dan pergerakan aktivitas kegiatan ekonomi, sosial, dan lingkungan di Provinsi NTB akan disertai dengan pertambahan jumlah sarana angkutan darat, baik kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat, serta menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa baik dalam kota maupun ke luar kota. Tantangan yang dihadapi dalam sarana dan prasarana perhubungan darat adalah memfasilitasi

kebutuhan angkutan publik melalui penyebaran jalur-jalur angkutan dan peningkatan serta pembangunan prasarana jalan.

Tabel 2. 80 Jumlah Armada Antar Kota dalam Provinsi Tahun 2021-2025

No.	Jenis Pelayanan	2021		2022		2023		2024		2025	
		Unit	Seat	Unit	Seat	Unit	Seat	Unit	Seat	Unit	Seat
1	AKDP Lombok	104	1.695	104	1.695	71	2221	85	2767	174	4195
2	AKDP Sumbawa dan Sumbawa Barat	134	2.716	134	2.716	160	3235	160	3189	182	3405
3	AKDP Dompu	48	1.455	48	1.455	55	1902	64	2244	73	2504
4	AKDP Bima	115	3.335	115	3.335	66	1803	70	7883	62	1694

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2025

Terdapat tren peningkatan kapasitas (seat) meskipun tidak selalu disertai dengan peningkatan jumlah unit kendaraan. Beberapa wilayah seperti Dompu menunjukkan pertumbuhan layanan secara stabil, sedangkan wilayah seperti Bima memperlihatkan fluktuasi ekstrem yang perlu dikaji lebih dalam. Hal ini mencerminkan adanya upaya peningkatan efisiensi transportasi AKDP di NTB, dengan mendorong kendaraan berkapasitas besar guna memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat antarwilayah di provinsi.

Dengan trend peningkatan kapasitas tentunya juga harus memperhatikan keselamatan pengguna transportasi agar kecelakaan lalu lintas dapat ditekan seminimal mungkin. Pengukuran indikator rasio kecelakaan transportasi dihitung berdasarkan rata-rata dari hasil penjumlahan rasio fatalitas ditambah rasio kecelakaan angkutan penyeberangan. Rasio fatalitas dihitung berdasarkan jumlah korban meninggal dunia akibat kecelakaan transportasi tahun 2025 dibandingkan dengan jumlah kendaraan bermotor tahun 2025 dikali 10.000.

Tabel 2. 81 Rasio Fatalitas Provinsi NTB Tahun 2021 – 2025

No	Tahun	Jumlah Kendaraan	Meninggal Dunia Karena Kecelakaan	Rasio Fatalitas
1	2021	1.237.624	375	3,03
2	2022	1.791.426	391	2,18
3	2023	1.837.342	290	1,58
4	2024	2.072.681	394	1,90
5	2025	2.084.362	359	1,72

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2026

Untuk meningkatkan konektivitas selain dengan angkutan reguler Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Perhubungan Provinsi NTB bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan RI membuka layanan angkutan perintis, baik angkutan darat maupun angkutan laut. Angkutan perintis digunakan untuk melayani kebutuhan transportasi daerah-daerah terpencil dan terisolir ataupun daerah yang belum dilayani transportasi secara memadai dengan tarif yang terjangkau. Pada tahun 2023 sejumlah 23

(dua puluh tiga) rute angkutan. Pada Tahun 2024, rute angkutan laut di NTB sudah terpenuhi sejumlah 24 (dua puluh empat) rute dengan penambahan 2 (dua) rute angkutan yaitu rute Lembar–Jangkar (Situbondo) dan rute pemenang–Nusa Penida. Secara persentase, pada tahun 2025 capaian rute angkutan laut tercapai 104,35% dengan realisasi sebesar 92,31% dari target yang ditetapkan.

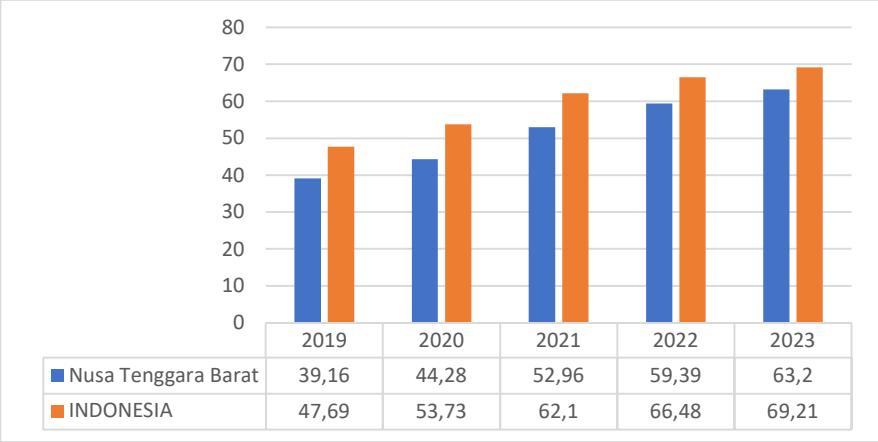
Indikator persentase rute angkutan darat adalah indikator untuk mengukur jumlah rute angkutan darat yang tersedia di Nusa Tenggara Barat dengan target rute angkutan darat sampai dengan tahun 2025 sejumlah 120 rute angkutan. Pada Tahun 2025, rute angkutan darat di NTB sudah terpenuhi sejumlah 122 (seratus dua puluh dua) rute. Secara persentase, pada tahun 2025 capaian rute angkutan darat adalah 101.67 %.

10. Komunikasi dan Informatika

Penerapan teknologi informasi melalui media online dalam hal ini website telah menjadi kebutuhan yang wajib dan sebagai salah satu pelayanan yang disediakan oleh pemerintah bagi masyarakat luas. Ketersediaan website milik Pemerintah Provinsi NTB telah tersedia selama ini. Salah satunya melalui http://ntbprov.go.id/.

Transparansi penyelenggaraan pemerintahan Provinsi NTB menjadi tuntutan yang tidak dapat ditawar lagi. Terbukanya akses informasi pelayanan kepada masyarakat baik mengenai data perencanaan, keuangan, pengadaan barang dan jasa, capaian kinerja, statistik, regulasi, LHKPN dan data aset. Selain itu, informasi mengenai pelayanan publik meliputi maklumat pelayanan, daftar informasi pelayanan (DIP), jenis pelayanan, standar pelayanan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan laporan permohonan dan keberatan terpublikasikan dalam website Provinsi NTB. Adanya kemudahan akses yang diimbangi dengan integritas jajaran Pemprov diharapkan akan menghasilkan percepatan pembangunan Provinsi NTB dan meningkatkan kepercayaan publik kepada birokrasi.

Grafik 2. 39 Perbandingan Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun ke Atas yang Mengakses Internet di Provinsi NTB dan Nasional Tahun 2019-2023



	2019	2020	2021	2022	2023
Nusa Tenggara Barat	39,16	44,28	52,96	59,39	63,2
INDONESIA	47,69	53,73	62,1	66,48	69,21

Sumber: Badan Pusat Statistik, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret, 2023

Pada tahun 2019, persentase penduduk berumur 5 (lima) tahun yang menggunakan internet di Provinsi NTB sebesar 39,16 % menempati peringkat ke-25 dari 34 provinsi lain, namun secara Nasional persentase pengguna internet sebesar 47.69. sampai dengan tahun 2023 persentase pengguna internet di NTB di peringkat 26 dari 34 Provinsi. Hal ini harus diperhatikan oleh pemerintah dalam pengembangan masyarakat melek internet yang sehat. Salah satu program yang dilaksanakan di Provinsi NTB dalam rangka mempercepat penyebarluasan informasi adalah melalui pengembangan kampung media. Kampung media merupakan program untuk penyebarluasan informasi yang berbasis komunitas yang seluruh kegiatannya menggunakan sebuah portal informasi, berita dan jurnalisme. Metode yang dimanfaatkan adalah dengan menggunakkan kemampuan jurnalisme warga, yang diunggah oleh setiap orang yang sudah terdaftar sebagai Warga Kampung Media. Warga Kampung Media diberi kebebasan untuk mengemukakan, mengekspresikan, serta menyampaikan berbagai gagasan, pendapat, ulasan, ataupun tanggapan, sepanjang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan norma dan hukum yang berlaku. Melalui kampung media masyarakat dapat ikut secara langsung berpartisipasi dalam penyebaran informasi publik. Sampai tahun 2018 komunitas kampung media mencapai 2.105 komunitas yang tersebar di 10 kabupaten/kota se NTB dengan jumlah 5.735 anggota.

Komitmen jajaran Kominfo terhadap penyediaan jaringan telekomunikasi di daerah-daerah terpencil terus diwujudkan, dan awal tahun 2018 telah dibangun fasilitas komunikasi di salah satu kecamatan terpencil di Kabupaten Sumbawa, NTB melalui program Telkomsel Bakti. Program Telkomsel Bakti membangun fasilitas komunikasi di Desa Sebeok dan Dusun Harapan Jaya, Desa Senawang dengan menggunakan GSM 900, yang coverage atau jangkuannya meliputi empat desa di Kecamatan Orong Telu, yakni Desa Senawang, Desa Sebeok, Desa Kelawis dan Desa Mungkin.

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Kondisi koperasi di Provinsi NTB selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup positif, terutama dari sisi jumlah koperasi dan peningkatan kembali koperasi aktif pada tahun 2025. Jumlah koperasi di NTB meningkat dari 4.363 unit pada tahun 2021 menjadi 6.190 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan semakin tumbuhnya kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat dan meningkatnya minat masyarakat dalam mengembangkan usaha melalui wadah koperasi. Namun demikian, perkembangan koperasi aktif mengalami fluktuasi selama periode tersebut. Pada tahun 2021 jumlah koperasi aktif tercatat sebanyak 2.707 unit dan meningkat menjadi 2.774 unit pada tahun 2022. Akan tetapi, pada tahun 2023 jumlah koperasi aktif menurun cukup signifikan menjadi 2.483 unit, sebelum kembali meningkat menjadi 2.592 unit pada tahun 2024 dan melonjak menjadi 3.953 unit pada tahun 2025.

Dinamika jumlah koperasi aktif selama kurun waktu 2021-2025 ini menunjukkan bahwa masih terdapat koperasi yang belum berjalan optimal, baik dari sisi kelembagaan, manajemen usaha, maupun aktivitas operasional. Faktor seperti rendahnya kapasitas pengelolaan, keterbatasan modal, perubahan kondisi ekonomi, serta penyesuaian data dan validasi koperasi diduga menjadi penyebab menurunnya jumlah koperasi aktif pada periode tersebut. Meski demikian, pada tahun 2025 persentase koperasi aktif kembali meningkat signifikan menjadi 63,86%, yang merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam pembinaan dan penguatan koperasi, termasuk upaya revitalisasi koperasi, peningkatan kapasitas SDM pengelola, digitalisasi layanan koperasi, serta penguatan akses pembiayaan dan kemitraan usaha. Kondisi koperasi di Provinsi NTB tahun 2021-2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 82 Kondisi Koperasi di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Uraian	Tahun				
		2021	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**
1	Jumlah Koperasi	4.363	4.433	4.726	4.835	6,190
2	Jumlah Koperasi Aktif	2.707	2.774	2.483	2.592	3,953
3	Persentase Koperasi Aktif	62,04	62,58	52,00	53,60	63.86

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

Secara umum, perkembangan koperasi di NTB menunjukkan bahwa koperasi masih menjadi salah satu pilar penting dalam penguatan ekonomi kerakyatan dan pemberdayaan UMKM. Ke depan, diperlukan penguatan tata kelola koperasi, peningkatan kualitas manajemen dan inovasi usaha, pengawasan koperasi yang lebih optimal, serta penguatan koperasi berbasis sektor unggulan daerah agar koperasi di NTB semakin sehat, produktif, dan berdaya saing dalam mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.

Pada jumlah UMKM di Provinsi NTB tahun 2025 menunjukkan perkembangan yang sangat signifikan dibandingkan tahun 2024. Total UMKM meningkat dari 324.624 unit pada tahun 2024 menjadi 649.494 unit pada tahun 2025. Peningkatan ini

mencerminkan semakin tumbuhnya aktivitas usaha masyarakat serta meningkatnya peran UMKM sebagai penggerak utama perekonomian daerah. Berdasarkan skala usaha, UMKM di NTB masih sangat didominasi oleh usaha mikro. Dari total 649.494 unit usaha pada tahun 2025, sebanyak 648.152 unit atau sekitar 99,79% merupakan usaha mikro. Sementara itu, usaha kecil berjumlah 1.119 unit dan usaha menengah hanya 223 unit. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur UMKM di NTB masih didominasi usaha berskala kecil dengan kapasitas usaha dan permodalan yang relatif terbatas.

Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan jumlah UMKM terbesar di NTB, yaitu mencapai 149.909 unit pada tahun 2025. Sebagian besar merupakan usaha mikro sebanyak 149.587 unit, disertai 261 usaha kecil dan 61 usaha menengah. Tingginya jumlah UMKM di wilayah ini menunjukkan besarnya aktivitas ekonomi masyarakat berbasis usaha kecil dan rumah tangga. Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Barat juga memiliki jumlah UMKM yang sangat besar, masing-masing sebanyak 129.922 unit dan 104.980 unit. Sementara itu, Kota Mataram meskipun memiliki jumlah UMKM lebih kecil dibanding beberapa kabupaten, namun memiliki jumlah usaha kecil dan menengah relatif lebih tinggi, yaitu 248 usaha kecil dan 38 usaha menengah. Hal ini menunjukkan bahwa struktur usaha di wilayah perkotaan cenderung lebih berkembang dan memiliki kapasitas usaha yang lebih baik.

Di sisi lain, Kabupaten Dompu, Sumbawa Barat, dan Kota Bima memiliki jumlah usaha menengah yang masih relatif sedikit. Kondisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar UMKM di daerah tersebut masih berada pada tahap usaha mikro dan kecil sehingga memerlukan dukungan pengembangan usaha yang lebih intensif. Secara umum, meningkatnya jumlah UMKM di NTB menunjukkan semakin kuatnya peran sektor usaha masyarakat dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengurangan kemiskinan. Namun, dominasi usaha mikro juga menunjukkan masih perlunya penguatan kapasitas usaha, akses pembiayaan, digitalisasi usaha, peningkatan kualitas produk, serta perluasan akses pasar agar UMKM dapat naik kelas menjadi usaha kecil dan menengah yang lebih produktif dan berdaya saing.

Ke depan, pemerintah daerah perlu terus memperkuat ekosistem UMKM melalui pelatihan kewirausahaan, pendampingan usaha, penguatan koperasi dan kemitraan, akses pembiayaan yang inklusif, serta pengembangan UMKM berbasis potensi unggulan daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi NTB yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 2. 83 Jumlah UMKM Provinsi NTB Berdasarkan Penetapan Kategori Usaha Berdasarkan Nilai Penjualan Tahun 2025

No	Kabupaten	Tahun 2024	Skala Usaha Tahun 2025			
			Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
1	Lombok Barat	55.473	104.850	111	19	104.980
2	Lombok Tengah	64.832	129.834	58	30	129.922
3	Lombok Timur	73.499	149.587	261	61	149.909
4	Sumbawa	14.547	40.549	43	16	40.608
5	Dompu	23.146	34.802	9	1	34.812
6	Bima	23.621	51.138	31	15	51.184

No	Kabupaten	Tahun 2024	Skala Usaha Tahun 2025			
			Mikro	Kecil	Menengah	Jumlah
7	Sumbawa Barat	15.089	20.752	144	14	20.910
8	Lombok Utara	28.937	38.387	195	24	38.606
9	Kota Mataram	10.562	51.051	248	38	51.337
10	Kota Bima	14.918	27.202	19	5	27.226
Jumlah		**324.624**	**648.152**	**1.119**	**223**	**649.494**

Sumber: Dinas Koperasi UKM Provinsi NTB Tahun 2025

12. Penanaman Modal

Kebijakan peningkatan investasi oleh Pemerintah Provinsi NTB baik dalam negeri maupun asing merupakan upaya untuk mendorong kegiatan ekonomi suatu daerah, penyerapan tenaga kerja, peningkatan produktivitas yang dihasilkan, penghematan devisa bahkan penambahan devisa. Kebijakan investasi yang ramah dan iklim usaha yang kondusif sangat mempengaruhi besar kecilnya nilai realisasi investasi suatu daerah. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB menetapkan Nilai Realisasi Investasi dalam Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2025 sebagai instrumen pengukuran dalam penyelenggaraan urusan bidang penanaman modal. Target dan capaian indikator kinerja urusan bidang penanaman modal tahun 2021-2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 84 Capaian Nilai Realisasi Investasi Provinsi NTB Tahun 2021 – 2025

Indikator Bidang Urusan	Tahun 2021		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.	Target	Real.
Nilai Realisasi Investasi (Rp.T)	13,362	14,879	15,428	21,606	17,814	39,896	25,4	54,55	61.09	61.10

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2025

Nilai realisasi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan dan secara konsisten melampaui target yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021, realisasi investasi mencapai Rp 14,879 triliun, lebih tinggi dibanding target sebesar Rp 13,362 triliun. Tren peningkatan tersebut terus berlanjut pada tahun-tahun berikutnya, di mana realisasi investasi tahun 2022 mencapai Rp 21,606 triliun dari target Rp15,428 triliun, kemudian melonjak menjadi Rp 39,896 triliun pada tahun 2023, jauh melampaui target Rp 17,814 triliun.

Pada tahun 2024, realisasi investasi kembali meningkat menjadi Rp 54,55 triliun dibanding target Rp 25,4 triliun. Sementara itu, pada tahun 2025 realisasi investasi mencapai Rp 61,10 triliun dan berhasil memenuhi target sebesar Rp 61,09 triliun. Capaian ini menunjukkan bahwa iklim investasi di NTB semakin berkembang dan mampu menarik minat investor, baik dari dalam maupun luar daerah.

Peningkatan realisasi investasi tersebut mencerminkan semakin membaiknya kondisi perekonomian daerah, dukungan pembangunan infrastruktur, kemudahan pelayanan perizinan, serta meningkatnya kepercayaan investor terhadap potensi

unggulan NTB. Tingginya investasi diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing daerah, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA Provinsi NTB tahun 2021-2025 secara umum menunjukkan peningkatan terutama untuk PMDN. Proporsi nilai PMDN juga selalu lebih besar dari PMA. Adapun perkembangan nilai investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB selama tahun 2021– 2025 dapat dilihat pada gambar berikut :

Tabel 2. 85 Perkembangan Investasi PMDN dan PMA di Provinsi NTB
Tahun 2021–2025

Tahun	Jenis Investasi (Rupiah)				Total (Rupiah)
	PMDN		PMA		
2021	11.334.069.286.351	76,17%	3.545.204.377.544	23,83%	14.879.273.663.895
2022	14.177.661.576.421	65,62%	7.429.012.296.895	34,38%	21.606.673.873.316
2023	31.849.653.936.049	79,78%	8.047.274.575.735	20,17%	39.896.928.511.784
2024	43.762.503.303.672	80,22%	10.791.226.674.189	19,78%	54.553.729.977.861
2025	51.112.831.672.312	83,65%	9.989.679.682.030	16,35%	61.102.511.354.342

Sumber : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2025

Komposisi investasi di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 didominasi oleh Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), meskipun Penanaman Modal Asing (PMA) juga memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Secara umum, total investasi menunjukkan tren peningkatan yang sangat pesat dari tahun ke tahun, sejalan dengan meningkatnya aktivitas ekonomi dan daya tarik investasi di NTB.

Dominasi PMDN menunjukkan tingginya peran investor domestik dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah, sekaligus mencerminkan meningkatnya kepercayaan pelaku usaha nasional terhadap potensi dan stabilitas ekonomi NTB. Di sisi lain, keberadaan PMA tetap menjadi faktor penting dalam mendukung transfer teknologi, perluasan pasar, dan peningkatan daya saing daerah. Peningkatan investasi yang konsisten ini diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja, mempercepat pembangunan infrastruktur dan sektor unggulan, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Untuk sebaran capaian Nilai Realisasi Investasi PMDN dan PMA menurut Kabupaten/Kota se-NTB periode tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. 86 Realisasi Investasi PMDN Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2021 – 2025

No	Kabupaten /Kota	Realisasi PMDN									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Kota Mataram	706.535.042.988	6,23	1.195.125.116.786	8,43	1.035.389.606.990	3,25	872.417.495.944	1,99	1.109.069.731.952	2,17
2	Lombok Utara	1.161.749.559.554	10,3	202.009.346.030	1,42	574.834.893.370	1,8	447.236.322.578	1,02	661.888.045.979	1,29

No	Kabupaten /Kota	Realisasi PMDN									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
3	Lombok Barat	1.500.268.505.882	13,2	252.985.623.373	1,78	620.358.305.798	1,95	1.065.784.386.534	2,44	1.043.172.960.386	2,04
4	Lombok Tengah	4.337.920.366.830	38,3	360.856.618.894	2,55	2.723.642.685.710	8,55	198.963.015.612	0,45	5.106.994.580.103	9,99
5	Lombok Timur	1.441.285.552.380	12,7	78.636.909.746	0,55	663.616.052.796	2,08	397.227.924.696	0,91	374.969.888.772	0,73
6	Sumbawa Barat	1.687.904.651.737	14,9	11.577.027.797.735	81,7	24.031.792.120.302	75,5	38.988.567.122.526	89,09	41.686.652.248.490	81,56
7	Sumbawa	201.988.977.881	1,78	255.933.672.361	1,81	1.778.454.774.295	5,58	1.591.177.280.905	3,64	762.839.190.822	1,49
8	Dompu	53.214.365.895	0,47	64.681.893.780	0,46	96.787.448.528	0,3	50.227.497.585	0,11	49.868.952.027	0,10
9	Bima	154.416.195.962	1,36	10.076.103.488	0,07	241.892.094.838	0,76	40.379.300.226	0,09	182.276.589.334	0,36
10	Kota Bima	88.786.067.242	0,78	180.328.494.228	1,27	82.885.953.422	0,26	110.522.957.066	0,25	131.007.445.982	0,26
	Jumlah	**11.334.069.286.351**	**100**	**14.177.661.576.421**	**100**	**31.849.653.936.049**	**100**	**43.762.503.303.672**	**100**	51.108.739.633.847	100

Sumber : NTB satu data 2025

Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren peningkatan yang sangat signifikan, meskipun distribusinya antar kabupaten/kota masih belum merata. Secara keseluruhan, nilai PMDN meningkat dari Rp11,33 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp51,11 triliun pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin kuatnya kepercayaan investor domestik terhadap potensi ekonomi dan iklim investasi di NTB. Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan kontribusi PMDN terbesar selama periode tersebut. Pada tahun 2022, kontribusinya mencapai 81,7% dari total PMDN NTB dan terus mendominasi hingga tahun 2025 dengan nilai investasi sebesar Rp41,69 triliun atau sekitar 81,56% dari total PMDN provinsi. Dominasi ini menunjukkan besarnya aktivitas investasi sektor unggulan, terutama yang berkaitan dengan industri pertambangan dan pengolahan sumber daya alam di wilayah tersebut.

Sementara itu, beberapa daerah lain juga menunjukkan perkembangan investasi yang cukup baik, seperti Lombok Tengah yang pada tahun 2025 mencatat realisasi PMDN sebesar Rp5,11 triliun atau 9,99% dari total investasi. Peningkatan investasi di Lombok Tengah dipengaruhi oleh berkembangnya kawasan pariwisata dan infrastruktur strategis nasional. Kota Mataram dan Lombok Barat juga tetap menjadi salah satu pusat aktivitas investasi, meskipun kontribusinya relatif lebih kecil dibanding Sumbawa Barat. Di sisi lain, beberapa kabupaten/kota seperti Dompu, Bima, dan Kota Bima masih memiliki kontribusi investasi yang relatif rendah. Hal ini menunjukkan masih perlunya upaya pemerataan investasi melalui peningkatan infrastruktur, kemudahan perizinan, penguatan promosi potensi daerah, serta pengembangan sektor unggulan lokal agar pertumbuhan ekonomi dapat lebih merata di seluruh wilayah NTB.

Sementara itu, untuk Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung meningkat. Total PMA meningkat dari Rp3,55 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp9,99 triliun pada tahun 2025. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa NTB

semakin mampu menarik minat investor asing, terutama pada sektor-sektor unggulan yang memiliki potensi sumber daya alam dan pariwisata. Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan kontribusi PMA terbesar selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2023 kontribusinya mencapai 56,56% dari total PMA NTB dan masih mendominasi pada tahun 2025 sebesar 41,37% dengan nilai investasi mencapai Rp4,13 triliun. Dominasi tersebut menunjukkan kuatnya investasi asing pada sektor pertambangan dan industri pengolahan yang berkembang di wilayah tersebut.

Selain Sumbawa Barat, Lombok Tengah juga menunjukkan peningkatan PMA yang sangat signifikan. Pada tahun 2025, realisasi PMA di Lombok Tengah mencapai Rp2,34 triliun atau 23,38% dari total PMA NTB. Kondisi ini sejalan dengan berkembangnya kawasan pariwisata strategis dan pembangunan infrastruktur pendukung yang mampu menarik investasi asing, khususnya di sektor pariwisata dan jasa. Kabupaten Dompu juga menjadi salah satu kontributor utama PMA, terutama pada periode 2021–2024. Pada tahun 2022 bahkan kontribusinya mencapai 43,3% dari total PMA provinsi. Namun demikian, kontribusi Dompu mengalami penurunan pada tahun 2025 menjadi 10,93%. Sementara itu, daerah lain seperti Kota Mataram dan Lombok Utara mulai menunjukkan peningkatan investasi asing yang cukup baik, terutama didorong oleh sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata.

Di sisi lain, beberapa wilayah seperti Kota Bima dan Bima masih memiliki kontribusi PMA yang relatif kecil. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan daya saing daerah melalui penguatan infrastruktur, promosi investasi, penyederhanaan perizinan, serta pengembangan potensi unggulan daerah agar investasi asing dapat tumbuh lebih merata di seluruh wilayah NTB. Realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2021 – 2025 dapat dilihat pada table berikut ini.

Tabel 2. 87 Realisasi Investasi PMA Menurut Kabupaten/Kota Periode Tahun 2021-2025

No.	Kabupaten/ Kota	Realisasi PMA									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp	%
1	Kota Mataram	99.950.475.623	2,82	406.345.552.226	5,47	163.573.604.712	2,03	494.550.562.933	4,58	827.239.266.471	8,28
2	Lombok Utara	221.598.732.590	6,25	19.063.460.385	0,26	534.911.850.655	6,65	634.130.320.300	5,88	905.979.209.270	9,07
3	Lombok Barat	244.792.935.564	6,9	342.036.723.365	4,6	333.110.878.161	4,14	258.217.358.278	2,39	316.009.617.752	3,16
4	Lombok Tengah	330.809.588.846	9,33	16.474.289.329	0,22	481.418.234.695	5,98	916.645.278.066	8,49	2.336.943.353.147	23,38
5	Lombok Timur	11.713.993.826	0,33	336.127.975.355	4,52	56.461.531.527	0,7	66.329.578.989	0,61	120.050.175.642	1,20
6	Sumbawa Barat	1.521.475.035.708	42,92	3.042.832.321.780	41	4.551.547.520.144	56,56	6.004.148.160.468	55,64	4.134.495.616.401	41,37
7	Sumbawa	30.017.194.987	0,85	17.411.038.217	0,23	31.324.944.864	0,39	104.395.723.759	0,97	247.047.925.448	2,47
8	Dompu	1.083.382.078.616	30,56	3.218.212.482.097	43,3	1.878.972.309.763	23,35	1.910.164.723.047	17,7	1.092.696.998.024	10,93
9	Bima	168.292.087	0	29.508.454.141	0,4	14.454.862.440	0,18	400.656.150.349	3,71	13.305.289.840	0,13
10	Kota Bima	1.296.049.697	0,04	1.000.000.000	0,01	1.534.838.773	0,02	1.988.818.000	0,02	4.268.500	0,00
	J u m l a h	**3.545.204.377.544**	**100**	**7.429.012.296.895**	**100**	**8.047.274.575.735**	**100**	**10.791.226.674.189**	**100**	9.993.771.720.495	100,00

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2025

Meningkatnya investasi PMDN dan PMA dipengaruhi oleh investor (perusahaan) yang melakukan investasi di daerah dengan berbagai kemudahan dan fasilitasi yang diberikan kepada pelaku usaha sehingga memberikan kenyamanan dalam berinvestasi. Berdasarkan sektor, baik kategori PMDN dan PMA untuk seluruh sektor tiap tahunnya mengalami fluktuasi. Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berdasarkan

sektor di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan pertumbuhan investasi yang sangat signifikan dengan dominasi yang kuat pada sektor pertambangan dan industri pengolahan. Total investasi PMDN meningkat tajam dari Rp11,33 triliun pada tahun 2021 menjadi Rp51,11 triliun pada tahun 2025, mencerminkan semakin berkembangnya aktivitas ekonomi dan meningkatnya kepercayaan investor domestik terhadap potensi daerah NTB.

Sektor pertambangan dan energi (ESDM) menjadi sektor utama penyumbang investasi PMDN sepanjang periode tersebut. Kontribusinya meningkat dari 25% pada tahun 2021 menjadi 73% pada tahun 2022, kemudian tetap mendominasi hingga mencapai 76,98% pada tahun 2025 dengan nilai investasi sebesar Rp39,35 triliun. Tingginya investasi pada sektor ini menunjukkan besarnya aktivitas eksplorasi, pengolahan, dan hilirisasi sumber daya alam yang menjadi penggerak utama ekonomi daerah.

Tabel 2. 88 Realisasi Investasi PMDN Menurut Sektor Periode Tahun 2021–2025

No	Sektor	Realisasi PMDN									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp	%
1	Pariwisata & ekonomi kreatif	2.361.030.370.153	20,8	1.265.742.863.001	8,9	3.892.397.973.760	12,2	1.389.781.561.555	3,2	2.860.654.691.637	5,60
2	Perhubungan Transportasi	2.263.446.554.370	20	290.799.027.478	2,1	373.174.710.482	1,17	267.426.644.549	0,6	433.242.011.229	0,85
3	Perdagangan	702.687.757.693	6,2	618.002.124.865	4,4	1.338.051.726.623	4,2	1.215.880.065.483	2,8	1.909.480.859.014	3,74
4	Pertanian, perkebunan dan peternakan	134.164.106.288	1,18	48.756.835.797	0,3	219.580.369.653	0,69	46.145.845.360	0,1	19.169.065.520	0,04
5	Perikanan	160.121.623.460	1,41	125.149.198.758	0,9	77.190.391.440	0,24	230.333.356.346	0,5	312.451.314.122	0,61
6	PUPR	2.602.788.875.013	23	73.107.528.605	0,5	161.125.315.744	0,51	158.379.145.911	0,4	184.327.026.693	0,36
7	Kesehatan, Obat & Makanan	48.244.587.322	0,43	36.474.472.135	0,3	62.322.370.943	0,2	49.135.742.983	0,1	215.019.060.844	0,42
8	Pertambangan, Energi (ESDM)	2.851.273.829.390	25	10.336.530.634.918	73	18.155.590.191.264	57	30.259.419.006.085	69	39.348.735.082.818	76,98
9	Industri/Perindustrian	189.096.308.958	2	1.309.342.587.322	9	7.430.573.302.124	23	9.853.765.342.819	23	4.952.027.638.297	9,69
10	Ketenagakerjaan	14.814.950.922	0	71.526.044.440	1	134.187.923.498	0	273.121.509.873	1	206.207.161.144	0,40
11	Pos Telekomunikasi, sistem dan transaksi elektronik	4.493.320.762	0	2.198.579.102	0	4.179.436.611	0	16.214.375.150	0	13.012.205.619	0,03
12	Pendidikan	962.002.020	0	-		-		850.400.000	-	20.000.000	0,00
13	UMK									652.419.063.500	1,28
14	Keuangan/ koperasi	50.000.000	-	31.680.000	-	1.280.223.907	-	1.900.307.558	-	6.066.491.875	0,01
	J u m l a h	**11.334.069.286.351**	**100**	**14.177.661.576.421**	**100**	**31.849.653.936.049**	**100**	**43.762.503.303.672**	**100**	**51.112.831.672.312**	**100**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2025

Pada kategori Realisasi Penanaman Modal Asing (PMA) berdasarkan sektor di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa investasi asing masih didominasi oleh sektor pertambangan dan energi, meskipun sektor pariwisata dan beberapa sektor jasa mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan. Total PMA meningkat dari Rp3,55 triliun pada tahun 2021 menjadi sekitar Rp9,99 triliun pada tahun 2025, yang mencerminkan meningkatnya daya tarik NTB bagi investor asing. Sektor pertambangan dan energi (ESDM) menjadi sektor utama tujuan investasi asing sepanjang periode tersebut. Pada tahun 2021 kontribusinya mencapai 73% dari total PMA, meningkat menjadi 83% pada tahun 2022, dan tetap mendominasi hingga tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 47,53% atau senilai Rp 4,75 triliun.

Dominasi sektor ini menunjukkan bahwa potensi sumber daya alam dan industri pengolahan mineral masih menjadi daya tarik utama investasi asing di NTB.

Selain sektor pertambangan, sektor pariwisata dan ekonomi kreatif juga menjadi salah satu sektor strategis yang terus berkembang. Nilai investasi PMA sektor ini meningkat dari Rp652,9 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp2,47 triliun pada tahun 2025 dengan kontribusi sebesar 24,72%. Peningkatan tersebut menunjukkan semakin besarnya minat investor asing terhadap pengembangan destinasi wisata, hotel, kawasan ekonomi pariwisata, dan industri kreatif di NTB, terutama pada kawasan strategis pariwisata internasional. Sektor industri/perindustrian juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan, terutama pada tahun 2023 dan 2025. Pada tahun 2025 nilai investasinya mencapai Rp847,88 miliar atau 8,49% dari total PMA. Hal ini menunjukkan mulai berkembangnya investasi asing pada sektor hilirisasi dan industri pengolahan yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah. Selain itu, sektor pos, telekomunikasi, sistem dan transaksi elektronik juga menunjukkan perkembangan positif dengan kontribusi sebesar 7,74% pada tahun 2025, mencerminkan meningkatnya kebutuhan investasi pada infrastruktur digital dan teknologi informasi.

Di sisi lain, beberapa sektor seperti kesehatan, pendidikan, kehutanan, dan ketenagakerjaan masih memiliki kontribusi investasi asing yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa investasi PMA di NTB masih terkonsentrasi pada sektor ekstraktif dan pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan strategi diversifikasi investasi melalui peningkatan promosi sektor potensial, penguatan infrastruktur pendukung, kemudahan regulasi, serta pengembangan sumber daya manusia agar investasi asing dapat berkembang lebih merata dan memberikan dampak ekonomi yang lebih luas bagi masyarakat NTB.

Tabel 2. 89 Realisasi Investasi PMA Menurut Sektor Periode Tahun 2021–2025

No.	Sektor	Realisasi PMA									
		2021		2022		2023		2024		2025	
		Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%	Rp.	%
1	Pariwisata & Ekonomi Kreatif	652.896.873.144	18	738.393.638.403	10	2.233.628.220.039	28	2.680.286.592.777	25	2.469.376.128.100	24,72
2	Perhubungan Transportasi	-		-		95.000.000	-	36.600.000	-	135.532.865.613	1,36
3	Perdagangan	4.487.505.844	0	107.345.605.496	1	37.501.021.048	0	144.230.949.860	1	306.583.561.173	3,07
4	Pertanian/Perkebunan & peternakan	1.333.600.000	0	-		19.769.966.466	0	7.536.402.426	0	415.864.685.198	4,16
5	PUPR	231.271.777.967	7	10.479.091.432	0	8.150.805.566	0	6.202.598.746	0	94.880.790.223	0,95
6	Kesehatan, Obat dan Makanan	2.962.733.347	0	7.655.000	-	-		1.525.153.400	0	3.758.624.804	0,04
7	Lingk. Hidup & Kehutanan	1.208.523.999	0	-		-		1.625.033.600	0		0,00
8	Perikanan	2.572.568.666	0	17.300.775.765	0	13.357.980.027	0	43.780.218.130	0	162.469.636.021	1,63
9	Peternakan	-		-		-		-	-		0,00
10	Pertambangan, Energi (ESDM)	2.574.011.901.192	73	6.151.978.369.559	83	5.063.063.080.562	63	7.690.817.042.887	71	4.747.838.937.911	47,53
11	Industri/ Perindustrian	1.474.000.000	0	5.151.183.592	0	548.456.914.842	7	182.996.926.345	2	847.875.435.614	8,49
12	Pos Telekomunikasi sistem dan transaksi elektronik	72.984.893.385	2	398.355.977.648	5	122.890.575.785	2	24.217.986.757	0	773.283.310.870	7,74
13	Ketenagakerjaan	-		-		10.000.000	-	6.991.883.311	0	14.456.035.478	0,14
14	Pendidikan	-		-		351.011.400	-	100.582.000	-	3.918.162.924	0,04
15	Keuangan	-		-		-		878.703.950	0	13.841.508.101	0,14
Jumlah		**3.545.204.377.544**	**100**	**7.429.012.296.895**	**100**	**8.047.274.575.735**	**100**	**10.791.226.674.189**	**100**	**9.989.679.682.030**	**100**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2025

Jumlah bidang perizinan dan non perizinan yang diterbitkan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika pelayanan perizinan yang cukup fluktuatif. Secara umum, jumlah izin yang diterbitkan mengalami peningkatan hingga tahun 2024 sebelum kemudian menurun pada tahun 2025. Total izin yang diterbitkan meningkat dari 3.599 izin pada tahun 2021 menjadi 7.643 izin pada tahun 2024, namun turun menjadi 4.024 izin pada tahun 2025. Sementara itu, jumlah non izin relatif lebih kecil dan cenderung stabil dibandingkan layanan perizinan. Sektor peternakan menjadi bidang dengan jumlah izin terbanyak selama periode tersebut. Pada tahun 2021 jumlah izin yang diterbitkan mencapai 2.612 izin dan tetap tinggi hingga tahun 2025 sebanyak 2.132 izin. Tingginya jumlah perizinan pada sektor ini menunjukkan besarnya aktivitas usaha peternakan di NTB yang menjadi salah satu sektor unggulan daerah. Selain itu, sektor perikanan dan kelautan juga mengalami peningkatan signifikan, terutama pada tahun 2024 yang mencapai 4.900 izin sebelum menurun menjadi 1.274 izin pada tahun 2025. Hal ini mencerminkan tingginya aktivitas usaha berbasis sumber daya kelautan dan perikanan di daerah.

Bidang perindustrian juga menunjukkan perkembangan yang cukup besar sejak tahun 2023 dengan jumlah izin mencapai 541 izin dan tetap tinggi pada tahun 2025 sebanyak 391 izin. Sementara itu, sektor pertambangan dan energi (ESDM) cenderung mengalami penurunan jumlah izin dari 195 izin pada tahun 2021 menjadi 55 izin pada tahun 2025. Penurunan ini dapat mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan, konsolidasi usaha, atau peningkatan selektivitas dalam penerbitan izin sektor pertambangan. Beberapa bidang lain seperti pariwisata, kesehatan, perdagangan, dan perhubungan juga menunjukkan aktivitas perizinan yang relatif stabil meskipun jumlahnya tidak sebesar sektor peternakan dan perikanan. Di sisi lain, terdapat beberapa bidang yang belum menunjukkan aktivitas penerbitan izin secara signifikan, seperti penanaman modal, pendidikan, pertanahan, dan perencanaan pembangunan daerah.

Tabel 2. 90 Jumlah Bidang Perizinan (Izin dan Non Izin) yang Diterbitkan Tahun 2021-2025

No	Bidang Perizinan	Izin					Non Izin					Jumlah 2025
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
	Penanaman Modal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	Perikanan dan Kelautan	610	617	1908	4900	1274	0	2332	0	0	0	1274
2	Pertanian &Perkebunan	3	0	25	27	35	0	23	0	0	0	35
3	Koperasi & UMKM	1	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
4	Pekerjaan Umum	36	18	44	9	5	0	29	0	0	0	5
5	Kehutanan	11	19	6	3	8	2	19	6	5	4	12
6	Lingkungan Hidup & Penelitian	51	4	6	7	6	0	4	0	0	0	6
7	Perindustrian	0	0	541	538	391	0	277	0	0	0	391
8	Perdagangan	1	4	3	6	7	3	5	2	3	3	10
9	Hubkominfo	59	0	43	0		0	2	0	0		0

No	Bidang Perizinan	Izin					Non Izin					Jumlah 2025
		2021	2022	2023	2024	2025	2021	2022	2023	2024	2025	
10	Pertambangan/ ESDM (2021)	195	242	212	66	55	0	350	0	0	0	55
11	Perencanaan Pembangunan Daerah	0	0	0	0		0	0	0	0		0
12	Kesehatan	16	1	25	13	10	0	19	0	1	0	10
13	Pariwisata	0	0	47	24	34	0	56	0	0	0	34
14	Pertanahan	0	0	0	0		0	0	0	0		0
15	Peternakan	2612	1273	2175	1989	2132	0	1273	0	0	0	2132
16	Sosial	4	22	2	3	4	16	22	15	16	17	21
17	Pendidikan	0	0	0	0		0	0	0	0		0
18	Ketenagakerjaan		0	75	31	28	0	72	0	0	0	28
19	Perhubungan		7	43	27	35	0	82	0	0	0	35
Jumlah		**3599**	**2207**	**5155**	**7643**	**4024**	**21**	**4571**	**23**	**25**	**24**	**4048**

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTB, 2024

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah perizinan ini menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan investasi di NTB yang didukung oleh pelayanan perizinan pemerintah daerah. Namun demikian, fluktuasi jumlah izin juga mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas pelayanan, penyederhanaan proses perizinan, digitalisasi layanan, serta penguatan pengawasan agar pelayanan perizinan semakin efektif, transparan, dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga di Provinsi NTB tahun 2021-2025 melalui pelaksanaan program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dan program Pengembangan Daya Saing Keolahragaan. Kinerja program prioritas tersebut diukur dengan indicator prestasi olahraga di tingkat nasional dan internasional, prestasi pemuda di tingkat nasional dan internasional dan proporsi wirausaha muda.

Medali yang diperoleh Provinsi NTB berasal dari berbagai macam cabang olahraga berprestasi, seperti pada table berikut ini:

Tabel 2. 91 Prestasi Olahraga Atlet Provinsi NTB Tahun 2021 – 2025

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
1.	2021	Nasional	Atletik	6	4	3	13	PON di Papua
			Panjat Tebing	2	1	-	3	
			Balap Motor	1	-	-	1	
			Kempo	2	-	1	3	
			Bola Voli Pasir	1	1	-	2	
			Tarung Derajat	1	-	3	4	
			Menembak	-	3	1	4	
			Sepak Bola	-	-	1	1	
			Tinju	2	2	3	7	
			Atletik	1	-	2	3	PEPARPENAS di PAPUA
			Bulutangkis	-	-	1	1	
		Internasional	-	-	-	-	-	
Jumlah				**16**	**11**	**15**	**42**	

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
		Nasional	Atletik	5	6	3	14	Kejurnas Atletik di Semarang
				1	1	2	4	Marathon 10 K Samota di Sumbawa
				-	-	1	1	PORWANAS di Malang
			Tarung Derajat	1	-	2	3	Kejurnas Tarung Derajat di Bandung
				3	-	-	3	POMNAS di Sumatera Barat
			Taekwondo	-	1	-	1	
			Karate	-	-	1	1	
				5	3	5	13	Kejurnas Karate INKAI ALT CUP di Jakarta
				1	1	1	3	Kejurnas Piala Umum PB FORKI di Padang
			Pencak Silat	4	5	-	9	Pra POPNAS di Kalimantan Timur
			Balap Motor	2	-	-	2	Kejurnas ONEPRIX di Jakarta
2.	**2022**		Menembak	2	3	3	8	Kejurnas PERBAKIN Aniversary di Jakarta
			Balap Sepeda	1	-	-	1	Raja gunung Road Bike Race di Bali
			Bola Voli Pantai	3	1	-	4	Liga Voli Pantai Nasional di Jawa Timur
				1	-	-	1	Kejurnas Bola Voli Pantai di Yogyakarta
			Taekwondo	1	1	5	7	Kejurnas Taekwondo di Banten
			Muay Thai	2	-	2	4	Kejurnas Muay Thai di Banten
			Selancar	-	-	1	1	Kejurnas di Bali
		Internasional	Atletik	1	-	-	1	Thailand open track and field championship
				-	-	1	1	SEA GAMES di Vietnam
			Karate	1	-	-	1	
			Tinju	-	1	-	1	
			Bola Voli Pantai	-	1	-		
			Panjat Tebing	1	-	-	1	IFSC Climbing Asin Championship di Seoul, Korea Selatan

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
			Binaraga	1	-	-	1	Internasional Binaraga WWF World Indonesia
	Jumlah			**36**	**24**	**27**	**86**	
		Nasional	PENCAK SILAT	1	1	2	4	POPNAS XVI di Palembang - Sumatera Selatan
			TAEKWONDO		1	2	3	
			ATLETIK	1	2	1	4	
			SHORINJI KEMPO		1	1	2	
			ATLETIK	1	1	1	3	Kerjurnas antar PPLP/SKO/PPLP D cabor Atletik di Depok-Jawa Barat
			TAEKWONDO			1	1	Kerjurnas antar PPLP/SKO/PPLP D cabor Taekwondo di NTB
			PENCAK SILAT	2		2	4	Kerjurnas antar PPLP/SKO/PPLP D cabor Pencak Silat di Palu-Sulawesi Tengah
			TAEKWONDO			2	2	Kejuaraan Nasional Best of The Best KEMENPORA RI di Jakarta
3.	**2023**		ATLETIK	1			1	Student Athletic Championship di Jakarta
			TAEKWONDO	2	2		4	Kejurnas Taekwondo Wilayah IV di Bali
			ATLETIK	3	4		7	Babak Kualifikasi PON Aceh- Sumut
			BERKUDA	1		1	2	
			BERMOTOR	2	2		4	
			BILIARD			1	1	
			BOLA VOLI PASIR	3			3	
			BRIDGE			1	1	
			BULU TANGKIS	7			7	
			CATUR	2			2	
			GATE BALL	1			1	
			GULAT		1	2	3	
			HAPKIDO			1	1	
			HOCKEY			1	1	
			SEPAK TAKRAW		1		1	
			KABADDI		1	1	2	
			KARATE	1			1	
			SHORINJI KEMPO	2	1	4	7	
			MENEMBAK	7	2	3	12	
			KICK BOXING	3	1		4	
			MUAYTHAI	1	1	6	8	
			PENCAK SILAT		3	2	5	
			PETANQUE		1		1	
			RENANG			2	2	
			SEPATU RODA	2	5	3	10	

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
			SOFT TENIS			1	1	
			TAEKWONDO			1	1	
			SPORT DANCE	3	3	1	7	
			Tarung Derajat	3	3	2	8	
			TINJU	3		1	4	
			WUSHU	2	1		3	
		Internasional	ATLETIK	1		1	2	Sea Youth Athlethics Campionship di Thailand
Jumlah				**55**	**38**	**47**	**140**	
4.	**2024**	Nasional	Atletik	4	2	3	9	PON di Sumut-Aceh
			Panjat Tebing				0	
			Balap Motor				0	
			Kempo	4	1	2	7	
			Muaythai	1	2	1	4	
			Bola Voli Pasir	1		1	2	
			Tarung Derajat	2	1	1	4	
			Menembak	1	3		4	
			Sepak Bola				0	
			Tinju	1	1	1	3	
			Dance Sport	1	1	1	3	
			Biliar		1	1	2	
			Pencak Silat		1	1	2	
			Soft Tennis		1		1	
			Bermotor		2		2	
			Hapkido			1	1	
			Gulat			1	1	
			Taekwondo			1	1	
			Kickboxing			3	3	
			Kabaddi			2	2	
			Atletik	2	1	2	5	PEPARPENAS di SOLO
			Bulutangkis	-	-	1	1	
			Pencak Silat	3	3	4	10	PRA POPNAS SULAWESI TENGGARA 17-24 NOVEMBER 2024
			Tinju		1		1	
			Pencak Silat	4	1	3	8	Kejurnas Antar PPLP/PPLPD/SKO 2024 di Kalsel
			Atletik	1			1	Kejurnas Antar PPLP/PPLPD/SKO 2024 di Babel
			Taekwondo			3	3	Kejurnas Antar PPLP/PPLPD/SKO 2024 di NTT
		Internasional	-	-	-	-	-	
Jumlah				**25**	**22**	**33**	**80**	
5.	**2025**	Nasional	Atletik			1		POPNAS XVII 2025 di Jakarta
			Taekwondo			1		
			Pencak Silat	1		1		
			Pencak Silat		3	1		Kejurnas Antar Spobnas Sumatera Utara 4 - 10 Agustus 2025
			Taekwondo		2			Kejurnas Antar Spobnas
			Atletik		2	1		

No	Tahun	Event	Jenis Lomba	Emas	Perak	Perunggu	Jumlah Medali	Keterangan
								Semarang Oktober 2025
			Taekwondo	3				Kejurnas Taekwondo Perang Bintang di Banten Juni 2025
		Internasional	Taekwondo	1	1			Try Out East Borneo Internasional Championship di Borneo Kaltim 16-20 Juli 2025
Jumlah				**5**	**8**	**5**	**18**	

Sumber: Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, 2025

Berbagai prestasi yang telah dicapai oleh atlet Provinsi NTB merupakan hasil dari pembinaan yang telah dilakukan melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP) Provinsi NTB. Peserta PPLP ini merupakan hasil seleksi di Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) pilihan mekanisme seleksi, yaitu talent scooting, Pekan Olahraga Daerah dan turnamen. Pola pembinaan yang dilakukan melaui sistem promosi-degradasi artinya ketika atlet mengalami penurunan prestasi maka terdegradasi dan dikeluarkan dari pusat pelatihan, sedangkan atlet yang berpotensi akan masuk menggantikannya pada pusat pelatihan. Peserta PPLP yang dibina setiap tahunnya sebanyak 46 atlet pelajar dengan pembiayaan utama berasal dari Dana Dekonsentrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Pembangunan dan perawatan sarana prasarana olahraga merupakan suatu hal yang krusial, karena akan memberikan pengaruh besar pada pencapaian prestasi olahraga. Sarana prasarana olahraga di Provinsi NTB memerlukan perhatian khusus, terutama setelah ditetapkannya Provinsi NTB menjadi tuan rumah PON tahun 2028. Tuan rumah PON 2028, harus memliki sarana dan prasarana olahraga sesuai standar nasional/international yang akan digunakan untuk penyelenggaraan pertandingan/perlombaan cabang olahraga. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing adalah melalui pembangunan pemuda. Pembangunan pemuda memiliki arti penting bagi keberlangsungan suatu negara-bangsa karena pemuda adalah penerima tongkat estafet kepemimpinan bangsa dan salah satu penentu optimalisasi bonus demografi.

Indikator bidang kepemudaan di Provinsi NTB adalah pemuda yang berprestasi di tingkat regional, Nasional dan Internasional. Pemuda berprestasi ini meliputi Paskibraka Nasional, Pertukaran Pemuda antar Negara dan Pemuda Pelopor. Sementara itu, pembangunan kepemudaan dilaksanakan dalam bentuk pelayanan kepemudaan, yang berfungsi melaksanakan penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan potensi kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda dalam segala aspek kehidupan. Isu-isu strategis dalam pembangunan kepemudaaan telah dipetakan dalam Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan, yaitu: Penyadaran Pemuda, Pemberdayaan Pemuda, Pengembangan Kepemimpinan Pemuda, Pengembangan

Kewirausahaan Pemuda, Pengembangan Kepeloporan Pemuda, Penelitian dan Kajian Kepemudaan, dan Penanggulangan Perilaku Negatif Pemuda.

14. Kebudayaan

Dalam melaksanakan amanat Undang Undang Nomor 5 Tahun 2017 pasal 2 tentang kebudayaan, Pengamanan Objek Pemajuan Kebudayaan dilakukan dengan cara: memutakhirkan data dalam Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu secara terus-menerus; mewariskan Objek Pemajuan Kebudayaan kepada generasi berikutnya; dan. memperjuangkan Objek Pemajuan Kebudayaan sebagai warisan budaya dunia. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama tahun 2017-2023 oleh Pemerintah Provinsi NTB dalam rangka memperkenalkan nilai-nilai budaya daerah, membentuk karakter masyarakat seturut nilai-nilai budaya lokal yang pada akhirnya bermuara pada pelestarian nilai-nilai budaya. Pemajuan Kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan. Pemajuan Kebudayaan bertujuan untuk: (a) mengembangkan nilai-nilai luhur budaya bangsa; (b) memperkaya keberagaman budaya; (c) mempertegas jati diri bangsa; (d) memperteguh persatuan dan kesatuan bangsa; (e). mencerdaskan kehidupan bangsa; (f) meningkatkan citra bangsa. Tahun 2024, terdapat 11 (sebelas) Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang dapat di data di tingkat Provinsi, namun pada tahun 2025, pendataan tidak dapat dilaksanakan karena efisiensi keterbatasan anggaran dan persiapan perubahan struktur organisasi perangkat daerah Provinsi NTB melalui pembentukan Dinas Kebudayaan. Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2. 92 Perkembangan Objek Pemajuan Kebudayaan Tahun 2020 – 2025

No	Objek	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Tradisi Lisan	116	-	-	-	-	-
2	Manuskrip	-	-	1	1	-	-
3	Adat Istiadat		10	-	3	-	-
4	Ritus	3	23	-	2	-	-
5	Pengetahuan Tradisional	-	38	10	5	10	-
6	Teknologi Tradisional				-	-	-
7	Seni	55		116	28	-	-
8	Bahasa	-	-	28	0	-	-
9	Permainan Rakyat	118	201	22	8	-	-
10	Olahraga Tradisional	131	201	-	336	1	-
11	Cagar Budaya	-	1	-	37	11	-

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2024

Berdasarkan data Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2021–2025, secara umum terlihat bahwa jumlah kunjungan mengalami peningkatan yang signifikan setelah tahun 2021, yang merupakan periode pemulihan pascapandemi COVID-19. Jumlah pengunjung meningkat dari 15.506 orang pada tahun 2021 menjadi 57.935 orang pada tahun 2022, kemudian kembali naik menjadi 60.433 orang pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya pada 63.822 orang pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 jumlah pengunjung tercatat menurun menjadi 44.443 orang, atau sekitar 30,4% dibandingkan tahun sebelumnya.

Jika ditinjau berdasarkan jenis pengunjung, pelajar masih menjadi segmen terbesar yang mendominasi kunjungan museum. Pengunjung dari jenjang SD memberikan kontribusi paling tinggi sepanjang periode pengamatan, diikuti oleh TK, SLTP, dan SLTA. Hal ini menunjukkan bahwa Museum Negeri Provinsi NTB masih berperan penting sebagai sarana edukasi dan pembelajaran sejarah serta budaya bagi peserta didik melalui kegiatan kunjungan sekolah.

Di sisi lain, jumlah pengunjung umum juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan setelah tahun 2021, meskipun mengalami penurunan pada tahun 2025. Sementara itu, kunjungan wisatawan asing (WTA) menunjukkan tren yang sangat positif, meningkat secara konsisten dari hanya 25 orang pada tahun 2021 menjadi 2.673 orang pada tahun 2025. Tren ini mengindikasikan semakin dikenalnya Museum Negeri Provinsi NTB sebagai salah satu destinasi wisata budaya yang menarik bagi wisatawan mancanegara, sejalan dengan pemulihan sektor pariwisata.

Tabel 2. 93 Pengunjung Museum Negeri Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Jenis Pengunjung	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	TK	3.166	11.660	11.254	9.234	8,514
2	SD	2.817	14.152	15.621	10.150	14,273
3	SLTP	1.443	5.841	5.962	4.817	5,840
4	SLTA	2.273	7.472	6.323	4.291	1,946
5	Mahasiswa	1.062	2.089	1.911	1.483	1,023
6	Peneliti	7	0	75	76	74
7	WTA (Wisatawan Asing)	25	504	1.564	2.517	2,673
8	RTD(Rombongan Tamu Daerah)	41	0	0	0	0
9	RTN (Rombongan Tamu Negara)	0	0	0	0	0
10	Pengunjung Umum	4.672	16.217	17.723	10.195	10,100
JUMLAH		**15.506**	**57.935**	**60.433**	**63.822**	**44,443**

Sumber: Dinas Kebudayaan, 2026

15. Perpustakaan

Perpustakaan sebagai tempat untuk mengakses informasi saat ini terus berbenah untuk dapat memberikan pelayanan dengan baik, melalu pelaksanaan tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan pengumpulan, penyimpanan, serta pelestarian terbitan

Indonesia sebagai khazanah kebudayaan serta menjamin pemeliharaan terbitan Indonesia.

Tabel 2. 94 Jumlah Pengunjung ke Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan Tahun 2022 – 2025

No	Uraian	2022	2023	2024	2025
1	Pengunjung Perpustakaan (orang)	48.100	49.704	59.027	66.233
2	Anggota Perpustakaan (orang)	8.089	7.014	4.677	3.316
	- Umum	587	517	400	463
	- Pelajar	489	638	554	513
	- Mahasiswa	6.863	5.653	3.723	2.211
	- Unverified	150	206	-	129

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2025.

Perkembangan jumlah pengunjung dan anggota perpustakaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2022–2025 menunjukkan dinamika yang menarik antara tingkat kunjungan masyarakat dengan pertumbuhan keanggotaan perpustakaan. Jumlah pengunjung perpustakaan mengalami tren peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2022 tercatat sebanyak 48.100 orang, meningkat menjadi 49.704 orang pada tahun 2023, kemudian naik lebih tinggi menjadi 59.027 orang pada tahun 2024 dan mencapai 66.233 orang pada tahun 2025. Secara keseluruhan, terjadi peningkatan sekitar 37,7 persen selama periode 2022–2025.

Kondisi ini menunjukkan bahwa minat masyarakat untuk memanfaatkan layanan perpustakaan terus meningkat, baik sebagai pusat literasi, ruang belajar, maupun sarana akses informasi dan pengetahuan. Peningkatan ini juga mengindikasikan adanya perbaikan kualitas layanan perpustakaan, penguatan fasilitas, transformasi layanan berbasis digital, serta meningkatnya kegiatan literasi dan edukasi yang melibatkan masyarakat.

Namun demikian, peningkatan jumlah pengunjung tidak diikuti oleh pertumbuhan jumlah anggota perpustakaan. Jumlah anggota justru mengalami penurunan cukup tajam dari 8.089 orang pada tahun 2022 menjadi 7.014 orang pada tahun 2023, turun lagi menjadi 4.677 orang pada tahun 2024, dan hanya tersisa 3.316 orang pada tahun 2025. Penurunan ini mencapai sekitar 59 persen dalam empat tahun terakhir. Secara umum, hal ini menggambarkan bahwa perpustakaan di NTB semakin ramai dikunjungi, tetapi pola pemanfaatan layanan telah berubah. Masyarakat cenderung menggunakan perpustakaan sebagai ruang aktivitas literasi dan akses informasi tanpa harus terdaftar sebagai anggota. Untuk itu, diperlukan penguatan transformasi layanan perpustakaan berbasis digital, inovasi layanan keanggotaan, integrasi perpustakaan dengan institusi pendidikan, serta peningkatan program literasi yang lebih adaptif terhadap kebutuhan generasi muda dan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).

Untuk mendukung minat baca dan peningkatan jumlah pengunjung pada perpustakaan di NTB, telah berkembang secara signifikan komunitas perpustakaan pada tahun 2015 sebanyak 101 Komunitas meningkat menjadi 182 Komunitas pada tahun

2019. Komunitas ini akan terus berkembang dengan adanya pembinaan yang dilakukan oleh baik Perpustakaan Provinsi maupun Perpustakaan Kabupaten/Kota. Ada perkembangan komunitas perpustakaan di NTB sebagaimana disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 95 Jumlah Perpustakaan Komunitas Di NTB Tahun 2021-2025

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	-	-	-	-	11
2	Lombok Tengah	25	25	25	25	37
3	Lombok Timur	24	24	24	24	34
4	Lombok Utara	-	-	-	-	9
5	Sumbawa Barat	-	-	-	-	16
6	Sumbawa	7	7	7	7	11
7	Dompu	10	10	10	10	18
8	Bima	-	-	-	-	10
9	Kota Mataram	-	-	-	-	17
10	Kota Bima	9	9	9	9	5
Jumlah		**75**	**75**	**75**	**75**	**168**

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2025

16. Kearsipan

Kearsipan merupakan suatu proses yang diawali dari penciptaan, penerimaan, pengumpulan, pengaturan, pengendalian, pemeliharaan dan perawatan serta penyimpanan menurut sistem tertentu. Kearsipan memegang peranan penting bagi kelancaran jalannya organisasi, yaitu sebagai sumber informasi dan sebagai pusat ingatan bagi organisasi.

Penyelamatan arsip Pemerintah Provinsi NTB yang tercipta di seluruh Perangkat Daerah dilakukan melalui proses akuisisi. Akuisisi arsip adalah pengumpulan arsip yang dilaksanakan melalui kegiatan penilaian, penataan dan pembuatan daftar arsip statis yang bertujuan untuk penyelamatan dan pelestarian serta pencari jejak informasi bersejarah dalam bentuk memori kolektif kehidupan berbangsa dan bernegara kepada generasi mendatang. Upaya yang telah dilakukan dalam pengelolaan arsip di Provinsi NTB selama kurun tahun 2021 – 2025 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. 96 Upaya Pengelolaan Arsip Tahun 2021 – 2025

No	Uraian	2021	2022	2023	2024	2025
1	Peningkatan Khasanah arsip statis (berkas)	24.994	25.367	25.367	28,698	28,988
2	Jumlah Arsip Perangkat Daerah/Lembaga (berkas)	68.235	57.619	68.235	46,477	46,447
3	Pengembangan Arsip Desa / Kelurahan (Desa)	-	-	-	-	-
4	*Record centre* (Perangkat Daerah)	21	22	24	24	24

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB, 2025.

2.1.3.3 Fokus Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Pembangunan dan pengembangan sektor kelautan dan perikanan di Provinsi NTB menjadi sangat penting ditengah isu kerawanan pangan, stunting serta kemiskinan yang masih tinggi. Wilayah perencanaan Provinsi NTB berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044. Berdasarkan data spasial tersebut, Provinsi NTB memiliki garis pantai sepanjang ± 2.999,54 km dengan perairan laut seluas ± 2.791.492 hektare (59%) yang terdiri dari perairan pesisir sejauh 12 mil laut dari pantai dan pulau-pulau kecil. Adapun daratan Provinsi NTB berdasarkan interpretasi data spasial adalah ± 1.966.639 hektar (41%). Potensi Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang demikian besar memerlukan pengelolaan secara berkelanjutan sehingga dapat meningkatan produksi perikanan yang menjadi sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan, juga untuk menjaga ketersediaan kebutuhan konsumsi sumber protein ikan dan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan.

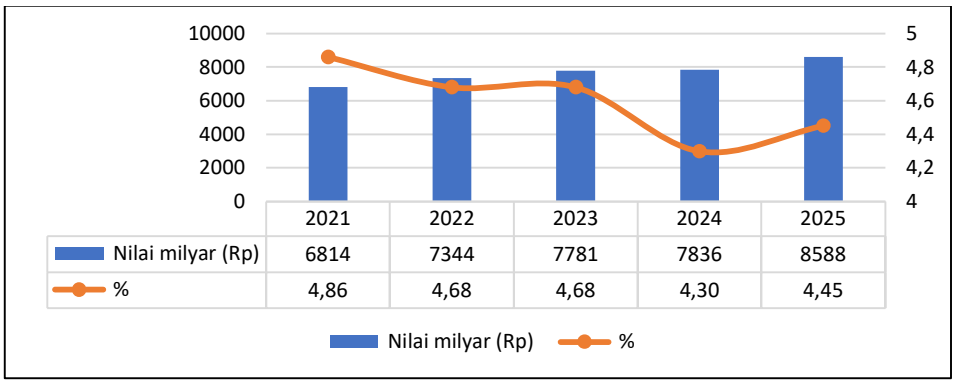
Ketersediaan produksi ikan secara berkelanjutan dengan memperhatikan kelestarian ekosistem sumber dayanya, dilakukan dengan pengelolaan dan pengendalian eksplorasi dan eksploitasinya. Pengelolaan sumberdaya kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil melalui upaya rehabilitasi, konservasi, mitigasi, pengendalian dan pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan perlu dilakukan secara optimal, sehingga dapat memberikan pemanfaatan bagi kesejahteraan masyarakat perikanan secara khusus dan masyarakat secara umum.

Kontribusi sektor perikanan menjadi salah satu variabel pembentuk dari PDRB sektor pertanian. Peningkatan kontribusi PDRB sektor perikanan dilakukan melalui peningkatan produksi perikanan yang merupakan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan melalui strategi peningkatan pengelolaan produksi perikanan budidaya dan pengelolaan produksi perikanan tangkap secara berkelanjutan.

Sub-sektor perikanan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren pertumbuhan nilai yang konsisten, dari Rp6.814 miliar pada 2021 menjadi Rp8.588 miliar pada 2025. Hal ini menandakan adanya peningkatan aktivitas produksi dan kinerja sektor perikanan, baik dari perikanan tangkap maupun budidaya. Namun, di sisi lain, kontribusi terhadap PDRB justru cenderung menurun, dari 4,86% pada 2021 menjadi 4,30% pada 2024, sebelum sedikit pulih ke 4,45% pada 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pertumbuhan subsektor perikanan lebih lambat dibandingkan sektor lain, sehingga peran relatifnya dalam struktur ekonomi daerah mengalami penurunan.

Fenomena ini mengindikasikan bahwa perikanan di NTB masih didominasi oleh sektor hulu dengan nilai tambah yang belum optimal, serta belum sepenuhnya didukung oleh hilirisasi dan industrialisasi. Di sisi lain, sektor-sektor lain kemungkinan tumbuh lebih cepat, sehingga menggeser kontribusi perikanan. Secara keseluruhan, subsektor perikanan tetap penting bagi NTB, terutama dalam penyediaan lapangan kerja dan ketahanan pangan. Namun, untuk meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB, diperlukan penguatan hilirisasi, peningkatan produktivitas, serta pengembangan industri pengolahan berbasis perikanan agar mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi. Adapun gambaran kontribusi sub-sektor Perikanan terhadap PDRB dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 2. 40 Nilai dan Kontribusi Sub-Sektor Perikanan Terhadap PDRB Provinsi NTB Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Nilai milyar (Rp)	6814	7344	7781	7836	8588
%	4,86	4,68	4,68	4,30	4,45

Sumber: BPS Provinsi NTB (Berita Resmi Statistik), 2026 data diolah

Selain capaian PDRB, pada Nilai Tukar Pertanian (NTP) subsektor perikanan di NTB menunjukkan tren menurun secara umum, dari 113,56 pada tahun 2021 menjadi 106,82 pada tahun 2025, meskipun sempat mengalami sedikit pemulihan pada tahun terakhir. Penurunan ini mengindikasikan bahwa daya beli dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan cenderung melemah, karena kenaikan biaya produksi lebih cepat dibandingkan peningkatan harga hasil produksi.

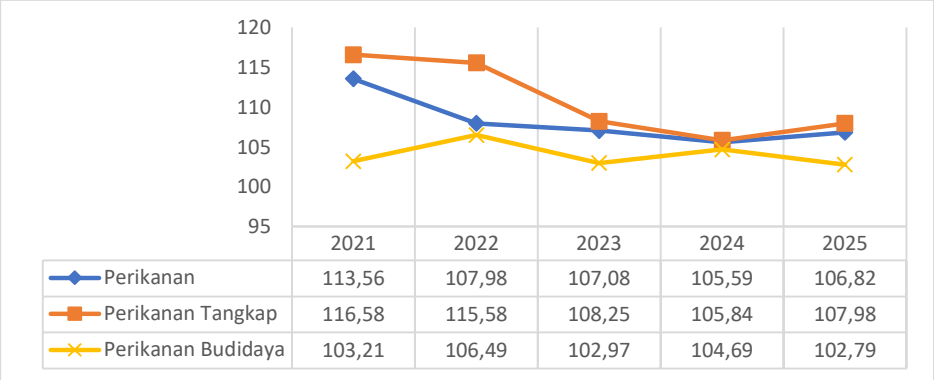
Jika dilihat lebih rinci, perikanan tangkap memiliki NTP tertinggi namun mengalami penurunan paling tajam, dari 116,58 (2021) menjadi 105,84 (2024), sebelum naik kembali ke 107,98 (2025). Sementara itu, perikanan budidaya relatif lebih stabil, meskipun berada pada level yang lebih rendah (sekitar 102–106), yang menunjukkan margin usaha yang lebih terbatas namun cenderung lebih tahan terhadap fluktuasi.

Pada tahun 2024, seluruh sub-sektor mencapai titik terendah, yang kemungkinan dipengaruhi oleh tekanan biaya operasional seperti pakan, BBM, dan faktor eksternal lainnya. Tahun 2025 menunjukkan adanya pemulihan moderat, meskipun belum kembali ke level awal.

Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan perlunya intervensi kebijakan untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan harga jual, seperti subsidi input, efisiensi

rantai pasok, serta penguatan hilirisasi, agar kesejahteraan nelayan dan pembudidaya dapat meningkat secara berkelanjutan. Perkembangan capaian Nilai Tukar Petani Sub-sektor Perikanan tahun 2021 – 2025 disajikan pada gambar di bawah ini.

Grafik 2. 41 Perkembangan Nilai Tukar Pertanian Sub-Sektor Perikanan Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Perikanan	113,56	107,98	107,08	105,59	106,82
Perikanan Tangkap	116,58	115,58	108,25	105,84	107,98
Perikanan Budidaya	103,21	106,49	102,97	104,69	102,79

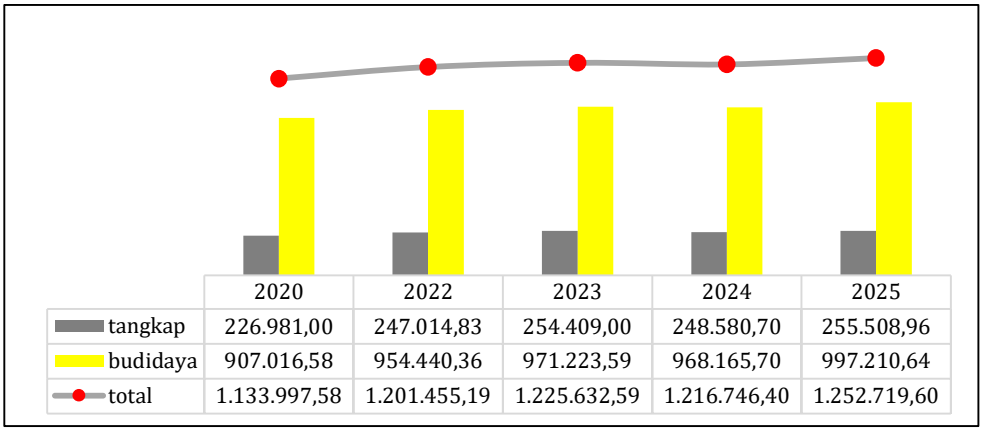
Sumber: BPS Provinsi NTB (Berita Resmi Statistik), 2026 data diolah

Selanjutnya pada pada capaian produksi perikanan di NTB menunjukkan tren meningkat secara umum selama periode 2021–2025, dengan total produksi naik dari sekitar 1,19 juta ton pada 2021 menjadi 1,25 juta ton pada 2025. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024, tren kembali meningkat pada 2025 dan mencapai level tertinggi selama periode tersebut. Dari struktur produksinya, perikanan budidaya menjadi kontributor utama dengan porsi yang sangat dominan (sekitar 75–80% dari total produksi). Produksi budidaya meningkat stabil dari 946 ribu ton (2021) menjadi hampir 1 juta ton (2025), menunjukkan bahwa sektor ini menjadi penggerak utama pertumbuhan perikanan di NTB.

Sementara itu, perikanan tangkap memiliki kontribusi yang lebih kecil dan cenderung fluktuatif. Produksi tangkap meningkat dari 2021 hingga 2023, kemudian menurun pada 2024, dan kembali naik pada 2025. Pola ini mengindikasikan ketergantungan pada faktor alam, musim, serta keterbatasan sumber daya perikanan tangkap. Penurunan total produksi pada tahun 2024 mencerminkan adanya tekanan, baik dari sisi produksi tangkap maupun perlambatan pertumbuhan budidaya. Namun, pemulihan pada 2025 menunjukkan adanya perbaikan kondisi produksi dan efektivitas intervensi kebijakan.

Secara keseluruhan, struktur ini menegaskan bahwa transformasi sektor perikanan NTB mengarah pada penguatan budidaya sebagai sektor yang lebih stabil dan berkelanjutan. Ke depan, peningkatan produktivitas, efisiensi budidaya, serta penguatan hilirisasi menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan dan meningkatkan nilai tambah sektor perikanan.

Grafik 2. 42 Perkembangan Capaian Produksi Perikanan Tahun 2021 – 2025



	2020	2022	2023	2024	2025
tangkap	226.981,00	247.014,83	254.409,00	248.580,70	255.508,96
budidaya	907.016,58	954.440,36	971.223,59	968.165,70	997.210,64
total	1.133.997,58	1.201.455,19	1.225.632,59	1.216.746,40	1.252.719,60

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2026

Produksi garam menjadikan NTB sebagai daerah terbesar ke-4 di Indonesia setelah Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan. Hal ini menjadi gambaran besarnya peluang sekaligus tantangan bagi garam NTB untuk dapat berkiprah di kancah nasional, baik dari aspek kuantitas maupun kualitasnya. Jangka lima tahun terakhir produksi garam di NTB menunjukkan pola fluktuatif namun cenderung meningkat dalam jangka menengah. Pada tahun 2022 produksi sempat turun signifikan menjadi sekitar 86 ribu ton akibat cuaca ekstrem dan hujan berkepanjangan yang menghambat proses penguapan air laut . Hal ini menegaskan bahwa produksi garam di NTB sangat bergantung pada kondisi iklim.

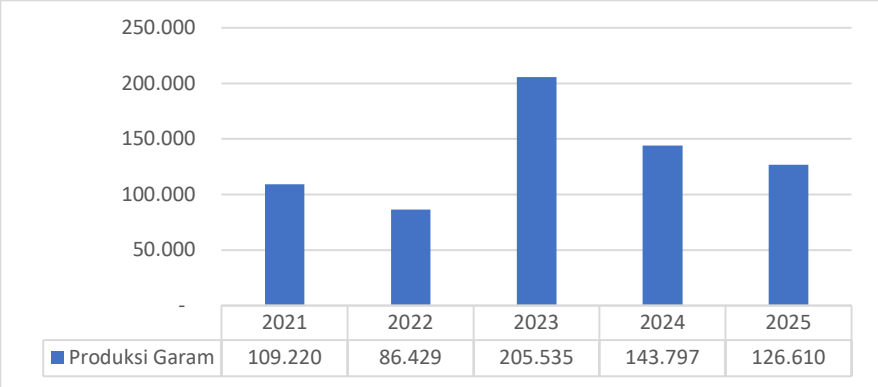
Selanjutnya, pada tahun 2023 terjadi lonjakan produksi yang sangat tinggi hingga sekitar 205 ribu ton, yang menjadi titik tertinggi dalam periode tersebut. Kenaikan ini didorong oleh kondisi cuaca yang lebih mendukung serta optimalisasi lahan produksi, terutama di wilayah sentra seperti Kabupaten Bima yang menjadi kontributor terbesar. Namun, setelah puncak tersebut, produksi kembali mengalami penurunan pada 2024–2025, meskipun tetap berada pada level lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun awal. Secara umum, tren jangka menengah menunjukkan arah peningkatan, dengan proyeksi produksi mencapai sekitar 180 ribu ton pada 2025 .

Dari sisi struktur, produksi garam NTB masih didominasi oleh tambak rakyat dengan metode tradisional, sehingga rentan terhadap perubahan cuaca dan memiliki keterbatasan dalam kualitas. Selain itu, terdapat tantangan pada aspek hilirisasi dan pemasaran, dimana sebagian besar produksi belum terserap optimal oleh industri dan masih dijual dalam bentuk bahan mentah .

Secara keseluruhan, produksi garam NTB memiliki potensi besar namun belum stabil, dengan karakteristik Sangat dipengaruhi faktor iklim, Terpusat di wilayah tertentu (terutama Bima) dan Masih didominasi produksi hulu (nilai tambah rendah). Ke depan, peningkatan stabilitas dan kontribusi ekonomi sektor ini sangat bergantung pada penerapan teknologi produksi, penguatan hilirisasi, serta perbaikan rantai pasar agar

produksi tidak hanya tinggi secara kuantitas, tetapi juga bernilai tambah tinggi. Perkembangan jumlah produksi garam di NTB dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2. 43 Perkembangan Produksi Garam (Ton) NTB Tahun 2021-2025



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, 2026

2. Pariwisata

Sektor pariwisata NTB memiliki potensi yang besar banyaknya destinasi dan keragaman potensi wisata kelas dunia, mulai dari Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, Kawasan Teluk Saleh, Pulau Moyo dan Tambora (Samota), Geopark Gunung Rinjani, Pantai Senggigi, pesona gili-gili kekayaan tradisi, seni budaya, sejarah, dan industri kerajinan rakyat yang unik dan potensial.

Sektor pariwisata Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode tahun 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang sangat positif dan terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini tercermin dari meningkatnya jumlah tamu menginap pada hotel berbintang maupun non berbintang yang menjadi salah satu indikator utama pertumbuhan aktivitas pariwisata daerah. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa pariwisata NTB semakin pulih dan berkembang setelah sebelumnya mengalami tekanan akibat pandemi global yang berdampak besar terhadap mobilitas wisatawan dan aktivitas industri pariwisata.

Pada tahun 2021 jumlah tamu menginap tercatat sebanyak 971.839 orang, kemudian meningkat menjadi 1.376.295 orang pada tahun 2022. Tren pertumbuhan tersebut terus berlanjut pada tahun 2023 dengan jumlah tamu mencapai 1.754.966 orang, meningkat lagi menjadi 2.132.422 orang pada tahun 2024, dan pada tahun 2025 mencapai 2.664.475 orang. Kenaikan jumlah tamu menginap yang sangat signifikan tersebut menunjukkan bahwa daya tarik destinasi wisata di NTB semakin kuat serta didukung oleh meningkatnya aktivitas ekonomi, promosi pariwisata, dan membaiknya konektivitas transportasi.

Pertumbuhan jumlah tamu menginap terjadi baik pada hotel berbintang maupun non berbintang. Pada hotel berbintang, jumlah tamu meningkat dari 446.661 orang pada tahun 2021 menjadi 1.315.445 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan meningkatnya permintaan wisatawan terhadap fasilitas akomodasi yang memiliki

kualitas pelayanan lebih baik dan lebih modern. Peningkatan tersebut juga mencerminkan berkembangnya sektor jasa pariwisata dan meningkatnya kepercayaan wisatawan terhadap kualitas layanan hotel di NTB.

Dilihat dari asal wisatawan hotel berbintang, wisatawan nusantara masih menjadi penyumbang utama jumlah tamu menginap. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan nusantara yang menginap di hotel berbintang tercatat sebanyak 439.092 orang dan meningkat secara bertahap menjadi 806.274 orang pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pasar wisata domestik masih menjadi kekuatan utama dalam menopang pertumbuhan sektor pariwisata NTB.

Di sisi lain, wisatawan mancanegara pada hotel berbintang mengalami pertumbuhan yang sangat tinggi. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan asing masih sangat rendah yaitu hanya 7.569 orang, namun meningkat menjadi 75.227 orang pada tahun 2022 dan terus melonjak hingga mencapai 509.171 orang pada tahun 2025. Peningkatan yang sangat signifikan ini menunjukkan bahwa NTB semakin dikenal sebagai destinasi wisata internasional. Berkembangnya event internasional, promosi pariwisata global, pengembangan kawasan wisata unggulan, serta meningkatnya aksesibilitas transportasi menjadi faktor penting yang mendorong peningkatan kunjungan wisatawan asing.

Sementara itu, hotel non berbintang juga mengalami pertumbuhan yang cukup besar. Jumlah tamu menginap pada hotel non berbintang meningkat dari 525.178 orang pada tahun 2021 menjadi 1.349.030 orang pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor akomodasi non berbintang seperti homestay, losmen, guest house, dan penginapan rakyat masih memiliki peran penting dalam mendukung aktivitas pariwisata daerah. Pertumbuhan hotel non berbintang juga mengindikasikan berkembangnya pariwisata berbasis masyarakat yang memberikan dampak ekonomi secara langsung kepada masyarakat lokal.

Wisatawan nusantara pada hotel non berbintang cenderung mengalami peningkatan secara bertahap dari 520.722 orang pada tahun 2021 menjadi 657.013 orang pada tahun 2025, meskipun pada tahun terakhir pertumbuhannya relatif melambat. Hal ini dapat menunjukkan adanya perubahan preferensi sebagian wisatawan domestik yang mulai beralih ke hotel berbintang seiring meningkatnya daya beli masyarakat dan kualitas layanan akomodasi.

Berbeda dengan wisatawan nusantara, wisatawan mancanegara pada hotel non berbintang mengalami lonjakan yang sangat tinggi. Pada tahun 2021 jumlah wisatawan asing tercatat hanya 4.456 orang, kemudian meningkat drastis menjadi 692.017 orang pada tahun 2025. Bahkan jumlah wisatawan asing pada hotel non berbintang pada tahun 2025 lebih tinggi dibanding hotel berbintang. Kondisi ini menunjukkan bahwa wisatawan mancanegara cenderung mulai memilih penginapan yang lebih fleksibel, ekonomis, dekat dengan destinasi wisata alam, serta menawarkan pengalaman lokal yang lebih autentik. Fenomena ini juga menggambarkan berkembangnya tren wisata alternatif dan wisata berbasis komunitas di NTB.

Peningkatan jumlah tamu menginap selama periode 2021–2025 memberikan dampak positif terhadap perekonomian daerah. Berkembangnya sektor pariwisata mendorong peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pada sektor transportasi, perdagangan, kuliner, ekonomi kreatif, jasa hiburan, dan usaha mikro kecil menengah. Selain itu, meningkatnya kunjungan wisatawan juga berdampak terhadap peningkatan pendapatan pelaku usaha pariwisata dan membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata.

Namun demikian, pertumbuhan sektor pariwisata tersebut juga perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur, pelayanan, dan tata kelola destinasi wisata. Peningkatan jumlah wisatawan memerlukan dukungan konektivitas transportasi yang memadai, pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, serta penguatan promosi dan digitalisasi layanan wisata. Selain itu, pengembangan sektor pariwisata juga perlu memperhatikan aspek keberlanjutan agar pertumbuhan yang terjadi tidak menimbulkan tekanan terhadap lingkungan dan budaya lokal.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah tamu menginap di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2021–2025 menunjukkan bahwa sektor pariwisata menjadi salah satu sektor strategis yang terus tumbuh dan memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian daerah. Meningkatnya wisatawan domestik dan mancanegara menjadi indikasi bahwa NTB semakin memiliki daya saing sebagai destinasi wisata unggulan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 2. 97 Jumlah Tamu Menginap Pada Hotel Berbintang dan Non Berbintang Tahun 2021-2025

Indikator	Tahun				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jumlah Tamu Menginap Berbintang dan Non Berbintang (orang)	971.839	1.376.295	1.754.966	2.132.422	2.664.475
Berbintang	446.661	754.053	935.194	1.113.211	1.315.445
- Dalam Negeri (Nusantara)	439.092	678.826	720.000	763.764	806.274
- Luar Negeri (Mancanegara)	7.569	75.227	215.194	349.447	509.171
Non Berbintang	525.178	622.242	819.772	1.019.211	1.349.030
- Dalam Negeri (Nusantara)	520.722	570.930	597.021	660.506	657.013
- Luar Negeri (Mancanegara)	4.456	51.312	222.751	358.705	692.017

Sumber: BPS NTB, 2026. (diolah)

3. Pertanian

Melihat geografis NTB serta sebagian besar mata pencaharian utama masyarakat NTB sebagai petani, sudah barang tentu hal tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang sangat strategis dalam struktur perekonomian NTB. Seiring dengan berkembangnya perekonomian yang mencanangkan masa depan NTB menuju era industrialisasi dan daerah pariwisata dunia tentunya sector pertanian memiliki peran penting dalam mewujudkannya.

Sektor pertanian NTB terdiri atas tiga sub sektor yaitu sub sektor tanaman pangan, tanaman hortikultura dan tanaman perkebunan. Komoditi strategis tanaman pangan yaitu padi, jagung dan kedelai yang memiliki peranan pokok dalam memenuhi kebutuhan pangan, pakan dan industri dalam negeri setiap tahunnya, yang cenderung meningkat seiring dengan pertambahan jumlah

penduduk dan berkembangnya industri pangan dan pakan. Sehingga dari sisi Ketahanan Pangan Nasional fungsinya menjadi sangat penting dan strategis. Pemenuhan kebutuhan pangan bagi seluruh penduduk menjadi agenda utama kebijakan pangan bagi pemerintah suatu negara. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk yang besar menghadapi tantangan yang sangat kompleks dalam memenuhi kebutuhan pangan penduduknya, sehingga masalah ketahanan pangan menjadi isu sentral dalam pembangunan dan menjadi fokus dalam pembangunan pertanian. Seiring bertambahnya jumlah penduduk, bertambah pula kebutuhan pangan yang harus disediakan. Oleh karena itu, pencapaian produksi pertanian yang terus diikuti dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi tantangan bagi pemerintah dalam rangka peningkatan produksi pertanian.

Dalam rangka mempertahankan swasembada pangan diperlukan suatu langkah terobosan untuk meningkatkan luas tambah tanam (LTT) maupun produkstivitas (hasil per hektar) diwilayah yang belum optimum indeks pertanamannya, serta perlu dilakukan rekayasa intensifikasi bagi wilayah yang mengalami pelandaian bahkan penurunan produktivitas pertanamannya. Oleh karena itu upaya optimalisasi lahan melalui kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) maupun Peningkatan Indeks Pertanaman (PIP), sistem tanam tumpang sari diharapkan dapat meingkatkan luas areal tanam serta penggunaan varietas unggul, pemupukan berimbang spesifik lokasi dan komoditas, budidaya sesuai anjuran diharapkan dapat berkontribusi positif terhadap produktivitas tanaman. Penggunaan alat dan mesin pertanian serta optimalisasi irigasi dalam rangka efektif dan efisiensi budidaya yang dilakukan petani diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan para petani.

Pada produksi tanaman pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup dinamis dengan komoditas utama berupa padi, jagung, dan kedelai. Secara umum, padi dan jagung masih menjadi komoditas unggulan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap ketahanan pangan daerah, sedangkan produksi kedelai masih relatif rendah dan fluktuatif.

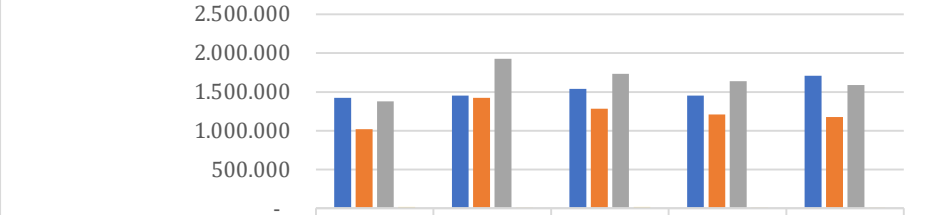
Produksi padi menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2021 produksi padi tercatat sebesar 1.419.560 ton GKG dan meningkat menjadi 1.452.945 ton pada tahun 2022 serta 1.538.537 ton pada tahun 2023. Pada tahun 2024 produksi sempat menurun menjadi 1.453.408 ton, namun kembali meningkat signifikan pada tahun 2025 menjadi 1.708.619 ton. Kenaikan produksi padi tersebut menunjukkan bahwa sektor pertanian pangan NTB masih memiliki kapasitas produksi yang kuat dan terus berkembang, didukung oleh peningkatan produktivitas, pengelolaan lahan, serta dukungan program ketahanan pangan.

Produksi jagung juga memberikan kontribusi besar terhadap sektor tanaman pangan NTB. Berdasarkan kadar air 14 persen, produksi jagung meningkat dari 1.019.225 ton pada tahun 2021 menjadi 1.421.922 ton pada tahun 2022. Namun setelah itu produksi mengalami penurunan menjadi 1.281.035 ton pada tahun 2023, 1.209.784 ton pada tahun 2024, dan kembali turun menjadi 1.175.152 ton pada tahun 2025. Pola yang sama juga terlihat pada produksi jagung kadar air 28 persen yang meningkat tajam pada tahun 2022 hingga mencapai 1.923.461 ton, kemudian menurun secara bertahap menjadi 1.589.650 ton pada tahun 2025. Penurunan produksi jagung dalam beberapa tahun terakhir dipengaruhi oleh kondisi iklim, perubahan luas tanam, produktivitas lahan, serta fluktuasi harga komoditas.

Sementara itu, produksi kedelai masih tergolong rendah dan berfluktuasi. Pada tahun 2021 produksi kedelai tercatat sebesar 19.393 ton, kemudian turun drastis menjadi 9.713 ton pada tahun 2022. Produksi kembali meningkat menjadi 20.011 ton pada tahun 2023, namun kembali menurun menjadi 8.770 ton pada tahun 2024 dan 8.272 ton pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengembangan kedelai di NTB masih menghadapi tantangan, baik dari sisi produktivitas, minat petani, maupun daya saing dibandingkan komoditas pangan lainnya.

Secara keseluruhan, sektor tanaman pangan Provinsi Nusa Tenggara Barat masih didominasi oleh komoditas padi dan jagung yang berperan penting dalam mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Namun demikian, diperlukan upaya peningkatan produktivitas pertanian melalui penguatan infrastruktur irigasi, pemanfaatan teknologi pertanian, adaptasi terhadap perubahan iklim, serta penguatan dukungan sarana dan prasarana pertanian agar produksi tanaman pangan dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Selain itu, pengembangan komoditas kedelai perlu menjadi perhatian agar ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah dapat dikurangi. Adapun produksi komoditas tanaman pangan di Provinsi NTB Tahun 2021-2025 mengalami perkembangan sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Grafik 2. 44 Produksi Tanaman Pangan Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Padi (ton GKG)	1.419.560	1.452.945	1.538.537	1.453.408	1.708.619
Jagung (ton JPK KA 14%)	1.019.225	1.421.922	1.281.035	1.209.784	1.175.152
Jagung (ton JPK KA 28%)	1.378.725	1.923.461	1.732.880	1.636.497	1.589.650
Kedelai (ton)	19.393	9.713	20.011	8.770	8.272

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTB, 2026

Selanjutnya pada produksi tanaman hortikultura di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang cukup fluktuatif pada komoditas utama seperti cabai, bawang merah, dan manggis. Kondisi ini dipengaruhi oleh faktor cuaca, luas panen, produktivitas lahan, serta dinamika permintaan pasar dan harga komoditas hortikultura.

Produksi cabai menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Pada tahun 2021 produksi cabai tercatat sebesar 78.625 ton dan sedikit menurun menjadi 71.738 ton pada tahun 2022. Namun pada tahun 2023 produksi kembali meningkat menjadi 83.908 ton dan mengalami lonjakan cukup signifikan pada tahun 2024 menjadi 110.303 ton. Pada tahun 2025 produksi sedikit menurun menjadi 104.845 ton, namun masih lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa komoditas cabai masih memiliki potensi pengembangan yang cukup baik di NTB dan menjadi salah satu komoditas hortikultura strategis daerah.

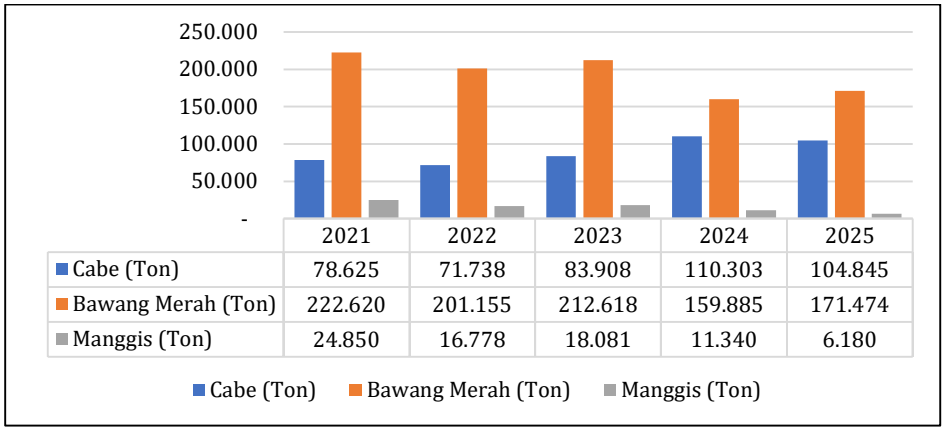
Sementara itu, produksi bawang merah merupakan komoditas hortikultura dengan volume produksi terbesar di NTB. Pada tahun 2021 produksi bawang merah mencapai 222.620 ton, kemudian menurun menjadi 201.155 ton pada tahun 2022. Produksi kembali meningkat menjadi 212.618 ton pada tahun 2023, namun mengalami penurunan cukup tajam pada tahun 2024 menjadi 159.885 ton sebelum kembali meningkat menjadi 171.474 ton pada tahun 2025. Fluktuasi produksi bawang merah dapat dipengaruhi oleh perubahan iklim, serangan hama penyakit, ketersediaan air, dan fluktuasi harga yang memengaruhi minat tanam petani.

Di sisi lain, produksi manggis menunjukkan tren penurunan selama periode 2021–2025. Produksi manggis yang pada tahun 2021 mencapai 24.850 ton turun menjadi 16.778 ton pada tahun 2022 dan sedikit meningkat menjadi 18.081 ton pada tahun 2023. Namun pada tahun 2024 dan 2025 produksi kembali menurun cukup signifikan menjadi 11.340 ton dan 6.180 ton. Penurunan ini mengindikasikan adanya tantangan dalam pengembangan komoditas buah-buahan, baik dari sisi produktivitas tanaman, luas panen, maupun faktor cuaca dan pemeliharaan tanaman.

Secara keseluruhan, sektor hortikultura di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih memiliki potensi besar terutama pada komoditas cabai dan bawang merah yang menjadi

komoditas unggulan daerah. Namun demikian, fluktuasi produksi menunjukkan perlunya penguatan sistem budidaya, pengendalian hama dan penyakit, peningkatan kualitas sarana produksi pertanian, serta pengembangan teknologi pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim agar produksi hortikultura dapat lebih stabil dan berkelanjutan. Selain itu, pengembangan komoditas buah-buahan seperti manggis perlu mendapatkan perhatian melalui peremajaan tanaman dan peningkatan produktivitas untuk menjaga keberlanjutan produksi di masa mendatang. Adapun perkembangan produksi tanaman hortikultura sebagai mana tabel berikut:

Grafik 2. 45 Produksi Tanaman Hortikultura Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Cabe (Ton)	78.625	71.738	83.908	110.303	104.845
Bawang Merah (Ton)	222.620	201.155	212.618	159.885	171.474
Manggis (Ton)	24.850	16.778	18.081	11.340	6.180

Sumber: Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov. NTB, 2026

Selain komoditi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tanaman Perkebunan dinilai menjadi kekuatan dan penopang ekonomi nasional, hal ini terbukti dari tahun ke tahun selalu berkontribusi dalam meningkatkan besaran PDB; nilai investasi/ penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri yang tinggi; menyumbang surplus neraca perdagangan internasional; sumber devisa negara; berkontribusi dalam peningkatan penerimaan negara melalui cukai tembakau, pajak ekspor dan bea keluar; pungutan ekspor bagi produk minyak sawit, penyediaan bahan pangan dan bahan baku industry. Selain peran ekonomi, perkebunan juga memiliki peran ekologis dan sosial budaya. Peran inklusiftas ekologis diasumsikan perkebunan sebagai salah satu paru-paru ekosistem yang menyerap dan mereduksi karbondioksida sekaligus mengeluarkan oksigen di atmosfer bumi, penyedia bahan bakar nabati dan bioenergy yang bersifat ramah lingkungan yang terbarukan, penurun emisi gas rumah kaca serta mendukung pelestarian SDA dan lingkungan hidup sedangkan peran sosial perkebunan pembuka lapangan kerja dan penyerap tenaga kerja yang berkelanjutan sesuai amanat Undang-Undang No. 39/2014 tentang Perkebunan.

Produksi tanaman perkebunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang bervariasi pada masing-masing komoditas unggulan. Secara umum, komoditas tembakau masih menjadi penyumbang

produksi terbesar dan menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, sementara beberapa komoditas lainnya cenderung stabil atau mengalami penurunan.

Produksi kopi di NTB relatif stabil selama lima tahun terakhir. Pada tahun 2021 produksi kopi tercatat sebesar 6.328 ton dan sedikit meningkat menjadi 6.483 ton pada tahun 2022. Produksi kemudian relatif stagnan pada tahun 2023 dan 2024 sebelum menurun menjadi 6.070 ton pada tahun 2025. Stabilnya produksi kopi menunjukkan bahwa komoditas ini masih memiliki potensi yang cukup baik, meskipun produktivitas dan pengembangan hilirisasi masih perlu diperkuat untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk kopi NTB.

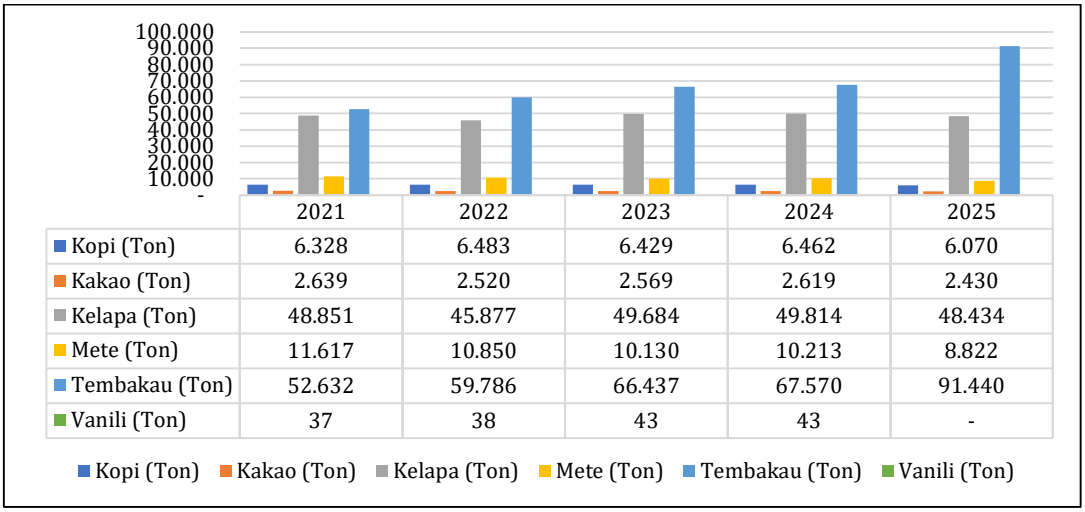
Produksi kakao juga menunjukkan kondisi yang relatif stabil. Produksi kakao tercatat sebesar 2.639 ton pada tahun 2021, sedikit menurun pada tahun 2022 menjadi 2.520 ton, kemudian kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024 sebelum turun menjadi 2.430 ton pada tahun 2025. Fluktuasi produksi kakao dapat dipengaruhi oleh kondisi tanaman, serangan hama penyakit, dan produktivitas kebun rakyat yang masih perlu ditingkatkan. Komoditas kelapa menjadi salah satu tanaman perkebunan dengan produksi cukup besar di NTB. Produksi kelapa berada pada kisaran 45–49 ribu ton selama periode 2021–2025. Setelah menurun pada tahun 2022 menjadi 45.877 ton, produksi kembali meningkat pada tahun 2023 dan 2024 hingga mencapai 49.814 ton, kemudian sedikit menurun menjadi 48.434 ton pada tahun 2025. Stabilnya produksi kelapa menunjukkan bahwa komoditas ini masih menjadi salah satu sumber penghidupan masyarakat perkebunan di NTB.

Sementara itu, produksi mete menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten. Pada tahun 2021 produksi mete tercatat sebesar 11.617 ton dan terus menurun hingga menjadi 8.822 ton pada tahun 2025. Penurunan ini dapat dipengaruhi oleh faktor usia tanaman, produktivitas kebun yang menurun, perubahan iklim, serta berkurangnya minat pengembangan tanaman mete dibandingkan komoditas lain yang lebih menguntungkan. Berbeda dengan komoditas lainnya, produksi tembakau menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan selama periode 2021–2025. Produksi tembakau meningkat dari 52.632 ton pada tahun 2021 menjadi 91.440 ton pada tahun 2025. Kenaikan ini menunjukkan bahwa tembakau masih menjadi komoditas perkebunan unggulan dan strategis di NTB, terutama karena tingginya permintaan pasar dan dukungan aktivitas industri hasil tembakau. Pertumbuhan produksi tembakau juga memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian masyarakat dan sektor pertanian daerah.

Adapun produksi vanili masih relatif kecil namun menunjukkan peningkatan dari 37 ton pada tahun 2021 menjadi 43 ton pada tahun 2023 dan 2024. Namun pada tahun 2025 data produksi belum tersedia. Meskipun volumenya kecil, vanili memiliki potensi nilai ekonomi tinggi sehingga masih berpeluang dikembangkan sebagai komoditas perkebunan bernilai ekspor. Secara keseluruhan, sektor perkebunan Provinsi Nusa Tenggara Barat masih memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, terutama melalui komoditas tembakau, kelapa, kopi, dan mete. Namun demikian,

beberapa komoditas mengalami penurunan produksi sehingga diperlukan upaya peningkatan produktivitas, peremajaan tanaman, penguatan hilirisasi, serta pengembangan teknologi budidaya yang adaptif terhadap perubahan iklim agar sektor perkebunan dapat tumbuh lebih berkelanjutan dan memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi masyarakat. Adapun produksi komoditi tanaman perkebunan Provinsi NTB tahun 2021 -2025 sebagaimana tersaji pada tabel berikut.

Grafik 2. 46 Produksi Komoditi Tanaman Perkebunan Tahun 2021 -2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Kopi (Ton)	6.328	6.483	6.429	6.462	6.070
Kakao (Ton)	2.639	2.520	2.569	2.619	2.430
Kelapa (Ton)	48.851	45.877	49.684	49.814	48.434
Mete (Ton)	11.617	10.850	10.130	10.213	8.822
Tembakau (Ton)	52.632	59.786	66.437	67.570	91.440
Vanili (Ton)	37	38	43	43	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi NTB, 2025.

4. Kehutanan

Dalam rangka mendukung pengelolaan hutan, diperlukan upaya untuk menjaga kelestarian kawasan hutan dan lahan melalui perencanaan pengelolaan hutan yang dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Panjang (RPHJP) dan Rencana Pengelolaan Hutan Jangka Pendek (RPHJPd). Provinsi NTB telah melaksanakan pembinaan dan pengendalian RPHJP/RPHJPd terhadap 8 unit KPH.

Di Provinsi NTB sendiri juga terdapat Kawasan Hutan Dengan Tujuan Khusus yang selanjutnya disingkat KHDTK adalah kawasan hutan yang secara khusus diperuntukkan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan kehutanan, pendidikan dan pelatihan kehutanan serta religi dan budaya. Di Tahun 2022, Provinsi NTB telah melaksanakan pembinaan dan pengendalian pengelolaan KHDTK seluas 1.231,61 ha dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. 98 Data dan Informasi Wilayah Usaha Perizinan Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung Pada Balai KPH (L/P)

No	Pengelola	Nomor SK	Kegiatan	Luas (Ha)
1	Universitas Mataram	SK.392/Menhut-II/2014	Hutan Pendidikan	225.7
2	Universitas Muhammadiyah Mataram	SK.405/MenLHK/Setjen/PLA.0/6/2016	Pendidikan dan Pelatihan	93.55

No	Pengelola	Nomor SK	Kegiatan	Luas (Ha)
3	KHDTK Rarung	SK.4762/MenLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2016	Peneltian, Pengembangan, Pendidikan, Pelatihan, Religi, dan Budaya	325.87
4	Universitas Teknologi Sumbawa	SK.89/MenLHK/Setjen/PLA.0/2/2018	Pendidikan dan Pelatihan	510
5	Yayasan Dea Malela	SK.286/MenLHK/Setjen/PLA.0/6/2018	Religi dan Budaya	76.49
6	Universitas Pendidikan Mandalika (UNDIKMA)*			217.76
TOTAL				**1,449.37**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi NTB, 2025

Berbagai upaya lainnya yang dilakukan oleh Provinsi NTB dalam rangka mempertahankan kelestarian kawasan hutan ialah monitoting ijin penggunaan kawasan hutan, penyelesaian permasalahan tenurial, dan melakukan verifikasi lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan. Hutan juga dapat menjadi manfaat bagi masyarakat sekitar, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya. Di Provinsi NTB terdapat 29 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) yang dimonitoring oleh Dinas LHK NTB, antara lain 7 Ijin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam (IUPJLWA) seluas 1.685,86 hektar, 5 Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) seluas 104.216 ha, dan 17 Kerjasama Pemanfaatan Hutan seluas 4.813,11 hektar. Upaya lainnya terkait pengolahan hasil hutan telah dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengelolaan hutan melalui Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor kehutanan, Monitoring Produksi Hasil Hutan Kayu, Monitoring Produksi Hasil Hutan Kayu, dan Monitoring Tenaga Teknis Pengelolaan Hutan (GanisPH).

Seluruh rangkaian upaya tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan capaian Indeks Kualitas Lahan (IKL), yang mencerminkan kondisi tutupan lahan baik berupa hutan maupun vegetasi non-hutan. IKL menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan pengelolaan hutan dan lahan, khususnya dalam menekan laju deforestasi, mengendalikan degradasi lahan, serta mendorong rehabilitasi hutan dan lahan secara berkelanjutan. Dengan demikian, semakin optimal pengelolaan perizinan, pengawasan pemanfaatan hutan, serta penyelesaian konflik tenurial, maka semakin besar kontribusinya terhadap peningkatan kualitas tutupan lahan.

Pada tahun 2025, Indeks Kualitas Lahan Provinsi NTB tercatat mencapai 77,36 poin, yang dihitung berdasarkan 22 kelas tutupan lahan. Capaian ini menunjukkan bahwa berbagai intervensi kebijakan dan program pengelolaan hutan yang telah dilaksanakan mulai memberikan dampak positif terhadap kualitas lingkungan, meskipun tetap diperlukan penguatan upaya secara konsisten untuk menjaga keberlanjutan fungsi ekologis lahan di masa mendatang.

Tabel 2. 99 Kondisi Tutupan Lahan Berdasarkan 22 Kelas Tutupan Lahan

No	Kelas Tutupan Lahan	Luasan (ha)
1	Hutan lahan kering primer	296.168,68
2	Hutan mangrove primer	1.465,57
3	Hutan rawa primer	-
4	Hutan lahan kering sekunder / bekas tebangan	545.530,86
5	Hutan mangrove sekunder / bekas tebangan	9.338,14
6	Hutan rawa sekunder / bekas tebangan	-
7	Hutan tanaman	12.771,15
8	Belukar Rawa	19,61
9	Perkebunan / Kebun	1.586,84
10	Belukar	127.870,01
11	Pertanian lahan kering campur semak / kebun campur	157.521,63
12	Pertanian lahan kering	382.672,19
13	Rawa	-
14	Sawah	267.165,49
15	Savanna / Padang rumput	87.335,89
16	Transmigrasi	-
17	Bandara / Pelabuhan	828,75
18	Tubuh air	8.389,36
19	Tambak	14.730,69
20	Permukiman / Lahan terbangun	41.745,65
21	Lahan terbuka	9.812,31
22	Pertambangan	2.636,11

Upaya untuk menurunkan lahan kritis di Provinsi NTB telah dilaksanakan melalui kegiatan penanaman di luar dan dalam kawasan hutan dengan reboisasi dan penghijauan. Reboisasi atau rehabilitasi hutan bertujuan untuk menghutankan kembali kawasan hutan yang kritis yang dilaksanakan bersama masyarakat secara partisipatif. Sedangkan penghijauan adalah penanaman pada lahan kosong diluar kawasan hutan. Pada tahun 2023, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 6.489,27 ha melalui dana APBN dan APBD, serta pihak lainnya. Berikut rincian luas areal kegiatan RHL tahun 2023 dengan total luasan 6.489,27 ha disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 100 Rincian Luas Areal Kegiatan RHL Tahun 2022

No	Jenis Kegiatan RHL	Luasan
1	Pembuatan tanaman produktif sekitar desa	402,73
2	Rehabilitasi di luar kawasan hutan sumber dana APBD	4.541,44
3	Rehabilitas dari sumber dana APBN KLHK	6.200
4	Rehabilitasi dari Pemegang IPPKH	3.116
5	Rehabilitasi dari perorangan, organisasi, pelajar/mahasiswa, BUMN, swasta, dan hibah	20,99
6	Pemulihan ekosistem oleh UPT KLHK (TN Gunung Rinjani, TN Tambora, BKSDA NTB) dan UPTD Dinas LHK NTB (Tahura Nuraksa)	232
TOTAL		**14.550,16**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutan Provinsi NTB, 2022

5. Energi Dan Sumber Daya Mineral

Urusan Pemerintahan Pilihan Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, pembentukan Dinas ESDM Provinsi NTB dihajatkan untuk menjawab isu strategis di sektor ESDM yang memerlukan penanganan lebih intensif untuk mengurangi angka kemiskinan yang masih relatif tinggi, serta masih adanya kesenjangan pembangunan infrastruktur antar wilayah di berbagai sektor. Dinas ESDM yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang ESDM yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah kewenangan Pemerintah Provinsi dalam urusan pemerintahan bidang ESDM terdiri dari kewenangan sub urusan bidang mineral dan batubara, sub urusan bidang geologi, sub urusan bidang energi baru terbarukan dan sub urusan bidang ketenagalistrikan. Sedangkan sub urusan bidang minyak dan gas bumi seluruhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Dalam perkembangannya hingga akhir tahun 2022 beberapa peraturan dan perundangan telah terbit yang mengubah kewenangan sebelumnya terkait bidang mineral dan batubara dan bidang geologi. Pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kewenangan sub urusan bidang mineral dan batubara berpindah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. Namun demikian pada tahun 2022 terbit Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara sehingga pengurusan perizinan pertambangan batuan dan mineral bukan logam dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Sedangkan untuk urusan perizinan di bidang air tanah, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pasca terbitnya Kepmen ESDM Nomor 259.K/GL.01/MEM.G/2022 tentang Standar Penyelenggaraan Izin Pengusahaan Air Tanah, sejak tanggal 19 Oktober 2022 perizinan air tanah dilaksanakan oleh Menteri ESDM. Kewenangan Provinsi di bidang geologi yang dibatasi pada konservasi air tanah dan Penetapan Nilai Perolehan Air. Perubahan regulasi pada kedua bidang tersebut tersebut membutuhkan proses transisi dalam pelaksanaannya selama tahun 2022. Selanjutnya berdasarkan kewenangan yang sudah ditetapkan, maka tercatat sampai dengan tahun 2025 berdasarkan data PLN rasio desa berlistrik sudah mencapai 100% dari jumlah desa/kelurahan sebanyak 1.143 mendapatkan listrik dari sumber PLN sedangkan 5 desa sisanya mendapatkan listrik dari sumber Non PLN.

Tabel 2. 101 Sebaran Desa Berlistrik di Provinsi NTB Tahun 2025

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/KEL	JML DESA/KEL BERLISTRIK	KETERENGAN
1.	Kota Mataram	50	50	50 Desa / Kelurahan Listrik PLN

No.	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH DESA/KEL	JML DESA/KEL BERLISTRIK	KETERENGAN
2.	Kab. Lombok Barat	122	122	122 Desa Listrik PLN
3.	Kab. Lombok Tengah	139	139	139 Desa Listrik PLN
4.	Kab. Lombok Timur	254	254	254 Desa Listrik PLN
5.	Kab. Lombok Utara	33	33	33 Desa Listrik PLN
6.	Kab. Sumbawa Barat	65	65	65 Desa Listrik PLN
7.	Kab. Sumbawa	165	165	160 Desa Listrik PLN dan 5 Desa listrik non PLN
8.	Kab. Dompu	81	81	81 Desa Listrik PLN
9.	Kab. Bima	193	193	193 Desa Listrik PLN
10.	Kota Bima	41	41	41 Desa/Kelurahan Listrik PLN
Total		**1.143**	**1.143**	

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, 2025

Sebanyak 5 (lima) desa yang mendapatkan listrik dari sumber Non PLN berada pada Kabupaten Sumbawa yang terdiri dari Desa Tepal, Desa Baodesa, Desa Tangkam Pulit dan Desa Baturotok yang masuk dalam Kecamatan Batulanteh dan Desa Mungkin Kecamatan Orong Telu. Kelima desa tersebut mendapatkan listrik dari sumber PLTMH. Kelima desa tersebut berada pada wilayah pegunungan di Kabupaten Sumbawa dimana jaringan listrik PLN belum dapat menjangkau wilayah tersebut. Kendala akses jalan bagi pembangunan jaringan PLN menjadi permasalahan utama belum masuknya jaringan listrik di wilayah tersebut. Untuk mengatasi masalah tersebut Dinas ESDM telah melakukan koordinasi secara berkala dengan PLN Wilayah NTB, Dinas PUPR Provinsi NTB dan Dinas PUPR Kabupaten Sumbawa dalam rangka mempercepat peningkatan jalan menuju ke wilayah tersebut.

Selanjutnya untuk meningkatkan rasio elektrifikasi, Pemerintah Provinsi NTB telah melaksanakan penyambungan listrik murah dan hemat diperuntukan bagi masyarakat miskin yang rumahnya sudah dilalui oleh jaringan listrik namun belum mendapat layanan listrik, maupun sudah mendapat layanan listrik tetapi masih menyambung pada tetangganya. Sejak tahun 2012 Pemerintah Provinsi telah melakukan pemasangan listrik murah dan hemat pada 27.074 rumah tangga sasaran yang bersumber dari anggaran APBN, APBD maupun sumber lainnya seperti CSR BUMN.

Tabel 2. 102 Pemasangan Listrik Murah dan Hemat Tahun 2012-2025

TAHUN	Kota Mataram	Kab Lombok Utara	Kab Lombok Barat	Kab Lombok Tengah	Kab Lombok Timur	Kab Sumbawa Barat	Kab Sumbawa	Kab Dompu	Kab Bima	Kota Bima
2012	443	889	1760	1657	2647	342	629	427	922	181
2013	64	368	140	484	657	205	50	113	282	25
2014	55	109	271	312	440	50	156	97	215	25

2015	75	100	325	300	425	100	275	130	230	100
2016	0	38	106	98	136	15	40	20	232	15
2017	80	125	215	275	425	50	175	125	150	90
2018	0	120	120	120	120	0	0	0	0	0
2019	50	80	542	407	267	50	98	60	115	62
2020	0	87	270	398	500	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	1951	254	97	211	170	156	66
2022	0	13	33	66	13	0	0	0	0	0
2023	9	115	110	474	292	48	336	59	117	0
2024	0	0	0	120	0	0	0	34	41	0
2025	0	19	100	100	0	0	19	52	0	48
TOTAL	**776**	**2063**	**3992**	**6762**	**6176**	**957**	**1989**	**1287**	**2460**	**612**

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, 2025

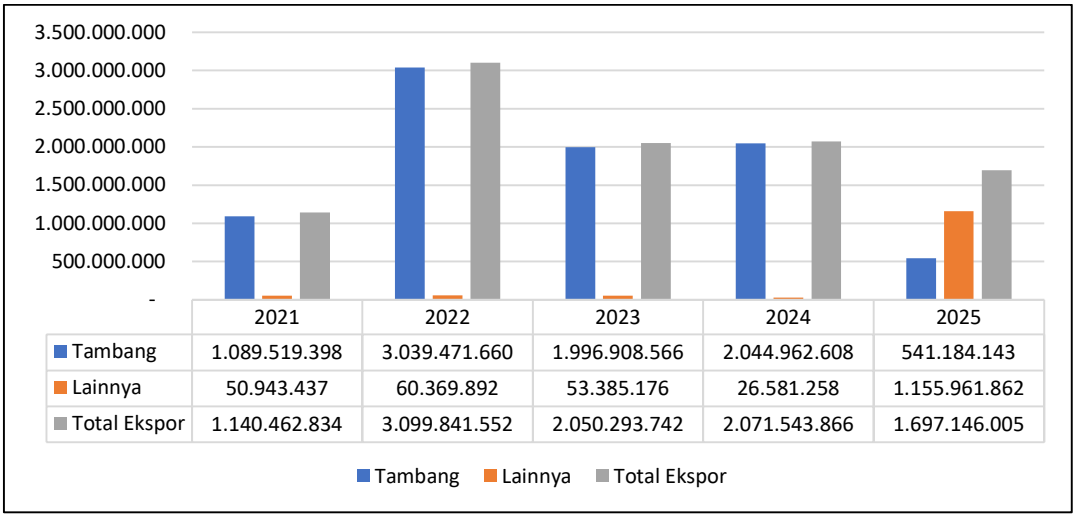
6. Perdagangan

Nilai ekspor Provinsi NTB selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang fluktuatif dengan pola yang sangat dipengaruhi oleh kinerja sektor pertambangan sebagai kontributor utama. Pada tahun 2021, total ekspor tercatat sebesar sekitar USD 1,14 miliar, kemudian meningkat tajam pada tahun 2022 hingga mencapai puncaknya sebesar USD 3,09 miliar. Lonjakan ini terutama didorong oleh tingginya ekspor sektor tambang yang mencapai lebih dari USD 3,03 miliar, mencerminkan kuatnya permintaan global dan/atau tingginya harga komoditas tambang pada periode tersebut.

Memasuki tahun 2023, nilai ekspor mengalami penurunan cukup signifikan menjadi sekitar USD 2,05 miliar, seiring dengan menurunnya ekspor sektor tambang ke kisaran USD 1,99 miliar. Tren ini relatif berlanjut pada tahun 2024 dengan nilai ekspor yang cenderung stagnan di kisaran USD 2,07 miliar, meskipun sektor tambang menunjukkan sedikit pemulihan menjadi sekitar USD 2,04 miliar. Kondisi ini mengindikasikan bahwa struktur ekspor NTB masih sangat bergantung pada fluktuasi sektor tambang, baik dari sisi produksi maupun harga komoditas di pasar internasional.

Perubahan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2025, di mana total ekspor menurun menjadi sekitar USD 1,69 miliar. Penurunan ini terutama disebabkan oleh anjloknya ekspor sektor tambang hingga sekitar USD 541 juta. Namun demikian, pada saat yang sama terjadi lonjakan signifikan pada sektor non-tambang (lainnya) yang meningkat drastis menjadi sekitar USD 1,15 miliar, setelah sebelumnya hanya berada pada kisaran puluhan juta dolar. Fenomena ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekspor NTB dari yang sebelumnya sangat terkonsentrasi pada sektor tambang menuju komposisi yang lebih beragam.

Grafik 2. 47 Nilai Ekspor Provinsi NTB Tahun 2021-2025 (USD)



	2021	2022	2023	2024	2025
Tambang	1.089.519.398	3.039.471.660	1.996.908.566	2.044.962.608	541.184.143
Lainnya	50.943.437	60.369.892	53.385.176	26.581.258	1.155.961.862
Total Ekspor	1.140.462.834	3.099.841.552	2.050.293.742	2.071.543.866	1.697.146.005

Sumber: BPS NTB, 2025 (data diolah)

Secara keseluruhan, kondisi ini menegaskan dua hal penting. Pertama, tingginya ketergantungan terhadap sektor tambang menyebabkan ekspor NTB rentan terhadap volatilitas eksternal, baik akibat siklus produksi maupun dinamika harga global. Kedua, lonjakan sektor non-tambang pada tahun 2025 memberikan sinyal positif terhadap mulai berkembangnya diversifikasi ekspor, yang berpotensi memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Oleh karena itu, ke depan diperlukan strategi yang lebih terarah dalam mendorong hilirisasi sektor unggulan serta penguatan sektor non-tambang seperti pertanian, perikanan, dan industri pengolahan, sehingga struktur ekspor NTB menjadi lebih seimbang, stabil, dan berkelanjutan.

Apabila dilihat dari jenis komoditas utama, maka komoditi tambang lebih mendominasi dibandingkan dengan komoditi lainnya (non tambang). Selama periode 2021–2025, struktur ekspor Provinsi NTB menunjukkan dinamika yang sangat dipengaruhi oleh sektor pertambangan, namun mulai mengalami pergeseran signifikan pada tahun terakhir. Pada tahun 2021, total ekspor sebesar USD 1,22 miliar didominasi hampir sepenuhnya oleh hasil tambang (±99%), sementara kontribusi komoditas lain seperti pertanian, perikanan, dan kerajinan masih sangat kecil dan belum signifikan.

Lonjakan ekspor terjadi pada tahun 2022 dengan total mencapai USD 3,17 miliar, didorong oleh peningkatan drastis ekspor hasil tambang hingga USD 3,12 miliar. Hal ini menegaskan bahwa kinerja ekspor NTB sangat bergantung pada siklus dan harga komoditas tambang global. Namun, ketergantungan ini juga menjadi sumber kerentanan, yang mulai terlihat pada tahun 2023 ketika total ekspor turun menjadi USD 1,86 miliar akibat penurunan tajam sektor tambang menjadi USD 1,32 miliar. Meskipun demikian, pada tahun ini mulai terlihat penguatan sektor non-tambang, khususnya pertanian dan perkebunan yang melonjak menjadi USD 383,96 juta, serta perikanan dan kelautan yang meningkat menjadi USD 14,42 juta.

Pada tahun 2024, total ekspor kembali meningkat menjadi USD 2,19 miliar seiring pemulihan sektor tambang yang mencapai USD 2,15 miliar. Namun, kontribusi sektor non-tambang masih relatif terbatas dan cenderung fluktuatif, seperti pertanian yang turun signifikan menjadi USD 35,59 juta dan perikanan yang sedikit menurun. Hal ini

menunjukkan bahwa diversifikasi ekspor belum sepenuhnya stabil dan masih bergantung pada momentum tertentu.

Perubahan struktur ekspor yang paling mencolok terjadi pada tahun 2025. Total ekspor menurun menjadi USD 1,69 miliar akibat anjloknya ekspor hasil tambang menjadi hanya USD 541,18 juta. Namun, penurunan ini diimbangi oleh lonjakan signifikan pada sektor non-tambang, terutama hasil industri yang mencapai USD 678,01 juta dan perhiasan/permata sebesar USD 444,31 juta. Selain itu, sektor perikanan dan kelautan juga menunjukkan peningkatan menjadi USD 24,05 juta, sementara komoditas lain seperti garam, kendaraan, dan gabungan komoditas lainnya mulai berkontribusi meskipun dalam skala lebih kecil.

Secara keseluruhan, terdapat dua fase utama dalam struktur ekspor NTB. Periode 2021–2024 ditandai oleh dominasi ekstrem sektor tambang dengan kontribusi yang sangat besar terhadap total ekspor, sementara sektor lainnya masih marginal. Adapun tahun 2025 menjadi titik balik penting, di mana struktur ekspor mulai bergeser menuju diversifikasi dengan meningkatnya peran sektor industri dan komoditas bernilai tambah seperti perhiasan.

Implikasinya, ketergantungan tinggi terhadap sektor tambang terbukti menyebabkan volatilitas ekspor yang cukup tajam dari tahun ke tahun. Namun, perkembangan pada tahun 2025 memberikan sinyal positif bahwa transformasi ekonomi ke arah hilirisasi dan diversifikasi mulai berjalan. Ke depan, penguatan sektor industri pengolahan, peningkatan nilai tambah komoditas lokal (pertanian, perikanan, dan kerajinan), serta pengembangan rantai nilai berbasis sumber daya unggulan daerah menjadi kunci untuk menciptakan struktur ekspor yang lebih stabil, inklusif, dan berkelanjutan.

Tabel 2. 103 Volume dan Nilai Ekspor Menurut Jenis Komoditi di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

Kelompok Komoditas	Nilai Ekspor (US $ Ribu)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Hasil Tambang	1.214.480,00	3.121.063,00	1.320.885,27	2.151.397,52	541.184,14
Hasil Kerajinan	447,00	448,00	70.934,40	-	0
Hasil Pertanian dan Perkebunan	675,00	50,18	383.961,32	35.594,18	3233,01
Hasil Perikanan dan Kelautan	5,96	4,90	14.424,07	12.674,16	24.054,01
Hasil Industri				310,11	678.007,60
Perhiasan/Permata					444.308,18
Garam, Belerang, Kapur					2.373,80
Kendaraan dan bagiannya					2.060,38
Hasil Kehutanan			72,00	-	
Gab komoditas lainnya					1.924,89
Total Ekspor	**1.221.564,00**	**3.176.585,00**	**1.862.205,06**	**2.199.975,97**	**1.697.146,01**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2026

Secara keseluruhan, terdapat tiga karakter utama dalam perkembangan ekspor NTB berdasarkan negara tujuan. Pertama, adanya ketergantungan pada pasar tertentu yang berubah-ubah setiap tahun, mencerminkan sensitivitas terhadap permintaan global dan jenis komoditas yang diekspor. Kedua, terjadi pergeseran pasar utama secara dinamis, dari China (2021), ke Korea Selatan dan Jepang (2022), ke Hongkong (2023), hingga kembali lebih terdiversifikasi pada 2025. Ketiga, mulai terlihat diversifikasi pasar ekspor pada tahun terakhir, yang ditandai dengan munculnya berbagai negara tujuan baru dan meningkatnya peran negara di luar pasar tradisional.

Implikasinya, struktur ekspor NTB masih menghadapi risiko volatilitas akibat konsentrasi pasar dan ketergantungan pada komoditas tertentu. Namun demikian, tren diversifikasi pasar pada tahun 2025 merupakan sinyal positif yang perlu diperkuat melalui strategi perluasan pasar ekspor, penguatan diplomasi perdagangan, serta peningkatan daya saing dan nilai tambah produk unggulan daerah. Dengan demikian, ketahanan ekspor NTB dapat semakin meningkat dan tidak mudah terpengaruh oleh perubahan permintaan dari satu atau dua negara utama saja.

Tabel 2. 104 Negara Tujuan dan Nilai Ekspor NTB Tahun 2021-2025

Negara TujuanEkspor	Nilai Ekspor (US $ Ribu)				
	2021	2022	2023	2024	2025
Jepang	126,386.97	746,867.56	314,662.84		120.009,85
Korea Selatan	93,016.69	927,776.57	312,799.83		295.777,86
China	817,520.91	775,858,39	183,037.02		459.122,72
Filipina	23,085.03	222,497.52	67,606.06		-
Hongkong	206.67	201.50.00	990,315.37		-
Australia	3,996.40	2,956.22	10,578.07		-
Swiss					427.446,31
Thailand					120.042,15
India					70.579,12
Malaysia					62.095,91
Taiwan					50.759,34
Vietnam					48.626,19
Negara Lainnya	157,351.63	500,428.02	477,266.98		42.686,51
Total Ekspor	**1,221,564.3**	**3,176,585.78**	**2,356,266.17**		**1.697.145,96**

Sumber: Dinas Perdagangan Provinsi NTB, 2026

7. Perindustrian

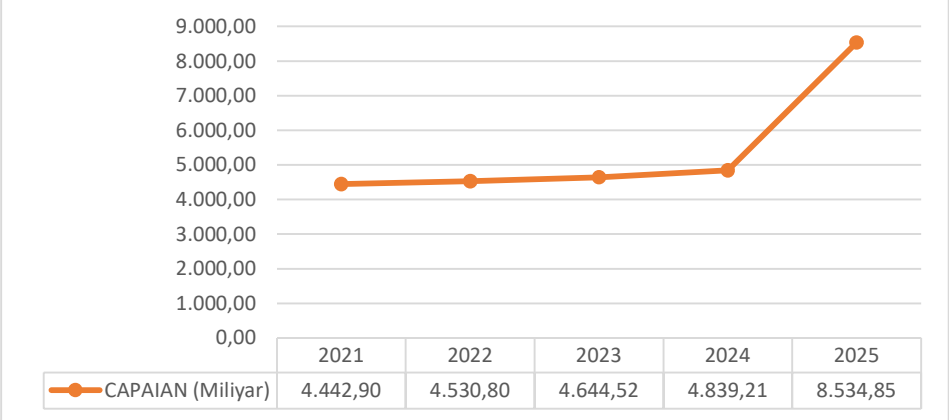
Sektor industri masih memiliki peran strategis dalam perekonomian NTB. Hal ini terlihat dari kemajuan ekonomi kerakyatan yang medorong tumbuh dan berkembangnya pelaku-pelaku ekonomi lokal berbasis komoditi unggulan lokal dan mampu menyerap tenaga kerja. Oleh karena Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya meningkatkan daya saing produk industri dengan menumbuhkan Industri Kecil Mengah (IKM), memfasiltasi sertifikasi halal dari MUI, bimbingan teknis desain produksi, fasilitasi pendaftaran HKI Karya Seni Budaya Daerah (Desain industry, merek, hak cipta), dan sertifkasi Standar Nasional Indonesia (SNI).

Pembangunan ekonomi pada hakekatnya adalah rangkaian kegiatan dan kebijakan yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan memperluas lapangan kerja, serta pemerataan pendapatan, dengan kata lain pemerataan pendapatan masyarakat yang peningkatan kesejahteraan.

Pada Perindustrian dengan indikator tujuan pembangunan pertumbuhan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sektor Industri. Dimana PDRB pada tingkat provinsi merupakan gambaran kemampuan suatu daerah dalam menciptakan nilai tambah suatu produk dalam suatu waktu tertentu. Dalam perhitungan PDRB tersebut digunakan dua pendekatan yaitu produksi dan penggunaan. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah yang dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha).

Pertumbuhan PDRB provinsi NTB belum memperlihatkan nilai yang signifikan, masih didominasi oleh nilai pertambangan dan pertanian perkebunan. Adapun nilai PDRB sektor Industri tahun 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut

Grafik 2. 48 PDRB sektor Industri Provinsi NTB tahun 2021 – 2025



Sumber BPS Provinsi NTB 2026

PDRB sektor industri Provinsi NTB selama periode 2021–2025 menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif stabil pada awal periode, kemudian mengalami lonjakan signifikan pada tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai PDRB sektor industri tercatat sebesar Rp4.442,90 miliar dan meningkat secara bertahap menjadi Rp4.530,80 miliar pada 2022 serta Rp4.644,52 miliar pada 2023. Pertumbuhan ini mencerminkan adanya perbaikan kinerja sektor industri, meskipun masih dalam laju yang moderat.

Pada tahun 2024, PDRB sektor industri kembali meningkat menjadi Rp4.839,21 miliar, yang menunjukkan konsistensi pertumbuhan sektor ini sebagai salah satu penopang ekonomi daerah. Namun demikian, peningkatan yang terjadi masih bersifat incremental dan belum menunjukkan akselerasi yang kuat. Perubahan yang paling mencolok terjadi pada tahun 2025, di mana PDRB sektor industri melonjak tajam menjadi Rp8.534,85 miliar. Lonjakan ini mengindikasikan adanya ekspansi besar dalam aktivitas industri, yang tidak terlepas dari mulai beroperasinya fasilitas smelter di NTB. Kehadiran

smelter mendorong proses hilirisasi komoditas tambang di dalam daerah, sehingga meningkatkan nilai tambah, memperpanjang rantai produksi, serta menggeser ekspor dari bahan mentah menjadi produk olahan. Dampak lanjutannya adalah meningkatnya output industri pengolahan, penyerapan tenaga kerja, serta aktivitas ekonomi turunan lainnya.

Tujuan pokok pembangunan industri adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tidak hanya sekedar pencapaian pembangunan yang tinggi melainkan untuk menciptakan suatu kegiatan yang mandiri. Bertambahnya jumlah industri, akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah kapasitas produksi disuatu daerah yang nantinya akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja. Pertambahan jumlah industri yang ada dapat memperluas penyerapan tenaga kerja dalam sektor perekonomian.

Berkembangnya sektor industri diharapkan dapat menjadi penggerak bagi sektor yang lainnya. Dalam RPD Provinsi NTB disebutkan sebagai lokomotif pembangunan dan sektor lainnya adalah gerbong yang terus mendukung dalam pencapaian tujuan pembangunan di NTB. Perkembangan leading sector atau sektor penggerak tersebut akan mempengaruhi perkembangan sektor yang lainnya dikarenakan antar sektor memiliki keterkaitan yang sangat erat. Untuk itu dengan tumbuhnya IKM sudah tentu akan dapat mendukung perekonomian daerah.

Adapun data pertumbuhan industri di provinsi NTB dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2. 105 Pertumbuhan Industri Provinsi NTB tahun 2021 – 2025

Tahun	Capaian (IKM)	bertambah /Berkurang
2021	102.983	6.688
2022	110.664	7681
2023	120.592	9.928
2024	123.006	2.414
2025	130.984	7978

Sumber : Dinas Perindustrian tahun 2026

Pertumbuhan industri di Provinsi NTB selama periode 2021–2025 menunjukkan tren meningkat dengan dinamika yang fluktuatif. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) meningkat dari 102.983 unit pada 2021 menjadi 130.984 unit pada 2025. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan penambahan 9.928 unit, mencerminkan ekspansi industri yang cukup pesat. Namun, pada tahun 2024 pertumbuhan melambat menjadi 2.414 unit, sebelum kembali menguat pada 2025 dengan penambahan 7.978 unit.

Secara keseluruhan, peningkatan jumlah IKM ini menunjukkan penguatan struktur industri daerah yang semakin inklusif. Akselerasi pada tahun 2025 juga sejalan dengan berkembangnya hilirisasi industri, termasuk dampak beroperasinya smelter yang mendorong tumbuhnya industri turunan dan memperluas keterlibatan IKM dalam rantai pasok.

8. Transmigrasi

Transmigrasi bertujuan untuk memfasilitasi perpindahan penduduk/transmigran untuk dapat hidup secara berkualitas dan sejahtera dengan memanfaatkan sumberdaya alam secara berkesinambungan di wilayah potensial melalui penyediaan areal permukiman yang layak untuk dihuni, layak untuk diusahakan, dan layak untuk dikembangkan secara lestari.

Jumlah alokasi transmigran yang ditempatkan di dalam Provinsi NTB maupun yang diarahkan keluar provinsi relatif berkurang. Sedangkan jumlah transmigran asal Provinsi NTB yang mengikuti program transmigrasi keluar provinsi dalam kurun waktu lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2. 106 Perkembangan Transmigran Keluar Provinsi NTB dan Tujuan Daerah Tahun 2018 – 2025

No	Jumlah	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1.	KK	10	10	0	0	7	0	0	0
2.	Jiwa	36	39	0	0	27	0	0	0
3.	Daerah Tujuan	Gorontalo 5 KK (18 Jiwa)	Sulawesi Tenggara 10 KK (39 Jiwa)	0	0	Sulawesi Tenggara 7 KK	0	0	0
		Sulawesi Barat 5 KK (18 Jiwa)							

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2024.

Perkembangan transmigrasi keluar Provinsi NTB yang cenderung menurun dan tidak berkelanjutan selama periode 2018–2025 tidak hanya dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti pembatasan mobilitas, tetapi juga berkaitan dengan semakin kuatnya kebijakan penguatan kawasan transmigrasi yang sudah ada. Pemerintah saat ini lebih memfokuskan pada peningkatan kualitas dan kemandirian kawasan transmigrasi eksisting melalui pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi lokal, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar dan pasar.

Pendekatan ini mendorong optimalisasi potensi wilayah transmigrasi yang telah berkembang, sehingga tidak lagi berorientasi pada penambahan jumlah transmigran baru, melainkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang sudah menetap. Di sisi lain, membaiknya kondisi ekonomi dan peluang usaha di daerah asal seperti NTB juga turut menurunkan minat masyarakat untuk mengikuti program transmigrasi keluar daerah.

Dengan demikian, penurunan jumlah transmigran keluar dapat dipahami sebagai bagian dari pergeseran kebijakan dari ekspansi transmigrasi menuju konsolidasi dan penguatan kawasan transmigrasi, yang lebih menekankan pada keberlanjutan, produktivitas, dan kesejahteraan jangka panjang.

Pengembangan Transmigrasi saat ini berubah menjadi pengembangan berbasis Kawasan Transmigrasi. Perubahan transmigrasi dari pendekatan Satuan Permukiman (SP) ke berbasis Kawasan Transmigrasi untuk mengintegrasikan berbagai SP agar lebih mandiri, berdaya saing dan terhubung dengan infrastruktur strategis. Transmigrasi berbasis Kawasan berfungsi meningkatkan pemerataan pemmbangunan antar daerah, sejalan dengan tujuan Pembangunan Kawasan transmigrasi untuk meningkatkan

kesejahteraan transmigran dan Masyarakat sekitar. Melalui Surat Keputusan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi telah ditetapkan 153 Kawasan Transmigrasi di seluruh Indonesia. Untuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan sebanyak 4 (empat) Kawasan Transmigrasi yaitu:

1. Kawasan Transmigrasi Selaparang Kabupaten Lombok Timur meliputi 3 Kecamatan yaitu Kecamatan Pringgabaya, Suela, dan Pringgasela.
2. Kawasan Transmigrasi Tongo Sekongkang Kabupaten Sumbawa Barat meliputi Kecamatan Sekongkang.
3. Kawasan Transmigrasi Labangka Kabupaten Sumbawa meliputi Kecamatan Labangka dan Kecamatan Plampang
4. Kawasan Transmigrasi Tambora Kabupaten Bima meliputi Kecamatan Tambora.

Capaian indikator persentase desa maju dan mandiri di 4 kawasan transmigrasi tahun 2025 sebesar 81,36 persen, dengan tingkat capaian kinerja sebesar 100 persen. Jika dibandingkan dengan capaian nasional tahun 2025 sebesar 55,81 persen cakjupan desa di Kawasan transmigrasi yang berstatus maju dan mandiri. Adapun target desa dalam peningkatan status desa maju dan mandiri yang ada di Kawasan Transmigrasi sampai tahun 2025 yaitu :

1. Di Kawasan Transmigrasi Selaparang menjadi 3 desa berkembang, 13 desa maju, dan 17 desa mandiri
2. Di Kawasan Transmigrasi Tongo Sekongkang menjadi 1 desa berkembang dan 2 desa mandiri.
3. Di Kawasan Transmigrasi Labangka terdapat 2 desa berkembang, 5 desa maju dan 9 desa mandiri
4. Di Kawasan Transmigrasi Tambora menjadi 5 desa berkembang dan 2 desa maju.

Dari total 59 desa yang masuk dalam 4 kawasan transmigrasi di Provinsi NTB, sampai tahun 2025 terdapat 48 desa masuk dalam kategori desa maju dan mandiri. Target dan capaian peningkatan status desa pada Kawasan transmigrasi tahun 2025 sebagaimana table berikut.

Tabel 2. 107 Target Peningkatan Prosentase Desa Maju dan Mandiri Di Kawasan Transmigrasi Tahun 2025

NO	NAMA KAWASAN TRANSMIGRASI	NAMA DESA		STATUS DESA TAHUN 2024	STATUS DESA TAHUN 2025
1	Selaparang Lombok Timur	1	Kerumut	Berkembang	Berkembang
		2	Puncak Jeringo	Berkembang	Berkembang
		3	Ketangga	Berkembang	Berkembang
		4	Bagik Papan	Maju	Maju
		5	Poh Gading	Maju	Maju
		6	Tanah Gadang	Maju	Maju
		7	Dara Kunci	Maju	Maju
		8	Madayin	Maju	Maju
		9	Obel - Obel	Maju	Maju
		10	Bagik Manis	Maju	Maju

NO	NAMA KAWASAN TRANSMIGRASI	NAMA DESA		STATUS DESA TAHUN 2024	STATUS DESA TAHUN 2025
		11	Dadap	Maju	Maju
		12	Selaparang	Maju	Maju
		13	Suntalangu	Maju	Maju
		14	Perigi	Maju	Maju
		15	Sapit	Berkembang	Maju
		16	Mekarsari	Maju	Maju
		17	Apit Aik	Mandiri	Mandiri
		18	Batu Yang	Mandiri	Mandiri
		19	Pringbaya	Mandiri	Mandiri
		20	Labuhan Lombok	Mandiri	Mandiri
		21	Pringbaya Utara	Mandiri	Mandiri
		22	Poh Gading Timur	Mandiri	Mandiri
		23	Teko	Mandiri	Mandiri
		24	Anggaraksa	Mandiri	Mandiri
		25	Gunung Malang	Mandiri	Mandiri
		26	Seruni Mumbol	Mandiri	Mandiri
		27	Telaga Waru	Mandiri	Mandiri
		28	Belanting	Mandiri	Mandiri
		29	Sambila	Mandiri	Mandiri
		30	Labuhan Pandan	Mandiri	Mandiri
		31	Sugian	Mandiri	Mandiri
		32	Padakguar	Mandiri	Mandiri
		33	Suela	Mandiri	Mandiri
2	Tongo KSB	1	Aik Kangkung	Berkembang	Berkembang
		2	Tatar	Mandiri	Mandiri
		2	Talonang Baru	Mandiri	Mandiri
3	Labangka	1	UPT Prode SP II	Berkembang	Berkembang
		2	UPT Prode SP III	Berkembang	Berkembang
		3	Suka Mulai	Maju	Maju
		4	Jaya Mulya	Maju	Maju
		5	UPT Prode SP I	Maju	Maju
		6	Selantah	Maju	Maju
		7	Brang Kolong	Maju	Maju
		8	Labangka	Mandiri	Mandiri
		9	Sukadamai	Mandiri	Mandiri
		10	Sekokat	Mandiri	Mandiri
		11	Muer	Mandiri	Mandiri
		12	Plampang	Mandiri	Mandiri
		13	Teluk Snatong	Mandiri	Mandiri
		14	Sepayung	Mandiri	Mandiri
		15	Sepakat	Mandiri	Mandiri
		16	Usar	Mandiri	Mandiri
4	Tambora	1	Kawinda To'i	Berkembang	Berkembang
		2	Oi Panihoi	Berkembang	Berkembang
		3	Rasa Bau	Berkembang	Berkembang
		4	Oi Bura	Berkembang	Berkembang
		5	Oi Katupa	Berkembang	Berkembang
		6	Labuhan Kenanga	Berkembang	Berkembang
		7	Kawinda Nae	Berkembang	Berkembang

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2025

Tabel 2. 108
Nama - Nama Desa Maju dan Mandiri di Kawasan Transmigrasi

NO	NAMA KAWASAN TRANSMIGRASI	Berkembang	Maju	Mandiri
1	Selaparang Lombok Timur	1 Kerumut	1 Bagik Papan	1 Apit Aik
		2 Puncak Jeringo	2 Poh Gading	2 Batu Yang
		3 Ketangga	3 Tanah Gadang	3 Pringbaya
			4 Dara Kunci	4 Labuhan Lombok
			5 Madayin	5 Pringbaya Utara
			6 Obel - Obel	6 Poh Gading Timur
			7 Bagik Manis	7 Teko
			8 Dadap	8 Anggaraksa
			9 Selaparang	9 Gunung Malang
			10 Suntalangu	10 Seruni Mumbol
			11 Perigi	11 Telaga Waru
			12 Sapit	12 Belanting
			13 Mekarsari	13 Sambila
				14 Labuhan Pandan
				15 Sugian
				16 Padakguar
				17 Suela
2	Tongo KSB	1 Aik Kangkung		1 Tatar
				2 Talonang Baru
3	Labangka		1 Suka Mulai	1 Labangka
			2 Jaya Mulya	2 Sukadamai
				3 Sekokat
		1 UPT Prode SP II	1 UPT Prode SP I	1 Muer
		2 UPT Prode SP III	2 Selantah	2 Plampang
			3 Brang Kolong	3 Teluk Snatong
				4 Sepayung
				5 Sepakat
				6 Usar
4	Tambora	1 Kawinda To'i	1 Labuhan Kenanga	
		2 Oi Panihoi	2 Kawinda Nae	
		3 Rasa Bau		
		4 Oi Bura		
		5 Oi Katupa		

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, 2025

2.1.3.4 Fokus Layanan Urusan Penunjang

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, urusan pemerintah fungsi penunjang merupakan urusan yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah meliputi: unsur pendukung pemerintahan, perencanaan, pengawasan, keuangan, kepegawaian, dan pendidikan pelatihan, serta Pemerintahan Umum. Pada tahun 2015-2019, urusan pemerintah fungsi penunjang yang dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi NTB diuraikan sebagai berikut:

1. Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan

Unsur pendukung merupakan salah satu fungsi penunjang yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan, koordinasi pemerintahan, organisasi dan administrasi umum serta fungsi pendukung lainnya yang dilaksanakan oleh sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dan Pengubung Daerah. Selama kurun waktu sampai dengan tahun 2025, beberapa capaian kinerja dari unsur pendukung pemerintahan antara lain indeks reformasi birokrasi dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Tabel 2. 109 Capaian Indek Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2025

Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024	2025
Indek Reformasi Birokrasi	Indeks	65,76	67,02	68,73	77,99	77,46

Sumber: Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2025

Perkembangan Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang secara umum mengalami peningkatan positif, meskipun pada tahun terakhir terjadi sedikit penurunan. Lonjakan signifikan terjadi pada tahun 2024 dengan capaian indeks sebesar 77,99. Kenaikan ini menunjukkan percepatan implementasi reformasi birokrasi yang lebih efektif, termasuk penguatan digitalisasi layanan pemerintahan, peningkatan budaya kerja birokrasi yang berorientasi hasil, serta penguatan sistem pengawasan internal dan manajemen kinerja perangkat daerah. Capaian tersebut juga mengindikasikan meningkatnya komitmen pemerintah daerah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, adaptif, dan melayani masyarakat secara lebih optimal.

Namun demikian, pada tahun 2025 indeks mengalami sedikit penurunan menjadi 77,46. Walaupun penurunannya relatif kecil, kondisi ini menjadi sinyal perlunya evaluasi terhadap konsistensi pelaksanaan reformasi birokrasi, terutama dalam menjaga keberlanjutan kualitas pelayanan publik, efektivitas implementasi kebijakan, serta penguatan integritas aparatur. Secara keseluruhan, capaian Indeks Reformasi Birokrasi selama periode 2021–2025 tetap menunjukkan kinerja yang baik dan mengarah pada tata kelola pemerintahan daerah yang semakin profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selanjutnya pada Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Provinsi NTB meraih predikat BB tahun 2021, melalui peran Biro Organisasi yang telah melakukan upaya peningkatan kualitas pada tahun 2025. Capaian SAKIP Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2021–2025 menunjukkan kinerja yang relatif baik dan konsisten dengan predikat “BB”. Nilai hasil evaluasi meningkat dari 70,59 pada tahun 2021 menjadi 73,48 pada tahun 2023, yang mencerminkan adanya penguatan tata kelola pemerintahan, khususnya dalam perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa implementasi manajemen kinerja pemerintah daerah semakin berorientasi pada hasil, akuntabel, dan terintegrasi dengan proses perencanaan pembangunan daerah.

Komponen perencanaan dan pengukuran kinerja menunjukkan perkembangan positif hingga tahun 2024, menandakan semakin baiknya penyusunan indikator, target, serta monitoring capaian program. Sementara itu, evaluasi internal mengalami peningkatan signifikan dari 6,62 pada tahun 2021 menjadi 15,89 pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin optimalnya fungsi pengawasan dan pembinaan internal pemerintah daerah. Adapun komponen pelaporan kinerja relatif stabil, mencerminkan konsistensi dalam penyusunan laporan akuntabilitas kinerja.

Pada tahun 2025, nilai evaluasi sedikit menurun menjadi 70,92, namun tetap berada pada kategori “BB”. Kondisi ini mengindikasikan perlunya penguatan konsistensi implementasi SAKIP, terutama dalam kualitas pengukuran kinerja dan pemanfaatan hasil

evaluasi untuk perbaikan kebijakan. Secara keseluruhan, capaian SAKIP Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tata kelola pemerintahan yang semakin efektif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.

Tabel 2. 110 Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Provinsi Tahun 2021-2025

NO	KOMPONEN YANG DINILAI	2021		2022		2023		2024		2025	
		BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI	BOBOT	NILAI
a	Perencanaan Kinerja	30	24,69	30	25,2	30	25,41	30	25,41	30	24,16
b	Pengukuran Kinerja	25	17,67	30	21,64	30	21,9	30	21,9	30	19,48
c	Pelaporan Kinerja	15	11,67	15	11,4	15	11,54	15	11,24	15	11,39
d	Evaluasi Internal	10	6,62	25	14,53	25	14,63	25	14,95	25	15,89
e	Capaian Kinerja	20	9,94	-	-	-	-	-	-	-	-
	Nilai Hasil Evaluasi	**100**	**70,59**	**100**	**72,77**	**100**	**73,48**	**100**	**72,88**	**100**	**70,92**
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**		**BB**

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi NTB, 2023

Jumlah produk hukum yang dihasilkan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat selama tahun 2021–2025 menunjukkan tren yang fluktuatif namun tetap mencerminkan fungsi regulasi dan tata kelola pemerintahan yang berjalan baik. Total produk hukum mencapai puncaknya pada tahun 2022 sebanyak 1.051 produk hukum, kemudian menurun secara bertahap hingga 753 produk hukum pada tahun 2025. Penurunan tersebut mengindikasikan adanya penyesuaian kebutuhan regulasi serta peningkatan fokus pada kualitas dan efektivitas kebijakan dibanding kuantitas regulasi yang diterbitkan.

Peraturan Daerah (Perda) mengalami dinamika dengan penurunan hingga tahun 2023, namun kembali meningkat menjadi 15 perda pada tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan penguatan fungsi legislasi daerah dalam mendukung pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Sementara itu, Peraturan Gubernur dan Keputusan Gubernur tetap menjadi instrumen utama dalam pelaksanaan kebijakan dan administrasi pemerintahan, meskipun jumlahnya cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir sebagai bagian dari upaya efisiensi regulasi dan penyederhanaan birokrasi.

Secara keseluruhan, perkembangan produk hukum daerah mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menjaga kepastian hukum, mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, serta memperkuat landasan regulasi bagi pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Adapun jumlah produk hukum yang dihasilkan oleh Provinsi NTB dari tahun 2021-2025 disajkan pada table berikut ini.

Tabel 2. 111 Jumlah Produk hukum yang dihasilkan Tahun 2021 – 2025

NO.	PRODUK HUKUM	SATUAN	2021	2022	2023	2024	2025

1.	Peraturan Daerah	Perda	16	9	4	10	15
2.	Peraturan Gubernur	Perkada	56	114	104	49	38
3.	Keputusan Gubernur	Keputusan Gubernur	828	928	846	808	700
Jumlah			**900**	**1.051**	**954**	**867**	**753**

Sumber: Biro Hukum Setda NTB, 2026

Fasilitasi dan evaluasi produk hukum kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2024–2025 menunjukkan peran aktif pemerintah provinsi dalam pembinaan dan harmonisasi regulasi daerah. Fasilitasi produk hukum didominasi oleh Raperbup/Perbup, terutama di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Timur, dan Sumbawa Barat, yang mencerminkan tingginya kebutuhan regulasi teknis untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Sementara itu, evaluasi Raperda/Perda dan Raperbup/Perbup dilakukan secara konsisten di seluruh kabupaten/kota guna memastikan kesesuaian regulasi dengan ketentuan perundang-undangan dan arah kebijakan pembangunan. Kota Mataram, Lombok Tengah, dan beberapa daerah lainnya menunjukkan aktivitas evaluasi yang cukup tinggi sebagai bentuk penguatan tata kelola regulasi daerah. Secara umum, fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah mencerminkan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas regulasi, memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif, tertib, dan akuntabel di Nusa Tenggara Barat.

Tabel 2. 112 Jumlah Perda/Perbup/Perwal yang Difasilitasi dan Dievaluasi Pada Tahun 2024-2025

NO	Kab. / Kota	Difasilitasi						Dievaluasi					
		Raperda/ Perda		Raperbub/ Perbup		Raperwal/ Perwal		Raperda/ Perda		Raperbub/ Perbup		Raperwal/ Perwal	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
1	Kota Mataram	3	2	-	-	-	-	3	3	-	-	3	3
2	Lobar	1	1	-	6	-	-	3	3	3	3	-	-
3	Loteng	4	3	10	63	-	-	18	1	4	3	-	-
4	Lotim	-	1	59	19	-	-	4	3	8	3	-	-
5	Lombok Utara	8	3	-	-	-	-	3	3	3	3	-	-
6	Sumbawa Barat	6	3	21	43	-	-	4	3	9	2	-	-
7	Sumbawa	5	1	8	27	-	-	4	4	3	3	-	-
8	Dompu	-	1	31	22	-	-	4	4	5	3	-	-
9	Kota Bima	-	-	-	-	6	16	4	4	-	-	3	3
10	Bima	3	-	-	-	-	-	4	4	7	3	-	-
Jumlah		**101**	32	15	129	180	6	16	51	32	42	23	6

Sumber: Biro Hukum Setda NTB, 2026

Tabel 2. 113 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Provinsi NTB Tahun 2025

No	No. Gugatan	Penggugat/ Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No. PTS		
1.	Perkara Perdata No. 19/PDT.G/2025/PN.Sel	penggugat: SUMAINI, DKK	T: Kepala BPKAD Prov. NTB TT: Kepala Kantah BPN Lombok Timur	terkait lahan rumah dinas penjaga pintu air	pn: Gugatan ditolak terkait kewenangan/kompetensi absolut	-	-	Dusun Pandan Dure, Desa Sukarara, Kec. Sakra Barat, Kab. Lombok Timur	banding: Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
2.	Perkara Perdata No. 9/PDT.G/2025/PN.Rbi	ASIKIN (Penggugat)	T1. Sukaina Binti M. Jafar Bin Hasan, T2. H.M Nur, T3. Juniarti Aisyah, T4. Kepala Kantor resort pengelolaan Hutan Kec. Sape.	Terkait dengan tanah seluas 7 are yang dipergunakan sebagai bangunan resort pengelolaan hutan sape	PN: Mengabulkan Eksepsi Tergugat IV tentang Gugatan Kedaluwarsa	-	-	Kec. Sape, Kab. Bima, NTB	banding: Menolak gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya; karena esepsi: gugatan kabur
3.	Perkara Perdata No. 117/Pdt.G/2025/PN Mtr	PT. Karya Pendidikan bangsa (Penggugat)	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Perkara Gugatan Perdata Wanprestasi, terkait pengadaan smart class	gugatan tidak dapat diterima esepsi: kurang pihak tidak menarik PPK sebagai pihak	-	-	-	
4.	Perkara Perdata No. 67/Pdt.G/2024/PN Sbw	H. MAKSUD	T1. Gubernur NTB T2. Kepala Bappenda Prov.NTB T3. Bupati Sumbawa T4. Kepala Samsat Sumbawa TT1. BPN Sumbawa TT2. Ketua PA Sumbawa	Terkait dengan permasalahan lahan Kantor Samsat Sumbawa Besar yang di klaim oleh H. Maksud di Pengadilan Negeri Sumbawa		gugatan ditolak Banding : Menguatkan putusan PN	-	Sumbawa Besar	inkrah

No	No. Gugatan	Penggugat/ Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No. PTS		
5.	Perkara Perdata No. 295/Pdt.G/2024/PN Mtr	IDA MADE ARKA	T1. Gubernur NTB T2. Direktur RSUD NTB	Terkait tanah di RSUP NTB				Terletak di Prabu Rangkasari, Kel. Dasan Cermen, Kec. Sandubaya, Kota Mataram, NTB.	masih ada potensi digugat kembali
6.	Perkara Perdata No. 157/Pdt.G/2025/PN Mtr	Lalu Munahir	t1. Lalu Sarsih T2. Pemda Lombok Barat T3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. NTB tT1. Pemprov NTB TT2. SMK 1 Kuripan	lahan SMKN 1 Kuripan		-	-	Desa Kuripan Kabupaten Lombok Barat	inkrah
7	Perkara Perdata No.78/Pdt.G/2025/PN. Sel	P1. INAQ SINARTI. P2 CIHI	t1. Pemprov NTB T2. Dinas Kelautan Dan Perikanan Pemprov. NTB T3. Pemerintah Desa Sembalun Bumbung t4. Kantor Pertanahan Kab. Lombok timur	lahan TPTD Dinas kelautan dan Perikanan	PN: NO karena kompetensi absolud			Sembalun Lombok Timur	masih ada potensi digugat kembali
8	Perkara Perdata No.49/G/2025/PTUN.MTR	H. ZAENUDIN	Gubernur NTB		Cabut				
9	Perkara Perdata No.	GIULIO TADDEI	1 H. Rukding 2. Gubernur	Perkara Gugatan Perdata,	proses			Gili Trawangan	

No	No. Gugatan	Penggugat/ Pembanding	Tergugat/ terbanding	Obyek Sengketa	Putusan pengadilan			Lokasi	Tahapan kasus
					PN/PTUN No. Putusan	PT No. PTS	MA No. PTS		
	274/Pdt.G/2025/PN Mtr	bertindak selaku Direktur Perseroan dari "PT GIUDA,		Wanprestasi Perjanjian terkait aset milik Pemprov NTB di Gili Trawangan					
10	Perkara Perdata No.57/G/2025/PTUN.MTR	H. ZAENUDIN	T1: Gubernur NTB T2: PT. DSM	gugatan PMH penerbitan SK Pemanfaatan Lahan di Gili Trawangan	proses			Gili Trawangan	

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2026

Berdasarkan data Penanganan penyelesaian sengketa hukum pada Tahun 2025 yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga permasalahan hukum/perkara hukum dapat diselesaikan sebanyak 10 perkara dengan rincian perkara yang ditangani Putusan Inkrach 2 perkara, Cabut 1 Perkara dan masih proses 7 Perkara.

Jumlah Penanganan Masalah Hukum Non Litigasi dan HAM yang difasilitasi tahun 2025 yaitu penyelesaian sengketa hukum (perkara) non litigasi sebanyak 2 perkara sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 114 Penyelesaian Sengketa Hukum (Perkara) Non Litigasi Provinsi NTB Tahun 2025

No.	Dasar	Pihak Yang Keberatan	Objek Sengketa	Lokasi	Uraian Kasus	Tahapan Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Evaluasi dan/atau pemutusan perjanjian kerjasama antara pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan PT. Istana Cempaka Raya	Pemerintah Provinsi NTB	total seluas 72.723m yang terbagi atas seluas 30.000 m2 sesuai dengan sertifikat hak pakai nomor 03 tahun 1997 dan seluas 42.723m2 sesuai sertifikat hak pakai nomor 04 tahun 1997 yang belum dikembalikan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat setelah dipailitkannya PT. Indonesia Cempaka Raya sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram nomor: 115/Pdt.P/2022/PN.Mtr tentang pembubaran PT. Istana Cempaka Raya tanggal 20 Juni 2022	Gili Tangkong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat	Pembangunan Hotel dan Fasilitas pendukung lainnya yang berada di Gili Tangkong, Kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat dengan objek tanah aset milik pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat dengan total seluas 72.723m yang terbagi atas seluas 30.000 m2 sesuai dengan sertifikat hak pakai nomor 03 tahun 1997 dan seluas 42.723m2 sesuai sertifikat hak pakai nomor 04 tahun 1997 yang belum dikembalikan kepada pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat setelah dipailitkannya PT. Indonesia Cempaka Raya sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri Mataram nomor: 115/Pdt.P/2022/PN.Mtr tentang pembubaran PT. Istana Cempaka Raya tanggal 20 Juni 2022	Selesai
2	Gugatan/klaim terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimanfaatkan oleh UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pemerintah Provinsi NTB (UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat	Tanah yang telah disengketakan dan Dimenangkan Oleh Pemerintah Provinsi NTB Namun Sertifikatnya tidak Kunjung Diberikan	Grupuk Kabupaten Lombok Tengah	Melakukan gugatan/klaim terhadap aset milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dimanfaatkan oleh UPTD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di Grupuk Kabupaten Lombok Tengah dalam Perkara Nomor 29/Pdt.G/2021/PN.Pry. dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 333 PK/Pdt/2023 tanggal 8 Juni 2023 dan sampai dengan saat ini Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memberikan somasi/peringatan yang ke-3 kalinya kepada penggugat	Menunggu Laporan Dinas kelautan dan Perikanan

No.	Dasar	Pihak Yang Keberatan	Objek Sengketa	Lokasi	Uraian Kasus	Tahapan Kasus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
					karena tidak mau mengembalikan Sertifikat tersebut.	

Sumber: Biro Hukum Setda Provinsi NTB, 2025

2. Urusan Perencanaan

Bidang Perencanaan merupakan salah satu unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah. Sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pasal 260 bahwa Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Rencana pembangunan Daerah yang dimaksud dikoordinasikan, disinergikan, dan diharmonisasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi yang selanjutnya dituangkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 263, bahwa Dokumen perencanaan pembangunan Daerah terdiri atas: (1). RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun; (2) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun; dan (3) RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun.

Tabel 2. 115 Capaian IPPN dan Pembentuk Komponen SAKIP Bappeda Provinsi NTB Tahun 2023-2025

Indikator	Satuan	2023	2024	2025
Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) NTB	Indeks	87,83	91,47	87,39
Nilai SAKIP Komponen Perencaan	Nilai	25,41	25,21	24,16
Nilai SAKIP Komponen Pengukuran	Nilai	21,90	21,48	19,48

Sumber : Bappeda NTB, 2026

Perkembangan indikator perencanaan dan akuntabilitas pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2023–2025 menunjukkan bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah secara umum berada pada kategori baik, meskipun mengalami fluktuasi pada tahun terakhir. Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional (IPPN) NTB meningkat dari 87,83 pada tahun 2023 menjadi 91,47 pada tahun 2024, yang mencerminkan semakin baiknya kualitas proses perencanaan, konsistensi dokumen pembangunan, serta sinkronisasi program dan kebijakan daerah. Namun pada tahun 2025 indeks menurun menjadi 87,39, yang mengindikasikan perlunya penguatan kembali konsistensi implementasi perencanaan dan pengendalian pembangunan.

Sejalan dengan itu, nilai SAKIP pada komponen perencanaan dan pengukuran kinerja juga menunjukkan tren yang cenderung menurun. Nilai komponen perencanaan

turun dari 25,41 pada tahun 2023 menjadi 24,16 pada tahun 2025, sementara komponen pengukuran menurun dari 21,90 menjadi 19,48 pada periode yang sama. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya peningkatan kualitas indikator kinerja, penguatan sistem monitoring dan evaluasi, serta optimalisasi pemanfaatan data kinerja dalam mendukung perencanaan yang lebih efektif dan berorientasi hasil.

Secara keseluruhan, capaian tersebut menunjukkan bahwa tata kelola perencanaan pembangunan di Nusa Tenggara Barat telah berjalan cukup baik, namun masih diperlukan penguatan integrasi antara perencanaan, pengukuran, dan evaluasi kinerja agar pembangunan daerah semakin adaptif, terukur, dan akuntabel.

3. Urusan Pengawasan

Inspektorat sebagai perangkat daerah yang melaksanakan urusan pengawasan merupakan pilar utama selaku Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki posisi sangat strategis baik dari aspek pelaksanaan fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian Visi dan Misi serta program Pemerintah Daerah sesuai RPJMD. Inspektorat dalam kaitannya dengan pencapaian indikator RPJMD yang merupakan penegak supremasi hukum, pemerintahan yang bebas Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN), dan memantapkan otonomi daerah sekaligus mengawal pelaksanaan program yang ditetapkan dalam APBD sehingga target RPJMD dapat tercapai.

Kapabilitas APIP merupakan kemampuan APIP untuk memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, dan membantu organisasi mencapai tujuan melalui berbagai aktivitas dan dukungan pengawasan. Peningkatan Kapabilitas APIP mencakup seluruh rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas peran Pengawasan Intern dan memberikan nilai tambah, meningkatkan operasional organisasi, serta membantu organisasi mencapai tujuannya melalui penguatan tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern organisasi. Peningkatan Kapabilitas APIP dilaksanakan berdasarkan model kapabilitas APIP yang terdiri atas Level Kapabilitas APIP, Elemen Kapabilitas APIP dan Topik Kapabilitas APIP. Adapun Level Kapabilitas APIP yaitu level 1 (Rintisan), Level 2 (Terstruktur), Level 3 (Memadai), Level 4 (Terintegrasi) dan Level 5 Optimal.

Berdasarkan Laporan BPKP Nomor: PE.09.03/S-27 /D404/2/2026 tanggal 20 Januari 2026 tentang Laporan Hasil Evaluasi atas Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, menyebutkan nilai Kapabilitas APIP pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat berada pada Level 2 dengan skor 2,20. Pada tahun 2025, Penurunan Target Kapabilitas APIP dikarenakan perubahan pedoman penilaian Kapabilitas APIP oleh BPKP melalui Perban BPKP Nomor 6 Tahun 2025, juga diperjelas dengan Surat Kepala BPKP yang menghimbau penyesuaian target kinerja pada seluruh dokumen perencanaan yang indikator Kapabilitas APIP.

Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) General Dimensi Evaluasi dengan indikator Nilai Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi, Pelaksanaan RB pada Tahun 2025 merupakan kelanjutan dari upaya penguatan tata

kelola pemerintahan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan hasil evaluasi internal Inspektorat Provinsi NTB, pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2025 menunjukkan kinerja sangat baik, baik dari sisi output maupun keuangan, Capaian Output total: 98,13% dan Capaian Keuangan total: 97,46%. Capaian ini meningkat signifikan dibandingkan tahun 2024, yang masing-masing berada pada 95,50% (output) dan 92,92% (keuangan). Artinya, secara agregat, perangkat daerah mampu menjaga konsistensi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.

Tabel 2. 116 Capaian Indikator Pengawasan pada Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025

No.	Sasaran	Indikator Bidang Urusan	Tahun 2024	Tahun 2025	
			Realisasi	Target	Realisasi
1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level III (3,00)	Level II (2,20)	Level II (2,20)
2	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi General Dimensi Evaluasi	Nilai Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi	94	96	98.13

Sumber : Inspektorat Provinsi NTB, 2025

4. Urusan Keuangan

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Keuangan diselenggarakan oleh 2 Perangkat Daerah. yaitu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA). Adapun capaian dari penyelenggaraan urusan dari kedua Perangkat Daerah tersebut dapat dirincikan sebagai berikut.

a. Capaian indikator kinerja BPKAD Provinsi NTB sebagai berikut

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi NTB melaksanakan urusan keuangan sesuai dengan tugas dan fungsi mencapai indikator kinerja tersebut yang mempertahakan Opini WTP dari BPK RI. Salah Satu Wujud Tata Kelola Organisasi yang dilakukan oleh BPKAD Provinsi NTB adalah Menyajikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Akuntabel dan Transparan guna mempertahankan Opini WTP dari BPK RI.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah Opini Audit yang diterbitkan jika Laporan Keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika Laporan Keuangan diberikan opini artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku secara umum dengan baik, kalaupun ada kesalahan dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pembalikan keputusan. Di dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 telah memenuhi kriteria:

a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
b. Kecukupan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan;
c. Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan;
d. Efektifitas Sistem Pengendalian Intern, yaitu meliputi Keberadaan Aset, Kelengkapan Bukti dan Nilai Aset.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2025, Provinsi NTB telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun 2025. Prestasi tersebut adalah yang ke-15 secara berturut-turut dari tahun 2011-2025. Opini WTP ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan best practice dalam pengelolaan keuangan daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 117 Opini BPK RI Tahun 2021-2025

TAHUN	OPINI
2021	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2022	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2023	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2024	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
2025	Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)

Sumber : BPKAD Provinsi NTB, 2024

b. Capaian indikator kinerja Bappenda Provinsi NTB dideskripsikan berikut

Keberhasilan penyelenggaraan Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Keuangan yang ditangani oleh BAPPENDA Provinsi NTB diukur melalui 1 indikator kinerja, yaitu: Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam menetapkan target PAD, Pemerintah Provinsi NTB senantiasa memperhatikan estimasi dasar, peningkatan cakupan, pertumbuhan penduduk, kenaikan pendapatan riil per kapita, inflasi, perubahan tarif, pembangunan baru dan perubahan peraturan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari: 1) Pendapatan Pajak Daerah, 2) Hasil Retribusi Daerah, 3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan 4) Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

Sampai akhir Tahun 2025, PAD telah direalisasikan sebesar Rp 2.755.211.234.527,- dengan capaian 98,08% dari target sebesar Rp. 2.809.270.382.230,- Bila dibanding dengan tahun lalu terjadi penurunan sebesar 5,32% atau sebesar Rp. 2.910.047.635.097,- dengan rincian: pajak daerah berkontraksi 15,49%, retribusi daerah bertumbuh 18,80%, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan meningkat 13,37%, dan lain-lain PAD yang sah juga mengalami peningkatan sebesar 24,08%. Rincian perkembangan penerimaan bagian PAD tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 2. 118 Persentase Kontribusi PAD terhadap APBD Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun 2024	Tahun 2025			Pertumb (%)
		Target	Realisasi	Capaian	
PENDAPATAN DAERAH	**6.621.160.040.387**	**6.489.786.120.531**	**6.419.270.268.677**	**98,91**	**-3,05**
PENDAPATAN ASLI DAERAH	**2.910.047.635.097**	**2.809.270.382.230**	**2.755.211.234.527**	**98,08**	-5,32
Pajak Daerah	2.045.004.056.872	1.675.039.847.735	1.728.154.255.901	103,17	-15,49
Retribusi Daerah	714.494.532.672	956.275.591.665	848.815.665.257	88,76	18,80
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	79.902.735.899	90.582.447.997	90.582.447.997	100,00	13,37
Lain-lain PAD yang Sah	70.646.309.654	87.372.494.833	87.658.865.372	100,33	24,08
PENDAPATAN TRANSFER	**3.327.187.768.386**	**3.498.464.336.475**	**3.484.351.876.680**	**99,60**	4,72
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.322.615.573.146	3.493.257.748.000	3.479.128.762.945	99,60	4,71
Transfer Antar Daerah	4.572.195.240	5.206.588.475	5.223.113.735	100,32	14,24
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YG SAH	**383.924.636.905**	**182.051.401.826**	**179.707.157.470**	**98,71**	-53,19

Sumber : BAPPENDA Provinsi NTB, 2025 (Unaudited)

Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB menunjukkan peningkatan tiap tahunnya, namun belum signifikan. Rata-rata capaian Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi NTB berada pada kategori "Rendah". Rentang KFD baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan berubah setiap tahunnya. Sampai dengan akhir Desember 2025, kinerja penguatan kapasitas fiskal yang dikelola oleh Bapenda Provinsi Nusa Tenggara Barat berada di bawah target yang ditetapkan dalam perubahan target pendapatan 2025. Indeks kapasitas Fiskal Daerah ditargetkan sebesar 1,100 point, dan terealisasi sebesar 0,598 point (capaian 54,36%) dengan kategori rendah. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 097 Tahun 2025 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah, tanggal 22 Desember 2025. Pada dasarnya Peta Kapasitas Fiskal Daerah hanya dapat digunakan untuk: (a) Pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; (b) Penentuan besaran dana pendamping oleh Pemerintahan Daerah, jika dipersyaratkan; dan (c) Penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Grafik 2. 49 Realisasi Indeks Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB Tahun 2021-2025



Sumber: Kementerian Keuangan RI, 2025

Secara keseluruhan, kondisi ini menunjukkan bahwa kapasitas fiskal daerah masih cukup fluktuatif sehingga diperlukan penguatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi pendapatan asli daerah, peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan, serta efisiensi belanja daerah agar kemampuan pembiayaan pembangunan dapat lebih berkelanjutan dan stabil. Dalam grafik diatas adalah perhitungan IKFD yang dilakukan pemerintah provinsi NTB dengan menggunakan formula sederhana yakni PAD berbanding Pendapatan Daerah yang telah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Sementara kementerian tiap tahunnya mengeluarkan IKFD dengan menggunakan formula yang lebih kompleks dengan memperhitungkan KFD seluruh Provinsi di seluruh Indonesia. Akibat formulasi tersebut, rentang IKFD setiap tahunnya menjadi berbeda-beda tergantung rentang KFD nasional. Berikut adalah rentang KF:

Tabel 2. 119 Rentang dan Kategori Indeks Kapasitas Fiskal Daerah

Rentang Indeks Kapasitas Fiskal Daerah (IKFD)	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
IKFD < 0,304	Sangat rendah

0,304 ≤ IKFD < 0,445	Rendah
0,445 ≤ IKFD < 0,808	Sedang
0,808 ≤ IKFD < 1,564	Tinggi
IKFD ≤ 1,564	Sangat tinggi

Sumber: PMK RI Nomor 193/PMK.07/2022 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Kemandirian fiskal daerah juga menjadi perhatian khusus pemerintah pusat, karena masih banyak ruang untuk melakukan optimalisasi penerimaan, terutama Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari pajak daerah.

5. Urusan Kepegawaian

Bidang Kepegawaian merupakan salah satu unsur penunjang yang melaksanakan fungsi-fungsi yang bersifat strategis yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan Urusan Pemerintahan di daerah sesuai dengan amanat undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk melaksanakan fungsi penunjang Bidang Kepegawaian, dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

BKD Provinsi NTB mengambil peran yang sangat penting dalam melaksanakan transformasi birokrasi yang meliputi 8 (delapan) area Perubahan antara lain: (1) Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan; (2) Pengawasan; (3) Akuntabilitas; (4) Kelembagaan; (5) Tata Laksana; (6) Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara; (7) Peraturan Perundangundangan; dan (8) Pelayanan Publik. Dari 8 area tersebut, yang bersinggungan langsung dengan Urusan Pemerintahan Bidang Kepegawaian adalah Area Pertama yakni Aspek Mental Aparatur dan Manajemen Perubahan serta Area Keenam yakni Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara. Untuk menjawab tantangan dalam pengelolaan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB menetapkan sasaran kinerja Organisasi tahun 2024 yaitu :

a. Mewujudkan Managemen ASN yang Meritrokrasi dengan indikator Nilai Penerapan Sistem Merit;
b. Mewujudkan ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja dengan indikator Indeks Profesionalisme ASN (dimensi Kualifikasi, Kinerja dan Disiplin).

Kedua sasaran diatas bertujuan untuk menciptakan aparatur yang professional dan melayani dengan menerapkan sistem merit dimana setiap kebijakan dan manajemen Aparatur Sipil Negara senantiasa berlandaskan pada kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin secara adil dan wajar tanpa membedakan factor politik, ras, agama, asal usul, jenis kelamin, dan kondisi kecacatan sehingga mampu melakukan percepatan pencapaian reformasi birokrasi menuju NTB yang Gemilang.

Dari Kedua Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi diatas yang dituangkan dalam perjanjian kinerja perangkat daerah tahun 2024

Tabel 2. 120 Capaian Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah Bidang Kepagawaian Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2024

			Target	Realisasi
1.	Mewujudkan manajemen ASN yang Meritokrasi	Nilai Sistem Merit	301,5	264,5
2.	Mewujudkan ASN yang Profesional, beritegritas, netral dan berkinerja	Indeks Profesionalime ASN (Dimensi Kualifikasi,Kinerja, dan Disiplin	0,73	0,7843

Sumber: Badan Kepegawaian Daeran Provinsi NTB, 2024

Berdasarkan tabel diatas indikator kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB untuk indikator Indeks Profesionalisme ASN (dimensi kualifikasi, kinerja, dan disiplin) pada tahun 2024 dari target 0,73 point telah tercapai sebesar 0,7843 point atau dengan kata lain tingkat capaian terhadap target kinerja tahun 2024 sebesar 107,44 persen. Sedangkan untuk indikator Nilai Sistem merit pada tahun 2024 dari target 301,5 poin telah tercapai sebesar 264,5. Nilai ini merupakan hasil verifikasi sementara nilai Sistem Merit Provinsi NTB pada aplikasi SIPINTER

Dari capaian kinerja utama diatas, untuk indikator kinerja Penerapan Sistem Merit telah disusun Strategi dan Road Map Penerapan Sistem Merit lingkup Pemerintah Provinsi NTB yang memuat 8 (delapan) Aspek sebagai berikut:

1. Ketersediaan perencanaan kebutuhan pegawai untuk jangka menengah 5 (lima) tahun yang disusun berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja serta diperinci menurut jumlah, jabatan, pangkat, kualifikasi dengan mempertimbangkan pegawai yang ada dan akan pensiun;
2. Pelaskanaan pengadaan pegawai yang transparan dan kompetitif dalam rangka memenuhi kebutuhan pegawai, baik yang berasal dari calon PNS, PNS dari instansi lain, dan PPPK;
3. Pengembangan karir meliputi penetapan standar kompetensi jabatan, pemetaan kompetensi, pembangunan talent pool dan rencana suksesi, serta peningkatan kompetensi dalam upaya mengatasi kesenjangan kompetensi dan kesenjangan kinerja;
4. Pelaksanaan promosi, mutasi dan rotasi secara objektif dan transparan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja dengan mempertimbangkan pola karir dan rencana suksesi;
5. Manajemen kinerja melalui penetapan target kinerja yang terukur, evaluasi kinerja secara berkala dengan menggunakan metode yang objektif, identifikasi kesenjangan kinerja dan penyusunan strategi untuk mengatasinya serta pengunaan hasil penilaian kinerja dalam membuat keputusan terkait promosi, mutasi dan demosi serta pendidikan dan pelatihan;
6. Penggajian dan penghargaan yang didasarkan hasil penilaian kinerja serta pengangkatan disiplin dan kepatuhan pegawai terhadap kode etik dank ode prilaku pegawai ASN;
7. Perlindungan dan pelayanan kepada pegawai dalam melakukan tugas;dan
8. Ketersediaan sistem informasi yang mendukung pelaksanaan Sistem Merit dalam Manajemen ASN.

Indikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB lainnya adalah Indeks Profesionalisme ASN yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dan secara teknis lebih lanjut diatur dalam Peraturan Kepala BKN Nomor 8 tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN. Empat kriteria pengukuran tingkat profesionalitas ASN yaitu dimensi :

1. Kompetensi; dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi yang pernah diikuti oleh PNS dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan.
2. Kualifikasi; dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai kualifikasi pendidikan formal PNS dari jenjang paling tinggi sampai jenjang paling rendah.
3. Kinerja; dimensi kinerja digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai penilaian kinerja yang dilakukan berdasarkan perencanaan kinerja pada tingkat individu dan tingkat unit atau organisasi dengan memperhatikan target, capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai serta perilaku PNS.
4. Disiplin; dimensi disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi kepegawaian lainnya yang memuat hukuman yang pernah diterima PNS

Kriteria Indeks Profesionalitas ASN dikelompokkan menjadi lima kategori yaitu: 1) Sangat Tinggi 0,91-1; 2) Tinggi 0,81-0,9; 3) Sedang 0,71-0,8; 4) Rendah 0,61-0,7; dan 5) Sangat Rendah 0,6 kebawah. Capaian Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB dari tahun 2024 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2. 121 Indeks Profesionalisme ASN Provinsi NTB Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Tahun 2024		Tingkat Capaian Terhadap Target 2024
		Target	Realisasi	
1.	Kualifikasi	13.4	21.2	158.21
2.	Kompetensi	29	26.9	93,06
3.	Kinerja	23.6	25.24	106.95
4.	Disiplin	4.98	5.00	100.40
Nilai IPA		**70,97**	**78,43**	**110,51**

Sumber: Badan Kepegawaian Daeran Provinsi NTB, 2024

Pada table di atas menunjukkan Nilai IPA Provinsi NTB pada tahun 2024 berada pada angka 78, 43 % melampaui dari target 70,97%. atau dengan kata lain capaiannya sebesar 107,44 %. Kategori IPA Provinsi NTB pada Tahun 2024 berada pada kualifikasi Sedang.

6. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Bidang Pendidikan dan Pelatihan diselenggarakan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB. Secara kelembagaan, sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun

2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. BPSDMD Provinsi NTB selaku unit kerja yang menyelenggarakan kegiatan Bidang Pendidikan dan Pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 69 yang mengamanatkan bahwa pengembangan karier PNS dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah. Kompetensi ASN meliputi Kompetensi Teknis, Kompetensi Manajerial, dan Kompetensi Sosial Kultural yang ditingkatkan melalui salah satunya dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan yang merupakan hak dan kesempatan untuk mengembangkan karir.

BPSDMD Provinsi NTB dalam melaksanakan urusan serta tugas dan fungsinya, difokuskan pada Dimensi Kompetensi. Dimensi kompetensi merupakan salah satu dari empat komponen yang digunakan untuk mengukur nilai Indeks Profesionalisme ASN. Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN. Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur data/informasi mengenai riwayat pengembangan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan yang pernah diikuti oleh Aparat Sipil Negara dan memiliki kesesuaian dalam pelaksanaan tugas jabatan. Dimensi Kompetensi diperhitungkan sebesar 40 persen dari keseluruhan pengukuran Indeks Profesionalisme ASN dengan jenis diklat kompetensi yaitu diklat kompetensi manajerial, diklat kompetensi fungsional, dan diklat kompetensi teknis.

Sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi NTB mengampu urusan penunjang bidang pendidikan dan pelatihan. Sasaran strategis yang ditetapkan sesuai Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yaitu “Meningkatnya Sistem Merit Melalui Pengembangan Kompetensi ASN “ dengan indikator yaitu “Indeks Sistem Merit unsur Pengembangan Kompetensi”.

Tabel 2. 122 Capaian Indeks Sistem Merit unsur Pengembangan Kompetensi Provinsi NTB tahun 2024-2025

No	Urusan Pemerintahan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025	
						Target	Realisasi
1	Urusan Pendidikan dan Pelatihan	Meningkatnya Sistem Merit Melalui Pengembangan Kompetensi ASN	Indeks Sistem Merit unsur Pengembangan Kompetensi	Nilai (Kategori)	23	25,5	23

Sumber : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi NTB, 2025

Surat BKN Nomor: 15014/B-BM.02.01/SD/C.VII/2025, Tanggal 24 Oktober Tahun 2025 menyatakan bahwa Badan Kepegawaian Negara sudah tidak lagi melaksanakan pengukuran Indeks Profesionalitas ASN, sementara indikator kinerja

utama Kepala BPSDM Daerah Provinsi NTB Tahun 2025 adalah Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi. SE BKN tersebut berdampak pada perubahan sasaran dan indikator BPSDMD pada bulan November Tahun 2025, sehingga mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Utama Kepala BPSDM Daerah Provinsi NTB tahun 2025.

Berdasarkan tabel Capaian Indikator Kinerja Utama tahun 2025 urusan Pemerintahan urusan Penunjang bidang pendidikan dan pelatihan tahun 2025 di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Indikator indeks Sistem Merit unsur Pengembangan Kompetensi tahun 2025, target nilai 25,5 berasal dari penjumlahan bobot indikator pembentuk sistem merit aspek kompetensi yaitu aspek pengadaan dan pengembangan karier dikali dengan bobot nilai yang berasal dari tim verivikator dengan melihat kesesuaian data dukung atau eviden yang menjadi indikator dalam sub aspek penilaian system merit, dan berdasarkan eviden yang sudah diverivikasi oleh tim BKN capaian sistem merit aspek kompetensi terealisasi sebesar 23 (tingkat capaian 90%). Nilai 23 masuk dalam kategori baik karena telah memenuhi sebagian eviden dari aspek yang menjadi turunan dari Nilai Sistem Merit yaitu *aspek pengadaan dan aspek pengembangan karier.* Namun demikian, sampai tahun 2025, BPSDMD Provinsi NTB belum menyusun perencanaan data pengembangan kompetensi yang disebut dengan HCDP (Human Capital Development Plan) yang seharusnya menjadi dasar pemetaan kompetensi ASN pada dokumen rencana Tahun anggaran 2025-2029.
b. Capaian indeks Sistem Merit unsur Pengembangan Kompetensi pada BPSDM Daerah Provinsi NTB sebesar nilai 23 ini dirilis oleh BKN melalui penjabaran eviden dua aspek turunan merit sistem yaitu aspek *pengadaan dan aspek pengembangan karier* dengan penejelasan sebagai berikut:
   - **Aspek pengadaan** dengan sub aspek Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS dan orientasi bagi ASN PPPK Provinsi dengan target nilai 8, terealisasi 8 atau tercapai 100 persen. Aspek ini terpenuhi karena BPSDMD sudah melaksanakan orientasi PPPK ASN Provinsi dan latsar CPNS pada tahun 2025.
   - **Aspek pengembangan karier** pada sub aspek Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN, dengan target nilai 5 terealisasi nilai 2,5 atau tercapai 50 persen. Realisasi nilai 2,5 terpenuhi melalui rapat koordinasi BPSDMD Provinsi NTB dengan OPD dan Pemkab/Kota se-NTB, dan penyediaan data kebutuhan pengembangan kompetensi ASN dalam satu tahun berdasarkan usulan dari masing-masing Perangkat Daerah sebagai bahan perencanaan kediklatan di BPSDMD pada tahun 2025.
   - **Aspek pengembangan karir** pada sub aspek penyelenggaraan diklat untuk mengatasi kesenjangan, target nilai 7,5 terealisasi 7,5 atau tercapai 100 persen. Terpenuhinya aspek ini karena pengembangan kompetensi berupa diklat struktural (PKA dan PKP), diklat teknis, workshop, seminar telah dilaksanakan selama tahun 2025 untuk mengatasi kesenjangan kompetensi ASN Pemerintah Provinsi NTB.

- **Aspek pengembangan karir** pada sub aspek pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai, dengan target nilai 2,5 terealisasi 2,5 atau tercapai 100 persen. Meskipun anggaran praktik kerja dan pertukaran pegawai ini tidak ada di tahun 2025, namun dengan terbitnya Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2025 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (Corporate University) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTB sebagai payung hukum penyelenggaraan pengelolaan pengembangan kompetensi, penyelenggaraan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai dapat terlaksana.

- **Aspek pengembangan karir** pada sub aspek pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring dengan target nilai 2,5 terealisasi 2,5 atau tercapai 100 persen. Eviden Tahun 2025 untuk sub aspek ini yaitu coaching dan mentoring oleh widyaiswara dan beberapa tim lainnya dari BPSDMD Provinsi NTB dengan sasaran 40 Desa Berdaya Transformatif. Coaching dan mentoring pada tahap awal menyasar aparat desa/kelurahan yaitu Kepala Desa dan Lurah, dengan melakukan pendampingan dalam penyusunan rencana aksi pemberdayaan desa. Tahun 2026 perencanaannya akan dikaitkan dengan pengembangan kompetensi ASN pada OPD yang terkait dengan penyelesaian permasalahan pada 40 lokus desa berdaya transformatif.

7. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Urusan Pemerintah Fungsi Penunjang Bidang Penelitian dan Pengembangan yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sesuai amanat Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2025 tentang tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTB. Namun sejak awal tahun 2022, urusan penelitian dan pengembangan menjadi bagian dari tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi NTB. Hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur NTB Nomor 32 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan-badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan komitmen kuat dalam menjaga marwah sebagai Provinsi Terinovatif. Pada tahun 2025, Provinsi NTB berhasil meraih nilai indeks 73,25 dengan predikat Sangat Inovatif, menempatkan diri pada peringkat ke-8 secara nasional dalam kategori Provinsi. Capaian ini merupakan hasil dari langkah cepat Pemerintah Provinsi NTB dalam melakukan akselerasi dan penguatan ekosistem inovasi di seluruh lini pemerintahan daerah.

Berikut grafik usulan inovasi dari tahun 2021-2025 dan predikat yang diterima Pemerintah Provinsi NTB.

Grafik 2. 50 Usulan inovasi dan predikat yang diterima Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2021-2025.



Sumber: Brida Provinsi NTB, 2025

Berdasarkan grafik diatas pada tahun 2025, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang telah terkirim ke Kemendagri sejumlah 139 inovasi terdiri dari inovasi digital sebanyak 51 inovasi dan non digital sebanyak 88 inovasi.

Distribusi inovasi berdasarkan inovatornya adalah sebagai berikut :

1. **Masyarakat**: Terdapat **23 inovasi** yang berasal dari partisipasi masyarakat. Inovasi ini mencerminkan kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap layanan publik serta cara-cara baru dalam meningkatkan kualitas kehidupan bersama.
2. **Organisasi Perangkat Daerah (OPD)**: OPD memiliki kontribusi paling besar dengan **116 inovasi**. OPD berperan penting dalam pengembangan dan implementasi kebijakan serta program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sehingga inovasi mereka kerap kali mencakup berbagai aspek pelayanan publik, administrasi, serta pengelolaan informasi.

Angka-angka ini menunjukkan bahwa inovasi yang dilaksanakan di Provinsi NTB melibatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, di mana setiap kelompok membawa idenya sendiri untuk meningkatkan layanan dan efektivitas pemerintahan. Setiap jenis inovasi memiliki karakteristik yang unik dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Produktivitas inovasi di NTB pada tahun 2025 mencatat total 139 inovasi yang telah dilaporkan ke Kemendagri. Keberhasilan ini didorong oleh kolaborasi inklusif antara birokrasi dan partisipasi publik. Inovasi Perangkat Daerah (OPD): Menjadi kontributor utama dengan 116 inovasi, yang mencakup transformasi pelayanan publik, efisiensi administrasi, dan tata kelola informasi. Partisipasi Masyarakat: Tercatat sebanyak 23 inovasi lahir dari inisiatif warga, yang mencerminkan respons masyarakat terhadap kebutuhan layanan publik dan peningkatan kualitas hidup.

Karakteristik Inovasi;Dari total inovasi yang dikirim, terdapat 51 inovasi digital dan 88 inovasi non-digital. Hal ini menunjukkan keseimbangan antara adaptasi teknologi modern dengan pendekatan konvensional yang tetap relevan bagi masyarakat.

Tabel 2. 123 Indeks Inovasi Daerah Tahun 2025 Kategori Provinsi

NO	DAERAH	NILAI	PREDIKAT
1	Provinsi Jawa Timur	90,84	Sangat Inovatif
2	Provinsi Sumatera Barat	86,96	Sangat Inovatif
3	Provinsi Jawa Barat	85,05	Sangat Inovatif
4	Provinsi DKI Jakarta	82,93	Sangat Inovatif
5	Provinsi Jawa Tengah	82,63	Sangat Inovatif
6	Provinsi Sumatera Selatan	81,23	Sangat Inovatif
7	Provinsi Bali	77,04	Sangat Inovatif
8	**Provinsi Nusa Tenggara Barat**	**73,25**	**Sangat Inovatif**
9	Provinsi Sumatera Utara	64,79	Inovatif
10	Provinsi Maluku Utara	63,64	Inovatif

Sumber : Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi NTB, 2025

2.2.4 Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing adalah hasil pengolahan atas kapasitas suatu negara berinovasi, berbasis sektor-sektor kunci yang ada. Untuk skala regional/lokal, daya saing suatu daerah menjadi hasil dari kemampuan memobilisasi berbagai sumberdaya (ekonomi, sosial dan lingkungan) untuk peningkatan taraf hidup masyarakat, serta mampu berkompetisi dengan daerah-daerah lain di dalam negeri maupun secara global. Bank Indonesia dan Fakultas Ekonomi Universitas Padjajaran dalam penelitiannya, mendefinisikan daya saing daerah sebagai kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan domestik dan internasional. Indikator utama yang menentukan daya saing daerah adalah: 1. Perekonomian Daerah; 2. Keterbukaan; 3. Sistem Keuangan; 4. Infrastruktur dan Sumber Daya Alam; 5. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; 6. Sumber Daya Manusia; 7. Institusi, Tata Pemerintahan dan Kebijakan Pemerintah; dan 8. Manajemen dan Ekonomi Mikro. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Aspek Daya Saing Daerah terdiri dari: 1. Kemampuan Ekonomi Daerah; 2. Fasilitas Wilayah/Infrastruktur; 3. Iklim Berinvestasi; dan 4. Sumber Daya Manusia.

2.1.4.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

Kemampuan ekonomi daerah terkait dengan daya saing daerah adalah kapasitas ekonomi daerah harus memiliki daya Tarik bagi pelaku ekonomi yang telah berada di dalam dan dan akan masuk ke suatu daerah untuk menciptakan nilai tambah bagi peningkatan daya saing daerah. Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator: 1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita; 2. Pengeluaran konsumsi non pangan per kapita; 3. Produktivitas total daerah; dan 4. Nilai tukar petani.

1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Salah satu indikator yang dapat menggambarkan aspek kemampuan ekonomi daerah dalam peranannya sebagai pendorong daya saing daerah adalah indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Indikator ini menggambarkan tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa atraktif tingkat pengeluaran rumah tangga. Semakin besar angka konsumsi rumah tangga semakin atraktif bagi peningkatan

kemampuan ekonomi daerah. Indikator pengeluaran per kapita menunjukan bahwa kondisi kesejahteraan ekonomi masyarakat dengan menggambarkan kemampuan daya beli masyarakat selama periode tertentu dengan cara membelanjakan uangnya dalam bentuk barang maupun jasa.

Grafik 2. 51 Pengeluaran Per Kapita Provinsi NTB Tahun 2021-2025



Sumber : BPS NTB, 2025, diolah

Selama periode 2021–2025, pengeluaran per kapita masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan tren yang terus meningkat. Nilai pengeluaran per kapita meningkat dari Rp10,337 juta pada tahun 2021 menjadi Rp11,922 juta pada tahun 2025, atau tumbuh sekitar 15,3 persen dalam lima tahun terakhir. Peningkatan tersebut mencerminkan semakin membaiknya aktivitas perekonomian daerah yang berdampak pada meningkatnya pendapatan dan daya beli masyarakat, sehingga kemampuan konsumsi rumah tangga terus mengalami penguatan. Rata-rata pengeluaran per kapita masyarakat NTB selama periode tersebut tercatat sebesar Rp11,120 juta.

Meskipun menunjukkan perkembangan yang positif, tingkat pengeluaran per kapita masyarakat NTB masih berada di bawah rata-rata nasional yang pada tahun 2025 mencapai Rp12,802 juta. Dibandingkan dengan beberapa provinsi di kawasan Jawa, Bali, dan Sulawesi, pengeluaran per kapita NTB juga masih relatif lebih rendah. Pada tahun 2025, pengeluaran per kapita masyarakat Bali mencapai sekitar Rp15,5 juta, Jawa Timur Rp13,6 juta, Sulawesi Selatan Rp12,9 juta, dan Jawa Barat Rp12,4 juta, sedangkan NTB sebesar Rp11,9 juta, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang sebesar sekitar Rp8,8 juta.

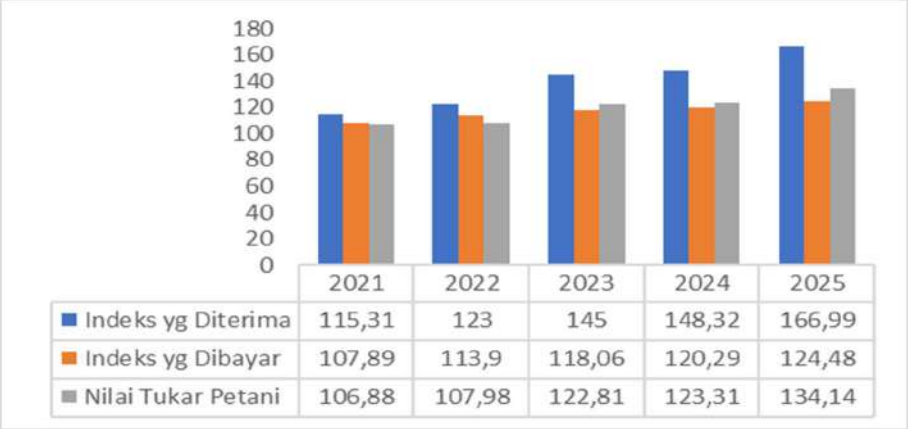
Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di NTB masih perlu terus diperkuat melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan. Peningkatan produktivitas sektor-sektor unggulan, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas, penguatan hilirisasi dan nilai tambah komoditas unggulan, serta perluasan kesempatan berusaha menjadi faktor penting dalam mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Di sisi lain, masih terdapat kesenjangan tingkat pengeluaran antarwilayah dan antarkelompok masyarakat yang perlu mendapat perhatian melalui kebijakan pembangunan yang lebih merata, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara lebih luas dan berkontribusi terhadap peningkatan daya beli serta kesejahteraan masyarakat NTB secara berkelanjutan.

2. Nilai Tukar Petani

Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani, yang menunjukkan kemampuan tukar produk pertanian yang dihasilkan terhadap barang dan jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga maupun kegiatan produksi pertanian. NTP dihitung dengan membandingkan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) terhadap Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) dikalikan 100. Nilai NTP di atas 100 mengindikasikan bahwa pendapatan yang diterima petani dari hasil usahataninya relatif lebih besar dibandingkan pengeluaran yang harus dikeluarkan untuk konsumsi dan biaya produksi.

Selama periode 2021–2025, Nilai Tukar Petani (NTP) di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren yang terus meningkat, dari 106,88 pada tahun 2021 menjadi 134,14 pada tahun 2025. Peningkatan tersebut sejalan dengan perkembangan Indeks Harga yang Diterima Petani (It) yang meningkat cukup signifikan dari 115,31 menjadi 166,99, sementara Indeks Harga yang Dibayar Petani (Ib) juga mengalami kenaikan namun dengan laju yang lebih rendah, yaitu dari 107,89 menjadi 124,48. Kondisi ini menunjukkan bahwa kenaikan harga komoditas yang diterima petani berlangsung lebih cepat dibandingkan kenaikan biaya konsumsi rumah tangga dan sarana produksi pertanian.

Grafik 2. 52 Nilai Tukar Petani NTB tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Indeks yg Diterima	115,31	123	145	148,32	166,99
Indeks yg Dibayar	107,89	113,9	118,06	120,29	124,48
Nilai Tukar Petani	106,88	107,98	122,81	123,31	134,14

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2024

Meningkatnya NTP mencerminkan adanya perbaikan daya beli dan tingkat kesejahteraan petani di Provinsi NTB. Namun demikian, keberlanjutan peningkatan kesejahteraan petani masih memerlukan dukungan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, penguatan akses pasar dan rantai nilai, stabilisasi harga komoditas pertanian, serta efisiensi biaya produksi. Upaya tersebut perlu terus diperkuat agar peningkatan pendapatan petani dapat berlangsung secara berkelanjutan, sekaligus mendukung transformasi sektor pertanian sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

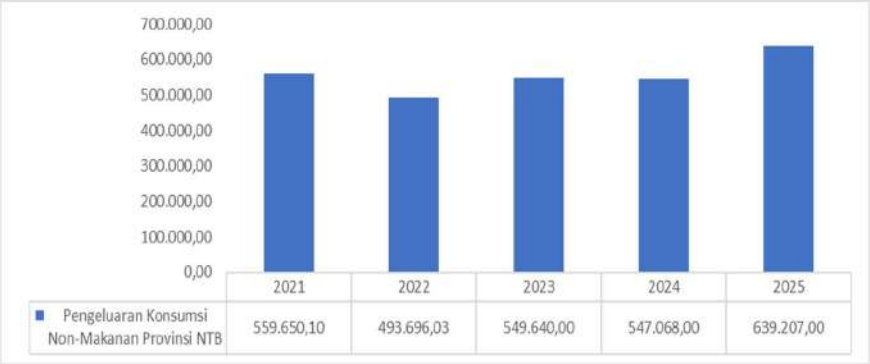
3. Pengeluaran Konsumsi Non-Pangan Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi non-makanan merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena mencerminkan kemampuan

rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan selain pangan, seperti perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, serta berbagai kebutuhan barang dan jasa lainnya. Semakin tinggi proporsi pengeluaran non-makanan, umumnya menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat.

Selama periode 2021–2025, pengeluaran konsumsi non-makanan masyarakat Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun sempat mengalami fluktuasi. Pada tahun 2021, pengeluaran konsumsi non-makanan tercatat sebesar Rp559.650,10, kemudian menurun menjadi Rp493.696,03 pada tahun 2022. Selanjutnya, nilai tersebut kembali meningkat menjadi Rp549.640,00 pada tahun 2023, relatif stabil pada tahun 2024 sebesar Rp547.068,00, dan mencapai Rp639.207,00 pada tahun 2025 sebagai capaian tertinggi selama lima tahun terakhir.

Grafik 2. 53 Pengeluaran Konsumsi Non-Makanan Provinsi NTB Tahun 2021–2025



Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

Peningkatan pengeluaran konsumsi non-makanan tersebut mengindikasikan adanya perbaikan kemampuan ekonomi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan di luar konsumsi pangan. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya daya beli masyarakat yang didukung oleh pertumbuhan aktivitas ekonomi, peningkatan pendapatan rumah tangga, serta semakin besarnya alokasi pengeluaran untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, transportasi, komunikasi, dan berbagai layanan lainnya. Ke depan, peningkatan konsumsi non-makanan perlu terus didorong melalui penguatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja yang produktif, serta peningkatan pendapatan masyarakat agar kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat NTB dapat terus meningkat secara berkelanjutan.

4. Perkembangan Ekspor

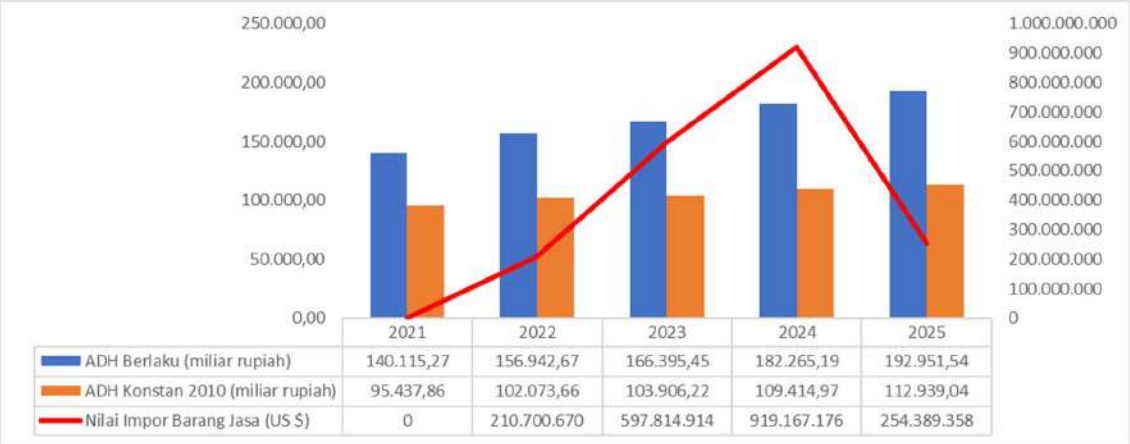
Selama periode 2021–2025, nilai ekspor barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan tren yang terus meningkat, dari Rp140.115,27 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp192.951,54 miliar pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 37,7 persen. Hal yang sama juga terjadi pada PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, yang meningkat dari Rp95.437,86 miliar menjadi Rp112.939,04 miliar pada periode yang sama. Peningkatan tersebut menunjukkan bahwa ekspor NTB tidak hanya mengalami kenaikan secara nominal akibat

perubahan harga, tetapi juga mengalami pertumbuhan secara riil yang mencerminkan meningkatnya volume aktivitas ekspor.

Dari sisi perdagangan internasional, nilai ekspor barang NTB yang diukur dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US$) mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Setelah mencapai sekitar US$210,70 juta pada tahun 2022, nilai ekspor meningkat tajam menjadi US$597,81 juta pada tahun 2023 dan mencapai puncaknya sebesar US$919,17 juta pada tahun 2024. Namun, pada tahun 2025 nilai ekspor menurun menjadi sekitar US$254,39 juta. Fluktuasi tersebut mengindikasikan bahwa kinerja ekspor NTB masih sangat dipengaruhi oleh dinamika permintaan pasar global, perubahan harga komoditas ekspor utama, serta kondisi perdagangan internasional.

Ke depan, kinerja ekspor NTB perlu terus diperkuat melalui diversifikasi produk ekspor, peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi komoditas unggulan, penguatan daya saing industri pengolahan, serta perluasan akses pasar internasional. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sektor ekspor terhadap gejolak ekonomi global sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing.

Grafik 2. 54 Nilai Ekspor Barang dan Jasa Provinsi NTB Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
ADH Berlaku (miliar rupiah)	140.115,27	156.942,67	166.395,45	182.265,19	192.951,54
ADH Konstan 2010 (miliar rupiah)	95.437,86	102.073,66	103.906,22	109.414,97	112.939,04
Nilai Impor Barang Jasa (US $)	0	210.700.670	597.814.914	919.167.176	254.389.358

Sumber: BPS NTB, 2026, diolah

5. Perkembangan Impor

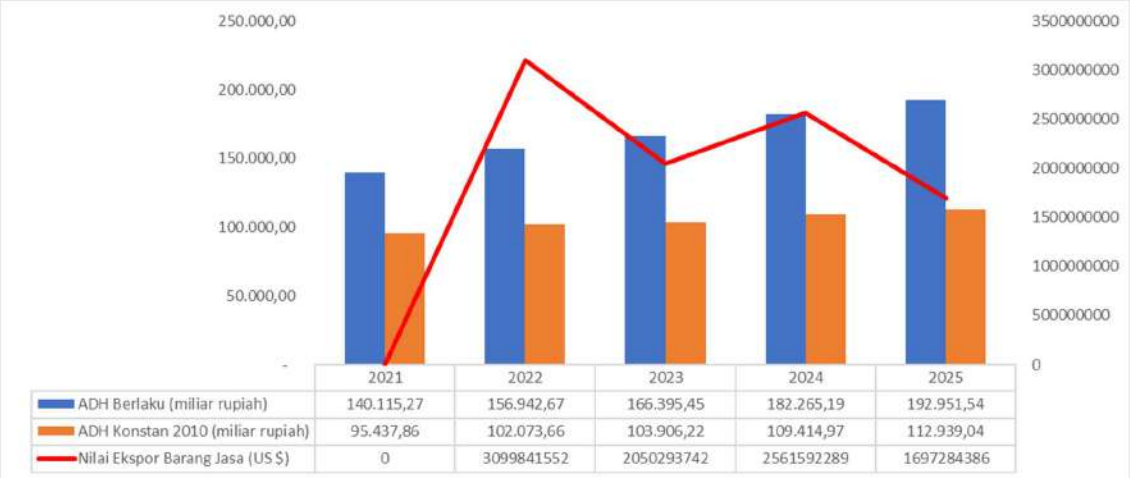
Impor barang dan jasa merupakan salah satu komponen dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menggambarkan nilai barang dan jasa yang didatangkan dari luar daerah maupun luar negeri untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, investasi, serta bahan baku dan penolong bagi kegiatan produksi. Perkembangan impor umumnya mencerminkan dinamika aktivitas ekonomi daerah, dimana peningkatan impor dapat menunjukkan meningkatnya kebutuhan bahan baku dan barang modal yang mendukung proses produksi dan investasi. Selama periode 2021–2025, nilai impor barang dan jasa Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berdasarkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menunjukkan tren yang terus meningkat, yaitu dari Rp140.115,27 miliar pada tahun 2021 menjadi Rp192.951,54 miliar pada tahun 2025, atau meningkat sekitar 37,7 persen. Peningkatan yang sama juga tercermin pada

PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010, yang naik dari Rp95.437,86 miliar menjadi Rp112.939,04 miliar selama periode yang sama. Hal tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan terhadap barang dan jasa dari luar daerah maupun luar negeri terus meningkat seiring berkembangnya aktivitas ekonomi di Provinsi NTB.

Sementara itu, nilai impor barang yang diukur dalam mata uang dolar Amerika Serikat (US$) mengalami fluktuasi yang cukup tinggi. Setelah mencapai sekitar US$309,98 juta pada tahun 2022, nilai impor menurun menjadi US$205,03 juta pada tahun 2023, kemudian kembali meningkat menjadi US$256,16 juta pada tahun 2024. Pada tahun 2025, nilai impor kembali mengalami penurunan menjadi sekitar US$169,73 juta. Fluktuasi tersebut dipengaruhi oleh perubahan kebutuhan bahan baku, barang modal, dan barang konsumsi, serta dinamika harga komoditas dan kondisi perdagangan internasional.

Ke depan, peningkatan aktivitas impor perlu diimbangi dengan penguatan kapasitas produksi dalam negeri, peningkatan penggunaan bahan baku lokal, serta pengembangan industri pengolahan berbasis sumber daya unggulan daerah. Upaya tersebut diharapkan mampu mengurangi ketergantungan terhadap barang impor, meningkatkan nilai tambah produk lokal, memperkuat daya saing perekonomian daerah, serta menciptakan struktur perdagangan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Grafik 2. 55 Nilai Impor Barang dan Jasa Provinsi NTB Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
ADH Berlaku (miliar rupiah)	140.115,27	156.942,67	166.395,45	182.265,19	192.951,54
ADH Konstan 2010 (miliar rupiah)	95.437,86	102.073,66	103.906,22	109.414,97	112.939,04
Nilai Ekspor Barang Jasa (US $)	0	3099841552	2050293742	2561592289	1697284386

Sumber : BPS NTB, 2026, diolah

2.1.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

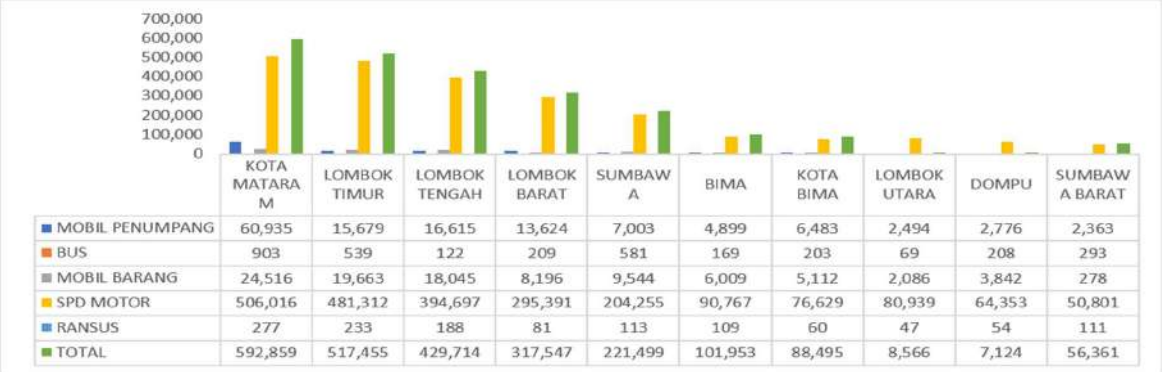
Analisis kinerja atas aspek fasilitas wilayah/infrastruktur dilakukan terhadap indikator: 1. Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan; 2. Jumlah Orang melalui Dermaga/Bandara/Terminal per Tahun; 3. Ketaatan terhadap RTRW; 4. Luas Wilayah kebanjiran; 5. Luas Wilayah Kekeringan; 6. Luas Wilayah Perkotaan; 7. Jenis dan Jumlah Bank dan Kantor Bank; 8. Jumlah Restoran; 9. Jenis dan Jumlah Hotel Berbintang dan Non Bintang; 10. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih; 11. Rasio Ketersediaan Daya Listrik; 12. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik.

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan diperoleh dengan membagi jumlah kenddaraan (unit) dengan panjang jalan (km). Dalam setiap 1 km panjang jalan menunjukan layanan terhadap sejumlah kendaraan. Kendaraan yang diperhitungkan terdiri dari mobil penumpang, bus, mobil barang dan sepeda motor. Sedangkan jalan yang diperhitungkan adalah jalan negara, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.

Nilai rasio panjang jalan dengan kendaraan menginformasikan tingkat penggunaan jalan di suatu wilayah, meskipun belum mencerminkan kepadatan jalannya dikarenakan belum diperhitungkan bobot perbedaan jenis kendaraan.

Grafik 2. 56 Jumlah Kendaraan di NTB menurut Kabupaten/Kota Tahun 2025



	KOTA MATARAM	LOMBOK TIMUR	LOMBOK TENGAH	LOMBOK BARAT	SUMBAWA	BIMA	KOTA BIMA	LOMBOK UTARA	DOMPU	SUMBAWA BARAT
MOBIL PENUMPANG	60,935	15,679	16,615	13,624	7,003	4,899	6,483	2,494	2,776	2,363
BUS	903	539	122	209	581	169	203	69	208	293
MOBIL BARANG	24,516	19,663	18,045	8,196	9,544	6,009	5,112	2,086	3,842	278
SPD MOTOR	506,016	481,312	394,697	295,391	204,255	90,767	76,629	80,939	64,353	50,801
RANSUS	277	233	188	81	113	109	60	47	54	111
TOTAL	592,859	517,455	429,714	317,547	221,499	101,953	88,495	8,566	7,124	56,361

Sumber : rc.korlantas.polri.go.id

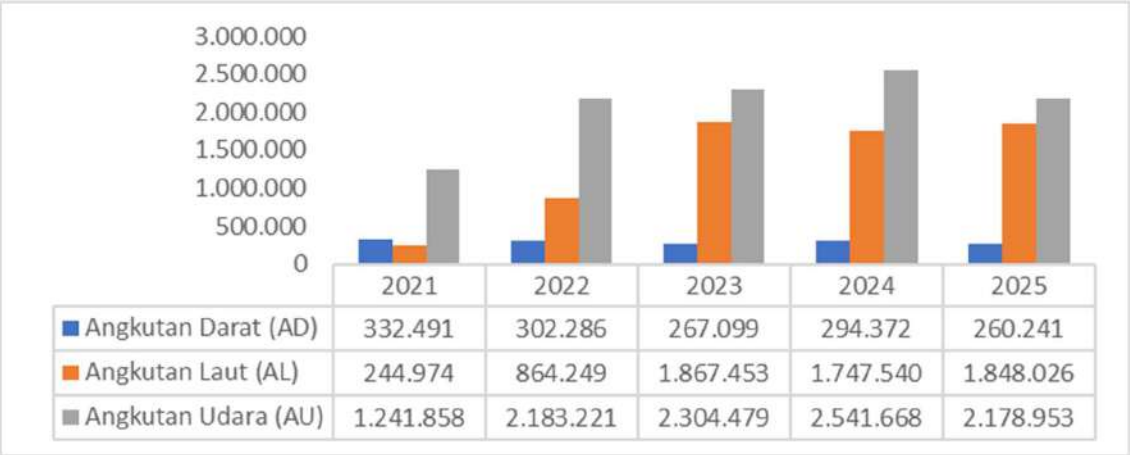
Berdasarkan data tersebut, Kota Mataram merupakan wilayah dengan jumlah kendaraan bermotor terbanyak, yaitu 592.859 unit, terdiri atas 506.016 sepeda motor, 60.935 mobil penumpang, 24.516 mobil barang, 903 bus, dan 277 kendaraan khusus (ransus). Jumlah tersebut diikuti oleh Kabupaten Lombok Timur sebanyak 517.455 unit dan Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 429.714 unit. Sebaliknya, jumlah kendaraan bermotor paling sedikit terdapat di Kabupaten Dompu dengan 7.124 unit, diikuti Kabupaten Lombok Utara sebanyak 8.566 unit.

Tingginya jumlah kendaraan bermotor di beberapa wilayah mencerminkan meningkatnya aktivitas ekonomi, mobilitas penduduk, serta kebutuhan masyarakat terhadap sarana transportasi. Di sisi lain, peningkatan jumlah kendaraan juga menjadi tantangan dalam penyediaan infrastruktur transportasi, pengelolaan lalu lintas, keselamatan berkendara, serta pengendalian emisi kendaraan bermotor. Oleh karena itu, pengembangan jaringan jalan, peningkatan kualitas angkutan umum, serta penerapan sistem transportasi yang berkelanjutan perlu terus didorong agar mampu mengakomodasi pertumbuhan jumlah kendaraan sekaligus mendukung kelancaran mobilitas masyarakat dan aktivitas perekonomian di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

2. Tingkat Konektivitas Antar Wilayah

Salah satu strategi dalam rangka percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi pada pengembangan suatu wilayah adalah melalui konektivitas antar wilayah. Peningkatan Tingkat konektivitas antar wilayah diantaranya adalah dengan ketersediaan sarana dan prasarana perhubungan darat, perhubungan laut melalui ASDP serta perhubungan udara melalui Angkasa Pura.

Grafik 2. 57 Jumlah Penumpang Provinsi NTB Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Angkutan Darat (AD)	332.491	302.286	267.099	294.372	260.241
Angkutan Laut (AL)	244.974	864.249	1.867.453	1.747.540	1.848.026
Angkutan Udara (AU)	1.241.858	2.183.221	2.304.479	2.541.668	2.178.953

Sumber: Dinas Perhubungan Provinsi NTB, 2025

Grafik di atas menunjukkan bahwa jumlah penumpang angkutan darat, laut, dan udara di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2021–2025 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat, terutama pada moda angkutan laut dan udara. Pada tahun 2021, jumlah penumpang masih relatif rendah, khususnya pada angkutan laut dan udara, yang merupakan dampak dari terbatasnya mobilitas masyarakat pada periode sebelumnya. Namun demikian, mulai tahun 2022 mobilitas masyarakat kembali meningkat seiring dengan membaiknya aktivitas ekonomi, pariwisata, dan transportasi, sehingga jumlah penumpang pada kedua moda tersebut mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Angkutan udara secara konsisten menjadi moda transportasi dengan jumlah penumpang terbesar di Provinsi NTB. Jumlah penumpang angkutan udara meningkat dari 1.241.858 penumpang pada tahun 2021 menjadi 2.183.221 penumpang pada tahun 2022, kemudian terus meningkat hingga mencapai 2.541.668 penumpang pada tahun 2024 sebelum sedikit menurun menjadi 2.178.953 penumpang pada tahun 2025. Sementara itu, angkutan laut juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat, dari 244.974 penumpang pada tahun 2021 menjadi 864.249 penumpang pada tahun 2022 dan meningkat tajam menjadi 1.867.453 penumpang pada tahun 2023. Pada periode 2023–2025, jumlah penumpang angkutan laut relatif stabil pada kisaran 1,7 juta hingga 1,8 juta penumpang, yang menunjukkan semakin tingginya mobilitas antarwilayah kepulauan di NTB maupun dengan daerah lain.

Berbeda dengan angkutan laut dan udara, angkutan darat menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan. Jumlah penumpang angkutan darat berfluktuasi pada kisaran 260.241 hingga 332.491 penumpang selama periode 2021–2025, dengan jumlah pengguna yang cenderung lebih rendah dibandingkan moda transportasi lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masyarakat lebih banyak memanfaatkan transportasi udara dan laut, terutama untuk perjalanan antarpulau, perjalanan jarak jauh, maupun aktivitas yang berkaitan dengan sektor pariwisata dan perdagangan.

Peningkatan jumlah penumpang, khususnya pada moda angkutan udara dan laut, tidak terlepas dari semakin membaiknya kualitas infrastruktur transportasi di Provinsi NTB, berkembangnya kawasan strategis seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)

Mandalika, serta meningkatnya aktivitas pariwisata dan investasi daerah. Selain itu, penyelenggaraan berbagai ajang internasional, seperti MotoGP di Sirkuit Mandalika, penguatan citra Lombok sebagai destinasi wisata kelas dunia, serta meningkatnya pelaksanaan kegiatan berskala nasional maupun internasional turut mendorong pertumbuhan mobilitas penumpang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sektor transportasi memiliki peran yang semakin strategis dalam mendukung konektivitas wilayah, pertumbuhan ekonomi, serta pengembangan sektor pariwisata dan perdagangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

3. Luas Wilayah Kebanjiran

Wilayah rawan bencana banjir tersebar di wilayah kabupaten/kota Provinsi NTB, berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB 2024-2044, lokasi rawan bencana banjir dijabarkan pada tabel berikut.

Tabel 2. 124 Kawasan Rawan Banjir di Provinsi NTB

No	Kab/Kota	Lokasi Kawasan Rawan Banjir
1	Kota Mataram	Daerah Ampenan Utara, Kopajali, Sekitar Kekalik, Sungai Meninting, Sungai Midang, Sungai Ancar, Sungai Unus dan Sungai Jangkok
2	Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Daerah Empol (Sekotong Tengah), Bayan, Gangga-Lempenge, sepanjang Sungai Penggolong Rempek dan Anyar, Sungai Bentek, Menggala (Pemenang), Berora, Gerung, dan Jembatan Kembar
3	Kab. Lombok Tengah	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Tengah
4	Kab. Lombok Timur	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di seluruh wilayah Kabupaten Lombok Timur
5	Kab. Sumbawa dan Sumbawa Barat	Sepanjang Brang Moyo di daerah Poto Tengke Moyo Hilir, Brang Beh di Lunyuk, Brang Rea di Taliwang, Brang Benete di Jereweh, Brang Labuhan Mapin di Alas, Brang Utan di Utan Rhee, Brang Muir di Plampang, Empang, Moyo Hulu, Ropang dan Lape Lopok
6	Kab. Dompu	Daerah di sepanjang aliran sungai yang terdapat di Kabupaten Dompu
7	Kota Bima	Daerah di sepanjang pantai di Kota Raba, khususnya yang dekat dengan lembah sungai
8	Kab. Bima	Daerah di sepanjang aliran sungai di Sori Wawo Maria, daerah Sape dan sekitarnya, Karumbu, Lambu, Ntoke – Tawali, Wera, Jatiwangi, dan daerah sekitar aliran sungai lainnya di wilayah Kabupaten Bima

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2025

4. Luas Wilayah Kekeringan

Bencana kekeringan yang terjadi di Provinsi NTB dominan berada di Pulau Lombok dengan luasan sebesar 96.644,12 Ha, sedangkan di pulau Sumbawa sebesar 1.775,57 Ha. Berdasarkan lampiran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB 2024-2044, lokasi rawan bencana banjir di jabarkan pada tabel berikut:

Tabel 2. 125 Kawasan Rawan Kekeringan di Provinsi NTB

No	Kab/Kota	Lokasi Kawasan Rawan Kekeringan
1	Kab. Lombok Barat dan Lombok Utara	Kecamatan Lembar; Sekotong dan sekitarnya; Kedondong; Malimbu; Pemenang dan sekitarnya; Tanjung; Liuk-Kayangan-Selengen-Bayan; dan Medas
2	Kab.Lombok Tengah	Praya Barat, Praya Timur, Pujut, Praya Tengah, Janapria dan Praya Barat Daya.
3	Kab.Lombok Timur	Keruak-Jerowaru-Sakra-Sakra Barat-Sakra Timur-Sikur; Labuhan Haji; Pringgabaya; Kecamatan Sambelia dan sekitarnya
4	Kab. Sumbawa Barat	Sejorong, Maluk, Jereweh-Endeh-Bertong-Taliwang-TepasSeteluk-Labuhan Sepakeh
5	Kab. Sumbawa	Lunyuk Besar-Kopo-Batulanteh-Baturotok-Punik; AlasPenyengar-Utan-Potopedu-Rhee Loka, Lenangguar-Semongkat; Pototano-Labuhan-Serading-Batubulan-Lopok-Lape-KalaningTanjungberu-Pungkit; Plampang-Empang
6	Kab. Dompu	Kempo, Hu'u, Kilo; dan Mbawi
7	Kab. dan Kota Bima	Sila; Paradowane; Bima dan sekitarnya; Tawali; Sape; dan P. Sangiang

Sumber: Bappeda Provinsi NTB, 2024

5. Luas Wilayah Perkotaan

Dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007, kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Luasan wilayah perkotaan di Provinsi NTB seluas 57.448,05 Ha. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2024-2044 sistem pusat permukiman terdiri atas Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Pusat Kegiatan Nasional berupa Kawasan Perkotaan Mataram Raya di Kota Mataram yang mencakup Kota Mataram dan sebagian Kabupaten Lombok Barat, Pusat Kawasan Wilayah yang meliputi Praya di Kabupaten Lombok Tengah, Sumbawa Besar di Kabupaten Sumbawa, dan Raba di Kota Bima, sedangkan PKL meliputi perkotaan yang tersebar di seluruh kab/kota di NTB.

6. Jenis dan Jumlah Bank

Secara umum, perkembangan kelembagaan perbankan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) selama periode 2021–2025 menunjukkan kecenderungan yang relatif stabil, meskipun terjadi penyesuaian pada struktur kelembagaan dan jaringan kantor perbankan. Perubahan yang paling menonjol terjadi pada tahun 2023, ditandai dengan transformasi Bank NTB Syariah yang berstatus sebagai bank devisa dan bank pemerintah daerah, sehingga jumlah bank umum devisa meningkat dari tidak ada pada tahun 2021–2022 menjadi 1 bank pada periode 2023–2025, sementara kategori bank nondevisa pemerintah daerah tidak lagi tercatat.

Tabel 2. 126 Jumlah Bank, Kantor Bank dan Kantor Cabang Serta Jumlah Perusahaan Pembiayaan Berdasarkan Status Kepemilikan dan Kegiatan Usaha di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

JENIS BANK	TAHUN				
	2021	2022	2023	2024	2025
Bank Konvensional					
Bank Umum					
Jumlah Bank (kantor pusat)	1	1	1	1	1
Bank Devisa	0	0	1	1	1
Bank Pemerintah	0	0	0	0	0
Bank Pemerintah Daerah	0	0	1	1	1
Bank Swasta Nasional	0	0	0	0	0
Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri [2)]	0	0	0	0	0
Bank Non Devisa	1	1	0	0	0
Bank Pemerintah	0	0	0	0	0
Bank Pemerintah Daerah	1	1	0	0	0
Bank Swasta Nasional	0	0	0	0	0
Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri [2)]	0	0	0	0	0
Jumlah Kantor	407	407	241	241	241
Bank Devisa	388	388	228	228	228
Bank Pemerintah	349	349	195	195	195
Bank Pemerintah Daerah	0	0	2	2	2
Bank Swasta Nasional	38	38	31	31	31
Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri [2)]	1	1	0	0	0
Bank Non Devisa	19	19	13	13	13
Bank Pemerintah	0	0	0	0	0
Bank Pemerintah Daerah	2	2	0	0	0
Bank Swasta Nasional	17	17	13	13	13
Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri [2)]	0	0	0	0	0
Bank Perkreditan Rakyat					
Jumlah Bank	28	28	19	19	19
Jumlah Kantor	115	115	90	89	89
Bank Syariah					
Bank Umum					
Jumlah Bank	9	9	9	9	9
Jumlah Kantor	77	77	68	67	67
Unit Usaha Syariah	0	0	0	0	0
Jumlah Kantor	0	0	0	0	0
Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah					
Jumlah Bank	3	3	3	3	3
Jumlah Kantor	8	8	9	9	9

Sumber: Bank Indonesia, 2026.

Catatan:

1) Termasuk BRI Unit
2) Semenjak Januari 2022, Klasifikasi Kantor Cabang Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri Digunakan untuk Menggantikan Bank Asing dan Bank Campuran

7. Jenis, Kelas dan Jumlah Restoran

Jumlah restoran merupakan salah satu indikator yang mencerminkan perkembangan sektor perdagangan, jasa, dan pariwisata di suatu daerah. Keberadaan restoran tidak hanya berperan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat, tetapi juga menjadi penunjang aktivitas pariwisata, investasi, serta penyediaan lapangan kerja. Oleh karena itu, perkembangan jumlah restoran dapat menjadi gambaran dinamika pertumbuhan ekonomi dan daya tarik suatu wilayah.

Selama periode 2021–2025, jumlah restoran di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan kecenderungan menurun, meskipun pada tahun 2025 mulai mengalami peningkatan. Jumlah restoran berkurang dari 2.016 unit pada tahun 2021 menjadi 1.836 unit pada tahun 2022 dan kembali menurun menjadi 1.635 unit pada tahun 2023. Pada tahun 2024 jumlah restoran turun cukup signifikan menjadi 1.126 unit, sebelum meningkat kembali menjadi 1.199 unit pada tahun 2025. Penurunan tersebut dapat dipengaruhi oleh penyesuaian data administrasi, perubahan status usaha, maupun proses verifikasi dan pemutakhiran data usaha restoran oleh pemerintah daerah.

Berdasarkan persebarannya, pada tahun 2025 Kota Mataram menjadi daerah dengan jumlah restoran terbanyak, yaitu 293 unit, diikuti oleh Kabupaten Lombok Timur sebanyak 214 unit, Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 195 unit, dan Kabupaten Lombok Barat sebanyak 190 unit. Sebaliknya, jumlah restoran paling sedikit terdapat di Kota Bima sebanyak 6 unit, Kabupaten Bima sebanyak 9 unit, dan Kabupaten Dompu sebanyak 14 unit. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aktivitas usaha restoran masih terkonsentrasi di wilayah dengan tingkat urbanisasi, kepadatan penduduk, dan aktivitas pariwisata yang lebih tinggi, terutama di Pulau Lombok.

Tabel 2. 127 Jumlah Restoran di Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No.	Kab/Kota	2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	338	338	335	191	190
2	Lombok Tengah	271	271	233	147	195
3	Lombok Timur	375	342	321	175	214
4	Sumbawa	126	126	227	90	120
5	Dompu	265	238	147	11	14
6	Bima	292	42	21	6	9
7	Sumbawa Barat	200	202	205	42	58
8	Lombok Utara	38	38	94	177	100
9	Kota Mataram	45	29	26	280	293
10	Kota Bima	66	210	26	7	6
Total		**2016**	**1836**	**1635**	**1126**	**1199**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2023.
Catatan : Tahun 2024 dan 2025 diolah dari Podes 2024 dan Podes 2025, BPS NTB.

Meskipun jumlah restoran secara keseluruhan mengalami penurunan dibandingkan tahun 2021, peningkatan yang terjadi pada tahun 2025 mengindikasikan mulai pulihnya aktivitas usaha di sektor penyediaan makanan dan minuman. Ke depan, pengembangan sektor restoran perlu terus didorong melalui peningkatan kualitas destinasi wisata, kemudahan berusaha, penguatan pelaku UMKM kuliner, serta peningkatan standar pelayanan dan keamanan pangan. Langkah tersebut diharapkan dapat memperkuat daya saing sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, meningkatkan

investasi di sektor jasa, serta menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

8. Jenis, Kelas dan Jumlah Penginapan/Hotel

Hotel berbintang dan nonbintang merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan kapasitas akomodasi yang mendukung sektor pariwisata di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Perkembangan jumlah hotel mencerminkan tingkat investasi di sektor pariwisata sekaligus menunjukkan meningkatnya permintaan terhadap layanan akomodasi sebagai dampak dari bertambahnya aktivitas wisata, perjalanan bisnis, maupun penyelenggaraan berbagai kegiatan berskala nasional dan internasional.

Tabel 2. 128 Jumlah Hotel Bintang Tahun 2021 -2025

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	17	22	26	36	34
2	Lombok Tengah	9	12	12	14	17
3	Lombok Timur	1	1	1	1	3
4	Sumbawa	3	4	4	9	6
5	Dompu	0	...	0	0	0
6	Bima	0	...	0	1	NA
7	Sumbawa Barat	1	1	1	1	NA
8	Lombok Utara	6	20	25	62	74
9	Mataram	25	26	26	32	32
10	Kota Bima	1	1	1	2	NA
Total		**983**	**63**	**87**	**96**	**158**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025.

Selama periode 2021–2025, jumlah hotel berbintang dan nonbintang di Provinsi NTB menunjukkan perkembangan yang cenderung meningkat, meskipun masih mengalami fluktuasi pada beberapa wilayah. Hotel berbintang meningkat dari 63 unit pada tahun 2022 menjadi 87 unit pada tahun 2023, kemudian bertambah menjadi 96 unit pada tahun 2024 dan mencapai 158 unit pada tahun 2025. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh bertambahnya hotel berbintang di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah, dan Lombok Barat, yang merupakan kawasan dengan aktivitas pariwisata yang berkembang pesat.

Sementara itu, hotel nonbintang juga menunjukkan tren pertumbuhan yang positif. Jumlah hotel nonbintang meningkat dari 540 unit pada tahun 2022 menjadi 842 unit pada tahun 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 796 unit pada tahun 2024 sebelum kembali meningkat menjadi 920 unit pada tahun 2025. Peningkatan jumlah hotel nonbintang paling menonjol terjadi di Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara, dan Lombok Timur, yang menjadi daerah tujuan wisata utama serta mengalami pertumbuhan usaha akomodasi skala kecil dan menengah.

Tabel 2. 129 Jumlah Hotel Non Bintang Tahun 2021 -2025

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	59	71	63	64	82
2	Lombok Tengah	88	185	188	228	390
3	Lombok Timur	85	93	80	99	187

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
4	Sumbawa	40	44	42	38	61
5	Dompu	32	39	33	33	53
6	Bima	8	10	8	7	12
7	Sumbawa Barat	32	46	40	51	79
8	Lombok Utara	53	204	199	252	383
9	Mataram	124	129	123	128	171
10	Kota Bima	19	21	20	20	25
Total		**983**	**540**	**842**	**796**	**920**

Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025.

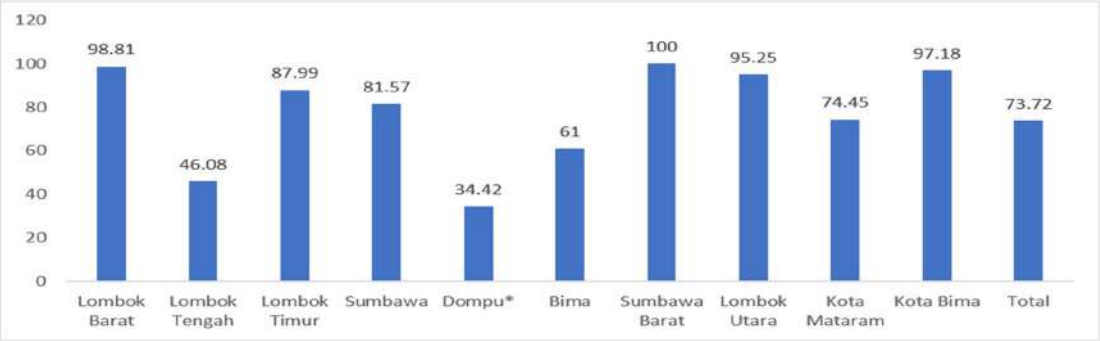
Bertambahnya jumlah hotel berbintang maupun nonbintang menunjukkan bahwa sektor pariwisata NTB terus mengalami pemulihan dan perkembangan yang positif. Kondisi ini mencerminkan meningkatnya kepercayaan investor terhadap prospek industri pariwisata di daerah, yang didukung oleh semakin baiknya konektivitas, pengembangan destinasi wisata unggulan, serta penyelenggaraan berbagai event berskala nasional dan internasional. Keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, penyelenggaraan ajang MotoGP dan berbagai agenda Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE) telah memberikan dampak yang signifikan terhadap meningkatnya kebutuhan akomodasi di Provinsi NTB.

9. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Salah satu goals dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) yaitu dalam memastikan pencapaian akses universal dalam sektor air minum dan sanitasi yang diharapkan dapat tercapai pada tahun 2030. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan Strategi :

1. Menjamin ketahanan air melalui peningkatan pengetahuan, perubahan sikap dan perilaku dalam pemanfaatan air minum dan pengelolaan sanitasi.
2. Penyediaan infrastruktur produktif dan manajemen layanan melalui penerapan manajemen aset baik di perencanaan, penganggaran, dan investasi,
3. Penyelenggaraan sinergi air minum dan sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan masyarakat (SPAMDes)
4. Peningkatan efektifitas dan efisiensi pendanaan infrastruktur air minum dan sanitasi,
5. Meningkatkan peran rencana tata ruang sebagai pedoman dalam pemanfaatan ruang provinsi,
6. Meningkatkan penyediaan dan kualitas layanan infrastruktur strategis.

Grafik 2. 58 Proporsional Jumlah Penduduk Pengguna Layanan Air Bersih Tahun 2025



Sumber : Dinas PUPR 10 Kabupaten/Kota Provinsi Nusa Tenggara Barat *Data Tahun 2025

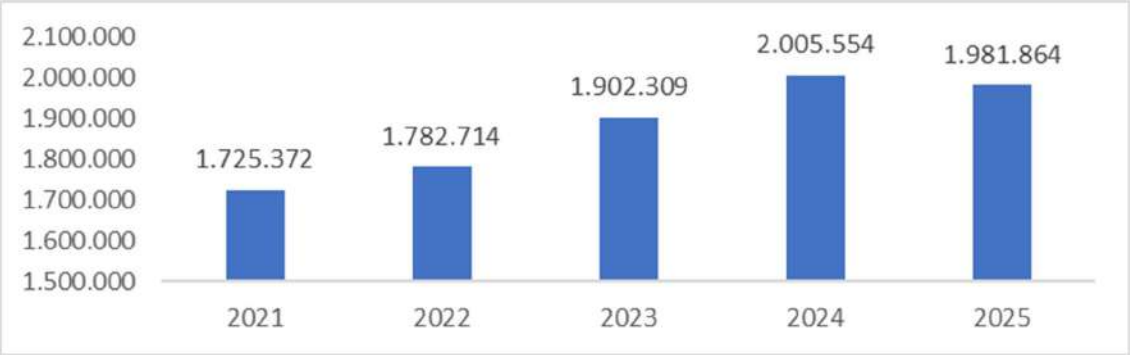
Berdasarkan data tahun 2025, rata-rata proporsi penduduk pengguna layanan air bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencapai 73,72 persen. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk telah memperoleh akses terhadap layanan air bersih, meskipun masih terdapat kesenjangan antarwilayah yang cukup signifikan. Ke depan, peningkatan cakupan layanan air bersih perlu terus didorong melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Air Minum, peningkatan kualitas dan kapasitas jaringan distribusi, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemerataan akses layanan air bersih, mendukung peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta mewujudkan pelayanan dasar yang berkualitas dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

10. Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Selama periode 2021–2025, jumlah pelanggan listrik yang dilayani oleh PLN Cabang Mataram, Sumbawa, dan Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan tren yang cenderung meningkat. Jumlah pelanggan bertambah dari 1.725.372 pelanggan pada tahun 2021 menjadi 1.782.714 pelanggan pada tahun 2022, kemudian meningkat menjadi 1.902.309 pelanggan pada tahun 2023 dan mencapai 2.005.554 pelanggan pada tahun 2024. Pada tahun 2025, jumlah pelanggan sedikit menurun menjadi 1.981.864 pelanggan, namun secara keseluruhan masih lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2021, dengan pertumbuhan sekitar 14,9 persen selama lima tahun terakhir.

Peningkatan jumlah pelanggan tersebut mencerminkan semakin luasnya cakupan pelayanan kelistrikan di Provinsi NTB yang didukung oleh pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan, perluasan jaringan distribusi, serta meningkatnya kebutuhan listrik pada sektor rumah tangga, bisnis, industri, dan layanan publik. Di sisi lain, penurunan tipis pada tahun 2025 tidak mengubah tren jangka panjang yang tetap menunjukkan pertumbuhan jumlah pelanggan. Data PLN juga menunjukkan bahwa jumlah pelanggan di NTB telah mencapai lebih dari dua juta pelanggan, yang didominasi oleh sektor rumah tangga.

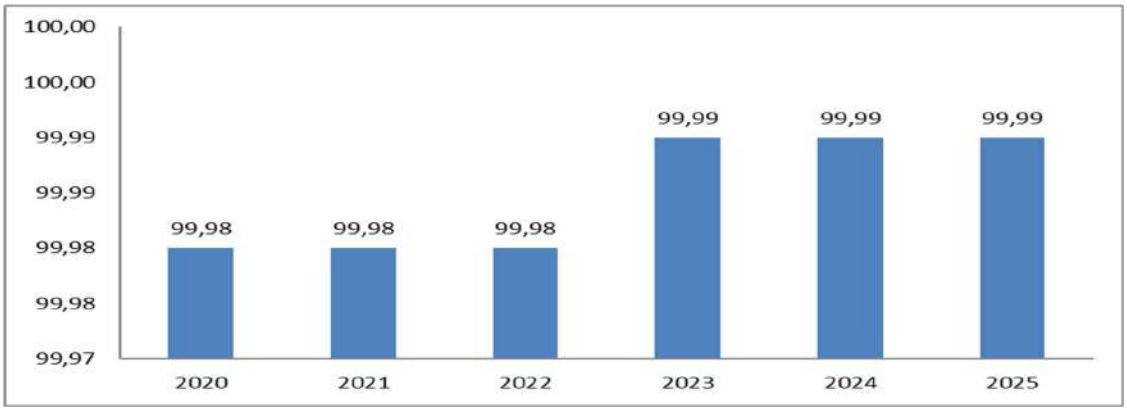
Grafik 2. 59 Jumlah Pelanggan Listrik Dari PLN Cabang Mataram, Sumbawa dan Bima di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2025



Sumber Data : PT. PLN (Persero) UIW NTB Tahun 2025

Selanjutnya, selama periode 2020–2025, rasio elektrifikasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan kondisi yang sangat baik dan relatif stabil pada tingkat yang sangat tinggi. Pada tahun 2020 hingga 2022, rasio elektrifikasi tercatat sebesar 99,98 persen, kemudian meningkat menjadi 99,99 persen pada tahun 2023 dan mampu dipertahankan hingga tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan bahwa hampir seluruh rumah tangga di Provinsi NTB telah menikmati akses terhadap layanan listrik, sehingga hanya sebagian kecil rumah tangga yang masih belum terjangkau jaringan kelistrikan.

Grafik 2. 60 Rasio Elektrifikasi Provinsi NTB Tahun 2020-2025



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTB, 2025.

Selama 5 tahun terakhir dilakukan terobosan untuk meningkatkan rasio elektrifikasi dengan menyediakan kebutuhan listrik bagi masyarakat yang belum menikmati layanan listrik baik melalui jaringan PLN maupun Non PLN antara lain:

a. Program "Listrik Murah dan Hemat" yaitu memberikan sambungan listrik gratis pada masyarakat yang sudah dilalui oleh jaringan listrik PLN namun belum dapat menikmati listrik.
b. Pembangunan Penerangan Jalan Umum Lighting Emitting Diode (PJU-LED) jaringan listrik PLN di sepanjang jalan Negara mulai Pelabuhan Lembar hingga Pelabuhan Kayangan. Pembangunan penerangan jalan umum juga dilaksanakan mulai dari

pelabuhan Poto Tano hingga pelabuhan Sape di ujung timur Pulau Sumbawa yang akan menjadi pelita di sepanjang ruas jalan negara.

c. Program "Desa Mandiri Energi" dengan membangun fasilitas kebutuhan energi masyarakat secara mandiri bagi wilayah-wilayah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN, dengan memanfaatkan sumber energi terbarukan sesuai potensi setempat seperti Pembangit Listrik Tenaga Surya (PLTS) baik secara tersebar maupun terpusat (komunal) dan hybrid PLT Bayu, Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH).

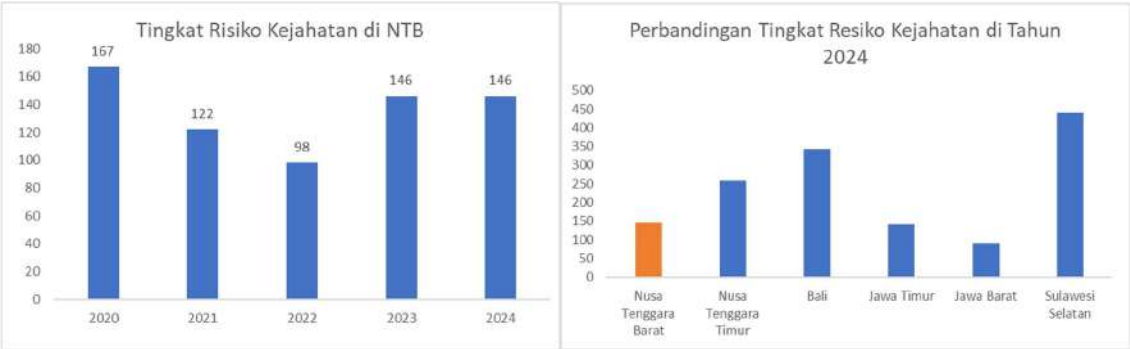
Investasi yang dibutuhkan untuk pengembangan ketenagalistrikan cukup tinggi karena merupakan usaha padat modal dan padat teknologi, sehingga dibutuhkan biaya tinggi. Target ini akan mencakup layanan listrik konvensional PT. PLN dan layanan Energi Baru Terbarukan untuk wilayah yang tidak terjangkau jaringan listrik PLN, karena minimnya akses menuju wilayah tersebut. Peningkatan rasio elektrifikasi tersebut diperoleh melalui pembangunan sarana dan prasarana bidang ketenagalistrikan baik yang bersumber dari Pembangkit PLN on grid maupun dari sumber energi baru terbarukan *off grid*.

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

1. Angka Kriminalitas

Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif, faktor keamanan dan ketertiban adalah hal yang penting. Untuk menjamin keamanan dan ketertiban di masyarakat, Provinsi NTB telah diperkuat oleh aparat keamanan yang terdiri dari aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI), aparat Kepolisian (POLRI), dan dibantu oleh aparat Satuan Polisi Pamong Praja (SatPol PP). Selama periode 2020–2024, tingkat risiko terkena kejahatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2020, tingkat risiko kejahatan tercatat sebesar 167, kemudian menurun menjadi 122 pada tahun 2021 dan kembali menurun menjadi 98 pada tahun 2022. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbaikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat selama dua tahun berturut-turut. Namun demikian, pada tahun 2023 tingkat risiko kejahatan kembali meningkat menjadi 146 dan bertahan pada angka yang sama (146) pada tahun 2024. Meskipun mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022, tingkat risiko kejahatan di NTB pada tahun 2024 masih lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2020.

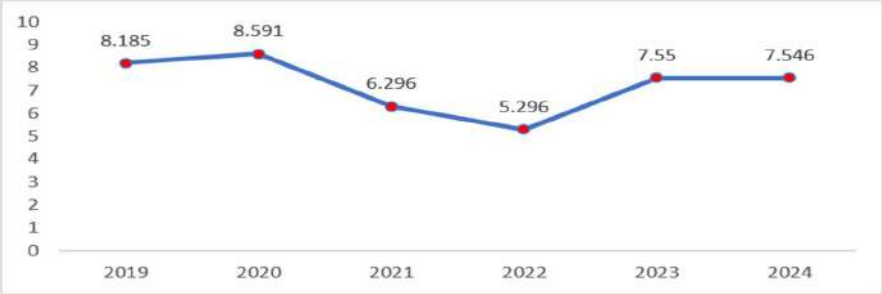
Grafik 2. 61 Tingkat Risiko Terkena Kejahatan Provinsi NTB Tahun 2020-2024



Sumber: BPS NTB, 2024 (Statistik Kriminalitas, diolah)

Selama periode 2019–2024, angka kejahatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2019 angka kejahatan tercatat sebesar 8,185, kemudian meningkat menjadi 8,591 pada tahun 2020. Selanjutnya, angka kejahatan mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 6,296 pada tahun 2021 dan kembali menurun hingga mencapai 5,296 pada tahun 2022, yang merupakan capaian terendah selama periode pengamatan. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya perbaikan situasi keamanan dan ketertiban masyarakat serta meningkatnya efektivitas upaya pencegahan dan penegakan hukum.

Grafik 2. 62 Angka Kejahatan Tahun 2019-2024



Sumber : BPS RI, 2025

2. Indeks Daya Saing

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) bertujuan untuk menilai tingkat daya saing daerah pada level Provinsi dan Kabupaten/Kota yang mendukung produktivitas daerah. Nilai IDSD tahun 2025 mengacu pada kerangka konseptual Global Competitiveness Index (GCI) 2019 dari World Economic Forum (WEF). Perhitungan nilai IDSD dilaksanakan oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dengan 4 komponen pembentuk daya saing, yaitu: lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar, dan ekosistem inovasi.

Tabel 2. 130 Skor Indikator Daya Saing Daerah (IDSD) Provinsi NTB Tahun 2025

No.	Pilar	Skor IDSD Tahun 2025				
		NTB	Nasional	Bali	NTT	Sulsel
1.	Institusi	4,69	4,30	4,73	4,55	4,40
2.	Infrastruktur	3,54	3,37	3,71	3,07	3,85
3.	Adopsi TIK	3,46	3,68	4,90	3,36	3,87
4.	Stabilitas Ekonomi Makro	3,57	4,02	4,16	4,19	4,24
5.	Kesehtan	3,56	3,79	4,02	3,58	3,87
6.	Keterampilan	4,04	3,67	4,05	3,83	3,90
7.	Pasar Produk	3,26	2,55	3,30	4,88	2,54
8.	Pasar Tenaga Kerja	2,58	2,96	3,92	2,04	2,59
9.	Sistem Keuangan	2,92	2,90	3,62	2,26	3,02
10.	Ukuran Pasar	4,29	4,38	4,40	4,12	4,73
11.	Dinamika Bisnis	2,56	2,79	3,28	2,26	3,29
12.	Kapabilitas Ekonomi	3,89	3,54	4,25	3,84	4,24

Sumber: BRIN, 2025

Pilar Institusi yang kuat merupakan pendorong fundamental bagi produktivitas dan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Institusi memberikan ketentuan dalam bentuk peraturan tertulis (kebijakan) dan tidak tertulis (norma perilaku) yang mempengaruhi pelaku ekonomi dalam membuat keputusan yang optimal. Skor NTB mencapai 4,69, lebih tinggi dari capaian Nasional sebesar 4,30 pada tahun 2025.

Pilar Infrastruktur menilai ketersediaan serta kualitas layanan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi di suatu wilayah. Keberadaan infrastruktur yang handal mendukung kelancaran aktivitas ekonomi, meningkatkan efisiensi, dan pada akhirnya akan memperkuat daya saing daerah. Skor NTB mencapai sebesar 3,54, lebih tinggi dari angka Nasional sebesar 3,37 pada tahun 2025.

Pilar Adopsi TIK mengukur tingkat difusi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dari suatu daerah. TIK dapat mengurangi biaya transaksi dan mempercepat pertukaran informasi dan ide pada suatu daerah sehingga meningkatkan efisiensi dan mendorong inovasi. Skor NTB mencapai sebesar 3,46, lebih rendah dari angka Nasional sebesar 3,68 pada tahun 2025.

Pilar Stabilitas Ekonomi Makro mencerminkan kemampuan daerah dalam mengelola perekonomian dan merespon guncangan maupun global. domestik Stabilitas ekonomi makro merupakan kunci kepercayaan menciptakan iklim investor, usaha yang terprediksi peningkatan dan mendorong produktivitas pertumbuhan ekonomi. Skor NTB mencapai sebesar 3,57, lebih rendah dari angka Nasional sebesar 4,02 pada tahun 2025.

Pilar Kesehatan mencerminkan tingkat kualitas sumber daya manusia, yang diukur berdasarkan harapan lama hidup bayi dalam kondisi sehat. Sumber daya manusia yang berkualitas tidak hanya berfungsi sebagai faktor produksi, tetapi juga sebagai modal pembangunan menyeluruh. Skor NTB mencapai angka 3,56, lebih rendah dari angka Nasional sebesar 3,79.

Pilar Keterampilan mencerminkan tingkat pendidikan dan kompetensi tenaga kerja di suatu wilayah. Keterampilan tenaga kerja menjadi faktor strategis dalam meningkatkan daya saing sektor bisnis, karena berperan dalam menyeimbangkan integrasi teknologi dengan investasi pada kualitas sumber daya manusia (Lawler et al., 2003). Skor NTB mencapai angka 4.04, lebih tinggi dari angka Nasional sebesar 3,67.

Pilar Pasar Produk mencerminkan keterbukaan pasar dalam memberikan kesempatan yang setara bagi seluruh pelaku usaha untuk bersaing secara adil. Praktik monopoli, oligopoli, dan hambatan masuk pasar menyebabkan distorsi pasar yang berujung pada tidak efisien dari sisi ekonomi. Keterbukaan pasar tercermin dari daya saing usaha kecil dan menengah terhadap usaha skala lebih besar. Skor NTB mencapai angka 3,56, lebih tinggi dari angka Nasional sebesar 2,55.

Pilar Pasar Tenaga Kerja yang efisien dan sistem pengupahan yang adil berperan penting dalam menyeimbangkan kepentingan dunia usaha dan tenaga kerja. Fleksibilitas pasar tenaga kerja memastikan keselarasan antara permintaan (demand) dan ketersediaan (supply) tenaga kerja. Pelaku usaha dan investor mempertimbangkan keterampilan serta struktur upah tenaga kerja sebagai faktor biaya produksi. Sementara itu, tenaga kerja menilai tingkat upah dan jaminan sosial dalam memilih pekerjaan. Kebijakan pasar tenaga kerja yang aktif mempermudah tenaga kerja dalam

meningkatkan keterampilan dan memasuki dunia kerja. Skor NTB mencapai angka 2,58, lebih rendah dari angka Nasional sebesar 2,96.

Pilar Sistem Keuangan terdiri dari institusi, pasar, infrastruktur, serta regulasi yang menjamin kelancaran aktivitas simpan pinjam (Gunadi et al., 2013). Sistem keuangan berperan dalam mengintermediasi sumber keuangan, memfasilitasi arus keuangan melalui layanan pembayaran yang efisien dan memproteksi risiko keuangan.Skor NTB mencapai angka 2,92 lebih tinggi dari angka Nasional sebesar 2,90.

Pilar Ukuran Pasar berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas dengan memberikan peluang bagi pelaku usaha untuk memanfaatkan keekonomian skala secara optimal. Luasnya cakupan pasar berperan dalam memperkokoh struktur industri, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan nilai tambah dalam perekonomian. Skor NTB mencapai angka 4,29 lebih rendah dari angka Nasional sebesar 4,3.

Pilar Dinamika Bisnis menggambarkan kemudahan untuk memulai dan melakukan bisnis dan kemudahan untuk melakukan divestasi dan keluar dari pasar (market) di suatu wilayah. Pemerintah Provinsi NTB berupaya untuk mengembangkan investasi baru dari perusahaan yang produktif dan inovatif ke wilayahnya. Secara administratif, mudahnya pelayanan dan rendahnya hambatan untuk memulai bisnis, serta kejelasan hukum mengenai kepailitan akan memudahkan perusahaan untuk keluar-masuk pasar. Daerah yang mampu menciptakan dinamika bisnis yang positif, yaitu daerah yang mendatangkan investasi dan pelaku usaha yang inovatif. Skor NTB mencapai angka 2,56, lebih rendah dari angka Nasional sebesar 2,79.

Pilar Kapabilitas Ekonomi memberikan gambaran kuantitas dan kualitas riset dan inovasi suatu daerah. Pilar ini juga menggambarkan sejauh mana lingkungan suatu daerah mendorong kolaborasi, konektivitas, kreativitas, keragaman, konfrontasi lintas-visi, dan sudut pandang yang berbeda, serta sejauh mana kapasitas daerah dapat mengubah ide menjadi barang dan jasa baru. Skor NTB mencapai angka 3,89, lebih tinggi dari angka Nasional sebesar 3,54.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Analisis kinerja atas aspek Sumber Daya Manusia dilakukan terhadap indikator: 1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3); dan 2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan).

1. Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Analisis kualitas tenaga kerja di Provinsi NTB bertujuan untuk mengevaluasi kondisi tenaga kerja dalam meningkatkan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi daerah. Tenaga kerja berkualitas dapat meningkatkan kapasitas ekonomi, menciptakan nilai tambah, adaptif, inovatif, dan kreatif. Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas (angkatan kerja dan bukan angkatan kerja) dengan pendidikan tertinggi universitas tahun 2025 di Provinsi NTB mencapai 3.204.660 orang, mencapai 56% dari jumlah penduduk NTB sebesar 5.731,100 orang. Gambaran perkembangan jumlah penduduk bekerja berumur 15+ tahun dengan pendidikan tertinggi universitas dapat dilihat pada grafik berikut ini:

Grafik 2. 63 Jumlah Penduduk Berumur 15+ dengan Pendidikan Tertinggi Universitas Tahun 2021-2025



	2021	2022	2023	2024	2025
Angkatan Kerja	358.586	349.856	407.362	3.105.550	3.106.730
Bukan Angkatan Kerja	59.475	46.918	5.637	8.701	9.793
Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja	418.061	396.774	463.732	3.192.560	3.204.660

Sumber: Sumber: BPS Provinsi NTB, 2025

Untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja NTB, diperlukan peningkatan kualitas tenaga kerja melalui perbaikan rasio lulusan S1/S2/S3 di Provinsi NTB. Transformasi sektor ketenagakerjaan yang mendukung peralihan bertahap dari ketergantungan tinggi pada sektor pertanian ke sektor jasa dan industri yang memiliki produktivitas tinggi. Tingkat pendidikan menjadi sarana membangun kemandirian daerah, untuk memutus rantai kemiskinan lintas generasi dan menjamin penduduk usia produktif tidak menjadi beban ketergantungan di masa depan. Peningkatan literasi, akses untuk minat baca dan akses informasi dapat menciptakan tenaga kerja NTB yang berkualitas.

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan/Dependency Ratio)

Rasio ketergantungan merupakan indikator ekonomi yang membandingkan jumlah penduduk usia non-produktif (0-14 tahun dan 65+ tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Rasio ketergantungan bertujuan untuk mengukur beban ekonomi yang ditanggung oleh penduduk usia produktif yang bekerja untuk menanggung penduduk usia non-produktif. Semakin tinggi angka ketergantungan maka akan semakin tinggi beban penduduk produktif untuk menanggung penduduk usia non-produktif.

Rasio ketergantungan penduduk NTB dihitung berdasarkan Survei Kependudukan pada tahun 2010, 2020, dan Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) pada tahun 2025, menunjukan tren penurunan dari 55,52 menjadi 48,77. Nilai ini masih lebih tinggi dari nasional yaitu dari 51,31 menurun menjadi 45,05. selama enam tahun terakhir menunjukkan trend menurun, penduduk usia produktif menanggung beban yang semakin mengecil. Berdasarkan struktur penduduk NTB tahun 2025, laju pertumbuhan penduduk NTB mencapai 1,58, dengan angka kelahiran total sebesar 2,38, dan ang angka kematian bayi (IMR) NTB menurun mencapai 21,03. Saat ini Provinsi NTB hampir memasuki fase ageing population, dengan jumlah penduduk lanjut usia mencapai 9,72% pada tahun 2025.

Tingginya nilai tingkat ketergantungan penduduk di Provinsi NTB yang mencapai 48,77, dari rata-rata nasional sebesar 45.05 ini akan berdampak pada produktivitas daerah. Tingkat ketergantungan berkaitan dengan rendahnya kualitas sumber daya manusia, yaitu kualitas tingkat pendidikan, tingkat kemiskinan yang masih tinggi, permasalahan kesehatan dan angka kesakitan, serta struktur ekonomi yang masih didominasi oleh sektor pertanian, perkebunan, kehutanan, dan perikanan.

Grafik 2. 64 Tingkat Ketergantungan (Dependency Ratio) NTB Tahun 2017-2024



Sumber : BPS Provinsi NTB,2025

Peningkatan kesejahteraan penduduk Provinsi NTB sejalan dengan laju pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, inklusif dan berkelanjutan, didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan dan kesehatan menjadi peluang untuk SDM NTB berkualitas, sejalan dengan tujuan Program Unggulan NTB Sehat dan Cerdas. Bonus Demografi dengan SDM berkualitas usia produktif yang lebih dominan dari penduduk usia non-produktif akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi NTB. Ke depan, perencanaan pembangunan harus mengarah pada peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak dini, mencegah dan menanggulangi stunting dan kurang gizi, peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta infrastruktur pendukung pemenuhan layanan dasar masyarakat. Hal ini sangat krusial agar penduduk usia produktif dan usia non-produktif dapat tetap aktif, sehat, dan menjadi kontributor pembangunan daerah.

2.2.5 Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) serta Indikator Kinerja Kunci (IKK) Pemerintah Provinsi NTB

IKD dan IKK merupakan instrumen pengukuran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang lebih operasional dan terdesentralisasi. IKD mengukur kinerja daerah secara agregat (regional performance indicators) yang mendukung pencapaian IKU, sementara IKK adalah indikator kunci (key performance indicators) yang spesifik per OPD sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pada tahun 2025, IKD dan IKK menjadi dasar penyusunan Renstra-PD dan Renja-PD setiap OPD. IKD mencakup indikator lintas-OPD yang mendukung sasaran pembangunan daerah (misalnya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik atau efisiensi belanja daerah) sedangkan IKK bersifat output-oriented dan terukur per perangkat daerah.

Sesuai dengan RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029 sebagaimana dijabarkan kedalam Perubahan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025, terdapat 252 Indikator Kinerja Daerah Provinsi NTB terdiri dari Aspek Geografi dan Demografi sebanyak 15 Indikator, Aspek Kesejahteraan Masyarakat sebanyak 39 Indikator, Aspek Daya Saing sebanyak 37 Indikator, Aspek Pelayanan Umum sebanyak 20 Indikator, dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebanyak 136 Indikator.

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja tahun 2025, dari 252 Indikator Kinerja Daerah, terdapat 125 indikator atau 49,60% sesuai bahkan melampaui target kinerja, dan 102 indikator atau 40,48% belum memenuhi target, serta masih terdapat 25 indikator kinerja yang belum dapat diukur capaianya karena belum ada rilis dari Lembaga terkait.

Grafik 2. 65 Tingkat Ketercapaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2025



Sumber : Bappeda NTB, 2026 (data diolah)

Berikut capaian dari IKD dan IKK sampai dengan Triwulan IV tahun 2025.

Tabel 2. 131 Target dan Capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2025

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)					
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	78.44	78.83	74.70	94.76
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	2.74	1.98	2.67	65.02
3	Konsumsi Listrik per kapita	kWh	709	751	747.74	99.57
4	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	NA	192.23	123.53	64.26
5	Kapasitas air baku	m3/detik	3.53	3.73	3.53	94.64
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	21.09	35.83	36.21	101.06
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	6.84	8.00	2.52	31.50
8	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	NA	20.00	27.37	136.85
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	45.00	64.00	52.55	82.11
10	Persentase Penurunan Emisi GRK					
	a. Kumulatif	%	NA	11.53	4.40	38.16
	b. Tahunan	%	NA	19.83	4.89	24.66
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	113.64	135.41	156.02	84.78
12	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.56	0.59	0.55	93.22
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	75.78	76.19	77.40	101.59
14	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	%	1.6	1.59	1.58	100.63
15	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	NA	0.536	NA	NA

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
	- Dengan Tambang	%	5.30	6.00	3.22	53.67
	- Non Tambang	%	3.87	6,00 - 6,50	8.33	128.15
2	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.83	0.84	0.82	100.00
3	Tingkat Kemiskinan	%	11.91	11,68-12,18	11.38	102.57
4	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	32.28	35.8	33.67	94.05
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,73 (Per Agustus)	2,19-2,79	3.05	90.68
6	Rasio Gini	Poin	0.364	0,369-0,373	0.364	101.36
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	0,54 (2023)	0.56	NA	NA
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72.25	72.92	72.60	99.56
9	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	257 (SP 2020)	184	257	60.33
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	29.8	21.7	13.39	138.29
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99.6	99.31	99.66	100.35
12	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	78.48	80	82.99	103.74
13	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	29.37	22.84	29.37	71.41
14	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	NA	36	26.13	72.58
15	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	60.00	80.00	73.60	92.00
16	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	NA	20.00	7.0	35.00
17	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%	58.30	60.70	58.30	96.05
18	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2.37	2.34	2.36	99.15
19	Insidensi Tuberkulosis					
	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	58.96	85.00	61.11	71.89
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate)	%	88.53	95	86.71	91.27
20	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	7,87	8,6-8,63	8.87	102.78
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.98	14,1-14,13	13.99	99.22
22	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					
	a) Literasi Membaca	%	NA	10	NA	NA
	b) Numerasi	%	NA	0,00- 10,00	NA	NA
23	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					
	a) Literasi Membaca	%	NA	26,24-28,74	NA	NA
	b) Numerasi	%	NA	22,68-25,18	NA	NA
24	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	9.44	10.02	11.63	116.07
25	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	84.07	84.68	86.71	102.40
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	68.04	70.34	65.69	93.39
27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	37.16	28.65	38.81	135.46
28	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	71.4	71,68 - 71,7	NA	NA

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	57,37 (Tahun 2023)	58,64-58,78	NA	NA
30	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	59,99 (Tahun 2023)	61.14	66.51	108.78
31	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	65.51	66.71	63.70	95.49
32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.53	0.517	0.515	99.61
33	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91.54	91.77	91.91	100.15
34	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	53,67 (Tahun 2023)	53.94	55.50	102.89
35	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	NA	35	35	100
36	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	2	3	2	66.67
37	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	NA	74.63	NA	NA
38	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	50.78	53.32	58.79	110.26
39	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	29.49	29	31.48	108.55
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	3.87	4.21	6.69	158.91
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	1.54	3.2	5.03	157.19
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.75	2.03	1.81	89.16
4	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	12,79 (Share PDRB Ekraf terhadap Provinsi (%))	0.39	NA	NA
5	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	349,447	382,813	509,171	133.01
6	Rasio kewirausahaan Daerah	%	0.12	2.37	10.03	423.40
7	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	63.4	76.5	73.25	95.75
8	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	3.27	3.5	3.89	111.14
9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	NA	51.15	NA	NA
10	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	NA	54.53	50.73	93.03
11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	17.43	23.50	25.07	106.68
12	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,74 (Tahun 2023)	5.7	5.88	103.16
13	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	NA	7.3	16.21	-22.05
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	31.8	36.9	34.31	92.98
15	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	35.21	24,53-24,55	30.42	123.91
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	75,83 (Tahun 2024)	76.21	70.12	92.01
17	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	67.74	71,68-71,7	71.49	99.73
18	Persentase Desa Mandiri	%	39.57	41.14	48.78	118.57
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1.87	1.44	1.70	118.06
20	Tingkat Inflasi	%	1.28	3-3,7	3.01	100

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
21	Indeks Kota Berkelanjutan	%	NA	60	NA	NA
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	NA	24.62	26.94	109.41
23	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	NA	0.15	0.24	159.04
24	Nilai Transaksi Saham per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	Miliar Rupiah	NA	1,099,427.73	900,799.31	81.93
25	Total Kredit/PDRB	%	NA	38	40.94	107.74
26	Inklusi Keuangan	%	NA	88.7	80.51	90.77
27	Jumlah Kerjasama Provinsi	%		10	27	270.00
28	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	3.01	3.03	NA	NA
29	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	NA	0.19	0.21	110.53
30	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	%	NA	8.95	NA	NA
31	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	NA	2.15	2.17	100.93
32	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0.95	0.97	0.93	95.97
33	Return on Asset (ROA) BUMD	%	NA	1.91	NA	NA
34	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	20,258	21,185	NA	NA
35	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	14.97	15.26	15.34	NA
36	Indeks Zakat Nasional	Poin	0.56	0.59	0.51	86.44
37	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	91.47	91.50	87.39	95.51
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	Nilai SAKIP	Nilai	72,88 (BB)	74,01 (BB)	70.92	95.82
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks (Kategori)	77.99	78,77 (BB)	77.46	98.34
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	77.74	70	96.54	137.91
4	Indeks Pemerintah Digital	Skor	NA	1.78	1.99	111.80
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	3.56	3.50	4.20	120.00
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.42	4.03	4.41	109.43
7	Indeks Integritas Nasional	Indeks	NA	71.99	64.93	90.19
8	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	NA	65	59.00	90.77
9	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	27.03	70	70.45	100.65
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	70.22	72	82.89	115.13
11	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	76.37	75,37-78,63	75.27	99.87
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.5	3.55	3.53	99.44
13	Indeks Transformasi Digital Nasional	Skor	45,85 (Tahun 2022)	46.55	NA	NA
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks		77.5	86.06	111.05
15	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	NA	65	45.79	70.45
16	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	2.826	2.927	NA	NA
17	Opini BPK atas LKD	Opini	WTP	WTP	WTP	100
18	Nilai Indeks Implementasi NSPK Manajemen ASN	Nilai	78,4 (2023)	82.92	NA	NA
19	Nilai Sistem Merit	Nilai	264.5	292	284.5	97.43
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	86.03	84.3	88.80	105.34
	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
1	**PENDIDIKAN**					

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	%	98.65	98.70	99.37	100.68
2	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	%	92.48	92.50	92.51	100.01
3	Kemampuan Literasi SMA	%	64.78	65.38	64.78	99.08
4	Kemampuan Literasi SMK	%	58.58	59.88	58.57	97.81
5	Kemampuan Literasi SDLB	%	54.18	55.78	54.17	97.11
6	Kemampuan Literasi SMPLB	%	61.53	62.03	61.53	99.19
7	Kemampuan Literasi SMALB	%	61.92	62.42	61.92	99.20
8	Kemampuan Numerasi SMA	%	55.43	57.03	55.42	97.18
9	Kemampuan Numerasi SMK	%	51.58	53.78	51.57	95.89
10	Kemampuan Numerasi SDLB	%	50.79	51.39	50.78	98.81
11	Kemampuan Numerasi SMPLB	%	59.4	59.65	59.39	99.56
12	Kemampuan Numerasi SMALB	%	59.22	59.72	59.21	99.15
13	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	%	41.14	44.1	NA	NA
2	**KESEHATAN**					
1	Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%	100	100	100	100
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	100
3	Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	%	100	100	100	100
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100	100	100
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
1	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi	%	40	40.29	40.05	99.40
2	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	%	62.93	65.53	65.59	100.09
3	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air minum curah lintas kabupaten/kota	%	15.00	18.00	NA	NA
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman	%	5.56	6.00	2.32	38.67
5	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	75.54	76.04	75.31	99.04
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**					
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	100
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	100
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	5.19	6.00	2.00	33.33
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	99.61	99.62	99.69	100.07
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
1	persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	100
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100
3	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	16.67	33.33	33.33	100
4	persentase penanganan pra bencana	%	100	100	60.00	60.00
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	100
6	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	100
6	**SOSIAL**					
1	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	25.00	30.00	45.27	150.90
7	**TENAGA KERJA**					
1	Tersedianya RTKD Provinsi yang masih berlaku	%	40	0	10	100
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	70	75	80	106.67
3	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	50.78	53.32	51.63	96.83
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	22.57	23.7	34.18	144.22
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	%	67.47	70.84	106.08	149.75
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	27.73	29.12	89.95	308.89
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
1	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	100
9	**PANGAN**					
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	40.38	52.42	58.8	112.1
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	4.27	4.27	0	200
10	**PERTANAHAN**					
1	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	100
2	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	100
11	**LINGKUNGAN HIDUP**					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	75.78	76.19	77.40	101.59
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah	%	100	100	3.12	3.12
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	%	74.15	74.89	68.5	91.47
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
1	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	100
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	50.79	30.00	29.69	98.97
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	11.66	11.76	44.37	377.30
3	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	100	100	100	100
4	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	100	100
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.37	2.34	2.36	99.15
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	60.20	60.80	59.10	97.20
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	5.90	5.57	11.84	-12.57
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	kelahiran per 1000 perempuan	37.80	32.68	25.50	121.97
15	**PERHUBUNGAN**					
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0.82	0.830	0.831	100.12
2	Kinerja lalu lintas provinsi	Km/Jam	NA	30	32	106.67
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	NA	2.22	NA	NA
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	0	0	0
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	0	7.89	8.33	105.58
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	81.71	81.75	74.76	91.45
17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**					
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	NA	5.05	4.14	81.98
2	Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	36.83	37.75	38.37	101.64
3	Proporsi Usaha Kecil Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	63.03	63.03	31.64	50.20
4	Pertumbuhan Wirausaha	%	4.49	4.49	4.89	108.91
18	**PENANAMAN MODAL**					
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	36.75	12.00	16.80	140.00
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	100	100	104.28	104.28
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi	Indeks	53,67 (Tahun 2023)	53.94	55.50	102.89
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	0.06	0.07	0.01	14.29
20	**STATISTIK**					
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Skor	2.77	2.77	2.77	100
21	**PERSANDIAN**					
1	Indeks Keamanan Informasi	Skor	437	456	505	110.75
22	**KEBUDAYAAN**					
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	100
2	Persentase kenaikan Jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	%	52	54	NA	NA
23	**PERPUSTAKAAN**					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	60.42	61.00	31.77	52.08

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	65.67	65.92	61.19	92.82
24	**KEARSIPAN**					
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	70.08	70.5	68.9	97.73
	URUSAN PILIHAN					
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	248,580.72	251,066.00	255,508.96	101.77
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	968,165.67	980,889.00	997,210.65	101.66
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	100	100	90.00	90.00
26	**PARIWISATA**					
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1.75	2.03	1.83	90.15
2	Persentase pertumbuhan Kunjungan wisatawan	%	4.51	4.74	4.74	100
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	0.39	0.39	4.33	1,110.26
4	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	NA	50.00	50.00	100
27	**PERTANIAN**					
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	-5.86	0.56	6.39	1,141.07
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-13.92	1.00	-1.61	-161.00
3	Peningkatan Produksi Perkebunan	%	1.06	0.22	7.67	3,486.36
4	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	1.00	2.00	-2.38	-119
5	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	80.99	81.79	94.04	114.98
6	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	69.4	70.09	82.57	117.81
7	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	100	100	100	100
28	**KEHUTANAN**					
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	9.72	11.37	11.1	97.63
2	Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarkatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	%	6.73	7.03	3.92	55.76
3	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	100	100	100	100
4	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	%	0.27	0.24	NA	NA
29	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**					
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	100	100
30	**PERDAGANGAN**					
1	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	**%**	77.75	88	84.58	96.11
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi	%	100	100	100	100
3	Nilai Ekspor Barang Per Provinsi	%	24.94	29.20	30.42	104.18
31	**PERINDUSTRIAN**					
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	%	4.19	4.21	76.37	1814.01
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi	%	3.87	3.89	6.69	171.98

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Orang	419926	341,328	324,130	94.96
4	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	US$ Miliar	0.024	2.17	1.02	47.00
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Rp. Triliun	24.8	8.68	5.79	66.71
6	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	18.51	18.75	9.49	50.61
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
32	**TRANSMIGRASI**					
1	Persentase Desa Maju dan Mandiri di 4 Kawasan Transrmigrasi	%	76.27	81.36	81.36	100.00
2	Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat di 4 Kawasan transmigrasi	%	NA	1.10	7.14	649.09
	FUNGSI PENUNJANG DAN PENGAWASAN					
33	**SEKRETARIAT DPRD**					
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	100
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	100
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%	NA	100	100	100
34	**PERENCANAAN**					
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100
2	Kesesuaian antara RKPD dengan APBD	%	100	100	100	100
35	**KEUANGAN**					
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	29.73	33.29	31.72	95.28
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	49.75	58.88	42.92	72.89
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	88.96	90.00	88.34	98.16
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	-1.62	3.00	0.66	22.00
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik		21.7	35.11	36.16	102.99
6	Persentase Penurunan SILPA	%	38.15	31.00	-157.49	-508.03
36	**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	66.28	67.94	69.77	102.69
2	Persentase Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Implementasi *Corporate University (CORPU)*	%	NA	50.00	50.00	100
37	**KESBANGPOLDAGRI**					
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	%	70.00	71.60	71.60	100
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	71.00	76.00	76.00	100
38	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	NA	50	60	120.00

No	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	Tahun 2025		
				Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3		4	5	6
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	0.95	0.96	1	104.17
39	**PENGAWASAN**					
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	Level III	Integrated Level III	III	80.15
			-3.116	2.67	2.14	80.15
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level III	Terdefinisi (Level III) (3,00)	Level II (2.20)	73.33
			-3.06	3.07	2.20	71.66
3	Manajemen Risiko Indeks	indeks	3.213	3.219	2.659	82.60
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	84	89.89	89.89	100
40	**PENGADAAN**					
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	%	19.71	19.91	23.41	117.58
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	skor	22.65	22.88	22.65	98.99
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	9/9	9/9	9/9	100
41	**PELAYANAN PUBLIK**					
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Skor	85.03	85.12	85.03	99.89
2	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	86.03	84.30	88.80	105.34

Sumber: data diolah, 2026

Pada Aspek Geografi dan Demografi terdapat beberapa indikator dengan tingkat capaiannya melampaui target diantaranya Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan, Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dan Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun. Sedangkan pada Aspek Kesejahteraan Masyarakat terdapat beberapa indikator dengan tingkat capaiannya melampaui target diantaranya, Laju Pertumbuhan Ekonomi Non Tambang, Tingkat Kemiskinan, Rasio Gini, Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita, Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun, Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi, Tingkat Penyerapan Lulusan SMK, Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi, Indeks Perlindungan Anak, Indeks Ketimpangan Gender (IKG), Indeks Pembangunan Gender, Indeks Pembangunan Pemuda, Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan, Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi, dan Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal

Sementara itu, pada Aspek Daya Saing, terdapat beberapa indikator dengan tingkat capaian melampui target diantaranya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan, Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan, Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara, Rasio kewirausahaan Daerah, Indeks Kapabilitas Inovasi, Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer, Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi, Ekspor Barang dan Jasa, Persentase Desa Mandiri, Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB, Tingkat Inflasi, Total Dana Pihak Ketiga/PDRB, Aset Dana Pensiun/PDRB, Total Kredit/PDRB, Jumlah Kerjasama Provinsi, Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah

non pertanian pada level provinsi, dan Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM). Adapun Aspek Pelayanan Umum terdapat beberapa indikator dengan tingkat capaiannya melampaui target diantaranya Indeks Reformasi Hukum, Indeks Pemerintah Digital, Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Indeks Pelayanan Publik, Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah, Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya, Indeks Tata Kelola Pengadaan, Opini BPK atas LKD, serta Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) dengan tingkat capaian sesuai bahkan melampaui target kinerja sebanyak 78 indikator atau mencapai 57,35%. Beberapa indikator dengan tingkat capaian melampui target diantaranya Peningkatan Produksi Perkebunan, Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi, Peningkatan produksi tanaman pangan, Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif, Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat di 4 Kawasan transmigrasi, Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa, Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan, Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan, Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi, Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar, Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi, Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan), Persentase peningkatan investasi di provinsi, Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19), Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah, Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Pemanfaatan Sistem Pengadaan, Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi, Indeks Keamanan Informasi, Pertumbuhan Wirausaha, Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja, Kinerja lalu lintas provinsi, Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah, Survei Kepuasan Masyarakat, Realisasi Total terhadap Target Investasi, Nilai Ekspor Barang Per Provinsi, Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah, Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi, Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan), Produksi Perikanan Tangkap, Produksi Perikanan Budidaya Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi, Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS), Rasio Konektivitas, Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi, Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum), Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS), Tingkat Kematangan UKPBJ, Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1, Terselesaikannya kasus tanah

garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi, Tersedianya RTKD Provinsi yang masih berlaku, Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS), Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan, Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni, Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni, Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan, Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah, Persentase pertumbuhan Kunjungan wisatawan, Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif, Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan, persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP, Persentase Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Implementasi Corporate University (CORPU), Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah, Persentase Penetapan RanPerda Tahun N, Persentase penanganan tanggap darurat bencana, Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi, Persentase penanganan pasca bencana, Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana, Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB, Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi, Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual, Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik, Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya, Persentase Fasilitasi Penataan Desa, Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku, Persentase Desa Maju dan Mandiri di 4 Kawasan Transrmigrasi, Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif, Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial, Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N, Kesesuaian antara RKPD dengan APBD, Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun, Indeks Pembangunan Statistik (IPS), serta Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah

2.3 Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal

Dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu pilar utama dalam penyelenggaraan urusan tersebut adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, yang menjadi prioritas karena langsung menyentuh kebutuhan mendasar masyarakat dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup warga negara.

Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar tersebut pada prinsipnya merupakan bentuk kehadiran negara dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar masyarakat, yang implementasinya diukur melalui pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM berfungsi sebagai tolok ukur kinerja pelayanan dasar yang wajib disediakan oleh pemerintah daerah secara minimal, merata, dan berkualitas.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Standar Pelayanan Minimal didefinisikan sebagai ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. Dengan demikian, SPM tidak hanya menjadi instrumen teknokratis dalam perencanaan dan penganggaran, tetapi juga merupakan bentuk komitmen negara dalam menjamin keadilan sosial dan pemerataan layanan publik.

Dalam rangka mengimplementasikan amanat regulasi tersebut, Pemerintah Provinsi NTB secara konsisten menyelenggarakan pelayanan dasar sesuai dengan kewenangannya sebagai pemerintah daerah provinsi. Pelaksanaan SPM di Provinsi NTB mencakup enam bidang pelayanan dasar, yaitu:

1. **SPM Bidang Pendidikan**, yang berfokus pada pemenuhan akses dan mutu pendidikan menengah serta pendidikan khusus;
2. **SPM Bidang Kesehatan**, yang diarahkan pada peningkatan pelayanan kesehatan rujukan, kesehatan masyarakat, dan penanganan kelompok rentan;
3. **SPM Bidang Pekerjaan Umum**, khususnya terkait penyediaan infrastruktur dasar seperti jalan provinsi dan sumber daya air;
4. **SPM Bidang Perumahan Rakyat**, yang mencakup penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak bencana serta penanganan kawasan permukiman kumuh;
5. **SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat**, yang diwujudkan melalui pelayanan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah, serta kesiapsiagaan bencana;
6. **SPM Bidang Sosial**, yang difokuskan pada perlindungan dan rehabilitasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Lebih lanjut, implementasi SPM di Provinsi NTB tidak hanya berorientasi pada pemenuhan indikator kinerja secara administratif, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelayanan publik. Hal ini dilakukan melalui integrasi perencanaan, penganggaran berbasis kinerja, serta penguatan sistem monitoring dan evaluasi yang adaptif. Selain itu, sinergi lintas perangkat daerah dan kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota menjadi kunci dalam memastikan ketercapaian target SPM secara optimal.

Dengan demikian, pelaksanaan SPM di Provinsi NTB diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan dasar secara berkelanjutan, memperkecil

kesenjangan antarwilayah, serta memperkuat fondasi pembangunan manusia yang inklusif dan berdaya saing.

Adapun pencapaian SPM di Provinsi NTB merupakan cerminan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi hak dasar masyarakat sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Pengukuran capaian SPM dilakukan terhadap indikator-indikator kinerja pada masing-masing bidang pelayanan dasar, yang menggambarkan tingkat akses, mutu, serta jangkauan pelayanan yang telah diberikan kepada masyarakat.

1. SPM Bidang Urusan Pendidikan

Tabel 2. 132 Capaian SPM Bidang Urusan Pendidikan Provinsi NTB Tahun 2021 - 2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Rata-Rata
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pendidikan Menegah	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	98,08	80,30	100	99,46	99,69	96,62
2	Pendidikan Khusus	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	84,19	92,60	100	98,57	99,99	92,84
Indeks Pencapaian SPM (IP-SPM) Pendidikan		**(Total Persentase Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar 1 + Persentase Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar 2) ÷ 2**	**Indeks**	**91,14**	**86,40**	**100**	**99,02**	**99,84**	94,73

Sumber : Laporan SPM Provinsi NTB, 2026 (diolah)

Capaian SPM Bidang Pendidikan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat baik dengan kecenderungan meningkat dan relatif stabil. Hal ini tercermin dari nilai Indeks Pencapaian SPM (IP-SPM) Pendidikan yang mencapai rata-rata sebesar 94,73, yang mengindikasikan bahwa pelayanan dasar pendidikan secara umum telah terpenuhi secara optimal, baik dari sisi cakupan penerima layanan maupun mutu layanan yang diberikan.

Pada layanan Pendidikan Menengah, capaian kinerja berada pada kategori sangat tinggi dengan rata-rata sebesar 96,62 persen. Pada tahun 2021, capaian sudah mencapai 98,08 persen, yang menunjukkan kondisi layanan yang relatif baik. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan cukup signifikan menjadi 80,30 persen, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam pemenuhan layanan, baik dari sisi akses maupun kualitas. Meskipun demikian, kondisi ini tidak berlangsung lama, karena pada tahun 2023 capaian meningkat drastis hingga mencapai 100 persen. Tren positif ini terus berlanjut pada tahun 2024 dan 2025 dengan capaian masing-masing sebesar 99,46 persen dan 99,69

persen, yang menunjukkan bahwa layanan pendidikan menengah telah kembali stabil dan berada pada tingkat optimal.

Sementara itu, pada layanan Pendidikan Khusus, capaian menunjukkan tren peningkatan yang lebih progresif dengan rata-rata sebesar 92,84 persen. Pada tahun 2021, capaian masih berada pada angka 84,19 persen, yang mengindikasikan bahwa layanan bagi peserta didik berkebutuhan khusus belum sepenuhnya optimal. Namun, pada tahun 2022 terjadi peningkatan signifikan menjadi 92,60 persen, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam jangkauan dan kualitas layanan. Puncak capaian terjadi pada tahun 2023 dengan nilai 100 persen, yang menunjukkan terpenuhinya seluruh indikator pelayanan dasar. Pada tahun 2024 dan 2025, capaian tetap terjaga pada tingkat yang sangat tinggi, masing-masing sebesar 98,57 persen dan 99,99 persen, yang menandakan konsistensi dalam penyediaan layanan pendidikan inklusif.

Secara agregat, nilai IP-SPM Pendidikan menggambarkan dinamika yang sejalan dengan capaian pada kedua jenis layanan tersebut. Pada tahun 2021, IP-SPM tercatat sebesar 91,14, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2022 menjadi 86,40. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi peningkatan signifikan hingga mencapai 100, yang kemudian tetap terjaga pada tahun 2024 sebesar 99,02 dan meningkat kembali pada tahun 2025 menjadi 99,84. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun sempat mengalami tekanan pada tahun 2022, sistem pelayanan pendidikan di Provinsi NTB mampu melakukan pemulihan dengan cepat dan bahkan mencapai tingkat kinerja yang sangat optimal.

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Pendidikan di Provinsi NTB mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memastikan terpenuhinya layanan dasar pendidikan bagi masyarakat. Ke depan, dengan capaian yang telah mendekati maksimal, fokus pembangunan pendidikan perlu diarahkan tidak hanya pada pemenuhan akses, tetapi juga pada peningkatan kualitas pembelajaran, pemerataan layanan antarwilayah, serta penguatan pendidikan inklusif yang berkelanjutan.

2. SPM Bidang Urusan Kesehatan

Tabel 2. 133 Capaian SPM Bidang Urusan Kesehatan Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Rata-Rata
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana daerah provinsi	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	100	90,00	47,30	100	100	89,55
2	pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa daerah provinsi	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	100	90,00	17,88	100	100	84,65

Indeks Pencapaian SPM (IP-SPM) Kesehatan	**(Total Persentase Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar 1 + Persentase Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar 2) ÷ 2**	**Indeks**	**100**	**90**	**32,59**	**100**	**100**	87,10

Sumber : Laporan SPM Provinsi NTB, 2026 (diolah)

Capaian SPM Bidang Kesehatan di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan dinamika yang cukup tajam, dengan pola fluktuatif ekstrem namun mampu pulih secara cepat dan kembali mencapai kondisi optimal. Secara rata-rata, Indeks Pencapaian SPM (IP-SPM) Kesehatan berada pada angka 87,10, yang mengindikasikan bahwa secara umum pelayanan dasar kesehatan telah terpenuhi dengan baik, meskipun terdapat gangguan signifikan pada periode tertentu.

Pada jenis pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana, capaian menunjukkan rata-rata sebesar 89,55 persen. Pada tahun 2021, capaian berada pada kondisi optimal sebesar 100 persen, yang mencerminkan kesiapsiagaan layanan kesehatan dalam menghadapi situasi krisis. Namun, pada tahun 2022 terjadi penurunan menjadi 90,00 persen, dan penurunan paling tajam terjadi pada tahun 2023 hingga mencapai 47,30 persen. Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan serius dalam penyelenggaraan layanan, yang dapat disebabkan oleh meningkatnya kompleksitas bencana, keterbatasan sumber daya, atau kendala distribusi layanan kesehatan pada situasi darurat. Meskipun demikian, pada tahun 2024 dan 2025 capaian kembali meningkat secara signifikan hingga mencapai 100 persen, yang menunjukkan adanya pemulihan sistem dan penguatan kapasitas layanan kesehatan dalam menghadapi krisis.

Sementara itu, pada pelayanan kesehatan bagi penduduk dalam kondisi kejadian luar biasa (KLB), pola capaian menunjukkan fluktuasi yang lebih ekstrem dengan rata-rata sebesar 84,65 persen. Pada tahun 2021 capaian berada pada angka 100 persen, kemudian menurun menjadi 90,00 persen pada tahun 2022. Penurunan paling drastis terjadi pada tahun 2023 dengan capaian hanya 17,88 persen, yang menunjukkan adanya gangguan besar dalam penanganan kondisi KLB, baik dari sisi cakupan layanan maupun mutu layanan yang diberikan. Hal ini dapat mengindikasikan keterbatasan respons sistem kesehatan terhadap lonjakan kasus atau kejadian luar biasa pada periode tersebut. Namun demikian, seperti pada layanan sebelumnya, capaian kembali pulih secara penuh pada tahun 2024 dan 2025 dengan nilai 100 persen, yang mencerminkan keberhasilan dalam memperkuat sistem respons darurat kesehatan.

Secara agregat, nilai IP-SPM Kesehatan menunjukkan pola yang konsisten dengan kedua jenis layanan tersebut. Pada tahun 2021 capaian berada pada kondisi maksimal sebesar 100, kemudian menurun menjadi 90 pada tahun 2022, dan mengalami kontraksi sangat tajam pada tahun 2023 hingga 32,59. Namun, pada tahun 2024 dan 2025 terjadi pemulihan yang sangat signifikan dengan capaian kembali ke angka 100. Pola ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pelayanan kesehatan sempat mengalami tekanan berat, kemampuan pemulihan (*resilience*) sistem kesehatan di Provinsi NTB tergolong sangat baik.

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Kesehatan di Provinsi NTB mencerminkan ketahanan sistem yang adaptif namun rentan terhadap shock pada kondisi krisis ekstrem, khususnya pada tahun 2023. Ke depan, upaya perbaikan perlu difokuskan pada penguatan sistem ketahanan kesehatan daerah, termasuk peningkatan kapasitas respons terhadap bencana dan kejadian luar biasa, penguatan sistem logistik dan distribusi layanan kesehatan, serta peningkatan kualitas data dan sistem monitoring. Dengan demikian, stabilitas capaian SPM dapat lebih terjaga dan tidak mengalami fluktuasi yang terlalu tajam di masa mendatang.

3. SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum

Tabel 2. 134 Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Rata-Rata
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	0,00	0,00	100	87,75	98,75	60,23
2	penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	0,00	0,00	90,00	98,25	82,5	45,13
Indeks Pencapaian SPM (IP-SPM) Pekerjaan Umum		**(Total Persentase Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar 1 + Persentase Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar 2) ÷ 2**	**Indeks**	**0,00**	**0,00**	**95,00**	**98,50**	**91,25**	53,70

Sumber : Laporan SPM Provinsi NTB, 2026 (diolah)

Capaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan pola yang sangat dinamis dengan lonjakan kinerja yang signifikan setelah fase awal yang belum berjalan optimal. Secara rata-rata, Indeks Pencapaian SPM (IP-SPM) Pekerjaan Umum tercatat sebesar 53,70, yang secara agregat masih tergolong sedang, namun angka ini belum sepenuhnya mencerminkan kondisi terkini karena adanya capaian nol pada dua tahun awal.

Pada jenis pelayanan pemenuhan kebutuhan air minum curah lintas daerah kabupaten/kota, capaian menunjukkan rata-rata sebesar 60,23 persen. Pada tahun 2021 dan 2022, capaian masih berada pada angka 0,00 persen, yang mengindikasikan bahwa layanan ini belum berjalan atau masih dalam tahap perintisan, baik dari sisi kelembagaan, infrastruktur, maupun kesiapan sistem layanan regional. Memasuki tahun 2023, terjadi lonjakan capaian yang sangat signifikan hingga mencapai 100 persen, yang menandakan mulai beroperasinya layanan secara optimal. Pada tahun 2024 capaian sedikit menurun menjadi 87,75 persen, namun kembali meningkat pada tahun 2025 menjadi 98,75 persen, menunjukkan bahwa layanan air minum curah lintas daerah telah berjalan dengan tingkat kinerja yang tinggi dan relatif stabil.

Sementara itu, pada jenis pelayanan pengolahan air limbah domestik regional lintas daerah kabupaten/kota, capaian memiliki rata-rata sebesar 45,13 persen dengan pola yang serupa namun lebih berfluktuasi. Pada tahun 2021 dan 2022 capaian masih 0,00 persen, yang menunjukkan belum tersedianya layanan atau masih dalam tahap pembangunan sistem. Pada tahun 2023 capaian meningkat signifikan menjadi 90,00 persen, kemudian mencapai puncaknya pada tahun 2024 sebesar 98,25 persen. Namun, pada tahun 2025 terjadi penurunan menjadi 82,50 persen, yang mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga konsistensi mutu layanan atau cakupan pelayanan, seperti keterbatasan operasional, pemeliharaan infrastruktur, atau pengelolaan sistem regional.

Secara agregat, nilai IP-SPM Pekerjaan Umum menunjukkan transformasi yang sangat jelas. Pada tahun 2021 dan 2022, indeks berada pada angka 0,00, yang mencerminkan belum berjalannya pelayanan dasar pada kedua jenis layanan tersebut. Namun, pada tahun 2023 terjadi lompatan signifikan menjadi 95,00, yang kemudian meningkat pada tahun 2024 menjadi 98,50, dan sedikit menurun pada tahun 2025 menjadi 91,25, namun tetap berada pada kategori sangat tinggi. Pola ini menunjukkan bahwa dalam waktu relatif singkat, Pemerintah Provinsi NTB berhasil melakukan akselerasi pembangunan dan operasionalisasi layanan infrastruktur dasar secara masif.

Secara keseluruhan, capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum di Provinsi NTB mencerminkan pergeseran dari fase pembangunan (development phase) menuju fase pelayanan (service delivery phase). Tantangan utama ke depan bukan lagi pada penyediaan infrastruktur awal, melainkan pada keberlanjutan layanan, optimalisasi pemanfaatan, serta peningkatan kualitas dan cakupan layanan secara merata. Oleh karena itu, diperlukan penguatan pada aspek pengelolaan operasional, pembiayaan pemeliharaan, serta kolaborasi lintas daerah agar kinerja SPM dapat terus terjaga dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

4. SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Permukiman

Tabel 2. 135 Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Rata-Rata
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah provinsi	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	99,80	100	90,00	100	100	98,3
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi Program Pemerintah Daerah provinsi	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	100	100	100	100	100	100
Indeks Pencapaian SPM (IP-SPM) Perumahan Rakyat		**(Total Persentase Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar 1 + Persentase Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar 2) ÷ 2**	**Indeks**	**99,90**	**100**	**95**	**100**	**100**	99,15

Sumber : Laporan SPM Provinsi NTB, 2026 (diolah)

Capaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, stabil, dan mendekati kondisi paripurna, dengan nilai Indeks Pencapaian SPM (IP-SPM) rata-rata sebesar 99,15. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan dasar perumahan, baik dari sisi cakupan penerima maupun mutu layanan, secara umum telah terpenuhi secara optimal.

Pada jenis pelayanan penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana, capaian berada pada rata-rata 98,30 persen. Kinerja ini menunjukkan efektivitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan hunian pascabencana. Meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2023 menjadi 90,00 persen, capaian kembali pulih dan mencapai 100 persen pada tahun 2024 dan 2025. Sementara itu, pada jenis pelayanan fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah daerah, capaian konsisten berada pada angka 100 persen sepanjang periode, yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan program relokasi secara menyeluruh.

Namun demikian, tingginya capaian tersebut tidak terlepas dari sejumlah permasalahan mendasar yang masih dihadapi dalam implementasi di lapangan. Salah satu isu utama adalah belum optimalnya sistem pendataan, sinkronisasi, dan validasi data rumah terdampak bencana. Ketidakterpaduan data antar perangkat daerah maupun dengan pemerintah kabupaten/kota berpotensi menyebabkan ketidaktepatan sasaran, baik dalam bentuk data yang belum terakomodasi maupun duplikasi penerima manfaat. Hal ini juga dapat menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi fluktuasi capaian pada tahun tertentu, khususnya pada tahun 2023.

Selain itu, keterbatasan ketersediaan lahan untuk relokasi menjadi tantangan strategis yang cukup kompleks. Meskipun capaian indikator relokasi menunjukkan angka maksimal, dalam praktiknya proses penyediaan lahan seringkali menghadapi kendala terkait kesesuaian tata ruang, status kepemilikan lahan, serta resistensi sosial dari masyarakat terdampak. Kondisi ini menuntut adanya upaya ekstra dari pemerintah daerah dalam memastikan keberlanjutan program relokasi tanpa menimbulkan konflik sosial maupun keterlambatan pelaksanaan. Di sisi lain, jumlah rumah yang rusak akibat bencana yang bersifat dinamis dan tidak terprediksi turut memberikan tekanan terhadap kinerja pelayanan. Tingginya kerentanan wilayah NTB terhadap bencana menyebabkan kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi dapat meningkat secara tiba-tiba, sehingga memerlukan kesiapan sistem yang adaptif, baik dari sisi pembiayaan, perencanaan, maupun kapasitas kelembagaan.

Dengan demikian, capaian SPM yang sangat tinggi pada Bidang Perumahan Rakyat perlu dimaknai sebagai hasil dari upaya intensif pemerintah daerah dalam mengatasi berbagai tantangan struktural. Ke depan, diperlukan penguatan pada integrasi sistem data perumahan berbasis spasial, peningkatan koordinasi lintas sektor dan lintas wilayah, serta inovasi dalam penyediaan lahan relokasi, seperti melalui skema land banking atau kerja sama pemanfaatan lahan. Selain itu, penguatan mitigasi dan manajemen risiko bencana menjadi langkah strategis untuk mengurangi tekanan

terhadap kebutuhan layanan perumahan, sehingga kualitas dan keberlanjutan capaian SPM dapat terus terjaga.

5. SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Tabel 2. 136 Capaian SPM Bidang Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Rata-Rata
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum daerah provinsi	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	100	96,00	96,67	100	100	98,78
Indeks Pencapaian SPM (IP-SPM) Trantibum		**Persentase Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar**	**Indeks**	**100**	**96,00**	**96,67**	**100**	**100**	98,78

Sumber : Laporan SPM Provinsi NTB, 2026 (diolah)

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi, stabil, dan konsisten mendekati kondisi paripurna, dengan nilai rata-rata Indeks Pencapaian SPM (IP-SPM) sebesar 98,78. Hal ini mengindikasikan bahwa pelayanan dasar dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum telah terlaksana secara optimal, baik dari sisi cakupan pelayanan maupun kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Pada jenis pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum, capaian kinerja berada pada tingkat maksimal sebesar 100 persen pada tahun 2021, yang mencerminkan kondisi pelayanan yang sangat baik. Pada tahun 2022 dan 2023 terjadi sedikit penurunan menjadi masing-masing 96,00 persen dan 96,67 persen, yang menunjukkan adanya dinamika dalam pelaksanaan layanan, seperti meningkatnya kompleksitas gangguan ketertiban umum, keterbatasan jangkauan pengawasan, atau tantangan dalam penegakan peraturan daerah. Namun demikian, pada tahun 2024 dan 2025 capaian kembali meningkat dan mencapai 100 persen, yang menandakan adanya penguatan kembali sistem pelayanan serta peningkatan efektivitas kinerja aparatur di lapangan.

Secara agregat, nilai IP-SPM Trantibum mengikuti pola yang sama, dengan capaian tinggi dan stabil sepanjang periode tersebut. Meskipun terdapat sedikit fluktuasi pada tahun 2022 dan 2023, secara umum kinerja pelayanan berada dalam kategori sangat optimal, yang menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas ketenteraman dan ketertiban masyarakat secara konsisten.

Namun demikian, capaian yang tinggi ini tetap perlu dilihat secara lebih kritis dengan mempertimbangkan beberapa tantangan yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan kinerja. Di antaranya adalah dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks, termasuk potensi konflik sosial, pelanggaran ketertiban umum, serta perubahan pola aktivitas masyarakat yang memerlukan respons cepat dan adaptif. Selain

itu, keterbatasan jumlah dan kapasitas aparatur, khususnya dalam menjangkau seluruh wilayah secara merata, masih menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi layanan.

Di sisi lain, kebutuhan akan penguatan sistem perlindungan masyarakat dan mitigasi bencana juga semakin meningkat, mengingat karakteristik wilayah NTB yang rawan terhadap bencana. Hal ini menuntut peningkatan kapasitas kelembagaan, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi dalam sistem deteksi dini dan respons cepat terhadap gangguan ketenteraman maupun kondisi darurat.

Dengan demikian, capaian SPM Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat yang sangat tinggi mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas wilayah. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada penguatan kualitas layanan, peningkatan responsivitas terhadap dinamika sosial, serta penguatan kapasitas aparatur dan sistem perlindungan masyarakat, agar capaian yang telah baik ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

6. SPM Bidang Urusan Sosial

Tabel 2. 137 Capaian SPM Bidang Urusan Bidang Sosial Provinsi NTB Tahun 2021-2025

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator	Satuan	Capaian Tahun					Rata-Rata
				2021	2022	2023	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	100	94,67	100	100	100	82,28
2	rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	100	100	100	100	100	80,05
3	rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	100	100	100	100	100	80,05
4	rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	100	95,38	100	100	100	95,03
5	perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar + Persentase Pencapaian Mutu Layanan dasar	%	100	100	100	96,00	96,00	95,03
Indeks Pencapaian SPM (IP-SPM) Sosial		**(Total Persentase Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar 1 s.d Persentase Pencapaian Jenis Pelayanan Dasar 5) ÷ 5**	**Indeks**	**100**	**98,01**	**100**	**99,20**	**99,20**	**87,32**

Sumber : Laporan SPM Provinsi NTB, 2026 (diolah)

Capaian SPM Bidang Urusan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan kinerja yang sangat tinggi dan relatif stabil, dengan nilai Indeks Pencapaian SPM (IP-SPM) rata-rata sebesar 87,32. Meskipun secara agregat terlihat lebih rendah dibanding beberapa bidang lain, hal ini lebih disebabkan oleh dinamika pembobotan dan kompleksitas indikator, sementara secara capaian tahunan hampir seluruh layanan berada pada kisaran mendekati atau mencapai 100 persen.

Pada layanan rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, capaian menunjukkan kinerja sangat baik, dengan nilai 100 persen pada hampir seluruh tahun, kecuali sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 94,67 persen. Hal ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam memberikan layanan yang inklusif bagi kelompok rentan, meskipun masih terdapat tantangan dalam menjaga konsistensi mutu layanan. Untuk layanan rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam panti dan lanjut usia terlantar di dalam panti, capaian menunjukkan konsistensi yang sangat tinggi dengan nilai 100 persen pada seluruh periode 2021–2025. Kondisi ini menggambarkan bahwa pemenuhan kebutuhan dasar bagi kelompok rentan tersebut telah berjalan optimal, baik dari sisi cakupan maupun kualitas layanan yang diberikan.

Sementara itu, pada layanan rehabilitasi sosial dasar tuna sosial (gelandangan dan pengemis), capaian juga tergolong sangat tinggi dengan rata-rata 95,03 persen. Meskipun terdapat sedikit penurunan pada tahun 2022 menjadi 95,38 persen, secara umum layanan ini telah berjalan efektif dalam menjangkau dan menangani kelompok sasaran. Pada layanan perlindungan dan jaminan sosial bagi korban bencana, capaian menunjukkan kinerja stabil pada angka 100 persen pada periode 2021–2023, namun sedikit menurun pada tahun 2024 dan 2025 menjadi 96,00 persen. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kompleksitas dalam penanganan korban bencana, baik dari sisi jumlah maupun kebutuhan layanan yang harus dipenuhi.

Secara agregat, nilai IP-SPM Sosial menunjukkan pola yang stabil pada tingkat sangat tinggi, yaitu 100 pada tahun 2021, 98,01 pada tahun 2022, 100 pada tahun 2023, serta sedikit menurun namun tetap tinggi pada tahun 2024 dan 2025 sebesar 99,20. Hal ini mencerminkan bahwa secara umum sistem pelayanan sosial di Provinsi NTB telah berjalan dengan sangat baik dan mampu menjangkau kelompok masyarakat yang membutuhkan. Namun demikian, di balik capaian yang tinggi tersebut, terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian ke depan. Di antaranya adalah keterbatasan kapasitas panti sosial, peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) yang bersifat dinamis, serta kebutuhan akan akurasi data terpadu agar intervensi program lebih tepat sasaran. Selain itu, tantangan dalam penanganan korban bencana yang semakin kompleks juga memerlukan penguatan sistem respons sosial yang lebih adaptif dan terintegrasi.

Dengan demikian, capaian SPM Bidang Sosial di Provinsi NTB mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan dan pelayanan dasar bagi kelompok rentan. Ke depan, fokus kebijakan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas layanan, penguatan sistem data dan kelembagaan, serta pengembangan model pelayanan sosial berbasis masyarakat, agar capaian yang telah tinggi ini dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan.

2.4 Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Daerah

2.4.1 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah

Permasalahan pembangunan daerah disusun berdasarkan hasil identifikasi capaian pada urusan aspek pelayanan umum di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun 2025. Proses ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap isu yang diangkat benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan, baik yang berkaitan dengan capaian kinerja, kendala pelaksanaan program, maupun tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Dengan pendekatan tersebut, permasalahan pembangunan yang dirumuskan tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga substantif dan berbasis data, sehingga dapat menjadi dasar yang kuat dalam perumusan kebijakan dan arah pembangunan ke depan. Selain itu, identifikasi permasalahan ini juga mempertimbangkan keterkaitan antar sektor serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah secara keseluruhan.

Adapun permasalahan pembangunan daerah selanjutnya disusun dan dikelompokkan berdasarkan bidang urusan, yang dijabarkan ke dalam empat urusan utama. Pengelompokan ini dimaksudkan untuk memudahkan pemetaan isu strategis serta penentuan prioritas penanganan secara lebih terarah dan terintegrasi, sebagaimana diuraikan sebagai berikut:

2.2.1.1 Permasalahan Layanan Urusan Wajib Berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang Pendidikan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 138 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang Pendidikan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Rata-rata lama sekolah rendah	▪ Tingkat pendapatan masyarakat rendah sehingga terbatas kemampuan pendanaan untuk pembiayaan pendidikan anak ▪ Kurangnya akses terhadap pendidikan menengah dan tinggi di kabupaten, kecamatan dan daerah terpencil ▪ Mutu dan daya saing pendidikan relatif masih rendah ▪ Pengaruh lingkungan sehingga terjadi pernikahan dini/perkawinan anak ▪ Persepsi masyarakat tentang pentingnya pendidikan masih kurang	▪ Rata-rata Lama Sekolah (RLS), RLS di NTB sebesar 7,87 tahun ▪ Tiga kabupaten/kota dengan RLS kurang dari 7 tahun, yaitu Lombok Barat, Lombok Tengah dan Lombok Timur ▪ Angka RLS ini malah lebih rendah dibandingkan RLS nasional, Sulsel, Bali dan NTT ▪ Persentase penduduk usia 19-23 tahun yang	Rata-rata lama sekolah rendah dipengaruhi oleh berbagai faktor yang terkait dengan tingkat pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendidikan anak, ekonomi keluarga, dan lingkungan tempat tinggal. Rendahnya RLS ini juga disebabkan Angka Partsipasi Sekolah yang masih rendah.

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
			tidak sekolah pada tahun 2024 terendahdibanding dengan provinsi Bali dan NTT serta nasional yaitu sebesar 28,88 persen	
2	▪ Masih kurangnya partisipasi sekolah SMA/MA/SMK/ Paket C	▪ Akses pendidikan menengah dan tinggi masih terbatas ▪ Kualitas sistem pendidikan masih rendah ▪ Sarana prasarana pendidikan terbatas	▪ Nilai APM cenderung mengalami kenaikan dari tahun 2019 sampai 2024, yaitu dari 66,04 menjadi 71,09 persen, namun masih banyak penduduk yang tidak bersekolah pada jenjang seusianya sebesar 28,01 persen.	APM yang baik adalah mendekati 100% untuk menunjukkan penduduk bersekolah pada jenjang yang sesuai dengan usianya, sehingga nilai APM yang masih kurang dari 100% ini menunjukkan semakin rendah (level SMA) menunjukkan masih banyak penduduk yang tidak bersekolah pada jenjang yang sesuai usianya

2. Kesehatan

Permasalahan dan isu strategis di bidang urusan kesehatan berkaitan dengan tingginya angka perkawinan dini atau perkawinan anak yang terjadi di Provinsi NTB. Hal ini berdampak pada masih tingginya angka kematian bayi, selain faktor tingginya angka kemiskinan, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, kurangnya kesadaran untuk kesehatan ibu dan anak, dan kondisi sanitasi yang buruk. Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang kesehatan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 139 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kesehatan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Masih tingginya angka kematian bayi dan angka kematian ibu	▪ Perkawinan usia dini/anak ▪ Tingginya angka kemiskinan ▪ Akses layanan kesehatan terbatas ▪ Kesadaran hidup sehat dan bersih ▪ Kondisi sanitasi yang buruk	▪ Angka kematian bayi mencapai 679 pada tahun 2024, dengan kasus tertinggi di Kabupaten Lombok Timur (155 kasus), Lombok Tengah (110 kasus) dan Bima (85 kasus) ▪ Proporsi angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup meningkat	▪ Hasil analisis memberikan gambaran tingginya angka perkawinan dini/anak memerlukan perhatian semua pihak untuk membangun kolaborasi untuk aksi pengurangan angka perkawinan dini/anak ▪ Pemerintah Provinsi NTB dan Kantor Wilayah Kementerian Agama c.q. Pengadilan Agama untuk fokus terhadap Dispensasi Nikah (Diskah).

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
			dari 7,91 tahun 2018 menjadi 8,76 pada tahun 2024 ▪ Kasus kematian ibu menurun dari 97 kasus tahun 2019 menjadi 79 kasus tahun 2024 ▪ Kasus perkawinan anak menurun dari 875 tahun 2020 menjadi 554 pada tahun 2024.	▪ Apabila saat diputuskan hakim calon pengantin sudah hamil untuk ber KB saat pasca salin dan dikawal 1000 Hari Pertama Kelahiran (1000 HPK) agar tidak stunting. ▪ Apabila diputuskan hakim calon pengantin belum hamil, disarankan untuk ber KB dan edukasi "3 jangan dan 4 terlalu" agar hamil di usia 19 tahun ke atas atau idealnya pada usia 21 tahun. ▪ Pemerintah Provinsi NTB perlu melakukan kegiatan edukasi masyarakat secara masif dengan mengoptimalkan peran Posyandu Keluarga (Posga) untuk pengendalian kelahiran dan percepatan penurunan stunting
2	Prevalensi balita gizi buruk dan stunting	▪ Asupan gizi balita kurang ▪ Sanitasi buruk ▪ intervensi spesifik dan sensitif belum optimal ▪ kelembagaan TPPS belum optimal	▪ Prevalensi stunting tahun 2019 sebesar 19,02 %, meningkat menjadi 23,51 % pada 2020, kemudian mengalami penurunan menjadi 19,23 % pada tahun 2021 dan menurun pada tahun 2022 menjadi 16,99%. Kembali menurun pada tahun 2023 sebesar 13,49 % dan pada tahun 2024 turun kembali menjadi 12,17%. ▪ Proporsi rumah tangga dengan akses sanitasi layak meningkat dari 79,36 pada tahun 2019 menjadi 85,45 pada tahun 2024	▪ Target akselerasi penurunan stunting memerlukan optimalisasi sumber daya pada intervensi spesifik dan sensitif, sesuai dengan siklus kehidupan, pendidikan dan edukasi gizi bagi masyarakat, sanitasi dan air bersih. ▪ Perlu optimalisasi kelembagaan TPPS untuk memantau perkembangan tumbuh kembang anak dan mencegah prevalensi stunting di NTB ▪ Memantau progres pelaksanaan percepatan penurunan stunting sesuai Perpres Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting
3	Usia Harapan Hidup (UHH) belum optimal mendukung target capaian IPM NTB	▪ UHH dihitung berdasarkan variabel angka kematian bayi ▪ Peningkatan angka kematian bayi akan berdampak pada capaian target nilai UHH NTB	▪ Usia Harapan Hidup (UHH) meningkat dari 64,13 pada tahun 2011 menjadi 72,25 pada tahun 2024	▪ Hasil analisis terhadap capaian kinerja Usia Harapan Hidup menunjukkan bahwa faktor kesehatan, sosial ekonomi, dan lingkngan perlu mendapat perhatian. ▪ Faktor kesehatan terkait dengan kualitas kesehatan masyarakat dapat

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
				ditingkatkan dengan mengoptimalkan penyediaan layanan fasilitas kesehatan dan peningkatan aksesibilitas. ▪ Faktor sosial ekonomi dengan tingginya angka kemiskinan menyebabkan keterbatasan untuk pemenuhan gizi keluarga dan kesehatan ibu hamil dan bayi ▪ Faktor lingkungan terkait daerah rawan bencana dengan kejadian bencana alam yang merusak infrastruktur wilayah, berdampak pada aksesibilitas masyarakat menuju fasilitas layanan kesehatan

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Pemerintah Provinsi NTB masih menghadapi tantangan dalam penyediaan infrastruktur layanan dasar bidang urusan pekerjaan umum dan penataan ruang. Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 140 Permasalahan pembangunan pada Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Kondisi infrastruktur wilayah yang masih belum memadai	▪ Keterbatasan sumberdaya untuk pemeliharaan infrastruktur jalan guna menjamin nilai kemantapan jalan yang telah dibangun ▪ Faktor keselamatan dan keamanan dalam layanan infrastruktur yang berkualitas masih belum optimal ▪ Keterbatasan lahan untuk infrastruktur wilayah karena adanya pertumbuhan jumlah penduduk yang membutuhkan ketersediaan lahan untuk perumahan dan permukiman ▪ Kesadaran masyarakat untuk menjaga fasilitas infrastruktur wilayah yang telah tersedia dengan baik massih belum optimal	▪ Untuk mendukung kelancaran transportasi darat, hingga tahun 2024 di Provinsi NTB telah dibangun Jalan Negara 939,68 km dan Jalan Provinsi 1.493,12 km ▪ Tingkat kemantapan jalan mengalami penurunan, dari 84,52% pada tahun 2022 menjadi 97,94% pada tahun 2024 ▪ Infrastruktur Sumber Daya Air (SDA), sebagai prasarana untuk mendukung penyimpanan dan pendistribusian air maupun prasarana	▪ Sebagian besar Jalan Provinsi sudah beraspal dan dalam kondisi baik, sementara sebagian kecilnya belum beraspal dan dalam kondisi sedang dan rusak ▪ Penurunan tingkat kemantapan jalan disebabkan oleh kasus bencana alam yang terjadi dan merusak kondisi infrastruktur wilayah yang telah terbangun, keterbatasan sumber daya untuk pemeliharaan jalan, meningkatan jumlah kendaraan bermotor, dan tingginya aktifitas logistik untuk pengangkutan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
			untuk pengendalian daya rusak air, 29 bendung skala besar, 137 bendung skala sedang, dan 686 bendung skala kecil, 10 bendungan, 238 embung, dan 161 pos pengawasan (ARR, AWLR, CR)	barang yang berdampak pada kondisi eksisting jalan yang ada ▪ Untuk menjamin ketersediaan air tanah, menjaga agar bendung, bendungan dan embung tetap dapat berfungsi, Pemerintah Provinsi NTB perlu memperhatikan kerbelanjutan dan keberhasilan program rehabilitasi hutan dan lahan yang dilaksanakan oleh Dinas LHK

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Provinsi NTB terlihat dari rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran hukum terhadap kelestarian lingkungan. Perkembangan pusat-pusat pertumbuhan baru yang disertai dengan peningkatan pemanfaatan lahan permukiman secara swadaya masyarakat, khususnya kategori Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) seringkali tidak difasilitasi dengan penyediaan layanan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) yang memadai. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik, mengakibatkan penurunan kualitas kawasan permukiman yang dibangun pengembang dan munculnya kawasan permukiman kumuh baru yang dibangun oleh MBR. Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada bidang urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 141 Permasalahan pembangunan pada Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Backlog perumahan dan kondisi rumah layak huni yang masih belum optimal	▪ Dari tahun 2022-2024 target Pencapaian terhadap rumah layak huni tida pernah mencapai target dimana tahun 2022 target 65,8% yang tercapai 62,3%, tahun 2023 target sebesar 68,95% teralisasi 66,31% dan pada tahun 2024 target 68,33% terealisasi sebesar 67,74%. ▪ Belum optimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang perumahan ▪ Rendahnya pendapatan masyarakat dengan tingginya harga tanah sehingga kemampuan untuk memiliki rumah terbatas	▪ Berdasarkan hasil Susenas Maret 2024 yang dirilis BPS persentase rumah tangga yang menempati rumah yang layak huni tahun 2024 sebesar 67,74% meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 66,31%	▪ Peningkatan kesejahteraan masyarakat digambarkan dengan ketersediaan perumahan dan kawasan permukiman yang layak huni sesuai 4 indikator kunci 4 (empat) kriteria rumah layak huni yang disesuaikan indikator Sustainable Development Goals (SDGs), yakin ketahanan bangunan (*durable housing*), memiliki akses terhadap air minum layak (*access to improved water*), memiliki akses terhadap sanitasi layak (*access to adequate sanitation*) dan kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita (*sufficient living space*), perlu mendapat perhatian
2	Kawasan kumuh	▪ Pekerjaan masyarakat masih pada sektor informal dengan pendapatan kecil ▪ Rendahnya tingkat kesejahteraan, rendahnya perilaku hidup sehat, ketaatan dan kesadaran hukum terhadap kelestarian lingkungan	▪ Luasan kumuh di Provinsi NTB seluas 5.991,58 Ha dan yang menjadi kewenangan Provinsi NTB seluas 612,83 ha, yang tersebar dalam 48 kawasan di 10 kabupaten Kota ▪ Capaian penanganan kawasan kumuh sampai dengan tahun 2024 yaitu 89,56 Ha dari target 621,03 Ha ▪ Masih terdapat 52,10% kawasan kumuh yang perlu	▪ Penanganan kumuh di level Kabupaten/Kota berdasarkan kewenangan < 10 Ha, kewenangan provinsi 10-15 Ha, dan pusat >15 Ha. Penanganan kawasan kumuh ▪ Kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah untuk penataan kawasan kumuh diperlukan untuk meningkatkan nilai ekonomi kawasan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
			mendapat penanganan	dan menciptakan lingkungan yang asri dan lestari di kota dan perkotaan di Provinsi NTB

5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada bidang urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 142 Permasalahan pembangunan pada Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Penurunan konflik dan penegakan implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan daerah (Perda dan Pergub)	• Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait norma dan regulasi yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah	• Selama tahun 2017-2024, jumlah konflik di Provinsi NTB menunjukkan trend penurunan kecuali pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan • Selama tahun 2020-2024, jumlah pelanggaran terhadap PERDA dan Peraturan Gubernur sebanyak 47 kasus dan telah tertangani seluruhnya	• Pemerintah Provinsi NTB tetap melakukan berbagai macam pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya kasus konflik, untuk menimbulkan rasa aman pada masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada investors untuk berinvestasi di Provinsi NTB
2	Masih lemahnya kapasitas daerah untuk penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana	• Kebijakan perencanaan dan pengganggaran belum mengimplementasikan kebutuhan sumberdaya untuk penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana • Rendahnya kapasitas sumber daya manusia untuk teknis perencanaan penanggulangan bencana	• Nilai indeks kapasitas daerah meningkat dari 0,59 tahun 2019 menjadi 0,72 pada tahun 2022 • Terbentuknya 242 Desa Tangguh Bencana (Destana) dari target 242 Destana pada tahun 2024 • Tersedianya aplikasi SiAGA (Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana) dan website SINCAN (Sistem Informasi Kebencanaan) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah	• Optimalisasi Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat • Penguatan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membangun kapasitas lokal dalam pengurangan risiko bencana • Pengurangan risiko bencana dengan memperbaiki kondisi dan fungsi lingkungan untuk mengurangi dampak bencana alam pada masyarakat

6. Sosial

Tantangan dalam penanganan permasalahan bidang urusan sosial berkaitan dengan tingginya tingkat kemiskinan, penanganan dan pemberdayaan fakir miskin dan

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), serta penyediaan sarana prasarana sosial. Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan sosial dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 143 Permasalahan pembangunan pada urusan sosial

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Penurunan konflik dan penegakan implementasi regulasi dan kebijakan pembangunan daerah (Perda dan Pergub)	• Kurangnya pengetahuan masyarakat terkait norma dan regulasi yang berlaku dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah	• Selama tahun 2017-2024, jumlah konflik di Provinsi NTB menunjukkan trend penurunan kecuali pada tahun 2022 dan 2023 mengalami kenaikan • Selama tahun 2020-2024, jumlah pelanggaran terhadap PERDA dan Peraturan Gubernur sebanyak 47 kasus dan telah tertangani seluruhnya	• Pemerintah Provinsi NTB tetap melakukan berbagai macam pencegahan untuk mengantisipasi terjadinya kasus konflik, untuk menimbulkan rasa aman pada masyarakat dan memberikan kepercayaan kepada investors untuk berinvestasi di Provinsi NTB
2	Masih lemahnya kapasitas daerah untuk penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana	• Kebijakan perencanaan dan pengganggaran belum mengimplementasikan kebutuhan sumberdaya untuk penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana • Rendahnya kapasitas sumber daya manusia untuk teknis perencanaan penanggulangan bencana	• Nilai indeks kapasitas daerah meningkat dari 0,59 tahun 2019 menjadi 0,72 pada tahun 2022 • Terbentuknya 242 Desa Tangguh Bencana (Destana) dari target 242 Destana pada tahun 2024 • Tersedianya aplikasi SiAGA (Sistem Informasi Aman Gangguan Bencana) dan website SINCAN (Sistem Informasi Kebencanaan) dan Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) di sekolah	• Optimalisasi Desa Tangguh Bencana (Destana) untuk mendukung peningkatan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana berbasis masyarakat • Penguatan peran Forum Pengurangan Risiko Bencana tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk membangun kapasitas lokal dalam pengurangan risiko bencana • Pengurangan risiko bencana dengan memperbaiki kondisi dan fungsi lingkungan untuk mengurangi dampak bencana alam pada masyarakat

2.2.1.2 Permasalahan Layanan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Menurunkan tingkat pengangguran menjadi fokus utama untuk meningkatkan produktivitas daerah dan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah urusan tenaga kerja dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 144 Permasalahan pembangunan pada urusan Tenaga Kerja

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa

1	Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) yang rendah belum mampu meningkatkan produktivitas daerah	• Kualitas dan produktivitas tenaga kerja masih belum optimal karena tingkat pendidikan yang masih rendah dan sertifikasi keahlian yang belum memadai	• Tingkat Penganguran Terbuka (TPT) 2020-2024 sangat fluktuatif • Tahun 2020-2024, TPT Provinsi NTB menurun signifikan, dari 4,22% menjadi 2,73% • Pada tahun 2024, distribusi penduduk bekerja masih didominasi oleh mereka yang berpendidikan SD kebawah yaitu sebanyak 41,49 persen. Sementara tenaga kerja yang berpendidikan tinggi yaitu Diploma sebanyak 2,16 persen dan Universitas sebesar 11,27 persen.	• Perluasan kesempatan kerja dan penciptaan peluang berusaha pada berbagai sektor ekonomi/lapangan usaha perlu dioptimalkan • Tingkat pendidikan harus ditingkatkan agar distribusi penduduk bekerja didominasi oleh tamatan SMA/SMK ke atas • Sertifikasi keahlian akan meningkatkan produktivitas tenaga kerja dengan menanamkan budaya kerja dan jam kerja yang lebih berkualitas
2	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) belum optimal meningkatkan kesejahteraan ekonomi	• Rendahnya kualitas dan tingkat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan di daerah • Infrastruktur yang belum memadai di daerah yang menghambat aksesibilitas ke tempat kerja dan peluang kerja • Rendahnya upah daan perlindungan sosial ketenagakerjaan yang masih terbatas • Kurangnya lapangan kerja yang tersedia karena rendahnya investasi di daerah	• Jumlah penduduk usia kerja di Provinsi NTB mengalami trend yang cenderung meningkat seiring bertambahnya jumlah penduduk. • Penduduk usia kerja pada Agustus 2024 sebanyak 4,1 juta orang, naik sebanyak 74,18 ribu orang dibanding Agustus 2023	• Meningkatnya jumlah penduduk usia kerja perlu diimbangi dengan meningkatkan kualitas keahlian dan tingkat pendidikan yang dimiliki untuk meningkatkan pendapatan per kapita • Pemerintah Provinsi NTB perlu berupaya untuk mendorong kebijakan peningkatan kualitas dan tingkat pendidikan dan pelatihan ketenagakerjaan untuk sektor/lapangan usaha yang memiliki share kontribusi tinggi pada PDRB • Peningkatan investasi di daerah diharapkan dapat mendorong peningkatan lapangan kerja dan peluang kerja dengan tingkat pendapatan yang tinggi untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat
3	Rendahnya tingkat kesejahteraan penduduk yang bekerja di sektor pertanian	• Pendapatan penduduk dari sektor pertanian kecil • Rendahnya kepemilikan lahan • Sarana prasarana pendukung pertanian terbatas • Ketergantungan pada pupuk subsidi	• Menurut sektor ekonomi/lapangan usaha, penduduk Usia 15 Tahun Keatas yang Bekerja pada lapangan usaha pertanian di provinsi NTB masih cukup tinggi yang mencapai lebih dari 30 persen • NTP (Perkebunan) masih rendah <100 • Tenaga kerja yang bekerja pada sektor yang masih rendah yaitu Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	• Kontribusi sektor pertanian pada PDRB NTB tingggi, tapi tingkat kesejahteraan masyarakat petani masih rendah • Peningkatan kesejahteraan petani dapat terwujud melalui penyediaan sumber produksi yang berkualitas dan terjangkau, dan subsidi pemerintah, serta penyediaan lapangan kerja pendukung di luar sektor pertanian sebagai tambahan pendapatan untuk petani yang menjadi buruh tani

			Limbah, dan Daur Ulang • Kondisi bencana alam seperti banjir dan kekeringan	

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 145 Permasalahan pembangunan pada Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Belum optimalnya kesetaraan gender dalam pembangunan daerah	• Partisipasi perempuan dalam pembangunan masih rendah • Rata-rata usia kawin pertama perempuan tinggi • Akses untuk meningkatkan keterlibatan perempuan di parlemen masih terbatas • Perempuan sebagai tenaga professional dan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga belum optimal	• Selama tahun 2020-2024, nilai Indeks Pembangunan Gender (IPG) NTB berada di bawah nasional, untuk NTB sebesar 91,54 pada tahun 2024, lebih rendah dari IPG nasional sebesar 91,85 • Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) di Provinsi NTB tahun 2020-2024, masih berada di bawah IDG nasional, untuk NTB sebesar 64,44 pada tahun 2024, lebih rendah dari IDG nasional sebesar 71,58	• Nilai IPG di bawah 100 menunjukan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. • Program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak perlu menjadi prioritas di Provinsi NTB • IDG dapat ditingkatkan dengan memberikan akses untuk mendorong keterlibatan perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga professional dan sumbangan pendapatan perempuan dalam keluarga • IDG dapat menunjukkan keterlibatan dan peran aktif perempuan dalam politik dan ekonomi
2	Perlindungan anak masih lemah	• Cakupan Kabupaten/Kota Layak Anak juga belum optimal karena kebijakan KLA belum dilaksanakan di Kabupaten/Kota • Kasus kekerasan pada anak masih tinggi •	• Tahun 2024, jumlah kasus kekerasan anak mencapai 549 kasus dengan jumlah kasus terbesar terjadi di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah 189 kasus • Tahun 2024, jumlah kasus kekerasan terhadap Perempuan mencapai 312 kasus dengan jumlah kasus terbesar terjadi di Kabupaten Lombok Timur dengan jumlah 88 kasus.	• Kasus kekerasan terhadap anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penelantaran dan kasus kekerasan lainnya. Dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak tersebut, angka tertinggi pada bentuk kekerasan yang dialami anak-anak yaitu kekerasan seksual • Perlu mengoptimalkan peran tokoh agama dan tokoh masyarakat membangun kesadaran kolektif untuk memberikan perlindungan pada anak dan memenuhi hak anak sebagai generasi penerus bangsa • Mengembangkan layanan perlindungan anak dan

				membangun sistem data dan informasi yang akurat dan aktual untuk ketepatan sasaran bantuan perlindungan anak

3. Pangan

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang Pangan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 146 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang Pangan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Belum optimalnya produksi pangan, distribusi, infrastruktur, akses dan pemanfaatan pangan	• Keterbatasan sumber daya dan teknologi pangan untuk mendukung optimalisasi produksi pangan • Tingkat distribusi pangan yang belum optimal karena keterbatasan akses dan infrastruktur • Keamanan pangan masih belum terjaga • Inflasi gejolak pangan karena kenaikan harga (demand dan suppy tidak seimbang)	• Kualitas konsumsi pangan penduduk NTB sejak tahun 2019 sampai tahun 2024 menunjukkan kualitas yang terus membaik atau mengarah ke konsumsi yang beragam dengan skor Pola Pangan Harapan (PPH) mendekati 100 • Konsumsi beras tahun 2024 ini juga mengalami penurunan sebesar 0,05 Kg/Kap/Tahun (0,04%) dibandingkan dengan konsumsi beras tahun 2023 sebesar 119,4 Kg/Kap/Tahun	• Ketersediaan pangan perlu memperhatikan peningkatan produksi dan produktivitas pangan, dan menjamin cadangan pangan tersedia pada level Pemerintah Provinsi NTB, Kabupaten/Kota dan masyarakat • Ketersediaan pangan terkait dengan dengan strategi kesiapsiagaan bencana • Penguatan kelembagaan Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKPD) yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubenur NTB Nomor 321/2019

4. Lingkungan Hidup

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang lingkungan hidup dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 147 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang lingkungan hidup

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa

1	Belum terwujudnya pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dalam perencanaan pembangunan daerah	• Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan pelestarian keanekaragaman hayati • Keterbatasan sumber daya dan teknologi untuk mendukung perlindungn terhadap kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup • Belum efektifnya upaya pengelolaan sampah dan limbah B3 • Degradasi lingkungan karena pencemaran	• Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi NTB meningkat dari tahun 2020-2024, dari 68,58 pada tahun 2020 menjadi 73,18 pada tahun 2024 • Indeks kualitas air terendah dan menurun dari tahun sebelumnya yaitu 47,78 pada tahun 2023 menjadi 47,00 pada tahun 2024 • Indeks kualitas udara meningkat dari 88,63 pada tahun 2020 menjadi 93,13 pada tahun 2024 • Indeks kualitas tutupan lahan mengalami penurunan yaitu sebesar 66,74 pada tahun 2020 menjadi 65,61 pada tahun 2022, pada tahun 2023 meningkat 66,60 dan mengalami penurunan sebesar 66,49 pada tahun 2024. • Indeks kualitas air laut meningkat dari 67, 49 tahun 2020 menjadi 85,83 pada tahun 2024 • Realisasi penanganan sampah meningkat dari 37,63% pada tahun 2020 menjadi 53,20% pada tahun 2024, • Realisasi pengurangan sampah meningkat dari 6,79% pada tahun 2019 menjadi 9,34% pada tahun 2021	• Pengarusutamaan pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim dalam kebijakan perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk membangun komitmen dan upaya terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan dan berperspektif perubahan iklim di NTB • Penguatan regulasi dan kelembagaan diperlukan untuk mendukung target NTB Net Zero Emission 2050 melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim di Provinsi NTB • Indeks kualitas air yang rendah menjadi perhatian penting untuk menjaga ketersediaan dan kualitas air yang menjadi pemenuhan kebutuhan masyarakat • Pengelolaan dan peengurangan sampah diharapkan mendukung ekonomi sirkular yang memberi nilai tambah untuk kesejahteraan masyarakat

5. Pertanahan

Kinerja Pemerintah Provinsi NTB untuk urusan pertanahan dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi NTB bekerjasama dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi NTB. Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang pertanahan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 148 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pertanahan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Konflik pertanahan yang berlangsung	• Tanah terindikasi terlantar sesuai Hak Guna Usaha (HGU) mencapai 166.027.457 Ha • Ketidakjelasan mekanisme komunikasi terkait pemanfaatan tanah oleh para pihak terkait • Proses penegakan hukum belum optimal karena keterbatasan sumber daya	▪ Penanganan konflik pertanahan pada Kawasan KEK Mandalika, tanah HGU Gili Terawandan, tanah HGU oleh berbagai perusahaan di Provinsi NTB ▪ Penguatan kelembagaan Satgas KEK Mandalika, Gugus Tugas	▪ Konflik pertanahan berlangsung lama dan proses penyelesaiannya membutuhkan banyak sumber daya ▪ Diperlukan mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan terhadap pemanfaatan tanah terlantar

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
			Reform Agraria NTB untuk menangani konflik pertanahan di daerah	▪ Upaya musyawarah dan mufakat untuk mencapai solusi yang menguntungkan semua pihak dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 149 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Belum optimalnya administrasi kependudukan dan pencatatan sipil	▪ Keterbatasan kualitas SDM untuk memberikan pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat	▪ Perekaman e-KTP telah mencapai 99,35% atau 3.977.230 orang ▪ Masih terdapat 15.633 penduduk yang belum melakukan perekaman e-KTP ▪ Kinerja daerah untuk proses pengolahan, analisis dan kajian data kependudukan telah dilaksanakan terpusat pada Sistem Informasi Administrasi Kependudukan oleh Direktorat Jenderal Dukcapil	▪ Dokumen kependudukan menjadi syarat utama untuk memperoleh fasilitas layanan publik dan bantuan sosial kemasyarakatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat ▪ Updating data dan informasi untuk administrasi kependudukan dan pencatatan sipil memerlukan kolaborasi dengan Pemerintah Desa dengan mengoptimalkan Sistem Informasi Desa (SID) yang dapat diakses untuk mengetahui perkembangan kondisi kependudukan di level desa dan kelurahan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 150 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pemberdayaan masyarakat desa

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa

1	Program pemberdayaan masyarakat belum optimal membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa	▪ Potensi alam di desa belum dapat dioptimalkan karena keterbatasan kemampuan SDM, teknologi, dan inovasi ▪ Tingkat kemajuan dan kemandirian desa masih belum tercapai ▪ Peran Lembaga Adat dan Pos Pelayanan Teknologi Tepat Guna (Posyantek) belum optimal ▪ Program pemberdayaan masyarakat tidak dilakukan pendampingan dari tahap inisiasi awal sampai dengan kemantapan/ kesiapan masyarakat untuk mandiri	▪ Status Desa Maju pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 47 Desa (berkurang sebesar 5%) bila di bandingkan dengan jumlah Desa Maju pada Tahun 2023 sebanyak 480 Desa dan pada Tahun 2024 sebanyak 433 Desa ▪ Status Desa Berkembang pada Tahun 2024 mengalami penurunan sebanyak 78 Desa bila di bandingkan dengan jumlah Desa berkembang pada Tahun 2023 sebanyak 282 Desa dan pada Tahun 2024 sebanyak 204 Desa ▪ Posyantek yang terbentuk selama tahun 2024 adalah 77 unit Posyantek ▪ Bumdes aktif berjumlah 1.005 untuk mengoptimalkan pemanfaatan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat desa	▪ Penguatan kelembagaan Bumdes menjadi kunci sukses untuk keberhasilan program pemberdayaan masyarakat dan desa ▪ Hal ini akan optimal membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ▪ Kemiskinan di desa pesisir dan lingkar hutan membutuhkan kolaborasi multi-pihak untuk mengoptimalkan potensi desa pesisir dan lingkar hutan yang mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal dan bernilai tinggi untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 151 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pengendalian penduduk dan keluarga

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Pengendalian pertumbuhan penduduk yang masih lemah	▪ Tingginya angka perkawinan dini/anak di Provinsi NTB ▪ Sosialisasi program keluarga berencana masih belum optimal	▪ Laju pertumbuhan penduduk mencapai 1,60% pada tahun 2024 ▪ tahun 2024 Rata-rata usia kawin pertama perempuan adalah 20,39 tahun meningkat dibanding tahun 2023 yaitu 20,25.	▪ Optimalisasi program keluarga berencana dan menekan rata-rata usia kawin pertama perempuan diharapkan dapat membantu pengendalian penduduk ▪ Membangun kesadaran bersama untuk menurunkan laju pertumbuhan penduduk, karena pertambahan jumlah penduduk akan berdampak pada penyediaan sarana prasarana layanan dasar, kebutuhan pangan, sandang, papan, dan esensial lainnya

9. Perhubungan

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang perhubungan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 152 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang perhubungan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa

1	Tingginya angka kecelakaan lalu lintas dan jumlah kematian	▪ Meningkatnya jumlah kendaraan bermotor dan penggunaan kendaraan pribadi yang belum memperhatikan kaidah keselamatan dan keamanan dalam mengemudi kendaraaan ▪ Fasilitas keamanan dan keselamatan jalan berupa rambu, marka, lampu jalan, guardrail, dan lainnya terbatas	▪ Peningkatan jumlah kecelakaan lalu lintas dari 1.775 tahun 2022 menjadi 1.939 tahun 2023 ▪ Jumlah korban jiwa mencapai 394 orang pada tahun 2024	▪ Mengoptimalkan penegakan hukum untuk perilaku pengemudi yang tidak memperhatikan regulasi keamanan dan keselamatan di jalan
2	Keterbatasan konektivitas dan aksesibilitas menuju destinasi wisata dan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan dan sektor ekonomi produktif lainnya	▪ Keterbatasan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi darat, laut, dan udara ▪ Subsidi untuk angkutan umum sebagai bentuk layanan publik belum tersedia secara berkelanjutan	▪ Rute angkutan yang dilayani dengan moda transportasi secara memasai yaitu 9 rute perintis yang dilayani oleh Bus Damri dan 2 rute multimoda untuk Bil-Mataram-Sengigigi dan BIL-Pancor	▪ Perlu mengembangan sarana dan prasarana konektivitas dan aksesibilitas menuju destinasi wisata dan fasilitas layanan kesehatan dan pendidikan dan sektor ekonomi produktif lainnya ▪ Alat angkut yang dipergunakan perlu memperhatikan jenis bahan bakar yang diperlukan guna mendukung komitmen NTB Net Zero Emission 2050 dari sisi penggunaan bahan bakar

10. Komunikasi dan Informatika

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang komunikasi dan informatika dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 153 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang Komunikasi dan Informatika

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk peningkatan kinerja birokrasi	▪ Keterbatasan sumber daya untuk meningkatkan penerapan berbagi pakai data di Perangkat Daerah ▪ Terbatasnya infrastruktur akses internet dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD) yang menghubungkan antar Perangkat Daerah ▪ Belum semua perangkat daerah terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) ▪ Kabupaten/Kota belum terhubung dengan JIPD Provinsi	▪ Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang mampu meningkatkan penilaian Indeks Reformasi Birokrasi dan Innovatif Government Award (IGA) pada tahun 2021 dan 2022 ▪ Nilai indeks SPBE mencapai 3,56 poin pada tahun 2024 dengan kategori **sangat baik** ▪ Pergub Telah mengintegrasikan 3 aplikasi antara lain E-Sensi dan E-Sipja, NTB Satu Data dan Satu Data Indonesia, NTB Satu Data dan Corona NTB ▪ persentase penduduk berumur 5 (lima) tahun yang menggunakan internet di Provinsi NTB	▪ Secara umum, prestasi implementasi SPBE di Provinsi NTB mencapai 8 besar nasional dengan nilai 3,24 (baik), namun komponen audit infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan manajemen SPBE perlu dioptimalkan ▪ Peningkatan 3 komponen ini berpeluang untuk meningkatkan indeks SPBE Provinsi NTB yang akan berdampak pada peningkatan nilai Indeks Reformasi Birokrasi dan kualitas layanan publik berbasis digital

			sebesar 63,20 % menempati peringkat ke-25 pada tahun 2023	

11. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan rendahnya produktivitas koperasi dan UMKM adalah rendahnya kualitas SDM dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi dan pemasaran, serta rendagnya kompetensi kewirausahaan UMKM. Hal lain yang berpengaruh adalah keterbatasan akses ke sumber dan dan iklim usaha yang kurang kondusif. Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 154 Permasalahan pembangunan pada Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Masih rendahnya manfaat koperasi yang terbentuk untuk meningkatkan kesejahteraan anggota	▪ Keterbatasan sumberdaya pengelola koperasi ▪ Kegiatan ekonomi koperasi belum mengoptimalkan teknologi digital ▪ Kinerja pengelolaan koperasi tergantung gaya kepemimpinan yang kurang inovatif	▪ Terbentuk 4.835 koperasi kumulatif pada tahun 2024, dengan jumlah koperasi aktif hanya mencapai 53,60% (2.592) dan koperasi tidak aktif masih mencapi 46,40% (2.243)	▪ Pengembangan sumber daya manusia untuk mengoptimalkan koperassi aktif dan mengaktifkan koperasi yang masih belum aktif untuk lebih produktif ▪ Koperasi yang belum aktif terkendala kemampuan terbatas dalam menguasai teknologi, informasi dan komunikasi untuk mendorong daya saing dan produktivitas koperasi ▪ Kesejahteraan anggota koperasi dapat diwujudkan dengan menggerakkan koperasi sebagai platform ekonomi produktif di daerah ▪ Hasil analisis menggambarkan pentingnya perluasan akses permodalan, optimalisasi teknologi informasi dan pasar, kredit modal kerja dan kredit investasi untuk aspek keberlanjutan usaha didukung pengembangan iklim usaha yang kondusif di daerah
2	Masih terbatas jumlah usaha kecil menjadi usaha menengah	▪ Kemampuan sumberdaya dan teknologi terbatas ▪ Jaringan pemasaran produk terbatas karena kualitas produksi dan manajemen produksi belum memadai	▪ Jumlah UMKM skala usaha mikro mencapai 107.439, skala kecil 15.108, dan skala menengah 1.240	▪ Pengembangan sumber daya manusia untuk melalui pendidikan dan pelatihan keterampilan teknis ▪ Penguatan modal dan akses modal ke lembaga keuangan dan pemberian bantuan permodalan dalam bentuk hibah atau pembiayaan ▪ Meningkatkan kualitas produk, promosi, pemasaran dan kemitraan ▪ Optimalisasi teknologi, informasi dan komunikasi untuk mendorong daya saing daerah

12. Penanaman Modal

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang penanaman modal dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 155 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang penanaman modal

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Keterbatasan manfaat dari nilai realisasi investasi untuk peningkatan pendapatan masyarakat	▪ Tingkat pendidikan, keterampilan, keahlian, sertifikasi kerja yang masih belum memadai pada level masyarakat/angkatan kerja ▪ Investasi pada sektor ketenagalistrikan, pertambangan, energi, pariwisata dan ekonomi kreatif belum optimal dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat ▪ Belum meratanya investasi berdasarkan daerah dan jenis sektor ▪ Investor masih mengalami permasalahan investasi di daerah	▪ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi sumber investasi di daerah ▪ Nilai realisasi investasi dari PMDN (80,22%) selalu lebih besar dari PMA (19,78%) di Provinsi NTB pada tahun 2024 ▪ Realisasi PMDN terbesar di Kabupaten Sumbawa Barat sebesar 89,09% tahun 2024 yang berdampak pada tingginya pendapatan per kapita di Kabupaten Sumbawa Barat dibanding daerah lain di NTB	▪ Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) menjadi pengggerak aktifitas ekonomi di daerah, membuka peluang kerja dan mendorong peningkatan keahlian tenaga kerja ▪ Optimalisasi sistem digital pada proses perijinan melalui OSS (Online Single Submission) diharapkan dapat dikembangkan untuk mengoptimalkan proses investasi di daerah ▪ Risiko berusaha dapat dikelola dengan baik untuk memastikan keamanan investasi dan kenyamanan bagi para pihak

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang kepemudaan dan olah raga dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 156 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kepemudaan dan olah raga

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Pembinaan pemuda dan atlit berprestasi masih belum optimal	▪ Keterbatasan sumberdaya dan tenaga pelatih profesional untuk cabang olahraga berprestasi ▪ Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang digunakan untuk program pelatihan atlit berprestasi ▪ Budaya disiplin berlatih dan motivasi pemuda dan atlit berprestasi yang perlu didorong untuk lebih inovatif dan kreatif	▪ Tahun 2024, 82 medali atlit berprestasi dari NTB untuk tingkat nasional dan internasional ▪ 15 pemuda berprestasi di tingkat nasional dan internasional	▪ Gemar Olahraga pada tingkatan anak remaja dan pemuda perlu menjadi bagian gaya hidup untuk mewujudkan masyarakat NTB yang sehat dan kuat ▪ Pembinaan bibit atlit berbakat untuk mencetak atlit berprestasi dilakukan dengan disiplin latihan, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, nyaman, aman, dan tenaga pelatih profesional yang siap membantu daerah

2	Wirausaha muda belum optimal mengembangkan potensi usaha ekonomi dan kreatifitasnya	▪ Keterbatasan akses modal, jejaring bisnis, pengetahuan, motivasi, kemauan mencoba dan membangun jiwa enterpreneurship untuk mewujudkan wirausaha baru	▪ Realisasi wirasusaha pemuda baru mencapai 68,56% pada tahun 2023	▪ Wirausaha pemuda memiliki potensi yang besar untuk mengembangkan usaha, khususnya di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ▪ Perlu dilakukan pendidikan dan keahlian keterampilan yang mendukung penciptaan peluang kerja dan strategi bisnis yang tepat ▪ Potensi pasar yaang besar perlu dikaji untuk menciptakan nilai tambah yang dapat merespon kebutuhan permintaan konsumen

14. Statistika

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang statistika dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 157 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang statistika

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Belum optimalnya implementasi NTB Satu Data untuk membangun sinergi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah	▪ Portal NTB Satu Data belum terintegrasi dengan portal data Kabupaten/Kota ▪ Kode referensi dan metadata untuk setiap jenis data yang tersedia belum dilaksanakan dengan baik ▪ Rekomendasi statistik dari Kepala OPD belum menggunakan rekomendasi BPS sebagai Pembina Data Statistik Sektoral	▪ Peraturan Gubernur NTB Nomor 45 Tahun 2021 tentang Nusa Tenggara Barat Satu Data ▪ Portal Satu Data NTB telah mempublikasikan data sektoral 94,06% sudah terpublikasi pada (https://data.ntbprov.go.id/), dan 5,94 % data belum dipublikasikan karena masih dalam proses verifikasi oleh walidata (Dinas Kominfotik Provinsi NTB)	▪ Hasil analissis menggambarkan peran Forum NTB Satu Data belum optimal unutk membangun sinergi NTB Satu Data di tingkat provinsi dan kabupaten/kota ▪ Perangkat Daerah telah memiliki data yang berkualitas, namun data prioritas yang berkualitas masih perlu dilakukan penyusunan standar data dan metadata ▪ Jenis data baru berdasarkan perkembangan kebutuhan pengguna data dan dokumen perencanaan pembangunan belum dilakukan penyesuaian ▪ Data pokok perencanaan pembangunan dalam bentuk time series untuk tren jangka panjang belum memadai untuk analisis perencanaan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
				pembangunan daerah

15. Persandian

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang persandian dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 158 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kebudayaan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Indeks kematangan keamanan informasi masih pada level II	▪ Keterbatasan SDM keahlian keilmuan di bidang persandian dan keamanan informasi ▪ Keterbatasan sarana dan prasarana di bidang persandian ▪ Email Sanapati belum diterapkan maksimal pada instalasi email di seluruh OPD karena BSSN masih melakukan pengembangan server yang terbatas	▪ Membentuk Tim NTBProv-CSIRT untuk mengidentifikasi dan merespon seluruh insiden dan serangan siber dalam sistem aplikasi dan jaringan komputer pemerintahan di Provinsi NTB. ▪ CSIRT juga mendukung Pemerintah NTB mengelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) unutk tata kelola pemerintah yang bersih, transparan, efektif dan akuntabel ▪ Layanan email Srikandi	▪ Pengembangan SDM dengan keahlian keilmuan bidang persandian dan keamanan informasi diperlukan untuk menghadapi tantangan dan isu strategis transformasi digital di era global saat ini ▪ Kinerja kebijakan tata kelola keamanan informasi dan jaring komunikasi sandi pemerintah daerah provinsi perlu dioptimalkan operasional kebijakan terkait manajemen risiko yang berguna sebagai dasar pelaksanaan keamanan siber

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
			dipergunakan sebagai alternatif jaring komunikasi sandi intra pemerintah	

16. Kebudayaan

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang kebudayaan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 159 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kebudayaan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Tantangan dunia global pada nilai budaya daerah	▪ Keterbatasan sumberdaya untuk kegiatan pelestarian nilai budaya ▪ Perubahan kebiasaan, pola hidup, pemikiran dan karakter masyarakat ▪ Pergeseran nilai budaya lokal karena pemahaman nilai budaya berkurang	▪ Berkurangnya kunjungan masyarakat dan wisatawan ke Museum Negeri NT selama kurun waktu 3 tahun terakhir, terutama dampak pandemi Covid-19 pembatasan pergerakan masyarakat dan menghindari kerumunan ▪ Membangun Sistem Pendataan Kebudayaan Terpadu sesuai 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) di tingkat Provinsi NTB	▪ Nilai budaya daerah yang tercatat pada Museum NTB dapat dibuat dalam versi digital dan bisa diakses oleh masyarakat ▪ Setelah pandemi Covid-19 berakhir, Museum Negeri dan Taman Budaya NTB dapat melaksanakan event inovatif dan kreatif untuk mendorong minat belajar sejarah budaya daerah dan mendorong kreatifitas generasi muda NTB ▪ Sarana prasarana, pengembangan SDM pengelola Museum Negeri dan Taman Budaya, sistem digital menjadi strategi untuk meningkatkan minat dan motivasi masyarakat dan wisatawan berkunjung ke Museum dan Taman Budaya

17. Perpustakaan

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang perpustakaan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 160 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang perpustakaan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Belum optimalnya pembangunan literasi masyarakat dan gemar membaca	▪ Budaya gemar membaca mulai berkurang karena budaya tutur menjadi dominan dalam kehidupan keseharian masyarakat ▪ Angka kunjungan ke perpustakaan menurun akibat dampak pandemi Covid-19	▪ Tahun 2024 nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Provinsi NTB berada dibawah Nasional yaitu 60,42 point, menurun disbanding tahun 2023 sebesar 66,32 point. ▪ Jumlah pengunjung perpustakaan di NTB meningkat dari 577,593 orang menjadi 705.238 orang, dengan total anggota perpustakaan sebanyak 8.032 orang, didominasi oleh kelompok mahasiswa sebanyak 6.807 orang, dan jumlah koleksi buku mencapai 103.658 judul dengan total eksemplar 331.800	▪ Hasil analisis menunjukkan budaya gemar membaca perlu dimulai dari lingkungan keluarga sehingga anak dan remaja gemar membaca dan termotivasi untuk belajar, meneliti, dan menganalisis, berinovasi dan kreatif dalam menemukan solusi permasalahan ▪ Optimalisasi pelayanan perpustakaan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat dengan meningkatkan kualitas SDM Pengelola perpustakaan ▪ Sistem digital dalam layanan perpustakaan NTB untuk meningkatkan minat baca, mendukung capaian rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah ▪ Membangun kolaborasi dengan satuan pendidikan dan lembaga pendidikan dalam mendorong minat baca dan implementasi pengetahuan

18. Kearsipan

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang kearsipan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 161 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kearsipan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Masih belum optimalnya penataan	▪ Keterbatasan sumberdaya tata	▪ Perangkat daerah yang mengelola arsip	▪ Akuntabilitas kinerja dapat ditingkatkan dengan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
	kearsipan daerah secara digital	kelola/manajemen arsip di daerah ▪ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja urusan kearsipan	secara tertib telah mencapai 37,2% dari target 35% pada tahun 2022 ▪ Proses akuisisi arsip dilaksanakan melalui penilaian, penataan, pembuatan daftar arsip statis	mengoptimalkan kemampuan SDM Arsiparis dalam menyiapkan alat bukti capaian kinerja daerah ▪ Penyelamatan dan pelestarian serta pencari jejak informasi bersejarah menjadi penting untuk pengeahuan generasi mendatang ▪ Pelatihan untuk SDM manejemen kearsipan perlu dilakukan

2.2.1.3 Permasalahan Layanan Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan kelautan dan perikanan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 162 Permasalahan pembangunan pada urusan kelautan dan perikanan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Produksi dan produktivitas perikanan masih belum optimal	▪ Keterbatasan sumber daya nelayan dan petani tambak untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor kelautan dan perikanan ▪ Dampak perubahan iklim dan cuaca pada produksi perikanan tangkap pada nelayan ▪ Tingkat kesejahteraan nelayan yang masih rendah karena keterbatasan pendidikan, pengetahuan, dan teknologi penangkapan ikan	▪ Pada tahun 2022, Nilai Tukar Petani (NTP) Sub-Sektor Perikanan mencapai angka 113,57 ▪ Nilai Tukar Sub-Sektor Perikanan Tangkap sebesr 115,58 point ▪ Nilai Tukar Sub-Sektor Perikanan Budidaya sebesar 106,49 point ▪ Komoditas dengan kontribusi terbesar pada perikanan budidaya adalah rumput laut (74,08), udang (18,61%), dan nila (4,96%)	▪ Penyediaan sumberdaya untuk meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan dapat dioptimalkan dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani tambak dan nelayan ▪ Komoditas yang berkontribusi pada peningkatan nilai ekspor diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan petani tambak ▪ Mengkaji rantai nilai dari proses produksi sampai dengan pemasaran untuk mengoptimalkan kesejahteraan nelayan dan petani tambak
2	Konsumsi ikan masyarakat masih rendah	▪ Pola konsumsi dan kebiasaan masyarakat yang berbeda antara Pulau Lombok (kecenderungan selain ikan) dan Pulau Sumbawa (dominan menu kuliner ikan) ▪ Keterbatasan akses ikan segar untuk wilayah dataran tinggi, pengetahuan dan informasi masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan untuk	▪ Capaian kinerja angka konsumsi ikan sebesar 53,12 kg/kap/tahun ini masih berada dibawah angka konsumsi ikan secara nasional yang mencapai 58,0 kg/kap/tahun	▪ Perhitungan Neraca Bahan Makanan (NBM) untuk dasar untuk angka konsumsi ikan ▪ Budaya Gemar Makan Ikan perlu disosialisasikan dan akses untuk memperoleh ikan segar ke masyarakat dengan harga terjangkau ▪ Fokus pada peningkatan akses distribusi ikan segar, peningkatan pengetahuan dan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		kecerdasan dan perkembangan otak		informasi masyarakat, dan perubahan pola konsumsi dan kebiasaan masyarakat

2. Pariwisata

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang pariwisata dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 163 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pariwisata

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Angka kunjungan wisatawan masih belum optimal	▪ Pengembangan Desa Wisata belum optimal untuk menarik kedatangan wisatawan mancanegara dan domestik ▪ Pelaku ekonomi kreatif belum optimal untuk mendukung pengembangan sektor pariwisata daerah ▪ SDM penunjang layanan pariwisata belum tersertifikasi	▪ Lama menginap berkisar 1,32-1,43 hari (hotel non bintang) dan 1.88-2.31 hari (hotel bintang) dalam 3 tahun terakhir dengan jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1,6 juta pengunjung pada tahun 2022 ▪ Pengembangan Desa Wisata mencapai 91.92%, 76 Desa Wisata Berkembang, 13 Desa Wisata Maju, dan 2 Desa Wisata Mandiri	▪ Pengembangan daya tarik destinasi pariwisata perlu didukung oleh sarana prasarana, infrastruktur wilayah, akomodasi, pelayanan dasar untuk mendukung sektor pariwisata ▪ Pengembangan desa wisata berkelas internasional perlu dilakukan dengan tata kelola dan standarisasi manajemen desa wisata yang mengakomodir kebutuhan target wisatawan mancanegara ▪ Pengembangan ekonomi kreatif yang memberikan nilai tambah dan mendukung peningkatan pendapatan per kapita masyarakat dan pelaku usaha UMKM di Provinsi NTB

3. Pertanian

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang pertanian dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 164 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pertanian

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Produksi dan produktivitas sektor pertanian belum optimal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat	▪ Tingginya alih fungsi lahan dari pertanian ke non-pertanian menyebabkan berkurangnya lahan produktif untuk meningkatkan produksi pertanian ▪ Kelangkaan pupuk dan subsidi	▪ Optimalisasi lahan pertanian dengan ketersediaan embung, dan pengembangan jaringan irigasi ▪ Alokasi dan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di	▪ Laju pertumbuhan jumlah penduduk menyebabkan kebutuhan lahan untuk perumahan dan permukiman meningkat seirinng dengan peningkatan kebutuhan layanan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		▪ Keterbatasn sarana dan prasarana produksi pertanian, alat dan mesin, benih bermutu dan varietas ungguk, pemupukan berimbang ▪ Penggunaan pupuk organik masih terkendala proses sertifikasi ▪ Dampak perubahan iklim pada sektor pertanian ▪ Kelembagaan kelompok tani dan pembiayaan yang masih lemah ▪ Pembangunan embung dan pengembangan jaringan irigasi belum optimal	Provinsi NTB untuk 3 komoditas tanaman pangan, yaitu padi (3.932,85 Ha tahun 2019 menjadi 2.037,29 Ha), jagung (95,63 Ha tahun 2019 menjadi 270,70 Ha), dan kedelai (3.403,41 Ha tahun 2019 menjadi 50,70 Ha tahun 2022) ▪ Bulan Desember 2022 Nilai Tukar Petani gabungan tercatat sebesar 107,98 persen mengalami kenaikan sebesar 2,26 persen dibandingkan NTP pada bulan November 2022 sebesar 105,59 persen	dasar infrastruktur lainnya ▪ Alih fungsi lahan yang terjadi dapat ditekan dengan mengurangi pelebaran wilayah kota atau urban sprawl ke wilayah perdesaan untuk melindungi lahan sawah produktif sebagai sumber ketahanan pangan masyarakat ▪ Penguatan kelembagaan dan organisasi petani perlu ditingkatkan untuk meningkatkan daya saing dan posisi tawar petani, termasuk kelompok tani perempuan ▪ Optimalisasi sistem budidaya komoditi perkebunan di bagian dulu dengan dengan pengembangan teknologi intensifikassi, rehabilitasi, diversifikasi, dan perluasan areal dan peremajaan tanaman tahunan yang mulai menurun

4. Kehutanan

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang kehutanan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 165 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kehutanan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Produksi dan produktivitas hasil hutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan hutan	▪ Kualitas dan kuantitas Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) masih belum optimal ▪ Nilai tambah produk HHBK belum memadai ▪ Hasil pemasaran produk HHBK masih terbatas ▪ Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan belum menghasilkan usaha ekonomi produktif untuk kesejahteraan masyarakat	▪ Total areal Perhutanan Sosial yang sudah berjalan s/d 2022 adalah 82.765,79 Ha. Perhutanan Sosial dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kelestarian hutan dan menyelesaikan masalah tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang ada di dalam atau sekitar hutan.	▪ Optimalisasi upaya kelestarian kawasan hutan melalui mekanisme monitoring, ijin penggunaan kawasan hutan, penyelesaian permasalahan tenurial, dan verifikasi lahan yang berbatasan dengan kawasan hutan
2	Belum optimalnya rehabilitasi hutan dan lahan	▪ Illgal logging dan pengalihan fungsi lahan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan ▪ Keterbatasan sumber daya untuk rehabilitasi hutan dan lahan ▪ Aspek penegakan hukum pada kasus tindak pidana kehutanan ▪ Kebakaran hutan dan lahan pada 44 titik yang tersebar pada 15 KPH dan Tahura dengan luasan 395,45 Ha	▪ Pada tahun 2022, dilaksanakan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) melalui penanaman di dalam dan luar kawasan hutan seluas 14.550,19 ha melalui dana APBN dan APBD, serta pihak lainnya ▪ Penguatan Satgas Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Provinsi NTB	▪ Peningkatan kemampuan dan kesadaran masyarakat untuk mendukung program rehabilitasi hutan dan lahan ▪ Perencanaan bangunan Konservasi Tanah dan Air (KTA) untuk mempertahankan tanah dan air di sekitar daerah tangkapan air melalui pengendalian erosi, sedimentasi dan banjir ▪ Penguatan peran KPD, Masyarakat Mitra Polhut (MMP), dan Masyarakat Peduli Api (MPA) berkolaborasi untuk mengurangi luas areal hutan dan lahan yang terbakar

5. Enegi dan Sumber Daya Mineral

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang energi dan sumber daya mineral dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 166 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang energi dan sumber daya mineral

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Akses listrik untuk masyarakat miskin,	▪ Belum dilakukan rekonsiliasi data secara	▪ Rasio elektrifikasi sudah mencapai	▪ Pembentukan forum khusus untuk

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
	daerah terpencil dan perbatasan	intensif untuk rasio elektrifikasi dengan para pihak yaitu PLN, BPS, Pemerintah Provinsi (Dinas ESDM, Dinas Pemdes Dukcapil, Bappeda, Dinas Sosial)	99,98% pada tahun 2022, namun belum menggambarkan kondisi aktual di lapangan	membahas rasio elektrifikasi yang aktual berdasarkan sumber data yang tersedia ▪ Penyediaan listrik untuk masyarakat miskin, daaerah terpencil, dan perbatasan dengan mengoptimalkan potensi energi baru terbarukan
2	Pengelolaan energi baru terbarukan belum optimal	▪ Keterbatasan ketersediaan data dan infornasi pengelolaan energi baru terbarukan sehingga perhitungan bauran energi nasih sangat terbatas	▪ Pemerintah Provinsi telah menetapkan Rencana Umum Energi Daerah (RUED) pada tahun 2025 dimana target EBT dalam bauran energi sebesar 22,86%. ▪ Pada semester I Tahun 2022 diperoleh capaian prosentase EBT dalam bauran energi sebesar 19,16% dari target Tahun 2022 sebesar 17,43%. ▪ Target Provinsi NTB untuk dapat mencapai Net Zero Emision NZE pada tahun 2050 diperlukan usaha dan kerja keras	▪ Diperlukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mendorong peningkatan pemanfaatan energi baru terbarukan tidak hanya terbatas pada institusi pemerintah namun juga dengan melibatkan peran swasta dan lembaga non pemerintah yang mempunyai ketertarikan dalam pengembangan EBT termasuk dengan memanfaatakan dukungan negara-negara luar

6. Perdagangan

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang perdagangan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 167 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang perdagangan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Komoditi non-tambang belum optimal mendorong nilai ekspor daerah	▪ Nilai tambah dari potensi komoditi non-tambang belum dikembangkan karena keterbatasan sumber daya, SDM IKM ekspor, infrastruktur transportasi dan logistik, dan teknologi ▪ Hasil pertanian dan perkebunan, hasil perikanan dan kelautan, hasil kerajinan dan hasil hutan masih terbatas tujuan ekspor ▪ Kurangnya dukungan permodalan perbankan untuk eksportir potensial ▪ Jejaring kerjasama perdagangan internasional terbatas untuk pasar tujuan ekspor produk lokal	▪ Sejak tahun 2020 hingga 2022 total ekspor provinsi NTB mengalami peningkatan sebesar 154,57% dengan total di tahun 2020 sebesar 379.609,74 ton dan di tahun 2022 sebesar 966.355,16 ton ▪ Komoditi ekspor yang mendominasi perolehan devisa pada tahun 2015-2022 adalah komoditi hasil tambang dengan pangsa ekspor did atas 90% ▪ Negara Tujuan ekspor Daerah NTB yang konsisten selama periode 2018-2022 seperti Jepang, Filipina, Korea Selatan, China, Hongkong dan Australia ▪ Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan berdasarkan lapangan usaha meningkat dari 6,85% pada Q4 tahun 2021 menjadi 7,80 pada Q4 tahun 2022 ▪ Capaian pertumbuhan ekspor non tambang NTB sebesar 75,96%, masih dibawah capaian nasional sebesar 94,57% tahun 2022	▪ Perluasan jejaring pemasaran produk hasil pertanian dan perkebunan, hasil perikanan dan kelautan, hasil kerajinan dan hasil hutan memperhatikan kualitas, kuantitas dan kontinuitasnya ▪ Laju pertumbuhan ekonomi sektor perdagangan meningkat seiring dengan menggeliatnya pariwisata NTB dengan mulai banyaknya kunjungan wisatawan ke NTB baik domestik maupun mancanegara

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
2	Pengendalian inflasi daerah melalui operasi pasar fluktuatif	▪ Keterbatasan sumber daya daerah	▪ Penyaluran bantuan paket sembako bertujuan untuk menjaga kestabilan harga melalui pemberian paket sembako kepada masyarakat miskin yang terdampak kenaikan harga, tahun 2021 sebanyak 12.704 paket telah diberikan kepada masyarakat miskin	▪ Krisis global memberikan dampak pada perekonomian daerah mengakibatkan inflasi yang cukup tinggi pada tahun 2022 yakni 6,30 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional sebesar 5,47 persen ▪ Berdampak pada kemampuan daya beli masyarakat menurun dan tingginya tingkat kemiskinan di NTB (13,82% tahun 2022) ▪ Ketepatan sasaran pemberian bantuan paket sembako menjadi penting untuk membantu masyarakat miskin ▪ Penguatan jaringan distribusi barang kebutuhan pokok, pengendalian harga dan pasokan barang kebutuhan pokok
3	Bela beli produk lokal/NTB Mall belum optimal	▪ Belum optimalnya pemanfaatan e-commerce dalam transaksi bela beli produk lokal	▪ Peraturan Gubernur NTB Nomor 43 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan UMKM melalui Bela dan Beli Produk Lokal ▪ Meningkatnya nilai jual/pemasaran produk unggulan daaerah (UMKM) melalaui aplikasi e-commerce NTBMall.com	▪ Promosi dan pemasaran produk unggulan daerah dapat menggunakan strategi inovatif dengan mengoptimalkan platform media sosial dan pemberian diskon harga untuk meningkatkan penjualan produk ▪ Perluasan jejaring kerjasama dengan lembaga/organisasi/ asosiasi pada sektor pariwisata di provinsi NTB dan mitra pembangunan untuk mendukung NTB Mall

7. Perindustrian

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang perindustrian dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 168 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang perindustrian

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Daya saing industri belum optimal	▪ Laporan data perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri masih belum berkualitas ▪ Masih rendahnya kesadaran pelaku usaha (IKM) tentang	▪ Pertambahan nilai PDRB sektor industri pengolahan baru mencapai Rp. 87,99 Milyar, dari target 173,02 Milyar tahun 2022	▪ Pertumbuhan industri yang berdaya saing didukung dari membangun kesadaran pelaku usaha (IKM) tentang

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		pentingnya HKI, Halal, SNI untuk melindungi kekayaan intelektual, kehalalan, dan standarisasi poduk yang dihasilkan ▪ Fasilitasi pendampingan pendaftaran SNU belum optimal ▪ Nilai tambah produk belum memadai karena keterbatasan teknologi dan sumber daya	▪ Besaran nilai kontribusi lapangan usaha industri pengolahan pada PDRB (Harga Berlaku) menurun dari 4,03% tahun 2020 menjadi 3,76% tahun 2022	pentingnya HKI, Halal, dan SNI ▪ Membangun baseline data perusahaan industri dan perusahaan kawasan industri, melakukan verifikasi dan pengklasifikasian data perusahaan industri dan IKM ▪ Upaya mendorong standarisasi produk dengan sertfikasi produk akan meningkatkan daya saing daerah ▪ Kerjasama penguatan HKI, Halal, dan SNI dengan berbagai kementerian/lembaga dan para pihak terkait untuk meningkatkan daya saing produk unggulan daerah

8. Transmigrasi

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang transmigrasi dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 169 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang transmigrasi

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Pengembangan kawasan transmigrasi yang belum optimal	▪ Keterbatasan sumber daya, sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas pendukung layanan dasar dan usaha ekonomi produktif transmigran ▪ Pemberdayaan transmigran dan peningkatan kapasitas transmigran untuk pengelolaan lahan dan usaha ekonomi produktif belum memadai ▪ Sertifikat Hak Milik (SHM) masih belum terselesaikan dengan baik	▪ Total luasan lahan kawasan transmigrasi, seluas 15.202,5 Ha yang sudah memiliki SHM atau sebesar 86,02 persen sementara 2.190,5 Ha dalam proses penyelesaian. ▪ Setiap setiap transmigran mendapatkan masing-masing 2 Ha atau 1 Ha lahan, terdiri dari 0,25 Ha atau 0,5 Ha lahan pekarangan, 0,5 atau 0,75 Ha /1 Ha lahan Usaha I dan 1 Ha lahan Usaha II ▪ Lokus kawasan transmigrasi prioritas nasional (sebagai daerah asal) yaitu Kawasan	▪ Menjamin ketersediaan Sertifikat Hak Milik (SHM) dapat dilaksanakan dengan berkoordinasi dengan BPN NTB, Dinas Kehutanan NTB untuk penyelesaian SHM di kawasan ▪ Penyediaan sumber daya, sarana prasarana, infrastruktur, dan fasilitas pendukung layanan dasar dan usaha ekonomi produktif transmigran ▪ Mendorong upaya untuk pemberdayaan transmigran dan peningkatan kapasitas transmigran untuk pengelolaan lahan dan usaha ekonomi produktif pada lokus kawasan transmigrasi prioritas

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
			Transmigrasi Tambora (Bima), Kawasan Transmigrasi Labangka (Sumbawa) dan lokus kawasan transmigrasi non prioritas nasional (prioritas bidang) pada Kawasan Transmigrasi Tongo-Sekongkang (KSB) dan Kawasan Transmigrasi Selaparang (Lotim)	nasional dan non prioritas nasional

2.2.1.4 Permasalahan Layanan Urusan Penunjang Unsur Pendukung Pemerintahan

1. Urusan Pemerintahan

Untuk unsur pendukung urusan pemerintahan, Pemerintah Provinsi NTB telah berkomitmen untuk meningkatkan capaian kinerja pelayanan publik, akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang pemerintahan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 170 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pemerintahan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Indeks reformasi birokrasi masih belum optimal	▪ Belum optimalnya tata kelola pemerintahan untuk mengelola kinerja secara efektif, efisien, bersih dari KKN, pelayanan publik yang berkualitas ▪ Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk mendukung tata kelola pemerintahan	▪ Tahun 2023, target dan capaian indeks reformasi birokrasi berada pada tingkat BB	▪ Kinerja tata kelola pemerintahan untuk mendukung capaian skor indeks reformasi birokrasi dengan 132 komponen, perlu memperhatikan manajemen perubahan di lingkungan organisasi, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, pelayanan publik, persepsi korupsi dan mendorong inovasi daerah
2	Nilai SAKIP masih belum optimal	▪ Perencanaan kinerja di internal Provinsi NTB masih belum optimal untuk mengakselerasi pencapaian tujuan pembangunan daerah ▪ Mekanisme pengukuran kinerja juga masih belum mengoptimalkan potensi sumber daya yang ada	▪ Nilai SAKIP mengalami peningkatan mendapat predikat penilaian BB pada tahun 2021, dari peringkat B pada tahun 2020 ▪ Semua komponen mengalami peningkatan dengan nilai hasil evaluasi mencapai 70,59	▪ Analisis per komponen pembentuk nilai SAKIP: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Kinerja, perlu dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekuatan Provinsi NTB dalam meningkatkan nilai SAKIP daerah

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		▪ Proses pelaporan kinerja belum memberikan kontribusi untuk perbaikan pengambilan keputusan untuk kebijakan ▪ Mekanisme evaluasi kinerja masih belum terlaksana dengan baik		

2. Urusan Perencanaan

Secara umum, proses perencanaan dan penganggaran daerah menjadi satu kesatuan yang mendukung pencapaian target indikator kinerja utama dan indikator kinerja daerah. Proses perencanaan dan penganggaran ini memiliki beberapa tantangan yang merupakan suatu peluang untuk perubahan, yang dijabarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 7 Tantangan perencanaan dan penganggaran daerah



Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang perencanaan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 171 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang perencanaan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Kualitas data dan informasi untuk penyusunan dokumen perencanaan masih belum optimal	▪ Data dan informasi belum dilakukan pengelompokan sesuai kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan ▪ Belum terbangunnya sistem data dan informasi spesifik untuk mendukung perencanaan	▪ Pembentukan Peraturan Gubernur NTB Nomor 45 Tahun 2021 tentang Pembentukan Forum NTB Satu Data menjadi milestone untuk perbaikan kualitas data dan informasi perencanaan	▪ Kualitas data dan informasi dapat dioptimalkan dengan membangun sistem data dan informasi yang andal yang secara spesifik mendukung tahapan proses perencanaan pembangunan daerah

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		pembangunan yang andal	pembangunan daerah ▪ Inovasi NTB Satu Peta berbasis informasi geospasial tematik dan dapat diakses melalui website: http://geospasial.bappeda.ntbprov.go.id dan memperoleh penghargaan sebagai Provinsi yang dinilai mampu melaksanakan perencanaan tata guna lahan partisipatif ▪ Pemerintah Provinsi NTB masuk menjadi finalis untuk lomba penghargaan Perencanaan Pembangunan Daerah (PPD)	▪ Belum optimalnya peran Forum Satu Data antara Provinsi dan Kabupaten/kota serta belum optimalniapemanfaatan SIPD
2	Proses analisis untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah belum didukung hasil riset terapan (aplikatif)	▪ Hasil riset dan inovasi daerah belum optimal dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah ▪ Dukungan Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) masih pada tahapan awal	▪ Implementasi program unggulan *Research-Based Policy* belum optimal untuk mendukung proses analisis perencanaan pembangunan daerah	▪ Hasil analisis untuk proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah memerlukan metode dan teknis analisis terkini yang dapat diperoleh dengan mengembangkankerjasama dengan pihak perguruan tinggi dan lembaga riset di daerah
3	Kualitas dokumen perencanaan masih perlu peningkatan	▪ Dokumen perencanaan pembangunan belum didukung oleh rumusan hasil analisis yang menggunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif, Spasial (THIS) ▪ Keterbatasan kemampuan SDM perencana yang andal untuk penyusunan dokumen perencanaan yang optimal	▪ Dokumen perencanaan jangka menengah (RPJMD) Provinsi NTB telah sinergi dengan RPJMN melalui fasilitasi Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian PPN/Bappenas ▪ Evaluasi sinergi capaian RKP dan RKPD juga dilakukan melalui rapat formal regular antara Bappenas dan Bappeda Provinsi NTB	▪ Dokumen perencanaan pembangunan provinsi perlu membangun sinergi dengan dokumen perencanaan pembangunan tingkat nasional ▪ Dokumen perencanaan pembangunan provinsi dijabarkan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota

3. Urusan Pengawasan

Urusan pengawasan menjadi bagian penting untuk mengawal manajemen pemerintahan dan pencapaian visi dan misi serta target kinerja pembangunan daerah. Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang pengawasan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 172 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang perencanaan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Capaian kapabilitas APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) berada di level III	▪ Nilai elemen kapabilitas APIP yang terkait pengelolaan SDM, praktik profesional, akuntabilitas dan manajemen kinerja, budaya dan hubungan organisasi, struktur tata kelola, peran dan layanan	▪ Pada tahun 2023, Inspektorat terus melakukan upaya pemenuhan data dan dokumen pendukung dalam rangka meningkatkan score pada level 3. ▪ Meningkatnya sistem akuntabilitas kinerja perangkat daerah dengan indikator Persentase Perangkat Daerah yang memperoleh Nilai Implementasi SAKIP Predikat BB-AA, target pada tahun 2023 sebesar 100 persen dan realisasi 100 persen	▪ Hasil analisis menunjukkan bahwa capaian kapabilitas APIP provinsi NTB yang berada di level III (*Delivered*) dapat dioptimalkan menjadi level 4 (institutionalized) ▪ APIP yang telah melaksanakan aktifitas pengawasan sesuai standar dan hasil pengawasan APIP sudah berkualitas dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan,efisiensi, dan efektivitas, peringatan dini, perbaikan tata kelola yang mendukung pencapaian tujuan organisasi
2	Tingkat maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) masih pada level 3 Terdefinisi	▪ 6 tingkatan dalam kerangka maturitas SPIP (0 belum ada, 1 rintisan, 2 berkembang, 3 terdefinisi, 4 terkelola dan terukur, 5 optimum) ▪ Pengembangan tingkat maturitas SPIP terkendala belum optimalnya pengendalian intern dan pemantauan secara rutin ▪ Evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumeentasi yang memadai ▪ Kurangnya pengendalian intern berdampak pada pencapaian tujuan organisasi	▪ Nilai untuk Maturitas Penyelenggaraan SPIP sebesar 3,116 atau telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada Level 3 (tiga) ▪ Nilai untuk Manajemen Risiko Indeks (MRI) sebesar 3,041 atau telah memenuhi karakteristik Manajemen Risiko Indeks (MRI) pada Level 3 (tiga) ▪ Nilai untuk Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) sebesar 3,018 atau telah memenuhi karakteristik Indeks	▪ Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP perlu memperhatikan unsur penilaian lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, pemantauan ▪ Memperhatikan penyusunan rencana tindak (*Action Plan*) yang disepakati bersama untuk menjadi acuan para pihak dalam perbaikan tingkat maturitas SPIP

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
			Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) pada Level 2 (dua) ▪ Hasil penilaian terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2023 Inspektorat dapat mempertahankan Level Terdefinisi (Level III)	

4. Urusan Keuangan

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang keuangan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 173 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang keuangan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Rata-rata capaian Indeks Kapasitas Fiskal Provinsi NTB berada pada kategori "Rendah"	▪ Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum berkontribusi optimal untuk pendanaan pembangunan daerah ▪ Ketergantungan tinggi pada dana transfer dari pemerintah pusat	▪ Capaian Indikator Kinerja Sasaran Pembangunan Daerah Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023, Provinsi NTB telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI pada tahun 2023. ▪ Prestasi tersebut adalah yang ke-13 secara berturut-turut dari tahun 2011-2023. Opini WTP ini menggambarkan bahwa Pemerintah Provinsi NTB telah melakukan Best Practice dalam pengelolaan keuangan daerah ▪ Kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2021 sampai 2023 menunjukkan peningkatan dan selalu melapaui target. Pada tahun 2021, capaian realisasi sebesar 39,34 persen dan terus meningkat hingga di tahun 2023 menjadi 48,69 persen ▪ Secara nasional IKFD Provinsi NTB Tahun 2022 berada pada peringkat 23 dengan kategori rendah dari 38 provinsi	▪ Hasil analisis menunjukkan bahawa Pemerintah Provinsi NTB perlu berupaya sekuat tenaga memacu pertumbuhan PAD, dengan target mendekati atau sedikit lebih tinggi dari dana transfer untuk bisa mencapai kategori sedang ▪ Perlu dilakukan optimalisasi peluang dan ruang yang ada untuk meningkatkan PAD ▪ Mendorong agar belanja daerah memiliki kriteria yang bersifat strategis untuk memberikan dampak yang lebih luas dari pilihan program prioritas pembangunan daerah yang telah ditetapkan

5. Urusan Kepegawaian

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang kepegawaian di Provinsi NTB dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 174 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang kepegawaian

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Angka indeks profesionalisme ASN belum optimal	▪ Belum tercapainya target dari dimensi kompetensi, kinerja, dan disiplin ▪ Perencanaan pegawai belum sesuai kebutuhan, pengadaan pegawai belum tepat waktu, sistem informasi belum terintegrasi meliputi SIASN, EKinerja, E-Sensi, selain itu pelayanan kepegawaian berbasis elektronik, perlindungan dan pelayanan ASN belum maksimal terkait pemberian bantuan hukum & JKK/JKM serta KORPRI ▪ Promosi dan mutasi belum menerapkan rencana suksesi dan talent manajemen ▪ Pengembangan karir pegawai belum menggunakan talent mapping ▪ Manajemen kinerja belum terintegrasi secara individu dengan kinerja organisasi	▪ Angka indeks profesionalisme ASN baru mencapai 0,639 poin (kategori sangat rendah) dari target 0,70 poin yang ditetapkan tahun 2022 ▪ Optimalisasi penggunaan teknologi digital untuk pemanfaatan sistem elektronik penilaian kinerja (e-kinerja, e-sipja) yang terintegrasi dengan kedisplinan (e-sensi) ▪ Target Penerapan Sistem Merit pada tahun 2022 berada pada angka 347,5 point dengan realisasi 287,0 point (kategori baik)	▪ Angka indeks profesionalisme ASN yang belum mencapai target menjadi indikator untuk mengoptimalkan aspek mental aparatur dan manajemen perubahan, serta SDM ASN untuk transformasi birokrasi ▪ Sasaran strategis yang perlu mendapat perhatian adalah manajemen ASN yang berbasis meritrokrasi dan SDM ASN yang profesional, integritas, netral, kinerja tinggi, produktif, dan berprestasi. Sistem reward & punishment menjadi bagian dari pengembangan sasaran strategis ini. ▪ Penerapan sistem merit perlu memperhatikan elemen pengembangan karir, manajemen kinerja, promosi dan mutasi, serta sistem informasi kepegawaian

6. Urusan Pendidikan dan Pelatihan

Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang pendidikan dan pelatihan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 175 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang pendidikan dan pelatihan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Angka indeks profesionalisme ASN belum optimal	▪ Perhitungan data ASN yang mengikuti pengembangan kompetensi manajerial, teknis, fungsional, workshop/seminar/bimtek belum terhimpun pada BPSDMD Provinsi NTB masih lemah	▪ Peraturan Gubernur NTB Nomor 52 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mendorong peningkatan nilai	▪ Diperlukan database pengembangan kompetensi ASN yang dilakukan oleh Perangkat Daerah dan tercatat pada portal NTB Satu Data untuk memenuhi kebutuhan data pengembangan kompetensi ASN di

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		▪ Indikator persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi karena prioritas pelaksanaan pelaksanaan uji kompetensi fungsional tertentu pada Kabupaten/Kota	Kompetensi ASN di Provinsi NTB melalui pelaksanaan Pengembangan Kompetensi terintegrasi satu pintu ▪ Rata-rata ASN yang memiliki Kompetensi, belum mencapai target yang ditetapkan dari 0.27 hanya mencapai 0.25. ▪ Pengukuran Indeks Profesionalisme ASN Dimensi Kompetensi yang diukur adalah Pengembangan Kompetensi Manajerial, Teknis, Fungsional dan Workshop/Seminar/ Bimtek dan lain sebagainya yang sejenis ▪ Indikator persentase ASN yang tersertifikasi kompetensi dari target 0,020 tidak tercapai	semua Perangkat Daerah Provinsi NTB ▪ Proses sertifikasi kompetensi ASN tingkat provinsi NTB perlu mendapat prioritas untuk mengembangkan ASN Profesional yang bersaing di era global dan digital saat ini ▪ Optimalisasi implementasi dari Pergub NTB 52/2020 untuk mendorong peningkatan nilai Kompetensi ASN

7. Urusan Penelitian dan Pengembangan

Sejak awal tahun 2022, urusan penelitian dan pengembangan menjadi bagian dari tugas dan fungsi Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Provinsi NTB. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Gubernur NTB Nomor 9 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi dasar pembagian peran, tugas dan fungsi Brida Provinsi NTB. Penjabaran dari permasalahan pembangunan daerah pada urusan bidang penelitian dan pengembangan dapat dilihat pada penjelasan berikut ini:

Tabel 2. 176 Permasalahan pembangunan pada urusan bidang penelitian dan pengembangan

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
1	Hasil kelitbangan dan inovasi belum optimal menjadi input penting untuk perumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah	▪ Kapasitas SDM peneliti belum tersedia dengan keahlian dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan daerah	▪ Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan (Lokus NTB) mengalami peningkatan dari 15% pada tahun 2018 menjadi	▪ Rekomendasi hasil kelitbangan dan inovasi menjadi belum menjadi input untuk rekomendasi kebijakan pembangunan daerah ▪ Kapasitas sumber daya iptek daerah perlu

No	Permasalahan	Akar Permasalahan	Kinerja Daerah	Analisa
		▪ Implementasi *research-based policy* terkendala pendanaan untuk riset terapan di daerah ▪ Kolaborasi dan kerjasama/kemitraan untuk riset dan inovasi masih terbatas	34,78% pada tahun 2022 ▪ Pembentukan Brida Provinsi NTB pada tahun 2021 menjadi momen pertama pembentukan Brida Provinsi Pertama di Indonesia, yang sejalan dengan pembentukan Brin (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang menggabungkan semua kelembagaan penelitian di tingkat nasional	ditingkatkan dengan mendorong upaya membangun ekosistem inovasi ▪ Laju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan diupayakan melalui peningkatan kapasitas wirasusah berbasis inovasi, teknologi dan digitalisasi ▪ Perlu optimalisasi kerjasama antar daerah dan dengan lembaga nasional dan internasional untuk pengembangan kapasitas riset daerah

2.4.2 Rumusan Permasalahan Daerah Tahun 2027

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah yang mencakup aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, serta daya saing daerah, dan dengan memperhatikan hasil evaluasi kinerja pembangunan daerah sampai dengan tahun 2025 serta identifikasi permasalahan pada penyelenggaraan urusan, dapat diidentifikasi bahwa pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius. Dinamika pembangunan yang terjadi menunjukkan adanya kesenjangan antara capaian kinerja saat ini dengan target yang telah ditetapkan, baik dalam konteks pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, maupun peningkatan kualitas pelayanan publik.

Di satu sisi, daerah memiliki potensi yang besar, baik dari aspek geografis yang strategis maupun kekayaan sumber daya alam, khususnya pada sektor agro-maritim. Namun di sisi lain, potensi tersebut belum sepenuhnya mampu didayagunakan secara optimal untuk mendorong transformasi ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari masih terbatasnya nilai tambah sektor unggulan, belum optimalnya pengembangan hilirisasi, serta belum maksimalnya pemanfaatan posisi strategis daerah dalam mendukung konektivitas perdagangan dan investasi.

Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang terjadi juga belum sepenuhnya merata antar wilayah, sehingga memunculkan ketimpangan pembangunan yang berdampak pada perbedaan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini diperparah oleh masih terbatasnya kualitas dan pemerataan layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan, yang berimplikasi pada rendahnya daya saing sumber daya manusia. Dalam konteks pelayanan umum, upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan juga masih menghadapi berbagai kendala, termasuk dalam hal efektivitas birokrasi, akuntabilitas, serta pemanfaatan teknologi digital dalam pelayanan publik.

Di sisi lain, kapasitas fiskal daerah dan kinerja investasi yang belum optimal turut membatasi ruang gerak pemerintah daerah dalam mempercepat pembangunan, terutama dalam penyediaan infrastruktur dan pelayanan dasar. Sementara itu, tekanan terhadap lingkungan hidup serta tingginya risiko kebencanaan menjadi tantangan

tersendiri yang berpotensi menghambat keberlanjutan pembangunan apabila tidak dikelola secara tepat melalui upaya mitigasi dan adaptasi yang terintegrasi.

Dengan memperhatikan berbagai kondisi tersebut, maka permasalahan pembangunan yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2027, diantaranya Adalah 1) Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Masalah Sosial lainnya, 2) Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia, 3) Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Inklusif, 4) Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur, Degradasi Lingkungan dan Kebencanaan Masih Tinggi, dan 5) Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah kebijakan yang lebih terarah, terpadu, dan berkelanjutan guna memastikan bahwa pembangunan daerah dapat berjalan secara efektif dan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat.

Secara terperinci, penjelasan masing-masing permasalahan pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang menjadi perhatian pada tahun 2027 disusun untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai akar persoalan, karakteristik permasalahan, serta keterkaitannya dengan capaian kinerja pembangunan yang telah dicapai hingga tahun 2025. Uraian ini menjadi penting sebagai dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berkelanjutan.

2.2.2.1 Masih Tingginya Tingkat Kemiskinan dan Masalah Sosial lainnya

Permasalahan masih tingginya tingkat kemiskinan dan berbagai permasalahan sosial lainnya di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan isu strategis yang meskipun menunjukkan tren perbaikan, namun masih memerlukan perhatian serius dan berkelanjutan. Berdasarkan data tahun 2020–2025, persentase penduduk miskin di NTB menunjukkan kecenderungan menurun, dari sekitar 13,97% pada tahun 2020 menjadi 11,38% pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan bahwa berbagai program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan mulai memberikan dampak positif. Namun demikian, capaian tersebut masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang pada tahun 2025 telah berada pada kisaran 8,25%, sehingga menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi.

Selain itu, jika dilihat dari sisi jumlah penduduk miskin, penurunan yang terjadi juga cukup signifikan, terutama pada periode 2023–2025. Jumlah penduduk miskin yang sebelumnya berada di atas 740 ribu jiwa mengalami penurunan menjadi sekitar 637 ribu jiwa pada tahun 2025. Meskipun demikian, fluktuasi yang terjadi pada periode sebelumnya menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di NTB masih rentan terhadap berbagai guncangan, baik yang bersifat ekonomi maupun non-ekonomi, seperti inflasi, bencana alam, dan perlambatan sektor-sektor utama daerah.

Dari sisi komparatif regional, tingkat kemiskinan NTB masih berada di atas provinsi lain seperti Bali, yang telah mencapai kisaran 3,42% pada tahun 2025, dan juga masih lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, jika dibandingkan dengan Nusa Tenggara Timur (NTT), tingkat kemiskinan NTB relatif lebih rendah, namun tetap

menunjukkan bahwa kawasan Nusa Tenggara secara umum masih menghadapi tantangan struktural dalam pengentasan kemiskinan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penanggulangan kemiskinan di NTB belum sepenuhnya mampu mengejar ketertinggalan dari daerah yang lebih maju.

Lebih lanjut, karakteristik kemiskinan di NTB juga cenderung bersifat struktural dan multidimensional. Kemiskinan tidak hanya dipengaruhi oleh rendahnya pendapatan, tetapi juga oleh keterbatasan akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja yang produktif, serta infrastruktur dasar. Selain itu, masih terdapat kelompok masyarakat yang berada pada kategori rentan miskin, yang sewaktu-waktu dapat kembali jatuh ke dalam kemiskinan akibat tekanan ekonomi atau kejadian tak terduga. Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada bantuan sosial, tetapi juga harus diiringi dengan penguatan ekonomi masyarakat dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Permasalahan kemiskinan juga berkorelasi dengan berbagai masalah sosial lainnya, seperti pengangguran, ketimpangan wilayah, serta keterbatasan akses terhadap perlindungan sosial yang efektif dan tepat sasaran. Ketimpangan antar wilayah di NTB, khususnya antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa serta antara wilayah perkotaan dan perdesaan, turut memperkuat persistensi kemiskinan. Di sisi lain, belum optimalnya integrasi program penanggulangan kemiskinan dan akurasi data sasaran juga menjadi tantangan dalam meningkatkan efektivitas intervensi kebijakan.

Dengan demikian, meskipun tren penurunan kemiskinan di NTB menunjukkan arah yang positif, namun tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, kesenjangan dengan rata-rata nasional, serta karakteristik kemiskinan yang bersifat struktural dan rentan, menjadikan isu ini sebagai prioritas utama dalam pembangunan daerah tahun 2027. Oleh karena itu, penanganan kemiskinan dan permasalahan sosial lainnya pada tahun 2027 perlu difokuskan pada upaya yang lebih terintegrasi dan berbasis pada penguatan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan akses terhadap layanan dasar dan perlindungan sosial yang inklusif. Selain itu, diperlukan penguatan sinergi antar pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, daerah, maupun sektor swasta dan masyarakat, guna memastikan bahwa setiap intervensi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan, sehingga mampu menurunkan tingkat kemiskinan secara signifikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.2.2.2 Masih Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia

Permasalahan masih rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan isu strategis yang bersifat multidimensional, mencakup aspek pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Meskipun berbagai indikator menunjukkan tren perbaikan dalam beberapa tahun terakhir, namun capaian yang ada masih belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan daya saing tenaga kerja dan produktivitas daerah secara optimal.

Dari aspek pendidikan, indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) menunjukkan perkembangan yang relatif baik, meningkat dari 13,7 tahun pada tahun 2020 menjadi 13,99 tahun pada tahun 2025, bahkan sedikit melampaui rata-rata nasional. Hal ini mencerminkan meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap akses pendidikan. Namun demikian, kondisi ini belum sepenuhnya diikuti oleh capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) yang hanya mencapai 8,21 tahun pada tahun 2025, masih tertinggal dibandingkan rata-rata nasional sebesar 9,07 tahun. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa secara aktual sebagian besar penduduk NTB belum menyelesaikan pendidikan hingga jenjang menengah, yang berdampak pada rendahnya kompetensi dasar tenaga kerja.

Selain itu, tantangan kualitas pendidikan juga tercermin dari masih rendahnya kemampuan literasi membaca dan numerasi peserta didik. Rendahnya literasi membaca berdampak pada keterbatasan kemampuan memahami informasi, berpikir kritis, serta menyerap pengetahuan secara efektif. Sementara itu, rendahnya numerasi berimplikasi pada lemahnya kemampuan analisis kuantitatif, pemecahan masalah, serta pengambilan keputusan berbasis data. Kondisi ini menyebabkan lulusan pendidikan belum sepenuhnya memiliki kompetensi dasar yang dibutuhkan dalam dunia kerja maupun dalam kehidupan sehari-hari, sehingga memperkuat fenomena mismatch antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar.

Dari aspek kesehatan, kualitas SDM di NTB tercermin antara lain melalui capaian Umur Harapan Hidup (UHH) yang menunjukkan tren peningkatan dalam lima tahun terakhir, yaitu dari 71,33 tahun pada tahun 2021 menjadi 72,60 tahun pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan adanya perbaikan derajat kesehatan masyarakat, baik dari sisi akses maupun kualitas layanan kesehatan. Namun demikian, jika dibandingkan dengan capaian nasional yang meningkat dari 73,46 tahun pada tahun 2021 menjadi 74,47 tahun pada tahun 2025, UHH NTB masih berada di bawah rata-rata nasional dengan selisih sekitar 1,8–2 tahun. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa kualitas kesehatan masyarakat NTB secara umum masih tertinggal, baik dalam hal akses layanan kesehatan, status gizi, maupun perilaku hidup sehat.

Permasalahan stunting yang meskipun menurun dari 19,02% pada tahun 2019 menjadi 13,39% pada tahun 2025, tetap menjadi faktor penting yang mempengaruhi capaian UHH secara jangka panjang. Masih adanya daerah dengan prevalensi stunting tinggi, seperti Lombok Timur yang berada di atas 20%, menunjukkan adanya ketimpangan kualitas kesehatan antar wilayah. Kondisi ini berimplikasi pada rendahnya kualitas kesehatan sejak usia dini yang pada akhirnya dapat menurunkan potensi usia produktif serta memperlambat peningkatan UHH di masa mendatang.

Sementara itu, dari aspek ketenagakerjaan, kondisi Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di NTB menunjukkan tren yang fluktuatif. TPT menurun dari 4,22% pada tahun 2020 menjadi 2,73% pada tahun 2024, namun kembali meningkat menjadi 3,06% pada tahun 2025. Meskipun angka ini relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, kondisi tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas tenaga kerja yang baik. Sebagian besar tenaga kerja masih terserap pada sektor informal dan sektor

berproduktivitas rendah, yang menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja (mismatch).

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Rendahnya capaian pendidikan berdampak pada terbatasnya keterampilan tenaga kerja, yang pada akhirnya mempengaruhi kesempatan kerja dan produktivitas. Di sisi lain, kondisi kesehatan yang belum optimal—yang tercermin dari masih adanya stunting dan relatif rendahnya capaian UHH dibandingkan nasional—juga turut menurunkan kualitas SDM secara jangka panjang. UHH yang masih tertinggal menunjukkan bahwa produktivitas penduduk belum dapat dimaksimalkan sepanjang siklus hidupnya, baik karena faktor kesehatan, gizi, maupun akses layanan kesehatan yang belum merata.

Kombinasi dari faktor-faktor ini menyebabkan daya saing tenaga kerja daerah belum optimal dalam menghadapi tuntutan pembangunan dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks. Dengan demikian, meskipun terdapat perbaikan pada beberapa indikator, kualitas SDM di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi tantangan yang cukup besar, terutama dalam hal pemerataan akses, peningkatan kualitas, dan relevansi dengan kebutuhan pembangunan.

Oleh karena itu, pada tahun 2027 diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, tidak hanya melalui penguatan pendidikan dan penurunan stunting, tetapi juga melalui percepatan peningkatan Umur Harapan Hidup (UHH). Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan layanan kesehatan dasar, peningkatan intervensi promotif dan preventif, perbaikan gizi masyarakat, serta pengurangan disparitas antar wilayah. Upaya tersebut perlu diiringi dengan pengembangan keterampilan tenaga kerja yang adaptif terhadap kebutuhan industri, guna mewujudkan SDM yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif sebagai fondasi utama pembangunan daerah.

2.2.2.3 Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belum Inklusif

Permasalahan pertumbuhan ekonomi daerah yang belum inklusif di Provinsi Nusa Tenggara Barat tercermin tidak hanya dari aspek pemerataan hasil pembangunan, tetapi juga dari karakteristik pertumbuhan ekonomi yang cenderung fluktuatif dan belum stabil. Berdasarkan data tahun 2021–2025, pertumbuhan ekonomi NTB menunjukkan dinamika yang cukup tinggi, yaitu dari 2,3% pada tahun 2021, melonjak menjadi 6,95% pada tahun 2022, kemudian mengalami kontraksi menjadi 1,8% pada tahun 2023, kembali meningkat menjadi 5,3% pada tahun 2024, dan kembali melambat menjadi 3,22% pada tahun 2025. Pola ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi NTB masih rentan terhadap faktor eksternal maupun sektoral tertentu, sehingga belum mampu tumbuh secara konsisten dan berkelanjutan.

Jika dibandingkan dengan rata-rata nasional, pertumbuhan ekonomi NTB cenderung lebih tidak stabil. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi relatif terjaga pada kisaran 5%, yaitu 5,31% pada tahun 2022, 5,05% pada tahun 2023, hingga 5,11% pada tahun 2025. Sementara itu, daerah lain seperti Bali bahkan menunjukkan tren pertumbuhan yang semakin kuat dan stabil, mencapai 5,82% pada tahun 2025, setelah

pulih dari kontraksi akibat pandemi. Hal ini menunjukkan bahwa struktur ekonomi di daerah lain relatif lebih resilien dan memiliki basis pertumbuhan yang lebih merata.

Fluktuasi pertumbuhan ekonomi NTB mengindikasikan bahwa kontribusi sektor-sektor ekonomi masih belum merata dan cenderung bergantung pada sektor pertambangan yang bersifat *volatile*. Akibatnya, ketika terjadi perlambatan pada sektor utama, pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan ikut terdampak signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi ekonomi daerah menuju struktur yang lebih beragam dan berdaya tahan masih belum optimal.

Di sisi lain, meskipun pada beberapa periode NTB mampu mencatatkan pertumbuhan yang tinggi, hal tersebut belum sepenuhnya diikuti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata. Hal ini tercermin dari masih tingginya tingkat kemiskinan dan belum optimalnya penyerapan tenaga kerja pada sektor-sektor produktif. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi yang terjadi belum inklusif, karena belum mampu menciptakan peluang ekonomi yang luas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat.

Selain itu, ketimpangan antar wilayah juga menjadi faktor yang memperkuat ketidakinklusifan pertumbuhan ekonomi. Aktivitas ekonomi masih terkonsentrasi pada wilayah tertentu yang memiliki infrastruktur dan aksesibilitas lebih baik, sementara wilayah lainnya, khususnya di luar pusat-pusat pertumbuhan, masih menghadapi keterbatasan dalam mengakses peluang ekonomi. Hal ini berdampak pada perbedaan tingkat pendapatan dan kesejahteraan antar wilayah.

Lebih lanjut, peran sektor informal yang masih dominan dalam struktur ketenagakerjaan juga menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya berkualitas. Sebagian besar tenaga kerja masih berada pada sektor dengan produktivitas rendah dan pendapatan yang tidak stabil, sehingga kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat menjadi terbatas.

Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih menghadapi tantangan dalam hal stabilitas, pemerataan, dan kualitas. Oleh karena itu, pada tahun 2027 diperlukan upaya yang lebih terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, melalui diversifikasi sektor ekonomi, penguatan sektor unggulan berbasis potensi lokal, peningkatan konektivitas wilayah, serta pengembangan investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah secara luas. Upaya ini diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tidak hanya tinggi, tetapi juga stabil, merata, dan berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.2.2.4 Belum Optimalnya Pembangunan Infrastruktur, Degradasi Lingkungan dan Kebencanaan Masih Tinggi

Permasalahan ini merupakan tantangan strategis yang saling berkaitan dan berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketiga aspek ini tidak hanya menentukan kelancaran aktivitas ekonomi dan

pemerataan pembangunan, tetapi juga mempengaruhi kualitas hidup masyarakat serta daya saing daerah secara keseluruhan.

Dari sisi infrastruktur, pembangunan yang telah dilaksanakan dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan kemajuan, namun masih belum sepenuhnya mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah secara menyeluruh. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, irigasi, transportasi, air bersih, sanitasi, serta infrastruktur energi dan telekomunikasi masih menghadapi keterbatasan, terutama di wilayah perdesaan, kawasan terpencil, dan wilayah di luar pusat pertumbuhan. Keterbatasan konektivitas antar wilayah menyebabkan tingginya biaya logistik dan distribusi, yang pada akhirnya menghambat pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan serta memperlebar kesenjangan pembangunan antar wilayah. Selain itu, belum optimalnya infrastruktur pendukung kawasan strategis, seperti kawasan pariwisata dan kawasan industri, juga menjadi kendala dalam menarik investasi dan meningkatkan nilai tambah ekonomi daerah.

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang belum sepenuhnya memperhatikan prinsip keberlanjutan turut berkontribusi terhadap degradasi lingkungan hidup. Tekanan terhadap sumber daya alam, seperti alih fungsi lahan, eksploitasi sumber daya pesisir dan laut, serta pengelolaan limbah yang belum optimal, berpotensi menurunkan kualitas lingkungan. Degradasi ini tidak hanya berdampak pada kerusakan ekosistem, tetapi juga mengancam keberlanjutan sektor-sektor ekonomi berbasis sumber daya alam, seperti pertanian, perikanan, dan pariwisata. Selain itu, perubahan iklim yang semakin nyata turut memperburuk kondisi lingkungan, ditandai dengan meningkatnya frekuensi kejadian cuaca ekstrem yang berdampak pada aktivitas ekonomi dan kehidupan masyarakat.

Permasalahan ini semakin kompleks dengan tingginya risiko kebencanaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Secara geografis, NTB merupakan wilayah yang rentan terhadap berbagai jenis bencana, seperti gempa bumi, banjir, kekeringan, tanah longsor, serta gelombang ekstrem dan abrasi di wilayah pesisir. Tingginya potensi bencana ini seringkali menimbulkan kerugian yang signifikan, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun infrastruktur. Kerusakan infrastruktur akibat bencana juga berpotensi menghambat pelayanan publik dan aktivitas ekonomi, sehingga memperlambat proses pemulihan dan pembangunan daerah.

Selain itu, kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap bencana masih perlu diperkuat, baik dari sisi perencanaan tata ruang yang berbasis risiko bencana, sistem peringatan dini, maupun kesiapan masyarakat dalam menghadapi bencana. Integrasi antara pembangunan infrastruktur dengan upaya mitigasi bencana dan perlindungan lingkungan juga masih belum optimal, sehingga meningkatkan kerentanan wilayah terhadap dampak bencana.

Dengan demikian, permasalahan pembangunan infrastruktur, degradasi lingkungan, dan tingginya risiko kebencanaan di Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan isu yang saling terkait dan memerlukan penanganan yang terintegrasi. Oleh

karena itu, pada tahun 2027 diperlukan pendekatan pembangunan yang tidak hanya berfokus pada percepatan penyediaan infrastruktur, tetapi juga memastikan keberlanjutan lingkungan dan ketahanan terhadap bencana. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan konektivitas wilayah, pembangunan infrastruktur yang ramah lingkungan dan tangguh bencana, penguatan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta peningkatan kapasitas mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan fondasi pembangunan yang kuat, berkelanjutan, dan mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

2.2.2.5 Masih belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah

Permasalahan ini merupakan salah satu tantangan mendasar yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menjadi prasyarat utama dalam memastikan bahwa seluruh proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan dapat berjalan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Namun demikian, dalam implementasinya masih terdapat berbagai kendala yang menyebabkan kinerja pemerintahan belum sepenuhnya optimal dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mencapai target pembangunan daerah.

Salah satu permasalahan yang dihadapi adalah belum optimalnya kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah. Sinkronisasi antara dokumen perencanaan, baik antar level pemerintahan maupun antar perangkat daerah, masih belum sepenuhnya terintegrasi. Hal ini berdampak pada belum optimalnya keterpaduan program dan kegiatan, serta masih adanya tumpang tindih atau duplikasi intervensi pembangunan. Selain itu, keterkaitan antara perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya berbasis kinerja, sehingga efektivitas penggunaan anggaran dalam mencapai target pembangunan masih perlu ditingkatkan.

Dari sisi pelaksanaan, efektivitas birokrasi juga masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kecepatan dan kualitas pelayanan publik. Prosedur yang masih relatif panjang dan belum sepenuhnya berbasis digital menyebabkan pelayanan kepada masyarakat belum optimal. Meskipun upaya digitalisasi telah mulai dilakukan, namun implementasinya belum merata di seluruh perangkat daerah dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam satu sistem yang terpadu. Hal ini berdampak pada belum optimalnya kemudahan akses layanan bagi masyarakat serta dunia usaha.

Selain itu, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan pemerintahan juga masih perlu diperkuat. Meskipun berbagai instrumen pengawasan telah diterapkan, namun kualitas pelaporan dan pengukuran kinerja masih perlu ditingkatkan agar lebih mencerminkan capaian yang sesungguhnya. Pengelolaan data dan informasi pembangunan juga belum sepenuhnya terintegrasi dan akurat, sehingga dapat mempengaruhi kualitas pengambilan keputusan.

Permasalahan lainnya adalah belum optimalnya pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) masih perlu ditingkatkan, baik dari

sisi kompetensi, integritas, maupun penerapan sistem merit dalam manajemen kepegawaian. Pengembangan kapasitas SDM aparatur, termasuk dalam hal pemanfaatan teknologi informasi dan inovasi pelayanan publik, masih menjadi kebutuhan penting untuk menjawab tuntutan pembangunan yang semakin kompleks.

Di sisi lain, koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan juga belum sepenuhnya berjalan optimal. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah kabupaten/kota, serta sektor swasta dan masyarakat masih perlu diperkuat untuk memastikan bahwa pembangunan berjalan secara terpadu dan saling mendukung. Kurangnya koordinasi ini seringkali menyebabkan tidak optimalnya pencapaian target pembangunan serta belum maksimalnya pemanfaatan sumber daya yang tersedia.

Dengan demikian, belum optimalnya tata kelola pemerintahan daerah di Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu faktor penghambat dalam percepatan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada tahun 2027 diperlukan upaya penguatan tata kelola pemerintahan melalui peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, penguatan akuntabilitas dan transparansi, serta peningkatan profesionalisme aparatur. Selain itu, penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor juga menjadi kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat.

2.4.3 Isu Strategis Daerah

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Isu strategis akan sangat unik dan mungkin akan berbeda dengan daerah lain, tidak semua permasalahan masuk dalam isu strategis. Oleh karena itu, dalam proses penyusunan isu strategis provinsi, perlu ada tahap selanjutnya yaitu proses pembobotan permasalahan menjadi isu strategis. Setelah diidentifikasi isu strategis yang ada kemudian masing-masing isu dibobot. Dalam menentukan pembobotan dilakukan FGD untuk memahami usulan dan masukan tentang berbagai isu strategis. Pembobotan dilakukan untuk menentukan mana isu strategis yang paling prioritas dan akan dijadikan dasar bagi Menyusun strategi dan arah kebijakan.

Berdasarkan Hasil analisis permasalahan pembangunan daerah diklasifikasikan menjadi kumpulan isu yang memiliki potensi sebagai penghambat dan peluang untuk mendukung pencapaian target pembangunan daerah. Kumpulan isu ini dianalisis untuk menentukan isu yang dapat dikategorikan sebagai isu strategis, sebagai prioritas yang akan ditangani dalam perumusan kebijakan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di Provinsi NTB. selanjutnya mengacu pada hasil evaluasi hasil capaian RPJPD Provinsi NTB Tahun 2005-2025, evaluasi RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025-2029, hasil capaian TPB/SDGs, dan hasil capaian 6 bidang SPM, akan memberikan pemahaman

yang komprehensif tentang keterkaitan antar isu strategis pada level yang berbeda ini akan bermanfaat untuk merumuskan kebijakan perencanaan dan penganggaran daerah. Selanjutnya, hal ini akan berdampak pada implementasi kebijakan dan kinerja kebijakan pembangunan daerah yang lebih baik di masa mendatang, maka isu strategis pembangunan Provinsi NTB tahun 2027 sebagai berikut :

1. Penurunan Tingkat Kemiskinan

Isu kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menjadi tantangan strategis yang memerlukan perhatian serius dan penanganan yang berkelanjutan. Meskipun berbagai upaya intervensi telah menunjukkan hasil yang positif, tingkat kemiskinan di NTB masih berada di atas rata-rata nasional, sehingga menuntut penguatan kebijakan yang lebih terarah dan terpadu.

Pada September 2025, persentase penduduk miskin di NTB tercatat sebesar 11,38% atau sekitar 637,18 ribu jiwa. Angka ini menunjukkan adanya penurunan dibandingkan periode sebelumnya, yang mencerminkan efektivitas awal dari program-program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan. Namun demikian, capaian tersebut masih relatif tertinggal jika dibandingkan dengan rata-rata nasional yang berada pada kisaran 8,25%.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa upaya penurunan kemiskinan di NTB tidak hanya perlu dipertahankan, tetapi juga harus diperkuat melalui pendekatan yang lebih komprehensif, adaptif, dan berbasis pada karakteristik wilayah. Sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas intervensi, serta penguatan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi kunci dalam mempercepat penurunan kemiskinan secara inklusif dan berkelanjutan di tahun 2027.

Permasalahan kemiskinan di Provinsi NTB tidak berdiri sendiri, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor struktural yang saling berkaitan dan memperkuat satu sama lain. Beberapa faktor utama yang memperburuk kondisi kemiskinan di NTB dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama, kualitas sumber daya manusia yang masih relatif rendah menjadi salah satu akar persoalan. Hal ini dipengaruhi oleh belum meratanya akses dan kualitas pendidikan, khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan, sehingga berdampak pada rendahnya daya saing tenaga kerja dan terbatasnya peluang peningkatan kesejahteraan.

Kedua, keterbatasan lapangan kerja yang layak dan produktif turut mempersempit kesempatan masyarakat untuk memperoleh penghasilan yang memadai. Tingginya persaingan di pasar kerja, yang tidak diimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja berkualitas, menyebabkan sebagian masyarakat terjebak dalam pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan rendah dan tidak stabil.

Ketiga, tingginya ketergantungan pada sektor pertanian yang masih berproduktivitas rendah dan rentan terhadap perubahan iklim menjadi faktor signifikan. Gangguan seperti kekeringan dan banjir kerap memengaruhi hasil produksi, sehingga berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat, terutama kelompok miskin yang menggantungkan hidup pada sektor ini.

Keempat, kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur di sejumlah wilayah turut menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar. Akses yang terbatas terhadap

pendidikan, kesehatan, dan pusat-pusat ekonomi memperlebar kesenjangan pembangunan antarwilayah dan memperlambat penurunan kemiskinan.

Kelima, kesenjangan pendapatan yang masih cukup tinggi antara kelompok masyarakat mampu dan tidak mampu memperburuk kondisi kemiskinan. Ketimpangan ini mencerminkan belum meratanya distribusi hasil pembangunan serta terbatasnya mobilitas ekonomi bagi kelompok berpendapatan rendah.

Keenam, belum optimalnya keterpaduan program penanggulangan kemiskinan, termasuk ketidak-tepatan sasaran, menjadi tantangan tersendiri. Lemahnya koordinasi dan sinergi antar lembaga, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota, menyebabkan intervensi yang dilakukan belum sepenuhnya efektif dan efisien.

Secara keseluruhan, berbagai faktor tersebut menunjukkan bahwa penanggulangan kemiskinan di NTB memerlukan pendekatan yang holistik, terintegrasi, dan berbasis wilayah, dengan penguatan koordinasi lintas sektor serta peningkatan kualitas intervensi yang lebih tepat sasaran.

2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Provinsi NTB masih menjadi tantangan penting dalam mendukung percepatan pembangunan daerah. Meskipun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menunjukkan tren peningkatan, capaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan kualitas SDM yang merata dan berdaya saing tinggi.

Pada aspek pendidikan, rendahnya rata-rata lama sekolah yang baru mencapai 8,87 tahun, setara dengan sekitar kelas VIII Sekolah Menengah Pertama (SMP), menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk belum menamatkan pendidikan dasar secara optimal. Kondisi ini diperkuat oleh masih tingginya proporsi penduduk dengan tingkat pendidikan tamatan Sekolah Dasar ke bawah yang mencapai 42,08%. Hal ini berdampak pada terbatasnya keterampilan dan kompetensi tenaga kerja, sehingga memengaruhi produktivitas dan peluang akses terhadap pekerjaan yang lebih layak.

Sementara itu, pada aspek kesehatan, kualitas SDM juga dihadapkan pada sejumlah tantangan yang cukup kompleks. Masih tingginya angka kematian ibu dan balita berdampak pada rendahnya usia harapan hidup. Di sisi lain, prevalensi stunting yang masih tinggi menunjukkan adanya permasalahan gizi kronis yang dapat memengaruhi kualitas generasi mendatang. Selain itu, peningkatan kasus penyakit menular dan tidak menular—seperti tuberkulosis, diabetes, hipertensi, dan obesitas—menjadi indikator bahwa beban kesehatan masyarakat semakin beragam dan memerlukan penanganan yang komprehensif.

Dengan berbagai kondisi tersebut, diperlukan upaya yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan dalam meningkatkan kualitas SDM di NTB. Intervensi tidak hanya difokuskan pada perluasan akses pendidikan dan layanan kesehatan, tetapi juga pada peningkatan kualitasnya, termasuk melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kompetensi, serta peningkatan layanan kesehatan preventif dan promotif. Dengan demikian, SDM NTB diharapkan mampu menjadi lebih produktif, adaptif, dan kompetitif dalam mendukung pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan.

3. Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah sesuai Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan

Pertumbuhan dan pemerataan pembangunan antarwilayah di Provinsi NTB yang selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan merupakan isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah. Isu ini muncul sebagai konsekuensi dari masih adanya ketimpangan pembangunan antar kabupaten/kota, khususnya di Pulau Lombok, di mana Kota Mataram berperan sebagai pusat pertumbuhan yang relatif lebih maju dan berkembang pesat dibandingkan wilayah lainnya. Meskipun demikian, secara agregat tingkat ketimpangan di Pulau Lombok tergolong rendah dengan nilai Indeks Williamson (IW) di bawah 0,035, yang menunjukkan adanya disparitas yang masih terkendali, namun tetap perlu diantisipasi agar tidak semakin melebar.

Pertumbuhan ekonomi terbukti menjadi salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap dinamika ketimpangan wilayah. Namun, akselerasi pertumbuhan yang belum sepenuhnya diiringi dengan pemerataan dan keberlanjutan berpotensi menimbulkan permasalahan baru, terutama terkait degradasi lingkungan. Penurunan kualitas guna lahan dan meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam menjadi indikasi bahwa aspek lingkungan belum sepenuhnya terintegrasi dalam kebijakan pembangunan.

Selain itu, penetapan sektor unggulan dalam pengembangan wilayah belum sepenuhnya berbasis pada identifikasi potensi dan keunggulan komparatif masing-masing daerah. Hal ini berdampak pada belum optimalnya pengembangan ekonomi lokal. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang telah dilakukan belum sepenuhnya mampu mendorong peningkatan daya saing wilayah secara merata.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2027 mengedepankan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi dengan memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Penguatan sinergi antara pemerintah daerah, masyarakat, dan seluruh pemangku kepentingan menjadi kunci dalam mewujudkan pertumbuhan yang inklusif, pemerataan pembangunan antarwilayah, serta keberlanjutan lingkungan di Provinsi NTB.

4. Produktivitas dan Perkuatan Pembangunan Ekonomi Daerah yang Berkelanjutan

NTB memiliki potensi ekonomi yang menjanjikan, terutama di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Dengan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dan diversifikasi ekonomi, NTB seharusnya dapat terus mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, namun dalam kenyataannya, kemiskinan masih tinggi, produktivitas masih rendah, serta pendapatan per kapita masih rendah. maka peningkatan produktivitas, baik dalam tenaga kerja maupun dalam sektor-sektor ekonomi, menjadi kunci untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif, melalui hilirisasi ekonomi, mendorong terus sektor-sektor yang mempunyai nilai tambah tinggi, serta mengoptimalkan pengelolaan potensi pariwisata. Dengan produktivitas yang lebih tinggi, maka NTB dapat menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dengan sumber daya yang sama, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan per kapita dan kesejahteraan masyarakat

Isu strategis dalam produktivitas dan penguatan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan mencakup berbagai aspek penting. Beberapa isu utama meliputi keterbatasan infrastruktur, rendahnya produktivitas, ketimpangan ekonomi, serta kurangnya kesempatan kerja dan lapangan usaha. Selain itu, tantangan dalam meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan juga menjadi perhatian.

a. Keterbatasan Infrastruktur
   Infrastruktur Dasar: Keterbatasan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, listrik, air bersih, dan fasilitas sanitasi dapat menghambat aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
   Infrastruktur Pendukung: Keterbatasan infrastruktur pendukung seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, dan telekomunikasi juga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat.
   Ketimpangan Infrastruktur: Kesenjangan infrastruktur antara daerah perkotaan dan perdesaan juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan.
b. Produktivitas Rendah
   Produktivitas Tenaga Kerja: Produktivitas tenaga keja yang rendah dapat disebabkan oleh kurangnya keterampilan, pendidikan, dan pelatihan.
   Produktivitas Sektor Ekonomi: Produktivitas sektor ekonomi seperti pertanian, perikanan, dan industri juga perlu ditingkatkan melalui inovasi teknologi dan penerapan praktik terbaik.
   Rendahnya Daya Saing: Wilayah dengan produktivitas rendah cenderung memiliki daya saing yang rendah dalam skala regional maupun global.
c. Ketimpangan Ekonomi
   Kesenjangan Pendapatan: Kesenjangan pendapatan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi.
   Kesenjangan Wilayah: Kesenjangan pembangunan antar wilayah juga perlu diperhatikan, terutama antara daerah perkotaan dan perdesaan.
   Akses Terhadap Sumber Daya: Akses terhadap sumber daya seperti modal, teknologi, dan informasi yang tidak merata juga dapat memperburuk ketimpangan ekonomi.
d. Kesempatan Kerja dan Lapangan Usaha
   Pengangguran: Tingkat pengangguran yang tinggi, terutama di kalangan pemuda, dapat menjadi masalah serius yang menghambat pertumbuhan ekonomi.
   Penciptaan Lapangan Kerja: Pemerintah daerah perlu menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja baru.
   Diversifikasi Ekonomi: Mendorong diversifikasi ekonomi dengan mengembangkan sektor-sektor potensial selain sektor yang sudah ada dapat menciptakan lapangan kerja baru.
e. Pembangunan Berkelanjutan:
   Pelestarian Lingkungan: Pembangunan ekonomi harus mempertimbangkan kelestarian lingkungan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya alam.
   Pemanfaatan Teknologi: Pemanfaatan teknologi yang ramah lingkungan dan efisien dalam kegiatan ekonomi dapat mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan.
   Pengelolaan Bencana: Pembangunan berkelanjutan juga perlu mempertimbangkan potensi bencana alam dan upaya mitigasinya.
f. Tata Kelola Pemerintahan

Efektivitas Tata Kelola: Tata kelola pemerintahan yang efektif dan transparan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan menarik investasi.
Keterlibatan Masyarakat: Masyarakat perlu dilibatkan dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan daerah.
Koordinasi Antar Lembaga: Koordinasi yang baik antar lembaga pemerintah dan sektor swasta juga penting untuk mencapai tujuan pembangunan.

g. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Pendidikan dan Pelatihan: Investasi dalam pendidikan dan pelatihan tenaga kerja dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Kesehatan Masyarakat: Kesehatan masyarakat yang baik juga merupakan faktor penting dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup.
Pemberdayaan Masyarakat: Pemberdayaan masyarakat dalam berbagai bidang dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam pembangunan.

h. Pengembangan Potensi Daerah
Komoditas Unggulan: Mengembangkan komoditas unggulan daerah dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan menarik investasi.
Pariwisata: Pengembangan potensi pariwisata daerah dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan kerja.
Sektor Ekonomi Kreatif: Pengembangan sektor ekonomi kreatif seperti seni, budaya, dan kerajinan tangan dapat meningkatkan pendapatan dan daya tarik daerah.

5. Penguatan Tata kelola Pemerintahan Daerah.

Tata kelola birokrasi di Provinsi NTB masih dihadapkan pada sejumlah tantangan yang memerlukan pembenahan secara sistematis dan berkelanjutan. Persepsi publik yang masih mengidentikkan birokrasi dengan pelayanan yang lambat, prosedur yang berbelit, serta kuatnya budaya afiliasi yang berpotensi mendorong praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), menjadi isu krusial yang harus segera direspons melalui reformasi birokrasi yang nyata dan terukur.

Dalam konteks tersebut, Pemerintah Provinsi NTB perlu menegaskan komitmennya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) melalui peningkatan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kinerja birokrasi, tetapi juga untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, transformasi digital menjadi salah satu instrumen kunci dalam mendorong perbaikan tata kelola. Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) atau e-government, digitalisasi pelayanan publik, serta integrasi sistem antarinstansi diharapkan mampu mempercepat proses layanan, meminimalkan potensi penyimpangan, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Di samping itu, penguatan kapasitas sumber daya aparatur menjadi faktor penentu keberhasilan reformasi birokrasi. Hal ini perlu didukung melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, serta penerapan sistem merit dalam manajemen aparatur sipil negara. Transformasi birokrasi juga harus diarahkan pada penyederhanaan struktur organisasi, peningkatan efisiensi kerja, serta penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan birokrasi di Provinsi NTB dapat bertransformasi menjadi lebih adaptif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan, sehingga mampu mendukung percepatan pembangunan daerah secara efektif, bersih, dan berkelanjutan.

2.5 Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Telaahan terhadap Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi salah satu referensi penting dalam memperkaya arah dan substansi perencanaan pembangunan daerah. Pokir DPRD disusun berdasarkan hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat tahun 2027, yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat dari berbagai wilayah serta menjadi wujud pelaksanaan fungsi representasi DPRD dalam mendorong peningkatan kualitas pembangunan daerah.

Sebagai bagian dari proses perencanaan, Pokir DPRD berperan sebagai masukan strategis yang melengkapi pendekatan teknokratis, sehingga perencanaan pembangunan tidak hanya berbasis data dan indikator kinerja, tetapi juga responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat di tingkat akar rumput. Hal ini menjadikan Pokir DPRD sebagai instrumen penting dalam memastikan bahwa arah kebijakan pembangunan daerah lebih inklusif, partisipatif, dan berorientasi pada pemerataan.

Penyampaian Pokir DPRD kepada Pemerintah Provinsi NTB dilakukan satu minggu sebelum pelaksanaan Musrenbang RKPD, sehingga telah memenuhi ketentuan batas waktu sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017. Secara kuantitas, 64 anggota DPRD Provinsi NTB menyampaikan total 9.658 usulan program yang tersebar di 10 Kabupaten/Kota dan terdistribusi kepada 21 Perangkat Daerah, sebagai bentuk dukungan terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD. Berdasarkan komposisi bidangnya, usulan Pokir didominasi oleh sektor infrastruktur dasar — meliputi jalan, drainase, irigasi, dan air bersih yang mencapai 30–40 persen dari total usulan, diikuti oleh sektor pendidikan, kesehatan, dan sosial-keagamaan, serta sektor penguatan ekonomi seperti UMKM dan pertanian. Selanjutnya, seluruh usulan Pokir tersebut akan ditelaah lebih lanjut untuk disesuaikan dengan kapasitas riil fiskal daerah serta keselarasannya dengan target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2027

Pokok-pokok pikiran DPRD merupakan bagian dari saran dan masukan DPRD dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah yang diperoleh dari hasil penyerapan aspirasi masyarakat melalui pelaksanaan Reses yang menjadi salah satu pertimbangan dalam penyusunan fokus dan prioritas pembangunan daerah, antara lain:

1. **PD1. Transformasi Sumber Daya Manusia Unggul, Kreatif dan Inovatif**

   Tingginya angka stunting akibat kurang gizi kronis dan ketimpangan akses pangan serta layanan kesehatan. Selain itu, terdapat ketidakpastian lapangan kerja akibat keterlambatan pemenuhan janji pembukaan lowongan kerja oleh pemerintah. Keharusan adanya program intervensi gizi terintegrasi dan sinkronisasi bursa kerja daerah dengan industri lokal.

   Dalam RPJMD juga menjabarkan untuk intervensi gizi, dan untuk sinkronisasi bursa kerja. Program prioritas seperti "Peningkatan Kesehatan dan Gizi Masyarakat" secara eksplisit mencakup pencegahan stunting melalui buffer stock makanan tambahan, pelatihan pencegahan gizi buruk, dan infrastruktur air minum. Sementara itu, program "Pengembangan Daya Saing Keolahragaan dan Ketenagakerjaan" mendukung aspirasi bursa kerja melalui pelatihan vokasi dan kemitraan industri,

dengan target peningkatan produktivitas tenaga kerja di sektor prioritas seperti agromaritim.

Masalah stunting dan ketidakpastian lapangan kerja harus menjadi prioritas utama dalam RPJMD NTB karena implikasinya yang mendalam terhadap pencapaian visi daerah dan nasional. Pertama, stunting tidak hanya masalah kesehatan, tetapi juga hambatan struktural terhadap SDM berkualitas, yang berdampak pada penurunan produktivitas ekonomi hingga 11% (menurut data survei nasional). Dengan prevalensi stunting NTB yakni sebesar 29,8% yang masih di atas rata-rata nasional sebesar 21,6%, prioritas ini esensial untuk mencapai target RPJMN dalam penguatan SDM dan pengurangan kemiskinan ekstrem. Tanpa intervensi gizi terintegrasi, NTB berisiko gagal mencapai Indonesia Emas 2045, di mana SDM sehat menjadi fondasi pertumbuhan.

Kedua, ketidakpastian lapangan kerja memperburuk ketimpangan sosial-ekonomi, dengan TPT NTB mencapai 3,05% pada tahun 2025 dan pengangguran pemuda hingga 6,91%. Sinkronisasi bursa kerja dengan industri lokal akan menciptakan kesempatan kerja berkualitas, mendukung target RPJMN untuk ekonomi inklusif dan pertumbuhan 6-7% per tahun. Ini juga selaras dengan Program Unggulan NTB Sehat dan Cerdas dan NTB Inklusif yang menekankan pengurangan pengangguran melalui kemitraan. Secara ekonomi, prioritas ini dapat meningkatkan PDRB per kapita hingga 10% melalui peningkatan partisipasi kerja.

Ketiga, kedua isu ini bersifat lintas sektoral dan mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya SDG 2 (Tanpa Kelaparan), SDG 3 (Kesehatan), dan SDG 8 (Pekerjaan Layak). Mengabaikannya berisiko memperlemah daya saing daerah, meningkatkan beban fiskal (misalnya biaya kesehatan dan subsidi sosial), dan menghambat pencapaian visi sejahtera. Oleh karena itu, integrasi aspirasi ini ke dalam RKPD tahunan dan anggaran APBD harus diprioritaskan untuk memastikan alokasi sumber daya yang efektif dan berkelanjutan.

2. PD2. Transformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan

Tingginya harga pupuk bersubsidi dan non-subsidi yang membebani petani. Hal ini menyebabkan penurunan produktivitas pertanian secara signifikan dan berkurangnya minat petani dalam menggarap lahan produktif. Selain itu, terjadi kelangkaan gas LPG 3 kg dengan harga di atas HET yang mengganggu ekonomi rumah tangga dan UMKM kecil.

Hal ini untuk menjelaskan bagaimana penataan ulang distribusi pupuk tepat sasaran dan pengawasan harga gas 3Kg di tingkat pangkalan. Karena sektor pertanian menyumbang signifikan terhadap PDRB NTB (sekitar 21,45% pada 2024) dan menyerap tenaga kerja terbesar (36,16% pada 2024). Tingginya harga pupuk dapat menurunkan produktivitas hingga menyebabkan alih fungsi lahan pertanian (masalah yang disebutkan dalam RPJMD), mengancam ketahanan pangan nasional dan target pertumbuhan PDRB pertanian. Prioritas ini diperlukan untuk mencapai sasaran RPJMD dalam membangun ekosistem industri agromaritim yang berkelanjutan, di mana distribusi pupuk tepat sasaran akan meningkatkan akses petani terhadap input produksi, sehingga mendukung visi "makmur" dan "mendunia".

Kelangkaan gas LPG 3 kg memengaruhi 40% rumah tangga miskin dan UMKM kecil di NTB, yang bergantung pada energi murah untuk operasional sehari-hari. RPJMD

menargetkan penurunan tingkat kemiskinan dari 11,68% pada 2025 menjadi 8,35% pada 2030 melalui bantuan sosial tepat sasaran, termasuk subsidi energi. Tanpa prioritas pengawasan harga dan distribusi, masalah ini akan memperburuk ketimpangan, kontradiktif dengan misi pemerataan ekonomi berkeadilan.

RPJMD berpedoman pada RPJMN 2025-2029, yang menekankan ketahanan pangan melalui pertanian rendah karbon dan hilirisasi. Prioritas aspirasi ini mendukung target nasional, seperti peningkatan indeks produktivitas pertanian (dari 93,41 pada 2024 menjadi 90,41 pada 2029) dan penguatan UMKM (proporsi usaha kecil non-pertanian dari NA pada 2024 menjadi 0,22 pada 2029). Selain itu, penurunan minat petani menggarap lahan mengancam keberlanjutan lingkungan (alih fungsi lahan mencapai 80% lahan kering), sehingga prioritas ini esensial untuk visi "berkelanjutan". Mengatasi masalah ini akan menciptakan efek berantai, seperti peningkatan produksi pertanian (target produksi tanaman pangan naik dari rata-rata 18,06 ribu ton/tahun) dan stabilitas UMKM, yang berkontribusi pada rasio kewirausahaan daerah (dari 0,12% pada 2024 menjadi 0,91% pada 2029). Kegagalan memprioritaskan dapat menghambat target RPJMD secara keseluruhan, termasuk pengurangan pengangguran dan peningkatan pendapatan per kapita.

3. PD5. Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim

Kurangnya fasilitas pengelolaan sampah (TPS dan kendaraan angkut) menyebabkan pembuangan liar yang merusak lingkungan desa. Di sisi lain, pembatasan otonomi daerah oleh regulasi pusat menghambat fleksibilitas kebijakan lokal di tingkat desa dan provinsi. Teridentifikasi pula kurangnya partisipasi masyarakat adat dalam penataan tata ruang terkait tanah ulayat. Pengadaan sarana persampahan terpadu dan pengakuan hak ulayat dalam kebijakan tata ruang daerah.

Masalah kurangnya fasilitas pengelolaan sampah, seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) dan kendaraan angkut, yang menyebabkan pembuangan liar dan kerusakan lingkungan desa, dapat diproyeksikan ke dalam Misi 5 RPJMD yakni "Memperkuat Sistim Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan". Secara spesifik, isu ini selaras dengan Tujuan 10 RPJMD, yaitu "Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan", yang mencakup indikator Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK). Program prioritas terkait meliputi "Program Pengelolaan Persampahan", yang menargetkan peningkatan persentase penanganan sampah hingga 100% melalui optimalisasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) seperti Kebon Kongok, pembangunan bank sampah induk, dan sistem persampahan skala regional. Aspirasi pengadaan sarana persampahan terpadu dapat diintegrasikan ke dalam program ini, untuk peningkatan infrastruktur TPA/TPST regional.

Prioritas ini esensial karena pengelolaan sampah yang tidak optimal telah menyebabkan degradasi lingkungan, seperti pencemaran sungai dan pantai, yang berdampak pada sektor pariwisata sebagai andalan ekonomi NTB. Hal ini selaras dengan mandat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, yang mewajibkan pemerintah daerah menyediakan infrastruktur persampahan untuk mencegah kerusakan lingkungan. Selain itu, peningkatan IKLH merupakan indikator kunci. RPJMN dan RPJPD, di mana kegagalan mengatasi pembuangan liar dapat

menghambat pencapaian target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sektor sampah hingga 48,56% pada tahun 2030. Prioritas ini juga mendukung ketahanan desa, mengurangi risiko kesehatan masyarakat, dan mempromosikan ekonomi sirkular, sehingga berkontribusi terhadap visi keberlanjutan provinsi secara keseluruhan.

Penguatan otonomi daerah merupakan keharusan karena regulasi pusat sering kali tidak selaras dengan kondisi lokal NTB sebagai provinsi kepulauan, sehingga menghambat respons cepat terhadap isu desa seperti pengelolaan sampah atau tata ruang. Hal ini didukung oleh mandat Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945, yang menjamin otonomi daerah untuk meningkatkan efisiensi pembangunan. Prioritas ini juga selaras dengan RPJMN, di mana ketidakfleksibelan kebijakan dapat menghalangi pencapaian target pemerintahan yang akuntabel, dengan risiko rendahnya realisasi program prioritas daerah hingga 70%. Dengan memprioritaskan ini, NTB dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan pelayanan publik, yang pada akhirnya mendukung visi provinsi yang kuat dan sejahtera.

4. **PD6. Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan**

   Kerusakan infrastruktur jalan provinsi yang membahayakan keselamatan serta menghambat distribusi logistik pertanian dan UMKM. Kondisi ini menurunkan minat investor dan kunjungan wisatawan ke destinasi unggulan. Terjadi pula sengketa pembangunan jalan umum menuju Pantai Mawi akibat penolakan pemegang izin usaha meski ada kesepakatan tertulis.

   Sejalan dengan aspirasi masyarakat dan daerah tentang percepatan rehabilitasi jalan provinsi dan penyelesaian konflik agraria untuk kepentingan akses publik. Prioritas ini beririsan dengan rencana program rehabilitasi jalan provinsi untuk meningkatkan konektivitas dengan target Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi mencapai 79,76% pada 2030, untuk memberikan dukungan distribusi logistik pertanian/UMKM, dan akses wisata.

   Jika kedua hal diatas mampu terwujud maka upaya integrasi infrastruktur jalan dengan pengembangan kawasan pertanian dan pariwisata dengan target peningkatan PDRB pertanian 22,1% dan pariwisata (akomodasi, makanan dan minuman) 1,6% pada 2030 akan tercapai, termasuk peningkatan realisasi investasi sebesar Rp96,22 triliun pada 2029.

5. **PD7. Transformasi Tata Kelola Daerah Yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif**

   Masih maraknya penyalahgunaan narkoba yang merusak generasi muda. Secara institusional, ditemukan kelemahan sistem meritokrasi ASN akibat intervensi politik dan KKN. Di bidang hukum, terdapat praktik penindasan dan pemerasan oleh oknum penegak hukum serta ketidakadilan proses hukum bagi masyarakat bawah. Penyalahgunaan narkoba merusak generasi muda, yang merupakan 25-30% populasi NTB. Tanpa prioritas, ini mengancam target RPJMD untuk indeks ketahanan sosial tinggi, mengakibatkan penurunan produktivitas tenaga kerja dan peningkatan beban kesehatan (proyeksi biaya sosial mencapai miliaran rupiah per tahun). Isu ini diproyeksikan ke program prioritas "Desa Bebas Narkoba dan Judi Online", yang bertujuan menciptakan desa aman dengan lingkungan sosial bebas dari penyalahgunaan narkoba.

Strategi mencakup perlindungan generasi muda melalui pendidikan, pembinaan karakter, dan kegiatan keagamaan serta olahraga. Program ini selaras dengan sasaran RPJMD untuk meningkatkan ketahanan sosial (outcome: peningkatan indeks ketahanan masyarakat terhadap ancaman non-tradisional seperti narkoba). Selain itu, program "Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Olahraga" mendukung pencegahan melalui pengembangan daya saing pemuda, dengan indikator prestasi olahraga nasional sebagai ukuran keberhasilan.

RPJMD secara eksplisit menangani ini melalui program prioritas "Manajemen Talenta", yang menargetkan peningkatan indeks profesionalisme ASN ke kategori sangat tinggi melalui sistem meritokrasi, bebas KKN, dan berbasis kompetensi serta kinerja. Strategi mencakup: (1) penguatan kapasitas ASN dengan nilai Sistem Merit mencapai 331,5 poin pada 2030 (dari baseline 264,5 pada 2024); (2) transformasi birokrasi dengan penyederhanaan struktur organisasi dan penerapan meritokrasi; serta (3) peningkatan pengawasan internal untuk mencegah intervensi politik. Indikator kinerja mencakup Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) dengan target 76,86 poin pada 2030 dan Nilai Indeks Implementasi NSPK (Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria) Manajemen ASN. Kelemahan meritokrasi ASN dan KKN menyebabkan inefisiensi birokrasi. Prioritas ini esensial untuk mencapai target IRB kategori A, karena intervensi politik menghambat pencapaian sasaran RPJMD seperti peningkatan pelayanan publik (indeks 4,2 pada 2030).

Ketidakadilan hukum erodasi kepercayaan masyarakat bawah, yang mencakup 40-50% populasi miskin NTB. Prioritasnya adalah pengawasan dan pencegahan konflik sosial yang mendukung investasi dan pertumbuhan ekonomi dengan target pertumbuhan 0,80% per tahun. Strategi RPJMD mencakup pemerintahan bebas KKN, penguatan indeks reformasi birokrasi (target 82,79 pada 2030), Indeks Reformasi Hukum dan pengawasan internal oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)

2.6 Inovasi Daerah

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat, Pemerintah Provinsi NTB melakukan beberapa inovasi sebagai berikut :

1. SIPEKA (Sistem Informasi Dan Edukasi Pencegahan Kembali Ke Rumah Sakit)

Readmisi atau kondisi pasien yang kembali menjalani perawatan di rumah sakit dalam waktu relatif singkat setelah dipulangkan merupakan salah satu indikator mutu pelayanan kesehatan. Tingginya angka readmisi menunjukkan bahwa kesinambungan pelayanan (*continuity of care*) antara rumah sakit, pasien, keluarga, dan fasilitas pelayanan kesehatan di masyarakat belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain rendahnya pemahaman pasien dan keluarga mengenai penyakit dan pengobatannya, ketidakpatuhan terhadap terapi dan jadwal kontrol, kurangnya pemantauan setelah pasien pulang, serta belum optimalnya koordinasi antara rumah sakit dengan fasilitas pelayanan kesehatan dan pemangku kepentingan lainnya.

Pada pelayanan kesehatan jiwa, risiko readmisi menjadi tantangan yang lebih besar karena pasien memerlukan pengobatan jangka panjang, pemantauan kondisi secara berkesinambungan, dukungan keluarga, serta lingkungan sosial yang mampu mendukung proses pemulihan. Ketika pasien tidak memperoleh edukasi yang memadai, tidak menjalani

kontrol sesuai jadwal, atau menghentikan pengobatan secara sepihak, risiko kekambuhan akan meningkat sehingga pasien berpotensi kembali menjalani perawatan di rumah sakit. Kondisi tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas hidup pasien dan keluarganya, tetapi juga meningkatkan beban pelayanan rumah sakit, penggunaan sumber daya, serta biaya pelayanan kesehatan.

Perkembangan teknologi informasi membuka peluang untuk menghadirkan model pelayanan kesehatan yang lebih efektif, cepat, dan berkelanjutan. Pemanfaatan teknologi digital tidak lagi terbatas pada administrasi pelayanan, tetapi dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi, komunikasi, pemantauan, dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Atas dasar kebutuhan tersebut, RSJ Mutiara Sukma mengembangkan **SIPEKA (Sistem Informasi dan Edukasi Pencegahan Kembali ke Rumah Sakit)** sebagai inovasi pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan sistem informasi, edukasi pasien, pemantauan pasca perawatan, serta kolaborasi antara rumah sakit, pasien, keluarga, fasilitas pelayanan kesehatan, pemerintah, dan komunitas dalam satu ekosistem pelayanan yang berkesinambungan.

Melalui SIPEKA diharapkan pasien memperoleh pendampingan yang lebih optimal setelah pulang dari rumah sakit, kepatuhan terhadap terapi dan jadwal kontrol meningkat, keluarga semakin berperan dalam proses pemulihan, serta angka readmisi dapat ditekan. Selain meningkatkan mutu pelayanan kesehatan, inovasi ini juga mendukung transformasi digital pelayanan publik yang berorientasi pada pelayanan yang berkualitas, efektif, efisien, dan berpusat pada kebutuhan pasien. Keterbaruan SIPEKA terletak pada perubahan paradigma pelayanan kesehatan dari pelayanan yang berfokus pada proses perawatan di dalam rumah sakit (*hospital-based care*) menjadi pelayanan yang berorientasi pada kesinambungan pelayanan (*continuity of care*) dan kebutuhan pasien (*patient-centered care*). Selama ini, proses pelayanan umumnya berakhir ketika pasien dinyatakan pulang, sedangkan pemantauan lanjutan masih dilakukan secara terbatas dan bergantung pada kunjungan kontrol pasien. SIPEKA menghadirkan pendekatan baru dengan memastikan bahwa proses pelayanan tetap berlangsung setelah pasien kembali ke rumah melalui sistem informasi yang mendukung pemantauan, edukasi, komunikasi, dan koordinasi secara berkelanjutan.

Berbeda dengan sistem informasi pelayanan kesehatan yang umumnya hanya berfungsi sebagai media pencatatan atau administrasi pasien, SIPEKA mengintegrasikan berbagai fungsi dalam satu platform, mulai dari pengelolaan data pasien, penyampaian edukasi kesehatan, pengingat jadwal kontrol, pemantauan kepatuhan pengobatan, identifikasi dini faktor risiko kekambuhan, hingga media komunikasi antara tenaga kesehatan, pasien, dan keluarga. Integrasi tersebut memungkinkan tenaga kesehatan melakukan tindak lanjut secara lebih cepat terhadap pasien yang menunjukkan risiko mengalami kekambuhan sehingga upaya pencegahan dapat dilakukan sebelum pasien memerlukan perawatan kembali. Keterbaruan lainnya terletak pada penyediaan edukasi digital yang dapat diakses secara berulang oleh pasien dan keluarga. Berbeda dengan metode edukasi konvensional yang umumnya hanya diberikan saat pasien dipulangkan, SIPEKA menyediakan materi edukasi yang dapat dipelajari kembali kapan saja, meliputi kepatuhan terhadap pengobatan, pengenalan tanda-tanda kekambuhan, pola hidup sehat,

manajemen stres, pentingnya kontrol rutin, serta langkah penanganan awal apabila muncul gejala yang memerlukan perhatian. Dengan demikian, proses edukasi tidak berhenti pada saat pasien keluar dari rumah sakit, tetapi menjadi bagian dari proses pendampingan yang berlangsung secara terus-menerus.

SIPEKA juga menghadirkan pendekatan kolaboratif dengan menempatkan keluarga sebagai bagian integral dari proses pelayanan. Dalam pelayanan kesehatan jiwa, keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pasien menjalani terapi secara konsisten dan memperoleh dukungan psikososial di lingkungan rumah. Melalui SIPEKA, keluarga tidak hanya menerima informasi mengenai kondisi pasien, tetapi juga memperoleh edukasi dan panduan dalam melakukan pendampingan sehingga mampu berperan aktif dalam mencegah kekambuhan. Selain itu, SIPEKA membangun kolaborasi antara rumah sakit, fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, pemerintah daerah, organisasi kesehatan, dan komunitas sebagai jejaring pelayanan yang saling terhubung. Kolaborasi ini memungkinkan proses pemantauan pasien tidak berhenti di rumah sakit, melainkan berlanjut di lingkungan tempat tinggal pasien sehingga pelayanan menjadi lebih komprehensif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Aspek keterbaruan berikutnya adalah pemanfaatan data pelayanan sebagai dasar pengambilan keputusan. Data mengenai kepatuhan pasien, riwayat kontrol, faktor risiko, dan angka readmisi terdokumentasi secara sistematis sehingga dapat dimanfaatkan untuk evaluasi mutu pelayanan, penyusunan kebijakan, serta pengembangan program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan. Pendekatan berbasis data ini menjadikan pelayanan lebih terukur, akuntabel, dan adaptif terhadap kebutuhan pasien.

Secara keseluruhan, SIPEKA tidak hanya merupakan aplikasi digital untuk mendokumentasikan data pasien, tetapi merupakan sebuah ekosistem pelayanan kesehatan yang mengintegrasikan teknologi informasi, edukasi, pemantauan aktif, komunikasi, dan kolaborasi lintas sektor dalam satu sistem yang berorientasi pada pencegahan. Pendekatan tersebut memberikan nilai tambah yang membedakan SIPEKA dari pelayanan konvensional karena tidak hanya menangani pasien ketika sakit, tetapi juga memastikan pasien tetap memperoleh pendampingan setelah pulang dari rumah sakit. Dengan demikian, SIPEKA berkontribusi dalam menurunkan angka readmisi, meningkatkan kepatuhan terhadap terapi, memperkuat peran keluarga, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya rumah sakit, serta mendukung transformasi pelayanan kesehatan yang lebih berkualitas, berkelanjutan, dan berpusat pada pasien.

2. LAYANAN GLAUKOMA

Pada Bulan Desember 2025 Rumah sakit Mata membuka layanan baru yaitu Layanan Glaukoma, dimana penyakit Glaukoma merupakan salah satu penyebab utama kebutaan permanen di dunia yang sering berkembang tanpa gejala pada tahap awal. Menyadari pentingnya deteksi dan penanganan dini, Rumah Sakit Mata NTB menghadirkan layanan unggulan Glaukoma sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kualitas penglihatan masyarakat. Layanan glaukoma di dukung oleh dokter spesialis mata fellowship glaukoma serta tenaga kesehatan profesional yang terlatih. Rumah Sakit Mata NTB dilengkapi dengan teknologi diagnostik terkini, seperti pemeriksaan tekanan introkular, analisis saraf optik

dan pemeriksaan lapang pandang, sehingga diagnosis dapat ditegakkan secara akurat dan cepat.

Penatalaksanaan glaukoma dilakukan secara komprehensif dan individual, meliputi terapi obat – obatan, tindakan laser, hingga pembedahan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pasien. Seluruh proses pelayanan mengedepankan keselamatan, kenyamanan dan edukasi pasien agar dapat berperan aktif dalam pengendalian penyakit glaucoma secara jangka panjang. Dengan layanan yang terintegrasi, fasilitas modern, serta pendekatan berbasis evidence – based medicine, layanan unggulan glaucoma RS Mata NTB hadir sebagai pusat rujukan terpercaya dalam pencegahan kebutaan akibat glaucoma. Komitmen kami adalah menjaga penglihatan masyarakat agar tetap optimal sepanjang hayat.

3. RESPATI LINMAS

RESPATI LINMAS (Respon Cepat Tindakan Lindungi Masyarakat) merupakan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi informasi yang dikembangkan sebagai kanal pengaduan terpadu untuk mempercepat penanganan berbagai potensi gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, bencana, serta keadaan darurat yang mengancam keselamatan masyarakat. Inovasi ini hadir sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan masyarakat melalui sistem yang mampu menghubungkan masyarakat dengan petugas secara cepat, akurat, dan terintegrasi. RESPATI LINMAS menjadi media komunikasi dua arah yang memungkinkan masyarakat menyampaikan laporan kejadian secara langsung, sementara pemerintah dapat memberikan respons yang cepat, tepat, transparan, dan terukur sesuai dengan tingkat urgensi kejadian.

Pengembangan RESPATI LINMAS dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya berbagai kendala dalam penyampaian informasi kejadian di lapangan, seperti keterlambatan pelaporan, terbatasnya akses masyarakat terhadap kanal pengaduan, belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta belum tersedianya sistem pemantauan penanganan laporan secara terpadu. Kondisi tersebut menyebabkan proses penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum maupun kejadian darurat sering kali membutuhkan waktu lebih lama, sehingga berpotensi meningkatkan risiko kerugian materiil maupun korban jiwa. Di sisi lain, meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah diakses, dan transparan mendorong perlunya transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan perlindungan masyarakat.

Melalui RESPATI LINMAS, masyarakat dapat menyampaikan laporan mengenai berbagai kejadian, seperti gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, kebakaran, pohon tumbang, banjir, tanah longsor, kecelakaan, konflik sosial, bencana alam, maupun kondisi darurat lainnya yang memerlukan penanganan segera. Laporan dapat dilengkapi dengan informasi lokasi, foto, video, maupun keterangan pendukung sehingga petugas memperoleh gambaran kondisi di lapangan secara lebih akurat. Informasi tersebut kemudian diverifikasi oleh operator sebelum diteruskan kepada perangkat daerah atau instansi yang berwenang sesuai dengan jenis kejadian, sehingga proses koordinasi dan mobilisasi petugas dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran.

RESPATI LINMAS juga mengintegrasikan proses pelaporan, verifikasi, disposisi, penanganan, pemantauan, hingga penyelesaian laporan dalam satu sistem. Masyarakat dapat mengetahui perkembangan penanganan laporan secara transparan melalui status layanan yang diperbarui secara berkala. Di sisi lain, pemerintah memperoleh data kejadian secara real time yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan monitoring, evaluasi, pemetaan wilayah rawan, analisis tren kejadian, serta penyusunan kebijakan dan strategi mitigasi risiko yang lebih efektif. Selain sebagai kanal pengaduan, RESPATI LINMAS juga berfungsi sebagai instrumen penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), aparat keamanan, pemerintah desa dan kelurahan, organisasi kemasyarakatan, relawan, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut memungkinkan setiap laporan ditangani oleh pihak yang paling berwenang sesuai dengan tugas dan fungsinya, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pendekatan kolaboratif ini sekaligus memperkuat partisipasi masyarakat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban umum, dan keselamatan lingkungan.

Implementasi RESPATI LINMAS diharapkan mampu meningkatkan kecepatan respons pemerintah terhadap berbagai kejadian, memperpendek waktu penanganan, meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, serta membangun budaya masyarakat yang lebih peduli terhadap keamanan dan keselamatan lingkungan. Inovasi ini juga mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang responsif, adaptif, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi sebagai bagian dari transformasi digital pelayanan publik.

Ke depan, RESPATI LINMAS diharapkan berkembang menjadi pusat informasi dan manajemen respons darurat yang mampu mengintegrasikan berbagai jenis layanan perlindungan masyarakat dalam satu ekosistem digital. Dengan dukungan data yang akurat, sistem monitoring yang berkelanjutan, serta kolaborasi seluruh pemangku kepentingan, RESPATI LINMAS tidak hanya berfungsi sebagai media pengaduan masyarakat, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan daerah, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meminimalkan dampak berbagai kejadian darurat, dan mewujudkan lingkungan yang aman, tertib, tangguh, serta berorientasi pada keselamatan masyarakat.

4. ROSSI MANDALIKA (Digital)

ROSSI MANDALIKA (Rekonstitusi Obat Injeksi dan Oral Rumah Sakit Mandalika) merupakan inovasi pelayanan kesehatan berbasis digital yang dikembangkan untuk meningkatkan keselamatan pasien (patient safety), mutu pelayanan kefarmasian, serta standardisasi proses rekonstitusi obat di rumah sakit. Inovasi ini mengintegrasikan standar operasional prosedur (SOP), panduan rekonstitusi, informasi dosis dan pengenceran, kompatibilitas pelarut, stabilitas obat, waktu kedaluwarsa setelah rekonstitusi, hingga sistem pelabelan obat yang disesuaikan dengan waktu pemberian kepada pasien ke dalam satu platform digital yang mudah diakses oleh tenaga kefarmasian dan tenaga kesehatan.

Pengembangan ROSSI MANDALIKA dilatarbelakangi oleh tingginya kompleksitas proses rekonstitusi obat, khususnya obat injeksi dan obat oral tertentu yang memerlukan

pengenceran atau pencampuran sebelum diberikan kepada pasien. Selama ini, proses rekonstitusi masih banyak mengandalkan pencarian informasi secara manual melalui berbagai referensi, sehingga berpotensi menimbulkan variasi prosedur, perbedaan interpretasi, keterlambatan pelayanan, serta meningkatkan risiko medication error. Kesalahan dalam pemilihan pelarut, volume pengenceran, teknik pencampuran, waktu penggunaan, maupun pelabelan obat dapat berdampak terhadap efektivitas terapi, keselamatan pasien, dan mutu pelayanan rumah sakit.

Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, ROSSI MANDALIKA menghadirkan sistem digital yang mengintegrasikan seluruh informasi penting mengenai rekonstitusi obat dalam satu aplikasi. Melalui sistem ini, tenaga kefarmasian dapat memperoleh panduan yang lengkap dan terstandar mengenai jenis pelarut yang digunakan, volume pengenceran, teknik rekonstitusi, dosis yang tepat, stabilitas obat setelah rekonstitusi, waktu kedaluwarsa, cara penyimpanan, serta ketentuan pemberian obat kepada pasien. Sistem juga menghasilkan label obat secara otomatis yang memuat identitas pasien, nama obat, dosis, pelarut yang digunakan, waktu rekonstitusi, batas waktu penggunaan, jadwal pemberian, serta informasi penting lainnya sesuai standar pelayanan kefarmasian. Keunggulan utama ROSSI MANDALIKA terletak pada kemampuannya mengintegrasikan aspek klinis dan digital dalam satu sistem pelayanan. Informasi yang sebelumnya tersebar dalam berbagai buku referensi, pedoman, maupun dokumen cetak kini tersaji secara terpusat, sehingga mempercepat proses kerja, mengurangi potensi kesalahan manusia (human error), serta memastikan seluruh tenaga kesehatan menggunakan standar prosedur yang sama. Dengan demikian, kualitas pelayanan menjadi lebih konsisten, akurat, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain meningkatkan keselamatan pasien, ROSSI MANDALIKA juga memperkuat tata kelola pelayanan kefarmasian melalui penerapan praktik berbasis bukti (evidence-based practice) dan standardisasi proses kerja. Sistem ini mendukung tenaga kefarmasian dalam mengambil keputusan klinis secara cepat dan tepat, sekaligus meningkatkan kolaborasi dengan dokter dan perawat dalam proses pemberian terapi obat. Standardisasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan mutu pelayanan, pengurangan variasi praktik antarpetugas, serta terciptanya budaya keselamatan pasien di lingkungan rumah sakit. Dari aspek manajemen, ROSSI MANDALIKA menyediakan data yang terdokumentasi secara sistematis mengenai proses rekonstitusi obat, sehingga memudahkan kegiatan monitoring, evaluasi, audit internal, pelaporan insiden keselamatan pasien, serta pengendalian mutu pelayanan kefarmasian. Data tersebut juga menjadi sumber informasi yang penting dalam penyusunan kebijakan, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan, serta pengembangan pelayanan farmasi klinis berbasis teknologi informasi.

Implementasi ROSSI MANDALIKA memberikan berbagai manfaat strategis bagi rumah sakit, di antaranya menurunkan angka medication error, mempercepat waktu pelayanan farmasi, meningkatkan efisiensi proses kerja, memperkuat kepatuhan terhadap standar operasional prosedur, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kualitas pelayanan rumah sakit. Inovasi ini juga mendukung pemenuhan standar nasional maupun internasional terkait keselamatan pasien, manajemen penggunaan obat, serta

mutu pelayanan kesehatan, sehingga menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung proses akreditasi rumah sakit.

Sebagai inovasi yang menggabungkan digitalisasi pelayanan, standardisasi klinis, dan peningkatan keselamatan pasien, ROSSI MANDALIKA memiliki potensi besar untuk direplikasi oleh rumah sakit lain di Indonesia. Konsep integrasi SOP, panduan klinis, sistem pelabelan otomatis, serta dokumentasi digital dapat diadaptasi sesuai kebutuhan masing-masing rumah sakit tanpa mengubah prinsip dasar pelayanan kefarmasian yang aman, efektif, dan berorientasi pada pasien. Dengan demikian, ROSSI MANDALIKA tidak hanya menjadi solusi bagi peningkatan mutu pelayanan di Rumah Sakit Mandalika, tetapi juga menjadi model praktik terbaik (best practice) dalam transformasi digital pelayanan farmasi klinis yang mendukung terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, aman, efisien, dan berkelanjutan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah merupakan landasan penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan yang efektif dan berkelanjutan. Kerangka ini menyajikan gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian daerah, termasuk pertumbuhan ekonomi, inflasi, ketenagakerjaan, serta sektor-sektor unggulan yang menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi. Di sisi lain, kerangka keuangan daerah menggambarkan kapasitas fiskal pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan, melalui analisis terhadap pendapatan asli daerah, dana transfer, belanja daerah, serta potensi pembiayaan lainnya. Keterpaduan antara analisis ekonomi dan kapasitas keuangan ini menjadi dasar bagi perumusan kebijakan pembangunan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta realistis dalam aspek pendanaannya.

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

3.1.1 Kondisi dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi perekonomian daerah dapat dilihat dari indikator-indikator makro seperti Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE), inflasi, ketenagakerjaan, ketimpangan pendapatan, tingkat kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Indek Modal Manusia (IMM). Pada tahun 2024 perekonomian NTB tumbuh sebesar 5,30% melampaui target yang ditetapkan yakni 5%, sementara itu pada triwulan III tahun 2025 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 2,82% dimana pada triwulan I dan II mengalami kontraksi salah satunya diakibatkan dari penurunan ekspor pertambangan.

Perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan kinerja yang cukup positif, hal ini mencerminkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dalam jangka pendek. Pertumbuhan ini terutama didorong oleh kinerja sektor-sektor produktif yang mengalami lonjakan signifikan, khususnya Lapangan Usaha Industri Pengolahan yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 40,71 persen.

Secara tahunan, pertumbuhan ekonomi NTB menunjukkan bahwa perekonomian daerah tetap berada pada jalur ekspansi meskipun dengan laju yang relatif moderat. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Industri Pengolahan kembali menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 66,65 persen. Kinerja tersebut mengindikasikan semakin kuatnya peran sektor industri dalam struktur ekonomi daerah, yang diduga dipengaruhi oleh proses hilirisasi, peningkatan kapasitas produksi, serta membaiknya kinerja ekspor komoditas unggulan. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 5,89 persen, mencerminkan masih signifikannya peran belanja pemerintah dalam menjaga stabilitas dan menggerakkan aktivitas ekonomi daerah melalui pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, serta berbagai program sosial dan ekonomi.

Secara keseluruhan, pola pertumbuhan ekonomi NTB pada Triwulan III Tahun 2025 memperlihatkan adanya dorongan kuat dari sektor industri dan aktivitas ekspor dalam jangka pendek, serta dukungan belanja pemerintah dalam menjaga kesinambungan pertumbuhan secara tahunan. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan sektor

industri pengolahan sebagai motor utama perekonomian daerah ke depan, yang perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas infrastruktur, konektivitas logistik, ketersediaan energi, serta pengembangan sumber daya manusia. Di sisi lain, untuk menjaga keberlanjutan pertumbuhan, diperlukan pula upaya diversifikasi basis ekonomi dan penguatan sektor-sektor lain, termasuk UMKM dan pasar domestik, agar perekonomian NTB menjadi semakin tangguh dan inklusif.

Kondisi perekonomian daerah digambarkan melalui kinerja indikator ekonomi dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 1 Realisasi dan Target Pembangunan Daerah Tahun 2024-2027

Indikator	Nasional					NTB				
	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026	Target 2027	Target Nasional untuk NTB Tahun 2027	Realisasi 2024	Realisasi 2025	Target 2026	Target RPJMD 2027	Target RKPD 2027
Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,03	5,11	5,4	5,9 - 7,5	4,4 - 5,7	5,3	2,82	6,9	7,7	4,8 - 5,7
Tingkat Inflasi	1,57	2,92	2,5	2,5		1,28	3,01	2,60-3,61	2,20-3,52	2,20-3,52
Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,91	4,85	4,44 - 4,96	4,30 - 4,87	2,00 - 2,69	2,73	3,06	2,10-2,74	2,00-2,69	2,00-2,69
Rasio Gini (Indeks)	0,381	0,363	0,377 - 0,380	0,362 - 0,367	0,351 - 0,353	0,364	0,369	0,358-0,362	0,347-0,351	0,351 - 0,353
Tingkat Kemiskinan (%)	8,57	8,25	6,5 - 7,5	6,0 - 6,5	9,64 - 10,64	11,91	11,78	10,79-11,41	9,9-10,65	9,9-10,80
Indeks Modal Manusia (IMM)/IPM	0,54	0,56	0,57	0,575	0,563 - 0,57	73,1	73,97	0,568	0,576	0,58

Sumber : RPJMD 2025-2029, BPS NTB 2026, RKP 2027

Berdasarkan perbandingan indikator makro pembangunan, target RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 secara umum telah selaras dengan target nasional dan target RPJMD. Pada indikator pertumbuhan ekonomi, NTB menargetkan pertumbuhan sebesar 4,8–5,7 persen, sejalan dengan target nasional untuk NTB sebesar 4,4–5,7 persen. Tingkat inflasi ditargetkan berada pada kisaran 2,20–3,52 persen, mendekati sasaran nasional sebesar 2,5 persen. Untuk tingkat pengangguran terbuka, NTB menargetkan penurunan hingga 2,00–2,69 persen dari realisasi 2025 sebesar 3,06 persen, menunjukkan komitmen kuat dalam penciptaan lapangan kerja. Demikian pula, target rasio gini sebesar 0,351–0,353 telah sesuai dengan target nasional untuk NTB, yang menunjukkan upaya pemerintah daerah dalam mengurangi ketimpangan pendapatan.

Pada indikator kemiskinan, NTB masih menghadapi tantangan cukup besar. Realisasi tingkat kemiskinan tahun 2025 sebesar 11,78 persen masih berada di atas target nasional untuk NTB pada tahun 2027 sebesar 9,64–10,64 persen. Meski demikian, target RKPD 2027 telah ditetapkan pada kisaran 9,9–10,80 persen, yang menunjukkan arah kebijakan yang konsisten untuk mempercepat penurunan kemiskinan melalui penguatan perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan peningkatan akses terhadap layanan dasar. Sementara itu, pada indikator Indeks Modal Manusia (IMM/IPM), target RKPD 2027 sebesar 0,58 berada di atas target nasional untuk NTB sebesar 0,563–0,570, mencerminkan

komitmen daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2027 mengarahkan kebijakan ekonomi pada upaya menjaga stabilitas dan memperkuat fondasi pertumbuhan jangka menengah dan panjang. Pengendalian inflasi dan stabilisasi harga dilakukan melalui penguatan ketahanan pangan daerah, peningkatan cadangan pangan pemerintah, perbaikan efisiensi distribusi antarwilayah, modernisasi pasar rakyat, serta penguatan koordinasi melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah. Sejalan dengan itu, perluasan kesempatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran didorong melalui program padat karya produktif, penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, peningkatan sertifikasi kompetensi tenaga kerja, serta pengembangan program magang dan kemitraan dengan sektor swasta. Penguatan UMKM juga menjadi prioritas melalui pendampingan usaha, perluasan akses pembiayaan, serta digitalisasi rantai pemasaran guna mendorong peningkatan produktivitas dan daya saing pelaku usaha lokal, sekaligus memperluas basis pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Selain itu, percepatan pengurangan kemiskinan dan penurunan ketimpangan antarwilayah ditempuh melalui integrasi program perlindungan sosial dengan pemberdayaan ekonomi rumah tangga miskin serta peningkatan akses terhadap layanan dasar, khususnya pendidikan, kesehatan, air minum, dan sanitasi di wilayah kurang berkembang. Peningkatan kualitas sumber daya manusia ditempatkan sebagai pilar utama pembangunan melalui perbaikan mutu pendidikan, pemerataan layanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta penguatan literasi dan keterampilan berbasis ekonomi digital. Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan kebijakan, pemerintah daerah juga menekankan peningkatan kualitas belanja, penguatan koordinasi lintas perangkat daerah, serta optimalisasi berbagai sumber pendanaan melalui APBD, dukungan pemerintah pusat, skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha, dan pembiayaan inovatif lainnya, sehingga sejalan dengan arah RPJMD dan prioritas pembangunan nasional dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah

Struktur perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat hingga tahun 2025 masih didominasi sektor-sektor hulu, khususnya pertanian dan pertambangan, yang meskipun menjadi penopang utama PDRB dan ekspor, belum sepenuhnya menghasilkan efek pengganda yang luas terhadap kesejahteraan masyarakat. Ketergantungan pada pertambangan yang padat modal menyebabkan distribusi manfaat ekonomi relatif terbatas, tercermin dari pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang masih berada di bawah rata-rata nasional. Kondisi ini menjadi tantangan utama bagi NTB dalam mendorong pertumbuhan yang lebih inklusif, sekaligus memperlihatkan adanya kesenjangan struktur ekonomi dibandingkan dengan tingkat nasional yang lebih terkonsolidasi pada sektor industri pengolahan dan perdagangan yang bernilai tambah tinggi.

Di sisi lain, NTB memiliki prospek besar untuk melakukan transformasi struktural melalui penguatan sektor hilir berbasis sumber daya lokal, terutama pengembangan

industri pengolahan hasil pertanian dan diversifikasi ekspor non-tambang. Upaya ini berpotensi meningkatkan nilai tambah, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta memperkuat daya beli masyarakat. Namun, transformasi tersebut perlu diiringi dengan percepatan pembangunan wilayah yang terintegrasi, optimalisasi pemanfaatan infrastruktur, serta kebijakan yang menargetkan penurunan disparitas sosial ekonomi dan peningkatan PDRB per kapita, sehingga pertumbuhan ekonomi NTB ke depan tidak hanya lebih tinggi secara agregat, tetapi juga semakin merata dan berkelanjutan.

Secara umum tantangan perekonomian yang dihadapi NTB pada tahun 2027 meliputi :

- Ketergantungan pada ekspor tambang dan siklus produksi
- Perlu percepatan hilirisasi sektor primer
- Produktivitas pertanian dan ketahanan pangan
- Infrastruktur dan aksesibilitas regional
- Kesenjangan digital dan SDM
- Efisiensi anggaran dan realisasi belanja pemerintah
- Kemiskinan dan distribusi kemakmuran
- Risiko global dan geopolitik

Tantangan berdasarkan sektoral secara umum adalah sebagai berikut :

1. Pertanian
   - Produktivitas masih relatif rendah untuk komoditas bernilai tambah tinggi.
   - Ketergantungan pada produksi primer tanpa hilirisasi mengurangi potensi nilai tambah daerah.
   - Keterbatasan akses teknologi, pembiayaan, dan mekanisasi pertanian.
   - Tantangan dalam pengendalian risiko iklim dan hama.
2. Pertambangan
   - Ketergantungan pada komoditas tambang yang padat modal namun kurang menyerap tenaga kerja lokal.
   - Risiko volatilitas harga komoditas global yang bisa mempengaruhi kinerja ekspor dan pendapatan daerah.
   - Keterbatasan integrasi industri pengolahan hasil tambang di dalam daerah.
3. Industri Pengolahan
   - Struktur industri hilir masih belum cukup kuat untuk mendukung transformasi nilai tambah.
   - Keterbatasan investasi pada industri berbasis sumber daya lokal.
   - Tantangan dalam peningkatan kapasitas teknologi dan sertifikasi mutu produk.
4. Perdagangan, Jasa, dan Pariwisata
   - Perlunya peningkatan kesiapan SDM untuk memenuhi standar industri jasa dan pariwisata.
   - Ketidakmerataan infrastruktur pendukung pariwisata di seluruh wilayah NTB.
   - Pemulihan pascapandemi masih berjalan lambat pada sub-sektor tertentu.
5. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
   - Akses pembiayaan formal yang masih terbatas.

- Tantangan dalam digitalisasi pemasaran dan integrasi ke rantai nilai regional/nasional.
- Keterbatasan kemampuan produksi massal/berskala untuk pasar nasional.

6. Tenaga Kerja dan SDM
   - Kesenjangan keterampilan antara kebutuhan industri hilir dengan kompetensi tenaga kerja lokal.
   - Tingkat sertifikasi kompetensi yang masih rendah.
   - Mobilitas tenaga kerja terhambat oleh akses pendidikan dan pelatihan yang belum merata.
7. Infrastruktur Ekonomi
   - Ketidakseimbangan antara infrastruktur di pusat kota dan wilayah pinggiran/perdesaan.
   - Konektivitas logistik antarwilayah yang belum optimal untuk mendukung rantai pasok.
   - Ketersediaan energi dan jaringan digital yang perlu diperluas.

Pada tahun 2025, perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Barat menunjukkan proses pemulihan yang semakin stabil setelah mengalami fluktuasi dalam lima tahun terakhir, meskipun masih dipengaruhi secara signifikan oleh kinerja sektor pertambangan. Namun, pertumbuhan ekonomi yang tetap positif ketika sektor tambang dikeluarkan mengindikasikan semakin menguatnya peran sektor non-tambang sebagai penopang ekonomi yang lebih merata dan berkelanjutan. Tren pertumbuhan pada sebagian besar dari 17 lapangan usaha, khususnya sektor pertanian, mencerminkan mulai pulihnya produksi pangan pasca tekanan cuaca ekstrem pada 2023. Di sisi lain, perlambatan pada sektor jasa keuangan dan asuransi serta kontraksi jangka pendek sektor pertambangan akibat fluktuasi produksi dan harga komoditas menegaskan masih adanya kerentanan struktural yang perlu diantisipasi dalam perencanaan jangka menengah.

Kondisi tersebut mengarah pada kebutuhan strategis dalam perencanaan pembangunan menuju 2027 untuk memasuki fase pemantapan dan konsolidasi ekonomi melalui penguatan sektor-sektor non-tambang, seperti pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan pariwisata. Upaya ini perlu disertai dengan percepatan hilirisasi, penguatan kapasitas UMKM, serta peningkatan nilai tambah berbasis inovasi lokal guna mengurangi ketergantungan pada sektor ekstraktif. Di samping itu, penguatan daya beli masyarakat menjadi agenda penting mengingat pertumbuhan konsumsi rumah tangga masih berada di bawah rata-rata nasional, sehingga optimalisasi perlindungan sosial, layanan dasar, dan stimulus ekonomi lokal perlu terus diperkuat. Dengan demikian, tahun 2026 diposisikan sebagai momentum akselerasi transformasi ekonomi NTB menuju struktur yang lebih inklusif, resilien terhadap guncangan eksternal, dan berorientasi pada penciptaan nilai tambah yang lebih tinggi.

Dengan melihat kontribusi masing-masing sktor pembentuk dan tantangan kedepan Provinsi Nusa Tenggara Barat, maka proyeksi kinerja ekonomi tahun 2027 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 2 Proyeksi Laju Pertumbuhan Ekonomi Berdasarkan Lapangan Usaha Tahun 2026 dan 2027

No	Lapangan Usaha	Realisasi Laju Pertumbuhan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010					Proyeksi Laju Pertumbuhan ADHK 2010	
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	1,14	2,19	2,05	1,54	5,03	4,53	5,24
2	Pertambangan dan Penggalian	-0,15	22,62	-10,39	11,66	-20,05	-14,49	-19,57
3	Industri Pengolahan	2,1	1,98	2,51	4,19	76,37	62,66	77,73
4	Pengadaan Listrik dan Gas	7,73	9,46	1,85	9,08	5,44	5,22	4,73
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,49	3,33	5,04	0,77	3,90	3,98	4,41
6	Konstruksi	8,94	-1,89	10,87	2,93	3,32	2,91	2,27
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1,72	4,95	6,94	5,87	6,15	8,06	9,04
8	Transportasi dan Pergudangan	2,14	16,89	8,14	4,21	3,45	3,95	2,94
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,35	24,68	8,97	8,37	7,42	8,91	8,49
10	Informasi dan Komunikasi	4,98	3,12	4,88	4,34	3,02	3,26	2,99
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,39	0,4	-1,2	5,72	9,02	8,04	9,5
12	Real Estate	1,47	4,11	4,4	4,02	3,73	4,88	5,32
13	Jasa Perusahaan	0,33	8,39	7,4	5,24	4,02	6,35	6,77
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,74	2,29	0,55	6,56	3,59	5,34	6,13
15	Jasa Pendidikan	1,67	3,13	5,12	3,46	2,10	3,45	3,57
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	7,87	2,47	6,03	6,19	2,38	2,81	2,08
17	Jasa Lainnya	1,65	10,54	6,5	4,81	4,55	5,63	5,64

Sumber : BPS NTB, 2026, Data Analisa Bappeda NTB, 2026

Untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian, diperlukan strategi Pembangunan yang fokus pada pertumbuhan sektor hilir guna meningkatkan nilai tambah dari prdoduk di sektor hulu (pertanian dan perikanan) sekaligus memerkuat posisi NTB sebagai lumbung pangan nasional. Dari sisi *supply*, hilirisasi sektor pertanian akan meningkatkan pertumbuhan baik sektor tersebut maupun di sektor terkait (perdagangan dan industri pengolahan) Adapun dari sisi demand, hilirisasi komoditas pertanian akan membuka lapangan pekerjaan baru (sektor riil) dan mendorong pertumbuhan konsumsi RT dan ekspor non-tambang (neraca pembayaran). Di sisi lain, sektor pariwisata memiliki potensi besar yang masih perlu dikembangkan, khususnya untuk diversifikasi sumber pertumbuhan ekonomi dan mewujudkan NTB Makmur Mendunia melalui Pariwisata Berkualitas, Kemandirian Pangan dan Penanggulangan Kemiskinan. Keseluruhan strategi di atas sejalan dengan tema Pembangunan Nasional untuk NTB sebagai “pusat pariwisata petualangan dan lumbung pangan”. Secara parallel, peningkatan kualitas SDM melalui perbaikan Pendidikan dan Kesehatan menjadi fondasi utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata.

Beberapa strategi yang dilakukan untuk menjaga perekonomian daerah tahun 2027 tetap positif bahkan meningkat, serta mampu memulihkan ekonomi masyarakat antara lain:

1. Penguatan Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah dengan mengidentifikasi dan fokus pada potensi melalui analisa sektor unggulan seperti pariwisata, agromaritim, ekonomi kreatif dan industri pengolahan serta menetapkan lokasi prioritas yang mampu menyerap tenaga kerja dan menarik investasi.
2. Melakukan reformasi regulasi daerah dengan menyederhanakan izin usaha dan penerapan kebijakan insentif berbasis kinerja
3. Memfasilitasi UMKM melalui bantuan modal, pelatihan digital marketing, pendampingan manajemen usaha serta pengintegrasian data UMKM ke ekosistem e-commerce dan supply chain modern
4. Peningkatan daya beli masyarakat melalui optimalisasi bantuan sosial tepat sasaran dan pemberian pelatihan vokasi terintegrasi dengan akses kerja atau inkubasi usaha
5. Memperluas jaringan broadband sebagai bagian dari transformasi Digital di daerah pinggiran
6. Melakukan investasi di bidang infrastruktur produktif melalui perbaikan akses transportasi untuk konektifitas dan mempertahankan proyek-proyek padat karya
7. Membangun infrastruktur pendukung ekonomi melalui pembangunan pasar modern, fasilitas cold storage untuk sektor maritim atau pangan
8. Pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berbasis kebutuhan industri, sinkronisasi kurikulum vokasi dengan program unggulan serta fasilitasi magang industri untuk mempercepat penyerapan kerja. Selain itu melakukan peningkatan keterampilan baru melalui pelatihan-pelatiihan seperti pelatihan digital, kewirausahaan, manajemen keuangan dan soft skills
9. Pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan melalui program Desa Berdaya dengan skema pembiayaan inklusif
10. Melakukan investasi ekonomi hijau melalui energi terbarukan, ekonomi sirkular dan pertanian berkelanjutan
11. Pengelolaan keuangan yang berketahanan ekonomi pada perencanaan dan penganggaran daerah yang solid melalui efektifitas anggaran sesuai prioritas pembangunan yang produktif, dan mitigasi eksternal (inflasi dan bencana)
12. Melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan ekonomi makro seperti pertumbuhan PDRB, penyerapan tenaga kerja, UMKM
13. Membangun kemitraan dan kolaborasi antara pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk kerjasama dengan kampus untuk riset dan inovasi. Selain itu melakukan pendekatan untuk kolaborasi dengan lembaga-lembaga pembangunan seperti ADB, World Bank dan lainnya untuk rencana proyek-proyek strategis.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Kebijakan Keuangan Daerah mencakup seluruh proses pengelolaan keuangan yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan,

pertanggungjawaban, hingga pengawasan. Proses ini diatur secara normatif dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menekankan pentingnya pengelolaan keuangan secara efektif, efisien, transparan, tertib, dan akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Inti dari kebijakan ini mencakup pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah agar benar-benar berorientasi pada kemanfaatan publik.

Sebagai instrumen utama dalam mendukung pembangunan, pengelolaan keuangan daerah menerapkan prinsip money follow program, yaitu pendekatan pembiayaan yang diarahkan pada program-program prioritas sesuai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Pendekatan ini menuntut adanya keterpaduan antara kebijakan fiskal dengan perencanaan pembangunan. Dengan demikian, analisis terhadap kondisi dan proyeksi keuangan daerah menjadi hal yang sangat krusial. Hal ini bertujuan untuk mengukur kapasitas fiskal daerah dalam membiayai rencana pembangunan sekaligus memastikan bahwa perhatian terhadap isu-isu strategis dan permasalahan utama dapat direspon secara tepat melalui alokasi sumber daya yang optimal.

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah yang dihitung berdasarkan formula tertentu (pendapatan dikurangi pengurang tertentu) untuk memetakan tingkat kemandirian fiskal. Rasio ini digunakan untuk menentukan klasifikasi daerah (rendah hingga tinggi) dalam rangka pengalokasian transfer pusat, hibah, dan utang daerah. Berdasarkan hasil penghitungan rasio Kapasitas Fiskal Daerah provinsi dikelompokkan dalam kategori Kapasitas Fiskal Daerah sebagai berikut:

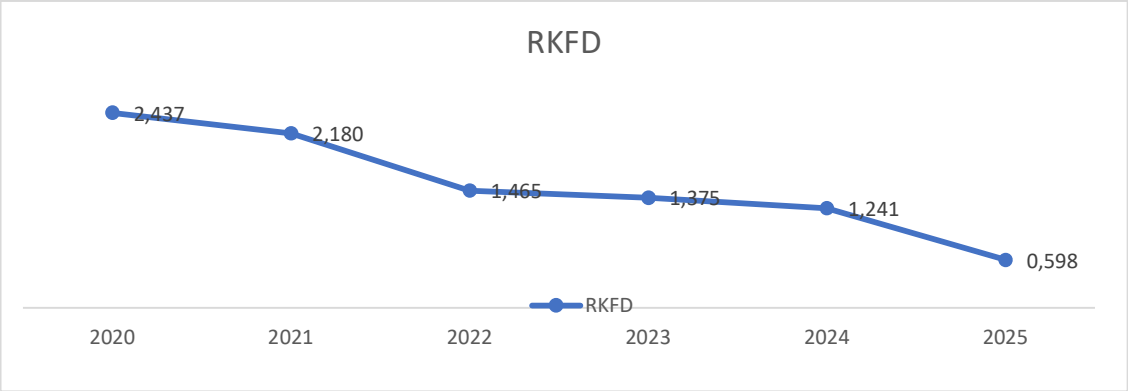
Tabel 3. 3 Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD)

Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
RKFD < 1,119	Sangat Rendah
1,119 ≤ RKFD < 1,656	Rendah
1,656 ≤ RKFD < 2,193	Sedang
2,193 ≤ RKFD < 2,730	Tinggi
2,730 ≤ RKFD	Sangat Tinggi

Sumber : Kementerian Keuangan

Selama periode tahun 2020-2025 RKFD provinsi NTB cenderung mengalami penurunan dengan kategorinya adalah rendah. Hal ini menunjukan bahwa provinsi NTB belum dapat secara mandiri untuk membiayai kegiatan pemerintahan atau masih bergantung pada dana transfer pusat dan masih tingginya belanja dan kebutuhan untuk pembiayaan berupa penyelesaian pinjaman daerah. Perkembangan RKFD Provinsi NTB pada tahun 2020 sampai dengan 2025 adalah sebagai berikut.

Grafik 3. 1 Perkembangan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB



Sumber : PMK Tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah 2020-2025, diolah

Perhitungan RKFD Provinsi dihitung dan dikeluarkan secara resmi melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK). Secara umum Kapasitas Fiskal Daerah Provinsi NTB masih dalam kategori Rendah berdasarkan rentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah. RKFD tahun 2025 sebesar 0,598 lebih rendah dibandingkan tahun 2024 namun masih dalam kategori Rendah, hal ini disebabkan adanya rumus perhitungan baru untuk tahun 2025 berdasarkan PMK 97/2025. Berkaitan dengan kemampuan keuangan daerah yang terbatas maka Pemerintah Provinsi NTB harus berupaya meningkatkan penerimaan pendapatan khususnya pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat semakin mandiri dalam membiayai pelaksanaan pembangunannya.

Keuangan daerah yang meliputi penerimaan atau pendapatan daerah, pengeluaran daerah atau belanja daerah dan pembiayaan daerah. Kebijakan terhadap keuangan daerah adalah pengelolaan dengan menganut azas tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

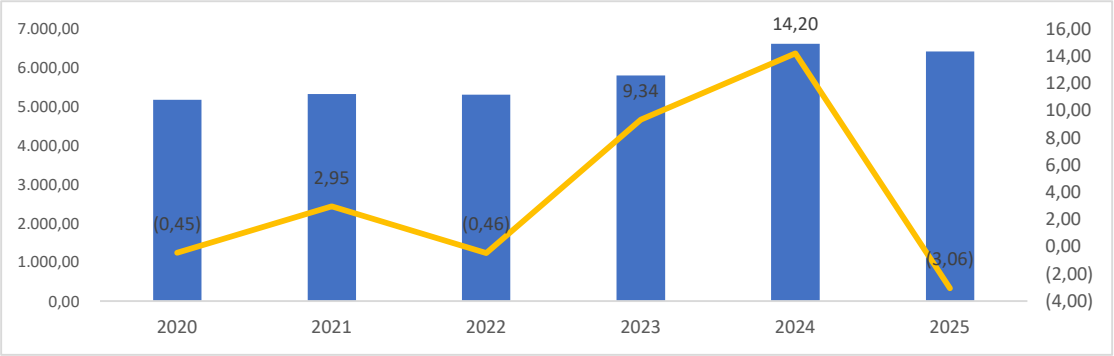
3.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan kemandirian fiskal melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan memperkuat intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pajak dan retribusi daerah, pemutakhiran basis data wajib pajak, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemungutan, peningkatan kinerja BUMD, serta optimalisasi pengelolaan aset daerah. Di samping itu, pemerintah daerah terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dalam rangka peningkatan pendapatan transfer, khususnya melalui sinkronisasi program prioritas daerah dengan kebijakan nasional dan pemenuhan persyaratan teknis Dana Alokasi Khusus. Diversifikasi sumber pendapatan juga dilakukan melalui kerja sama pemanfaatan aset daerah, pengembangan sektor unggulan daerah, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif.

Selama kurun waktu Tahun 2020–2025, realisasi pendapatan daerah mengalami cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 4,60 persen, pendapatan daerah pada tahun 2025 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2024 sebesar 6,58 persen sebagai dampak dari efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Rata-rata Pendapatan

Daerah adalah sebesar 5,77 triliun lebih dengan pendapatan tertinggi mencapai 6,62 triliun lebih pada tahun 2024.

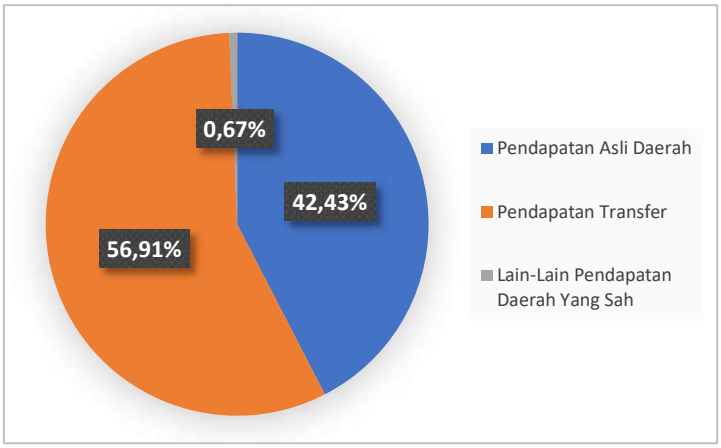
Grafik 3. 2 Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2020-2025



Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2025, diolah

Pendapatan Provinsi Nusa Tenggara Barat mayoritas disumbang oleh Pendapatan Transfer dengan kontribusi rata-rata mencapai 53,87 persen. Pajak Daerah merupakan kontributor terbesar bagi PAD dengan kontribusi rata-rata sebesar 69,93 persen selama periode tahun 2020-2025 dengan nilai realisasi pajak tertinggi terdapat pada tahun 2024 yang mencapai 2,04 triliun lebih. Sementara itu pada tahun 2025 nilai Pajak Daerah mengalami penurunan cukup besar yang mencapai 15,49 persen.

Grafik 3. 3 Rata-rata Pertumbuhan Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020-2025

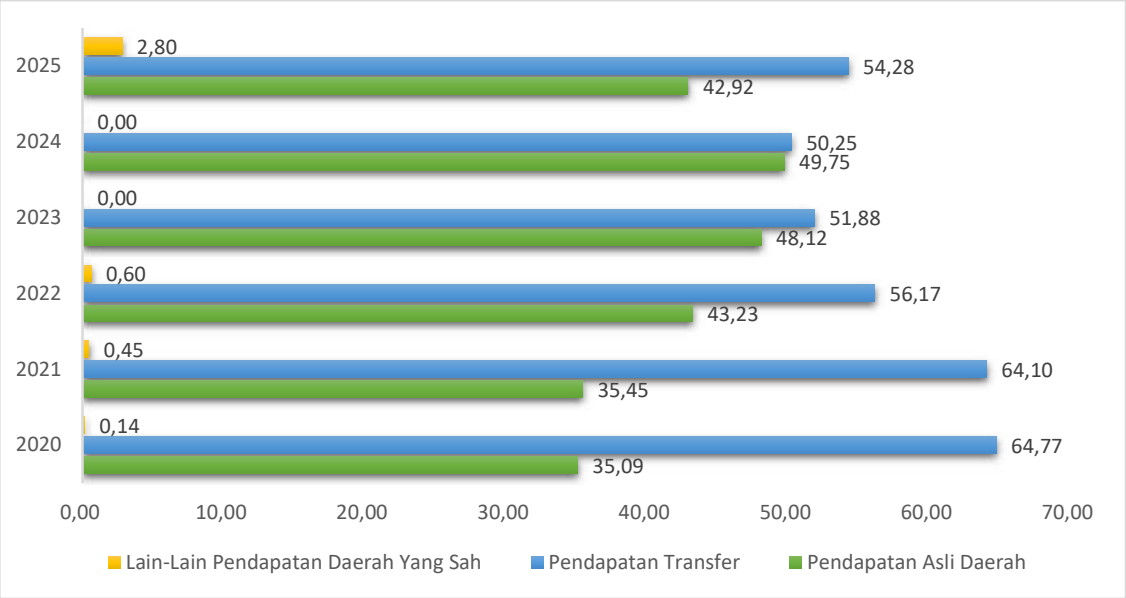


Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2025, diolah

Pendapatan transfer merupakan komponen terbesar yang berkontribusi pada pendapatan daerah selama periode Tahun 2020-2025 yang mencapai 56,91 persen. Nilai transfer tertinggi terdapat pada tahun 2025 yang mencapai 3,484 triliun lebih, mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 4,72 persen. Meskipun terdapat penurunan untuk pendapatan transfer berdasarkan kebijakan efisiensi oleh pemerintah pusat secara rata-rata realisasi pendapatan transfer mengalami peningkatan, demikian halnya dengan komponen PAD rata-rata kontribusinya terhadap Pendapatan

Daerah mencapai 42,43 persen dengan realisasi tertinggi tercatat pada tahun 2024 yakni sebesar 3,29 triliun lebih.

Grafik 3. 4 Proporsi Realisasi Komponen Pendapatan Daerah Tahun 2020-2025



Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2025, diolah

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Komponen Pendapatan Transfer merupakan yang dominan, hal ini menunjukan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap Pusat dalam pengelolaan pendapatan. Selama periode 2020-2025 komponen Pendapatan Transfer mengalami kecenderungan menurun setiap tahunnya, proporsi tertinggi mencapai 64,77 persen, namun demikian pada tahun 2025 proporsinya meningkat dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 4,03 persen.

Sementara itu untuk komponen PAD, selama tahun 2020-2025 proporsinya mengalami peningkatan dimana proporsi tertinggi ada pada tahun 2024 yang mencapai 49,75 persen, namun pada tahun 2025 proporsinya menurun sebesar 6,3 persen. Untuk komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan komponen terkecil, namun pada tahun 2025 proporsinya meningkat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya mencapai 2,80 persen yang bersumber dari Bagi Hasil atau Rryalti PT Amman Nusantara.

3.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

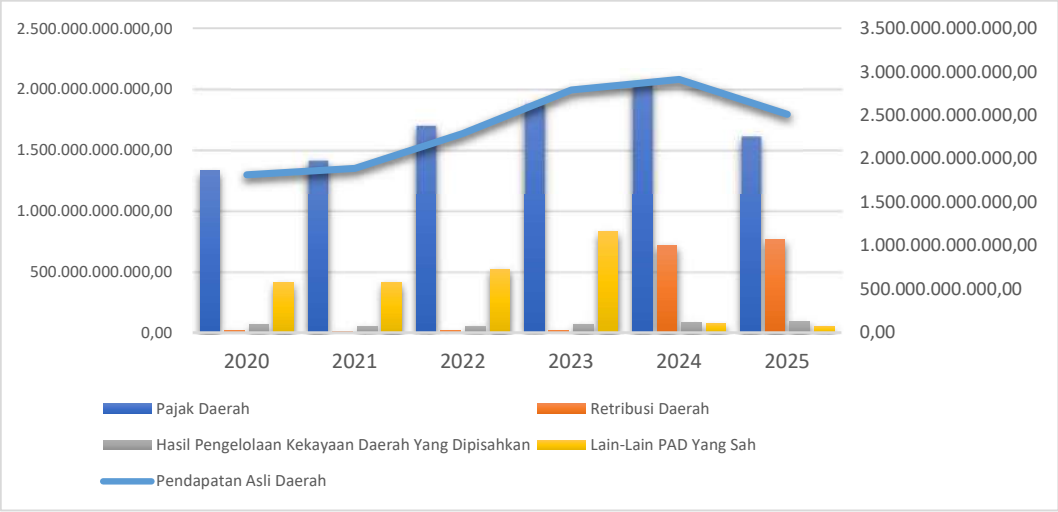
Berdasarkan data tahun 2020–2025, Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren meningkat hingga tahun 2024 sebelum mengalami koreksi pada tahun 2025. Pada 2020 PAD tercatat sebesar sekitar Rp1,82 triliun dan meningkat bertahap menjadi Rp1,89 triliun pada 2021, kemudian melonjak cukup signifikan pada 2022 menjadi Rp2,29 triliun dan kembali naik pada 2023 hingga Rp2,79 triliun. Puncak PAD terjadi pada 2024 sebesar Rp2,91 triliun, sebelum turun pada 2025 menjadi sekitar Rp2,76 triliun. Pola ini

menggambarkan pemulihan dan penguatan kapasitas fiskal daerah pascapandemi, meskipun masih terdapat volatilitas pada tahun terakhir.

Komponen Pajak Daerah sebagai penyumbang utama PAD sempat turun pada 2020, lalu meningkat konsisten dari 2021 hingga 2024, mencerminkan membaiknya aktivitas ekonomi dan efektivitas pemungutan. Namun pada 2025 terjadi penurunan dibandingkan 2024, yang mengindikasikan perlunya penguatan kembali basis pajak dan intensifikasi pengawasan. Sementara itu, Retribusi Daerah mengalami fluktuasi tajam: relatif rendah pada 2020–2023, kemudian melonjak sangat signifikan pada 2024 dan kembali meningkat pada 2025, yang menunjukkan adanya perluasan objek retribusi atau perubahan kebijakan pemungutan yang berdampak besar terhadap penerimaan.

Untuk komponen Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, terlihat tren kenaikan relatif stabil sejak 2022 hingga 2025 setelah sempat melemah pada 2021, mencerminkan membaiknya kinerja BUMD atau investasi daerah. Adapun Lain-lain PAD yang Sah meningkat kuat sampai 2023, namun mengalami penurunan drastis pada 2024 dan hanya sedikit pulih pada 2025, sehingga berkontribusi pada melambatnya pertumbuhan PAD di akhir periode. Secara keseluruhan, dinamika ini menunjukkan bahwa meskipun PAD daerah tumbuh cukup kuat dalam jangka menengah, struktur penerimaannya masih rentan terhadap perubahan kebijakan dan kinerja pada beberapa pos tertentu.

Grafik 3. 5 Realisasi PAD dan Komponennya Tahun 2020 - 2025



Sumber : LRA NTB, 2025 diolah

Dengan diterapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) diproyeksikan akan menyebabkan penurunan pajak daerah sebesar 20,70% yang disebabkan oleh penurunan PKB sebesar 40,64%, penurunan BBNKB 37,57% dan penurunan pajak rokok sebesar 10,05%. Oleh karenanya Pemerintah Provinsi NTB perlu melakukan upaya-upaya peningkatan penerimaan yang berasal dari pajak, baik melalui ektensifikasi dan intensifikasi serta menggali sumber-sumber penerimaan bukan pajak.

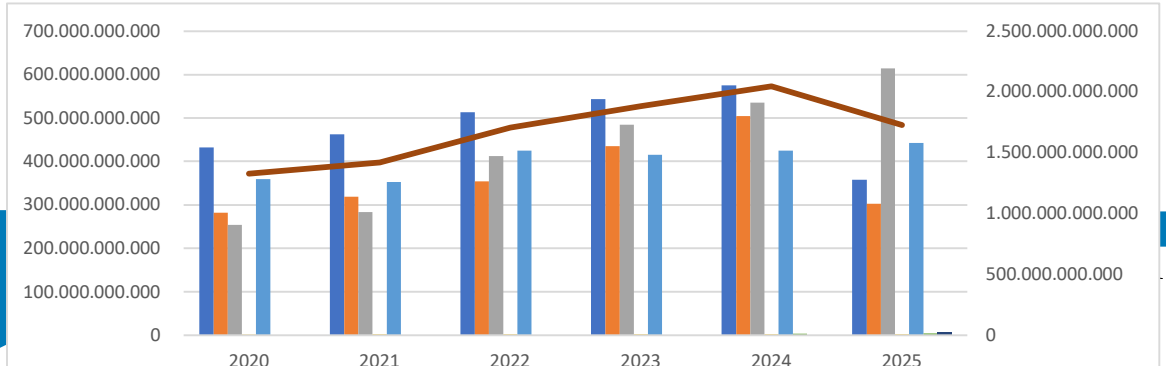
a. Pajak Daerah

Sumber penerimaan terbesar PAD Provinsi NTB berasal dari pajak daerah yang meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok, sementara untuk tahun 2024 dan 2025 terdapat tambahan komponen yang berkontribusi yakni Pajak Alat Berat dan Opsen MBLB. Pendapatan dari sektor pajak daerah menunjukkan tren positif selama periode 2020 hingga 2025. Peningkatan signifikan terjadi pada beberapa jenis pajak utama, yang mencerminkan kinerja optimal dalam pemungutan pajak sekaligus pertumbuhan aktivitas ekonomi di daerah sejalan dengan membaiknya aktivitas ekonomi regional dan semakin efektifnya sistem pemungutan pajak. Kenaikan tersebut juga mengindikasikan keberhasilan pemerintah daerah dalam melakukan intensifikasi penerimaan, baik melalui penguatan basis data wajib pajak, digitalisasi layanan, maupun peningkatan pengawasan.

Dalam struktur pajak daerah, PKB tampil sebagai kontributor terbesar dengan pertumbuhan yang konsisten dengan rata-rata 480,70 miliar selama periode tahun 2020-2025, hal ini mencerminkan pertumbuhan kepemilikan kendaraan bermotor serta meningkatnya kepatuhan masyarakat. komponen BBNKB rata-rata berkontribusi sebesar 21,74 persen terhadap Pajak Daerah, nilai terbesar terealisasi sebesar 504 miliar lebih pada tahun 2024 hal ini menunjukkan tingginya transaksi kendaraan serta kemungkinan dampak positif dari penyempurnaan administrasi dan kebijakan tarif. PBBKB tumbuh stabil dari 254,18 miliar menjadi 613,97 miliar, menandakan meningkatnya konsumsi bahan bakar seiring ekspansi mobilitas dan aktivitas transportasi. Pajak Air Permukaan memiliki rata-rata kontribusi kecil dibandingkan komponen yang lain yakni 0,09 persen atau rata-rata terealisasi sebesar 1,54 miliar, namun selama tahun 2020-2025 dapat meningkat signifikan dari 1,22 miliar ke 1,81 miliar,, sementara Pajak Rokok relatif stabil dengan fluktuasi kecil dari 383,8 miliar menjadi Rp442,38 miliar, yang mencerminkan karakter penerimaan berbasis bagi hasil nasional dan pola konsumsi yang cenderung stagnan. Untuk tahun 2024 dan 2025 terdapat 2 komponen tambahan untuk pajak daerah yakni Pajak Alat Berat dan Opsen MBLB dimana nilainya dapat menjadi tambahan yang signifikan bagi peningkatan Pajak Daerah di NTB.

Secara keseluruhan, tren pendapatan pajak daerah menunjukkan arah yang positif yakni PKB, BBNKB, dan PBBKB meningkat tajam dan stabil, PAP meskipun naik, nilainya sangat kecil dibandingkan jenis pajak lain dan Pajak Rokok stabil dengan sedikit fluktuasi. Namun demikian, masih terdapat peluang untuk optimalisasi dari sektor-sektor dengan kontribusi rendah, upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak, peningkatan sistem informasi perpajakan, serta penguatan pengawasan dan kepatuhan menjadi kunci dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah ke depan. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2020-2025 dapat dilihat pada grafik sebagai berikut.

Grafik 3. 6 Realisasi Pajak Daerah dan Komponennya Tahun 2020 - 2025



Sumber : LRA NTB, 2025 diolah

Untuk peningkatan pajak daerah terutama untuk PKB dan BBNKB dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Pada aspek pemetaan potensi, perlu dibentuk *planning team director* lintas sektoral yang bertugas melakukan *up grading* perekonomian masyarakat, perumusan data, membuat kajian pemetaan potensi dan kebutuhan anggaran agar pengelolaan pajak daerah menjadi lebih terarah, terukur, dan valuatif.
2. Pada aspek intensifikasi, dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut :
   a. Merekrut dan menyeleksi petugas pelaksana pengelolaan pajak, termasuk petugas pemungut pajak yang mumpuni, agar dapat menghindari penyimpangan dan subjektifitas dalam proses pemungutan dan unsur-unsur teknis lainnya seperti penetapan tarif dan sebagainya.
   b. Membuat *potential cluster* pada masing-masing UPTB serta menyiapkan langkah-langkah perencanaan dan antisipasi untuk pencapaian target agat terjadi peningkatan penerimaan setiap tahun.
   c. Melakukan penyesuaian atau pemotongan tarif pajak, terutama untuk kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang > 5 tahun. Hal ini dimaksudkan untuk mengaktifkan kembali obyek pajak, sehingga kedepannya diharapkan akan rutin melakukan daftar ulang kendaraan.

3. Pada aspek kebijakan dapat dilakukan :
   a. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam pengelolaan pajak daerah yang efektif dan efisien.
   b. Mensosialisasikan secara masif formulasi teknis (SOP) yang jelas dan tegas terkait pengelolaan pajak, sehingga masyarakat semakin teredukasi dan tidak terjadi keraguan, pertanyaan dan multitafsir yang dapat menyulitkan wajib pajak.
4. Pada aspek hukum, dibuat payung hukum yang pasti. *Law Enforcement* dapat mendukung dan mempermudah langkah dan upaya untuk mencapai target pendapatan secara terarah, terukur dan rasional sehingga mampu meningkatkan optimalisasi peningkatan pajak daerah.

5. Pada aspek administrasi dapat dilakukan :
   a. Peningkatan pelayanan administrasi, penerapan Pajak Online dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam upaya peningkatan kualitas data dan informasi pajak melalui kerja sama dengan pihak perbankan seperti yang sudah dilakukan saat ini.
   b. Peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dan kapasitas sumber daya manusia serta pengawasan yang baik.
   c. Peningkatan koordinasi dan sinergi di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, perangkat daerah penghasil, kabupaten dan kota serta Polri (optimalisasi tim pembina samsat, razia kepatuhan, penyederhanaan mekanisme daftar ulang kendaraan untuk kendaraan yang tidak melakukan daftar ulang > 5 tahun)

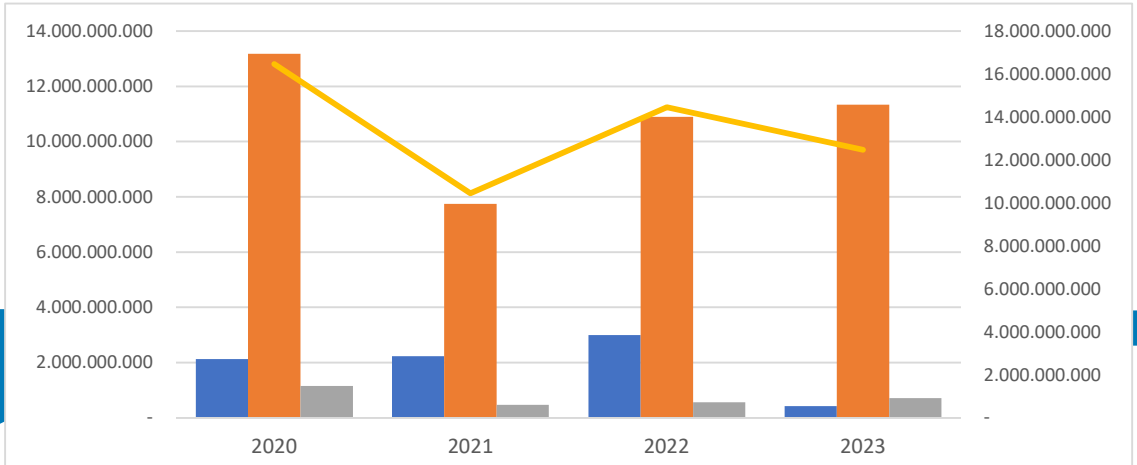
Untuk obyek pajak daerah selain PKB dan BBNKB kebijakan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan penerimaan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Perubahan dan penyempurnaan peraturan–peraturan terkait pemungutan pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
2. Pengembangan digitalisasi pelayanan pemungutan Pajak Daerah
3. Pemutakhiran dan penyempurnaan data subjek dan objek Pajak Daerah
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan melalui peningkatan kualitas
5. Peningkatan koordinasi kelembagaan dan kerjasama meliputi koordinasi dalam rangka pemungutan pajak daerah dengan kabupaten/kota dan mitra kerja, law enforcement, operasi gabungan, pendataan dan pengawasan, sosialisasi pajak daerah kepada wajib pajak dan masyarakat.

b. Retribusi Daerah

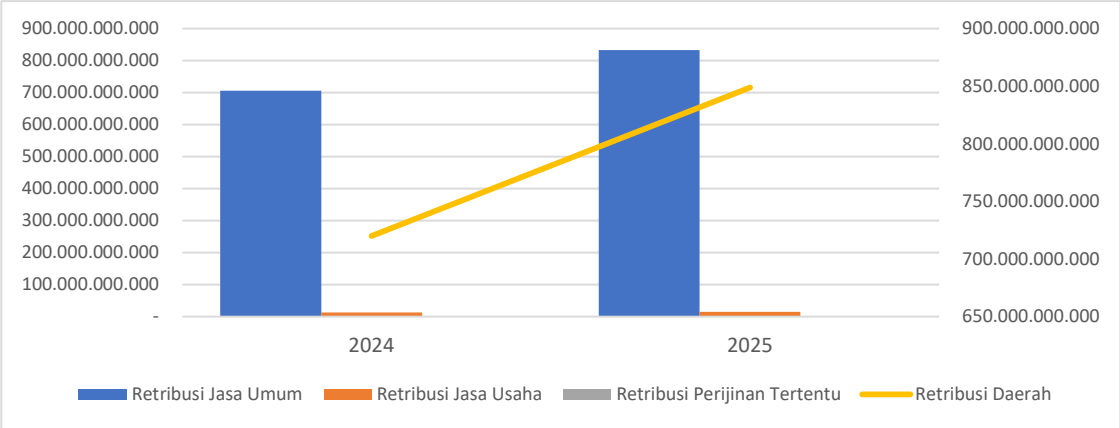
Dengan berlakunya Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah berdampak terhadap penghapusan beberapa jenis retribusi. Dihapusnya beberapa jenis retribusi tersebut bukan berarti pemerintah provinsi tidak melakukan layanan publik dimaksud. Layanan publik tersebut tetap dilaksanakan oleh pemerintah provinsi namun tanpa melakukan pungutan kepada masyarakat. Hal ini dilakukan dalam rangka efisiensi pelayanan publik, mendukung investasi dan kemudahan berusaha. Walaupun demikian diupayakan agar penerimaan Pendapatan Asli Daerah terjaga.

Grafik 3. 7 Realisasi Retribusi Daerah dan Komponennya Tahun 2020-2023



Sumber : LRA NTB, 2025 diolah

Grafik 3. 8 Realisasi Retribusi Daerah dan Komponennya Tahun 2024-2025



Sumber : LRA NTB, 2025 diolah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disesuaikan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Komponen dari Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah 35/2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa pelayanan jasa kesehatan dalam bentuk BLUD masuk ke dalam Retribusi Daerah dimana sebelumnya berada di komponen PAD Lain-lain PAD Yang Sah.

Selama periode tahun 2020-2025 rata-rata realisasi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Daerah sebesar 4,45 persen sementara terhadap PAD rata-rata sebesar 10,78 persen. Rata-rata Retribusi Daerah adalah mencapai 270,45 miliar dimana sebelum BLUD menjadi komponen Retribusi, realisasi tertinggi terdapat pada tahun 2020 yang mencapai 16.47 miliar lebih. Setelah BLUD menjadi bagian dari Retribusi, besarannya meningkat dari 706 miliar lebih di tahun 2024 menjadi 833,409 miliar lebih di tahun 2025. Komponen retribusi terbesar adalah Retribusi Jasa Umum yang mencapai 95,36 persen.

Beberapa kebijakan dalam rangka optimalisasi penerimaan Retribusi Daerah adalah:

1. Pengembangan aplikasi sistem pemungutan Retribusi Daerah secara elektronik;
2. Penerapan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;
3. Penerapan transaksi non tunai dalam melakukan pembayaran Retribusi Daerah;

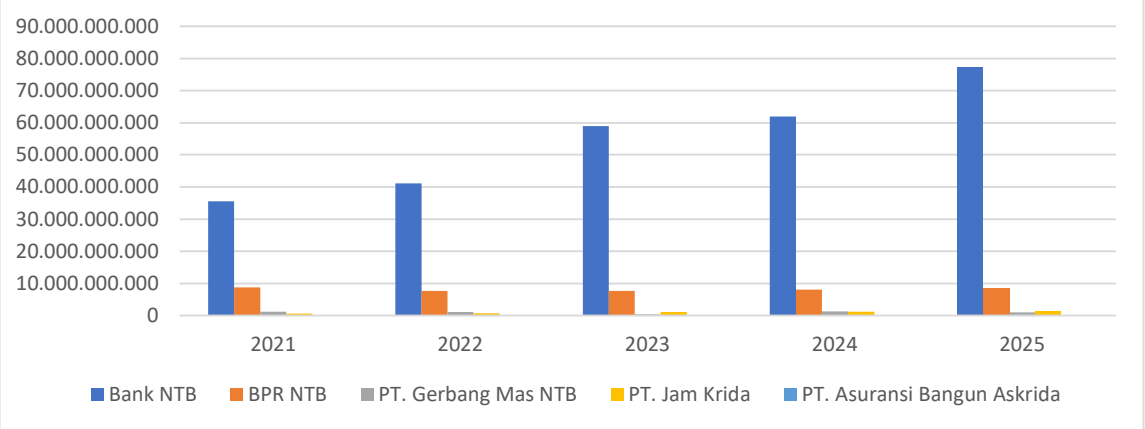
4. Pemberian kemudahan pelayanan kepada masyarakat atau wajib Retribusi Daerah melalui Retribusi Perizinan dan Non Perizinan;
5. Penerapan sistem e-ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.
6. Revisi peraturan tentang retribusi yang menyesuaikan dengan kajian akademis dan peraturan yang terkait.

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain berasal dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Selama kurun waktu 2018 hingga 2022 kinerja keuangan dan kinerja operasional bisnis BUMD mengalami fluktuasi. Dalam kurun waktu 2024 hingga 2026 pemerintah daerah berupaya untuk meningkatkan fiskal daerah salah satunya melalui pengelolaan BUMD.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah antara lain berasal dari Bank Pembangunan Daerah, Perusahaan Daerah, deviden dan Penyertaan Modal Daerah kepada pihak ketiga. Kontribusi hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan ini mencapai 0,8-1% dari PAD. Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan untuk Provinsi NTB mengalami kenaikan setiap tahun dari Rp 50,61 M di tahun 2022 meningkat menjadi Rp68,18 M di tahun 2023.

Grafik 3. 9 Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2021-2025



Sumber : LRA NTB, 2025 diolah

Pada tahun 2024 dan 2025, penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan diproyeksikan menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang mencapai yaitu sebesar Rp 411 M di tahun 2024 dan Rp 46,18 M di tahun 2025. Hal ini disebabkan komponen pembentuk utamanya yaitu deviden BUMD yang meningkat. Oleh karena itu untuk mendukung peningkatan fiscal daerah peran BUMD dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah harus ditingkatkan.

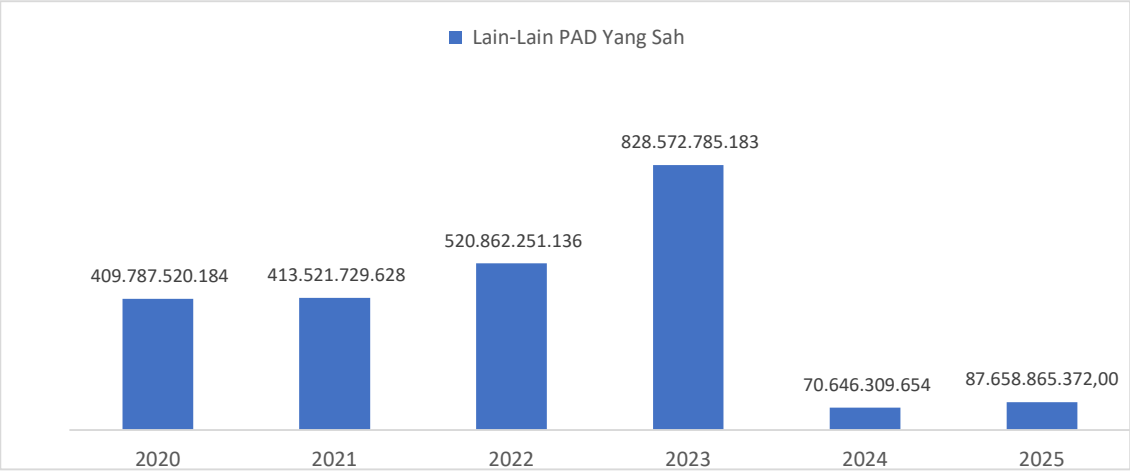
Untuk meningkatkan kinerja komponen pendapatan ini dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Perbaikan tata kelola BUMD salah satunya melalui kepengurusan yang unggul dan professional.
2. Penerapan strategis bisnis yang tepat serta meningkatkan sinergitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan.
3. Optimalisasi produktivitas aset BUMD melalui kerjasama dengan BUMD, BUMN dan pihak swasta.
4. Inovasi dan diferensiasi bisnis agar mampu bersaing
5. Penguatan struktur permodalan BUMD

d. Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang Sah adalah penerimaan daerah yang bersumber dari Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan, Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan, Hasil Kerja Sama Daerah, Pendapatan Jasa Giro, Pendapatan Bunga, Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (TGR), Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda Pajak, Pendapatan Denda Retribusi Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah.

Grafik 3. 10 Realisasi Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2020-2025



Sumber : LRA NTB, 2025 diolah

Pada periode 2020–2025, komponen Lain-Lain PAD yang Sah menunjukkan dinamika yang sangat fluktuatif. Pada 2020 realisasinya sebesar sekitar Rp409,8 miliar dan relatif

stabil pada 2021 menjadi Rp413,5 miliar. Pada 2022 terjadi peningkatan cukup signifikan hingga Rp520,9 miliar, kemudian melonjak tajam pada 2023 mencapai sekitar Rp828,6 miliar, yang mencerminkan adanya tambahan sumber penerimaan atau optimalisasi pos tertentu dalam kelompok ini.

Namun pada 2024 terjadi penurunan yang sangat drastis menjadi sekitar Rp70,6 miliar, sebelum sedikit meningkat kembali pada 2025 menjadi Rp87,7 miliar. Penurunan tajam tersebut mengindikasikan berkurangnya penerimaan insidental atau perubahan kebijakan/klasifikasi akun yang sebelumnya menopang lonjakan pada 2023. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa pos Lain-Lain PAD yang Sah masih bersifat volatil dan perlu penguatan basis penerimaan yang lebih berkelanjutan agar tidak terlalu bergantung pada sumber yang temporer.

Adapun Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan Penerimaan Daerah yang berasal dari Lain-Lain Milik Pemerintah Daerah. Penerimaan ini berasal dari Hasil Penjualan Barang Milik Daerah, Penerimaan Jasa Giro termasuk BLUD selama periode 2020-2023 dan sejak tahun 2024 BLUD masuk ke dalam komponen Retribusi Daerah.

Kebijakan dalam rangka peningkatan kinerja Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah adalah sebagai berikut :

1. Implementasi hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga.
2. Optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan pihak ketiga.

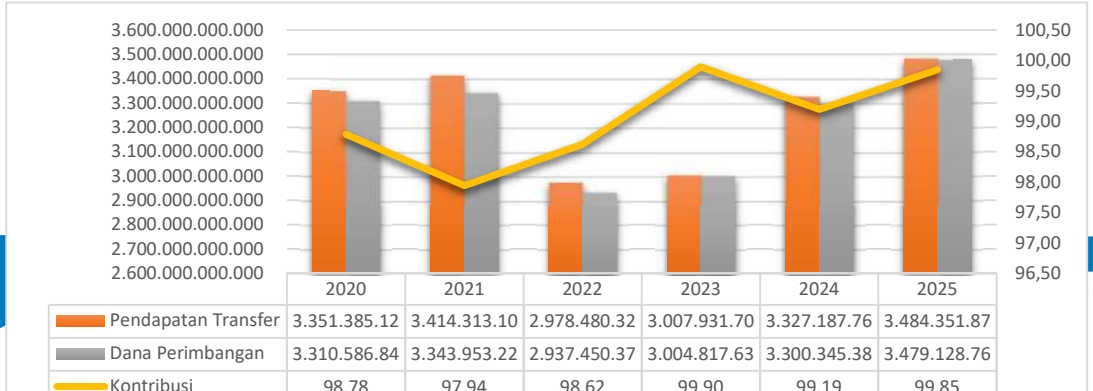
3.1.1.2 Pendapatan Transfer

1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan merupakan bagian dari pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat dalam bentuk Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus sebagaimana diatur melalui Undang-Undang Nomor 33 Tahun 24 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Sebagai komponen terbesar pada sumber pendapatan transfer, tren Dana Perimbangan selama tahun 2020-2025 mengalami pertumbuhan naik hal ini juga menunjukan adanya tren pertumbuhan naik pada Pendapatan Transfer. Rata – rata realisasi Dana Perimbangan mencapai 3,223 triliun lebih atau berkontribusi 99,85 persen terhadap Pendapatan Transfer, hal ini menunjukan masih tingginya ketergantungan pemerintah daerah pada dana transfer khususnya dana perimbangan. Nilai tertinggi terdapat pada tahun 2025 yang mencapai 3,48 triliun lebih.

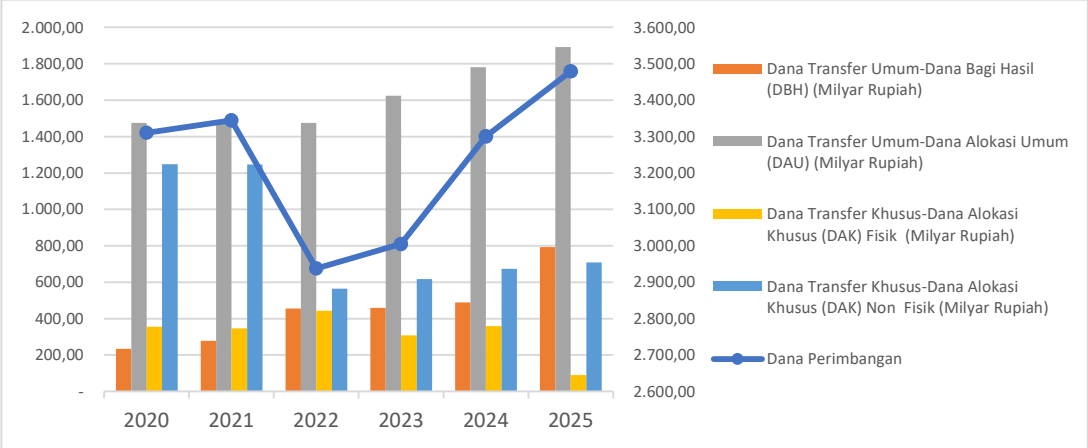
Grafik 3. 11 Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2020-2025



	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Pendapatan Transfer	3.351.385.12	3.414.313.10	2.978.480.32	3.007.931.70	3.327.187.76	3.484.351.87
Dana Perimbangan	3.310.586.84	3.343.953.22	2.937.450.37	3.004.817.63	3.300.345.38	3.479.128.76
Kontribusi	98,78	97,94	98,62	99,90	99,19	99,85

Sumber : LRA NTB, 2025 diolah

Grafik 3. 12 Realisasi Dana Perimbangan dan Komponennya Tahun 2020 – 2025



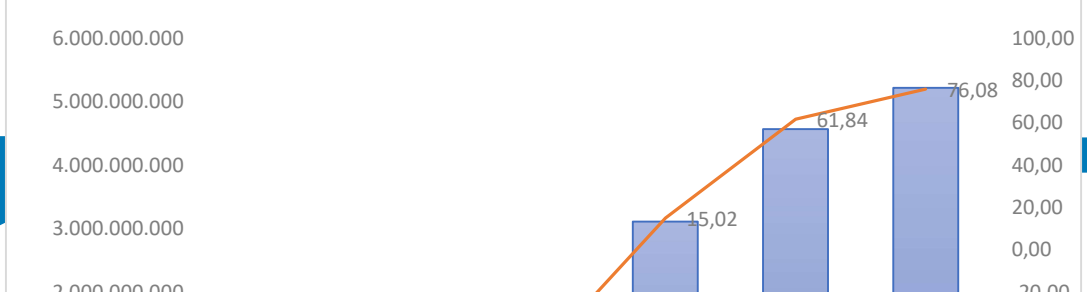
Sumber : LRA NTB, 2025 diolah

Tren Dana Perimbangan Provinsi NTB mengalami peningkatan sejak tahun 2022-2025 dengan rata-rata pertumbuhan selama periode tahun 2020-2025 adalah sebesar 0,91 persen atau rata-rata 3,229 triliun lebih. Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan komponen Dana Perimbangan terbesar dengan rata-rata proporsinya mencapai 50,18 persen, selanjutnya adalah Dana Alokasi Khusus (DAK) dengan rata-rata sebesar 35,87 persen dan terakhir adalah Dana Bagi Hasil (DBH) dengan rata-rata kontribusinya sebesar 13,95 persen.

2. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya

Komponen pendapatan transfer selain pendapatan transfer pusat adalah pendapatan transfer antar daerah berupa Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah (Pemda) lainnya yang dukungan anggaran yang diberikan oleh pemerintah provinsi atau daerah lain kepada kabupaten/kota atau daerah yang memerlukan. Bantuan ini bertujuan untuk mendukung pembangunan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat di daerah penerima. Bantuan ini diatur dalam regulasi perundangan sebagai salah satu bentuk hubungan keuangan antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.

Grafik 3. 13 Realisasi Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya Tahun 2020-2025



Sumber : LRA NTB, 2025 diolah

Komponen ini merupakan pendapatan yang belanjanya disalurkan ke pemerintah Kabupaten/Kota dalam hal ini Pemerintah Provinsi NTB terkait Bantuan Keuangan Pengelolaan Persampahan, Kontribusi Pendidikan dan Pelatihan dan lainnya. Selama tahun 2020-2025 rata-rata pertumbuhannya mencapai 12,68 persen atau sebesar 3,046 triliun lebih dengan kecenderungan meningkat sejak 3 tahun terakhir. Pendapatan tertinggi terdapat pada tahun 2025 sebesar 5,22 triliun lebih, naik dari tahun sebelumnya sebesar 650 miliar lebih.

Pada tahun 2027 arah kebijakan pendapatan transfer adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pengelolaan pendapatan transfer melalui penguatan kepatuhan administrasi, ketepatan waktu pelaporan, serta intensifikasi koordinasi dengan kementerian/lembaga guna menjaga keberlanjutan dan optimalisasi alokasi transfer pusat.
2. Mengoptimalkan penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) dengan memastikan validitas data objek pajak/sumber daya alam, serta memperkuat sinkronisasi perhitungan dengan pemerintah pusat dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal.
3. Mengarahkan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk mendukung prioritas nasional dan daerah tahun 2027, disertai dengan penguatan perencanaan teknis, kesiapan dokumen usulan, serta pemilihan proyek DAK Fisik yang matang dan realistis berbasis evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya.
4. Mengoptimalkan Dana Insentif Daerah (DID) melalui peningkatan kinerja indikator pelayanan publik, tata kelola keuangan, dan capaian pembangunan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk mendukung program prioritas nasional dan daerah.
5. Mendorong pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif di luar transfer, khususnya pinjaman daerah melalui PT SMI dan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), guna memperbesar kapasitas belanja modal dan percepatan pembangunan infrastruktur strategis.
6. Mengkaji pembentukan dana abadi daerah sebagai instrumen pembiayaan jangka panjang untuk mendukung program sosial-ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

7. Memanfaatkan keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika serta penyelenggaraan event internasional sebagai katalis peningkatan aktivitas ekonomi daerah dan basis penerimaan fiskal daerah ke depan.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, perumusan kebijakan pendapatan daerah merupakan hal yang sangat penting sehingga apa yang direncanakan dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Kebijakan pendapatan daerah Provinsi NTB merupakan perkiraan yang terukur dan memiliki kepastian serta dasar hukum yang jelas. Kebijakan tersebut diarahkan pada upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, serta dana perimbangan dalam rangka mendukung pembangunan daerah dengan optimalisasi pemanfaatan sumber-sumber pendapatan dan aset-aset pemerintah daerah.

3.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencakup berbagai sumber pendapatan yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah, atau hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Sumber-sumber ini berasal dari aktivitas lain yang sah dan berpotensi menambah pendapatan daerah, namun tidak memiliki pos khusus atau bentuk pajak/retribusi tertentu.

Komponen Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah pada struktur APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020-2025 adalah Pendapatan Hibah dan Pendapatan Lainnya Sesuai Ketentuan Peratuan Perundangan dimana komponen ini berasal dari Deviden atau royalti pengelolaan PT Amman Nusantara.

Grafik 3. 14 Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Provinsi NTB Tahun 2020-2025



Sumber : LRA NTB, 2025 diolah

Rata-rata pertumbuhan pos lain-lain pendapatan daerah yang sah 104,51 miliar lebih yang terdiri dari pendapatan hibah yang secara tren mengalami peningkatan dengan rata-

rata mencapai 11,081 miliar. Selain pendapatan hibah pada pos lain-lain pendapatan daerah yang sah terdapat komponen yang baru sejak tahun 2024 yakni Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan nilai realisasi pada tahun 2025 mencapai 176,67 miliar lebih turun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 383,92 miliar lebih.

Kondisi perekonomian daerah sangat mempengaruhi kinerja pendapatan daerah terutama terkait pendapatan asli daerah dan kebijakan fiskal nasional terkait dengan dana transfer pusat dan daerah. Kinerja pendapatan daerah NTB dalam kurun waktu 2023 – 2024, target 2025 serta proyeksi tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 4 Realisasi, Target dan Proyeksi Pendapatan Daerah NTB Tahun 2024 – 2027

Kode	Uraian	Realisasi APBD		Target RKPD	APBD	RPJMD	RKPD
		2024	2025	2026	2026	2027	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Pendapatan**	**6.621.160.040.387**	**6.419.270.268.676**	**6.557.466.967.650**	**5.622.953.979.442**	**6.861.984.074.056**	**6.223.456.006.394**
4.1	**Pendapatan Asli Daerah**	**2.910.047.635.097**	**2.755.211.234.526**	**2.973.055.155.567**	**3.025.373.242.985**	**3.201.929.983.849**	**3.128.823.295.425**
4.1.1	Pajak Daerah	2.045.004.056.872	1.728.154.255.901	1.998.482.078.467	1.837.535.868.342	2.196.880.715.661	2.001.846.160.542
4.1.2	Retribusi Daerah	714.494.532.672	848.815.665.256	833.230.465.235	1.025.956.381.180	846.650.466.507	968.578.333.203
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	79.902.735.899	90.582.447.997	97.139.028.805	96.219.588.313	107.564.681.162	107.564.681.162
4.1.4	Lain-Lain PAD Yang Sah	70.646.309.654	87.658.865.372	44.203.583.059	65.661.405.150	50.834.120.518	50.834.120.518
4.2	**Pendapatan Transfer**	**3.327.187.768.386**	**3.484.351.876.680**	**3.365.702.781.088**	**2.483.569.768.457**	**3.436.790.835.532**	**2.980.508.306.969**
4.2.1	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**3.322.615.573.146**	**3.479.128.762.945**	**3.362.446.464.888**	**2.481.714.874.957**	**3.433.485.674.632**	**2.978.653.413.469**
4.2.1.1	Dana Perimbangan	3.300.345.380.146	3.479.128.762.945	3.357.067.344.888	2.481.714.874.957	3.428.106.554.632	2.978.653.413.469
4.2.1.1.1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	488.434.616.000	791.823.074.500	599.661.747.943	178.902.336.957	652.033.946.050	404.246.557.990
4.2.1.1.2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1.781.174.009.000	1.891.278.904.567	1.866.701.163.740	1.518.289.669.000	1.885.368.175.377	1.713.036.726.099
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	358.033.134.458	87.827.501.387	229.689.786.000	-	229.689.786.000	0
4.2.1.1.4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	672.703.620.688	708.199.282.491	661.014.647.205	784.522.869.000	661.014.647.205	861.370.129.380
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	22.270.193.000	-	5.379.120.000	-	5.379.120.000	0
4.2.2	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**4.572.195.240**	**5.223.113.735**	**3.256.316.200**	**1.854.893.500**	**3.305.160.900**	**1.854.893.500**

4.2.2.2	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda Lainnya	4.572.195.240	5.223.113.735	3.256.316.200	1.854.893.500	3.305.160.900	1.854.893.500
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**383.924.636.905**	**179.707.157.470**	**218.709.030.995**	**114.010.968.000**	**223.263.254.675**	**114.124.404.000**
4.3.1	Pendapatan Hibah	-	3.029.968.000	2.250.547.000	2.029.968.000	2.475.601.000	2.143.404.000
4.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	383.924.636.905	176.677.189.470	216.458.483.995	111.981.000.000	220.787.653.675	111.981.000.000

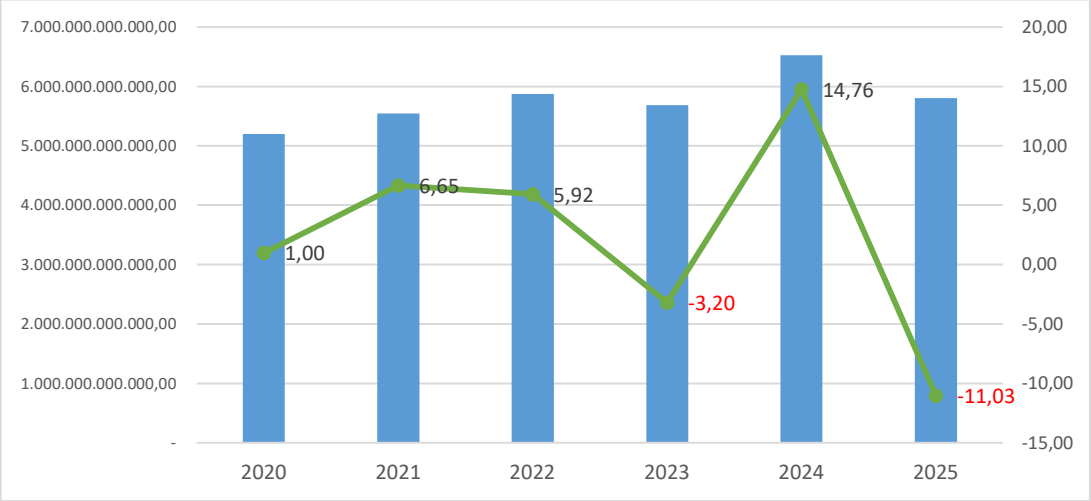
Sumber: LRA Prov NTB 2025, RKPD 2026, APBD 2026, RPJMD 2025-2029 data diolah 2026.

3.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, disebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah serta berpedoman pada KUA – PPAS yang didasarkan pada RKPD.

Belanja Daerah sesuai ketentuan pada Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait Pelayanan Dasar. Sedangkan, Urusan Pemerintahan Pilihan disesuaikan dengan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah dikelompokkan ke dalam Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer.

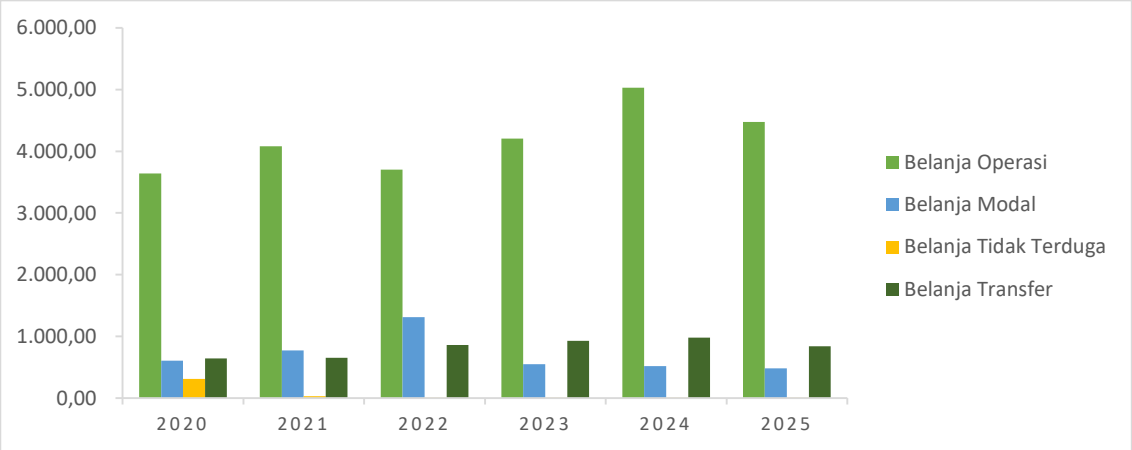
Tabel 3. 5 Realisasi Belanja Daerah NTB
Tahun 2020 – 2025



Sumber : LRA NTB, 2025 diolah

Selama periode **2019–2025**, **Belanja Daerah** secara umum menunjukkan tren meningkat hingga mencapai puncaknya pada 2024, sebelum mengalami penurunan pada 2025. Belanja naik dari sekitar Rp5,15 triliun pada 2019 menjadi Rp5,55 triliun pada 2021, kemudian terus meningkat pada 2022 dan sempat turun tipis pada 2023. Lonjakan terbesar terjadi pada 2024 dengan realisasi sekitar Rp6,52 triliun, yang mencerminkan ekspansi fiskal untuk mendukung program prioritas daerah. Pada 2025, belanja menurun kembali ke kisaran Rp5,80 triliun, mengindikasikan adanya penyesuaian kebijakan belanja.

Grafik 3. 15 Rata-Rata Pertumbuhan Realisasi Kom[onen Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2020-2025



Sumber : LRA NTB, 2025 diolah

Dilihat dari komponennya, **Belanja Operasi** tetap mendominasi struktur belanja dan bergerak relatif searah dengan total belanja daerah, dengan puncak pada 2024 sebelum melemah pada 2025. **Belanja Modal** sempat meningkat tajam pada 2022, yang mengindikasikan dorongan kuat pada pembangunan infrastruktur, namun menurun cukup signifikan pada 2023–2025. **Belanja Transfer** cenderung meningkat hingga 2024 lalu turun pada 2025, sementara **Belanja Tidak Terduga** sangat fluktuatif dan relatif kecil dibandingkan pos lainnya, dengan lonjakan besar pada 2020 yang kemungkinan berkaitan dengan kondisi darurat. Grafik di atas memperlihatkan bahwa dinamika belanja daerah masih dipengaruhi oleh kebutuhan situasional dan prioritas pembangunan tahunan, dengan tantangan menjaga keseimbangan antara belanja operasional dan belanja produktif jangka panjang. Dinamika ini menunjukkan perlunya menjaga kesinambungan fiskal sekaligus memperkuat porsi belanja produktif agar lebih mendukung pertumbuhan jangka menengah.

Kecenderungan semakin meningkatnya kebutuhan belanja pegawai, pemenuhan belanja rutin perkantoran (fixed cost), belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, tidak berbanding lurus dengan peningkatan pendapatan daerah. Dengan menggunakan indikator ruang fiskal (ketersediaan dana dalam APBD yang dapat digunakan secara bebas oleh daerah) dan ruang fiskal daerah NTB menunjukkan kecenderungan menurun dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara umum Pengelolaan Belanja Daerah Provinsi NTB diperuntukkan dan fokus pada program-program prioritas yang akan dicapai, antara lain:

1. Mengarahkan belanja daerah secara fokus pada penyelesaian permasalahan utama daerah, terutama dalam peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan dasar kepada masyarakat.
2. Menjamin pemenuhan alokasi anggaran fungsi pendidikan dan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Mengutamakan belanja yang mendukung pemulihan dan transformasi ekonomi daerah, perluasan kesempatan kerja, penurunan tingkat pengangguran, pengentasan kemiskinan, pengurangan ketimpangan, serta selaras dengan agenda pembangunan dalam RPJMD.
4. Mengalokasikan belanja bantuan secara terarah, akuntabel, dan tepat sasaran untuk memperkuat perlindungan sosial, stabilitas pelayanan publik, serta kohesi sosial masyarakat.
5. Menyediakan subsidi guna menjamin keterjangkauan dan keberlanjutan pelayanan publik strategis bagi masyarakat.
6. Menyalurkan hibah kepada masyarakat, kelompok, dan lembaga untuk mendukung kegiatan sosial-ekonomi, pemberdayaan komunitas, serta pelaksanaan agenda strategis daerah termasuk pengamanan penyelenggaraan pemilihan umum.
7. Memberikan bantuan sosial bagi kelompok rentan dan marjinal melalui pendekatan inklusif dalam rangka memperkuat modal sosial dan ketahanan sosial masyarakat.
8. Mengalokasikan bantuan keuangan kepada pemerintah daerah lain sebagai instrumen insentif maupun disinsentif dalam mendorong kerja sama antardaerah serta penguatan komitmen pencapaian prioritas pembangunan bersama.
9. Memprioritaskan penganggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat, khususnya urusan wajib pelayanan dasar, dengan berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2027 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang akuntabel, proporsional, efisien dan efektif yakni sebagai berikut:

1. Menjamin pemenuhan belanja wajib daerah, khususnya pada fungsi pendidikan minimal 20 persen dari total belanja daerah serta fungsi Pengawasan minimal 0,6 persen di luar belanja gaji dan tunjangan, belanja infrastruktur minimal 40 persen termasuk belanja pegawai minimal 30 persen dan alokasi untuk moda transportasi sebesar 10 persen dari target Pajak Kendaraan Bermotor serta belanja bagi hasil pajak daerah kepada kabupaten/kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Mengalokasikan belanja mengikat secara terukur untuk pembayaran gaji, tambahan penghasilan, dan tunjangan PNSD (ASN dan PPPK) dengan memperhitungkan kebijakan penggajian nasional serta kebutuhan formasi aparatur, disertai pengendalian belanja operasional perangkat daerah melalui penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas.

3. Menyusun kebutuhan belanja fixed cost, regular cost, dan variable cost secara proporsional guna menjamin keberlangsungan operasional pemerintahan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah, termasuk kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan evaluasi.
4. Memprioritaskan belanja pada program-program yang mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan sosial dasar, pengembangan wilayah berbasis produk unggulan yang berwawasan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur strategis untuk mendukung pembangunan sosial, ekonomi, dan budaya.
5. Mengarahkan belanja program dan kegiatan berdasarkan sumber pendanaannya, antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK), DBH Cukai Hasil Tembakau, Pajak Rokok, serta belanja pada OPD dengan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, sekaligus untuk pemenuhan Standar Pelayanan Minimal dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.
6. Mengoptimalkan belanja untuk penyelenggaraan urusan kewenangan Pemerintah Provinsi serta pemberian bantuan keuangan, hibah, dan bantuan sosial bagi urusan non-kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Memperkuat kapasitas fiskal kabupaten/kota dan desa melalui belanja bantuan keuangan yang diarahkan pada penguatan kelembagaan, tata kelola, serta kualitas aparatur desa sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi Undang-Undang Desa.
8. Mengarahkan belanja daerah pada penanganan risiko kesehatan masyarakat dan perlindungan daya beli, sebagai pembelajaran dari pandemi, melalui penguatan sistem kesehatan serta program perlindungan sosial adaptif.
9. Mengalokasikan belanja pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, irigasi, komunikasi, perumahan, dan pertanian, serta mendukung program unggulan daerah dan komitmen pendanaan pemerintah provinsi (committed budget).
10. Menjamin pemenuhan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal sebagai prioritas utama dalam penganggaran urusan wajib pelayanan dasar.
11. Mendukung implementasi kebijakan nasional di daerah, termasuk percepatan penurunan stunting, penghapusan kemiskinan ekstrem, serta pengendalian inflasi daerah.
12. Menyediakan alokasi Belanja Tidak Terduga secara memadai untuk menghadapi kondisi darurat dan kebutuhan mendesak yang tidak terprediksi, sekaligus sebagai instrumen mitigasi risiko dan sensitivitas makrofiskal daerah.

Kinerja Belanja daerah NTB dalam kurun waktu 2024 – 2025, target 2026 serta proyeksi tahun 2027 adalah sebagai berikut.

Tabel 3. 6 Realisasi, Target dan Proyeksi Belanja Daerah NTB Tahun 2024 – 2027

Kode	Uraian	Realisasi APBD		Target RKPD	APBD	RPJMD	RKPD
		2024	2025	2026	2026	2027	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
5	**Belanja**	**6.524.655.104.542**	**5.804.991.041.585**	**6.434.668.241.658**	**5.868.745.047.820**	**6.739.185.348.064**	**6.060.657.280.402**
5.1	**Belanja Operasi**	**5.027.607.043.872**	**4.480.769.686.934**	**4.872.868.730.440**	**4.714.511.310.247**	**5.015.136.477.916**	**4.802.418.023.371**
5.1.1	Belanja Pegawai	2.334.452.787.499	2.307.618.048.486	2.616.786.869.388	2.409.901.736.405	2.654.122.606.776	2.407.093.414.204
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	2.343.702.423.204	2.003.074.878.092	2.071.795.755.600	2.162.065.907.455	2.107.539.229.126	2.116.851.670.402
5.1.3	Belanja Bunga	46.602.880.945	35.275.372.063	34.956.621.056	25.993.780.957	45.305.524.288	18.030.812.906
5.1.4	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	7.000.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	295.516.952.224	130.111.108.293	142.261.614.396	112.847.885.430	200.734.237.718	200.096.325.859
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.332.000.000	4.690.280.000	7.067.870.000	3.702.000.000	7.434.880.008	53.345.800.000
5.2	**Belanja Modal**	**520.804.751.498**	**478.625.313.656**	**712.917.210.929**	**194.410.629.788**	**844.991.412.518**	**276.805.444.651**
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**71.133.029**	**4.035.402.669**	**20.000.000.000**	**27.014.022.946**	**20.000.000.000**	**15.000.000.000**
5.3.1	Belanja Tidak Terduga	71.133.029	4.035.402.669	20.000.000.000	27.014.022.946	20.000.000.000	15.000.000.000
5.4	**Belanja Transfer**	**976.172.176.144**	**841.560.638.326**	**932.809.084.839**	**932.809.084.839**	**859.057.457.630**	**966.433.812.380**
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	975.488.676.144	836.902.138.326	828.198.800.289	803.311.897.839	858.373.957.630	819.760.312.380
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	683.500.000	4.658.500.000	683.500.000	129.497.187.000	683.500.000	146.673.500.000
	Surflus/Defisit	**96.504.935.845**	**614.279.227.091**	**122.798.725.992**	**-245.791.068.378**	**122.798.725.992**	**162.798.725.992**

Sumber: LRA Prov NTB 2025, RKPD 2026, APBD 2026, RPJMD 2025-2029 data diolah 2026.

Pendanaan tahun 2027 juga diarahkan untuk mendukung program prioritas daerah serta kewajiban pemerintah daerah yang bersifat perundangan. Termasuk di dalamnya alokasi hibah perundangan kepada lembaga penyelenggara, instansi vertikal, serta organisasi kemasyarakatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah perundangan ini bertujuan mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab daerah maupun kewajiban normatif yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Tabel 3. 6 Hibah Perundangan NTB Tahun 2027

NO	Penerima Hibah	Perangkat Daerah	Perkiraan Alokasi 2027 (Rp.)
1	POLDA NTB	Bakesbangpoldagri	750.000.000
2	Komite Olah Raga Nasional (KONI) NTB	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	60.000.000.000
3	Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD)	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1.000.000.000
4	Komisi Pemilihan Umum Prov.NTB	Bakesbangpoldagri	200.000.000
5	Badan Pengawas Pemilu Prov.NTB	Bakesbangpoldagri	100.000.000
6	Komisi Penyiaran Indonesia (KPID) NTB	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	1.500.000.000
7	Palang Merah Indonesia Prov. NTB	Dinas Kesehatan	200.000.000
8	Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Prov. NTB	Biro Kesra	700.000.000

NO	Penerima Hibah	Perangkat Daerah	Perkiraan Alokasi 2027 (Rp.)
9	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Prov. NTB	Bakesbangpoldagri	200.000.000
10	Badan Narkotika Nasional RI Provinsi NTB	Bakesbangpoldagri	150.000.000
11	Majelis Ulama Indonesia Prov. NTB	Biro Kesra	500.000.000
12	Gerakan Pramuka Kwartir Daerah NTB	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	300.000.000
13	Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) NTB	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	200.000.000
14	Dewan Pendidikan Provinsi NTB	Biro Kesra	200.000.000
15	BPSK Kota Mataram	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	600.000.000
16	BPSK Kab. Lombok Utara	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000
17	BPSK Kab. Sumbawa	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	150.000.000
18	BPSK Kab. Lombok Barat	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000
19	BPSK Kab. Dompu	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000
20	BPSK Kab. Bima	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	100.000.000
21	TP PKK Provinsi NTB	DPMPDukcapil	1.500.000.000
22	Pimpinan Daerah Legiun Veteran RI NTB	Bakesbangpoldagri	150.000.000
23	Korem 162/Wira Bhakti	Bakesbangpoldagri	300.000.000
24	Dharma Wanita Pemprov. NTB	Dinas Sosial, P3A	500.000.000
25	Badan Kerjasama Organisasi Wanita Provinsi NTB	Dinas Sosial, P3A	1.000.000.000
26	Dewan Kerajinan Nasional Daerah (DEKRANASDA) NTB	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	1.500.000.000
27	Bale Mediasi	Bakesbangpoldagri	450.000.000
28	LKKS Provinsi NTB	Dinas Sosial, P3A	750.000.000
29	BADAN INTELEJEN NEGARA (BINDA NTB)	Bakesbangpoldagri	250.000.000
30	LANUD TGKH Z. Abdul Madjid	Bakesbangpoldagri	300.000.000
31	LANAL Mataram	Bakesbangpoldagri	500.000.000
32	Bansos LKSA	Dinas Sosial, P3A	1.230.000.000
33	KORMI NTB	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	300.000.000
34	Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Nusa Tenggara Barat	Dinas Sosial, P3A	500.000.000
35	NPC (National Paralympic Committee)	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	300.000.000
36	Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) NTB	Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	100.000.000
37	PWM NTB	Bakesbangpoldagri	150.000.000
38	Dewan Kebudayaan NTB	Dinas Kebudayaan	200.000.000
39	Kejaksaan Tinggi NTB	Bakesbangpoldagri	500.000.000

NO	Penerima Hibah	Perangkat Daerah	Perkiraan Alokasi 2027 (Rp.)
40	Pengadilan Tinggi NTB	Bakesbangpoldagri	300.000.000
TOTAL			**78.080.000.000**

Sumber Data : SIPD-RI, 2026

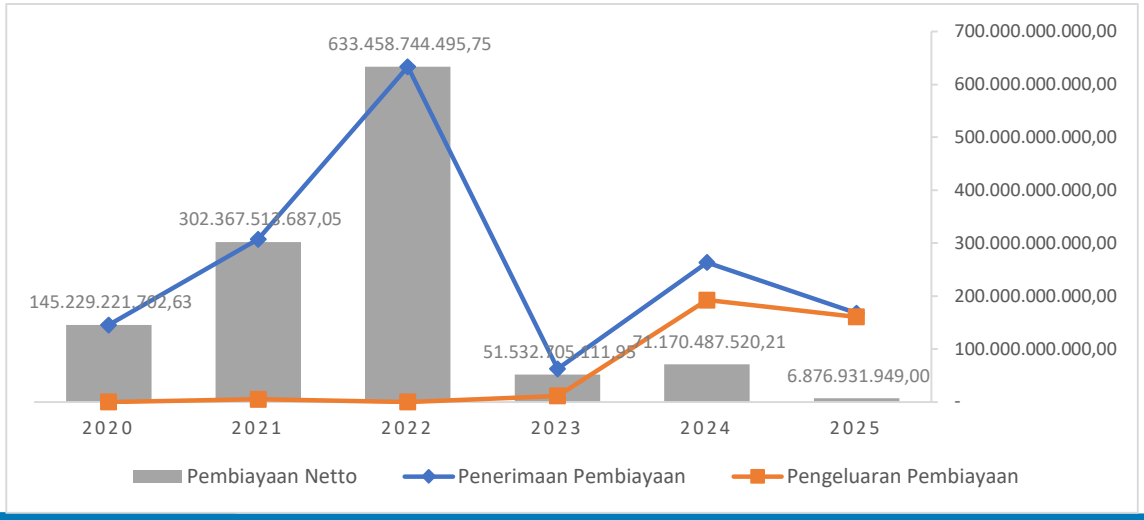
3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus.

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit anggaran yang disebabkan oleh lebih besarnya Belanja Daerah dibandingkan dengan Pendapatan yang diperoleh, atau sebaliknya untuk memanfaatkan adanya surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya. Sementara pengeluaran pembiayaan merupakan pembiayaan yang disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun berikutnya.

Grafik 3. 16 Realisasi Pembiayaan Daerah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2025



Sumber: LRA Prov. NTB 2020-2024, diolah

Untuk periode 2020–2025 kinerja pembiayaan daerah memperlihatkan pola yang sangat fluktuatif. Penerimaan Pembiayaan meningkat tajam dari sekitar Rp145,23 miliar pada 2020 menjadi Rp307,37 miliar pada 2021, kemudian mencapai puncaknya pada 2022 sebesar Rp633,46 miliar. Lonjakan ini mencerminkan tingginya kebutuhan pendanaan untuk menutup defisit atau membiayai program prioritas pada periode tersebut. Namun pada 2023 penerimaan pembiayaan turun drastis menjadi sekitar Rp62,54 miliar, sebelum kembali naik pada 2024 menjadi Rp263,97 miliar dan kembali melemah pada 2025 menjadi Rp167,68 miliar.

Di sisi lain, Pengeluaran Pembiayaan mulai muncul pada 2021 sebesar Rp5,0 miliar, meningkat pada 2023 menjadi Rp11,00 miliar, lalu melonjak sangat signifikan pada 2024 hingga Rp192,80 miliar dan tetap tinggi pada 2025 sebesar Rp160,80 miliar. Peningkatan pengeluaran ini berpengaruh besar terhadap Pembiayaan Netto, yang meskipun tetap positif sepanjang periode, menunjukkan tren penurunan tajam setelah 2022. Dari posisi tertinggi Rp633,46 miliar pada 2022, pembiayaan netto turun drastis menjadi Rp51,53 miliar pada 2023, sedikit membaik pada 2024 menjadi Rp71,17 miliar, dan kembali menurun pada 2025 hingga hanya sekitar Rp6,88 miliar. Kondisi ini mengindikasikan semakin terbatasnya ruang pembiayaan bersih daerah pada akhir periode, sehingga diperlukan pengelolaan pembiayaan yang lebih hati-hati dan berorientasi pada keberlanjutan fiskal.

Secara umum Penerimaan Pembiayaan melonjak tajam pada 2022 dan 2024, pengeluaran pembiayaan relatif kecil dan tidak stabil, namun naik signifikan di 2024. Untuk Pembiayaan Netto mengikuti tren penerimaan, menunjukkan ketergantungan terhadap pembiayaan untuk menutup defisit, sementara SILPA menunjukkan tren naik di 2023–2024, mengindikasikan sisa anggaran yang belum terserap optimal.

Tabel 3. 7 Realisasi, Target dan Proyeksi Pembiayaan Daerah NTB
Tahun 2024 – 2027

Kode	Uraian	Realisasi APBD		Target RKPD	APBD	RPJMD	RKPD
		2024	2025	2026	2026	2027	2027
1	2	3	4	5	6	7	8
6	**Pembiayaan**						
6.1	Penerimaan Pembiayaan	263.969.222.344	167.675.666.773	5.000.000.000	368.589.794.370	5.000.000.000	10.000.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	192.798.734.824	160.798.734.824	127.798.725.992	122.798.725.992	127.798.725.992	172.798.725.992
	Pembiayaan Netto	**71.170.487.520**	**6.876.931.949**	**- 122.798.725.992**	**245.791.068.378**	**- 122.798.725.992**	**-162.798.725.992**
6.3	**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)**	**167.675.423.365**	**621.156.159.040**	-	-	-	-

Sumber: LRA Prov NTB 2025, RKPD 2026, APBD 2026, RPJMD 2025-2029 data diolah 2026.

3.3 Sumber Pembiayaan Alternatif

Dalam rangka mempercepat penyelesaian permasalahan pembangunan serta memastikan pencapaian sasaran pembangunan daerah secara berkelanjutan, kebijakan pembiayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat diarahkan pada penguatan dan diversifikasi sumber pendanaan di luar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Pendekatan ini ditempuh melalui optimalisasi pendanaan non-APBD dengan memperluas skema kerja sama antara pemerintah dan badan usaha, mendorong partisipasi sektor swasta, BUMN dan BUMD, serta menguatkan peran masyarakat dan komunitas lokal dalam pembangunan. Keterbatasan kapasitas fiskal daerah di tengah meningkatnya kebutuhan pembiayaan pembangunan menuntut integrasi berbagai sumber pendanaan, baik yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kolaborasi antar pemerintah daerah, pinjaman daerah, maupun skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU).

A. Pendanaan melalui APBN

Dukungan APBN diarahkan untuk memperkuat pembiayaan program dan kegiatan prioritas daerah melalui mekanisme dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang dikelola oleh perangkat daerah provinsi maupun kabupaten/kota. Sinergi perencanaan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menjadi kunci dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber dana tersebut, khususnya melalui penyelarasan kebijakan nasional dengan prioritas pembangunan daerah. Kolaborasi lintas tingkat pemerintahan diharapkan dapat mengurangi duplikasi program, meningkatkan efektivitas belanja publik, serta mempercepat pencapaian target pembangunan strategis.

B. Kolaborasi APBD Kabupaten/Kota

Kolaborasi pembiayaan antara APBD Provinsi dan APBD kabupaten/kota dipandang sebagai instrumen penting untuk mengatasi keterbatasan fiskal serta memperkuat integrasi pembangunan wilayah. Melalui penganggaran bersama pada program dan kegiatan yang memiliki dampak lintas daerah, pembangunan diharapkan berjalan lebih terkoordinasi dan berkelanjutan. Kolaborasi dilakukan dengan memastikan keselarasan sasaran, indikator kinerja, serta pembagian peran yang jelas antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, sehingga pelaksanaan pembangunan menjadi lebih efisien dan manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.

C. Pinjaman Daerah

Pinjaman daerah dimanfaatkan sebagai alternatif pembiayaan pembangunan yang dilakukan secara selektif, hati-hati, dan bertanggung jawab sesuai dengan kerangka regulasi nasional, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta peraturan turunannya. Pemanfaatan pinjaman diarahkan untuk mendukung pengelolaan kas daerah, pembangunan infrastruktur strategis, penguatan permodalan BUMD, serta investasi pelayanan publik. Pemerintah Provinsi NTB tetap memperhatikan risiko fiskal, antara lain risiko kesinambungan keuangan daerah, risiko tingkat bunga, risiko pembiayaan kembali, risiko nilai tukar, serta risiko operasional, dengan mengacu pada batasan dan rambu-rambu yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Jenis pinjaman daerah diarahkan sesuai dengan peruntukannya, yaitu pinjaman jangka pendek untuk menutup kekurangan arus kas, pinjaman jangka menengah untuk pembiayaan pelayanan publik yang tidak menghasilkan penerimaan langsung, serta pinjaman jangka panjang untuk investasi prasarana dan sarana pelayanan publik yang memberikan manfaat ekonomi dan sosial, termasuk penerbitan obligasi daerah bagi proyek-proyek yang berpotensi menghasilkan penerimaan bagi APBD.

D. Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Skema KPBU dikembangkan sebagai alternatif utama pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi yang berorientasi pada kepentingan publik, dengan mengacu pada ketentuan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 serta regulasi teknis terkait. Dalam skema ini, pemerintah bertindak sebagai Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK), sementara badan usaha berperan dalam penyediaan pembiayaan, perancangan, pembangunan, hingga pengoperasian infrastruktur sesuai dengan perjanjian kerja sama yang disepakati. Pembagian risiko dilakukan secara proporsional antara para pihak, serta jangka waktu kontrak yang relatif panjang ditetapkan untuk menjamin kelayakan investasi badan usaha.

KPBU diarahkan untuk mendukung pengembangan berbagai sektor infrastruktur strategis, yang mencakup kelompok infrastruktur konektivitas, fasilitas perkotaan, dan fasilitas sosial. Sektor-sektor tersebut meliputi transportasi, jalan, energi dan energi terbarukan, telekomunikasi, air minum, pengelolaan limbah, persampahan, irigasi, pasar tradisional, perumahan rakyat, pendidikan, kesehatan, pariwisata, kawasan pengembangan, serta sarana olahraga dan budaya.

E. Mitra Pembangunan

Pemerintah Provinsi NTB mendorong keterlibatan mitra pembangunan internasional, nasional, maupun lokal dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan melalui sinergi pendanaan, penguatan kapasitas, serta transfer pengetahuan. Kerja sama ini diarahkan untuk memperluas akses pendanaan sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

F. Gerakan Multipihak

Pendekatan gerakan multipihak dipromosikan untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan unsur pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi masyarakat sipil, dan komunitas lokal. Kolaborasi lintas pemangku kepentingan ini diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), pengarusutamaan GEDSI, serta penguatan ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat.

G. Bantuan Teknis

Sebagai pelengkap strategi pembiayaan, Pemerintah Provinsi NTB memanfaatkan bantuan teknis dari berbagai mitra kerja sama dalam dan luar negeri guna meningkatkan kapasitas kelembagaan, kualitas aparatur, serta daya saing daerah. Bantuan teknis diarahkan pada penguatan sistem perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, inovasi layanan publik, serta peningkatan efektivitas pelaksanaan program pembangunan prioritas.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Pembangunan Daerah yang dilaksanakan pada Tahun 2027 merupakan tahun ketiga dalam tahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029. Tahun ketiga ini memiliki posisi strategis sebagai fase penguatan dan percepatan pencapaian sasaran pembangunan daerah, setelah melalui tahapan konsolidasi kebijakan dan penataan program pada tahun-tahun sebelumnya. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah pada Tahun 2027 diarahkan untuk memastikan kesinambungan kebijakan, peningkatan kinerja pembangunan, serta penguatan dampak program pembangunan terhadap kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan
4. Secara faktual, menjadi tolak ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Kerangka pikir perumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027 disusun sebagai landasan konseptual yang menggambarkan keterkaitan antara isu strategis, tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta prioritas pembangunan daerah, sebagaimana disajikan pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. 1 Kerangka Pikir Perumusan Prioritas Pembangunan Provinsi NTB Tahun 2027



Sumber : Analisis Bappeda NTB, 2026

4.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran pembangunan merupakan hasil perumusan capaian strategis yang mencerminkan tingkat kinerja pembangunan daerah secara komprehensif serta menjadi landasan dalam penyusunan kinerja pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat secara menyeluruh. Perumusan tujuan dan sasaran tersebut diarahkan untuk memastikan keterpaduan, kesinambungan, dan konsistensi pelaksanaan pembangunan daerah.

Dalam konteks penyusunan RKPD Tahun 2027, penetapan tujuan dan sasaran pembangunan difokuskan pada upaya menjamin keberlanjutan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029, sekaligus mendukung pencapaian visi dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2025–2045. Selain itu, perumusan tersebut juga memperhatikan keterkaitan dan keselarasan dengan sasaran pembangunan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2027 yang merupakan tahap ketiga dariRPJMD NTB 2025-2029 diharapkan dapat berjalan secara selaras dengan kebijakan nasional, mendukung pencapaian target-target strategis pembangunan Indonesia, serta memberikan kontribusi nyata dan berkelanjutan terhadap agenda pembangunan nasional.

4.1.1 Penelaahan Sasaran Pembangunan Nasional serta Kebijakan Strategis Lainnya

Penyelarasan sasaran pembangunan nasional merupakan langkah penting dalam memastikan bahwa arah pembangunan daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat sejalan dengan kebijakan dan prioritas pembangunan nasional. Dalam konteks ini, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi NTB Tahun 2027 disusun dengan mengacu dan menelaah secara mendalam dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2027, yang merupakan penjabaran tahap ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Sasaran Pembangunan Nasional berlandaskan pada Trisula Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas, penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Sasaran pembangunan tersebut disusun sebagai tolok ukur keberhasilan pelaksanaan pembangunan, sekaligus menjadi instrumen pengendalian agar arah kebijakan tetap selaras dengan target pembangunan jangka menengah.

Pada pilar pertumbuhan ekonomi berkualitas, sasaran pembangunan diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan, yang didukung oleh peningkatan produktivitas, penguatan investasi, serta pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Indikator yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran ini meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan nasional bruto per kapita, penurunan intensitas emisi gas rumah kaca, serta peningkatan indeks kualitas lingkungan hidup. Indikator-indikator tersebut mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan, sehingga pembangunan yang dilakukan tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

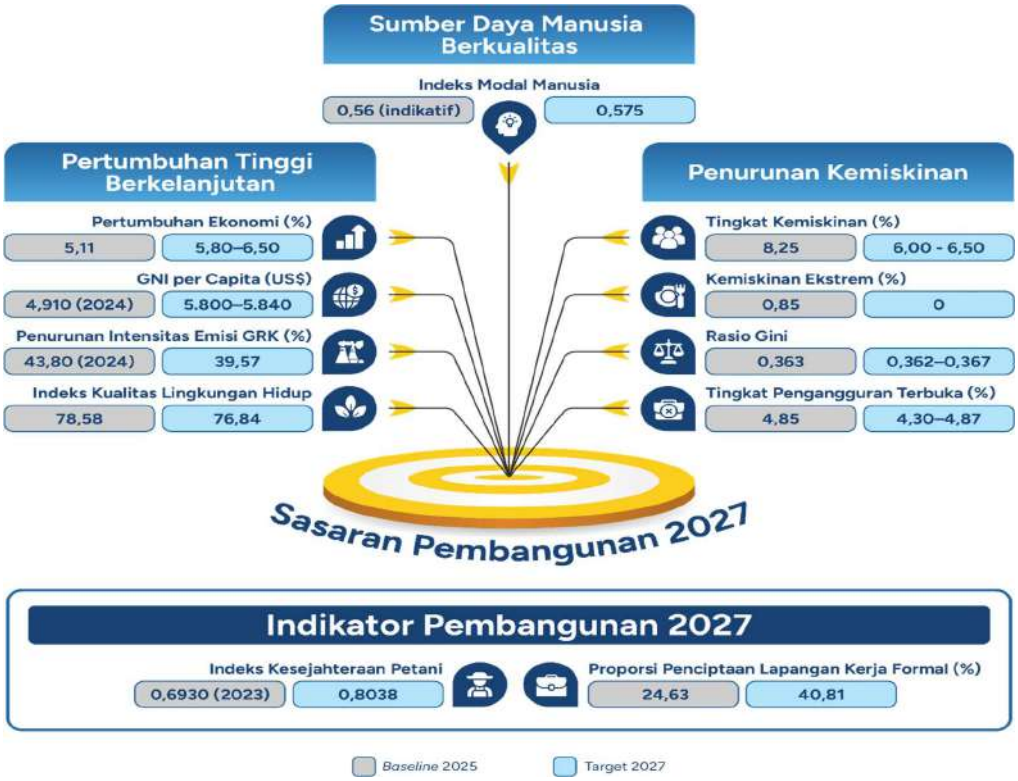
Pada pilar penurunan kemiskinan dan ketimpangan, sasaran pembangunan difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok rentan antara lain, meliputi (1) penguatan perlindungan sosial, (2) peningkatan kesempatan kerja, serta (3) stabilisasi harga kebutuhan pokok. Indikator yang digunakan meliputi tingkat kemiskinan, kemiskinan ekstrem, dan rasio gini, yang secara bersama-sama mencerminkan tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi. Upaya ini diharapkan dapat memperkecil kesenjangan antarkelompok pendapatan serta meningkatkan daya beli masyarakat secara luas.

Selanjutnya, pada pilar peningkatan kualitas sumber daya manusia, sasaran pembangunan diarahkan pada penguatan kualitas tenaga kerja yang sehat, produktif, dan berdaya saing. Hal ini dilakukan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, serta penguatan keterampilan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri. Indikator yang digunakan antara lain tingkat pengangguran terbuka dan indeks modal manusia sebagai ukuran kualitas dan produktivitas sumber daya manusia dalam mendukung pembangunan ekonomi.

Selain indikator utama tersebut, sasaran pembangunan juga diperkuat dengan indikator pendukung yang mencerminkan kinerja sektor-sektor strategis, antara lain indeks kesejahteraan petani dan proporsi penciptaan lapangan kerja formal. Indikator tersebut penting untuk memastikan bahwa transformasi ekonomi yang didorong melalui produktivitas, investasi, dan industrialisasi juga diikuti dengan peningkatan kesejahteraan pelaku ekonomi di sektor riil serta penciptaan lapangan kerja yang lebih berkualitas.

Secara keseluruhan, sasaran pembangunan RKP Tahun 2027 dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian Trisula Pembangunan. Dengan keterkaitan yang kuat antara sasaran, indikator, dan intervensi kebijakan, pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat berjalan secara efektif, terarah, dan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Gambar 4. 2 Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2027



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2026 (diolah)

4.1.1.1 Arah Kebijakan Pertumbuhan Ekonomi Berkualitas Melalui Peningkatan Produktivitas dan Industri

Penguatan ekonomi domestik menjadi salah satu strategi utama dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional sekaligus meningkatkan kapasitas pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya tersebut ditempuh melalui berbagai kebijakan yang saling terintegrasi, mencakup penguatan stabilitas makroekonomi, perlindungan terhadap daya beli masyarakat, optimalisasi penghimpunan tabungan dan pembiayaan domestik, percepatan realisasi investasi dan belanja yang produktif, penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif, peningkatan produktivitas sektor-sektor ekonomi, serta penguatan tata kelola pemerintahan dan kualitas sumber daya manusia. Dengan pendekatan tersebut, perekonomian nasional diharapkan memiliki daya tahan yang semakin kuat terhadap berbagai risiko dan dinamika global, sekaligus mampu menciptakan sumber-sumber pertumbuhan ekonomi baru yang lebih produktif, berdaya saing, dan berkesinambungan.

Dalam mendukung agenda tersebut, kebijakan investasi diarahkan sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan produktivitas, pengembangan industri bernilai tambah, serta percepatan transformasi struktur ekonomi. Pengembangan investasi juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas produksi yang berorientasi ekspor melalui optimalisasi peran PMA maupun PMDN. Pencapaian sasaran tersebut didukung oleh berbagai kebijakan strategis, antara lain penyederhanaan regulasi, peningkatan kemudahan berusaha, penguatan kepastian hukum bagi investor, serta pembangunan infrastruktur konektivitas dan sistem logistik yang semakin efisien. Sinergi berbagai kebijakan tersebut diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang semakin

kompetitif, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah ekonomi, serta memperkuat daya saing nasional di tengah dinamika perekonomian global.

Selanjutnya untuk hilirisasi diarahkan sebagai strategi utama untuk mendukung pencapaian sasaran sektor industri pengolahan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi nasional. Pada tahun 2027, sektor industri pengolahan ditargetkan tumbuh 5,9–6,6 persen dan memberikan kontribusi sebesar 21,5 persen terhadap PDB. Melalui pendekatan yang inklusif dan berkelanjutan, implementasi hilirisasi dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir disertai penguatan ekosistem hilirisasi, mencakup peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pasokan bahan baku, penguatan konektivitas dan logistik, serta pendalaman produk turunan melalui:

1) akselerasi hilirisasi komoditas berbasis sumber daya unggulan, seperti nikel, bauksit, garam, kelapa sawit, kelapa, dan rumput laut, yang salah satunya akan diimplementasikan melalui berbagai PSN;
2) pengembangan industri bernilai tambah tinggi, yang mencakup industri kimia, industri alat angkutan (termasuk pengembangan industri mobil nasional dan industri dirgantara), dan industri elektronika, serta industri mesin dan perlengkapan;
3) peningkatan daya saing industri padat karya seperti industri tekstil salah satunya melalui pelaksanaan program Kredit Industri Padat Karya dan restrukturisasi mesin/peralatan;
4) percepatan transformasi industri hijau melalui implementasi peta jalan dekarbonisasi industri, penerapan ekonomi sirkular, serta pilot project pembiayaan industri hijau dengan skema Green Industry Service Company (GISCO);
5) perluasan dan pendalaman ekspor produk dan jasa industri, terutama melalui pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan yang telah diratifikasi; dan
6) peningkatan produktivitas dan daya saing industri melalui penguatan rantai pasok industri, keberlanjutan penerapan industri 4.0, penyiapan SDM industri terampil dan produktif, serta penerapan standardisasi, serta dukungan kebijakan fiskal dan insentif yang tepat sasaran.

Selanjutnya, sektor pertanian dan perikanan tahun 2027 ditargetkan tetap tumbuh di tengah tantangan perubahan iklim melalui (1) perbaikan pengelolaan air dan irigasi, lahan/kawasan konservasi dan rehabilitasi, serta Jalan Usaha Tani; (2) penyediaan benih dan bibit unggul, alat dan mesin pertanian (alsintan), sarana produksi perikanan, pupuk subsidi, cetak sawah, optimasi lahan, revitalisasi tambak dan kampung nelayan; (3) penyuluhan dan regenerasi petani, nelayan, dan pembudidaya ikan; (4) peningkatan produksi lada, jagung, dan komoditas strategis lainnya, termasuk komoditas pertanian dan perikanan; serta (5) hilirisasi pertanian dan perikanan. Sementara itu, sektor perdagangan dari sisi dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, transformasi digitalisasi perdagangan, dan peningkatan konektivitas ke pasar global.

4.1.1.2 Arah Kebijakan Proyek Strategis Nasional

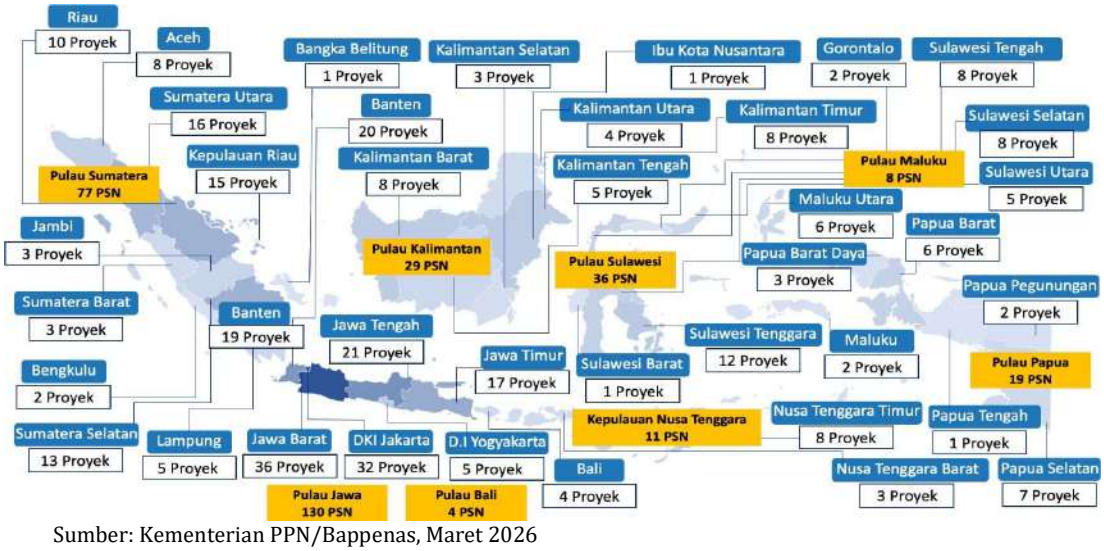
Kebijakan PSN dalam RKP Tahun 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan serta memperkuat pemerataan pembangunan antarwilayah. PSN diprioritaskan untuk meningkatkan konektivitas, mengembangkan wilayah berbasis potensi unggulan, dan memperluas akses terhadap infrastruktur serta layanan dasar.

PSN mencakup tiga kelompok utama: PSN Direktif Presiden, PSN Usulan Baru, dan PSN Lanjutan. PSN Direktif Presiden merupakan proyek strategis yang berasal dari arahan langsung Presiden berdasarkan urgensi, dampak strategis, dan kebutuhan percepatan pelaksanaan agenda prioritas nasional. PSN Direktif Presiden meliputi:

1. PSN Makan Bergizi Gratis,
2. PSN Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih,
3. PSN Pembangunan Sekolah Rakyat,
4. PSN Kartu Usaha Afirmatif,
5. PSN Kartu Kesejahteraan,
6. PSN Digitalisasi Pendidikan,
7. PSN Program Pengelolaan Sampah,
8. PSN Program Percepatan Penguatan Tata Kelola dan Ekosistem Agribisnis Kelapa Sawit, dan
9. PSN Program Pengembangan Mobil Nasional.

PSN usulan baru tahun 2027 diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan melalui pengembangan sektor prioritas, peningkatan konektivitas, serta penyediaan infrastruktur dan layanan dasar. Penetapannya dilakukan secara selektif berdasarkan kontribusi terhadap Prioritas Nasional, trisula pembangunan, dan kesiapan proyek. Sementara itu, PSN lanjutan merupakan PSN yang berdasarkan hasil evaluasi masih relevan untuk dilanjutkan, dengan fokus pada kesinambungan pelaksanaan dan optimalisasi manfaat proyek lintas tahun.

Gambar 4. 3 Pemetaan PSN Per Wilayah



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2026

Untuk memastikan efektivitas pelaksanaan, PSN didukung oleh percepatan perizinan, pembiayaan, pengadaan tanah, fasilitasi proyek, penyederhanaan administrasi, serta penguatan pemantauan dan evaluasi berbasis Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (MRPN). Persebaran PSN juga diarahkan lebih merata ke luar Jawa untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan mendorong pusat-pusat pertumbuhan baru.

4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029 disusun berdasarkan tujuh misi pembangunan daerah yang telah ditetapkan sebagai Sapta Cita sebagai landasan utama dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Ketujuh misi tersebut dirumuskan untuk mendukung pencapaian Asta Cita sebagai prioritas pembangunan nasional, sehingga arah pembangunan daerah senantiasa selaras dengan kebijakan dan agenda strategis pemerintah pusat. Dengan demikian, perumusan tujuan dan sasaran RPJMD tidak hanya berorientasi pada penyelesaian permasalahan dan isu-isu prioritas pembangunan dalam lima tahun ke depan, tetapi juga diarahkan untuk mengawal pencapaian visi pembangunan jangka panjang daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi NTB 2025–2045, yaitu terwujudnya Nusa Tenggara Barat sebagai "Provinsi Kepulauan yang Maju, Kuat, Aman, Berkelanjutan, dan Sejahtera."

Selanjutnya, penyelarasan tujuan dan sasaran dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional dan daerah dilakukan secara sistematis untuk membangun sinergitas, harmonisasi, dan kolaborasi yang efektif dan efisien antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Penyelarasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah mampu mendukung pencapaian target pembangunan nasional, sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya pembangunan secara terpadu. Melalui sinergi yang kuat antara pusat dan daerah, diharapkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat dapat berjalan lebih terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan.

Adapun tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029, yang sekaligus menjadi tujuan dan sasaran pembangunan daerah pada Tahun 2027, dirumuskan sebagai pedoman strategis dalam penyelenggaraan pembangunan tahunan. Perumusan tersebut dilakukan dengan memperhatikan capaian pembangunan sebelumnya, hasil evaluasi kinerja, serta tantangan dan peluang pembangunan yang berkembang. Tujuan dan sasaran ini disusun untuk memastikan kesinambungan agenda pembangunan lima tahunan dengan arah kebijakan RPJPD NTB 2025–2045, sekaligus menjaga konsistensi pelaksanaan pembangunan agar tetap sejalan dengan agenda pembangunan nasional.

Dengan berlandaskan pada Sapta Cita, Asta Cita, serta visi pembangunan jangka panjang daerah, tujuan dan sasaran RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi pijakan yang kuat bagi seluruh perangkat daerah dalam merumuskan strategi, menetapkan prioritas program, dan mengalokasikan sumber daya pembangunan secara efektif dan efisien. Melalui perencanaan yang terarah, sinergis, dan berorientasi pada hasil, pembangunan daerah diharapkan dapat memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat serta mempercepat terwujudnya Provinsi Nusa Tenggara Barat yang maju, berdaya saing, dan sejahtera secara berkelanjutan.

Penjabaran dari tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2027 disertai dengan sasaran, target indikator sebagai tolak ukur, strategi, arah kebijakan, intervensi kebijakan dan hilight intervensi kebijakan serta kerangka regulasi untuk keberhasilan pencapaian pembangunan daerah dijabarkan sebagai berikut.

Tabel 4. 1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Mendukung IUP
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Visi : NUSA TENGGARA BARAT BANGKIT BERSAMA MENUJU PROVINSI KEPULAUAN YANG MAKMUR MENDUNIA									
1	**Misi 1 : Membangun Manusia yang Berkarakter Unggul, Produktif dan Kompetitif**									
		Tujuan 1	**Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif**	**1**	**Indeks Modal Manusia (IMM)**	**Indeks**	**NA**	**0,58**	**0,58**	Sasaran Visi
				2	**Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga**	**Indeks**	**63,70**	**68,23**	**68,23**	IUP 39
		Sasaran 1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	8,87	8,77-8,79	9,02	IUP 5c
				2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,99	14,20-14,23	14,10	IUP 5d
				3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	11,63	10,20	11,67	IUP 6
				4	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					IUP 5a
					a) Literasi Membaca	%	0	20	10	IUP 5a; a)
					b) Numerasi	%	0	10	10	IUP 5a; b)
				5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					IUP 5b
					a) Literasi Membaca	%	22,77	28,32-30,82	24,00-28,32	IUP 5b; a)
					b) Numerasi	%	15,17	24,28-26,78	17,00-24,28	IUP 5b; b)
		Sasaran 2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,60	73,5	73,5	IUP 1

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Mendukung IUP
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13,39	19,78	19,78	IUP 2b
		Sasaran 3	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.515	0,499	0,499	IUP 40
				2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,70	65,10	65,10	
2	**Misi 2 : Memperkuat Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Produktivitas, Daya Saing dan Pendapatan Perkapita Masyarakat sebagai Pondasi Mewujudkan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan**									
		Tujuan 2	**Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah**	**1**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi :**					Sasaran Visi
				1a	**- Dengan Tambang**	**%**	**3,22**	**7,70**	**4.8-5.7**	
				1b	**- NonTambang**	**%**	**8,33**	**6,03-6,63**	**6,03-6,63**	
				2	**Kontribusi PDRB Provinsi**	**%**	**0,82**	**0,87**	**0,83**	Sasaran Visi
		Sasaran 4	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	1	Rasio kewirausahaan Daerah	%	10,03	2,42	10,60	IUP 14b
				2	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,93	0,99	0,99	IUP 14c
				3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,67	14,80	14,80	
		Tujuan 3	**Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat**	**1**	**PDRB Per Kapita**	**Juta Rupiah**	**33,67**	**45,25**	**36,63**	Sasaran Visi
		Sasaran 5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	36.010,28	35.763,20	37.025,62	
				2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,05	2,00-2,69	2,00-2,69	Sasaran Visi
		Sasaran 6	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	1	Inklusi Keuangan	%	80,51	89,80	89,80	IUP 34
		Tujuan 4	**Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali**	**1a**	**Tingkat Kemiskinan**	**%**	**11,38**	**9,9-10,65**	**9.80-10.80**	Sasaran Visi

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Mendukung IUP
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				1b	**Tingkat Kemiskinan Ekstrem NTB**	**%**	**0,40**	**0,84**	**0,35**	
				2	**Rasio Gini**	**Poin**	**0,364**	**0,347-0,351**	**0.351-0.353**	Sasaran Visi
				3	**Tingkat Inflasi**	**%**	**3,01**	**2,20-3,52**	**2,20-3,52**	IUP 32
		Sasaran 7	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	49,21	48,00	50,50	
		Sasaran 8	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,70	79,62	75,49	
		Sasaran 9	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	1	Indeks Desa	(%)	78,57	79,2	79,20	
		Sasaran 10	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	16,21	7,14	13,80	IUP 20
3	**Misi 3 : Membangun Ekosistem Industri Komoditas Unggulan Sektor Pertanian, Peternakan dan Kelautan Perikanan Menuju terwujudnya Industri Agromaritim yang Berkelanjutan**									
		Tujuan 5	**Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan**	**1**	**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan**	**%**	**6,69**	**5,61**	**6,75**	Sasaran Visi dan IUP 11
		Sasaran 11	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	1	Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	%	9,80	7,2 - 8,0	9,95	
		Sasaran 12	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	1	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	5,03	3,79	5,20	IUP 11b
4	**Misi 4 : Membangun Sektor Pariwisata Berkualitas, Industri Kreatif serta Mengembangkan Seni Budaya Daerah dan Prestasi Olahraga**									
		Tujuan 6	**Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif**	**1**	**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku**	**%**	**11,75**	**12,11**	**12,11**	
				2	**Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional**	**%**	**NA**	**0,42**	**0,42**	IUP 13
		Sasaran 13	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	474.838	458.164	512.000	IUP 12b

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran			Indikator	Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Mendukung IUP
(1)	(2)	(3)			(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,81	2,22	2,22	IUP 12a
				3	Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	%	4,33	3,83	4,50	
		Tujuan 7	**Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya**	**1**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	**Indeks**	**NA**	**59,80-60,08**	**59,80-60,08**	IUP 37
		Sasaran 14	Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	1	Indeks budaya literasi	Indeks	NA	67,64	67,64	
				2	Indeks ekspresi budaya	Indeks	NA	49,22	49,22	
				3	Indeks warisan budaya	Indeks	NA	51,97	51,97	
				4	Indeks ekonomi budaya	Indeks	NA	46,60	46,60	
		Tujuan 8	**Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga**	**1**	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**	**Indeks**	**55,50**	**54,48**	**54,48**	
				2	**Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)**	**Indeks**	**NA**	**0,348**	**0,348**	
		Sasaran 15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%	69,97	71,18	71,18	
				2	Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)	23,40 (58 medali)	11,53 (58 Medali)	11,53 (58 Medali)	
				3	Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa	%	100	100	100	
5	**Misi 5 : Memperkuat Sistim Mitigasi Bencana, Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Investasi Berkelanjutan**									
		Tujuan 9	**Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana**	**1**	**Indeks Risiko Bencana (IRB)**	**Indeks**	**156,02**	**133,27-131,18**	**133,27-131,18**	IUP 44
		Sasaran 16	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,55	0,63	0,63	
		Tujuan 10	**Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan**	**1**	**Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Indeks**	**NA**	**0,543**	**0,543**	IUP 41
				2	**Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**	**%**	13,80	**28,61**	**28,61**	Sasaran Visi

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Mendukung IUP
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sasaran 17	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,40	76,61	76,61	Sasaran Visi dan IUP 42a
		Sasaran 18	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks	0,331	0,337	0,337	
				2	Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik	%	0,10	0,20	0,20	
		Sasaran 19	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan	1	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	123,53	176,89	176,89	IUP 43a
				2	Konsumsi Listrik per kapita	kWh	769,88	808,00	808,00	IUP 43a
		Tujuan 11	**Terwujudnya Investasi Berkelanjutan**	**1**	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**% PDRB**	**34,31**	**37,03-37,32**	**36,399479**	IUP 21
		Sasaran 20	Meningkatnya Realisasi Investasi	1	Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	61,10	76,65	68,8	
6	**Misi 6 : Memantapkan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Berwawaasan Lingkungan Serta Memastikan Penegakan Tata Ruang yang Berkelanjutan**									
		Tujuan 12	**Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan**	**1**	**Indeks Kemantapan Infrastruktur**	**Indeks**	**74,90**	**78,40**	**78,40**	
		Sasaran 21	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	70,12	76,97	76,97	
				2	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	71,49	72,24-72,45	72,24-72,45	IUP 23b
				3	Rasio Konektivitas	Rasio	0,831	0,85	0,85	
		Tujuan 13	**Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan**		**Persentase capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang**	**%**	**62,17**	**65,40**	**65,40**	
		Sasaran 22	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang		Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang	%	83,13	83,88	83,88	
7	**Misi 7 : Mempercepat Transformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan yang Kolaboratif dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota Sebagai Fondasi Percepatan Pembangunan Daerah**									

No.	Visi/ Misi	Tujuan/Sasaran		Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Mendukung IUP
(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Tujuan 14	**Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif**	**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**Indeks (Kategori)**	**79,91**	**80,35 (A)**	**80,35 (A)**	
				2	**Indeks Ketahanan Nasional**	**Indeks**	**3,03**	**3,13**	**3,13**	**IUP 36**
				3	**Indeks Inovasi Daerah**	**Indeks**	**73,25**	**78,85**	**77,00**	**Sasaran Visi**
		Sasaran 23	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1a	Reformasi Birokrasi General	Skor	70,50	70,88	70,88	
				1b	Reformasi Birokrasi Tematik	Skor	6,96	9,47	9,47	
				2	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,598	1,199	0,764	
				3	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	87,39	92,00	88,00	
		Sasaran 24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	75,27	76,75-80,00	76,75-80,00	IUP 30
				2	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	59,00	72,50	60,05	IUP 28a
				3	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	83,08	76,51	83,50	
		Sasaran 25	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	60	70	70	
				2	Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah	%	100,00	97,50	97,50	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 dan Hasil Analisis Bappeda, 2026

4.2 Tema dan Prioritas Pembangunan

4.2.1 Tema dan Prioritas Pembangunan Nasional

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nasional Tahun 2027

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 lahir sebagai pelaksanaan tahap pertama RPJPN Tahun 2025-2045 sekaligus memuat delapan visi Presiden yang tertuang dalam Asta Cita. Selanjutnya, Asta Cita diterjemahkan ke dalam delapan Prioritas Nasional sebagai acuan utama pelaksanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan Trisula Pembangunan, yaitu (1) pertumbuhan ekonomi berkualitas, (2) penurunan kemiskinan dan ketimpangan, serta (3) peningkatan kualitas sumber daya manusia. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMN Tahun 2025–2029. Kedudukan RKP Tahun 2027 menjadi penting karena tidak hanya memastikan kesinambungan arah kebijakan yang telah dilaksanakan di dua tahun pertama, tetapi juga mengakselerasi ketercapaian sasaran jangka menengah di dua tahun berikutnya, atau di akhir periode pelaksanaan RPJMN Tahun 2025–2029.

Tahun 2027 menjadi momentum strategis untuk mempercepat transformasi ekonomi nasional di tengah tantangan ekonomi global yang semakin dinamis. Tantangan ini memerlukan stabilitas dan perkuatan fondasi pertumbuhan ekonomi yang adaptif dan berkelanjutan. Pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 5,80–6,50 persen. Pencapaian target pertumbuhan ekonomi tersebut memerlukan strategi peningkatan nilai tambah (value added) yang transformatif dan signifikan. Oleh karena itu, intervensi pemerintah difokuskan pada tiga faktor penggerak utama, yaitu produktivitas, investasi, dan industri.

Dari faktor produktivitas, peningkatan output dan nilai tambah diarahkan melalui penguatan lima pilar pembentuk Total Factor Productivity (TFP), yaitu (1) inovasi melalui peningkatan kapasitas riset dan kolaborasi serta percepatan adopsi teknologi dalam proses produksi; (2) pendidikan melalui peningkatan kualitas dan kesesuaian keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar; (3) infrastruktur fisik untuk menurunkan biaya logistik dan memperlancar konektivitas; (4) efisiensi melalui perbaikan iklim usaha dan pengurangan berbagai hambatan ekonomi; serta (5) institusi melalui penguatan kepastian hukum, efektivitas belanja pemerintah, dan kemudahan berusaha. Pertumbuhan ekonomi yang didorong produktivitas (TFP) menjadi basis akselerasi pertumbuhan tinggi berkelanjutan. Kontribusi produktivitas (TFP) terhadap rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional masih terbatas 0,26 persen (periode 2015–2025), namun berpotensi meningkat signifikan hingga mencapai dua persen. Selanjutnya, peningkatan produktivitas menjadi krusial dalam merespons inefisiensi investasi agar menjadi lebih berkualitas, sebagaimana tecermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) yang berpotensi turun hingga mencapai 5,7 (dari 6,4 pada tahun 2025).

Investasi sebagai faktor pengungkit utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, tercatat sebagai komponen terbesar kedua dengan kontribusi sebesar 28,8 persen terhadap PDB sisi pengeluaran pada tahun 2025, mencerminkan perannya yang signifikan dalam menggerakkan aktivitas ekonomi. Lebih lanjut, investasi mendorong penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kapasitas produksi nasional melalui perluasan basis industri serta penguatan sisi penawaran (*supply-side*) perekonomian. Di tengah kebutuhan transformasi ekonomi, peningkatan investasi berkualitas melalui Foreign Direct Investment (FDI) menjadi semakin krusial untuk mendorong alih teknologi dan

pengetahuan, terutama mengingat rasio FDI Indonesia yang masih terbatas pada kisaran 1,2 persen terhadap PDB, namun berpotensi meningkat signifikan seperti Vietnam yang mencapai 6,0 persen terhadap PDB. Selain itu, berbagai komitmen investasi dari kesepakatan kerja sama internasional dengan mitra strategis menjadi modal kuat untuk direalisasikan sehingga dapat mengakselerasi pertumbuhan ekonomi ke depan.

Sementara itu, faktor industri merupakan salah satu penggerak utama transformasi ekonomi dan akselerasi pertumbuhan berkualitas dengan kontribusi PDB tertinggi. Selain itu industri pengolahan berperan menciptakan ekosistem keterkaitan antar sektor dengan multiplier output tinggi dan penyerapan tenaga kerja berkualitas. Oleh karena itu, kebijakan industri perlu diarahkan pada transformasi struktural menuju industri bernilai tambah tinggi, berdaya saing global, dan berorientasi ekspor. Arah kebijakan ini menekankan pada industrial upgrading, baik melalui pergeseran dari industri berbasis komoditas dan teknologi rendah menuju industri berteknologi menengah-tinggi (*intra-industry upgrade*) maupun melalui pendalaman struktur industri ke tahapan yang lebih maju dalam rantai nilainya (*inter-industrial upgrade*).

Faktor produktivitas, investasi, dan industri dipandang sebagai tiga pilar utama yang paling menentukan dalam mendorong akselerasi pertumbuhan berkualitas. Dengan demikian, Pemerintah menetapkan Tema RKP Tahun 2027 yaitu: "**Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri**." Tema ini mencerminkan upaya Pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara inklusif dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia.

4.2.1.2 Prioritas Nasional

RKP Tahun 2027 difokuskan pada pencapaian Trisula Pembangunan, yaitu pertumbuhan ekonomi berkualitas, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta penurunan kemiskinan dan ketimpangan. Dalam mencapai target tersebut, RKP Tahun 2027 dilaksanakan melalui delapan Prioritas Nasional (PN).

Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

Dukungan terhadap akselerasi pertumbuhan berkelanjutan diwujudkan melalui penguatan ideologi, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) sebagai pilar Pancasila dalam perumusan kebijakan publik yang inklusif serta kondusif bagi stabilitas sosial dan politik. Pancasila sebagai ideologi bangsa merupakan landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks tersebut, integrasi materi serta penguatan pelaksanaan pendidikan kebangsaan, kewarganegaraan, dan politik menjadi instrumen penting untuk menghadapi radikalisme, polarisasi, dan dinamika krisis global. Selanjutnya, peningkatan kualitas demokrasi terus didorong untuk mewujudkan demokrasi substansial, antara lain melalui penguatan aspirasi dan partisipasi publik yang bermakna, keterbukaan pemerintah, penguatan fungsi legislasi lembaga legislatif, penguatan kelembagaan penyelenggara pemilihan umum (pemilu), serta penguatan kesetaraan masyarakat sipil. Dalam mendukung agenda tersebut, komunikasi publik, media massa, dan pers sebagai pilar penting demokrasi berperan dalam memperkuat ruang publik yang sehat berlandaskan Pancasila. Upaya ini dilakukan melalui penguatan pers dan media massa yang bertanggung jawab, edukatif, jujur, objektif, dan sehat industri (BEJO'S), serta pemantapan sistem komunikasi publik dan literasi media masyarakat untuk mencegah misinformasi dan

disinformasi, sekaligus meningkatkan integritas serta keberlanjutan industri pers dan media massa. Selain itu, pembangunan juga perlu dilaksanakan dengan berlandaskan HAM. Pertumbuhan berkualitas merupakan salah satu sarana penting dalam upaya pemenuhan HAM sehingga pelaksanaannya perlu didukung oleh pengarusutamaan, pemajuan, dan penegakan HAM melalui uji tuntas HAM, penanganan pelanggaran HAM, serta penguatan ruang damai.

Prioritas Nasional 2: Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru

RKP Tahun 2027 menempatkan ketahanan nasional dan kemandirian bangsa sebagai prioritas nasional. Untuk menjamin terwujudnya pembangunan yang berkesinambungan, harus didukung dengan sistem pertahanan dan keamanan negara yang kuat untuk melindungi dan menjamin kedamaian serta diplomasi yang mendukung kepentingan nasional dan mampu memperkuat posisi Indonesia di tingkat global. Sementara itu, kemandirian bangsa akan terus dimantapkan melalui swasembada pangan, energi, dan air menggunakan pendekatan food, energy, and water nexus (FEW Nexus) untuk memastikan tercapainya kemandirian bangsa yang berdiri tanpa bergantung kepada negara lain serta menjamin adanya keselarasan dalam pemenuhan ketiga sumber daya.

Selain diarahkan untuk mencapai kemandirian bangsa, swasembada pangan, energi, dan air juga mendukung penuh pertumbuhan ekonomi tinggi dan berkelanjutan. Transformasi ekonomi hijau memastikan bahwa pertumbuhan dan produktivitas ekonomi berjalan selaras dengan keberlanjutan lingkungan, efisiensi sumber daya, dan keadilan sosial melalui strategi pembangunan rendah karbon, ekonomi sirkular dan pengelolaan sampah terpadu, pengelolaan hutan lestari, keanekaragaman hayati serta penciptaan lapangan kerja hijau. Selain itu, penerapan ekonomi syariah, ekonomi digital, dan ekonomi biru didorong untuk mencapai pembangunan ekonomi yang inklusif dan progresif. Ekonomi syariah sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru diarahkan untuk mendorong terwujudnya visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah global. Ekonomi digital meningkatkan kontribusi Produk Domestik Bruto (PDB) melalui strategi penguatan faktor pendukung ekonomi digital mencakup pengembangan SDM, perlindungan data, ekosistem digital, regulasi dan pendanaan, serta strategi penguatan ekonomi dan industri digital serta sektor strategis lainnya khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), perdagangan, pertanian, perikanan, dan digitalisasi daerah. Sementara itu, ekonomi biru diarahkan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru melalui peningkatan pemanfaatan potensi sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan untuk mendukung ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah ekonomi kelautan dan kesejahteraan masyarakat, serta pengelolaan konservasi dan wilayah pesisir.

Prioritas Nasional 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif, serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi

Pembangunan infrastruktur yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan memegang peranan penting dalam mendorong peningkatan produktivitas, menciptakan iklim investasi yang kondusif, dan mempercepat transformasi struktur industri. Infrastruktur yang terintegrasi dapat menurunkan biaya produksi, transportasi, dan logistik sehingga meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi. Hal ini juga dapat mendorong

pengembangan kapasitas tenaga kerja UMKM dalam mendukung kewirausahaan, penguatan industri agromaritim di pusat produksi, serta pengembangan sektor ekonomi kreatif, pariwisata, dan keuangan inklusif yang melibatkan UMKM dan koperasi.

Dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, pembangunan infrastruktur difokuskan pada peningkatan konektivitas multimoda, penguatan infrastruktur dan layanan digital, serta layanan infrastruktur ketenagalistrikan berkualitas dan ramah lingkungan, yang didukung dengan penyelenggaraan industri konstruksi berkelanjutan. Pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata turut berkontribusi dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian nasional.

Selain itu, pendalaman sektor keuangan melalui peningkatan total aset sektor keuangan terhadap PDB menjadi kunci perluasan pembiayaan ke sektor strategis termasuk UMKM. Langkah tersebut difokuskan pada penguatan peran perbankan dan nonbank seperti asuransi, dana pensiun, pasar modal, dan industri Pembiayaan Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML), melalui peningkatan intermediasi, diversifikasi produk, penguatan tata kelola, perluasan akses konvensional maupun syariah, serta peningkatan inklusi keuangan untuk kesejahteraan keuangan masyarakat. Sinergi kebijakan makroprudensial dan mikroprudensial diarahkan untuk menjaga stabilitas dan intermediasi berkelanjutan yang dipercepat melalui transformasi digital dan pemeringkat kredit alternatif disertai penguatan literasi dan pelindungan konsumen.

Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Pembangunan SDM bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan kemampuan manusia (human capabilities) agar dapat memanfaatkan modal sosial dan budaya dalam memenuhi kebutuhan dasar serta meningkatkan harkat dan martabat manusia. SDM unggul menjadi landasan utama dalam meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan sektor strategis nasional untuk mendukung pencapaian swasembada pangan dan energi, serta mempercepat pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Pembangunan SDM diwujudkan melalui pemerataan pendidikan berkualitas, kesehatan untuk semua; penguatan iptek dan inovasi; peningkatan kualitas keluarga, kesetaraan gender, dan masyarakat inklusif, khususnya anak, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia; serta peningkatan prestasi olahraga dan budaya berolahraga di masyarakat. Melalui berbagai upaya tersebut, dapat terwujud masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan berdaya saing sebagai pilar utama pembangunan nasional.

Prioritas Nasional 5: Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri

PN 5 diarahkan untuk memperkuat transformasi industri sebagai penggerak utama akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan ekspor. Fokus mencakupi percepatan hilirisasi komoditas prioritas untuk meningkatkan nilai tambah domestik, pengembangan industri prioritas berteknologi menengah-tinggi berbasis inovasi yang mampu menyerap tenaga kerja, dan penguatan daya saing industri berorientasi ekspor. Dalam konteks tersebut, pengembangan hilirisasi industri berbasis sumber daya alam (SDA) unggulan menjadi pilar strategis melalui penguatan rantai nilai komoditas mineral, pertanian, dan perikanan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. PN

5 juga mendorong pengembangan aglomerasi industri melalui optimalisasi kawasan industri (KI) dan kawasan ekonomi khusus (KEK) sebagai pusat pertumbuhan baru yang terintegrasi. Upaya ini didukung oleh perbaikan iklim investasi melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan kepastian usaha, penyediaan dan peningkatan kualitas layanan infrastruktur konektivitas, penguatan sistem logistik nasional untuk menurunkan biaya logistik dan meningkatkan efisiensi rantai pasok, serta pembiayaan investasi strategis. Secara keseluruhan, PN 5 menjadi instrumen kunci dalam mendorong industrialisasi yang inklusif, berdaya saing, berkelanjutan, dan memperkuat struktur ekspor nasional melalui peningkatan ekspor produk industri berteknologi menengah-tinggi dalam rangka mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional tahun 2027.

Prioritas Nasional 6: Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan

Pembangunan dari desa dan dari bawah menjadi strategi utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif, pemerataan antarwilayah, dan percepatan pengentasan kemiskinan. Pembangunan tersebut dilakukan melalui peningkatan akses terhadap kapasitas dan kesempatan kerja, layanan dasar inklusif, dan pemberdayaan berbasis pendampingan. Hal ini diperkuat dengan perlindungan sosial adaptif yang responsif terhadap berbagai risiko, serta integrasi dengan pemberdayaan ekonomi afirmatif untuk mendorong graduasi menuju kemandirian. Selain itu, sebagai pemenuhan layanan dasar, pembangunan juga diarahkan untuk peningkatan akses terhadap rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan. Pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) meningkatkan ketepatan sasaran dan efisiensi program serta mendukung perencanaan dari tingkat nasional hingga tingkat administrasi pemerintahan terkecil yang terintegrasi. Keterkaitan desa-kota diperkuat melalui peran desa dalam rantai pasok dan kota sebagai pusat akses pasar, teknologi, dan inovasi, termasuk penguatan koperasi produksi. Sementara itu, pembangunan kawasan strategis seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) berfungsi sebagai katalis pertumbuhan wilayah, meningkatkan konektivitas, pemerataan penduduk, dan membuka peluang ekonomi baru di luar Jawa.

Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan

Peningkatan produktivitas, investasi, dan industri membutuhkan dukungan reformasi politik, hukum, dan birokrasi. Akselerasi pertumbuhan berkualitas dicapai dengan peningkatan pendapatan negara yang optimal dan tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang baik, dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Reformasi politik berfokus pada penguatan tata kelola partai politik, peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu, serta pengelolaan identitas kependudukan guna menjamin terpenuhinya hak memilih dan dipilih. Reformasi hukum dilaksanakan melalui penyempurnaan pembentukan regulasi, akses terhadap keadilan terpadu, optimalisasi sistem peradilan pidana, transformasi sistem pemulihan aset, dan pencegahan tindak pidana korupsi. Reformasi Birokrasi (RB) diarahkan pada penguatan prinsip meritokrasi serta reformasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penguatan kebijakan RB Nasional dan manajemen kinerja pembangunan.

Selanjutnya, peningkatan upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba serta rehabilitasi penyalahguna narkotika diarahkan melalui penguatan kapasitas SDM, pemenuhan kebutuhan laboratorium narkotika dan

pusat rehabilitasi, serta optimalisasi pencegahan berbasis komunitas. Pelayanan dan pelindungan Warga Negara Indonesia (WNI), termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri, dioptimalkan melalui perbaikan tata kelola data yang terintegrasi, peningkatan kualitas layanan, penyelesaian kasus, serta kerja sama internasional dalam kerangka pelindungan WNI/PMI di luar negeri. Peningkatan produktivitas BUMN didorong melalui peningkatan daya saing, percepatan pelaksanaan proyek berdampak ekonomi signifikan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta integrasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) BUMN dengan agenda pembangunan.

Prioritas Nasional 8: Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur

Dalam RKP Tahun 2027, akselerasi pertumbuhan berkualitas melalui produktivitas, investasi, dan industri didukung oleh penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama. Peningkatan kerukunan antarumat beragama menjadi kunci stabilitas sosial yang mendukung investasi dan industri. Layanan keagamaan transformatif mendorong produktivitas ekonomi melalui pengembangan ekonomi haji dan umrah, optimalisasi Dana Sosial Keagamaan (DSK) produktif, dan penguatan sertifikasi halal. Selain itu, melalui penguatan pemajuan kebudayaan, modal sosial budaya ditempatkan sebagai motor penggerak potensi lokal untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjaga keberlanjutan stabilitas sosial dan ekonomi tersebut, perubahan iklim perlu diantisipasi karena berpotensi menekan sektor produktif. Oleh karena itu, pelaksanaan pembangunan berketahanan iklim difokuskan melalui pendekatan infrastruktur, teknologi, peningkatan kapasitas, dan penguatan tata kelola. Selain itu, aspek penanggulangan bencana juga perlu diperkuat sebagai bagian integral dalam menjaga keberlanjutan pembangunan melalui pengelolaan risiko bencana yang efisien dan tepat guna. Kejadian bencana dapat mengganggu rantai pasok, produktivitas, dan iklim investasi. Dengan menimbang hal tersebut, langkah mitigasi yang komprehensif menjadi krusial demi menjamin roda ekonomi nasional tetap resilien terhadap bencana dan perubahan iklim. Dengan demikian, upaya penguatan yang holistik dan integratif ini menegaskan peran strategis keselarasan hubungan manusia, alam, dan budaya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing.

4.2.2 Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.2.1.1 Tema Pembangunan Nusa Tenggara Barat Tahun 2027

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027 merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029. Kedudukan RKPD Tahun 2027 menjadi penting karena tidak hanya menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan pada dua tahun pertama, tetapi juga mempercepat pencapaian sasaran pembangunan jangka menengah menuju terwujudnya visi "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia." Penyusunan RKPD Tahun 2027 juga diselaraskan dengan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 yang mengusung tema "Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."

Tahun 2027 menjadi momentum strategis bagi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk mempercepat transformasi pembangunan di tengah dinamika ekonomi global, perubahan iklim, perkembangan teknologi, serta meningkatnya persaingan antarwilayah. Tantangan tersebut memerlukan penguatan fondasi pembangunan yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan Triple Agenda Pembangunan sebagai fokus utama percepatan pembangunan daerah, yang meliputi (1) pengentasan kemiskinan, terutama kemiskinan ekstrem; (2) penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya; serta (3) menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia. Triple Agenda tersebut menjadi pengungkit utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat struktur ekonomi daerah, dan meningkatkan daya saing Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Dari agenda pengentasan kemiskinan, pembangunan diarahkan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan perlindungan sosial, peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemberdayaan ekonomi masyarakat, perluasan kesempatan kerja, serta pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Pengentasan kemiskinan, khususnya kemiskinan ekstrem, menjadi prioritas karena merupakan prasyarat bagi terwujudnya pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Selanjutnya, agenda penguatan ketahanan pangan diarahkan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Penguatan dilakukan melalui peningkatan produktivitas, modernisasi pertanian, hilirisasi komoditas unggulan, pengembangan industri pengolahan, penguatan rantai pasok, peningkatan investasi, pemanfaatan inovasi dan teknologi, serta pemberdayaan petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha. Transformasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan, memperkuat ketahanan pangan daerah, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Sementara itu, agenda menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia diarahkan pada pengembangan destinasi pariwisata yang berkualitas, berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Pengembangan tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas amenitas, atraksi, aksesibilitas, tata kelola destinasi, promosi, serta penguatan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal. Pembangunan pariwisata juga diarahkan untuk memperkuat keterkaitan dengan sektor pertanian, perikanan, industri kreatif, perdagangan, dan jasa sehingga mampu memberikan dampak ekonomi yang lebih luas sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan budaya.

Ketiga agenda tersebut dipandang sebagai pilar utama transformasi pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengentasan kemiskinan akan semakin efektif apabila didukung oleh ketahanan pangan yang kuat melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, sementara pengembangan destinasi wisata berkelas dunia akan memperluas sumber pertumbuhan ekonomi, meningkatkan investasi, memperkuat daya saing daerah, serta membuka kesempatan kerja yang lebih luas. Sinergi ketiga agenda tersebut diharapkan mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas,

meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan mempercepat terwujudnya visi pembangunan daerah.

Berdasarkan arah pembangunan tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menetapkan tema RKPD Tahun 2027, yaitu "**Penguatan Upaya Transformasi dalam Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan Ekosistem Industri Agromaritim serta Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan**." Tema ini merupakan penjabaran operasional dari Triple Agenda RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025–2029 yang menegaskan bahwa percepatan pengentasan kemiskinan harus berjalan secara terpadu dengan penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri agromaritim serta pengembangan destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Melalui sinergi ketiga agenda tersebut, pembangunan Tahun 2027 diharapkan mampu mempercepat terwujudnya NTB yang lebih makmur, berdaya saing, dan mendunia.

4.2.1.2 Prioritas Daerah, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Barat

Prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 disusun dengan mengacu pada agenda pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam RKP Tahun 2027 yang mengusung tema "*Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri*." Dengan demikian, arah pembangunan daerah tetap selaras dengan kebijakan nasional dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan Indonesia. Berdasarkan RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 telah ditetapkan tujuh (7) prioritas pembangunan daerah yang dimaksudkan untuk menjaga kesinambungan pembangunan dan mengoptimalkan efektivitas pengendalian pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029, sebagai berikut : 1) Transformasi sumber daya manusia unggul, kreatif dan inovatif, 2) Tranformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan, 3)

Ketujuh prioritas pembangunan tersebut juga menjadi instrumen strategis dalam mendukung pelaksanaan Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang diamanatkan dalam RPJMN 2025–2029, khususnya pada penguatan ketahanan pangan dan energi, transformasi ekonomi inklusif, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia. Lebih lanjut, prioritas pembangunan daerah Provinsi NTB Tahun 2027 merupakan turunan langsung dari RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 yang mengusung visi: "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan Yang Makmur Dan Mendunia." Sinergi antara RPJMn 2025–2029, RKP Nasional 2027, dan RPJPD 2025–2045 diharapkan dapat memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan pembangunan Tahun 2027 berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat kontribusi Provinsi Nusa Tenggara Barat terhadap pencapaian visi Indonesia Emas 2045.

Gambar 4. 4 Sapta Cita sebagai Prioritas Pembangunan Daerah



Sumber : RPJMD NTB 2025-2029, 2025

Prioritas Daerah 1 : Transformasi sumber daya manusia unggul, kreatif dan inovatif

Dalam mendukung pencapaian prioritas 1, pembangunan difokuskan pada Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif dengan sasaran Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB, Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender.

Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif

Prioritas Daerah 1 diarahkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif sebagai fondasi utama dalam mendukung transformasi pembangunan daerah. Pembangunan sumber daya manusia tidak hanya difokuskan pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, tetapi juga pada pembentukan karakter, penguatan kapasitas individu, serta peningkatan daya saing masyarakat agar mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dinamika global.

Upaya pencapaian tujuan tersebut diwujudkan melalui peningkatan akses dan kualitas layanan dasar yang inklusif dan berkeadilan, dengan sasaran utama meningkatnya akses dan layanan pendidikan berkualitas yang merata di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat, sehingga setiap penduduk memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Di samping itu, pembangunan juga diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas, penguatan upaya promotif dan preventif, serta peningkatan akses terhadap fasilitas kesehatan guna mewujudkan masyarakat yang sehat dan produktif.

Selain aspek pendidikan dan kesehatan, Prioritas Daerah 1 juga menekankan pentingnya penguatan ketahanan dan keharmonisan keluarga serta kesetaraan gender sebagai fondasi pembangunan sosial yang berkelanjutan. Keluarga yang tangguh diharapkan mampu membentuk generasi yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya saing, sementara pengarusutamaan gender menjadi bagian penting dalam memastikan setiap warga, baik laki-laki maupun perempuan, memperoleh kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan secara adil. Dengan demikian, Prioritas Daerah 1 diharapkan mampu menghasilkan sumber daya manusia NTB yang unggul, sehat, inklusif, produktif, dan berdaya saing sebagai modal utama dalam mewujudkan visi "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia."

Dalam rangka mengawal keberhasilan pencapaian tujuan Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif, telah dirumuskan indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Indikator dan Target Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif Tahun 2027

Tujuan	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang Berkarakter Unggul, Sehat, Produktif, dan Kompetitif	1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	0,54 (2023)	0,58	0,58	Sasaran Visi
	2	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	63,70	68,23	68,23	IUP 39

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Pembangunan sumber daya manusia merupakan fondasi utama dalam mewujudkan transformasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Sumber daya manusia yang unggul tidak hanya ditentukan oleh tingkat pendidikan dan kesehatan yang baik, tetapi juga oleh karakter, produktivitas, daya saing, kemampuan beradaptasi terhadap perubahan, serta penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi, dan inovasi. Oleh karena itu, pembangunan manusia diarahkan untuk menghasilkan masyarakat yang berkualitas, berintegritas, sehat, cerdas, berakhlak mulia, serta memiliki kompetensi yang mampu menjawab tantangan pembangunan dan persaingan global.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan difokuskan pada peningkatan akses dan layanan pendidikan berkualitas yang merata di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selanjutnya, pembangunan juga diarahkan pada peningkatan derajat kesehatan masyarakat sebagai prasyarat terbentuknya sumber daya manusia yang produktif dan berdaya saing. Di samping aspek pendidikan dan kesehatan, pembangunan sumber daya manusia juga menempatkan penguatan ketahanan dan keharmonisan keluarga sebagai fondasi utama pembangunan sosial.

1. Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB

Sasaran ini diarahkan untuk menjamin tersedianya layanan pendidikan yang inklusif, adil, dan bermutu bagi seluruh masyarakat, tanpa diskriminasi wilayah, kondisi sosial ekonomi, maupun latar belakang lainnya, guna mendukung terwujudnya sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, dan berkarakter. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	1	Rata-Rata Lama Sekolah Penduduk Usia di Atas 15 Tahun	Tahun	8,87	8,77-8,79	9,02	IUP 5c
	2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,99	14,20-14,23	14,10	IUP 5d
	3	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	11,63	10,20	11,67	IUP 6
	4	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					IUP 5a
		a) Literasi Membaca	%	0	20	10	IUP 5a; a)
		b) Numerasi	%	0	10	10	IUP 5a; b)
	5	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					IUP 5b
		a) Literasi Membaca	%	22,77	28,32-30,82	24,00-28,32	IUP 5b; a)
		b) Numerasi	%	15,17	24,28-26,78	17,00-24,28	IUP 5b; b)

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang unggul, berdaya saing, serta berkarakter sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah strateginya adalah dilaksanakan melalui Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau dengan peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan, dengan memperkuat kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, pengembangan metode pembelajaran yang inovatif, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.

Arah kebijakan :

Arah kebijakan pada Sasaran ini diarahkan pada upaya percepatan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kebijakan ini difokuskan pada pengurangan kesenjangan akses dan kualitas pendidikan antarwilayah, antar kelompok sosial, serta antar jenjang pendidikan, khususnya di wilayah miskin ekstrem, kepulauan, dan daerah dengan tingkat partisipasi pendidikan yang masih rendah.

Higlight Intervensi kebijakan :

Upaya pemerataan akses pendidikan dilakukan dengan memperluas jangkauan layanan pendidikan hingga ke wilayah terpencil, miskin ekstrem, dan kepulauan, melalui pembangunan dan rehabilitasi sarana prasarana pendidikan, pemerataan distribusi guru, serta penguatan satuan pendidikan berbasis komunitas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan layanan pendidikan antarwilayah dan antar kelompok masyarakat. Dalam rangka meningkatkan keterjangkauan pendidikan, Pemerintah Daerah mendorong optimalisasi program bantuan pendidikan, beasiswa, dan subsidi biaya pendidikan bagi peserta didik dari keluarga kurang mampu. Kebijakan ini diharapkan dapat menekan angka putus sekolah serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan pada semua jenjang.

Selanjutnya, penguatan tata kelola pendidikan dilakukan melalui peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, serta monitoring dan evaluasi berbasis data dan sistem informasi terintegrasi. Dengan tata kelola yang efektif dan transparan, penyelenggaraan pendidikan dapat berjalan lebih efisien, akuntabel, dan tepat sasaran. Selain itu, kebijakan ini juga menekankan pada pengembangan pendidikan inklusif dan berkeadilan, dengan memberikan layanan yang ramah bagi peserta didik berkebutuhan khusus dan kelompok rentan. Pendidikan karakter, literasi, dan numerasi terus diperkuat sebagai fondasi pembentukan kepribadian dan kecakapan hidup peserta didik.

Melalui sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, serta penyelarasan pendidikan dengan potensi unggulan daerah, penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau diharapkan mampu mendorong terwujudnya masyarakat NTB yang cerdas, produktif, dan berdaya saing menuju pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Tabel 4. 4 Highlight Intervensi kebijakan Peningkatan Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Penyelenggaraan Pendidikan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Percepatan pemerataan kesempatan memperoleh layanan pendidikan yang bermutu, inklusif, dan berkeadilan di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pembangunan dan pemerataan sarana prasarana sekolah
			Peningkatan kualitas dan distribusi pendidik
			Perluasan layanan bagi kelompok rentan
			Peningkatan kualitas peserta didik
			Penguatan pembelajaran digital
			Dukungan pembiayaan yang berkeadilan
			Pelibatan keluarga dan masyarakat, serta penguatan sistem data dan evaluasi berbasis wilayah

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

2. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat

Sasaran ini diarahkan untuk meningkatkan status kesehatan masyarakat secara menyeluruh melalui penguatan upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan, guna mewujudkan masyarakat yang

sehat, produktif, dan berdaya saing. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 5 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	1	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72,60	73,5	73,5	IUP 1
	2	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13,39 (EPPGM)	19,78	19,78	IUP 2b

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya saing sebagai modal utama pembangunan daerah strateginya adalah Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan melalui penguatan sistem pelayanan kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu.

Arah Kebijakan :

Mengarahkan pembangunan kesehatan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas, merata, dan terjangkau dilaksanakan dengan memperluas akses dan keterjangkauan layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat miskin, kelompok rentan, serta wilayah terpencil, dan kepulauan.

Selanjutnya, pembangunan kesehatan diarahkan pada penguatan upaya promotif dan preventif, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan status gizi masyarakat, serta percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak. Sehingga dalam rangka mewujudkan sistem kesehatan daerah yang tangguh dan berkelanjutan, kebijakan ini didukung oleh penguatan sistem informasi kesehatan, surveilans epidemiologi, kesiapsiagaan menghadapi wabah, serta peningkatan kapasitas laboratorium kesehatan daerah.

Melalui pelaksanaan kebijakan secara terpadu, sinergis, dan berkelanjutan, diharapkan terwujud pelayanan kesehatan yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Highlight Intervensi kebijakan :

Penguatan layanan kesehatan dasar dan rujukan diarahkan untuk memastikan seluruh masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan yang cepat, tepat, dan berkualitas. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan, penguatan layanan rumah sakit rujukan, serta pengembangan sistem rujukan terpadu yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan kegawatdaruratan. Pemerataan dan peningkatan

kompetensi tenaga kesehatan dilaksanakan melalui penataan distribusi tenaga kesehatan secara proporsional di seluruh wilayah, khususnya di daerah terpencil dan kepulauan. Selain itu, pengembangan kapasitas tenaga kesehatan dilakukan secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi untuk meningkatkan profesionalisme dan mutu pelayanan.

Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan difokuskan pada pemenuhan standar pelayanan minimal fasilitas kesehatan. Kegiatan ini meliputi rehabilitasi dan pembangunan fasilitas, pengadaan alat kesehatan modern, serta penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, ramah anak, dan berwawasan lingkungan guna menciptakan layanan yang aman dan nyaman. Digitalisasi dan integrasi sistem informasi kesehatan diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akurasi pelayanan. Melalui pengembangan rekam medis elektronik, sistem rujukan berbasis daring, dan pemanfaatan telemedicine, diharapkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan semakin mudah, cepat, dan terjangkau.

Perluasan akses dan jaminan pembiayaan kesehatan dilakukan dengan mengoptimalkan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional, pemberian bantuan iuran bagi masyarakat miskin, serta penguatan skema pembiayaan daerah. Intervensi kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban biaya kesehatan masyarakat dan menjamin keberlanjutan pelayanan. Penguatan upaya promotif dan preventif berbasis masyarakat diarahkan pada peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam menjaga kesehatan. Kegiatan ini mencakup kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, deteksi dini penyakit, serta pemberdayaan kader kesehatan dan posyandu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat.

Percepatan penurunan AKI dan AKB dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak secara terpadu. Upaya ini meliputi penguatan layanan antenatal, persalinan di fasilitas kesehatan, pelayanan neonatal, serta pengembangan sistem rujukan kegawatdaruratan maternal dan neonatal.

Pengendalian penyakit dan kesiapsiagaan kesehatan diarahkan pada peningkatan kemampuan daerah dalam mencegah, mendeteksi, dan menangani penyakit menular dan tidak menular. Hal ini dilakukan melalui penguatan surveilans epidemiologi, peningkatan cakupan imunisasi, serta kesiapan sistem kesehatan dalam menghadapi potensi wabah dan bencana kesehatan. Peningkatan status gizi masyarakat difokuskan pada penanggulangan stunting, wasting, dan anemia melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif. Upaya ini dilaksanakan dengan penguatan layanan gizi di fasilitas kesehatan, edukasi gizi keluarga, serta kolaborasi lintas sektor dalam penyediaan pangan bergizi.

Tabel 4. 6 Highlight Intervensi kebijakan Peningkatan Derajat Kesehatan Masyarakat

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Peningkatan kualitas dan pemerataan pelayanan Kesehatan melalui penguatan sistem pelayanan	Penguatan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas, merata, dan terjangkau serta penguatan upaya promotif dan preventif, pengendalian penyakit menular dan tidak menular, peningkatan	Peningkatan kapasitas puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan, penguatan layanan rumah sakit rujukan, serta pengembangan sistem rujukan terpadu yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, termasuk pelayanan kegawatdaruratan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
	kesehatan yang komprehensif, berkesinambungan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, dengan mengedepankan prinsip promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif secara terpadu.	status gizi masyarakat, serta percepatan penurunan angka kematian ibu dan anak.	Penataan distribusi tenaga kesehatan secara proporsional di seluruh wilayah dan pengembangan kapasitas tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan
			Rehabilitasi dan pembangunan fasilitas, pengadaan alat kesehatan modern, serta penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas, ramah anak, dan berwawasan lingkungan
			Pengembangan rekam medis elektronik, sistem rujukan berbasis daring, dan pemanfaatan telemedicine
			Pemberian bantuan iuran bagi masyarakat miskin, dan penguatan skema pembiayaan daerah
			Kampanye Perilaku Hidup Bersih dan Sehat, deteksi dini penyakit, serta pemberdayaan kader kesehatan dan posyandu
			Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi, dan anak secara terpadu
			Penanggulangan stunting, wasting, dan anemia melalui intervensi gizi spesifik dan sensitif

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

3. Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat fungsi keluarga sebagai unit sosial dasar dalam pembangunan sumber daya manusia melalui peningkatan kualitas pengasuhan, perlindungan, dan pemberdayaan keluarga, serta penguatan peran perempuan dan laki-laki secara setara dalam seluruh aspek kehidupan, guna mewujudkan masyarakat yang harmonis, inklusif, dan berkeadilan gender. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 7 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal (2025)	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	1	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.515	0,499	0,499	IUP 40
	2	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Indeks	63,70	65,10	65,10	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga, dan pembangunan berwawasan kependudukan diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang

inklusif, adil, dan berkelanjutan dengan menjamin kesetaraan peran, akses, partisipasi, dan manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat. Strategi ini dilaksanakan melalui pengintegrasian perspektif gender dan kependudukan dalam seluruh tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi pembangunan daerah.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan pembangunan daerah diarahkan pada penguatan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga, serta pembangunan berwawasan kependudukan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses pembangunan memberikan kesempatan, akses, partisipasi, dan manfaat yang setara bagi seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi, baik berdasarkan jenis kelamin, usia, kondisi sosial ekonomi, maupun wilayah tempat tinggal.

Pengarusutamaan gender dilaksanakan melalui pengintegrasian perspektif gender dalam seluruh tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah. Upaya ini didukung dengan penguatan kapasitas aparatur, pengembangan perencanaan dan penganggaran responsif gender, serta penyediaan data terpilah sebagai dasar perumusan kebijakan yang tepat sasaran. Dengan demikian, kesenjangan gender dalam berbagai bidang pembangunan dapat ditekan secara sistematis dan berkelanjutan.

Peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga diarahkan pada penguatan peran keluarga sebagai unit terkecil dalam pembangunan sumber daya manusia. Kebijakan ini mendorong peningkatan kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan perlindungan melalui penguatan layanan konseling, pendidikan pengasuhan, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta pencegahan berbagai permasalahan sosial, seperti perkawinan usia anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan penelantaran anak. Keluarga yang tangguh dan harmonis diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuh kembang generasi yang sehat, cerdas, dan berkarakter.

Selanjutnya, pembangunan berwawasan kependudukan dilaksanakan dengan memperhatikan dinamika jumlah, struktur, persebaran, dan kualitas penduduk dalam setiap kebijakan pembangunan. Pemerintah daerah mendorong penguatan program kependudukan dan keluarga berencana, peningkatan akses layanan kesehatan reproduksi, serta optimalisasi pemanfaatan data kependudukan dalam perencanaan pembangunan. Upaya ini bertujuan untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk, menyeimbangkan persebaran penduduk antarwilayah, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia secara menyeluruh.

Dalam rangka menciptakan lingkungan yang aman dan berkeadilan, kebijakan ini juga menekankan pada penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Penguatan kelembagaan layanan perlindungan, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum dan tenaga layanan sosial, serta penguatan peran masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun sistem perlindungan yang terpadu dan berkelanjutan. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan secara terintegrasi melalui sinergi lintas sektor antara perangkat

daerah, lembaga pendidikan, dunia usaha, organisasi masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Penguatan koordinasi dan kolaborasi ini diharapkan mampu meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta memperluas dampak pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Highlight Intervensi kebijakan :

Penguatan pengarusutamaan gender dalam pembangunan diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah telah mempertimbangkan kebutuhan, peran, dan kepentingan perempuan dan laki-laki secara setara. Upaya ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan PUG, penyempurnaan regulasi pendukung, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender. Dengan demikian, pembangunan daerah dapat berjalan lebih inklusif, adil, dan berkeadilan. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak dilaksanakan melalui penguatan sistem pencegahan dan penanganan kekerasan secara terpadu dan berkelanjutan. Pemerintah daerah memperkuat peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, meningkatkan kualitas layanan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial, serta mengembangkan jejaring layanan lintas sektor. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang aman, ramah, dan kondusif bagi tumbuh kembang perempuan dan anak.

Penguatan ketahanan dan keharmonisan keluarga diarahkan pada peningkatan kemampuan keluarga dalam menjalankan fungsi pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan perlindungan. Intervensi dilakukan melalui pengembangan layanan konseling keluarga, pendidikan pengasuhan yang berkualitas, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Keluarga yang tangguh dan harmonis diharapkan mampu menjadi fondasi utama dalam pembentukan sumber daya manusia yang berkualitas. Pencegahan perkawinan usia anak dan permasalahan sosial keluarga dilakukan melalui peningkatan kesadaran masyarakat, penguatan regulasi, serta pendampingan bagi remaja dan keluarga. Kampanye edukasi tentang kesehatan reproduksi, hak anak, dan kesiapan berkeluarga terus digencarkan, disertai dengan penguatan peran sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam membangun pola pikir yang sehat dan bertanggung jawab.

Penguatan program kependudukan dan KB diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan layanan kesehatan reproduksi bagi seluruh lapisan masyarakat. Upaya ini meliputi peningkatan akses terhadap alat kontrasepsi, peningkatan kompetensi tenaga layanan KB, serta penguatan edukasi perencanaan keluarga. Program ini diharapkan mampu mendukung terwujudnya keluarga kecil, sehat, dan sejahtera. Peningkatan kualitas pengasuhan dan perlindungan anak dilakukan melalui pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, penguatan layanan ramah anak, serta peningkatan kapasitas keluarga dan lembaga pendidikan. Upaya ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak anak atas kesehatan, pendidikan, perlindungan, dan partisipasi secara optimal.

Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan ekonomi dan sosial diarahkan pada pemberdayaan perempuan agar lebih mandiri dan produktif. Intervensi dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan kerja, fasilitasi akses permodalan, serta penguatan jejaring usaha. Dengan demikian, perempuan dapat berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

Pengendalian laju pertumbuhan dan persebaran penduduk dilaksanakan melalui penguatan perencanaan kependudukan yang terintegrasi dengan tata ruang dan pembangunan wilayah. Pemerintah daerah mendorong pengendalian urbanisasi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, serta peningkatan layanan dasar di daerah asal migrasi guna menciptakan persebaran penduduk yang lebih seimbang.

Tabel 4. 8 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas keluarga, dan pembangunan berwawasan kependudukan	penguatan pengarusutamaan gender, peningkatan kualitas dan ketahanan keluarga, serta pembangunan berwawasan kependudukan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, adil, dan berkelanjutan	Penguatan kelembagaan PUG, penyempurnaan regulasi pendukung, serta peningkatan kapasitas aparatur dalam perencanaan dan penganggaran responsif gender
			Memperkuat peran UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, meningkatkan kualitas layanan pendampingan hukum, psikologis, dan sosial, serta mengembangkan jejaring layanan lintas sektor
			Pengembangan layanan konseling keluarga, pendidikan pengasuhan yang berkualitas, serta pemberdayaan ekonomi keluarga
			Kampanye edukasi tentang kesehatan reproduksi, hak anak, dan kesiapan berkeluarga terus digencarkan, disertai dengan penguatan peran sekolah, tokoh masyarakat, dan lembaga keagamaan dalam membangun pola pikir yang sehat dan bertanggung jawab
			Peningkatan akses terhadap alat kontrasepsi, peningkatan kompetensi tenaga layanan KB, serta penguatan edukasi perencanaan keluarga
			Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak, penguatan layanan ramah anak, serta peningkatan kapasitas keluarga dan lembaga pendidikan
			Pemberdayaan perempuan agar lebih mandiri dan produktif. Intervensi dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan kerja, fasilitasi akses permodalan, serta penguatan jejaring usaha
			Mendorong pengendalian urbanisasi, pengembangan pusat-pusat pertumbuhan baru, serta peningkatan layanan dasar di daerah asal migrasi

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Prioritas Daerah 2 : Tranformasi Ekonomi Berkeadilan dan Berkelanjutan

Dalam mendukung pencapaian prioritas 2, pembangunan difokuskan pada Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah dengan sasaran Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan. Selanjutnya, transformasi ekonomi juga diarahkan pada Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat dengan sasaran Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran dan Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan. Di

samping itu, Prioritas Daerah 2 juga diarahkan untuk Mewujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali dengan sasaran Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat, Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan, Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan dan Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi

Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah

Peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah diarahkan untuk memperkuat struktur perekonomian yang inklusif, berkelanjutan, dan berbasis potensi unggulan daerah. Pembangunan ekonomi difokuskan pada pengembangan sektor-sektor produktif yang memiliki nilai tambah tinggi, mampu menyerap tenaga kerja, serta berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata.

Selanjutnya, pada peningkatan daya saing ekonomi diarahkan untuk meningkatkan kontribusi ekonomi daerah secara optimal, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan melalui penerapan tata kelola pertambangan yang baik (*good mining practice*). Hal ini menekankan penguatan pengawasan, kepatuhan terhadap regulasi, serta peningkatan nilai tambah hasil tambang melalui pengolahan dan pemurnian di dalam negeri. Selain itu juga mendorong penguatan peran sektor pertambangan dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal melalui peningkatan serapan tenaga kerja, pemberdayaan UMKM, penguatan koperasi, serta pengembangan program tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan (CSR). Pengelolaan dampak lingkungan dan sosial menjadi perhatian utama melalui rehabilitasi lahan pascatambang, perlindungan sumber daya air, serta penguatan pengawasan AMDAL. Melalui integrasi sektor pertambangan dengan sektor industri, perdagangan, dan jasa pendukung, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara jangka panjang.

Dalam rangka mengawal keberhasilan pencapaian tujuan Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah telah dirumuskan indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Indikator dan Target Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah Tahun 2027

Tujuan	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Peningkatan Produktifitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah	**1**	**Laju Pertumbuhan Ekonomi :**					Sasaran Visi
	1a	**- Dengan Tambang**	**%**	**3,22**	**7,70**	**4.8-5.7**	
	1b	**- NonTambang**	**%**	**8,33**	**6,03-6,63**	**6,03-6,63**	
	2	**Kontribusi PDRB Provinsi**	**%**	**0,82**	**0,87**	**0,83**	Sasaran Visi

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 (Hasil Rakortekbang 2026)

1. Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan

Sasaran meningkatnya produktivitas UMKM, koperasi, dan nilai tambah perdagangan diarahkan untuk memperkuat peran sektor usaha rakyat sebagai penggerak utama perekonomian daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Sasaran ini menekankan peningkatan kapasitas produksi, kualitas produk, efisiensi usaha, serta daya saing UMKM dan koperasi melalui pemanfaatan teknologi, inovasi, dan penguatan manajemen usaha. Pemerintah daerah mendorong sinergi kebijakan dengan Kementerian/Lembaga maupun mitra Pembangunan lainnya dalam rangka memperluas akses pembinaan, pembiayaan, dan pemasaran bagi pelaku usaha.

Selain itu, sasaran ini juga diarahkan pada penguatan peran koperasi sebagai wadah ekonomi kolektif yang mampu meningkatkan posisi tawar anggota dalam rantai pasok dan perdagangan. Peningkatan nilai tambah perdagangan dilakukan melalui pengembangan sistem distribusi yang efisien, penguatan jejaring pasar, peningkatan kualitas kemasan dan branding produk, serta perluasan akses pasar digital dan ekspor. Melalui penguatan UMKM, koperasi, dan sektor perdagangan secara terintegrasi, diharapkan tercipta struktur ekonomi daerah yang lebih produktif, tangguh, dan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 10 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	1	Rasio kewirausahaan Daerah	%	10,03	2,42	10,60	IUP 14b
	2	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0,93	0,99	0,99	IUP 14c
	3	Kontribusi Sektor Perdagangan terhadap PDRB	%	14,67	14,80	14,80	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Strategi penguatan UMKM, kewirausahaan, dan koperasi berbasis inovasi dan digitalisasi diarahkan untuk meningkatkan daya saing, produktivitas, serta keberlanjutan usaha melalui pemanfaatan teknologi, pengembangan kreativitas, dan penerapan model bisnis modern. Strategi ini mendorong transformasi UMKM dan koperasi dari pola usaha konvensional menjadi usaha yang berorientasi pada nilai tambah, efisien, dan adaptif terhadap dinamika pasar. Koperasi diposisikan sebagai wadah penguatan ekonomi anggota dan penggerak ekonomi rakyat yang mampu memperkuat akses permodalan, pemasaran, dan rantai pasok secara kolektif. Melalui sinergi antara UMKM, wirausaha, dan koperasi, diharapkan tercipta ekosistem usaha yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Pada sektor perdagangan, strateginya adalah perluasan akses pasar dan penguatan sistem perdagangan daerah yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk

lokal, memperluas jaringan pemasaran, serta memperkuat efisiensi distribusi barang dan jasa secara berkelanjutan. Strategi ini menekankan pengembangan sistem perdagangan yang terintegrasi melalui pemanfaatan teknologi digital, penguatan infrastruktur logistik, serta peningkatan kualitas produk dan layanan pelaku usaha. Pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan Kementerian/Lembaga dalam rangka mendorong promosi produk daerah, fasilitasi ekspor, dan pengembangan pasar domestik maupun internasional. Selain itu, strategi ini mendorong penguatan peran UMKM, koperasi, dan pelaku usaha lokal dalam rantai pasok perdagangan melalui peningkatan kapasitas pemasaran, standardisasi mutu, sertifikasi produk, serta penguatan branding daerah. Pengembangan pasar digital, pusat distribusi regional, dan kemitraan dengan dunia usaha menjadi bagian penting dalam memperluas akses pasar. Melalui integrasi antara produksi, distribusi, dan pemasaran, diharapkan tercipta sistem perdagangan daerah yang efisien, inklusif, dan berdaya saing tinggi, sehingga mampu meningkatkan nilai tambah ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan dari strategi penguatan UMKM, kewirausahaan, dan koperasi berbasis inovasi dan digitalisasi diarahkan untuk membangun ekosistem usaha yang modern, terintegrasi, dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah. Kebijakan ini menekankan pada peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan pengelola koperasi dalam pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan usaha profesional, serta pengembangan jaringan usaha dan kemitraan. Pemerintah daerah mendorong penguatan kelembagaan koperasi agar mampu berperan sebagai pusat layanan usaha, pembiayaan, pemasaran, dan distribusi bagi anggotanya. Selain itu, arah kebijakan ini juga difokuskan pada penguatan kolaborasi antara UMKM, koperasi, dunia usaha, lembaga keuangan, dan perguruan tinggi guna memperluas akses pasar dan meningkatkan daya saing produk daerah secara berkelanjutan.

Pada sektor perdagangan Arah kebijakannya diarahkan pada pembangunan ekosistem perdagangan yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing melalui penguatan infrastruktur distribusi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas tata kelola perdagangan. Kebijakan ini menekankan pengembangan jaringan pemasaran produk daerah di tingkat regional, nasional, dan internasional melalui promosi terpadu, fasilitasi kemitraan usaha, serta penguatan peran UMKM dan koperasi dalam rantai pasok. Pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia untuk mendukung perluasan pasar, peningkatan ekspor, dan perlindungan konsumen.

Selain itu, arah kebijakan juga difokuskan pada peningkatan efisiensi distribusi barang melalui penguatan sistem logistik daerah, stabilisasi pasokan dan harga, serta pengembangan pusat-pusat perdagangan yang representatif dan terstandar. Penguatan regulasi perdagangan, perlindungan produk lokal, serta pengendalian praktik usaha tidak sehat menjadi bagian penting dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif. Melalui kebijakan yang terarah dan berkelanjutan, diharapkan sistem perdagangan daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan nilai tambah produk lokal, serta memperluas kesempatan usaha dan kerja bagi masyarakat.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan difokuskan pada peningkatan kapasitas UMKM, wirausaha, dan koperasi melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, digitalisasi, serta penguatan tata kelola kelembagaan koperasi. Intervensi diarahkan pada fasilitasi transformasi digital UMKM dan koperasi melalui pengembangan platform pemasaran daring, sistem pencatatan keuangan digital, dan integrasi dengan layanan pembayaran elektronik. Pemerintah daerah juga memperkuat peran koperasi sebagai agregator produksi dan pemasaran, pusat distribusi bahan baku, serta penyedia layanan pembiayaan bagi anggota. Selain itu, dukungan terhadap akses permodalan, pendampingan usaha, sertifikasi produk, standardisasi mutu, penguatan branding, dan pengemasan produk terus ditingkatkan. Pengembangan inkubator bisnis, pusat inovasi, serta kemitraan strategis dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan menjadi bagian penting dalam mempercepat pertumbuhan UMKM dan koperasi yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Pada sektor perdagangan *Highlight* intervensi kebijakan difokuskan pada peningkatan kualitas produk melalui standardisasi, sertifikasi, pengemasan, dan penguatan merek dagang daerah agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah juga memperkuat infrastruktur perdagangan dan logistik melalui pengembangan pasar rakyat modern, pusat distribusi, gudang penyimpanan, serta sistem transportasi distribusi yang efisien. Penguatan sistem informasi perdagangan, pemantauan harga dan stok barang kebutuhan pokok, serta pengembangan mekanisme stabilisasi pasar menjadi bagian penting dalam menjaga keberlanjutan sistem perdagangan. Selain itu, intervensi kebijakan mencakup fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha lokal dengan pelaku usaha besar, distributor, dan platform digital, serta dukungan akses pembiayaan dan asuransi perdagangan. Penguatan perlindungan konsumen, pengawasan peredaran barang, serta penegakan regulasi perdagangan terus ditingkatkan guna menciptakan iklim usaha yang sehat, adil, dan berdaya saing tinggi.

Tabel 4. 11 *Highlight* Intervensi Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan di NTB Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan Prioritas
1	Strategi penguatan UMKM, kewirausahaan, dan koperasi berbasis inovasi dan digitalisasi	- Peningkatan kapasitas pelaku UMKM dan pengelola koperasi dalam pemanfaatan teknologi digital, pengelolaan usaha profesional, serta pengembangan jaringan usaha dan kemitraan	Peningkatan kapasitas UMKM, wirausaha, dan koperasi melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen usaha, dan pengembangan kompetensi digital
			Penguatan tata kelola dan kelembagaan koperasi agar lebih profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan anggota
			Fasilitasi transformasi digital UMKM dan koperasi melalui pengembangan *platform* pemasaran *daring*
			Pengembangan koperasi sebagai pusat penyedia bahan baku, logistik, dan layanan usaha terpadu
			Peningkatan akses pembiayaan melalui kemitraan dengan lembaga keuangan, perbankan, dan *fintech*

No	Strategi	Arah Kebijakan	Program dan Kegiatan Prioritas
			Penyediaan layanan pendampingan usaha secara berkelanjutan bagi UMKM dan koperasi
2.	Peningkatan daya saing produk lokal, memperluas jaringan pemasaran, serta memperkuat efisiensi distribusi barang dan jasa secara berkelanjutan	Pembangunan ekosistem perdagangan yang modern, terintegrasi, dan berdaya saing melalui penguatan infrastruktur distribusi, pemanfaatan teknologi digital, serta peningkatan kualitas tata kelola perdagangan	Pengembangan dan penguatan platform perdagangan daring (*e-commerce*) produk lokal
			Peningkatan kualitas produk melalui standardisasi mutu, sertifikasi, pengemasan, dan penguatan branding produk daerah
			Penguatan infrastruktur distribusi dan logistik, termasuk gudang, *cold storage*, dan sistem transportasi barang
			Penguatan sistem informasi perdagangan, pemantauan harga, dan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok
			Peningkatan akses pembiayaan, asuransi perdagangan, dan dukungan permodalan bagi pelaku usaha
			Penguatan sistem stabilisasi pasokan dan harga barang strategis
			Pengawasan peredaran barang dan penertiban praktik perdagangan tidak sehat

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat

Tujuan terwujudnya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan merata melalui penguatan sektor-sektor produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta perluasan kesempatan kerja dan berusaha. Selain itu, tujuan ini juga menekankan pentingnya peningkatan akses masyarakat terhadap layanan keuangan yang inklusif, terjangkau, dan berkelanjutan sebagai prasyarat utama dalam mendorong produktivitas dan pengembangan usaha. Pemerintah daerah mendorong perluasan akses pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan mikro, koperasi simpan pinjam, serta program pembiayaan pemerintah lainnya. Penguatan literasi dan inklusi keuangan menjadi bagian penting dalam memastikan masyarakat mampu memanfaatkan produk dan layanan keuangan secara bijak untuk kegiatan produktif.

Dalam rangka mengawal keberhasilan pencapaian tujuan Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat, telah dirumuskan indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 12 Indikator dan Target Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat Tahun 2027

Tujuan	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Peningkatan Pendapatan Per Kapita Masyarakat	**1**	**PDRB Per Kapita**	**Juta Rupiah**	**33,67**	**45,25**	**36,63**	Sasaran Visi

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 (Hasil Analisa Bappeda, 2026)

2. Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran

Sasaran meningkatnya produktivitas tenaga kerja dan menurunnya tingkat pengangguran diarahkan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika pasar kerja. Peningkatan produktivitas dilakukan melalui penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi, sertifikasi kompetensi, serta pengembangan keterampilan berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri. Selanjutnya, penurunan tingkat pengangguran juga didorong melalui peningkatan akses masyarakat terhadap pelatihan berbasis kompetensi, pendampingan wirausaha, serta dukungan permodalan bagi usaha produktif. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, pemuda, dan lulusan baru agar memiliki keterampilan yang relevan dan peluang kerja yang memadai. Melalui integrasi kebijakan pendidikan, ketenagakerjaan, dan pengembangan ekonomi daerah, diharapkan tercipta tenaga kerja yang produktif, terserap secara optimal, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 13 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	1	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	36.010,28	35.763,20	37.025,62	
	2	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,05	2,00-2,69	2,00-2,69	Sasaran Visi

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029 (Hasil Analisa Bappeda NTB, 2026)

Strategi :

Dalam peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran strateginya adalah penguatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing, dan adaptif terhadap dinamika pasar kerja. Strategi ini dilaksanakan melalui pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kebutuhan dunia usaha dan industri, peningkatan sertifikasi kompetensi, serta penguatan sistem pemagangan dan penempatan kerja. Selain itu, strategi juga menekankan penguatan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru melalui

pengembangan UMKM, industri kreatif, dan sektor produktif lainnya. Pemerintah daerah memperkuat kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga pendidikan, dan instansi terkait. Penguatan layanan ketenagakerjaan berbasis digital dan inklusif menjadi bagian penting dalam mendukung efektivitas strategi ini.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan peningkatan produktivitas tenaga kerja dan penurunan tingkat pengangguran difokuskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang berkualitas, relevan, dan terjangkau. Kebijakan diarahkan untuk memperkuat kapasitas lembaga pelatihan kerja, balai latihan kerja, serta pusat pengembangan keterampilan berbasis potensi daerah. Pemerintah daerah juga mengarahkan kebijakan pada perluasan kesempatan kerja melalui pengembangan sektor unggulan daerah, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja lokal.

Selain itu, arah kebijakan difokuskan pada penguatan perlindungan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta pengembangan sistem ketenagakerjaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok muda, perempuan, dan kelompok rentan agar memperoleh kesempatan kerja yang setara.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight Intervensi Kebijakan dalam rangka meningkatkan produktivitas tenaga kerja dan menurunkan tingkat pengangguran diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi, keterampilan, dan daya saing tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar. Intervensi dilakukan melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi berbasis industri, fasilitasi sertifikasi kompetensi, serta penguatan balai latihan kerja dan lembaga pelatihan swasta.

Selain itu, intervensi kebijakan difokuskan pada penguatan sistem pemagangan dan penempatan kerja melalui kerja sama dengan dunia usaha, industri, UMKM, dan lembaga pendidikan. Pemerintah daerah memfasilitasi program magang terstruktur, layanan bursa kerja, serta mekanisme job matching yang efektif untuk mempercepat pertemuan antara pencari kerja dan pengguna tenaga kerja. Pengembangan sistem informasi pasar kerja berbasis digital juga diperkuat agar masyarakat dapat mengakses informasi lowongan kerja, peluang pelatihan, dan pengembangan karier secara mudah, transparan, dan berkelanjutan.

Highlight intervensi juga diarahkan pada penguatan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja baru melalui pelatihan usaha produktif, pendampingan bisnis, inkubasi usaha, serta dukungan akses permodalan. Upaya ini bertujuan mendorong pencari kerja dan tenaga kerja muda untuk bertransformasi menjadi pelaku usaha mandiri yang mampu menyerap tenaga kerja baru. Di sisi lain, perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan, perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas melalui program peningkatan keterampilan, fasilitasi kerja layak, serta pendampingan karier yang inklusif.

Selanjutnya, intervensi kebijakan diperkuat melalui peningkatan tata kelola ketenagakerjaan, pengawasan hubungan industrial, serta perlindungan hak-hak pekerja guna menciptakan iklim kerja yang kondusif dan berkeadilan. Sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait terus ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelatihan,

sertifikasi, pemagangan, dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan. Melalui integrasi berbagai intervensi tersebut, diharapkan produktivitas tenaga kerja meningkat secara signifikan, kesempatan kerja semakin luas, dan tingkat pengangguran dapat ditekan secara berkelanjutan.

Tabel 4. 14 Highlight Intervensi Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran di NTB Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Penguatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten, berdaya saing, dan adaptif terhadap dinamika pasar kerja	- Peningkatan akses masyarakat terhadap pelatihan kerja yang berkualitas, relevan, dan terjangkau - Penguatan perlindungan tenaga kerja, peningkatan kesejahteraan pekerja, serta pengembangan sistem ketenagakerjaan yang adil, transparan, dan berkelanjutan	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja
			Penguatan Pemagangan dan Penempatan Kerja
			Pengembangan Sistem Informasi Pasar Kerja
			Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Produktif
			Pemberdayaan Kelompok Rentan dan Pemuda
			Penguatan pemberdayaan pekerja migran Indonesia setelah kembali ke daerah asal
			Penguatan Tata Kelola Ketenagakerjaan
			Pengawasan hubungan industrial
			Perlindungan hak-hak pekerja guna menciptakan iklim kerja yang kondusif dan berkeadilan
			Sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait terus ditingkatkan dalam penyelenggaraan pelatihan, sertifikasi, pemagangan, dan pengembangan sistem informasi ketenagakerjaan

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

3. Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan

Dalam mewujudkan sistem pembiayaan daerah yang inklusif, merata, dan berkelanjutan sebagai fondasi penguatan ekonomi masyarakat. Sasaran ini menempatkan akses terhadap layanan keuangan formal sebagai instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan usaha produktif, peningkatan pendapatan masyarakat, serta pengurangan kesenjangan ekonomi antarwilayah dan antarkelompok sosial. Pemerintah daerah berupaya memastikan bahwa UMKM, koperasi, wirausaha, dan masyarakat berpenghasilan rendah memiliki kesempatan yang sama dalam memperoleh pembiayaan, layanan perbankan, serta produk jasa keuangan lainnya secara mudah, aman, dan terjangkau.

Selanjutnya untuk mendukung pencapaian sasaran tersebut, pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan lembaga jasa keuangan, regulator, dan pemangku kepentingan terkait, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, guna meningkatkan literasi dan inklusi keuangan masyarakat. Dengan meningkatnya pemahaman dan kapasitas pengelolaan keuangan, masyarakat diharapkan mampu memanfaatkan layanan keuangan secara produktif dan bertanggung jawab. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 15 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPDTahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	1	Inklusi Keuangan	%	80,51	89,80	89,80	IUP 34

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan dengan strategi Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam Akses Pembiayaan Produktif dan Kolaborasi Lintas Sektor untuk Inovasi Pembiayaan Daerah diarahkan untuk memperkuat inklusi keuangan sebagai fondasi utama pertumbuhan ekonomi daerah yang berkelanjutan. Kebijakan ini menempatkan UMKM dan koperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat yang perlu didukung melalui kemudahan akses terhadap sumber pembiayaan yang terjangkau, aman, dan sesuai dengan karakteristik usaha. Pemerintah daerah mendorong penguatan literasi dan inklusi keuangan masyarakat melalui sinergi dengan lembaga jasa keuangan, perbankan, guna menciptakan ekosistem pembiayaan yang sehat dan inklusif.

Strategi ini difokuskan pada pemberdayaan UMKM dan koperasi melalui peningkatan kapasitas manajemen keuangan, penyusunan laporan keuangan yang bankable, serta pendampingan dalam pemenuhan persyaratan pembiayaan. Pemerintah daerah memfasilitasi akses terhadap berbagai skema pembiayaan produktif, seperti kredit usaha rakyat, pembiayaan mikro, pembiayaan syariah, modal ventura, dan pembiayaan berbasis teknologi finansial. Selain itu, koperasi diperkuat perannya sebagai lembaga intermediasi pembiayaan bagi anggota, pusat pengelolaan dana usaha, serta mitra strategis lembaga keuangan dalam memperluas jangkauan layanan pembiayaan di tingkat lokal.

Selain itu, pemerintah daerah mendorong integrasi kebijakan pembiayaan dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan kewirausahaan, inkubasi bisnis, dan penguatan pasar, sehingga akses keuangan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi benar-benar mendorong peningkatan produktivitas dan nilai tambah usaha. Penguatan sistem penjaminan kredit, subsidi bunga, dan insentif pembiayaan juga dilakukan untuk menekan risiko usaha dan meningkatkan keberanian pelaku UMKM dan koperasi dalam mengembangkan usahanya.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan peningkatan ketersediaan akses keuangan diarahkan pada penguatan ekosistem pembiayaan daerah yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan UMKM, koperasi, dan wirausaha produktif. Kebijakan ini menekankan perluasan jangkauan layanan keuangan formal melalui sinergi dengan lembaga perbankan, lembaga keuangan nonbank, dan regulator, khususnya Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, dalam rangka meningkatkan literasi, inklusi, dan perlindungan konsumen jasa keuangan.

Selain itu, arah kebijakan difokuskan pada peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi agar mampu mengakses pembiayaan secara mandiri dan berkelanjutan melalui penguatan manajemen usaha, transparansi keuangan, dan peningkatan kelayakan usaha (*bankability*). Pemerintah daerah mendorong penguatan peran koperasi sebagai lembaga intermediasi pembiayaan dan agregator ekonomi anggota, serta memperluas pemanfaatan teknologi finansial untuk mempercepat proses pembiayaan. Integrasi kebijakan pembiayaan dengan program pemberdayaan ekonomi, pengembangan pasar, dan peningkatan produktivitas menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa akses keuangan benar-benar berdampak pada pertumbuhan usaha dan kesejahteraan masyarakat.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan difokuskan pada peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM, koperasi, dan masyarakat melalui edukasi keuangan, pendampingan penyusunan laporan keuangan, serta fasilitasi pembukaan akses rekening dan layanan keuangan formal. Intervensi ini bertujuan meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap produk pembiayaan, manajemen risiko, dan kewajiban keuangan, sehingga mampu memanfaatkan pembiayaan secara produktif dan bertanggung jawab. Pemerintah daerah memfasilitasi akses UMKM dan koperasi terhadap berbagai skema pembiayaan produktif, seperti kredit usaha rakyat, pembiayaan mikro, pembiayaan syariah, modal ventura, dan pembiayaan berbasis teknologi. Dukungan juga diberikan melalui penguatan sistem penjaminan kredit, subsidi bunga, serta pembentukan dana bergulir daerah untuk menekan risiko pembiayaan dan meningkatkan keberanian pelaku usaha dalam melakukan ekspansi.

Selain itu, intervensi diarahkan pada penguatan peran koperasi sebagai pusat layanan pembiayaan, pendampingan usaha, dan pengelolaan modal anggota. Koperasi didorong untuk mengembangkan unit simpan pinjam yang sehat, transparan, dan terintegrasi dengan sistem keuangan nasional. Pemerintah daerah juga memfasilitasi kemitraan antara koperasi, perbankan, dan lembaga keuangan lainnya dalam penyaluran pembiayaan berbasis klaster dan rantai nilai. Highlight kebijakan juga mencakup pengembangan inovasi pembiayaan daerah melalui kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan komunitas bisnis. Inovasi ini meliputi pembiayaan berbasis digital, pembiayaan klaster usaha, pembiayaan berbasis komoditas unggulan, serta pemanfaatan platform teknologi untuk mempercepat proses pengajuan, penilaian, dan monitoring pembiayaan.

Tabel 4. 16 Highlight Intervensi Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan di NTB Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Pemberdayaan UMKM dan Koperasi dalam Akses Pembiayaan Produktif dan Kolaborasi Lintas Sektor untuk	- Penguatan ekosistem pembiayaan daerah yang inklusif, terintegrasi, dan berkelanjutan guna mendukung pengembangan UMKM,	Peningkatan literasi dan inklusi keuangan bagi pelaku UMKM, koperasi, dan masyarakat
			Fasilitasi Akses Pembiayaan Produktif untuk akses kredit usaha rakyat, pembiayaan mikro, dan pembiayaan syariah

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
	Inovasi Pembiayaan Daerah	koperasi, dan wirausaha produktif - peningkatan kapasitas UMKM dan koperasi agar mampu mengakses pembiayaan secara mandiri dan berkelanjutan melalui penguatan manajemen usaha, transparansi keuangan, dan peningkatan kelayakan usaha (*bankability*)	Penguatan Peran Koperasi sebagai Lembaga Intermediasi Pengembangan Inovasi Pembiayaan Daerah berbasis klaster usaha dan rantai nilai Penguatan Kolaborasi Lintas Sektor Kemitraan pemerintah, perbankan, koperasi, dan dunia usaha

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali

Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui Inflasi Daerah yang Terkendali diarahkan untuk menjaga stabilitas harga sebagai fondasi utama dalam meningkatkan daya beli masyarakat, memperkuat ketahanan ekonomi rumah tangga, serta mewujudkan pemerataan kesejahteraan secara berkelanjutan. Inflasi yang terkendali menjadi prasyarat penting dalam menciptakan iklim ekonomi yang stabil, kondusif bagi investasi, serta mendukung keberlangsungan usaha masyarakat, khususnya UMKM dan sektor ekonomi rakyat.

Pemerintah daerah berkomitmen memperkuat sinergi dengan Lembaga terkait dalam pengendalian inflasi melalui penguatan sistem pemantauan harga, analisis perkembangan pasar, serta penyediaan data yang akurat dan terintegrasi. Kebijakan pengendalian inflasi diarahkan pada pengelolaan permintaan dan penawaran secara seimbang, khususnya terhadap komoditas kebutuhan pokok dan strategis yang berpengaruh besar terhadap tingkat inflasi daerah.

Selain itu, tujuan ini difokuskan pada penguatan ketahanan pangan dan kelancaran distribusi barang melalui peningkatan produksi lokal, penguatan cadangan pangan, optimalisasi sistem logistik, serta pengendalian rantai pasok. Pemerintah daerah mendorong pengembangan pusat distribusi, pasar rakyat, dan sistem perdagangan yang efisien untuk menekan biaya distribusi dan meminimalkan disparitas harga antarwilayah. Upaya ini dilakukan agar masyarakat di seluruh wilayah dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang wajar dan terjangkau.

Dalam mendukung pemerataan ekonomi yang berkeadilan, pengendalian inflasi juga diintegrasikan dengan kebijakan perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pemerintah daerah memperkuat program bantuan sosial, subsidi tepat sasaran, serta penguatan UMKM dan koperasi sebagai instrumen stabilisasi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan demikian, dampak fluktuasi harga dapat diminimalkan, terutama bagi kelompok rentan dan masyarakat miskin. Adapun indikator

tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 17 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Terwujudnya Peningkatan Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi yang Berkeadilan melalui inflasi daerah yang terkendali	1a	Tingkat Kemiskinan	%	11,38	9,9-10,65	9.80-10.80	Sasaran Visi
	1b	Tingkat Kemiskinan Ekstrem NTB	%	0,40	0,84	0,35	
	2	Rasio Gini	Poin	0,364	0,347-0,351	0.351-0.353	Sasaran Visi
	3	Tingkat Inflasi	%	3,01	2,20-3,52	2,20-3,52	IUP 32

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

1. Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat

Pada sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan kualitas kehidupan masyarakat yang lebih layak, sejahtera, dan bermartabat melalui peningkatan daya beli, perluasan akses terhadap layanan dasar, serta penguatan kapasitas ekonomi rumah tangga. Sasaran ini menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama pembangunan daerah yang tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari terpenuhinya kebutuhan dasar, meningkatnya kualitas sumber daya manusia, serta terciptanya lingkungan sosial dan ekonomi yang kondusif.

Sasaran ini juga difokuskan pada peningkatan akses dan kualitas layanan dasar, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan layak, air bersih, sanitasi, dan energi. Pemerintah daerah mendorong pemerataan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi hingga ke wilayah pedesaan dan terpencil, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara adil dan merata. Upaya ini diintegrasikan dengan program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat untuk memperkuat ketahanan sosial-ekonomi rumah tangga.

Selain itu, peningkatan taraf hidup masyarakat diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, peningkatan keterampilan kerja, serta pengembangan karakter dan produktivitas. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan ketahanan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak sebagai fondasi utama kesejahteraan jangka panjang. Pembangunan yang berperspektif inklusif dan berkeadilan menjadi prinsip utama dalam memastikan bahwa kelompok rentan, masyarakat miskin, dan penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 18 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat di Provinsi NTB Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	1	Indeks Kesejahteraan Sosial	Indeks	49,21	48,00	50,50	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Dalam meningkatkan taraf hidup Masyarakat strateginya adalah Pengembangan Program Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran dan Responsif diarahkan untuk memperkuat sistem perlindungan sosial sebagai instrumen utama dalam menjaga dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya kelompok miskin, rentan, dan berisiko sosial ekonomi. Strategi ini bertujuan memastikan bahwa setiap bentuk bantuan dan jaminan sosial yang diberikan mampu melindungi masyarakat dari tekanan ekonomi, fluktuasi harga, bencana, dan kondisi darurat lainnya, sehingga daya beli, ketahanan rumah tangga, dan kesejahteraan sosial dapat terjaga secara berkelanjutan.

Strategi ini juga menekankan penguatan sistem perlindungan sosial yang responsif terhadap dinamika sosial dan ekonomi, termasuk dampak inflasi, bencana alam, krisis kesehatan, dan perlambatan ekonomi. Pemerintah daerah mengembangkan mekanisme respons cepat melalui bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi layanan dasar, serta dukungan sementara bagi masyarakat terdampak. Skema bantuan yang fleksibel dan adaptif ini diharapkan mampu menjaga stabilitas konsumsi rumah tangga, mencegah penurunan kualitas hidup, serta mengurangi risiko kemiskinan baru.

Selain itu, pengembangan program perlindungan sosial diintegrasikan dengan upaya pemberdayaan dan peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Penerima manfaat tidak hanya memperoleh bantuan bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan untuk mengikuti program pelatihan keterampilan, pendampingan usaha, serta fasilitasi akses pembiayaan produktif. Pendekatan ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi, meningkatkan pendapatan keluarga, dan memperkuat keberlanjutan kesejahteraan dalam jangka panjang.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan pengembangan program perlindungan sosial diarahkan pada penguatan sistem bantuan dan jaminan sosial yang inklusif, adaptif, dan berbasis data guna melindungi masyarakat dari risiko sosial dan tekanan ekonomi. Kebijakan ini bertujuan memastikan bahwa kelompok miskin, rentan, dan terdampak krisis memperoleh perlindungan yang memadai sehingga mampu mempertahankan daya beli, kualitas hidup, dan ketahanan ekonomi rumah tangga.

Selain itu, arah kebijakan difokuskan pada penguatan responsivitas program perlindungan sosial terhadap dinamika sosial ekonomi, seperti inflasi, bencana, krisis kesehatan, dan gejolak ekonomi. Pemerintah daerah mengembangkan mekanisme respons cepat dan fleksibel agar bantuan dapat disalurkan secara tepat waktu sesuai

dengan tingkat kebutuhan masyarakat. Kebijakan perlindungan sosial juga diintegrasikan dengan program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, dan perluasan akses kerja, sehingga tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga mendorong kemandirian masyarakat.

Arah kebijakan ini turut menekankan penguatan tata kelola, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyaluran dan pengawasan bantuan. Dengan sistem yang terintegrasi dan partisipatif, perlindungan sosial diharapkan mampu menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan difokuskan pada pemutakhiran dan integrasi data kesejahteraan sosial melalui verifikasi lapangan, sinkronisasi antarinstansi, serta pemanfaatan sistem informasi digital. Upaya ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran penerima manfaat, mengurangi risiko tumpang tindih bantuan, dan memastikan keadilan distribusi program perlindungan sosial.

Pemerintah daerah memperkuat penyaluran bantuan sosial secara tepat waktu dan adaptif melalui pengembangan skema bantuan tunai, bantuan pangan, subsidi layanan dasar, serta bantuan khusus bagi masyarakat terdampak inflasi, bencana, dan krisis ekonomi. Mekanisme respons cepat dikembangkan agar masyarakat memperoleh perlindungan segera pada saat terjadi guncangan sosial ekonomi.

Selain itu, intervensi diarahkan pada integrasi bantuan sosial dengan program pemberdayaan ekonomi, seperti pelatihan keterampilan kerja, pendampingan usaha mikro, fasilitasi akses pembiayaan, dan penguatan UMKM. Pendekatan ini bertujuan mendorong penerima manfaat untuk bertransformasi menjadi pelaku ekonomi yang produktif dan mandiri.

Highlight kebijakan juga mencakup penguatan tata kelola dan akuntabilitas program melalui peningkatan sistem monitoring dan evaluasi, pengawasan penyaluran bantuan, serta pengembangan mekanisme pengaduan masyarakat yang mudah diakses. Transparansi informasi dan pelibatan masyarakat dalam pengawasan menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan publik.

Selanjutnya, pemerintah daerah memperluas kolaborasi dengan dunia usaha, lembaga sosial, organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi dalam mendukung penyelenggaraan perlindungan sosial. Kemitraan ini diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan, meningkatkan kualitas pendampingan, serta memperkuat keberlanjutan program.

Tabel 4. 19 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat di Provinsi NTB Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Pengembangan Program Perlindungan Sosial yang Tepat Sasaran dan Responsif	- Penguatan sistem bantuan dan jaminan sosial yang inklusif, adaptif, dan berbasis data guna melindungi masyarakat dari	Pemutakhiran dan Integrasi Data Kesejahteraan Sosial
			Penyaluran Bantuan Sosial yang Tepat Waktu dan Adaptif
			Pengembangan Mekanisme Respons Cepat Sosial

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
		risiko sosial dan tekanan ekonomi - Penguatan responsivitas program perlindungan sosial terhadap dinamika sosial ekonomi. - Penguatan tata kelola, koordinasi lintas sektor, serta pemanfaatan teknologi digital dalam penyaluran dan pengawasan bantuan	Integrasi Bantuan Sosial dengan Program Pemberdayaan Ekonomi
			Penguatan Perlindungan bagi Kelompok Rentan
			Pemanfaatan Teknologi Digital dalam Penyaluran Bantuan
			Pelatihan aparatur dan pendamping sosial
			Pengembangan program CSR untuk mendukung perlindungan sosial

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

2. Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan

Pada sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan sistem pangan daerah yang kuat, mandiri, dan berdaya saing dalam mendukung kesejahteraan masyarakat. Pencapaian sasaran ini dilakukan melalui penguatan produksi pangan lokal yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara ramah lingkungan. Selain itu, pemerintah daerah mendorong penguatan cadangan pangan, stabilisasi pasokan, dan pengembangan sistem distribusi yang efisien guna menjamin ketersediaan pangan sepanjang waktu, baik dalam kondisi normal maupun darurat.

Di sisi keterjangkauan, upaya difokuskan pada pengendalian harga pangan, penguatan jaringan distribusi, serta pengurangan disparitas harga antarwilayah melalui pengembangan infrastruktur logistik dan pasar pangan. Intervensi ini bertujuan agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya kelompok rentan dan berpenghasilan rendah, dapat mengakses pangan yang cukup, aman, dan bergizi dengan harga yang terjangkau. Pemerintah daerah juga memperkuat peran kelembagaan pangan, koperasi, dan UMKM pangan sebagai bagian dari rantai pasok yang inklusif dan berkeadilan.

Dalam aspek pemanfaatan pangan, kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas konsumsi masyarakat melalui edukasi gizi seimbang, diversifikasi pangan berbasis potensi lokal, serta pengurangan ketergantungan pada pangan impor. Upaya ini didukung dengan pengembangan industri pengolahan pangan, peningkatan keamanan pangan, serta penguatan sistem pengawasan mutu. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki akses terhadap pangan yang cukup, tetapi juga mampu memanfaatkan pangan secara optimal untuk meningkatkan kualitas kesehatan dan sumber daya manusia.

Secara keseluruhan, sasaran ini menjadi fondasi penting dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah yang tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika global, serta berkelanjutan dalam jangka panjang. Melalui sinergi lintas sektor, inovasi teknologi, pemberdayaan petani dan nelayan, serta penguatan tata kelola pangan, diharapkan tercipta sistem pangan yang mampu mendukung stabilitas ekonomi, menekan angka kemiskinan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat

secara merata. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 20 Indikator dan dan Target Sasaran Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74,70	79,62	75,49	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Strategi sasaran ini diarahkan pada penguatan sistem pangan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan menempatkan produksi, cadangan, distribusi, dan konsumsi pangan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. Pemerintah daerah mendorong peningkatan produksi pangan lokal secara berkelanjutan melalui penerapan teknologi tepat guna, pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan, serta penguatan kapasitas petani, nelayan, dan peternak. Upaya ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan yang cukup dan stabil sepanjang waktu.

Selanjutnya, strategi juga difokuskan pada penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga. Pemerintah daerah memperkuat sistem cadangan pangan pemerintah dan masyarakat, mengembangkan lumbung pangan, serta meningkatkan kapasitas penyimpanan dan pengelolaan stok pangan strategis. Di sisi distribusi, dilakukan penguatan jaringan logistik dan transportasi pangan agar aliran pasokan dari daerah produksi ke daerah konsumsi berjalan lancar, efisien, dan merata, termasuk ke wilayah terpencil dan rawan pangan.

Secara keseluruhan, strategi ini dirancang untuk membangun sistem pangan daerah yang tangguh, adaptif terhadap perubahan iklim dan dinamika pasar, serta mampu menjamin akses pangan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Melalui integrasi kebijakan, penguatan infrastruktur, dan pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan ketahanan pangan daerah dapat terjaga secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan pembangunan pangan daerah difokuskan pada penguatan sistem cadangan dan distribusi pangan yang terintegrasi, andal, dan berkelanjutan guna menjamin ketersediaan pasokan sepanjang waktu serta menjamin keterjangkauan harga bagi masyarakat. Kebijakan diarahkan pada peningkatan kapasitas penyimpanan dan pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah, optimalisasi peran kelembagaan pangan, penguatan jaringan distribusi hingga wilayah terpencil, serta pengembangan sistem logistik yang efisien dan berbasis teknologi.

Selain itu, arah kebijakan juga menekankan pada penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan peran pelaku usaha lokal, serta penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan. Melalui kebijakan ini, diharapkan

sistem pangan daerah mampu merespons dinamika pasar, kondisi darurat, dan dampak perubahan iklim secara cepat dan tepat.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan dalam mendukung penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah difokuskan pada peningkatan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola stok pangan secara profesional, transparan, dan akuntabel. Pemerintah daerah mengembangkan dan merevitalisasi gudang serta lumbung pangan, meningkatkan sistem manajemen persediaan, serta memastikan ketersediaan cadangan pangan strategis untuk kebutuhan normal maupun kondisi darurat, seperti bencana alam dan gejolak harga.

Dalam aspek distribusi dan logistik, intervensi diarahkan pada penguatan jalur distribusi pangan, pengembangan pusat distribusi regional, serta peningkatan sarana transportasi dan penyimpanan, termasuk sistem rantai dingin *(cold chain)* untuk komoditas tertentu. Upaya ini bertujuan untuk mengurangi kehilangan hasil, menekan biaya logistik, serta mempercepat penyaluran pangan dari sentra produksi ke pasar dan konsumen.

Untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga, pemerintah daerah melaksanakan operasi pasar, pasar murah, dan fasilitasi distribusi antarwilayah dari daerah surplus ke daerah defisit. Intervensi ini didukung dengan penguatan mekanisme intervensi harga dan koordinasi rutin dengan pemangku kepentingan pangan, sehingga gejolak harga dapat dikendalikan sejak dini.

Selanjutnya, highlight kebijakan juga menekankan pada pemberdayaan kelembagaan pangan lokal, seperti koperasi, BUMDes, kelompok tani, dan kelompok nelayan, agar mampu berperan sebagai pengelola cadangan, agregator produksi, dan distributor pangan. Pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan usaha, akses permodalan, serta peningkatan kapasitas manajemen bagi kelembagaan tersebut.

Di bidang tata kelola dan data, intervensi diarahkan pada pengembangan sistem informasi pangan terpadu yang memuat data produksi, stok, distribusi, dan harga secara real time. Sistem ini berfungsi sebagai dasar perumusan kebijakan, peringatan dini kerawanan pangan, serta evaluasi kinerja program. Selain itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia pengelola pangan dilakukan melalui pelatihan, pendampingan, dan sertifikasi kompetensi.

Sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan darurat, pemerintah daerah juga menyiapkan mekanisme respons cepat melalui penyediaan cadangan khusus bencana, pembentukan posko pangan, serta prosedur distribusi cepat kepada masyarakat terdampak. Dengan rangkaian intervensi tersebut, diharapkan sistem cadangan dan distribusi pangan daerah semakin andal, responsif, dan berkelanjutan dalam mendukung kesejahteraan masyarakat.

Tabel 4. 21 Highlight Intervensi Kebijakan Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan di Provinsi NTB Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	- Penguatan sistem pangan daerah yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan menempatkan produksi, cadangan, distribusi, dan konsumsi pangan sebagai satu kesatuan yang saling mendukung. - penguatan cadangan dan distribusi pangan daerah sebagai instrumen utama dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga.	- Penguatan sistem cadangan dan distribusi pangan yang terintegrasi, andal, dan berkelanjutan guna menjamin ketersediaan pasokan sepanjang waktu serta menjamin keterjangkauan harga bagi Masyarakat. - penguatan koordinasi lintas sektor, peningkatan peran pelaku usaha lokal, serta penguatan sinergi pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan	Pengembangan gudang dan lumbung pangan daerah Optimalisasi Distribusi dan Logistik Pangan Operasi pasar dan pasar murah berkala Penguatan peran gapoktan dan kelompok nelayan Digitalisasi data stok, produksi, dan harga Peningkatan Kapasitas SDM dan Tata Kelola Pangan Penguatan Ketahanan Pangan Darurat Integrasi sistem monitoring pangan daerah

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

3. Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan

Pada Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Pencapaian sasaran ini dilaksanakan melalui sinergi pembangunan lintas sektor yang terintegrasi dengan Program Desa Berdaya sebagai instrumen utama dalam memperkuat kapasitas, kemandirian, dan daya saing desa. Program ini menjadi wadah strategis dalam mengoptimalkan potensi lokal, mempercepat pembangunan infrastruktur dasar, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di wilayah perdesaan.

Melalui Program Desa Berdaya, pemerintah daerah mendorong pemerataan akses terhadap pendidikan, kesehatan, air bersih, sanitasi, transportasi, dan teknologi informasi, sehingga masyarakat desa memiliki kesempatan yang setara dengan masyarakat perkotaan. Penguatan konektivitas antarwilayah dan peningkatan kualitas infrastruktur desa menjadi bagian penting dalam membuka akses ekonomi dan sosial, memperlancar distribusi barang dan jasa, serta mendukung mobilitas masyarakat. Dengan demikian, kesenjangan antarwilayah dapat ditekan secara bertahap dan berkelanjutan.

Selain pembangunan fisik, sasaran ini juga menekankan pada pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui pengembangan usaha produktif berbasis potensi lokal, seperti pertanian, perikanan, pariwisata desa, dan industri kreatif. Program Desa Berdaya diarahkan untuk memperkuat peran UMKM, koperasi, dan BUMDes sebagai penggerak ekonomi desa, melalui pendampingan usaha, peningkatan kapasitas SDM, akses permodalan, serta perluasan jaringan pemasaran. Upaya ini bertujuan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan ekonomi desa.

Dalam aspek tata kelola, Program Desa Berdaya juga berperan dalam meningkatkan kapasitas aparatur desa, memperkuat partisipasi masyarakat, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pembangunan. Perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa diarahkan agar selaras dengan kebijakan daerah serta berbasis pada kebutuhan dan potensi riil masyarakat. Kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah desa, dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas lokal terus diperkuat untuk memastikan keberlanjutan program.

Secara keseluruhan, keterkaitan Sasaran Pemerataan Pembangunan Perdesaan dengan Program Desa Berdaya bertujuan untuk mewujudkan desa yang mandiri, produktif, dan sejahtera. Melalui penguatan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola yang baik, desa diharapkan mampu tumbuh sebagai pusat pembangunan yang inklusif dan berkontribusi signifikan terhadap pembangunan daerah yang berkeadilan dan berkelanjutan. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 22 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan di NTB Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	1	Indeks Desa	(%)	78,57	79,2	79,20	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Strategi pada sasaran ini diarahkan pada penguatan peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan, partisipatif, dan berkelanjutan. Pembangunan perdesaan tidak hanya difokuskan pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga pada peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat dalam mengelola potensi lokal secara optimal. Oleh karena itu, salah satu strategi utama yang ditempuh adalah peningkatan kemandirian dan pemberdayaan masyarakat desa melalui penguatan sumber daya manusia, kelembagaan, dan usaha produktif berbasis desa.

Pemerintah daerah memfasilitasi pelatihan keterampilan, kewirausahaan, serta pengelolaan usaha, guna meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menciptakan nilai tambah ekonomi. Selain itu, penguatan peran BUMDes, koperasi, dan UMKM desa terus didorong sebagai motor penggerak perekonomian lokal yang inklusif dan berkelanjutan. Di samping aspek pemberdayaan ekonomi, strategi pembangunan perdesaan juga diarahkan pada penguatan infrastruktur dasar dan konektivitas antarwilayah, peningkatan akses terhadap layanan pendidikan dan kesehatan, serta pengembangan infrastruktur digital desa. Seluruh upaya tersebut diintegrasikan dalam kerangka Program Desa Berdaya, sehingga pembangunan desa berjalan secara terpadu, sinergis, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui strategi ini, diharapkan desa mampu tumbuh menjadi wilayah yang mandiri, produktif, dan berdaya saing, sekaligus mengurangi kesenjangan pembangunan antarwilayah.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan pemerataan pembangunan perdesaan difokuskan pada penguatan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa. Kebijakan diarahkan untuk menciptakan desa yang mampu mengelola sumber daya secara optimal, membangun usaha produktif secara berkelanjutan, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu, arah kebijakan juga menekankan pada integrasi pembangunan desa dengan kebijakan daerah, penguatan sinergi lintas sektor, serta peningkatan peran pemerintah desa sebagai fasilitator pembangunan. Pemerintah daerah mendorong terciptanya ekosistem perdesaan yang mendukung inovasi, kewirausahaan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan, sehingga kesenjangan antarwilayah dapat dikurangi secara signifikan.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan dalam mendukung pemerataan pembangunan perdesaan difokuskan pada penguatan kapasitas masyarakat dan kelembagaan desa sebagai fondasi utama kemandirian desa. Pemerintah daerah melaksanakan berbagai program pelatihan keterampilan kerja, kewirausahaan, dan manajemen usaha bagi masyarakat desa, disertai dengan pendampingan intensif terhadap kelompok usaha produktif. Intervensi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi ekonomi lokal secara profesional dan berkelanjutan.

Selanjutnya, intervensi diarahkan pada pemberdayaan kelembagaan ekonomi desa, seperti BUMDes, koperasi, dan UMKM, agar mampu berperan sebagai pengelola usaha, penyedia lapangan kerja, dan agregator produk lokal. Pemerintah daerah memfasilitasi akses permodalan, penguatan tata kelola kelembagaan.

Dalam mendukung produktivitas masyarakat desa, intervensi kebijakan juga mencakup pembangunan dan peningkatan infrastruktur pendukung, seperti jalan produksi, irigasi, sarana air bersih, sanitasi, serta jaringan telekomunikasi dan internet. Infrastruktur ini menjadi faktor penting dalam memperlancar aktivitas ekonomi, meningkatkan mobilitas masyarakat, dan membuka akses terhadap informasi dan teknologi.

Selain itu, highlight intervensi juga difokuskan pada peningkatan kualitas layanan dasar dan tata kelola pemerintahan desa. Pemerintah daerah memperkuat kapasitas aparatur desa melalui pelatihan manajemen pemerintahan, perencanaan pembangunan, dan pengelolaan keuangan desa yang transparan dan akuntabel. Partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa dan pengawasan pembangunan terus diperkuat untuk menciptakan pemerintahan desa yang responsif dan berorientasi pada pelayanan publik.

Sebagai bagian dari penguatan keberlanjutan pembangunan perdesaan, intervensi kebijakan turut mendorong pengembangan inovasi dan kolaborasi lintas sektor, termasuk kerja sama dengan dunia usaha, perguruan tinggi, dan komunitas lokal. Pemerintah daerah memfasilitasi pengembangan melalui Desa Beraya dan replikasi praktik baik pembangunan desa. Melalui rangkaian intervensi tersebut, diharapkan terwujud desa yang mandiri, inklusif, dan sejahtera, serta mampu menjadi pilar utama pemerataan pembangunan daerah.

Tabel 4. 23 *Highlight* Intervensi Kebijakan Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Penguatan peran desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan, partisipatif, dan berkelanjutan	Penguatan kemandirian desa melalui pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa	Penguatan Kapasitas SDM Masyarakat Desa
			Pemberdayaan Kelembagaan Ekonomi Desa
			Fasilitasi akses permodalan, penguatan tata kelola kelembagaan
			Pengembangan Usaha Produktif Berbasis Potensi Lokal
			Peningkatan Infrastruktur Pendukung Produktivitas
			Peningkatan Kualitas Layanan Dasar Desa
			Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Desa
			Pengembangan Inovasi dan Desa Tematik
			Penguatan Kolaborasi dan Kemitraan Lintas Sektor

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

4. Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi

Sasaran ini diarahkan untuk mewujudkan pemerataan akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan barang strategis dengan harga yang wajar, stabil, dan terjangkau di seluruh wilayah. Pencapaian sasaran ini menjadi bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat, menekan inflasi daerah, serta mendukung pemerataan kesejahteraan. Pemerintah daerah berupaya mengurangi kesenjangan harga antara wilayah perkotaan, perdesaan, dan daerah terpencil melalui penguatan sistem distribusi, logistik, dan konektivitas antarwilayah.

Upaya penurunan disparitas harga dilakukan melalui penguatan jaringan transportasi dan infrastruktur logistik, pengembangan pusat distribusi regional, serta optimalisasi jalur distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit. Pemerintah daerah juga memperkuat koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dalam menjaga ketersediaan pasokan, pengelolaan cadangan pangan, serta pelaksanaan intervensi pasar. Melalui sinergi ini, pasokan barang kebutuhan pokok dapat terdistribusi secara lebih merata dan berkelanjutan.

Selain aspek distribusi, sasaran ini juga menekankan pada penguatan peran kelembagaan ekonomi lokal, seperti koperasi, BUMDes, dan UMKM, sebagai bagian dari rantai pasok daerah. Pemerintah daerah mendorong terbentuknya sistem perdagangan yang lebih efisien dan transparan, sehingga dapat menekan biaya distribusi dan margin perdagangan yang berlebihan. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan harga dan stok juga terus dikembangkan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang cepat dan tepat.

Secara keseluruhan, sasaran menurunnya disparitas harga antarwilayah bertujuan untuk menciptakan sistem perdagangan daerah yang adil, efisien, dan inklusif. Melalui penguatan infrastruktur, tata kelola distribusi, kelembagaan ekonomi lokal, serta sinergi lintas sektor, diharapkan kesenjangan harga antarwilayah dapat ditekan secara signifikan, sehingga seluruh masyarakat memperoleh manfaat pembangunan ekonomi secara merata dan berkelanjutan. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 24 Indikator dan Target Sasaran Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	1	Koefisien Variasi Harga Antar Wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	16,21	7,14	13,80	IUP 20

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Strategi penurunan disparitas harga antarwilayah diarahkan pada penguatan sistem distribusi dan logistik yang efisien, terintegrasi, dan merata hingga ke wilayah terpencil. Pemerintah daerah mendorong optimalisasi konektivitas antarwilayah melalui peningkatan infrastruktur transportasi, pengembangan pusat distribusi regional, serta penguatan jalur distribusi dari daerah surplus ke daerah defisit.

Selain itu, strategi juga difokuskan pada penguatan peran kelembagaan ekonomi lokal, seperti koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha perdagangan, agar mampu menjadi simpul distribusi yang efisien dan berkeadilan. Penguatan sistem cadangan pangan dan stabilisasi pasokan dilakukan melalui sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait, sehingga intervensi pasar dapat dilakukan secara cepat dan tepat sasaran.

Di samping itu, pemanfaatan teknologi informasi dalam pemantauan harga dan stok pangan terus dikembangkan sebagai dasar pengambilan kebijakan yang responsif. Melalui strategi ini, diharapkan rantai pasok semakin pendek, biaya distribusi menurun, dan kesenjangan harga antarwilayah dapat ditekan secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan penurunan disparitas harga antarwilayah difokuskan pada penguatan sistem perdagangan dan distribusi daerah yang efisien, transparan, dan inklusif. Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kelancaran arus barang, memperkuat kapasitas logistik daerah, serta mengoptimalkan peran pusat distribusi dan pasar rakyat sebagai simpul utama rantai pasok.

Selain itu, arah kebijakan juga menekankan pada penguatan stabilisasi pasokan dan harga melalui pengelolaan cadangan pangan daerah, pelaksanaan operasi pasar, serta fasilitasi kerja sama perdagangan antarwilayah. Pemerintah daerah mendorong integrasi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta penguatan sistem informasi harga sebagai instrumen pengendalian inflasi dan perlindungan daya beli masyarakat.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan dalam mendukung penurunan disparitas harga antarwilayah difokuskan pada penguatan sistem distribusi dan logistik daerah agar mampu menjangkau seluruh wilayah secara efisien dan berkelanjutan. Pemerintah daerah mengembangkan dan merevitalisasi pusat distribusi regional, gudang pangan, serta sarana penyimpanan strategis, termasuk fasilitas rantai dingin untuk komoditas tertentu. Peningkatan kualitas infrastruktur transportasi dan konektivitas

antarwilayah terus dilakukan guna memperlancar arus barang dari sentra produksi menuju wilayah konsumsi, terutama ke daerah terpencil dan sulit dijangkau.

Selanjutnya, highlight intervensi juga diarahkan pada penguatan kelembagaan dan rantai pasok lokal melalui pemberdayaan koperasi, BUMDes, pedagang, dan pelaku usaha distribusi di daerah. Pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan antara produsen, distributor, dan pengecer untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih pendek, efisien, dan transparan. Dengan rantai distribusi yang lebih sederhana, biaya logistik dapat ditekan dan harga di tingkat konsumen menjadi lebih terjangkau.

Dalam mendukung efektivitas pengendalian harga, pemerintah daerah mengembangkan sistem informasi harga dan stok berbasis digital yang terintegrasi antarwilayah. Sistem ini digunakan untuk memantau perkembangan harga secara real time, mengidentifikasi potensi kelangkaan pasokan, serta menjadi dasar pengambilan kebijakan intervensi. Selain itu, penguatan sistem peringatan dini gejolak harga juga dilakukan untuk mengantisipasi dampak faktor musiman, cuaca ekstrem, maupun gangguan distribusi.

Untuk menekan biaya distribusi, pemerintah daerah memberikan fasilitasi transportasi dan logistik ke wilayah terpencil, termasuk melalui kerja sama dengan pelaku usaha logistik, serta optimalisasi jalur distribusi alternatif. Kebijakan ini diharapkan mampu mengurangi beban biaya distribusi yang selama ini menjadi penyebab utama tingginya harga di daerah terpencil.

Di sisi pengawasan, highlight intervensi kebijakan juga mencakup peningkatan pengawasan harga dan distribusi di pasar tradisional maupun modern, serta pencegahan praktik penimbunan dan spekulasi. Pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan aparat penegak hukum dan melibatkan masyarakat dalam pengawasan melalui kanal pengaduan publik. Dengan demikian, tercipta iklim perdagangan yang sehat, adil, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Melalui rangkaian intervensi tersebut, diharapkan sistem distribusi dan perdagangan daerah semakin efisien, stabilitas harga semakin terjaga, dan kesenjangan harga antarwilayah dapat ditekan secara berkelanjutan demi mendukung kesejahteraan masyarakat secara merata.

Tabel 4. 25 Highlight Intervensi Kebijakan Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	- Penguatan sistem distribusi dan logistik yang efisien, terintegrasi, dan merata hingga ke wilayah terpencil. - Penguatan peran kelembagaan ekonomi lokal, seperti koperasi, BUMDes, dan pelaku usaha perdagangan, agar mampu menjadi simpul distribusi yang efisien dan berkeadilan	- Penguatan sistem perdagangan dan distribusi daerah yang efisien, transparan, dan inklusif - Penguatan stabilisasi pasokan dan harga melalui pengelolaan cadangan pangan daerah, pelaksanaan operasi pasar, serta fasilitasi kerja sama perdagangan antarwilayah	Penguatan Infrastruktur dan Logistik Distribusi
			Pelaksanaan operasi pasar dan pasar murah secara berkala
			Pemberdayaan koperasi, BUMDes, dan pedagang lokal sebagai distributor
			Digitalisasi pemantauan harga dan ketersediaan barang
			Pengendalian Biaya Distribusi
			Fasilitasi perdagangan antar kabupaten/kota

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
			Pengawasan harga di pasar tradisional dan modern
			Pencegahan praktik penimbunan dan spekulasi

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Prioritas Daerah 3 : Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan

Dalam mewujudkan prioritas tersebut, pembangunan difokuskan pada terwujudnya pembangunan ekosistem industri komoditas unggulan daerah yang berkelanjutan. Pengembangan dilakukan melalui pendekatan hulu hingga hilir (end-to-end), mulai dari penyediaan sarana produksi yang berkualitas, peningkatan produktivitas, penerapan teknologi dan inovasi, penguatan kelembagaan petani, nelayan, peternak, dan pelaku usaha, hingga pengembangan industri pengolahan, sistem logistik, pemasaran, serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor. Dengan demikian, setiap komoditas unggulan daerah mampu memberikan nilai tambah yang lebih tinggi serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Sasaran utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kontribusi industri agromaritim terhadap perekonomian daerah dan Di sisi lain, pembangunan juga diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor agromaritim, yang meliputi sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan.

Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan

Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan diarahkan untuk membangun sistem industri daerah yang terintegrasi, berdaya saing, dan mampu memberikan nilai tambah optimal bagi perekonomian masyarakat. Pembangunan ekosistem industri ini dilaksanakan dengan mengoptimalkan potensi sumber daya lokal di Nusa Tenggara Barat, khususnya pada sektor-sektor unggulan seperti pertanian, perikanan, peternakan, pariwisata, dan industri pengolahan. Upaya ini bertujuan untuk memperkuat posisi daerah dalam rantai nilai regional maupun nasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pencapaian tujuan ini difokuskan pada penguatan keterkaitan antara hulu, tengah, dan hilir dalam sistem produksi dan industri. Pemerintah daerah mendorong peningkatan produktivitas bahan baku, pengembangan industri pengolahan, serta perluasan akses pasar melalui penerapan teknologi, inovasi, dan manajemen modern. Dengan demikian, komoditas unggulan daerah tidak hanya dijual dalam bentuk mentah, tetapi diolah menjadi produk bernilai tambah tinggi yang mampu bersaing di pasar domestik maupun global.

Secara keseluruhan, tujuan ini bertujuan untuk mewujudkan struktur ekonomi daerah yang lebih kuat, mandiri, dan berdaya saing melalui pengembangan ekosistem industri komoditi unggulan yang terintegrasi dan berkelanjutan. Melalui sinergi kebijakan, penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas SDM, serta pemanfaatan inovasi dan teknologi, diharapkan tercipta pertumbuhan ekonomi yang inklusif, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 26 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Terwujudnya Pembangunan Ekosistem Industri Komoditi Unggulan Daerah yang Berkelanjutan	**1**	**Kontribusi PDRB Industri Pengolahan**	**%**	**6,69**	**5,61**	**6,75**	Sasaran Visi dan IUP 11

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

5. Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat peran sektor pertanian, perikanan, kelautan, dan industri pengolahannya sebagai pilar utama pembangunan ekonomi daerah. Pencapaian sasaran ini difokuskan pada pengembangan sistem industri agromaritim yang terintegrasi dari hulu hingga hilir, mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam dan posisi strategis wilayah di Nusa Tenggara Barat, industri agromaritim diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Upaya peningkatan kontribusi industri agromaritim dilakukan melalui penguatan produktivitas sektor primer, peningkatan kualitas hasil produksi, serta pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan. Pemerintah daerah mendorong penerapan teknologi tepat guna, modernisasi sarana produksi, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia agar pelaku usaha agromaritim mampu menghasilkan produk yang bernilai tambah tinggi dan berdaya saing. Dengan demikian, komoditas pertanian, perikanan, dan kelautan tidak hanya dipasarkan dalam bentuk bahan mentah, tetapi diolah menjadi produk siap konsumsi dan produk ekspor.

Selain itu, sasaran ini juga menekankan pada penguatan rantai pasok dan kelembagaan usaha agromaritim melalui peran UMKM, koperasi, dan BUMDes. Pemerintah daerah memfasilitasi kemitraan antara petani, nelayan, pelaku industri, dan distributor untuk menciptakan sistem usaha yang efisien, transparan, dan berkeadilan. Akses terhadap pembiayaan, pasar, dan informasi terus diperluas agar pelaku usaha agromaritim mampu tumbuh secara berkelanjutan dan berorientasi pada pasar.

Secara keseluruhan, Sasaran Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim bertujuan untuk memperkuat struktur ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat pesisir dan perdesaan, serta mendorong transformasi ekonomi berbasis potensi lokal. Melalui penguatan integrasi hulu–hilir, inovasi teknologi, pengembangan SDM, dan sinergi lintas sektor, industri agromaritim diharapkan menjadi motor utama pembangunan daerah yang berdaya saing, inklusif, dan berkelanjutan. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 27 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	1	Persentase Peningkatan PDRB Sub Sektor Industri Pengolahan Berbasis Agromaritim	%	9,80	7,2 - 8,0	9,95	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Peningkatan kontribusi industri agromaritim dilaksanakan melalui strategi penguatan sistem industri terintegrasi dari hulu hingga hilir berbasis komoditas unggulan daerah. Strategi ini diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan kelautan, pengembangan industri pengolahan bernilai tambah, penguatan rantai pasok, serta perluasan akses pasar domestik dan ekspor. Selain itu, penguatan kapasitas SDM, inovasi teknologi, kemitraan usaha, dan penerapan prinsip keberlanjutan menjadi fondasi utama dalam membangun ekosistem industri agromaritim yang tangguh dan berdaya saing.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan peningkatan kontribusi industri agromaritim menekankan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian, perikanan, dan kelautan melalui modernisasi sarana produksi, penerapan teknologi tepat guna, serta peningkatan kualitas input dan manajemen usaha. Pemerintah daerah mendorong pengembangan industri pengolahan bernilai tambah untuk memperkuat posisi produk lokal dalam rantai nilai nasional dan global.

Selanjutnya, arah kebijakan juga difokuskan pada penguatan rantai pasok yang efisien dan berdaya saing melalui peningkatan konektivitas logistik, integrasi sistem distribusi, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha. Perluasan akses pasar domestik dan ekspor menjadi prioritas melalui fasilitasi promosi, standardisasi mutu, sertifikasi, dan penguatan branding produk agromaritim daerah. Selain itu, kebijakan diarahkan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan inovasi dan riset terapan, pengembangan kemitraan usaha, serta penerapan prinsip keberlanjutan untuk memastikan pertumbuhan industri yang tangguh, inklusif, dan berwawasan lingkungan.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan difokuskan pada percepatan penguatan ekosistem industri agromaritim secara terpadu dari sektor produksi hingga pemasaran. Intervensi dilakukan melalui penguatan unit pengolahan hasil, fasilitas pascapanen, pengemasan modern, serta pengembangan produk olahan berbasis komoditas unggulan.

Di sisi rantai pasok, intervensi diarahkan pada penguatan infrastruktur logistik, pengembangan pusat distribusi, *cold storage*, dan sistem informasi perdagangan yang

terintegrasi. Akses pasar diperluas melalui pengembangan platform pemasaran digital, fasilitasi pameran dan misi dagang, serta dukungan sertifikasi dan standardisasi produk. Penguatan kapasitas SDM dilakukan melalui pelatihan kewirausahaan, manajemen industri, dan inovasi teknologi, serta pengembangan inkubator bisnis agromaritim.

Selain itu, pemerintah memperkuat kemitraan antara petani, nelayan, koperasi, UMKM, industri pengolahan, dan investor dalam skema usaha yang saling menguntungkan. Intervensi juga mencakup dukungan pembiayaan, penjaminan usaha, dan fasilitasi investasi sektor agromaritim. Seluruh program dilengkapi dengan penerapan prinsip keberlanjutan, pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, adaptasi perubahan iklim, dan pengurangan dampak lingkungan, guna membangun industri agromaritim yang berdaya saing tinggi dan berkelanjutan.

Tabel 4. 28 Highlight Intervensi Kebijakan Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Penguatan sistem industri terintegrasi dari hulu hingga hilir berbasis komoditas unggulan daerah	- Pengembangan industri pengolahan bernilai tambah untuk memperkuat posisi produk lokal dalam rantai nilai nasional dan global - Penguatan rantai pasok yang efisien dan berdaya saing melalui peningkatan konektivitas logistik, integrasi sistem distribusi, serta penguatan kelembagaan pelaku usaha - Peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan inovasi dan riset terapan, pengembangan kemitraan usaha, serta penerapan prinsip keberlanjutan	Penguatan unit pengolahan hasil, fasilitas pascapanen, pengemasan modern, serta pengembangan produk olahan berbasis komoditas unggulan
			Penguatan infrastruktur logistik, pengembangan pusat distribusi, *cold storage*, dan sistem informasi perdagangan yang terintegrasi
			Pelatihan kewirausahaan, manajemen industri, dan inovasi teknologi, serta pengembangan inkubator bisnis agromaritim
			Memperkuat kemitraan antara petani, nelayan, koperasi, UMKM, industri pengolahan, dan investor
			Dukungan pembiayaan, penjaminan usaha, dan fasilitasi investasi sektor agromaritim

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

6. Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat peran sektor primer sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi daerah di Nusa Tenggara Barat. Peningkatan produktivitas sektor ini menjadi kunci dalam mendukung ketahanan pangan, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan industri pengolahan, serta pengembangan ekonomi wilayah berbasis potensi lokal. Sasaran ini menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan, efisien, dan berwawasan lingkungan.

Upaya peningkatan produktivitas dilakukan melalui modernisasi sistem produksi pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna, inovasi budidaya, serta penguatan sarana dan prasarana pendukung. Pemerintah daerah mendorong penggunaan benih dan bibit unggul, penerapan mekanisasi, pengelolaan lahan dan perairan yang optimal, serta peningkatan kualitas

pakan dan manajemen usaha. Di sektor kelautan dan perikanan, produktivitas ditingkatkan melalui penguatan armada, alat tangkap ramah lingkungan, serta pengembangan budidaya perikanan berkelanjutan.

Selain aspek teknis produksi, sasaran ini juga menekankan penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui penyuluhan, pelatihan, dan pendampingan berkelanjutan bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku usaha kehutanan. Pengembangan kelembagaan kelompok tani, koperasi, dan asosiasi usaha terus diperkuat untuk meningkatkan efisiensi usaha, akses terhadap pembiayaan, serta posisi tawar di pasar. Dengan kelembagaan yang kuat, pelaku sektor agromaritim diharapkan mampu mengelola usaha secara profesional dan berorientasi pada peningkatan nilai tambah.

Dalam rangka menjaga keberlanjutan, peningkatan produktivitas juga diarahkan pada penerapan praktik ramah lingkungan, konservasi sumber daya alam, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi lahan kritis, perlindungan kawasan pesisir, dan pengendalian pencemaran menjadi bagian integral dalam mendukung keberlanjutan sektor agromaritim. Pendekatan ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara peningkatan produksi dan kelestarian lingkungan.

Secara keseluruhan, Sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim bertujuan untuk mewujudkan sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan yang maju, tangguh, dan berdaya saing. Melalui penguatan teknologi, SDM, kelembagaan, dan tata kelola berkelanjutan, sektor agromaritim diharapkan mampu menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara merata dan berkelanjutan. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 29 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	1	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	5,03	3,79	5,20	IUP 11b

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Strategi dalam pencapaian peningkatan Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, serta Kehutanan) di Nusa Tenggara Barat diarahkan untuk memperkuat kinerja sektor primer sebagai fondasi utama pembangunan ekonomi daerah. Salah satu strategi utama yang ditempuh adalah peningkatan kapasitas dan kualitas produksi komoditas unggulan, yang dilakukan melalui penggunaan benih dan bibit unggul, penerapan teknologi budidaya modern, penguatan sarana produksi, serta perbaikan sistem pascapanen dan pengendalian

mutu. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan hasil produksi sekaligus menjamin kualitas produk agar mampu memenuhi standar pasar dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Strategi berikutnya difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha melalui penguatan layanan penyuluhan, pelatihan teknis, sekolah lapang, pendampingan usaha, serta pengembangan demplot percontohan. Dengan peningkatan kompetensi dan profesionalisme petani, peternak, nelayan, dan pengelola hutan, diharapkan produktivitas usaha dapat terus meningkat secara berkelanjutan. Di samping itu, penguatan kelembagaan kelompok usaha, koperasi, dan kemitraan hulu–hilir dengan industri dan pasar juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efisiensi usaha, memperluas akses permodalan, serta memperkuat posisi tawar pelaku sektor agromaritim.

Untuk mendukung keberlanjutan usaha, strategi peningkatan produktivitas juga diarahkan pada perluasan akses pembiayaan dan perlindungan usaha melalui fasilitasi kredit, dan bantuan modal produktif. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan dengan menerapkan praktik budidaya ramah lingkungan, konservasi lahan dan hutan, perlindungan ekosistem pesisir, serta adaptasi terhadap perubahan iklim. Seluruh strategi tersebut diperkuat dengan pengembangan sistem informasi produksi dan pasar yang terintegrasi, sehingga pelaku usaha dapat mengambil keputusan secara lebih tepat, cepat, dan responsif terhadap dinamika pasar.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan peningkatan produktivitas sektor agromaritim difokuskan pada penguatan sistem produksi yang modern, efisien, dan berkelanjutan. Kebijakan diarahkan pada peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, mekanisasi, serta inovasi budidaya yang ramah lingkungan. Pemerintah daerah mendorong optimalisasi pengelolaan lahan, perairan, dan kawasan hutan secara produktif dan lestari.

Selain peningkatan produksi, arah kebijakan juga menitikberatkan pada penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pendapatan pelaku usaha agromaritim. Hilirisasi dilakukan melalui pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan, penguatan rantai pasok dari hulu hingga hilir, peningkatan kualitas pascapanen, pengembangan sentra industri dan kawasan agromaritim, serta perluasan akses pasar domestik maupun ekspor. Upaya ini didukung dengan penguatan kemitraan antara petani, peternak, nelayan, koperasi, UMKM, pelaku industri, dan dunia usaha sehingga tercipta ekosistem industri agromaritim yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Selanjutnya, arah kebijakan juga menekankan penguatan kapasitas pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi, profesionalisme, dan kewirausahaan petani, peternak, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan. Penguatan kelembagaan kelompok usaha, koperasi, dan kemitraan bisnis menjadi prioritas untuk meningkatkan efisiensi usaha dan posisi tawar. Selain itu, kebijakan diarahkan pada perluasan akses terhadap pembiayaan, dan penguatan sistem perlindungan dari risiko iklim dan bencana. Seluruh kebijakan dilaksanakan dengan mengintegrasikan prinsip keberlanjutan, konservasi sumber daya, dan adaptasi perubahan iklim.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan difokuskan pada percepatan peningkatan kapasitas produksi dan kualitas hasil sektor agromaritim secara terpadu. Intervensi dilakukan melalui penyediaan benih, bibit, dan pakan unggul, penguatan mekanisasi pertanian, modernisasi alat tangkap dan budidaya perikanan, serta peningkatan sarana peternakan dan kehutanan produktif. Pemerintah juga memperkuat pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, tambatan perahu, tempat pelelangan ikan, kandang komunal, dan persemaian hutan. Percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah dilakukan melalui pengembangan industri pengolahan berbasis sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan, serta kehutanan guna meningkatkan nilai tambah produk, memperkuat daya saing, memperluas akses pasar, dan mendorong peningkatan ekspor. Kebijakan ini diarahkan untuk membangun rantai nilai yang terintegrasi dari hulu hingga hilir sehingga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, meningkatkan pendapatan pelaku usaha, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Di bidang sumber daya manusia, intervensi diarahkan pada penguatan layanan penyuluhan, pelatihan teknis, pendampingan usaha, serta pengembangan sekolah lapang dan (*demonstration plot*) *demplot* percontohan. Penguatan kelembagaan dilakukan melalui pembinaan kelompok tani, nelayan, dan peternak, pengembangan koperasi sektor agromaritim, serta fasilitasi kemitraan dengan industri dan pasar. Dukungan pembiayaan diperkuat melalui fasilitasi kredit usaha, dan bantuan modal produktif. Selain itu, intervensi mencakup penerapan sistem pertanian dan perikanan cerdas iklim, pengelolaan hutan lestari, rehabilitasi lahan kritis, serta perlindungan ekosistem pesisir dan perairan. Pemerintah juga mendorong digitalisasi data produksi, sistem informasi pasar, dan pemanfaatan teknologi presisi untuk meningkatkan efisiensi usaha. Seluruh intervensi tersebut dilaksanakan secara terintegrasi guna mewujudkan sektor agromaritim yang produktif, tangguh, berdaya saing, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 30 Highlight Intervensi Kebijakan Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan) Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	- Peningkatan kapasitas dan kualitas produksi komoditas unggulan - peningkatan kapasitas sumber daya manusia pelaku usaha melalui penguatan layanan	- Peningkatan kualitas dan kuantitas hasil pertanian, peternakan, perikanan, dan kehutanan melalui pemanfaatan teknologi tepat guna, mekanisasi, serta inovasi budidaya yang ramah lingkungan - Penguatan hilirisasi komoditas unggulan daerah untuk meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan pendapatan pelaku usaha agromaritim - penguatan kapasitas pelaku usaha melalui peningkatan kompetensi,	Penyediaan benih, bibit, dan pakan unggul
			Percepatan hilirisasi komoditas unggulan daerah
			Modernisasi Sistem Produksi Berbasis Teknologi dan Inovasi
			Modernisasi alat tangkap dan budidaya perikanan
			Peningkatan sarana pertanian, peternakan, Perikanan dan kehutanan produktif
			Pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur pendukung seperti irigasi, jalan usaha tani, tambatan perahu, tempat pelelangan ikan, kandang komunal, dan persemaian hutan

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
	penyuluhan, pelatihan teknis, sekolah lapang, pendampingan usaha dan pada perluasan akses pembiayaan dan perlindungan usaha melalui fasilitasi kredit, dan bantuan modal produktif	profesionalisme, dan kewirausahaan petani, peternak, nelayan, dan masyarakat sekitar hutan	Pembinaan kelompok tani, nelayan, Kawasan hutan dan peternak, pengembangan koperasi sektor agromaritim, serta fasilitasi kemitraan dengan industri dan pasar
			Fasilitasi kredit usaha, dan bantuan modal produktif
			Digitalisasi data produksi, sistem informasi pasar, dan pemanfaatan teknologi presisi untuk meningkatkan efisiensi usaha

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Prioritas Daerah 4 : Transformasi Pariwisata, Ekraf, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi

Dalam mendukung pencapaian prioritas tersebut, pembangunan diarahkan pada tiga tujuan utama yang saling memperkuat. Pertama, terwujudnya pariwisata NTB yang berkualitas dan industri ekonomi kreatif yang berdaya saing, dengan sasaran meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Kedua, terwujudnya pengembangan kebudayaan daerah dan penguatan ketahanan sosial budaya, dengan sasaran meningkatnya budaya literasi, pelestarian dan pengembangan ekspresi budaya, perlindungan warisan budaya, serta penguatan ekonomi berbasis budaya sebagai identitas dan modal pembangunan daerah. Ketiga, terwujudnya peningkatan prestasi kepemudaan dan olahraga, dengan sasaran meningkatnya daya saing pemuda, berkembangnya kepemimpinan, kreativitas, dan kewirausahaan pemuda, serta meningkatnya prestasi olahraga daerah di tingkat nasional maupun internasional melalui pembinaan yang berkelanjutan dan penyediaan ekosistem olahraga yang berkualitas.

Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif

Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat posisi Nusa Tenggara Barat sebagai destinasi wisata unggulan yang berdaya saing tinggi serta mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan. Pembangunan sektor pariwisata tidak hanya difokuskan pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kualitas destinasi, layanan pariwisata, serta pengalaman wisata yang aman, nyaman, dan berkesan bagi wisatawan. Pengembangan pariwisata berkualitas dilakukan melalui penguatan daya tarik destinasi, peningkatan kualitas infrastruktur dan amenitas pariwisata, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia di sektor pariwisata. Pemerintah daerah mendorong pengembangan destinasi yang berbasis pada keunikan budaya lokal, keindahan alam, serta potensi wisata bahari, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar. Selain itu, penguatan promosi dan pemasaran destinasi secara terpadu, baik melalui media digital maupun kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, terus dilakukan untuk meningkatkan daya saing pariwisata daerah di tingkat nasional maupun internasional.

Sejalan dengan pengembangan pariwisata, industri ekonomi kreatif juga didorong sebagai sektor yang memberikan nilai tambah terhadap pengalaman wisata dan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Pengembangan ekonomi kreatif difokuskan pada penguatan subsektor unggulan seperti kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, serta produk kreatif berbasis budaya lokal. Melalui penguatan inovasi, kreativitas, dan kewirausahaan, pelaku ekonomi kreatif diharapkan mampu menghasilkan produk yang berkualitas, memiliki identitas daerah, serta mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Upaya pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif juga diarahkan pada penguatan keterlibatan masyarakat, khususnya di kawasan destinasi wisata. Pemberdayaan masyarakat lokal, pelaku UMKM, koperasi, serta komunitas kreatif menjadi bagian penting dalam menciptakan ekosistem pariwisata yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan keterlibatan masyarakat, manfaat ekonomi dari sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dapat dirasakan secara lebih merata.

Selain itu, pembangunan pariwisata juga menekankan prinsip keberlanjutan melalui pengelolaan destinasi yang ramah lingkungan, pelestarian budaya, serta penguatan tata kelola pariwisata yang adaptif terhadap perubahan global. Pendekatan ini diharapkan mampu menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal. Adapun indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 31 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif Tahun 2027

Tujuan	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Terwujudnya Pariwisata NTB yang Berkualitas dan Industri Ekonomi Kreatif	**1**	**Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB Harga Berlaku**	**%**	**11,75**	**12,11**	**12,11**	
	2	**Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional**	**%**	**NA**	**0,42**	**0,42**	IUP 13

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

1. Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

   Sasaran meningkatnya nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif diarahkan untuk memperkuat kontribusi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan nilai tambah ini tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari peningkatan kualitas pengalaman wisata, lama tinggal wisatawan, belanja wisatawan, serta berkembangnya produk dan layanan ekonomi kreatif yang terintegrasi dengan aktivitas pariwisata.

   Pengembangan sektor pariwisata di Nusa Tenggara Barat diarahkan pada penguatan destinasi wisata yang berkualitas, berdaya saing, dan berkelanjutan melalui peningkatan daya tarik wisata, kualitas layanan, serta pengelolaan destinasi yang profesional. Di sisi lain, pengembangan ekonomi kreatif difokuskan pada peningkatan kreativitas, inovasi, dan nilai tambah produk lokal berbasis budaya, seni, dan kearifan lokal yang mampu memperkaya pengalaman wisata.

Melalui integrasi antara pariwisata dan ekonomi kreatif, diharapkan tercipta ekosistem ekonomi yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat identitas budaya daerah sebagai daya tarik utama pariwisata. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 32 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di NTB Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	474.838	458.164	512.000	IUP 12b
	2	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1,81	2,22	2,22	IUP 12a
	3	Rasio PDRB Industri Ekonomi Kreatif	%	4,33	3,83	4,50	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Peningkatan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif dilaksanakan melalui strategi penguatan kualitas destinasi pariwisata, pengembangan produk dan layanan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, serta integrasi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dalam menciptakan pengalaman wisata yang bernilai tambah tinggi. Strategi ini juga mencakup peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan promosi dan pemasaran destinasi, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat dalam membangun ekosistem pariwisata dan ekonomi kreatif yang berkelanjutan dan berdaya saing.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan peningkatan nilai tambah pariwisata dan ekonomi kreatif difokuskan pada penguatan kualitas destinasi wisata melalui peningkatan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan. Pemerintah daerah mendorong pengembangan destinasi yang terintegrasi dengan produk ekonomi kreatif lokal sehingga mampu menciptakan pengalaman wisata yang unik dan autentik.

Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada penguatan industri ekonomi kreatif sebagai bagian dari rantai nilai pariwisata melalui pengembangan subsektor unggulan. Penguatan kapasitas pelaku usaha, fasilitasi promosi dan pemasaran, serta pemanfaatan teknologi digital menjadi bagian penting dalam memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk kreatif daerah.

Di sisi lain, arah kebijakan juga menekankan peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif, penguatan kelembagaan usaha dan komunitas kreatif, serta pengembangan kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan untuk mendukung inovasi dan pengembangan produk kreatif yang berkelanjutan.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan difokuskan pada upaya peningkatan kualitas destinasi wisata, pengembangan produk ekonomi kreatif, serta penguatan promosi dan pemasaran pariwisata secara terpadu. Intervensi dilakukan melalui pengembangan dan revitalisasi destinasi wisata prioritas, peningkatan fasilitas dan amenitas pariwisata, serta penguatan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat.

Di sektor ekonomi kreatif, intervensi diarahkan pada penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan kewirausahaan kreatif, pengembangan desain dan inovasi produk subsektor unggulan seperti kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, dan produk kreatif berbasis budaya lokal, serta fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk kreatif. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan sentra ekonomi kreatif, inkubator bisnis kreatif, serta ruang kreatif sebagai pusat kolaborasi dan inovasi.

Selain itu, intervensi juga mencakup penguatan promosi dan pemasaran destinasi serta produk ekonomi kreatif melalui platform digital, penyelenggaraan event pariwisata dan festival budaya, serta kerja sama promosi dengan berbagai pemangku kepentingan. Pengembangan paket wisata terintegrasi dengan produk ekonomi kreatif lokal juga terus didorong untuk meningkatkan lama tinggal wisatawan dan nilai belanja wisatawan.

Seluruh intervensi tersebut dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip keberlanjutan, pelestarian budaya lokal, serta pemberdayaan masyarakat, sehingga sektor pariwisata dan ekonomi kreatif mampu memberikan manfaat ekonomi yang luas dan berkelanjutan bagi masyarakat daerah.

Tabel 4. 33 Highlihgt Intervensi kebijakan Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	- Penguatan kualitas destinasi pariwisata, pengembangan produk dan layanan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal, serta integrasi antara sektor pariwisata dan ekonomi kreatif - peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan promosi dan pemasaran destinasi, pemanfaatan teknologi digital, serta pengembangan kemitraan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat	- Penguatan kualitas destinasi wisata melalui peningkatan daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan yang dikelola secara profesional dan berkelanjutan - Penguatan industri ekonomi kreatif sebagai bagian dari rantai nilai pariwisata melalui pengembangan subsektor unggulan - Peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan dan revitalisasi destinasi wisata prioritas, peningkatan fasilitas dan amenitas pariwisata, serta penguatan pengelolaan destinasi berbasis masyarakat
			Penguatan kapasitas pelaku usaha melalui pelatihan kewirausahaan kreatif
			Pengembangan desain dan inovasi produk subsektor unggulan seperti kuliner, kriya, fesyen, seni pertunjukan, dan produk kreatif berbasis budaya lokal
			Fasilitasi sertifikasi dan standardisasi produk kreatif
			Promosi dan pemasaran destinasi serta produk ekonomi kreatif melalui platform digital
			Penyelenggaraan event pariwisata dan festival budaya, serta kerja sama promosi dengan berbagai pemangku kepentingan
			Pengembangan paket wisata terintegrasi dengan produk ekonomi kreatif lokal

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya

Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat identitas, karakter, dan jati diri masyarakat melalui pelestarian, pengembangan, serta pemanfaatan nilai-nilai budaya lokal sebagai fondasi pembangunan daerah. Kebudayaan tidak hanya dipandang sebagai warisan masa lalu yang perlu dijaga, tetapi juga sebagai sumber inspirasi dan kekuatan sosial yang mampu memperkuat kohesi masyarakat, memperkaya kehidupan sosial, serta mendukung pembangunan ekonomi kreatif dan pariwisata berbasis budaya. Pengembangan kebudayaan daerah di Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan terhadap berbagai bentuk warisan budaya, baik yang bersifat benda maupun tak benda, seperti tradisi, bahasa daerah, kesenian, adat istiadat, serta nilai-nilai kearifan lokal yang hidup di tengah masyarakat. Upaya ini penting untuk menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memperkuat rasa kebanggaan dan identitas masyarakat terhadap budaya daerahnya.

Selain itu, pembangunan kebudayaan juga diarahkan untuk memperkuat ketahanan sosial budaya masyarakat dalam menghadapi berbagai dinamika perubahan sosial, globalisasi, serta perkembangan teknologi dan informasi. Ketahanan sosial budaya tercermin dari kemampuan masyarakat dalam menjaga nilai-nilai kebersamaan, toleransi, gotong royong, serta keharmonisan kehidupan sosial yang berlandaskan pada nilai-nilai budaya lokal. Penguatan ketahanan sosial budaya juga dilakukan melalui peningkatan peran masyarakat, komunitas budaya, tokoh adat, serta generasi muda dalam pelestarian dan pengembangan budaya daerah. Pendidikan budaya, pengembangan ruang-ruang ekspresi seni dan budaya, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya menjadi bagian penting dalam menjaga keberlangsungan nilai-nilai budaya sekaligus menumbuhkan kreativitas masyarakat.

Di sisi lain, pengembangan kebudayaan daerah juga memiliki keterkaitan erat dengan penguatan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, di mana budaya lokal menjadi daya tarik utama yang dapat meningkatkan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemanfaatan budaya dilakukan secara bijak dengan tetap menjaga keaslian, nilai, serta keberlanjutan warisan budaya. Adapun indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 34 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya Tahun 2027

Tujuan	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Terwujudnya Pengembangan Kebudayaan Daerah dan Ketahanan Sosial Budaya	**1**	**Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)**	**Indeks**	**57,37 (2023)**	**59,80-60,08**	**59,80-60,08**	IUP 37

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

2. Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya

   Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat pembangunan kebudayaan sebagai fondasi dalam membangun karakter masyarakat, memperkokoh identitas daerah, serta meningkatkan ketahanan sosial budaya. Kebudayaan menjadi unsur penting dalam

menjaga keberlanjutan nilai-nilai kearifan lokal, memperkuat solidaritas sosial, serta membentuk masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap pentingnya pelestarian budaya sebagai bagian dari pembangunan daerah.

Penguatan budaya literasi menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis, kreatif, serta terbuka terhadap perkembangan pengetahuan. Budaya literasi tidak hanya berkaitan dengan peningkatan minat baca masyarakat, tetapi juga mencakup penguatan literasi budaya, literasi digital, serta literasi sejarah dan pengetahuan lokal yang mendorong masyarakat untuk memahami, menghargai, dan melestarikan kekayaan budaya daerah.

Di sisi lain, peningkatan ekspresi budaya diarahkan untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi masyarakat, komunitas seni, dan generasi muda dalam mengekspresikan kreativitas dan inovasi budaya. Berbagai kegiatan seni, festival budaya, pertunjukan tradisional, serta aktivitas kreatif berbasis budaya menjadi sarana penting dalam menjaga dinamika kehidupan budaya sekaligus memperkuat identitas budaya daerah.

Pelestarian warisan budaya juga menjadi bagian penting dari sasaran ini melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan berbagai bentuk warisan budaya, baik yang bersifat benda maupun tak benda, seperti situs sejarah, tradisi lisan, bahasa daerah, kesenian tradisional, serta adat istiadat yang hidup di tengah masyarakat. Upaya ini bertujuan untuk memastikan bahwa kekayaan budaya daerah tetap terjaga dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.

Selain itu, pengembangan ekonomi budaya juga didorong agar potensi budaya tidak hanya menjadi simbol identitas daerah, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat. Produk kerajinan tradisional, seni pertunjukan, karya seni, serta berbagai produk kreatif berbasis budaya lokal dapat dikembangkan menjadi sumber ekonomi baru yang mendukung sektor pariwisata dan ekonomi kreatif di Nusa Tenggara Barat. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 35 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya di NTB Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya	1	Indeks budaya literasi	Indeks	(2023) 61.20	67,64	67,64	
	2	Indeks ekspresi budaya	Indeks	39.74 (2023)	49,22	49,22	
	3	Indeks warisan budaya	Indeks	48.37 (2023)	51,97	51,97	
	4	Indeks ekonomi budaya	Indeks	41.92 (2023)	46,60	46,60	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Peningkatan budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, dan ekonomi budaya dilaksanakan melalui strategi penguatan literasi masyarakat, pelestarian dan

pengembangan warisan budaya, peningkatan ruang ekspresi seni dan budaya, serta pengembangan ekonomi berbasis budaya lokal. Strategi ini juga mencakup penguatan kapasitas pelaku seni dan budaya, pengembangan komunitas budaya, pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi dan promosi budaya, serta penguatan sinergi antara pemerintah, komunitas budaya, lembaga pendidikan, dan sektor swasta dalam membangun ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan peningkatan budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, dan ekonomi budaya difokuskan pada penguatan gerakan literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan daerah, perpustakaan desa, serta berbagai program literasi yang mendorong peningkatan minat baca dan literasi budaya masyarakat. Pemerintah daerah juga mendorong penguatan literasi budaya dan literasi sejarah untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap nilai-nilai budaya dan identitas daerah.

Selain itu, arah kebijakan juga diarahkan pada perlindungan dan pelestarian warisan budaya melalui inventarisasi, dokumentasi, revitalisasi, serta penguatan perlindungan hukum terhadap berbagai bentuk warisan budaya daerah. Pengembangan ruang-ruang ekspresi budaya seperti taman budaya, pusat kesenian, serta ruang kreatif masyarakat menjadi bagian penting dalam mendukung aktivitas seni dan budaya.

Kebijakan juga diarahkan pada pengembangan ekonomi budaya melalui penguatan kapasitas pelaku seni dan budaya, pengembangan produk kreatif berbasis budaya lokal, serta integrasi antara kebudayaan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pemanfaatan teknologi digital dalam promosi dan pemasaran produk budaya juga terus didorong agar produk budaya lokal dapat menjangkau pasar yang lebih luas.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan difokuskan pada penguatan gerakan literasi masyarakat melalui pengembangan fasilitas literasi, peningkatan koleksi bahan bacaan, serta penyelenggaraan berbagai program literasi berbasis komunitas. Pemerintah daerah juga mendorong penyelenggaraan berbagai kegiatan budaya seperti festival budaya, pameran seni, pertunjukan tradisional, serta program pendidikan budaya untuk meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap kekayaan budaya daerah.

Intervensi juga diarahkan pada perlindungan dan pengembangan warisan budaya melalui kegiatan inventarisasi, dokumentasi, revitalisasi situs budaya, serta penguatan peran komunitas adat dan pelaku budaya dalam menjaga keberlanjutan tradisi dan nilai-nilai budaya lokal. Selain itu, pemerintah daerah mendorong pengembangan ekonomi budaya melalui pembinaan pelaku seni dan budaya, pengembangan produk budaya yang bernilai ekonomi, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk budaya di tingkat nasional maupun internasional.

Penguatan kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem kebudayaan yang dinamis dan berkelanjutan. Melalui berbagai intervensi tersebut, diharapkan kebudayaan daerah tidak hanya tetap lestari, tetapi juga mampu menjadi sumber inspirasi, kreativitas, serta kesejahteraan bagi masyarakat.

Tabel 4. 36 Highlight Intervensi Kebijakan Meningkatnya budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya dan ekonomi budaya Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	- Penguatan literasi masyarakat, pelestarian dan pengembangan warisan budaya, peningkatan ruang ekspresi seni dan budaya, serta pengembangan ekonomi berbasis budaya lokal - Penguatan kapasitas pelaku seni dan budaya, pengembangan komunitas budaya, pemanfaatan teknologi digital dalam dokumentasi dan promosi budaya	- Penguatan gerakan literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan daerah, perpustakaan desa, serta berbagai program literasi yang mendorong peningkatan minat baca dan literasi budaya Masyarakat - Perlindungan dan pelestarian warisan budaya - Pengembangan ekonomi budaya melalui penguatan kapasitas pelaku seni dan budaya, pengembangan produk kreatif berbasis budaya lokal, serta integrasi antara kebudayaan dengan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif	Pengembangan fasilitas literasi, peningkatan koleksi bahan bacaan, serta penyelenggaraan berbagai program literasi berbasis komunitas
			Penyelenggaraan festival budaya, pameran seni, pertunjukan tradisional, serta program pendidikan budaya
			Inventarisasi, dokumentasi, revitalisasi situs budaya, serta penguatan peran komunitas adat dan pelaku budaya
			Pembinaan pelaku seni dan budaya, pengembangan produk budaya yang bernilai ekonomi, serta fasilitasi promosi dan pemasaran produk budaya
			Penguatan kolaborasi antara pemerintah, komunitas budaya, lembaga pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga

Tujuan terwujudnya peningkatan prestasi pemuda dan olahraga diarahkan untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, produktif, berkarakter, serta memiliki daya saing tinggi melalui penguatan peran pemuda dan pengembangan olahraga prestasi maupun olahraga masyarakat. Pemuda merupakan salah satu aset strategis pembangunan daerah yang memiliki potensi besar sebagai agen perubahan, inovator, serta penggerak pembangunan di berbagai sektor kehidupan. Oleh karena itu, pembangunan kepemudaan perlu diarahkan pada peningkatan kapasitas, kreativitas, dan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Penguatan peran pemuda dilakukan melalui pengembangan berbagai program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kompetensi, kepemimpinan, kewirausahaan, serta kepeloporan pemuda dalam bidang sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan. Melalui program-program tersebut, diharapkan pemuda mampu menjadi generasi yang inovatif, adaptif terhadap perubahan, serta memiliki semangat kebangsaan dan kepedulian sosial yang tinggi.

Di sisi lain, pembangunan olahraga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menciptakan prestasi olahraga yang membanggakan daerah. Pengembangan olahraga diarahkan pada peningkatan pembinaan atlet secara berkelanjutan, penguatan sistem pembinaan olahraga sejak usia dini, serta peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan mudah diakses oleh masyarakat. Peningkatan prestasi olahraga juga didukung melalui penguatan kelembagaan olahraga, peningkatan kapasitas pelatih dan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan berbagai kompetisi dan kejuaraan olahraga secara berjenjang. Upaya ini diharapkan mampu melahirkan atlet-atlet berprestasi yang dapat bersaing di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Adapun indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 37 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga Tahun 2027

Tujuan	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Peningkatan Prestasi Pemuda dan Olahraga	**1**	**Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)**	**Indeks**	**55,50**	**54,48**	**54,48**	
	2	**Indeks Pembangunan Olahraga (IPO)**	**Indeks**	**0,345 (2024)**	**0,348**	**0,348**	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

3. Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga

Sasaran meningkatnya daya saing pemuda dan prestasi olahraga diarahkan untuk memperkuat peran pemuda sebagai agen perubahan dan penggerak pembangunan daerah, sekaligus meningkatkan capaian prestasi olahraga yang mampu mengharumkan nama daerah di tingkat regional, nasional, maupun internasional. Pemuda merupakan kelompok strategis yang memiliki potensi besar dalam mendorong inovasi, kreativitas, serta partisipasi aktif dalam berbagai bidang pembangunan, sehingga perlu didukung melalui berbagai program pemberdayaan yang mampu meningkatkan kapasitas, kompetensi, serta kepemimpinan pemuda.

Penguatan daya saing pemuda dilakukan melalui pengembangan pendidikan kepemudaan, pelatihan kewirausahaan, peningkatan keterampilan, serta penguatan kepeloporan dan partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya. Upaya ini diharapkan mampu menciptakan generasi muda yang inovatif, produktif, serta memiliki kemampuan untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan dinamika global.

Di sisi lain, peningkatan prestasi olahraga menjadi bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang sehat, tangguh, dan berdaya saing. Pengembangan olahraga diarahkan pada penguatan sistem pembinaan atlet secara berkelanjutan, peningkatan kualitas pelatih dan tenaga keolahragaan, serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan merata. Melalui pembinaan yang terstruktur dan berkelanjutan, diharapkan lahir atlet-atlet berprestasi yang mampu bersaing dan meraih prestasi pada berbagai ajang olahraga.

Selain itu, pengembangan olahraga masyarakat juga menjadi bagian penting dalam membangun budaya hidup sehat dan aktif di tengah masyarakat. Kegiatan olahraga rekreasi, olahraga komunitas, serta berbagai kompetisi olahraga menjadi sarana penting dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga sekaligus memperluas basis pembinaan atlet di daerah. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 38 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga di NTB Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	1	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Pemuda	%	69,97	71,18	71,18	
	2	Persentase Peningkatan Perolehan Medali Tingkat Nasional dan Internasional	% (medali)	23,40 (58 medali)	11,53 (58 Medali)	11,53 (58 Medali)	
	3	Persentase Pemuda dan atlet berprestasi yang mendapat insentif dan atau beasiswa	%	100	100	100	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga dilaksanakan melalui strategi penguatan pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda, peningkatan pembinaan olahraga prestasi secara berjenjang, serta pengembangan olahraga masyarakat. Strategi ini juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang kepemudaan dan olahraga, penguatan kelembagaan organisasi kepemudaan dan olahraga, serta penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai dan merata di berbagai wilayah.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan peningkatan daya saing pemuda dan prestasi olahraga difokuskan pada penguatan kapasitas pemuda melalui berbagai program pendidikan kepemudaan, pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan berbagai program kepeloporan pemuda, kegiatan kepemudaan berbasis komunitas, serta penguatan organisasi kepemudaan sebagai wadah pengembangan potensi generasi muda.

Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada penguatan sistem pembinaan olahraga prestasi melalui peningkatan kualitas pembinaan atlet sejak usia dini, pengembangan pusat pelatihan olahraga, serta peningkatan kapasitas pelatih dan tenaga keolahragaan. Pemerintah daerah juga mendorong penyelenggaraan berbagai kompetisi olahraga secara berjenjang sebagai bagian dari proses pembinaan atlet yang berkelanjutan.

Di sisi lain, arah kebijakan juga mencakup peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga Persiapan PON 2028, pengembangan olahraga masyarakat, serta penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga rekreasi yang mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan difokuskan pada penguatan pemberdayaan pemuda melalui program pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta pengembangan

keterampilan yang mendukung peningkatan daya saing pemuda di berbagai sektor pembangunan. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan program kepeloporan pemuda, penguatan komunitas kreatif pemuda, serta fasilitasi kegiatan kepemudaan yang mampu meningkatkan partisipasi aktif generasi muda dalam pembangunan daerah.

Di sektor olahraga, intervensi diarahkan pada penguatan sistem pembinaan atlet melalui pengembangan pusat pelatihan olahraga, peningkatan kualitas pelatih dan tenaga keolahragaan, serta penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang untuk menjaring dan membina atlet berprestasi. Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga Persiapan PON 2028 juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembinaan olahraga yang lebih efektif.

Selain itu, intervensi kebijakan juga mencakup pengembangan olahraga masyarakat melalui penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga rekreasi dan komunitas yang mendorong gaya hidup sehat serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam aktivitas olahraga. Penguatan kerja sama dengan organisasi olahraga, lembaga pendidikan, serta sektor swasta juga menjadi bagian penting dalam membangun ekosistem pembinaan pemuda dan olahraga yang berkelanjutan.

Tabel 4. 39 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Penguatan pemberdayaan pemuda, pengembangan kepemimpinan dan kewirausahaan pemuda, peningkatan pembinaan olahraga prestasi secara berjenjang, serta pengembangan olahraga masyarakat	- Penguatan kapasitas pemuda melalui berbagai program pendidikan kepemudaan, pelatihan keterampilan, pengembangan kewirausahaan, serta peningkatan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah - Pengembangan pusat pelatihan olahraga - Peningkatan akses terhadap sarana dan prasarana olahraga Persiapan PON 2028	Program pelatihan kepemimpinan, kewirausahaan, serta pengembangan keterampilan yang mendukung peningkatan daya saing pemuda
			Pengembangan program kepeloporan pemuda
			Penguatan komunitas kreatif pemuda
			Fasilitasi kegiatan kepemudaan dalam pembangunan daerah
			Peningkatan kualitas pembinaan atlet sejak usia dini, pengembangan pusat pelatihan olahraga, serta peningkatan kapasitas pelatih dan tenaga keolahragaan
			Penyediaan dan peningkatan kualitas sarana dan prasarana olahraga Persiapan PON 2028
			Penyelenggaraan berbagai kegiatan olahraga rekreasi dan komunitas

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Prioritas Daerah 5 : Transformasi Lingkungan Berkelanjutan dan Ketahanan Iklim

Dalam mendukung pencapaian prioritas tersebut, pembangunan diarahkan pada tiga tujuan strategis yang saling terintegrasi. Pertama, terwujudnya peningkatan resiliensi terhadap bencana, dengan sasaran meningkatnya ketahanan daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana melalui penguatan upaya mitigasi, kesiapsiagaan, kapasitas kelembagaan, sistem peringatan dini, serta kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana pada setiap tahapan, mulai dari pra-bencana,

tanggap darurat, hingga pascabencana. Kedua, terwujudnya pengelolaan sumber daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, dengan sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup, semakin optimalnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem, serta meningkatnya ketahanan energi melalui pengembangan energi baru terbarukan, efisiensi energi, dan pemerataan akses energi yang berkelanjutan sebagai bagian dari pembangunan rendah karbon dan pengendalian perubahan iklim. Ketiga, terwujudnya investasi yang berkelanjutan, dengan sasaran meningkatnya realisasi investasi yang berkualitas, inklusif, dan berwawasan lingkungan guna memperkuat transformasi ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, serta mendukung pembangunan yang tangguh dan berkelanjutan.

Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana

Tujuan terwujudnya peningkatan resiliensi terhadap bencana diarahkan untuk membangun kemampuan daerah dan masyarakat dalam mengantisipasi, mengurangi risiko, menghadapi, serta pulih secara cepat dan berkelanjutan dari dampak bencana. Tujuan ini menekankan penguatan sistem mitigasi, kesiapsiagaan, tanggap darurat, dan pemulihan yang terintegrasi, berbasis risiko, dan partisipatif. Pemerintah daerah berupaya memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat guna memastikan efektivitas penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Selain itu, tujuan ini juga diarahkan untuk mengintegrasikan prinsip ketangguhan bencana dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, pengelolaan lingkungan, serta pembangunan infrastruktur yang aman dan berkelanjutan. Melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, pemberdayaan masyarakat, penguatan sistem peringatan dini, serta pengembangan budaya sadar risiko, diharapkan tercipta daerah yang tangguh, adaptif, dan mampu menjaga keberlanjutan pembangunan serta kesejahteraan masyarakat di tengah berbagai potensi ancaman bencana. Adapun indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 40 Indikator dan Target Tujuan Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana Tahun 2027

Tujuan	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Peningkatan resiliensi Terhadap Bencana	**1**	**Indeks Risiko Bencana (IRB)**	**Indeks**	**156,02**	**133,27-131,18**	**133,27-131,18**	IUP 44

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

1. Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana

   Sasaran ini diarahkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang tangguh, terintegrasi, dan berkelanjutan melalui penguatan kapasitas kelembagaan, sumber daya manusia, serta partisipasi masyarakat. Strategi ini menekankan pada upaya pengurangan risiko bencana sejak tahap perencanaan pembangunan, peningkatan kualitas mitigasi dan kesiapsiagaan, serta penguatan sistem peringatan dini dan respons cepat. Pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor dengan lembaga terkait, termasuk dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana,

guna memastikan keterpaduan kebijakan dan program penanggulangan bencana di tingkat daerah dan nasional.

Selain itu, juga mendorong pengarusutamaan kebencanaan dalam tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan lingkungan hidup agar lebih adaptif terhadap potensi ancaman bencana. Pemberdayaan masyarakat melalui edukasi kebencanaan, pembentukan desa tangguh bencana, serta penguatan relawan menjadi bagian penting dalam membangun ketahanan sosial. Melalui sinergi antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat, diharapkan terwujud daerah yang mampu mengantisipasi, menghadapi, dan pulih secara cepat dari dampak bencana, sehingga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat terus terjaga. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 41 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana di NTB Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	1	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0,55	0,63	0,63	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Strategi peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, respons kedaruratan, serta pemulihan pascabencana diarahkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan. Strategi ini menekankan penguatan upaya pencegahan dan pengurangan risiko melalui pemetaan wilayah rawan bencana, integrasi kebencanaan dalam perencanaan pembangunan, serta peningkatan kapasitas aparatur dan masyarakat. Pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam rangka memastikan keterpaduan kebijakan dan efektivitas penanganan bencana.

Selain itu, strategi ini mendorong penguatan sistem tanggap darurat yang cepat, tepat, dan terkoordinasi, serta percepatan pemulihan sosial, ekonomi, dan lingkungan pascabencana. Melalui pendekatan kolaboratif antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan lembaga pendidikan, diharapkan terwujud daerah yang tangguh, adaptif, dan mampu pulih secara cepat dari dampak bencana.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan peningkatan mitigasi, kesiapsiagaan, respons kedaruratan, dan pemulihan pascabencana diarahkan pada penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kebijakan ini menekankan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam perencanaan pembangunan, tata ruang, serta pembangunan infrastruktur yang berwawasan kebencanaan. Pemerintah daerah mendorong peningkatan kapasitas kelembagaan, sistem komando penanganan darurat, serta penguatan logistik dan sumber daya pendukung kebencanaan.

Selain itu, arah kebijakan juga difokuskan pada peningkatan peran serta masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan, penguatan sistem peringatan dini, serta pengembangan mekanisme pemulihan pascabencana yang berorientasi pada keberlanjutan. Kebijakan pemulihan diarahkan untuk memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi berjalan secara cepat, tepat, dan berkeadilan dengan menerapkan prinsip pembangunan yang lebih aman dan tangguh.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan difokuskan pada penguatan upaya mitigasi melalui penyusunan dan pemutakhiran peta risiko bencana, integrasi kebencanaan dalam dokumen perencanaan daerah, serta pembangunan infrastruktur pengendali bencana. Intervensi diarahkan pada peningkatan kesiapsiagaan melalui pelatihan kebencanaan, simulasi evakuasi, pembentukan desa tangguh bencana, dan penguatan relawan kebencanaan di tingkat lokal.

Dalam aspek respons kedaruratan, pemerintah daerah memperkuat sistem peringatan dini, pusat komando penanganan bencana, serta penyediaan sarana dan prasarana darurat, termasuk logistik, layanan kesehatan, dan tempat pengungsian yang layak. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam mempercepat penanganan keadaan darurat.

Pada tahap pemulihan pascabencana, intervensi kebijakan diarahkan pada percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur, pemulihan layanan dasar, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat terdampak. Pemerintah daerah mendorong penerapan prinsip build back better dalam pembangunan kembali wilayah terdampak, penguatan dukungan psikososial, serta pendampingan usaha produktif guna memastikan pemulihan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan tinggi terhadap risiko bencana di masa depan.

Tabel 4. 42 Highlight Intervensi Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana di NTB Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Peningkatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana, respons kedaruratan, serta pemulihan pascabencana diarahkan untuk membangun sistem penanggulangan bencana yang komprehensif, responsif, dan berkelanjutan	- Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang terintegrasi dari hulu hingga hilir dan - peningkatan peran serta masyarakat dalam mitigasi dan kesiapsiagaan, penguatan sistem peringatan dini, serta pengembangan mekanisme pemulihan pascabencana yang berorientasi pada keberlanjutan.	Penyusunan dan pemutakhiran peta risiko dan kerawanan bencana secara berkala berbasis data dan teknologi
			Integrasi pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan pembangunan, tata ruang, dan pembangunan infrastruktur daerah
			Penguatan kapasitas aparatur, relawan, dan masyarakat melalui pelatihan, sertifikasi, serta simulasi kebencanaan
			Pengembangan dan penguatan desa/kelurahan tangguh bencana sebagai basis kesiapsiagaan masyarakat
			Penguatan dan modernisasi sistem peringatan dini bencana yang terintegrasi dan mudah diakses masyarakat
			Penyediaan dan peningkatan sarana-prasarana tanggap darurat, termasuk posko bencana, logistik, tempat pengungsian, dan layanan kesehatan
			Penguatan pusat komando dan sistem koordinasi penanganan darurat lintas sektor dan lintas wilayah

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
			Pemulihan layanan dasar masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, air bersih, dan sanitasi di wilayah terdampak.

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara bijaksana, efisien, dan bertanggung jawab sehingga mampu memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat tanpa mengabaikan kelestarian lingkungan hidup. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan menjadi fondasi penting dalam mendukung pembangunan daerah yang berwawasan lingkungan, sekaligus menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan ekosistem, dan kesejahteraan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pembangunan daerah perlu memperhatikan keseimbangan antara eksploitasi sumber daya alam dengan upaya konservasi dan perlindungan lingkungan. Berbagai sektor pembangunan yang memanfaatkan sumber daya alam seperti pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, pertambangan, serta pariwisata harus dikelola dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan, efisiensi pemanfaatan sumber daya, serta pengendalian dampak lingkungan. Pendekatan ini penting untuk mencegah terjadinya degradasi lingkungan, kerusakan ekosistem, dan penurunan kualitas sumber daya alam yang dapat mengancam keberlanjutan pembangunan daerah.

Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga memiliki keterkaitan erat dengan upaya pengendalian perubahan iklim, khususnya dalam menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari berbagai aktivitas pembangunan. Sektor kehutanan, energi, pertanian, serta pengelolaan limbah merupakan kontributor penting terhadap emisi GRK, sehingga diperlukan berbagai langkah mitigasi melalui pengelolaan hutan yang berkelanjutan, rehabilitasi lahan kritis, pengembangan energi bersih, serta penerapan praktik produksi yang lebih ramah lingkungan. Upaya ini diharapkan mampu menekan laju peningkatan emisi sekaligus memperkuat kontribusi daerah dalam mendukung komitmen nasional dalam pengendalian perubahan iklim.

Selain itu, pengelolaan sumber daya alam juga diarahkan pada penguatan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan, seperti perlindungan kawasan hutan dan pesisir, pengelolaan daerah aliran sungai, pelestarian keanekaragaman hayati, serta pengendalian pencemaran lingkungan. Upaya-upaya tersebut tidak hanya bertujuan menjaga kualitas lingkungan hidup, tetapi juga berkontribusi dalam meningkatkan kapasitas penyerapan karbon oleh ekosistem alam sehingga dapat membantu mengurangi konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Di sisi lain, penerapan teknologi ramah lingkungan, pengembangan ekonomi hijau, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian lingkungan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pemberdayaan masyarakat dan penguatan peran komunitas lokal dalam pengelolaan lingkungan, seperti pengelolaan hutan berbasis masyarakat, konservasi sumber daya pesisir, serta praktik pertanian berkelanjutan, dapat menjadi langkah strategis dalam menjaga keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dan upaya

perlindungan lingkungan. Adapun indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 43 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan Tahun 2027

Tujuan	Indikator		Satuan	Kondisi Awal (2024)	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Ramah Lingkungan dan Berkelanjutan	**1**	**Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati**	**Indeks**	**NA**	**0,543**	**0,543**	IUP 41
	2	**Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)**	**%**	13,80	**28,61**	**28,61**	Sasaran Visi

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

1. Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas

Pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas merupakan fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, tangguh terhadap perubahan iklim, serta mampu menjamin keberlanjutan sumber daya alam bagi generasi mendatang. Peningkatan kualitas lingkungan hidup diarahkan pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, perlindungan keanekaragaman hayati, serta penguatan tata kelola sumber daya alam yang berkelanjutan.

Seiring dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta perkembangan kawasan permukiman, industri, pariwisata, dan pertanian, tekanan terhadap lingkungan hidup juga semakin besar. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kebijakan yang mendorong keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya alam dengan upaya konservasi dan rehabilitasi lingkungan.

Upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dilakukan melalui pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah; pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu; rehabilitasi kawasan hutan dan lahan kritis; serta penguatan ketahanan daerah terhadap dampak perubahan iklim dan bencana ekologis. Selain itu, peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat, dunia usaha, serta pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan menjadi faktor kunci dalam menciptakan ekosistem pembangunan yang ramah lingkungan. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 44 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,40	76,61	76,61	Sasaran Visi dan IUP 42a

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Strategi peningkatan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas diarahkan pada penguatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara

terpadu melalui peningkatan pengawasan terhadap aktivitas pemanfaatan sumber daya alam serta penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan pada seluruh sektor pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan tata kelola lingkungan hidup yang mampu menjaga keseimbangan antara kegiatan pembangunan dengan upaya konservasi dan perlindungan ekosistem.

Selain itu, strategi pembangunan lingkungan juga difokuskan pada peningkatan pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Rehabilitasi dan konservasi sumber daya alam, termasuk kawasan hutan, daerah aliran sungai, dan ekosistem penting lainnya, menjadi bagian penting dalam menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penguatan ketahanan lingkungan terhadap dampak perubahan iklim juga menjadi strategi utama melalui penerapan langkah-langkah mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan daerah.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup difokuskan pada upaya peningkatan kualitas lingkungan melalui pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah secara berkelanjutan serta penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. Kebijakan juga diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pemulihan daerah aliran sungai guna menjaga keberlanjutan fungsi ekosistem dan mengurangi risiko bencana lingkungan.

Di samping itu, arah kebijakan juga menekankan pada penguatan integrasi aspek lingkungan hidup dalam proses perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah sehingga setiap aktivitas pembangunan tetap memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengembangan kebijakan pembangunan rendah karbon, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan lingkungan hidup juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan.

Highlight Intervensi kebijakan :

Sebagai bentuk implementasi dari strategi dan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup, pemerintah daerah melakukan berbagai intervensi kebijakan prioritas yang difokuskan pada peningkatan pengelolaan sampah daerah melalui pengembangan fasilitas pengolahan sampah terpadu, penguatan bank sampah berbasis masyarakat, serta pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai. Intervensi lainnya juga diarahkan pada rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pemulihan daerah aliran sungai, serta perlindungan kawasan lindung dan ekosistem penting.

Selain itu, pengendalian pencemaran lingkungan dilakukan melalui peningkatan pengawasan terhadap ketaatan lingkungan usaha dan industri, pengendalian limbah domestik dan industri, serta penguatan sistem pemantauan kualitas air, udara, dan tanah secara berkala. Dalam rangka meningkatkan ketahanan lingkungan terhadap perubahan iklim, intervensi kebijakan juga mencakup pengembangan program desa tangguh iklim, pengurangan emisi gas rumah kaca, serta penguatan kapasitas masyarakat dan pemerintah daerah dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana ekologis.

Tabel 4. 45 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	- Penguatan upaya pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan secara terpadu - peningkatan pengelolaan sampah dan limbah secara terpadu dengan melibatkan pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat	- Pengendalian pencemaran air, udara, dan tanah secara berkelanjutan serta penguatan sistem pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir dengan pendekatan pengurangan, pemanfaatan kembali, dan daur ulang - Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan kritis serta pemulihan daerah aliran Sungai - Penguatan integrasi aspek lingkungan hidup dalam proses perencanaan pembangunan dan penataan ruang wilayah	Pengembangan fasilitas pengolahan sampah terpadu, penguatan bank sampah berbasis masyarakat, serta pengurangan penggunaan sampah plastik sekali pakai
			Rehabilitasi hutan dan lahan kritis, pemulihan daerah aliran sungai
			Perlindungan kawasan lindung dan ekosistem penting
			Peningkatan pengawasan terhadap ketaatan lingkungan usaha dan industri, pengendalian limbah domestik dan industri
			Penguatan sistem pemantauan kualitas air, udara, dan tanah secara berkala
			Pengembangan program desa tangguh iklim
			Pengurangan emisi gas rumah kaca
			Penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim dan bencana ekologis

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

2. Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem

Sasaran meningkatnya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem diarahkan untuk menjaga kelestarian keanekaragaman hayati serta keberlanjutan fungsi ekosistem yang menjadi penopang kehidupan masyarakat dan pembangunan daerah. Sumber daya alam hayati yang meliputi berbagai jenis flora, fauna, serta ekosistem darat maupun laut merupakan kekayaan alam yang memiliki nilai ekologis, sosial, dan ekonomi yang sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan.

Upaya konservasi sumber daya alam hayati perlu dilakukan secara terpadu melalui perlindungan kawasan konservasi, pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan, serta pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya degradasi ekosistem, penurunan keanekaragaman hayati, serta kerusakan habitat yang dapat mengancam keseimbangan lingkungan.

Selain itu, konservasi ekosistem juga memiliki peran penting dalam mendukung mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Ekosistem alami seperti hutan, mangrove, padang lamun, dan terumbu karang memiliki kemampuan dalam menyerap karbon serta melindungi wilayah dari berbagai risiko bencana lingkungan seperti banjir, abrasi, dan kekeringan. Oleh karena itu, pengelolaan dan perlindungan ekosistem menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas lingkungan dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim.

Di sisi lain, peningkatan konservasi sumber daya alam hayati juga memerlukan dukungan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan pengelola kawasan konservasi, serta pengembangan berbagai program pemberdayaan masyarakat berbasis konservasi. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara upaya pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang hidup di sekitar kawasan sumber daya alam. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 46 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	1	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Sektor Kehutanan dan Lahan	Indeks	0,331	0,337	0,337	
	2	Persentase Luas Lokasi Prioritas Rehabilitasi Ekosistem Berstatus Baik	%	0,10	0,20	0,20	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Peningkatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dilaksanakan melalui strategi penguatan perlindungan kawasan konservasi, pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan, serta penguatan peran masyarakat dalam konservasi sumber daya alam. Strategi ini juga mencakup penguatan sistem pengawasan dan pengendalian pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan penelitian dan pemantauan keanekaragaman hayati, serta peningkatan kerja sama lintas sektor dalam upaya pelestarian ekosistem darat dan laut.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan peningkatan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem difokuskan pada penguatan perlindungan kawasan konservasi dan kawasan lindung melalui peningkatan pengawasan, pengendalian aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan, serta penguatan pengelolaan kawasan konservasi secara berkelanjutan. Pemerintah daerah juga mendorong upaya rehabilitasi ekosistem yang mengalami degradasi melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, restorasi ekosistem pesisir dan laut, serta perlindungan habitat satwa dan tumbuhan yang terancam punah.

Selain itu, arah kebijakan juga diarahkan pada penguatan konservasi berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan konservasi untuk terlibat aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan ekonomi berbasis konservasi seperti ekowisata, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam mendukung upaya konservasi.

Kebijakan lainnya juga mencakup penguatan penelitian, pemantauan, serta pengembangan sistem informasi keanekaragaman hayati sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan berbasis data.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan dalam rangka meningkatkan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem difokuskan pada penguatan perlindungan kawasan konservasi dan kawasan lindung melalui peningkatan pengawasan serta pengendalian aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan. Upaya ini dilakukan

dengan memperkuat tata kelola kawasan konservasi, meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya alam, serta mendorong penerapan prinsip pemanfaatan yang berkelanjutan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga.

Intervensi kebijakan juga diarahkan pada pelaksanaan rehabilitasi dan pemulihan ekosistem yang mengalami degradasi melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan kritis, restorasi kawasan pesisir, serta pemulihan ekosistem laut seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki fungsi ekologis lingkungan, meningkatkan kemampuan ekosistem dalam menyerap karbon, serta memperkuat ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan bencana lingkungan.

Selain itu, perlindungan keanekaragaman hayati menjadi bagian penting dari intervensi kebijakan melalui penguatan upaya konservasi flora dan fauna serta perlindungan habitat alami yang menjadi tempat hidup berbagai spesies. Pemerintah daerah juga mendorong pengembangan sistem pemantauan dan pendataan keanekaragaman hayati sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang lebih efektif dan berbasis data.

Di sisi lain, intervensi kebijakan juga menekankan pada penguatan konservasi berbasis masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sumber daya alam agar berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan. Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis konservasi seperti ekowisata, pengelolaan hutan berbasis masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan menjadi bagian penting dalam menciptakan keseimbangan antara upaya pelestarian lingkungan dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang konservasi juga menjadi fokus intervensi kebijakan melalui peningkatan kompetensi aparatur, penguatan koordinasi lintas sektor, serta pengembangan kemitraan dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi, dunia usaha, dan organisasi masyarakat. Melalui berbagai intervensi tersebut, diharapkan upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem dapat dilaksanakan secara lebih efektif, berkelanjutan, serta memberikan manfaat ekologis dan ekonomi bagi masyarakat di Nusa Tenggara Barat.

Tabel 4. 47 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Penguatan perlindungan kawasan konservasi, pengelolaan ekosistem secara berkelanjutan, rehabilitasi dan pemulihan ekosistem yang mengalami kerusakan, serta penguatan peran	- Penguatan perlindungan kawasan konservasi dan kawasan lindung - Penguatan konservasi berbasis Masyarakat - Penguatan penelitian, pemantauan, serta pengembangan sistem informasi keanekaragaman hayati	Peningkatan pengawasan serta pengendalian aktivitas yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan
			Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
			Restorasi kawasan pesisir
			Pemulihan ekosistem laut seperti mangrove, padang lamun, dan terumbu karang
			Penguatan upaya konservasi flora dan fauna serta perlindungan habitat alami yang menjadi tempat hidup berbagai spesies
			Pengembangan sistem pemantauan dan pendataan keanekaragaman hayati
			Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan sumber daya alam

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
	masyarakat dalam konservasi sumber daya alam		Pengembangan kegiatan ekonomi berbasis konservasi seperti ekowisata

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

3. Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan

Sasaran ini diarahkan untuk memastikan ketersediaan energi yang cukup, andal, dan berkelanjutan guna mendukung pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Energi merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan daerah karena berperan dalam mendukung berbagai aktivitas ekonomi, sosial, dan pelayanan publik.

Upaya peningkatan ketahanan energi tidak hanya difokuskan pada peningkatan pasokan energi, tetapi juga pada pemerataan akses energi bagi seluruh masyarakat, termasuk wilayah terpencil dan kawasan yang masih memiliki keterbatasan layanan listrik. Ketersediaan energi yang merata akan mendukung peningkatan produktivitas masyarakat, pengembangan sektor usaha, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Selain itu, pengembangan energi ramah lingkungan menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan pengendalian perubahan iklim. Pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan seperti tenaga surya, tenaga air, biomassa, serta energi angin perlu terus didorong untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil serta menekan emisi gas rumah kaca dari sektor energi.

Peningkatan efisiensi energi dan pengelolaan konsumsi energi secara bijak juga menjadi bagian penting dalam memperkuat ketahanan energi daerah. Melalui penerapan teknologi energi yang lebih efisien, pengembangan sistem kelistrikan yang andal, serta peningkatan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan energi yang hemat dan ramah lingkungan, diharapkan sistem energi daerah dapat berkembang secara berkelanjutan. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 48 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjuta	1	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	123,53	176,89	176,89	IUP 43a
	2	Konsumsi Listrik per kapita	kWh	769,88	808,00	808,00	IUP 43a

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Peningkatan ketahanan energi ramah lingkungan dan pemerataan konsumsi listrik dilaksanakan melalui strategi pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, peningkatan keandalan sistem kelistrikan daerah, perluasan akses listrik bagi masyarakat, serta peningkatan efisiensi dan konservasi energi. Strategi ini juga

mencakup penguatan infrastruktur energi, pengembangan teknologi energi bersih, serta peningkatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam pengembangan energi berkelanjutan.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan peningkatan ketahanan energi daerah difokuskan pada penguatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pemerintah daerah mendorong pemanfaatan potensi energi lokal seperti tenaga surya, mikrohidro, biomassa, dan sumber energi terbarukan lainnya guna meningkatkan kemandirian energi daerah.

Selain itu, arah kebijakan juga diarahkan pada peningkatan keandalan sistem kelistrikan melalui penguatan jaringan distribusi listrik, peningkatan kapasitas pembangkit listrik, serta pengembangan sistem kelistrikan yang mampu menjangkau wilayah terpencil dan kawasan yang belum terlayani secara optimal.

Kebijakan lainnya juga mencakup peningkatan efisiensi energi melalui penerapan teknologi hemat energi, penguatan program konservasi energi, serta peningkatan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam penggunaan energi secara efisien dan berkelanjutan. Penguatan perencanaan energi daerah serta pengembangan kerja sama dengan berbagai pihak juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan sistem energi yang berkelanjutan.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan dalam meningkatkan ketahanan energi ramah lingkungan dan pemerataan konsumsi listrik difokuskan pada pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan melalui pembangunan berbagai sumber pembangkit energi bersih seperti tenaga surya, mikrohidro, dan biomassa yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal. Pengembangan energi terbarukan ini diharapkan dapat meningkatkan ketersediaan energi sekaligus mengurangi ketergantungan pada energi berbasis fosil.

Intervensi kebijakan juga diarahkan pada peningkatan akses dan pemerataan layanan listrik bagi masyarakat melalui penguatan infrastruktur kelistrikan, perluasan jaringan distribusi listrik, serta pengembangan sistem energi alternatif di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik utama.

Selain itu, peningkatan efisiensi dan konservasi energi menjadi bagian penting dari intervensi kebijakan melalui penerapan teknologi hemat energi pada sektor industri, bangunan, dan rumah tangga, serta pengembangan berbagai program edukasi dan kampanye penggunaan energi secara bijak.

Penguatan tata kelola energi daerah, peningkatan kapasitas kelembagaan, serta pengembangan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan juga menjadi bagian dari intervensi kebijakan untuk memastikan pengembangan energi yang lebih terintegrasi, berkelanjutan, dan mampu mendukung pembangunan daerah secara jangka panjang.

Tabel 4. 49 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Pengembangan dan pemanfaatan energi baru terbarukan, peningkatan keandalan sistem kelistrikan daerah, perluasan akses listrik bagi masyarakat, serta peningkatan efisiensi dan konservasi energi	- Penguatan pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan sebagai sumber energi alternatif yang ramah lingkungan dan berkelanjutan - Penguatan jaringan distribusi listrik, peningkatan kapasitas pembangkit listrik, serta pengembangan sistem kelistrikan yang mampu menjangkau wilayah terpencil dan kawasan yang belum terlayani secara optimal	Pembangunan berbagai sumber pembangkit energi yang memanfaatkan potensi sumber daya lokal
			Penguatan infrastruktur kelistrikan
			Perluasan jaringan distribusi listrik
			Pengembangan sistem energi alternatif di wilayah terpencil yang belum terjangkau jaringan listrik utama
			Penerapan teknologi hemat energi pada sektor industri, bangunan, dan rumah tangga
			Pengembangan berbagai program edukasi dan kampanye penggunaan energi secara bijak
			Penguatan dan pengembangan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan energi

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Terwujudnya Investasi Berkelanjutan

Tujuan ini diarahkan untuk mendorong peningkatan investasi yang tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan, sosial, dan tata kelola pembangunan daerah. Investasi berkelanjutan menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat struktur ekonomi daerah melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan nilai tambah sektor unggulan, serta penguatan daya saing daerah dalam jangka panjang.

Dalam konteks pembangunan daerah, investasi berkelanjutan juga diarahkan untuk mendukung transformasi ekonomi melalui pengembangan sektor-sektor strategis yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif. Hal ini dilakukan dengan memperkuat sinergi antara pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat dalam menciptakan ekosistem investasi yang inklusif, inovatif, dan berkelanjutan.

Dengan terwujudnya investasi yang berkualitas dan berkelanjutan, diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, mengurangi kesenjangan wilayah, serta menjaga keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan untuk generasi mendatang. Adapun indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 50 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Investasi Berkelanjutan Tahun 2027

Tujuan	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Terwujudnya Investasi Berkelanjutan	**1**	**Pembentukan Modal Tetap Bruto**	**% PDRB**	**34,31**	**37,03-37,32**	**36,39**	IUP 21

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

1. Meningkatnya Realisasi Investasi

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat peran investasi sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan realisasi investasi menjadi penting dalam mendorong percepatan pembangunan, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan nilai tambah sektor unggulan, serta memperkuat daya saing perekonomian daerah. Investasi yang masuk diharapkan tidak hanya berorientasi pada besaran nilai investasi, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi yang luas bagi masyarakat serta mendukung transformasi ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Upaya peningkatan realisasi investasi dilakukan melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif, peningkatan kemudahan berusaha, serta penguatan promosi potensi daerah yang berbasis pada keunggulan komparatif dan kompetitif. Pemerintah daerah juga mendorong investasi pada sektor-sektor strategis yang memiliki keterkaitan kuat dengan pengembangan ekonomi lokal, seperti sektor industri pengolahan, pariwisata, pertanian, kelautan dan perikanan, serta ekonomi kreatif.

Selain itu, peningkatan realisasi investasi juga didukung melalui penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha dalam memastikan kepastian regulasi, ketersediaan infrastruktur pendukung, serta kesiapan kawasan investasi. Dengan demikian, peningkatan investasi yang masuk ke daerah diharapkan mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, memperkuat struktur ekonomi daerah, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 51 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Realisasi Investasi Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya Realisasi Investasi	1	Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	61,10	76,65	68,8	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Strategi untuk mewujudkan peningkatan Realisasi Investasi diarahkan pada penguatan ekosistem investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan. Hal ini dilakukan melalui peningkatan kemudahan dan kepastian berusaha dengan menyederhanakan proses perizinan serta meningkatkan kualitas pelayanan investasi yang cepat, transparan, dan terintegrasi. Selain itu, strategi juga difokuskan pada optimalisasi promosi potensi dan peluang investasi daerah dengan menonjolkan sektor-sektor unggulan yang memiliki nilai tambah tinggi serta potensi pengembangan yang luas.

Di samping itu, pemerintah daerah mendorong pengembangan investasi pada sektor-sektor prioritas yang mampu memberikan dampak ekonomi yang signifikan, baik dalam bentuk peningkatan nilai tambah maupun penciptaan lapangan kerja. Penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan dunia usaha juga

menjadi bagian penting dalam strategi ini guna memastikan adanya kepastian regulasi, dukungan kebijakan, serta koordinasi dalam pengembangan investasi. Strategi lainnya adalah meningkatkan kesiapan kawasan dan infrastruktur pendukung sebagai faktor penting dalam menarik minat investor untuk menanamkan modal di daerah.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan dalam mendukung peningkatan realisasi investasi difokuskan pada penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif melalui penguatan sistem pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi dan berbasis digital. Pemerintah daerah juga mendorong peningkatan promosi investasi secara lebih terarah dengan memanfaatkan pemetaan potensi daerah dan pengembangan peluang investasi yang berbasis pada sektor unggulan dan kawasan strategis.

Selain itu, arah kebijakan juga diarahkan pada pengembangan kawasan-kawasan ekonomi yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan investasi baru, seperti kawasan industri, kawasan pariwisata, serta kawasan ekonomi strategis lainnya. Kebijakan ini juga mendorong terbangunnya kemitraan yang kuat antara investor dengan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM dan pelaku ekonomi kreatif, sehingga investasi yang masuk dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi perekonomian daerah. Dukungan terhadap penyediaan infrastruktur serta peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi bagian dari kebijakan untuk memperkuat daya tarik investasi daerah.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan dalam meningkatkan realisasi investasi difokuskan pada beberapa langkah strategis yang berdampak langsung terhadap peningkatan minat dan realisasi penanaman modal di daerah. Intervensi tersebut antara lain melalui penguatan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi dan efisien untuk mempercepat proses investasi serta meningkatkan kepastian bagi para investor.

Selain itu, dilakukan penyusunan dan promosi peta peluang investasi daerah yang memuat potensi sektor unggulan serta peluang pengembangan usaha yang prospektif. Intervensi lainnya adalah penyiapan dan pengembangan kawasan strategis investasi, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi potensial yang didukung oleh infrastruktur yang memadai.

Pemerintah daerah juga memfasilitasi kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM, guna memperkuat rantai nilai ekonomi daerah serta meningkatkan pemerataan manfaat investasi. Di samping itu, pelaksanaan berbagai kegiatan promosi investasi, forum bisnis, dan business matching dengan calon investor juga terus didorong untuk meningkatkan daya tarik daerah sebagai tujuan investasi yang potensial dan berkelanjutan.

Tabel 4. 52 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Realisasi Investasi Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Penguatan ekosistem investasi yang kondusif, kompetitif, dan berkelanjutan	- Penciptaan iklim investasi yang semakin kondusif - Pengembangan kawasan-kawasan ekonomi yang memiliki potensi menjadi pusat pertumbuhan investasi baru	Penguatan pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi dan efisien untuk mempercepat proses investasi serta meningkatkan kepastian bagi para investor
			Penyusunan dan promosi peta peluang investasi daerah yang memuat potensi sektor unggulan
			Penyiapan dan pengembangan kawasan strategis investasi, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan ekonomi potensial yang didukung oleh infrastruktur yang memadai
			Fasilitasi kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal, termasuk UMKM
			Promosi investasi, forum bisnis, dan business *matching* dengan calon investor

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Prioritas Daerah 6 : Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan

Dalam mendukung pencapaian prioritas tersebut, pembangunan diarahkan pada dua tujuan strategis yang saling memperkuat. Pertama, terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang berwawasan lingkungan, dengan sasaran meningkatnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang terintegrasi melalui penguatan jaringan transportasi darat, laut, dan udara, peningkatan infrastruktur dasar dan logistik, pengembangan konektivitas digital, serta penerapan prinsip pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim guna mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pemerataan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kedua, terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, dengan sasaran meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang melalui penguatan perencanaan tata ruang yang terintegrasi, pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif, perlindungan kawasan lindung dan kawasan rawan bencana, serta sinkronisasi pembangunan infrastruktur dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan sehingga tercipta pembangunan wilayah yang tertata, berkelanjutan, dan berketahanan.

Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan

Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat dukungan infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pemerataan pembangunan, serta memperkuat keterhubungan antarwilayah secara berkelanjutan. Infrastruktur yang berkualitas dan terintegrasi menjadi faktor penting dalam memperlancar mobilitas orang, barang, dan jasa, sekaligus membuka akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, layanan publik, dan kawasan produksi.

Pembangunan infrastruktur tidak hanya difokuskan pada peningkatan kuantitas dan kualitas sarana prasarana, tetapi juga memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan aspek efisiensi sumber daya, perlindungan lingkungan, serta mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur. Dengan pendekatan tersebut,

pembangunan infrastruktur diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keseimbangan ekosistem dan kelestarian lingkungan.

Selain itu, penguatan konektivitas antarwilayah menjadi bagian penting dalam upaya mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah serta meningkatkan integrasi wilayah. Melalui pengembangan jaringan transportasi darat, laut, dan udara yang terhubung dengan kawasan strategis, pusat produksi, kawasan pariwisata, serta pusat layanan masyarakat, diharapkan dapat tercipta sistem konektivitas wilayah yang lebih efektif dan efisien.

Dengan terwujudnya pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah yang berwawasan lingkungan, diharapkan dapat meningkatkan aksesibilitas wilayah, memperkuat daya saing daerah, mempercepat distribusi hasil produksi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan. Adapun indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 53 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan Tahun 2027

Tujuan	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas antar Wilayah yang Berwawasan Lingkungan	**1**	**Indeks Kemantapan Infrastruktur**	**Indeks**	**74,90**	**78,40**	**78,40**	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

1. Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi

   Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat sistem infrastruktur yang mampu meningkatkan keterhubungan antarwilayah, memperlancar mobilitas masyarakat serta distribusi barang dan jasa, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah. Infrastruktur yang terintegrasi menjadi faktor penting dalam membuka akses terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan produksi, kawasan pariwisata, serta pusat pelayanan dasar masyarakat.

   Pembangunan infrastruktur juga diarahkan untuk mendukung pengembangan wilayah secara lebih inklusif dengan memperhatikan keterpaduan antara infrastruktur transportasi, permukiman, serta infrastruktur dasar lainnya. Dalam konteks tersebut, peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan menjadi bagian penting dari pembangunan infrastruktur. Penyediaan hunian yang layak tidak hanya berkaitan dengan kualitas bangunan, tetapi juga dengan ketersediaan infrastruktur dasar seperti air minum, sanitasi, akses jalan lingkungan, serta lingkungan permukiman yang sehat dan aman.

   Selain itu, pembangunan infrastruktur dan konektivitas wilayah juga dilakukan dengan memperhatikan prinsip keberlanjutan lingkungan melalui perencanaan tata ruang yang terintegrasi, penggunaan teknologi yang ramah lingkungan, serta penguatan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Dengan demikian, pembangunan infrastruktur tidak hanya meningkatkan aksesibilitas

wilayah, tetapi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat serta memperkuat daya saing wilayah secara berkelanjutan. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 54 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	1	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)	Indeks	70,12	76,97	76,97	
	2	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	71,49	72,24-72,45	72,24-72,45	IUP 23b
	3	Rasio Konektivitas	Rasio	0,831	0,85	0,85	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Strategi dalam mencapai sasaran ini difokuskan pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang terintegrasi antarwilayah guna mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan kawasan ekonomi. Upaya ini dilakukan melalui penguatan konektivitas transportasi darat, laut, dan udara yang terhubung dengan kawasan strategis, pusat produksi, kawasan pariwisata, dan pusat pelayanan masyarakat.

Selain itu, strategi juga diarahkan pada pengembangan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas hunian masyarakat serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman. Penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan sektor swasta juga menjadi bagian penting dalam mendukung pembiayaan serta percepatan pembangunan infrastruktur. Di samping itu, pembangunan infrastruktur dilaksanakan dengan mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan, termasuk efisiensi penggunaan sumber daya, perlindungan lingkungan, serta penguatan ketahanan terhadap bencana.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan dalam mendukung peningkatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang terintegrasi difokuskan pada penguatan jaringan infrastruktur wilayah yang mampu meningkatkan aksesibilitas, memperlancar mobilitas masyarakat, serta mempercepat distribusi barang dan jasa antar kawasan. Kebijakan ini diarahkan pada pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan infrastruktur jalan sebagai tulang punggung konektivitas wilayah yang menghubungkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan produksi, kawasan pariwisata, serta pusat pelayanan masyarakat. Melalui penguatan jaringan jalan yang

terintegrasi dan berkualitas, diharapkan dapat mempercepat pergerakan orang dan barang serta mengurangi kesenjangan akses antar wilayah.

Selain itu, arah kebijakan juga diarahkan pada pengembangan dan peningkatan infrastruktur sumber daya air, khususnya jaringan irigasi, guna mendukung ketahanan pangan dan meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Upaya ini dilakukan melalui pembangunan, rehabilitasi, serta optimalisasi jaringan irigasi yang terintegrasi dengan kawasan produksi pertanian, sehingga dapat menjamin ketersediaan air bagi kegiatan budidaya secara berkelanjutan. Penguatan infrastruktur irigasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan kawasan pertanian unggulan serta meningkatkan efisiensi pengelolaan sumber daya air.

Di samping itu, kebijakan pembangunan infrastruktur juga diarahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan ini dilakukan melalui pengembangan kawasan permukiman yang terencana, peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman seperti air minum, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan dalam mendukung Peningkatan Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Terintegrasi difokuskan pada percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang memiliki dampak langsung terhadap konektivitas wilayah, produktivitas ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Intervensi kebijakan diarahkan pada pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah, khususnya yang menghubungkan kawasan produksi, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan pariwisata, serta pusat pelayanan masyarakat. Penguatan infrastruktur jalan tersebut diharapkan mampu memperlancar mobilitas masyarakat serta mempercepat distribusi barang dan jasa antar wilayah.

Selain itu, intervensi juga difokuskan pada pembangunan, rehabilitasi, dan optimalisasi jaringan irigasi guna mendukung ketahanan pangan serta meningkatkan produktivitas sektor pertanian. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan fungsi jaringan irigasi yang terintegrasi dengan kawasan pertanian dan penguatan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan.

Intervensi kebijakan lainnya diarahkan pada peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal ini dilakukan melalui program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, pengembangan kawasan permukiman yang terencana, serta penyediaan infrastruktur dasar permukiman seperti air minum, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan.

Di samping itu, penguatan integrasi pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui penataan kawasan berbasis tata ruang, pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan, serta peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana dan perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan

pemangku kepentingan lainnya juga menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan pembangunan infrastruktur yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Tabel 4. 55 Highlight Intervensi kebijakan Sasaran Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektivitas Antar Wilayah yang Terintegrasi Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	- Percepatan pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur yang terintegrasi antarwilayah guna mendukung mobilitas masyarakat, distribusi barang dan jasa, serta pengembangan kawasan ekonomi - Pengembangan kawasan permukiman yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan	- Penguatan jaringan infrastruktur wilayah dan peningkatan infrastruktur sumber daya air - Peningkatan kualitas kawasan permukiman melalui penyediaan hunian yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi Masyarakat - Peningkatan jaringan transportasi	Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jaringan jalan untuk memperkuat konektivitas antar wilayah dan menghubungkan kawasan produksi, pusat pertumbuhan ekonomi, kawasan pariwisata, serta pusat pelayanan masyarakat
			Peningkatan fungsi jaringan irigasi yang terintegrasi dengan kawasan pertanian
			Penguatan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan
			Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni
			Pengembangan kawasan permukiman yang terencana
			Penyediaan infrastruktur dasar permukiman seperti air minum, sanitasi, drainase, dan jalan lingkungan
			Pengembangan infrastruktur yang ramah lingkungan
			Peningkatan ketahanan infrastruktur terhadap risiko bencana dan perubahan iklim

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan pengelolaan ruang wilayah yang tertata secara optimal, selaras dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, serta mampu mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan. Penataan ruang menjadi instrumen penting dalam mengarahkan pemanfaatan ruang secara efektif sehingga dapat menciptakan keseimbangan antara kebutuhan pembangunan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Pengelolaan ruang wilayah yang aman dan nyaman diwujudkan melalui pengendalian pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang serta penguatan mitigasi terhadap risiko bencana dan dampak perubahan iklim. Dengan perencanaan ruang yang terintegrasi, kawasan permukiman, kawasan lindung, kawasan budidaya, serta kawasan strategis dapat berkembang secara harmonis tanpa menimbulkan tekanan yang berlebihan terhadap lingkungan.

Selain itu, ruang wilayah yang produktif diarahkan untuk mendukung pengembangan sektor-sektor unggulan daerah, seperti pertanian, perikanan, pariwisata, industri, dan jasa, melalui pengalokasian ruang yang tepat serta penguatan keterkaitan antar kawasan. Penataan ruang juga berperan dalam mengoptimalkan pemanfaatan potensi wilayah sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang merata dan berdaya saing.

Di sisi lain, aspek keberlanjutan menjadi prinsip utama dalam pengelolaan ruang wilayah dengan memperhatikan perlindungan kawasan lindung, konservasi sumber daya alam, serta pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui tata kelola ruang wilayah yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan, diharapkan dapat tercipta ruang wilayah yang aman bagi masyarakat, nyaman untuk dihuni, produktif dalam mendukung aktivitas ekonomi, serta tetap menjaga keseimbangan lingkungan bagi generasi masa depan. Adapun indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 56 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan Tahun 2027

Tujuan	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan	**1**	**Persentase capaian kinerja penyelenggaraan penataan ruang**	**%**	**62,17**	**65,40**	**65,40**	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

1. Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang

Sasaran ini diarahkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan ruang wilayah dilaksanakan secara tertib, terencana, dan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap penataan ruang menjadi faktor penting dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dengan perlindungan lingkungan serta pengelolaan sumber daya wilayah secara berkelanjutan. Peningkatan kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang juga bertujuan untuk meminimalkan terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti kerusakan lingkungan, konflik pemanfaatan lahan, serta meningkatnya risiko bencana. Oleh karena itu, penguatan sistem pengendalian pemanfaatan ruang menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan berjalan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

Selain itu, kepatuhan dalam penataan ruang juga didukung melalui peningkatan kualitas perencanaan tata ruang yang terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah, penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang, serta peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang. Dengan demikian, penyelenggaraan penataan ruang diharapkan mampu menciptakan pemanfaatan ruang wilayah yang lebih tertib, efisien, dan berkelanjutan, sehingga dapat mendukung terwujudnya ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 57 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang	1	Persentase capaian kesesuaian pemanfaatan ruang	%	83,13	83,88	83,88	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Strategi dalam mencapai sasaran ini difokuskan pada penguatan sistem penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu dan berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dokumen rencana tata ruang yang selaras dengan arah pembangunan daerah serta memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Selain itu, strategi juga diarahkan pada penguatan pengendalian pemanfaatan ruang melalui sistem perizinan yang sesuai dengan rencana tata ruang serta peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan. Peningkatan kapasitas kelembagaan serta koordinasi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan juga menjadi bagian penting dalam mendukung penyelenggaraan penataan ruang yang efektif.

Di samping itu, strategi lainnya adalah meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat serta pelaku usaha dalam mematuhi ketentuan tata ruang, sehingga pemanfaatan ruang dapat berjalan secara tertib dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang diarahkan pada penguatan sistem perencanaan tata ruang yang berkualitas dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan daerah. Kebijakan ini juga difokuskan pada peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penerapan sistem perizinan yang berbasis pada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada penguatan mekanisme pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang guna memastikan bahwa setiap kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan rencana tata ruang. Pengembangan sistem informasi penataan ruang yang terintegrasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung transparansi dan kemudahan akses informasi terkait pemanfaatan ruang wilayah.

Di sisi lain, kebijakan juga mendorong peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penataan ruang, sehingga tercipta keselarasan antara perencanaan pembangunan dengan pemanfaatan ruang wilayah secara berkelanjutan.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan dalam mendukung peningkatan kepatuhan penyelenggaraan penataan ruang difokuskan pada penguatan sistem pengendalian pemanfaatan ruang secara lebih efektif dan terintegrasi. Intervensi dilakukan melalui pengawasan pelaksanaan dokumen rencana tata ruang untuk memastikan

kesesuaiannya dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan pengembangan wilayah.

Selain itu, dilakukan penguatan sistem perizinan pemanfaatan ruang melalui penerapan mekanisme kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang terintegrasi dengan sistem perizinan berusaha. Intervensi juga mencakup peningkatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan guna mencegah terjadinya penyimpangan pemanfaatan ruang. Upaya lainnya adalah pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang, serta peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengawasan tata ruang wilayah. Di samping itu, peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang juga menjadi bagian dari intervensi kebijakan guna mewujudkan pemanfaatan ruang wilayah yang tertib, aman, dan berkelanjutan.

Tabel 4. 58 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Penguatan sistem penyelenggaraan penataan ruang yang mencakup perizinan, perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang secara terpadu dan berkelanjutan	- Peningkatan efektivitas pengendalian pemanfaatan ruang melalui penerapan sistem perizinan yang berbasis pada kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang - Peningkatan koordinasi antar pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya dalam penyelenggaraan penataan ruang	Pengawasan pelaksanaan dokumen rencana tata ruang untuk memastikan kesesuaiannya dengan dinamika pembangunan serta kebutuhan pengembangan wilayah
			Pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang
			Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan dan pengawasan tata ruang wilayah
			Peningkatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta pelaku usaha mengenai pentingnya kepatuhan terhadap rencana tata ruang
			Peningkatan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan pemanfaatan ruang di lapangan
			Peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia dalam penyelenggaraan penataan ruang

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Prioritas Daerah 7 : Transformasi Ttata Kelola Daerah yang Kreatif, Inovatif, Adaptif dan Kolaboratif

Dalam mendukung pencapaian prioritas tersebut, pembangunan diarahkan pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, adaptif, dan akuntabel serta kepemimpinan daerah yang kolaboratif, dengan sasaran meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintahan daerah melalui penguatan reformasi birokrasi, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), transformasi digital, penguatan sistem merit, serta peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima. Selain itu, pembangunan juga diarahkan pada meningkatnya penegakan hukum yang berkeadilan serta terpeliharanya stabilitas keamanan sebagai fondasi bagi terwujudnya demokrasi yang berkualitas, kondusif, dan partisipatif. Di sisi lain, penguatan riset, inovasi, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan serta teknologi terus didorong untuk meningkatkan kualitas kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy), mempercepat transformasi pelayanan publik, serta mendukung peningkatan daya saing dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif

Tujuan ini diarahkan untuk memperkuat kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan dinamika pembangunan. Tata kelola pemerintahan yang baik menjadi fondasi penting dalam memastikan bahwa setiap kebijakan dan program pembangunan dapat dilaksanakan secara efisien, tepat sasaran, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Pemerintahan yang bersih diwujudkan melalui penguatan integritas aparatur, peningkatan akuntabilitas kinerja, serta penerapan prinsip transparansi dan pengawasan yang efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Upaya ini dilakukan untuk mendorong terciptanya birokrasi yang profesional, berorientasi pada pelayanan publik, serta bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Selain itu, penguatan tata kelola pemerintahan juga didorong melalui pengembangan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Inovasi menjadi instrumen penting untuk meningkatkan kualitas layanan, mempercepat proses birokrasi, serta mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam mendukung transformasi tata kelola pemerintahan yang lebih modern, efisien, dan adaptif terhadap perubahan. Di sisi lain, kepemimpinan daerah yang kolaboratif menjadi elemen penting dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat. Pendekatan kolaboratif ini memungkinkan terbangunnya kerja sama yang lebih efektif dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan pembangunan, sehingga dapat mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Dengan terwujudnya tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, dan kolaboratif, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, memperkuat efektivitas penyelenggaraan pembangunan, serta menciptakan sistem pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Adapun indikator tujuan dan sasaran pembangunan sebagai tolok ukur kinerja pembangunan daerah pada Tahun 2027, sebagai berikut:

Tabel 4. 59 Indikator dan Target Kinerja Tujuan Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif Tahun 2027

Tujuan	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Inovatif serta Kepemimpinan Daerah yang Kolaboratif	**1**	**Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)**	**Indeks (Kategori)**	**79,91 (BB)**	**80,35 (A)**	**80,35 (A)**	
	2	**Indeks Ketahanan Nasional**	**Indeks**	**3,03**	**3,13**	**3,13**	**IUP 36**
	3	**Indeks Inovasi Daerah**	**Indeks**	**73,25**	**78,85**	**77,00**	**Sasaran Visi**

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

1. Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah

Sasaran ini diarahkan untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan dapat direncanakan, dilaksanakan, serta dievaluasi secara optimal dan berorientasi pada hasil.

Penguatan kapasitas tata kelola pemerintah daerah juga mencakup peningkatan kualitas sumber daya aparatur, kelembagaan, serta sistem manajemen pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan dan tantangan pembangunan. Hal ini dilakukan melalui penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan yang terintegrasi dan berbasis kinerja.

Selain itu, peningkatan tata kelola pemerintahan juga diarahkan pada penguatan inovasi daerah dan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang lebih modern dan responsif. Dengan tata kelola yang baik dan kapasitas kelembagaan yang kuat, diharapkan pemerintah daerah mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mempercepat pencapaian pembangunan yang berkelanjutan. Adapun indikator kinerja dan target pembangunan yang ditetapkan pada tahun 2027 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 60 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1a	Reformasi Birokrasi General	Skor	70,50	70,88	70,88	
	1b	Reformasi Birokrasi Tematik	Skor	6,96	9,47	9,47	
	2	Rasio Kapasitas Fiskal Daerah	Poin	0,598	1,199	0,764	
	3	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	87,39	92,00	88,00	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Dalam mewujudkan sasaran “Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah”, dilakukan melalui penguatan kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan daerah yang adaptif dan berbasis kinerja, peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegritas, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan (e-Government). Ketiga strategi tersebut saling mendukung dalam menciptakan birokrasi yang efektif, akuntabel, responsif, dan berorientasi pelayanan publik. Penguatan kelembagaan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi dan akuntabilitas kinerja, peningkatan kapasitas aparatur bertujuan membentuk ASN yang kompeten dan berdaya saing, sedangkan penerapan e-Government mendukung transformasi digital pemerintahan agar layanan publik menjadi lebih cepat, transparan, terintegrasi,

dan efisien. Dengan demikian, tata kelola pemerintahan daerah diharapkan semakin berkualitas, adaptif terhadap perubahan, serta mampu mendukung percepatan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

Arah Kebijakan :

Dalam mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas dan kapasitas tata kelola pemerintah daerah, arah kebijakan difokuskan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang adaptif, profesional, akuntabel, dan berbasis digital. Penguatan kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan diarahkan untuk meningkatkan efektivitas organisasi perangkat daerah, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta mengoptimalkan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi pembangunan berbasis kinerja. Selain itu, kebijakan juga diarahkan pada peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur melalui penguatan kompetensi, penerapan sistem merit, peningkatan integritas, serta pengembangan budaya kerja yang profesional dan berorientasi pelayanan publik. Sejalan dengan itu, percepatan transformasi digital pemerintahan melalui penerapan e-Government dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) diarahkan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, integrasi layanan, dan kemudahan akses pelayanan publik bagi masyarakat.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan dilakukan melalui penyederhanaan birokrasi dan penguatan kelembagaan perangkat daerah berbasis fungsi dan kinerja, penguatan implementasi reformasi birokrasi, SAKIP, dan SPIP, serta peningkatan koordinasi dan integrasi perencanaan pembangunan daerah. Intervensi juga dilakukan melalui peningkatan kapasitas ASN melalui pelatihan teknis, manajerial, kepemimpinan, dan kompetensi digital, disertai penerapan manajemen talenta dan sistem merit dalam pengelolaan ASN. Pada aspek transformasi digital, intervensi diarahkan pada pengembangan dan integrasi layanan pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi pelayanan publik, penguatan satu data daerah, pemanfaatan teknologi informasi dalam pengambilan keputusan pembangunan, serta penguatan keamanan data dan sistem informasi pemerintahan. Selain itu, dilakukan optimalisasi pengawasan internal, pengelolaan pengaduan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang cepat, transparan, inklusif, dan mudah diakses masyarakat.

Tabel 4. 61 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	penguatan kelembagaan dan sistem manajemen pemerintahan daerah yang adaptif dan berbasis kinerja,	- Penguatan Tata Kelola dan Kelembagaan Pemerintahan Daerah - Peningkatan Profesionalisme dan Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah	Peningkatan efektivitas organisasi perangkat daerah, penguatan koordinasi lintas sektor
			Penguatan sistem perencanaan, penganggaran, pengendalian, dan evaluasi Pembangunan Daerah
			penguatan kompetensi ASN melalui pengembangan kapasitas, penerapan sistem merit, penguatan budaya kerja berorientasi pelayanan, serta peningkatan integritas

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
	peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur yang profesional dan berintegritas, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam tata kelola pemerintahan (e-Government).	- Percepatan Transformasi Digital Pemerintahan Daerah - Penguatan Akuntabilitas dan Pelayanan Publik Berbasis Kinerja	dan disiplin aparatur guna mendukung pelayanan publik yang berkualitas, inovatif, dan berdaya saing
			penguatan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, pengelolaan data terintegrasi, dan digitalisasi layanan publik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses layanan pemerintahan bagi masyarakat
			peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan reformasi birokrasi
			peningkatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
			optimalisasi pengawasan internal dan pengelolaan pengaduan masyarakat guna meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

2. Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas

Dalam mewujudkan Sasaran Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas, difokuskan pada penguatan sistem penegakan hukum yang berkeadilan, peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penguatan stabilitas keamanan daerah yang kondusif dan demokratis. Dalam rangka menciptakan kepastian hukum, meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat perlindungan hak-hak masyarakat, serta menjaga stabilitas sosial, politik, dan keamanan daerah guna mendukung iklim pembangunan yang aman, tertib, dan berkelanjutan. Selain itu, penguatan demokrasi juga diarahkan melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan demokrasi, serta peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Tabel 4. 62Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RPJMD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	1	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	75,27	76,75-80,00	76,75-80,00	IUP 30
	2	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	59,00	72,50	60,05	IUP 28a
	3	Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Indeks	83,08	76,51	83,50	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Strategi dalam mewujudkan sasaran meningkatnya penegakan hukum yang adil dan terpeliharanya stabilitas keamanan untuk mendukung demokrasi yang berkualitas dilakukan melalui penguatan sistem penegakan hukum yang berkeadilan, peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penguatan demokrasi dan

partisipasi publik. Penguatan sistem penegakan hukum diarahkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi antar lembaga penegak hukum, memperkuat perlindungan masyarakat, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat guna menciptakan kepastian hukum dan rasa keadilan.

Di sisi lain, strategi peningkatan stabilitas keamanan dilakukan melalui penguatan sistem deteksi dini konflik sosial, peningkatan kesiapsiagaan keamanan daerah, serta penguatan sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat dalam menjaga ketenteraman dan ketertiban umum. Selain itu, penguatan demokrasi dilakukan melalui peningkatan pendidikan politik masyarakat, penguatan partisipasi publik dalam pembangunan dan pengambilan kebijakan, serta penguatan transparansi dan akuntabilitas pemerintahan guna menciptakan kehidupan demokrasi yang inklusif, partisipatif, dan berkualitas.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan dalam mewujudkan meningkatnya penegakan hukum yang adil dan terpeliharanya stabilitas keamanan untuk mendukung demokrasi yang berkualitas difokuskan pada penguatan sistem hukum yang responsif, peningkatan ketenteraman dan ketertiban umum, serta penguatan stabilitas sosial dan politik daerah. Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan koordinasi penegakan hukum, memperkuat perlindungan masyarakat terhadap berbagai potensi gangguan keamanan dan konflik sosial, serta meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, arah kebijakan juga difokuskan pada penguatan kualitas demokrasi melalui peningkatan partisipasi masyarakat, penguatan kelembagaan demokrasi, peningkatan transparansi pemerintahan, dan penguatan akses masyarakat terhadap informasi publik sehingga tercipta iklim pembangunan yang aman, tertib, demokratis, dan kondusif.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan dilakukan melalui penguatan koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, aparat keamanan, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas daerah dan penegakan hukum. Intervensi diarahkan pada peningkatan kapasitas aparatur penegak hukum dan ketertiban umum, penguatan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat, serta penguatan upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial secara cepat dan terpadu. Selain itu, dilakukan penguatan sistem deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan, kriminalitas, radikalisme, penyalahgunaan narkotika, dan gangguan ketenteraman masyarakat lainnya.

Dalam mendukung demokrasi yang berkualitas, intervensi kebijakan diarahkan pada peningkatan pendidikan politik masyarakat, penguatan partisipasi publik dalam proses pembangunan dan pengawasan pemerintahan, penguatan kelembagaan demokrasi dan organisasi masyarakat, serta pengembangan sistem keterbukaan informasi publik berbasis digital. Intervensi juga dilakukan melalui peningkatan kualitas pelayanan pengaduan masyarakat, penguatan perlindungan hak sipil dan politik masyarakat, serta pengembangan kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan media dalam menciptakan stabilitas keamanan dan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 4. 63 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	Penguatan sistem penegakan hukum yang berkeadilan, peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penguatan demokrasi dan partisipasi publik	- Penguatan sistem penegakan hukum yang adil dan berkeadilan. - Peningkatan stabilitas keamanan dan ketertiban umum daerah. - Penguatan pencegahan dan penanganan konflik sosial serta gangguan keamanan. - Peningkatan kesadaran dan kepatuhan hukum masyarakat. - Penguatan kualitas demokrasi dan partisipasi publik dalam pembangunan daerah.	Penguatan koordinasi pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan aparat keamanan dalam penegakan hukum dan stabilitas daerah
			Pelaksanaan edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan hukum kepada masyarakat secara berkelanjutan
			Penguatan sistem deteksi dini dan penanganan cepat konflik sosial serta gangguan keamanan masyarakat
			Pencegahan kriminalitas, radikalisme, penyalahgunaan narkotika, dan gangguan ketenteraman umum lainnya
			Penguatan partisipasi publik dalam proses perencanaan, pengawasan, dan evaluasi pembangunan daerah
			Pengembangan sistem keterbukaan informasi publik dan pelayanan pengaduan masyarakat berbasis digital
			Penguatan perlindungan hak masyarakat serta peningkatan pelayanan pengaduan dan aspirasi publik
			Pengembangan kolaborasi pemerintah, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam menjaga stabilitas keamanan dan demokrasi daerah

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

3. Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah

Strategi dalam mewujudkan Sasaran Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah dilakukan melalui penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah, peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan penelitian, serta pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan dan pengembangan sektor unggulan daerah. Strategi ini diarahkan untuk mendorong terciptanya riset yang aplikatif, inovatif, dan berdaya saing guna mendukung transformasi ekonomi daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik, serta penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan secara efektif dan berkelanjutan. Selain itu, strategi juga difokuskan pada penguatan kolaborasi antara pemerintah daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam pengembangan inovasi daerah berbasis potensi lokal dan teknologi.

Tabel 4. 64 Indikator dan Target Sasaran Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah Tahun 2027

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam	1	Persentase Kebijakan Berbasis Bukti	%	60	70	70	

Sasaran	Indikator		Satuan	Kondisi Awal 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Ket.
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)		(6)
Mendukung Pembangunan Daerah	2	Persentase Inovasi yang di terapkan dalam pembangunan daerah	%	100,00	97,50	97,50	

Sumber : RPJMD Provinsi NTB 2025-2029

Strategi :

Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah dilakukan melalui peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan, penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat, serta pengembangan riset dan inovasi berbasis potensi unggulan daerah. Strategi ini diarahkan untuk mendorong pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam penyusunan kebijakan pembangunan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan daya saing daerah, serta percepatan transformasi ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi.

Arah Kebijakan :

Arah kebijakan dalam mewujudkan meningkatnya keunggulan riset dan inovasi untuk mendukung pembangunan daerah difokuskan pada penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan. Kebijakan diarahkan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan daerah, memperkuat kualitas sumber daya manusia riset dan inovasi, serta mendorong kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, komunitas, dan masyarakat dalam menghasilkan inovasi yang aplikatif dan berdaya guna. Selain itu, pengembangan riset dan inovasi diarahkan berbasis potensi unggulan daerah dan kebutuhan pembangunan sehingga mampu mendukung peningkatan daya saing daerah, transformasi ekonomi, serta penyelesaian berbagai permasalahan pembangunan secara efektif. Pemanfaatan teknologi informasi dan digitalisasi juga menjadi bagian penting dalam mendukung pengembangan inovasi daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik berbasis inovasi.

Highlight Intervensi kebijakan :

Highlight intervensi kebijakan dilakukan melalui penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah serta pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) yang mendukung sinergi antar pemangku kepentingan. Intervensi diarahkan pada peningkatan kapasitas peneliti, inovator, dan aparatur melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi riset, serta pengembangan pusat inovasi dan inkubasi bisnis berbasis potensi unggulan daerah. Selain itu, dilakukan fasilitasi riset terapan dan inovasi yang mendukung sektor prioritas pembangunan daerah, penguatan kerja sama dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan dunia usaha, serta pemanfaatan hasil kajian dan data riset sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan berbasis evidence. Intervensi lainnya juga dilakukan melalui pengembangan inovasi pelayanan publik berbasis digital, pemberian apresiasi dan insentif bagi inovator daerah, serta penguatan hilirisasi hasil riset dan inovasi guna meningkatkan daya saing ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Tabel 4. 65 Highlight Intervensi kebijakan Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah Tahun 2027

No	Strategi	Arah Kebijakan	Bentuk Intervensi
1	peningkatan kapasitas kelembagaan penelitian dan pengembangan, penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat, serta pengembangan riset dan inovasi berbasis potensi unggulan daerah	- Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah yang terintegrasi dan berkelanjutan - Penguatan kolaborasi riset antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan Masyarakat - Pengembangan riset dan inovasi berbasis potensi unggulan daerah dan kebutuhan Pembangunan - Pemanfaatan hasil riset dan inovasi dalam perumusan kebijakan pembangunan daerah	Penguatan kelembagaan riset dan inovasi daerah serta pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)
			Peningkatan kapasitas peneliti, inovator, dan aparatur melalui pelatihan, pendampingan, dan kolaborasi riset
			Fasilitasi riset terapan dan inovasi yang mendukung sektor prioritas pembangunan daerah
			Penguatan kerja sama riset dan inovasi dengan perguruan tinggi, lembaga penelitian, dunia usaha, dan komunitas
			Pemanfaatan hasil kajian, data, dan riset sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan berbasis evidence

Sumber : Analisa Bappeda NTB, 2026

Strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan tersebut diharapkan menjadi pedoman utama bagi pelaksanaan program dan kegiatan seluruh perangkat daerah, sehingga setiap intervensi pembangunan dapat terarah dan saling mendukung. Dengan berfokus pada penanganan yang bersifat prioritas, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan bahwa sumber daya yang tersedia baik anggaran, aparatur, maupun dukungan kemitraan digunakan secara efektif dan efisien.

Selanjutnya, sebagai langkah konkret untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang menjadi bagian dari sasaran pembangunan jangka menengah, dalam RPJMD Provinsi NTB Tahun 2025–2029 menetapkan sepuluh (10) Program Unggulan (PU) sebagai pendukung utama prioritas pembangunan daerah. Penetapan Program Unggulan ini dimaksudkan untuk:

- Menjadi motor penggerak dalam mewujudkan tujuh prioritas pembangunan daerah,
- Mempercepat pencapaian indikator kinerja utama RPJMD, dan
- Memastikan keterpaduan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2027 yang mengusung tema *"Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri."*

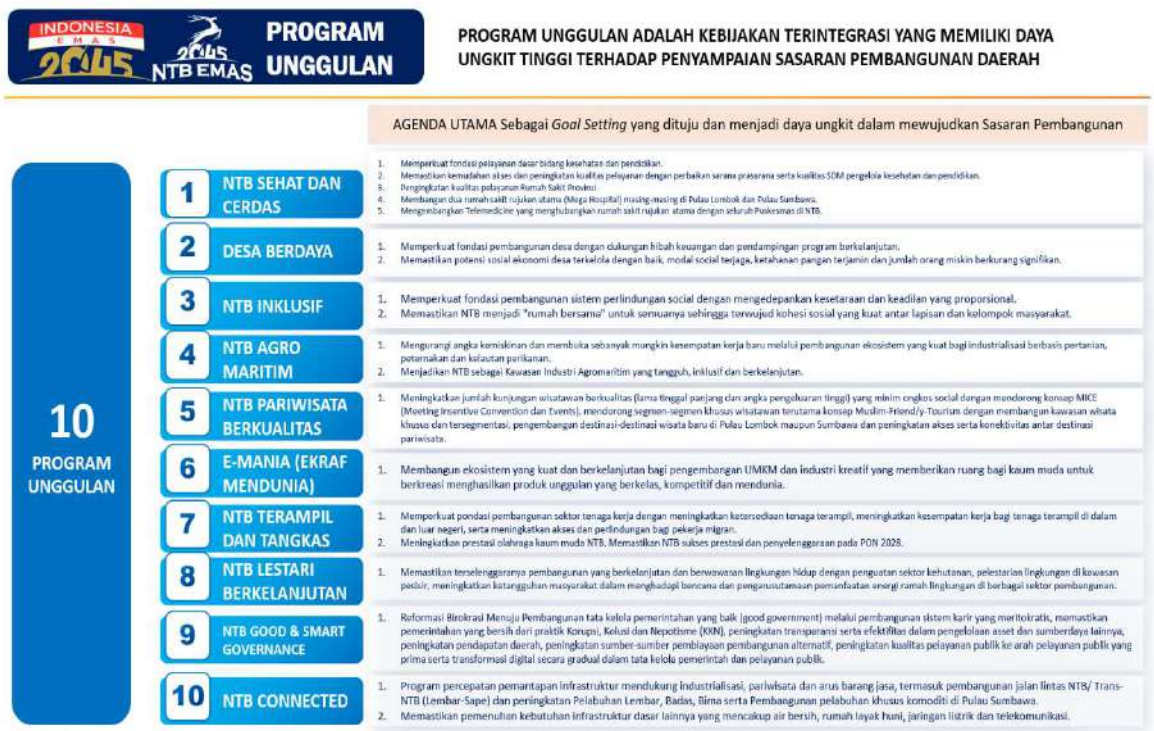
Sepuluh Program Unggulan tersebut disusun dengan mempertimbangkan:

1. Daya ungkit tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pencapaian sasaran pembangunan nasional,
2. Konsistensi dengan RPJMD NTB 2025–2029 yang berorientasi pada visi *"Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan Yang Makmur Dan Mendunia,"* serta
3. Sinergi lintas sektor dan multipihak, melibatkan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat.

Keberadaan sepuluh Program Unggulan ini menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam menyusun rencana kerja tahunan, memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2027:

- Selaras dengan tujuh prioritas pembangunan daerah,
- Mendukung capaian Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden dalam RPJMN 2025–2029, dan
- Memberikan kontribusi nyata terhadap visi Indonesia Emas 2045.

Gambar 4. 5 Sepuluh Program Unggulan Provinsi NTB



Sumber : RPJMD NTB 2025-2029, 2025

Program Unggulan NTB Sehat dan Cerdas

Program unggulan ini merupakan perkuatan pondasi pelayanan dasar bidang Kesehatan dan Pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat NTB yang mendukung capaian nilai Indeks Modal Manusia (IMM). NTB Sehat dan Cerdas secara konsep difokuskan pada dua aspek yaitu Kesehatan dan Pendidikan. Pada aspek Kesehatan dilakukan dengan memperkuat upaya pelayanan kesehatan dasar, memastikan kemudahan akses pelayanan kesehatan, dan peningkatan kualitas pelayanan kesehatan Rumah Sakit. Untuk aspek Pendidikan dengan Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah) melalui peningkatan kualitas pemenuhan SPM Pendidikan, penanganan anak tidak sekolah, kolaborasi antar pusat dan daerah, dan pemberdayaan masyarakat melalui PKBM.

Tujuan strategis program ini adalah Percepatan Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah). Sedangkan sasarannya meliputi; (a) Pencegahan dan penanganan stunting menuju NTB Bebas Stunting; (b). Percepatan

Wajib Belajar 13 Tahun (1 Tahun Pra Sekolah dan 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah); dan (c). Semua Anak Bersekolah sesuai dengan jenjang umurnya.

Agenda Prioritas dalam program unggulan ini Adalah :

1. NTB Bebas Stunting
2. NTB Bebas Penyakit Menular Dan Penyakit Tidak Menular
3. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (Universal Health Coverage) 100%
4. SPM Pendidikan Dan Kesehatan Berkualitas
5. Wajib Belajar (WAJAR) 13 Tahun
6. Anak Tidak Sekolah (ATS) Nol

Program Unggulan Desa Berdaya

Program Unggulan Desa Berdaya merupakan upaya strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memperkuat fondasi pembangunan desa melalui dukungan bantuan keuangan daerah yang disertai dengan pendampingan secara berkelanjutan. Program ini diarahkan untuk mempercepat transformasi desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta penguatan kemandirian desa melalui pengembangan potensi dan keunggulan lokal yang dimiliki masing-masing desa. Pelaksanaan Program Unggulan Desa Berdaya difokuskan pada pembangunan wilayah berbasis desa yang selaras dengan Triple Agenda pembangunan daerah, yaitu percepatan pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian beserta subsektornya, serta pengembangan desa sebagai bagian dari destinasi pariwisata berkualitas dan berkelas dunia. Implementasi program dilakukan dengan mengedepankan pendekatan berbasis permasalahan (problem based approach) dan pendekatan berbasis potensi (asset based approach), sehingga setiap intervensi disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, dan keunggulan masing-masing desa.

Sebagai bagian dari implementasi program, dikembangkan Desa Berdaya Transformatif sebagai model pembangunan desa yang mampu mewujudkan desa mandiri, tangguh, dan inklusif. Model ini diarahkan untuk menciptakan desa yang bebas dari kemiskinan, memiliki ketahanan pangan yang kuat, mampu mengembangkan potensi ekonomi lokal secara berkelanjutan, serta mengoptimalkan keunggulan desa, termasuk pengembangan desa wisata yang maju dan berdaya saing. Secara strategis, Program Unggulan Desa Berdaya bertujuan memperkuat fondasi pembangunan desa melalui dukungan pembiayaan dan pendampingan yang berkesinambungan, sekaligus memastikan potensi sosial ekonomi desa dapat dikelola secara optimal, modal sosial masyarakat tetap terpelihara, ketahanan pangan semakin kokoh, dan tingkat kemiskinan terus menurun secara signifikan. Dengan demikian, sasaran utama program ini adalah terwujudnya pengelolaan potensi sosial ekonomi desa yang semakin produktif, terpeliharanya modal sosial masyarakat, meningkatnya ketahanan pangan desa, serta percepatan penurunan jumlah penduduk miskin secara berkelanjutan.

Program Unggulan NTB Inklusif

Program Unggulan NTB Inklusif merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengintegrasikan pendekatan Gender Equality, Disability, and

Social Inclusion (GEDSI) ke dalam seluruh proses pembangunan daerah. Program ini diarahkan untuk mendorong pembangunan yang semakin sensitif, responsif, dan transformatif terhadap isu kesetaraan gender, disabilitas, serta inklusi sosial, sehingga setiap kebijakan, program, dan kegiatan mampu memberikan manfaat yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat. Pelaksanaan program ini berlandaskan pada prinsip No One Left Behind, yaitu memastikan tidak ada seorang pun yang tertinggal dalam proses pembangunan. Prinsip tersebut diwujudkan melalui pemenuhan hak, kesempatan, dan akses yang setara bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, serta kelompok rentan lainnya, tanpa adanya diskriminasi. Dengan demikian, setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi secara aktif, bermakna, dan memperoleh manfaat yang setara dari hasil-hasil pembangunan.

Secara strategis, Program Unggulan NTB Inklusif bertujuan memperkuat fondasi sistem perlindungan sosial yang berkeadilan dengan mengedepankan prinsip kesetaraan, keadilan, dan inklusivitas. Program ini juga diarahkan untuk mewujudkan NTB sebagai "Rumah Bersama" yang aman, ramah, dan terbuka bagi seluruh kelompok masyarakat, sehingga tercipta kohesi sosial yang kuat, solidaritas antarwarga, serta kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan. Sasaran utama program ini meliputi meningkatnya kesetaraan gender dan penguatan peran perempuan, anak, lanjut usia, serta penyandang disabilitas dalam berbagai aspek pembangunan; meningkatnya akses kelompok rentan terhadap layanan dasar, sumber daya, kesempatan ekonomi, dan ruang partisipasi publik; serta terwujudnya keterlibatan seluruh kelompok masyarakat secara aktif dan bermakna dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata.

Untuk mencapai sasaran tersebut, implementasi Program Unggulan NTB Inklusif menitikberatkan pada penguatan kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, media, dan komunitas dalam mengarusutamakan prinsip-prinsip GEDSI di seluruh sektor pembangunan. Melalui sinergi tersebut, diharapkan terwujud tata kelola pembangunan yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat kualitas pembangunan manusia serta mempercepat terwujudnya kesejahteraan yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat NTB tanpa terkecuali.

Program Unggulan NTB Agro Maritim

Program Unggulan NTB Agro Maritim merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam dan komoditas unggulan daerah secara berkelanjutan sebagai penggerak utama transformasi ekonomi. Program ini berfokus pada pengembangan sektor pertanian dalam arti luas, perikanan dan kelautan, kehutanan, serta sumber daya alam lainnya melalui peningkatan produktivitas, penguatan daya saing, dan penciptaan nilai tambah. Pengembangan dilakukan secara terpadu dengan memastikan aspek kualitas, kuantitas, dan kontinuitas (3K) produksi, sekaligus memperkuat sistem pemasaran dan akses pasar agar produk unggulan NTB mampu bersaing di tingkat nasional maupun global.

Secara strategis, program ini bertujuan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah yang berdampak langsung pada peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy) yang berkelanjutan, inklusif, serta adaptif terhadap perubahan iklim. Melalui pendekatan tersebut, NTB diarahkan untuk memperkuat perannya sebagai Lumbung Pangan Nasional melalui peningkatan produksi, swasembada, diversifikasi pangan, serta penguatan cadangan pangan daerah. Di sisi lain, program ini juga mendorong pengembangan komoditas unggulan daerah melalui percepatan hilirisasi, peningkatan nilai tambah, perluasan pasar, serta peningkatan ekspor komoditas unggulan sektor non-tambang.

Pelaksanaan Program Unggulan NTB Agro Maritim diarahkan melalui pembangunan ekosistem industri agro maritim yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Penguatan dilakukan mulai dari penyediaan sarana produksi, peningkatan produktivitas dan kualitas hasil, penguatan kelembagaan petani, peternak, pembudi daya ikan, dan nelayan, hingga pengembangan industri pengolahan, logistik, pemasaran, serta jaringan distribusi yang efisien. Pendekatan ini didukung oleh percepatan hilirisasi komoditas unggulan melalui pengembangan industri pengolahan berbasis pertanian, peternakan, perikanan, dan hasil hutan sehingga mampu meningkatkan nilai tambah, daya saing, investasi, dan ekspor daerah. Pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan akselerator yang menciptakan iklim usaha kondusif melalui penguatan kemitraan antara pelaku usaha, koperasi, dunia industri, lembaga keuangan, perguruan tinggi, dan masyarakat.

Pengembangan NTB Agro Maritim juga dilaksanakan melalui pendekatan kawasan berbasis potensi unggulan dengan memperkuat kawasan strategis pusat pertumbuhan ekonomi, sentra produksi, kawasan agropolitan, minapolitan, serta kawasan industri berbasis komoditas unggulan daerah. Pendekatan ini diharapkan mampu menciptakan keterkaitan antarsektor, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Sasaran Program Unggulan NTB Agro Maritim meliputi terwujudnya pengembangan ekonomi hijau pada sektor pertanian, kehutanan, dan sumber daya alam lainnya; penguatan ekonomi biru pada sektor perikanan dan kelautan; terbentuknya ekosistem industri agro maritim yang terintegrasi; meningkatnya ketahanan pangan daerah; meningkatnya nilai tambah dan ekspor komoditas unggulan sektor non-tambang melalui hilirisasi; meningkatnya pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat lokal; serta berkembangnya kawasan strategis sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sentra produksi komoditas unggulan yang mampu mendorong transformasi ekonomi daerah secara inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global.

Program Unggulan NTB Pariwisata Berkualitas

Program Unggulan NTB Pariwisata Berkualitas merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mengembangkan potensi sumber daya alam, budaya, dan sumber daya buatan sebagai daya tarik wisata yang berdaya saing di tingkat nasional maupun global. Program ini diarahkan untuk mewujudkan ekosistem pariwisata yang berkualitas, berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang optimal sekaligus menjaga kelestarian lingkungan, budaya, dan

kearifan lokal. Konsep Pariwisata Berkualitas (Quality Tourism) menitikberatkan pada penyediaan pengalaman wisata yang unggul melalui pemenuhan standar pelayanan, keamanan, keselamatan, kebersihan, aksesibilitas, infrastruktur, fasilitas publik, serta pelestarian lingkungan dan budaya. Pendekatan ini tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga pada peningkatan kualitas wisatawan yang ditandai dengan lama tinggal yang lebih panjang, tingkat pengeluaran yang lebih tinggi, serta dampak sosial dan lingkungan yang lebih terkendali sehingga memberikan manfaat ekonomi yang lebih besar bagi masyarakat lokal.

Secara strategis, Program Unggulan NTB Pariwisata Berkualitas bertujuan meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Upaya tersebut diwujudkan melalui pengembangan destinasi wisata yang berkualitas dan berkelanjutan, penguatan identitas budaya daerah, peningkatan investasi sektor pariwisata, serta pengembangan produk dan layanan wisata yang mampu menjangkau berbagai segmen pasar, termasuk Meeting, Incentive, Convention, and Exhibition (MICE), Muslim-Friendly Tourism, wisata bahari, sport tourism, ekowisata, geopark, dan wisata berbasis komunitas. Selain itu, pengembangan destinasi baru di Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa terus didorong untuk menciptakan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan memperluas manfaat pembangunan pariwisata di seluruh wilayah Provinsi NTB.

Pelaksanaan program ini mengedepankan dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan berbasis permasalahan (problem-based approach) yang difokuskan pada penyelesaian berbagai tantangan pembangunan pariwisata, seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, penguatan kebersihan, keamanan, keselamatan, kenyamanan destinasi, serta pengembangan komponen utama destinasi yang meliputi atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan layanan pendukung (ancillary services). Kedua, pendekatan berbasis keunggulan (asset-based approach) yang mengoptimalkan potensi kepulauan NTB melalui pengembangan destinasi unggulan, kekayaan budaya, keindahan alam, dan ekonomi kreatif sebagai keunggulan kompetitif daerah.

Dalam implementasinya, Program Unggulan NTB Pariwisata Berkualitas diarahkan pada pembangunan ekosistem pariwisata yang terintegrasi melalui pengembangan 10 destinasi pariwisata prioritas yang saling terkoneksi dengan dukungan infrastruktur transportasi udara, laut, dan darat, serta penguatan konektivitas digital dan layanan publik. Sinergi pengembangan pariwisata antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa juga terus diperkuat dengan kawasan strategis pariwisata di Bali dan Nusa Tenggara Timur sehingga membentuk jejaring destinasi yang mampu meningkatkan daya tarik, memperpanjang lama tinggal wisatawan, dan memperluas peluang investasi serta pengembangan usaha masyarakat.

Sasaran Program Unggulan NTB Pariwisata Berkualitas meliputi terwujudnya pembangunan budaya dan identitas daerah sebagai daya tarik wisata, meningkatnya penyelenggaraan pariwisata berbasis MICE dan Muslim-Friendly Tourism, tertatanya destinasi wisata yang berkualitas dan berkelanjutan, meningkatnya investasi di sektor pariwisata, semakin kuatnya aksesibilitas dan konektivitas antar destinasi, serta meningkatnya kualitas layanan dan pengalaman wisata yang mampu memperkuat posisi

NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat.

Program Unggulan E-Mania (Ekraf Mendunia)

Program Unggulan NTB E-Mania (Ekraf Mendunia) merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendorong transformasi ekonomi berbasis kreativitas, inovasi, dan kewirausahaan, khususnya bagi generasi muda. Program ini diarahkan untuk mengembangkan potensi ekonomi kreatif sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan nilai tambah dari kekayaan intelektual, warisan budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, serta potensi lokal daerah. Melalui penguatan ekosistem ekonomi kreatif, NTB diharapkan mampu melahirkan produk dan karya kreatif yang inovatif, berdaya saing tinggi, serta memiliki akses yang luas ke pasar nasional maupun internasional. Secara strategis, Program Unggulan NTB E-Mania bertujuan membangun ekosistem ekonomi kreatif yang kuat, inklusif, dan berkelanjutan guna memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), industri kreatif, serta wirausaha muda. Program ini memberikan ruang yang lebih luas bagi generasi muda untuk berkreasi, berinovasi, dan berkolaborasi dalam menghasilkan produk unggulan yang berkualitas, kompetitif, bernilai tambah tinggi, serta mampu menjadi identitas dan kebanggaan daerah di tingkat global.

Pelaksanaan program ini didasarkan pada pengembangan ekonomi kreatif sebagai perwujudan nilai tambah yang bersumber dari kreativitas manusia, inovasi, serta pemanfaatan kekayaan intelektual yang berbasis budaya, ilmu pengetahuan, teknologi, dan potensi lokal. Pengembangan dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, penumbuhkembangan kreativitas (creative ecosystem development) melalui pembangunan creative capital, yang mencakup penguatan sumber daya manusia kreatif, komunitas, jejaring kolaborasi, dukungan pembiayaan, serta penyediaan infrastruktur pendukung. Selain itu, dilakukan pengembangan creative space berupa ruang-ruang kreatif, baik fisik maupun digital, yang mampu menjadi wadah bagi lahirnya ide, inovasi, kolaborasi, serta inkubasi bisnis kreatif. Penguatan tersebut dilengkapi dengan pengembangan creative hub sebagai pusat inovasi, pembelajaran, promosi, dan kolaborasi lintas pelaku ekonomi kreatif.

Pendekatan kedua diarahkan pada pengembangan industri kreatif yang berdaya saing melalui peningkatan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia, penguatan rantai pasok bahan baku, pemanfaatan teknologi dan digitalisasi, peningkatan daya saing produk, perluasan akses pembiayaan dan investasi, penguatan pemasaran berbasis digital dan ekspor, serta penyediaan infrastruktur dan regulasi yang mendukung tumbuhnya ekosistem industri kreatif secara berkelanjutan. Pendekatan ini juga mendorong sinergi antara pemerintah, dunia usaha, perguruan tinggi, komunitas kreatif, lembaga keuangan, dan media dalam mempercepat pertumbuhan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu penggerak transformasi ekonomi daerah.Sasaran Program Unggulan NTB E-Mania meliputi terwujudnya ekosistem ekonomi kreatif yang semakin kuat dan terintegrasi, berkembangnya UMKM dan industri kreatif yang inovatif dan berdaya saing, meningkatnya ruang dan kesempatan bagi generasi muda untuk berkreasi, berwirausaha, dan berinovasi,

serta meningkatnya jumlah produk unggulan daerah yang berkualitas, memiliki nilai tambah tinggi, mampu menembus pasar nasional maupun global, dan menjadi representasi Ekraf Mendunia sebagai identitas baru ekonomi kreatif Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Program Unggulan NTB Terampil dan Tangkas

Program Unggulan NTB Terampil dan Tangkas merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memperkuat kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan kompetensi tenaga kerja, pengembangan kewirausahaan pemuda, serta pembinaan olahraga prestasi. Program ini diarahkan untuk menyiapkan generasi NTB yang unggul, adaptif, inovatif, dan berdaya saing dalam menghadapi dinamika pasar kerja, transformasi ekonomi, serta perkembangan teknologi, sekaligus memperkuat daya saing daerah melalui peningkatan prestasi olahraga di tingkat nasional maupun internasional. Secara strategis, program ini bertujuan memperkuat fondasi pembangunan sektor ketenagakerjaan melalui peningkatan ketersediaan tenaga kerja yang kompeten, produktif, dan sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri. Di samping itu, program ini juga diarahkan untuk memperluas kesempatan kerja di dalam maupun luar negeri, meningkatkan kualitas tata kelola penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI), serta mendorong tumbuhnya wirausaha muda yang inovatif dan berdaya saing. Pada bidang olahraga, Program Unggulan NTB Terampil dan Tangkas berfokus pada peningkatan prestasi atlet daerah, penguatan pembinaan olahraga secara berkelanjutan, serta memastikan kesiapan Provinsi NTB sebagai tuan rumah yang sukses dalam penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXII Tahun 2028, sekaligus meraih prestasi yang membanggakan.

Pelaksanaan program ini dilakukan melalui dua pendekatan utama. Pertama, penguatan pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi yang diarahkan untuk menghasilkan tenaga kerja terampil dan siap kerja melalui revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), penguatan Balai Latihan Kerja (BLK), peningkatan kualitas lembaga pelatihan kerja, pengembangan sertifikasi kompetensi, serta penguatan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja (DUDIKA). Pendekatan ini juga diperkuat melalui optimalisasi peran Tim Koordinasi Daerah Vokasi (TKDV) dalam menyelaraskan kebutuhan pasar kerja dengan sistem pendidikan dan pelatihan vokasi sehingga tercipta keterkaitan (link and match) antara lulusan dengan kebutuhan dunia kerja. Kedua, pengembangan kepemudaan dan olahraga prestasi yang difokuskan pada pembinaan atlet secara berjenjang, peningkatan kualitas pelatih dan organisasi olahraga, penyediaan sarana dan prasarana olahraga yang memadai, serta penguatan ekosistem olahraga prestasi menuju PON 2028. Pada saat yang sama, program ini juga mendorong pengembangan kreativitas, kepemimpinan, dan kewirausahaan pemuda melalui berbagai program pemberdayaan, inkubasi usaha, pelatihan keterampilan, serta penguatan Generasi Makmur Mendunia (GMM) sebagai wadah pembentukan pemimpin muda yang inovatif, produktif, dan berdaya saing global.

Sasaran Program Unggulan NTB Terampil dan Tangkas meliputi meningkatnya proporsi penduduk bekerja dengan tingkat pendidikan menengah dan tinggi, meningkatnya penempatan pekerja migran Indonesia pada sektor formal yang aman dan berkualitas, meningkatnya remitansi sebagai kontribusi terhadap perekonomian daerah, semakin kuatnya kelembagaan koordinasi pendidikan dan pelatihan vokasi, tumbuhnya wirausaha muda yang memiliki kompetensi, usaha, aset, dan penguasaan teknologi (KUAT), serta meningkatnya prestasi olahraga daerah dan kesiapan penyelenggaraan PON XXII Tahun 2028. Melalui sasaran tersebut, Program Unggulan NTB Terampil dan Tangkas diharapkan mampu menciptakan sumber daya manusia yang unggul, produktif, adaptif terhadap perubahan, serta menjadi motor penggerak transformasi ekonomi dan peningkatan daya saing Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Program Unggulan NTB Lestari Berkelanjutan

Program Unggulan NTB Lestari Berkelanjutan merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, tangguh, dan berwawasan lingkungan melalui pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, pelestarian ekosistem, peningkatan ketahanan terhadap perubahan iklim dan bencana, serta percepatan transisi menuju pemanfaatan energi bersih. Program ini diarahkan untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan berjalan secara seimbang sebagai fondasi pembangunan daerah yang berkelanjutan. Secara strategis, Program Unggulan NTB Lestari Berkelanjutan bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup sekaligus memperkuat kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat melalui tata kelola lingkungan yang adaptif, pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan, serta penguatan ketahanan wilayah terhadap dampak perubahan iklim dan bencana. Program ini juga diarahkan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati, mendorong pemanfaatan sumber daya alam yang ramah lingkungan, mempercepat pengembangan energi baru terbarukan, serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana pada seluruh tahapan, mulai dari pra-bencana, saat tanggap darurat, hingga pascabencana.

Pelaksanaan Program Unggulan NTB Lestari Berkelanjutan dilakukan melalui pendekatan pembangunan rendah karbon (low carbon development) dan ekonomi hijau (green economy) yang mengintegrasikan aspek lingkungan ke dalam seluruh proses pembangunan daerah. Pada sektor kehutanan, intervensi diarahkan pada pengendalian deforestasi dan degradasi hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, pengelolaan daerah aliran sungai (DAS), penguatan perhutanan sosial, rehabilitasi ekosistem mangrove, serta pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan sekaligus menjaga kelestarian ekosistem.

Pada aspek kualitas lingkungan hidup, program ini difokuskan pada peningkatan kualitas air, udara, laut, dan ekosistem pesisir melalui pengelolaan sampah yang terpadu, penguatan ekonomi sirkular, pengendalian pencemaran, peningkatan sanitasi berbasis masyarakat (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat/STBM), serta pengembangan sistem pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui implementasi pembangunan rendah karbon, peningkatan tutupan

vegetasi, konservasi sumber daya alam, serta penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi dampak perubahan iklim.

Dalam mendukung transisi energi, Program Unggulan NTB Lestari Berkelanjutan mendorong peningkatan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT) melalui pengembangan sumber energi bersih yang berkelanjutan guna meningkatkan kontribusi EBT dalam bauran energi daerah sekaligus mendukung pencapaian target penurunan emisi gas rumah kaca. Di sisi lain, penguatan ketangguhan daerah terhadap bencana dilakukan melalui pengurangan risiko bencana berbasis wilayah, penguatan sistem peringatan dini, peningkatan kapasitas kelembagaan dan masyarakat, serta penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu pada fase pra-bencana, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.

Program ini juga diarahkan untuk mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang layak, aman, tangguh, dan berkelanjutan melalui peningkatan kualitas kawasan permukiman, penanganan kawasan kumuh, penyediaan prasarana dan sarana dasar permukiman, serta penguatan tata kelola penyelenggaraan perumahan. Selain itu, pelestarian kawasan bernilai konservasi tinggi terus diperkuat melalui pengembangan dan pengelolaan Rinjani–Lombok UNESCO Global Geopark, Geopark Tambora, serta kawasan Cagar Biosfer sebagai aset strategis yang mendukung konservasi keanekaragaman hayati, pendidikan, penelitian, mitigasi perubahan iklim, dan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Sasaran Program Unggulan NTB Lestari Berkelanjutan meliputi terwujudnya hutan yang lestari, meningkatnya kualitas lingkungan hidup, semakin kuatnya mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim, meningkatnya pemanfaatan energi baru terbarukan, terbangunnya sistem mitigasi dan ketangguhan bencana yang efektif, berkembangnya perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, serta optimalnya pengelolaan geopark dan cagar biosfer sebagai bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mendorong pembangunan ekonomi hijau yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan di Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Program Unggulan NTB Good & Smart Governance

Program unggulan NTB Good and Smart Governance merupakan komitmen pemerintah daerah untuk perbaikan tata kelola pemerintahan dalam meningkatkan pelayanan publik, kepada masyarakat. Tujuan strategisnya adalah Reformasi Birokrasi menuju pembangunan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Government*) melalui pembangunan sistem karir yang meritokratis, memastikan pemerintahan yang bersih dari praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), peningkatan transparansi serta efektifitas dalam pengelolaan asset dan sumberdaya Iainnya, peningkatan pendapatan daerah, peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif, peningkatan kualitas pelayanan publik ke arah pelayanan publik yang prima serta transformasi digital secara gradual dalam tata kelola pemerintah dan pelayanan publik. Adapun sasarannya meliputi: (1) Tata kelola pemerintahan Provinsi NTB berkualitas; (2) Sistem karir meritokratis; (3) Provinsi NTB Bebas KKN; (4) Tata kelola asset daerah; (5) Peningkatan pendapatan daerah; (6) Peningkatan sumber-sumber pembiayaan pembangunan alternatif; (7) Peningkatan kualitas pelayanan publik PRIMA; dan (8) Implementasi transformasi digital.

Implementasi dari Program NTB *Good and Smart Governance* dilakukan dengan pendekatan (1) Pembangunan sistem melalui penyediaan kerangka sistematis untuk pengelolaan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel terutama SPBE; (2) Tata kelola pemerintahan yang adaptif melalui peningkatan daya tanggap pemerintahan terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat terutama kapasitas ASN, meritokrasi, dan restrukturisasi organisasi perangkat daerah; (3) Pemerintahan Modern (Digital, Inovatif, Kolaboratif, Efisien) melalui integrasi layanan publik, penguatan fiskal, penerapan SPM untuk penanggulangan kemiskinan dan stunting, dan reformasi perizinan; (4) Pengambilan Keputusan Berbasis Bukti (*Evidence*) melalui pembentukan NTB policy untuk mendukung pengambilan kebijakan berbasis data dan pemanfaatan big data; (5) Dukungan Data Terintegrasi melalui pembangunan NTB Data Hub dan NTB Satu Data, data pokok prioritas pembangunan, integrasi sistem informasi lintas sektor dan perangkat daerah, jaminan kualitas dan validasi data, standarisasi dan keamanan data, dan pengembangan portal publikasi data dan open data NTB.

Program Unggulan NTB Connected

Program Unggulan NTB Connected merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam memperkuat konektivitas wilayah sebagai fondasi utama percepatan transformasi ekonomi dan pemerataan pembangunan. Program ini diarahkan untuk membangun sistem konektivitas yang terintegrasi antarkawasan melalui pengembangan infrastruktur transportasi darat, laut, dan udara yang mampu mendukung mobilitas orang, barang, dan jasa secara lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan. Konektivitas yang semakin baik diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, layanan pendidikan, layanan kesehatan, lapangan kerja, serta berbagai pelayanan publik lainnya sehingga mendorong peningkatan produktivitas dan kesejahteraan masyarakat.

Secara strategis, Program Unggulan NTB Connected bertujuan mempercepat pemantapan infrastruktur wilayah yang mendukung pengembangan ekosistem industri, sektor agromaritim, pariwisata berkualitas, serta kelancaran arus logistik dan distribusi barang. Penguatan konektivitas dilakukan melalui pembangunan dan peningkatan jaringan jalan strategis, termasuk koridor Trans-NTB (Lembar–Sape), pengembangan pelabuhan utama seperti Pelabuhan Lembar, Pelabuhan Badas, dan Pelabuhan Bima, serta pembangunan pelabuhan khusus komoditas di Pulau Sumbawa untuk mendukung efisiensi rantai pasok dan penguatan daya saing produk unggulan daerah. Selain itu, program ini juga diarahkan untuk mempercepat pemenuhan infrastruktur dasar yang berkualitas, meliputi penyediaan air minum, perumahan layak huni, energi listrik, telekomunikasi, serta infrastruktur digital yang menjangkau seluruh wilayah Provinsi NTB.

Pelaksanaan Program Unggulan *NTB Connected* dilakukan melalui tiga pendekatan utama. Pertama, pengembangan infrastruktur wilayah yang berfokus pada peningkatan kemantapan jalan, pembangunan dan peningkatan sistem penyediaan air minum (SPAM), penguatan jaringan transportasi publik perkotaan, pengembangan terminal dan dermaga kapal cepat, pembangunan pelabuhan pengumpan logistik dan komoditas, serta peningkatan konektivitas antarpusat pertumbuhan ekonomi dan kawasan strategis.

Pendekatan ini diarahkan untuk memperkuat keterhubungan antara kawasan produksi, kawasan industri, destinasi pariwisata, pusat perdagangan, dan kawasan permukiman sehingga tercipta sistem logistik yang lebih efisien dan berdaya saing. Kedua, penguatan infrastruktur layanan dasar yang difokuskan pada peningkatan akses masyarakat terhadap air minum yang aman, penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas sanitasi permukiman, perluasan layanan energi listrik, serta penguatan jaringan telekomunikasi dan infrastruktur digital sebagai penunjang pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi berbasis teknologi. Ketiga, penataan ruang wilayah yang berkelanjutan melalui penguatan perencanaan tata ruang, pengendalian pemanfaatan ruang, serta sinkronisasi pembangunan infrastruktur dengan daya dukung lingkungan dan karakteristik wilayah. Pendekatan ini diarahkan untuk mewujudkan pembangunan yang tertata, mengurangi konflik pemanfaatan ruang, meningkatkan ketahanan wilayah terhadap risiko bencana, serta mendukung pengembangan kawasan yang produktif, aman, dan berkelanjutan.

elain itu, Program Unggulan *NTB Connected* juga mendorong pengembangan transportasi publik yang terintegrasi antara kawasan perkotaan dan perdesaan, serta pengembangan kota ramah sepeda sebagai bagian dari upaya mewujudkan sistem transportasi yang aman, sehat, rendah emisi, dan berkelanjutan. Sejalan dengan komitmen pembangunan rendah karbon, program ini juga mendorong percepatan adopsi kendaraan listrik (*electric vehicle/EV*) baik pada transportasi publik maupun kendaraan operasional pemerintah secara bertahap, yang didukung oleh pengembangan infrastruktur pengisian daya, penguatan ekosistem kendaraan listrik, serta peningkatan pemanfaatan energi bersih. Upaya tersebut diarahkan untuk mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, menekan emisi gas rumah kaca dari sektor transportasi, meningkatkan efisiensi energi, serta mempercepat transisi menuju sistem transportasi yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Sasaran Program Unggulan *NTB Connected* meliputi terwujudnya infrastruktur yang mendukung pengembangan industri, sektor agromaritim, pariwisata, dan kelancaran arus barang dan jasa; meningkatnya kualitas layanan infrastruktur dasar seperti air minum, perumahan layak huni, energi listrik, telekomunikasi, dan infrastruktur digital; terwujudnya penataan ruang yang berkelanjutan dan berketahanan; berkembangnya sistem transportasi publik yang terintegrasi antarkawasan; meningkatnya pemanfaatan kendaraan listrik sebagai bagian dari transformasi transportasi rendah karbon; serta terbangunnya kota-kota yang ramah sepeda, inklusif, dan berkelanjutan. Melalui penguatan konektivitas dan transformasi transportasi hijau tersebut, Program Unggulan NTB Connected diharapkan menjadi pengungkit utama percepatan pertumbuhan ekonomi, pemerataan pembangunan, peningkatan efisiensi logistik, serta penurunan emisi gas rumah kaca, sehingga mendukung terwujudnya Provinsi NTB yang Makmur dan mendunia.

4.2.1.3 Fokus Pembangunan dan Program Kerja Prioritas Pembangunan Daerah

Berikut disajikan Fokus Pembangunan yang selanjutnya termuat dalam Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) Tahun 2027 yang di integrasikan dengan Prioritas Daerah dan 10 Program Unggulan Provinsi NTB, Adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 66 Keterkaitan Subtema dengan Fokus Pembangunan dan Program Kerja Prioritas Daerah Tahun 2027

Sub Tema	Fokus Pembangunan (FP)		Bentuk Intervensi Prioritas Daerah		Program Unggulan	Prioritas Daerah
Pengentasan Kemiskinan	FP 1	Peningkatan Kualitas SDM dan Perlindungan Sosial	1	Beasiswa bagi keluarga miskin dan afirmasi pendidikan	NTB Sehat dan Cerdas, NTB Terampil dan Tangguh, NTB Inklusif, NTB Good & Smart Governance	Prioritas Daerah 1 dan 7
			2	Layanan kesehatan gratis dan promotif-preventif		
			3	Penurunan stunting dan peningkatan gizi masyarakat		
			4	Penguatan jaminan sosial dan bantuan sosial adaptif		
			5	Integrasi data kemiskinan (by name by address)		
			6	Pemenuhan SPM Pendidikan		
			7	Pemenuhan SPM Kesehatan		
			8	Eliminasi Penyakit Menular dan Tidak Menular		
			9	Perlindungan sosial adaptif dan inklusif		
	FP 2	Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Desa dan UMKM	1	Penguatan BUMDes, koperasi, dan UMKM lokal	Desa Berdaya, NTB Agro Maritim, NTB Inklusif	Prioritas Daerah 2 dan 3
			2	Akses pembiayaan mikro dan inklusi keuangan		
			3	Pengembangan usaha berbasis potensi desa (pertanian, perikanan, kerajinan)		
			4	Pendampingan usaha dan inkubasi bisnis		
			5	Digitalisasi pemasaran produk UMKM		
	FP 3	Perluasan Kesempatan Kerja dan Kewirausahaan	1	Pelatihan vokasi berbasis kebutuhan industri	NTB Terampil dan Tangguh, E-Mania	Prioritas Daerah 1 dan 2
			2	Pengembangan wirausaha baru dan startup lokal		
			3	Penempatan tenaga kerja dan link and match dengan industri		
			4	Penguatan sektor ekonomi kreatif berbasis digital		
			5	Program padat karya produktif		
	FP 4	Pengurangan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan Desa Kantong Kemiskinan	1	Penyediaan rumah layak huni	NTB Inklusif, Desa Berdaya, NTB Connected	Prioritas Daerah 2, 6 dan 7
			2	Akses air bersih dan sanitasi layak		
			3	Subsidi dan bantuan pangan		
			4	Pengembangan desa mandiri dan desa wisata		
			5	Intervensi terpadu berbasis wilayah (cluster kemiskinan)		
			6	Pengembangan ekonomi lokal berbasis kawasan		
			7	Peningkatan akses transportasi dan konektivitas wilayah		
Ketahanan Pangan	FP 5	Peningkatan Produksi dan Produktivitas	1	Intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian, peternakan, dan perikanan	NTB Agro Maritim, NTB	Prioritas Daerah 2, 3 dan 5

Sub Tema	Fokus Pembangunan (FP)		Bentuk Intervensi Prioritas Daerah		Program Unggulan	Prioritas Daerah
		Pangan Berkelanjutan			Lestari Berkelanjutan	
			2	Penyediaan benih unggul, pupuk, pakan, dan sarana produksi		
			3	Modernisasi pertanian (mekanisasi dan smart farming)		
			4	Peningkatan kapasitas petani, nelayan, dan peternak		
			5	Pengembangan pertanian ramah lingkungan dan organik		
	FP 6	Penguatan Cadangan Pangan dan Stabilitas Harga	1	Penguatan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat	NTB Inklusif, NTB Good & Smart Governance	Prioritas Daerah 2 dan 7
			2	Stabilisasi pasokan dan harga pangan strategis		
			3	Operasi pasar dan intervensi harga		
			4	Sistem monitoring harga pangan berbasis digital		
			5	Penanganan daerah rawan pangan		
	FP 7	Penguatan Distribusi dan Kemandirian Pangan Lokal	1	Peningkatan konektivitas wilayah produksi dan konsumsi	Desa Berdaya, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Connected	Prioritas Daerah 2, 5 dan 6
			2	Pengembangan pasar pangan dan distribusi antar wilayah		
			3	Digitalisasi informasi distribusi dan harga		
			4	Pengembangan komoditas pangan lokal (jagung, sorgum, umbi-umbian, dll.)		
			5	Edukasi konsumsi pangan beragam, bergizi, seimbang		
			6	Penguatan ketahanan pangan rumah tangga		
	FP 8	Kawasan pangan terintegrasi dari hulu ke hilir	1	Pengembangan kawasan pertanian dan perikanan terpadu	NTB Agro Maritim, Desa Berdaya	Prioritas Daerah 3
			2	Pembangunan lumbung pangan desa dan daerah		
			3	Integrasi produksi, pengolahan, dan pemasaran dalam satu kawasan		
			4	Penguatan kelembagaan petani dan nelayan (koperasi/BUMDes)		
			5	Peningkatan infrastruktur produksi dan pascapanen		
	FP 9	Ketahanan Pangan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Iklim	1	Adaptasi dan mitigasi perubahan iklim sektor pertanian	NTB Lestari Berkelanjutan	Prioritas Daerah 5
			2	Pengelolaan air dan irigasi berkelanjutan		
			3	Rehabilitasi lahan kritis dan konservasi tanah		
			4	Pengurangan risiko gagal panen		
			5	Sistem peringatan dini kerawanan pangan		
Ekosistem Industri Agromaritim	FP 10	Peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan, dan	1	Intensifikasi dan modernisasi pertanian, perikanan, dan peternakan	NTB Agro Maritim, NTB Lestari Berkelanjutan	Prioritas Daerah 2, 3 dan 5

Sub Tema	Fokus Pembangunan (FP)		Bentuk Intervensi Prioritas Daerah		Program Unggulan	Prioritas Daerah
		peternakan secara berkelanjutan				
			2	Penyediaan benih unggul, pakan, dan sarana produksi		
			3	Penguatan SDM petani, nelayan, dan peternak		
			4	Pengembangan budidaya berbasis teknologi dan ramah lingkungan		
			5	Adaptasi perubahan iklim sektor agromaritim		
	FP 11	Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Agromaritim	1	Pengembangan industri pengolahan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan	NTB Agro Maritim, E-Mania, Desa Berdaya	Prioritas Daerah 2 dan 3
			2	Penguatan UMKM agroindustri dan industri rumah tangga		
			3	Standarisasi dan sertifikasi produk (halal, mutu, ekspor)		
			4	Pengembangan kemasan dan branding produk lokal		
			5	Peningkatan akses pasar domestik dan ekspor		
	FP 12	Peningkatan Akses Pembiayaan dan Investasi	1	Fasilitasi kredit usaha rakyat (KUR) dan pembiayaan mikro	NTB Inklusif, NTB Good & Smart Governance	Prioritas Daerah 2 dan 7
			2	Skema pembiayaan inovatif untuk petani dan nelayan		
			3	Promosi investasi sektor agromaritim		
			4	Kemudahan perizinan usaha dan investasi		
			5	Penguatan kelembagaan ekonomi (koperasi, BUMDes)		
	FP 13	Penguatan SDM dan Kelembagaan Agromaritim	1	Pelatihan teknis dan manajerial petani, nelayan, dan pelaku usaha	NTB Terampil dan Tangguh, Desa Berdaya	Prioritas Daerah 1 dan 3
			2	Penguatan kelompok tani, nelayan, dan koperasi		
			3	Pendampingan usaha dan inkubasi bisnis		
			4	Peningkatan literasi keuangan dan digital		
			5	Regenerasi pelaku usaha sektor agromaritim		
Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan	FP 14	Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Berkelas Dunia	1	Penataan dan pengembangan kawasan strategis pariwisata	NTB Pariwisata Berkualitas, NTB Connected	Prioritas Daerah 4 dan 6
			2	Peningkatan kualitas amenitas, atraksi, dan aksesibilitas (3A)		
			3	Pengembangan destinasi super prioritas dan destinasi unggulan daerah		
			4	Standarisasi dan sertifikasi destinasi wisata		
			5	Penguatan branding dan positioning pariwisata NTB		
	FP 15	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wisata	1	Pengembangan desa wisata berbasis potensi lokal	Desa Berdaya, NTB Pariwisata Berkualitas	Prioritas Daerah 2 dan 4

Sub Tema	Fokus Pembangunan (FP)		Bentuk Intervensi Prioritas Daerah		Program Unggulan	Prioritas Daerah
			2	Pelibatan UMKM dan ekonomi kreatif dalam rantai pariwisata		
			3	Penguatan kelembagaan desa wisata (pokdarwis)		
			4	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam layanan wisata		
			5	Penguatan ekonomi lokal berbasis pariwisata		
	FP 16	Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata	1	Pengembangan produk kreatif (kuliner, kriya, fesyen, dll.)	E-Mania (Ekraf Mendunia), NTB Inklusif	Prioritas Daerah 2 dan 4
			2	Inkubasi dan pendampingan pelaku ekonomi kreatif		
			3	Digitalisasi pemasaran produk ekraf		
			4	Penguatan branding produk lokal		
			5	Pengembangan event berbasis budaya dan kreativitas		
	FP 17	Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Destinasi	1	Pembangunan dan peningkatan jalan menuju destinasi wisata	NTB Connected	Prioritas Daerah 6
			2	Pengembangan transportasi wisata dan konektivitas antar pulau		
			3	Penyediaan infrastruktur dasar (air, sanitasi, listrik, internet)		
			4	Penataan kawasan wisata berbasis tata ruang		
			5	Pengembangan smart tourism berbasis digital		
	FP 18	Penguatan Promosi, Event, dan Branding Pariwisata Global	1	Promosi digital dan pemasaran global	NTB Pariwisata Berkualitas, NTB Good & Smart Governance	Prioritas Daerah 4 dan 7
			2	Penyelenggaraan event nasional dan internasional (*sport tourism, MICE*)		
			3	Kerja sama dengan travel agent, platform digital, dan investor		
			4	Penguatan citra dan branding NTB sebagai destinasi kelas dunia		
			5	Pengembangan kalender event daerah		

Sumber : Hasil Analisa Bappeda NTB, 2026

A. Pengentasan Kemiskinan

I. Peningkatan Kualitas SDM dan Perlindungan Sosial

Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan penguatan perlindungan sosial di Provinsi NTB diarahkan untuk mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus memiliki ketahanan terhadap berbagai risiko sosial dan ekonomi. Fokus pembangunan ini menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, menurunkan kemiskinan, serta mengurangi ketimpangan antar wilayah dan kelompok masyarakat.

Pendekatan yang digunakan bersifat holistik, terintegrasi, dan berbasis siklus hidup (*life-cycle approach*), dimulai dari pemenuhan hak dasar anak, penguatan kualitas pendidikan dan kesehatan, hingga perlindungan kelompok rentan melalui

sistem perlindungan sosial yang adaptif. Selain itu, pembangunan SDM juga diarahkan untuk menjawab tantangan global seperti transformasi digital, perubahan struktur ekonomi, dan dinamika pasar kerja.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Peningkatan Kualitas SDM dan Perlindungan Sosial diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Beasiswa bagi Keluarga Miskin dan Afirmasi Pendidikan

Program ini merupakan intervensi strategis untuk memutus rantai kemiskinan antargenerasi melalui peningkatan akses dan keberlanjutan pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan. Beasiswa tidak hanya mencakup pembiayaan langsung seperti biaya sekolah, seragam, dan perlengkapan belajar, tetapi juga diperluas dengan skema afirmasi berupa bantuan transportasi, dukungan digital (akses internet dan perangkat belajar), serta pendampingan akademik dan psikososial.

Strategi implementasi diarahkan pada penajaman sasaran berbasis data kemiskinan terintegrasi, kolaborasi dengan satuan pendidikan, serta monitoring keberlanjutan pendidikan penerima manfaat. Intervensi ini juga diprioritaskan bagi kelompok rentan seperti anak putus sekolah, anak di daerah terpencil, dan anak dari keluarga pekerja informal.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya angka partisipasi sekolah (APS), menurunnya angka putus sekolah, serta meningkatnya kualitas SDM yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan mobilitas sosial dan pengurangan kemiskinan jangka panjang.

2. Layanan Kesehatan Gratis dan Promotif-Preventif

Program ini bertujuan untuk menjamin akses layanan kesehatan yang merata, terjangkau, dan berkualitas bagi seluruh masyarakat, khususnya kelompok miskin. Pendekatan tidak hanya berfokus pada layanan kuratif, tetapi lebih menekankan aspek promotif dan preventif melalui edukasi kesehatan, skrining rutin, serta penguatan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).

Implementasi dilakukan melalui optimalisasi fasilitas kesehatan tingkat pertama (puskesmas dan jaringannya), integrasi layanan kesehatan dengan program jaminan kesehatan, serta peningkatan kapasitas tenaga kesehatan. Selain itu, dilakukan inovasi layanan seperti kunjungan rumah, layanan kesehatan berbasis komunitas, dan digitalisasi layanan kesehatan.

Dampak utama dari program ini adalah menurunnya angka kesakitan, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan, serta berkurangnya beban pembiayaan kesehatan rumah tangga miskin.

3. Penurunan Stunting dan Peningkatan Gizi Masyarakat

Program ini difokuskan pada percepatan penurunan prevalensi stunting melalui pendekatan konvergensi lintas sektor yang mencakup intervensi gizi spesifik dan sensitif. Sasaran utama adalah ibu hamil, balita, remaja putri, dan keluarga berisiko stunting.

Intervensi meliputi pemberian makanan tambahan bergizi, suplementasi, edukasi pola asuh dan gizi, peningkatan akses air bersih dan sanitasi, serta penguatan layanan kesehatan ibu dan anak. Selain itu, dilakukan penguatan peran kader posyandu dan integrasi program lintas OPD seperti pendidikan, kesehatan, dan ketahanan pangan.

Dampak yang diharapkan adalah penurunan signifikan angka stunting, peningkatan kualitas tumbuh kembang anak, serta peningkatan kualitas SDM di masa depan.

4. Penguatan Jaminan Sosial dan Bantuan Sosial Adaptif

Program ini bertujuan untuk memberikan perlindungan ekonomi kepada masyarakat miskin dan rentan melalui sistem jaminan sosial yang komprehensif dan responsif terhadap risiko. Bantuan sosial dirancang adaptif agar dapat menyesuaikan dengan dinamika sosial ekonomi, termasuk kondisi darurat seperti bencana alam, pandemi, dan inflasi.

Strategi implementasi meliputi integrasi berbagai skema bantuan, penajaman targeting berbasis data, serta peningkatan mekanisme penyaluran yang transparan dan akuntabel. Program ini juga mendorong transformasi dari bantuan konsumtif menuju bantuan produktif yang mendukung kemandirian ekonomi.

Dampaknya adalah meningkatnya ketahanan ekonomi rumah tangga miskin, berkurangnya kerentanan terhadap guncangan, serta terjaganya tingkat kesejahteraan masyarakat.

5. Integrasi Data Kemiskinan (*By Name By Address*)

Program ini merupakan fondasi utama dalam memastikan efektivitas seluruh program pengentasan kemiskinan. Integrasi data dilakukan secara menyeluruh dengan pendekatan by name by address yang memungkinkan identifikasi individu penerima manfaat secara akurat dan real-time.

Strategi mencakup pemutakhiran data secara berkala, integrasi lintas OPD, serta pemanfaatan teknologi digital untuk pengelolaan data. Sistem ini juga mendukung pengambilan kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas program.

Dampak utama adalah meningkatnya ketepatan sasaran program, berkurangnya duplikasi bantuan, serta efisiensi penggunaan anggaran.

6. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan

Program ini bertujuan untuk menjamin seluruh masyarakat memperoleh layanan pendidikan dasar yang berkualitas sesuai standar nasional. Fokusnya mencakup ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan distribusi guru, serta peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Implementasi dilakukan melalui pembangunan dan rehabilitasi fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi tenaga pendidik, serta penguatan sistem pembelajaran berbasis teknologi. Perhatian khusus diberikan pada daerah tertinggal dan terpencil. Dampaknya adalah meningkatnya kualitas layanan pendidikan, pemerataan akses pendidikan, serta peningkatan capaian pembelajaran siswa.

7. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan

Program ini diarahkan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan kesehatan dasar sesuai standar yang ditetapkan. Fokusnya mencakup ketersediaan fasilitas kesehatan, tenaga medis, obat-obatan, serta layanan kesehatan ibu dan anak. Strategi implementasi meliputi penguatan layanan kesehatan primer, peningkatan kapasitas fasilitas kesehatan, serta integrasi layanan dengan sistem rujukan yang efektif. Selain itu, dilakukan penguatan sistem pembiayaan kesehatan agar lebih inklusif.

Dampaknya adalah meningkatnya derajat kesehatan masyarakat, menurunnya angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatnya akses layanan kesehatan yang berkualitas.

8. Eliminasi Penyakit Menular dan Tidak Menular

Program ini bertujuan untuk menekan beban penyakit melalui pengendalian penyakit menular seperti TBC dan HIV, serta penyakit tidak menular seperti diabetes dan hipertensi. Pendekatan dilakukan secara komprehensif melalui promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Intervensi meliputi deteksi dini, pengobatan berkelanjutan, kampanye gaya hidup sehat, serta penguatan sistem surveilans kesehatan. Program ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor dalam mengatasi faktor risiko kesehatan.

Dampaknya adalah menurunnya prevalensi penyakit, meningkatnya produktivitas masyarakat, serta berkurangnya beban pembiayaan kesehatan.

9. Perlindungan Sosial Adaptif dan Inklusif

Program ini memastikan bahwa seluruh kelompok masyarakat, termasuk kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, dan perempuan kepala keluarga, mendapatkan perlindungan yang setara dan berkeadilan. Pendekatan adaptif memungkinkan program merespons perubahan kondisi, sementara pendekatan inklusif memastikan tidak ada yang tertinggal.

Strategi implementasi mencakup penguatan kebijakan inklusif, peningkatan akses layanan sosial, serta integrasi program perlindungan sosial lintas sektor. Program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam sistem perlindungan sosial. Dampaknya adalah meningkatnya keadilan sosial, berkurangnya ketimpangan, serta terciptanya masyarakat yang lebih tangguh dan inklusif.

II. Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Desa dan UMKM

Penguatan ekonomi masyarakat berbasis desa dan UMKM di Provinsi NTB diarahkan untuk membangun struktur ekonomi daerah yang inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan baru dan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan ekonomi, sekaligus memastikan bahwa manfaat pertumbuhan dapat dirasakan secara merata hingga ke tingkat akar rumput.

Transformasi ekonomi berbasis desa dan UMKM dilakukan melalui penguatan kapasitas produksi, akses pembiayaan, perluasan pasar, serta integrasi dengan sektor unggulan seperti agromaritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif. Dengan

demikian, desa tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi berkembang menjadi subjek dan pusat aktivitas ekonomi produktif.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Penguatan Ekonomi Masyarakat Berbasis Desa dan UMKM diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan BUMDes, Koperasi, dan UMKM Lokal

Program ini diarahkan untuk membangun fondasi ekonomi lokal yang kuat melalui penguatan kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat, yaitu BUMDes, koperasi, dan UMKM. Ketiga entitas ini menjadi pilar utama dalam menggerakkan ekonomi desa karena memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta memahami potensi lokal yang dimiliki.

Strategi implementasi mencakup peningkatan kapasitas manajerial dan tata kelola kelembagaan, penguatan permodalan, serta pengembangan unit usaha produktif yang berbasis potensi desa. Selain itu, dilakukan pembenahan kelembagaan agar lebih profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan menarik kemitraan dengan pihak swasta.

Intervensi juga diarahkan pada penguatan jejaring antar pelaku usaha, pengembangan klaster ekonomi, serta integrasi BUMDes dan koperasi sebagai agregator produk UMKM. Dengan demikian, skala usaha dapat meningkat dan daya saing produk lokal semakin kuat.

Dampak yang diharapkan adalah tumbuhnya pusat-pusat ekonomi desa yang mandiri, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta terciptanya ekosistem ekonomi lokal yang berkelanjutan.

2. Akses Pembiayaan Mikro dan Inklusi Keuangan

Program ini bertujuan untuk mengatasi keterbatasan akses permodalan yang selama ini menjadi hambatan utama bagi UMKM dan pelaku usaha di desa. Pendekatan yang dilakukan adalah memperluas akses pembiayaan mikro melalui berbagai skema seperti kredit usaha rakyat (KUR), pembiayaan berbasis koperasi, serta kemitraan dengan lembaga keuangan formal dan nonformal.

Selain penyediaan pembiayaan, program ini juga menekankan pentingnya inklusi keuangan melalui peningkatan literasi keuangan masyarakat. Edukasi dilakukan agar pelaku usaha memahami pengelolaan keuangan, perencanaan usaha, serta pemanfaatan produk dan layanan keuangan secara optimal.

Strategi lainnya adalah mendorong inovasi pembiayaan seperti skema pembiayaan berbasis kelompok, pembiayaan syariah, serta pemanfaatan teknologi finansial (fintech) untuk menjangkau wilayah terpencil. Pemerintah juga berperan dalam memberikan fasilitasi, penjaminan, dan subsidi bunga guna menurunkan risiko pembiayaan.

Dampak dari program ini adalah meningkatnya akses permodalan bagi pelaku usaha, tumbuhnya usaha baru, serta meningkatnya skala dan produktivitas usaha yang pada akhirnya berkontribusi terhadap pengurangan kemiskinan.

3. Pengembangan Usaha Berbasis Potensi Desa (Pertanian, Perikanan, Kerajinan)

Program ini difokuskan pada pengembangan usaha ekonomi yang berbasis potensi unggulan desa, seperti sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kerajinan. Pendekatan yang digunakan adalah pengembangan ekonomi berbasis kawasan dan komoditas unggulan, sehingga setiap desa memiliki keunggulan kompetitif yang dapat dikembangkan secara optimal.

Strategi implementasi meliputi identifikasi dan pemetaan potensi desa, pengembangan rantai nilai (value chain), serta integrasi antara sektor produksi, pengolahan, dan pemasaran. Selain itu, dilakukan penguatan teknologi produksi, peningkatan kualitas produk, serta diversifikasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah.

Program ini juga mendorong pengembangan ekonomi kreatif berbasis budaya lokal dan kearifan lokal sebagai bagian dari identitas daerah. Kolaborasi dengan sektor swasta dan pasar juga diperkuat untuk memastikan keberlanjutan usaha.
Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya nilai tambah produk lokal, terciptanya lapangan kerja di desa, serta berkurangnya urbanisasi karena masyarakat dapat memperoleh penghidupan yang layak di daerahnya sendiri.

4. Pendampingan Usaha dan Inkubasi Bisnis

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan keberlanjutan usaha UMKM melalui pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Pendampingan dilakukan mulai dari tahap perintisan usaha, pengembangan, hingga ekspansi usaha. Strategi implementasi mencakup penyediaan tenaga pendamping profesional, pelatihan manajemen usaha, akses informasi pasar, serta fasilitasi legalitas usaha. Inkubasi bisnis juga dilakukan untuk membantu pelaku usaha dalam mengembangkan ide bisnis menjadi usaha yang viable dan kompetitif.

Program ini juga menyediakan mentoring, coaching, serta akses ke jejaring bisnis dan investor. Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas dalam hal inovasi produk, pengelolaan keuangan, serta strategi pemasaran.

Dampak dari program ini adalah meningkatnya kualitas dan daya tahan usaha UMKM, berkurangnya tingkat kegagalan usaha, serta meningkatnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah.

5. Digitalisasi Pemasaran Produk UMKM

Program ini diarahkan untuk meningkatkan daya saing produk UMKM melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran. Digitalisasi menjadi kunci dalam memperluas akses pasar, baik di tingkat nasional maupun global.

Strategi implementasi meliputi pelatihan literasi digital, pemanfaatan platform e-commerce, serta pengembangan branding dan pemasaran digital. Pelaku UMKM didorong untuk memanfaatkan media sosial, marketplace, serta platform digital lainnya sebagai sarana promosi dan penjualan.

Selain itu, dilakukan penguatan infrastruktur digital dan pengembangan sistem informasi pasar untuk mendukung akses informasi yang lebih luas. Pemerintah juga memfasilitasi kemitraan dengan platform digital dan pelaku industri untuk mempercepat transformasi digital UMKM.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya volume penjualan, perluasan jangkauan pasar, serta meningkatnya daya saing produk lokal di pasar yang lebih luas.

III. Perluasan Kesempatan Kerja dan Kewirausahaan

Perluasan kesempatan kerja dan kewirausahaan di Provinsi NTB diarahkan untuk mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, inklusif, dan berdaya saing, dengan menempatkan tenaga kerja dan pelaku usaha sebagai aktor utama pembangunan. Fokus ini menjadi strategi kunci dalam menurunkan tingkat pengangguran, mengurangi kemiskinan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Pendekatan pembangunan dilakukan secara terpadu antara sisi penawaran (supply) tenaga kerja dan sisi permintaan (demand) lapangan kerja, melalui peningkatan kualitas SDM, penciptaan lapangan kerja baru, serta penguatan ekosistem kewirausahaan. Selain itu, transformasi ekonomi daerah menuju sektor-sektor bernilai tambah tinggi menjadi pendorong utama dalam memperluas peluang kerja.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Perluasan Kesempatan Kerja dan Kewirausahaan diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Pelatihan Vokasi Berbasis Kebutuhan Industri

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja melalui penyelenggaraan pelatihan vokasi yang selaras dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri (link and match). Pendekatan yang digunakan tidak lagi supply-driven, tetapi demand-driven, di mana jenis pelatihan disusun berdasarkan kebutuhan riil pasar kerja, termasuk sektor unggulan NTB seperti agromaritim, pariwisata, dan ekonomi kreatif.

Strategi implementasi mencakup penyusunan kurikulum berbasis kompetensi, kemitraan dengan industri dalam penyelenggaraan pelatihan, serta penguatan balai latihan kerja (BLK) sebagai pusat pengembangan keterampilan. Selain itu, dilakukan sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan pengakuan terhadap keterampilan tenaga kerja.

Program ini juga mengintegrasikan pelatihan soft skills seperti komunikasi, etos kerja, dan literasi digital, yang menjadi kebutuhan penting dalam dunia kerja modern. Pelatihan berbasis teknologi dan digitalisasi juga diperkuat untuk menjawab tantangan transformasi ekonomi.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kompetensi tenaga kerja, menurunnya tingkat pengangguran, serta meningkatnya daya serap tenaga kerja oleh industri.

2. Pengembangan Wirausaha Baru dan Startup Lokal

Program ini bertujuan untuk menciptakan wirausaha baru sebagai motor penggerak ekonomi daerah dan pencipta lapangan kerja. Fokus utama adalah

mendorong lahirnya pelaku usaha baru yang inovatif, adaptif, dan berbasis potensi lokal.

Strategi implementasi meliputi pelatihan kewirausahaan, fasilitasi akses permodalan, serta penyediaan inkubasi bisnis bagi calon wirausaha. Program ini juga mendorong pengembangan startup lokal berbasis teknologi dan digital yang mampu menjawab kebutuhan pasar modern.

Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan mulai dari tahap ide bisnis, validasi pasar, hingga pengembangan usaha. Selain itu, pemerintah memfasilitasi akses ke jejaring bisnis, investor, dan pasar untuk mempercepat pertumbuhan usaha.

Dampak dari program ini adalah meningkatnya jumlah wirausaha baru, berkembangnya ekosistem startup lokal, serta meningkatnya kontribusi sektor kewirausahaan terhadap perekonomian daerah.

3. Penempatan Tenaga Kerja dan Link and Match dengan Industri

Program ini difokuskan pada peningkatan penyerapan tenaga kerja melalui penguatan sistem penempatan kerja yang terintegrasi dengan kebutuhan industri. Pendekatan link and match menjadi kunci untuk memastikan bahwa kompetensi tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Strategi implementasi mencakup penguatan sistem informasi pasar kerja, penyelenggaraan job fair, serta fasilitasi penempatan tenaga kerja baik di dalam maupun luar daerah. Selain itu, dilakukan kemitraan dengan perusahaan untuk membuka peluang kerja dan program magang.

Program ini juga mendorong peningkatan mobilitas tenaga kerja serta penguatan perlindungan tenaga kerja, termasuk bagi pekerja migran. Digitalisasi sistem penempatan kerja juga dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya tingkat penyerapan tenaga kerja, berkurangnya mismatch antara pendidikan dan pekerjaan, serta meningkatnya kesejahteraan tenaga kerja.

4. Penguatan Sektor Ekonomi Kreatif Berbasis Digital

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sektor ekonomi kreatif sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis inovasi dan kreativitas. Fokus utama adalah pada subsektor yang memiliki potensi tinggi di NTB, seperti kuliner, fesyen, kriya, musik, dan konten digital.

Strategi implementasi meliputi penguatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif melalui pelatihan, inkubasi, serta fasilitasi akses pasar dan pembiayaan. Digitalisasi menjadi kunci dalam pengembangan sektor ini, baik dalam produksi, distribusi, maupun pemasaran.

Program ini juga mendorong kolaborasi antara pelaku ekonomi kreatif dengan sektor pariwisata dan industri lainnya untuk menciptakan nilai tambah. Selain itu, dilakukan penguatan branding dan promosi produk kreatif lokal di tingkat nasional dan global.

Dampak dari program ini adalah meningkatnya nilai tambah produk kreatif, terbukanya peluang kerja baru, serta meningkatnya kontribusi ekonomi kreatif terhadap PDRB daerah.

5. Program Padat Karya Produktif

Program ini merupakan intervensi jangka pendek yang bertujuan untuk menyerap tenaga kerja, khususnya masyarakat miskin dan pengangguran, melalui kegiatan yang bersifat produktif. Program ini tidak hanya memberikan pendapatan sementara, tetapi juga menghasilkan output yang bermanfaat bagi masyarakat.

Strategi implementasi mencakup pelaksanaan kegiatan padat karya di sektor infrastruktur dasar, lingkungan, dan ekonomi produktif, seperti pembangunan jalan desa, irigasi, pengelolaan lingkungan, serta pengembangan usaha produktif masyarakat.

Pendekatan yang digunakan adalah pemberdayaan masyarakat, di mana tenaga kerja lokal dilibatkan secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, program ini juga dapat dikombinasikan dengan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan kapasitas tenaga kerja.

Dampak yang diharapkan adalah berkurangnya pengangguran, meningkatnya pendapatan masyarakat, serta terciptanya infrastruktur dan aset ekonomi yang mendukung pembangunan daerah.

IV. Pengurangan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan Desa Kantong Kemiskinan

Pengurangan beban pengeluaran rumah tangga miskin dan penanganan desa kantong kemiskinan di Provinsi NTB diarahkan untuk mempercepat penurunan kemiskinan secara signifikan, terukur, dan berkelanjutan, dengan fokus pada pengurangan beban hidup dasar sekaligus peningkatan kapasitas ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menempatkan rumah tangga miskin sebagai subjek utama intervensi, dengan strategi yang menyentuh langsung kebutuhan dasar dan kondisi kerentanan yang mereka hadapi.

Pembangunan dilakukan melalui pendekatan terpadu, berbasis wilayah (spasial), dan berbasis data (by name by address), sehingga intervensi dapat lebih tepat sasaran, efektif, dan efisien. Desa kantong kemiskinan menjadi prioritas utama melalui intervensi lintas sektor yang terintegrasi, guna memutus rantai kemiskinan secara sistematis.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Pengurangan Beban Pengeluaran Rumah Tangga Miskin dan Desa Kantong Kemiskinan diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Penyediaan Rumah Layak Huni

Program ini bertujuan untuk memastikan setiap masyarakat, khususnya rumah tangga miskin, memiliki hunian yang aman, sehat, dan layak. Rumah layak huni tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas hidup, kesehatan, dan produktivitas masyarakat.

Strategi implementasi mencakup rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH), pembangunan rumah baru bagi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal,

serta penyediaan bantuan stimulan berbasis swadaya masyarakat. Pendekatan kolaboratif dilakukan dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, swasta, dan masyarakat.

Selain itu, program ini diintegrasikan dengan penyediaan infrastruktur dasar seperti listrik, air bersih, dan sanitasi, sehingga menciptakan lingkungan permukiman yang sehat dan berkelanjutan.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas hunian masyarakat, menurunnya kawasan kumuh, serta meningkatnya derajat kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

2. Akses Air Bersih dan Sanitasi Layak

Program ini diarahkan untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap air minum yang aman dan sanitasi yang layak sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Ketersediaan air bersih dan sanitasi yang baik merupakan kebutuhan dasar yang sangat menentukan kualitas kesehatan lingkungan.

Strategi implementasi meliputi pembangunan dan rehabilitasi sistem penyediaan air minum (SPAM), pengembangan sanitasi berbasis masyarakat, serta edukasi perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS). Program ini juga mendorong inovasi teknologi tepat guna untuk menjangkau wilayah terpencil dan rawan air.

Pendekatan berbasis komunitas diperkuat agar masyarakat memiliki peran aktif dalam pengelolaan dan pemeliharaan sarana air dan sanitasi. Selain itu, dilakukan integrasi dengan program kesehatan dan penanganan stunting.

Dampak yang diharapkan adalah menurunnya penyakit berbasis lingkungan, meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, serta berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan air dan kesehatan.

3. Subsidi dan Bantuan Pangan

Program ini bertujuan untuk menjaga daya beli masyarakat miskin melalui penyediaan bantuan pangan yang terjangkau dan tepat sasaran. Intervensi ini penting untuk memastikan ketahanan pangan rumah tangga, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil atau saat terjadi kenaikan harga bahan pokok.

Strategi implementasi mencakup penyaluran bantuan pangan bersubsidi, operasi pasar, serta penguatan distribusi pangan ke daerah rawan. Program ini juga diarahkan untuk memanfaatkan produk lokal guna mendukung petani dan pelaku usaha pangan di daerah.

Pendekatan adaptif diterapkan agar bantuan dapat disesuaikan dengan kondisi darurat seperti bencana atau krisis ekonomi. Selain itu, dilakukan integrasi dengan program perlindungan sosial lainnya untuk meningkatkan efektivitas intervensi.

Dampak yang diharapkan adalah terjaganya ketahanan pangan masyarakat, stabilitas harga pangan, serta berkurangnya beban pengeluaran rumah tangga miskin.

4. Pengembangan Desa Mandiri dan Desa Wisata

Program ini diarahkan untuk mendorong kemandirian ekonomi desa melalui pengembangan potensi lokal yang berbasis sumber daya alam, budaya, dan kearifan

lokal. Desa mandiri dan desa wisata menjadi strategi penting dalam menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di perdesaan.

Strategi implementasi meliputi penguatan kelembagaan desa (BUMDes), pengembangan produk unggulan desa, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan usaha dan pelayanan wisata. Program ini juga mendorong integrasi antara sektor pariwisata dengan UMKM dan ekonomi kreatif.

Pengembangan desa wisata dilakukan dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan pelestarian budaya, sehingga memberikan manfaat ekonomi tanpa merusak sumber daya yang ada.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat desa, terciptanya lapangan kerja lokal, serta berkurangnya kesenjangan antara wilayah desa dan kota.

5. Intervensi Terpadu Berbasis Wilayah (Cluster Kemiskinan)

Program ini merupakan pendekatan strategis dalam penanggulangan kemiskinan dengan fokus pada wilayah-wilayah yang memiliki tingkat kemiskinan tinggi (kantong kemiskinan). Intervensi dilakukan secara terpadu dan lintas sektor untuk memberikan dampak yang lebih signifikan.

Strategi implementasi mencakup pemetaan wilayah prioritas berbasis data, integrasi program lintas OPD, serta penanganan secara simultan pada aspek pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur. Pendekatan ini memastikan bahwa intervensi tidak parsial, tetapi menyasar seluruh dimensi kemiskinan.

Program ini juga melibatkan partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan lokal untuk memastikan keberlanjutan program. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengukur efektivitas intervensi.

Dampak yang diharapkan adalah percepatan penurunan kemiskinan di wilayah prioritas, berkurangnya ketimpangan antar wilayah, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh.

6. Pengembangan Ekonomi Lokal Berbasis Kawasan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi daerah secara terintegrasi melalui pendekatan kawasan. Setiap wilayah dikembangkan berdasarkan keunggulan komparatifnya, seperti kawasan pertanian, perikanan, industri, atau pariwisata.

Strategi implementasi meliputi pengembangan klaster ekonomi, integrasi rantai nilai (hulu–hilir), serta penguatan konektivitas antar sektor. Program ini juga mendorong investasi dan kemitraan dengan sektor swasta untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi kawasan.

Pendekatan ini memungkinkan terciptanya skala ekonomi yang lebih besar dan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya. Selain itu, dilakukan penguatan kelembagaan ekonomi lokal untuk mendukung keberlanjutan program.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya nilai tambah ekonomi daerah, terciptanya lapangan kerja, serta meningkatnya daya saing wilayah.

7. Peningkatan Akses Transportasi dan Konektivitas Wilayah

Program ini diarahkan untuk meningkatkan konektivitas antar wilayah sebagai upaya mendukung distribusi barang, mobilitas masyarakat, dan akses terhadap layanan dasar. Infrastruktur transportasi yang baik menjadi kunci dalam mengurangi kesenjangan wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Strategi implementasi mencakup pembangunan dan peningkatan jalan, jembatan, serta transportasi publik yang menghubungkan wilayah produksi dengan pasar. Selain itu, dilakukan pengembangan konektivitas antar pulau dan wilayah terpencil.

Program ini juga mendukung integrasi dengan sistem logistik daerah untuk meningkatkan efisiensi distribusi barang, khususnya pangan dan produk lokal. Digitalisasi transportasi juga didorong untuk meningkatkan kualitas layanan.

Dampak yang diharapkan adalah menurunnya biaya logistik, meningkatnya akses masyarakat terhadap layanan dasar, serta terbukanya peluang ekonomi baru di wilayah yang sebelumnya terisolasi.

B. Ketahanan Pangan

I. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan Berkelanjutan

Peningkatan produksi dan produktivitas pangan berkelanjutan di Provinsi NTB diarahkan untuk mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah melalui sistem produksi yang efisien, berdaya saing, dan ramah lingkungan. Fokus ini tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan volume produksi, tetapi juga pada stabilitas pasokan, kualitas hasil, nilai tambah, serta keberlanjutan sumber daya alam.

Pendekatan pembangunan dilakukan secara terpadu dari hulu hingga hilir, mencakup penyediaan sarana produksi, peningkatan kapasitas pelaku utama, penguatan infrastruktur, hingga pengembangan sistem distribusi dan pemasaran. Selain itu, pembangunan pangan juga diarahkan untuk adaptif terhadap perubahan iklim serta mampu menjawab tantangan global seperti krisis pangan dan fluktuasi harga.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pangan Berkelanjutan diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pertanian, Peternakan, dan Perikanan

Program ini diarahkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas sektor agromaritim melalui optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang ada serta perluasan areal produksi secara terencana dan berkelanjutan. Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan hasil per satuan lahan melalui penerapan teknologi budidaya yang lebih baik, efisiensi penggunaan input, serta peningkatan manajemen usaha tani, perikanan, dan peternakan.

Sementara itu, ekstensifikasi difokuskan pada pembukaan dan pengembangan lahan atau kawasan baru yang potensial, termasuk lahan kering, lahan marginal, serta wilayah pesisir dan perairan untuk budidaya perikanan. Pendekatan ini dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan daya dukung ekosistem.

Program ini juga mendorong integrasi antar subsektor, seperti integrasi tanaman-ternak dan perikanan terpadu, sehingga tercipta efisiensi dan peningkatan nilai ekonomi. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya produksi pangan daerah, ketahanan pangan yang lebih kuat, serta peningkatan pendapatan pelaku usaha agromaritim.

2. Penyediaan Benih Unggul, Pupuk, Pakan, dan Sarana Produksi

Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan input produksi yang berkualitas dan terjangkau bagi petani, nelayan, dan peternak. Ketersediaan benih unggul, pupuk, pakan, serta sarana produksi lainnya menjadi faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil produksi.

Strategi implementasi mencakup penguatan sistem distribusi input produksi, pengembangan unit produksi benih lokal, serta pengawasan kualitas dan harga agar tetap terjangkau. Selain itu, dilakukan penguatan subsidi yang tepat sasaran serta mendorong penggunaan input yang efisien dan ramah lingkungan.

Program ini juga mendorong kemandirian petani dan kelompok usaha dalam memproduksi benih, pakan, dan pupuk secara mandiri berbasis potensi lokal. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya produktivitas, efisiensi biaya produksi, serta kualitas hasil yang lebih kompetitif di pasar.

3. Modernisasi Pertanian (Mekanisasi dan Smart Farming)

Program ini diarahkan untuk mendorong transformasi sektor pertanian dari sistem tradisional menuju sistem modern yang berbasis teknologi. Mekanisasi pertanian dilakukan melalui penggunaan alat dan mesin pertanian (alsintan) untuk meningkatkan efisiensi kerja, mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja manual, serta mempercepat proses produksi.

Selain itu, penerapan smart farming menjadi fokus utama dengan memanfaatkan teknologi digital seperti sensor, Internet of Things (IoT), sistem informasi geografis, serta aplikasi pertanian untuk monitoring dan pengambilan keputusan. Teknologi ini memungkinkan pengelolaan usaha tani yang lebih presisi dan efisien.

Strategi implementasi mencakup penyediaan alsintan, pelatihan penggunaan teknologi, serta penguatan kelembagaan petani dalam pengelolaan teknologi. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya produktivitas, efisiensi biaya, serta daya saing sektor pertanian di era digital.

4. Peningkatan Kapasitas Petani, Nelayan, dan Peternak

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia pelaku usaha agromaritim agar lebih profesional, adaptif, dan berdaya saing. Peningkatan kapasitas dilakukan melalui pelatihan teknis, manajerial, serta penguatan kewirausahaan.

Strategi implementasi mencakup penyuluhan berbasis kebutuhan, pelatihan berbasis kompetensi, serta pendampingan usaha secara berkelanjutan. Selain itu, dilakukan penguatan kelembagaan kelompok tani, nelayan, dan peternak agar mampu berperan sebagai motor penggerak ekonomi lokal.

Program ini juga mendorong regenerasi pelaku usaha melalui keterlibatan generasi muda dalam sektor agromaritim. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya produktivitas, kualitas pengelolaan usaha, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan pasar dan teknologi.

5. Pengembangan Pertanian Ramah Lingkungan dan Organik

Program ini diarahkan untuk memastikan keberlanjutan sektor pertanian melalui penerapan praktik budidaya yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Pertanian organik dan ramah lingkungan menjadi solusi dalam menjaga kesuburan tanah, kualitas air, serta kelestarian ekosistem.

Strategi implementasi mencakup pengurangan penggunaan bahan kimia, pengembangan pupuk organik, serta penerapan sistem pertanian terpadu. Selain itu, dilakukan sertifikasi produk organik untuk meningkatkan nilai tambah dan akses pasar.

Program ini juga mendorong edukasi dan perubahan perilaku petani menuju praktik pertanian yang lebih berkelanjutan. Dampak yang diharapkan adalah terjaganya kelestarian lingkungan, meningkatnya kualitas produk, serta terbukanya peluang pasar baru yang bernilai tinggi.

II. Penguatan Cadangan Pangan dan Stabilitas Harga

Penguatan cadangan pangan dan stabilitas harga di Provinsi NTB diarahkan untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, dan kestabilan pangan bagi seluruh masyarakat sepanjang waktu. Fokus ini menjadi pilar penting dalam menjaga ketahanan pangan daerah, melindungi daya beli masyarakat—terutama kelompok rentan—serta mengendalikan inflasi pangan yang berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi daerah.

Pendekatan pembangunan dilakukan secara sistemik dan terintegrasi antara aspek produksi, distribusi, konsumsi, serta tata niaga pangan, dengan memperkuat peran pemerintah sebagai stabilisator melalui kebijakan cadangan pangan, intervensi pasar, dan pengendalian harga. Selain itu, sistem ini dirancang adaptif terhadap berbagai risiko seperti perubahan iklim, gangguan distribusi, dan gejolak harga global.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Penguatan Cadangan Pangan dan Stabilitas Harga diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan Cadangan Pangan Pemerintah dan Masyarakat

Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan pangan sepanjang waktu melalui penguatan cadangan pangan yang dikelola oleh pemerintah maupun masyarakat. Cadangan pangan berfungsi sebagai instrumen strategis untuk mengantisipasi kondisi darurat seperti bencana alam, gagal panen, gejolak harga, maupun gangguan distribusi.

Strategi implementasi mencakup peningkatan kapasitas cadangan pangan daerah melalui pengadaan, penyimpanan, dan pengelolaan yang profesional, serta penguatan cadangan pangan berbasis masyarakat seperti lumbung pangan desa. Sistem pengelolaan cadangan juga diarahkan agar lebih modern, efisien, dan terintegrasi dengan sistem logistik pangan daerah.

Selain itu, dilakukan penguatan kelembagaan dan tata kelola cadangan pangan, termasuk mekanisme distribusi yang cepat dan tepat sasaran saat terjadi krisis. Program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketersediaan pangan melalui pengelolaan cadangan secara mandiri.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya ketahanan pangan daerah, kemampuan menghadapi krisis, serta terjaganya stabilitas pasokan pangan.

2. Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Strategis

Program ini diarahkan untuk menjaga keseimbangan antara pasokan dan permintaan pangan strategis guna mencegah terjadinya fluktuasi harga yang merugikan masyarakat dan pelaku usaha. Stabilitas harga menjadi faktor penting dalam menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin.

Strategi implementasi meliputi penguatan sistem distribusi pangan, pengendalian stok, serta koordinasi lintas sektor dan antar wilayah untuk memastikan kelancaran pasokan. Pemerintah juga melakukan intervensi kebijakan seperti pengaturan distribusi, pengendalian impor, serta dukungan terhadap produksi dalam negeri.

Program ini juga mendorong penguatan sistem logistik pangan yang efisien dan terintegrasi, sehingga mampu mengurangi disparitas harga antar wilayah. Selain itu, dilakukan penguatan peran pelaku usaha dan distributor dalam menjaga stabilitas pasar.

Dampak yang diharapkan adalah harga pangan yang stabil dan terjangkau, meningkatnya kepastian usaha bagi produsen, serta terjaganya ketahanan pangan masyarakat.

3. Operasi Pasar dan Intervensi Harga

Program ini merupakan langkah taktis yang dilakukan pemerintah untuk merespons secara cepat gejolak harga pangan di pasar. Operasi pasar dilakukan dengan menyediakan pangan pokok dengan harga terjangkau, terutama pada saat terjadi kenaikan harga yang signifikan atau menjelang hari besar keagamaan.

Strategi implementasi mencakup pelaksanaan operasi pasar secara terencana dan berbasis data, serta kerja sama dengan berbagai pihak seperti Bulog, distributor, dan pelaku usaha. Intervensi harga juga dilakukan melalui subsidi, pengendalian distribusi, serta penguatan cadangan pangan.

Program ini dirancang agar fleksibel dan adaptif terhadap dinamika pasar, sehingga mampu memberikan dampak langsung dalam menjaga stabilitas harga. Selain itu, dilakukan pengawasan untuk mencegah praktik penimbunan dan spekulasi harga.

Dampak yang diharapkan adalah terjaganya stabilitas harga pangan, meningkatnya daya beli masyarakat, serta perlindungan terhadap konsumen dari lonjakan harga yang tidak wajar.

4. Sistem Monitoring Harga Pangan Berbasis Digital

Program ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengendalian harga pangan melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pemantauan harga dan pasokan secara real-time. Sistem ini menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat berbasis data.

Strategi implementasi meliputi pengembangan dashboard informasi harga pangan, integrasi data lintas OPD, serta pemanfaatan teknologi untuk pengumpulan dan analisis data. Sistem ini juga dapat diakses oleh masyarakat untuk meningkatkan transparansi informasi harga. Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengelolaan data serta pengembangan sistem peringatan dini (early warning system) untuk mengantisipasi potensi gejolak harga.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya akurasi dan kecepatan respon kebijakan, transparansi informasi pasar, serta efisiensi dalam pengendalian harga pangan.

5. Penanganan Daerah Rawan Pangan

Program ini difokuskan pada penanganan wilayah-wilayah yang mengalami kerawanan pangan, baik secara kronis maupun sementara. Kerawanan pangan dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kemiskinan, keterbatasan akses, kondisi geografis, maupun bencana. Strategi implementasi mencakup identifikasi dan pemetaan daerah rawan pangan berbasis data, serta pelaksanaan intervensi terpadu yang melibatkan berbagai sektor seperti pertanian, kesehatan, sosial, dan infrastruktur. Intervensi dapat berupa bantuan pangan, penguatan produksi lokal, serta peningkatan akses terhadap layanan dasar.

Program ini juga mendorong pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan usaha produktif dan penguatan ketahanan pangan rumah tangga. Pendekatan berbasis komunitas menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan program. Dampak yang diharapkan adalah berkurangnya jumlah wilayah rawan pangan, meningkatnya ketahanan pangan masyarakat, serta meningkatnya kesejahteraan di wilayah prioritas.

III. Penguatan Distribusi dan Kemandirian Pangan Lokal

Penguatan distribusi dan kemandirian pangan lokal di Provinsi NTB diarahkan untuk mewujudkan sistem pangan daerah yang efisien, inklusif, tangguh, dan berkelanjutan, dengan memastikan bahwa pangan tersedia secara merata, mudah diakses, dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Fokus ini tidak hanya menitikberatkan pada kelancaran distribusi, tetapi juga pada penguatan produksi dan konsumsi pangan lokal sebagai fondasi kemandirian pangan daerah.

Pendekatan pembangunan dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan memperkuat konektivitas antar wilayah, memperpendek rantai distribusi, serta mendorong diversifikasi pangan berbasis potensi lokal. Selain itu, strategi ini juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan luar daerah serta meningkatkan ketahanan pangan masyarakat dalam menghadapi berbagai risiko. Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Penguatan Distribusi dan Kemandirian Pangan Lokal diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Peningkatan Konektivitas Wilayah Produksi dan Konsumsi

Program ini bertujuan untuk menjamin kelancaran arus distribusi pangan dari sentra produksi ke wilayah konsumsi secara efisien, cepat, dan berbiaya rendah.

Konektivitas menjadi faktor kunci dalam mengurangi kesenjangan harga antar wilayah serta mencegah terjadinya kelangkaan pangan di daerah tertentu.

Strategi implementasi diarahkan pada penguatan infrastruktur transportasi dan logistik, termasuk peningkatan kualitas jalan produksi, akses ke pelabuhan, serta konektivitas antar pulau dan wilayah terpencil. Selain itu, dilakukan pengembangan sistem logistik pangan yang terintegrasi, termasuk fasilitas penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi yang efisien.

Intervensi juga mencakup penguatan koordinasi lintas wilayah dan lintas sektor untuk memastikan kelancaran distribusi, terutama pada masa puncak produksi dan periode rawan pangan.

Dampak yang diharapkan adalah menurunnya biaya distribusi, berkurangnya disparitas harga antar wilayah, serta meningkatnya ketersediaan pangan secara merata di seluruh daerah.

2. Pengembangan Pasar Pangan dan Distribusi Antar Wilayah

Program ini diarahkan untuk memperkuat sistem pasar pangan yang efisien, transparan, dan terintegrasi antar wilayah. Pengembangan pasar pangan tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga pada sistem distribusi dan tata niaga yang lebih adil dan menguntungkan bagi produsen dan konsumen.

Strategi implementasi meliputi pembangunan dan revitalisasi pasar pangan, pengembangan pasar induk dan pusat distribusi, serta penguatan jaringan distribusi antar daerah. Program ini juga mendorong kemitraan antara petani, pedagang, dan pelaku usaha untuk memperkuat rantai pasok pangan. Selain itu, dilakukan penguatan sistem tata niaga untuk meminimalisir praktik perantara yang tidak efisien serta meningkatkan posisi tawar petani dan produsen. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya efisiensi distribusi pangan, stabilitas harga, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha di sektor pangan.

3. Digitalisasi Informasi Distribusi dan Harga

Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi sistem distribusi pangan melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi menjadi instrumen penting dalam menyediakan informasi harga, stok, dan distribusi pangan secara real-time.

Strategi implementasi mencakup pengembangan sistem informasi pangan berbasis digital, integrasi data lintas OPD, serta pemanfaatan aplikasi dan platform digital untuk memantau distribusi dan harga. Sistem ini juga dilengkapi dengan fitur analisis data dan peringatan dini untuk mengantisipasi potensi gangguan pasokan atau lonjakan harga. Program ini juga mendorong keterlibatan pelaku usaha dalam sistem digital, sehingga informasi pasar menjadi lebih terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya akurasi dan kecepatan pengambilan kebijakan, transparansi pasar, serta efisiensi dalam pengendalian distribusi dan harga pangan.

4. Pengembangan Komoditas Pangan Lokal (Jagung, Sorgum, Umbi-umbian, dll.)

Program ini difokuskan pada diversifikasi pangan melalui pengembangan komoditas lokal yang memiliki potensi besar di NTB. Diversifikasi pangan menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada komoditas tertentu serta meningkatkan ketahanan pangan daerah. Strategi implementasi meliputi pengembangan kawasan produksi komoditas lokal, peningkatan teknologi budidaya, serta penguatan rantai nilai dari hulu hingga hilir. Selain itu, dilakukan pengembangan produk olahan berbasis pangan lokal untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing.

Program ini juga mendorong kolaborasi dengan sektor industri dan UMKM untuk memperluas pasar produk pangan lokal, baik di tingkat regional maupun nasional. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya produksi dan konsumsi pangan lokal, diversifikasi sumber pangan, serta peningkatan pendapatan petani dan pelaku usaha.

5. Edukasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA). Perubahan pola konsumsi menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan mengurangi masalah gizi seperti stunting dan obesitas. Strategi implementasi mencakup kampanye edukasi gizi, sosialisasi pola makan sehat, serta integrasi program edukasi dengan sektor pendidikan dan kesehatan. Program ini juga mendorong pemanfaatan pangan lokal sebagai bagian dari pola konsumsi masyarakat.

Pendekatan berbasis komunitas dan keluarga diperkuat untuk memastikan perubahan perilaku yang berkelanjutan. Selain itu, dilakukan pelibatan berbagai pihak seperti kader kesehatan, sekolah, dan organisasi masyarakat. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas konsumsi pangan masyarakat, perbaikan status gizi, serta meningkatnya kualitas SDM secara keseluruhan.

6. Penguatan Ketahanan Pangan Rumah Tangga

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan. Ketahanan pangan rumah tangga menjadi fondasi utama dalam sistem ketahanan pangan daerah. Strategi implementasi meliputi pengembangan program pekarangan pangan lestari, pemanfaatan lahan sempit untuk produksi pangan, serta pemberdayaan keluarga dalam pengelolaan pangan. Program ini juga mendorong penguatan ekonomi rumah tangga melalui usaha produktif berbasis pangan.

Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas keluarga dalam pengelolaan pangan, termasuk penyimpanan, pengolahan, dan konsumsi yang efisien. Program ini juga diintegrasikan dengan program perlindungan sosial untuk menjangkau kelompok rentan.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kemandirian pangan rumah tangga, berkurangnya kerentanan terhadap krisis pangan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

IV. Kawasan pangan terintegrasi dari hulu ke hilir

Pengembangan kawasan pangan terintegrasi dari hulu ke hilir di Provinsi NTB diarahkan untuk membangun sistem pangan yang efisien, berdaya saing, bernilai tambah tinggi, dan berkelanjutan, melalui pendekatan kawasan yang mengintegrasikan seluruh rantai nilai mulai dari produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran. Pendekatan ini menjadi strategi kunci dalam mentransformasi sektor pangan dari yang berbasis produksi primer menjadi ekosistem ekonomi yang modern dan terintegrasi.

Pembangunan kawasan pangan dilakukan dengan pendekatan klaster dan koridor ekonomi, yang menghubungkan sentra produksi dengan industri pengolahan serta pasar. Dengan demikian, kawasan pangan tidak hanya berfungsi sebagai pusat produksi, tetapi juga sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan memperkuat ketahanan pangan daerah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Kawasan pangan terintegrasi dari hulu ke hilir diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Kawasan Pertanian dan Perikanan Terpadu

Program ini bertujuan untuk membangun kawasan produksi pangan yang terintegrasi, efisien, dan berdaya saing tinggi melalui pendekatan berbasis wilayah (area-based development). Kawasan pertanian dan perikanan tidak lagi dikembangkan secara parsial, tetapi dalam satu kesatuan sistem yang menghubungkan berbagai komoditas, pelaku usaha, dan infrastruktur pendukung.

Strategi implementasi dilakukan melalui penetapan kawasan unggulan berbasis potensi wilayah, seperti kawasan sentra padi, jagung, hortikultura, perikanan budidaya, maupun perikanan tangkap. Pengembangan kawasan diarahkan pada integrasi lintas subsektor, seperti sistem pertanian terpadu (crop-livestock-fishery system), sehingga terjadi efisiensi pemanfaatan sumber daya dan peningkatan nilai ekonomi.

Intervensi mencakup penyediaan sarana produksi, penguatan teknologi budidaya, pengembangan irigasi dan tambak, serta penguatan sistem kelembagaan di tingkat kawasan. Selain itu, dilakukan penguatan konektivitas kawasan dengan pusat distribusi dan pasar.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya produktivitas kawasan, efisiensi usaha, serta terbentuknya sentra produksi pangan yang mampu menjadi penggerak ekonomi daerah.

2. Pembangunan Lumbung Pangan Desa dan Daerah

Program ini diarahkan untuk memperkuat sistem cadangan pangan melalui pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan di tingkat desa dan daerah. Lumbung pangan berfungsi sebagai instrumen strategis dalam menjaga stabilitas pasokan, terutama pada saat terjadi krisis, gagal panen, atau gangguan distribusi.

Strategi implementasi mencakup pembangunan infrastruktur penyimpanan pangan yang memadai, penguatan sistem manajemen stok, serta pengelolaan berbasis komunitas. Lumbung pangan desa juga didorong untuk terintegrasi dengan

BUMDes atau kelembagaan lokal agar pengelolaannya lebih profesional dan berkelanjutan.

Selain itu, dilakukan penguatan mekanisme distribusi cadangan pangan agar dapat dimanfaatkan secara cepat dan tepat sasaran saat dibutuhkan. Program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga ketahanan pangan melalui pengelolaan cadangan secara mandiri.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya ketahanan pangan lokal, kemampuan menghadapi krisis, serta terjaganya stabilitas pasokan dan harga pangan.

3. Integrasi Produksi, Pengolahan, dan Pemasaran dalam Satu Kawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah sektor pangan melalui integrasi rantai nilai dari hulu hingga hilir dalam satu kawasan. Pendekatan ini memastikan bahwa hasil produksi tidak hanya dijual dalam bentuk bahan mentah, tetapi juga diolah menjadi produk bernilai tinggi sebelum dipasarkan.

Strategi implementasi meliputi pengembangan agroindustri di kawasan produksi, penyediaan fasilitas pengolahan, serta penguatan sistem pemasaran yang terintegrasi. Program ini juga mendorong kemitraan antara petani, pelaku industri, dan pelaku usaha lainnya untuk memperkuat rantai pasok.

Selain itu, dilakukan pengembangan branding produk lokal serta pemanfaatan teknologi digital dalam pemasaran. Integrasi ini juga didukung oleh sistem logistik yang efisien dan infrastruktur yang memadai.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya nilai tambah produk, peningkatan pendapatan pelaku usaha, serta terciptanya ekosistem ekonomi yang berkelanjutan di kawasan.

4. Penguatan Kelembagaan Petani dan Nelayan (Koperasi/BUMDes)

Program ini bertujuan untuk memperkuat posisi dan kapasitas pelaku usaha agromaritim melalui penguatan kelembagaan ekonomi seperti koperasi dan BUMDes. Kelembagaan yang kuat menjadi kunci dalam meningkatkan efisiensi usaha, akses terhadap pasar, serta kemampuan dalam mengelola sumber daya secara kolektif.

Strategi implementasi mencakup peningkatan kapasitas manajerial, penguatan tata kelola organisasi, serta pengembangan unit usaha produktif. Koperasi dan BUMDes didorong untuk berperan sebagai agregator dalam pengumpulan, pengolahan, dan pemasaran produk.

Selain itu, dilakukan fasilitasi akses permodalan, kemitraan dengan sektor swasta, serta penguatan jejaring usaha. Program ini juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kelembagaan.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya daya tawar petani dan nelayan, efisiensi usaha, serta penguatan ekonomi berbasis komunitas.

5. Peningkatan Infrastruktur Produksi dan Pascapanen

Program ini diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas dan kualitas hasil melalui penyediaan infrastruktur yang memadai, baik pada tahap produksi maupun pascapanen. Infrastruktur yang baik menjadi faktor kunci dalam mengurangi kehilangan hasil dan meningkatkan efisiensi usaha.

Strategi implementasi mencakup pembangunan dan rehabilitasi infrastruktur seperti irigasi, embung, tambak, jalan usaha tani, serta fasilitas pascapanen seperti gudang, cold storage, dan alat pengolahan hasil. Program ini juga mendorong pemanfaatan teknologi modern dalam pengelolaan pascapanen.

Selain itu, dilakukan penguatan sistem logistik untuk mendukung distribusi hasil produksi secara efisien. Infrastruktur yang dibangun juga diarahkan untuk mendukung integrasi kawasan dan rantai nilai.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya produktivitas, kualitas hasil produksi, berkurangnya kehilangan hasil (losses), serta meningkatnya daya saing produk di pasar.

V. Ketahanan Pangan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Iklim

Ketahanan pangan berbasis lingkungan dan ketahanan iklim di Provinsi NTB diarahkan untuk mewujudkan sistem pangan yang tangguh, adaptif, dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan antara peningkatan produksi dan pelestarian sumber daya alam. Fokus ini menjadi sangat strategis mengingat tingginya kerentanan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan terhadap perubahan iklim, degradasi lingkungan, serta bencana alam.

Pendekatan pembangunan dilakukan melalui integrasi antara ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, dan adaptasi perubahan iklim, sehingga sistem pangan tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan saat ini, tetapi juga tetap berkelanjutan untuk generasi mendatang. Selain itu, strategi ini juga diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko iklim serta mengurangi dampak negatif terhadap produksi pangan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Ketahanan Pangan Berbasis Lingkungan dan Ketahanan Iklim diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim Sektor Pertanian

Program ini bertujuan untuk meningkatkan ketahanan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan terhadap dampak perubahan iklim yang semakin nyata, seperti kekeringan, banjir, perubahan pola musim, serta peningkatan frekuensi kejadian ekstrem. Adaptasi difokuskan pada kemampuan sistem produksi untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan iklim, sementara mitigasi diarahkan untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari aktivitas pertanian.

Strategi implementasi meliputi pengembangan varietas tahan iklim ekstrem (tahan kekeringan, genangan, dan salinitas), penyesuaian kalender tanam berbasis informasi iklim, serta penerapan praktik pertanian cerdas iklim (climate-smart agriculture). Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas petani dalam memahami risiko iklim dan mengambil keputusan berbasis informasi.

Di sisi mitigasi, program ini mendorong penggunaan pupuk organik, efisiensi penggunaan input kimia, pengelolaan limbah pertanian, serta peningkatan tutupan vegetasi. Kolaborasi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam mendukung implementasi program ini.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya ketahanan sistem produksi pangan terhadap perubahan iklim, berkurangnya risiko kerugian akibat bencana, serta kontribusi terhadap upaya pengurangan emisi.

2. Pengelolaan Air dan Irigasi Berkelanjutan

Program ini diarahkan untuk menjamin ketersediaan air bagi sektor pertanian secara berkelanjutan, mengingat air merupakan faktor kunci dalam produksi pangan. Tantangan utama yang dihadapi adalah keterbatasan sumber air, distribusi yang tidak merata, serta perubahan pola curah hujan akibat perubahan iklim.

Strategi implementasi mencakup pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, pengembangan embung dan waduk kecil, serta penerapan teknologi irigasi hemat air seperti irigasi tetes dan sprinkler. Selain itu, dilakukan penguatan manajemen air berbasis masyarakat melalui peran aktif kelompok tani dalam pengelolaan irigasi.

Program ini juga mendorong konservasi sumber daya air melalui perlindungan daerah tangkapan air, pengelolaan DAS, serta pemanfaatan air secara efisien. Integrasi dengan sistem informasi iklim juga dilakukan untuk mendukung perencanaan penggunaan air.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya efisiensi penggunaan air, terjaminnya ketersediaan air sepanjang musim, serta meningkatnya produktivitas pertanian.

3. Rehabilitasi Lahan Kritis dan Konservasi Tanah

Program ini bertujuan untuk memulihkan lahan kritis dan menjaga kesuburan tanah sebagai basis utama produksi pangan. Degradasi lahan yang disebabkan oleh erosi, deforestasi, dan praktik budidaya yang tidak ramah lingkungan menjadi tantangan utama yang harus diatasi.

Strategi implementasi meliputi rehabilitasi lahan melalui penanaman kembali (reboisasi), penerapan sistem agroforestry, serta penggunaan teknik konservasi tanah dan air seperti terasering, mulsa, dan penanaman tanaman penutup tanah. Selain itu, dilakukan pengurangan praktik pembakaran lahan dan penggunaan bahan kimia berlebihan.

Program ini juga mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kelestarian lahan serta penguatan kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya alam. Pendekatan berbasis lanskap digunakan untuk memastikan keberlanjutan ekosistem secara menyeluruh.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas lahan, terjaganya kesuburan tanah, serta meningkatnya produktivitas pertanian secara berkelanjutan.

4. Pengurangan Risiko Gagal Panen

Program ini diarahkan untuk meminimalisir risiko kerugian akibat gagal panen yang disebabkan oleh faktor iklim, hama penyakit, maupun bencana alam. Gagal panen tidak hanya berdampak pada produksi pangan, tetapi juga pada kesejahteraan petani dan stabilitas ekonomi daerah.

Strategi implementasi mencakup penerapan teknologi budidaya yang adaptif, pengendalian hama dan penyakit secara terpadu, serta diversifikasi usaha tani untuk mengurangi ketergantungan pada satu komoditas. Selain itu, dilakukan

pengembangan skema asuransi pertanian sebagai bentuk perlindungan terhadap risiko usaha.

Program ini juga mendorong penggunaan informasi iklim dan sistem peringatan dini dalam pengambilan keputusan usaha tani. Pendampingan kepada petani menjadi bagian penting dalam memastikan penerapan praktik yang tepat.

Dampak yang diharapkan adalah menurunnya tingkat kerugian akibat gagal panen, meningkatnya ketahanan ekonomi petani, serta terjaganya stabilitas produksi pangan.

5. Sistem Peringatan Dini Kerawanan Pangan

Program ini bertujuan untuk mengantisipasi dan merespons secara cepat potensi kerawanan pangan melalui sistem peringatan dini yang berbasis data dan teknologi. Sistem ini memungkinkan pemerintah untuk mendeteksi lebih awal potensi gangguan produksi, distribusi, maupun akses pangan.

Strategi implementasi mencakup pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dengan data produksi, stok, harga, serta kondisi iklim. Selain itu, dilakukan pemetaan wilayah rawan pangan dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam analisis data.

Program ini juga mendorong koordinasi lintas sektor dalam merespons potensi krisis pangan, termasuk penyiapan langkah intervensi seperti distribusi cadangan pangan, operasi pasar, dan bantuan sosial.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kesiapsiagaan pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi kerawanan pangan, berkurangnya dampak krisis pangan, serta terjaganya stabilitas pangan daerah.

C. Ekosistem Industri Agromaritim

I. Peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan secara berkelanjutan

Peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan di Provinsi NTB diarahkan untuk mewujudkan sistem agromaritim yang produktif, efisien, berdaya saing, dan berkelanjutan, sebagai fondasi utama ketahanan pangan dan penggerak ekonomi daerah. Fokus ini menempatkan subsektor pertanian, perikanan, dan peternakan sebagai satu kesatuan ekosistem yang saling terintegrasi dalam mendukung peningkatan produksi sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya alam.

Pendekatan pembangunan dilakukan secara holistik dari hulu hingga hilir, dengan mengedepankan peningkatan produktivitas, efisiensi usaha, penguatan kapasitas pelaku utama, serta penerapan prinsip keberlanjutan lingkungan. Selain itu, strategi ini juga diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah produk, memperluas pasar, dan memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat berbasis sektor primer.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan, dan peternakan secara berkelanjutan diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Intensifikasi dan Modernisasi Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Program ini diarahkan untuk mentransformasi sistem produksi agromaritim dari pola tradisional menuju sistem yang lebih produktif, efisien, dan berbasis teknologi. Intensifikasi dilakukan melalui peningkatan hasil per satuan lahan atau usaha dengan penerapan praktik budidaya yang lebih baik, efisiensi penggunaan input, serta penguatan manajemen usaha.

Modernisasi menjadi kunci utama melalui pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan), mekanisasi perikanan, serta teknologi peternakan modern. Selain itu, pendekatan smart farming dan precision agriculture mulai diterapkan dengan memanfaatkan teknologi digital seperti sensor, aplikasi monitoring, dan sistem informasi berbasis data.

Strategi implementasi mencakup penyediaan sarana modernisasi, pelatihan penggunaan teknologi, serta penguatan kelembagaan dalam pengelolaan alat secara kolektif. Program ini juga mendorong integrasi antar subsektor (tanaman, ternak, dan perikanan) untuk meningkatkan efisiensi dan nilai ekonomi.

Dampak yang diharapkan adalah peningkatan produktivitas, efisiensi biaya produksi, serta daya saing sektor agromaritim di tingkat regional dan nasional.

2. Penyediaan Benih Unggul, Pakan, dan Sarana Produksi

Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan input produksi yang berkualitas, terjangkau, dan tepat waktu sebagai faktor kunci dalam meningkatkan produktivitas dan kualitas hasil. Benih unggul, pakan berkualitas, serta sarana produksi lainnya menjadi fondasi utama dalam sistem produksi yang efisien.

Strategi implementasi meliputi penguatan sistem produksi dan distribusi benih unggul, pengembangan pakan lokal berbasis sumber daya daerah, serta penyediaan sarana produksi seperti pupuk, alat budidaya, dan sarana pendukung lainnya. Selain itu, dilakukan pengawasan kualitas dan harga agar tetap sesuai standar dan terjangkau.

Program ini juga mendorong kemandirian pelaku usaha dalam memproduksi input secara lokal melalui kelompok tani, koperasi, dan BUMDes. Dengan demikian, ketergantungan terhadap pasokan luar dapat dikurangi.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya produktivitas dan kualitas hasil produksi, efisiensi biaya usaha, serta meningkatnya kemandirian sektor agromaritim.

3. Penguatan SDM Petani, Nelayan, dan Peternak

Program ini difokuskan pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai pelaku utama dalam sektor agromaritim. SDM yang kompeten, adaptif, dan inovatif menjadi kunci dalam menghadapi tantangan perubahan teknologi dan pasar.

Strategi implementasi mencakup penyuluhan berbasis kebutuhan, pelatihan teknis dan manajerial, serta penguatan kewirausahaan. Selain itu, dilakukan pendampingan usaha secara berkelanjutan untuk memastikan penerapan pengetahuan dan teknologi di lapangan.

Program ini juga mendorong regenerasi pelaku usaha dengan melibatkan generasi muda dalam sektor agromaritim melalui program pelatihan, inkubasi bisnis, dan akses terhadap teknologi. Penguatan kelembagaan kelompok tani,

nelayan, dan peternak juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan kapasitas kolektif.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya produktivitas dan profesionalisme pelaku usaha, kemampuan adaptasi terhadap perubahan, serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

4. Pengembangan Budidaya Berbasis Teknologi dan Ramah Lingkungan

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem produksi agromaritim yang tidak hanya produktif, tetapi juga berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pendekatan ini penting untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan produksi dan kelestarian sumber daya alam.

Strategi implementasi mencakup penerapan teknologi budidaya modern seperti smart farming, aquaculture berbasis teknologi, serta sistem peternakan terpadu. Selain itu, dilakukan pengurangan penggunaan bahan kimia melalui pengembangan pertanian organik dan penggunaan input ramah lingkungan.

Program ini juga mendorong efisiensi penggunaan sumber daya seperti air, energi, dan lahan, serta pengelolaan limbah produksi agar tidak mencemari lingkungan. Sertifikasi produk ramah lingkungan juga dikembangkan untuk meningkatkan daya saing di pasar.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas dan keberlanjutan produksi, terjaganya kelestarian lingkungan, serta terbukanya peluang pasar produk bernilai tinggi.

5. Adaptasi Perubahan Iklim Sektor Agromaritim

Program ini diarahkan untuk meningkatkan ketahanan sektor agromaritim terhadap dampak perubahan iklim yang semakin kompleks, seperti perubahan pola musim, kekeringan, banjir, dan peningkatan risiko bencana.

Strategi implementasi meliputi pengembangan varietas tahan iklim ekstrem, penyesuaian pola tanam dan budidaya, serta penerapan praktik pertanian cerdas iklim (climate-smart agriculture). Selain itu, dilakukan pemanfaatan informasi iklim dan sistem peringatan dini dalam pengambilan keputusan usaha.

Program ini juga mencakup penguatan kapasitas pelaku usaha dalam memahami risiko iklim serta penerapan teknologi adaptif. Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan juga menjadi bagian penting dalam mendukung ketahanan iklim.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya ketahanan produksi terhadap perubahan iklim, berkurangnya risiko kerugian, serta terjaganya stabilitas produksi pangan.

II. Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Agromaritim

Hilirisasi dan peningkatan nilai tambah produk agromaritim di Provinsi NTB diarahkan untuk mentransformasi struktur ekonomi dari berbasis produksi primer menuju ekonomi bernilai tambah tinggi, berdaya saing, dan berkelanjutan. Fokus ini menempatkan sektor pertanian, perikanan, dan peternakan tidak hanya sebagai penghasil bahan mentah, tetapi sebagai sumber utama pengembangan industri

pengolahan yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan memperkuat daya saing daerah di pasar nasional maupun global.

Pendekatan pembangunan dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, dengan menghubungkan produksi dengan industri pengolahan, distribusi, dan pemasaran dalam satu ekosistem yang efisien. Hilirisasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi tawar pelaku usaha lokal serta mengurangi ketergantungan terhadap penjualan bahan mentah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Hilirisasi dan Peningkatan Nilai Tambah Produk Agromaritim diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Industri Pengolahan Hasil Pertanian, Perikanan, dan Peternakan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan nilai tambah produk agromaritim melalui pengembangan industri pengolahan berbasis komoditas unggulan daerah. Selama ini, sebagian besar produk masih dijual dalam bentuk bahan mentah, sehingga nilai ekonomi yang diperoleh relatif rendah. Oleh karena itu, hilirisasi menjadi strategi utama untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan pelaku usaha.

Strategi implementasi mencakup pengembangan sentra agroindustri di kawasan produksi, pembangunan fasilitas pengolahan, serta penerapan teknologi pengolahan yang efisien dan berstandar industri. Selain itu, dilakukan penguatan kemitraan antara petani, nelayan, peternak, dan pelaku industri untuk memastikan kesinambungan pasokan bahan baku.

Program ini juga mendorong diversifikasi produk olahan berbasis potensi lokal, seperti pengolahan hasil laut, olahan daging, serta produk berbasis tanaman pangan dan hortikultura. Dukungan pembiayaan dan insentif investasi juga diberikan untuk menarik pelaku usaha masuk ke sektor pengolahan.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya nilai tambah produk, terciptanya lapangan kerja baru, serta tumbuhnya industri berbasis sumber daya lokal yang berdaya saing tinggi.

2. Penguatan UMKM Agroindustri dan Industri Rumah Tangga

Program ini diarahkan untuk memperkuat peran UMKM sebagai tulang punggung ekonomi daerah, khususnya dalam sektor agroindustri. UMKM memiliki peran penting dalam menyerap tenaga kerja dan menggerakkan ekonomi lokal, namun masih menghadapi berbagai kendala seperti keterbatasan modal, teknologi, dan akses pasar.

Strategi implementasi mencakup peningkatan kapasitas pelaku UMKM melalui pelatihan manajemen usaha, peningkatan kualitas produksi, serta penguatan kewirausahaan. Selain itu, dilakukan pendampingan usaha secara berkelanjutan untuk memastikan UMKM mampu berkembang dan naik kelas.

Program ini juga mendorong penguatan kelembagaan UMKM melalui koperasi dan BUMDes sebagai agregator usaha, serta fasilitasi akses pembiayaan dan

kemitraan dengan sektor swasta. Pengembangan klaster UMKM berbasis komoditas juga menjadi fokus untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas dan daya tahan UMKM, bertambahnya jumlah usaha yang berkembang, serta meningkatnya kontribusi UMKM terhadap perekonomian daerah.

3. Standarisasi dan Sertifikasi Produk (Halal, Mutu, Ekspor)

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal melalui penerapan standar mutu dan sertifikasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Standarisasi menjadi syarat utama untuk memasuki pasar yang lebih luas, termasuk pasar ekspor.

Strategi implementasi mencakup fasilitasi sertifikasi halal, standar mutu (SNI), serta sertifikasi ekspor sesuai dengan persyaratan negara tujuan. Selain itu, dilakukan peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memenuhi standar produksi, keamanan pangan, serta sistem manajemen mutu.

Program ini juga mendorong penguatan lembaga pendukung seperti laboratorium uji mutu dan lembaga sertifikasi. Pendampingan teknis diberikan agar pelaku usaha mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas produk, terbukanya akses ke pasar yang lebih luas, serta meningkatnya kepercayaan konsumen terhadap produk lokal.

4. Pengembangan Kemasan dan Branding Produk Lokal

Program ini diarahkan untuk meningkatkan daya tarik dan nilai jual produk lokal melalui pengembangan kemasan dan branding yang lebih profesional. Kemasan dan branding menjadi faktor penting dalam meningkatkan daya saing produk, terutama di pasar modern dan digital.

Strategi implementasi mencakup pelatihan desain kemasan, pengembangan identitas merek, serta penggunaan bahan kemasan yang ramah lingkungan dan sesuai standar. Selain itu, dilakukan pendampingan dalam strategi pemasaran dan storytelling produk untuk memperkuat citra produk lokal.

Program ini juga mendorong pemanfaatan teknologi digital dalam promosi dan branding, termasuk penggunaan media sosial dan platform e-commerce. Kolaborasi dengan desainer dan pelaku industri kreatif juga diperkuat.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya daya saing produk, meningkatnya minat konsumen, serta penguatan identitas produk lokal di pasar.

5. Peningkatan Akses Pasar Domestik dan Ekspor

Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan pemasaran produk lokal, baik di pasar domestik maupun internasional. Akses pasar yang luas menjadi kunci dalam meningkatkan volume penjualan dan keberlanjutan usaha.

Strategi implementasi mencakup fasilitasi keikutsertaan dalam pameran, promosi produk, serta pengembangan platform pemasaran digital. Selain itu, dilakukan penguatan jaringan distribusi dan kemitraan dengan pelaku usaha besar, retail modern, serta eksportir.

Program ini juga mendorong pengembangan sistem logistik yang efisien untuk mendukung distribusi produk ke berbagai wilayah. Dukungan regulasi dan kebijakan juga diberikan untuk mempermudah akses pasar ekspor.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya volume penjualan, perluasan pasar produk lokal, serta meningkatnya kontribusi ekspor terhadap perekonomian daerah.

III. Peningkatan Akses Pembiayaan dan Investasi

Peningkatan akses pembiayaan dan investasi di Provinsi NTB diarahkan untuk memperkuat fondasi pertumbuhan ekonomi daerah melalui penyediaan sumber pendanaan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya ungkit tinggi. Fokus ini menjadi kunci dalam mendorong percepatan pembangunan sektor-sektor prioritas seperti agromaritim, pariwisata, UMKM, dan ekonomi kreatif, sekaligus memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pendekatan pembangunan dilakukan dengan mengintegrasikan berbagai sumber pembiayaan—baik dari pemerintah, lembaga keuangan, maupun sektor swasta—dalam satu ekosistem yang efisien, transparan, dan mudah diakses. Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah melalui perbaikan iklim usaha, penyederhanaan regulasi, serta penguatan kelembagaan ekonomi.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Peningkatan Akses Pembiayaan dan Investasi diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Fasilitasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Mikro

Program ini bertujuan untuk memperluas akses permodalan bagi pelaku usaha agromaritim—khususnya petani, nelayan, peternak, dan UMKM—yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal. Ketersediaan pembiayaan yang terjangkau dan mudah diakses menjadi faktor penting dalam meningkatkan kapasitas produksi dan skala usaha.

Strategi implementasi diarahkan pada optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta pembiayaan mikro melalui kerja sama dengan perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan koperasi. Pemerintah berperan dalam memfasilitasi akses, memberikan subsidi bunga, serta memperkuat skema penjaminan kredit guna menurunkan risiko bagi lembaga pembiayaan.

Intervensi juga mencakup peningkatan literasi keuangan bagi pelaku usaha, pendampingan dalam penyusunan proposal usaha, serta integrasi pembiayaan dengan program pendampingan teknis. Selain itu, dilakukan digitalisasi layanan keuangan untuk menjangkau wilayah terpencil.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya akses pembiayaan, berkembangnya usaha produktif, serta meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan pelaku usaha agromaritim.

2. Skema Pembiayaan Inovatif untuk Petani dan Nelayan

Program ini diarahkan untuk mengembangkan alternatif pembiayaan yang lebih fleksibel dan sesuai dengan karakteristik usaha di sektor agromaritim yang memiliki risiko tinggi dan siklus usaha yang khas. Skema pembiayaan inovatif menjadi solusi

untuk menjangkau pelaku usaha yang belum terlayani oleh sistem perbankan konvensional.

Strategi implementasi mencakup pengembangan pembiayaan berbasis kelompok (group lending), pembiayaan syariah, kemitraan usaha (off-taker financing), serta pemanfaatan teknologi finansial (fintech). Selain itu, dikembangkan skema pembiayaan berbasis hasil (revenue-based financing) yang lebih adaptif terhadap fluktuasi pendapatan pelaku usaha.

Program ini juga mendorong integrasi pembiayaan dengan asuransi usaha tani dan nelayan untuk mengurangi risiko gagal usaha. Pemerintah berperan dalam memberikan insentif, regulasi pendukung, serta fasilitasi kemitraan antara pelaku usaha dan lembaga pembiayaan.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya inklusi keuangan, berkurangnya ketergantungan pada pembiayaan informal, serta meningkatnya keberlanjutan usaha di sektor agromaritim.

3. Promosi Investasi Sektor Agromaritim

Program ini bertujuan untuk menarik investasi ke sektor agromaritim sebagai upaya mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pengembangan industri berbasis sumber daya lokal. Investasi menjadi katalis penting dalam pengembangan infrastruktur, teknologi, dan kapasitas produksi.

Strategi implementasi mencakup penyusunan profil investasi daerah, promosi potensi unggulan NTB di tingkat nasional dan internasional, serta penyelenggaraan forum investasi dan business matching. Selain itu, dilakukan pengembangan kawasan investasi terpadu yang siap menerima investor.

Program ini juga mendorong kemitraan antara investor dengan pelaku usaha lokal untuk memastikan manfaat ekonomi dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. Dukungan insentif investasi serta kepastian regulasi menjadi bagian penting dalam menarik minat investor.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya investasi di sektor agromaritim, terciptanya lapangan kerja, serta percepatan transformasi ekonomi daerah.

4. Kemudahan Perizinan Usaha dan Investasi

Program ini diarahkan untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui penyederhanaan dan percepatan proses perizinan. Kemudahan perizinan menjadi faktor kunci dalam menarik investasi dan mendorong pertumbuhan usaha.

Strategi implementasi mencakup digitalisasi layanan perizinan melalui sistem online, penyederhanaan regulasi, serta pengurangan biaya dan waktu pengurusan izin. Selain itu, dilakukan penguatan layanan terpadu satu pintu (PTSP) untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi.

Program ini juga mendorong penerapan prinsip kemudahan berusaha (ease of doing business) serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Pendampingan kepada pelaku usaha juga dilakukan untuk membantu proses legalitas usaha.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah usaha formal, bertambahnya investasi, serta terciptanya iklim usaha yang lebih kompetitif dan transparan.

5. Penguatan Kelembagaan Ekonomi (Koperasi, BUMDes)

Program ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan ekonomi berbasis masyarakat sebagai pilar utama dalam pengembangan ekonomi lokal. Koperasi dan BUMDes memiliki peran strategis dalam mengelola usaha kolektif, meningkatkan akses pasar, serta memperkuat posisi tawar pelaku usaha.

Strategi implementasi mencakup peningkatan kapasitas manajerial, penguatan tata kelola, serta pengembangan unit usaha produktif yang berbasis potensi lokal. Selain itu, dilakukan fasilitasi akses pembiayaan, kemitraan dengan sektor swasta, serta penguatan jaringan usaha.

Program ini juga mendorong koperasi dan BUMDes untuk berperan sebagai agregator dalam rantai nilai agromaritim, mulai dari pengumpulan, pengolahan, hingga pemasaran produk. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan kelembagaan juga menjadi fokus utama.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kinerja kelembagaan ekonomi, meningkatnya kesejahteraan anggota, serta terciptanya ekonomi lokal yang lebih mandiri dan berkelanjutan.

IV. Penguatan SDM dan Kelembagaan Agromaritim

Penguatan SDM dan kelembagaan agromaritim di Provinsi NTB diarahkan untuk membangun fondasi sektor agromaritim yang profesional, adaptif, inovatif, dan berdaya saing tinggi, sebagai pilar utama dalam mendukung ketahanan pangan, hilirisasi, dan pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal. Fokus ini menempatkan petani, nelayan, dan peternak sebagai aktor utama pembangunan, yang didukung oleh kelembagaan ekonomi dan tata kelola yang kuat.

Pendekatan pembangunan dilakukan secara terintegrasi antara peningkatan kapasitas individu dan penguatan kelembagaan kolektif, sehingga mampu menciptakan ekosistem agromaritim yang produktif, efisien, dan berkelanjutan. Selain itu, transformasi SDM diarahkan untuk menjawab tantangan global seperti digitalisasi, perubahan iklim, dan persaingan pasar.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Penguatan SDM dan Kelembagaan Agromaritim diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Pelatihan Teknis dan Manajerial Petani, Nelayan, dan Pelaku Usaha

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial pelaku usaha agromaritim agar mampu mengelola usaha secara produktif, efisien, dan berdaya saing. Tantangan utama yang dihadapi saat ini adalah masih terbatasnya penguasaan teknologi, manajemen usaha, serta akses terhadap informasi pasar.

Strategi implementasi mencakup penyelenggaraan pelatihan berbasis kebutuhan (demand-driven training) yang meliputi teknik budidaya modern, pengolahan hasil, manajemen usaha, serta pemasaran. Pelatihan juga diarahkan pada peningkatan kemampuan analisis usaha, pencatatan keuangan, dan pengelolaan risiko.

Intervensi dilakukan melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan, penyuluh, dunia usaha, serta praktisi industri. Metode pelatihan mengedepankan pendekatan praktik langsung (learning by doing) dan berbasis teknologi digital.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kapasitas teknis dan manajerial pelaku usaha, efisiensi usaha, serta peningkatan produktivitas dan pendapatan.

2. Penguatan Kelompok Tani, Nelayan, dan Koperasi

Program ini diarahkan untuk memperkuat kelembagaan pelaku usaha sebagai wadah kolektif dalam meningkatkan efisiensi, akses terhadap sumber daya, serta posisi tawar di pasar. Kelembagaan yang kuat menjadi kunci dalam pengembangan ekonomi berbasis komunitas.

Strategi implementasi mencakup peningkatan kapasitas organisasi, penguatan tata kelola, serta pengembangan unit usaha produktif di tingkat kelompok. Selain itu, dilakukan fasilitasi legalitas kelembagaan dan penguatan peran koperasi sebagai agregator dalam rantai nilai.

Intervensi juga meliputi penguatan jaringan kemitraan dengan sektor swasta, lembaga keuangan, serta pemerintah. Kelompok tani dan nelayan didorong untuk bertransformasi menjadi kelembagaan ekonomi yang profesional dan berkelanjutan.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya efisiensi usaha kolektif, akses terhadap pasar dan pembiayaan, serta meningkatnya kesejahteraan anggota.

3. Pendampingan Usaha dan Inkubasi Bisnis

Program ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan usaha melalui pendampingan yang intensif dan terarah. Pendampingan menjadi penting karena banyak pelaku usaha yang mengalami kesulitan dalam mengembangkan usaha secara mandiri.

Strategi implementasi mencakup penyediaan tenaga pendamping yang kompeten, pengembangan program inkubasi bisnis, serta fasilitasi akses terhadap teknologi, pembiayaan, dan pasar. Inkubasi bisnis difokuskan pada pengembangan usaha baru maupun penguatan usaha yang sudah ada agar mampu naik kelas.

Program ini juga mendorong kolaborasi dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan sektor swasta untuk mendukung inovasi usaha. Pendampingan dilakukan secara berkelanjutan dengan pendekatan berbasis kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya keberhasilan usaha, berkembangnya wirausaha baru, serta meningkatnya kontribusi sektor agromaritim terhadap perekonomian daerah.

4. Peningkatan Literasi Keuangan dan Digital

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemahaman pelaku usaha terhadap pengelolaan keuangan dan pemanfaatan teknologi digital sebagai alat pendukung usaha. Literasi yang rendah sering menjadi hambatan dalam pengembangan usaha dan akses terhadap layanan keuangan.

Strategi implementasi mencakup edukasi pengelolaan keuangan, pemanfaatan layanan perbankan, serta penggunaan platform digital untuk pemasaran dan transaksi. Selain itu, dilakukan pelatihan penggunaan aplikasi keuangan, e-commerce, dan sistem informasi usaha.

Program ini juga mendorong inklusi keuangan melalui integrasi dengan program pembiayaan serta penguatan akses terhadap layanan keuangan digital.

Pendampingan dilakukan untuk memastikan penerapan pengetahuan yang diperoleh.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kemampuan pengelolaan keuangan, efisiensi usaha, serta perluasan akses pasar melalui digitalisasi.

5. Regenerasi Pelaku Usaha Sektor Agromaritim

Program ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan sektor agromaritim melalui keterlibatan generasi muda sebagai pelaku usaha baru. Saat ini, sektor ini masih didominasi oleh pelaku usaha berusia lanjut, sehingga diperlukan upaya regenerasi yang sistematis.

Strategi implementasi mencakup penyediaan program pelatihan khusus bagi generasi muda, pengembangan inkubasi bisnis berbasis startup, serta pemberian insentif dan akses pembiayaan bagi wirausaha muda. Selain itu, dilakukan promosi sektor agromaritim sebagai sektor yang modern dan menjanjikan.

Program ini juga mendorong integrasi teknologi dan inovasi sebagai daya tarik bagi generasi muda. Kolaborasi dengan dunia pendidikan dan komunitas kreatif menjadi bagian penting dalam mendorong minat generasi muda.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah pelaku usaha muda, terjadinya transfer pengetahuan dan inovasi, serta terjaganya keberlanjutan sektor agromaritim.

D. Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan

I. Pengembangan Destinasi Pariwisata Unggulan Berkelas Dunia

Pengembangan destinasi pariwisata unggulan berkelas dunia di Provinsi NTB diarahkan untuk mewujudkan sektor pariwisata sebagai leading sector yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara inklusif dan berkelanjutan. Fokus ini menempatkan NTB sebagai destinasi pariwisata global yang memiliki daya tarik unik, kualitas layanan tinggi, serta berdaya saing internasional.

Pendekatan pembangunan dilakukan melalui penguatan 3A (Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas) secara terpadu, didukung oleh penguatan SDM, digitalisasi, serta keberlanjutan lingkungan dan budaya. Selain itu, pengembangan destinasi juga diarahkan untuk menciptakan pengalaman wisata yang berkualitas, autentik, dan berkesan bagi wisatawan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Penataan dan Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata

Program ini bertujuan untuk mengoptimalkan pengembangan kawasan strategis pariwisata sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang terintegrasi, berdaya saing, dan berkelanjutan. Kawasan strategis tidak hanya dikembangkan sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai ekosistem ekonomi yang menghubungkan sektor pariwisata dengan UMKM, ekonomi kreatif, dan sektor pendukung lainnya.

Strategi implementasi mencakup penataan ruang kawasan wisata secara terpadu, penguatan infrastruktur dasar, serta pengendalian pemanfaatan ruang agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya lokal. Selain itu, dilakukan pengembangan zonasi kawasan wisata yang jelas, termasuk kawasan inti, penyangga, dan kawasan pengembangan.

Intervensi juga meliputi peningkatan kualitas tata kelola kawasan melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha. Pendekatan berbasis kawasan (area-based development) memastikan bahwa setiap destinasi berkembang secara terarah dan terintegrasi.

Dampak yang diharapkan adalah terciptanya kawasan wisata yang tertata, berkelanjutan, serta mampu menarik investasi dan meningkatkan kunjungan wisatawan.

2. Peningkatan Kualitas Amenitas, Atraksi, dan Aksesibilitas (3A)

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengalaman wisata melalui penguatan tiga komponen utama pariwisata, yaitu amenitas (fasilitas), atraksi (daya tarik), dan aksesibilitas (kemudahan akses). Ketiga aspek ini menjadi faktor kunci dalam menentukan daya saing destinasi.

Strategi implementasi mencakup peningkatan kualitas fasilitas pendukung seperti akomodasi, restoran, pusat informasi wisata, serta fasilitas umum lainnya. Pada aspek atraksi, dilakukan pengembangan dan diversifikasi daya tarik wisata berbasis alam, budaya, dan buatan, termasuk event dan festival.

Sementara itu, peningkatan aksesibilitas dilakukan melalui pengembangan infrastruktur transportasi, konektivitas antar destinasi, serta kemudahan akses informasi bagi wisatawan. Integrasi antar komponen 3A menjadi fokus utama agar tercipta pengalaman wisata yang nyaman dan berkesan.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kepuasan wisatawan, lama tinggal (length of stay), serta peningkatan jumlah kunjungan wisata.

3. Pengembangan Destinasi Super Prioritas dan Destinasi Unggulan Daerah

Program ini bertujuan untuk mempercepat pengembangan destinasi unggulan yang memiliki potensi besar sebagai penggerak utama pariwisata daerah. Destinasi super prioritas menjadi fokus utama dalam menarik wisatawan nasional maupun internasional.

Strategi implementasi mencakup percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan daya tarik wisata, serta peningkatan kualitas layanan di destinasi prioritas. Selain itu, dilakukan pengembangan destinasi unggulan daerah sebagai penyangga untuk menciptakan pemerataan manfaat pariwisata.

Program ini juga mendorong sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta keterlibatan sektor swasta dalam pengembangan destinasi. Pendekatan berbasis klaster digunakan untuk mengintegrasikan berbagai destinasi dalam satu jaringan wisata.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya daya tarik destinasi, meningkatnya kunjungan wisatawan, serta pemerataan manfaat ekonomi pariwisata.

4. Standarisasi dan Sertifikasi Destinasi Wisata

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan daya saing destinasi melalui penerapan standar pelayanan dan pengelolaan yang profesional. Standarisasi menjadi penting untuk menjamin keamanan, kenyamanan, dan kepuasan wisatawan.

Strategi implementasi mencakup penerapan standar nasional dan internasional dalam pengelolaan destinasi, termasuk standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE). Selain itu, dilakukan sertifikasi bagi pelaku usaha pariwisata dan destinasi wisata.

Program ini juga mendorong peningkatan kapasitas pengelola destinasi melalui pelatihan dan pendampingan. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi dilakukan untuk memastikan standar yang telah ditetapkan dapat diterapkan secara konsisten.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas layanan, kepercayaan wisatawan, serta daya saing destinasi di pasar global.

5. Penguatan Branding dan Positioning Pariwisata NTB

Program ini bertujuan untuk memperkuat citra dan identitas pariwisata NTB sebagai destinasi yang unik, berdaya saing, dan berkelas dunia. Branding yang kuat menjadi kunci dalam menarik wisatawan dan meningkatkan daya saing di tengah persaingan global.

Strategi implementasi mencakup pengembangan strategi komunikasi pemasaran terpadu, pemanfaatan media digital, serta penyelenggaraan promosi dan kampanye pariwisata yang kreatif dan inovatif. Selain itu, dilakukan penguatan storytelling berbasis keunikan budaya, alam, dan kearifan lokal NTB.

Program ini juga mendorong kolaborasi dengan influencer, media, dan pelaku industri pariwisata untuk memperluas jangkauan promosi. Positioning NTB sebagai destinasi pariwisata berkualitas dan berkelanjutan menjadi fokus utama.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya citra positif NTB, meningkatnya kunjungan wisatawan, serta meningkatnya kontribusi sektor pariwisata terhadap perekonomian daerah.

II. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wisata

Pemberdayaan masyarakat dan pengembangan desa wisata di Provinsi NTB diarahkan untuk mewujudkan pariwisata yang inklusif, berbasis komunitas, dan berkelanjutan, dengan menempatkan masyarakat sebagai pelaku utama sekaligus penerima manfaat pembangunan. Fokus ini menjadi strategi penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan sektor pariwisata tidak hanya terpusat pada kawasan tertentu, tetapi juga mampu mendorong pemerataan ekonomi hingga ke tingkat desa.

Pendekatan pembangunan dilakukan melalui integrasi antara pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelestarian budaya lokal, dan penguatan kelembagaan desa, sehingga desa wisata tidak hanya menjadi destinasi, tetapi juga menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berbasis potensi lokal. Selain itu, pengembangan desa wisata diarahkan untuk menciptakan pengalaman wisata yang autentik, unik, dan berdaya saing.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Wisata diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Desa Wisata Berbasis Potensi Lokal

Program ini bertujuan untuk mendorong desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui pengembangan pariwisata berbasis potensi lokal, baik sumber daya alam, budaya, maupun kearifan lokal. Desa wisata tidak hanya menjadi destinasi kunjungan, tetapi juga menjadi ruang pemberdayaan masyarakat yang berkelanjutan.

Strategi implementasi dilakukan melalui identifikasi dan pengembangan potensi unggulan desa, seperti wisata alam, budaya, kuliner, dan kerajinan. Penataan desa wisata diarahkan pada penguatan daya tarik yang autentik, menjaga kelestarian lingkungan, serta mempertahankan nilai-nilai budaya lokal.

Intervensi mencakup penyediaan infrastruktur dasar, pengembangan paket wisata, serta integrasi desa wisata dalam jaringan destinasi regional. Pendekatan partisipatif menjadi kunci, di mana masyarakat menjadi pelaku utama dalam pengelolaan dan pengembangan desa wisata.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat desa, terciptanya lapangan kerja lokal, serta terjaganya kelestarian budaya dan lingkungan.

2. Pelibatan UMKM dan Ekonomi Kreatif dalam Rantai Pariwisata

Program ini diarahkan untuk memperkuat keterkaitan antara sektor pariwisata dengan UMKM dan ekonomi kreatif, sehingga manfaat ekonomi pariwisata dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat. UMKM dan pelaku ekonomi kreatif menjadi bagian penting dalam menyediakan produk dan layanan yang mendukung pengalaman wisata.

Strategi implementasi mencakup pengembangan produk lokal seperti kuliner, kerajinan, dan produk kreatif yang memiliki nilai jual tinggi. Selain itu, dilakukan integrasi UMKM dalam rantai pasok pariwisata, seperti penyediaan suvenir, jasa kuliner, dan layanan pendukung lainnya.

Intervensi juga meliputi pelatihan peningkatan kualitas produk, pengembangan kemasan, serta fasilitasi akses pasar melalui platform digital dan jaringan distribusi. Kemitraan antara pelaku usaha pariwisata dan UMKM juga diperkuat.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan UMKM, berkembangnya ekonomi kreatif, serta meningkatnya nilai tambah sektor pariwisata.

3. Penguatan Kelembagaan Desa Wisata (Pokdarwis)

Program ini bertujuan untuk memperkuat kelembagaan pengelola desa wisata melalui penguatan kelompok sadar wisata (Pokdarwis) sebagai aktor utama dalam pengelolaan destinasi. Kelembagaan yang kuat menjadi kunci dalam memastikan pengelolaan yang profesional dan berkelanjutan.

Strategi implementasi mencakup peningkatan kapasitas organisasi, penguatan tata kelola, serta pengembangan sistem manajemen destinasi yang efektif. Selain itu,

dilakukan fasilitasi legalitas dan penguatan peran Pokdarwis dalam pengambilan keputusan.

Intervensi juga meliputi penguatan jejaring antar desa wisata, kemitraan dengan pemerintah dan sektor swasta, serta pengembangan unit usaha berbasis komunitas. Transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan menjadi fokus utama.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas pengelolaan desa wisata, keberlanjutan program, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat dan wisatawan.

4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat dalam Layanan Wisata

Program ini diarahkan untuk meningkatkan kualitas layanan pariwisata melalui peningkatan kapasitas masyarakat sebagai pelaku utama. Kualitas layanan menjadi faktor penting dalam menciptakan pengalaman wisata yang positif dan berkesan.

Strategi implementasi mencakup pelatihan pelayanan wisata (hospitality), pemandu wisata, pengelolaan homestay, serta kemampuan komunikasi dan bahasa asing. בנוסף, dilakukan pelatihan standar kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan (CHSE).

Intervensi juga melibatkan pendampingan berkelanjutan untuk memastikan penerapan standar layanan di lapangan. Kolaborasi dengan lembaga pendidikan dan pelaku industri pariwisata juga diperkuat.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas layanan, kepuasan wisatawan, serta meningkatnya daya saing destinasi.

5. Penguatan Ekonomi Lokal Berbasis Pariwisata

Program ini bertujuan untuk menjadikan pariwisata sebagai penggerak utama ekonomi lokal melalui pengembangan usaha produktif yang berbasis potensi daerah. Pariwisata tidak hanya menghasilkan pendapatan langsung, tetapi juga menciptakan multiplier effect bagi sektor lain. Strategi implementasi mencakup pengembangan usaha berbasis pariwisata seperti homestay, kuliner, transportasi lokal, serta jasa wisata lainnya. בנוסף, dilakukan penguatan rantai nilai ekonomi lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata.

Intervensi juga meliputi fasilitasi akses pembiayaan, penguatan kelembagaan ekonomi lokal, serta pengembangan sistem pemasaran yang terintegrasi. Program ini juga mendorong keberlanjutan usaha melalui pengelolaan yang ramah lingkungan dan berbasis komunitas. Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya pendapatan masyarakat, berkembangnya usaha lokal, serta terciptanya ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

III. Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata

Pengembangan ekonomi kreatif berbasis pariwisata di Provinsi NTB diarahkan untuk membangun ekosistem ekonomi yang inovatif, bernilai tambah tinggi, berbasis budaya lokal, dan berdaya saing global, dengan menjadikan sektor pariwisata sebagai pengungkit utama pertumbuhan subsektor ekonomi kreatif. Fokus ini menempatkan ekonomi kreatif tidak hanya sebagai pelengkap pariwisata, tetapi sebagai sumber utama pengalaman wisata (experience economy) yang

mampu meningkatkan lama tinggal wisatawan, pengeluaran wisatawan (tourist spending), serta pemerataan manfaat ekonomi.

Pendekatan pembangunan dilakukan melalui integrasi kreativitas, budaya, teknologi, dan kewirausahaan, sehingga tercipta produk dan layanan yang unik, autentik, dan memiliki identitas kuat. Selain itu, pengembangan ekonomi kreatif juga diarahkan untuk memperkuat keterkaitan dengan sektor UMKM, industri agromaritim, serta desa wisata, sehingga terbentuk rantai nilai yang inklusif dan berkelanjutan.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Pariwisata diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Pengembangan Produk Kreatif (Kuliner, Kriya, Fesyen, dll.)

Program ini bertujuan untuk mendorong penciptaan dan pengembangan produk ekonomi kreatif yang inovatif, bernilai tambah tinggi, serta memiliki identitas lokal yang kuat. Sektor kuliner, kriya, dan fesyen menjadi unggulan karena berbasis pada kekayaan budaya dan sumber daya lokal NTB.

Strategi implementasi diarahkan pada penguatan proses kreatif mulai dari ide, desain, hingga produksi. Pengembangan produk dilakukan dengan mengedepankan inovasi, kualitas, dan diferensiasi agar mampu bersaing di pasar yang semakin kompetitif. Selain itu, pemanfaatan bahan baku lokal didorong untuk memperkuat karakter produk sekaligus meningkatkan nilai ekonomi daerah.

Intervensi mencakup pelatihan desain dan inovasi produk, fasilitasi akses terhadap teknologi produksi, serta kolaborasi dengan desainer dan pelaku industri kreatif. Program ini juga mendorong perlindungan kekayaan intelektual untuk menjaga keaslian produk.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas dan variasi produk kreatif, meningkatnya daya saing produk lokal, serta bertambahnya peluang usaha dan lapangan kerja.

2. Inkubasi dan Pendampingan Pelaku Ekonomi Kreatif

Program ini bertujuan untuk mempercepat pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif melalui proses inkubasi dan pendampingan yang terstruktur dan berkelanjutan. Banyak pelaku ekraf yang memiliki potensi, namun belum mampu mengembangkan usaha secara optimal karena keterbatasan kapasitas dan akses.

Strategi implementasi mencakup pengembangan program inkubasi bisnis yang menyediakan pelatihan, mentoring, serta fasilitasi akses terhadap pembiayaan dan pasar. Inkubasi difokuskan pada pengembangan model bisnis, peningkatan kapasitas produksi, serta strategi pemasaran.

Intervensi juga melibatkan kolaborasi dengan perguruan tinggi, komunitas kreatif, dan sektor swasta untuk mendukung inovasi dan pengembangan usaha. Pendampingan dilakukan secara intensif sesuai dengan kebutuhan masing-masing pelaku usaha.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya jumlah usaha kreatif yang berkembang, terciptanya wirausaha baru, serta meningkatnya kontribusi sektor ekonomi kreatif terhadap perekonomian daerah.

3. Digitalisasi Pemasaran Produk Ekraf

Program ini diarahkan untuk memperluas jangkauan pasar produk ekonomi kreatif melalui pemanfaatan teknologi digital. Digitalisasi menjadi kunci dalam meningkatkan akses pasar, efisiensi pemasaran, serta daya saing produk di era ekonomi digital.

Strategi implementasi mencakup pelatihan pemasaran digital, pemanfaatan platform e-commerce, serta penggunaan media sosial sebagai sarana promosi. Selain itu, dilakukan pengembangan platform digital lokal untuk mendukung pemasaran produk ekraf.

Intervensi juga meliputi peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam pengelolaan konten digital, branding online, serta transaksi elektronik. Program ini mendorong integrasi dengan sistem logistik untuk mendukung distribusi produk secara efisien.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya akses pasar, peningkatan volume penjualan, serta meningkatnya daya saing produk kreatif di pasar nasional dan global.

4. Penguatan Branding Produk Lokal

Program ini bertujuan untuk membangun citra dan identitas produk lokal NTB yang kuat dan mudah dikenali oleh konsumen. Branding menjadi elemen penting dalam meningkatkan nilai jual dan daya saing produk di pasar.

Strategi implementasi mencakup pengembangan identitas merek, desain kemasan yang menarik, serta storytelling yang mengangkat nilai budaya dan keunikan produk. Selain itu, dilakukan kampanye promosi yang terintegrasi untuk memperkuat positioning produk di pasar.

Intervensi juga melibatkan kolaborasi dengan desainer, media, dan influencer untuk memperluas jangkauan promosi. Program ini mendorong penggunaan standar kemasan yang berkualitas dan ramah lingkungan.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya daya tarik produk, meningkatnya kepercayaan konsumen, serta penguatan posisi produk lokal di pasar.

5. Pengembangan Event Berbasis Budaya dan Kreativitas

Program ini diarahkan untuk mendorong pengembangan event sebagai sarana promosi, pemasaran, serta penguatan identitas budaya daerah. Event berbasis budaya dan kreativitas menjadi daya tarik wisata sekaligus wadah ekspresi bagi pelaku ekonomi kreatif.

Strategi implementasi mencakup penyelenggaraan festival, pameran, dan kegiatan kreatif yang melibatkan berbagai pelaku ekraf. Event dirancang secara profesional dan berkelanjutan agar mampu menarik wisatawan dan investor.

Intervensi juga meliputi penguatan kapasitas penyelenggara event, pengembangan konsep kreatif, serta promosi melalui berbagai media. Program ini juga mendorong kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas dan dampak event.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kunjungan wisata, meningkatnya promosi produk lokal, serta penguatan identitas budaya dan kreativitas daerah.

IV. Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Destinasi

Penguatan infrastruktur dan konektivitas destinasi di Provinsi NTB diarahkan untuk menciptakan sistem pariwisata yang terhubung, mudah diakses, nyaman, dan berstandar internasional, sehingga mampu meningkatkan daya saing destinasi serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara merata. Infrastruktur dan konektivitas menjadi fondasi utama dalam memastikan kelancaran mobilitas wisatawan, distribusi logistik pariwisata, serta integrasi antar destinasi dalam satu ekosistem yang efisien.

Pendekatan pembangunan dilakukan melalui integrasi infrastruktur fisik, konektivitas transportasi, serta konektivitas digital, dengan memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan inklusivitas. Selain itu, penguatan konektivitas juga diarahkan untuk membuka akses ke destinasi baru (emerging destinations), mempercepat pengembangan kawasan prioritas, serta mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Destinasi diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Pembangunan dan Peningkatan Jalan Menuju Destinasi Wisata

Program ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata melalui pembangunan dan peningkatan kualitas jaringan jalan. Akses jalan yang baik menjadi faktor utama dalam menarik kunjungan wisatawan serta memperlancar distribusi barang dan jasa ke kawasan wisata.

Strategi implementasi mencakup pembangunan jalan baru menuju destinasi potensial, peningkatan kualitas jalan eksisting, serta pemeliharaan rutin untuk memastikan kondisi tetap layak. Prioritas diberikan pada konektivitas antara pusat-pusat transportasi (bandara, pelabuhan) dengan destinasi wisata unggulan.

Intervensi juga meliputi pembangunan jalan ramah lingkungan, penyediaan rambu dan fasilitas keselamatan, serta integrasi dengan sistem transportasi lainnya. Pendekatan berbasis kawasan dilakukan agar pengembangan infrastruktur sejalan dengan rencana tata ruang.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya aksesibilitas, menurunnya waktu tempuh, serta meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan.

2. Pengembangan Transportasi Wisata dan Konektivitas Antar Pulau

Program ini diarahkan untuk memperkuat sistem transportasi wisata yang terintegrasi dan mendukung mobilitas wisatawan antar destinasi, termasuk antar pulau. NTB sebagai wilayah kepulauan membutuhkan sistem transportasi yang efisien dan terjangkau.

Strategi implementasi mencakup pengembangan moda transportasi darat, laut, dan udara yang mendukung pariwisata, termasuk penyediaan transportasi khusus wisata. Selain itu, dilakukan penguatan konektivitas antar pulau melalui peningkatan layanan pelabuhan, kapal penyeberangan, dan rute transportasi.

Intervensi juga meliputi peningkatan kualitas layanan transportasi, keamanan, serta kenyamanan bagi wisatawan. Integrasi jadwal dan sistem tiket juga didorong untuk mempermudah perjalanan wisata.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya mobilitas wisatawan, terbukanya akses ke destinasi baru, serta pemerataan kunjungan wisata.

3. Penyediaan Infrastruktur Dasar (Air, Sanitasi, Listrik, Internet)

Program ini bertujuan untuk memastikan ketersediaan infrastruktur dasar yang memadai di kawasan wisata sebagai prasyarat utama dalam memberikan pengalaman wisata yang berkualitas. Infrastruktur dasar yang baik juga mendukung keberlanjutan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Strategi implementasi mencakup penyediaan air bersih, pembangunan sistem sanitasi yang layak, penyediaan listrik yang stabil, serta penguatan jaringan internet di kawasan wisata. Prioritas diberikan pada destinasi unggulan dan kawasan dengan potensi pengembangan tinggi.

Intervensi juga meliputi penerapan teknologi ramah lingkungan, seperti energi terbarukan dan pengelolaan limbah yang berkelanjutan. Selain itu, dilakukan penguatan kapasitas pengelolaan infrastruktur oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas layanan wisata, kenyamanan wisatawan, serta terjaganya kebersihan dan kelestarian lingkungan.

4. Penataan Kawasan Wisata Berbasis Tata Ruang

Program ini diarahkan untuk memastikan pengembangan kawasan wisata dilakukan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan melalui pendekatan tata ruang. Penataan kawasan menjadi penting untuk mencegah pembangunan yang tidak terkendali dan menjaga keseimbangan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Strategi implementasi mencakup penyusunan dan penegakan rencana tata ruang kawasan wisata, penetapan zonasi (zona inti, penyangga, dan pengembangan), serta pengendalian pemanfaatan ruang. Selain itu, dilakukan penataan kawasan agar lebih tertib, estetis, dan ramah lingkungan.

Intervensi juga meliputi revitalisasi kawasan wisata, penataan fasilitas umum, serta penguatan regulasi dan pengawasan. Partisipasi masyarakat dan pelaku usaha menjadi bagian penting dalam proses penataan.

Dampak yang diharapkan adalah terciptanya kawasan wisata yang tertata, berkelanjutan, serta memiliki daya tarik yang tinggi.

5. Pengembangan Smart Tourism Berbasis Digital

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman wisata melalui pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan dan promosi pariwisata. Smart tourism menjadi strategi penting dalam menghadapi era digital dan meningkatkan daya saing destinasi.

Strategi implementasi mencakup pengembangan platform digital pariwisata yang menyediakan informasi destinasi, reservasi, serta layanan wisata secara terintegrasi. בנוסף, dilakukan pemanfaatan teknologi seperti aplikasi mobile, big data, dan Internet of Things (IoT) untuk mendukung pengelolaan destinasi.

Intervensi juga meliputi peningkatan kapasitas pelaku usaha dalam memanfaatkan teknologi digital, serta penguatan infrastruktur digital di kawasan wisata. Sistem monitoring dan evaluasi berbasis data juga dikembangkan untuk mendukung pengambilan kebijakan.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kualitas layanan, kemudahan akses informasi, serta meningkatnya daya tarik dan daya saing pariwisata NTB.

V. Penguatan Promosi, Event, dan Branding Pariwisata Global

Penguatan promosi, event, dan branding pariwisata global di Provinsi NTB diarahkan untuk membangun citra daerah sebagai destinasi kelas dunia yang unik, kompetitif, dan berkelanjutan, serta mampu menarik wisatawan domestik maupun mancanegara secara konsisten. Fokus ini menjadi strategi kunci dalam meningkatkan awareness, attractiveness, dan preference terhadap NTB di pasar global, sekaligus memperkuat posisi daerah dalam peta pariwisata internasional.

Pendekatan pembangunan dilakukan secara terintegrasi antara pemasaran digital, pengembangan event berkualitas, dan penguatan identitas destinasi, dengan memanfaatkan teknologi, kolaborasi lintas sektor, serta pendekatan berbasis data (data-driven marketing). Selain itu, strategi ini juga diarahkan untuk menciptakan narasi kuat (storytelling) yang mencerminkan keunikan budaya, keindahan alam, serta pengalaman wisata yang autentik.

Selanjutnya, dalam pelaksanaan Fokus Pembangunan Penguatan Promosi, Event, dan Branding Pariwisata Global diperkuat melalui Program Kerja Prioritas Daerah (PKPD) yang dijabarkan melalui berbagai intervensi kebijakan sebagai berikut :

1. Promosi Digital dan Pemasaran Global

Program ini bertujuan untuk memperluas jangkauan promosi pariwisata NTB melalui pemanfaatan teknologi digital dan strategi pemasaran global yang terintegrasi. Di tengah perubahan perilaku wisatawan yang semakin digital, promosi berbasis teknologi menjadi kunci utama dalam meningkatkan visibilitas destinasi.

Strategi implementasi mencakup pengembangan kampanye pemasaran digital melalui media sosial, platform perjalanan, serta website resmi pariwisata NTB. Pendekatan berbasis data (data-driven marketing) digunakan untuk menargetkan segmen pasar yang tepat, baik wisatawan domestik maupun mancanegara.

Intervensi meliputi produksi konten kreatif (foto, video, virtual tour), kolaborasi dengan influencer dan content creator, serta optimalisasi mesin pencari (SEO) untuk meningkatkan visibilitas destinasi. Selain itu, dilakukan integrasi dengan platform digital global untuk memperluas jangkauan promosi.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya awareness terhadap destinasi NTB, meningkatnya minat kunjungan, serta meningkatnya jumlah wisatawan.

2. Penyelenggaraan Event Nasional dan Internasional (Sport Tourism, MICE)

Program ini diarahkan untuk menjadikan event sebagai instrumen utama dalam menarik wisatawan dan meningkatkan citra NTB sebagai destinasi unggulan. Event berbasis olahraga (sport tourism) dan MICE (Meeting, Incentive, Convention, Exhibition) memiliki potensi besar dalam menarik wisatawan dalam jumlah besar dan berdampak langsung pada perekonomian daerah.

Strategi implementasi mencakup penyelenggaraan event berskala nasional dan internasional secara profesional dan berkelanjutan. Event dirancang untuk memanfaatkan keunggulan NTB, seperti keindahan alam dan fasilitas yang memadai.

Intervensi meliputi peningkatan kapasitas penyelenggara, penguatan infrastruktur pendukung, serta promosi event secara luas melalui berbagai kanal. Kolaborasi dengan federasi olahraga, asosiasi MICE, dan sektor swasta juga diperkuat.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kunjungan wisatawan, meningkatnya lama tinggal, serta meningkatnya perputaran ekonomi di daerah.

3. Kerja Sama dengan Travel Agent, Platform Digital, dan Investor

Program ini bertujuan untuk memperluas jaringan pemasaran dan investasi melalui kemitraan strategis dengan berbagai pihak. Kolaborasi menjadi kunci dalam meningkatkan efektivitas promosi dan pengembangan pariwisata.

Strategi implementasi mencakup penguatan kerja sama dengan travel agent, tour operator, serta platform digital seperti online travel agent (OTA). Selain itu, dilakukan penjajakan kerja sama dengan investor untuk pengembangan destinasi dan fasilitas pariwisata.

Intervensi meliputi penyusunan paket wisata terpadu, fasilitasi business matching, serta pengembangan kemitraan yang saling menguntungkan. Pemerintah berperan sebagai fasilitator dalam membangun ekosistem kolaborasi yang kuat.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya akses pasar, berkembangnya investasi di sektor pariwisata, serta meningkatnya kualitas layanan wisata.

4. Penguatan Citra dan Branding NTB sebagai Destinasi Kelas Dunia

Program ini diarahkan untuk membangun citra NTB sebagai destinasi pariwisata kelas dunia yang memiliki keunikan, kualitas, dan daya saing tinggi. Branding yang kuat menjadi faktor penting dalam memenangkan persaingan global.

Strategi implementasi mencakup pengembangan identitas merek (brand identity) yang konsisten dan mudah dikenali, serta penyusunan strategi komunikasi pemasaran terpadu. Selain itu, dilakukan penguatan storytelling yang mengangkat keindahan alam, budaya, dan kearifan lokal NTB.

Intervensi meliputi kampanye branding melalui berbagai media, kolaborasi dengan media internasional, serta partisipasi dalam pameran pariwisata global. Program ini juga mendorong konsistensi branding di seluruh destinasi dan pelaku usaha.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya citra positif NTB di mata wisatawan, meningkatnya kepercayaan pasar, serta meningkatnya daya saing destinasi.

5. Pengembangan Kalender Event Daerah

Program ini bertujuan untuk menyusun dan mengelola kalender event daerah yang terencana dan berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pemasaran pariwisata. Kalender event menjadi alat penting dalam menarik wisatawan sepanjang tahun dan mengurangi fluktuasi kunjungan.

Strategi implementasi mencakup penyusunan kalender event tahunan yang terintegrasi dengan event nasional dan internasional. Event dirancang berdasarkan potensi lokal, seperti budaya, seni, olahraga, dan kuliner.

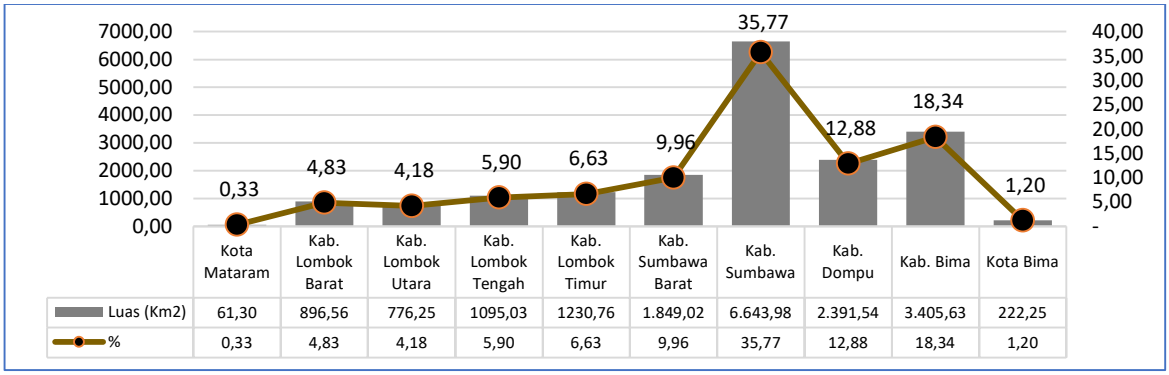
Intervensi meliputi penguatan koordinasi antar daerah, peningkatan kualitas event, serta promosi kalender event secara luas. Selain itu, dilakukan evaluasi berkala untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan kualitas event.

Dampak yang diharapkan adalah meningkatnya kunjungan wisata sepanjang tahun, meningkatnya promosi destinasi, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pariwisata.

BAB V ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KABUPATEN KOTA

Provinsi NTB merupakan provinsi kepulauan yang terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa beserta 401 pulau-pulau kecil yang berada di dalam perairan lautnya sejauh 12 mil. Dengan total luas wilayah adalah ± 4.931.190 Ha, wilayah Provinsi NTB terbagi menjadi daratan seluas ± 1.967.545,75 Ha (41,34%) dan perairan laut seluas ± 2.791.151,34 Ha (58,65%). Sedangkan ukuran luas daratan wilayah NTB dalam satuan kilometer adalah 18.572,32 km^2 dengan rincian Pulau Lombok seluas 4.059,90 km^2 atau 21,86 persen dan Pulau Sumbawa seluas 14.512,42 km^2 atau 78,14 persen.

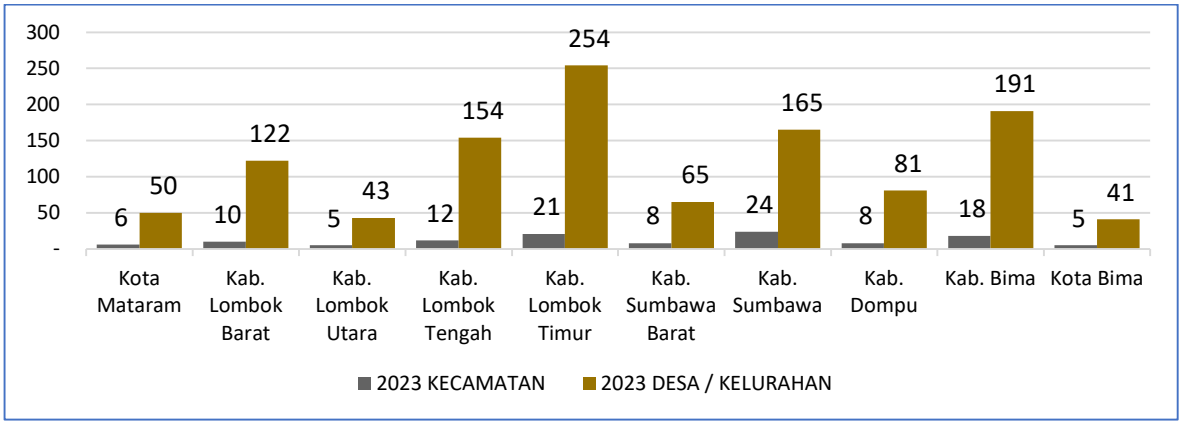
Grafik 5. 1 Luas Wilayah Kabupaten/Kota se-NTB



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2024 (data diolah)

Provinsi NTB sebagai suatu daerah otonom mempunyai wilayah administrasi pemerintahan mencakup 8 (delapan) Kabupaten, 2 (dua) Kota dengan 117 kecamatan, 1.166 desa/kelurahan. Selama lima tahun terakhir perkembangan wilayah administratif umumnya terjadi pada level desa/kelurahan. Adapun jumlah kecamatan dan keluaran/desa menurut kabupaten/kota se-NTB pada tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Grafik 5. 2 Jumlah Kecamatan dan Keluarahan/Desa Menurut Kabupaten/Kota se-NTB



Sumber : BPS Provinsi NTB, 2024 (data diolah)

Pengembangan wilayah Provinsi NTB mengusung konsep Pembangunan Berkelanjutan dengan pendekatan pengembangan wilayah Provinsi NTB adalah *Lombok Eco City and Resilient Island* untuk pulau Lombok dan *Sumbawa Sustainable Economic Zone* untuk Pulau Sumbawa. LECI dan SuEZ menekankan pada pola pengelolaan sumberdaya alam agar tetap lestari dan dapat dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Pendekatan sistem satu pulau pada Pulau Lombok dan pendekatan ekosistem pada Pulau Sumbawa masih tetap digunakan dalam kerangka pengembangan wilayah. Pendekatan ini diperkaya dengan pertimbangan faktor kebencanaan, mengingat pengurangan risiko bencana merupakan isu besar yang dihadapi masyarakat NTB. Dengan demikian, titik berat pada perubahan RTRW Provinsi NTB adalah mengintegrasikan rencana tata ruang wilayah dengan kajian risiko bencana daerah melalui upaya-upaya optimalisasi pengelolaan sumberdaya serta penataan ruang yang berbasis mitigasi bencana. Berdasarkan data dan peta rawan bencana dapat dapat ditinjau dari kondisi geografis, geologis, hidrometeorologis, dan vulkanologis, WP3K Provinsi NTB berpotensi mengalami bencana alam seperti banjir, gerakan tanah (longsor), gempa bumi, tsunami, dan erupsi gunung api.

Kerentanan dapat didefinisikan sebagai *Exposure* kali *Sensitivity*. Kerentanan dapat dibagi-bagi ke dalam kerentanan sosial, ekonomi, fisik dan ekologi/lingkungan. “Aset-aset” yang terekspos termasuk kehidupan manusia (kerentanan sosial), wilayah ekonomi, struktur fisik dan wilayah ekologi/lingkungan. Tiap “aset” memiliki sensitivitas sendiri, yang bervariasi per bencana (dan intensitas bencana). Indikator yang digunakan dalam analisis kerentanan terutama adalah informasi keterpaparan. Dalam dua kasus informasi disertakan pada komposisi paparan (seperti kepadatan penduduk, rasio jenis kelamin, rasio kemiskinan, rasio orang cacat dan rasio kelompok umur). Potensi bencana dilihat sebagai dasar dalam menentukan upaya pengurangan risiko bencana untuk masing- masing jenis bencana. Resiko bencana dibentuk oleh 3 (tiga) komponen utama, yaitu bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Risiko bencana dikaji berdasarkan indeks bahaya, indeks penduduk terpapar, indeks kerugian, indeks kapasitas, serta indeks lain tergantung kepada jenis ancaman bencana yang mengacu pada Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana dan referensi pedoman yang ada di kementerian dan/atau lembaga di tingkat nasional.

Tingkat Bahaya Indeks parameter untuk menentukan tingkat bahaya pada masing-masing jenis bencana yang kemudian dikaji 3 (tiga) kategori dengan interval sebagai berikut:

- Kategori rendah (0,000 - 0,333);
- Kategori sedang (> 0,333 - 0,666); dan
- Kategori tinggi (> 0,666 - 1,000).

Adapun sebaran daerah rawan bencana menurut kabupaten/kota se-NTB dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 1 Sebaran Daerah Rawan Bencana Menurut Jenis Bencana

NO	KABUPATEN KOTA	BANJIR	CUACA EKSTREM	GELOMBANG TINGGI / ABRASI	GEMPA	GUNUNG API	KARHUTLA	KEKERINGAN	LIKUIFAKSI	TANAH LONGSOR	TSUNAMI
1	Lombok Barat	103	119	19	122	0	60	122	102	60	14
2	Lombok Tengah	98	139	11	139	10	36	139	11	30	3
3	Lombok Timur	149	254	45	254	45	80	254	43	41	47
4	Lombok Utara	22	32	22	33	16	31	33	25	29	7
5	Kota Mataram	48	50	7	50	0	0	50	50	0	8
6	Sumbawa Barat	62	63	23	65	0	61	64	61	63	0
7	Sumbawa	144	164	66	165	0	147	165	116	131	0
8	Dompu	65	76	29	81	5	75	81	38	74	11
9	Bima	145	178	67	191	8	172	191	141	171	4
10	Kota Bima	34	37	6	38	0	23	40	35	23	6
	NTB	870	1.112	295	1.138	84	685	1.139	622	622	100

Sumber : BPBD Provinsi NTB, 2024 (data diolah)

5.1 Arahan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Nasional

Dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027, arah pembangunan kewilayahan difokuskan untuk mewujudkan pembangunan yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan melalui penguatan sinergi antarwilayah sesuai dengan karakteristik, potensi, dan tingkat perkembangan masing-masing wilayah. Arah pembangunan tersebut dijabarkan ke dalam highlight intervensi yang mendukung lima fokus pembangunan kewilayahan, yaitu: (1) pembangunan perdesaan, daerah afirmasi, dan transmigrasi; (2) pembangunan kota terpadu; (3) pembangunan wilayah kepulauan; (4) pemulihan wilayah pascabencana; serta (5) pembangunan Papua.

Sebagai upaya memperkuat implementasi arah pembangunan kewilayahan, RKP Tahun 2027 juga memuat pendetailan highlight intervensi melalui pemetaan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) sebagaimana tercantum dalam Buku I PKPN RKP Tahun 2027 serta Proyek Strategis Nasional (PSN) pada setiap lokasi prioritas pembangunan kewilayahan. Pemetaan tersebut menjadi instrumen untuk memastikan keterpaduan antara perencanaan sektoral dengan kebutuhan pembangunan di tingkat wilayah, sehingga pelaksanaan program dan proyek dapat mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional sekaligus memberikan dampak yang lebih nyata terhadap pengurangan kesenjangan antarwilayah, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, pemerataan akses layanan dasar, serta peningkatan daya saing dan ketahanan wilayah. Adapun Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang dilaksanakan secara nasional dan/atau di seluruh provinsi adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 2 Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) yang berlaku secara nasional dan/atau seluruh provinsi

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	Lokasi Pelaksanaan
1	5.000 Kampung Nelayan Merah Putih	Tersebar di 37 provinsi sentra nelayan.
2	Budi Daya Ikan Darat Tematik	Tersebar di 38 provinsi sentra perikanan budi daya.
3	Implementasi Standar Kinerja Energi Minimum (SKEM)	Seluruh wilayah Indonesia.

No.	Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN)	Lokasi Pelaksanaan
4	Makan Bergizi Gratis (MBG) Anak Sekolah	Tersebar di seluruh kabupaten/kota pada 38 provinsi.
5	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Sekolah dan Madrasah Berkualitas	Tersebar di seluruh kabupaten/kota pada 38 provinsi, dengan prioritas pada satuan pendidikan yang memiliki ruang kelas rusak berat.
6	Bantuan Perlengkapan Sekolah	Tersebar di 38 provinsi pada satuan pendidikan yang terdata dalam Dapodik atau EMIS.
7	500 Sekolah Nasional Terintegrasi (SNT)	Tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mencakup 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
8	Digitalisasi Pendidikan (2 Juta Papan Interaktif Digital)	Tersebar di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
9	Sekolah Rakyat	Tersebar di 38 provinsi dan 500 kabupaten/kota.
10	Peningkatan Kesejahteraan Guru melalui Transfer Langsung Tunjangan	Seluruh wilayah Indonesia dengan sasaran guru ASN dan non-ASN.
11	Pelindungan Anak di Ruang Digital melalui PP Tunas	Seluruh provinsi di Indonesia.
12	Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita	Tersebar di seluruh kabupaten/kota pada 38 provinsi.
13	Pemeriksaan Kesehatan Gratis	Seluruh provinsi di Indonesia.
14	PRO-KESRA Bantuan Sosial Terintegrasi	Pelaksanaan bersifat nasional dengan sasaran masyarakat miskin dan rentan.
15	PRO-KESRA 10 Juta Penduduk Berusaha dan Bekerja	Pelaksanaan bersifat nasional melalui integrasi program pemberdayaan lintas kementerian/lembaga.
16	Pembentukan 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	Seluruh provinsi di Indonesia.
17	Gerakan ASRI: Penggantian Atap Seng Menjadi Genteng	Tahap awal di Pulau Jawa, Bali, Lampung, dan Nusa Tenggara Barat; tahap lanjutan di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, dan Nusa Tenggara Timur.
18	Gerakan ASRI: Pengendalian Sampah Terpadu di 514 Kabupaten/Kota	Tersebar di seluruh kabupaten/kota pada 38 provinsi.
19	Motor Nasional	Distribusi dan pelaksanaan mencakup seluruh wilayah Indonesia.
20	Program 3 Juta Rumah (1 Juta Rumah Baru dan 2 Juta Renovasi Rumah)	Mencakup wilayah perkotaan, perdesaan, dan kawasan pesisir.
21	Pemberantasan Judi Online	Pelaksanaan bersifat nasional, terutama pada ruang digital dan sistem transaksi keuangan.
22	Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan, dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN)	Seluruh wilayah Indonesia melalui 34 Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan 182 Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota (BNNK).
23	Pemberantasan Penyelundupan	Seluruh wilayah Indonesia.

Sumber : Rancangan RKP 2027

Higlight Lokasi Prioritas Provinsi Nusa Tenggara Barat

A. Pembangunan Perdesaan Daerah Afirmasi dan Transmigrasi
Investasi dan Industri **Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)** 1. Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun – Kab. Lombok Timur
Industri **Kawasan Transmigrasi** 2. KT Selaparang – Kab. Lombok Timur
B. Pembangunan Kota Terpadu
Industri **Kawasan Perkotaan Sedang** 1. Kota Mataram
C. Pembangunan Wilayah Kepulauan
Industri 1. Kab. Bima

Tabel 5. 3 Lokasi Prioritas dan Highlight Intervensi Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
A. Pembangunan Perdesaan, Daerah Afirmasi dan Transmigrasi		
Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	**Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)** • A1: Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis Pariwisata Sembalun – Kab. Lombok Timur	• Percepatan Pembangunan Daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) • Elektrifikasi Desa
Swasembada Pangan, Energi, dan Air	**Kawasan Perdesaan Prioritas (KPP)** • A1: Kawasan Perdesaan Prioritas Berbasis	Swasembada Air

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
	Pariwisata Sembalun – Kab. Lombok Timur	
Swasembada Pangan, Energi, dan Air	**Kawasan Transmigrasi (KT)** • A2: KT Selaparang – Kab. Lombok Timur	Swasembada Air
B. Pembangunan Kota Terpadu		
Swasembada Pangan, Energi, dan Air	**Kawasan Perkotaan Sedang** B1: Kota Mataram	Swasembada Air
C. Pembangunan Wilayah Kepulauan		
Swasembada Pangan, Energi, dan Air	C1: Kab. Bima	Swasembada Air
Fokus Pembangunan Kewilayahan Prioritas Lainnya		
Infrastruktur dan Konektivitas Ekonomi	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Elektrifikasi Desa
Investasi Berorientasi industri dan Ekspor	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pengembangan KEK Mandalika di Kab. Lombok Tengah*
Swasembada Pangan, Energi, dan Air	Provinsi Nusa Tenggara Barat	• Budi Daya Ikan Darat Tematik • Pengembangan Kawasan Pangan Terintegrasi (Padi, Jagung, dan Kedelai) • Pengembangan Kawasan Perkebunan (Tebu, Kopi, Jambu Mete) • Peningkatan Produksi Daging, Susu, dan Telur • Program Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) • PLTA Skala Besar Terintegrasi • Kompor Listrik untuk Rumah

Klaster/Fokus Pembangunan	Lokasi Prioritas	*Highlight* Intervensi
		Tangga • Swasembada Air
Hilirisasi SDA Strategis	Kab. Dompu	• Proyek Terpadu Pengembangan Mineral Kritis Tembaga dan Energi Panas Bumi Hu'u*
	• Kab. Sumbawa Barat Kab. Sumbawa	• Fasilitas Pemurnian Tembaga Terintegrasi dengan Tambang di Blok Batu Hijau, Blok • Lampui dan Blok Elang*

Sumber : Rancangan RKP Tahun 2027

Keterangan:

a. Highlight Intervensi mengacu pada Buku I PKPN RKP Tahun 2027
b. (*) merupakan indikasi Proyek Strategis Nasional (PSN) Tahun 2026 – 2027

5.2 Arahan Kebijakan Pembangunan Kewilayahan Provinsi NTB

Arah kebijakan pembangunan Provinsi Nusa Tenggara Barat menjadi panduan pemerintah kabupaten/kota dalam menyelaraskan program dan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2025, berdasarkan perencanaan dan penganggaran berbasis program (Money follows program) dan pendekatan Tematik Holistik-Integratif dan Spasial (THIS). Pendekatan ini diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis pembangunan kabupaten/kota yang telah diselaraskan dengan isu strategis pembangunan provinsi. Selanjutnya, untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang berkelanjutan, pembangunan kabupaten/kota dijabarkan dalam kebijakan umum arah pembangunan kabupaten/kota, penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), realisasi dan target indikator makro kabupaten/kota, analisis indikator penyelenggaraan pemerintah kabupaten/kota, dan sinergitas pembangunan provinsi dan kabupaten/kota.

Kebijakan umum arah pengembangan wilayah berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB Tahun 2024-2044. RTRW ini memuat rencana besar pengembangan wilayah NTB pada 3 (tiga) sektor kunci yaitu agribisnis (pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan), pariwisata dan industri. RTRW mencakup Rencana Struktur Ruang dan Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi. Arah pengembangan wilayah untuk Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa disusun berdasarkan karakteristik wilayah, potensi dan keunggulan daerah. Hal ini bertujuan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah. Strategi pengembangan ruang mengatur hubungan yang harmonis antara sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia yang berkelanjutan.

RTRW Provinsi NTB menggunakan konsep pendekatan pengembangan wilayah *Lombok Eco City & Resilient Island* atau dikenal dengan istilah LECI untuk Pulau Lombok; dan Sumbawa *Sustainable Economic Zone* atau dikenal dengan istilah SUEZ untuk Pulau Sumbawa.

5.2.1 Isu-isu Pembangunan kewilayahan

5.2.1.1 Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Provinsi NTB menurut kabupaten/kota periode 2021–2025 menunjukkan tren penurunan yang cukup konsisten di seluruh wilayah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa program penanggulangan kemiskinan di NTB secara umum berjalan positif, meskipun tingkat dan kecepatan penurunannya berbeda antar daerah. Secara umum, seluruh kabupaten/kota mengalami penurunan angka kemiskinan pada tahun 2025 dibandingkan tahun 2021. Penurunan tersebut mencerminkan mulai membaiknya kondisi ekonomi masyarakat pascapandemi, meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, penguatan perlindungan sosial, serta berbagai program pemberdayaan masyarakat dan pengembangan sektor unggulan daerah.

Kabupaten Lombok Utara masih menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi di NTB selama periode 2021–2025. Pada tahun 2021 persentase penduduk miskin mencapai 27,04 persen dan menurun menjadi 20,74 persen pada tahun 2025. Walaupun mengalami penurunan cukup signifikan sebesar 6,30 poin persen, angka tersebut masih jauh di atas rata-rata kabupaten/kota lainnya. Tingginya kemiskinan di Lombok Utara menunjukkan bahwa wilayah ini masih menghadapi tantangan struktural, terutama akibat kerentanan ekonomi masyarakat, ketergantungan pada sektor primer dan pariwisata, serta dampak bencana yang mempengaruhi pemulihan ekonomi masyarakat. Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah dengan tingkat kemiskinan tertinggi kedua di NTB. Persentase penduduk miskin turun dari 15,38 persen pada tahun 2021 menjadi 13,53 persen pada tahun 2025. Penurunan ini menunjukkan adanya perbaikan kondisi ekonomi masyarakat, namun besarnya jumlah penduduk menyebabkan angka kemiskinan absolut masih cukup tinggi sehingga membutuhkan intervensi yang lebih masif, khususnya pada sektor pertanian, UMKM, dan penciptaan lapangan kerja.

Kabupaten Bima, Lombok Barat, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Dompu juga menunjukkan tren penurunan yang stabil. Kabupaten Bima turun dari 14,88 persen menjadi 12,59 persen, Lombok Barat dari 14,47 persen menjadi 11,90 persen, Sumbawa dari 13,91 persen menjadi 11,79 persen, Sumbawa Barat dari 13,54 persen menjadi 10,98 persen, dan Dompu dari 12,60 persen menjadi 11,15 persen. Penurunan ini mengindikasikan semakin membaiknya daya beli masyarakat serta meningkatnya aktivitas ekonomi daerah, terutama dari sektor pertanian, perdagangan, industri pengolahan, dan jasa. Kabupaten Lombok Tengah menunjukkan penurunan cukup signifikan dari 13,44 persen pada tahun 2021 menjadi 10,68 persen pada tahun 2025. Kondisi ini dipengaruhi oleh berkembangnya kawasan pariwisata dan ekonomi penunjang di wilayah tersebut, terutama dengan adanya pengembangan kawasan strategis seperti KEK Mandalika yang memberikan multiplier effect terhadap kesempatan kerja dan usaha masyarakat.

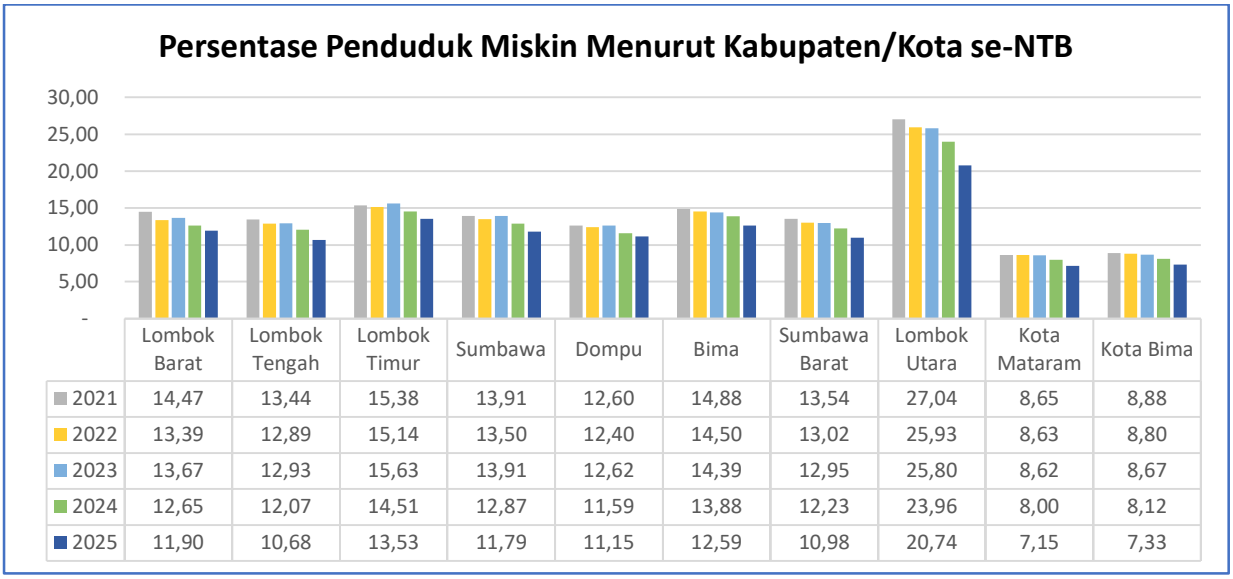
Sementara itu, Kota Mataram dan Kota Bima tetap menjadi wilayah dengan tingkat kemiskinan terendah di NTB. Kota Mataram turun dari 8,65 persen pada tahun 2021

menjadi 7,15 persen pada tahun 2025, sedangkan Kota Bima dari 8,88 persen menjadi 7,33 persen. Rendahnya tingkat kemiskinan di wilayah perkotaan dipengaruhi oleh struktur ekonomi yang lebih beragam, dominasi sektor perdagangan dan jasa, akses infrastruktur yang lebih baik, serta tingkat pendidikan dan kesempatan kerja yang relatif lebih tinggi dibandingkan wilayah kabupaten.

Dari sisi dinamika tahunan, pada tahun 2023 beberapa daerah sempat mengalami kenaikan tipis, seperti Lombok Barat, Lombok Timur, Sumbawa, dan Dompu. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemulihan ekonomi belum sepenuhnya stabil dan masih dipengaruhi oleh inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta kerentanan pendapatan masyarakat, khususnya di sektor informal dan pertanian. Namun pada tahun 2024 dan 2025 tren penurunan kembali berlanjut secara lebih merata.

Secara keseluruhan, data tersebut menunjukkan bahwa kesenjangan kemiskinan antarwilayah di NTB masih cukup tinggi. Wilayah perkotaan memiliki tingkat kemiskinan yang relatif rendah, sedangkan beberapa wilayah kabupaten, terutama Lombok Utara dan Lombok Timur, masih menghadapi tantangan besar dalam penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan pembangunan ke depan perlu diarahkan pada penguatan ekonomi berbasis potensi lokal, peningkatan kualitas SDM, perluasan kesempatan kerja, penguatan perlindungan sosial adaptif, pengendalian inflasi daerah, serta pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kantong kemiskinan agar penurunan kemiskinan dapat berlangsung lebih cepat dan merata di seluruh wilayah NTB.

Grafik 5. 3 Persentase Penduduk Miskin d Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021-2025



	Lombok Barat	Lombok Tengah	Lombok Timur	Sumbawa	Dompu	Bima	Sumbawa Barat	Lombok Utara	Kota Mataram	Kota Bima
2021	14,47	13,44	15,38	13,91	12,60	14,88	13,54	27,04	8,65	8,88
2022	13,39	12,89	15,14	13,50	12,40	14,50	13,02	25,93	8,63	8,80
2023	13,67	12,93	15,63	13,91	12,62	14,39	12,95	25,80	8,62	8,67
2024	12,65	12,07	14,51	12,87	11,59	13,88	12,23	23,96	8,00	8,12
2025	11,90	10,68	13,53	11,79	11,15	12,59	10,98	20,74	7,15	7,33

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025 (data diolah)

Selanjutnya dalam upaya penurunan kemiskinan di NTB termasuk di kabupaten/kota dirumuskan strategi kebijakan yang dilakukan meliputi:

a. Pengurangan beban pengeluaran masyarakat;
b. Peningkatan pendapatan masyarakat; dan
c. Penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan.

Untuk memastikan tercapainya target penurunan angka kemiskinan diperlukan komitmen dan partisipasi dari seluruh stakeholder pembangunan dan dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Upaya sistematis dapat dimulai melalui proses perencanaan dan penganggaran program, pelaksanaan dan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Anggaran program penanggulangan kemiskinan tidak hanya bersumber dari APBD, tetapi juga APBN dan pembiayaan lainnya seperti keterlibatan multi pihak. Semua pihak harus berkomitmen bersama untuk mengentaskan kemiskinan.

Selain strategi diatas, penurunan kemiskinan Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-NTB dilakukan dengan merumuskan langkah-langkah konkrit diantaranya: memperkuat komitmen melalui kebijakan bersama provinsi dan kabupaten/kota; pemutakhiran data kemiskinan berbasis Regsosek; penguatan kelembagaan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD); program dan penganggaran yang lebih fokus dalam percepatan penurunan kemiskinan pada Perangkat Daerah; dan penguatan koordinasi dan kolaborasi melalui Gerakan Multi Pihak Penurunan Kemiskinan (GMP-PK).

5.2.1.2 Ketimpangan Antar Wilayah

Tingkat ketimpangan pendapatan yang diukur melalui Gini Ratio di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2020–2024 menunjukkan kondisi yang relatif fluktuatif, namun secara umum mengalami perbaikan pada tahun 2024. Nilai Gini Ratio NTB turun dari 0,375 pada tahun 2023 menjadi 0,361 pada tahun 2024, yang mengindikasikan distribusi pendapatan masyarakat semakin merata. Secara umum, ketimpangan di NTB masih berada pada kategori ketimpangan sedang karena berada pada rentang 0,3–0,5.

Gambar 5. 1 Tingkat Ketimpangan Pendapatan (Gini Ratio) Menurut Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2020-2024

NO	KABUPATEN / KOTA	2020	2021	2022	2023	2024
1	Lombok Barat	0,306	0,389	0,421	0,365	0,348
2	Lombok Tengah	0,378	0,338	0,313	0,349	0,342
3	Lombok Timur	0,364	0,280	0,274	0,310	0,313
4	Sumbawa	0,349	0,412	0,406	0,441	0,379
5	Dompu	0,355	0,360	0,312	0,331	0,292
6	Bima	0,358	0,381	0,372	0,356	0,358
7	Sumbawa Barat	0,299	0,397	0,375	0,354	0,372
8	Lombok Utara	0,345	0,317	0,317	0,283	0,278
9	Kota Mataram	0,381	0,429	0,445	0,412	0,393
10	Kota Bima	0,375	0,413	0,429	0,411	0,380
	NTB	**0,376**	**0,381**	**0,373**	**0,375**	**0,361**

Sumber : BPS Provinsi NTB, 2025 (data diolah)
Keterangan : Tahun 2025 belum rillis untuk Kabupaaten/kota

Masih adanya ketimpangan pendapatan yang cukup tinggi di kabupaten/kota di NTB seperti di wilayah perkotaan, mengindikasikan adanya ketimpangan peluang terutama bagi masyarakat kurang mampu dalam mengakses kesempatan bekerja. Walaupun secara umum rata-rata gini ratio di NTB stabil di angka 0,3 - 0,5 poin, beberapa daerah mampu menurunkan ketimpangan pendapatan seperti di Kabupaten Lombok Utara. Hal ini sejalan

dengan data tingkat pengangguran terbuka di KLU yang hanya 2,68 persen, artinya sebagian besar penduduk usia kerja telah terserap dalam aktivitas ekonomi produktif.

Ketimpangan antar wilayah infrastruktur terutama infrastruktur dasar (jalan, jembatan, permukiman, sanitasi dan air bersih) dan infrastruktur pendukung (irigasi, telekomunikasi, pelabuhan/bandar udara) juga terjadi di wilayah NTB terutama antara Pulau Lombok dan Sumbawa. Kemantapan jalan antara Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa pada tahun 2025 berbanding 94 persen dan 74 persen. Hal ini dapat dimaklumi mengingat luas wilayah Pulau Sumbawa tiga kali lebih luas dari Pulau Lombok.

Sedangkan untuk ketimpangan kesempatan/peluang lebih kepada kesenjangan pendidikan. Rata-Rata Lama Sekolah di wilayah NTB berkisar 6-10 tahun, dan umumnya yang terendah berada di wilayah perdesaan seperti di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Tengah. Tak hanya itu rata-rata Angka Partisipasi Murni (APM) terendah yaitu 60-80 persen berada pada jenjang SMA sederajat. Artinya hanya terdapat 60-80 persen penduduk usia 16-18 tahun yang menikmati pendidikan SMA. Capaian ini jauh dibandingkan dengan APM untuk jenjang SD (usia 7-12 tahun) dan SMP (13-15 tahun) sederajat yang berada di kisaran 80-99 persen.

Keseluruhan ketimpangan antar wilayah dari sisi ekonomi, infrastruktur dan kesempatan/peluang di wilayah NTB terjadi terutama pada masyarakat kurang mampu dalam mengakses kebutuhan pelayanan dasar dan kesempatan bekerja. Hal ini tentunya berdampak pada ketahanan ekonomi yang rendah. Oleh karena itu prioritas pembangunan saat ini difokuskan pada upaya mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan. Untuk menyeimbangkan pembangunan tersebut pemerintah daerah melakukan beberapa pembangunan antara lain mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang dapat menarik investor. Selain itu, pembangunan sistem logistik yang efektif dan efisien dengan membangun infrastruktur meliputi pembangunan jalan dan pelabuhan yang menghubungkan pusat-pusat ekonomi, pembangunan jaringan telekomunikasi. Selain pengembangan ekonomi dilakukan juga pengembangan teknologi dan kualitas SDM melalui penguatan sistem pendidikan vokasi serta jaminan pendidikan berkualitas.

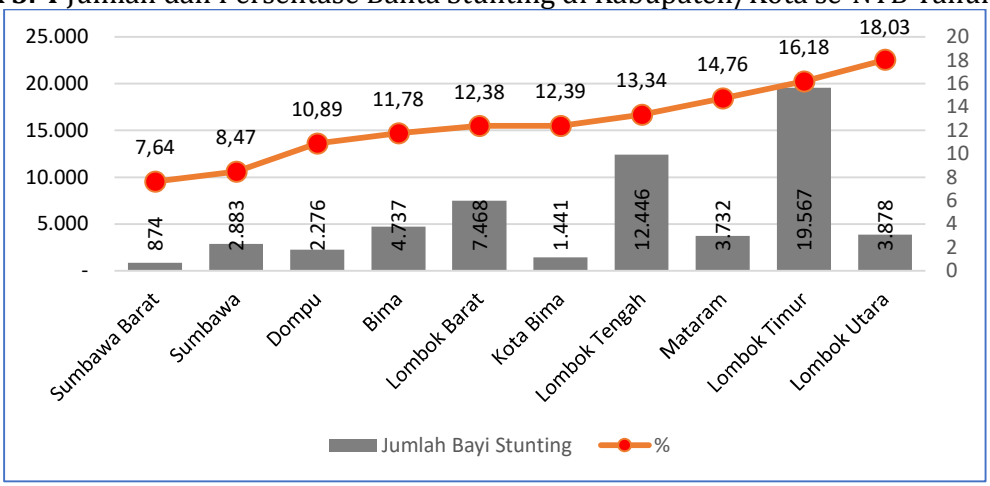
Secara keseluruhan, perkembangan Gini Ratio kabupaten/kota di NTB menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi pascapandemi mulai diikuti dengan distribusi pendapatan yang lebih merata pada sebagian besar wilayah di tahun 2024. Namun demikian, masih terdapat tantangan pada daerah perkotaan dan wilayah dengan struktur ekonomi berbasis sektor modern atau ekstraktif yang cenderung menciptakan konsentrasi pendapatan. Oleh karena itu, penguatan ekonomi inklusif melalui peningkatan kesempatan kerja, pengembangan UMKM, pengurangan kesenjangan wilayah, serta pemerataan akses pendidikan dan layanan ekonomi menjadi penting untuk menjaga penurunan ketimpangan di NTB secara berkelanjutan.

5.2.1.3 Stunting

Berdasarkan data Pelaporan stunting melalui aplikasi elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM), tercatat bahwa persentase Balita Stunting di Provinsi NTB terus mengalami penurunan dari 19,02 persen di tahun 2019 menjadi

13,49 persen di tahun 2023. Adapun jumlah dan persentase balita stunting berdasarkan kabupaten/kota se-NTB pada tahun 2023 dapat dilihat pada gambar berikut.

Grafik 5. 4 Jumlah dan Persentase Balita Stunting di Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2023



Sumber : Sumber Data: e-PPGBM, Dinas Kesehatan Prov.NTB, Desember 2023

Apabila dilihat dari sisi jumlah balita stunting, Kabupaten Lombok Timur menjadi daerah yang tertinggi yaitu sebanyak 19.567 balita, diikuti Kabupaten Lombok Tengah dengan jumlah sebanyak 12.446 balita, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Sumbawa Barat yakni sebanyak 874 balita kemudian diikuti Kota Bima dengan jumlah sebanyak 1.441 balita. Untuk sisi persentase balita stunting, tertinggi berada di Kabupaten Lombok Utara yakni sebesar 18,03 persen, diikuti Kabupaten Lombok Timur sebesar 16,18 persen, sedangkan yang terendah berada di Kabupaten Sumbawa Barat dengan besaran 7,64 persen dan diikuti Kabupaten Sumbawa yakni sebesar 8,47 persen.

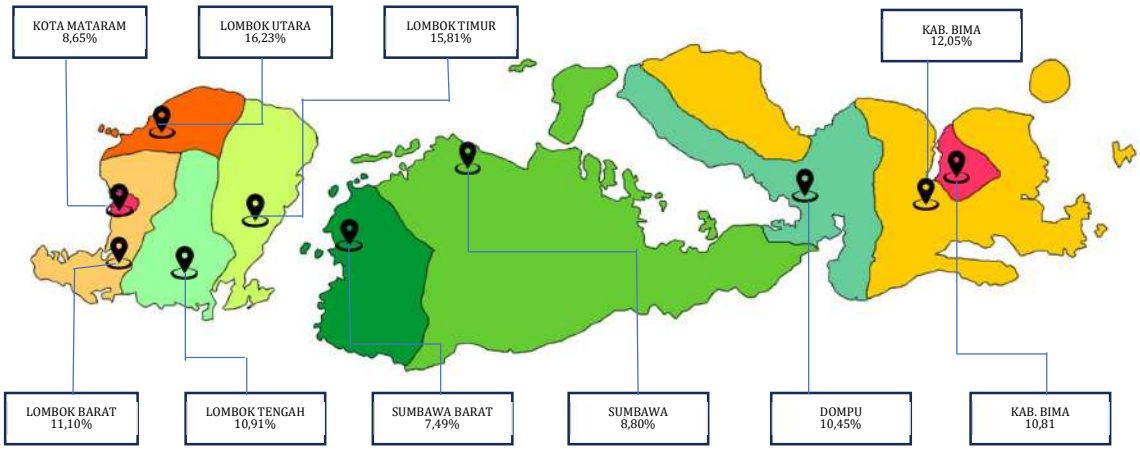
Masih tingginya balita stunting di NTB dan kabupaten/kota disebabkan permasalahan yang dihadapi diantaranya belum seluruhnya kelompok sasaran menerima dan memanfaatkan intervensi yang diberikan melalui penguatan data dan pendampingan keluarga. Data tersebar dalam berbagai sistem informasi, format pencatatan dan pelaporan berbeda, overlapping informasi dan tidak efisien serta peran TPPS provinsi dan kabupaten/kota se-NTB yang belum optimal dalam mengawal program penurunan balita stunting.

Oleh karena itu penanganan isu penurunan stunting di NTB dilakukan bersama-sama antara Provinsi, Kabupaten/Kota dan pihak-pihak lainnya melalui langkah-langkah yang telah dirumuskan. Strategi penurunan balita stunting yang dilakukan mencakup:

a. Pemenuhan Intervensi baik Spesifik (PMT ibu hamil KEK, balita gizi kurang; TTD Ibu hamil, remaja putri; pemberian ASI ekslusif; MP ASI baduta; Tata laksana gizi buruk); dan Sensitif (air minum layak, sanitasi layak, penerima bantuan iuran JKN, bantuan tunai bersyarat, bantuan sosial pangan, layanan KB pasca persalinan, menekan kehamilan yang tidak diinginkan, dan pemberian informasi mengnai stunting).
b. Peningkatan Konvergensi di desa : seluruh intervensi fokus pada desa prioritas dan keluarga 1.000 HPK;

c. Pendampingan Keluarga : setiap keluarga 1.000 HPK di dampingi untuk memastikan *compliance* intervensi;
d. Perbaikan monev termasuk Surveilans: peningkatan monev, pemahaman data, dan surveilans untuk deteksi dini masalah gizi di lapangan, termasuk: pemenuhan alat ukur terstandar di seluruh posyandu dan peningkatan kualitas SDM pengukur terstandar.

Gambar 5. 2 Sebaran Balita Stunting Menurut Kabupaten/Kota



5.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia

Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan tren yang terus meningkat di seluruh wilayah. IPM NTB meningkat dari 70,86 pada tahun 2021 menjadi 73,97 pada tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan kualitas hidup masyarakat yang ditunjukkan melalui peningkatan aspek kesehatan, pendidikan, dan daya beli masyarakat. Meskipun demikian, capaian IPM NTB masih berada di bawah rata-rata nasional yang mencapai 75,90 pada tahun 2025, sehingga masih diperlukan percepatan pembangunan manusia secara lebih merata antarwilayah.

Secara regional, terdapat kesenjangan IPM yang cukup jelas antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Kota Mataram mencatat IPM tertinggi di NTB dengan nilai 82,37 pada tahun 2025, jauh di atas rata-rata provinsi maupun nasional. Tingginya IPM Kota Mataram didukung oleh akses pendidikan yang lebih baik, fasilitas kesehatan yang lebih lengkap, tingkat urbanisasi tinggi, serta dominasi sektor perdagangan dan jasa yang mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. Sementara itu, Bima juga memiliki IPM relatif tinggi sebesar 79,41 yang menunjukkan kualitas pembangunan manusia di wilayah perkotaan cenderung lebih maju dibanding wilayah kabupaten.

Di tingkat kabupaten, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan IPM tertinggi sebesar 76,46 pada tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan daerah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat yang didukung oleh aktivitas ekonomi daerah dan investasi sektor unggulan. Kabupaten Dompu

dan Kabupaten Lombok Barat juga menunjukkan peningkatan signifikan dengan IPM masing-masing mencapai 73,58 dan 73,52 pada tahun 2025.

Sementara itu, Kabupaten Lombok Utara masih menjadi daerah dengan IPM terendah di NTB meskipun terus meningkat dari 66,14 tahun 2021 menjadi 69,63 tahun 2025. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemulihan dan pembangunan pascabencana serta peningkatan akses layanan dasar masih perlu terus diperkuat. Kabupaten Bima, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur juga masih berada di bawah rata-rata provinsi, meskipun mengalami peningkatan yang cukup konsisten setiap tahunnya.

Grafik 5. 5 IPM Menurut Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021-2025

NO		2021	2022	2023	2024	2025
1	Lombok Barat	70,64	71,44	72,18	72,70	73,52
2	Lombok Tengah	68,70	69,57	70,41	71,19	72,07
3	Lombok Timur	68,90	69,83	70,65	71,48	72,35
4	Sumbawa	69,82	70,71	71,68	72,36	73,27
5	Dompu	70,27	70,96	71,77	72,59	73,58
6	Bima	68,72	69,63	70,33	70,99	71,97
7	Sumbawa Barat	73,54	74,34	74,84	75,52	76,46
8	Lombok Utara	66,14	67,09	68,02	68,64	69,63
9	Kota Mataram	80,24	80,67	81,15	81,64	82,37
10	Kota Bima	77,03	77,75	78,24	78,91	79,41
	NTB	**70,86**	**71,65**	**72,37**	**73,10**	**73,97**
	Nasional	**73,16**	**73,77**	**74,39**	**75,02**	**75,90**

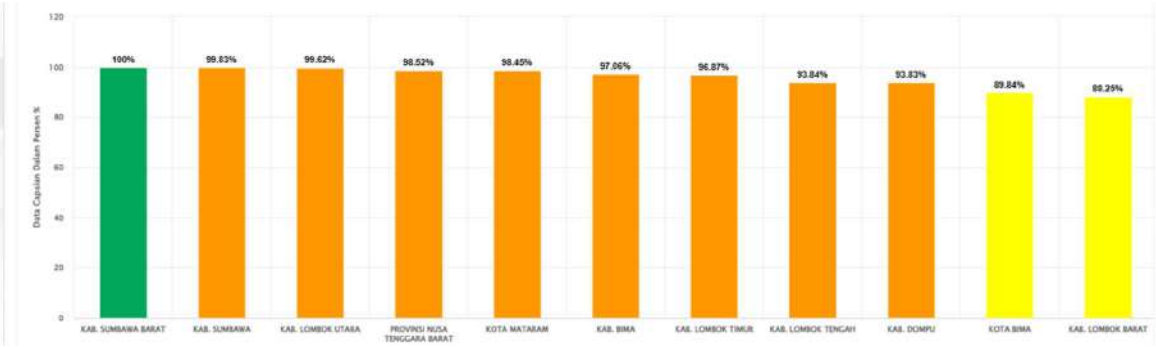
Sumber : BPS Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

Secara umum, peningkatan IPM di seluruh kabupaten/kota menunjukkan bahwa pembangunan manusia di NTB bergerak ke arah yang lebih baik. Namun, masih adanya disparitas antarwilayah menunjukkan perlunya penguatan kebijakan pembangunan yang lebih inklusif dan merata, khususnya pada daerah dengan IPM rendah. Fokus pembangunan ke depan perlu diarahkan pada peningkatan kualitas pendidikan, penguatan layanan kesehatan, penurunan stunting dan kemiskinan, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta perluasan kesempatan kerja produktif agar kualitas sumber daya manusia NTB semakin kompetitif dan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

5.2.1.5 Standar Pelayanan Minimal

Pengaturan mengenai jenis pelayanan dasar ditentukan dengan tegas dan jelas dalam Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. Sebagai tindak lanjut dari amanat Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Provinsi NTB diharapkan mampu memberikan pelayanan dasar yang berhak diperoleh warganya secara minimal. Melalui berbagai kebijakan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 yang diterbitkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga yang menyelenggarakan Urusan Wajib Pelayanan Dasar bidang Pendidikan; Kesehatan; Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang; Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman; Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat; dan Sosial, Pemerintah Provinsi NTB dapat menerapkan dan mengimplementasikan SPM secara optimal.

Grafik 5. 6 Capaian SPM pada Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2025



Sumber : Biro Pemeritahan Setda Provinsi NTB, 2026 (data diolah)

Berdasarkan gambar diatas diketahui bahwa pencapaian pemenuhan SPM di kabupaten/kota se-NTB pada tahun 2025 secara keseluruhan, capaian SPM tahun 2025 menunjukkan bahwa kualitas pelayanan dasar di NTB terus mengalami peningkatan dan semakin mendekati target pelayanan universal. Ke depan, tantangan utama bukan hanya mempertahankan tingginya capaian, tetapi juga memastikan kualitas layanan yang lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan antarwilayah sehingga mampu mendukung peningkatan kualitas hidup dan pembangunan manusia di NTB secara menyeluruh..

5.2.1.6 Kapasital Fiskal Daerah

Perkembangan peta kapasitas fiskal kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan kondisi yang cukup dinamis dengan adanya perbedaan kemampuan fiskal antarwilayah. Kapasitas fiskal mencerminkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik dari sumber pendapatan yang dimiliki. Secara umum, sebagian besar kabupaten/kota di NTB masih berada pada kategori rendah hingga sedang, yang menunjukkan tingkat ketergantungan terhadap transfer pemerintah pusat masih cukup tinggi.

Pada tahun 2025, Kabupaten Sumbawa Barat menjadi daerah dengan kapasitas fiskal tertinggi dengan indeks sebesar 0,457 dan masuk kategori sangat tinggi. Kondisi ini dipengaruhi oleh kuatnya penerimaan daerah yang bersumber dari sektor pertambangan dan aktivitas ekonomi skala besar, sehingga memberikan ruang fiskal yang lebih luas dalam pembiayaan pembangunan daerah. Selama periode 2021–2024, Sumbawa Barat juga menunjukkan tren kapasitas fiskal yang relatif lebih baik dibanding daerah lainnya, bahkan sempat mencapai indeks 2,362 pada tahun 2023.

Sementara itu, beberapa daerah seperti Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kabupaten Lombok Tengah berada pada kategori sedang pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan kemampuan fiskal daerah yang relatif lebih baik dalam mendukung pembiayaan pembangunan, meskipun masih memerlukan optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) dan diversifikasi sumber ekonomi untuk memperkuat kemandirian fiskal.

Di sisi lain, sebagian besar daerah lainnya masih berada pada kategori rendah hingga sangat rendah. Kabupaten Lombok Timur tercatat memiliki kapasitas fiskal sangat rendah pada tahun 2025 dengan indeks hanya 0,048, meskipun merupakan salah satu daerah dengan jumlah penduduk terbesar di NTB. Kondisi ini menunjukkan bahwa besarnya kebutuhan pelayanan publik belum sepenuhnya diimbangi oleh kemampuan pendapatan

daerah. Selain itu, Kota Mataram yang merupakan pusat pemerintahan dan ekonomi juga masuk kategori rendah pada tahun 2025 dengan indeks 0,116. Hal ini mengindikasikan adanya tekanan kebutuhan belanja daerah yang tinggi dibanding kapasitas pendapatan yang tersedia.

Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima juga masih berada pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan pembiayaan pembangunan di daerah-daerah tersebut masih sangat dipengaruhi oleh dana transfer pusat, sementara kapasitas PAD belum cukup kuat untuk menopang kebutuhan pembangunan secara mandiri.

Tabel 5. 4 Perkembangan Peta Kapasitas Fiskal di Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat Tahun 2021-2025

NO	WILAYAH	2021	2022	2023	2024	2025	KATEGORI
1	Kota Mataram	1.150	1.599	1.547	1,544	0,116	Rendah
2	Lombok Barat	0.887	1.379	0.953	0,843	0,165	Sedang
3	Lombok Utara	0.515	1.579	1.444	1,388	0,221	Sedang
4	Lombok Tengah	0.898	1.065	0.763	0,886	0,176	Sedang
5	Lombok Timur	1.344	1.539	1.264	1,017	0,048	Sangat Rendah
6	Sumbawa Barat	0.574	1.951	2.362	1,653	0,457	Sangat Tinggi
7	Sumbawa	0.770	1.339	1.082	0,941	0,034	Rendah
8	Dompu	0.592	1.407	1.273	1,048	0,028	Rendah
9	Bima	0.676	1.287	0.929	0,846	0,032	Rendah
10	Kota Bima	0.523	1.200	1.230	0,964	0,020	Rendah
	NTB	**0.408**	**1.465**	**1.375**	**1,241**	**0,598**	**Rendah**

Sumber : Kementerian Keuangan RI, 2025 (data diolah)

Rendahnya peta kapasitas fiskal di provinsi dan kabupaten/kota se-NTB mengindikasikan bahwa kemampuan fiskal dalam membelanjakan anggaran secara lebih leluasa terbatas. Faktor yang paling mempengaruhi Peta Kapasitas Fiskal bagi daerah provinsi adalah PAD, semakin besar maka akan semakin baik dan mandiri. Namun rata-rata PAD baik provinsi dan kabupaten/kota se-NTB masih dalam kategori belum mandiri (< 50 persen), masih bergantung pada transfer pusat. Oleh karena itu peningkatan PAD ditempuh dengan kebijakan menggali dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan yang sesuai dengan kewenangan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah, peningkatan pelayanan, penyiapan dan pemutakhiran data yang dapat mendukung penentuan perhitungan besaran pendapatan, serta peningkatan pendayagunaan kekayaan daerah sebagai sumber pendapatan daerah.

5.2.1.7 Bencana Alam

Sebagai wilayah dengan potensi kebencanaan yang cukup tinggi, provinsi dan kabupaten/kota se-NTB memerlukan kesiapsiagaan dan mitigasi kebencanaan. Kajian Risiko Bencana NTB Tahun 2022-2026 menunjukkan kondisi wilayah NTB masih rawan terhadap 13 (tiga belas) jenis ancaman bencana seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, gempa bumi, tsunami, gunung meletus.

Perkembangan Indeks Risiko Bencana (IRB) kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat selama periode 2021–2025 menunjukkan bahwa seluruh wilayah di NTB berada pada kategori risiko sedang. Kondisi ini menggambarkan bahwa NTB merupakan daerah yang memiliki kerentanan tinggi terhadap berbagai jenis bencana alam akibat karakteristik geografis, topografi, dan kondisi iklim wilayah yang beragam. Ancaman bencana yang dominan meliputi gempa bumi, tsunami, banjir, tanah longsor, kekeringan, cuaca ekstrem, kebakaran hutan dan lahan, serta gelombang ekstrem dan abrasi. Adapun perkembangan nilai IRB Provinsi NTB dan kabupaten/kota se-NTB kurun waktu 2021 sampai dengan 2025 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. 5 Perkembangan Indeks Risiko Bencana di Kabupaten/Kota se-NTB Tahun 2021-2025

NO	KABUPATEN/ KOTA	2021	2022	2023	2024	2025	KATEGORI	KETERANGAN
1	Kota Mataram	90.03	90.03	89.44	89.44	133,46	Sedang	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kekeringan
2	Lombok Utara	94.50	102.71	112.79	99.16	118,39	Sedang	Gempa Bumi, Letusan Gunung Api, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem
3	Lombok Barat	145.84	129.66	116.90	107.22	119,67	Sedang	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem
4	Lombok Tengah	146.99	136.01	127.55	133.05	165,07	Sedang	Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem
5	Lombok Timur	137.88	127.12	118.94	113.01	172,85	Sedang	Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem
6	Sumbawa Barat	128.53	128.53	118.21	125.05	144,20	Sedang	Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem
7	Sumbawa	150.00	150.00	137.58	128.58	195,07	Sedang	Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem
8	Dompu	107.21	109.11	108.88	113.94	169,01	Sedang	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem
9	Bima	129.72	132.93	130.80	135.17	194,28	Sedang	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Letusan Gunung Api, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem
10	Kota Bima	92.61	92.23	92.00	91.74	148,17	Sedang	Banjir, Gempa Bumi, Tsunami, Kebakaran hutan dan Lahan, Tanah Longsor, Gelombang Ekstrem dan Abrasi, Kekeringan, Cuaca Ekstrem
	NTB	**122.33**	**119.83**	**115.90**			**Sedang**	

Sumber : https://inarisk.bnpb.go.id/irbi, 2025 (data diolah)

Secara keseluruhan, kondisi IRB di NTB menunjukkan bahwa aspek mitigasi dan ketangguhan bencana harus menjadi prioritas dalam pembangunan daerah. Tingginya potensi multi-bencana menuntut penguatan perencanaan pembangunan berbasis pengurangan risiko bencana, peningkatan kualitas infrastruktur tahan bencana, rehabilitasi lingkungan, penguatan edukasi kebencanaan, serta integrasi adaptasi perubahan iklim dalam kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, pembangunan di NTB tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mampu meningkatkan ketahanan wilayah dan keselamatan masyarakat secara berkelanjutan.

5.2.2 Potensi Pengembangan Wilayah di Provinsi NTB

Sektor unggulan umumnya berkaitan dengan suatu perbandingan, baik itu perbandingan berskala regional, nasional maupun internasional. Pada lingkup internasional, suatu sektor dikatakan memiliki unggulan jika sektor tersebut mampu bersaing dengan sektor yang sama dengan negara lain. Sedangkan pada lingkup nasional, suatu sektor dapat dikategorikan sebagai sektor unggulan apabila sektor di wilayah tertentu mampu bersaing dengan sektor yang sama di wilayah lain, baik di pasar nasional ataupun domestik. Suatu daerah akan mempunyai sektor unggulan apabila daerah tersebut dapat memenangkan persaingan pada sektor yang sama dengan daerah lain sehingga dapat menghasilkan pendapatan ekspor.

Sektor unggulan merupakan tulang punggung dan penggerak perekonomian, sehingga dapat juga disebut sebagai sektor kunci atau sektor pemimpin perekonomian suatu wilayah. Dengan demikian, sektor unggulan merupakan refleksi dari suatu struktur perekonomian, sehingga dapat pula dipandang sebagai salah satu aspek penciri atau karakteristik dari suatu perekonomian. Sektor unggulan di suatu daerah (wilayah) berhubungan erat dengan data PDRB dari daerah bersangkutan. Karena di dalam PDRB terkandung informasi yang sangat penting diantaranya untuk melihat output sektor ekonomi (kontribusi masing-masing sektor) dan tingkat pertumbuhan dalam suatu daerah baik daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Penentuan sektor unggulan menjadi hal yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah sesuai era otonomi daerah saat ini, dimana daerah memiliki kesempatan serta kewenangan untuk membuat kebijakan yang sesuai dengan potensi daerah demi mempercepat pembangunan ekonomi daerah. Adapun kriteria sektor unggulan yaitu: pertama sektor unggulan memiliki laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kedua sektor unggulan memiliki angka penyerapan tenaga kerja yang relatif besar, ketiga sektor unggulan memiliki keterkaitan antara sektor yang tinggi baik ke depan maupun ke belakang, dan keempat sektor yang mampu menciptakan nilai tambah yang tinggi.

Dalam pengembangan ekonomi di wilayah NTB dilakukan berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki oleh setiap wilayah. Salah satu instrumen untuk mengindikasikan sektor-sektor unggulan daerah dilakukan melalui pendekatan *economic base*. Konsep dasar *economic base* terletak pada asumsi bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu wilayah ditentukan oleh produktivitas lapangan usaha dari wilayah yang mampu

memberikan kontribusi yang cukup besar dan berpeluang meningkat. Sektor-sektor yang kinerja produktivitasnya baik dan tumbuh pesat dikategorikan sebagai *base activities sectors* (sektor unggulan). Sebaliknya, kategori lapangan usaha yang tidak memiliki performa produktivitas yang tinggi dapat dikategorikan sebagai *non-base sectors* (sektor bukan unggulan). Analisi dari sektor unggulan dan bukan unggulan didasarkan pada nilai tambah atau lapangan pekerjaan yang diciptakan (jumlah tenaga kerja yang terserap).

Berdasarkan hasil analisis dalam pengembangan potensi unggulan di wilayah kabupaten/kota se-NTB menurut tipologi Klassen, maka dapat dibagi ke dalam 4 (empat) kuadran yaitu Kuadran 1 dikelompokan pada sektor maju dan tumbuh pesat; Kuadran 2 dikelompokan pada sektor maju tapi tertekan; Kuadran 3 dikelompokan pada sektor potensial atau masih dapat berkembang dengan pesat; dan Kuadran 4 dikelompokan pada sektor relatif tertinggal. Berdasarkan hasil identifikasi potensi unggulan untuk wilayah NTB berdasarkan jenis lapangan usaha dapat diuraikan sebagai berikut.

a. **Kuadran 1 (Q-1) Maju dan Tumbuh Pesat** yang mencakup :
   1) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu;
   2) Pengadaan Listrik dan Gas : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara;
   3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Lombok Utara;
   4) Real Estate ; potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, dan Kabupaten Lombok Timur;
   5) Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
   6) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, dan Kota Bima.

b. **Kuadran 2 (Q-2) Maju Tetapi Tertekan** yang mencakup :
   1) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kota Mataram, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
   2) Jasa Perusahaan : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima;

3) Jasa Pendidikan : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima.

c. **Kuadran 3 (Q-3) Potensial, Bisa Berkembang** yang mencakup :
   1) Pengadaan Listrik dan Gas : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
   2) Informasi dan Komunikasi : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
   3) Jasa Keuangan dan Asuransi : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

d. **Kuadran 4 (Q-4) Relatif Tertinggal** yang mencakup :
   1) Pertambangan dan Penggalian : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
   2) Industri Pengolahan : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kota Bima;
   3) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
   4) Konstruksi : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu;
   5) Transportasi dan Pergudangan : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu;
   6) Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
   7) Jasa Lainnya : potensi unggulan ini terdapat di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima.

Untuk hasil identifikasi potensi unggulan di kabupaten / kota se-NTB menurut sektor dapat diuraikan sebagai berikut:

a. **Kuadran 1 (Q-1) Maju dan Tumbuh Pesat** yang mencakup :
   1) Sektor Primer : potensi unggulan ini terdapat di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa, dan Kabupaten Dompu;
   2) Sektor Tersier : potensi unggulan ini terdapat di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.
b. **Kuadran 2 (Q-2) Maju Tetapi Tertekan** yang mencakup :
   1) Sektor Tersier : potensi unggulan ini terdapat di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
c. **Kuadran 3 (Q-3) Potensial, Bisa Berkembang** yang mencakup :
   1) Sektor Tersier : potensi unggulan ini terdapat di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima;
d. **Kuadran 4 (Q-4) Relatif Tertinggal** yang mencakup :
   1) Pertambangan dan Penggalian : potensi unggulan ini terdapat di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima (primer, sekunder, dan tersier);
   2) Sektor Sekunder : potensi unggulan ini terdapat di Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima;
   3) Sektor Tersier : potensi unggulan ini terdapat di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, dan Kota Bima.

Sedangkan untuk hasil identifikasi potensi unggulan menurut kabupaten/kota se-NTB dapat dilihat pada uraian berikut.

Gambar 5. 3 Potensi Unggulan Wilayah Menurut Kabupaten/Kota se-NTB

Q1: MAJU & TUMBUH

1. **Kota Mataram** : Pertambangan dan Penggalian; Pengadaan Listrik dan Gas; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; dan Jasa Keuangan;
2. **Lombok Barat** : Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estate; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya;
3. **Lombok Tengah** : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Real Estate; Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; ; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya;
4. **Lombok Timur** : Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; Industri Pengolahan; ; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Informasi dan Komunikasi; Real Estate; Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa Lainnya;
5. **Lombok Utara** : Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
6. **Sumbawa Barat** : Pertambangan dan Penggalian;

Q2: MAJU, TETAPI

1. **Kota Mataram** : Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
2. **Lombok Barat** : Konstruksi, Adm. Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
3. **Lombok Tengah** : Industri Pengolahan;
4. **Lombok Timur** : -
5. **Lombok Utara** : Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Real Estate; Jasa Perusahaan; dan Jasa Pendidikan;
6. **Sumbawa Barat** : -
7. **Sumbawa** : -
8. **Dompu** : Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Real Estate; Jasa Perusahaan; dan Jasa Pendidikan;
9. **Bima** : Pertanian Kehutanan dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; dan Transportasi Pergudangan;
10. **Kota Bima** : Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minuml Real Estate; Jasa Perusahaan; Adm.

Q3: POTENSIAL, BISA

2. **Lombok Barat** : Jasa Perusahaan
3. **Lombok Tengah** : Pengadaan Listrik dan gas; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa perusahaan; dan Jasa Pendidikan;
4. **Lombok Timur** : Pertambangan dan Penggalian; Transportasi Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Jasa Keuangan dan Ausransi; Jas perusahaan;
5. **Lombok Utara**; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Administrasi Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib;
6. **Sumbawa Barat** : Pertanian Kehutanan dan Perikanan, Pengadaan Listrik dan gas, Informasi dan Komunikasi; Jasa keuangan dan Asuransi; Adm. Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
7. **Sumbawa**: Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial;
8. **Dompu** : Pengadaan Listrik dan Gas; Informasi dan Komunikasi;

Q4: RELATIF TERTINGGAL

1. Penggalian; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum;
2. Lombok Barat : Pertanian; Pertambangan dan Penggalian; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor;
3. Lombok Tengah: Pertambangan dan Penggalian;
4. Lombok Timur;
5. Lombok Utara: Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Spd Motor; Transportasi dan Pergudangan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya;
6. Sumbawa Barat : Industri Pengolahan; Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Real Estate; Jasa Perusahaan; Jasa Pendidikan
7. Sumbawa : Pertambangan dan penggalian; Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi Makan Minum; Real Estate; Jasa perusahaan; Adm. Pemerintahan Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; dan Jasa lainnya;
8. Dompu: Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Air Pengelolaan Sampah Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Transportasi dan pergudangan; Penyediaan Akomodasi Makan Minum; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; Jasa lainnya;

Tabel 5. 6 Sasaran dan Indikator Pembangunan Kewilayahan Kabupaten/kota Tahun 2027

Target Kesepakatan 2027	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Kemiskinan	Rasio Gini	TPT	PDRB Per Kapita	Kontribusi PDRB	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	IKLH	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah
Kota Mataram	5,17-7,02	6,10 - 6,79	0,373 - 0,379	4,29 - 4,56	61,06	14,45	9,8	65,05	84,75	4,30
Kab. Lombok Barat	5,24 - 5,94	10,25 - 11,24	0,331 - 0,340	2,68 - 2,70	27,14*	10,89	4,50	74,66	48,39	4,17
Kab. Lombok Utara	4,58 - 5,4	17,86 - 19,14	0,264 - 0,280	1,36 - 2,55	24,47	3,5	1,38	77,93	59,7108	3,58
Kab. Lombok Tengah	5,36 - 6,34	9,20 - 10,14	0,325 - 0,338	2,89 - 3,19	21,77	13,16	4,80	72,32	64,66	3,79
Kab. Lombok Timur	4,94-5,42	12,40 - 13,07	0,270 - 0,297	2,68 - 2,75	20,08	14,73	7,03	72,83	59,91	3,82
Kab. Sumbawa Barat	3,01 - 6,00	9,50 - 10,42	0,320 - 0,337	2,95 - 3,92	240	19,97	15,00	83,70	56,19	3,58
Kab. Sumbawa	4,93 - 5,20	9,80 - 10,80	0,326 - 0,378	2,24 - 2,47	37,14 - 37,55	10,85	2,10	81,26	53,02	4,21
Kab. Dompu	5,4-6,3	9,6-10,2	0,251-0,277	2,45-2,6	43,5-44,5	5,10-5,75	4,5-5,1	76,6-77,3	71,5-72,5	3,65-3,85
Kab. Bima	4,19 - 5,15	10,60 - 11,95	0,308 - 0,340	1,83 - 2,00	30,50	8,50	2,16	70,00*	48,14	3,90

Target Kesepakatan 2027	Laju Pertumbuhan Ekonomi	Tingkat Kemiskinan	Rasio Gini	TPT	PDRB Per Kapita	Kontribusi PDRB	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	IKLH	Indeks Inovasi Daerah	Indeks Daya Saing Daerah
Kota Bima	4,54 - 5,37	6,31 - 7,07	0,361 - 0,380	3,68 - 4,07	34,64	3,02	3,15	74,43	85,64	3,95
Nusa Tenggara Barat	4,80-5,70	9,80-10,80	0,351-0,353	2,00 - 2,69	33,67 - 34,25	0,82 - 0,85	6,69 - 7,00	77,40 - 78,00	73,25 - 78,85	3,53 - 3,70

Sumber : Hasil Diskusi Pra-Musrenbang Provinsi NTB Tahun 2026

5.2.3 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota di Pulau Lombok

5.2.3.1 Pendekatan Pengembangan Wilayah Pulau Lombok

Arah kebijakan pembangunan kabupaten/kota di Pulau Lombok didasarkan pada pendekatan Lombok Eco City and Resilient Island atau Pulau Tangguh untuk Pulau Lombok yang ditinjau dari kondisi geografis, fenomena degradasi lingkungan, dan sistem sosial. Berdasarkan kondisi geografis, Pulau Lombok termasuk pulau kecil dengan ciri-ciri biogeofisik yang unik dan kompleks. Akan tetapi, pulau kecil dan daerah pesisir merupakan wilayah yang sangat rentan terhadap perubahan iklim. Perubahan iklim ini yang menyebabkan munculnya bencana-bencana alam, khususnya bencana hidrologis. Posisi Provinsi NTB juga berada di cincin api (rings of fire), menjadi alasan kuat bahwa Pulau Lombok perlu menjadi pulau tangguh.

Pertumbuhan penduduk di Pulau Lombok sangat pesat yang disebabkan oleh berbagai faktor seperti tarikan kegiatan dan aksesibilitas internal yang mudah. Dengan sumber daya alam yang terbatas dan harus meyediakan kebutuhan penduduk yang sangat banyak, maka degradasi lingkungan tidak dapat dihindari. Melihat kondisi geofisik Pulau Lombok yang sepertiganya adalah kawasan Gunung Rinjani yang terdiri dari ekosistem hutan dan taman nasional yang berfungsi sebagai daerah tangkapan, sehingga sebagian besar mata air dan sungai di Pulau Lombok berasal dari satu sumber yang sama. Tekanan jumlah penduduk yang besar menjadi ancaman terhadap penurunan kualitas lingkungan di Pulau Lombok. Tekanan berat pada SDA hingga melampaui daya dukung lestarinya, telah mengakibatkan peningkatan lahan lahan kritis, pencemaran sungai, penurunan debit mata air, sert mengancam keberlanjutan sistem kehidupan di Pulau Lombok.

Ketahanan" (resilience) dalam konteks pengembangan wilayah Pulau Lombok mengandung kata kunci kemampuan bertahan terhadap tekanan dan bencana serta kemampuan untuk menjaga fungsi-fungsi lindung yang terkait dengan upaya pemulihan lingkungan yang telah mengalami degradasi, sekaligus menjaga fungsi utama, dalam hal ini sebagai penyedia sumber daya alam seperti air, hutan, dan lainnya. Dampak dari perubahan iklim tidak hanya berkaitan dengan persoalan lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan persoalan ekonomi dan sosial. Kerentanan terhadap kondisi lingkungan, sosial, dan ekonomi akan mengarah pada ketidakmampuan dalam mengakses perubahan dan melakukan pemulihan. Oleh sebab itu, penanganan terhadap bencana perlu menjadi pengarusutamaan secara sektoral yang melibatkan berbagai lapisan.

Rencana pembangunan dan pengembangan wilayah harus selaras dengan upaya antisipasi, mitigasi, adaptasi, kesiapsiagaan, penanganan (tanggap) darurat, serta proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana agar Pulau Lombok bisa kembali dengan

kondisi yang lebih kuat dari sebelumnya untuk menghadapi tantangan di masa mendatang. Tantangan yang akan dihadapi oleh wilayah Pulau Lombok adalah:

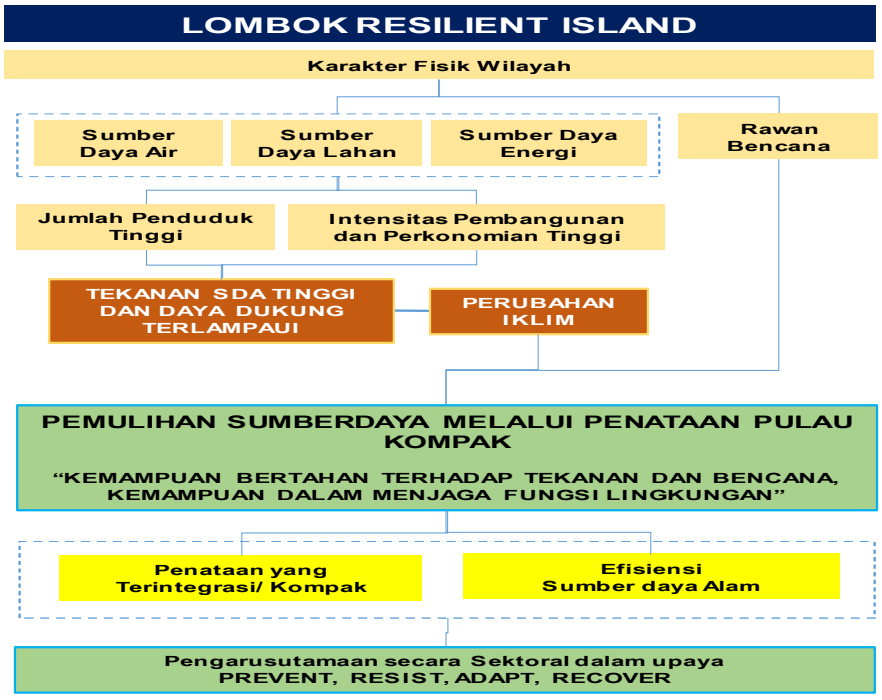
1. Tantangan ekonomi, mencakup transformasi struktur ekonomi, migrasi spasial dan sektoral, ketersediaan sumber daya dan lahan pertanian serta ketahanan pangan, investasi dan permodalan, ketahanan energi ramah lingkungan, ekonomi berkelanjutan.
2. Tantangan sosial, mencakup penanggulangan penyakit, penanganan konflik sosial dan kriminalitas, peningkatan Indeks Pembangunan Masyarakat (IPM), kelembagaan yang harmoni.
3. Tantangan lingkungan, mencakup bencana alam, pengelolaan limbah dan sampah, serta pelestarian alam.

Implikasi penerapan Lombok Eco City and Resilient Island adalah segala bentuk pembangunan diarahkan untuk mencegah, mengurangi, dan beradaptasi terhadap perubahan iklim. Oleh sebab itu, rencana pembangunan dan pengembangan di Pulau Lombok harus diatur secara selektif untuk peruntukan budidaya dan memaksimalkan fungsi-fungsi konservasi kawasan lindung.

Dalam aspek arahan pengembangan wilayah di pulau Lombok adalah :

1. Mengendalikan kegiatan perkotaan yang membutuhkan lahan luas dan potensial yang berdampak pada alih fungsi lahan sawah dan kawasan lindung;
2. Menerapkan pembangunan fisik dengan mempertimbangkan faktorfaktor resiko bencana;
3. Menerapkan kegiatan pariwisata yang melindungi dan melestarikan lingkungan dan potensi alam serta memberikan keberlanjutan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat.

Gambar 5. 4 Dasar Pemikiran Konsep *Lombok Eco City and Resilient Island*



Sumber: Materi Teknis RTRW Provinsi NTB, 2024

Tabel 5. 7 Arah Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan

No.	Aspek	Arah Kebijakan
1.	Sasaran	• Pemanfaatan air dan energi yang lestari (*green energy and green water*) • Kesempatan ekonomi baru • Kesiapan menghadapi bencana dan penyakit • Mobilitas yang terintegrasi (*green transportation*) • Keterbukaan informasi publik dan pemerintahan • SDM yang kompetitif
2.	Pendekatan dan Pola Pengembangan/ Pemanfaatan Ruang Wilayah	***Pengaturan secara selektif untuk peruntukan budidaya dan memaksimalkan fungsi-fungsi konservasi kawasan lindung*** • Pendekatan **satu pulau satu sistem** dengan Rinjani sebagai pusatnya, dimana Rinjani diarahkan untuk mendukung tata air di Pulau Lombok • Pendekatan pengembangan wilayah darat: - Penataan wilayah diatur berdasarkan sistem DAS, yaitu wilayah hulu (hutan, Kawasn Gunung Rinjani), wilayah tengah, dan hilir (muara, perairan); - Masing-masing wilayah tersebut di atas terbagi menjadi zona inti, zona penyangga, dan zona pemanfaatan berdasarkan Satuan Kemampuan Lahan (SKL). - Pemulihan SDA yang mengalami degradasi dan meningkatkan kualitas SDA yang masih ada. • Pendekatan pengembangan wilayah laut/perairan

No.	Aspek	Arah Kebijakan
		- Wilayah laut Provinsi NTB berada pada laut territorial, yaitu 12 mil dari garis dasar ke laut lepas. - Pemanfaatan sumber daya laut dilakukan pada ZEE dengan pembagian zonasi berdasarkan kedalamannya dan/atau berdasarkan ekosistemnya. - Revitalisasi sumber daya laut guna pemanfaatan secara lestari • Resiliensi Pulau Lombok terdiri dari 5 (lima) kerangka: - Aspek lingkungan hidup meliputi energi, sumber daya air, tutupan hijau, lahan dan perairan, kesehatan lingkungan, dan penanggulangan pencemaran - Aspek sosial meliputi pembahuran pengetahuan, SDM yang kompeten, kesehatan, dan perlindungan gender. - Aspek ekonomi meliputi ketahanan dan kedaulatan pangan, pendapatan hijau, perlindungan asset, dan penanggulangan kemiskinan. - Aspek infrastruktur meliputi ketahanan bangunan, permukiman layak, fasilitas publik memadai dan melayani, sarana pendidikan, ruang-ruang evakuasi - Aspek tata kelola meliputi kebijakan, perencanaan, penganggaran, partisipasi masyarakat, kerjasama antar wilayah, dan kerjasama antar lembaga
3.	Strategi Penataan Ruang Berdimensi Ekologi	**Pengelolaan Sumber Daya Air Lestari** • Pelarangan exploitasi hutan secara besar-besaran; • Pengaturan komposisi ruang berbasis sistem DAS. • Konservasi air melalui pendekatan eko-drainase, dimana air hujan dan aliran permukaan di panen dan dimasukan sebanyak-banyak ke dalam tanah dan bukan dibuang ke laut. • Pemanfaatan sumber-sumber air secara lestari sesuai dengan kebutuhan • Penerapan bentuk-bentuk teknologi konservasi air sesuai kebutuhan dan kondisi lahan • Konservasi air melalui pendekatan eko-antropos, yaitu membudayakan efisiensi pemanfaatan air yang diimbangi dengan upaya konservasi air yang memadai • Perbaikan kualitas air dengan membuat sumber air buatan dan menyediakan area-area resapan **Pemanfaatan Energi Secara Lestari** • Mempromosikan perilaku ramah lingkungan • Pemanfaatan sumber daya energi sampai pada pemanfaatan akhir, dengan menggunakan teknologi yang efisien dan membudayakan pola hidup hemat energi • Mencari dan mengembangkan sumber-sumber energi alternatif; • Pengembangan desa mandiri energi • Pengembangan dan pemanfaatan limbah yang diolah menjadi sumber energi (*waste to energy*). **Penanggulangan Limbah dan Persampahan** • Mengedukasi masyarakat dan para pelaku usaha tentang pengelolaan sampah dan limbah tepat guna
4.	Strategi Pembanguan Berdimensi Ekologi untuk Kawasan Lindung dan Budidaya	
5.	Strategi Penataan/ Pembangunan Berdimensi Lingkungan Hidup	

No.	Aspek	Arah Kebijakan
		• Mempromosikan Zero Waste sebagai bagian dari gaya hidup modern (kekinian) • Penerapan prinsip 6R (Reuse, Recycle, Reduce, Replace, Refill, Repair) yang didukung oleh instrumen kebijakan • Mengemas pola-pola pengelolaan sampah dan limbah secara komersial dari penimbunan sampah dan pembakaran limbah menjadi daur ulang. • Penempatan sumber daya manusia (managed service) dalam mengelola sampah dan limbah • Pengelolaan limbah dan sampah secara terpadu berbasis segmen bisnis dan sarana komersial (CSR) dengan standar pengendalian pencemaran lingkungan hidup; • Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan limbah yang ramah terhadap lingkungan.
6.	Strategi Penataan/ Pembangunan Berdimensi Ekonomi	• Menyusun rencana bisnis berkelanjutan • Menyusun investasi hijau atau green budgeting • Mendorong berkembangnya ekonomi lokal • Meningkatkan integrasi pendanaan perencanaan • Mempromosikan kewirausahaan baru yang ramah lingkungan, yaitu: - Pekerjaan yang dapat membantu melindungi ekosistem; - Pekerjaan yang berkaitan dengan peningkatan efisiensi/penghematan energi, penghematan materi/bahan, dan konsumsi air yang efisien tinggi; - pekerjaan terkait dengan upaya penurunan emisi karbon dalam ekonomi - Pekerjaan yang berkaitan dengan pengurangan atau pencegahan pembuatan segala bentuk limbah dan polusi • Penyediaan lapangan-lapangan kerja baru untuk menurunkan jumlah pengangguran dan menyiapkan status ekonomi sebagai pusat kegiatan • Mengembangkan usaha yang inovatif yang berorientasi sosial dan ramah lingkungan
7.	Strategi Penataan/ Pembangunan Berdimensi Sosial Budaya	• Aksesibilitas / Mobilitas / Transportasi yang Terintegrasi • Promosi budaya menggunakan transportasi umum melalui program-program tepat sasaran; • Meningkatkan koordinasi dan manajemen institusional transportasi publik • Membangun mekanisme transportasi hijau yang terintegrasi dengan prasarana lainnya • Memberlakukan transportasi umum massal yang terhubung dengan lingkup wilayah yang lebih kecil • Membangun jalur infrastruktur hijau yang tepat sasaran • Menyediakan dan meningkatkan asset alam dan buatan, melalui perlindungan terhadap infrastruktur penting • Manajemen pengelolaan transportasi berbasis pergerakan moda sistem satu pulau; • Optimalisasi layanan infrastruktur penting • Komunikasi dan mobilitas yang dapat diandalkan

No.	Aspek	Arah Kebijakan
		• Menyediakan moda angkutan umum massal yang terintegrasi dengan prasarana sarana transportasi darat, laut, dan udara • Membangun kapasitas kelembagaan untuk konektivitas antar-moda • Merencanakan/merancang cetak biru Lombok Berketahanan, melalui: • Penyusunan satu peta bencana, rencana kontinjensi, dll • Pemenuhan kebutuhan dasar sesuai standar yang berlaku • Jaminan peayanan kesehatan • Pemetaan lokasi rawan bencana, serta menetapkan jalur evakuasi (koridor jalur hijau) dan tempat evakuasi (gedung evakuasi, RT) dan pengendalian permukiman di area zona berbahaya (rawan longsor, jalur gempa, tsunami). • Rehabilitasi dan rekonstruksi perkotaan dan pusat-pusat pertumbuhan harus sesuai persyaratan mitigasi bencana dan menjadikan KTB • Menyediakan sanitasi yang memadai • Menyediakan fasilitas-fasilitas kesehatan • Relokasi bertahap hingga penyiapan lahan pengungsian bagi kawasan yang rawan bencana • Pengembangan dan penerapan teknologi dalam manajemen bencana dan penanggulangan penyakit • Peningkatan kapasitas stakeholder dalam manajemen bencana dan penyakit • Meningkatkan koordinasi dalam hal pengurangan resiko bencana • Meningkatkan kualifikasi pendidikan yang lebih tinggi sembari membuka peluang pendidikan yang lebih besar • Meningkatkan pendidikan informal di sektor informal dan formal • Membangunan identitas budaya lokal, terutama kearifan lokal. • Memasukkan pendidikan sadar dan tanggap bencana, cerdas dan bijak tinggal di kawasan rentan bencana. • Mendorong partisipasi masyarakat secara terpadu • Transformasi profesi yang ada dan ditetapkan kembali kriteria/kompetensi baru yang lebih ramah terhadap lingkungan
8.	Keterbukaan Informasi Publik dan Pemerintahan	• Optimalisasi Musrembang dalam proses perencanaan • Optimasi koordinasi pemerintah lintas SKPD dalam hal integrasi data dan informasi publik; • Membangun kepemimpinan yang efektif, pemberdayaan pemangku kepentingan, dan perencanan terpadu • Melembagakan komunitas di dalam masyarakat sebagai bagian dari perencanaan • Peningkatan sharing informasi, inovasi dan kolaborasi untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik di berbagai sektor

Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044

5.2.3.2 Pembangunan pada Kawasan Strategis Provinsi di Pulau Lombok

Penentuan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) di Provinsi NTB dilakukan dengan mempertimbangkan aspek kepentingan, kriteria, dan arahan penanganan di masing-

masing KSP yang ditetapkan. KSP di Pulau Lombok difokuskan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi. Terdiri dari 2 (dua) KSP yang memiliki nilai ekspor dan mendorong berkembangnya ekonomi di Pulau Lombok yaitu :

Tabel 5. 8 KSP di Pulau Lombok

No.	KSP	Cakupan Wilayah	Sektor Unggulan
A.	Pulau Lombok		
1.	Kawasan Mataram Raya - Gili Matra dan Sekitarnya	Kota Mataram, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, perairan Kawasan Kayangan, perairan Kawasan Gili Indah, dan perairan Kawasan Lembar	Perdagangan-jasa, industri, pariwisata, dan perikanan
2.	Kawasan Kuta Mandalika dan Sekitarnya	Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, perairan Kawasan Teluk Sepi, perairan Kawasan Kuta, perairan Kawasan Teluk Ekas, perairan Kawasan Samudera Hindia Lombok, perairan Kawasan Lembar, dan perairan Teluk Jukung	Pariwisata, perikanan, dan industri

Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044

Gambar 5. 5 Rencana Pengembangan KSP Pulau Lombok



Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044

2. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Mataram Raya-Gili Tramena dan Sekitarnya sebagai berikut:
   a. Pengembangan *linkage system* sektor perdagangan-jasa, industri, pariwisata, dan perikanan yang terintegrasi;
   b. Perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya kelautan dan perikanan yang mendukung sektor perdagangan-jasa, industri, pariwisata, dan perikanan;
   c. Penataan dan pengendalian kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
   d. Penyelenggaraan kegiatan perdagangan-jasa, industri, pariwisata

berkelanjutan, dan perikanan lestari yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;

e. Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor perdagangan-jasa, industri, pariwisata, dan perikanan;
f. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi perdagangan-jasa, industri, pariwisata, dan perikanan;
g. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha perdagangan-jasa, industri, pariwisata, dan perikanan; dan
h. Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor perdagangan-jasa, industri, pariwisata, dan perikanan.

3. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kuta Mandalika dan Sekitarnya sebagai berikut :
   a. Pengembangan *linkage system* sektor pariwisata, perikanan, dan industri yang terintegrasi;
   b. Perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya kelautan dan perikanan yang mendukung sektor pariwisata, perikanan, dan industri;
   c. Penataan dan pengendalian kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
   d. Penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkelanjutan, perikanan lestari yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
   e. Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, perikanan, dan industri;
   f. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi pariwisata, perikanan, dan industri;
   g. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha pariwisata, perikanan, dan industri; dan
   h. Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, perikanan, dan industri.

5.2.4 Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten/Kota di Pulau Sumbawa

5.2.5.1 Pendekatan Pengembangan Wilayah Pulau Sumbawa

Paradigma pembangunan berkelanjutan muncul seiring dengan percepatan pertumbuhan ekonomi. Muncul kesadaran bahwa pertumbuhan ekonomi yang dipercepat menuntut eksploitasi besar-besaran terhadap SDA, sehingga terjadi degrasi lingkungan dan muncul kantong-kantong kesenjangan secara massif. Tak dapat dipungkiri bahwa kesejahteraan manusia pada akhirnya bergantung pada kemampuan alam untuk menyediakan beberapa sumber daya dasar, seperti air, lahan, udara bersih, dan iklim yang baik untuk mendukung kehidupan.

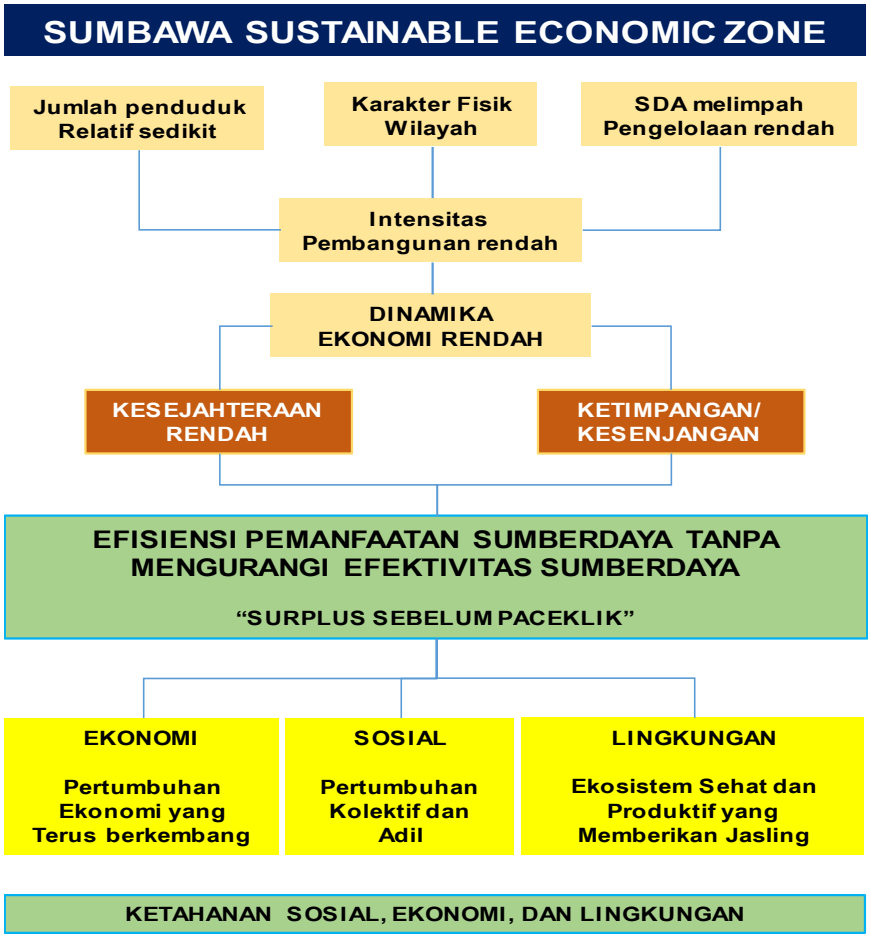
Bagi wilayah yang memiliki pasokan SDA relatif banyak dengan intensitas pengelolaan yang terbatas seperti Pulau Sumbawa, kelimpahan SDA ini dapat menjadi anugerah sekaligus bencana apabila salah dalam pengelolaan. Menghadapi tantangan yang sama dengan Pulau Lombok di bidang lingkungan, ekonomi, dan sosial, ada perbedaan yang mendasar dalam pengelolaan SDA di Pulau Sumbawa. Jika Pulau Lombok menitikberatkan proses pemulihan SDA sebagai bentuk perbaikan terhadap kondisi lingkungan sehingga mampu menghadapi berbagai tekanan di masa mendatang, maka Pulau Sumbawa menitikberatkan pada pemanfaatan sumber daya alam secara lestari yang mendorong pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan sosial yang kolektif dan adil, serta lingkungan tetap produktif dan sehat dalam memberikan jasa lingkungan.

Belajar dari kondisi Pulau Lombok, pengembangan Pulau Sumbawa memang tidak diarahkan untuk melakukan eksploitasi SDA besar-besaran untuk medorong pembangunan wilayahnya. Kondisi seperti ini mempercepat kelangkaan sumber daya alam, biaya sosial dari polusi dan perubahan iklim semakin meningkat, dan ekosistem yang mendukung kehidupan terancam karena bencana, pada akhirnya keberlanjutan kesejahteraan manusia secara fundamental ikut terancam. Oleh sebab itu, konsep pengembangan Pulau Sumbawa tetap menekankan pada pertumbuhan ekonomi berkelanjutan pada sektor-sektor strategis yang dimiliki.

Pengembangan ekonomi berkelanjutan di Pulau Sumbawa berlaku jangka panjang dengan penerapan yang kongkrit dan nyata yang didukung oleh kesiapan masyarakat dan kesiapan instrumen penerapannya. Kata kunci dari konsep ini adalah **produksi dan konsumsi berkelanjutan (*sustainable consumption and production*)** yang dicirikan sebagai berikut:

1. Peningkatan investasi hijau;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas lapangan pekerjaan pada sektor hijau (pertanian, perkebunan, perikanan, energi dan pertambangan, industri, dan kehutanan);
3. Peningkatan pangsa sektor hijau;
4. Penurunan energi/sumberdaya yang digunakan dalam setiap unit produksi;
5. Penurunan CO2 dan tingkat polusi per GDP yang dihasilkan; dan
6. Penurunan konsumsi yang menghasilkan sampah (*decrease in wasteful consumption*).

Gambar 5. 6 Dasar Pemikiran Pendekatan *Sumbawa Sustainable Economic Zone*



Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044

Implikasi penerapan konsep tersebut adalah segala bentuk pembangunan diarahkan untuk pertumbuhan ekonomi hijau. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi didorong untuk mematuhi dan taat pada rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Kawasan dengan keanekaragaman hayati yang beragam harus dikelola secara efisien dan lestari sehingga dapat menjadi peluang dalam pertumbuhan inklusif dan merata, ketahanan sosial-ekonomi-lingkungan, ekosistem yang sehat dan produktif memberikan jasa-jasa lingkungan, serta pengurangan emisi gas rumah kaca.

Berpegang pada prinsip pembanguan berkelanjutan yang mengintegrasikan kepentingan ekonomi (*green economic*), pada dasarnya sektor-sektor strategi berpotensi menyumbangkan emisi terhadap perubahan lingkungan. Dalam prakteknya, *sustainable economic zone* meninitikberatkan pada sektor-sektor ekonomi strategis yang apabila dikelola dengan tepat bisa melindungi layanan jasa ekosistem dan mengamankan komoditas dimana masyarakat bergantung untuk kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Maka, inti dari konsep pengembangan wilayah di Pulau Sumbawa adalah pemanfaatan SDA dan keanekaragaman hayati secara lestari untuk

memberikan kontribusi di bidang ekonomi yang dapat mensejahterakan masyarakat secara merata melalaui strategi antisipasi, mitigasi dan adaptasi.

5.2.5.2 Pembangunan pada Kawasan Strategis Provinsi di Pulau Sumbawa

KSP di Pulau Sumbawa difokuskan untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi yang terdiri dari 6 (enam) KSP, untuk kepentingan fungsi serta daya dukung lingkungan terdiri dari 3 (tiga) KSP. Cakupan wilayah beserta sektor unggulan dari masing-masing KSP di Pulau Sumbawa dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5. 9 KSP di Pulau Sumbawa

No.	KSP	Cakupan Wilayah	Sektor Unggulan
A	**KSP dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi**		
1.	Kawasan Industri Sumbawa Barat dan Sekitarnya	Kabupaten Sumbawa Barat dan perairan Kawasan Maluk	Pertambangan dan industri turunannya, perikanan, dan pariwisata
2.	Kawasan Agribisnis Poto Tano - Alas - Utan dan Sekitarnya	Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, perairan Kawasan Maluk, perairan Kawasan Alas, dan perairan Kawasan Pantura Sumbawa	Agroindustri, perikanan, peternakan, dan pariwisata
3.	Kawasan Teluk Saleh - Moyo - Tambora (SAMOTA) dan Sekitarnya	Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, perairan Kawasan Pantura Sumbawa, perairan Kawasan Laut Flores Dompu, dan perairan Kawasan Teluk Saleh	Perikanan, pariwisata, pertanian, peternakan, dan industri (minaindustri, agroindustri, dan energi)
4.	Kawasan Teluk Cempi - Hu'u dan Sekitarnya	Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, perairan Kawasan Teluk Cempi, perairan Kawasan Samudera Hindia Sumba Dompu, dan perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada	Pariwisata, perikanan, industri, pertambangan dan energi
5.	Kawasan Teluk Bima dan Sekitarnya	Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima, Kota Bima, perairan Kawasan Sape, perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu, perairan Kawasan Laut Flores Dompu, perairan Kawasan Teluk Bima, dan perairan Kawasan Teluk Sanggar	Pariwisata, perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa
6.	Kawasan Waworada - Sape dan Sekitarnya	Kabupaten Bima, perairan Kawasan Samudera Hindia Cempi Waworada, perairan Kawasan Waworada, perairan Kawasan Sape, dan perairan Kawasan Laut Flores Bima Dompu	Perikanan, pariwisata, dan industri
B	**KSP dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan**		
1.	Kawasan Ekosistem	Kabupaten Sumbawa	Pelestarian ekosistem hutan

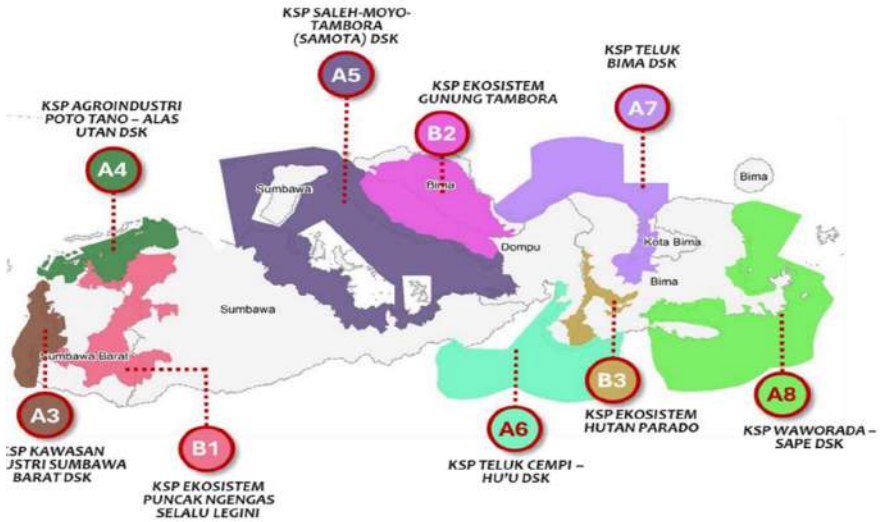
No.	KSP	Cakupan Wilayah	Sektor Unggulan
	Puncak Ngengas Selalu Legini	Barat dan Kabupaten Sumbawa	
2.	Kawasan Ekosistem Hutan Parado	Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima	Pelestarian ekosistem hutan
3.	Kawasan Ekosistem Gunung Tambora	Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima	Mendukung cagar biosfer

Sumber : Perda Nomor 5 Tahun 2024 tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2024-2044

Arahan kebijakan untuk pulau Sumbawa sebagai berikut :

1. Mendorong kegiatan ekonomi unggulan berbasis pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan kelautan serta pariwisata;
2. Meningkatkan optimalisasi potensi wilayah perairan;
3. Memprioritaskan investasi untuk pengembangan kawasan.

Gambar 5. 7 Peta KSP Pulau Sumbawa



2. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Industri Sumbawa Barat dan sekitarnya :
   a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam unggulan;
   b. Perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam;
   c. Industrialisasi hulu dan hilir sektor unggulan;
   d. Peningkatkan peran serta swasta dan masyarakat;
   e. Pemanfaatan teknologi tepat guna ramah lingkungan; dan
   f. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana.
3. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Agribisnis Poto Tano-Alas-Utan

dan sekitarnya :

a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam unggulan;
b. Perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam;
c. Industrialisasi hulu dan hilir sektor unggulan;
d. Peningkatkan peran serta swasta dan masyarakat;
e. Pemanfaatan teknologi tepat guna ramah lingkungan; dan
f. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana.

4. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Teluk Saleh-Moyo-Tambora (SAMOTA) dan sekitarnya :
   a. Pengembangan sektor pariwisata, industri dan perikanan yang berkela njutan dan memiliki nilai tambah yang tinggi;
   b. Penguatan sistem pusat pelayanan kegiatan ekonomi yang terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana wilayah dalam mendukung kegiatan pariwisata dan perikanan;
   c. Pengendalian dan pelestarian kawasan lindung dan cagar biosfer dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup dan pembangunan berkelanjutan;
   d. Pengembangan dan pengendalian kawasan budidaya dengan memperhatikan aspek keberlanjutan dan kelestarian lingkungan hidup dalam menciptakan kawasan yang aman, nyaman, harmonis dan produktif;
   e. Peningkatan peran masyarakat dalam pengembangan kawasan; dan
   f. Pengelolaan mitigasi bencana dalam pemanfaatan ruang Kawasan.
5. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Teluk Cempi-Hu'u dan sekitarnya :
   a. Pengembangan pusat-pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam unggulan;
   b. Perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam;
   c. Industrialisasi hulu dan hilir sektor unggulan dengan memanfatkan teknologi tepat guna ramah lingkungan;
   d. Pengembangan dan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana;
   e. Penataan dan pengendalian kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
   f. Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keb erlanjutan sektor pariwisata, perikanan, industri, pertambangan dan energi; dan
   g. Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, perikanan, dan industri.

6. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Teluk Bima dan sekitarnya :
   a. Perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya kelautan dan perikanan yang mendukung sektor pariwisata, perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa;
   b. Penataan dan pengendalian kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
   c. Penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkelanjutan, perikanan lestari, industri, serta perdagangan dan jasa yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
   d. Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa;
   e. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi pariwisata, perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa;
   f. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha pariwisata, perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa; dan
   g. Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, perikanan, industri, serta perdagangan dan jasa.
7. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Waworada-Sape dan sekitarnya :
   a. Pengembangan *linkage system* sektor pariwisata, perikanan, dan industri yang terintegrasi;
   b. Perlindungan, pelestarian, serta optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya alam serta sumber daya kelautan dan perikanan yang mendukung sektor pariwisata, perkanan, dan industri;
   c. Penataan dan pengendalian kawasan yang berbasis pada aspek pengurangan risiko bencana;
   d. Penyelenggaraan kegiatan pariwisata berkelanjutan, perikanan lestari yang berwawasan lingkungan dan berbasis kerakyatan;
   e. Peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang mendukung kualitas dan keberlanjutan sektor pariwisata, perikanan, dan industri;
   f. Peningkatan produktivitas dan diversifikasi usaha yang berbasis potensi pariwisata, perikanan, dan industri;
   g. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia pelaku usaha pariwisata, perikanan, dan industri; dan
   h. Peningkatan peran serta masyarakat dan kelembagaan dalam mendukung dan menciptakan iklim berusaha di sektor pariwisata, perikanan, dan industri.
8. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Ekosistem Puncak Ngengas Selalu Legini dan sekitarnya :
   a. Perlindungan terhadapnkelestarian keanekaragaman hayati;
   b. Pemanfaatan jasa ekosistem ramah lingkungan;

c. Penyediaan layanan ekosistem dasar dalam kondisi kritis seperti perlindungan daerah aliran sungai dan pengendali erosi;
d. Pengelolaan kawasan yang memiliki kebutuhan dasar untuk komunitas lokal serta memiliki peranan penting bagi warga setempat, seperti kawasan budaya, ekologi, subsisten, dan tempat ibadah; dan
e. Pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang menerapkan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

9. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Ekosistem Hutan Parado dan sekitarnya :
   a. Penghijauan dan reboisasi hutan;
   b. Rehabilitasi hutan dan lahan kritis;
   c. Pengawasan dan penertiban kegiatan masyarakat yang berpotensi merusak lingkungan;
   d. Pengelolaan hutan dilaksanakan secara bijaksana dengan mempertimbangkan sumber ekonomi dan kelestariannya secara keberlanjutannya; dan
   e. Pengembangan dan pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang menerapkan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.
10. Arah Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi (KSP) Kawasan Ekosistem Gunung Tambora dan sekitarnya :
   a. Pengelolaan kawasan berbasis zonasi yang meliputi zona inti, zona rimba atau penyangga, zona perlindungan khusus, zona pemanfaatan, dan zona budidaya;
   b. Konservasi dan preservasi ekosistem dan rehabilitasi kawasan hutan; dan
   c. Pemanfaatan nilai-nilai kearifan lokal dan budaya yang menerapkan pelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup.

BAB VI RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Rencana kerja dan pendanaan program dan kegiatan daerah tahun 2026 merupakan penjabaran tahun pertama dari perencanaan jangka menengah yang termuat dalam RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2029. Penyusunannya juga memperhatikan keterkaitan dengan prioritas pembangunan nasional pada RKP Tahun 2026, serta harus mempunyai keberpihakan terhadap penyelesaian permasalahan pembangunan yang terjadi di Kabupaten/Kota serta mensinkronkan dari hasil pembahasan substansi substansi program dan kegiatan yang dilakukan melalui proses perencanaan seperti Konsultasi Publik, Forum OPD dan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Sebagai implementasi pendekatan bawah-atas (*bottom-up*) yang membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan yang terdiri dari pihak akademisi, dunia usaha, komunitas, pemerintahan, dan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah. daerah diminta untuk menggunakan aplikasi SIPD dalam melakukan perencanaan, penganggaran dan penatausahaan. Oleh karena itu dalam penyusunan RKPD Provinsi NTB Tahun 2025 disusun melalui sistem SIPD (*https:// sipd-ri.kemendagri.go.id*) pada tahapan proses perencanaan. Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah yang akan disusun melalui SIPD dirangkum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari dokumen ini.

6.1 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBD

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan secara terpadu berdasarkan urusan/kewenangan baik urusan wajib maupun urusan pilihan serta fungsi penunjang dan fungsi lainnya, dengan dukungan pendanaan bersifat indikatif. Adapun rekapitulasi rencana anggaran berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 adalah sebagai berikut.

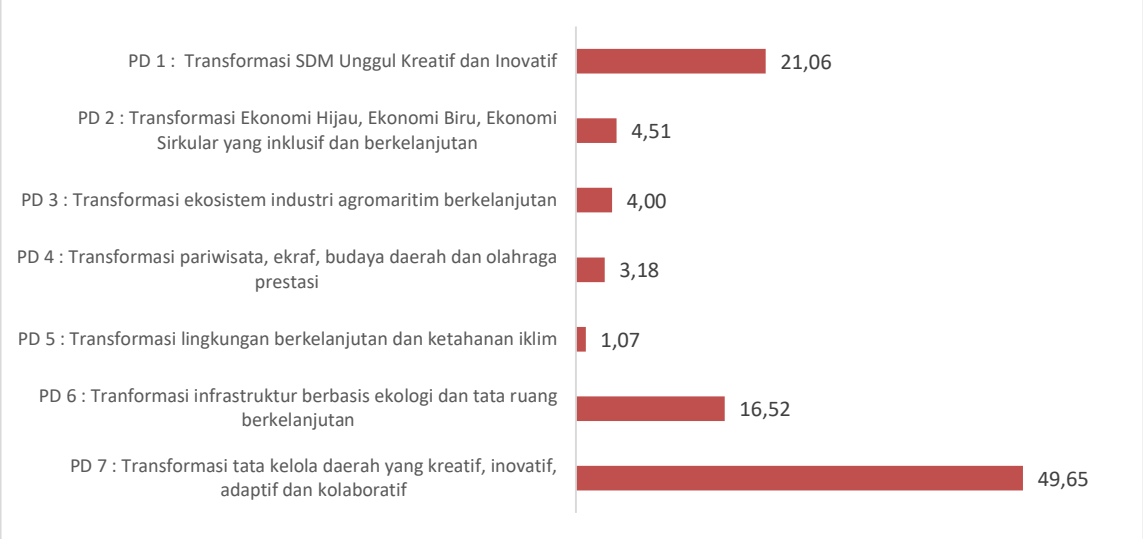
Tabel 6. 1 Rekapitulasi Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027

Prioritas dan Sasaran Daerah		Nilai (Rp.)
PD 1 : Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif		**510.384.838.578**
1	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	364.807.620.000
2	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	141.698.830.203
3	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	3.878.388.375
PD 2 : Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular yang inklusif dan berkelanjutan		**109.399.312.762**
4	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	8.175.090.200
5	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	5.775.961.582
6	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	3.477.144.300
7	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	67.004.444.980
8	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	5.605.600.000
9	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	18.811.071.700
10	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	550.000.000
PD 3 : Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan		**96.932.671.743**

Prioritas dan Sasaran Daerah		Nilai (Rp.)
11	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	4.108.430.000
12	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	92.824.241.743
PD 4 : Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi		**77.121.313.590**
13	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	7.409.459.500
14	Meningkatnya indeks budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, ekonomi budaya untuk menunjang perbaikan IPK daerah	6.711.854.090
15	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	63.000.000.000
PD 5 : Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim		**26.021.046.935**
16	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	1.258.362.904
17	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	9.733.207.891
18	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	9.941.150.265
19	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik yang merata serta berkelanjutan	1.974.744.975
20	Meningkatnya iklim Investasi Berkelanjutan	3.113.580.900
PD 6 : Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan		**400.414.544.785**
21	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	348.888.951.985
22	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang	51.525.592.800
PD 7 : Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif		**1.203.200.460.040**
23	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	1.174.867.884.460
24	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	24.438.348.980
25	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam Mendukung Pembangunan Daerah	3.894.226.600
	TOTAL	**2.423.474.188.433**

Sumber : Bappeda NTB, diolah 2026

Grafik 6. 1 Persentase Anggaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2027



Sumber : Bappeda NTB, diolah 2026

Alokasi anggaran pembangunan Provinsi NTB Tahun 2027 sebesar Rp2,423 triliun mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung tema pembangunan "Penguatan Upaya Transformasi dalam Pengentasan Kemiskinan, Ketahanan Pangan, dan

Ekosistem Industri Agromaritim serta Destinasi Pariwisata Berkualitas Berkelanjutan." Tema tersebut sekaligus menjadi implementasi dari Triple Agenda NTB, yaitu pengentasan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan melalui pembangunan ekosistem industri pertanian dan subsektornya, serta menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.

Dari sisi struktur anggaran, Prioritas Daerah 7 (Transformasi Tata Kelola Daerah) memperoleh alokasi terbesar, yaitu Rp1,203 triliun atau sekitar 49,65 persen dari total anggaran. Besarnya alokasi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pelaksanaan tema pembangunan tidak hanya ditentukan oleh besarnya investasi pada sektor-sektor utama, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam menghadirkan tata kelola yang efektif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis kinerja. Penguatan birokrasi, digitalisasi pelayanan publik, pengelolaan keuangan daerah, riset dan inovasi, serta stabilitas pemerintahan menjadi faktor pendukung yang memastikan seluruh program pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, pengembangan industri agromaritim, dan pariwisata dapat berjalan secara terintegrasi dan tepat sasaran.

Pada aspek pengentasan kemiskinan, dukungan anggaran terlihat melalui Prioritas Daerah 1 (Transformasi SDM Unggul, Kreatif dan Inovatif) sebesar Rp510,38 miliar dan Prioritas Daerah 2 (Transformasi Ekonomi Hijau, Biru, dan Sirkular) sebesar Rp109,40 miliar. Investasi pada peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, pemberdayaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, pembangunan desa, perluasan akses keuangan, serta peningkatan taraf hidup masyarakat merupakan instrumen penting dalam mengurangi angka kemiskinan secara berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengentasan kemiskinan tidak hanya dilakukan melalui bantuan sosial, tetapi juga melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan aktivitas ekonomi masyarakat.

Selanjutnya, tema ketahanan pangan dan penguatan ekosistem industri agromaritim diwujudkan melalui Prioritas Daerah 3 (Transformasi Ekosistem Industri Agromaritim Berkelanjutan) dengan alokasi Rp96,93 miliar, yang sebagian besar difokuskan pada peningkatan produktivitas sektor pertanian, peternakan, kelautan, perikanan, dan kehutanan. Upaya tersebut diperkuat oleh Prioritas Daerah 2 melalui peningkatan ketahanan pangan dan pembangunan wilayah pedesaan, serta Prioritas Daerah 6 (Transformasi Infrastruktur Berbasis Ekologi dan Tata Ruang Berkelanjutan) sebesar Rp400,41 miliar yang diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah. Sinergi ketiga prioritas tersebut mendukung terbentuknya ekosistem industri agromaritim yang lebih produktif, efisien, memiliki nilai tambah yang tinggi, serta mampu memperkuat posisi NTB sebagai lumbung pangan nasional sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani, nelayan, dan pelaku usaha sektor primer.

Sementara itu, tema pengembangan destinasi pariwisata berkualitas berkelanjutan didukung melalui Prioritas Daerah 4 (Transformasi Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Budaya Daerah dan Olahraga Prestasi) sebesar Rp77,12 miliar, yang diarahkan pada peningkatan daya saing pariwisata, ekonomi kreatif, pelestarian budaya, serta pengembangan sumber daya manusia di bidang olahraga. Pengembangan destinasi wisata juga diperkuat oleh pembangunan infrastruktur dan konektivitas pada Prioritas Daerah 6, serta pengelolaan lingkungan hidup dan konservasi sumber daya alam pada Prioritas Daerah 5. Sinergi tersebut menjadi prasyarat penting dalam mewujudkan destinasi wisata yang berkualitas,

berdaya saing global, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, komposisi anggaran menunjukkan bahwa pembangunan Tahun 2027 tidak hanya diarahkan untuk membiayai program-program sektoral, tetapi juga membangun fondasi transformasi pembangunan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur yang secara kumulatif mencapai sekitar 87,23 persen dari total anggaran. Ketiga prioritas tersebut menjadi enabling factors bagi percepatan pelaksanaan tema pembangunan Tahun 2027, sehingga upaya pengentasan kemiskinan, penguatan ketahanan pangan, pembangunan ekosistem industri agromaritim, dan pengembangan destinasi pariwisata berkualitas berkelanjutan dapat berjalan secara lebih efektif, terpadu, dan berkelanjutan.

Dengan demikian, struktur alokasi anggaran Tahun 2027 telah menunjukkan keterkaitan yang kuat antara tema RKPD Tahun 2027, tujuh Prioritas Daerah, dan Triple Agenda NTB, yaitu mewujudkan NTB Tanpa Kemiskinan, NTB Makmur melalui penguatan ketahanan pangan dan industri agromaritim, serta NTB Mendunia melalui pengembangan destinasi wisata berkualitas berkelanjutan, sebagai langkah menuju visi "Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur dan Mendunia."

Tabel 6. 2 Program Prioritas Daerah Tahun 2027

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
PD 1 : Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif	Meningkatnya Akses dan Layanan Pendidikan Berkualitas yang Merata di NTB	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	364.472.620.000	364.807.620.000
		Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM	55.000.000	
		Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	170.000.000	
		Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN	60.000.000	
		Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA	50.000.000	
	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	138.237.424.556	141.698.830.203
		Dinas Kesehatan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA KESEHATAN	864.760.947	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
		Dinas Kesehatan	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	145.801.900	
		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.450.842.800	
	Meningkatnya Penguatan Ketahanan dan Keharmonisan Keluarga, serta Kesetaraan Gender	Dinas Sosial P3A	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	67.597.500	3.878.388.375
		Dinas Sosial P3A	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	255.969.600	
		Dinas Sosial P3A	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	1.500.000.000	
		Dinas Sosial P3A	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	54.202.500	
		Dinas Sosial P3A	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	190.475.000	
		Dinas Sosial P3A	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	852.180.000	
		Dinas Kesehatan	PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	349.645.300	
		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	160.734.500	
		Dinas Kesehatan	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	447.583.975	
PD 2 : Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular yang inklusif dan berkelanjutan	Meningkatnya Produktivitas UMKM, Koperasi, dan Nilai Tambah Perdagangan	Dinas Koperasi UKM	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	404.683.000	8.175.090.200
		Dinas Koperasi UKM	PROGRAM PENGAWASAN DAN	158.000.000	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
			PEMERIKSAAN KOPERASI		
		Dinas Koperasi UKM	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI	217.000.000	
		Dinas Koperasi UKM	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	100.000.000	
		Dinas Koperasi UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	1.000.000.000	
		Dinas Koperasi UKM	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	1.875.725.800	
		Dinas Koperasi UKM	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	419.681.400	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	-	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.150.000.000	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	1.050.000.000	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	1.400.000.000	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	400.000.000	
	Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja dan Menurunnya Tingkat Pengangguran	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	77.155.500	5.775.961.582
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	1.132.872.935	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	721.478.055	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	3.111.402.000	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	733.053.092	
	Meningkatnya Ketersediaan Akses Keuangan	Sekretariat Daerah	PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	3.477.144.300	3.477.144.300
	Meningkatnya Taraf Hidup Masyarakat	Dinas Sosial P3A	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	3.424.565.000	67.004.444.980
		Dinas Sosial P3A	PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	50.000.000	
		Dinas Sosial P3A	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	7.290.432.480	
		Dinas Sosial P3A	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	55.726.570.000	
		Dinas Sosial P3A	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	449.212.500	
		Dinas Sosial P3A	PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	63.665.000	
	Meningkatnya ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan pangan yang berkelanjutan	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	500.000.000	5.605.600.000
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	3.455.600.000	
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	1.300.000.000	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	350.000.000	
	Meningkatnya Pemerataan Pembangunan di wilayah Pedesaan	DPMDUKCAPIL	PROGRAM PENATAAN DESA	56.393.600	18.811.071.700
		DPMDUKCAPIL	PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA	385.713.400	
		DPMDUKCAPIL	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	15.615.941.700	
		DPMDUKCAPIL	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	2.253.023.000	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PERENCANAAN KAWASAN TRANSMIGRASI	45.984.400	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	352.135.600	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI	101.880.000	
	Menurunnya disparitas harga antar wilayah dalam provinsi	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	550.000.000	550.000.000
PD 3 : Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan	Meningkatnya Kontribusi Industri Agromaritim	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	3.908.430.000	4.108.430.000
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	100.000.000	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	100.000.000	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
	Meningkatnya Produktivitas Sektor Agromaritim (Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan, dan Kehutanan)	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	31.869.518.047	92.824.241.743
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	42.314.132.300	
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	1.282.039.700	
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.439.316.100	
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	1.836.849.406	
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan - Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	64.349.000	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	3.115.170.000	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	3.407.150.000	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	611.238.900	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.380.093.090	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN	504.385.200	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
			MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN		
PD 4 : Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi	Meningkatnya Nilai Tambah Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	2.209.459.500	7.409.459.500
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	4.000.000.000	
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	600.000.000	
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	600.000.000	
	Meningkatnya indeks budaya literasi, ekspresi budaya, warisan budaya, ekonomi budaya untuk menunjang perbaikan IPK daerah	Dinas Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	3.193.609.000	6.711.854.090
		Dinas Kebudayaan	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	107.500.000	
		Dinas Kebudayaan	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	15.000.000	
		Dinas Kebudayaan	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	30.310.090	
		Dinas Kebudayaan	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN	1.065.435.000	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2.190.000.000	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	110.000.000	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
	Meningkatnya Daya Saing Pemuda dan Prestasi Olahraga	Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	1.000.000.000	63.000.000.000
		Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	61.700.000.000	
		Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	300.000.000	
PD 5 : Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim	Meningkatnya Ketahanan Daerah dalam Penanggulangan Bencana	BPBD	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	1.101.445.255	1.258.362.904
		BPBD	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	156.917.649	
	Meningkatnya Pengelolaan lingkungan Hidup Berkualitas	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	128.220.000	9.733.207.891
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	1.495.273.663	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	202.113.274	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	150.900.000	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN	211.140.000	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
			IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	150.000.000	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	6.439.361.789	
		Dinas Energi dan SumberDaya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN	231.999.990	
		Dinas Energi dan SumberDaya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA	724.199.175	
	Meningkatnya Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)	70.364.000	9.941.150.265
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA	97.062.000	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN	5.380.093.090	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	130.300.000	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL	3.303.700.000	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	959.631.175	
	Meningkatnya Ketahanan Energi Ramah Lingkungan dan konsumsi listrik	Dinas Energi dan SumberDaya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	1.165.133.075	1.974.744.975

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
	yang merata serta berkelanjutan				
		Dinas Energi dan SumberDaya Mineral	PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN	809.611.900	
	Meningkatnya iklim Investasi Berkelanjutan	DPMPTSP	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	1.086.194.500	3.113.580.900
		DPMPTSP	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	617.009.600	
		DPMPTSP	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	578.913.500	
		DPMPTSP	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	783.323.300	
		DPMPTSP	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	48.140.000	
PD 6 : Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan	Meningkatnya Pembangunan Infrastruktur dan Konektifitas Antar Wilayah yang Terintegrasi	Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	39.776.205.770	348.888.951.985
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	4.013.040.000	
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	10.910.000.000	
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	1.668.171.259	
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	4.056.000.000	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	13.353.000.000	
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	65.349.995.000	
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	650.000.000	
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	88.045.743.400	
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	499.990.000	
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	3.000.000.000	
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	15.437.580.000	
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	88.182.420.000	
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	-	
		Dinas Perhubungan	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	10.362.154.882	
		Dinas Perhubungan	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	3.584.651.674	
	Meningkatnya kepatuhan dalam penyelenggaraan penataan ruang	Dinas PUPRPKP	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	1.185.000.000	51.525.592.800
		Dinas PUPRPKP	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH	50.340.592.800	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
			KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE		
PD 7 : Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	Meningkatnya Kualitas dan Kapasitas Tata Kelola Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	PROGRAM PENATAAN ORGANISASI	1.519.758.000	1.174.867.884.460
		Sekretariat Daerah	PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH	1.000.000.000	
		Sekretariat Daerah	PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT	53.498.521.764	
		Sekretariat Daerah	PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM	5.993.766.600	
		Sekretariat Daerah	PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA	968.982.600	
		Sekretariat Daerah	PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN	665.985.000	
		Bappeda	PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	6.087.388.300	
		Bappeda	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	5.372.739.200	
		Bapenda	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	11.764.535.000	
		BKAD - Bapenda	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	1.011.108.288.436	
		BKAD	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	988.942.310	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	6.636.422.600	
		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	2.272.705.250	
		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	656.060.000	
		Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	780.920.000	
		Inspektorat	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	7.906.780.000	
		Inspektorat	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	1.629.350.000	
		Badan Kepegawaian Daerah	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	2.311.766.000	
		BPSDM	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	10.096.089.300	
		Badan Penghubung	PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG	139.203.700	
		DPMDUKCAPIL	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	138.835.600	
		DPMDUKCAPIL	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	268.095.700	
		DPMDUKCAPIL	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	268.095.700	
		DPMDUKCAPIL	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	-	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	600.000.000	

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	-	
		Sekretariat DPRD	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	42.194.653.400	
	Meningkatnya Penegakan Hukum yang Adil dan Terpeliharanya Stabilitas Keamanan untuk Mendukung Demokrasi yang Berkualitas	Bakesbangpoldagri	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	2.091.774.200	24.438.348.980
		Bakesbangpoldagri	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA	7.572.795.000	
		Bakesbangpoldagri	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	3.399.339.000	
		Bakesbangpoldagri	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	631.258.000	
		Bakesbangpoldagri	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	5.068.995.000	
		Satpol PP	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	5.674.187.780	
	Meningkatnya Keunggulan Riset dan Inovasi dalam	Badan Riset dan Inovasi Daerah	PROGRAM PENELITIAN DAN	2.843.726.600	3.894.226.600

Prioritas Daerah	Sasaran Daerah	Perangkat Daerah	Program	Nilai (Rp)	
	Mendukung Pembangunan Daerah		PENGEMBANGAN DAERAH		
		Badan Riset dan Inovasi Daerah	PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	1.050.500.000	
TOTAL					**2.423.474.188.433**

Sumber : Bappeda NTB, diolah 2026

Rencana Belanja Daerah Provinsi NTB Tahun 2027 sesuai dengan rencana kebijakan Belanja Daerah adalah sebesar Rp. 6.060.657.280.402 yang tersebar di perangkat daerah lingkup pemerintah provinsi seperti yang disajikan pada tabel berikut ini :

Tabel 6. 3 Rekapitulasi Alokasi Anggaran Indikatif Perangkat Daerah Provinsi NTB Tahun 2027

No	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)
1	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	1.888.985.906.838
2	Dinas Kesehatan	164.631.129.489
3	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	144.093.906.142
4	Rumah Sakit Mutiara Sukma	72.513.135.262
5	Rumah Sakit Mandalika	56.868.337.330
6	Rumah Sakit Mata	42.829.133.320
7	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi NTB	875.037.178.342
8	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	464.291.873.126
9	Satuan Polisi Pamong Praja	22.926.249.216
10	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	12.978.668.450
11	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	105.211.992.906
12	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	29.188.149.723
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	105.811.297.951
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31.044.747.247
15	Dinas Perhubungan	25.661.773.857
16	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	22.949.717.283
17	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	17.154.917.388
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	11.733.829.410
19	Dinas Kebudayaan	14.618.037.164
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	16.420.871.422
21	Dinas Kelautan dan Perikanan	41.944.560.000
22	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	22.305.188.317

No	Perangkat Daerah	Pagu (Rp)
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	39.149.361.717
24	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	133.223.479.898
25	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral	13.218.225.541
26	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	29.233.086.023
27	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia	6.923.170.895
28	Biro Kesejahteraan Rakyat	54.779.321.880
29	Biro Organisasi	2.145.213.400
30	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah	1.294.634.000
31	Biro Pengadaan Barang dan Jasa	1.810.121.500
32	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	4.633.580.380
33	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan	138.329.494.176
34	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	114.907.341.260
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	35.162.246.087
36	Badan Keuangan dan Aset Daerah	1.044.786.997.408
37	Badan Pendapatan Daerah	117.442.470.062
38	Badan Kepegawaian Daerah	18.220.932.340
39	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	27.310.086.122
40	Badan Riset dan Inovasi Daerah	12.314.068.376
41	Badan Penghubung Daerah	13.145.473.063
42	Inspektorat	36.618.800.428
43	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	26.808.575.659
	TOTAL	**6.060.657.280.402**

Sumber : Bappeda NTB, 2026 (Data Olahan)

Selanjutnya beberapa program strategis dalam upaya mendukung prioritas pembangunan daerah Tahun 2027 diantaranya adalah sebagai berikut :

Tabel 6. 4 Program Strategis Pembangunan Daerah Tahun 2027

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
1	**Percepatan Penanganan Standar Pelayanan Minimal (SPM)**			**160.833.883.879**	**6,55**
	SPM Bidang Kesehatan			**3.901.736.050**	
	Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	2.572.084.000	
	Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi	Dinas Kesehatan	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi	1.329.652.050	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
	SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum			**360.632.500**	
	Pelayananan Ketenteraman dan Keteriban Umum Provinsi	Satuan Polisi Pamong Praja	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	360.632.500	
	SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			**5.681.211.259**	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	4.013.040.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	1.668.171.259	
	SPM Bidang Pendidikan			**143.847.690.000**	
	Angka Partisipasi Sekolah	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	25.000.000	
	Keamanan, Kebhinekaan, dan Inklusivitas	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I	Pengelolaan Pendidikan Khusus	82.000.000	
	Kekhususan SMK	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	143.715.690.000	
	Literasi dan Numerasi	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	Pengelolaan Pendidikan Khusus	25.000.000	
	SPM Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman			**2.917.807.100**	
	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah provinsi.	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.822.007.100	
	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana provinsi	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	1.095.800.000	
	SPM Bidang Sosial			**4.124.806.970**	
	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	449.212.500	
	Rehabilitasi sosial dasar anak telantar di dalam panti	Perlindungan Perempuan dan Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti	2.049.052.500	
	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di dalam panti	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	1.283.197.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di dalam panti	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti	103.100.000	
	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam panti	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	240.244.970	
2	**Kemiskinan Ekstrim**			**965.037.435.418**	**39,32**
	Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan			204.789.521.989	
		Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	326.495.770	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	150.637.900	
		Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok	Pemeliharaan Rutin Jalan	15.383.749.400	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	-	
		Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa	Pemeliharaan Rutin Jalan	17.947.949.700	
			Pemeliharaan Rutin Jembatan	2.033.406.400	
		Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok	Operasi dan Pemeliharaan Embung	7.918.000.000	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	7.509.000.000	
		Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa	Operasi dan Pemeliharaan Embung	2.956.306.300	
			Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	8.434.693.700	
		Biro Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	167.500.000	
			Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	18.909.315.565	
		Dinas Kebudayaan	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	10.000.000	
			Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	1.020.611.000	
			Pemanfaatan Cagar Budaya	5.310.090	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	90.000.000	
			Penetapan Cagar Budaya	5.000.000	
			Pengembangan Cagar Budaya	5.000.000	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	375.000.000	
		Dinas Kesehatan	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	210.055.900	
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik	Penyediaan Akses Internet	781.490.000	
			Penyusunan Konten	86.800.000	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus	-	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	50.000.000	
			Pelaksanaan penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota	-	
			Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	-	
			Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	100.900.000	
			Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	1.240.000.000	
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	221.309.500	
			Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	795.162.600	
			Optimalisasi TPA/TPST/SPA	9.910.000.000	
			Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	4.437.580.000	
			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.257.836.500	
			Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan	2.056.000.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	3.720.000.000	
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	300.000.000	
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	503.040.000	
			Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	500.000.000	
			Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus	580.440.000	
			Penggantian Jembatan	15.507.500.000	
			Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi	110.000.000	
			Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	1.200.000.000	
			Peningkatan Tanggul Sungai	3.904.000.000	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	-	
			Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.281.710.000	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	1.220.637.900	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	2.000.000.000	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.368.171.259	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.000.000.000	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.510.000.000	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.542.163.500	
			Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	1.416.000.000	
			Rekonstruksi Jalan	35.637.500.000	
			Survey Kondisi Jalan/Jembatan	315.000.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
		Dinas Perhubungan	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	63.698.000	
			Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	801.866.324	
			Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	282.973.973	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	79.155.296	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.873.396.713	
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	200.000.000	
			Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	325.000.000	
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1.500.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	2.780.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	113.191.000	
			Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	12.900.000	
			Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	10.000.000	
			Pengangkatan Anak antar WNI	15.000.000	
			Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	35.000.000	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	3.305.000.000	
			Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	8.250.000	
			Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana	30.812.500	
			Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	21.130.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
		Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	25.091.000	
		Satuan Polisi Pamong Praja	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi	1.900.000.000	
			Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	55.000.000	
			Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	35.025.800	
		Taman Budaya	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	259.698.000	
			Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	90.000.000	
			Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	32.750.000	
		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	35.214.900	
			Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	3.665.315.499	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	-	
	Mengurangi Beban Pengeluaran			664.869.984.587	
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	146.673.500.000	
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	40.500.000	
			Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	124.981.540	
			Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor	65.000.000	
			Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	36.000.000	
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	27.000.000	
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana	48.984.405	
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	137.979.900	
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	346.500.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	27.000.000	
		Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	240.000.000	
			Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	-	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.062.552.097	
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	-	
		Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	25.000.000	
			Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	25.000.000	
		Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	20.000.000	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	27.000.000	
		Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	20.000.000	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	22.000.000	
		Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10.000.000	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	16.500.000	
		Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10.000.000	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	9.300.000	
		Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	10.000.000	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	17.000.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
		Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	15.000.000	
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	25.000.000	
		Dinas Kesehatan	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	74.441.000	
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	553.873.100	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	254.116.000	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	9.699.454.382	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	64.622.036.780	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	1.329.652.050	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana	2.572.084.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.158.399.900	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	753.548.200	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	440.300.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	306.859.500	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	341.955.000	
			Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik	1.515.000.000	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	127.734.000	
			Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	49.999.900	
			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	127.168.800	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	624.790.700	
			Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	166.800.000	
			Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	162.500.000	
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2.166.345.900	
			Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	246.444.000	
			Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	140.856.000	
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	886.275.000	
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	547.900.000	
			Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	1.488.000.000	
			Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	127.547.500	
			Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi	97.547.500	
			Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	547.900.000	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	138.835.600	
			Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	138.835.600	
			Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	175.491.800	
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	50.000.000	
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	175.000.000	
			Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	455.000.000	
			Pembangunan Ruang Kelas Baru	700.000.000	
			Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	1.500.000.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	1.025.800.000	
			Pemeliharaan Mebel	44.393.000	
			Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik	525.000.000	
			Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik	700.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	193.308.600.000	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	138.485.540.000	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	18.698.480.000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus	450.000.000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	350.000.000	
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan	175.000.000	
			Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	200.000.000	
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	1.300.000.000	
			Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	765.000.000	
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	148.050.000	
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.150.000.000	
			Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	2.470.000.000	
			Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	35.600.000	
			Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	10.000.000	
			Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	500.000.000	
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.000.000	
			Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota	100.000.000	
			Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	250.000.000	
		Dinas Sosial, Pemberdayaan	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.649.560.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
		Perempuan dan Perlindungan Anak			
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	505.880.000	
			Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal	50.000.000	
			Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar	1.230.000.000	
			Pelayanan Dukungan Psikososial	88.000.000	
			Pemulangan ke Daerah Asal	58.000.000	
			Pemulasaraan	52.200.000	
			Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan	182.400.000	
			Penyediaan Alat Bantu	16.000.000	
			Penyediaan Permakanan	4.593.245.000	
			Penyediaan Sandang	321.399.500	
			Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	15.000.000	
		Perlindungan Perempuan dan Anak	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	69.362.500	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	20.000.000	
			Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
			layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.990.000	
			layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.750.000	
			layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-	
			layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	3.750.000	
			Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	20.000.000	
			layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	38.080.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	345.800.000	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	20.000.000	
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	2.670.000	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	3.040.000	
			Penyediaan Permakanan	1.470.000.000	
			Penyediaan Sandang	118.180.000	
		Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	33.800.000	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	15.096.550	
			Pemulasaraan	8.000.000	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	155.125.000	
			Penyediaan Permakanan	1.283.500.000	
			Penyediaan Sandang	30.000.000	
		Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	22.800.000	
			Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga	-	
			Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses	23.450.860	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti	5.719.110	
			Penyediaan Permakanan	146.525.000	
			Penyediaan Sandang	33.750.000	
		Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	4.800.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	62.400.000	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	28.500.000	
			Pemulasaraan	24.200.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	105.995.200	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	25.619.800	
			Penyediaan Permakanan	969.345.000	
			Penyediaan Sandang	50.337.000	
		Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar	4.000.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	20.000.000	
			Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari	2.400.000	
			Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial	28.800.000	
			Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	4.472.960	
			Pemulasaraan	5.000.000	
			Penyediaan Alat Bantu	1.000.000	
			Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses	6.135.000	
			Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial	7.410.000	
			Penyediaan Permakanan	589.875.000	
			Penyediaan Sandang	36.075.000	
		Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.507.196.600	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.992.803.400	
		Rumah Sakit Mandalika	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	2.750.000.000	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	
			Pengembangan Rumah Sakit	250.000.000	
			Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	-	
		Rumah Sakit Mata	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	3.050.000.000	
		Rumah Sakit Mutiara Sukma	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	4.267.429.425	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin,	1.314.090.571	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan		
			Pengembangan Rumah Sakit	-	
		Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	21.828.072.957	
	Meningkatkan Pendapatan			95.377.928.842	
		Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	50.001.000	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	50.000.000	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	600.000	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	990.000	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	1.200.000.000	
		Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	366.685.000	
		Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	24.999.900	
			Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	278.172.085	
		Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi	200.000.000	
		Balai Latihan Kerja (Skill Center)	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	110.875.000	
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	10.000.000	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	573.655.235	
		Balai Pelatihan Pertanian	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	50.000.000	
			Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	300.000.000	
			Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	10.000.000	
		Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	199.996.200	
		Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	100.000.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
		Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	246.617.282	
		Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	43.333.350	
		Balai Pengembangan Perikanan Budidaya	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	75.000.000	
		Biro Kesejahteraan Rakyat	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	7.940.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	97.500.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	63.500.100	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	122.491.400	
		Dinas Kebudayaan	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200.000.000	
			Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	7.500.000	
			Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	100.000.000	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000	
			Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	15.000.000	
			Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan	41.000.000	
			Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	1.000.000.000	
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah	5.800.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi		
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	
			Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	287.500.000	
			Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.015.000.000	
			Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	60.000.000	
		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	404.683.000	
			Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	217.000.000	
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.984.000.000	
			Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	93.459.000	
			Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	76.999.000	
			Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	67.060.000	
			Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif	220.000.000	
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	440.118.000	
			Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	291.739.500	
			Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	76.712.000	
			Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	609.600.000	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.500.000.000	
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi	158.859.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	177.103.000	
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi	600.000.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	50.000.000	
			Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	100.000.000	
		Dinas Perhubungan	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	183.534.000	
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura	1.560.000.000	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan	3.270.000.000	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura	300.000.000	
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	959.316.000	
			Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	5.498.747.000	
			Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	25.000.000	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan	50.000.000	
			Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Peternakan	27.999.900	
			Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan	45.998.900	
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	52.500.000.000	
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik	44.117.200	
			Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	32.029.100	
			Job Fair/Bursa Kerja	82.000.000	
			Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk	73.843.600	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja		
			Pelayanan Antar Kerja	43.174.125	
			Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	249.622.400	
			Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	98.099.200	
			Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	23.309.925	
			Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	22.500.100	
			Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	25.316.200	
			Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	40.170.800	
			Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja	110.875.000	
			Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	10.000.000	
			Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.882.880.000	
			Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	54.712.300	
			Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	148.759.000	
			Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	20.000.100	
			Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja	61.997.880	
			Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	67.530.525	
			Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi	67.907.400	
			Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro	45.126.400	
			Perluasan Kesempatan Kerja	43.681.900	
			Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	657.197.135	
			Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	211.939.200	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
		Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	250.000.000	
		Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	300.000.000	
		Taman Budaya	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	475.255.000	
		UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	291.739.500	
3	**Stunting**			**1.328.673.089.485**	**54,13**
		Badan Keuangan dan Aset Daerah	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota	26.732.900	
			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	213.681.900	
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	115.049.300	
			Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	117.868.700	
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	128.797.900	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	28.983.200	
			Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	22.018.200	
			Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	185.370.000	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	430.594.400	
			Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	70.064.500	
			Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	106.953.700	
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	153.405.900	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)		
			Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	109.013.300	
			Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	174.943.100	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	178.221.800	
			Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	125.534.300	
		Badan Riset dan Inovasi Daerah	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial	521.093.400	
			Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	150.421.300	
		Dinas Kelautan dan Perikanan	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10.000.000	
			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	510.000.000	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1.236.095.425	
			Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar	10.000.000	
			Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	510.000.000	
			Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	5.800.000	
			Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000	
		Dinas Kesehatan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	8.788.692.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	10.762.006.479	
			Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	553.873.100	
			Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	180.531.000	
			Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	118.621.400	
			Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	128.777.947	
			Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	110.368.000	
			Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	64.622.036.780	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.158.399.900	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	753.548.200	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	440.300.000	
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	341.955.000	
			Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	579.819.000	
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	263.486.000	
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	127.734.000	
			Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	127.168.800	
			Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	210.055.900	
			Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	2.166.345.900	
		Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	93.600.000.000	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.992.803.400	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
		Rumah Sakit Mandalika	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	31.933.717.257	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	-	
		Rumah Sakit Mata	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	21.083.004.326	
		Rumah Sakit Mutiara Sukma	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	28.800.000.000	
			Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	1.314.090.571	
		Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	707.002.495.674	
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.329.309.856	
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	1.488.000.000	
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota	300.000.000	
			Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	503.040.000	
			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	87.620.000.000	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.368.171.259	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.510.000.000	
			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.542.163.500	
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	191.665.300	
			Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	70.375.600	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
			Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	114.898.400	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	34.280.500	
			Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	139.203.700	
			Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1.500.000.000	
			Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	15.106.883.000	
			Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	274.073.400	
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	455.000.000	
			Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	193.308.600.000	
			Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan	148.050.000	
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	2.473.486.577	
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.700.000.000	
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang	50.001.000	
			Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi	50.000.000	
			Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	600.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	25.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	330.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	50.000.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	75.000.000	
			Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	25.000.000	

No	Program Strategis	Perangkat Daerah	Kegiatan/SubKegiatan	NILAI (RP)	%
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	359.316.000	
			Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	18.000.000	
			Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	103.490.000	
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.649.560.000	
			Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	505.880.000	
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	113.191.000	
			Penyediaan Permakanan	4.593.245.000	
			Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	20.000.000	
		Sekretariat Daerah	Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	892.057.000	
			Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	1.021.090.200	
			Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	9.947.084.334	
			Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	167.500.000	
	TOTAL			**2.454.544.408.782**	

Sumber : Data Olahan Bappeda NTB, 2026

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Standar Pelayanan Minimal

Rencana program dan kegiatan untuk Standar Pelayanan Minimal (SPM) menjadi acuan penting dalam upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Pemerintah daerah NTB berkomitmen untuk memenuhi SPM di berbagai sektor, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, dan pelayanan sosial. Adapun focus pelaksanaan kegiatan pada masing-masing SPM sebagai berikut :

a. **Kesehatan:** Pemerintah NTB berfokus pada penyediaan layanan kesehatan dasar seperti imunisasi, pelayanan ibu hamil dan menyusui, serta pencegahan penyakit menular. Fasilitas kesehatan diupayakan agar tersebar merata di seluruh wilayah, termasuk di daerah terpencil.
b. **Pendidikan:** Pemerintah daerah berupaya memastikan semua anak mendapatkan pendidikan dasar yang berkualitas. Program beasiswa dan bantuan pendidikan lainnya sering diimplementasikan untuk mendukung anak-anak dari keluarga kurang mampu.
c. **Infrastruktur:** Pemerintah NTB berfokus pada pembangunan dan perbaikan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, air bersih, dan sanitasi. Hal ini penting

untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan dasar dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

d. **Pelayanan Sosial:** NTB juga menyediakan berbagai program pelayanan sosial untuk membantu kelompok rentan, termasuk lansia, anak-anak, dan penyandang disabilitas, guna memastikan mereka mendapatkan hak-hak dasar mereka.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Stunting

Stunting adalah masalah serius di NTB, dengan prevalensi yang cukup tinggi dibandingkan dengan rata-rata nasional. Pemerintah NTB telah mengidentifikasi beberapa faktor utama yang berkontribusi pada masalah stunting, termasuk:

a. **Kekurangan Gizi:** Banyak anak di NTB mengalami kekurangan gizi kronis, yang disebabkan oleh kurangnya akses terhadap makanan bergizi. Program intervensi gizi seperti pemberian makanan tambahan untuk ibu hamil dan anak-anak balita gencar dilakukan.
b. **Sanitasi yang Buruk:** Akses terhadap air bersih dan sanitasi yang memadai masih menjadi tantangan di banyak daerah. Program-program peningkatan akses air bersih dan pembangunan fasilitas sanitasi terus digalakkan untuk mengurangi infeksi yang dapat menyebabkan stunting.
c. **Pendidikan Gizi:** Kurangnya pengetahuan tentang gizi dan pola asuh yang tepat di kalangan masyarakat juga menjadi penyebab stunting. Pemerintah NTB bekerja sama dengan berbagai organisasi untuk memberikan edukasi tentang pentingnya gizi seimbang dan praktik kebersihan yang baik.

Pelaksanaan Program dan Kegiatan Penanggulangan Kemiskinan

Pelaksanaan penganggulangan kemiskinan di Provinsi NTB menjadi salah satu program dan kegiatan yang sangat penting dan focus menjadi perhatian dalam penanganannya karena berdasarkan data selama 5 (lima) tahun terakhir kemiskinan di Nusa Tenggara Barat mengalami pergerakan yang fluktiatif. Terakhir rilis dari BPS menunjukkan angka 13,85% naik sebesar 0,03 poin dari tahun sebelumnya. Adapun fokus dalam penanganan penanggulangan kemiskinan di NTB adalah sebagai berikut :

a. Meminimalkan Wilayah Kantong Kemiskinan

Meminimalkan wilayah kantong kemiskinan adalah upaya untuk mengurangi jumlah dan luas daerah-daerah yang memiliki tingkat kemiskinan yang tinggi. Kantong kemiskinan biasanya adalah area geografis di mana penduduknya memiliki akses terbatas ke sumber daya ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar. Beberapa strategi utama untuk meminimalkan wilayah kantong kemiskinan antara lain:

1. Peningkatan Akses Pendidikan
2. Peningkatan Akses Kesehatan
3. Pengembangan Infrastruktur
4. Pemberdayaan Ekonomi Lokal
5. Peningkatan Akses ke Keuangan

6. Kebijakan dan Program Sosial
7. Pemberdayaan Komunitas

b. Mengurangi Beban Pengeluaran

Mengurangi beban pengeluaran merupakan salah satu strategi penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Fokusnya adalah mengurangi biaya yang harus dikeluarkan oleh masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, sehingga pendapatan yang terbatas dapat lebih efektif digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan. Beberapa langkah yang dapat diambil untuk mengurangi beban pengeluaran meliputi:

1. Subsidi dan Bantuan Sosial
2. Akses Pendidikan Gratis atau Terjangkau
3. Layanan Kesehatan Gratis atau Terjangkau
4. Akses terhadap Perumahan yang Terjangkau
5. Pengurangan Biaya Energi dan Utilitas
6. Transportasi Terjangkau
7. Kebijakan dan Program Sosial
8. Edukasi dan Literasi Keuangan

Dengan mengurangi beban pengeluaran, masyarakat miskin dapat mengalokasikan lebih banyak dari pendapatan mereka untuk investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi, yang pada gilirannya dapat membantu mereka keluar dari lingkaran kemiskinan. Pendekatan ini memerlukan kebijakan yang komprehensif dan implementasi yang efektif dari pemerintah serta dukungan dari berbagai sektor.

c. Meningkatkan Pendapatan

Meningkatkan pendapatan adalah strategi penting dalam mengentaskan kemiskinan. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kapasitas ekonomi individu dan keluarga agar mereka bisa memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kualitas hidup mereka. Berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan pendapatan:

1. Penciptaan Lapangan Kerja
2. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan
3. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
4. Pengembangan Sektor Pertanian dan Perikanan
5. Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Digital
6. Pengembangan Pariwisata
7. Kebijakan Upah dan Perlindungan Tenaga Kerja
8. Akses ke Teknologi dan Inovasi

Dengan mengimplementasikan berbagai strategi ini, pemerintah dan pihak terkait dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin, yang pada gilirannya dapat mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan umum. Upaya ini memerlukan kerjasama yang erat antara pemerintah, sektor swasta, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat itu sendiri.

6.2 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari APBN

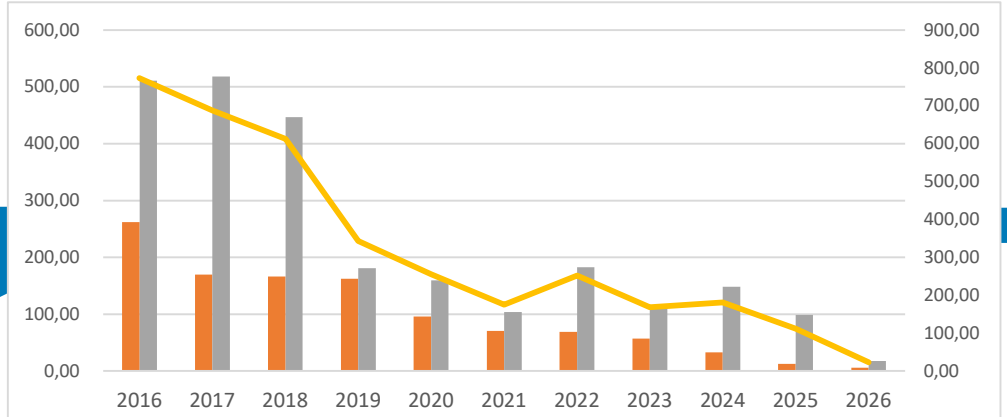
Prinsip penyelenggaraan sebagian urusan Pemerintah Pusat yang menjadi kewenangannya di daerah dilaksanakan berdasarkan asas dekonsentrasi dan asas tugas pembantuan. Dekonsentrasi dan tugas pembantuan diselenggarakan, karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Disamping itu, sebagai konsekuensi negara kesatuan memang tidak dimungkinkan semua wewenang pemerintah didesentralisasikan dan diotonomkan sekalipun kepada daerah.

Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada wilayah provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi untuk melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan kepada gubenur sebagai wakil pemerintah di wilayah provinsi. Gubernur sebagai kepala daerah provinsi berfungsi pula selaku wakil Pemerintah di daerah, dalam pengertian untuk menjembatani dan memperpendek rentang kendali pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah termasuk dalam pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan di daerah kabupaten dan kota. Pendanaan dekonsentrasi hanya diperuntukkan untuk mendukung penguatan dan pemberdayaan peran Gubernur selaku wakil pemerintah pusat dan kegiatannya bersifat non-fisik.

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan merupakan cerminan dari sistem dan prosedur penugasan Pemerintah kepada daerah dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota dan/ atau desa, serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang memberi penugasan. Pendanaan tugas pembantuan hanya membiayai kegiatan yang bersifat fisik dan ditujukan kepada Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala daerah otonom.

Kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan seluruhnya adalah kewenangan pusat dengan pendanaan dari APBN Kementerian/Lembaga yang mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKPD) dan Prioritas Nasional dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran nasional. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan dilakukan oleh Satuan Kerja (Satker) yang terdapat di Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi. Selama tahun 2016 sampai dengan tahun 2026, jumlah anggaran baik dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang diberikan cenderung menurun seperti yang tergambar pada gambar berikut ini.

Grafik 6. 2 Perkembangan APBN (Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) Pada Satuan Kerja Lingkup Pemerintah Provinsi



Sumber: Bappeda, 2026 (data diolah)

Kecenderungan menurunnya pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuannya disebabkan adanya alasan strategis pengalihan secara bertahap pendanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK) diantaranya:

a. Amanat pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 108 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan Pasal 76-77. Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang merupakan bagian dari anggaran kementerian negara/lembaga yang digunakan untuk melaksanakan urusan yang menurut peraturan perundang-undangan menjadi urusan daerah, secara bertahap dialihkan menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK);
b. Rekomendasi BPK dan Panja DPR. Rekomendasi dan temuan BPK yaitu masih ada dana pusat yang membiayai urusan daerah melalui dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan, dan adanya tindak lanjut Panja Belanja Pemerintah Pusat dan Transfer Daerah dimana pemerintah menerbitkan kebijakan Road Map rencana pengalihan dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang masih membiayai urusan daerah ke Dana Alokasi Khusus (DAK).

Melihat adanya tren penurunan dan alasan strategis yang telah diungkapkan diatas, maka untuk pendanaan Dekonsetrasi dan Tugas Pembantuan di lingkup Pemerintah Provinsi NTB pada tahun 2027 diproyeksikan masih tetap menurun dengan rata-rata mencapai 3-8 persen dari tahun sebelumnya sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6. 5 Proyeksi Pendanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Pemerintah Provinsi NTB Tahun 2027

Jenis Dana	2021	2022	2023	2024	2025	2026	Proyeksi 2027
Dekon	70.849.733.000	69.124.442.000	56.767.228.000	33.122.786.000	12.710.862.000	5.452.232.000	3.522.305.142
TP	104.032.136.000	183.151.999.000	111.871.044.000	148.552.022.000	98.585.450.000	17.648.481.000	15.317.794.946

Sumber : Data diolah, Bappeda NTB 2026

Oleh karena itu Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam mendukung prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan daerah, telah menyusun rencana kegiatan yang didanai dari APBN yang terdiri dari rencana program dan kegiatan yang diusulkan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (K/L) maupun yang diusulkan untuk didanai oleh Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan serta Dana Alokasi Khusus (DAK). Berikut ini akan disajikan usulan rencana program dan

kegiatan Tahun 2026 yang akan menjadi Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, sebagai berikut.

Tabel 6. 6 Rencana Program Dan Kegiatan Yang Dibiayai Melalui Dana APBN (Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan) Tahun 2026

NO	URAIAN	PAGU 2026
A	**DANA DEKONSENTRASI PROVINSI NTB**	
1	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2.753.461.000
2	DINAS KOPERASI UKM	2.698.770.000
JUMLAH DANA DEKONSENTRASI PROVINSI		**5.452.231.000**
B	**TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI NTB**	
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	12.847.436.000
2	DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN	5.124.000
3	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	3.540.653.000
4	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	785.268.000
5	DINAS PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	470.000.000
JUMLAH TUGAS PEMBANTUAN PROVINSI		**17.648.481.000**

Sumber : Data Olahan Bappeda NTB, 2026

6.3 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional (PN)

Program dan kegiatan yang tertuang di dalam RKPD ini dilaksanakan untuk mendukung pembangunan Prioritas Daerah NTB. Dukungan terhadap Prioritas Nasional dan Program Strategis Nasional seperti yang tersaji pada tabel sebagai berikut.

Tabel 6. 7 Dukungan Prioritas Daerah Terhadap Prioritas Nasional

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	NILAI (Rp.)
PN 1 - Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	PD 7 - Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	28.332.575.580
PN 2 - Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	PD 3 - Transformasi ekosistem industri agromaritim berkelanjutan	96.932.671.743
	PD 6 - Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan	51.525.592.800
PN 3 - Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	PD 6 - Tranformasi infrastruktur berbasis ekologi dan tata ruang berkelanjutan	348.888.951.985
PN 4 - Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi	PD 1 - Transformasi SDM Unggul Kreatif dan Inovatif	510.384.838.578
	PD 4 - Transformasi pariwisata, ekraf, budaya daerah dan olahraga prestasi	77.121.313.590

PRIORITAS NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	NILAI (Rp.)
milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.		
PN 5 - Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	PD 2 - Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular yang inklusif dan berkelanjutan	9.703.661.617
PN 6 - Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	PD 2 - Transformasi Ekonomi Hijau, Ekonomi Biru, Ekonomi Sirkular yang inklusif dan berkelanjutan	99.695.651.145
PN 7 - Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	PD 7 - Transformasi tata kelola daerah yang kreatif, inovatif, adaptif dan kolaboratif	1.174.867.884.460
PN 8 - Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	PD 5 - Transformasi lingkungan berkelanjutan dan ketahanan iklim	26.021.046.935
TOTAL		**2.423.474.188.433**

Sumber : Bappeda NTB 2026 (data diolah)

Tabel 6. 8 Dukungan Program Daerah Terhadap Program Strategis Nasional (Pro SN) dan Tematik Tahun 2027

No	Pro SN	Tematik	Sub Kegiatan	Nilai
1	**Kesehatan Untuk Semua**			**78.094.050.564**
		Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	1.02.02.1.02.0016 - Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	64.622.036.780
		Makan Bergizi Gratis	3.25.06.1.02.0003 - Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	570.438.900
		Pembangunan Rumah Sakit Lengkap Berkualitas di Kab/Kota	1.02.02.1.01.0026 - Pengembangan Rumah Sakit	250.000.000

No	Pro SN	Tematik	Sub Kegiatan	Nilai
		Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.02.02.1.02.0032 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	2.974.170.590
			1.02.02.1.02.0038 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	474.999.730
		Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting	1.02.02.1.02.0003 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	753.548.200
			1.02.02.1.02.0006 - Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	7.158.399.900
			1.03.03.1.01.0014 - Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	503.040.000
			2.14.04.1.01.0028 - Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	110.368.000
		Penuntasan Tuberkolosis (TBC)	1.02.02.1.02.0033 - Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis	677.048.464
2	**Ketahanan Pangan**			**22.893.893.700**
		Irigasi Yang Mendukung Swasembada Pangan	1.03.02.1.02.0021 - Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	15.943.693.700
			1.03.02.1.02.0032 - Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	2.281.710.000
		Kampung Nelayan Merah Putih	3.25.03.1.06.0002 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	760.000.000
		Mencetak dan Meningkatkan Produktivitas Lahan Pertanian (sawah/lumbung/food estate)	2.09.02.1.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	500.000.000

No	Pro SN	Tematik	Sub Kegiatan	Nilai
			3.27.03.1.01.0001 - Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	113.490.000
			3.27.03.1.01.0013 - Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian	100.000.000
		Pangan Akuatik	3.25.02.1.01.0002 - Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	670.000.000
			3.25.02.1.01.0012 - Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	2.500.000
			3.25.03.1.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	287.500.000
			3.25.03.1.01.0010 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	2.015.000.000
		Pendayagunaan Penyuluh Pertanian	3.27.07.1.01.0003 - Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian	10.000.000
			3.27.07.1.01.0006 - Pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota	200.000.000
			3.27.07.1.02.0004 - Sinkronisasi dan Koordinasi penyuluh pertanian (ASN, Swadaya dan Swasta) lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	10.000.000
3	**Pengentasan Kemiskinan**			**4.030.269.400**
		Optimalisasi Pelaksanaan Pengentasan Kemiskinan dan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem	1.06.05.1.02.0003 - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	2.649.560.000

No	Pro SN	Tematik	Sub Kegiatan	Nilai
			1.06.05.1.02.0006 - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	505.880.000
			1.06.05.1.02.0008 - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	35.000.000
			1.06.05.1.02.0012 - Fasilitasi Bantuan Jaminan Sosial bagi Pekerja Rentan Miskin	-
			3.28.05.1.01.0009 - Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	127.074.000
		Pembangunan 3 Juta Rumah	1.04.02.1.03.0004 - Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	547.900.000
		Sekolah Rakyat	2.11.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	101.140.000
			2.15.02.1.06.0004 - Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	63.715.400
4	**Perluasan Akses Pendidikan**			**680.000.000**
		Digitalisasi Pembelajaran	1.01.02.1.01.0075 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	100.000.000
			1.01.02.1.02.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	75.000.000
			1.01.02.1.03.0073 - Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	50.000.000

No	Pro SN	Tematik	Sub Kegiatan	Nilai
		Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	1.01.02.1.01.0060 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	200.000.000
			1.01.02.1.02.0053 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	175.000.000
			1.01.02.1.03.0059 - Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	80.000.000
5	**Pertumbuhan Ekonomi**			**2.971.246.726**
		Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih	2.17.03.1.01.0003 - Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	75.000.000
		Pelestarian Lingkungan dan Pengelolaan Sampah	1.03.04.1.01.0016 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	1.000.000.000
			2.11.03.1.01.0011 - Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	133.040.000
			2.11.11.1.01.0014 - Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1.463.206.726
		Pengendalian Inflasi	2.09.03.1.01.0009 - Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	250.000.000
			3.30.04.1.02.0001 - Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	50.000.000
6	**Non Pro SN**			**6.110.317.960**

No	Pro SN	Tematik	Sub Kegiatan	Nilai
		Ekonomi Syariah	4.01.06.1.01.0001 - Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	557.447.400
		Masyarakat Adat	2.13.05.1.01.0001 - Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	70.375.600
			2.13.05.1.01.0002 - Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	70.375.600
		Pembinaan Ideologi Pancasila	1.01.02.1.01.0066 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	200.000.000
			1.01.02.1.02.0061 - Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik	100.000.000
			8.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	346.648.000
			8.01.02.1.01.0012 - Pembentukan Paskibraka	1.533.485.000
		Penanggulangan Bencana	1.05.03.1.02.0024 - Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi	167.499.560
			1.05.03.1.04.0009 - Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi	36.000.000
			1.05.03.1.04.0013 - Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi	40.500.000
		Pengarusutamaan Gender	.01.02.1.01.0045 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas	350.000.000

No	Pro SN	Tematik	Sub Kegiatan	Nilai
			2.07.04.1.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja	43.681.900
			2.08.02.1.01.0013 - Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi	67.597.500
		Perlindungan Anak	1.01.02.1.01.0065 - Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	410.000.000
			1.06.04.1.01.0006 - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	379.600.000
			5.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	1.481.806.900
		Kemudahan Perizinan di Daerah	2.18.02.1.01.0004 - Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	80.640.000
			2.18.04.1.02.0007 - Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	126.520.500
			2.18.06.1.01.0002 - Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	48.140.000
	TOTAL			**114.779.778.350**

Sumber : Bappeda NTB 2026 (data diolah)

Tabel 6. 9 Dukungan Program Daerah Terhadap Outcome Prioritas Tahun 2027

No	Outcome Prioritas/Sub Kegiatan	Nilai Rp)
1	**Kesehatan Untuk Semua**	**1.278.872.830**
	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	553.873.100

No	Outcome Prioritas/Sub Kegiatan	Nilai Rp)
	Pengembangan Rumah Sakit	250.000.000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	474.999.730
	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan	-
2	**Lingkungan Hidup Berkualitas**	**286.780.000**
	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-
	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah	75.640.000
	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	101.140.000
	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	110.000.000
3	**Menguatnya keamanan siber dan sandi lingkungan Pemerintah Daerah**	**605.060.000**
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	478.790.000
	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	126.270.000
4	**Meningkatkan pengelolaan hutan lestari**	**433.999.200**
	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	60.645.000
	Rehabilitasi Mangrove di luar kawasan hutan	-
	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial	127.074.000
	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan	246.280.200
5	**Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya**	**25.000.000**
	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10.000.000
	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	-
	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	15.000.000
	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	-
6	**Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat**	**140.000.000**
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	-
	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi	100.000.000
	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	20.000.000
	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	20.000.000
7	**Meningkatnya Kemandirian Pedesaan yang Berkelanjutan yang didukung oleh Tata Kelola Pemerintahan Desa**	**15.460.220.200**

No	Outcome Prioritas/Sub Kegiatan	Nilai Rp)
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	238.311.800
	Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi pelaksanaan pemantauan evaluasi dan pelaporan, pemberian bimbingan teknis dan supervisi serta fasilitasi di bidang kerja sama pemerintahan	-
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	15.106.883.000
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	115.025.400
8	**Meningkatnya ketahanan pangan**	**1.450.000.000**
	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	-
	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	250.000.000
	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	1.150.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	50.000.000
9	**Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan**	**3.586.307.735**
	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	657.197.135
	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial	46.230.600
	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.882.880.000
10	**Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional**	**3.973.600.000**
	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	609.600.000
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2.984.000.000
	Fasilitasi Prasarana Melalui Revitalisasi Ruang Kreatif	104.318.500
	Fasilitasi Kekayaan Intelektual	275.681.500
11	**Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital**	**278.039.300**
	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	139.203.700
	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	-
	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	138.835.600
	Koordinasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	-
12	**Meningkatnya kualitas pemuda, budaya olahraga yang inklusif, dan prestasi olahraga**	**200.000.000**
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	50.000.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda	-
	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	50.000.000
	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	100.000.000

No	Outcome Prioritas/Sub Kegiatan	Nilai Rp)
13	**Meningkatnya kualitas stabilitas politik dan demokrasi, implementasi nilai-nilai ideologi Pancasila, wawasan kebangsaan, ketahanan ekonomi dan sosial budaya, serta kewaspadaan nasional**	**2.623.362.000**
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	475.445.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	130.042.000
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1.705.980.000
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	311.895.000
14	**Meningkatnya pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital**	**139.203.700**
	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	139.203.700
	Koordinasi Penyelenggaraan Pendaftaran penduduk ke Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	-
15	**Meningkatnya Peran Industri Dalam Perekonomian Nasional**	**1.804.500.000**
	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi	4.500.000
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.700.000.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi	50.000.000
	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	50.000.000
16	**Meningkatnya Peran Koperasi dalam Perekonomian Lokal**	**75.000.000**
	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	75.000.000
17	**Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global**	**500.000.000**
	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	50.000.000
	Pameran Dagang Internasional/Nasional	300.000.000
	Peningkatan Citra Produk Ekspor	150.000.000
18	**Meningkatnya Produksi Pertanian**	**22.003.632.000**
	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	20.553.632.000
	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih	1.200.000.000

No	Outcome Prioritas/Sub Kegiatan	Nilai Rp)
	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	150.000.000
	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	100.000.000
19	**Meningkatnya Produktivitas Koperasi dan UMKM**	**1.222.446.400**
	Digitalisasi pencatatan transaksi dan operasional koperasi	250.000.000
	Pendampingan dan Fasilitasi Koperasi	750.000.000
	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	159.701.400
	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	62.745.000
20	**Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa**	**175.373.200**
	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi	100.354.000
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	75.019.200
21	**Mewujudkan transformasi kawasan transmigrasi menjadi pusat pertumbuhan lokal berbasis sinergi dan kolaborasi lintas sektor**	**100.000.000**
	Penyuluhan Transmigrasi	50.000.000
	Pelatihan Transmigrasi	50.000.000
22	**Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)**	**695.565.090**
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	675.255.000
	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	10.000.000
	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	5.000.000
	Pemanfaatan Cagar Budaya	5.310.090
23	**Penyelenggaraan Infrastruktur Pekerjaan Umum Yang Andal Dan Berkelanjutan**	**40.570.921.259**
	Pembangunan Tanggul Sungai	-
	Normalisasi/Restorasi Sungai	-
	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	-
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	3.510.000.000
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Persampahan	-
	Penyediaan Sarana Pendukung TPA/TPST/SPA	-
	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	1.368.171.259
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	-
	Rehabilitasi Jalan	-
	Rekonstruksi Jalan	35.637.500.000
	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	55.250.000

No	Outcome Prioritas/Sub Kegiatan	Nilai Rp)
	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	-
24	**Swasembada Energi**	**936.657.200**
	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	125.570.000
	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT	129.977.000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	-
	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	681.110.200
25	**Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah**	**6.479.896.600**
	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	72.282.600
	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	5.448.850.000
	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	177.274.000
	Penyediaan Akses Internet	781.490.000
26	**Tercapainya Indeks Kesejahteraan Sosial**	**3.845.880.000**
	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi	3.305.000.000
	Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah melalui Pemberdayaan Ekonomi	-
	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	505.880.000
	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi	35.000.000
27	**Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)**	**294.280.000**
	Peningkatan kualitas statistik sektoral	132.900.000
	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	161.380.000
28	**Tercapainya Target realisasi Penanaman Modal**	**339.478.300**
	Pengawasan Penanaman Modal	201.158.300
	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	138.320.000
29	**Terlaksananya pembangunan daerah sesuai dengan rencana tata ruang**	**-**
	Koordinasi Fasilitasi Ranperkada RDTR Kabupaten/Kota	-
	Pengenaan Sanksi Administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang dalam RTR	-
30	**Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan**	**1.006.000.000**
	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	225.000.000
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	556.000.000
	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik	175.000.000
	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	50.000.000

No	Outcome Prioritas/Sub Kegiatan	Nilai Rp)
31	**Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan**	**98.420.000.000**
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.542.163.500
	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	5.257.836.500
	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman	-
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	87.620.000.000
32	**Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar**	**297.961.290**
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)	34.999.850
	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana	137.979.900
	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	124.981.540
	Pengelolaan Risiko Bencana	-
33	**Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satuan Perlindungan Masyarakat, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar**	**216.417.649**
	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota	53.500.000
	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	55.000.000
	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	80.917.649
	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	27.000.000
34	**Terwujudnya pemerataan penguasaan tanah dan pemberdayaan masyarakat melalui penataan aset dan akses di daerah**	**50.340.592.800**
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota	50.250.000.000
	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria	90.592.800
35	**Terwujudnya Peningkatan Konektivitas antar wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**	**7.998.097.613**
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	5.061.002.900
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	2.873.396.713
	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	-
	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	63.698.000
36	**Terwujudnya Penyelenggaraan Program Bangga Kencana yang Berkualitas**	**207.034.000**
	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja	105.609.500

No	Outcome Prioritas/Sub Kegiatan	Nilai Rp)
	Peningkatan Kesertaan KB Pascapersalinan	-
	Fasilitasi pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	101.424.500
	Pembinaan Ketahanan Keluarga Rentan melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (Satyagatra)	-
37	**Terwujudnya Tata Kelola Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan**	**2.099.250.000**
	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1.499.250.000
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	600.000.000
	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	-
	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi	-
	TOTAL	**270.109.428.366**

Sumber : Bappeda NTB 2026 (data diolah)

6.4 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha. Saat ini banyak pemerintah daerah yang menyadari pentingnya kontribusi dari pihak swasta dalam mendorong pembangunan.

Berdasarkan fakta, pihak swasta dapat membawa keahlian, ilmu, teknologi, efisiensi dan permodalan yang sangat dibutuhkan sektor publik sehingga apabila dikombinasikan dengan sumber daya publik yang tepat dapat menjadi kontribusi yang lebih besar untuk pembangunan berkelanjutan. Namun pihak swasta membutuhkan lingkungan yang stabil, dukungan peraturan dan kerangka regulasi yang kuat, persiapan kelembagaan yang jelas dan faktor lainnya yang penting untuk “menciptakan pangsa pasar”.

Salah satu persoalan yang dihadapi Pemerintah Daerah adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang tidak mampu sepenuhnya membiayai pembangunan infrastruktur yang diinginkan atau diharapkan. Artinya, masih banyak bidang-bidang lain seperti Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan, Sosial dan Agama yang juga membutuhkan penyerapan anggaran dari APBD. Di sisi lain, pembangunan infrastruktur sangat dibutuhkan. Pada kondisi ini, skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dapat menjadi solusi dengan prinsip gotong royong. Melalui skema pembiayaan KPBU, pemerintah, BUMN/BUMD, serta swasta bekerja sama untuk membiayai pengakselerasian pembangunan.

Beberapa kriteria yang dapat dibiayai dari skema KPBU berdasarkan peraturan perundang – undangan dimaksud di atas, antara lain :

a. Infrastruktur yang dapat dikerjasamakan adalah infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial;
b. Termasuk ke dalam 19 (Sembilan belas) jenis infrastruktur yang disebutkan dalam Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur dan peraturan perundang – undangan turunannya; dan
c. Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (Value for Money) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan resiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Beberapa kegiatan yang memungkinkan masuk kategori sebagaimana disebut di atas dan berpotensi untuk dikerjasamakan dengan Badan Usaha, di antaranya meliputi dan tidak terbatas pada :

a. Rencana Pembangunan SPAM Regional Pulau Lombok
b. Rencana Pembangunan Jalan Tol Lembar-Kayangan
c. Rencana Pembangunan Jembatan Kayangan-Pototano
d. Rencana Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi
e. Rencana Pengembangan Destinasi Pariwisata (Pulau-pulau Kecil)
f. Rencana Pengembangan Sistem Transportasi Berkelanjutan
g. Rencana Pengembangan Energi Baru Terbarukan
h. Rencana Pengembangan Jalan Penerangan Umum
i. Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan Terpadu Pulau Sumbawa

Proses pelibatan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur daerah menjadi strategi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Kerjasama pemerintah dan badan usaha ini, atau yang dikenal dengan nama KPBU dilaksanakan dengan 4 kegiatan utama yaitu Perencanaan KPBU, Penyiapan KPBU, Transaksi KPBU, dan Implementasi KPBU. Pada tahapan Perencanaan KPBU, agenda kegiatan diawali dengan penyusunan rencana KPBU, studi pendahuluan dan konsultasi, dan pengambilan keputusan untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan proses KPBU. Selanjutnya pada tahapan Penyiapan KPBU, setelah diputuskan untuk melanjutkan proses KPBU, agenda kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan Outline Business Case (OBC), penjajakan minat pasar, permohonan rencana dukungan dari Pemerintah (jika ada), dan penyusunan Final Business Case (FBC). Selanjutnya pada tahapan Transaksi KPBU, dilakukan proses prakualifikasi, permintaan

proposal, lelang pekerjaan, penetapan pemenang lelang, pendirian Badan Usaha Pelaksana, penandatangana perjanjian KPBU, dan penutupan finansial. Akhirnya, tahapan terakhir adalah Pelaksanaan KPBU, yang meliputi kegiatan konstruksi dan operasi dan berakhirnya perjanjian KPBU sesuai jangka waktu yang telah disepakati oleh para pihak saat penandatangan perjanjian KPBU.

Secara umum, di Indonesia, sektor infrastuktur yang telah didanai dari mekanisme KPBU meliputi infrastruktur ekonomi dan infrastruktur sosial. Infrastruktur ekonomi meliputi transportasi, jalan, sumber daya air dan irigasi, air minum, sistem pengelolaan air limbah, sistem pengelolaan persampahan, telekominfo, energi dan ketenagalistrikan, konservasi energi, fasilitas perkotaan dan kawasan. Selanjutnya, infrastruktur sosial yang telah melaksanakan mekanisme KPBU adalah pariwisata, fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan, pemasyarakat, perumahan rakyat, kesehatan, fasilitas sarana olah raga, kesenian, dan budaya. Dalam implementasinya, skema dalam KPBU ini dapat dilaksanakan dengan kontrak operasi dan pemeliharaan, kontak bangun dan keuangan, kontrak desain-bangun-keuangan-pelihara, kontrak desain-bangun-keuangan-pelihara-operasi, dan konsesi. Pemerintah melalui Kementerian Keuangan akan membantu dalam proses penyiapan Proyek KPBU, terutama pada saat fasilitasi penyiapan proyek, dukungan kelayan, dan penjaminan infrastruktur.

6.5 Rencana Program dan Kegiatan yang Bersumber dari Mitra Pembangunan.

Pembiayaan berbagai program/kegiatan juga dapat diperoleh dengan mengoptimalkan Kerjasama Kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan di Provinsi NTB, yaitu NGO/LSM, CSO, Donor, swasta, media, akademisi, dan lainnya. Seluruh mitra pembangunan daerah berkumpul dalam Forum Mitra Pembangunan Daerah. Para mitra pembangunan ini banyak bekerja untuk program dan kegiatan pada bidang pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan, pembangunan rendah karbon dan berketahanan ikilim, peningkatan ketangguhan bencana, penanggulangan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Mitra pembangunan yang berkontribusi pada pembangunan di provinsi NTB memperoleh dana dari berbagai sumber seperti, UN, UNICEF, UNDP, Pemerintah Australia, Pemerintah Jerman, OXFAM, UNI EROPA, Ford Foundation, dan lainnya. Adapun nama mitra pembangunan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6. 10 Mitra Pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat

NO	NAMA MITRA PEMBANGUNAN
1	YKMI NTB (yayasan kemanusiaan madani Indonesia)
2	Studi Partisipasi, Ekonomi dan Demokrasi (MITRA SAMYA)
3	Lemabga Bantuan Hukum Asosiasi Permpuan Indonesia Untuk Keadilan (LBH APIK) NTB
4	Sinergitas Kolaborasi Akselerasi Layanan Dasar (SKALA NTB)
5	Solusi Anak Bangsa (SOBAT NTB)
6	PKBI Mataram (Perkumpulan keluarga berencana Indonesia)
7	PPK NTB (Perkumpulan Panca Karsa)
8	IAKMI (Ikatan Ahli Kesehatan masyarakat Indonesia)
9	LPA NTB (lembaga perlindungan anak NTB)
10	YPII (Yayasan Plan Internasional Indonesia)
11	PEKKA Sinergi
12	Generasi Emas NTB (GEN)

NO	NAMA MITRA PEMBANGUNAN
13	Gerakan Masyarakat Cinta Alam (GEMA ALAM NTB)
14	PRISMA
15	Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra (LPSDM)
16	KONSEPSI NTB
17	Yayasan Islamic Relief Indonesia (Yir)
18	Yayasan selaksa sejahtera(YASERA)
19	SOBAT NTB (Perkumpulan Solusi Anak Bangsa Prov. NTB)
20	HWDI (Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia)
21	SIAPSIAGA
22	FITRA
23	Yayasan Tunas Alam Indonesia (SANTAI NTB)
24	Gold ismia project sites
25	RUMAH ZAKAT
26	PKBI Lombok tengah
27	yayasan Masyarakat Peduli (YMP)
28	Program Gizi NTB
29	Islamic Relief Worldwide
30	Migrant care NTB
31	Pusat Studi Pembangunan (PSP NTB)
32	Wahana visi Indonesia
33	Lembaga inovasi
34	UNICEF
35	INSET
36	Koalisi Perempuan Indinesia (KPI NTB)
37	Training And Facilitation For Natural Resourtces Management (TRANSFORM)
38	Tifa Foundation
39	Yayasan Rumah Energi
41	WCS (Wildlife Conservation Society Indonesia)
42	GAGAS Foundation Galang Anak Semesta
43	INSPIRASI NTB
44	BAZNAS Prov. NTB
45	Lembaga advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD)
46	AKSI NTB
47	LONTAR NTB
48	SMERU
49	Lembaga Gerakan Nasional untuk Kesejahteraan Masyarakat (Genius)
50	Pusat Studi Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSP-SDM)
51	Save the children Indonesia (STCI)
52	Rutgers Wpf Indonesia
53	Gugah nurani Indonesia (GNI)
54	Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI)
55	AOI (Aliance One Indonesia)
56	Yayasan Juang Laut Lestari (JARI)
57	Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah (JPKP) Kab Lotim
58	SOLIDARITAS PEREMPUAN
59	Lembaga Advocacy Center Of Village Communities(LACOVC)
60	KOSLATA
61	ENDRI Foundation
62	Lembaga Kemanusiaan Rinjani Foundation (LKRF)
63	Lembaga Kajian Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (LAPEKSDAM PW NU NTB)
64	Solidaritas Masyarakat untuk Transparansi (SOMASI NTB)

NO	NAMA MITRA PEMBANGUNAN
65	Sekolah Rintisan Perempuan untuk Perubahan' (LA RIMPU)
66	LPA kab. Lombok tengah
67	Pita Putih Indonesia (PPI) NTB
68	Yayasan Sumber Daya dan Lingkungan untuk pelestarian pembangunan (YSLPP) NTB
69	Yayasan INSET
70	yayasan Lombok independent disabilitas Indonesia (Lidi foundasition)
71	Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi NTB)
72	Yayasan masyarakat nusa tenggara (Samantha)
73	LPW NTB (Lembaga Pengembangan Wilayah)
74	Lembaga Studi Kemanusiaan (LenSa - NTB)
75	LOMBOK CARE
76	Jaringan Masyarakat Sipil (JMS) Lombok
77	Advokasi Buruh Migran Indonesai (ADMI)
78	Sekretarit Pengembangan kesehatan Lingkungan (SPKL)
79	SPM (Solidaritas Perempuan Mataram)
80	Aliansi Masyarakat Adat NTB (AMAN) Nusa Tengggara
81	Heppy hearts Indonesia (HHI)
82	Lembaga Pemberdayaan dan Pengembangan Potensi Daerah (LP3D)
83	Kaukus Peduli Perempuan NTB (KPP NTB)
84	HIPTAL (himpunan petani tembakau Lombok)
85	Nusa Tenggara Center for Social Research and Development (NTCSD)
86	Asosiasi Pengeuatan Perempuan Usaha Kecil-makro (ASPPUK NT)
87	Lembaga Centra Edukasi dan Advokasi Sosial (CERDAS NTB)
88	lembaga Centra Edukasi dan Advokasi social NTB.
89	Solidaritas Institut NTB (Solidaritas Institut)
90	SANTIRI Foundation
91	Lembaga Bantuan Hukum (LBH Pelangi)
92	Yayasan Kerja pemukiman Rakyat (YKPR)
93	LPA kabupaten Lombok timur
94	DPD Apti NTB (Asosiasi Petani Tembakau Indonesia)
95	Indonesia Dwi Sembilan (I D S)
96	Kaukus Peduli Perempuan NTB (KPP NTB)
97	Global Fund Komponen Malaria (GFKM)
98	NU Peduli Lombok
99	Lembaga Pengembangan Ilmu Tekhnologi dan Sumber Daya (LEINTSA)
100	Yayasan Humanies studies (YHS)
101	Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA Uin)
102	Pusat Studi Gender Dan Anak (PSGA Unram)
103	SMS Lombok

Sumber : RPJMD NTB 2025-2029

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang telah direncanakan. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. lndikator kinerja dimaksud juga diperlukan oleh publik dalam rangka perwujudan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Lebih lanjut data dan informasi juga berguna sebagai dasar untuk mengidentifikasi masalah, memilih berbagai alternatif kebijakan, menentukan alokasi anggaran, memberikan peringatan dini *(early warning)* terhadap masalah yang berkembang, memantau perkembangan pelaksanaan kebijakan, membuat tindakan korektif secara dini, sebagai bahan pengendalian dan evaluasi dampak dari kebijakan yang telah dibuat serta sebagai laporan pertanggungjawaban kepada publik.

Penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir tahun perencanaan. Target IKU dan IKD serta IKK pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berpedoman pada target dalam RPJMD NTB 2025-2029, capaian pada tahun 2025 dan sasaran visi serta Indikator utama pembangunan RPJPD 2025-2045 untuk Tahun 2027 yang sudah diselaraskan dengan Nasional. Adapun yang menjadi target IKK, IKD dan IKK pada tahun 2027 adalah sebagai berikut :

7.1 Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB

Tabel 7. 1 Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi NTB Tahun 2027

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,22	7.70	4,8-5,7	
2	PDRB Per Kapita	(Rp. Juta)	33,67	45.25	36,63	
3	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0,82	0.87	0,83	
4	Tingkat Kemiskinan	%	11,38	9,9-10,65	9,80-10,80	
5	Rasio Gini	Poin	0,364	0,347-0,351	0,351-0,353	
6	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	NA	0.58	0,58	
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK	%	12,37	28.61	28,61	
8	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,40	76.61	76,61	
9	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,05	2,00-2,69	2,00-2,69	
10	Kontribusi PDB Industri Pengolahan	%	6,69	5,61	6,75	
11	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	73,25	78.85	77,00	
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3,53	3770	3,59	
13	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	50,73	77.9255	70,13	

Sumber : RPJMD NTB 2025-2029, diolah

7.2 Indikator Kinerja Utama

Tabel 7. 2 Indikator Kinerja Utama Provinsi NTB 2027

No.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Indeks Modal Manusia (IMM)	Indeks	NA	0,58	0,58	Sasaran Visi
2	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	NA	0,499	0,499	IUP 40
3	Laju Pertumbuhan Ekonomi :					Sasaran Visi
	- Dengan Tambang	%	3.22	7.70	4,80 – 5,70	
	- Non Tambang	%	8.33	6,03-6,63	6,03-6,63	
4	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.82	0,87	0,83	Sasaran Visi
5	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.53	3,70	3,59	Sasaran Visi
6	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	33.67	45.25	36,63	Sasaran Visi
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.05	2,00-2,69	2,00-2,69	Sasaran Visi
8	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	Juta Rupiah/Tenaga Kerja	36.353,04	35.763,20	37.025,62	
9	Inklusi Keuangan	%	80.51	89.80	89,80	IUP 34
10	Tingkat Kemiskinan	%	11.38	9,9-10,65	9.80-10.80	Sasaran Visi
11	Rasio Gini	Poin	0.364	0,347-0,351	0.351-0.353	Sasaran Visi
12	Tingkat Inflasi	%	3.01	2,20-3,52	2,20-3,52	IUP 32
13	Indeks Desa	(%)	78.57	79.2	79,20	
14	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74.70	79.62	75.49	
15	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	6.69	5.61	6.75	Sasaran Visi dan IUP 11
16	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	NA	0.42	0.42	IUP 13
17	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	509,171	458.16	512,000	IUP 12b
18	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	NA	59,80-60,08	59,80-60,08	IUP 37
19	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	156.02	133,27-131,18	133,27-131,18	IUP 44
20	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77,40	76,61	76.61	Sasaran Visi dan IUP 42a
21	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	%	13,80	28.61	28.61	Sasaran Visi dan IUP 45
22	Nilai Realisasi Investasi	Rp Triliun	61.10	76.65	68.8	
23	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	Indeks (Kategori)	77.46	80,35 (A)	80,35 (A)	
24	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	73.25	78.85	77.00	Sasaran Visi

Sumber : RPJMD NTB 2025-2029, diolah

Selain Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran digunakan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah IKD dan IKK. Adapun indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang penting dianalisis meliputi 4 (empat) aspek utama, yaitu aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

7.3 Indikator Kinerja Daerah

Tabel 7. 3 Indikator Kinerja Daerah dan Indikator Kinerja Kunci Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2027

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	INDIKATOR KINERJA DAERAH (IKD)					
I	**ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI**					
1	Indeks Ketahanan Pangan	Indeks	74.7	79.62	75.49	
2	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (*Prevalence of Undernourishment*)	%	2.67	1.79	2.47	IUP 43b
3	Konsumsi Listrik per kapita	kWh	747.74	808	808	IUP 43a
4	Intensitas energi primer	SBM/Rp milyar	123.53	176.89	176.89	IUP 43a
5	Kapasitas air baku	m3/detik	3.53	3.86	3.86	IUP 43c
6	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan	%	36.21	41.1	41.1	IUP 43c
7	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	2.52	16.8	16.8	IUP 42b
8	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah	%	27.37	30	34.63	IUP 42c
9	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah	%	52.55	78.4	67.65	IUP 42c
10	Persentase Penurunan Emisi GRK					
	a. Kumulatif	%	4.4	12.95	12.95	IUP 45a
	b. Tahunan	%	4.89	22.49	22.49	IUP 45b
11	Indeks Risiko Bencana (IRB)	Indeks	156.02	133,27-131,18	133,27-131,18	IUP 44
12	Indeks Ketahanan Daerah	Indeks	0.55	0.63	0.63	
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	77.4	76.61	76.61	IUP 42 a
14	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun	%	1.58	1.58	1.58	
15	Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Daerah	Indeks	NA	0.543	0.543	IUP 41
II	**ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT**					
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi					
	- Dengan Tambang	%	3.22	7.7	4.8-5.7	Sasaran Visi

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	- Non Tambang	%	8.33	6,03-6,63	6,03-6,63	
2	Kontribusi PDRB Provinsi	%	0.82	0.87	0.83	Sasaran Visi
3	Tingkat Kemiskinan	%	11.38	9,9-10,65	9.80-10.80	IUP 8
4	PDRB Per Kapita	Juta Rupiah	33.67	45.25	36.63	Sasaran Visi
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3.05	2,00-2,69	2,00-2,69	IUP 15a
6	Rasio Gini	Poin	0.364	0,347-0,351	0.351-0.353	Sasaran Visi
7	Indeks Modal Manusia	Indeks	NA	0.58	0.58	Sasaran Visi
8	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	72.6	73.5	73.5	IUP 1/RIBK
9	Angka Kematian Ibu	Per 100.000 Kelahiran Hidup	257	151.5	151.5	IUP 2a/RIBK
10	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	13.39	19.78	19.78	IUP 2b/RIBK
11	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	99.66	99.39	99.39	IUP 4
12	Cakupan Kepesertaan Aktif Jaminan Kesehatan Nasional	%	82.99	80	80	RIBK
13	Angka Kematian Balita	Per 1.000 Kelahiran Hidup	24.85	20.23	20.23	RIBK
14	Cakupan Penerima Pemeriksaan Kesehatan Gratis	%	26.01	55	55	RIBK
15	Cakupan Imunisasi Bayi Lengkap	%	73.6	84	84	RIBK
16	Persentase hipertensi dalam pengendalian	%	7	30	30	RIBK
17	Proporsi penduduk dengan aktifitas fisik cukup	%	58.3	63.7	63.7	RIBK
18	Total Fertility Rate (Angka Kelahiran Total)	Jiwa	2.36	2.32	2.32	RIBK
19	Insidensi Tuberkulosis					
	a. Cakupan penemuan kasus Tuberkulosis (*treatment coverage*)	%	61.11	90	90	IUP 3a
	b. Angka keberhasilan pengobatan Tuberkolusis (treatment success rate)	%	86.71	95	95	IUP 3b/RIBK
20	Rata-rata lama sekolah penduduk usia di atas 15 tahun	Tahun	8.87	8,77-8,79	9.12	IUP 5c
21	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13.99	14,20-14,23	14.02	IUP 5d
22	Persentase Kabupaten/Kota yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada Asesmen Tingkat Nasional untuk:					
	a) Literasi Membaca	%	NA	20	20	IUP 5a; a)
	b) Numerasi	%	NA	10	10	IUP 5a; b)
23	Persentase Satuan Pendidikan yang Mencapai Standar Kompetensi Minimum pada					

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	Asesmen Tingkat Nasional untuk:					
	a) Literasi Membaca	%	NA	28,32-30,82	28,32-30,82	IUP 5b; a)
	b) Numerasi	%	NA	24,28-26,78	24,28-26,78	IUP 5b; b)
24	Proporsi Penduduk Berusia 15 Tahun ke Atas yang Berkualifikasi Pendidikan Tinggi	%	11.63	10.2	10.2	IUP 6
25	Tingkat Penyerapan Lulusan SMK	%	86.71	85.9	86,90	
26	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	65.69	74.94	71.92	IUP 16
27	Cakupan kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Provinsi	%	38.81	35.27	47.53	IUP 9
28	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	Indeks	NA	72,24 - 72,35	72,24 - 72,35	IUP 38
29	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	Indeks	NA	59,80-60,08	59,80-60,08	IUP 37
30	Indeks Perlindungan Anak	Indeks	66.51	61.3	61.3	
31	Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga	Indeks	63.7	68.23	68.23	IUP 39
32	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Indeks	0.515	0.499	0.499	IUP 40
33	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	91.91	92.22	92.22	
34	Indeks Pembangunan Pemuda	Indeks	55.5	54.48	54.48	
35	Jumlah penyandang disabilitas yang mendapatkan fasilitasi dari Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan dan/atau dari Dinas yang menangani bidang ketenagakerjaan	orang	35	3175	3175	IUP 10
36	Jumlah Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan di tingkat kab/kota/provinsi	Unit	2	7	7	IUP 10
37	Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi	%	NA	76.29	76.29	IUP 7
38	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	58.79	58.79	58.79	
39	Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	%	31.48	31.48	31.48	IUP 15b
III	**ASPEK DAYA SAING DAERAH**					
1	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	%	6.69	6.3	6.75	IUP 11a
2	Pertumbuhan PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	%	5.03	4.08	5.2	IUP 11b
3	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum	%	1.81	2.31	2.31	IUP 12 a

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4	Proporsi Nilai Tambah Ekonomi Kreatif Provinsi Terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	%	NA	0.44	0.44	IUP 13
5	Jumlah tamu Wisatawan Mancanegara	Orang	509.171	501231	512000	IUP 12b
6	Rasio kewirausahaan Daerah	%	10.03	2.45	10,6	IUP 14b
7	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	73.25	78.85	75	Sasaran Visi
8	Indeks Kapabilitas Inovasi	Skor	3.89	3.65	3.65	IUP 17
9	Indeks Ekonomi Hijau Daerah	Indeks	NA	54.6225	54.6225	IUP 18a
10	Indeks Ekonomi Biru Indonesia	Indeks	50.73	77.9255	70.13	Sasaran Visi
11	Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer	%	25.07	17.12	17.12	IUP 18b
12	Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Indeks	5,88 (2024)	6.38	6.38	IUP 19
13	Koefisien Variasi Harga Antar wilayah Tingkat Provinsi	Koefisien	16.21	7.06	13.8	IUP 20
14	Pembentukan Modal Tetap Bruto	% PDRB	34.31	37,09-37,53	36.399479	IUP 21
15	Ekspor Barang dan Jasa	% PDRB	30.42	25,72-26,35	30.5	IUP 22
16	Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur	Indeks	70.12	76.97	76.97314673	
17	Persentase Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau dan berkelanjutan	%	71.49	72,24-72,45	72,24-72,45	IUP 23b
18	Persentase Desa Mandiri	%	48.78	45.84	50,25	IUP 23c
19	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	1.7	1.59	1.9	IUP 31
20	Tingkat Inflasi	%	3.01	1,80-3,42	2,5+1	IUP 32
21	Indeks Kota Berkelanjutan	%	NA	61.06	61.06	IUP 23a
22	Total Dana Pihak Ketiga/PDRB	%	26.94	25.54	27.01	IUP 33a
23	Aset Dana Pensiun/PDRB	%	0.24	0.16	0.26	IUP 33b
24	Nilai Transaksi Saham per Provinsi Berupa Nilai Rata-Rata Tahunan	Rupiah	900,799,31	1223565.5	1223565.5	IUP 33c
25	Total Kredit/PDRB	%	40.94	40.07	40.99	IUP 33d
26	Inklusi Keuangan	%	80.51	90.36	90.36	IUP 34
27	Jumlah Kerjasama Provinsi	%	27	12.1	12.1	IUP 35
28	Indeks Ketahanan Nasional	Indeks	NA	3.2	3.2	IUP 36
29	Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah non pertanian pada level provinsi	%	0.21	0.22	0,44	IUP 14ai
30	Proporsi jumlah industri kecil dan menengah pada level provinsi	%	NA	8.98	8.98	IUP 14aii
31	Proporsi Jumlah Usaha Kecil dan Menengah (UKM)	%	2.17	2.29	2,37	IUP 14aiii
32	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB	%	0.93	1.01	0,99	IUP 14c
33	Return on Asset (ROA) BUMD	%	NA	2.07	2.07	IUP 14d

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
34	Jumlah Produk Tersertifikasi Halal	Produk	NA	22496	22800	
35	Aset Perbankan Syariah/PDRB	%	15.34	17.37	17.37	
36	Indeks Zakat Nasional	Poin	0.51	0.68	0.68	
37	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi	Indeks	87.39	92.25	92.25	
IV	**ASPEK PELAYANAN UMUM**					
1	Nilai SAKIP	Nilai	70.92	76,35 (BB)	76,35 (BB)	
2	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks (Kategori)	77.46	80,35 (A)	80,35 (A)	
3	Indeks Reformasi Hukum	Indeks	96.54	70.6	96,56	IUP 24
4	Indeks Pemerintah Digital	Skor	1.99	1.9	1.85	
5	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Indeks	4.2	3.5	Tidak ada penilaian untuk tahun berikutnya, diganti menjadi IPEMDI	IUP 25
6	Indeks Pelayanan Publik	Indeks	4.41	4.09	4,42	IUP 26
7	Indeks Integritas Nasional	Indeks	64.93	73.17	70,10	IUP 27
8	Persentase Capaian Pelaksanaan Aksi HAM Daerah	%	59	72.5	60,05	IUP 28a
9	Persentase Penegakan Hukum Peraturan Daerah	%	70.45	72.85	72.85	IUP 28b
10	Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	%	82.89	73.2	73.2	IUP 29
11	Indeks Demokrasi Indonesia	Indeks	75.27	76,75-80,00	76,75-80,00	IUP 30
12	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	3.53	3.7	3.59	Sasaran Visi
13	Indeks Transformasi Digital Nasional	Skor	NA	48.05	48.05	
14	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Indeks	86.06	82.5	87.5	
15	Indeks Kualitas Kebijakan	Indeks	45.79	79	46,20	
16	Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	%	NA	3.165	3.165	
17	Opini BPK atas LKD	Opini	WTP	WTP	WTP	
18	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	NA	85.89	85,89	
19	Nilai Sistem Merit	Nilai	284.5	308	308	
20	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	88.8	86.7	86.7	
	INDIKATOR KINERJA KUNCI					
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB BERKAITAN PELAYANAN DASAR					
1	**PENDIDIKAN**					
1	Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi	%	99.37	98.8	98.8	

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	dalam Pendidikan Menengah (APS)					
2	Persentase Anak Usia 4-18 Tahun Penyandang Disabilitas yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Khusus (APS)	%	92.51	92.54	92.54	
3	Kemampuan Literasi SMA	%	64.78	66.58	64,91	
4	Kemampuan Literasi SMK	%	58.57	62.48	59,09	
5	Kemampuan Literasi SDLB	%	54.17	58.98	50,96	
6	Kemampuan Literasi SMPLB	%	61.53	63.03	65,98	
7	Kemampuan Literasi SMALB	%	61.92	63.42	63,76	
8	Kemampuan Numerasi SMA	%	55.42	60.23	56,45	
9	Kemampuan Numerasi SMK	%	51.57	58.18	53,24	
10	Kemampuan Numerasi SDLB	%	50.78	52.59	46,77	
11	Kemampuan Numerasi SMPLB	%	59.39	60.15	61,2	
12	Kemampuan Numerasi SMALB	%	59.21	60.72	55,56	
13	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	%	NA	50.2	55.95	
2	**KESEHATAN**					
1	Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	%	100	100	100	
2	Persentase Pelayanan Kesehatan bagi penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	%	100	100	100	
3	Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	%	100	100	100	
4	Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	%	100	100	100	
3	**PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**					
1	Persentase Luas layanan irigasi multikomoditas kewenangan Provinsi	%	40.05	42.18	42.18	
2	Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	%	65.59	71.44	71.44	
3	Persentase peningkatan kapasitas yang terlayani melalui penyaluran air minum curah lintas kabupaten/kota terhadap kebutuhan pemenuhan kapasitas yang memerlukan pelayanan air	%	NA	25.5	25.5	

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	minum curah lintas kabupaten/kota					
4	Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman	%	2.32	18	18	
5	Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	%	75.31	77.42	73.69	
4	**PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN**					
1	Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	100	100	100	
2	Persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program provinsi yang memperoleh fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni	%	100	100	100	
3	Persentase Luas kawasan kumuh 10-15 Ha yang ditangani	%	2	15	10	
4	Persentase permukiman yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	%	99.69	99.67	99.76	
5	**KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**					
1	Persentase penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	%	100	100	100	
2	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	
3	Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	%	33.33	50	50	
4	persentase penanganan pra bencana	%	60	100	100	
5	Persentase penanganan tanggap darurat bencana	%	100	100	100	
6	Persentase penanganan pasca bencana	%	100	100	100	
6	**SOSIAL**					
1	Pesentase Penerima manfaat yang terpenuhi kebutuhan dasar	%	45.27	40	45,33	
7	**TENAGA KERJA**					
1	Tersedianya RTKD Provinsi yang masih berlaku	%	10	70	70	

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	80	85	85	
3	Persentase tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	%	51.63	58.79	58.79	
4	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	%	34.18	26.13	26.13	
5	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi.	%	106.08	78.1	78.1	
6	Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan perundangan bidang ketenagakerjaan	%	89.95	32.1	32.1	
8	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**					
1	Persentase anak memerlukan perlindungan khusus yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	
2	Persentase perempuan korban kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan komprehensif	%	100	100	100	
9	**PANGAN**					
1	Persentase Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	%	58.8	76.77	76.77	
2	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	%	0	2.56	2.56	
10	**PERTANAHAN**					
1	Terselesaikannya kasus tanah garapan belum bersertifikat yang dilakukan melalui mediasi	%	100	100	100	
2	Ditetapkannya Hak Atas tanah dalam penguasaan dan pengelolaan Pemerintah Daerah	%	100	100	100	
11	**LINGKUNGAN HIDUP**					
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	Indeks	77.4	76.61	76.61	
2	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang	%	3.12	100	6.4	

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	diterbitkan oleh Pemerintah Daerah					
3	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah Provinsi	%	68.5	76.4	75.5	
12	**ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**					
1	Jumlah Data Profile Kependudukan yang disusun	%	100	100	100	
13	**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**					
1	Persentase peningkatan status desa mandiri	%	29.69	3.9	3,9	
2	Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	%	44.37	12.01	45,50	
3	Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa	%	100	100	100	
4	Persentase Fasilitasi Penataan Desa	%	100	100	100	
14	**PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**					
1	Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	Rata-rata Anak per Wanita	2.36	2.32	2.32	
2	Angka prevalensi kontrasepsi modern/modern Contraceptive (mCPR)	%	59.1	62.2	62.2	
3	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	%	11.84	4.91	4.91	
4	Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	kelahiran per 1000 perempuan	25.5	32.41	32.41	
15	**PERHUBUNGAN**					
1	Rasio Konektivitas	Rasio	0.831	0.85	0.85	
2	Kinerja lalu lintas provinsi	Km/Jam	32	30	30	
3	Persentase perusahaan angkutan umum yang tersertifikasi sistem manajemen keselamatan	%	NA	4.44	4.44	
16	**KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**					
1	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	0	100	100	
2	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	%	8.33	100	100	Kondisi Awal mengikuti Perda No 5 Tahun

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						tentang OPD, (3 dari 38 OPD)
3	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Skor	74.76	81.91	74.85	
17	**KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH**					
1	Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	%	4.14	5.15	5,15	
2	Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	%	38.37	39.6	39,6	
3	Proporsi Usaha Kecil Menjalin Kemitraan dan Ekspor	%	31.64	73.03	33,5	
4	Pertumbuhan Wirausaha	%	4.89	4.58	4,58	
18	**PENANAMAN MODAL**					
1	Persentase peningkatan investasi di provinsi	%	16.8	12.02	6.13	
2	Realisasi Total terhadap Target Investasi	%	104.28	100	100	
19	**KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**					
1	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) di Provinsi	Indeks	55.5	54.48	54.48	
2	Persentase atlet yang masuk Pelatnas	%	0.01	0.09	0.09	
20	**STATISTIK**					
1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Skor	2.77	2.85	2.8	
21	**PERSANDIAN**					
1	Indeks Keamanan Informasi	Skor	505	520	520	
22	**KEBUDAYAAN**					
1	Persentase Warisan Budaya yang dilestarikan	%	100	100	100	
2	Persentase kenaikan Jumlah masyarakat yang mengunjungi Pusat seni dan pusat sejarah	%	NA	59	59	
23	**PERPUSTAKAAN**					
1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Indeks	31.77	62.5	62.5	
2	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Nilai	61.19	66.42	66.42	
24	**KEARSIPAN**					
1	Indeks Hasil Pengawasan Kearsipan pada lingkup Pemerintahan Daerah	Nilai	68.9	71.5	71,5	
	URUSAN PILIHAN					
25	**KELAUTAN DAN PERIKANAN**					
1	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	255,508,96	256113	256113	
2	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	997,210,65	1004561	1004561	
3	Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	%	90	100	97	

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
26	**PARIWISATA**					
1	Rasio PDRB Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	%	1.83	2.22	2.22	
2	Persentase pertumbuhan Kunjungan wisatawan	%	4.74	5.22	5.22	
3	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	4.33	0.42	0.42	
4	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki Kekayaan Intelektual	%	50	55.13	55.13	
27	**PERTANIAN**					
1	Peningkatan produksi tanaman pangan	%	6.39	0.58	0.58	
2	Peningkatan Produksi Hortikultura	%	-1.61	1.04	1.04	
3	Peningkatan Produksi Perkebunan	%	7.67	0.25	0.25	
4	Peningkatan Produksi komoditas Peternakan	%	-2.38	3.06	1.1	
5	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	94.04	83.44	83.44	
6	Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	%	82.57	71.5	71.5	
7	Persentase wilayah yang terkendali dari penyakit hewan menular strategis (diperoleh dari surveylance penyakit dari 5 PHMS)	%	100	100	100	
28	**KEHUTANAN**					
1	Persentase luas lahan kritis yang direhabilitasi	%	11.1	16.4	13.31	luas RHL dibagi dgn luas lahan kritis
2	Persentase Luas kawasan hutan yang dikelola oleh masyarakat dalam skema hutan desa, hutan kemasyarkatan, hutan tanaman rakyat dan kemitraan kehutanan	%	3.92	7.63	3.96	Persentaee pada kondisi awal (2024) sebesar 6,73 % atau 72.045,92 Ha dari luas total Kawasan Hutan NTB seluas 1.071.000 Ha

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
						(sumber data DLHK)
3	Peningkatan akses legal kepada masyarakat dalam pengelolaan hutan melalui Perhutanan Sosial	%	100	100	100	
4	Persentase kerusakan hutan pertahun (deforestrasi)	%	NA	0.19	0.19	
29	**ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**					
1	Persentase Usaha Tambang Sesuai Kewenangan Provinsi yang Tidak Melanggar Peraturan Perundang-Undangan	%	100	100	100	
30	**PERDAGANGAN**					
1	Persentase Kinerja Realisasi Pupuk	**%**	84.58	90	86	
2	Persentase penanganan pengaduan konsumen per Provinsi	%	100	100	100	
3	Nilai Ekspor Barang Per Provinsi	%	30.42	29.36	30.5	
31	**PERINDUSTRIAN**					
1	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	%	76.37	4.25	76.45	
2	Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas terhadap PDRB Provinsi	%	6.69	3.93	6.8	
3	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Orang	324.13	348189	348189	
4	Nilai Ekspor Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	US$ Miliar	1.02	2.4	1.25	
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Provinsi	Rp. Triliun	5.79	8.85	5.93	
6	Persentase realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri dibandingkan realisasi investasi seluruh sektor	%	9.49	19.15	9.6	
	FUNGSI PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN					
32	**TRANSMIGRASI**					
1	Persentase Desa Maju dan Mandiri di 4 Kawasan Transrmigrasi	%	81.36	91.52542373	91.52542373	
2	Persentase Peningkatan Pendapatan perkapita masyarakat di 4 Kawasan transmigrasi	%	7.14	1.6	1.6	

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	FUNGSI PENUNJANG DAN PENGAWASAN					
33	**SEKRETARIAT DPRD**					
1	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	%	100	100	100	
2	Persentase Penetapan RanPerda Tahun N	%	100	100	100	
3	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah	%	100	100	100	
34	**PERENCANAAN**					
1	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	
2	Kesesuaian antara RKPD dengan APBD	%	100	100	100	
35	**KEUANGAN**					
1	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang dialokasikan Melalui TKD	%	31.72	30	30	
2	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	%	42.92	59	59	
3	Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	%	88.34	94	94	
4	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	%	0.66	3	3	
5	Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	%	36.16	40	40	
6	Persentase Penurunan SILPA	%	-157.49	33	33	
36	**KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**					
1	Persentase Pegawai Pendidikan Perguruan Tinggi (ASN tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	%	69.77	71.38	71,38	
3	Persentase Pengembangan Kompetensi Berdasarkan Implementasi *Corporate University (CORPU)*	%	50	60	100	
37	**KESBANGPOLDAGRI**					
1	Persentase masyarakat yang mendapatkan Pendidikan Politik dan Etika Budaya Politik	%	71.6	76.3	76,3	
2	Persentase Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara Daerah yang mengikuti peningkatan kapasitas bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	%	76	83	83	

No.	Indikator	Satuan	Kondisi Awal Tahun 2025	Target RPJMD Tahun 2027	Target RKPD Tahun 2027	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
38	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**					
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan daerah	%	60	70	70	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	Rasio	1	0.97	0.97	
39	**PENGAWASAN**					
1	Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Level	III	Integrated Level III		
			2.14	-3.122	2,86	
2	Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)	Level	Level II (2,20)	Terdefinisi (Level III)		
			2.2	3.09	2,4	
3	Manajemen Risiko Indeks	indeks	2.659	3.232	2859	
4	Tindaklanjut Rekomendasi BPK Tahun Anggaran N-1	%	89.89	91.7	91,7	
40	**PENGADAAN**					
1	Pemanfaatan Sistem Pengadaan	%	23.41	20.31	20.31	
2	Kualifikasi dan Kompetensi SDM PBJ	Skor	22.65	23.34	23.34	
3	Tingkat Kematangan UKPBJ	Level	9/9	9/9	9/9	
41	**PELAYANAN PUBLIK**					
1	Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun N	Skor	85.03	85.29	85.29	
2	Survei Kepuasan Masyarakat	Indeks	88.8	86.7	86.7	

Sumber : RPJMD NTB 2025-2029 dan Hasil Analisa Bappeda NTB, 2026

BAB VIII PENUTUP

8.1 KAIDAH PELAKSANAAN

RKPD tahun 2027 dapat diwujudkan dengan membangun kolaborasi, sinergi dan partisipasi semua pelaku pembangunan. RKPD harus dijadikan acuan oleh seluruh pelaku pembangunan baik pihak pemerintah, swasta, organisasi masyarakat sipil dan mitra pembangunan lainnya. Semuanya melaksanakan strategi transformasi pembangunan sesuai peran masing-masing melalui kaidah pelaksanaan. Kaidah pelaksanaan mencakup konsistensi perencanaan dan pendanaan, kerangka pengendalian, sistem insentif dan mekanisme perubahan. Kaidah pelaksanaan ini menjadi instrumen pengaman untuk memastikan terwujudnya visi dan misi RPJMD 2025-2029 mendukung terwujudnya visi NTB Makmur Mendunia.

8.1.1 Konsistensi Perencanaan dan Pendanaan

Untuk menjaga konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan serta sinkronisasinya dengan kebijakan pendanaan diperlukan perencanaan yang berkualitas sehingga menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dimana terdapat kesesuaian antar dokumen perencanaan dengan pelaksanaannya. Perencanaan yang berkualitas tercermin pada konsistensi dan sinkronisasi antar dokumen perencanaan mulai dari RPJPN, RPJPD Provinsi dan Kabupaten/Kota, RPJMD Provinsi dan Kabupaten/Kota, Renstra Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, RKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Renja setiap Perangkat Daerah Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

Perencanaan yang berkualitas merupakan kunci bagi pelaksanaan pembangunan untuk mencapai tujuan secara berkelanjutan. Perencanaan yang berkualitas juga diperlukan untuk memberikan pedoman yang jelas bagi seluruh pelaku pembangunan baik pemerintah maupun pelaku non pemerintah. Upaya menjamin konsistensi perencanaan dan pendanaan perlu didukung dengan komitmen dari pemerintah daerah dan DPRD dalam pengambilan keputusan penetapan alokasi APBD setiap tahunnya. Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan prioritas pembangunan daerah mendapat alokasi yang semestinya. Pendekatan teknokratis dalam penetapan prioritas harus lebih diutamakan dibanding pendekatan yang bersifat politis. Dalam pendekatan teknokratis prinsip Kerangka Kerja Logis (KKL) pembangunan dengan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS).

- Tematik adalah penentuan tema-tema prioritas dalam suatu jangka waktu perencanaan serta mampu menjawab tujuan pembangunan.
- Holistik adalah penjabaran tematik program pembangunan kedalam perencanaan yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan dengan memperhatikan pengarus utamaan pembangunan yang mencakup GEDSI, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi sirkuler, transformasi digital, tujuan pembangunan berkelanjutan serta kebencanaan.
- Integratif adalah keterpaduan pelaksanaan program dari berbagai pemangku kepentingan pembangunan serta keterpaduan berbagai sumber pendanaan.

- Spasial adalah penjabaran beberapa program pembangunan dalam satu kesatuan wilayah sesuai Rencanan Tata Ruang Wilayah.

Sebagai alat ukur ketercapaian pembangunan, KKL dilengkapi indikator kinerja pada setiap tingkatannya. Pemilihan indikator kinerja menerapkan kriteria SMART; *Spesific, Measurable, Achievable, Result-Oriented/Relevan*t dan *Time-Bound* sehingga mampu menjamin kesinambungan indikator dalam perencanaan pembangunan. Dalam memastikan kesinambungan pembangunan, seluruh indikator RPJPD harus menjadi bagian dari RPJMD dan seluruh indikator RPJMD harus menjadi bagian dari RKPD dan Renstra Perangkat daerah.

Peningkatan kualitas belanja

Pencapaian sasaran pembangunan daerah dalam RKPD perlu didukung dengan sinkronisasi perencanaan dan pendanaan pembangunan. Sebagai Upaya menjamin pencapaian sasaran pebangunan daerah perlu dilakukan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber pendanaan pembangunan baik yang bersumber dari pemerintah maupun non pemerintah secara lebih inovatif, integratif dan tepat sasaran.

Dalam rangka mengoptimalkan sumber pendanaan pembangunan dilakukan peningkatan kualitas belanja dan pembiayaan prioritas pembangunan yang sesuai dengan tahapan pembangunan. Selain melakukan efisiensi dan peningkatan efektifitas dalam belanja, pemerintah juga memanfaatkan sumber dana dari non APBD.

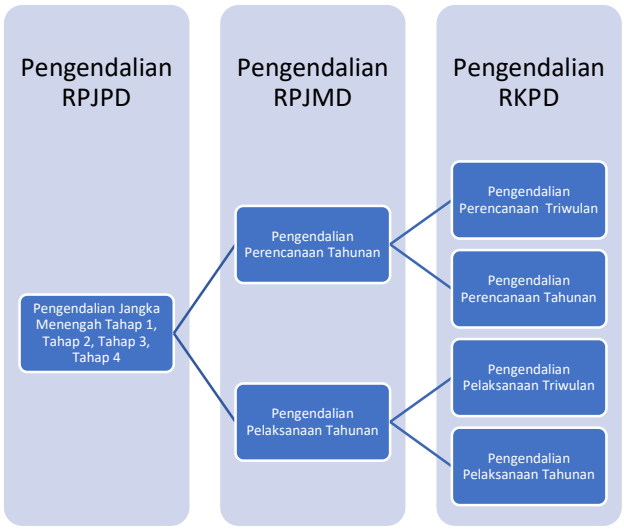
8.1.2 Kerangka Pengendalian

Dalam rangka menjamin tercapainya sasaran pembangunan daerah diperlukan pengendalian yang kontinyu dan partisipatif dengan memanfaatkan sistem elektronik terpadu didukung dengan tata kelola data pokok pembangunan. Pengendalian dilakukan dari kegiatan pemantauan, evaluasi dan manajemen resiko yang dilakukan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Mengacu pada sistem informasi terpadu untuk perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah mengoptimalkan Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) yang telah ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri. SIPD ini bertujuan untuk sinkronisasi perencanaan pusat dan daerah, penganggaran, dan monitoring dan evaluasi daerah. Pemerintah nasional dapat memantau aliran data capaian intervensi pusat di daerah dan intervensi daerah. Ekosistem perencanaan, penganggaran, dan monitoring evaluasi daerah yang mendukung transparansi, akuntabilitas, kemitraan, dan kolaborasi lintas pemerintahan, lintas sektor, dan non-pemerintahan. Proses pengendalian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan didukung dengan pengumpulan data sebagai dalam pemantauan dan evaluasi kebijakan pembangunan daerah.

Kerangka pengendalian RKPD Tahun 2027 bertujuan untuk menjamin agar implementasi program pembangunan daerah dapat mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Pengendalian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan RKPD dijabarkan dalam pengendalian perencanaan dan pengendalian pelaksanaan triwulan.

Gambar 8. 1 Kerangka Pengendalian RKPD 2027



Sumber: Bappeda NTB, 2026

Pengendalian RKPD dilaksanakan melalui pengendalian jangka menengah dan jangka pendek yang disampaikan kepada gubernur. Berdasarkan pada tahapan pelaksanaan ruang lingkup pengendalian daerah terbagi menjadi dua bagian:

PENGENDALIAN PERENCANAAN

Pengendalian pada tahap perencanaan bertujuan memastikan konsistensi perencanaan pembangunan, meningkatkan kualitas desain prioritas pembangunan daerah serta menjamin ketersediaan alokasi anggaran. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan hasil evaluasi perencanaan jangka menengah dan jangka pendek. Pengendalian jangka menengah mencakup: 1) penjabaran RPJPD ke RPJMD, dokumen RPJMD ke Renstra OPD dan Renstra OPD ke dokumen Renja Perangkat Daerah; 2) Kesiapan rencana desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk pendekatan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; 3) Konsistensi perencanaan dan penganggaran dan 4) Identifikasi resiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya. Selanjutnya pengendalian jangka pendek mencakup: 1) penjabaran RPJMD ke dokumen RKPD, dokumen RKPD ke dokumen renja perangkat daerah serta dokumen RKPD provinsi ke dokumen RKPD kab/kota; 2) kesiapan rencana desain proyek prioritas pembangunan daerah termasuk pendekatan prinsip KKL dan penetapan ukuran keberhasilan; 3) konsistensi perencanaan dan penganggaran dan 4) identifikasi resiko perencanaan pembangunan dan mitigasinya.

PENGENDALIAN PELAKSANAAN

Pengendalian pada tahap pelaksanaan bertujuan untuk menjamin impelementasi pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian ini dilaksanan melalui pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencanan jangka menengah dan jangka pendek. Pemantauan dan evaluasi tersebut mencakup: 1) Pemantauan proyek prioritas

pembangunan daerah; 2) Pemantauan mitigasi resiko pembangunan; 3) Evaluasi pencapaian sasaran pembangunan daerah dan 4) Evaluasi pencapaian tujuan utama dan program perangkat daerah yang mendukung sasaran pembangunan daerah.

Berbagai langkah pengendalian pembangunan tersebut perlu didukung tatanan regulasi agar pelaksanaan berjalan dengan efektif. Selain itu diperlukan juga pembentukan kelembagaan pengendalian yang dapat memastikan pembangunan berjalan dengan baik.

8.1.3 Sistem Insentif

Keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan daerah memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pelaku pembangunan. Untuk mendorong patisipasi aktif semua unsur pelaku pembangunan perlu diciptakan sistem insentif yang baik. Sistem insentif ini diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan secara luas dan partisipatif sehingga dapat mempercepat capaian sasaran prioritas pembangunan daerah. Untuk pelaku pembangunan dari unsur pemerintah sistem insentif diintegrasikan dalam sistem manajemen kinerja dan sistem manajemen anggaran. Pemberian insentif dilaksanakan berdasarkan kinerja perangkat daerah terhadap kinerja pencapaian pembangunan daerah. Kinerja diukur antara lain dari aspek konsistensi perencanaan, konsistensi perencanaan dan pendanaan, pencapaian indikator kerangka ekonomi makro pusat dan daerah serta pencapaian indikator-indikator lainnya maupun pencapaian program prioritas. Untuk pelaku pembangunan non pemerintah sistem insentif dapat berupa dukungan regulasi dan fasilitas kemudahan lainnya.

8.1.4 Mekanisme perubahan

Dokumen perencanaan yang disusun perlu bersifat adaptif, memerlukan ruang penyesuaian atas faktor yang tidak dapat dikendalikan. Dalam keadaan kahar (force majeure) yang meliputi perubahan geo politik, geo ekonomi, bencana serta penyimpangan pencapaian sasaran pembangunan yang signifikan dari tahapan-tahapan sebelumnya sehingga tidak memungkinkan sasaran pembangunan jangka Panjang target RPJPD dapat dimutakhirkan. Pemutakhiran target dapat dilakukan berdasarkan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

1. Komunikasi publik

   Dengan komunikasi publik yang baik diharapkan kebijakan dan program pemerintah dapat dengan mudah dipahami oleh publik dan dapat mengundang partisipasi publik dalam perencanaan, pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan pembangunan. Prinsip dasar komunikasi publik terdiri atas: 1) Struktur dan tata kelola komunikasi lintas sektor dan daerah yang obyektif, akuntabel, inovatif dan profesional; 2) Penyediaan informasi yang akurat, transparan, tepat waktu, menarik dan dapat dimanfaatkan semua pihak dengan mudah dan murah serta 3) Keterlibatan semua kelompok secara demokratis berbasis data yang valid dan metode komunikasi yang sesuai kebutuhan publik yang beragam. Selain itu komunikasi publik RPJPD juga menggunakan prinsip tidak ada yang tertinggal (no one left behind) dan partisipasi yang bermakna (meaningful participation). Komunikasi publik dilaksanakan dengan mengutamakan keterbukaan, menjamin akses yang luas, jelas, tepat, cepat dan obyektif.

8.2 SUMBER-SUMBER PEMBIAYAAN

Beberapa sumber pendanaan perlu dijajaki dan tidak terbatas pada sumber pendanaan melalui Pembiayaan Utang Daerah seperti Pinjaman Daerah. Sinergi Pendanaan antara Pemerintah Provinsi NTB dengan pihak swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD, dan/atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, skema Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPBU), pendanaan yang bersumber dari mitra pembangunan, penugasan kepada BUMD termasuk mendorong dilakukannya kerjasama secara B to B serta membuka peluang seluas-luasnya bagi peran serta masyarakat secara sukarela untuk penyelenggaraan skema Tanggung Jawab Sosial/*Corporate Social Responsibility (CSR)* dan kerjasama pendanaan lainnya, sesuai peraturan perundang-undangan. Secara skematis berbagai kerangka alternatif pendanaan yang dapat diimplementasikan pada tahun 2027 dapat dilihat pada Gambar berikut ini:

Gambar 8. 2 Kerangka Alternatif Pendanaan untuk RKPD Provinsi NTB Tahun 2027



Sumber: Bappeda NTB Tahun 2026, diolah

Kerangka alternatif pendanaan untuk RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 dapat dijelaskan sebagai berikut:

(a) Sumber Pembiayaan Melalui Pembiayaan Utang Daerah

Pembiayaan Utang Daerah adalah setiap penerimaan Daerah yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun – tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. Dalam hal ini, Pemerintah Daerah dilarang melakukan Pembiayaan langsung dari pihak luar negeri. Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran terlebih dahulu mendapatkan persetujuan dari DPRD yang diberikan pada

saat pembahasan APBD. Dalam hal tertentu, Kepala Daerah dapat melakukan pembiayaan melebihi nilai bersih maksimal yang telah disetujui DPRD dan dilaporkan sebagai perubahan APBD tahun yang bersangkutan. Pembiayaan Utang Daerah yang memenuhi persyaratan teknis dapat dilakukan melebihi sisa masa jabatan Kepala Daerah setelah mendapat pertimbangan dari Menteri, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemeritahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.

(b) Pinjaman Daerah

Pinjaman Daerah merupakan pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah lain, lembaga keuangan bank dan/atau lembaga keuangan bukan bank. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018, Pinjaman Daerah merupakan salah satu alternatif sumber pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk mendanai kegiatan yang merupakan inisiatif Pemerintah Daerah dalam rangka urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pinjaman Daerah dapat digunakan dalam rangka pengelolaan kas, pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah, pengelolaan portofolio utang daerah, dan/atau penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD. Terkait dengan Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD. Namun demikian, Pinjaman Daerah dimaksud harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenan. Pinjaman Daerah memiliki risiko kesinambungan fiskal, risiko tingkat bunga, dan risiko pembiayaan kembali, sehingga diperlukan kecermatan dan kehati- hatian dalam pengelolaan pinjaman daerah.

Daerah bertanggung jawab atas kegiatan yang diusulkan untuk didanai dari Pinjaman Daerah. Adapun pengelolaan Pinjaman Daerah harus memenuhi prinsip taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, transparan, akuntabel, efisien dan efektif dan kehati-hatian. Syarat untuk mendapatkan Pinjaman Daerah antara lain:

1) Jumlah sisa Pinjaman Daerah ditambah jumlah pinjaman yang akan ditarik tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum APBD tahun sebelumnya;
2) Nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman Daerah sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan;
3) Tidak mempunyai tunggakan atas pengembalian pinjaman yang berasal dari Pemerintah Pusat;
4) Kegiatan yang dibiayai dari Pinjaman Daerah harus sesuai dengan dokumen perencanaan daerah; dan

5) Persyaratan lain yang ditetapkan pemberi pinjaman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seluruh penerimaan maupun pengeluaran dalam rangka Pinjaman Daerah dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

(c) Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU)

Berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur, pemerintah dimungkinkan untuk melakukan kerjasama dengan badan usaha.

Kerjasama pemerintah dengan badan usaha dilakukan dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum. Kerjasama tersebut mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh Penanggung jawab Proyek Kerjasama (PJPK), yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Skema pendanaan KPBU dimaksudkan untuk pembangunan prasarana dasar yang tidak layak secara finansial namun layak secara ekonomis dan telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan. Kerjasama pemerintah dan badan usaha menjadi salah satu alternatif pembiayaan pembangunan infrastruktur sosial dan ekonomi.

Karakteristik proyek KPBU meliputi:

1) Proyek KPBU merupakan proyek infastruktur yang penyediaannya dilakukan Pemerintah melalui kerjasama dengan badan usaha
2) Skema diwujudkan melalui ikatan perjanjian (kontrak) kerjasama yang melibatkan pemerintah sebagai PJPK dan suatu badan usaha.
3) Dalam perjanjian kerjasama proyek, pihak badan usaha dapat bertanggungjawab atas desain, kontribusi, pembiayaan dan operasi proyek KPBU.
4) Perjanjian kerjasama skema KPBU biasanya memiliki jangka waktu relatif panjang (lebih dari 15 tahun) untuk memungkinkan pengembalian investasi bagi pihak badan usaha.
5) Basis dan perjanjian kerjasama proyek KPBU tersebut adalah pembagian alokasi risiko antara pemerintah melalui PJPK dan badan usaha.
6) Memberikan manfaat yang lebih bagi masyarakat dengan memperhatikan analisa biaya manfaat dan sosial dan analisa nilai manfaat uang (*Value for Money*) apabila dikerjasamakan dengan Badan Usaha.

KPBU di Indonesia sudah dibuka untuk 19 sektor baik KPBU ekonomi maupun sosial yang mempunyai kelayakan finansial tinggi (*full cost recovery*) atau kelayakan marjinal, 19 jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha yaitu: 1) infrastruktur transportasi; 2) infrastruktur jalan; 3) infrastruktur sumber daya air dan irigasi; 4) infrastruktur air minum; 5) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah terpusat; 6) infrastruktur sistem pengelolaan air limbah setempat; 7)

infrastruktur sistem pengelolaan persampahan; 8) infrastruktur telekomunikasi dan informatika; 9) infrastruktur energi dan ketenagalistrikan, termasuk infrastruktur energi terbarukan; 10) infrastruktur konservasi energi; 11) infrastruktur ekonomi fasilitas perkotaan; 12) infrastruktur kawasan; 13) infrastruktur pariwisata, antara lain pusat informasi pariwisata (tourism information center); 14) infrastruktur fasilitas pendidikan, penelitian dan pengembangan; 15) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya; 16) infrastruktur kesehatan; 17) infrastruktur pemasyarakatan; 18) infrastruktur perumahan rakyat; 19) infrastruktur fasilitas sarana olahraga, kesenian dan budaya.

Pengelompokan 19 (sembilan belas) jenis infrastruktur yang dapat dikerjasamakan dengan badan usaha melaui skema pendanaan KPBU dikelompokan menjadi 3 (tiga) kelompok terdiri kelompok pertama 7 (tujuh) jenis infrastruktur konektivitas (tranportasi, jalan, ketenagalistrikan, migas dan energi baru dan terbarukan (EBT), konservasi energi, telekomunikasi dan informatika), kelompok kedua 7 (tujuh) jenis infrastruktur fasilitas perkotaan (air minum, pengelolaan limbah setempat, pengelolaan limbah terpusat, pengelolaan sampah, SDA dan irigasi, pasar tradisional, perumaha rakyat, dan kelompok ketiga 6 jenis infrastruktur fasilitas sosial (pariwisata, pendidikan, lembaga pemasyarakatan, sarana olah raga dan budaya, kawasan/technopark, kesehatan).

Dalam pengimplementasiannya, Skema KPBU ini diharapkan dapat memacu baik aktifitas pembangunan pemerintah dan pemerintah daerah, maupun animo investasi bagi pihak swasta/badan usaha. Bentuk stimulus bagi pihak swasta/badan usaha diantaranya adanya jaminan dan dukungan Pemerintah serta kepastian pengembalian investasi Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur melalui mekanisme pembayaran secara berkala oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha. Namun demikian dalam pelaksanaannya Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat harus memperhatikan kemampuan keuangan daerah, kesinambungan fiskal, pengelolaan risiko fiskal dan ketepatan sasaran penggunaannya secara jangka panjang.

Akhirnya, dokumen RKPD Provinsi NTB Tahun 2027 ini membutuhkan komitmen, kerja keras, kecerdasan, keikhlasan, dan kontribusi sumber daya dari seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah di Provinsi NTB. Mewujudkan tujuan utama “Bangkit Bersama Menuju NTB Provinsi Kepulauan Yang Makmur Mendunia”. Semoga seluruh agenda pembangunan dapat berjalan dan mencapai tujuan sebagaimana yang telah direncanakan “untuk mewujudkan Nusa Tenggara Barat Emas pada tahun 2045” menuju Indonesia Emas 2045.

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD)
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2027

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga						**1.880.691.791.861,42**							**1.894.340.915.682,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.817.866.791.861,42**							**1.844.340.915.682,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.817.866.791.861,42**							**1.844.340.915.682,00**	
1.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***1.455.995.671.861,42***							***1.813.161.125.682,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	1.455.995.671.861,42						79.05 Skor	1.813.161.125.682,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00						1 Berita Acara	100.220.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00						2 Berita Acara	100.220.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	40.080.400,00						3 Data	250.550.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.175.000,00						1 Dokumen	125.717.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.220.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	694.304.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.220.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.852.800,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	56.500.000,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.160.000,00						1 Dokumen	121.229.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.625.000,00						1 Laporan	215.288.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.700.000,00						1 Laporan	430.608.000,00	
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	2 Substansi		2 Substansi	2 Substansi	0,00						2 Substansi	100.220.000,00	
	1.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						40.000.000,00							694.304.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	694.304.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	694.304.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						40.160.000,00							111.984.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	40.160.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	111.984.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.160.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	111.984.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						56.500.000,00							111.984.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	56.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	111.984.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	56.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	111.984.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						26.175.000,00							125.717.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.175.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	125.717.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	26.175.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	125.717.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						14.852.800,00							111.984.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	14.852.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	111.984.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						49.625.000,00							215.288.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	49.625.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	215.288.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	49.625.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	215.288.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						35.700.000,00							430.608.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	35.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	430.608.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	35.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	430.608.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						40.080.400,00							250.550.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	40.080.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Data	250.550.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						30.000.000,00							100.220.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	100.220.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							100.220.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.220.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						0,00							100.220.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.220.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						0,00							100.220.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2 Berita Acara		2 Berita Acara	0 Berita Acara	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Berita Acara	100.220.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu						0,00							100.220.000,00	
		Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	2 Substansi		2 Substansi	0 Substansi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Substansi	100.220.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	86.985.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	55.122.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	508.310.000,00						1 Dokumen	3.117.619.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	111.846.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	56.159.800,00						10 Dokumen	124.758.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.280.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	129.700.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170434 Orang/ Bulan		166434 Orang/ Bulan	167434 Orang/ Bulan	904.637.911.984,42						168434 Orang/ Bulan	1.297.823.424.682,00	
	1.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						904.637.911.984,42							1.297.823.424.682,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	170434 Orang/ Bulan		166434 Orang/ Bulan	3500 Orang/ Bulan	904.637.911.984,42	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		168434 Orang/ Bulan	1.297.823.424.682,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	770 Orang/ Bulan		770 Orang/ Bulan	3500 Orang/ Bulan	904.637.911.984,42	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		Orang/ Bulan	1.297.823.424.682,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						197.920.000,00							3.117.619.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	197.920.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	3.117.619.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	197.920.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	3.117.619.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						56.159.800,00							124.758.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8554 Dokumen		8554 Dokumen	8554 Dokumen	56.159.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8554 Dokumen	124.758.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	8554 Dokumen	56.159.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	124.758.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							55.122.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	55.122.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	55.122.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							75.280.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.280.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						10.000.000,00							86.985.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30 Dokumen		30 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Dokumen	86.985.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	86.985.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						10.000.000,00							129.700.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	129.700.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	129.700.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							111.846.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	111.846.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	111.846.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
		Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	72.450.000,00						2 Laporan	303.299.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	177.550.000,00						4 Laporan	144.594.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	90.423.000,00	
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							90.423.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	90.423.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						177.550.000,00							144.594.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	177.550.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	144.594.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	177.550.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	144.594.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						72.450.000,00							303.299.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	72.450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	303.299.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	72.450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	303.299.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						10.000.000,00					-		163.972.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun						10.000.000,00					-		163.972.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	94.768.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00						12 Laporan	69.204.000,00	
	1.01.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah						0,00							94.768.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	94.768.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						10.000.000,00							69.204.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	69.204.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.512.500,00						1 Dokumen	205.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	120.397.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.451.000,00						1 Dokumen	351.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	254.222.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	297.403.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	35.078.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	80.176.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	60.969.000,00	
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							60.969.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	60.969.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							35.078.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	35.078.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						100.451.000,00							351.400.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.451.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	351.400.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						199.512.500,00							205.770.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.512.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	205.770.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							120.397.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	120.397.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							80.176.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	80.176.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							297.403.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	297.403.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	297.403.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							254.222.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	254.222.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	542 Orang		542 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		542 Orang	254.222.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
		Persentase Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	720 Dokumen	6.000.000,00						720 Dokumen	227.932.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	191.240.000,00						1 Dokumen	129.558.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	250 Dokumen	5.800.000,00						250 Dokumen	66.254.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.600.000,00						12 Laporan	231.323.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	375.080.000,00						3 Laporan	381.294.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	23.200.000,00						12 Paket	211.196.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	7.500.000,00						5 Paket	109.065.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.011.100,00						4 Paket	148.901.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	23.875.000,00						3 Paket	18.610.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.077.597,00						2 Paket	53.349.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	35.057.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						23.875.000,00							18.610.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	23.875.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	18.610.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.077.597,00							53.349.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.077.597,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	53.349.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							35.057.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	35.057.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	35.057.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.200.000,00							211.196.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	23.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	211.196.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	12 Paket	23.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	211.196.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.011.100,00							148.901.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	10.011.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	148.901.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	10.011.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	148.901.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						6.000.000,00							227.932.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	720 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	227.932.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	720 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	227.932.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						7.500.000,00							109.065.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	5 Paket	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	109.065.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	109.065.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						40.600.000,00							231.323.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	40.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	231.323.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	40.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	231.323.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						375.080.000,00							381.294.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	375.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	381.294.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	375.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	381.294.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						5.800.000,00							66.254.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	5.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	66.254.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	250 Dokumen	5.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	66.254.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						191.240.000,00							129.558.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	191.240.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	129.558.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	191.240.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	129.558.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
		Persentase BMD yang Diterima/ Diadakan						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	76.212.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	105.550.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	45.100.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	466.791.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	466.791.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3 Unit	5 Unit	100.000.000,00						5 Unit	378.423.000,00	
	1.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							466.791.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	466.791.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	466.791.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							466.791.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	466.791.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	466.791.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							76.212.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	76.212.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	76.212.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						100.000.000,00							378.423.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	378.423.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	378.423.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00							45.100.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	45.100.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							105.550.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	105.550.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	105.550.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
		Persentase laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	818.394.700,00						12 Laporan	590.663.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.239.467.000,00						12 Laporan	3.345.769.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	68.589.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	53.751.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							53.751.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	53.751.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						397.966.300,00							590.663.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	397.966.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	590.663.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							68.589.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	68.589.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	68.589.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						49.014.467.000,00							3.345.769.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	49.014.467.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	3.345.769.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	Unit	0,00						Unit	244.937.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	405.060.000,00						30 Unit	56.453.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00						10 Unit	55.101.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	74.744.000,00						10 Unit	196.439.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	99.075.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						199.050.000,00							56.453.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	30 Unit	199.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	56.453.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	30 Unit	199.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	56.453.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							244.937.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	244.937.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	244.937.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						20.000.000,00							55.101.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	80 Unit	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	55.101.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	80 Unit	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	55.101.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						74.744.000,00							196.439.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	10 Unit	74.744.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	196.439.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	74.744.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	196.439.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							99.075.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	99.075.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.486.577,00						1 Unit Kerja	3.766.147.000,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						0,00							204.625.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	0 Unit Kerja	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	204.625.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	-	499.712.012.380,00						-	500.000.000.000,00	
	1.01.01.1.02.0009	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan						499.712.012.380,00							500.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Bidang Pendidikan	-		-	158922 Orang/bulan	499.712.012.380,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Non Fisik-TPG PNSD DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD DAK Non Fisik-TKG PNSD	-	-		-	500.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**364.472.620.000,00**							**30.690.886.000,00**	
		Meningkatnya mutu pendidikan						***353.975.820.000,00***							***29.753.292.000,00***	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus	98.17 %		57 %	57.25 %	352.685.820.000,00						58 %	21.214.331.000,00	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah	99.84 %		66.6 %	66.8 %	352.685.820.000,00						66.85 %	21.214.331.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMA						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	500 Buku		500 Buku	500 Buku	100.000.000,00						500 Buku	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	0,00						5 Konten Digital	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	75.000.000,00						150 Orang	602.735.000,00	
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	0,00						30 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		3200 Paket	2 Paket	300.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta didik		500 Peserta didik	500 Peserta didik	350.000.000,00						500 Peserta didik	0,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	75.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	374 Satuan Pendidikan		374 Satuan Pendidikan	374 Satuan Pendidikan	193.308.600.000,00						374 Satuan Pendidikan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	688 Orang		688 Orang	688 Orang	10.150.000,00						688 Orang	0,00	
		terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	500 Buku		500 Buku	500 Buku	100.000.000,00						500 Buku	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	0,00						5 Konten Digital	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	75.000.000,00						150 Orang	602.735.000,00	
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	30 Orang		30 Orang	30 Orang	0,00						30 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		3200 Paket	2 Paket	300.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta didik		500 Peserta didik	500 Peserta didik	350.000.000,00						500 Peserta didik	0,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	75.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	374 Satuan Pendidikan		374 Satuan Pendidikan	374 Satuan Pendidikan	193.308.600.000,00						374 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	688 Orang		688 Orang	688 Orang	10.150.000,00						688 Orang	0,00	
	1.01.02.1.01.0039	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						300.000.000,00							0,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		3200 Paket	2000 Paket	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0041	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						175.000.000,00							0,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0045	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas						350.000.000,00							0,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	500 Peserta didik		500 Peserta didik	500 Peserta didik	350.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		500 Peserta didik	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		750 Peserta Didik	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0050	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						85.000.000,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	50 Orang	85.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	150 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		60 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0053	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas						193.308.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Mengelola Dana BOS	374 Satuan Pendidikan		374 Satuan Pendidikan	374 Satuan Pendidikan	193.308.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Non Fisik-Dana BOSP-BOS Reguler	-	-		374 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0054	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas						10.150.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Menengah Atas	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Atas	688 Orang		688 Orang	0 Orang	10.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		688 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0056	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Atas						0,00							0,00	
		Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	30 Orang		30 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang		150 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		150 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Konten Digital	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						48.050.000,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	5 Dokumen	48.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						0,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	0 Komunitas	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						0,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0066	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						100.000.000,00							0,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	500 Buku		500 Buku	1500 Buku	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		500 Buku	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.01.0075	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		344 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	300 Buku		300 Buku	300 Buku	100.000.000,00						300 Buku	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	0,00						5 Konten Digital	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	75.000.000,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	300.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	75.000.000,00						150 Orang	0,00	
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	103 Peserta didik		103 Peserta didik	103 Peserta didik	175.000.000,00						103 Peserta didik	0,00	
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	500 Orang		500 Orang	500 Orang	175.000.000,00						500 Orang	0,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	75.000.000,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	333 Satuan Pendidikan		333 Satuan Pendidikan	333 Satuan Pendidikan	138.485.540.000,00						333 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.150.000,00						100 Orang	0,00	
			Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00						100 Orang	0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	175.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	300 Buku		300 Buku	300 Buku	100.000.000,00						300 Buku	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	0,00						5 Konten Digital	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	75.000.000,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	300.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	75.000.000,00						150 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	103 Peserta didik		103 Peserta didik	103 Peserta didik	175.000.000,00						103 Peserta didik	0,00	
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	500 Orang		500 Orang	500 Orang	175.000.000,00						500 Orang	0,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	75.000.000,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	333 Satuan Pendidikan		333 Satuan Pendidikan	333 Satuan Pendidikan	138.485.540.000,00						333 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	10.150.000,00						100 Orang	0,00	
			Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	150.000.000,00						100 Orang	0,00	
	1.01.02.1.02.0030	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						40.000.000,00							0,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	10 Paket	40.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0031	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						300.000.000,00							0,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2000 Paket	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0033	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						175.000.000,00							0,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	47 Paket	175.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0037	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan						175.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Kejuruan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	103 Peserta didik		103 Peserta didik	500 Peserta didik	175.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		103 Peserta didik	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						100.000.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	150 Peserta Didik	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		610 Peserta Didik	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0042	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						80.000.000,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	100 Orang	80.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		135 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0046	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						138.485.540.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Mengelola Dana BOS	333 Satuan Pendidikan		333 Satuan Pendidikan	333 Satuan Pendidikan	138.485.540.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	-		333 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0047	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan						10.150.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Kejuruan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	10.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	-		100 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Konten Digital	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						175.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0056	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik SMK						150.000.000,00							0,00	
		Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	Pendidik SMK yang mendapat sertifikat kompetensi	100 Orang		100 Orang	111 Orang	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						0,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	0 Komunitas	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						0,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0060	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik						175.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	500 Orang		500 Orang	500 Orang	175.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		500 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0061	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						100.000.000,00							0,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	300 Buku		300 Buku	60 Buku	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Penugasan-SMK	-	-		300 Buku	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		329 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang		150 Orang	50 Orang	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		150 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0078	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Menengah Kejuruan						0,00							0,00	
		Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	1 Orang		1 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	175.000.000,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	150 Buku		150 Buku	150 Buku	0,00						150 Buku	82.365.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	0,00						5 Konten Digital	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	25.000.000,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	54.910.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	200 Orang		200 Orang	200 Orang	0,00						200 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	50.000.000,00						150 Orang	0,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	164 Peserta Didik		164 Peserta Didik	164 Peserta Didik	450.000.000,00						164 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	0,00						25 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	25.000.000,00						20 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan		55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	18.698.480.000,00						55 Satuan Pendidikan	20.972.727.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	50 Orang		50 Orang	50 Orang	10.150.000,00						50 Orang	0,00	
		Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	175.000.000,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	150 Buku		150 Buku	150 Buku	0,00						150 Buku	82.365.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	0,00						5 Konten Digital	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	25.000.000,00						50 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	54.910.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	200 Orang		200 Orang	200 Orang	0,00						200 Orang	0,00	
			Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	50.000.000,00						150 Orang	0,00	
			Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	164 Peserta Didik		164 Peserta Didik	164 Peserta Didik	450.000.000,00						164 Peserta Didik	0,00	
			Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	25 Orang		25 Orang	25 Orang	0,00						25 Orang	0,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	25.000.000,00						20 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan		55 Satuan Pendidikan	55 Satuan Pendidikan	18.698.480.000,00						55 Satuan Pendidikan	20.972.727.000,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	50 Orang		50 Orang	50 Orang	10.150.000,00						50 Orang	0,00	
	1.01.02.1.03.0037	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						20.000.000,00							0,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	10 Paket	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0038	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik						100.000.000,00							0,00	
		Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	500 Paket	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0040	Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik						175.000.000,00							0,00	
		Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia	3 Paket		3 Paket	3 Paket	175.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		3 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0044	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus						450.000.000,00							0,00	
		Biaya Personil Peserta Didik Pendidikan Khusus Diterima oleh Peserta Didik	Jumlah Peserta Didik Pendidikan Khusus yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	164 Peserta Didik		164 Peserta Didik	150 Peserta Didik	450.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		164 Peserta Didik	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						60.000.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	50 Peserta Didik	60.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		200 Peserta Didik	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0049	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Khusus						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan Tersedia bagi Satuan Pendidikan Khusus	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Khusus	200 Orang		200 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		200 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						50.000.000,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	53 Orang	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		250 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0052	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus						18.698.480.000,00							20.972.727.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Mengelola Dana BOS	55 Satuan Pendidikan		55 Satuan Pendidikan	53 Satuan Pendidikan	18.698.480.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	-		55 Satuan Pendidikan	20.972.727.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0053	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus						10.150.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Tenaga Pengelola Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Pendidikan Khusus	50 Orang		50 Orang	0 Orang	10.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Non Fisik-BOS Reguler	-	-		50 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Konten Digital	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang		20 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						80.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.03.0062	Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Khusus						0,00							0,00	
		Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	Jumlah Pendidik Satuan Pendidikan Khusus yang mendapat sertifikat kompetensi	20 Orang		20 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		20 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0065	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terlaksananya sertifikasi kompetensi peserta didik	Jumlah peserta didik yang memiliki sertifikasi kompetensi	25 Orang		25 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		25 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						0,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0073	Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan	150 Orang		150 Orang	53 Orang	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						0,00							104.329.000,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	0 Komunitas	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Komunitas	104.329.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0082	Peningkatan profesi pelaku perbukuan daerah pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							54.910.000,00	
		Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	Jumlah Pelaku perbukuan daerah yang mendapatkan fasilitasi peningkatan profesi	10 Orang		10 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Orang	54.910.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0083	Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik						0,00							82.365.000,00	
		Peserta Didik Menerima Perlengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks	Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik	150 Buku		150 Buku	0 Buku	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Buku	82.365.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***353.975.820.000,00***							***29.753.292.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100 %		100 %	100 %	1.930.000.000,00						100 %	8.538.961.000,00	
			999.Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	98.95 %		98.75 %	98.8 %	1.930.000.000,00						98.85 %	8.538.961.000,00	
			999.Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	99 Persentase		98.75 Persentase	98.8 Persentase	1.930.000.000,00						98.85 Persentase	8.538.961.000,00	
			999.Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	92.65 Persentase		92.52 Persentase	92.54 Persentase	1.930.000.000,00						92.56 Persentase	8.538.961.000,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMA						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	100.000.000,00						2 Ruang	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	0,00						100 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	0,00						4 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	200.000.000,00						4 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	200.000.000,00						4 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	9 Ruang		9 Ruang	9 Ruang	0,00						9 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00						4 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	300.000.000,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	0,00	
		terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	2 Ruang	100.000.000,00						2 Ruang	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	0,00						100 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	0,00						4 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	200.000.000,00						4 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		4 Ruang	4 Ruang	200.000.000,00						4 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	9 Ruang		9 Ruang	9 Ruang	0,00						9 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00						4 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		3 Unit	3 Unit	300.000.000,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	0,00	
	1.01.02.1.01.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	4 Ruang		4 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	-	-		4 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0010	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	9 Ruang		9 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	-	-		9 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0011	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMA	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0012	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						0,00							0,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0013	Pembangunan Asrama Sekolah						0,00							0,00	
		Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0014	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						300.000.000,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	3 Unit		3 Unit	2 Unit	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0015	Pembangunan Fasilitas Parkir						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0016	Pembangunan Kantin Sekolah						0,00							0,00	
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0019	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah						200.000.000,00							0,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	4 Ruang		4 Ruang	9 Ruang	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0020	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0027	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0028	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah						0,00							0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Perpusatakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0029	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0036	Pengadaan Mebel Sekolah						120.000.000,00							0,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0037	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah						5.000.000,00							0,00	
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	2 Paket		2 Paket	15 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0038	Pengadaan Perlengkapan Sekolah						40.000.000,00							0,00	
		Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	10 Paket	40.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0055	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit		100 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							0,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0067	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0,00							0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0068	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						300.000.000,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	3 Unit	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0069	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah						0,00							0,00	
		Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0070	Pembangunan Ruang Laboratorium						0,00							0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0071	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	2 Ruang		2 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0072	Pembangunan Ruang Kelas Baru						200.000.000,00							0,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	4 Ruang		4 Ruang	9 Ruang	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0073	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0,00							0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Di Rehabilitasi sedang/berat	4 Unit		4 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0074	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah						0,00							0,00	
		Kantin Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0076	Penataan Ruang/Sudut Baca						0,00							0,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0077	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.01.0079	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							0,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	0,00						100 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	100.000.000,00						3 Ruang	0,00	
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang		12 Ruang	12 Ruang	300.000.000,00						12 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	1.000.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	198.962.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00						1 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	0,00						100 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang		3 Ruang	3 Ruang	100.000.000,00						3 Ruang	0,00	
			Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang		12 Ruang	12 Ruang	300.000.000,00						12 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	1.000.000.000,00						1 Ruang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	198.962.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.000.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	1.01.02.1.02.0001	Pembangunan USB (Unit Sekolah Baru)						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	3 Ruang		3 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0004	Pembangunan Ruang Praktik Siswa						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Praktik Siswa yang Terbangun	Jumlah Ruang Praktik Siswa yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0005	Pembangunan Ruang Laboratorium						0,00							0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0006	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0007	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						0,00							0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0008	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						0,00							0,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0009	Pembangunan Asrama Sekolah						0,00							0,00	
		Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0010	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						1.000.000.000,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0011	Pembangunan Fasilitas Parkir						0,00							0,00	
		Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0012	Pembangunan Kantin Sekolah						0,00							0,00	
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0016	Rehabilitasi Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi	Jumlah ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0018	Rehabilitasi Ruang Laboratorium						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0019	Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0028	Pengadaan Mebel Sekolah						120.000.000,00							0,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0029	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah						5.000.000,00							0,00	
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	15 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0032	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah						0,00							198.962.000,00	
		Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	198.962.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0035	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0048	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit		100 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							0,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0062	Rehabilitasi sedang/berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						300.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	3 Unit	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0063	Rehabilitasi Ruang Praktik Peserta Didik						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Praktik Peserta Didik yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Praktik Peserta Didik yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	2 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0064	Pembangunan Ruang Kelas Baru						300.000.000,00							0,00	
		Ruang Kelas Baru Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	12 Ruang		12 Ruang	3 Ruang	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		12 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0065	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0,00							0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0066	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Serba Guna/Aula						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0067	Rehabilitasi sedang/berat Kantin Sekolah						0,00							0,00	
		Kantin Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0068	Penataan Ruang/Sudut Baca						0,00							0,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0069	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						1.000.000.000,00							0,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	5 Ruang	1.000.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0070	Rehabilitasi sedang/berat Fasilitas Parkir						0,00							0,00	
		Rehabilitasi Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0071	Rehabilitasi sedang/berat Asrama Sekolah						100.000.000,00							0,00	
		Asrama Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0074	Rehabilitasi sedang/berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0,00							0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0075	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah						0,00							0,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0076	Pembangunan Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							0,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terbangun	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0077	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						0,00							0,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.02.0079	Pembangunan Bengkel/Unit Produksi						0,00							0,00	
		Bengkel/Unit Produksi yang Terbangun	Jumlah Bengkel/Unit Produksi yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	238.606.000,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	135.897.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	296.121.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	189.456.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	321.811.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	0,00						100 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	269.049.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	217.957.000,00	
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	658.922.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	135.897.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	141.236.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	198.962.000,00	
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	219.641.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	160.289.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	165.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	5.491.014.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	238.606.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	135.897.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	296.121.000,00	
			Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	189.456.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	321.811.000,00	
			Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	0,00						100 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	269.049.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	217.957.000,00	
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	658.922.000,00	
			Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	135.897.000,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	141.236.000,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	198.962.000,00	
			Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	219.641.000,00	
			Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00						1 Ruang	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	200.000.000,00						1 Unit	160.289.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	165.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	5.491.014.000,00	
	1.01.02.1.03.0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)						0,00							5.491.014.000,00	
		Sekolah Baru yang Terbangun	Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Unit	5.491.014.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						0,00							658.922.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terbangun	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	658.922.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							219.641.000,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	219.641.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah						0,00							269.049.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terbangun	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	269.049.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0006	Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula						0,00							0,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terbangun	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0007	Pembangunan Asrama Sekolah						0,00							238.606.000,00	
		Asrama Sekolah yang Terbangun	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	238.606.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0008	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						200.000.000,00							160.289.000,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terbangun	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	160.289.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0009	Pembangunan Fasilitas Parkir						0,00							296.121.000,00	
		Fasilitas Parkir yang Terbangun	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	296.121.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0010	Pembangunan Kantin Sekolah						0,00							321.811.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kantin Sekolah yang Terbangun	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	321.811.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0012	Pembangunan Ruang Laboratorium						0,00							0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terbangun	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0013	Pembangunan Ruang Orientasi dan Mobilitas						0,00							0,00	
		Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terbangun	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0014	Pembangunan Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)						0,00							0,00	
		Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0015	Pembangunan Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)						0,00							0,00	
		Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0016	Pembangunan Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)						0,00							0,00	
		Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0017	Pembangunan Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)						0,00							0,00	
		Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terbangun	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Dibangun	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0028	Rehabilitasi Ruang Laboratorium						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Laboratorium yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0029	Rehabilitasi Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Pusat Sumber Anak Berkebutuhan Khusus yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0030	Rehabilitasi Ruang Orientasi dan Mobilitas						100.000.000,00							0,00	
		Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Orientasi dan Mobilitas yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0031	Rehabilitasi Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B)						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Persepsi Bunyi dan Irama untuk Tunarungu (B) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0032	Rehabilitasi Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C)						0,00							0,00	
		Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Diri untuk Tunagrahita (C) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0033	Rehabilitasi Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D)						0,00							0,00	
		Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Diri dan Bina Gerak untuk Tunadaksa (D) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0034	Rehabilitasi Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E)						0,00							0,00	
		Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Terehabilitasi	Jumlah Ruang Bina Pribadi dan Sosial untuk Tunalaras (E) yang Telah Direhabilitasi	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0035	Pengadaan Mebel Sekolah						120.000.000,00							0,00	
		Mebel Sekolah yang Tersedia	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	120.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0036	Pengadaaan Alat Rumah Tangga Sekolah						5.000.000,00							0,00	
		Alat Rumah Tangga Sekolah yang Tersedia	Jumlah Alat Rumah Tangga yang Tersedia	1 Paket		1 Paket	10 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0039	Pengadaaan Sarana Mobilitas Sekolah						0,00							0,00	
		Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	Jumlah Sarana Mobilitas Sekolah yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0042	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0054	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit		100 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							0,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Paket	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.03.0064	Penataan Ruang/Sudut Baca						0,00							0,00	
		Ruang/Sudut Baca yang Tertata	Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata	1 Ruang		1 Ruang	0 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0067	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah						0,00							0,00	
		Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0068	Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0,00							0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terbangun	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Dibangun	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0069	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						165.000.000,00							0,00	
		Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	165.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0070	Pembangunan Ruang Kelas Baru						200.000.000,00							0,00	
		Ruang Kelas Sekolah Bertambah	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Bertambah	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Ruang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0072	Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah						0,00							0,00	
		Kantin Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Kantin Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0074	Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah						0,00							0,00	
		Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0075	Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir						0,00							189.456.000,00	
		Fasilitas Parkir yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	189.456.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0076	Rehabilitasi Sedang/Berat Asrama Sekolah						100.000.000,00							135.897.000,00	
		Asrama Sekolah yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	135.897.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0077	Rehabilitasi sedang/berat Perpustakaan Sekolah						0,00							217.957.000,00	
		Perpustakaan Sekolah yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	217.957.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.03.0078	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula						0,00							198.962.000,00	
		Ruang Serba Guna/Aula yang Terehabilitasi Sedang/Berat	Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	198.962.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0079	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Kelas Sekolah						100.000.000,00							141.236.000,00	
		Ruang Kelas Sekolah yang Terehabiltasi sedang/berat	Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi sedang berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	141.236.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.02.1.03.0080	Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU						100.000.000,00							135.897.000,00	
		Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Terehabilitasi sedang/berat	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat	1 Ruang		1 Ruang	1 Ruang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ruang	135.897.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMA						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
		terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	1.01.02.1.01.0043	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	-		-	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
3.	**1.01.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM**						**55.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan						***55.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan Lokal	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	55.000.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.01.03.1.01	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						25.000.000,00					-		0,00	
		Persentase sekolah yang telah menyusun modul dan bahan ajar bahasa daerah						25.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	100 Buku		0 Buku	80 Buku	0,00						80 Buku	0,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	100 Buku		0 Buku	100 Buku	25.000.000,00						100 Buku	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	2 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	2 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	150 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	0,00	
	1.01.03.1.01.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah						0,00							0,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	3 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.03.1.01.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah						25.000.000,00							0,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersedia	100 Buku		0 Buku	100 Buku	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Buku	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.03.1.01.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah						0,00							0,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Meningkat Kompetensinya	150 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah						0,00							0,00	
		Buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Menengah yang telah dinilai/ditelaah	100 Buku		0 Buku	0 Buku	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Buku	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.03.1.01.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah						0,00							0,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Menengah yang tersusun	2 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.03.1.01.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah						0,00							0,00	
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Menengah yang Tersusun	2 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.03.1.02	Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						30.000.000,00					-		0,00	
		Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						30.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	15 Buku		0 Buku	15 Buku	0,00						15 Buku	0,00	
			Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	50 Buku		0 Buku	50 Buku	0,00						50 Buku	0,00	
			Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	30.000.000,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
	1.01.03.1.02.0002	Penyusunan Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus						0,00							0,00	
		Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersusun	Jumlah Silabus Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.03.1.02.0003	Penyediaan Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus						0,00							0,00	
		Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus Tersedia	Jumlah Buku Teks Pelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersedia	50 Buku		0 Buku	0 Buku	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Buku	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.03.1.02.0004	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus						30.000.000,00							0,00	
		Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus Meningkat Kompetensinya	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Meningkat Kompetensinya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.03.1.02.0005	Pelaksanaan penilaian/penelaahan buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus						0,00							0,00	
		Buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	Jumlah buku teks muatan lokal Pendidikan Khusus yang telah dinilai/ditelaah	15 Buku		0 Buku	0 Buku	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Buku	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.03.1.02.0006	Penyusunan model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus						0,00							0,00	
		Tersusunnya model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus	Jumlah model-model pembelajaran inovatif Pendidikan Khusus yang tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.03.1.02.0007	Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus	Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Khusus yang Tersusun	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
4.	**1.01.04**	**PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**						**170.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidikan						***170.000.000,00***							***0,00***	
			999.Indeks Pemerataan Guru	0.74 Poin		0.71 Poin	0.72 Poin	170.000.000,00						0.73 Poin	0,00	
			999.Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	46.48 Persentase		42.48 Persentase	43.48 Persentase	170.000.000,00						44.48 Persentase	0,00	
			999.Persentase kualifikasi pendidikan minimal S1	97.25 %		96.85 %	96.95 %	170.000.000,00						97.05 %	0,00	
	1.01.04.1.01	Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Provinsi						170.000.000,00					-		0,00	
		Persentase Ketersediaan data Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten / Kota dalam satu provinsi						170.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	120.000.000,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00						2 Laporan	0,00	
	1.01.04.1.01.0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						120.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		3 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.04.1.01.0002	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
5.	**1.01.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN**						**60.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas dan distribusi institusi pendidikan						***15.000.000,00***							***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Usulan Izin Satuan Pendidikan yang Diterbitkan/ Diperbarui	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	15.000.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.01.05.1.01	Penerbitan Izin Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						30.000.000,00					-		0,00	
		Persentase verifikasi dan evaluasi kelayakan penyelenggaraan pendidikan menengah yang diselenggarakan oleh masyarakat						30.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00						10 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00						10 Dokumen	0,00	
	1.01.05.1.01.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						15.000.000,00							0,00	
		Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		10 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.05.1.01.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Menengah yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		10 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.05.1.02	Penerbitan Izin Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						30.000.000,00					-		0,00	
		Persentase verifikasi dan evaluasi kelayakan penyelenggaraan pendidikan Khusus yang diselenggarakan oleh masyarakat						30.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	1.01.05.1.02.0001	Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						15.000.000,00							0,00	
		Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat Terverifikasi	Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.05.1.02.0002	Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.05.1.02.0003	Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pendidikan Khusus yang Diselenggarakan oleh Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
6.	**1.01.06**	**PROGRAM PENGEMBANGAN BAHASA DAN SASTRA**						**50.000.000,00**							**0,00**	
		Terlestarikannya bahasa dan sastra daerah						***50.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase pengembangan bahasa dan sastra daerah	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00						100 %	0,00	
	1.01.06.1.01	Pembinaan, Pengembangan dan Perlindungan Bahasa dan Sastra yang Penuturannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						50.000.000,00					-		0,00	
		Persentase pembinaan pengembangan dan perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah						50.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	3 Buku		3 Buku	3 Buku	0,00						3 Buku	0,00	
			Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan provinsi	6 Judul		3 Judul	3 Judul	0,00						3 Judul	0,00	
			Jumlah Ensiklopedia Budaya Daerah kewenangan provinsi	10 Buku		3 Buku	3 Buku	0,00						3 Buku	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kebijakan strategis dan regulasi yang mendukung upaya pelestarian bahasa daerah di lingkup provinsi.	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi	10 Media		3 Media	5 Media	0,00						5 Media	0,00	
			Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	6 Dokumen		3 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00						6 Dokumen	0,00	
			Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi	75 Orang		25 Orang	75 Orang	0,00						75 Orang	0,00	
			Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	5 Orang		0 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	0,00	
	1.01.06.1.01.0004	Penghargaan Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi						0,00							0,00	
		Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi Mendapat Penghargaan	Jumlah Tokoh Kebahasaan dan Kesastraan Daerah Kewenangan Provinsi yang Mendapat Penghargaan	5 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.06.1.01.0007	Penyusunan Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi						50.000.000,00							0,00	
		Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	Jumlah Modul dan Bahan Ajar Bahasa Daerah Kewenangan Provinsi yang Tersusun	6 Dokumen		3 Dokumen	6 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		6 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.06.1.01.0008	Fasilitasi media publik berbahasa daerah						0,00							0,00	
		Media publik berbahasa daerah terfasilitasi	Jumlah media bahasa daerah terfasilitasi	10 Media		3 Media	0 Media	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Media	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.06.1.01.0009	Penyusunan Ensiklopedia Budaya Daerah						0,00							0,00	
		Tersusunnya Ensiklopedia Budaya Daerah kewenangan provinsi	Jumlah Ensiklopedia Budaya Daerah kewenangan provinsi	10 Buku		3 Buku	0 Buku	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Buku	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.06.1.01.0010	Penyusunan Buku Cerita Anak Berbahasa Daerah						0,00							0,00	
		Penyusunan Penerjemahan cerita rakyat daerah kewenangan provinsi tersusun	Jumlah buku cerita anak dwibahasa yang tersusun berdasarkan kewenangan provinsi	6 Judul		3 Judul	0 Judul	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Judul	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.06.1.01.0011	Penyusunan Kebijakan Strategis						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terprogramnya kegiatan utama pelestarian bahasa daerah dan terumuskannya kebijakan strategis, baik berupa peraturan perudangan-undangan (regulasi) dan/atau kebijakan program terkait pelestarian bahasa daerah di wilayah provinsi.	Jumlah kebijakan strategis dan regulasi yang mendukung upaya pelestarian bahasa daerah di lingkup provinsi.	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.06.1.01.0012	Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan, Penerbitan, dan Pendistribusian buku-buku berbahasa daerah	Jumlah buku berbahasa daerah yang disusun, diterbitkan, dan didistribusikan	3 Buku		3 Buku	0 Buku	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Buku	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	1.01.06.1.01.0013	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebahasaan dan Kesastraan kewenangan provinsi						0,00							0,00	
		Terbinanya sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan di provinsi	Jumlah sumber daya manusia kebahasaan dan kesastraan yang terbina di provinsi	75 Orang		25 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**62.825.000.000,00**							**50.000.000.000,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**62.825.000.000,00**							**50.000.000.000,00**	
7.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**1.000.000.000,00**							**0,00**	
		meningkatnya daya saing kepemudaan						***875.000.000,00***							***0,00***	
			999.Rasio Wirausaha Pemuda	28.58 Persentase		26.58 Persentase	27.08 Persentase	875.000.000,00						27.58 Persentase	0,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						800.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						800.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang		30 Orang	30 Orang	75.000.000,00						30 Orang	0,00	
			Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	25 Orang		25 Orang	25 Orang	50.000.000,00						25 Orang	0,00	
	2.19.02.1.01.0013	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi						75.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi	Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat Provinsi Dari Seluruh Kabupaten/Kota Yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda	30 Orang		30 Orang	30 Orang	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0015	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha Muda Tingkat Provinsi	Jumlah Wirausaha Muda Tingkat Provinsi Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda	25 Orang		25 Orang	25 Orang	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi						200.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya kegiatan Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Provinsi						200.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	2 Organisasi		2 Organisasi	2 Organisasi	200.000.000,00						2 Organisasi	0,00	
	2.19.02.1.02.0004	Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi						200.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaran pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	Jumlah organisasi kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan manajemen kelembagaan organisasi kepemudaan tingkat provinsi	2 Organisasi		2 Organisasi	2 Organisasi	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Organisasi	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Terlaksananya kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						800.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	-		-	-	50.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	-	575.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.19.02.1.01.0016	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan kepemimpinan pemuda tingkat provinsi	Persentase efektifitas penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengembangan kepemimpinan pemuda	-		-	0 Persentase	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0017	Pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi Pemenuhan Hak Pemuda di tingkat provinsi	Jumlah pemuda di tingkat provinsi yang haknya terpenuhi	-		-	20 Orang	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0018	Pemberian Penghargaan Kepemudaan bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan pemuda bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan potensi pemuda	Jumlah yang menerima penghargaan pemuda	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0019	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Kader Provinsi	Jumlah Pemuda Kader Provinsi dari Seluruh Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0020	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi provinsi Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Provinsi	Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di provinsi	-		-	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.02.1.01.0021	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi						550.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	2 Unit	550.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
8.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**61.700.000.000,00**							**50.000.000.000,00**	
		meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga						***61.350.000.000,00***							***50.000.000.000,00***	
			999.Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	0.12 Persentase		0.08 Persentase	0.09 Persentase	61.350.000.000,00						0.1 Persentase	50.000.000.000,00	
		Terselenggaranya kejuaraan olahraga						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00						1 Kegiatan	0,00	
	2.19.03.1.02.0005	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Paralimpik Pelajar Tingkat Provinsi	1 Kegiatan		1 Kegiatan	0 Kegiatan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Kegiatan	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						750.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						750.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	-		-	-	750.000.000,00						-	0,00	
	2.19.03.1.01.0006	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi						600.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	-		-	2 Unit	600.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga						100.000.000,00					-		0,00	
		Terselenggaranya kejuaraan olahraga						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.19.03.1.02.0007	Keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya keikutsertaan anggota kontingen provinsi dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	Jumlah anggota kontingen provinsi yang ikut serta dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.02.0008	Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi						100.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi	Jumlah Pekan dan Kejuaraan Olahraga Tingkat Nasional dan Provinsi yang terselenggara	-		-	2 Kegiatan	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional						250.000.000,00					-		50.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Nasional						250.000.000,00					-		50.000.000.000,00	
			Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	-	50.000.000,00						-	50.000.000.000,00	
			Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	-	100.000.000,00						-	0,00	
	2.19.03.1.03.0010	Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)						50.000.000,00							50.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusatan Latihan Daerah yang Terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	-		-	0 Pelatda	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.000.000.000,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.03.0011	Penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi						0,00							0,00	
		Tersedianya data Keolahragaan terpadu di provinsi	Jumlah dokumen penyediaan data Keolahragaan terpadu di provinsi	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.03.0012	Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Olahragawan Berprestasi Provinsi	Jumlah Olahragawan Atlet Berprestasi Provinsi yang Dibina dan Diberikan Pengembangan	-		-	0 Orang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.03.1.03.0013	Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga	Jumlah penerima Penghargaan olahraga	-		-	5 Orang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.03.0014	Seleksi Atlet Daerah						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Seleksi Atlet Daerah	Jumlah Atlet Daerah yang Diseleksi	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
	2.19.03.1.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						60.600.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga						60.600.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-		-	-	60.600.000.000,00						-	0,00	
	2.19.03.1.04.0006	Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait						60.600.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Provinsi dengan Lembaga Terkait	-		-	3 Dokumen	60.600.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
9.	**2.19.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN**						**300.000.000,00**							**0,00**	
		meningkatnya kualitas kepramukaan						***300.000.000,00***							***0,00***	
			999.Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Kepramukaan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	300.000.000,00						100 Persentase	0,00	
	2.19.04.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						300.000.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan						300.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	-	300.000.000,00						-	0,00	
	2.19.04.1.01.0010	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi						300.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Kapasitas Organisasi Kepramukaan Provinsi	Jumlah Organisasi Kepramukaan Provinsi yang Meningkat Kapasitasnya	-		-	11 Organisasi	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
		Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I						**935.413.400,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**935.413.400,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**935.413.400,00**							**0,00**	
10.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***363.413.400,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	363.413.400,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.175.000,00						1 Dokumen	125.717.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.852.800,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	56.500.000,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.160.000,00						1 Dokumen	121.229.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.625.000,00						1 Laporan	215.288.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.700.000,00						1 Laporan	430.608.000,00	
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	86.985.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	508.310.000,00						1 Dokumen	3.117.619.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	111.846.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	56.159.800,00						10 Dokumen	124.758.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.280.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	129.700.000,00	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						48.870.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	48.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	48.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8554 Dokumen		8554 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8554 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30 Dokumen		30 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
		Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	72.450.000,00						1 Laporan	303.299.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	177.550.000,00						2 Laporan	144.594.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	90.423.000,00	
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.512.500,00						1 Dokumen	205.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	120.397.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.451.000,00						1 Dokumen	351.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	254.222.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	297.403.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	60.969.000,00	
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							0,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	542 Orang		542 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		542 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
		Persentase Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	720 Dokumen	6.000.000,00						720 Dokumen	227.932.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	191.240.000,00						1 Dokumen	129.558.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	250 Dokumen	5.800.000,00						250 Dokumen	66.254.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	40.600.000,00						12 Laporan	231.323.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	375.080.000,00						3 Laporan	381.294.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	12 Paket	23.200.000,00						12 Paket	211.196.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	5 Paket	7.500.000,00						5 Paket	109.065.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	10.011.100,00						4 Paket	148.901.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	23.875.000,00						3 Paket	18.610.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.077.597,00						2 Paket	53.349.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	35.057.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
		Persentase BMD yang Diterima/ Diadakan						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	76.212.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100.000.000,00						20 Unit	378.423.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
		Persentase laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	818.394.700,00						12 Laporan	590.663.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.239.467.000,00						12 Laporan	3.345.769.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	68.589.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	53.751.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						110.113.400,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	110.113.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						175.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	Unit	0,00						Unit	244.937.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	405.060.000,00						1 Unit	56.453.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00						10 Unit	55.101.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	74.744.000,00						10 Unit	196.439.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	99.075.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						29.430.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
11.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**364.472.620.000,00**							**30.690.886.000,00**	
		Meningkatnya mutu pendidikan						***457.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus	98.17 %		57 %	57.25 %	457.000.000,00						58 %	0,00	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah	99.84 %		66.6 %	66.8 %	457.000.000,00						66.85 %	0,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMA						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
		terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						60.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	150 Peserta Didik	60.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		750 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	88 Satuan Pendidikan	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		60 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						25.000.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	10 Komunitas	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						35.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		344 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						60.000.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	75 Peserta Didik	60.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		610 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		135 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						105.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	75 Satuan Pendidikan	105.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						20.000.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	10 Komunitas	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						35.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		329 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
		Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						27.000.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	10 Peserta Didik	27.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		200 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		250 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus						29.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	10 Satuan Pendidikan	29.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						20.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						5.500.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	5.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah I
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***457.000.000,00***							***0,00***	
		Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II						**1.241.500.000,00**							**9.245.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.241.500.000,00**							**9.245.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.241.500.000,00**							**9.245.000,00**	
12.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***579.500.000,00***							***9.245.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	579.500.000,00						79.05 Skor	9.245.000,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.175.000,00						1 Dokumen	125.717.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.852.800,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	56.500.000,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.160.000,00						1 Dokumen	121.229.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.625.000,00						1 Laporan	215.288.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.700.000,00						1 Laporan	430.608.000,00	
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							9.245.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	9.245.000,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	9.245.000,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	86.985.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	508.310.000,00						1 Dokumen	3.117.619.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	111.846.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	56.159.800,00						10 Dokumen	124.758.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.280.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	129.700.000,00	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						28.670.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	28.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	28.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8554 Dokumen		8554 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8554 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30 Dokumen		30 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
		Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	72.450.000,00						1 Laporan	303.299.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	177.550.000,00						2 Laporan	144.594.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	90.423.000,00	
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.512.500,00						1 Dokumen	205.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	120.397.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.451.000,00						1 Dokumen	351.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	254.222.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	297.403.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	60.969.000,00	
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	542 Orang		542 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		542 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
		Persentase Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	720 Dokumen	6.000.000,00						720 Dokumen	227.932.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	191.240.000,00						1 Dokumen	129.558.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	250 Dokumen	5.800.000,00						250 Dokumen	66.254.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	40.600.000,00						12 Laporan	231.323.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	375.080.000,00						3 Laporan	381.294.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	12 Paket	23.200.000,00						12 Paket	211.196.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	5 Paket	7.500.000,00						5 Paket	109.065.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	10.011.100,00						4 Paket	148.901.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	23.875.000,00						3 Paket	18.610.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.077.597,00						2 Paket	53.349.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	35.057.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
		Persentase BMD yang Diterima/ Diadakan						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	76.212.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	105.550.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100.000.000,00						20 Unit	378.423.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
		Persentase laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	818.394.700,00						12 Laporan	590.663.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.239.467.000,00						12 Laporan	3.345.769.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	68.589.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	53.751.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						101.400.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	101.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						420.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	420.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						599.804.000,00					-		652.005.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	Unit	0,00						Unit	244.937.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	405.060.000,00						1 Unit	56.453.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00						10 Unit	55.101.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	74.744.000,00						10 Unit	196.439.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						29.430.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
13.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**364.472.620.000,00**							**30.690.886.000,00**	
		Meningkatnya mutu pendidikan						***342.500.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus	98.17 %		57 %	57.25 %	342.500.000,00						58 %	0,00	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah	99.84 %		66.6 %	66.8 %	342.500.000,00						66.85 %	0,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMA						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						82.500.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	100 Peserta Didik	82.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		750 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						155.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	169 Satuan Pendidikan	155.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		60 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						25.000.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	10 Komunitas	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						35.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan DBH SDA Pertambangan Gas Alam-Aceh-Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		344 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						82.500.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	100 Peserta Didik	82.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		610 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		135 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						155.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	174 Satuan Pendidikan	155.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						25.000.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	10 Komunitas	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						35.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		329 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
		Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						22.000.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	20 Peserta Didik	22.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		200 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		250 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus						22.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	13 Satuan Pendidikan	22.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						20.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						3.000.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah II
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***342.500.000,00***							***0,00***	
		Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III						**464.380.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**464.380.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**464.380.000,00**							**0,00**	
14.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***239.880.000,00***							***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	239.880.000,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.175.000,00						1 Dokumen	125.717.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.852.800,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	56.500.000,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.160.000,00						1 Dokumen	121.229.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.625.000,00						1 Laporan	215.288.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.700.000,00						1 Laporan	430.608.000,00	
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	86.985.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	508.310.000,00						1 Dokumen	3.117.619.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	111.846.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	56.159.800,00						10 Dokumen	124.758.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.280.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	129.700.000,00	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						40.870.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	40.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8554 Dokumen		8554 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8554 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30 Dokumen		30 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
		Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	72.450.000,00						1 Laporan	303.299.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	177.550.000,00						2 Laporan	144.594.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	90.423.000,00	
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.512.500,00						1 Dokumen	205.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	120.397.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.451.000,00						1 Dokumen	351.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	254.222.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	297.403.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	60.969.000,00	
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							0,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	542 Orang		542 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		542 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
		Persentase Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	720 Dokumen	6.000.000,00						720 Dokumen	227.932.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	191.240.000,00						1 Dokumen	129.558.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	250 Dokumen	5.800.000,00						250 Dokumen	66.254.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	40.600.000,00						12 Laporan	231.323.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	375.080.000,00						3 Laporan	381.294.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	12 Paket	23.200.000,00						12 Paket	211.196.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	5 Paket	7.500.000,00						5 Paket	109.065.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	10.011.100,00						4 Paket	148.901.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	23.875.000,00						3 Paket	18.610.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.077.597,00						2 Paket	53.349.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	35.057.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
		Persentase BMD yang Diterima/ Diadakan						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	76.212.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	105.550.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100.000.000,00						20 Unit	378.423.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
		Persentase laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	818.394.700,00						12 Laporan	590.663.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.239.467.000,00						12 Laporan	3.345.769.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	68.589.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	53.751.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						29.580.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.580.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						140.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	140.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	Unit	0,00						Unit	244.937.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	405.060.000,00						1 Unit	56.453.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00						10 Unit	55.101.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	74.744.000,00						10 Unit	196.439.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						29.430.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	00 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	00 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
15.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**364.472.620.000,00**							**30.690.886.000,00**	
		Meningkatnya mutu pendidikan						***179.500.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus	98.17 %		57 %	57.25 %	179.500.000,00						58 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah	99.84 %		66.6 %	66.8 %	179.500.000,00						66.85 %	0,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMA						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
		terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						33.500.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	11 Peserta Didik	33.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		750 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	11 Satuan Pendidikan	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		60 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						10.000.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	10 Komunitas	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						15.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		344 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						20.000.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	12 Peserta Didik	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		610 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		135 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						24.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	6 Satuan Pendidikan	24.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						5.500.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	10 Komunitas	5.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						15.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		329 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
		Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						16.500.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	5 Peserta Didik	16.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		200 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		250 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						10.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						4.500.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	4.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah III
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***179.500.000,00***							***0,00***	
		Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV						**698.300.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**698.300.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**698.300.000,00**							**0,00**	
16.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***324.600.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	324.600.000,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.175.000,00						1 Dokumen	125.717.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.852.800,00						1 Dokumen	111.984.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	56.500.000,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.160.000,00						1 Dokumen	121.229.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.625.000,00						1 Laporan	215.288.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.700.000,00						1 Laporan	430.608.000,00	
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	86.985.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	508.310.000,00						1 Dokumen	3.117.619.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	111.846.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	56.159.800,00						10 Dokumen	124.758.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.280.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	129.700.000,00	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						48.870.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	48.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	48.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8554 Dokumen		8554 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8554 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30 Dokumen		30 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
		Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	72.450.000,00						1 Laporan	303.299.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	177.550.000,00						2 Laporan	144.594.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	90.423.000,00	
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.512.500,00						1 Dokumen	205.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	120.397.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.451.000,00						1 Dokumen	351.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	254.222.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	297.403.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	60.969.000,00	
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							0,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	542 Orang		542 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		542 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
		Persentase Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	720 Dokumen	6.000.000,00						720 Dokumen	227.932.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	191.240.000,00						1 Dokumen	129.558.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	250 Dokumen	5.800.000,00						250 Dokumen	66.254.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	40.600.000,00						12 Laporan	231.323.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	375.080.000,00						3 Laporan	381.294.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	12 Paket	23.200.000,00						12 Paket	211.196.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	5 Paket	7.500.000,00						5 Paket	109.065.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	10.011.100,00						4 Paket	148.901.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	23.875.000,00						3 Paket	18.610.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.077.597,00						2 Paket	53.349.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	35.057.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
		Persentase BMD yang Diterima/ Diadakan						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	76.212.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	105.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100.000.000,00						20 Unit	378.423.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
		Persentase laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	818.394.700,00						12 Laporan	590.663.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.239.467.000,00						12 Laporan	3.345.769.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	68.589.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	53.751.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						36.300.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	36.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						210.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	210.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	Unit	0,00						Unit	244.937.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	405.060.000,00						1 Unit	56.453.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00						10 Unit	55.101.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	74.744.000,00						10 Unit	196.439.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						29.430.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
17.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**364.472.620.000,00**							**30.690.886.000,00**	
		Meningkatnya mutu pendidikan						***353.700.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus	98.17 %		57 %	57.25 %	353.700.000,00						58 %	0,00	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah	99.84 %		66.6 %	66.8 %	353.700.000,00						66.85 %	0,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMA						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
		terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						59.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	30 Peserta Didik	59.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		750 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						88.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	28 Satuan Pendidikan	88.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		60 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						20.000.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	10 Komunitas	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						25.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		344 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						37.500.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	20 Peserta Didik	37.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		610 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		135 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						56.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	19 Satuan Pendidikan	56.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						15.000.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	10 Komunitas	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						20.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		329 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
		Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						9.300.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	5 Peserta Didik	9.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		200 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		250 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus						27.200.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	2 Satuan Pendidikan	27.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						10.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						5.500.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	5.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah IV
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***353.700.000,00***							***0,00***	
		Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V						**565.519.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**565.519.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**565.519.000,00**							**0,00**	
18.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***221.719.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	221.719.000,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.175.000,00						1 Dokumen	125.717.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.852.800,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	56.500.000,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.160.000,00						1 Dokumen	121.229.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.625.000,00						1 Laporan	215.288.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.700.000,00						1 Laporan	430.608.000,00	
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	86.985.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	508.310.000,00						1 Dokumen	3.117.619.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	111.846.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	56.159.800,00						10 Dokumen	124.758.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.280.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	129.700.000,00	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						17.870.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	17.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	17.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8554 Dokumen		8554 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8554 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30 Dokumen		30 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
		Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	72.450.000,00						1 Laporan	303.299.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	177.550.000,00						2 Laporan	144.594.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	90.423.000,00	
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.512.500,00						1 Dokumen	205.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	120.397.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.451.000,00						1 Dokumen	351.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	254.222.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	297.403.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	60.969.000,00	
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	542 Orang		542 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		542 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
		Persentase Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	720 Dokumen	6.000.000,00						720 Dokumen	227.932.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	191.240.000,00						1 Dokumen	129.558.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	250 Dokumen	5.800.000,00						250 Dokumen	66.254.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	40.600.000,00						12 Laporan	231.323.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	375.080.000,00						3 Laporan	381.294.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	12 Paket	23.200.000,00						12 Paket	211.196.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	5 Paket	7.500.000,00						5 Paket	109.065.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	10.011.100,00						4 Paket	148.901.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	23.875.000,00						3 Paket	18.610.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.077.597,00						2 Paket	53.349.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	35.057.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
		Persentase BMD yang Diterima/ Diadakan						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	76.212.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	105.550.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100.000.000,00						20 Unit	378.423.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
		Persentase laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	818.394.700,00						12 Laporan	590.663.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.239.467.000,00						12 Laporan	3.345.769.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	68.589.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	53.751.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						69.419.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	69.419.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						105.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	Unit	0,00						Unit	244.937.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	405.060.000,00						1 Unit	56.453.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00						10 Unit	55.101.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	74.744.000,00						10 Unit	196.439.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						29.430.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
19.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**364.472.620.000,00**							**30.690.886.000,00**	
		Meningkatnya mutu pendidikan						***308.800.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus	98.17 %		57 %	57.25 %	308.800.000,00						58 %	0,00	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah	99.84 %		66.6 %	66.8 %	308.800.000,00						66.85 %	0,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMA						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
		terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						54.300.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	30 Peserta Didik	54.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		750 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	29 Satuan Pendidikan	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		60 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						15.000.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	10 Komunitas	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						20.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		344 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						34.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	20 Peserta Didik	34.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		610 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		135 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						55.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	21 Satuan Pendidikan	55.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						15.000.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	10 Komunitas	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						20.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		329 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
		Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						17.000.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	5 Peserta Didik	17.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		200 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		250 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus						23.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	9 Satuan Pendidikan	23.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						10.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						5.500.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	5.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah V
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***308.800.000,00***							***0,00***	
		Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI						**834.916.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**834.916.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**834.916.000,00**							**0,00**	
20.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***304.416.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	304.416.000,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.175.000,00						1 Dokumen	125.717.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.852.800,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	56.500.000,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.160.000,00						1 Dokumen	121.229.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.625.000,00						1 Laporan	215.288.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.700.000,00						1 Laporan	430.608.000,00	
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	86.985.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	508.310.000,00						1 Dokumen	3.117.619.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	111.846.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	56.159.800,00						10 Dokumen	124.758.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.280.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	129.700.000,00	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						53.370.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	53.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	53.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8554 Dokumen		8554 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8554 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30 Dokumen		30 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
		Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	72.450.000,00						1 Laporan	303.299.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	177.550.000,00						2 Laporan	144.594.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	90.423.000,00	
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						299.963.500,00					-		1.405.415.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	199.512.500,00						1 Dokumen	205.770.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	120.397.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.451.000,00						1 Dokumen	351.400.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	254.222.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	297.403.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	60.969.000,00	
	1.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							0,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	542 Orang		542 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		542 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
		Persentase Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	720 Dokumen	6.000.000,00						720 Dokumen	227.932.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	191.240.000,00						1 Dokumen	129.558.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	250 Dokumen	5.800.000,00						250 Dokumen	66.254.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	40.600.000,00						12 Laporan	231.323.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	375.080.000,00						3 Laporan	381.294.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	12 Paket	23.200.000,00						12 Paket	211.196.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	5 Paket	7.500.000,00						5 Paket	109.065.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	10.011.100,00						4 Paket	148.901.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	23.875.000,00						3 Paket	18.610.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.077.597,00						2 Paket	53.349.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	35.057.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
		Persentase BMD yang Diterima/ Diadakan						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	76.212.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100.000.000,00						20 Unit	378.423.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
		Persentase laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	818.394.700,00						12 Laporan	590.663.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.239.467.000,00						12 Laporan	3.345.769.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	68.589.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	53.751.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						46.616.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	46.616.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						175.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	175.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	Unit	0,00						Unit	244.937.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	405.060.000,00						1 Unit	56.453.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00						10 Unit	55.101.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	74.744.000,00						10 Unit	196.439.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						29.430.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
21.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**364.472.620.000,00**							**30.690.886.000,00**	
		Meningkatnya mutu pendidikan						***480.500.000,00***							***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus	98.17 %		57 %	57.25 %	480.500.000,00						58 %	0,00	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah	99.84 %		66.6 %	66.8 %	480.500.000,00						66.85 %	0,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMA						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
		terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	165.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.050.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	115.000.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	85.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	344 Satuan Pendidikan	0,00						344 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	823.500.000,00						60 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	750 Peserta Didik	470.000.000,00						750 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.01.0049	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						80.500.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	750 Peserta Didik		750 Peserta Didik	50 Peserta Didik	80.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		750 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.01.0051	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.01.0052	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas						155.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Atas	Jumlah Sekolah Menengah Atas yang Dilakukan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	60 Satuan Pendidikan		60 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	155.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		60 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.01.0061	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.01.0063	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						20.000.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	10 Komunitas	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.01.0065	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						35.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	30 Kegiatan	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.01.0078	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	344 Satuan Pendidikan		344 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		344 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	160.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	7 Komunitas	95.500.000,00						7 Komunitas	0,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	135 Orang	80.000.000,00						135 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	329 Satuan Pendidikan	0,00						329 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	100 Satuan Pendidikan	556.000.000,00						100 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	610 Peserta Didik	379.000.000,00						610 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.02.0041	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						45.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	610 Peserta Didik		610 Peserta Didik	40 Peserta Didik	45.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		610 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.02.0043	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	135 Orang		135 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		135 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.02.0045	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan						60.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Menengah Kejuruan	Jumlah Sekolah Menengah Kejuruan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	100 Satuan Pendidikan		100 Satuan Pendidikan	41 Satuan Pendidikan	60.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.02.0054	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.02.0057	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						15.000.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	7 Komunitas		7 Komunitas	10 Komunitas	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		7 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.02.0059	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						35.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	25 Kegiatan	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.02.0072	Penyelengaraan Proses Belajar Peserta Didik						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Proses Belajar bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	329 Satuan Pendidikan		329 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		329 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
		Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	85.000.000,00						2 Kegiatan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	29.500.000,00						5 Komunitas	104.329.000,00	
			Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	50.000.000,00						250 Orang	0,00	
			Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	0,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	50 Satuan Pendidikan	236.200.000,00						50 Satuan Pendidikan	0,00	
			Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	200 Peserta Didik	176.800.000,00						200 Peserta Didik	0,00	
	1.01.02.1.03.0048	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa						25.000.000,00							0,00	
		Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	200 Peserta Didik		200 Peserta Didik	20 Peserta Didik	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		200 Peserta Didik	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.03.0050	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Khusus						0,00							0,00	
		Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitasi Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	250 Orang		250 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Orang	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.03.0051	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus						39.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Pendidikan Khusus	Jumlah Sekolah Pendidikan Khusus yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	30 Satuan Pendidikan	39.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.03.0060	Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan	Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Dokumen	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.03.0066	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi						15.000.000,00							0,00	
		Terlayaninya satuan pendidikan dalam pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi	2 Kegiatan		2 Kegiatan	1 Kegiatan	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Kegiatan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.03.0071	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Proses Belajar Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar	50 Satuan Pendidikan		50 Satuan Pendidikan	0 Satuan Pendidikan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Satuan Pendidikan	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
	1.01.02.1.03.0081	Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan						5.500.000,00							0,00	
		Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi	5 Komunitas		5 Komunitas	5 Komunitas	5.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Komunitas	0,00	Cabang Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Wilayah VI
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***480.500.000,00***							***0,00***	
		Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan						**478.300.000,00**							**602.735.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**478.300.000,00**							**602.735.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**478.300.000,00**							**602.735.000,00**	
22.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***128.300.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	128.300.000,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						333.093.200,00					-		2.562.764.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	40.080.400,00						3 Data	250.550.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.175.000,00						1 Dokumen	125.717.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.220.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.852.800,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	56.500.000,00						1 Dokumen	111.984.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.160.000,00						1 Dokumen	121.229.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.625.000,00						1 Laporan	215.288.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.700.000,00						1 Laporan	430.608.000,00	
	1.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	0 Data	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Data	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun						1.404.934.394.164,42					-		1.801.524.734.682,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	86.985.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	508.310.000,00						1 Dokumen	3.117.619.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	111.846.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	56.159.800,00						10 Dokumen	124.758.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	75.280.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00						4 Laporan	129.700.000,00	
	1.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						71.870.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	71.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	71.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8554 Dokumen		8554 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8554 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30 Dokumen		30 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
		Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						250.000.000,00					-		538.316.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	72.450.000,00						1 Laporan	303.299.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	177.550.000,00						2 Laporan	144.594.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	90.423.000,00	
	1.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
		Persentase Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum						692.383.697,00					-		1.612.539.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	720 Dokumen	6.000.000,00						720 Dokumen	227.932.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	191.240.000,00						1 Dokumen	129.558.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	250 Dokumen	5.800.000,00						250 Dokumen	66.254.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	40.600.000,00						12 Laporan	231.323.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	375.080.000,00						3 Laporan	381.294.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	12 Paket	23.200.000,00						12 Paket	211.196.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	5 Paket	7.500.000,00						5 Paket	109.065.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	10.011.100,00						4 Paket	148.901.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	23.875.000,00						3 Paket	18.610.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	9.077.597,00						2 Paket	53.349.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	35.057.000,00	
	1.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
		Persentase BMD yang Diterima/ Diadakan						100.000.000,00					-		1.538.867.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	76.212.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	100.000.000,00						20 Unit	378.423.000,00	
	1.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
		Persentase laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD						51.057.861.700,00					-		4.058.772.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	818.394.700,00						12 Laporan	590.663.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.239.467.000,00						12 Laporan	3.345.769.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	68.589.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	53.751.000,00	
	1.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						27.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						599.804.000,00					-		652.005.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						599.804.000,00					-		652.005.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	Unit	0,00						Unit	244.937.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	405.060.000,00						1 Unit	56.453.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	20.000.000,00						10 Unit	55.101.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	74.744.000,00						10 Unit	196.439.000,00	
	1.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						29.430.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
23.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**364.472.620.000,00**							**30.690.886.000,00**	
		Meningkatnya mutu pendidikan						***100.000.000,00***							***602.735.000,00***	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Khusus	98.17 %		57 %	57.25 %	100.000.000,00						58 %	602.735.000,00	
			999.Persentase Nilai Akreditasi Pendidikan Menengah	99.84 %		66.6 %	66.8 %	100.000.000,00						66.85 %	602.735.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMA						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	0,00						5 Konten Digital	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	75.000.000,00						150 Orang	602.735.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	75.000.000,00						100 Orang	0,00	
		terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	0,00						5 Konten Digital	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	75.000.000,00						150 Orang	602.735.000,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	75.000.000,00						100 Orang	0,00	
	1.01.02.1.01.0057	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						75.000.000,00							602.735.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	150 Orang		150 Orang	50 Orang	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		150 Orang	602.735.000,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.02.1.01.0058	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Konten Digital	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.02.1.01.0059	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	100 Orang		100 Orang	50 Orang	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		100 Orang	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.02.1.01.0060	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.02.1.02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	0,00						5 Konten Digital	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	75.000.000,00						50 Orang	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	75.000.000,00						50 Orang	0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	175.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	0,00						5 Konten Digital	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	75.000.000,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	75.000.000,00						50 Orang	0,00	
	1.01.02.1.02.0050	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Orang	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.02.1.02.0051	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Konten Digital	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.02.1.02.0052	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Orang	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.02.1.02.0053	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.02.1.03	Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	0,00						5 Konten Digital	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	25.000.000,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	25.000.000,00						20 Orang	0,00	
		Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	5 Konten Digital	0,00						5 Konten Digital	0,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	50 Orang	25.000.000,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	25.000.000,00						20 Orang	0,00	
	1.01.02.1.03.0056	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan						25.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	50 Orang		50 Orang	25 Orang	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		50 Orang	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.02.1.03.0057	Pengembangan konten digital untuk pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya konten digital untuk pendidikan yang dikembangkan	Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan	5 Konten Digital		5 Konten Digital	0 Konten Digital	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		5 Konten Digital	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.02.1.03.0058	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan						25.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	20 Orang		20 Orang	25 Orang	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		20 Orang	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
	1.01.02.1.03.0059	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Dokumen	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***100.000.000,00***							***602.735.000,00***	
			999.Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	0,00	
			999.Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	98.95 %		98.75 %	98.8 %	0,00						98.85 %	0,00	
			999.Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	99 Persentase		98.75 Persentase	98.8 Persentase	0,00						98.85 Persentase	0,00	
			999.Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	92.65 Persentase		92.52 Persentase	92.54 Persentase	0,00						92.56 Persentase	0,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMA						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
		terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
	1.01.02.1.01.0064	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							0,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan						144.856.190.000,00					-		198.962.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.02.1.02.0058	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							0,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		1 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	0,00	
		Terlaksananya pengelolaan Pendidikan Khusus						21.651.130.000,00					-		29.889.189.000,00	
			Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	0,00	
	1.01.02.1.03.0063	Penyediaan infrastruktur TIK						0,00							0,00	
		Tersedianya infrastruktur TIK	Jumlah paket infrastruktur TIK yang tersedia	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pendidikan	-	-		2 Paket	0,00	Balai Teknologi Informasi dan Data Pendidikan
		Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga						**602.300.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**0,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**0,00**							**0,00**	
24.	**1.01.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN**						**364.472.620.000,00**							**30.690.886.000,00**	
		Meningkatnya mutu pendidikan						***0,00***							***0,00***	
		Meningkatnya partisipasi anak usia sekolah						***0,00***							***0,00***	
			999.Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Menengah	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	0,00	
			999.Angka Partisipasi Murni (APM) Pendidikan Menengah	98.95 %		98.75 %	98.8 %	0,00						98.85 %	0,00	
			999.Persentase Anak Usia 16-18 Tahun yang Berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah (APS)	99 Persentase		98.75 Persentase	98.8 Persentase	0,00						98.85 Persentase	0,00	
			999.Persentase anak usia 4-18 tahun penyandang disabilitas yang berpartisipasi dalam pendidikan khusus (APS)	92.65 Persentase		92.52 Persentase	92.54 Persentase	0,00						92.56 Persentase	0,00	
	1.01.02.1.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
		Meningkatnya Mutu Pengelolaan Pendidikan SMA						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	0,00						100 Unit	0,00	
		terlaksananya pengelolaan pendidikan sekolah menengah atas						197.965.300.000,00					-		602.735.000,00	
			Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit		100 Unit	100 Unit	0,00						100 Unit	0,00	
	1.01.02.1.01.0055	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan	100 Unit		100 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Unit	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**602.300.000,00**							**0,00**	
	2.19	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**						**602.300.000,00**							**0,00**	
25.	**2.19.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**427.300.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***427.300.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	82.97 Skor		79.73 Skor	80.53 Skor	427.300.000,00						81.33 Skor	0,00	
	2.19.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		Persentase Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
	2.19.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						26.870.000,00					-		0,00	
		Persentase Dokumen Laporan Keuangan yang tersusun						26.870.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	26.870.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	0,00						10 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	0,00	
	2.19.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						26.870.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	26.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		0 Dokumen	12 Dokumen	26.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	10 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	8554 Dokumen		8554 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8554 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	30 Dokumen		30 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		19 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						0,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
	2.19.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		Persentase Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah yang disusun						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	0,00	
	2.19.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		Persentase Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	2.19.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							0,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	542 Orang		542 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		542 Orang	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		Persentase Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	720 Dokumen	0,00						720 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	250 Dokumen	0,00						250 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	0,00						3 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	12 Paket	0,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	5 Paket	0,00						5 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	4 Paket	0,00						4 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						2 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
	2.19.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		10 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						25.000.000,00					-		0,00	
		Persentase BMD yang Diterima/ Diadakan						25.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	25.000.000,00						20 Unit	0,00	
	2.19.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		0 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						216.000.000,00					-		0,00	
		Persentase laporan pelaksanaan jasa Layanan Administrasi Umum OPD						216.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
	2.19.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						216.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	216.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						159.430.000,00					-		0,00	
		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						159.430.000,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	130.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	29.430.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	0,00	
	2.19.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						29.430.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	30 Unit		30 Unit	4 Unit	29.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
	2.19.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						130.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	130.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
26.	**2.19.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN**						**1.000.000.000,00**							**0,00**	
		meningkatnya daya saing kepemudaan						***25.000.000,00***							***0,00***	
			999.Rasio Wirausaha Pemuda	28.58 Persentase		26.58 Persentase	27.08 Persentase	25.000.000,00						27.58 Persentase	0,00	
	2.19.02.1.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						800.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Kewenangan Provinsi						800.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	-	575.000.000,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.19.02.1.01.0021	Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Provinsi						25.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Kepemudaan Provinsi yang Terkelola dan Termanfaatkan	-		-	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
27.	**2.19.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN DAYA SAING KEOLAHRAGAAN**						**61.700.000.000,00**							**50.000.000.000,00**	
		meningkatnya pembudayaan dan prestasi olahraga						***150.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Atlet yang Masuk Pelatnas	0.12 Persentase		0.08 Persentase	0.09 Persentase	150.000.000,00						0.1 Persentase	0,00	
	2.19.03.1.01	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						750.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						750.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	-		-	-	750.000.000,00						-	0,00	
	2.19.03.1.01.0006	Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat provinsi						150.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga	Jumlah prasarana olahraga di tingkat provinsi yang tersedia	-		-	1 Unit	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Balai Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga
		SMKN 3 Mataram						**158.950.000,00**							**1.426.122.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**158.950.000,00**							**1.426.122.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**158.950.000,00**							**1.426.122.000,00**	
28.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***158.950.000,00***							***1.426.122.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	158.950.000,00						79.05 Skor	1.426.122.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.486.577,00						1 Unit Kerja	3.766.147.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						158.950.000,00							1.426.122.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	158.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	1.426.122.000,00	SMKN 3 Mataram
		SMKN 5 Mataram						**1.081.697.500,00**							**1.132.635.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.081.697.500,00**							**1.132.635.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**1.081.697.500,00**							**1.132.635.000,00**	
29.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***1.081.697.500,00***							***1.132.635.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	1.081.697.500,00						79.05 Skor	1.132.635.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.486.577,00						1 Unit Kerja	3.766.147.000,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						1.081.697.500,00							1.132.635.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.081.697.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	1.132.635.000,00	SMKN 5 Mataram
		SMKN 1 Lingsar						**227.200.000,00**							**1.002.765.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**227.200.000,00**							**1.002.765.000,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**227.200.000,00**							**1.002.765.000,00**	
30.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***227.200.000,00***							***1.002.765.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	227.200.000,00						79.05 Skor	1.002.765.000,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.486.577,00						1 Unit Kerja	3.766.147.000,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						227.200.000,00							1.002.765.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	227.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	1.002.765.000,00	SMKN 1 Lingsar
		SMKN 2 Kuripan						**52.325.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**52.325.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**52.325.000,00**							**0,00**	
31.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***52.325.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	52.325.000,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.486.577,00						1 Unit Kerja	3.766.147.000,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						52.325.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	52.325.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	0,00	SMKN 2 Kuripan
		SMKN 1 Praya						**253.600.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**253.600.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**253.600.000,00**							**0,00**	
32.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***253.600.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	253.600.000,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.486.577,00						1 Unit Kerja	3.766.147.000,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						253.600.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	253.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	0,00	SMKN 1 Praya
		SMKN 1 Selong						**192.950.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**192.950.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**192.950.000,00**							**0,00**	
33.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***192.950.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	192.950.000,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.486.577,00						1 Unit Kerja	3.766.147.000,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						192.950.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	192.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	0,00	SMKN 1 Selong
		SMKN 1 Taliwang						**150.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**150.000.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**150.000.000,00**							**0,00**	
34.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***150.000.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	150.000.000,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.486.577,00						1 Unit Kerja	3.766.147.000,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						150.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	0,00	SMKN 1 Taliwang
		SMKN 2 Sumbawa						**102.400.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**102.400.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**102.400.000,00**							**0,00**	
35.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***102.400.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	102.400.000,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.486.577,00						1 Unit Kerja	3.766.147.000,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						102.400.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	102.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	0,00	SMKN 2 Sumbawa
		SMKN 1 Dompu						**116.864.077,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**116.864.077,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**116.864.077,00**							**0,00**	
36.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***116.864.077,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	116.864.077,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.486.577,00						1 Unit Kerja	3.766.147.000,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						116.864.077,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	116.864.077,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	0,00	SMKN 1 Dompu
		SMKN 2 Kota Bima						**67.500.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**67.500.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**67.500.000,00**							**0,00**	
37.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***67.500.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	67.500.000,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.486.577,00						1 Unit Kerja	3.766.147.000,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						67.500.000,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	67.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	0,00	SMKN 2 Kota Bima
		SMKN 1 Donggo						**70.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**70.000.000,00**							**0,00**	
	1.01	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN**						**70.000.000,00**							**0,00**	
38.	**1.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**1.460.750.986.838,42**							**1.817.823.531.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***70.000.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.64 Skor		77.50 Skor	78.27 Skor	70.000.000,00						79.05 Skor	0,00	
	1.01.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
		Persentase Dokumen Laporan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.473.486.577,00					-		3.766.147.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.473.486.577,00						1 Unit Kerja	3.766.147.000,00	
	1.01.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						70.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	70.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	0,00	SMKN 1 Donggo
		Dinas Kesehatan						**143.847.914.190,00**							**215.975.794.986,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**142.889.950.415,00**							**215.975.794.986,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**142.889.950.415,00**							**215.975.794.986,00**	
39.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**60.933.928.464,00**							**54.491.474.124,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***41.453.265.262,00***							***35.743.530.137,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.68 Skor		81.37 Skor	82.19 Skor	41.453.265.262,00						83.01 Skor	35.743.530.137,00	
	1.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.047.944.700,00					-		1.629.605.529,00	
		Terlaksananya kegiatan penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1.047.944.700,00					-		1.629.605.529,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.643.000,00						1 Dokumen	21.458.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	58.282.000,00						1 Dokumen	68.399.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	498.201.700,00						1 Dokumen	804.671.529,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.520.000,00						1 Dokumen	19.251.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.651.000,00						1 Dokumen	24.585.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.904.000,00						1 Dokumen	29.006.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.255.000,00						1 Laporan	38.726.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	363.488.000,00						1 Laporan	623.509.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						498.201.700,00							804.671.529,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	498.201.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	804.671.529,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						27.904.000,00							29.006.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.904.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	29.006.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						23.651.000,00							24.585.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.651.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	24.585.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						20.643.000,00							21.458.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.643.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.458.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						18.520.000,00							19.251.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	19.251.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						37.255.000,00							38.726.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.255.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	38.726.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						363.488.000,00							623.509.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	363.488.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	623.509.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						58.282.000,00							68.399.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	58.282.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	68.399.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						43.736.728.176,00					-		35.624.734.108,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						43.736.728.176,00					-		35.624.734.108,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.846.800,00						1 Dokumen	5.039.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	91.509.900,00						1 Dokumen	104.346.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.107.000,00						1 Dokumen	3.230.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	90.467.650,00						1 Laporan	9.504.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.678.900,00						1 Laporan	27.308.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246 Orang/ Bulan		166 Orang/ Bulan	183 Orang/ Bulan	43.522.117.926,00						202 Orang/ Bulan	35.475.307.108,00	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						34.379.866.922,00							27.422.251.121,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246 Orang/ Bulan		166 Orang/ Bulan	183 Orang/ Bulan	34.379.866.922,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		202 Orang/ Bulan	27.422.251.121,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						81.789.900,00							94.212.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	81.789.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	94.212.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						90.467.650,00							9.504.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	90.467.650,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	9.504.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						4.846.800,00							5.039.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.846.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.039.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						24.678.900,00							27.308.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.678.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	27.308.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						3.107.000,00							3.230.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.107.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	3.230.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						45.199.710,00					-		49.468.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						45.199.710,00					-		49.468.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.016.710,00						1 Laporan	40.962.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.183.000,00						1 Laporan	8.506.000,00	
	1.02.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						37.016.710,00							40.962.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.016.710,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	40.962.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						8.183.000,00							8.506.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.183.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	8.506.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						450.866.000,00					-		529.909.000,00	
		Terwujudnya Tata Kelola Administrasi kepegawaian sesuai SOP						450.866.000,00					-		529.909.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.419.000,00						1 Dokumen	166.440.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	136.902.000,00						1 Dokumen	38.163.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.028.000,00						1 Dokumen	17.735.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang		65 Orang	70 Orang	147.517.000,00						75 Orang	307.571.000,00	
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						16.028.000,00							17.735.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.028.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	17.735.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						150.419.000,00							166.440.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.419.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	166.440.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						136.902.000,00							38.163.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	136.902.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	38.163.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						147.517.000,00							157.571.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang		65 Orang	70 Orang	147.517.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Orang	157.571.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						405.876.680,00					-		524.394.000,00	
		Terselenggara nya pelayanan administrasi umum secara tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						405.876.680,00					-		524.394.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,00						1 Dokumen	5.383.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.700.000,00						1 Dokumen	29.557.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.250.000,00						1 Laporan	78.110.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	71.500.000,00						1 Laporan	124.762.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.395.000,00						1 Paket	43.067.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	22.650.200,00						1 Paket	44.076.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	82.103.350,00						1 Paket	64.601.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	130.478.130,00						1 Paket	134.838.000,00	
	1.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						82.103.350,00							64.601.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	82.103.350,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	64.601.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						130.478.130,00							134.838.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	130.478.130,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	134.838.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						41.395.000,00							43.067.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	41.395.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	43.067.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.650.200,00							44.076.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	22.650.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	44.076.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						4.800.000,00							5.383.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.383.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						26.250.000,00							78.110.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	78.110.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						71.500.000,00							124.762.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	71.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	124.762.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						26.700.000,00							29.557.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	29.557.000,00	Dinas Kesehatan
		Tersedianya barang milik daerah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien						879.549.000,00					-		1.331.126.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.860.000,00						1 Paket	122.140.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	299.909.000,00						1 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	249.245.000,00						1 Unit	275.000.000,00	
	1.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						50.860.000,00							122.140.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	50.860.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	122.140.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						249.245.000,00							275.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	249.245.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	275.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						299.909.000,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	2 Unit	299.909.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	250.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						4.719.542.198,00					-		5.068.694.487,00	
		Tersedianya layanan jasa penunjang secara tepat waktu, berkualitas, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						4.719.542.198,00					-		5.068.694.487,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.523.489.200,00						1 Laporan	1.785.839.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.187.921.998,00						1 Laporan	3.274.403.487,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.131.000,00						1 Laporan	8.452.000,00	
	1.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.131.000,00							8.452.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.131.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	8.452.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						951.489.000,00							1.156.639.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	951.489.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.156.639.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.307.042.000,00							2.305.435.487,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.307.042.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.305.435.487,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						859.530.000,00					-		892.789.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						859.530.000,00					-		892.789.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	158.120.000,00						3 Unit	164.113.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	191.740.000,00						2 Unit	207.758.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	209.970.000,00						1 Unit	320.918.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	299.700.000,00						1 Unit	200.000.000,00	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						104.620.000,00							111.926.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	104.620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	111.926.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						158.120.000,00							164.113.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	3 Unit		3 Unit	3 Unit	158.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	164.113.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						209.970.000,00							320.918.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	209.970.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	320.918.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						299.700.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	299.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						879.549.000,00					-		1.331.126.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien						879.549.000,00					-		1.331.126.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	279.535.000,00						-	683.986.000,00	
	1.02.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						279.535.000,00							683.986.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	279.535.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	683.986.000,00	Dinas Kesehatan
40.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**99.277.831.603,00**							**177.849.804.105,00**	
		Meningkatnya kualitas Gizi Masyarakat						***86.328.255.324,00***							***149.146.206.000,00***	
			999.Cakupan Kabupaten /kota Memenuhi Syarat Kualitas Kesehatan Lingkungan	60 %		20 %	30 %	13.103.000.694,00						40 %	17.779.406.000,00	
			999.Persentase Kabupaten/Kota dengan surveilans gizi (inputan Sigizikesga) >90%	100 %		100 %	100 %	13.103.000.694,00						100 %	17.779.406.000,00	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap akses & pemenuhaan standarisasi mutu faskes						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	118.621.400,00						1 Dokumen	332.480.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	7.158.399.900,00						Dokumen	7.218.481.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.300.000,00						1 Dokumen	563.530.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	579.819.000,00						1 Dokumen	2.868.093.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	127.734.000,00						1 Dokumen	339.787.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan pada Ibu dan Anak						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	118.621.400,00						1 Dokumen	332.480.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	7.158.399.900,00						Dokumen	7.218.481.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.300.000,00						1 Dokumen	563.530.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	579.819.000,00						1 Dokumen	2.868.093.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	127.734.000,00						1 Dokumen	339.787.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan mutu layanan SPM bidang Kesehatan						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	118.621.400,00						1 Dokumen	332.480.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	7.158.399.900,00						Dokumen	7.218.481.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.300.000,00						1 Dokumen	563.530.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	579.819.000,00						1 Dokumen	2.868.093.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	127.734.000,00						1 Dokumen	339.787.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tatalaksana upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	118.621.400,00						1 Dokumen	332.480.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	7.158.399.900,00						Dokumen	7.218.481.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.300.000,00						1 Dokumen	563.530.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	579.819.000,00						1 Dokumen	2.868.093.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	127.734.000,00						1 Dokumen	339.787.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	118.621.400,00						1 Dokumen	332.480.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	7.158.399.900,00						Dokumen	7.218.481.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.300.000,00						1 Dokumen	563.530.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	579.819.000,00						1 Dokumen	2.868.093.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	127.734.000,00						1 Dokumen	339.787.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya pencegahan penyakit pada Balita						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	118.621.400,00						1 Dokumen	332.480.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	7.158.399.900,00						Dokumen	7.218.481.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.300.000,00						1 Dokumen	563.530.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	579.819.000,00						1 Dokumen	2.868.093.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	127.734.000,00						1 Dokumen	339.787.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya peningkatan Kualitas, Gizi Masyarakat						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	118.621.400,00						1 Dokumen	332.480.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	7.158.399.900,00						Dokumen	7.218.481.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.300.000,00						1 Dokumen	563.530.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	579.819.000,00						1 Dokumen	2.868.093.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	127.734.000,00						1 Dokumen	339.787.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya Penyehatan lingkungan						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	118.621.400,00						1 Dokumen	332.480.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	7.158.399.900,00						Dokumen	7.218.481.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.300.000,00						1 Dokumen	563.530.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	579.819.000,00						1 Dokumen	2.868.093.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	127.734.000,00						1 Dokumen	339.787.000,00	
	1.02.02.1.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat						7.158.399.900,00							7.218.481.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.158.399.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		Dokumen	7.218.481.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan						440.300.000,00							563.530.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	440.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	563.530.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan						579.819.000,00							2.868.093.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	579.819.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.868.093.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0017	Pengelolaan Surveilans Kesehatan						127.734.000,00							339.787.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	127.734.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	339.787.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0021	Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota						118.621.400,00							332.480.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Investigasi Lanjutan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal oleh Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	118.621.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	332.480.000,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya Kualitas kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat						***86.328.255.324,00***							***149.146.206.000,00***	
			999.Cakupan Penurunan kasus Kematian Balita	5 %		5 %	5 %	5.431.674.594,00						5 %	7.354.131.000,00	
			999.Cakupan Penurunan kasus Kematian Ibu	7 %		7 %	7 %	5.431.674.594,00						7 %	7.354.131.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap akses & pemenuhaan standarisasi mutu faskes						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.548.200,00						2 Dokumen	897.096.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan pada Ibu dan Anak						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.548.200,00						2 Dokumen	897.096.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan mutu layanan SPM bidang Kesehatan						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.548.200,00						2 Dokumen	897.096.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tatalaksana upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.548.200,00						2 Dokumen	897.096.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.548.200,00						2 Dokumen	897.096.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya pencegahan penyakit pada Balita						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.548.200,00						2 Dokumen	897.096.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya peningkatan Kualitas, Gizi Masyarakat						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.548.200,00						2 Dokumen	897.096.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya Penyehatan lingkungan						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.548.200,00						2 Dokumen	897.096.000,00	
	1.02.02.1.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak						753.548.200,00							897.096.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.548.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	897.096.000,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, Kesehatan Jiwa dan upaya kesehatan masyarakat yang proaktif dan responsif						***86.328.255.324,00***							***149.146.206.000,00***	
			999.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	95 (%)		95 (%)	95 (%)	10.705.140.044,00						95 (%)	22.529.557.000,00	
			999.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.40 %	0.30 %	10.705.140.044,00						0.20 %	22.529.557.000,00	
			999.Cakupan Diabetes dalam pengendalian	28 %		20 %	23 %	10.705.140.044,00						25 %	22.529.557.000,00	
			999.Cakupan Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Malaria	100 %		80 %	100 %	10.705.140.044,00						100 %	22.529.557.000,00	
			999.Cakupan Kabupaten/Kota Eliminasi Kusta	100 %		80 %	80 %	10.705.140.044,00						90 %	22.529.557.000,00	
			999.Cakupan Merokok Penduduk Usia 10-21th	17 %		25 %	23 %	10.705.140.044,00						20 %	22.529.557.000,00	
			999.Cakupan ODHIV mengalami supresi Virus (Viral Land <50 kopi/ml	95 %		75 %	80 %	10.705.140.044,00						85 %	22.529.557.000,00	
			999.Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	85 %		85 %	85 %	10.705.140.044,00						85 %	22.529.557.000,00	
			999.Persentase hipertensi dalam pengendalian	45 %		25 %	30 %	10.705.140.044,00						35 %	22.529.557.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100 %		100 %	100 %	10.705.140.044,00						100 %	22.529.557.000,00	
			999.Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %		100 %	100 %	10.705.140.044,00						100 %	22.529.557.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	100 %		100 %	100 %	10.705.140.044,00						100 %	22.529.557.000,00	
			999.Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	100 %		100 %	100 %	10.705.140.044,00						100 %	22.529.557.000,00	
			999.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %		23.4 %	23.4 %	10.705.140.044,00						23.4 %	22.529.557.000,00	
			999.Proporsi kabupaten/ kota dengan capain skrining prioritas >80%	70 %		50 %	50 %	10.705.140.044,00						60 %	22.529.557.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap akses & pemenuhaan standarisasi mutu faskes						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	254.116.000,00						1 Dokumen	472.582.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	135.089.000,00						1 Dokumen	297.783.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	306.859.500,00						1 Dokumen	323.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	341.955.000,00						1 Dokumen	583.489.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	246.444.000,00						1 Dokumen	162.152.000,00	
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	106 Paket		106 Paket	106 Paket	294.814.100,00						106 Paket	162.147.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91176.00 Orang		65533 Orang	74081 Orang	1.329.652.050,00						82628 Orang	3.649.359.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	54763 Orang		52775 Orang	53430 Orang	2.572.084.000,00						54092 Orang	8.708.605.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan pada Ibu dan Anak						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	254.116.000,00						1 Dokumen	472.582.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	135.089.000,00						1 Dokumen	297.783.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	306.859.500,00						1 Dokumen	323.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	341.955.000,00						1 Dokumen	583.489.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	246.444.000,00						1 Dokumen	162.152.000,00	
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	106 Paket		106 Paket	106 Paket	294.814.100,00						106 Paket	162.147.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91176.00 Orang		65533 Orang	74081 Orang	1.329.652.050,00						82628 Orang	3.649.359.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	54763 Orang		52775 Orang	53430 Orang	2.572.084.000,00						54092 Orang	8.708.605.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan mutu layanan SPM bidang Kesehatan						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	254.116.000,00						1 Dokumen	472.582.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	135.089.000,00						1 Dokumen	297.783.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	306.859.500,00						1 Dokumen	323.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	341.955.000,00						1 Dokumen	583.489.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	246.444.000,00						1 Dokumen	162.152.000,00	
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	106 Paket		106 Paket	106 Paket	294.814.100,00						106 Paket	162.147.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91176.00 Orang		65533 Orang	74081 Orang	1.329.652.050,00						82628 Orang	3.649.359.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	54763 Orang		52775 Orang	53430 Orang	2.572.084.000,00						54092 Orang	8.708.605.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tatalaksana upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	254.116.000,00						1 Dokumen	472.582.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	135.089.000,00						1 Dokumen	297.783.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	306.859.500,00						1 Dokumen	323.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	341.955.000,00						1 Dokumen	583.489.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	246.444.000,00						1 Dokumen	162.152.000,00	
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	106 Paket		106 Paket	106 Paket	294.814.100,00						106 Paket	162.147.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91176.00 Orang		65533 Orang	74081 Orang	1.329.652.050,00						82628 Orang	3.649.359.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	54763 Orang		52775 Orang	53430 Orang	2.572.084.000,00						54092 Orang	8.708.605.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	254.116.000,00						1 Dokumen	472.582.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	135.089.000,00						1 Dokumen	297.783.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	306.859.500,00						1 Dokumen	323.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	341.955.000,00						1 Dokumen	583.489.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	246.444.000,00						1 Dokumen	162.152.000,00	
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	106 Paket		106 Paket	106 Paket	294.814.100,00						106 Paket	162.147.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91176.00 Orang		65533 Orang	74081 Orang	1.329.652.050,00						82628 Orang	3.649.359.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	54763 Orang		52775 Orang	53430 Orang	2.572.084.000,00						54092 Orang	8.708.605.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya pencegahan penyakit pada Balita						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	254.116.000,00						1 Dokumen	472.582.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	135.089.000,00						1 Dokumen	297.783.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	306.859.500,00						1 Dokumen	323.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	341.955.000,00						1 Dokumen	583.489.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	246.444.000,00						1 Dokumen	162.152.000,00	
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	106 Paket		106 Paket	106 Paket	294.814.100,00						106 Paket	162.147.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91176.00 Orang		65533 Orang	74081 Orang	1.329.652.050,00						82628 Orang	3.649.359.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	54763 Orang		52775 Orang	53430 Orang	2.572.084.000,00						54092 Orang	8.708.605.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya peningkatan Kualitas, Gizi Masyarakat						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	254.116.000,00						1 Dokumen	472.582.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	135.089.000,00						1 Dokumen	297.783.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	306.859.500,00						1 Dokumen	323.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	341.955.000,00						1 Dokumen	583.489.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	246.444.000,00						1 Dokumen	162.152.000,00	
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	106 Paket		106 Paket	106 Paket	294.814.100,00						106 Paket	162.147.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91176.00 Orang		65533 Orang	74081 Orang	1.329.652.050,00						82628 Orang	3.649.359.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	54763 Orang		52775 Orang	53430 Orang	2.572.084.000,00						54092 Orang	8.708.605.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya Penyehatan lingkungan						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	254.116.000,00						1 Dokumen	472.582.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	135.089.000,00						1 Dokumen	297.783.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	306.859.500,00						1 Dokumen	323.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	341.955.000,00						1 Dokumen	583.489.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	246.444.000,00						1 Dokumen	162.152.000,00	
			Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	106 Paket		106 Paket	106 Paket	294.814.100,00						106 Paket	162.147.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91176.00 Orang		65533 Orang	74081 Orang	1.329.652.050,00						82628 Orang	3.649.359.000,00	
			Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	54763 Orang		52775 Orang	53430 Orang	2.572.084.000,00						54092 Orang	8.708.605.000,00	
	1.02.02.1.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana						2.572.084.000,00							8.708.605.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan yang Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/Atau Berpotensi Bencana Provinsi Sesuai Standar	54763 Orang		52775 Orang	53430 Orang	2.572.084.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		54092 Orang	8.708.605.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)						1.329.652.050,00							3.649.359.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Provinsi Sesuai Standar	Jumlah Penduduk yang Mendapatkan Layanan Kesehatan pada Kondisi Kejadian Luar Biasa Provinsi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	91176.00 Orang		65533 Orang	74081 Orang	1.329.652.050,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		82628 Orang	3.649.359.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif						341.955.000,00							583.489.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Produktif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	341.955.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	583.489.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut						306.859.500,00							323.190.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	306.859.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	323.190.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji						135.089.000,00							297.783.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	135.089.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	297.783.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota						254.116.000,00							472.582.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkoordinasi dan Tersinkronisasinya Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	254.116.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	472.582.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan						546.000.000,00							1.713.215.000,00	
		Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	546.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	1.713.215.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0025	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional						294.814.100,00							162.147.000,00	
		Terdistribusinya Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional	Jumlah Paket Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Lab Rujukan/Nasional yang Didistribusikan	106 Paket		106 Paket	106 Paket	294.814.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		106 Paket	162.147.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0026	Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan						246.444.000,00							162.152.000,00	
		Terlaksananya Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	246.444.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	162.152.000,00	Dinas Kesehatan
		Terpenuhinya Jaminan Pembiayaan dan Layanan kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau di fasilitas kesehatan bagi semua						***97.975.279.506,00***							***173.431.024.000,00***	
			999.Cakupan Faskes pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan >60%	56.52 %		50 %	50 %	82.769.843.356,00						52.17 %	145.139.035.000,00	
			999.Cakupan Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan melalui Telemedicine	24.37 %		16.91 %	16.91 %	82.769.843.356,00						19.40 %	145.139.035.000,00	
			999.Cakupan Kabupaten /kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar	80 %		40 %	50 %	82.769.843.356,00						60 %	145.139.035.000,00	
			999.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	99.54 (%)		99.35 (%)	99.39 (%)	82.769.843.356,00						99.42 (%)	145.139.035.000,00	
			999.Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi (BLKPK)	77.43 %		67.43 %	69.93 %	82.769.843.356,00						72.43 %	145.139.035.000,00	
			999.Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Jiwa Mutiara Sukma	77.55 %		76.75 %	76.95 %	82.769.843.356,00						77.15 %	145.139.035.000,00	
			999.Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Manambai	75.50 %		73.5 %	74 %	82.769.843.356,00						74.5 %	145.139.035.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Mandalika	85 %		77 %	79 %	82.769.843.356,00						81 %	145.139.035.000,00	
			999.Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Mata	80 %		62 %	65 %	82.769.843.356,00						70 %	145.139.035.000,00	
			999.Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	82.2 %		81.94 %	82 %	82.769.843.356,00						82.08 %	145.139.035.000,00	
			999.Proporsi Fasyankes dengan Perbekalan Sesuai Standar	96 %		86 %	89 %	82.769.843.356,00						92 %	145.139.035.000,00	
			999.Proporsi Fasyankes Terakreditasi Paripurna	88 %		85.65 %	85.65 %	82.769.843.356,00						88 %	145.139.035.000,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						11.718.379.579,00					-		27.384.289.105,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan sarana prasarana, alat Kesehatan serta perbakalan kesehatan sesuai standar						11.718.379.579,00					-		27.384.289.105,00	
			Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	553.873.100,00						10 Dokumen	948.699.000,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit		3 Unit	3 Unit	162.500.000,00						3 Unit	266.750.000,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	120 Paket		120 Paket	120 Paket	10.762.006.479,00						120 Paket	25.166.487.000,00	
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						162.500.000,00							266.750.000,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Unit		3 Unit	3 Unit	162.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	266.750.000,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.01.0025	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan						553.873.100,00							948.699.000,00	
		Terlaksananya distribusi Alat Kesehatan, Obat,Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Jumlah dokumen distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	553.873.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Dokumen	948.699.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						9.699.454.382,00							22.375.925.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	120 Paket		120 Paket	120 Paket	9.699.454.382,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		120 Paket	22.375.925.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap akses & pemenuhaan standarisasi mutu faskes						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.622.036.780,00						1 Dokumen	112.792.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	1.515.000.000,00						Dokumen	1.303.290.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.856.000,00						1 Dokumen	171.544.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit		4 Unit	6 Unit	166.800.000,00						8 Unit	129.807.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan pada Ibu dan Anak						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.622.036.780,00						1 Dokumen	112.792.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	1.515.000.000,00						Dokumen	1.303.290.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.856.000,00						1 Dokumen	171.544.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit		4 Unit	6 Unit	166.800.000,00						8 Unit	129.807.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan mutu layanan SPM bidang Kesehatan						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.622.036.780,00						1 Dokumen	112.792.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	1.515.000.000,00						Dokumen	1.303.290.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.856.000,00						1 Dokumen	171.544.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit		4 Unit	6 Unit	166.800.000,00						8 Unit	129.807.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tatalaksana upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.622.036.780,00						1 Dokumen	112.792.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	1.515.000.000,00						Dokumen	1.303.290.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.856.000,00						1 Dokumen	171.544.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit		4 Unit	6 Unit	166.800.000,00						8 Unit	129.807.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.622.036.780,00						1 Dokumen	112.792.541.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	1.515.000.000,00						Dokumen	1.303.290.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.856.000,00						1 Dokumen	171.544.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit		4 Unit	6 Unit	166.800.000,00						8 Unit	129.807.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya pencegahan penyakit pada Balita						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.622.036.780,00						1 Dokumen	112.792.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	1.515.000.000,00						Dokumen	1.303.290.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.856.000,00						1 Dokumen	171.544.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit		4 Unit	6 Unit	166.800.000,00						8 Unit	129.807.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya peningkatan Kualitas, Gizi Masyarakat						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.622.036.780,00						1 Dokumen	112.792.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	1.515.000.000,00						Dokumen	1.303.290.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.856.000,00						1 Dokumen	171.544.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit		4 Unit	6 Unit	166.800.000,00						8 Unit	129.807.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya Penyehatan lingkungan						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.622.036.780,00						1 Dokumen	112.792.541.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	1.515.000.000,00						Dokumen	1.303.290.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.856.000,00						1 Dokumen	171.544.000,00	
			Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit		4 Unit	6 Unit	166.800.000,00						8 Unit	129.807.000,00	
	1.02.02.1.02.0016	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat						64.622.036.780,00							112.792.541.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.622.036.780,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	112.792.541.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0020	Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas						140.856.000,00							171.544.000,00	
		Terverifikasi dan Terlaksananya Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Verifikasi dan Penilaian Kelayakan Puskesmas untuk Registrasi Puskesmas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	140.856.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	171.544.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0023	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)						166.800.000,00							129.807.000,00	
		Tersedianya dan Terkelolanya Public Safety Center (PSC 119) yang Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi dengan Rumah Sakit dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	10 Unit		4 Unit	6 Unit	166.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		8 Unit	129.807.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik						1.515.000.000,00							1.303.290.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.515.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		Dokumen	1.303.290.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.03	Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						263.486.000,00					-		227.877.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap Sistem informasi Pelayanan Kesehatan di Faskes						263.486.000,00					-		227.877.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	263.486.000,00						1 Dokumen	227.877.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan						263.486.000,00							227.877.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	263.486.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	227.877.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						967.710.700,00					-		794.977.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tata kelola rumah sakit dan Fasilitas Pelayanankesehatan lainnya						967.710.700,00					-		794.977.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	220 Unit		209 Unit	211 Unit	624.790.700,00						213 Unit	580.125.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	10 Unit		7 Unit	8 Unit	144.370.000,00						9 Unit	105.332.000,00	
			Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	46 Unit		46 Unit	46 Unit	198.550.000,00						46 Unit	109.520.000,00	
	1.02.02.1.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Perizinan Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan						144.370.000,00							105.332.000,00	
		Tersedianya Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	Jumlah Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya	10 Unit		7 Unit	8 Unit	144.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		9 Unit	105.332.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit						198.550.000,00							109.520.000,00	
		Meningkatnya Tata Kelola Rumah Sakit Sesuai Standar	Jumlah Rumah Sakit yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar	46 Unit		46 Unit	46 Unit	198.550.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		46 Unit	109.520.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						624.790.700,00							250.715.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	220 Unit		209 Unit	211 Unit	624.790.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		213 Unit	250.715.000,00	Dinas Kesehatan
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap akses & pemenuhaan standarisasi mutu faskes						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Imunisasi Sesuai Standar	-		-	-	200.000.010,00						-	330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	196.164.600,00						-	471.552.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.974.170.590,00						-	3.920.469.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	474.999.730,00						-	660.000.000,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	-	677.048.464,00						-	825.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	155.743.000,00						-	250.014.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan pada Ibu dan Anak						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Imunisasi Sesuai Standar	-		-	-	200.000.010,00						-	330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	196.164.600,00						-	471.552.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.974.170.590,00						-	3.920.469.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	474.999.730,00						-	660.000.000,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	-	677.048.464,00						-	825.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	155.743.000,00						-	250.014.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan mutu layanan SPM bidang Kesehatan						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Imunisasi Sesuai Standar	-		-	-	200.000.010,00						-	330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	196.164.600,00						-	471.552.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.974.170.590,00						-	3.920.469.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	474.999.730,00						-	660.000.000,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	-	677.048.464,00						-	825.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	155.743.000,00						-	250.014.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tatalaksana upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Imunisasi Sesuai Standar	-		-	-	200.000.010,00						-	330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	196.164.600,00						-	471.552.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.974.170.590,00						-	3.920.469.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	474.999.730,00						-	660.000.000,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	-	677.048.464,00						-	825.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	155.743.000,00						-	250.014.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Imunisasi Sesuai Standar	-		-	-	200.000.010,00						-	330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	196.164.600,00						-	471.552.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.974.170.590,00						-	3.920.469.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	474.999.730,00						-	660.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	-	677.048.464,00						-	825.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	155.743.000,00						-	250.014.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya pencegahan penyakit pada Balita						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Imunisasi Sesuai Standar	-		-	-	200.000.010,00						-	330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	196.164.600,00						-	471.552.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.974.170.590,00						-	3.920.469.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	474.999.730,00						-	660.000.000,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	-	677.048.464,00						-	825.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	155.743.000,00						-	250.014.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya peningkatan Kualitas, Gizi Masyarakat						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Imunisasi Sesuai Standar	-		-	-	200.000.010,00						-	330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	196.164.600,00						-	471.552.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.974.170.590,00						-	3.920.469.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	474.999.730,00						-	660.000.000,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	-	677.048.464,00						-	825.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	155.743.000,00						-	250.014.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya Penyehatan lingkungan						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Imunisasi Sesuai Standar	-		-	-	200.000.010,00						-	330.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	-	196.164.600,00						-	471.552.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	-	2.974.170.590,00						-	3.920.469.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	-	474.999.730,00						-	660.000.000,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	-	677.048.464,00						-	825.000.000,00	
			Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	-	155.743.000,00						-	250.014.000,00	
	1.02.02.1.02.0032	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular						2.974.170.590,00							3.920.469.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular	-		-	10 Laporan	2.974.170.590,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	3.920.469.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0033	Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis						677.048.464,00							825.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengelolaan pelayanan kesehatan penyakit Tuberkulosis	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Kesehatan penyakit Tuberkulosis	-		-	10 Kabupaten/Kota	677.048.464,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	825.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0035	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa						196.164.600,00							471.552.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang yang berisiko Masalah Kesehatan Jiwa	-		-	1 Dokumen	196.164.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	471.552.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0036	Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja						155.743.000,00							250.014.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan pelayanan kesehatan kerja	Jumlah tempat kerja melaksanakan kesehatan kerja	-		-	1 Laporan	155.743.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	250.014.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0038	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular						474.999.730,00							660.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Tidak Menular	-		-	5 Laporan	474.999.730,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	660.000.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.02.1.02.0042	Pengelolaan Imunisasi						200.000.010,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Imunisasi Sesuai Standar	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Imunisasi Sesuai Standar	-		-	1 Laporan	200.000.010,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	330.000.000,00	Dinas Kesehatan
41.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**864.760.947,00**							**4.884.983.734,00**	
		Meningkatnya mutu, ketersediaan, dan pemerataan, Tenaga medis dan Tenaga Kesehatan						***864.760.947,00***							***4.884.983.734,00***	
			999.Cakupan fasilitas kesehatan dengan tenaga medis dan tenaga kesehatan terpenuhi sesuai standar	88.5 %		80.84 %	84.2 %	864.760.947,00						88 %	4.884.983.734,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						180.531.000,00					-		514.270.734,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Kesehatan yang Memenuhi Standar						180.531.000,00					-		514.270.734,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16.980 Orang		16.720 Orang	16.830 Orang	0,00						16.910 Orang	246.995.734,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	16.980 Orang		16.720 Orang	16.830 Orang	180.531.000,00						16.910 Orang	267.275.000,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						0,00							246.995.734,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	16.980 Orang		16.720 Orang	16830 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		16.910 Orang	246.995.734,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.1.01.0002	Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan						180.531.000,00							267.275.000,00	
		Terlaksananya Distribusi dan Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Terdistribusi	16.980 Orang		16.720 Orang	16830 Orang	180.531.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		16.910 Orang	267.275.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						684.229.947,00					-		4.370.713.000,00	
		Terpenuhinya upaya pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi teknis SDM Kesehatan tingkat daerah provinsi						684.229.947,00					-		4.370.713.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	128.777.947,00						1 Dokumen	273.997.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1.312 Orang		1.162 Orang	1.212 Orang	555.452.000,00						1.262 Orang	4.096.716.000,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						555.452.000,00							4.096.716.000,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	1.312 Orang		1.162 Orang	1212 Orang	555.452.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1.262 Orang	4.096.716.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.03.1.02.0002	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan						128.777.947,00							273.997.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	128.777.947,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	273.997.000,00	Dinas Kesehatan
42.	**1.02.04**	**PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN**						**145.801.900,00**							**1.153.972.215,00**	
		Terpenuhinya Kualitas sarana prasarana kefarmasian, dan pengawasan Keamanan Makanan dan Minuman						***145.801.900,00***							***1.153.972.215,00***	
			999.Cakupan Sarana Kefarmasian yang memenuhi syarat	80 %		60 %	65 %	145.801.900,00						70 %	1.153.972.215,00	
	1.02.04.1.01	Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						95.802.000,00					-		1.082.214.215,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pada Pedagang Besar Farmasi (PBF) dan Penyalur Alat Kesehatan (PAK)						95.802.000,00					-		1.082.214.215,00	
			Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	31 Sarana		31 Sarana	31 Sarana	95.802.000,00						31 Sarana	1.082.214.215,00	
	1.02.04.1.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK						95.802.000,00							1.082.214.215,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Pengakuan PBF Cabang dan Cabang PAK	Jumlah PBF Cabang dan Cabang PAK yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Perizinan	31 Sarana		31 Sarana	31 Sarana	95.802.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		31 Sarana	1.082.214.215,00	Dinas Kesehatan
	1.02.04.1.02	Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)						49.999.900,00					-		71.758.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pada Usaha Kecil dan Obat Tradisonal (UKOT)						49.999.900,00					-		71.758.000,00	
			Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana		3 Sarana	3 Sarana	49.999.900,00						3 Sarana	71.758.000,00	
	1.02.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional						49.999.900,00							71.758.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	Jumlah Usaha Kecil Obat Tradisional yang Dikendalikan dan Diawasi dalam rangka Penerbitan dan Tindaklanjut Penerbitan Izin Usaha Kecil Obat Tradisional	3 Sarana		3 Sarana	3 Sarana	49.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Sarana	71.758.000,00	Dinas Kesehatan
43.	**1.02.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN**						**2.450.842.800,00**							**762.284.900,00**	
		Meningkatnya gaya hidup sehat, partisipasi dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan						***2.450.842.800,00***							***762.284.900,00***	
			999.Persentase Kabupaten Kota yang melaksanakan pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan	100 %		100 %	100 %	2.450.842.800,00						100 %	762.284.900,00	
	1.02.05.1.01	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						210.055.900,00					-		551.055.900,00	
		Terlaksananya Advokasi dalam membangun kemitraan dan peran serta masyarakat dan lintas sektor						210.055.900,00					-		551.055.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	210.055.900,00						1 Dokumen	551.055.900,00	
	1.02.05.1.01.0001	Peningkatan Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi						210.055.900,00							551.055.900,00	
		Terlaksananya Upaya Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi Kesehatan, Pemberdayaan, Penggalangan Kemitraan, Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	210.055.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	551.055.900,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.02	Pelaksanaan Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Provinsi						2.166.345.900,00					-		159.288.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap penerapan Perilaku Hidup bersih dan sehat masyarakat di Kab/Kota2						2.166.345.900,00					-		159.288.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.166.345.900,00						1 Dokumen	159.288.000,00	
	1.02.05.1.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat						2.166.345.900,00							159.288.000,00	
		Terselenggaranya Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Dokumen Hasil Promosi Kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.166.345.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	159.288.000,00	Dinas Kesehatan
	1.02.05.1.03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Provinsi						74.441.000,00					-		51.941.000,00	
		terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terhadap peningkatan peran UKBM aktif di Kab/Kota						74.441.000,00					-		51.941.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.441.000,00						1 Dokumen	51.941.000,00	
	1.02.05.1.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM						74.441.000,00							51.941.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi UKBM	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.441.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	51.941.000,00	Dinas Kesehatan
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**957.963.775,00**							**0,00**	
	2.14	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA**						**957.963.775,00**							**0,00**	
44.	**2.14.02**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK**						**349.645.300,00**							**0,00**	
		Terkendalinya Pertambahan Jumlah Penduduk						***349.645.300,00***							***0,00***	
			999.Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19)	32-32 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun		32.55-32.55 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	32.41-32.41 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	349.645.300,00						32.27-32.27 Kelahiran per 1000 WUS 15-19 tahun	0,00	
			999.Angka kelahiran total (Total Fertility Rate/TFR) per WUS usia 15-49 Tahun	2.29 Rata-rata Anak per Wanita		2.33 Rata-rata Anak per Wanita	2.32 Rata-rata Anak per Wanita	349.645.300,00						2.31 Rata-rata Anak per Wanita	0,00	
		Terpadunya kebijakan pengendalian kuantitas penduduk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi secara terarah dan berkelanjutan						349.645.300,00					Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	2 Daerah		2 Daerah	2 Daerah	0,00						2 Daerah	0,00	
	2.14.02.1.01.0024	Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Bangga Kencana dan Sektor Lain						0,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	Jumlah Advokasi dan Sosialisasi Pembentukan Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) dan Sektor Lain	2 Daerah		2 Daerah	10 Daerah	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Daerah	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.02.1.01	Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk						349.645.300,00					Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota		0,00	
		Terpadunya kebijakan pengendalian kuantitas penduduk antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi secara terarah dan berkelanjutan						349.645.300,00					Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah kab/kota yang menerima sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya IPBK	-		-	-	37.662.800,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	75.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	-	49.662.800,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi PJPK	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) di Perguruan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SMA/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di Kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) melalui ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat	-		-	-	122.455.000,00						-	0,00	
			Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK)	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah penyelenggaraan koordinasi antar lintas sektor terkait pencegahan dan percepatan penurunan stunting	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah penyelenggaraan koordinasi antar lintas sektor/tim koordinasi terkait optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Tersedianya laporan tahunan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	-	64.864.700,00						-	0,00	
	2.14.02.1.01.0018	Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan Sosialisasi tentang Pemanfaatan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.02.1.01.0028	Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	Jumlah Kajian Dampak Kependudukan Beserta Model Solusi Strategis Sebagai Peringatan Dini Dampak Kependudukan kepada Pemangku Kepentingan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.02.1.01.0029	Koordinasi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah penyelenggaraan koordinasi antar lintas sektor/tim koordinasi terkait optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	10 Kegiatan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.02.1.01.0030	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan						49.662.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	Jumlah laporan dari perangkat daerah yang melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan dalam penyusunan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	-		-	1 Laporan / Dokumen	49.662.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.02.1.01.0031	Koordinasi pembinaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas						75.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi pembinaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan pembinaan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	10 Kabupaten/Kota	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.02.1.01.0040	Pengembangan media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK)						0,00								0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK)	Jumlah media dan materi edukasi kependudukan sesuai dengan isu dan kearifan lokal bagi Sekolah Siaga Kependudukan (SSK), Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK), ASN Peduli Kependudukan (ASN PK), dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK)	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.02.1.01.0041	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas						64.864.700,00							0,00	
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	Tersedianya laporan tahunan optimalisasi penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas	-		-	1 Laporan / Dokumen	64.864.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.02.1.01.0043	Advokasi dan Sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi dan Sosialisasi Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK)	Jumlah Laporan Pelaksanaan Advokasi dan Sosialisasi PJPK	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.02.1.01.0047	Sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)						37.662.800,00							0,00	
		Terlaksananya sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK)	Jumlah kab/kota yang menerima sosialisasi Pembangunan Berwawasan Kependudukan (PBK) dan alat ukurnya IPBK	-		-	10 Kab/Kota	37.662.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.02.1.01.0048	Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) di Perguruan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SMA/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) melalui ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat						122.455.000,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) di Perguruan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SMA/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) melalui ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Advokasi, promosi, dan pembinaan edukasi kependudukan pada Perguruan Tinggi Peduli Kependudukan (PTPK) di Perguruan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) di satuan pendidikan jenjang SMA/ Pramuka Peduli Kependudukan (Pramuka PK) di Kwartir ASN Peduli Kependudukan (ASN PK) di lembaga kediklatan/OPD dan Masyarakat Peduli Kependudukan (Mass PK) melalui ormas pengelola kelompok kegiatan masyarakat	-		-	1 Laporan	122.455.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.02.1.01.0050	Koordinasi penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi penyelenggaraan Dapur Sehat Atasi Stunting (DASHAT) di Kampung Keluarga Berkualitas	Jumlah penyelenggaraan koordinasi antar lintas sektor terkait pencegahan dan percepatan penurunan stunting	-		-	1 Laporan / Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.02.1.02	Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Provinsi						0,00					Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota		0,00	
		Tersedianya dokumen Pengembangan Model Solusi Strategis Pengendalian Dampak Kependudukan						0,00					Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.14.02.1.02.0012	Pemetaan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana)						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemetaan Program Bangga Kencana	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan Program Bangga Kencana	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
45.	**2.14.03**	**PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)**						**160.734.500,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Pembinaan Keluarga Berencana (KB)						***160.734.500,00***							***0,00***	
			999.Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern/Modern Contraceptive (mCPR)	64.3 Persentase		61.5 Persentase	62.2 Persentase	160.734.500,00						62.9 Persentase	0,00	
			999.Proporsi Kebutuhan KB yang terpenuhi menurut alat/cara KB Modern	93.33 %		91.77 %	92.16 %	160.734.500,00						92.55 %	0,00	
	2.14.03.1.01	Pengembangan Desain Program, Pengelolaan dan Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (KB) Sesuai Kearifan Budaya Lokal						160.734.500,00					Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,, Masyarakat, Pasangan Usia Subur		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Jumlah Kab/Kota yang melaksanakan pengembangan desain program dan pelaksanan KIE Pngendalian Penduduk dan KB						160.734.500,00					Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,, Masyarakat, Pasangan Usia Subur		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja	-		-	-	105.609.500,00						-	0,00	
			Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	-		-	-	55.125.000,00						-	0,00	
			umlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.14.03.1.01.0013	Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal						55.125.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Penyediaan Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga Sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Materi dan Sarana Promosi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Program Bangga Kencana Sesuai Kearifan Budaya Lokal yang dikembangkan/disediakan.	-		-	1 Dokumen	55.125.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.03.1.01.0014	Pelaksanaan Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja						105.609.500,00							0,00	
		Terlaksananya Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Advokasi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana Melalui Mitra Kerja	-		-	1 Laporan / Dokumen	105.609.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.03.1.01.0016	Fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	umlah fasilitasi Kerja Sama dengan Stakeholders dan Mitra Kerja dalam Pelaksanaan Advokasi, Promosi dan KIE Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana	-		-	10 Daerah	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.03.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pengelolaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB						0,00					Organisasi Kemasyarakatan		0,00	
		Meningkatnya Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB bagi Organisasi Masyarakat						0,00					Organisasi Kemasyarakatan		0,00	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan KB (dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi)	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi)	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.14.03.1.02.0009	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan,dan Keluarga Berencana (dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi)						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi)	-		-	10 Organisasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.03.1.02.0012	Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan KB (dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi)						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan KB (dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi)	Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pengembangan dan Penguatan Jejaring Kemitraan dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan KB (dengan Pemerintah Daerah, Organisasi Kemasyarakatan, Organisasi Profesi, dan Perguruan Tinggi)	-		-	20 Organisasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pemban gunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyan dang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
46.	**2.14.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)**						**447.583.975,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Pemberdayaan dan Peran Serta Masyarakat dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera (KS)						***447.583.975,00***							***0,00***	
			999.Indeks Pengasuhan Keluarga yang memiliki Remaja	88.79 Indeks		84.45 Indeks	85.65 Indeks	447.583.975,00						86.75 Indeks	0,00	
			999.Persentase Kampung Keluarga Berkualitas Mandiri	45.44 Persentase		25.44 Persentase	30.44 Persentase	447.583.975,00						35.44 Persentase	0,00	
	2.14.04.1.01	Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						320.415.175,00					Kampung Keluarga Berkualitas, Masyarakat, Keluarga		0,00	
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui implementasi program pembangunan keluarga yang terarah dan berkelanjutan						320.415.175,00					Kampung Keluarga Berkualitas, Masyarakat, Keluarga		0,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	110.368.000,00						4 Laporan	0,00	
	2.14.04.1.01.0028	Pembinaan program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)						110.368.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Program Pengasuhan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK)	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	110.368.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.04.1.02	Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						127.168.800,00					Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Masyarakat		0,00	
		Meningkatnya kapasitas Organisasi Kemasyarakatan/ TRIBINA dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						127.168.800,00					Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6 Organisasi		6 Organisasi	6 Organisasi	127.168.800,00						6 Organisasi	0,00	
	2.14.04.1.02.0008	Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						127.168.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Peningkatan Kapasitas Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Mitra dan Organisasi Kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas dalam Pengelolaan Program Ketahanan Keluarga Melalui Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	6 Organisasi		6 Organisasi	8 Organisasi	127.168.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		6 Organisasi	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.04.1.02.0011	Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pendampingan Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	2 Laporan		2 Laporan	10 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		2 Laporan	0,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya ketahanan dan kesejahteraan keluarga melalui implementasi program pembangunan keluarga yang terarah dan berkelanjutan						320.415.175,00					Kampung Keluarga Berkualitas, Masyarakat, Keluarga		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang mendapat pembinaan	-		-	-	101.424.500,00						-	0,00	
			Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	-		-	-	45.005.675,00						-	0,00	
			Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	-		-	-	63.617.000,00						-	0,00	
	2.14.04.1.01.0008	Fasilitasi Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB						63.617.000,00							0,00	
		Terpenuhinya PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	Jumlah PIK-R yang Mengikuti Pengembangan Kelompok Pusat Informasi Konseling-Remaja (PIK-R) di Kampung KB	-		-	4 Organisasi	63.617.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.14.04.1.01.0016	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	-		-	100 Keluarga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.04.1.01.0019	Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	Jumlah kelompok Genre yang mendapaat sosialisasi dan Pembinaan Remaja tentang Generasi Berencana	-		-	4 Kelompok	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.04.1.01.0022	Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota						45.005.675,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Advokasi, Sosialisasi dan Promosi Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota	-		-	10 Daerah	45.005.675,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
	2.14.04.1.01.0036	Fasilitasi pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga						101.424.500,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga	Jumlah kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga yang mendapat pembinaan	-		-	10 Kelompok	101.424.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya kapasitas Organisasi Kemasyarakatan/ TRIBINA dalam Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga						127.168.800,00					Pemerintah Daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Masyarakat		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Lanjut Usia Berdaya	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.14.04.1.02.0012	Fasilitasi dan Pembinaan Lanjut Usia Berdaya						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan lanjut usia berdaya	Jumlah Pelaksanaan Fasilitasi dan Pembinaan Lanjut Usia Berdaya	-		-	5 Laporan / Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Dinas Kesehatan
		Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi						**875.037.178.342,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**875.037.178.342,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**875.037.178.342,00**							**0,00**	
47.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**853.209.105.385,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	853.209.105.385,00						-	0,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						145.183.854.681,00					-		0,00	
		-						145.183.854.681,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	145.183.854.681,00						-	0,00	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						145.183.854.681,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	1322 Orang/ Bulan	145.183.854.681,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	4 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.022.755.030,00					-		0,00	
		-						1.022.755.030,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	986.264.030,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	36.491.000,00						-	0,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						986.264.030,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	986.264.030,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						36.491.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	36.491.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						707.002.495.674,00					-		0,00	
		-						707.002.495.674,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	707.002.495.674,00						-	0,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						707.002.495.674,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	707.002.495.674,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
48.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**21.828.072.957,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	21.828.072.957,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						21.828.072.957,00					-		0,00	
		-						21.828.072.957,00					-		0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	21.828.072.957,00						-	0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						21.828.072.957,00							0,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	60 Unit	21.828.072.957,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-	-	-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						0,00							0,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	2000 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi
		Rumah Sakit Mutiara Sukma						**72.513.135.262,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**72.513.135.262,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**72.513.135.262,00**							**0,00**	
49.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**66.931.615.266,00**							**0,00**	
			Nilai AKIP Dinas Kesehatan	-		-	82,19 %	35.111.769.866,00						-	0,00	
			Nilai SAKIP Dinas Kesehatan	-		-	82,19 %	28.800.000.000,00						-	0,00	
			-	-		-	-	3.019.845.400,00						-	0,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						35.111.769.866,00					-		0,00	
		-						35.111.769.866,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	35.111.769.866,00						-	0,00	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						35.111.769.866,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	291 Orang/ Bulan	35.111.769.866,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Mutiara Sukma
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.019.845.400,00					-		0,00	
		-						3.019.845.400,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	793.894.400,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	2.225.951.000,00						-	0,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						793.894.400,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	3 Laporan	793.894.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Selagalas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Mutiara Sukma
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.225.951.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	2.225.951.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Selagalas || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Mutiara Sukma
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						28.800.000.000,00					-		0,00	
		-						28.800.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	28.800.000.000,00						-	0,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						28.800.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	28.800.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Selagalas || 0	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Mutiara Sukma
50.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**5.581.519.996,00**							**0,00**	
			Cakupan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit Sesuai Target (berdasarkan kemampuan layanan rumah sakit)	-		-	76,95 %	5.581.519.996,00						-	0,00	
			Persentase capaian SPM rumah sakit mencapai target	-		-	100 %	5.581.519.996,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						5.581.519.996,00					-		0,00	
		-						5.581.519.996,00					-		0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	4.267.429.425,00						-	0,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	1.314.090.571,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						4.267.429.425,00							0,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	4 Unit	4.267.429.425,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Selagalas || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Mutiara Sukma
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Selagalas || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan RS Rujukan Nasional/Provinsi/Regional/Pariwisata	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Mutiara Sukma
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						1.314.090.571,00							0,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	1 Paket	1.314.090.571,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Selagalas || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Mutiara Sukma
		Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir						**144.093.906.142,00**							**158.093.903.045,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**144.093.906.142,00**							**158.093.903.045,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**144.093.906.142,00**							**158.093.903.045,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
51.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**138.593.906.142,00**							**150.593.903.045,00**	
			Nilai SAKIP	-		-	81,37 %	100.477.332.000,00						-	111.477.332.000,00	
			Nilai SAKIP	-		-	81,37 %	38.116.574.142,00						-	39.116.571.045,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						38.116.574.142,00					-		39.116.571.045,00	
		-						38.116.574.142,00					-		39.116.571.045,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	38.116.574.142,00						-	39.116.571.045,00	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						38.116.574.142,00							39.116.571.045,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	419 Orang/ Bulan	38.116.574.142,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	39.116.571.045,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Lempeh || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						6.877.332.000,00					-		7.877.332.000,00	
		-						6.877.332.000,00					-		7.877.332.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	746.844.000,00						-	746.844.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	6.130.488.000,00						-	7.130.488.000,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						746.844.000,00							746.844.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	5 Laporan	746.844.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	746.844.000,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.130.488.000,00							7.130.488.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	6.130.488.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	7.130.488.000,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						93.600.000.000,00					-		103.600.000.000,00	
		-						93.600.000.000,00					-		103.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	93.600.000.000,00						-	103.600.000.000,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						93.600.000.000,00							103.600.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	93.600.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Seketeng || 0	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	103.600.000.000,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
52.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**5.500.000.000,00**							**7.500.000.000,00**	
			Cakupan Pemenuhan Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan RS H.L. Manambai Abdulkadir	-		-	75 %	5.500.000.000,00						-	7.500.000.000,00	
			Cakupan Pemenuhan SPM Rumah Sakit H.L. Manambai Abdulkadir	-		-	100 %	0,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						5.500.000.000,00					-		7.500.000.000,00	
		-						5.500.000.000,00					-		7.500.000.000,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	3.507.196.600,00						-	4.507.196.600,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	1.992.803.400,00						-	2.992.803.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						3.507.196.600,00							4.507.196.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	43 Unit	3.507.196.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	4.507.196.600,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						0,00							0,00	
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						1.992.803.400,00							2.992.803.400,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	9 Paket	1.992.803.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	2.992.803.400,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.02.1.02.0024	Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Rujukan dan Rujuk Balik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan	-		-	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
53.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**0,00**							**0,00**	
			Cakupan Pemenuhan Pelatihan / Peningkatan Kompetensi SDM Kesehatan	-		-	75 %	0,00						-	0,00	
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						0,00							0,00	
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Sumbawa || Kelurahan Samapuin || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	-	0,00	Rumah Sakit H. L. Manambai Abdul Kadir
		Rumah Sakit Mandalika						**56.868.337.330,47**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**56.868.337.330,47**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**56.868.337.330,47**							**0,00**	
54.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**53.868.337.330,47**							**0,00**	
			-	-		-	-	53.868.337.330,47						-	0,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						20.421.961.071,00					-		0,00	
		-						20.421.961.071,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	20.421.961.071,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						20.421.961.071,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	185 Orang/ Bulan	20.421.961.071,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	45 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.512.659.002,47					-		0,00	
		-						1.512.659.002,47					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	600.384.002,47						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	912.275.000,00						-	0,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						600.384.002,47							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	6 Laporan	600.384.002,47	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						912.275.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	12 Laporan	912.275.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	-		-	12 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	-		-	300 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	3 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						31.933.717.257,00					-		0,00	
		-						31.933.717.257,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	31.933.717.257,00						-	0,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						31.933.717.257,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	31.933.717.257,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	Pendapatan dari BLUD	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
55.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3.000.000.000,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	3.000.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						3.000.000.000,00					-		0,00	
		-						3.000.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	2.750.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	-	250.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	-		-	10 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						2.750.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	31 Unit	2.750.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.02.1.01.0016	Pengadaan Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit	Jumlah Barang Penunjang Operasional Rumah Sakit yang Disediakan	-		-	150 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.02.1.01.0020	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Layanan Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Melayani Konsultasi Jarak Jauh Antar Fasyankes Melalui Pelayanan Telemedicine untuk Mendapatkan Akses Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.02.1.01.0026	Pengembangan Rumah Sakit						250.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	Jumlah Rumah sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan/atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit	-		-	1 Unit	250.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	-		-	86 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pelayanan Kesehatan Rujukan	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
56.	**1.02.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**						**0,00**							**0,00**	
			-	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.03.1.01	Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.03.1.01.0001	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan						0,00							0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) yang Memenuhi Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	-		-	55 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
	1.02.03.1.02	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						0,00					-		0,00	
		-						0,00					-		0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.02.03.1.02.0001	Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksana Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Kompetensi dan Kualifikasi Meningkat	-		-	150 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Pujut || Desa Sengkol || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Rumah Sakit Mandalika
		Rumah Sakit Mata						**42.829.133.320,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**42.829.133.320,00**							**0,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**42.829.133.320,00**							**0,00**	
57.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**39.779.133.320,00**							**0,00**	
			Meningkatnya mutu Pelayanan BLUD	-		-	100 %	21.083.004.326,00						-	0,00	
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	-		-	1 Dokumen Dokumen	1.350.167.000,00						-	0,00	
			Persentase Pemenuhan Layanan Administrasi dan Teknis Perangkat Daerah	-		-	160 orang	17.345.961.994,00						-	0,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.345.961.994,00					-		0,00	
		-						17.345.961.994,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	-	17.345.961.994,00						-	0,00	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.345.961.994,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	-		-	162 Orang/ Bulan	17.345.961.994,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Pejanggik || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Mata

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.350.167.000,00					-		0,00	
		-						1.350.167.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	-	1.350.167.000,00						-	0,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Pejanggik || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Mata
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.350.167.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	-		-	1 Laporan	1.350.167.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Pejanggik || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Mata
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						21.083.004.326,00					-		0,00	
		-						21.083.004.326,00					-		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	-	21.083.004.326,00						-	0,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						21.083.004.326,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-		-	1 Unit Kerja	21.083.004.326,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Pejanggik || 0	Pendapatan dari BLUD	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Mata
58.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**3.050.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase RS yang memenuhi Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan yang sesuai standar	-		-	2 unit	3.050.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						3.050.000.000,00					-		0,00	
		-						3.050.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	-	3.050.000.000,00						-	0,00	
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						3.050.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	-		-	3 Unit	3.050.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Pejanggik || 0	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		-	0,00	Rumah Sakit Mata
		Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi						**20.783.215.299,00**							**23.166.724.092,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.783.215.299,00**							**23.166.724.092,00**	
	1.02	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN**						**20.783.215.299,00**							**23.166.724.092,00**	
59.	**1.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**60.933.928.464,00**							**54.491.474.124,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***19.480.663.202,00***							***18.747.943.987,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.68 Skor		81.37 Skor	82.19 Skor	19.480.663.202,00						83.01 Skor	18.747.943.987,00	
	1.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						43.736.728.176,00					-		35.624.734.108,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						43.736.728.176,00					-		35.624.734.108,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	91.509.900,00						1 Dokumen	104.346.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246 Orang/ Bulan		166 Orang/ Bulan	183 Orang/ Bulan	43.522.117.926,00						202 Orang/ Bulan	35.475.307.108,00	
	1.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.142.251.004,00							8.053.055.987,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	246 Orang/ Bulan		166 Orang/ Bulan	1 Orang/ Bulan	9.142.251.004,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		202 Orang/ Bulan	8.053.055.987,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
	1.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						9.720.000,00							10.134.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.720.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.134.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
	1.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						450.866.000,00					-		529.909.000,00	
		Terwujudnya Tata Kelola Administrasi kepegawaian sesuai SOP						450.866.000,00					-		529.909.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang		65 Orang	70 Orang	147.517.000,00						75 Orang	307.571.000,00	
	1.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	85 Orang		65 Orang	1 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Orang	150.000.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
	1.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						4.719.542.198,00					-		5.068.694.487,00	
		Tersedianya layanan jasa penunjang secara tepat waktu, berkualitas, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						4.719.542.198,00					-		5.068.694.487,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.523.489.200,00						1 Laporan	1.785.839.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.187.921.998,00						1 Laporan	3.274.403.487,00	
	1.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						572.000.200,00							629.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	572.000.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	629.200.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
	1.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						880.879.998,00							968.968.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	880.879.998,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	968.968.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
	1.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						859.530.000,00					-		892.789.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						859.530.000,00					-		892.789.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	191.740.000,00						2 Unit	207.758.000,00	
	1.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						87.120.000,00							95.832.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	87.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	95.832.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
	1.02.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						8.788.692.000,00					-		8.840.754.000,00	
		Terlaksananya tata kelola dan akuntabilitas BLUD						8.788.692.000,00					-		8.840.754.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	194 Unit Kerja		194 Unit Kerja	194 Unit Kerja	8.788.692.000,00						194 Unit Kerja	8.840.754.000,00	
	1.02.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						8.788.692.000,00							8.840.754.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	194 Unit Kerja		194 Unit Kerja	1 Unit Kerja	8.788.692.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		194 Unit Kerja	8.840.754.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
60.	**1.02.02**	**PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT**						**99.277.831.603,00**							**177.849.804.105,00**	
		Meningkatnya kualitas Gizi Masyarakat						***0,00***							***296.455.000,00***	
		Meningkatnya Kualitas kesehatan Perorangan dan Kesehatan Masyarakat						***0,00***							***296.455.000,00***	
		Meningkatnya upaya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, Kesehatan Jiwa dan upaya kesehatan masyarakat yang proaktif dan responsif						***0,00***							***296.455.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Angka keberhasilan pengobatan tuberkulosis (treatment success rate)	95 (%)		95 (%)	95 (%)	0,00						95 (%)	296.455.000,00	
			999.Angka Kematian Dengue	0.10 %		0.40 %	0.30 %	0,00						0.20 %	296.455.000,00	
			999.Cakupan Diabetes dalam pengendalian	28 %		20 %	23 %	0,00						25 %	296.455.000,00	
			999.Cakupan Kabupaten/Kota dengan Eliminasi Malaria	100 %		80 %	100 %	0,00						100 %	296.455.000,00	
			999.Cakupan Kabupaten/Kota Eliminasi Kusta	100 %		80 %	80 %	0,00						90 %	296.455.000,00	
			999.Cakupan Merokok Penduduk Usia 10-21th	17 %		25 %	23 %	0,00						20 %	296.455.000,00	
			999.Cakupan ODHIV mengalami supresi Virus (Viral Land <50 kopi/ml	95 %		75 %	80 %	0,00						85 %	296.455.000,00	
			999.Cakupan penemuan kasus tuberkulosis (treatment coverage)	85 %		85 %	85 %	0,00						85 %	296.455.000,00	
			999.Persentase hipertensi dalam pengendalian	45 %		25 %	30 %	0,00						35 %	296.455.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan bagi orang yang terdampak dan berisiko pada situasi KLB provinsi	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	296.455.000,00	
			999.Persentase Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk terdampak Krisis Kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	296.455.000,00	
			999.Persentase pelayanan kesehatan pengurangan risiko KLB bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi KLB	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	296.455.000,00	
			999.Persentase Pelayanan Kesehatan pengurangan risiko krisis kesehatan bagi penduduk yang tinggal di wilayah berpotensi bencana	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	296.455.000,00	
			999.Prevalensi Obesitas lebih dari 18 tahun	23.4 %		23.4 %	23.4 %	0,00						23.4 %	296.455.000,00	
			999.Proporsi kabupaten/ kota dengan capain skrining prioritas >80%	70 %		50 %	50 %	0,00						60 %	296.455.000,00	
	1.02.02.1.02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap akses & pemenuhaan standarisasi mutu faskes						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan pada Ibu dan Anak						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan mutu layanan SPM bidang Kesehatan						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap tatalaksana upaya pencegahan dan pengendalian penyakit menular						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap upaya pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya pencegahan penyakit pada Balita						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya peningkatan Kualitas, Gizi Masyarakat						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan upaya Penyehatan lingkungan						86.328.255.324,00					-		149.442.661.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	546.000.000,00						3 Dokumen	2.009.670.000,00	
	1.02.02.1.02.0019	Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan						0,00							296.455.000,00	
		Terbinanya Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Pelaksanaan Upaya Pelayanan Kesehatan	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	296.455.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Jaminan Pembiayaan dan Layanan kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau di fasilitas kesehatan bagi semua						***1.302.552.097,00***							***4.418.780.105,00***	
			999.Cakupan Faskes pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan >60%	56.52 %		50 %	50 %	1.302.552.097,00						52.17 %	4.122.325.105,00	
			999.Cakupan Faskes yang melaksanakan pelayanan kesehatan melalui Telemedicine	24.37 %		16.91 %	16.91 %	1.302.552.097,00						19.40 %	4.122.325.105,00	
			999.Cakupan Kabupaten /kota yang memilki Unit Pelayanan Kesehatan Tingkat Desa/ Kelurahan sesuai standar	80 %		40 %	50 %	1.302.552.097,00						60 %	4.122.325.105,00	
			999.Cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional (JKN)	99.54 (%)		99.35 (%)	99.39 (%)	1.302.552.097,00						99.42 (%)	4.122.325.105,00	
			999.Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Balai Laboratorium Kesehatan Pengujian dan Kalibrasi (BLKPK)	77.43 %		67.43 %	69.93 %	1.302.552.097,00						72.43 %	4.122.325.105,00	
			999.Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Jiwa Mutiara Sukma	77.55 %		76.75 %	76.95 %	1.302.552.097,00						77.15 %	4.122.325.105,00	
			999.Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Manambai	75.50 %		73.5 %	74 %	1.302.552.097,00						74.5 %	4.122.325.105,00	
			999.Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Mandalika	85 %		77 %	79 %	1.302.552.097,00						81 %	4.122.325.105,00	
			999.Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah sakit Mata	80 %		62 %	65 %	1.302.552.097,00						70 %	4.122.325.105,00	
			999.Cakupan Pemenuhan Sarana prasarana dan alat kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi	82.2 %		81.94 %	82 %	1.302.552.097,00						82.08 %	4.122.325.105,00	
			999.Proporsi Fasyankes dengan Perbekalan Sesuai Standar	96 %		86 %	89 %	1.302.552.097,00						92 %	4.122.325.105,00	
			999.Proporsi Fasyankes Terakreditasi Paripurna	88 %		85.65 %	85.65 %	1.302.552.097,00						88 %	4.122.325.105,00	
	1.02.02.1.01	Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						11.718.379.579,00					-		27.384.289.105,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan terhadap pemenuhan sarana prasarana, alat Kesehatan serta perbakalan kesehatan sesuai standar						11.718.379.579,00					-		27.384.289.105,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	307 Unit		844 Unit	406 Unit	0,00						379 Unit	0,00	
			Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	6 Unit		3 Unit	6 Unit	240.000.000,00						6 Unit	266.200.000,00	
			Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	140.887.105,00	
			Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	120 Paket		120 Paket	120 Paket	10.762.006.479,00						120 Paket	25.166.487.000,00	
			Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	595.266.000,00	
	1.02.02.1.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit						0,00							595.266.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Rumah Sakit	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Rumah Sakit	3 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	595.266.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
	1.02.02.1.01.0010	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Disediakan	307 Unit		844 Unit	844 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		379 Unit	0,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
	1.02.02.1.01.0013	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi						0,00							140.887.105,00	
		Telaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Pengujian dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center	Jumlah Alat Uji dan Kalibrasi pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintainance Center yang Disediakan dan Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	140.887.105,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
	1.02.02.1.01.0017	Pemeliharaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan						240.000.000,00							266.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	6 Unit		3 Unit	1 Unit	240.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Unit	266.200.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
	1.02.02.1.01.0027	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan						1.062.552.097,00							2.790.562.000,00	
		Tersedianya Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan	120 Paket		120 Paket	1 Paket	1.062.552.097,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		120 Paket	2.790.562.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
	1.02.02.1.04	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas B dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi						967.710.700,00					-		794.977.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan tata kelola rumah sakit dan Fasilitas Pelayanankesehatan lainnya						967.710.700,00					-		794.977.000,00	
			Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	220 Unit		209 Unit	211 Unit	624.790.700,00						213 Unit	580.125.000,00	
	1.02.02.1.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan						0,00							329.410.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM)	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan Kesehatan	220 Unit		209 Unit	211 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		213 Unit	329.410.000,00	Balai Laboratorium Kesehatan, Pengujian dan Kalibrasi
		Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman						**399.217.906.375,53**							**513.158.175.698,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**348.877.313.575,53**							**512.968.175.698,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**242.257.313.575,53**							**241.551.072.998,00**	
61.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**77.824.134.896,99**							**78.885.369.123,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***75.910.397.316,53***							***75.531.952.998,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.10 Skor		77.94 Skor	78.71 Skor	75.910.397.316,53						79.50 Skor	75.531.952.998,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						722.430.800,00					Aparatur Sipil Negara		553.602.000,00	
		Tersusunnya dokumen anggaran dan evaluasi kinerja						722.430.800,00					Aparatur Sipil Negara		553.602.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		12 Data	12 Data	29.956.000,00						12 Data	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.133.500,00						1 Dokumen	33.876.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	246.357.700,00						2 Dokumen	147.960.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.480.200,00						1 Dokumen	4.422.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	82.622.300,00						1 Dokumen	173.980.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42.558.700,00						1 Dokumen	130.121.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.046.000,00						1 Laporan	23.508.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	260.276.400,00						2 Laporan	34.735.000,00	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						196.581.300,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	196.581.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	196.581.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						26.153.700,00							74.457.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.153.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	74.457.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						26.372.900,00							96.886.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.372.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	96.886.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						9.133.500,00							33.876.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.133.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	33.876.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						9.480.200,00							4.422.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.480.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	4.422.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						42.046.000,00							23.508.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	42.046.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	23.508.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	42.046.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	23.508.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						260.276.400,00							34.735.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	260.276.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	34.735.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						29.956.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	12 Data		12 Data	12 Data	29.956.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Data	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						51.978.473.755,53					Aparatur		51.957.740.323,00	
		Tersusunnya dokumen keuangan						51.978.473.755,53					Aparatur		51.957.740.323,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.800.000,00						1 Dokumen	15.764.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.555.000,00						1 Dokumen	19.461.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	66.539.000,00						1 Dokumen	108.079.325,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.076.000,00						1 Dokumen	19.681.450,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	227.920.600,00						1 Dokumen	200.140.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.558.000,00						1 Laporan	24.304.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.796.400,00						1 Laporan	26.081.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/ Bulan		1 Orang/ Bulan	1 Orang/ Bulan	51.540.228.755,53						1 Orang/ Bulan	51.544.229.548,00	
	1.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						51.540.228.755,53							51.544.229.548,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1 Orang/ Bulan		1 Orang/ Bulan	433 Orang/ Bulan	51.540.228.755,53	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Orang/ Bulan	51.544.229.548,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	433 Orang/ Bulan		433 Orang/ Bulan	433 Orang/ Bulan	51.540.228.755,53	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		433 Orang/ Bulan	51.544.229.548,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						43.514.000,00							27.384.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	10 Dokumen	43.514.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		6 Dokumen	27.384.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	43.514.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	27.384.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						117.200.600,00							102.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	117.200.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	102.320.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						30.555.000,00							19.461.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	30.555.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	19.461.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						35.558.000,00							24.304.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	35.558.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Laporan	24.304.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	35.558.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	24.304.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						15.800.000,00							15.764.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	15.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	15.764.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						46.796.400,00							26.081.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	10 Laporan	46.796.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Laporan	26.081.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	10 Laporan	46.796.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	26.081.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						15.076.000,00							19.681.450,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	10 Dokumen	15.076.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	19.681.450,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						173.134.500,00					Aparatur		147.649.000,00	
		Tersusunnya dokumen Aset/barang milik daerah pada SKPD						173.134.500,00					Aparatur		147.649.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.335.450,00						1 Dokumen	12.489.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	75.490.750,00						3 Laporan	86.057.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.236.250,00						1 Laporan	22.952.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	36.072.050,00						2 Dokumen	26.151.000,00	
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						32.472.050,00							20.871.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	32.472.050,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	20.871.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						33.436.250,00							22.952.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	33.436.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	22.952.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						57.756.250,00							61.557.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	6 Laporan	57.756.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Laporan	61.557.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						26.335.450,00							12.489.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	26.335.450,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	12.489.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000.000,00					Aparatur		129.530.000,00	
		Tersusunnya dokumen kepegawaian perangkat daerah						250.000.000,00					Aparatur		129.530.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	23.290.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	76.240.000,00	
	1.03.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						150.000.000,00							23.290.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	23.290.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						100.000.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	10 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Orang	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	10 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Orang	25.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						915.645.100,00					Aparatur		815.619.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kepegawaian SKPD						915.645.100,00					Aparatur		815.619.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00						1 Dokumen	28.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.715.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	297.536.000,00						12 Laporan	266.276.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	71.805.000,00						1 Paket	81.300.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.732.500,00						1 Paket	57.743.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	379.856.600,00						1 Paket	341.800.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						32.184.500,00							28.093.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	32.184.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	28.093.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						377.544.100,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	377.544.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						20.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						71.013.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	71.013.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	60.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						33.200.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	33.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						70.565.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.565.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	70.565.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		6 Laporan	20.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						250.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						405.000.000,00					Aparatur		1.144.470.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1 Paket	Paket	30.000.000,00						Paket	160.000.000,00	
			Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		1 Unit	Unit	0,00						Unit	150.000.000,00	
	1.03.01.1.07.0003	Pengadaan Alat Besar						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan	Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Unit	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						30.000.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1 Paket	17 Paket	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Paket	125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	17 Paket	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						21.817.565.810,46					Aparatur		22.405.858.800,00	
		Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah						21.817.565.810,46					Aparatur		22.405.858.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.134.633.710,46						1 Laporan	1.553.771.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.559.384.300,00						12 Laporan	20.552.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	113.547.700,00						12 Laporan	294.387.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.100,00						1 Laporan	5.000.000,00	
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.100,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	5.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						719.997.600,00							1.200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	719.997.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	719.997.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	1.200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.287.100,00							125.592.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	50.287.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	125.592.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						20.546.980.500,00							20.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	20.546.980.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	20.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.546.980.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	20.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.561.884.931,00					Aparatur		1.730.900.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						1.561.884.931,00					Aparatur		1.730.900.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	145.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	853.213.500,00						1 Unit	977.900.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	405.004.770,00						1 Unit	473.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	253.666.661,00						1 Unit	135.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						385.350.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	48 Unit	385.350.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		5 Unit	48 Unit	385.350.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Unit	450.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	7 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						243.546.661,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	5 Unit	243.546.661,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						405.000.000,00					Aparatur		1.144.470.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						405.000.000,00					Aparatur		1.144.470.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	175.000.000,00						-	600.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	234.470.000,00	
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						175.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	5 Unit	175.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
62.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**39.776.205.770,00**							**115.931.224.196,00**	
		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi						***12.631.710.000,00***							***71.527.150.000,00***	
			999.Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	81.49 %		68.42 %	71.44 %	12.631.710.000,00						74.76 %	71.527.150.000,00	
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	48.5 %		40.92 %	42.18 %	12.631.710.000,00						44.08 %	71.527.150.000,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						18.824.802.070,40					Petani dan masyarakat		33.653.824.196,00	
		Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						18.824.802.070,40					Petani dan masyarakat		33.653.824.196,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 Dokumen		5 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	300.000.000,00	
			Jumlah Embung yang dibangun	35 Unit		35 Unit	30 Unit	0,00						20 Unit	4.000.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	0,00						1 Lembaga	165.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						0 Dokumen	1.500.000.000,00	
			Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	28 Titik		30 Titik	20 Titik	3.720.000.000,00						13 Titik	2.600.000.000,00	
			Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	3.6 KM		4.35 KM	2.25 KM	3.904.000.000,00						1.8 KM	2.400.000.000,00	
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi						0,00							165.250.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Lembaga	165.250.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0094	Peningkatan Tanggul Sungai						3.904.000.000,00							2.400.000.000,00	
		Meningkatnya Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Ditingkatkan	3.6 KM		4.35 KM	2.25 KM	3.904.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1.8 KM	2.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.02.1.01.0116	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku						3.720.000.000,00							2.600.000.000,00	
		Terbangunnya Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun	28 Titik		30 Titik	20 Titik	3.720.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		13 Titik	2.600.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi						0,00							1.500.000.000,00	
		Tersusunnya Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	0 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		0 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0121	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya						0,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	5 Dokumen		5 Dokumen	3 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Dokumen	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.01.0130	Pembangunan Embung						0,00							4.000.000.000,00	
		Terbangunnya Embung untuk fungsi konservasi dan penyediaan air baku	Jumlah Embung yang dibangun	35 Unit		35 Unit	30 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		20 Unit	4.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.951.403.699,60					Masyarakat		82.277.400.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kewenangan Provinsi						20.951.403.699,60					Masyarakat		82.277.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	4 Dokumen		10 Dokumen	4 Dokumen	2.281.710.000,00						3 Dokumen	1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	110.000.000,00						2 Lembaga	1.000.000.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	21.88 KM		18.66 KM	19.49 KM	1.416.000.000,00						21.42 KM	38.561.900.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	16.33 KM		4.67 KM	9.33 KM	1.200.000.000,00						14 KM	21.000.000.000,00	
	1.03.02.1.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan						1.200.000.000,00							21.000.000.000,00	
		Meningkatnya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Ditingkatkan	16.33 KM		4.67 KM	9.33 KM	1.200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		14 KM	21.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan						1.416.000.000,00							38.561.900.000,00	
		Terehabilitasinya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	21.88 KM		18.66 KM	19.5 KM	1.416.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		21.42 KM	38.561.900.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.02.0030	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi						110.000.000,00							1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kelembagaan Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang mendapatkan Penguatan Kapasitas	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi Kewenangan Provinsi yang Diperkuat Kapasitasnya	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	110.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Lembaga	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa						2.281.710.000,00							1.500.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	4 Dokumen		10 Dokumen	4 Dokumen	2.281.710.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Dokumen	1.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
63.	**1.03.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM**						**4.013.040.000,00**							**8.514.658.000,00**	
		Meningkatnya Akses Msyarakat Terhadap Sistem Penyediaan Air Minum						***4.013.040.000,00***							***8.514.658.000,00***	
			999.Persentase Akses Layanan Air Minum	90.41 %		86.41 %	87.41 %	4.013.040.000,00						88.41 %	8.514.658.000,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						4.013.040.000,00					10 Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat		8.514.658.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya basis data air minum yang terintegrasi dan terlaksananya pembinaan kepada kabupaten/kota terkait perbaikan infrastruktur dan regulasi						4.013.040.000,00					10 Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat		8.514.658.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	3.510.000.000,00						4 Dokumen	7.414.658.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota		10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	503.040.000,00						10 Kabupaten/Kota	1.100.000.000,00	
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota						503.040.000,00							1.100.000.000,00	
		Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	10 Kabupaten/Kota		10 Kabupaten/Kota	10 Kabupaten/Kota	503.040.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Kabupaten/Kota	1.100.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota						3.510.000.000,00							7.414.658.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	3.510.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Dokumen	7.414.658.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
64.	**1.03.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL**						**10.910.000.000,00**							**5.713.548.000,00**	
		Meningkatnya Layanan Persampahan Regional						***10.910.000.000,00***							***5.713.548.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Infrastruktur TPA/TPST Regional	100 %		100 %	100 %	10.910.000.000,00						100 %	5.713.548.000,00	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional						10.910.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan sekitarnya		5.713.548.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Pengolahan Sampah						10.910.000.000,00					Masyarakat Kabupaten Lombok Barat, Kota Mataram, dan sekitarnya		5.713.548.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00						1 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	9.910.000.000,00						3 Unit	4.713.548.000,00	
	1.03.04.1.01.0011	Optimalisasi TPA/TPST/SPA						9.910.000.000,00							4.713.548.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teroptimalisasinya TPA/TPST/SPA	Jumlah TPA/TPST/SPA yang dioptimalisasi	1 Unit		2 Unit	1 Unit	9.910.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Unit	4.713.548.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	0 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
65.	**1.03.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH**						**1.668.171.259,00**							**4.257.329.000,00**	
		Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Sistem Pengelolaan Air Limbah						***1.668.171.259,00***							***4.257.329.000,00***	
			999.Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses air limbah domestik aman	33 %		12 %	18 %	1.668.171.259,00						24 %	4.257.329.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional						1.668.171.259,00					10 Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat		4.257.329.000,00	
		Tersusunnya basis data sanitasi yang terintegrasi dan terlaksananya pembinaan kepada kabupaten/kota terkait perbaikan infrastruktur dan regulasi						1.668.171.259,00					10 Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat		4.257.329.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	5 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.368.171.259,00						2 Dokumen	2.000.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Kabupaten/Kota		3 Kabupaten/ Kota	3 Kabupaten/ Kota	300.000.000,00						3 Kabupaten/ Kota	2.257.329.000,00	
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)						1.368.171.259,00							2.000.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	5 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	1.368.171.259,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.05.1.01.0022	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Kabupaten/Kota						300.000.000,00							2.257.329.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya Kabupaten/Kota dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Kabupaten/Kota yang memperoleh pembinaan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	10 Kabupaten/Kota		3 Kabupaten/ Kota	10 Kabupaten/Kota	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Kabupaten/ Kota	2.257.329.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
66.	**1.03.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE**						**4.056.000.000,00**							**20.415.752.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Sistem Drainase Perkotaan						***4.056.000.000,00***							***20.415.752.000,00***	
			999.Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	73 Persentase		12 Persentase	35.5 Persentase	4.056.000.000,00						47 Persentase	20.415.752.000,00	
	1.03.06.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi						4.056.000.000,00					10 Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat		20.415.752.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase pada Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Kawasan Strategis Provinsi						4.056.000.000,00					10 Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat		20.415.752.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00						1 Dokumen	1.415.752.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	70 Sistem Drainase Perkotaan		35 Sistem Drainase Perkotaan	35 Sistem Drainase Perkotaan	2.056.000.000,00						45 Sistem Drainase Perkotaan	9.000.000.000,00	
			Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	5 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan	5 Sistem Drainase Perkotaan	0,00						5 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000.000,00	
	1.03.06.1.01.0007	Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan						0,00							10.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan	5 Sistem Drainase Perkotaan		0 Sistem Drainase Perkotaan	2 Sistem Drainase Perkotaan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		5 Sistem Drainase Perkotaan	10.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.06.1.01.0008	Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan						2.056.000.000,00							9.000.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Dibangun	70 Sistem Drainase Perkotaan		35 Sistem Drainase Perkotaan	25 Sistem Drainase Perkotaan	2.056.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		45 Sistem Drainase Perkotaan	9.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.06.1.01.0012	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan						2.000.000.000,00							1.415.752.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	1.415.752.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
67.	**1.03.07**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN**						**13.353.000.000,00**							**17.995.230.000,00**	
		Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman						***13.353.000.000,00***							***17.995.230.000,00***	
			999.Persentase peningkatan infrastruktur permukiman	60 %		40 %	45 %	13.353.000.000,00						50 %	17.995.230.000,00	
	1.03.07.1.01	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi						13.353.000.000,00					10 Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat		17.995.230.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik						13.353.000.000,00					10 Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat		17.995.230.000,00	
			Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	1250 SR		0 SR	1000 SR	1.610.000.000,00						1150 SR	3.595.230.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	30 Liter/Detik		30 Liter/Detik	30 Liter/Detik	1.488.000.000,00						30 Liter/Detik	3.000.000.000,00	
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	50 Liter/Detik		0 Liter/Detik	30 Liter/Detik	0,00						45 Liter/Detik	4.500.000.000,00	
			Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	1 Ton/hari		0 Ton/hari	1 Ton/hari	0,00						1 Ton/hari	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.07.1.01.0024	Peningkatan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi						0,00							4.500.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	50 Liter/Detik		0 Liter/Detik	30 Liter/Detik	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		45 Liter/Detik	4.500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.07.1.01.0026	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi						1.488.000.000,00							3.000.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	30 Liter/Detik		30 Liter/Detik	30 Liter/Detik	1.488.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		30 Liter/Detik	3.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.07.1.01.0031	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi						1.610.000.000,00							3.595.230.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang mendapatkan Perluasan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan pada Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	1250 SR		0 SR	1150 SR	1.610.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1150 SR	3.595.230.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.07.1.01.0042	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi						0,00							500.000.000,00	
		Meningkatnya TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS di Kawasan Strategis Provinsi yang ditingkatkan	1 Ton/hari		0 Ton/hari	1 Ton/hari	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Ton/hari	500.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Terwujudnya Peningkatan Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik						13.353.000.000,00					10 Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat		17.995.230.000,00	
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	-		-	-	10.000.000.000,00						-	4.400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	-		-	-	255.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	1.03.07.1.01.0027	Optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi						10.000.000.000,00							4.400.000.000,00	
		Teroptimalisasinya Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan di Kawasan Strategis Provinsi yang dioptimalisasi	-		-	2 Unit	10.000.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	4.400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.07.1.01.0041	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi						255.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terbangunnya Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi	Kapasitas Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat di Kawasan Strategis Provinsi yang dibangun	-		-	10 M³/Hari	255.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
68.	**1.03.08**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG**						**65.349.995.000,00**							**28.966.168.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Bangunan Gedung						***65.349.995.000,00***							***28.966.168.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Bangunan Gedung dalam Kondisi Baik	90 Persentase		50 Persentase	60 Persentase	65.349.995.000,00						70 Persentase	28.966.168.000,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						65.349.995.000,00					-		28.966.168.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kualitas bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi dalam kondisi baik						65.349.995.000,00					-		28.966.168.000,00	
			Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	-	65.199.995.000,00						-	26.966.168.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-		-	-	150.000.000,00						-	2.000.000.000,00	
	1.03.08.1.01.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung kepada Pemerintah Kabupaten/Kotan Pengawasan Pembangunan Bangunan Gedung Negara kepada Pemerintah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Bangunan Gedung	-		-	10 Kabupaten/Kota	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	2.000.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.08.1.01.0027	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi						65.199.995.000,00							26.966.168.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestariaan dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	65.199.995.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	26.966.168.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
69.	**1.03.09**	**PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA**						**650.000.000,00**							**4.949.285.000,00**	
		Meningkatnya Bangunan dan Lingkungan yang Tertata						***650.000.000,00***							***4.949.285.000,00***	
			999.Persentase Penataan Bangunan dan Lingkungan	26.28 Persentase		25.50 Persentase	25.76 Persentase	650.000.000,00						26.02 Persentase	4.949.285.000,00	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						650.000.000,00					lembaga		4.949.285.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kualitas penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota						650.000.000,00					lembaga		4.949.285.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan		1 Kawasan	2 Kawasan	500.000.000,00						2 Kawasan	4.749.285.000,00	
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						500.000.000,00							4.749.285.000,00	
		Terlaksananya Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	1 Kawasan		1 Kawasan	2 Kawasan	500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Kawasan	4.749.285.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Terlaksananya peningkatan kualitas penataan bangunan dan lingkungan di Kawasan Strategis daerah provinsi dan lintas daerah kabupaten/kota						650.000.000,00					lembaga		4.949.285.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	-		-	-	150.000.000,00						-	200.000.000,00	
	1.03.09.1.01.0018	Pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota						150.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan kepada pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan penataan bangunan dan lingkungan	-		-	10 kabupaten /kota	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
70.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**88.045.743.400,00**							**18.687.754.200,00**	
		Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman						***52.530.000.000,00***							***0,00***	
			999.Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	79.76 %		76.71 %	77.42 %	52.530.000.000,00						78.18 %	0,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						88.045.743.400,00					Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman		18.687.754.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi						88.045.743.400,00					Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman		18.687.754.200,00	
			Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	97 Dokumen		77 Dokumen	82 Dokumen	1.220.637.900,00						87 Dokumen	830.000.000,00	
			Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1504.1027 KM		1504.1027 KM	1504.1027 KM	315.000.000,00						1504.1027 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	3 KM		3 KM	3 KM	0,00						3 KM	0,00	
			Panjang Jalan yang Direkonstruksi	16.18 KM		11.31 KM	11.78 KM	35.637.500.000,00						23.015 KM	0,00	
			Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	55 Meter		60 Meter	30 Meter	15.507.500.000,00						25 Meter	0,00	
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan						35.637.500.000,00							0,00	
		Terekonstruksinya Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	16.18 KM		11.31 KM	10 KM	35.637.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penguatan Intervensi Stunting	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		23.015 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						1.070.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	97 Dokumen		77 Dokumen	2 Dokumen	1.070.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		87 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan						315.000.000,00							0,00	
		Jalan/Jembatan yang mendapatkan Survey Kondisi	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	1504.1027 KM		1504.1027 KM	1493.12 KM	315.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1504.1027 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.1.01.0044	Pengelolaan Leger Jalan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Leger Jalan	Jumlah Dokumen Leger Jalan yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.1.01.0046	Penggantian Jembatan						15.507.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penggantian Jembatan	Panjang Jembatan yang dilakukan penggantian	55 Meter		60 Meter	30 Meter	15.507.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		25 Meter	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Terlaksananya Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	3 KM		3 KM	5 KM	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 KM	0,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
71.	**1.03.12**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG**						**1.185.000.000,00**							**1.725.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang						***985.000.000,00***							***1.725.000.000,00***	
			999.Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang	84.64 %		83.63 %	83.88 %	985.000.000,00						84.13 %	1.725.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang secara hirarki dan komprehensif						450.000.000,00					Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		575.000.000,00	
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	150.000.000,00						1.00 Dokumen	175.000.000,00	
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota						150.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota dengan adanya laporan progres dan tindak lanjut dari provinsi	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1.00 Dokumen	175.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						400.000.000,00					Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		525.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi						400.000.000,00					Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		525.000.000,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	200.000.000,00						1.00 Dokumen	225.000.000,00	
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang						200.000.000,00							225.000.000,00	
		Tersedianya dokumen Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.00 Dokumen	225.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.04	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfataan Ruang Daerah Provinsi						335.000.000,00					Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		625.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah provinsi						335.000.000,00					Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		625.000.000,00	
			Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	115.000.000,00						1.00 Dokumen	125.000.000,00	
			Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1.00 Dokumen	120.000.000,00						1.00 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2.00 Laporan		2.00 Laporan	2.00 Laporan	100.000.000,00						2.00 Laporan	350.000.000,00	
	1.03.12.1.04.0006	Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat						115.000.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan TURBINLAK dan Pengawasan Fungsi dan Manfaat	Dokumen hasil Peniliaian kinerja Pengaturan, Pembinaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang dan Penilaian Kinerja Fungsi dan Manfaat	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1.00 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.04.0009	Operasionalisasi Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang						100.000.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	Jumlah Laporan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Forum Penataan Ruang	2.00 Laporan		2.00 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2.00 Laporan	350.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.04.0014	Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan/atau pernyataan mandiri pelaku UMK						120.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	Dokumen tekstual dan spasial hasil Penilaian Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang	1.00 Dokumen		1.00 Dokumen	1 Dokumen	120.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1.00 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang						450.000.000,00					Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		575.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang secara hirarki dan komprehensif						450.000.000,00					Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		575.000.000,00	
			Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi	-		-	-	300.000.000,00						-	400.000.000,00	
	1.03.12.1.02.0007	Penyusunan RTRW Provinsi						300.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi sesuai dengan pedoman	Jumlah materi teknis dan ranperda RTRW Provinsi	-		-	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	400.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang daerah provinsi						400.000.000,00					Masyarakat dan Pemangku Kepentingan		525.000.000,00	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	-		-	-	200.000.000,00						-	300.000.000,00	
	1.03.12.1.03.0006	Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang						200.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedia dan terlaksananya pengembangan sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang	-		-	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**106.620.000.000,00**							**271.417.102.700,00**	
72.	**1.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN**						**3.000.000.000,00**							**3.733.514.700,00**	
		Terpenuhinya rumah layak huni bagi warga negara korban bencana dan yang terkena relokasi akibat program pemerintah						***2.452.100.000,00***							***3.671.014.700,00***	
			999.Persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100 %		100 %	100 %	2.452.100.000,00						100 %	3.671.014.700,00	
			999.Persentase Warga Negara yang Terkena Relokasi Akibat Program Provinsi yang Memperoleh Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	2.452.100.000,00						100 Persentase	3.671.014.700,00	
	1.04.02.1.01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						1.822.007.100,00					Masyarakat		1.801.042.700,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						1.822.007.100,00					Masyarakat		1.801.042.700,00	
			Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	127.547.500,00						1 Dokumen	125.758.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	221.309.500,00						1 Dokumen	264.629.000,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	795.162.600,00						1 Dokumen	391.531.700,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	580.440.000,00						Dokumen	565.092.300,00	
			Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	97.547.500,00						1 Dokumen	454.031.700,00	
	1.04.02.1.01.0002	Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan						221.309.500,00							264.629.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Data Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	Jumlah Dokumen Data Lahan yang Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	221.309.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	264.629.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.01.0006	Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus						580.440.000,00							565.092.300,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	580.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Dokumen	565.092.300,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.01.0008	Identifikasi Perumahan di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi						795.162.600,00							391.531.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi yang Berpotensi Terkena Relokasi Program Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	795.162.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	391.531.700,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.01.0009	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana Provinsi						97.547.500,00							454.031.700,00	
		Tersusunnya Dokumen Data Rumah Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	Jumlah Dokumen Data Rumah yang Terkena Bencana Provinsi Berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	97.547.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	454.031.700,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.01.0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi						127.547.500,00							125.758.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusun dan Terverifikasinya Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terverifikasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	127.547.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	125.758.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						82.192.900,00					Masyarakat		125.000.000,00	
		Tersosialisasinya Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						82.192.900,00					Masyarakat		125.000.000,00	
			Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang		Orang	50 Orang	0,00						Orang	62.500.000,00	
	1.04.02.1.02.0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana						0,00							62.500.000,00	
		Tersosialisasinya Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	Orang		Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Orang	62.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.04.02.1.03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						1.095.800.000,00					Masyarakat		1.807.472.000,00	
		Tersedianya dan Terehabilitasinya Rumah Korban Bencana atau Rumah Masyarakat Terdampak Relokasi Program Provinsi						1.095.800.000,00					Masyarakat		1.807.472.000,00	
			Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	10 Unit Rumah		10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	547.900.000,00						10 Unit Rumah	585.000.000,00	
			Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah		20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	547.900.000,00						20 Unit Rumah	602.500.000,00	
			Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	8 Rumah Tangga		Rumah Tangga	8 Rumah Tangga	0,00						8 Rumah Tangga	619.972.000,00	
	1.04.02.1.03.0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana						547.900.000,00							602.500.000,00	
		Terehabilitasinya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Korban Bencana Provinsi yang Terehabilitasi	20 Unit Rumah		20 Unit Rumah	20 Unit Rumah	547.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		20 Unit Rumah	602.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.03.0004	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana						547.900.000,00							585.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Provinsi yang Terbangun	10 Unit Rumah		10 Unit Rumah	10 Unit Rumah	547.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Unit Rumah	585.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.02.1.03.0007	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi						0,00							619.972.000,00	
		Terfasilitasinya Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Provinsi	Jumlah Rumah Tangga Korban Bencana Provinsi yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah	8 Rumah Tangga		Rumah Tangga	8 Rumah Tangga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		8 Rumah Tangga	619.972.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Tersosialisasinya Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi						82.192.900,00					Masyarakat		125.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	-		-	-	82.192.900,00						-	62.500.000,00	
	1.04.02.1.02.0011	Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan						82.192.900,00							62.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersosialisasinya Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Penyediaan Rumah Layak Huni dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	-		-	50 Orang	82.192.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU yang Ditentukan Penggunaannya Bidang Pekerjaan Umum	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	62.500.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
73.	**1.04.03**	**PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN**						**15.437.580.000,00**							**38.033.347.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kawasan Permukiman						***15.337.580.000,00***							***37.783.347.000,00***	
			999.Persentase Luas Kawasan Kumuh 10-15 Ha yang Ditangani	30 Persentase		10 Persentase	15 Persentase	15.337.580.000,00						20 Persentase	37.783.347.000,00	
	1.04.03.1.01	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						200.000.000,00					Masyarakat		500.000.000,00	
		Meningkatnya penataan kawasan permukiman						200.000.000,00					Masyarakat		500.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00						2 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00						2 Laporan	250.000.000,00	
	1.04.03.1.01.0008	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP						100.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusun/Tereview/Terlegalisasinya Kebijakan Bidang PKP	Jumlah Dokumen Kebijakan Bidang PKP yang Tersusun/Tereview/ Terlegalisasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum						100.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Kelompok Kerja dan/atau Forum	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	250.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						15.237.580.000,00					Masyarakat		37.533.347.000,00	
		Meningkatnya kualitas rumah pada kawasan permukiman kumuh sesuai kriteria rumah layak huni						15.237.580.000,00					Masyarakat		37.533.347.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	200 Unit Rumah		120 Unit Rumah	200 Unit Rumah	5.257.836.500,00						200 Unit Rumah	10.603.115.000,00	
			Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	800 Unit Rumah		480 Unit Rumah	800 Unit Rumah	5.542.163.500,00						800 Unit Rumah	16.964.673.000,00	
			Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	107.4 Hektar		35.8 Hektar	53.7 Hektar	4.437.580.000,00						71.6 Hektar	9.965.559.000,00	
	1.04.03.1.02.0003	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						5.542.163.500,00							16.964.673.000,00	
		Terlaksananya Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diperbaiki	800 Unit Rumah		480 Unit Rumah	800 Unit Rumah	5.542.163.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		800 Unit Rumah	16.964.673.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0011	Pembangunan Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						5.257.836.500,00							10.603.115.000,00	
		Terbangunnya Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Jumlah Rumah Baru Layak Huni untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	200 Unit Rumah		120 Unit Rumah	200 Unit Rumah	5.257.836.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Unit Rumah	10.603.115.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.03.1.02.0013	Pelaksanaan Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha						4.437.580.000,00							9.965.559.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peremajaan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	Luas Kawasan Permukiman Kumuh Dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha yang Diremajakan	107.4 Hektar		35.8 Hektar	53,7 Hektar	4.437.580.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		71.6 Hektar	9.965.559.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
74.	**1.04.05**	**PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)**						**88.182.420.000,00**							**229.450.241.000,00**	
		Meningkatnya penyediaan PSU permukiman						***88.182.420.000,00***							***229.450.241.000,00***	
			999.Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	99.72 Persentase		99.65 Persentase	99.67 Persentase	88.182.420.000,00						99.69 Persentase	229.450.241.000,00	
	1.04.05.1.01	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman						88.182.420.000,00					Masyarakat		229.450.241.000,00	
		Meningkatnya Kawasan Permukiman Dengan PSU Layak						88.182.420.000,00					Masyarakat		229.450.241.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	562.420.000,00						11 Dokumen	1.210.000.000,00	
			Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1186 Lokasi		1158 Lokasi	1161 Lokasi	87.620.000.000,00						1173.42408 Lokasi	228.240.241.000,00	
	1.04.05.1.01.0001	Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman						562.420.000,00							1.210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Permukiman	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	562.420.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		11 Dokumen	1.210.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	1.04.05.1.01.0009	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman						87.620.000.000,00							228.240.241.000,00	
		Tersedianya Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman	Jumlah Lokasi Permukiman yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum	1186 Lokasi		1158 Lokasi	1161 Lokasi	87.620.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1173.42408 Lokasi	228.240.241.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
75.	**1.04.06**	**PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN**						**0,00**							**200.000.000,00**	
		Meningkatnya sertifikasi dan registrasi bagi orang atau badan hukum yang melaksanakan perencanaan rumah serta perencanaan prasarana, sarana dan utilitas umum PSU tingkat kemampuan menengah						***0,00***							***200.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	0,00						100 Persentase	200.000.000,00	
	1.04.06.1.01	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah						0,00					Masyarakat		200.000.000,00	
		Bertambahnya Orang atau Badan Hukum yang melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah						0,00					Masyarakat		200.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	200.000.000,00	
	1.04.06.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan Dengan Kualifikasi Menengah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	200.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**50.340.592.800,00**							**190.000.000,00**	
	2.10	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN**						**50.340.592.800,00**							**190.000.000,00**	
76.	**2.10.06**	**PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE**						**50.340.592.800,00**							**190.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya akses masyarakat terhadap Tanah Objek Reforma Agraria (TORA)						***50.340.592.800,00***							***95.000.000,00***	
			999.Persentase Tersedianya Tanah Objek Landreform (TOL) yang siap diredistribusikan yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan tanah absentee	25 %		10 %	15 %	50.340.592.800,00						25 %	95.000.000,00	
	2.10.06.1.01	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						50.340.592.800,00					Masyarakat		190.000.000,00	
		Meningkatnya penyelesaian penetapan redistribusi tanah						50.340.592.800,00					Masyarakat		190.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	4 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	90.592.800,00						3 Berita Acara	95.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.250.000.000,00						2 Berita Acara	95.000.000,00	
	2.10.06.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota						50.250.000.000,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Kerja Sama Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria dalam 1 (satu) Provinsi.	Jumlah Berita Acara Pelaksanaan Rapat Koordinasi Penataan Akses dalam rangka Reforma Agraria.	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	50.250.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Berita Acara	95.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
	2.10.06.1.01.0005	Koordinasi dalam rangka Penataan Aset Reforma Agraria						90.592.800,00							95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pemerintah Provinsi berkoordinasi dengan Kanwil BPN Provinsi dalam pelaksanaan legalisasi aset dan redistribusi tanah	Jumlah Berita Acara dalam rangka Koordinasi Penataan Aset Reforma Agraria	4 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	90.592.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Berita Acara	95.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok						**16.100.000.000,00**							**7.914.405.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.100.000.000,00**							**7.914.405.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**16.100.000.000,00**							**7.914.405.000,00**	
77.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**77.824.134.896,99**							**78.885.369.123,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***716.250.600,00***							***769.478.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.10 Skor		77.94 Skor	78.71 Skor	716.250.600,00						79.50 Skor	769.478.000,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						722.430.800,00					-		553.602.000,00	
		Tersusunnya dokumen anggaran dan evaluasi kinerja						722.430.800,00					-		553.602.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	246.357.700,00						2 Dokumen	147.960.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	82.622.300,00						1 Dokumen	173.980.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42.558.700,00						1 Dokumen	130.121.000,00	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						16.206.000,00							17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	16.206.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	17.000.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	16.206.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	17.000.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							15.764.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	15.764.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						13.794.000,00							13.794.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	Tersedianya Dokumen Dokumen	13.794.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	13.794.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						51.978.473.755,53					-		51.957.740.323,00	
		Tersusunnya dokumen keuangan						51.978.473.755,53					-		51.957.740.323,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	227.920.600,00						1 Dokumen	200.140.000,00	
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						71.100.000,00							52.860.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	Terlaksananya Penata Dokumen	71.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	52.860.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						915.645.100,00					-		815.619.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kepegawaian SKPD						915.645.100,00					-		815.619.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00						1 Dokumen	28.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.732.500,00						1 Paket	57.743.000,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.468.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.468.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.000.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.800.000,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	2.000.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						21.817.565.810,46					-		22.405.858.800,00	
		Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah						21.817.565.810,46					-		22.405.858.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.134.633.710,46						1 Laporan	1.553.771.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.559.384.300,00						1 Laporan	20.552.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	113.547.700,00						12 Laporan	294.387.600,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						112.200.000,00							112.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	Tersedianya Jasa Kom Laporan	112.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	112.200.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	Tersedianya Jasa Kom Laporan	112.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	112.200.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						24.680.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	24.680.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	120.000.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						5.852.600,00							31.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	Tersedianya Jasa Laporan	5.852.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	31.200.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	Tersedianya Jasa Laporan	5.852.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	31.200.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.561.884.931,00					-		1.730.900.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						1.561.884.931,00					-		1.730.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	853.213.500,00						1 Unit	977.900.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	405.004.770,00						1 Unit	473.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						263.150.000,00							196.660.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		5 Unit	Tersedianya Jasa Pem Unit	263.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	196.660.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	Tersedianya Jasa Pem Unit	263.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	196.660.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	4 Unit	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
78.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**88.045.743.400,00**							**18.687.754.200,00**	
		Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman						***15.383.749.400,00***							***7.144.927.000,00***	
			999.Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	79.76 %		76.71 %	77.42 %	15.383.749.400,00						78.18 %	7.144.927.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						88.045.743.400,00					-		18.687.754.200,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi						88.045.743.400,00					-		18.687.754.200,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	333.46 KM		285.568 KM	328.4 KM	33.331.699.100,00						303.8653 KM	16.081.851.200,00	
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3294.81 Meter		3294.81 Meter	3294.81 Meter	2.033.406.400,00						3294.81 Meter	1.775.903.000,00	
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						15.383.749.400,00							6.369.024.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	333.46 KM		285.568 KM	Terlaksanany a Pemeli KM	15.383.749.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		303.8653 KM	6.369.024.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan						0,00							775.903.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3294.81 Meter		3294.81 Meter	Pemeliharaan Jembata Meter	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3294.81 Meter	775.903.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Lombok
		Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa						**20.850.000.000,00**							**11.500.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**20.850.000.000,00**							**11.500.000.000,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**20.850.000.000,00**							**11.500.000.000,00**	
79.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**77.824.134.896,99**							**78.885.369.123,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***835.073.500,00***							***787.172.800,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.10 Skor		77.94 Skor	78.71 Skor	835.073.500,00						79.50 Skor	787.172.800,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						722.430.800,00					Aparatur		553.602.000,00	
		Tersusunnya dokumen anggaran dan evaluasi kinerja						722.430.800,00					Aparatur		553.602.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	246.357.700,00						3 Dokumen	147.960.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	82.622.300,00						1 Dokumen	173.980.000,00	
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						33.570.400,00							30.960.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	33.570.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	30.960.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	33.570.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Dokumen	30.960.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						33.570.400,00							23.400.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	33.570.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	23.400.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						51.978.473.755,53					Aparatur		51.957.740.323,00	
		Tersusunnya dokumen keuangan						51.978.473.755,53					Aparatur		51.957.740.323,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	227.920.600,00						1 Dokumen	200.140.000,00	
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						39.120.000,00							24.960.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	39.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	24.960.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						173.134.500,00					Aparatur Sipil Negara		147.649.000,00	
		Tersusunnya dokumen Aset/barang milik daerah pada SKPD						173.134.500,00					Aparatur Sipil Negara		147.649.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	75.490.750,00						3 Laporan	86.057.000,00	
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						17.149.500,00							9.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	17.149.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Laporan	9.500.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						915.645.100,00					Aparatur		815.619.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kepegawaian SKPD						915.645.100,00					Aparatur		815.619.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	297.536.000,00						1 Laporan	266.276.000,00	
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						37.276.000,00							37.276.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	37.276.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	37.276.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	37.276.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	37.276.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						21.817.565.810,46					Aparatur		22.405.858.800,00	
		Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah						21.817.565.810,46					Aparatur		22.405.858.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.134.633.710,46						1 Laporan	1.553.771.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	113.547.700,00						12 Laporan	294.387.600,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						121.000.000,00							120.571.200,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	121.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	120.571.200,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	121.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	120.571.200,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						28.113.800,00							28.795.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	28.113.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	28.795.600,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.561.884.931,00					Aparatur		1.730.900.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						1.561.884.931,00					Aparatur		1.730.900.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	853.213.500,00						1 Unit	977.900.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	405.004.770,00						1 Unit	473.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						157.240.000,00							177.240.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	14 Unit	157.240.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	177.240.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		5 Unit	14 Unit	157.240.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Unit	177.240.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						201.603.800,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	4 Unit	201.603.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	200.000.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						405.000.000,00					Aparatur		1.144.470.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						405.000.000,00					Aparatur		1.144.470.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	234.470.000,00	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						200.000.000,00							134.470.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	20 Unit	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	134.470.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
80.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**88.045.743.400,00**							**18.687.754.200,00**	
		Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman						***19.981.356.100,00***							***10.712.827.200,00***	
			999.Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	79.76 %		76.71 %	77.42 %	19.981.356.100,00						78.18 %	10.712.827.200,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						88.045.743.400,00					Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman		18.687.754.200,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi						88.045.743.400,00					Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman		18.687.754.200,00	
			Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	333.46 KM		285.568 KM	328.4 KM	33.331.699.100,00						303.8653 KM	16.081.851.200,00	
			Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3294.81 Meter		3294.81 Meter	3294.81 Meter	2.033.406.400,00						3294.81 Meter	1.775.903.000,00	
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan						17.947.949.700,00							9.712.827.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	333.46 KM		285.568 KM	170,9382074 13696 KM	17.947.949.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		303.8653 KM	9.712.827.200,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan						2.033.406.400,00							1.000.000.000,00	
		&Terlaksananya Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	3294.81 Meter		3294.81 Meter	1 Tahun Meter	2.033.406.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3294.81 Meter	1.000.000.000,00	Balai Pemeliharaan Jalan Provinsi Pulau Sumbawa
		Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok						**15.527.000.000,00**							**42.594.074.196,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.527.000.000,00**							**42.594.074.196,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**15.527.000.000,00**							**42.594.074.196,00**	
81.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**77.824.134.896,99**							**78.885.369.123,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***100.000.000,00***							***380.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.10 Skor		77.94 Skor	78.71 Skor	100.000.000,00						79.50 Skor	380.000.000,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						722.430.800,00					Aparatur Sipil Negara		553.602.000,00	
		Tersusunnya dokumen anggaran dan evaluasi kinerja						722.430.800,00					Aparatur Sipil Negara		553.602.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	82.622.300,00						1 Dokumen	173.980.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42.558.700,00						1 Dokumen	130.121.000,00	
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						8.305.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.305.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						785.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	785.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						51.978.473.755,53					Aparatur		51.957.740.323,00	
		Tersusunnya dokumen keuangan						51.978.473.755,53					Aparatur		51.957.740.323,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	66.539.000,00						1 Dokumen	108.079.325,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	227.920.600,00						1 Dokumen	200.140.000,00	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	40.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		6 Dokumen	40.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						500.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						173.134.500,00					Aparatur		147.649.000,00	
		Tersusunnya dokumen Aset/barang milik daerah pada SKPD						173.134.500,00					Aparatur		147.649.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	75.490.750,00						3 Laporan	86.057.000,00	
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						585.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	585.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Laporan	15.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						915.645.100,00					Aparatur		815.619.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kepegawaian SKPD						915.645.100,00					Aparatur		815.619.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.000.000,00						1 Dokumen	28.500.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.715.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	297.536.000,00						1 Laporan	266.276.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	71.805.000,00						1 Paket	81.300.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.732.500,00						1 Paket	57.743.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	379.856.600,00						1 Paket	341.800.000,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						480.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	480.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	20.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.212.500,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	2.212.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	50.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						231.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	231.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	20.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							11.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	6 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Dokumen	11.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	6 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	11.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						150.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	10.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		6 Laporan	10.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						260.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	260.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	20.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	260.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	20.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						405.000.000,00					Aparatur		1.144.470.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						405.000.000,00					Aparatur		1.144.470.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	160.000.000,00	
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1 Paket	3 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		Paket	35.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	35.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						21.817.565.810,46					Aparatur		22.405.858.800,00	
		Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah						21.817.565.810,46					Aparatur		22.405.858.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.134.633.710,46						1 Laporan	1.553.771.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.559.384.300,00						1 Laporan	20.552.700.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	113.547.700,00						12 Laporan	294.387.600,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						37.500.000,00							37.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	37.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	37.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	37.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	37.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.466.800,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.466.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	20.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						6.551.200,00							21.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.551.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	21.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	6.551.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	21.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.561.884.931,00					Aparatur		1.730.900.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						1.561.884.931,00					Aparatur		1.730.900.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	145.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	853.213.500,00						1 Unit	977.900.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	253.666.661,00						1 Unit	135.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.853.500,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		5 Unit	5 Unit	21.853.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Unit	65.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	5 Unit	21.853.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	65.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	45.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.120.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	5 Unit	10.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	35.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
82.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**39.776.205.770,00**							**115.931.224.196,00**	
		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi						***15.427.000.000,00***							***42.069.074.196,00***	
			999.Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	81.49 %		68.42 %	71.44 %	15.427.000.000,00						74.76 %	42.069.074.196,00	
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	48.5 %		40.92 %	42.18 %	15.427.000.000,00						44.08 %	42.069.074.196,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						18.824.802.070,40					Petani dan masyarakat		33.653.824.196,00	
		Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						18.824.802.070,40					Petani dan masyarakat		33.653.824.196,00	
			Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	129 Unit		129 Unit	129 Unit	10.874.306.300,40						129 Unit	21.853.574.196,00	
	1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung						7.918.000.000,00							21.853.574.196,00	
		Beroperasi dan terpeliharanya embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	129 Unit		129 Unit	109 Unit	7.918.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		129 Unit	21.853.574.196,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.951.403.699,60					Masyarakat		82.277.400.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kewenangan Provinsi						20.951.403.699,60					Masyarakat		82.277.400.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1000 KM		1000 KM	1000 KM	15.943.693.699,60						1000 KM	20.215.500.000,00	
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						7.509.000.000,00							20.215.500.000,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1000 KM		1000 KM	5 KM	7.509.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1000 KM	20.215.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Lombok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa						**11.497.000.000,00**							**0,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.497.000.000,00**							**0,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**11.497.000.000,00**							**0,00**	
83.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**77.824.134.896,99**							**78.885.369.123,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***106.000.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.10 Skor		77.94 Skor	78.71 Skor	106.000.000,00						79.50 Skor	0,00	
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						51.978.473.755,53					Meningkatkan administrasi yang mendukung kelancaran tugas dan kinerja ASN		51.957.740.323,00	
		Tersusunnya dokumen keuangan						51.978.473.755,53					Meningkatkan administrasi yang mendukung kelancaran tugas dan kinerja ASN		51.957.740.323,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	66.539.000,00						1 Dokumen	108.079.325,00	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						8.100.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	3 Dokumen	8.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6 Dokumen	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	8.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						173.134.500,00					Tersedianya laporan barang milik daerah yang valid, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		147.649.000,00	
		Tersusunnya dokumen Aset/barang milik daerah pada SKPD						173.134.500,00					Tersedianya laporan barang milik daerah yang valid, akurat, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan		147.649.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.236.250,00						1 Laporan	22.952.000,00	
	1.03.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						915.645.100,00					Meningkatkan kelancaran dan ketertiban administrasi umum dalam mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah		815.619.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kepegawaian SKPD						915.645.100,00					Meningkatkan kelancaran dan ketertiban administrasi umum dalam mendukung tugas dan fungsi perangkat daerah		815.619.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	297.536.000,00						1 Laporan	266.276.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	71.805.000,00						1 Paket	81.300.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.732.500,00						1 Paket	57.743.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	379.856.600,00						1 Paket	341.800.000,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						100.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	10 Paket	100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						6.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						405.000.000,00					Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah guna menunjang kinerja pemerintahan		1.144.470.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						405.000.000,00					Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah guna menunjang kinerja pemerintahan		1.144.470.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1 Paket	Paket	30.000.000,00						Paket	160.000.000,00	
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		Paket	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						21.817.565.810,46					Meningkatkan ketersediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		22.405.858.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah						21.817.565.810,46					Meningkatkan ketersediaan jasa penunjang yang mendukung kelancaran tugas dan fungsi perangkat daerah		22.405.858.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.134.633.710,46						12 Laporan	1.553.771.200,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	113.547.700,00						12 Laporan	294.387.600,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.561.884.931,00					Menjaga keberlanjutan fungsi dan umur ekonomis barang milik daerah		1.730.900.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						1.561.884.931,00					Menjaga keberlanjutan fungsi dan umur ekonomis barang milik daerah		1.730.900.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	145.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		5 Unit	4 Unit	853.213.500,00						4 Unit	977.900.000,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		5 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Unit	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Unit	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
	1.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Unit	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						405.000.000,00					Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perangkat daerah guna menunjang kinerja pemerintahan		1.144.470.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	234.470.000,00	
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-		-	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
84.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**39.776.205.770,00**							**115.931.224.196,00**	
		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi						***11.391.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	81.49 %		68.42 %	71.44 %	11.391.000.000,00						74.76 %	0,00	
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	48.5 %		40.92 %	42.18 %	11.391.000.000,00						44.08 %	0,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						18.824.802.070,40					Masyarakat		33.653.824.196,00	
		Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						18.824.802.070,40					Masyarakat		33.653.824.196,00	
			Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	129 Unit		129 Unit	129 Unit	10.874.306.300,40						129 Unit	21.853.574.196,00	
	1.03.02.1.01.0137	Operasi dan Pemeliharaan Embung						2.956.306.300,40							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Beroperasi dan terpeliharanya embung	Jumlah Embung yang dioperasikan dan dipelihara	129 Unit		129 Unit	45 Unit	2.956.306.300,40	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		129 Unit	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.951.403.699,60					Masyarakat		82.277.400.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder Kewenangan Provinsi						20.951.403.699,60					Masyarakat		82.277.400.000,00	
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1000 KM		1000 KM	1000 KM	15.943.693.699,60						1000 KM	20.215.500.000,00	
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan						8.434.693.699,60							0,00	
		Beroperasi dan Terpeliharanya Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	1000 KM		1000 KM	234 KM	8.434.693.699,60	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1000 KM	0,00	Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Pulau Sumbawa
		Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material						**1.099.966.750,46**							**2.817.825.325,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.099.966.750,46**							**2.817.825.325,00**	
	1.03	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**						**1.099.966.750,46**							**2.817.825.325,00**	
85.	**1.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**77.824.134.896,99**							**78.885.369.123,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***114.743.080,46***							***806.865.325,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.10 Skor		77.94 Skor	78.71 Skor	114.743.080,46						79.50 Skor	806.865.325,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						722.430.800,00					-		553.602.000,00	
		Tersusunnya dokumen anggaran dan evaluasi kinerja						722.430.800,00					-		553.602.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	82.622.300,00						1 Dokumen	173.980.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	42.558.700,00						1 Dokumen	130.121.000,00	
	1.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						8.100.000,00							9.900.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	9.900.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						8.100.000,00							9.900.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	9.900.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						51.978.473.755,53					-		51.957.740.323,00	
		Tersusunnya dokumen keuangan						51.978.473.755,53					-		51.957.740.323,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	66.539.000,00						1 Dokumen	108.079.325,00	
	1.03.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						14.925.000,00							40.695.325,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	14.925.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	40.695.325,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	12 Dokumen	14.925.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	40.695.325,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						173.134.500,00					-		147.649.000,00	
		Tersusunnya dokumen Aset/barang milik daerah pada SKPD						173.134.500,00					-		147.649.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	36.072.050,00						2 Dokumen	26.151.000,00	
	1.03.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						3.600.000,00							5.280.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	5.280.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						250.000.000,00					-		129.530.000,00	
		Tersusunnya dokumen kepegawaian perangkat daerah						250.000.000,00					-		129.530.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	0,00						4 Orang	76.240.000,00	
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							51.240.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	35 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	51.240.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	35 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Orang	51.240.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						915.645.100,00					-		815.619.000,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana pendukung kepegawaian SKPD						915.645.100,00					-		815.619.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	297.536.000,00						1 Laporan	266.276.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	71.805.000,00						1 Paket	81.300.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	40.732.500,00						1 Paket	57.743.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	379.856.600,00						1 Paket	341.800.000,00	
	1.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						600.000,00							1.650.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	1.650.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							41.800.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	41.800.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						561.000,00							1.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	561.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	1.300.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						4.000.000,00							59.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	59.000.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	59.000.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						21.817.565.810,46					-		22.405.858.800,00	
		Tersedianya penunjang urusan pemerintah daerah						21.817.565.810,46					-		22.405.858.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.134.633.710,46						1 Laporan	1.553.771.200,00	
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						53.936.110,46							84.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	53.936.110,46	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	84.000.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	53.936.110,46	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	84.000.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.561.884.931,00					-		1.730.900.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						1.561.884.931,00					-		1.730.900.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		5 Unit	4 Unit	853.213.500,00						4 Unit	977.900.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	405.004.770,00						1 Unit	473.000.000,00	
	1.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.620.000,00							89.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	8 Unit	25.620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	89.000.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		5 Unit	8 Unit	25.620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	89.000.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.400.970,00							23.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	27 Unit	3.400.970,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	23.000.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						405.000.000,00					-		1.144.470.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						405.000.000,00					-		1.144.470.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	-	175.000.000,00						-	600.000.000,00	
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	-		-	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	400.000.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
86.	**1.03.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)**						**39.776.205.770,00**							**115.931.224.196,00**	
		Meningkatnya Perlindungan Masyarakat Terhadap Banjir dan Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Irigasi						***326.495.770,00***							***835.000.000,00***	
			999.Persentase Kondisi irigasi kewenangan Provinsi	81.49 %		68.42 %	71.44 %	326.495.770,00						74.76 %	835.000.000,00	
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas Kewenangan Provinsi	48.5 %		40.92 %	42.18 %	326.495.770,00						44.08 %	835.000.000,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota						18.824.802.070,40					-		33.653.824.196,00	
		Terlaksananya pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/ Kota						18.824.802.070,40					-		33.653.824.196,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	95 Dokumen		75 Dokumen	80 Dokumen	326.495.770,00						85 Dokumen	835.000.000,00	
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi						326.495.770,00							835.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	95 Dokumen		75 Dokumen	80 Dokumen	326.495.770,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Dokumen	835.000.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
87.	**1.03.10**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN**						**88.045.743.400,00**							**18.687.754.200,00**	
		Meningkatnya Aksesibilitas Masyarakat yang Nyaman dan Aman						***150.637.900,00***							***830.000.000,00***	
			999.Tingkat Kemantapan Jalan Provinsi	79.76 %		76.71 %	77.42 %	150.637.900,00						78.18 %	830.000.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi						88.045.743.400,00					-		18.687.754.200,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kemantapan Jalan Provinsi						88.045.743.400,00					-		18.687.754.200,00	
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	97 Dokumen		77 Dokumen	82 Dokumen	1.220.637.900,00						87 Dokumen	830.000.000,00	
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						150.637.900,00							830.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	97 Dokumen		77 Dokumen	80 Dokumen	150.637.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		87 Dokumen	830.000.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
88.	**1.03.11**	**PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI**						**499.990.000,00**							**336.060.000,00**	
		Meningkatnya Kompetensi Tenaga Konstruksi						***499.990.000,00***							***336.060.000,00***	
			999.Persentase Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	7.18 Persentase		4.64 Persentase	5.11 Persentase	499.990.000,00						5.75 Persentase	336.060.000,00	
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						366.685.000,00					Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi		1.060.000,00	
		Terselenggaranya pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi						366.685.000,00					Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi		1.060.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1220 Orang		195 Orang	330 Orang	366.685.000,00						570 Orang	1.060.000,00	
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli						366.685.000,00							1.060.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	1220 Orang		195 Orang	330 Orang	366.685.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		570 Orang	1.060.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						78.055.000,00					Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi		55.000.000,00	
		Terselenggaranya Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi						78.055.000,00					Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi		55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.055.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
	1.03.11.1.02.0008	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi						78.055.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infromasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.055.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.03.11.1.03	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						55.250.000,00					Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi		280.000.000,00	
		Telaksananya Kebijakan khusus terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi						55.250.000,00					Meningkatnya pembinaan jasa konstruksi		280.000.000,00	
			Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	300 Paket Pekerjaan		300 Paket Pekerjaan	300 Paket Pekerjaan	55.250.000,00						300 Paket Pekerjaan	280.000.000,00	
	1.03.11.1.03.0004	Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						55.250.000,00							280.000.000,00	
		Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang mendapatkan Pengawasan dan Evaluasi Tertib Penyelenggaraan	Jumlah Paket Pekerjaan Jasa Konstruksi Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota yang Diawasi dan Dievaluasi Tertib Penyelenggaraan	300 Paket Pekerjaan		300 Paket Pekerjaan	300 Paket Pekerjaan	55.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		300 Paket Pekerjaan	280.000.000,00	Balai Bina Jasa Konstruksi dan Pengujian Material
		Satuan Polisi Pamong Praja						**22.926.249.216,00**							**28.447.815.962,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.926.249.216,00**							**28.447.815.962,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**22.926.249.216,00**							**28.447.815.962,00**	
89.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**17.252.061.436,00**							**20.845.995.962,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***17.252.061.436,00***							***20.819.484.962,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85,12 Skor		81,80 Skor	82,62 Skor	17.252.061.436,00						83,45 Skor	20.819.484.962,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						226.913.900,00					ASN		306.546.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja						226.913.900,00					ASN		306.546.900,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.900,00						1 Dokumen	6.511.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.730.000,00						1 Dokumen	58.861.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00						1 Dokumen	6.511.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.714.000,00						1 Dokumen	37.791.500,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.769.900,00						1 Dokumen	33.729.800,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	26.000.000,00						2 Laporan	39.132.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	75.700.100,00						13 Laporan	124.009.600,00	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						75.730.000,00							58.861.500,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.730.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	58.861.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						17.769.900,00							33.729.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	17.769.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	33.729.800,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						25.714.000,00							37.791.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.714.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	37.791.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.999.900,00							6.511.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	6.511.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.000.000,00							6.511.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	6.511.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						26.000.000,00							39.132.500,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	26.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	39.132.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						75.700.100,00							124.009.600,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	75.700.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		13 Laporan	124.009.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						15.983.211.441,00					ASN		17.446.300.962,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan						15.983.211.441,00					ASN		17.446.300.962,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.833.400,00						12 Dokumen	22.654.500,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.499.800,00						1 Laporan	23.602.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	64.800.000,00						4 Laporan	101.404.200,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan		150 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan	15.879.078.241,00						150 Orang/ Bulan	17.298.640.262,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						15.879.078.241,00							17.298.640.262,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	150 Orang/ Bulan		150 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan	15.879.078.241,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		150 Orang/ Bulan	17.298.640.262,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						21.833.400,00							22.654.500,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	21.833.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-		12 Dokumen	22.654.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						17.499.800,00							23.602.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.499.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-		1 Laporan	23.602.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						64.800.000,00							101.404.200,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	64.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-		4 Laporan	101.404.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						12.900.000,00					ASN		35.132.500,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						12.900.000,00					ASN		35.132.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00						1 Laporan	10.851.500,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.400.000,00						2 Laporan	16.872.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3248000 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.499.900,00						2 Laporan	2.946.500,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.100,00						1 Dokumen	4.462.500,00	
	1.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.500.100,00							4.462.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	4.462.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						1.500.000,00							10.851.500,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	10.851.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.499.900,00							2.946.500,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	3248000 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.499.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	2.946.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						8.400.000,00							16.872.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	8.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	16.872.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						50.100.000,00					ASN		512.301.600,00	
		Tersedianya Anggota Satpol PP yang Memenuhi Standar Administrasi						50.100.000,00					ASN		512.301.600,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket		300 Paket	300 Paket	50.100.000,00						300 Paket	474.006.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		4 Orang	4 Orang	0,00						6 Orang	38.295.600,00	
	1.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						50.100.000,00							474.006.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	300 Paket		300 Paket	300 Paket	50.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		300 Paket	474.006.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							38.295.600,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	6 Orang		4 Orang	6 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Orang	38.295.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						158.395.325,00					ASN		306.142.800,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Perangkat Daerah						158.395.325,00					ASN		306.142.800,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.482.000,00						12 Laporan	27.690.500,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	119.999.900,00						2 Laporan	167.358.500,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.389.125,00						2 Paket	19.338.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	22.039.300,00						10 Paket	59.907.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.485.000,00						1 Paket	6.480.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	23.030.600,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	2.337.000,00	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.485.000,00							6.480.600,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.485.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	6.480.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							23.030.600,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	23.030.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							2.337.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	2.337.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.389.125,00							19.338.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.389.125,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	19.338.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						22.039.300,00							59.907.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	22.039.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Paket	59.907.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.482.000,00							27.690.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.482.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	27.690.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						119.999.900,00							167.358.500,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	119.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	167.358.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					ASN		893.219.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah						0,00					ASN		893.219.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket		9 Paket	10 Paket	0,00						10 Paket	27.654.000,00	
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	460.637.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		9 Unit	15 Unit	0,00						15 Unit	215.548.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		2 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	79.380.000,00	
	1.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							460.637.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		1 Unit	460.637.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	70.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							27.654.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Paket		9 Paket	10 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Paket	27.654.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							215.548.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		9 Unit	15 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-		15 Unit	215.548.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-		2 Unit	20.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							79.380.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	6 Unit		2 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	-	-		5 Unit	79.380.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						468.000.770,00					ASN		526.827.600,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						468.000.770,00					ASN		526.827.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	94.320.000,00						12 Laporan	103.600.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	372.702.770,00						12 Laporan	420.061.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	978.000,00						12 Laporan	3.166.000,00	
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						978.000,00							3.166.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	978.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	3.166.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						94.320.000,00							103.600.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	94.320.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	103.600.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						372.702.770,00							420.061.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	372.702.770,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		12 Laporan	420.061.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						352.540.000,00					ASN		819.524.600,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah yang Terpelihara						352.540.000,00					ASN		819.524.600,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00						2 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit		19 Unit	19 Unit	175.010.000,00						19 Unit	327.026.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	62.670.000,00						18 Unit	186.001.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	0,00						50 Unit	12.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	14.860.000,00						50 Unit	35.081.600,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	58.916.000,00	
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						62.670.000,00							186.001.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	18 Unit		18 Unit	18 Unit	62.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		18 Unit	186.001.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						175.010.000,00							327.026.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	19 Unit		19 Unit	19 Unit	175.010.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		19 Unit	327.026.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Unit	12.500.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						14.860.000,00							35.081.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	14.860.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Unit	35.081.600,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		1 Unit	1 Unit	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		2 Unit	200.000.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							58.916.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		10 Unit	58.916.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
90.	**1.05.02**	**PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**						**5.674.187.780,00**							**7.601.820.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas SDM PPNS						***360.632.500,00***							***510.031.400,00***	
			999.Persentase PPNS yang Ditingkatkan Kompetensinya	100 Persentase		38.46 Persentase	51.28 Persentase	360.632.500,00						64.1 Persentase	510.031.400,00	
	1.05.02.1.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi						360.632.500,00					-		510.031.400,00	
		Meningkatnya Anggota Satpol PP Menjadi PPNS						360.632.500,00					-		510.031.400,00	
			Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	143.719.400,00						1 Laporan	165.687.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.775.000,00						1 Dokumen	141.680.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan		1 laporan	1 laporan	60.552.700,00						1 laporan	72.352.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	82.061.400,00						1 Laporan	96.393.000,00	
			Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.524.000,00						1 Dokumen	33.919.000,00	
	1.05.02.1.03.0003	Pembentukan Sekretariat PPNS						3.524.000,00							33.919.000,00	
		Terbentuknya Sekretariat PPNS	Surat Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Sekretariat PPNS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.524.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	33.919.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.03.0004	Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah						70.775.000,00							141.680.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.775.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	141.680.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.03.0005	Dukungan Operasional Sekretariat PPNS						60.552.700,00							72.352.000,00	
		Terlaksananya Tugas dan Fungsi Sekretariat PPNS dalam Pelaksanaan Penegakan Peraturan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Kinerja Sekretariat PPNS	1 laporan		1 laporan	1 laporan	60.552.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 laporan	72.352.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.03.0007	Peningkatan Kapasitas dan Karier PPNS dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						82.061.400,00							96.393.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Terlaksananya Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	82.061.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	96.393.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.03.0008	Pembentukan PPNS Penegak Peraturan Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						143.719.400,00							165.687.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersediannya Anggaran Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	Jumlah Aparatur yang Mengikuti Diklat PPNS Penegak Peraturan Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	143.719.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	165.687.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum						***4.591.814.900,00***							***4.258.860.200,00***	
			999.Persentase Penyelenggaraan Tibumtranmas yang dilaksanakan oleh Satpol PP	100 %		100 %	100 %	4.277.346.700,00						100 %	3.675.015.400,00	
	1.05.02.1.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						4.591.814.900,00					Masyarakat, Kelompok Organisasi		4.258.860.200,00	
		Meningkatnya Anggota Satlinmas Yang Diberdayakan						4.591.814.900,00					Masyarakat, Kelompok Organisasi		4.258.860.200,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	150 Orang		150 Orang	150 Orang	205.000.000,00						150 Orang	284.648.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00						1 Dokumen	90.364.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	262.000.000,00						1 Dokumen	67.484.300,00	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.500.000,00						1 Dokumen	175.622.500,00	
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	875.000.000,00						1 Dokumen	103.347.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.560.000,00						1 Dokumen	32.844.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	72.508.000,00						12 Laporan	123.432.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	548.354.900,00						12 laporan	1.272.256.200,00	
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	35.025.800,00						1 Laporan	77.022.400,00	
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.900.000.000,00						1 Laporan	107.187.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 Unit		1 Unit	3 Unit	252.398.000,00						3 Unit	1.340.808.000,00	
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat						4.591.814.900,00					Masyarakat, Kelompok Organisasi		4.258.860.200,00	
			Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	150 Orang		150 Orang	150 Orang	205.000.000,00						150 Orang	284.648.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00						1 Dokumen	90.364.000,00	
			Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	262.000.000,00						1 Dokumen	67.484.300,00	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.500.000,00						1 Dokumen	175.622.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	875.000.000,00						1 Dokumen	103.347.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.560.000,00						1 Dokumen	32.844.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	72.508.000,00						12 Laporan	123.432.000,00	
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	548.354.900,00						12 laporan	1.272.256.200,00	
			Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	35.025.800,00						1 Laporan	77.022.400,00	
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.900.000.000,00						1 Laporan	107.187.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 Unit		1 Unit	3 Unit	252.398.000,00						3 Unit	1.340.808.000,00	
	1.05.02.1.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat						18.560.000,00							32.844.000,00	
		Tersedianya Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.560.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	32.844.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.02.1.01.0014	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi						55.000.000,00							90.364.000,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	90.364.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0015	Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						35.025.800,00							77.022.400,00	
		Tersedianya Pelayanan Dasar keapada warga negara yang terkena dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Pemberian Pelayanan Dasar Kepada Warga Yang Terdampak Penegakan Perda dan Perkada	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	35.025.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	77.022.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0020	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa						72.508.000,00							123.432.000,00	
		Terlaksananya Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	72.508.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	123.432.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0021	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						548.354.900,00							1.272.256.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan dan Pengawalan	12 laporan		12 laporan	12 laporan	548.354.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 laporan	1.272.256.200,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0023	Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas daerah provinsi						1.900.000.000,00							107.187.000,00	
		Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Kerjasama penyelenggaraan ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat lintas perbatasan daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.900.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	107.187.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0024	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja						205.000.000,00							284.648.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja	Jumlah Aparatur Satpol PP yang mengikuti peningkatan kapasitas	150 Orang		150 Orang	150 Orang	205.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		150 Orang	284.648.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0025	Penyusunan Peta Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat						875.000.000,00							103.347.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen pemetaan Rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	Jumlah dokumen Peta Daerah Rawan Gangguan Trantibum dan dokumen yang menggambarkan daerah rawan Gangguan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat yang sah dan legal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	875.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	103.347.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0026	Implementasi tugas dan fungsi Satpol PP sesuai Indeks Penyelenggaraan trantibum Provinsi dan Kabupaten/ Kota						53.500.000,00							175.622.500,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai dengan Kepmendagri Nomor 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen penyelenggaraan trantibum di daerah sesuai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	53.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	175.622.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0028	Penyediaan Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum						262.000.000,00							67.484.300,00	
		Tersedianya Layanan Informasi dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelayanan Informasi publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan Ketertiban Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	262.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	67.484.300,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0029	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat serta dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						252.398.000,00							1.340.808.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum, dan perlindungan masyarakat	Jumlah Sarana dan Prasarana ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	3 Unit		1 Unit	3 Unit	252.398.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		3 Unit	1.340.808.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya Penyelesaian Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada						***721.740.380,00***							***2.768.528.400,00***	
			999.Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100 %		100 %	100 %	721.740.380,00						100 %	2.768.528.400,00	
	1.05.02.1.02	Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur						721.740.380,00					Masyarakat, Kelompok Organisasi		2.832.928.400,00	
		Meningkatnya Penanganan Pelanggaran Perda dan Perkada						721.740.380,00					Masyarakat, Kelompok Organisasi		2.832.928.400,00	
			Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.001.000,00						1 Dokumen	64.400.000,00	
			Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.460.000,00						1 Dokumen	161.454.000,00	
			Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.466.800,00						1 Dokumen	45.080.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00						12 Laporan	1.338.392.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.500.000,00						12 Laporan	120.271.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	66.485.000,00						10 Laporan	386.151.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 laporan		4 laporan	4 laporan	99.999.800,00						4 laporan	171.364.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 laporan		1 laporan	1 laporan	55.999.000,00						1 laporan	64.400.000,00	
			Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	60.300.000,00						1 laporan	72.089.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Unit		21 Unit	3 Unit	192.528.780,00						3 Unit	409.326.400,00	
	1.05.02.1.02.0002	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						89.500.000,00							120.271.500,00	
		Terlaksananya pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	89.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	120.271.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02.0005	Penyelidikan terhadap dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						55.999.000,00							64.400.000,00	
		Terlaksananya Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Penyelidikan atas Dugaan Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	1 laporan		1 laporan	1 laporan	55.999.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 laporan	64.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02.0007	Dukungan Pelaksanaan Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah						60.300.000,00							72.089.000,00	
		Terlaksananya Sidang atas Pelanggaran Peraturan Daerah	Jumlah Perkara yang Dapat Disidangkan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	60.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 laporan	72.089.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02.0008	Pembinaan dan Penyuluhan terhadap Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur						99.999.800,00							171.364.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Penyuluhan pada Pelanggar Peraturan daerah dan Peraturan Gubernur	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Penyuluhan atas Pelanggar Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	4 laporan		4 laporan	4 laporan	99.999.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 laporan	171.364.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02.0009	Pemberkasan Administrasi Penyidikan oleh PPNS Penegak Peraturan Daerah						26.001.000,00							64.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberkasan Hasil Penyidikan oleh PPNS Penegak Perda	Jumlah Dokumen Pemberkasan Hasil Penyidikan atas Pelanggaran Perda	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.001.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	64.400.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02.0010	Sosialisasi Ketentuan Sanksi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						66.485.000,00							386.151.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	66.485.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Laporan	386.151.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02.0011	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						39.466.800,00							45.080.000,00	
		Tersedianya Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.466.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	45.080.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02.0012	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah						55.000.000,00							1.338.392.000,00	
		Terlaksananya Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Kepala Daerah Sesuai SOP	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	55.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	1.338.392.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02.0013	Implementasi Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada						36.460.000,00							161.454.000,00	
		Terlaksananya penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Istrumen Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Dokumen penyelenggaraan Penegakan Perda dan Perkada sesuai Instrumen Penegakan Perda dan Perkada	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	36.460.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	161.454.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.02.0014	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah dalam mendukung pencapaian SPM sub urusan trantibum						192.528.780,00							409.326.400,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	5 Unit		21 Unit	3 Unit	192.528.780,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	409.326.400,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Meningkatnya Perlindungan Terhadap Masyarakat						***4.591.814.900,00***							***4.258.860.200,00***	
			999.Persentase Cakupan Perlindungan Masyarakat	75.6 Persentase		72.6 Persentase	73.2 Persentase	314.468.200,00						73.8 Persentase	583.844.800,00	
		Meningkatnya Anggota Satlinmas Yang Diberdayakan						4.591.814.900,00					Masyarakat, Kelompok Organisasi		4.258.860.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.469.100,00						1 Dokumen	120.139.000,00	
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	90.000.100,00						10 Laporan	207.797.500,00	
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	900 Orang		500 Orang	600 Orang	149.999.000,00						700 Orang	255.908.300,00	
		Meningkatnya Penanganan Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat						4.591.814.900,00					Masyarakat, Kelompok Organisasi		4.258.860.200,00	
			Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.469.100,00						1 Dokumen	120.139.000,00	
			Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	90.000.100,00						10 Laporan	207.797.500,00	
			Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	900 Orang		500 Orang	600 Orang	149.999.000,00						700 Orang	255.908.300,00	
	1.05.02.1.01.0012	Pembentukan Satgas Linmas Tingkat Provinsi						74.469.100,00							120.139.000,00	
		Terbentuknya Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	Jumlah Dokumen SK Pembentukan Satgas Linmas ditingkat Provinsi dalam Penyelenggaraan Linmas melalui SK Gubernur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	74.469.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		1 Dokumen	120.139.000,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0022	Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat						90.000.100,00							207.797.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Pelindungan Masyarakat dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	Jumlah laporan yang Memuat Hasil Pemberdayaan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	90.000.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	207.797.500,00	Satuan Polisi Pamong Praja
	1.05.02.1.01.0030	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Pelindungan Masyarakat						149.999.000,00							255.908.300,00	
		Terlaksananya Peningkatan Meningkatnya Kapasitas SDM Satuan Perlindungan Masyarakat	Jumlah SDM Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasanya	900 Orang		500 Orang	600 Orang	149.999.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		700 Orang	255.908.300,00	Satuan Polisi Pamong Praja
		Badan Penanggulangan Bencana Daerah						**12.978.668.450,00**							**1.486.537.612,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**12.978.668.450,00**							**1.486.537.612,00**	
	1.05	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT**						**12.978.668.450,00**							**1.486.537.612,00**	
91.	**1.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**11.720.305.546,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***11.720.305.546,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.80 Skor		77.65 Skor	78.43 Skor	11.720.305.546,00						79.21 Skor	0,00	
	1.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						140.249.235,00					-		0,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan dan penganggaran perangkat daerah yang tepat waktu dan sesuai kebutuhan pembangunan						140.249.235,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.173.670,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.678.700,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.783.500,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.583.300,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.873.350,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.156.470,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.245,00						1 Laporan	0,00	
	1.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						21.678.700,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.678.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						25.873.350,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.873.350,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						24.583.300,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.583.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						14.173.670,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.173.670,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						13.783.500,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.783.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						22.156.470,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.156.470,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						18.000.245,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.245,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.690.595.816,00					-		0,00	
		Meningkatnya akuntabilitas dan efektivitas pengelolaan keuangan perangkat daerah						7.690.595.816,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	128.790.370,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	19.999.900,00						4 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan		55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	7.523.805.546,00						55 Orang/ Bulan	0,00	
	1.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.523.805.546,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	55 Orang/ Bulan		55 Orang/ Bulan	55 Orang/ Bulan	7.523.805.546,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		55 Orang/ Bulan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						128.790.370,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	128.790.370,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						18.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						19.999.900,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	19.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		4 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						24.954.580,00					-		0,00	
		Meningkatnya tertib administrasi dan pengelolaan barang milik daerah pada perangkat daerah						24.954.580,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	18.386.480,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	6.568.100,00						2 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						6.568.100,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		Laporan	2 Laporan	6.568.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						18.386.480,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	18.386.480,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam pengelolaan kepegawaian perangkat daerah						57.993.400,00					-		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	Orang	40.000.000,00						Orang	0,00	
	1.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						40.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang		Orang	11 Orang	40.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Orang	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						412.365.315,00					-		0,00	
		Meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana administrasi umum untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah						412.365.315,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.947.090,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	275.498.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.060.400,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.674.425,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	37.053.400,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	Paket	8.332.000,00						Paket	0,00	
	1.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						18.674.425,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	18.674.425,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						37.053.400,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	37.053.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.332.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.332.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		Paket	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.060.400,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.060.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Paket	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						10.800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						275.498.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	1 Laporan	275.498.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		5 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						35.947.090,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.947.090,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						79.150.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya ketersediaan dan kondisi Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan yang layak pakai						79.150.000,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		31 Unit	7 Unit	79.150.000,00						3 Unit	0,00	
	1.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						79.150.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		31 Unit	7 Unit	79.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		3 Unit	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.780.257.200,00					-		0,00	
		Meningkatnya ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah secara efektif dan tepat guna						2.780.257.200,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	261.187.200,00						12 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.487.100.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	27.540.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.430.000,00						12 Laporan	0,00	
	1.05.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.430.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						261.187.200,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	261.187.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						27.540.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	0 Laporan	27.540.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.487.100.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.487.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		12 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						534.740.000,00					-		0,00	
		Terpeliharanya kondisi Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan agar tetap berfungsi optimal						534.740.000,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	90.280.000,00						Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit		50 Unit	50 Unit	344.000.000,00						50 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		5 Unit	36 Unit	75.460.000,00						43 Unit	0,00	
	1.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Unit	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						344.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit		50 Unit	50 Unit	344.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		50 Unit	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						75.460.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	47 Unit		5 Unit	36 Unit	75.460.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		43 Unit	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						90.280.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		Unit	1 Unit	90.280.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Unit	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						57.993.400,00					-		0,00	
		Meningkatnya tertib administrasi dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam pengelolaan kepegawaian perangkat daerah						57.993.400,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	17.993.400,00						-	0,00	
	1.05.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						17.993.400,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	2 Dokumen	17.993.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
92.	**1.05.03**	**PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA**						**1.101.445.255,00**							**737.881.612,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektivitas Penanganan Pascabencana						***150.500.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Penanganan Pasca Bencana	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	150.500.000,00						100 Persentase	0,00	
	1.05.03.1.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana						186.500.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Penanggulangan Bencana secara Simultan						186.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	60 Orang		60 Orang	Orang	40.500.000,00						60 Orang	0,00	
			Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	10 kabupaten /kota		10 kabupaten /kota	10 kabupaten /kota	36.000.000,00						10 kabupaten /kota	0,00	
			Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Lembaga		Lembaga	1 Lembaga	0,00						1 Lembaga	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	65.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	36.000.000,00						1 Kegiatan	0,00	
	1.05.03.1.04.0007	Penanganan Pasca Bencana Provinsi						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	Jumlah Dokumen Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P) yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0009	Koordinasi Penanganan Pascabencana Provinsi						36.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi lintas perangkat daerah pada tahap perencanaan, pengalokasian sumber daya dan ketersediaan APBD, non APBD dan sumber pendanaan lainnya berdasarkan R3P melalui pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan lintas perangkat daerah dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Provinsi yang dilegalkan	1 Kegiatan		1 Kegiatan	0 Kegiatan	36.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Kegiatan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0012	Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Provinsi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Provinsi	Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat, dunia usaha dan Lembaga non Pemerintah lainnya yang terdaftar dan legal dalam penanganan pascabencana Provinsi	1 Lembaga		Lembaga	0 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Lembaga	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0013	Bimbingan Teknis Pasca Bencana Provinsi						40.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	Jumlah Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P)	60 Orang		60 Orang	75 Orang	40.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Orang	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0014	Fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana dengan memprioritaskan GEDSI (Gender Equality, Disability, and Social Inclusion)						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan koordinasi pengumpulan data penduduk di daerah rawan bencana yang terpilah dengan memprioritaskan GEDSI	Jumlah penduduk terpilah yang terdapat di daerah rawan bencana berbasis GEDSI	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0018	Penguatan Kelembagaan Bencana Daerah						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah dan dokumen Maklumat Pelayanan Penanggulangan Bencana yang sah dan legal	Jumlah Dokumen yang dilegalkan	1 Dokumen		Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0022	Penyusunan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan						9.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	Jumlah dan jenis Data dan Informasi Kebencanaan yang terintegrasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD)	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0023	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota						36.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan dan pengawasan dalam Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Sub Urusan Bencana Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) tahun	10 kabupaten /kota		10 kabupaten /kota	0 kabupaten/ kota	36.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		10 kabupaten /kota	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.04.0024	Kolaborasi Penanggulangan Bencana Lintas Sektor						65.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi atau kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	Jumlah Laporan Koordinasi atau Dokumen kerja sama antar lembaga dan sinergitas lintas sektor dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di seluruh tahapan (pra, saat dan pascabencana)	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana						***514.445.255,00***							***737.881.612,00***	
			999.Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	514.445.255,00						100 Persentase	737.881.612,00	
			999.Persentase dokumen kebencanaan yang telah ditetapkan dan masih berlaku	100 %		41.67 %	50 %	514.445.255,00						75 %	737.881.612,00	
			999.Persentase Ketangguhan Pra-Bencana	77.53 %		63.79 %	66.98 %	514.445.255,00						70.33 %	737.881.612,00	
	1.05.03.1.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						479.445.405,00					-		737.881.612,00	
		Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam Kesiapsiagaan menghadapi Bencana						479.445.405,00					-		737.881.612,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	167.499.560,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	1 Dokumen		Dokumen	Dokumen	0,00						Dokumen	0,00	
			Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	83 Kawasan		82 Kawasan	82 Kawasan	137.979.900,00						82 Kawasan	505.000.000,00	
			Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	60 Orang		30 Orang	Orang	48.984.405,00						120 Orang	0,00	
			Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	700 Orang		400 Orang	400 Orang	124.981.540,00						400 Orang	232.881.612,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	150 Orang		Orang	150 Orang	0,00						150 Orang	0,00	
	1.05.03.1.02.0013	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan bencana						137.979.900,00							505.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan rawan bencana dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota untuk pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana	Jumlah laporan yang memuat kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana	83 Kawasan		82 Kawasan	1 Laporan (82 Desa) Kawasan	137.979.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		82 Kawasan	505.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0022	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana						0,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalkan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0023	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana						124.981.540,00							232.881.612,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya uji mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana dan keberfungsian sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara dan aparatur di kawasan risiko bencana tinggi lintas Kabupaten/Kota yang terlibat geladi kesiapsiagaan mengetahui dan memahami mekanisme dan prosedur tetap (SOP) pengendalian operasi penanganan darurat bencana	700 Orang		400 Orang	200 Orang	124.981.540,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		400 Orang	232.881.612,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0024	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi						167.499.560,00							0,00	
		Tersedianya dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang sah dan legal	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalkan	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	167.499.560,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0027	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana						48.984.405,00							0,00	
		Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial personil TRC tingkat Provinsi untuk penanganan awal darurat bencana	Jumlah personil TRC tingkat Provinsi yang memiliki sertifikasi kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana	60 Orang		30 Orang	9 Orang	48.984.405,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120 Orang	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.02.0030	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana						0,00							0,00	
		Meningkatnya kemampuan dan keterampilan warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota dalam pencegahan dan mitigasi bencana	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang meningkat kemampuan dan ketrampilannya dalam pencegahan dan mitigasi bencana	150 Orang		Orang	150 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		150 Orang	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya Penanganan Bencana pada Saat Darurat Bencana						***373.500.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase penanganan tanggap darurat bencana	100 %		100 %	100 %	373.500.000,00						100 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.05.03.1.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						400.500.000,00					-		0,00	
		Menurunnya Jumlah Korban dan Kerugian akibat Bencana Alam Penanganan Darurat Bencana						400.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	3 Orang		3 Orang	3 Orang	0,00						3 Orang	0,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50000 Orang		50000 Orang	50000 Orang	346.500.000,00						50000 Orang	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.000.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.000.000,00						2 Laporan	0,00	
	1.05.03.1.03.0025	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana						27.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Upaya untuk Menemukan, Menolong, maupun Memindahkan Korban Bencana Dari Lokasi Bencana ke Tempat yang Aman	Jumlah Laporan Pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	27.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0026	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dalam penangananan keadaan darurat Provinsi						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya SDM Aparatur BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah Provinsi yang kompeten dalam penanganan keadaan darurat Provinsi	Jumlah Aparatur SDM BPBD Provinsi dan lintas perangkat daerah yang memiliki kemampuan penanganan keadaan darurat dalam aspek manajerial dan teknis	3 Orang		3 Orang	3 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		3 Orang	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0028	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana						346.500.000,00							0,00	
		Terdistribusinya Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	50000 Orang		50000 Orang	50000 Orang	346.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		50000 Orang	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0030	Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana						27.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Respon Cepat Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	27.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.03.0031	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengerahan dan Pengorganisasian Komando Penanganan Darurat Bencana Tingkat Provinsi,	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		2 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.03.1.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi						34.999.850,00					-		0,00	
		Meningkatnya Layanan Informasi Kebencanaan di Provinsi dan Kab/Kota						34.999.850,00					-		0,00	
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	34.999.850,00						-	0,00	
	1.05.03.1.01.0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Provinsi (Per Jenis Ancaman)						34.999.850,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi bagi warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dan aparatur di kawasan risiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota yang menerima sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi rawan bencana (per jenis ancaman) lintas Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	34.999.850,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya Kapasitas Aparatur dalam Kesiapsiagaan menghadapi Bencana						479.445.405,00					-		737.881.612,00	
			Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	-	0,00						-	0,00	
	1.05.03.1.02.0026	Pengelolaan Risiko Bencana						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan untuk mengatasi akar masalah risiko bencana berdasarkan hasil kajian risiko bencana di kawasan berisiko tinggi bencana lintas Kabupaten/Kota	Jumlah akar masalah risiko bencana lintas Kabupaten/Kota yang tertangani	-		-	1 Kegiatan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
93.	**1.05.04**	**PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN**						**156.917.649,00**							**748.656.000,00**	
		Meningkatnya Layanan Pencegahan Kebakaran						***129.917.649,00***							***748.656.000,00***	
			999.Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Kebakaran	100 Persentase		35.28 Persentase	52.92 Persentase	129.917.649,00						70.56 Persentase	748.656.000,00	
	1.05.04.1.01	Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran						129.917.649,00					-		748.656.000,00	
		Tersedianya Informasi Daerah Rawan Bahaya Kebakaran Permukiman						129.917.649,00					-		748.656.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	22.000.000,00						Dokumen	118.598.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	80.917.649,00						Dokumen	416.258.000,00	
			Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan		1 laporan	1 laporan	0,00						1 laporan	93.400.000,00	
	1.05.04.1.01.0012	Penyajian Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang Terintegrasi dan Valid	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Kejadian dan Dampak Kebakaran serta Penyelamatan yang terintegrasi dan Valid	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Dokumen	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.1.01.0018	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)						80.917.649,00							416.258.000,00	
		Tersedianya Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP) yang Sah dan Legal	Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	80.917.649,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Dokumen	416.258.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.1.01.0021	Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota						0,00							93.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Kompetensi Teknis Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	1 laporan		1 laporan	1 laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 laporan	93.400.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.1.01.0024	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						22.000.000,00							118.598.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran Melalui Media Sosial, Wahana Multi Media Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat Terkait Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	22.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Dokumen	118.598.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	1.05.04.1.02	Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran						27.000.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya Kinerja Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran di Kab/Kota						27.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	1.05.04.1.02.0007	Pembinaan dan Pengawasan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota						27.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Kegiatan Pendampingan dan Penguatan Kapasitas Penyelenggaraan Urusan Kebakaran di Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	27.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		1 Laporan	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran						***129.917.649,00***							***748.656.000,00***	
			999.Cakupan Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	27.000.000,00						100 Persentase	120.400.000,00	
		Tersedianya Informasi Daerah Rawan Bahaya Kebakaran Permukiman						129.917.649,00					-		748.656.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						Unit	0,00	
	1.05.04.1.01.0026	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal sesuai Standar Teknis Terkait	Jumlah Sarana dan Prasarana untuk Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		Unit	0,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Tersedianya Informasi Daerah Rawan Bahaya Kebakaran Permukiman						129.917.649,00					-		748.656.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	-		-	-	27.000.000,00						-	120.400.000,00	
	1.05.04.1.01.0023	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota						27.000.000,00							120.400.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	27.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	8.Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	-		-	120.400.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak						**98.128.151.736,45**							**81.037.070.088,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**95.456.792.136,45**							**76.631.342.275,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**95.456.792.136,45**							**76.631.342.275,00**	
94.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**35.287.123.326,45**							**45.359.004.577,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***34.281.134.136,45***							***40.596.154.577,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.38 Skor		81.09 Skor	81.90 Skor	34.281.134.136,45						82.72 Skor	40.596.154.577,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					ASN Lingkup DinsosP3A		466.700.000,00	
		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					ASN Lingkup DinsosP3A		466.700.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	9.875.000,00						1 Berita Acara	134.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.488.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.468.000,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.488.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.028.000,00						1 Dokumen	67.700.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.464.000,00						1 Dokumen	66.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.200.000,00						1 Laporan	56.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	47.850.000,00						1 Laporan	27.000.000,00	
		Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					ASN Lingkup DinsosP3A		466.700.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	9.875.000,00						1 Berita Acara	134.500.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.488.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	45.468.000,00						2 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.488.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.028.000,00						1 Dokumen	67.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.464.000,00						1 Dokumen	66.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.200.000,00						1 Laporan	56.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	47.850.000,00						1 Laporan	27.000.000,00	
	1.06.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						45.468.000,00							55.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	45.468.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	45.468.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						55.644.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.644.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						62.328.000,00							32.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	62.328.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	32.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						9.488.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.488.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						9.488.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.488.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.200.000,00							56.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	26 Laporan	15.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	56.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan		26 Laporan	26 Laporan	15.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		26 Laporan	56.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						47.850.000,00							27.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	47.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	27.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.875.000,00							134.500.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	9.875.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Berita Acara	134.500.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.805.581.436,45					ASN Lingkup Dinas SosialP3A		29.791.954.577,00	
		Tersediannya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah						27.805.581.436,45					ASN Lingkup Dinas SosialP3A		29.791.954.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.480.000,00						1 Dokumen	467.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.850.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.610.000,00						1 Laporan	33.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang/ Bulan		230 Orang/ Bulan	230 Orang/ Bulan	27.701.641.436,45						230 Orang/ Bulan	29.276.304.577,00	
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						27.805.581.436,45					ASN Lingkup Dinas SosialP3A		29.791.954.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.480.000,00						1 Dokumen	467.650.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.850.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.610.000,00						1 Laporan	33.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang/ Bulan		230 Orang/ Bulan	230 Orang/ Bulan	27.701.641.436,45						230 Orang/ Bulan	29.276.304.577,00	
	1.06.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						27.701.641.436,45							29.276.304.577,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang/ Bulan		230 Orang/ Bulan	230 Orang/ Bulan	27.701.641.436,45	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		230 Orang/ Bulan	29.276.304.577,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	66 Orang/ Bulan		58 Orang/ Bulan	230 Orang/ Bulan	27.701.641.436,45	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		62 Orang/ Bulan	29.276.304.577,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						24.960.000,00							125.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.960.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	125.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12.850.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	12.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						12.610.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.610.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	33.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						48.944.000,00					ASN Lingkup Dinas SosialP3A		110.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengeloaan administrasi dan pelaporan BMD						48.944.000,00					ASN Lingkup Dinas SosialP3A		110.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.944.000,00						1 Laporan	87.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	14.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	9.500.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						48.944.000,00					ASN Lingkup Dinas SosialP3A		110.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.944.000,00						1 Laporan	87.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	14.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	9.500.000,00	
	1.06.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							9.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	9.500.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							14.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	14.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						15.740.000,00							38.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	15.740.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Laporan	38.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	15.740.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	38.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					ASN Lingkup DinsosP3A		80.000.000,00	
		Meningkatnya kompetensi dan kinerja pegawai sesuai dengan tugas dan fungsinya						0,00					ASN Lingkup DinsosP3A		80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	35.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang		10 Orang	12 Orang	0,00						14 Orang	45.000.000,00	
	1.06.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	35.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18 Orang		10 Orang	12 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		14 Orang	45.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	3 Orang		3 Orang	12 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		3 Orang	45.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						959.194.390,00					ASN Lingkup DinsosP3A		1.598.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah						959.194.390,00					ASN Lingkup DinsosP3A		1.598.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00						1 Dokumen	244.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.205.750,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.800.000,00						1 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	599.560.000,00						1 Laporan	860.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.584.750,00						12 Paket	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	56.724.640,00						12 Paket	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.225.850,00						1 Paket	89.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.382.800,00						1 Paket	94.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.110.600,00						1 Paket	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya pelayanan administrasi umum secara tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						959.194.390,00					ASN Lingkup DinsosP3A		1.598.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00						1 Dokumen	244.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.205.750,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.800.000,00						1 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	599.560.000,00						1 Laporan	860.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.584.750,00						12 Paket	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	56.724.640,00						12 Paket	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.225.850,00						1 Paket	89.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.382.800,00						1 Paket	94.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.110.600,00						1 Paket	45.000.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.050.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	12.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Paket	18.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	12.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	18.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.110.600,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.110.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Paket	25.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	5.110.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	25.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.494.850,00							47.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	25.494.850,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Paket	47.500.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.165.500,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	35.165.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Paket	45.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	35.165.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	45.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						126.000.000,00							220.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	126.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	220.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						5.340.500,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	5.340.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Paket	8.500.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						34.800.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	45.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						544.520.000,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	544.520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	550.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	544.520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	550.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.205.750,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.205.750,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	12.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						138.500.000,00					ASN Lingkup DinsosP3A		2.951.500.000,00	
		Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah perangkat daerah						138.500.000,00					ASN Lingkup DinsosP3A		2.951.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	1.189.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	950.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	138.500.000,00						10 Unit	462.500.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien						138.500.000,00					ASN Lingkup DinsosP3A		2.951.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		4 Paket	12 Paket	0,00						10 Paket	1.189.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	950.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	350.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	138.500.000,00						10 Unit	462.500.000,00	
	1.06.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Unit	350.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							950.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Unit	950.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Unit	950.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							249.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Paket	249.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Paket	249.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						136.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	15 Unit	136.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Unit	200.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		10 Unit	15 Unit	136.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		17 Unit	200.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.273.392.500,00					ASN		7.482.350.000,00	
		Tersedianya layanan jasa penunjang secara tepat waktu, berkualitas, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						5.273.392.500,00					ASN		7.482.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	688.930.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.568.812.500,00						1 Laporan	6.357.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.650.000,00						12 Laporan	54.800.000,00	
		Tersedianya layanan penunjang dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						5.273.392.500,00					ASN		7.482.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	688.930.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.568.812.500,00						1 Laporan	6.357.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.650.000,00						12 Laporan	54.800.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.000.000,00							30.300.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	30.300.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6 Laporan	30.300.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						260.360.000,00							380.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	260.360.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	380.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	260.360.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6 Laporan	380.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	70.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6 Laporan	70.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.568.812.500,00							6.175.550.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	4.568.812.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	6.175.550.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.568.812.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	6.175.550.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						782.650.000,00					ASN Lingkup Dinas SosialP3A		2.878.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						782.650.000,00					ASN Lingkup Dinas SosialP3A		2.878.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	134.150.000,00						1 Unit	1.950.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	586.110.000,00						1 Unit	764.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	25.000.000,00						11 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.390.000,00						12 Unit	114.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpeliharanya barang milik daerah secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						782.650.000,00					ASN Lingkup Dinas SosialP3A		2.878.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	134.150.000,00						1 Unit	1.950.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	586.110.000,00						1 Unit	764.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit		22 Unit	22 Unit	25.000.000,00						22 Unit	50.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.390.000,00						12 Unit	114.000.000,00	
	1.06.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	22 Unit		22 Unit	5 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		22 Unit	50.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	5 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		11 Unit	50.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						407.820.000,00							235.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	15 Unit	407.820.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Unit	235.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	15 Unit	407.820.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Unit	235.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						13.200.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	25 Unit	13.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		30 Unit	50.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	25 Unit	13.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Unit	50.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						54.600.000,00							1.100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		3 Unit	5 Unit	54.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Unit	1.100.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	5 Unit	54.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Unit	1.100.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
95.	**1.06.02**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL**						**3.424.565.000,00**							**11.325.576.730,00**	
		Meningkatnya Kualitas kelembagaan Pelayanan Kesejahteraan Sosial oleh Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial						***3.424.565.000,00***							***11.325.576.730,00***	
			999.Persentase Lembaga di Bidang Kesejahteraan Sosial yang Melaksanakan Pelayanan Sosial sesuai Standar	78.5 %		75.5 %	76 %	3.424.565.000,00						76.5 %	11.325.576.730,00	
			999.Persentase SDM Kesejahteraan Sosial yang Aktif	13 %		5 %	7 %	3.424.565.000,00						9 %	11.325.576.730,00	
	1.06.02.1.01	Penerbitan Izin Pengumpulan Sumbangan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						5.585.000,00					BUMN dan BUMD		26.620.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Undian Gratis Berhadian dan Rekomendasi/Izin Pengumpulan atau Barang						5.585.000,00					BUMN dan BUMD		26.620.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.585.000,00						12 Dokumen	26.620.000,00	
	1.06.02.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang						5.585.000,00							26.620.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.585.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Dokumen	26.620.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.1.02	Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi						3.418.980.000,00					PSKS Lembaga (LKSA,LKSLU,LKSPD dll) dan PSKS Perorangan (TKSK,PSM,KARANG TARUNA,Sakti Peksos,Pordam,Tagana)		11.298.956.730,00	
		Meningkatnya Kompetensi SDM Kesos						3.418.980.000,00					PSKS Lembaga (LKSA,LKSLU,LKSPD dll) dan PSKS Perorangan (TKSK,PSM,KARANG TARUNA,Sakti Peksos,Pordam,Tagana)		11.298.956.730,00	
			Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	30 Badan Usaha		25 Badan Usaha	30 Badan Usaha	2.780.000,00						30 Badan Usaha	101.640.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	6 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	5.180.000,00						6 Layanan	55.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	15 Lembaga		15 Lembaga	15 Lembaga	12.900.000,00						15 Lembaga	160.622.200,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	75 Lembaga		55 Lembaga	60 Lembaga	3.305.000.000,00						65 Lembaga	10.650.694.521,00	
			Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	1 Orang		1 Orang	1 Orang	2.740.000,00						0 Orang	9,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	500 Orang		500 Orang	500 Orang	72.130.000,00						500 Orang	76.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	8.250.000,00						100 Orang	105.000.000,00	
			Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	6 Lembaga		5 Lembaga	6 Lembaga	0,00						6 Lembaga	40.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	90 Orang		90 Orang	90 Orang	10.000.000,00						90 Orang	110.000.000,00	
		Meningkatnya Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Lembaga Provinsi yang terfasilitasi						3.418.980.000,00					PSKS Lembaga (LKSA,LKSLU,LK SPD dll) dan PSKS Perorangan (TKS K,PSM,KARANG TARUNA,Sakti P eksos,Pordam,Ta gana)		11.298.956.730,00	
			Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	30 Badan Usaha		25 Badan Usaha	30 Badan Usaha	2.780.000,00						30 Badan Usaha	101.640.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	6 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	5.180.000,00						6 Layanan	55.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	15 Lembaga		15 Lembaga	15 Lembaga	12.900.000,00						15 Lembaga	160.622.200,00	
			Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	75 Lembaga		55 Lembaga	60 Lembaga	3.305.000.000,00						65 Lembaga	10.650.694.521,00	
			Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	1 Orang		1 Orang	1 Orang	2.740.000,00						0 Orang	9,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	500 Orang		500 Orang	500 Orang	72.130.000,00						500 Orang	76.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	8.250.000,00						100 Orang	105.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	6 Lembaga		5 Lembaga	6 Lembaga	0,00						6 Lembaga	40.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	90 Orang		90 Orang	90 Orang	10.000.000,00						90 Orang	110.000.000,00	
	1.06.02.1.02.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi						3.305.000.000,00							10.650.694.521,00	
		Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kesejahteraan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Provinsi	75 Lembaga		55 Lembaga	60 Lembaga	3.305.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		65 Lembaga	10.650.694.521,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.1.02.0006	Koordinasi Pengusulan Akreditasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi						12.900.000,00							160.622.200,00	
		Tersedianya Usulan Akreditasi Bagi Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan	15 Lembaga		15 Lembaga	15 Lembaga	12.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		15 Lembaga	160.622.200,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.1.02.0008	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi						8.250.000,00							105.000.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya	100 Orang		100 Orang	100 Orang	8.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		100 Orang	105.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.1.02.0011	Pengenalan, Penanaman dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial						72.130.000,00							76.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	Jumlah Orang yang Mengikuti dan Mendapatkan Pengenalan, Penanaman, dan Penghayatan Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial	500 Orang		500 Orang	500 Orang	72.130.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		500 Orang	76.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.1.02.0012	Pembinaan Koordinasi Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten/Kota						5.180.000,00							55.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial	Jumlah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Layanan Terpadu Kesejahteraan Sosial Sesuai Standar	6 Layanan		4 Layanan	4 Layanan	5.180.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6 Layanan	55.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.1.02.0013	Koordinasi Pengusulan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi						10.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Usulan Sertifikasi bagi Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesejahteraan Sosial Daerah Provinsi yang diusulkan Mendapat Sertifikasi	90 Orang		90 Orang	90 Orang	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		90 Orang	110.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.1.02.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan						2.780.000,00							101.640.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	Jumlah Badan Usaha yang Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan	30 Badan Usaha		25 Badan Usaha	30 Badan Usaha	2.780.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		30 Badan Usaha	101.640.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.1.02.0016	Fasilitasi Pengembangan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) Lintas Kabupaten/Kota						0,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Peran Puskesos sebagai Layanan Sosial Satu Pintu dan Hub Program Graduasi	Jumlah Puskesos Kabupaten/Kota yang Memberikan Layanan Sosial Satu Pintu dan Berperan sebagai Hub Program Graduasi	6 Lembaga		5 Lembaga	6 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6 Lembaga	40.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.02.1.02.0017	Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional						2.740.000,00							9,00	
		Terlaksananya Proses Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional	Jumlah Orang yang Diusulkan sebagai Calon Pahlawan Nasional	1 Orang		1 Orang	1 Orang	2.740.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		0 Orang	9,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
96.	**1.06.03**	**PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN**						**50.000.000,00**							**595.350.000,00**	
		Terlindunginya WNI migran korban tindak kekerasan						***50.000.000,00***							***595.350.000,00***	
			999.Persentase Warga Negara Korban Tindak Kekerasan yang terlindungi	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00						100 %	595.350.000,00	
	1.06.03.1.01	Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						50.000.000,00					WNI		595.350.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Pemulangan WN Migran Korban Tindak Kekerasan ke Daerah Kab/Kota Asal						50.000.000,00					WNI		595.350.000,00	
			Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang		40 Orang	40 Orang	50.000.000,00						40 Orang	595.350.000,00	
	1.06.03.1.01.0003	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal						50.000.000,00							595.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dalam dan Luar Negeri yang Dipulangkan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk Dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota	40 Orang		40 Orang	40 Orang	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		40 Orang	595.350.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
97.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**7.290.432.480,00**							**26.865.526.694,00**	
		Meningkatnya Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)						***119.057.500,00***							***1.042.000.000,00***	
			999.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (non SPM) yang tertangani dan berfungsi sosial kembali	95 %		87 %	89 %	119.057.500,00						91 %	1.042.000.000,00	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						119.057.500,00					PPKS		5.188.338.800,00	
		Meningkatnya Kualitas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) didalam Panti						119.057.500,00					PPKS		5.188.338.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	260.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	49.000.000,00						100 Orang	1.897.745.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	300 Orang		300 Orang	300 Orang	0,00						300 Orang	250.000.000,00	
			Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	300 Orang		0 Orang	150 Orang	0,00						200 Orang	170.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	5.057.500,00						250 Orang	305.000.000,00	
			Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	20 Orang		15 Orang	20 Orang	15.000.000,00						20 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	195.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar HIV AIDS dan Napza di RPTC						119.057.500,00					PPKS		5.188.338.800,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	260.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	49.000.000,00						100 Orang	1.897.745.100,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	300 Orang		300 Orang	300 Orang	0,00						300 Orang	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	300 Orang		0 Orang	150 Orang	0,00						200 Orang	170.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	5.057.500,00						250 Orang	305.000.000,00	
			Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	20 Orang		15 Orang	20 Orang	15.000.000,00						20 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	195.000.000,00	
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan						49.000.000,00							152.000.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	120 Orang	49.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		100 Orang	152.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang						5.057.500,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	100 Orang	5.057.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		250 Orang	55.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal						50.000.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		100 Orang	120.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.1.05.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA						0,00							260.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	260.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.1.05.0015	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS)						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Pemerlu Pelayanan Kesejateraan Sosial (PPKS) Kewenangan Provinsi	300 Orang		300 Orang	300 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		300 Orang	250.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.1.05.0017	Pelaksanaan Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah						0,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Sosial melalui Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	Jumlah orang yang mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi dalam penerapan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar Bidang Sosial di Daerah	300 Orang		0 Orang	150 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		200 Orang	170.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.1.05.0018	Pemulasaraan						15.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemulasaraan bagi penyandang disabilitas kewenangan provinsi	Jumlah Orang yang terpenuhi kebutuhan pemulasaraannya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA kewenangan provinsi	20 Orang		15 Orang	20 Orang	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		20 Orang	35.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Gelandangan & Pengemis Terantar dalam Panti						***1.333.100.000,00***							***3.521.268.604,00***	
			999.Persentase anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	1.333.100.000,00						100 %	3.521.268.604,00	
			999.Persentase Disabilitas terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	1.333.100.000,00						100 %	3.521.268.604,00	
			999.Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	1.333.100.000,00						100 %	3.521.268.604,00	
			999.Persentase Lanjut Usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	1.333.100.000,00						100 %	3.521.268.604,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti						1.653.712.550,00					Penyandang Disabilitas		7.172.617.604,00	
		Meningkatnya kualitas penanganan penyandang disabilitas terlantar						1.653.712.550,00					Penyandang Disabilitas		7.172.617.604,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	113.191.000,00						1 Dokumen	424.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	500 Orang		500 Orang	500 Orang	15.000.000,00						500 Orang	940.300.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	0,00						160 Orang	347.156.250,00	
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						0,00							121.686.875,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	121.686.875,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.1.01.0004	Penyediaan Alat Bantu						15.000.000,00							940.300.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	500 Orang		500 Orang	500 Orang	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		500 Orang	940.300.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar						88.100.000,00							350.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti						3.279.052.500,00					Anak Terlantar		6.774.880.290,00	
		Meningkatnya anak terlantar yang tertangani						3.279.052.500,00					Anak Terlantar		6.774.880.290,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	6500 Orang		3000 Orang	3000 Orang	1.230.000.000,00						5000 Orang	2.109.281.729,00	
	1.06.04.1.02.0020	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar						1.230.000.000,00							2.109.281.729,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	6500 Orang		3000 Orang	3000 Orang	1.230.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5000 Orang	2.109.281.729,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
98.	**1.06.05**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL**						**55.726.570.000,00**							**14.930.500.005,00**	
		Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar Penduduk sangat Miskin						***55.711.570.000,00***							***14.857.500.005,00***	
			999.Persentase Penerima Manfaat yang Terpenuhi Kebutuhan Dasar	55 Persentase		35 Persentase	40 Persentase	562.010.000,00						45 Persentase	5.407.500.000,00	
	1.06.05.1.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						55.711.570.000,00					Kelompok Masyarakat Rentan Miskin		14.857.500.005,00	
		Meningkatnya data fakir miskin yang termutakhirkan						55.711.570.000,00					Kelompok Masyarakat Rentan Miskin		14.857.500.005,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.130.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota		10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	35.000.000,00						10 Kab/Kota	1.907.500.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	900 Orang		600 Orang	750 Orang	505.880.000,00						800 Orang	3.000.000.000,00	
		Meningkatnya pendampingan peningkatan ekonomi fakir miskin						55.711.570.000,00					Kelompok Masyarakat Rentan Miskin		14.857.500.005,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.130.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota		10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	35.000.000,00						10 Kab/Kota	1.907.500.000,00	
			Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	900 Orang		600 Orang	750 Orang	505.880.000,00						800 Orang	3.000.000.000,00	
	1.06.05.1.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga						505.880.000,00							3.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penerima Manfaat (PM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Provinsi	900 Orang		600 Orang	250 Orang	505.880.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		800 Orang	3.000.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.1.02.0008	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Provinsi						35.000.000,00							1.907.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Aktif Melaksanakan Pemutakhiran Data Fakir Miskin	10 Kab/Kota		10 Kab/Kota	10 Kab/Kota	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		10 Kab/Kota	1.907.500.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.1.02.0010	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai						21.130.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.130.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Meningkatnya Perekonomian penduduk miskin yang menerima bantuan sosial						***55.711.570.000,00***							***14.857.500.005,00***	
			999.Pesentase Penerima manfaat yang meningkat kemandirian ekonomi	13 %		5 %	7 %	55.170.690.000,00						9 %	9.950.000.005,00	
		Meningkatnya data fakir miskin yang termutakhirkan						55.711.570.000,00					Kelompok Masyarakat Rentan Miskin		14.857.500.005,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.130.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	
			Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	400 Orang		250 Orang	250 Orang	52.500.000.000,00						300 Orang	2.750.000.005,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	850 Orang		550 Orang	650 Orang	2.649.560.000,00						750 Orang	6.500.000.000,00	
			Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	350 Orang		0 Orang	200 Orang	0,00						250 Orang	200.000.000,00	
		Meningkatnya pendampingan peningkatan ekonomi fakir miskin						55.711.570.000,00					Kelompok Masyarakat Rentan Miskin		14.857.500.005,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.130.000,00						1 Dokumen	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	400 Orang		250 Orang	250 Orang	52.500.000.000,00						300 Orang	2.750.000.005,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	850 Orang		550 Orang	650 Orang	2.649.560.000,00						750 Orang	6.500.000.000,00	
			Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	350 Orang		0 Orang	200 Orang	0,00						250 Orang	200.000.000,00	
	1.06.05.1.02.0003	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat						2.649.560.000,00							6.500.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Provinsi	850 Orang		550 Orang	650 Orang	2.649.560.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		750 Orang	6.500.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.1.02.0009	Fasilitasi pengembangan potensi pendamping Program Bantuan Sosial						0,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengembangan potensi bagi pendamping program bantuan sosial	Jumlah pendamping program bantuan sosial yang mendapatkan pengembangan potensi	350 Orang		0 Orang	200 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		250 Orang	200.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.1.02.0010	Penyelenggaraan Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai						21.130.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Program Bantuan Sosial Non Tunai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.130.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.05.1.02.0011	Fasilitasi Bantuan Stimulan Modal Usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota						52.500.000.000,00							2.750.000.005,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya fasilitasi bantuan stimulan modal usaha dan pendampingan bagi Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah keluarga fakir miskin yang memperoleh bantuan stimulan modal dan pendampingan usaha lintas daerah kabupaten/kota	400 Orang		250 Orang	6000 Orang	52.500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		300 Orang	2.750.000.005,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Terlindunginya anak dalam pengasuhan orang tua angkat						***15.000.000,00***							***73.000.000,00***	
			999.Persentase anak yang mendapat pengasuhan orang tua angkat	100 %		100 %	100 %	15.000.000,00						100 %	73.000.000,00	
	1.06.05.1.01	Pengangkatan Anak antar WNI dan Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						15.000.000,00					PPKS		73.000.000,00	
		Meningkatnya fasilitasi pengangkatan anak oleh orang tua asuh						15.000.000,00					PPKS		73.000.000,00	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	35 Orang		35 Orang	35 Orang	15.000.000,00						35 Orang	52.000.000,00	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	8 Orang		6 Orang	6 Orang	0,00						7 Orang	21.000.000,00	
	1.06.05.1.01.0001	Pengangkatan Anak antar WNI						15.000.000,00							52.000.000,00	
		Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Asuh/Oang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Asuh/Orang Tua Angkat Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	35 Orang		35 Orang	35 Orang	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		35 Orang	52.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.05.1.01.0002	Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal						0,00							21.000.000,00	
		Terlaksananya Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal Sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Orang Tua Tunggal sesuai Ketentuan yang Berlaku Kewenangan Provinsi	8 Orang		6 Orang	6 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		7 Orang	21.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
99.	**1.06.06**	**PROGRAM PENANGANAN BENCANA**						**449.212.500,00**							**3.869.818.366,00**	
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam						***449.212.500,00***							***3.869.818.366,00***	
			999.Persentase Korban Bencana Alam, Sosial dan/atau Non Alam yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya	100 %		100 %	100 %	449.212.500,00						100 %	3.869.818.366,00	
	1.06.06.1.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi						449.212.500,00					Kobran Bencana Alam dan Sosial		3.869.818.366,00	
		Meningkatnya Korban Bencana Alam dan Sosial yang tertangani						449.212.500,00					Kobran Bencana Alam dan Sosial		3.869.818.366,00	
			Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	400 Orang		400 Orang	400 Orang	0,00						400 Orang	120.000.000,00	
			Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	10 Daerah		10 Daerah	10 Daerah	0,00						10 Daerah	50.000.000,00	
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	88.000.000,00						5000 Orang	614.119.200,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	48.000.000,00						5000 Orang	647.246.400,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	182.400.000,00						5000 Orang	724.212.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	250 Orang		250 Orang	250 Orang	0,00						250 Orang	152.087.500,00	
			Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	85.000.000,00						5000 Orang	845.618.666,00	
			Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	200 Orang		150 Orang	150 Orang	30.812.500,00						200 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	15.000.000,00						5000 Orang	551.534.000,00	
			Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	40 Orang		0 Orang	40 Orang	0,00						40 Orang	65.000.000,00	
	1.06.06.1.01.0001	Penyediaan Permakanan						85.000.000,00							845.618.666,00	
		Terpenuhinya Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Pengungsi yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	85.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5000 Orang	845.618.666,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.1.01.0004	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan						182.400.000,00							724.212.600,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan Kewenangan Provinsi	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	182.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5000 Orang	724.212.600,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.1.01.0005	Pelayanan Dukungan Psikososial						88.000.000,00							614.119.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Pelayanan Dukungan Psikososial bagi Korban Bencana Kewenangan Provinsi	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Provinsi	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	88.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5000 Orang	614.119.200,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.1.01.0011	Penyediaan Sandang						48.000.000,00							647.246.400,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Pengungsi dalam Masa Tanggap Darurat Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Provinsi	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	48.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5000 Orang	647.246.400,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.1.01.0013	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi						15.000.000,00							551.534.000,00	
		Tersedianya Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Provinsi	5000 Orang		5000 Orang	5000 Orang	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5000 Orang	551.534.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.1.01.0016	Peningkatan Kompetensi Taruna Siaga Bencana (Tagana) Dalam Penanganan Bencana						30.812.500,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Kompetensi Tagana Dalam Penanganan Bencana	Jumlah Tagana yang Mendapatkan Peningkatan Kompetensi	200 Orang		150 Orang	150 Orang	30.812.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		200 Orang	100.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.1.01.0018	Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah						0,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi dan Edukasi penanggulangan Bencana pada Anak Usia Sekolah	Jumlah Anak Usia Sekolah yang Mendapatkan Edukasi penanggulangan Bencana pada lokasi rawan bencana	400 Orang		400 Orang	400 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		400 Orang	120.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.1.01.0019	Penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana						0,00							152.087.500,00	
		Terlaksananya penyuluhan sosial untuk sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) kepada masyarakat terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan bencana	Jumlah Orang yang mendapatkan penyuluhan sosial berupa sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) terkait penanggulangan bencana pada masyarakat di lokasi rawan	250 Orang		250 Orang	250 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		250 Orang	152.087.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.1.01.0020	Fasilitasi Pemetaan rawan konflik sosial						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi pemetaan rawan konflik sosial	Jumlah Daerah yang difasilitasi untuk melakukan pemetaan rawan konflik sosial	10 Daerah		10 Daerah	10 Daerah	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Daerah	50.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.06.1.01.0022	Peningkatan kapasitas tenaga Pelopor Perdamaian (Pordam) dalam penanganan korban bencana sosial dan non Alam						0,00							65.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas tenaga pelopor perdamaian dalam penanganan bencana sosial dan non Alam	Jumlah tenaga pelopor perdamaian yang mendapatkan peningkatan kapasitas	40 Orang		0 Orang	40 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		40 Orang	65.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
100.	**1.06.07**	**PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN**						**63.665.000,00**							**545.673.993,00**	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Taman Makam Pahlawan						***63.665.000,00***							***545.673.993,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Indeks Kepuasan Masyarakat	90 %		86 %	87 %	63.665.000,00						88 %	545.673.993,00	
	1.06.07.1.01	Pengelolaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						63.665.000,00					Kelompok Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum		545.673.993,00	
		Terpeliharanya TMP Nasional						63.665.000,00					Kelompok Masyarakat, Pelajar, Mahasiswa dan Masyarakat Umum		545.673.993,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	221.137.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	95.000.000,00	
			Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam		1 Makam	1 Makam	49.765.000,00						1 Makam	112.455.000,00	
			Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	500 Orang		500 Orang	500 Orang	13.900.000,00						500 Orang	117.081.493,00	
	1.06.07.1.01.0001	Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						0,00							221.137.500,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	221.137.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.07.1.01.0002	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						49.765.000,00							112.455.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharannya pada Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Makam		1 Makam	1 Makam	49.765.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Makam	112.455.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.07.1.01.0003	Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						0,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Laporan	95.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	1.06.07.1.01.0004	Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi						13.900.000,00							117.081.493,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	Jumlah orang yang diberikan Pelayanan Ziarah dan Studi di Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi	500 Orang		500 Orang	500 Orang	13.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		500 Orang	117.081.493,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.671.359.600,00**							**4.405.727.813,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**2.671.359.600,00**							**4.405.727.813,00**	
101.	**2.08.02**	**PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**						**67.597.500,00**							**792.973.125,00**	
		Meningkatnya kualitas dan efektivitas penyelenggaraan PUG dan peran perempuan dalam pembangunan						***67.597.500,00***							***792.973.125,00***	
			999.Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	15 Persentase		7 Persentase	9 Persentase	67.597.500,00						11 Persentase	792.973.125,00	
			999.Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	81.84 %		72.64 %	74.94 %	67.597.500,00						77.24 %	792.973.125,00	
	2.08.02.1.01	Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Provinsi						67.597.500,00					-		668.779.997,00	
		Meningkatnya Kapasitas SDM OPD dalam Menyusun Dokumen PPRG						67.597.500,00					-		668.779.997,00	
			Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Provinsi	-		-	-	0,00						-	372.579.385,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	-		-	-	0,00						-	49.677.252,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-		-	-	67.597.500,00						-	85.072.293,00	
			Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi dan kab/kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	0,00						-	161.451.067,00	
	2.08.02.1.01.0013	Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG kewenangan Provinsi						67.597.500,00							85.072.293,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	-		-	40 Lembaga	67.597.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	85.072.293,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.01.0014	Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah Penggerak PUG Tingkat Kab/Kota						0,00							161.451.067,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG bagi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi dan Perangkat Daerah Penggerak PUG Tingkat Kab/Kota	Jumlah SDM Perangkat Daerah Provinsi dan kab/kota yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	161.451.067,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.01.0015	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi						0,00							49.677.252,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan PUG kewenangan provinsi	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	49.677.252,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.01.0016	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi						0,00							372.579.385,00	
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan PUG Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan PUG di tingkat Provinsi	-		-	1 Kebijakan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	372.579.385,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi KeMasyarakatan Kewenangan Provinsi						0,00						-	124.193.128,00	
		Meningkatnya partisipasi dan kapasitas perempuan dalam organisasi kemasyarakatan di bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi						0,00						-	124.193.128,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	-	0,00						-	124.193.128,00	
			Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.08.02.1.02.0010	Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi						0,00							124.193.128,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial, dan/atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah lembaga masyarakat dan pemerintah tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	-		-	40 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	124.193.128,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.02.1.02.0011	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis dan Pendampingan SDM pemberdayaan perempuan di bidang politik, atau hukum, atau sosial, dan atau ekonomi Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM organisasi kemasyarakatan, perempuan potensial, perempuan penyintas kekerasan dan atau rentan lainnya yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
102.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**255.969.600,00**							**1.270.493.438,00**	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						***147.449.600,00***							***788.149.688,00***	
			999.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		100 %	100 %	147.449.600,00						100 %	788.149.688,00	
			999.Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	8.29 per 100.000 penduduk		10.71 per 100.000 penduduk	10.04 per 100.000 penduduk	147.449.600,00						9.42 per 100.000 penduduk	788.149.688,00	
	2.08.03.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan yang melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						110.717.500,00					-		643.860.000,00	
		Meningkatnya efektivitas pencegahan kekerasan terhadap perempuan melalui koordinasi dan keterlibatan para pihak di tingkat provinsi dan kabupaten/kota						110.717.500,00					-		643.860.000,00	
			Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	88.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat provinsi	-		-	-	110.717.500,00						-	441.000.000,00	
			Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	0,00						-	76.072.500,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	38.587.500,00	
	2.08.03.1.01.0008	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi						110.717.500,00							441.000.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat provinsi	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) tingkat provinsi	-		-	10 Kegiatan	110.717.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	441.000.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.01.0009	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi						0,00							38.587.500,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	38.587.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.01.0011	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi						0,00							76.072.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-		-	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	76.072.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.01.0012	Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi						0,00							88.200.000,00	
		Tersusunnya kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan (KtP) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) Kewenangan Provinsi	-		-	1 Kebijakan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	88.200.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						36.732.100,00					-		182.877.188,00	
		Meningkatnya kapasitas dan efektivitas lembaga layanan perlindungan perempuan di tingkat provinsi						36.732.100,00					-		182.877.188,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	0,00						-	50.577.188,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	-	0,00						-	38.587.500,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	-	36.732.100,00						-	93.712.500,00	
	2.08.03.1.03.0010	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						0,00							50.577.188,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	50.577.188,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.03.0012	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi						0,00							38.587.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	38.587.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.03.1.03.0013	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi						36.732.100,00							93.712.500,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan	-		-	30 Orang	36.732.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	93.712.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
103.	**2.08.04**	**PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA**						**1.500.000.000,00**							**335.711.250,00**	
		Meningkatnya Kualitas Keluarga dalam Mendukung Kesetaraan Gender, Pemenuhan Hak, serta Perlindungan Perempuan dan Anak						***1.500.000.000,00***							***335.711.250,00***	
			999.Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang Berperspektif Gender dan Hak Anak Sesuai Standar	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	1.500.000.000,00						2 Lembaga	335.711.250,00	
	2.08.04.1.01	Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						1.500.000.000,00					-		203.411.250,00	
		Terlaksananya peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak kewenangan provinsi						1.500.000.000,00					-		203.411.250,00	
			Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Kebijakan		1 Kebijakan	1 Kebijakan	0,00						1 Kebijakan	165.375.000,00	
			Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	1.500.000.000,00						10 Lembaga	38.036.250,00	
	2.08.04.1.01.0006	Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						0,00							165.375.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Kebijakan mengenai peningkatan kualitas keluarga untuk Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kebijakan yang disusun mengenai peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	1 Kebijakan		1 Kebijakan	1 Kebijakan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Kebijakan	165.375.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.04.1.01.0007	Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota						1.500.000.000,00							38.036.250,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan yang mendapatkan Advokasi dan sosialisasi peningkatan kualitas keluarga Kewenangan Provinsi dan Lintas Kabupaten/Kota	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	1.500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Lembaga	38.036.250,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						0,00						-	132.300.000,00	
		Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak Kewenangan Provinsi						0,00						-	132.300.000,00	
			Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	38.587.500,00	
			Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	0,00						10 Lembaga	93.712.500,00	
	2.08.04.1.02.0004	monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						0,00							38.587.500,00	
		Terlaksananya monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil monitoring evaluasi dan pelaporan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	38.587.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.04.1.02.0007	peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi						0,00							93.712.500,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapatkan peningkatan kapasitas	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Lembaga	93.712.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
104.	**2.08.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK**						**54.202.500,00**							**127.338.750,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Data Gender dan Anak						***54.202.500,00***							***127.338.750,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Tingkat Pemanfaatan Data Gender dan Anak dalam Perencanaan, Evaluasi dan/atau Penyusunan Kebijakan	100 %		98.95 %	99.94 %	54.202.500,00						100 %	127.338.750,00	
		Meningkatnya ketersediaan dan keterpaduan data gender dan anak yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dalam kelembagaan data tingkat provinsi						54.202.500,00					-		127.338.750,00	
			Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	50 Lembaga		50 Lembaga	50 Lembaga	0,00						50 Lembaga	50.163.750,00	
	2.08.05.1.01.0004	Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak						0,00							50.163.750,00	
		Terlaksananya Advokasi dan penguatan jejaring lintas sektor dalam penyediaan data gender dan anak	Jumlah stakeholder yang diadvokasi dan berpartisipasi dalam penyediaan data gender dna anak	50 Lembaga		50 Lembaga	50 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Lembaga	50.163.750,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.05.1.01	Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Provinsi						54.202.500,00					-		127.338.750,00	
		Meningkatnya ketersediaan dan keterpaduan data gender dan anak yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi dalam kelembagaan data tingkat provinsi						54.202.500,00					-		127.338.750,00	
			Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	-		-	-	54.202.500,00						-	77.175.000,00	
	2.08.05.1.01.0007	Penyediaan, Penyajian, dan Pemanfaatan Data Gender dan Anak tingkat provinsi						54.202.500,00							77.175.000,00	
		Tersedianya Data Gender dan Anak tingkat provinsi	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak tingkat provinsi yang Tersedia	-		-	1 Dokumen	54.202.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	77.175.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
105.	**2.08.06**	**PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)**						**190.475.000,00**							**1.250.235.000,00**	
		Terjaminnya pemenuhan hak anak semua secara komprehensif						***190.475.000,00***							***1.250.235.000,00***	
			999.Indeks Pemenuhan Hak Anak (IPHA)	62.29 Indeks		59.86 Indeks	60.46 Indeks	190.475.000,00						61.06 Indeks	1.250.235.000,00	
	2.08.06.1.01	Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						94.800.000,00					-		569.651.439,00	
		Terlaksananya Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Provinsi						94.800.000,00					-		569.651.439,00	
			Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	-		-	-	94.800.000,00						-	149.908.274,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan provinsi	-		-	-	0,00						-	44.972.482,00	
			Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	374.770.683,00	
	2.08.06.1.01.0009	Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan Provinsi						0,00							374.770.683,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah pemangku kepentingan tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	-		-	250 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	374.770.683,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.01.0011	Penyusunan Kebijakan terkait Penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi						94.800.000,00							149.908.274,00	
		Tersusunnya kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan terkait penyelenggaraan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak di tingkat provinsi	-		-	1 Kebijakan	94.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	149.908.274,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.01.0012	Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan provinsi						0,00							44.972.482,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak kewenangan provinsi	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	44.972.482,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.02	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						95.675.000,00					-		680.583.561,00	
		Terlaksananya Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						95.675.000,00					-		680.583.561,00	
			Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	110.932.122,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	52.467.896,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	-	0,00						-	517.183.543,00	
			Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	-	95.675.000,00						-	0,00	
	2.08.06.1.02.0013	Kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						0,00							110.932.122,00	
		Terlaksananya kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah kerjasama antar lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	110.932.122,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.02.0014	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						0,00							52.467.896,00	
		Terlaksananya pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	52.467.896,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.02.0015	Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						0,00							517.183.543,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga tingkat provinsi yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi (lembaga pemerintah dan non pemerintah)	-		-	35 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	517.183.543,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.06.1.02.0016	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi						95.675.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM lembaga penyedia layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Provinsi yang mendapatkan bimbingan teknis dan pendampingan.	-		-	75 Orang	95.675.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
106.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**852.180.000,00**							**1.782.742.500,00**	
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Esploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak						***711.635.000,00***							***1.001.070.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	66.74 Indeks		64.13 Indeks	64.78 Indeks	711.635.000,00						65.42 Indeks	1.001.070.000,00	
			999.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	711.635.000,00						100 Persentase	1.001.070.000,00	
	2.08.07.1.01	Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						665.000.000,00					-		753.007.500,00	
		Menurunnya kekerasan terhadap anak						665.000.000,00					-		753.007.500,00	
			Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	71.662.500,00	
			Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Provinsi	-		-	-	165.000.000,00						-	418.950.000,00	
			Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	500.000.000,00						-	220.500.000,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	-	0,00						-	41.895.000,00	
	2.08.07.1.01.0011	Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan Kewenangan Provinsi						165.000.000,00							418.950.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) kepada pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan di tingkat Provinsi	Jumlah kegiatan advokasi dan sosialisasi pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) tingkat Provinsi	-		-	10 Kegiatan	165.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-	-	-	418.950.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.01.0012	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi						0,00							41.895.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Kewenangan Provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	-	-	41.895.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.1.01.0013	Kerjasama pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi						500.000.000,00							220.500.000,00	
		Terlaksananya kerjasama para pihak termasuk pemerintah dan lembaga non pemerintah termasuk lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kerjasama yang melibatkan para pihak baik pemerintah maupun lembaga pemerintah dan lembaga masyarakat dalam pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) di tingkat Provinsi atau lintas Kabupaten/Kota	-		-	3 Dokumen	500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	220.500.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.01.0014	Penyusunan kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi						0,00							71.662.500,00	
		Tersusunnya kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	Jumlah kebijakan pencegahan Kekerasan terhadap Anak (KtA) Kewenangan Provinsi	-		-	1 Kebijakan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	71.662.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.03	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						46.635.000,00					-		319.725.000,00	
		Meningkatnya kapasitas dan jangkauan layanan perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus di tingkat provinsi dan antar kabupaten/kota.						46.635.000,00					-		319.725.000,00	
			Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	0,00						-	71.662.500,00	
			Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	0,00						-	82.687.500,00	
			Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	-	46.635.000,00						-	165.375.000,00	
	2.08.07.1.03.0014	Kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						0,00							71.662.500,00	
		Terlaksananya kerjasama Antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kerjasama antar Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	71.662.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.03.0016	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi						0,00							82.687.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus kewenangan provinsi	Jumlah laporan hasil pemantauan dan evaluasi kegiatan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	82.687.500,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
	2.08.07.1.03.0017	Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi						46.635.000,00							165.375.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan teknis dan pendampingan SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah SDM Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	-		-	60 Orang	46.635.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	165.375.000,00	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi						**440.639.980,00**							**9.075.257.404,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**440.639.980,00**							**9.075.257.404,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**440.639.980,00**							**9.075.257.404,00**	
107.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**35.287.123.326,45**							**45.359.004.577,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***200.395.010,00***							***665.500.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.38 Skor		81.09 Skor	81.90 Skor	200.395.010,00						82.72 Skor	665.500.000,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.028.000,00						1 Dokumen	67.700.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.464.000,00						1 Dokumen	66.500.000,00	
		Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.028.000,00						1 Dokumen	67.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.464.000,00						1 Dokumen	66.500.000,00	
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	6.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	6.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
		Tersediannya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.480.000,00						1 Dokumen	467.650.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.480.000,00						1 Dokumen	467.650.000,00	
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						4.440.000,00							33.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	33.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengeloaan administrasi dan pelaporan BMD						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.944.000,00						1 Laporan	87.000.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.944.000,00						1 Laporan	87.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						3.600.000,00							7.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	7.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	7.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00						1 Dokumen	244.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	599.560.000,00						1 Laporan	860.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.584.750,00						12 Paket	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	56.724.640,00						12 Paket	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.225.850,00						1 Paket	89.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.382.800,00						1 Paket	94.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan administrasi umum secara tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00						1 Dokumen	244.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	599.560.000,00						1 Laporan	860.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.584.750,00						12 Paket	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	56.724.640,00						12 Paket	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.225.850,00						1 Paket	89.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.382.800,00						1 Paket	94.000.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.535.000,00							13.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	6.535.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	13.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.535.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	13.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.813.100,00							13.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.813.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	13.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.725.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.725.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	6.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	1.725.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	6.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.800.000,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						6.611.910,00							15.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	6.611.910,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	15.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						8.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
		Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah perangkat daerah						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	1.189.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	138.500.000,00						10 Unit	462.500.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		4 Paket	12 Paket	0,00						10 Paket	1.189.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	138.500.000,00						10 Unit	462.500.000,00	
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							140.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	140.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	140.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							67.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		10 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Unit	67.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	67.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
		Tersedianya layanan jasa penunjang secara tepat waktu, berkualitas, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	688.930.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.568.812.500,00						1 Laporan	6.357.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.650.000,00						12 Laporan	54.800.000,00	
		Tersedianya layanan penunjang dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	688.930.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.568.812.500,00						1 Laporan	6.357.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.650.000,00						12 Laporan	54.800.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	3.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	3.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						51.020.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	51.020.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	120.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	51.020.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	120.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	25.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	134.150.000,00						1 Unit	1.950.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	586.110.000,00						1 Unit	764.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.390.000,00						12 Unit	114.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	134.150.000,00						1 Unit	1.950.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	586.110.000,00						1 Unit	764.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.390.000,00						12 Unit	114.000.000,00	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.620.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	5 Unit	25.620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	120.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	5 Unit	25.620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	120.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.180.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	10 Unit	6.180.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	10.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	10 Unit	6.180.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	10.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						79.550.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	2 Unit	79.550.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	150.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		3 Unit	2 Unit	79.550.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	150.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
108.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**7.290.432.480,00**							**26.865.526.694,00**	
		Meningkatnya Keberfungsian Sosial Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)						***0,00***							***4.146.338.800,00***	
			999.Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) (non SPM) yang tertangani dan berfungsi sosial kembali	95 %		87 %	89 %	0,00						91 %	4.146.338.800,00	
	1.06.04.1.05	Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti						119.057.500,00					-		5.188.338.800,00	
		Meningkatnya Kualitas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) didalam Panti						119.057.500,00					-		5.188.338.800,00	
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	1.870.093.700,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	0,00						250 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	49.000.000,00						100 Orang	1.897.745.100,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	5.057.500,00						250 Orang	305.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	0,00						250 Orang	65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	55.000.000,00	
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	195.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	0,00						250 Orang	15.500.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	0,00						250 Orang	40.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di luar HIV AIDS dan Napza di RPTC						119.057.500,00					-		5.188.338.800,00	
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	1.870.093.700,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	0,00						250 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	49.000.000,00						100 Orang	1.897.745.100,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	5.057.500,00						250 Orang	305.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	0,00						250 Orang	65.000.000,00	
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	55.000.000,00	
			Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang		100 Orang	100 Orang	50.000.000,00						100 Orang	195.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	0,00						250 Orang	15.500.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	250 Orang	0,00						250 Orang	40.000.000,00	
	1.06.04.1.05.0001	Penyediaan Permakanan						0,00							1.745.745.100,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	1.745.745.100,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.05.0002	Penyediaan Sandang						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	100 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Orang	250.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.05.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses						0,00							65.000.000,00	
		Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	100 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Orang	65.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.05.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						0,00							30.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	100 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Orang	30.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.05.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						0,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	100 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Orang	40.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.05.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						0,00							15.500.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	250 Orang		250 Orang	100 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Orang	15.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.05.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar						0,00							1.870.093.700,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	1.870.093.700,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.05.0010	Pemulangan ke Daerah Asal						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Provinsi yang Dipulangkan ke Daerah Asal	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	75.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.05.0014	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						0,00							55.000.000,00	
		Terpenuhinya orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS dan NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	55.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Gelandangan & Pengemis Terantar dalam Panti						***240.244.970,00***							***4.061.918.604,00***	
			999.Persentase anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	240.244.970,00						100 %	4.061.918.604,00	
			999.Persentase Disabilitas terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	240.244.970,00						100 %	4.061.918.604,00	
			999.Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	240.244.970,00						100 %	4.061.918.604,00	
			999.Persentase Lanjut Usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	240.244.970,00						100 %	4.061.918.604,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti						1.653.712.550,00					PPKS		7.172.617.604,00	
		Meningkatnya kualitas penanganan penyandang disabilitas terlantar						1.653.712.550,00					PPKS		7.172.617.604,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	0,00						160 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	155.125.000,00						160 Orang	464.379.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	1.283.500.000,00						160 Orang	3.450.100.229,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	30.000.000,00						160 Orang	326.988.125,00	
			Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	50 orang		50 orang	50 orang	0,00						50 orang	862.694.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	0,00						160 Orang	42.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	33.800.000,00						160 Orang	55.000.000,00	
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan						0,00							973.700.229,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Labuapi || Desa Bengkel || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	973.700.229,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang						0,00							121.686.875,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	121.686.875,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						0,00							79.337.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	79.337.500,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	15.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						0,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	12.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.01.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						0,00							10.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Labuapi || Desa Bengkel || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Orang	10.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						0,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	11.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.01.0016	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Disabilitas Terlantar Kewenangan Provinsi	50 Orang		50 Orang	40 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		50 Orang	150.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.01.0020	Fasilitasi Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan						0,00							862.694.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional bagi Kemandirian Ekonomi Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan	Jumlah Penyandang Disabilitas Miskin dan Rentan yang Mendapatkan Pemberdayaan dan Pelatihan Vokasional untuk Kemandirian Ekonomi	50 orang		50 orang	50 orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Labuapi || Desa Bengkel || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		50 orang	862.694.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.04	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti						240.244.970,00					-		1.901.500.000,00	
		Meningkatnya Gelandangan dan Pengemis terlantar yang tertangani						240.244.970,00					-		1.901.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	8.000.000,00						40 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	0,00						40 Orang	550.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang		10 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	0,00						40 Orang	35.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	5.719.110,00						40 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	146.525.000,00						40 Orang	665.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	33.750.000,00						40 Orang	176.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	23.450.860,00						40 Orang	120.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	22.800.000,00						40 Orang	15.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	0,00						40 Orang	60.000.000,00	
	1.06.04.1.04.0001	Penyediaan Permakanan						146.525.000,00							665.500.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	146.525.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	665.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.04.0002	Penyediaan Sandang						33.750.000,00							176.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	33.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	176.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.04.0003	Penyediaan Asrama/Wisma yang Mudah Diakses						23.450.860,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama/Wisma Layak Huni Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	23.450.860,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	120.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.04.0004	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						5.719.110,00							25.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan pemenuhan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	5.719.110,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	25.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.04.0005	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	60.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.04.0006	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						22.800.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	22.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	15.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.04.0007	Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar						0,00							550.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Diberikan Bimbingan Keterampilan Dasar Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	550.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.04.0009	Akses Kelayanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						0,00							60.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	20 Orang		10 Orang	40 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Orang	60.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.04.0010	Pemulangan ke Daerah Asal						8.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Gelandangan dan Pengemis/Keluarga ke Daerah Asal Kewenangan Provinsi	Jumlah Gelandangan dan Pengemis/Keluarga yang Dipulangkan ke Daerah asal Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	40 Orang	8.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	90.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.04.0011	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis Terlantar di dalam Panti						0,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.04.1.04.0013	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis						0,00							50.000.000,00	
		TTerpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Gelandangan dan Pengemis Kewenangan Provinsi	50 Orang		50 Orang	40 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
	1.06.04.1.04.0015	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						0,00							35.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	40 Orang		40 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Orang	35.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Remaja Karya Wanita dan Penyandang Disabilitas Mirah Adi
		Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika						**1.449.545.800,00**							**4.578.840.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.449.545.800,00**							**4.578.840.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**1.449.545.800,00**							**4.578.840.000,00**	
109.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**35.287.123.326,45**							**45.359.004.577,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***166.348.800,00***							***852.050.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.38 Skor		81.09 Skor	81.90 Skor	166.348.800,00						82.72 Skor	852.050.000,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.028.000,00						1 Dokumen	67.700.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.464.000,00						1 Dokumen	66.500.000,00	
		Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.028.000,00						1 Dokumen	67.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.464.000,00						1 Dokumen	66.500.000,00	
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
		Tersediannya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.480.000,00						1 Dokumen	467.650.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.480.000,00						1 Dokumen	467.650.000,00	
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						6.000.000,00							80.550.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	80.550.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengeloaan administrasi dan pelaporan BMD						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.944.000,00						1 Laporan	87.000.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.944.000,00						1 Laporan	87.000.000,00	
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						12.414.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	12.414.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	10.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.414.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00						1 Dokumen	244.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	599.560.000,00						1 Laporan	860.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.584.750,00						12 Paket	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	56.724.640,00						12 Paket	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.225.850,00						1 Paket	89.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.382.800,00						1 Paket	94.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.110.600,00						1 Paket	45.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan administrasi umum secara tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00						1 Dokumen	244.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	599.560.000,00						1 Laporan	860.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.584.750,00						12 Paket	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	56.724.640,00						12 Paket	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.225.850,00						1 Paket	89.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.382.800,00						1 Paket	94.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.110.600,00						1 Paket	45.000.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.096.500,00							17.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	2.096.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	17.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.096.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	17.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	5.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.042.700,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.042.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	12.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.085.600,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.085.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	10.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	3.085.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	20.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
		Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah perangkat daerah						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	1.189.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	138.500.000,00						10 Unit	462.500.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	1.189.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	138.500.000,00						10 Unit	462.500.000,00	
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		4 Paket	6 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	250.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	6 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	250.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		10 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Unit	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
		Tersedianya layanan jasa penunjang secara tepat waktu, berkualitas, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	688.930.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.568.812.500,00						1 Laporan	6.357.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.650.000,00						12 Laporan	54.800.000,00	
		Tersedianya layanan penunjang dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	688.930.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.568.812.500,00						1 Laporan	6.357.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.650.000,00						12 Laporan	54.800.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						650.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	6.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	6.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						98.400.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	98.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	135.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	98.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	135.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	40.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	40.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	134.150.000,00						1 Unit	1.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	586.110.000,00						1 Unit	764.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.390.000,00						12 Unit	114.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	134.150.000,00						1 Unit	1.950.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	586.110.000,00						1 Unit	764.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.390.000,00						12 Unit	114.000.000,00	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						36.000.000,00							99.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	6 Unit	36.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	99.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	6 Unit	36.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	99.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.660.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	5 Unit	3.660.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	12.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	5 Unit	3.660.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	12.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	100.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
110.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**7.290.432.480,00**							**26.865.526.694,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Gelandangan & Pengemis Terantar dalam Panti						***1.283.197.000,00***							***3.659.290.000,00***	
			999.Persentase anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	1.283.197.000,00						100 %	3.659.290.000,00	
			999.Persentase Disabilitas terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	1.283.197.000,00						100 %	3.659.290.000,00	
			999.Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	1.283.197.000,00						100 %	3.659.290.000,00	
			999.Persentase Lanjut Usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	1.283.197.000,00						100 %	3.659.290.000,00	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						1.998.364.960,00					PPKS		5.828.190.000,00	
		Meningkatnya Lanjut Usia terlantar yang tertangani						1.998.364.960,00					PPKS		5.828.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	132.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	4.000.000,00						130 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	30 Orang		20 Orang	25 Orang	1.000.000,00						30 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang		20 Orang	20 Orang	22.000.000,00						25 Orang	45.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	32.972.960,00						130 Orang	79.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	33.029.800,00						130 Orang	230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	1.559.220.000,00						130 Orang	4.325.600.000,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	43 Orang		25 Orang	27 Orang	0,00						39 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	86.412.000,00						130 Orang	385.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	112.130.200,00						130 Orang	244.840.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	17 Orang		20 Orang	20 Orang	29.200.000,00						20 Orang	70.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	7.200.000,00						130 Orang	44.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	91.200.000,00						130 Orang	82.000.000,00	
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan						969.345.000,00							2.699.950.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	80 Orang	969.345.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	2.699.950.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang						50.337.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	80 Orang	50.337.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	250.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						105.995.200,00							144.840.000,00	
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	80 Orang	105.995.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	144.840.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu						0,00							40.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	30 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		30 Orang	40.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						25.619.800,00							160.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	80 Orang	25.619.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	160.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						62.400.000,00							52.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	80 Orang	62.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	52.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						4.800.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	80 Orang	4.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	25.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						12.000.000,00							26.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang		20 Orang	13 Orang	12.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		25 Orang	26.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						28.500.000,00							46.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	80 Orang	28.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	46.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan						24.200.000,00							55.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	17 Orang		20 Orang	15 Orang	24.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		20 Orang	55.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar						0,00							15.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Orang	15.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar						0,00							30.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	80 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	30.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						0,00							76.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	76.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
	1.06.04.1.03.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar						0,00							39.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	43 Orang		25 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		39 Orang	39.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Mandalika
		Perlindungan Perempuan dan Anak						**2.558.590.750,00**							**6.668.414.811,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.309.525.750,00**							**5.514.648.561,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**2.309.525.750,00**							**5.514.648.561,00**	
111.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**35.287.123.326,45**							**45.359.004.577,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***260.473.250,00***							***844.050.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.38 Skor		81.09 Skor	81.90 Skor	260.473.250,00						82.72 Skor	844.050.000,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.028.000,00						1 Dokumen	67.700.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.464.000,00						1 Dokumen	66.500.000,00	
		Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.028.000,00						1 Dokumen	67.700.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.464.000,00						1 Dokumen	66.500.000,00	
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						18.120.000,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.500.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
		Tersediannya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.480.000,00						1 Dokumen	467.650.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.480.000,00						1 Dokumen	467.650.000,00	
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						20.520.000,00							60.550.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	60.550.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengeloaan administrasi dan pelaporan BMD						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.944.000,00						1 Laporan	87.000.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.944.000,00						1 Laporan	87.000.000,00	
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						3.600.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	10.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00						1 Dokumen	244.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	599.560.000,00						1 Laporan	860.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.584.750,00						12 Paket	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	56.724.640,00						12 Paket	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.225.850,00						1 Paket	89.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.382.800,00						1 Paket	94.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.110.600,00						1 Paket	45.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan administrasi umum secara tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00						1 Dokumen	244.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	599.560.000,00						1 Laporan	860.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.584.750,00						12 Paket	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	56.724.640,00						12 Paket	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.225.850,00						1 Paket	89.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.382.800,00						1 Paket	94.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.110.600,00						1 Paket	45.000.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.314.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	8.314.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	15.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	8.314.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	15.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	5.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.526.000,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	6.526.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	12.500.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							11.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	11.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	11.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.663.250,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.663.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	16.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	70.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	3 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	70.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
		Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah perangkat daerah						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	1.189.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	138.500.000,00						10 Unit	462.500.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	1.189.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	138.500.000,00						10 Unit	462.500.000,00	
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	120.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	120.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		10 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Unit	45.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	45.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
		Tersedianya layanan jasa penunjang secara tepat waktu, berkualitas, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	688.930.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.568.812.500,00						1 Laporan	6.357.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.650.000,00						12 Laporan	54.800.000,00	
		Tersedianya layanan penunjang dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	688.930.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.568.812.500,00						1 Laporan	6.357.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.650.000,00						12 Laporan	54.800.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	4.500.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	4.500.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						159.000.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	159.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	135.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	159.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	135.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							42.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	42.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	42.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	134.150.000,00						1 Unit	1.950.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	586.110.000,00						1 Unit	764.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.390.000,00						12 Unit	114.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	134.150.000,00						1 Unit	1.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	586.110.000,00						1 Unit	764.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.390.000,00						12 Unit	114.000.000,00	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						39.810.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	6 Unit	39.810.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	125.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	6 Unit	39.810.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	125.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.420.000,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	5 Unit	1.420.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	13.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	5 Unit	1.420.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	13.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	150.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	150.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
112.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**7.290.432.480,00**							**26.865.526.694,00**	
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Gelandangan & Pengemis Terantar dalam Panti						***2.029.052.500,00***							***4.665.598.561,00***	
			999.Persentase anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	2.029.052.500,00						100 %	4.665.598.561,00	
			999.Persentase Disabilitas terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	2.029.052.500,00						100 %	4.665.598.561,00	
			999.Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	2.029.052.500,00						100 %	4.665.598.561,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Lanjut Usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	2.029.052.500,00						100 %	4.665.598.561,00	
	1.06.04.1.02	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak TerlAntar di dalam Panti						3.279.052.500,00					PPKS		6.774.880.290,00	
		Meningkatnya anak terlantar yang tertangani						3.279.052.500,00					PPKS		6.774.880.290,00	
			Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	0,00						120 Orang	30.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	135.000.000,00	
			Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	45.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	69.362.500,00						120 Orang	620.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	20.000.000,00						120 Orang	53.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	3.040.000,00						120 Orang	42.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	1.470.000.000,00						120 Orang	3.125.598.561,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	118.180.000,00						120 Orang	125.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	2.670.000,00						120 Orang	250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	15.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	0,00						120 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	345.800.000,00						120 Orang	190.000.000,00	
	1.06.04.1.02.0001	Pengasuhan						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Pengasuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Pengasuhan Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		120 Orang	30.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.04.1.02.0003	Penyediaan Sandang						118.180.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	118.180.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		120 Orang	125.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.04.1.02.0004	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						2.670.000,00							250.000.000,00	
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	2.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		120 Orang	250.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.04.1.02.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						3.040.000,00							42.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	3.040.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		120 Orang	42.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.04.1.02.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						345.800.000,00							190.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	345.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		120 Orang	190.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.04.1.02.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		120 Orang	25.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.04.1.02.0009	Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar						69.362.500,00							620.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	69.362.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		120 Orang	620.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.04.1.02.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	120 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Orang	10.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.04.1.02.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						20.000.000,00							53.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		120 Orang	53.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.04.1.02.0015	Penyediaan Permakanan						1.470.000.000,00							3.125.598.561,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	120 Orang		120 Orang	120 Orang	1.470.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		120 Orang	3.125.598.561,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.04.1.02.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti						20.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pembinaan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	135.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.04.1.02.0022	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan Bagi Anak Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Orang	15.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	1.06.04.1.02.0023	Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti						0,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Akses Layanan Pengasuhan kepada Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang Mendapatkan Pengasuhan Keluarga Pengganti Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Orang	45.000.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**249.065.000,00**							**1.153.766.250,00**	
	2.08	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**						**249.065.000,00**							**1.153.766.250,00**	
113.	**2.08.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN**						**255.969.600,00**							**1.270.493.438,00**	
		Menurunnya kekerasan terhadap perempuan						***104.770.000,00***							***388.631.250,00***	
			999.Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 %		100 %	100 %	104.770.000,00						100 %	388.631.250,00	
			999.Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan	8.29 per 100.000 penduduk		10.71 per 100.000 penduduk	10.04 per 100.000 penduduk	104.770.000,00						9.42 per 100.000 penduduk	388.631.250,00	
	2.08.03.1.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						108.520.000,00					-		443.756.250,00	
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan melalui koordinasi lintas daerah						108.520.000,00					-		443.756.250,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	6.840.000,00						-	41.343.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.750.000,00						-	82.687.500,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	16.537.500,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	44.100.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	38.080.000,00						-	49.612.500,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	8.100.000,00						-	55.125.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.750.000,00						-	55.125.000,00	
			Jumlah Perempuan Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	18.000.000,00						-	99.225.000,00	
	2.08.03.1.02.0011	layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.750.000,00							55.125.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	3.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	55.125.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0012	Layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						6.840.000,00							41.343.750,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	6.840.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	41.343.750,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							16.537.500,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	16.537.500,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0014	Layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.750.000,00							82.687.500,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	3.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	82.687.500,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0015	Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						8.100.000,00							55.125.000,00	
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	8.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	55.125.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.03.1.02.0016	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							44.100.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	44.100.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0017	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						18.000.000,00							99.225.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	99.225.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.03.1.02.0018	Layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						38.080.000,00							49.612.500,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	50 Orang	38.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	49.612.500,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
114.	**2.08.07**	**PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK**						**852.180.000,00**							**1.782.742.500,00**	
		Meningkatnya Pencegahan dan Penanganan Tindak Kekerasan, Esploitasi, Penelantaran, Perkawinan dan Perlakuan Salah Lainnya Terhadap Anak						***116.795.000,00***							***621.810.000,00***	
			999.Indeks Perlindungan Khusus Anak (IPKA)	66.74 Indeks		64.13 Indeks	64.78 Indeks	116.795.000,00						65.42 Indeks	621.810.000,00	
			999.Persentase Anak Memerlukan Perlindungan Khusus yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	116.795.000,00						100 Persentase	621.810.000,00	
	2.08.07.1.02	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Provinsi						140.545.000,00					-		710.010.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya akses dan kualitas layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus						140.545.000,00					-		710.010.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.990.000,00						-	66.150.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.750.000,00						-	88.200.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	3.750.000,00						-	132.300.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	15.000.000,00						-	26.460.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	70.560.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	38.080.000,00						-	79.380.000,00	
			Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	35.975.000,00						-	88.200.000,00	
			Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	-	20.000.000,00						-	158.760.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.08.07.1.02.0016	Layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.750.000,00							88.200.000,00	
		Tersedianya layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan yang tidak dijamin BPJS, Jamkesda, dan sumber pendanaan lainnya tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	80 Orang	3.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	88.200.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0017	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						15.000.000,00							26.460.000,00	
		Tersedianya Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	80 Orang	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	26.460.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0018	Layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.750.000,00							132.300.000,00	
		Tersedianya layanan medikolegal bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan medikolegal Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	80 Orang	3.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	132.300.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0019	Layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							158.760.000,00	
		Tersedianya layanan pendampingan tenaga ahli bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban yang mendapatkan Layanan pendampingan tenaga ahli di Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	80 Orang	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	158.760.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0020	Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						35.975.000,00							88.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Layanan spesifik bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan spesifik Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	80 Orang	35.975.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	88.200.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0021	Layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						3.990.000,00							66.150.000,00	
		Tersedianya layanan gelar kasus bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan gelar kasus Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	80 Orang	3.990.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	66.150.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0022	Layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						38.080.000,00							79.380.000,00	
		Tersedianya layanan rumah perlindungan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan rumah perlindungan bagi anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	80 Orang	38.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	79.380.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
	2.08.07.1.02.0023	Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						20.000.000,00							70.560.000,00	
		Tersedianya Layanan Pengaduan atau Penjangkauan bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan Layanan Pengaduan atau Penjangkauan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	-		-	80 Orang	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	-	-		-	70.560.000,00	Perlindungan Perempuan dan Anak
		Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah						**1.743.018.430,00**							**4.690.412.125,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.743.018.430,00**							**4.690.412.125,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**1.743.018.430,00**							**4.690.412.125,00**	
115.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**35.287.123.326,45**							**45.359.004.577,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***192.405.880,00***							***1.149.200.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.38 Skor		81.09 Skor	81.90 Skor	192.405.880,00						82.72 Skor	1.149.200.000,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.028.000,00						1 Dokumen	67.700.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.464.000,00						1 Dokumen	66.500.000,00	
		Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.028.000,00						1 Dokumen	67.700.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.464.000,00						1 Dokumen	66.500.000,00	
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	6.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							7.200.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.200.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
		Tersediannya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.480.000,00						1 Dokumen	467.650.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.480.000,00						1 Dokumen	467.650.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						13.320.000,00							93.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.320.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	93.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengeloaan administrasi dan pelaporan BMD						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.944.000,00						1 Laporan	87.000.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.944.000,00						1 Laporan	87.000.000,00	
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						3.600.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	12.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	12.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00						1 Dokumen	244.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	599.560.000,00						1 Laporan	860.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.584.750,00						12 Paket	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	56.724.640,00						12 Paket	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.225.850,00						1 Paket	89.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.382.800,00						1 Paket	94.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.110.600,00						1 Paket	45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya pelayanan administrasi umum secara tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00						1 Dokumen	244.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	599.560.000,00						1 Laporan	860.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.584.750,00						12 Paket	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	56.724.640,00						12 Paket	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.225.850,00						1 Paket	89.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.382.800,00						1 Paket	94.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.110.600,00						1 Paket	45.000.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.158.800,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	3.158.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	16.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.158.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	16.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	5.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.420.000,00							13.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.420.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	13.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.999.750,00							11.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	4.999.750,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	11.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.999.750,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	11.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						39.217.330,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	39.217.330,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	16.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	55.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	55.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
		Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah perangkat daerah						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	1.189.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	138.500.000,00						10 Unit	462.500.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	1.189.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	138.500.000,00						10 Unit	462.500.000,00	
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							285.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		4 Paket	6 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	285.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	6 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	285.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		10 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Unit	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
		Tersedianya layanan jasa penunjang secara tepat waktu, berkualitas, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	688.930.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.568.812.500,00						1 Laporan	6.357.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.650.000,00						12 Laporan	54.800.000,00	
		Tersedianya layanan penunjang dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	688.930.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.568.812.500,00						1 Laporan	6.357.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.650.000,00						12 Laporan	54.800.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	6.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	6.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						62.500.000,00							145.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	62.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	145.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	62.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	145.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	40.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	40.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	134.150.000,00						1 Unit	1.950.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	586.110.000,00						1 Unit	764.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.390.000,00						12 Unit	114.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	134.150.000,00						1 Unit	1.950.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	586.110.000,00						1 Unit	764.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.390.000,00						12 Unit	114.000.000,00	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						51.240.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	6 Unit	51.240.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	135.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	6 Unit	51.240.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	135.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						8.950.000,00							17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	5 Unit	8.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	17.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	5 Unit	8.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	17.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	250.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	250.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
116.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**7.290.432.480,00**							**26.865.526.694,00**	
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Gelandangan & Pengemis Terantar dalam Panti						***1.550.612.550,00***							***3.505.212.125,00***	
			999.Persentase anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	1.550.612.550,00						100 %	3.505.212.125,00	
			999.Persentase Disabilitas terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	1.550.612.550,00						100 %	3.505.212.125,00	
			999.Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	1.550.612.550,00						100 %	3.505.212.125,00	
			999.Persentase Lanjut Usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	1.550.612.550,00						100 %	3.505.212.125,00	
	1.06.04.1.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas TerlAntar di dalam Panti						1.653.712.550,00					PPKS		7.172.617.604,00	
		Meningkatnya kualitas penanganan penyandang disabilitas terlantar						1.653.712.550,00					PPKS		7.172.617.604,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	113.191.000,00						1 Dokumen	424.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang		20 Orang	20 Orang	15.096.550,00						20 Orang	25.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	0,00						160 Orang	35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	155.125.000,00						160 Orang	464.379.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	1.283.500.000,00						160 Orang	3.450.100.229,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	30.000.000,00						160 Orang	326.988.125,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	0,00						160 Orang	347.156.250,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	5 orang		10 orang	8 orang	8.000.000,00						7 orang	20.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	0,00						160 Orang	42.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	160 Orang	33.800.000,00						160 Orang	55.000.000,00	
	1.06.04.1.01.0001	Penyediaan Permakanan						1.283.500.000,00							2.476.400.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan Per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	120 Orang	1.283.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Batukliang || Desa Selebung || 1	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	2.476.400.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.04.1.01.0002	Penyediaan Sandang						30.000.000,00							205.301.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	120 Orang	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Batukliang || Desa Selebung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	205.301.250,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.04.1.01.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						0,00							225.469.375,00	
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	120 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Batukliang || Desa Selebung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	225.469.375,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.04.1.01.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti						155.125.000,00							385.041.500,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	120 Orang	155.125.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Batukliang || Desa Selebung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	385.041.500,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.04.1.01.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial						33.800.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	120 Orang	33.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Batukliang || Desa Selebung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	40.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.04.1.01.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						0,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	120 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Batukliang || Desa Selebung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	30.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.04.1.01.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						15.096.550,00							25.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	20 Orang		20 Orang	20 Orang	15.096.550,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Batukliang || Desa Selebung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		20 Orang	25.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.04.1.01.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						0,00							24.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	160 Orang		160 Orang	120 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Batukliang || Desa Selebung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		160 Orang	24.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.04.1.01.0017	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas						0,00							20.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Batukliang || Desa Selebung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Orang	20.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.04.1.01.0019	Pemulasaraan						8.000.000,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemulasaraan bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pemulasaraannya bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Provinsi	5 orang		10 orang	8 orang	8.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Tengah || Kecamatan Batukliang || Desa Selebung || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		7 orang	20.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
	1.06.04.1.01.0021	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar						25.091.000,00							74.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Bidang Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.091.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	74.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Bina Laras Muthmainnah
		Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi						**892.046.210,00**							**3.000.950.000,00**	
	1	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**892.046.210,00**							**3.000.950.000,00**	
	1.06	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL**						**892.046.210,00**							**3.000.950.000,00**	
117.	**1.06.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**35.287.123.326,45**							**45.359.004.577,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***174.178.250,00***							***690.550.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.38 Skor		81.09 Skor	81.90 Skor	174.178.250,00						82.72 Skor	690.550.000,00	
	1.06.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
		Terpenuhinya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.028.000,00						1 Dokumen	67.700.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.464.000,00						1 Dokumen	66.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersediannya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						278.861.000,00					-		466.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.028.000,00						1 Dokumen	67.700.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	76.464.000,00						1 Dokumen	66.500.000,00	
	1.06.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						2.700.000,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	6.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						2.700.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
		Tersediannya kualitas pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.480.000,00						1 Dokumen	467.650.000,00	
		Terselenggaranya pengelolaan keuangan daerah yang tertib administrasi, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						27.805.581.436,45					-		29.791.954.577,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.480.000,00						1 Dokumen	467.650.000,00	
	1.06.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						9.240.000,00							75.550.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.240.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	75.550.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
		Meningkatnya kualitas pengeloaan administrasi dan pelaporan BMD						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.944.000,00						1 Laporan	87.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai peraturan perundang-undangan						48.944.000,00					-		110.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.944.000,00						1 Laporan	87.000.000,00	
	1.06.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						9.990.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	9.990.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	9.990.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	10.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan administrasi umum perangkat daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00						1 Dokumen	244.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	599.560.000,00						1 Laporan	860.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.584.750,00						12 Paket	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	56.724.640,00						12 Paket	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.225.850,00						1 Paket	89.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.382.800,00						1 Paket	94.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.110.600,00						1 Paket	45.000.000,00	
		Terselenggaranya pelayanan administrasi umum secara tertib, efisien, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						959.194.390,00					-		1.598.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	129.600.000,00						1 Dokumen	244.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	599.560.000,00						1 Laporan	860.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	48.584.750,00						12 Paket	112.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	56.724.640,00						12 Paket	96.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.225.850,00						1 Paket	89.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.382.800,00						1 Paket	94.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.110.600,00						1 Paket	45.000.000,00	
	1.06.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.228.500,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	12 Paket	3.228.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	15.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	3.228.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	15.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	5.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.288.100,00							12.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.288.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	12.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.250.000,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	1.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	6.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	1.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	6.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.800.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						2.891.650,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	2.891.650,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	20.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						47.040.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	2 Laporan	47.040.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	85.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	47.040.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	85.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
		Meningkatnya ketersediaan barang milik daerah perangkat daerah						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		4 Paket	12 Paket	0,00						10 Paket	1.189.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	138.500.000,00						10 Unit	462.500.000,00	
		Tersedianya barang milik daerah yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah secara efektif dan efisien						138.500.000,00					-		2.951.500.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	1.189.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	138.500.000,00						10 Unit	462.500.000,00	
	1.06.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							145.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	145.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15 Paket		4 Paket	5 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Paket	145.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		10 Unit	5 Unit	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		10 Unit	5 Unit	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		17 Unit	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
		Tersedianya layanan jasa penunjang secara tepat waktu, berkualitas, dan mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	688.930.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.568.812.500,00						1 Laporan	6.357.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.650.000,00						12 Laporan	54.800.000,00	
		Tersedianya layanan penunjang dalam mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						5.273.392.500,00					-		7.482.350.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	688.930.000,00						12 Laporan	1.000.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.568.812.500,00						1 Laporan	6.357.550.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.650.000,00						12 Laporan	54.800.000,00	
	1.06.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	4.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	4.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						57.650.000,00							85.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	57.650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	85.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	57.650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	85.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	35.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	35.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah agar tetap berfungsi optimal dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	134.150.000,00						1 Unit	1.950.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	586.110.000,00						1 Unit	764.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.390.000,00						12 Unit	114.000.000,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah secara optimal untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						782.650.000,00					-		2.878.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	134.150.000,00						1 Unit	1.950.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	586.110.000,00						1 Unit	764.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	12 Unit	37.390.000,00						12 Unit	114.000.000,00	
	1.06.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						25.620.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit		12 Unit	4 Unit	25.620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	4 Unit	25.620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.980.000,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	12 Unit		12 Unit	7 Unit	3.980.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	12.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	30 Unit		30 Unit	7 Unit	3.980.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Unit	12.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	200.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
118.	**1.06.04**	**PROGRAM REHABILITASI SOSIAL**						**7.290.432.480,00**							**26.865.526.694,00**	
		Terpenuhinya kebutuhan dasar Disabilitas, Anak Terlantar, Lanjut Usia dan Gelandangan & Pengemis Terantar dalam Panti						***715.167.960,00***							***2.129.900.000,00***	
			999.Persentase anak terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	715.167.960,00						100 %	2.129.900.000,00	
			999.Persentase Disabilitas terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	715.167.960,00						100 %	2.129.900.000,00	
			999.Persentase Gelandangan dan Pengemis terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	715.167.960,00						100 %	2.129.900.000,00	
			999.Persentase Lanjut Usia terlantar dalam panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	100 %		100 %	100 %	715.167.960,00						100 %	2.129.900.000,00	
	1.06.04.1.03	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						1.998.364.960,00					PPKS		5.828.190.000,00	
		Meningkatnya Lanjut Usia terlantar yang tertangani						1.998.364.960,00					PPKS		5.828.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	132.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	4.000.000,00						130 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	30 Orang		20 Orang	25 Orang	1.000.000,00						30 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang		20 Orang	20 Orang	22.000.000,00						25 Orang	45.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	32.972.960,00						130 Orang	79.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	33.029.800,00						130 Orang	230.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	1.559.220.000,00						130 Orang	4.325.600.000,00	
			Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	43 Orang		25 Orang	27 Orang	0,00						39 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	86.412.000,00						130 Orang	385.750.000,00	
			Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	112.130.200,00						130 Orang	244.840.000,00	
			Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	17 Orang		20 Orang	20 Orang	29.200.000,00						20 Orang	70.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	7.200.000,00						130 Orang	44.000.000,00	
			Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	130 Orang	91.200.000,00						130 Orang	82.000.000,00	
	1.06.04.1.03.0001	Penyediaan Permakanan						589.875.000,00							1.625.650.000,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Permakanan per Orang Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	50 Orang	589.875.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	1.625.650.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0002	Penyediaan Sandang						36.075.000,00							135.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian dan Kelengkapan Lainnya dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	50 Orang	36.075.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	135.750.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0003	Penyediaan Asrama yang Mudah Diakses						6.135.000,00							100.000.000,00	
		Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terakses Asrama Layak Huni Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	50 Orang	6.135.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	100.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0004	Penyediaan Alat Bantu						1.000.000,00							20.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai Kebutuhan Kewenangan Provinsi	30 Orang		20 Orang	50 Orang	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		30 Orang	20.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0005	Penyediaan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Sosial						7.410.000,00							70.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Perbekalan Kesehatan di dalam Panti Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	50 Orang	7.410.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	70.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0006	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spritual dan Sosial						28.800.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	50 Orang	28.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	30.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0007	Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari						2.400.000,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	Jumlah Peserta Bimbingan Aktivitas Hidup Sehari-Hari Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	50 Orang	2.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	19.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0010	Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga						10.000.000,00							19.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Penelusuran Keluarga Kewenangan Provinsi	25 Orang		20 Orang	7 Orang	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		25 Orang	19.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0011	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga						4.472.960,00							33.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	50 Orang	4.472.960,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	33.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0012	Pemulasaraan						5.000.000,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	Jumlah Pemulasaraan Kewenangan Provinsi	17 Orang		20 Orang	10 Orang	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		20 Orang	15.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0015	Fasilitasi Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar						0,00							5.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Dokumen Kependudukan bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	10 Orang		10 Orang	5 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Orang	5.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0016	Akses ke Layanan Kesehatan Dasar						4.000.000,00							20.000.000,00	
		Terpenuhinya Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Kesehatan Dasar Kewenangan Provinsi	130 Orang		130 Orang	50 Orang	4.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		130 Orang	20.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0017	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti						20.000.000,00							55.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pembinaan Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Fasilitasi Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	55.500.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
	1.06.04.1.03.0018	Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar						0,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	Jumlah Orang yang mendapatkan Rehabilitasi Sosial melalui Asistensi Rehabilitasi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar Kewenangan Provinsi	43 Orang		25 Orang	7 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		39 Orang	21.000.000,00	Pusat Pelayanan Sosial Lanjut Usia Meci Angi
		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi						**27.249.077.116,00**							**37.353.446.074,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**26.749.077.116,00**							**34.162.459.074,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**26.749.077.116,00**							**34.162.459.074,00**	
119.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**22.912.188.141,00**							**25.451.722.659,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***22.110.905.661,00***							***24.284.332.824,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	82.22 Skor		80.92 Skor	81.25 Skor	22.110.905.661,00						81.57 Skor	24.284.332.824,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						153.273.220,00					-		151.630.883,00	
		Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						153.273.220,00					-		151.630.883,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.143.550,00						4 Dokumen	18.129.453,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.140.200,00						1 Dokumen	36.849.843,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.220.245,00						4 Dokumen	17.957.153,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.913.650,00						4 Dokumen	28.623.756,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	28.639.325,00						4 Dokumen	26.935.191,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	9.632.950,00						5 Laporan	7.680.384,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.583.300,00						1 Laporan	15.455.103,00	
	2.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						47.140.200,00							36.849.843,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.140.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	36.849.843,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						22.206.425,00							9.026.497,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	22.206.425,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	9.026.497,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						19.600.750,00							10.715.062,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	19.600.750,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	10.715.062,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						9.046.650,00							5.922.898,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	9.046.650,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	5.922.898,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						7.123.345,00							5.992.898,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	7.123.345,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	5.992.898,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						9.632.950,00							7.680.384,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	9.632.950,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Laporan	7.680.384,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						17.583.300,00							15.455.103,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.583.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	15.455.103,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.907.718.041,00					-		21.035.495.152,00	
		Laporan Administrasi Keuangan						18.907.718.041,00					-		21.035.495.152,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	49.517.750,00						5 Dokumen	29.344.838,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.960.000,00						1 Dokumen	23.906.972,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.513.500,00						4 Laporan	28.408.380,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/ Bulan		128 Orang/ Bulan	128 Orang/ Bulan	18.826.726.791,00						128 Orang/ Bulan	20.953.834.962,00	
	2.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						18.826.726.791,00							20.953.834.962,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	128 Orang/ Bulan		128 Orang/ Bulan	143 Orang/ Bulan	18.826.726.791,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		128 Orang/ Bulan	20.953.834.962,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						24.960.000,00							23.906.972,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.960.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	23.906.972,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						13.934.100,00							10.316.612,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	13.934.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	10.316.612,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.638.500,00							10.429.686,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	3.638.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	10.429.686,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						33.305.475,00					-		53.666.682,00	
		Laporan Barang Milik Daerah						33.305.475,00					-		53.666.682,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	33.305.475,00						4 Laporan	53.666.682,00	
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						13.810.400,00							14.214.956,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	13.810.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	14.214.956,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						91.659.755,00					-		64.960.078,00	
		Jumlah ASN yang mendapat pelatihan						91.659.755,00					-		64.960.078,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	128 Dokumen		128 Dokumen	128 Dokumen	14.429.300,00						128 Dokumen	10.768.906,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang		29 Orang	29 Orang	77.230.455,00						29 Orang	54.191.172,00	
	2.07.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						14.429.300,00							10.768.906,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	128 Dokumen		128 Dokumen	1 Dokumen	14.429.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		128 Dokumen	10.768.906,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.671.900,00							16.500.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang		29 Orang	6 Orang	10.671.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Orang	16.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						645.502.350,00					-		269.014.354,00	
		Laporan administrasi umum						645.502.350,00					-		269.014.354,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	19.050.000,00						20 Dokumen	21.537.813,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	43.500.000,00						4 Laporan	40.383.399,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	142.228.300,00						4 Laporan	64.613.437,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 Paket		73 Paket	73 Paket	75.759.750,00						73 Paket	28.886.481,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	26.732.300,00						16 Paket	23.925.925,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	46 Paket		46 Paket	46 Paket	24.359.000,00						46 Paket	19.669.409,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		29 Paket	29 Paket	313.873.000,00						29 Paket	69.997.890,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.222.000,00							5.384.453,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	46 Paket		46 Paket	11 Paket	9.222.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		46 Paket	5.384.453,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						168.000.000,00							32.306.719,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		29 Paket	8 Paket	168.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Paket	32.306.719,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.760.450,00							11.815.073,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 Paket		73 Paket	30 Paket	21.760.450,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		73 Paket	11.815.073,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.205.300,00							11.703.217,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	7 Paket	19.205.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Paket	11.703.217,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						8.250.000,00							10.768.906,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen		20 Dokumen	7 Dokumen	8.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Dokumen	10.768.906,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						26.100.000,00							21.537.813,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	26.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	21.537.813,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						110.810.800,00							26.922.266,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	110.810.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	26.922.266,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		442.051.716,00	
		jumlah sarana dan prasarana kantor						0,00					-		442.051.716,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	0,00						7 Unit	442.051.716,00	
	2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							162.051.716,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	162.051.716,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.828.203.300,00					-		2.914.970.232,00	
		jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						2.828.203.300,00					-		2.914.970.232,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	484.477.300,00						4 Laporan	521.753.508,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.340.224.000,00						1 Laporan	2.382.870.261,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.502.000,00						4 Laporan	10.346.463,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.961.449,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	2.961.449,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						277.178.500,00							306.913.828,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	277.178.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	306.913.828,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.340.224.000,00							2.382.870.261,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.340.224.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.382.870.261,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						252.526.000,00					-		519.933.562,00	
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara						252.526.000,00					-		519.933.562,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	101.750.000,00						4 Unit	188.455.860,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	109.050.000,00						26 Unit	231.326.874,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	41.726.000,00						4 Unit	100.150.828,00	
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						39.810.000,00							69.793.281,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	12 Unit	39.810.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		26 Unit	69.793.281,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						37.000.000,00							80.766.797,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	37.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	80.766.797,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.840.000,00							37.691.172,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	10.840.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	37.691.172,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
120.	**2.07.02**	**PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA**						**77.155.500,00**							**1.064.330.000,00**	
		Terkelolanya informasi tenaga kerja						***77.155.500,00***							***1.064.330.000,00***	
			999.Persentase kabupaten/kota yang menyusun rencana tenaga kerja	100 %		50 %	70 %	77.155.500,00						80 %	1.064.330.000,00	
	2.07.02.1.01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)						77.155.500,00					-		1.064.330.000,00	
		Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja yang dihasilkan						77.155.500,00					-		1.064.330.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.126.400,00						1 Dokumen	851.464.000,00	
			Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	50 Orang		50 Orang	50 Orang	32.029.100,00						50 Orang	212.866.000,00	
	2.07.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro						45.126.400,00							851.464.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.126.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	851.464.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro						32.029.100,00							212.866.000,00	
		Terlaksananya fasilitasi penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Kabupaten/Kota yang membidangi ketenagakerjaan mampu menjadi fasilitator Penyusunan RTK Mikro	50 Orang		50 Orang	50 Orang	32.029.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	212.866.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
121.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**1.132.872.935,00**							**2.189.640.000,00**	
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja						***438.342.700,00***							***814.682.344,00***	
			999.Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	3.74 %		3.74 %	3.74 %	438.342.700,00						3.74 %	814.682.344,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						866.221.435,00					-		1.986.870.625,00	
		Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi						866.221.435,00					-		1.986.870.625,00	
			Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	15 Kesepakatan		7 Kesepakatan	9 Kesepakatan	24.305.700,00						11 Kesepakatan	40.000.000,00	
			Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	73.843.600,00						10 Lembaga	49.546.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	866 Orang		410 Orang	524 Orang	657.197.135,00						638 Orang	1.688.433.707,00	
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						83.541.900,00							522.366.969,00	
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	866 Orang		410 Orang	300 Orang	83.541.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		638 Orang	522.366.969,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.01.0002	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						73.843.600,00							49.546.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	10 Lembaga		10 Lembaga	30 Lembaga	73.843.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Lembaga	49.546.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.03.1.01.0004	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas						24.305.700,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	15 Kesepakatan		7 Kesepakatan	4 Kesepakatan	24.305.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Kesepakatan	40.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.02	Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja						211.939.200,00					-		138.892.625,00	
		Jumlah LPK Yang Disurvei dan dinilai						211.939.200,00					-		138.892.625,00	
			Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	60 LPK		20 LPK	30 LPK	211.939.200,00						40 LPK	138.892.625,00	
	2.07.03.1.02.0001	Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja						211.939.200,00							138.892.625,00	
		Terlaksananya Survey dan Penilaian Akreditasi Kepada Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja yang Terakreditasi	60 LPK		20 LPK	50 LPK	211.939.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 LPK	138.892.625,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.03	Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Menengah						0,00					-		34.980.125,00	
		Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas						0,00					-		34.980.125,00	
			Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan		5 Perusahaan	5 Perusahaan	0,00						5 Perusahaan	34.980.125,00	
	2.07.03.1.03.0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah						0,00							34.980.125,00	
		Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Menengah	Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas	5 Perusahaan		5 Perusahaan	0 Perusahaan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-		5 Perusahaan	34.980.125,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi						54.712.300,00					-		28.896.625,00	
		Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas						54.712.300,00					-		28.896.625,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.712.300,00						1 Dokumen	28.896.625,00	
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						44.712.300,00							28.896.625,00	
		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	44.712.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	28.896.625,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
122.	**2.07.04**	**PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA**						**721.478.055,00**							**2.005.870.000,00**	
		Meningkatnya penempatan tenaga kerja						***721.478.055,00***							***1.933.795.000,00***	
			999.Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar lintas kerja daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.	90.42 %		74.39 %	78.1 %	721.478.055,00						82.01 %	1.933.795.000,00	
	2.07.04.1.01	Pelayanan Antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota						239.694.355,00					-		497.164.100,00	
		Jumlah pencari kerja yang ditempatkan melalui AKAD/ AKL						239.694.355,00					-		497.164.100,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	200 Orang		100 Orang	125 Orang	23.309.925,00						150 Orang	36.037.500,00	
			Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	5 Orang		5 Orang	5 Orang	61.997.880,00						5 Orang	72.075.000,00	
			Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	35 Orang		15 Orang	20 Orang	67.530.525,00						25 Orang	205.909.025,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	200 Orang		100 Orang	125 Orang	43.681.900,00						150 Orang	72.075.000,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	900 Orang		500 Orang	600 Orang	43.174.125,00						700 Orang	111.067.575,00	
	2.07.04.1.01.0001	Penyediaan Sumber Daya Pelayanan Antar Kerja						61.997.880,00							72.075.000,00	
		Tersedianya SDM Pelayanan Antar Kerja (PengAntar Kerja dan Petugas Antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan Antar Kerja yang Tersedia dan/atau Ditingkatkan Kompetensinya	5 Orang		5 Orang	20 Orang	61.997.880,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	72.075.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0002	Pelayanan Antar Kerja						43.174.125,00							111.067.575,00	
		Terwujudnya Pelayanan Antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang ditempatkan Melalui layanan AKAD, AKL dan ULD	900 Orang		500 Orang	600 Orang	43.174.125,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		700 Orang	111.067.575,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0004	Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)						23.309.925,00							36.037.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD (Antar Kerja Antar Daerah) dan AKL (Antar Kerja Lokal)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Operasionalisasi Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja AKAD dan AKL	200 Orang		100 Orang	125 Orang	23.309.925,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	36.037.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0005	Perluasan Kesempatan Kerja						43.681.900,00							72.075.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui Program Perluasan Kesempatan Kerja	200 Orang		100 Orang	125 Orang	43.681.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	72.075.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.01.0006	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan						67.530.525,00							205.909.025,00	
		Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah tenaga kerja disabilitas yang mendapatkan fasilitasi layanan ULD	35 Orang		15 Orang	40 Orang	67.530.525,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Orang	205.909.025,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.02	Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00					-		84.087.500,00	
		Jumlah izin yang diterbitkan						10.000.000,00					-		84.087.500,00	
			Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	25 Lembaga		5 Lembaga	10 Lembaga	10.000.000,00						15 Lembaga	84.087.500,00	
	2.07.04.1.02.0002	Pengawasan dan Pengendalian LPTKS						10.000.000,00							84.087.500,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang dilakukan Pengawasan dan Pengendalian sesuai dengan Aturan yang Berlaku	25 Lembaga		5 Lembaga	10 Lembaga	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Lembaga	84.087.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja						104.500.100,00					-		510.938.400,00	
		Jumlah Pencari Kerja yang ditempatkan						104.500.100,00					-		510.938.400,00	
			Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.100,00						1 Dokumen	120.125.000,00	
			Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang		100 Orang	150 Orang	82.000.000,00						200 Orang	390.813.400,00	
	2.07.04.1.03.0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online						22.500.100,00							120.125.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.500.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	120.125.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.03.0003	Job Fair/Bursa Kerja						82.000.000,00							390.813.400,00	
		Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	300 Orang		100 Orang	150 Orang	82.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		200 Orang	390.813.400,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah PMI Yang Dilindungi, Diberdayakan Dan fasilitasi penyelesaian kasus kasusnya						310.975.500,00					-		683.680.000,00	
			Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	45 Perusahaan		25 Perusahaan	30 Perusahaan	44.117.200,00						35 Perusahaan	128.000.000,00	
			Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	600 Orang		200 Orang	300 Orang	148.759.000,00						400 Orang	238.080.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	130 Orang		50 Orang	70 Orang	98.099.200,00						90 Orang	304.800.000,00	
	2.07.04.1.04.0001	Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)						148.759.000,00							238.080.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	600 Orang		200 Orang	300 Orang	148.759.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	238.080.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.04.0002	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) terintegrasi secara elektronik						44.117.200,00							128.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan yang dilakukan untuk verifikasi dan pemberian Izin kepada cabang Perusahaan PMI secara Online	Jumlah cabang Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Diverifikasi dan Diberi Izin secara online	45 Perusahaan		25 Perusahaan	20 Perusahaan	44.117.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Perusahaan	128.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.04.0004	Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan						98.099.200,00							304.800.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	130 Orang		50 Orang	50 Orang	98.099.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		90 Orang	304.800.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.05	Pengesahan RPTKA Perpanjangan yang Tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						56.308.100,00					-		230.000.000,00	
		Jumlah TKA yang Telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA						56.308.100,00					-		230.000.000,00	
			Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	95 Orang		75 Orang	80 Orang	56.308.100,00						85 Orang	230.000.000,00	
	2.07.04.1.05.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengesahan RPTKA yang tidak Mengandung Perubahan Jabatan, Jumlah TKA, dan Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						56.308.100,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan TKA	Jumlah TKA yang telah Mendapatkan Pengesahan RPTKA	95 Orang		75 Orang	70 Orang	56.308.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Orang	230.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.04.1.04	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Provinsi						310.975.500,00					-		683.680.000,00	
		Jumlah PMI Yang Dilindungi, Diberdayakan Dan fasilitasi penyelesaian kasus kasusnya						310.975.500,00					-		683.680.000,00	
			Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam Layanan Terpadu	-		-	-	20.000.100,00						-	12.800.000,00	
	2.07.04.1.04.0005	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran						20.000.100,00							12.800.000,00	
		Tersedianya Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CPMI yang Terlayani Sesuai Prosedur dalam Layanan Terpadu	-		-	6000 Orang	20.000.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	12.800.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
123.	**2.07.05**	**PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL**						**3.111.402.000,00**							**5.125.450.000,00**	
		Meningkatnya pekerja indonesia yang terlindungi						***3.111.402.000,00***							***5.083.262.500,00***	
			999.Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak dan dialog sosial	55843 Orang		53664 Orang	54201 Orang	3.111.402.000,00						54743 Orang	5.083.262.500,00	
	2.07.05.1.01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk yang Mempunyai Wilayah Kerja lebih dari 1 (satu) Kabupaten/Kota						66.230.800,00					-		126.562.500,00	
		Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina						66.230.800,00					-		126.562.500,00	
			Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.200,00						1 Laporan	42.187.500,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan		35 Perusahaan	35 Perusahaan	46.230.600,00						35 Perusahaan	84.375.000,00	
	2.07.05.1.01.0001	Pengesahan Peraturan Perusahaan yang terkait dengan Hubungan Industrial						46.230.600,00							84.375.000,00	
		Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait Dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Peraturan Perusahaan dan Terdaftar di WLKP Online	35 Perusahaan		35 Perusahaan	35 Perusahaan	46.230.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Perusahaan	84.375.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.01.0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja						20.000.200,00							42.187.500,00	
		Terselenggaranya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar Sebagai Peserta Jamsostek	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	42.187.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						132.288.400,00					-		310.078.125,00	
		Jumlah Perusahaan dan Pekerja Yang Dibina						132.288.400,00					-		310.078.125,00	
			Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	11 Lembaga		11 Lembaga	11 Lembaga	39.064.800,00						11 Lembaga	99.140.625,00	
			Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	45 Perkara		25 Perkara	30 Perkara	67.907.400,00						35 Perkara	42.187.500,00	
			Jumlah Perselisihan yang Dicegah	45 Perkara		25 Perkara	30 Perkara	25.316.200,00						35 Perkara	94.921.875,00	
			Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	50 Perusahaan		30 Perusahaan	35 Perusahaan	0,00						40 Perusahaan	73.828.125,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.05.1.02.0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						25.316.200,00							94.921.875,00	
		Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/ Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perselisihan yang Dicegah	45 Perkara		25 Perkara	30 Perkara	25.316.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Perkara	94.921.875,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Provinsi						67.907.400,00							42.187.500,00	
		Terselesaikannya Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselesaikan	45 Perkara		25 Perkara	30 Perkara	67.907.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Perkara	42.187.500,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi						39.064.800,00							99.140.625,00	
		Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Provinsi	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	11 Lembaga		11 Lembaga	11 Lembaga	39.064.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Lembaga	99.140.625,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.02.0005	Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi						0,00							73.828.125,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Pembinaan Pengupahan Skala Provinsi	50 Perusahaan		30 Perusahaan	35 Perusahaan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Perusahaan	73.828.125,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.03	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK)						2.912.882.800,00					-		4.688.809.375,00	
		Jumlah UMP / UMK Yang Disahkan						2.912.882.800,00					-		4.688.809.375,00	
			Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan		1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	30.002.800,00						1 Surat Keputusan	52.734.375,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	35000 Orang		20000 Orang	20000 Orang	2.882.880.000,00						25000 Orang	4.636.075.000,00	
	2.07.05.1.03.0001	Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP)						30.002.800,00							52.734.375,00	
		Ditetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP)	Jumlah Penetapan UMP	1 Surat Keputusan		1 Surat Keputusan	1 Surat Keputusan	30.002.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Surat Keputusan	52.734.375,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.05.1.03.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja						2.882.880.000,00							4.636.075.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Terdaftar dalam Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	35000 Orang		20000 Orang	13000 Orang	2.882.880.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pajak Rokok	-	-		25000 Orang	4.636.075.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
124.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**733.053.092,00**							**2.141.220.000,00**	
		Terlindungi hak-hak dasar pekerja						***289.793.200,00***							***857.025.000,00***	
			999.Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasaranya	55843 Orang		53664 Orang	54201 Orang	289.793.200,00						54743 Orang	857.025.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						733.053.092,00					-		2.141.220.000,00	
		Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3						733.053.092,00					-		2.141.220.000,00	
			Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	24 Kasus		24 Kasus	24 Kasus	40.170.800,00						24 Kasus	198.900.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	195 Perusahaan		135 Perusahaan	150 Perusahaan	539.573.032,00						165 Perusahaan	1.478.092.500,00	
	2.07.06.1.01.0002	Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan						40.170.800,00							198.900.000,00	
		Terlaksananya Penegakan Hukum Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Kasus Permasalahan Hukum yang Diselesaikan	24 Kasus		24 Kasus	10 Kasus	40.170.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Kasus	198.900.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						249.622.400,00							658.125.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	195 Perusahaan		135 Perusahaan	60 Perusahaan	249.622.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		165 Perusahaan	658.125.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**500.000.000,00**							**3.190.987.000,00**	
	3.32	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI**						**500.000.000,00**							**3.190.987.000,00**	
125.	**3.32.02**	**PROGRAM Perencanaan KAWASAN TRANSMIGRASI**						**45.984.400,00**							**1.017.190.000,00**	
		Meningkatnya perencanaan transmigrasi						***45.984.400,00***							***1.017.190.000,00***	
			999.Persentase Program Transmigrasi yang Dilaksanakan	95.83 Persentase		87.5 Persentase	91.67 Persentase	45.984.400,00						91.67 Persentase	1.017.190.000,00	
	3.32.02.1.01	Pencadangan Tanah untuk Kawasan Transmigrasi						45.984.400,00					-		1.017.190.000,00	
		Jumlah Dokumen perencanaan						45.984.400,00					-		1.017.190.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.186.050,00						1 Dokumen	517.270.000,00	
			Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi		2 Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi	20.798.350,00						2 Kawasan Transmigrasi	499.920.000,00	
	3.32.02.1.01.0001	Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi						25.186.050,00							517.270.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Teridentifikasinya Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi Potensi Kawasan Transmigrasi yang Bisa Dibangun dan Dikerjasamakan dengan Daerah Lain	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	25.186.050,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	517.270.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.02.1.01.0002	Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan						20.798.350,00							499.920.000,00	
		Terlaksananya Advokasi dan Musyawarah Penetapan Kawasan	Jumlah Kasus yang Dapat Diselesaikan untuk Mendukung Penetapan Kawasan Transmigrasi	2 Kawasan Transmigrasi		2 Kawasan Transmigrasi	3 Kawasan Transmigrasi	20.798.350,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Kawasan Transmigrasi	499.920.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
126.	**3.32.03**	**PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**352.135.600,00**							**1.109.467.000,00**	
		meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi						***302.135.600,00***							***1.056.967.000,00***	
			999.Persentase Luas Kawasan Transmigrasi yang Berkembang	77.38 Persentase		77.38 Persentase	77.38 Persentase	302.135.600,00						77.38 Persentase	1.056.967.000,00	
	3.32.03.1.01	Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						352.135.600,00					-		1.109.467.000,00	
		Jumlah transmigran yang ditempatkan						352.135.600,00					-		1.109.467.000,00	
			Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	15 Paket		15 Paket	15 Paket	223.629.300,00						15 Paket	839.997.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	70 Kepala Keluarga		50 Kepala Keluarga	55 Kepala Keluarga	50.000.000,00						60 Kepala Keluarga	52.500.000,00	
			Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	5 Lokasi		5 Lokasi	5 Lokasi	28.506.300,00						5 Lokasi	164.470.000,00	
	3.32.03.1.01.0005	Penyuluhan Transmigrasi						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan	70 Kepala Keluarga		50 Kepala Keluarga	55 Kepala Keluarga	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Kepala Keluarga	52.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0017	Bantuan Non-Standar Transmigrasi (Dalam Bentuk Barang Sesuai Kearifan Lokal)						223.629.300,00							839.997.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Bantuan Non-Standar Transmigrasi	Jumlah Bantuan Non-Standar yang Diberikan kepada Transmigran	15 Paket		15 Paket	8 Paket	223.629.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Paket	839.997.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.03.1.01.0018	Monitoring Dan Evaluasi Ke Lokasi Transmigrasi						28.506.300,00							164.470.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ke Lokasi Transmigrasi	Jumlah Lokasi Transmigrasi yang Dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi	5 Lokasi		5 Lokasi	5 Lokasi	28.506.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Lokasi	164.470.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Jumlah transmigran yang ditempatkan						352.135.600,00					-		1.109.467.000,00	
			Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-		-	-	50.000.000,00						-	52.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.32.03.1.01.0006	Pelatihan Transmigrasi						50.000.000,00							52.500.000,00	
		Terselenggaranya Pelatihan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran/Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan	-		-	20 Orang	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	52.500.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
127.	**3.32.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TRANSMIGRASI**						**101.880.000,00**							**1.064.330.000,00**	
		meningkatnya pemberdayaan dan kapasitas transmigran dalam pengembangan kawasan transmigrasi						***101.880.000,00***							***1.064.330.000,00***	
			999.Persentase Transmigran Yang Dibina dan Diberdayakan	53.79 %		51.55 %	52.11 %	101.880.000,00						52.67 %	1.064.330.000,00	
	3.32.04.1.01	Pengembangan Satuan Permukiman pada Tahap Pemantapan						101.880.000,00					-		1.064.330.000,00	
		Jumlah kawasan yang dibina						101.880.000,00					-		1.064.330.000,00	
			Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	30 Kepala Keluarga		30 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	67.524.550,00						30 Kepala Keluarga	638.598.000,00	
			Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman		2 Satuan Permukiman	2 Satuan Permukiman	34.355.450,00						2 Satuan Permukiman	425.732.000,00	
	3.32.04.1.01.0001	Penguatan SDM dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman						67.524.550,00							638.598.000,00	
		Terwujudnya Penguatan SDM dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Kepala Keluarga Transmigran yang Dibina	30 Kepala Keluarga		30 Kepala Keluarga	30 Kepala Keluarga	67.524.550,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Kepala Keluarga	638.598.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
	3.32.04.1.01.0002	Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam rangka Pemantapan Satuan Pemukiman						34.355.450,00							425.732.000,00	
		Terwujudnya Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan dalam Rangka Pemantapan Satuan Pemukiman	Jumlah Satuan Permukiman yang Dikembangkan dalam Rangka Penguatan Infrastruktur Sosial, Ekonomi dan Kelembagaan	2 Satuan Permukiman		2 Satuan Permukiman	2 Satuan Permukiman	34.355.450,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Satuan Permukiman	425.732.000,00	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
		Balai Latihan Kerja (Skill Center)						**952.642.710,00**							**1.858.792.801,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**952.642.710,00**							**1.858.792.801,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**952.642.710,00**							**1.858.792.801,00**	
128.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**22.912.188.141,00**							**25.451.722.659,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***254.650.475,00***							***390.614.108,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	82.22 Skor		80.92 Skor	81.25 Skor	254.650.475,00						81.57 Skor	390.614.108,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						153.273.220,00					-		151.630.883,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						153.273.220,00					-		151.630.883,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.143.550,00						4 Dokumen	18.129.453,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.220.245,00						4 Dokumen	17.957.153,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.913.650,00						4 Dokumen	28.623.756,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	28.639.325,00						4 Dokumen	26.935.191,00	
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						2.019.000,00							5.922.898,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	2.019.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	5.922.898,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						2.019.000,00							5.922.898,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	2.019.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	5.922.898,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.443.000,00							5.099.077,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.443.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	5.099.077,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.443.000,00							4.856.777,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.443.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	4.856.777,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.907.718.041,00					-		21.035.495.152,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Laporan Administrasi Keuangan						18.907.718.041,00					-		21.035.495.152,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	49.517.750,00						5 Dokumen	29.344.838,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.513.500,00						4 Laporan	28.408.380,00	
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						10.627.400,00							8.259.320,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	10.627.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	8.259.320,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						952.600,00							5.992.898,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	952.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	5.992.898,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						33.305.475,00					-		53.666.682,00	
		Laporan Barang Milik Daerah						33.305.475,00					-		53.666.682,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	33.305.475,00						4 Laporan	53.666.682,00	
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						6.515.025,00							14.214.956,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	6.515.025,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	14.214.956,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						91.659.755,00					-		64.960.078,00	
		Jumlah ASN yang mendapat pelatihan						91.659.755,00					-		64.960.078,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang		29 Orang	29 Orang	77.230.455,00						29 Orang	54.191.172,00	
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.009.000,00							5.384.453,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang		29 Orang	5 Orang	10.009.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Orang	5.384.453,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						645.502.350,00					-		269.014.354,00	
		Laporan administrasi umum						645.502.350,00					-		269.014.354,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	19.050.000,00						20 Dokumen	21.537.813,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	43.500.000,00						4 Laporan	40.383.399,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	142.228.300,00						4 Laporan	64.613.437,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 Paket		73 Paket	73 Paket	75.759.750,00						73 Paket	28.886.481,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	26.732.300,00						16 Paket	23.925.925,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	46 Paket		46 Paket	46 Paket	24.359.000,00						46 Paket	19.669.409,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		29 Paket	29 Paket	313.873.000,00						29 Paket	69.997.890,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.394.000,00							5.992.898,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	46 Paket		46 Paket	25 Paket	7.394.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		46 Paket	5.992.898,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000,00							16.153.359,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		29 Paket	6 Paket	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Paket	16.153.359,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.351.950,00							6.302.502,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 Paket		73 Paket	15 Paket	21.351.950,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		73 Paket	6.302.502,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.490.000,00							5.922.898,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	5 Paket	2.490.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Paket	5.922.898,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						3.600.000,00							5.384.453,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen		20 Dokumen	6 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Dokumen	5.384.453,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.800.000,00							8.076.680,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	5.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	8.076.680,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.472.500,00							16.153.359,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	10.472.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	16.153.359,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		442.051.716,00	
		jumlah sarana dan prasarana kantor						0,00					-		442.051.716,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	0,00						7 Unit	442.051.716,00	
	2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	120.000.000,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.828.203.300,00					-		2.914.970.232,00	
		jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						2.828.203.300,00					-		2.914.970.232,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	484.477.300,00						4 Laporan	521.753.508,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.502.000,00						4 Laporan	10.346.463,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							1.895.328,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	1.895.328,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						90.120.000,00							107.689.063,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	90.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	107.689.063,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						252.526.000,00					-		519.933.562,00	
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara						252.526.000,00					-		519.933.562,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	101.750.000,00						4 Unit	188.455.860,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	109.050.000,00						26 Unit	231.326.874,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	41.726.000,00						4 Unit	100.150.828,00	
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.810.000,00							53.844.531,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	7 Unit	21.810.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		26 Unit	53.844.531,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						27.750.000,00							53.844.531,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	27.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	53.844.531,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						16.796.000,00							26.922.266,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	9 Unit	16.796.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	26.922.266,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
129.	**2.07.03**	**PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA**						**1.132.872.935,00**							**2.189.640.000,00**	
		Meningkatnya Produktivitas Tenaga Kerja						***694.530.235,00***							***1.374.957.656,00***	
			999.Persentase tenaga kerja di sektor prioritas yang meningkat produktivitasnya	3.74 %		3.74 %	3.74 %	694.530.235,00						3.74 %	1.374.957.656,00	
	2.07.03.1.01	Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						866.221.435,00					-		1.986.870.625,00	
		Pencari Kerja / Calon Tenaga Kerja Yang mendapat sertifikat kompetensi						866.221.435,00					-		1.986.870.625,00	
			Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	20 Unit		34 Unit	17 Unit	110.875.000,00						18 Unit	208.890.918,00	
			Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	866 Orang		410 Orang	524 Orang	657.197.135,00						638 Orang	1.688.433.707,00	
	2.07.03.1.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi						573.655.235,00							1.166.066.738,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis kompetensi Pada Tahun n	866 Orang		410 Orang	272 Orang	573.655.235,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		638 Orang	1.166.066.738,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.03.1.01.0003	Pengadaan Sarana Pelatihan Kerja						110.875.000,00							208.890.918,00	
		Tersedianya Sarana Pelatihan Kerja	Jumlah Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana Pelatihan kerja	20 Unit		34 Unit	25 Unit	110.875.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sandubaya || Kelurahan Dasan Cermen || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Unit	208.890.918,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
	2.07.03.1.04	Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi						54.712.300,00					-		28.896.625,00	
		Jumlah Perusahaan Menengah yang Mendapatkan Konsultasi Peningkatan Produktivitas						54.712.300,00					-		28.896.625,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	54.712.300,00						1 Dokumen	28.896.625,00	
	2.07.03.1.04.0001	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan daya saing Tenaga Kerja di Tingkat daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Balai Latihan Kerja (Skill Center)
		Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok						**678.188.472,00**							**1.338.254.308,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**678.188.472,00**							**1.338.254.308,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**678.188.472,00**							**1.338.254.308,00**	
130.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**22.912.188.141,00**							**25.451.722.659,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***327.685.680,00***							***226.099.135,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	82.22 Skor		80.92 Skor	81.25 Skor	327.685.680,00						81.57 Skor	226.099.135,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						153.273.220,00					-		151.630.883,00	
		Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						153.273.220,00					-		151.630.883,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.143.550,00						4 Dokumen	18.129.453,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.220.245,00						4 Dokumen	17.957.153,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.913.650,00						4 Dokumen	28.623.756,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	28.639.325,00						4 Dokumen	26.935.191,00	
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						1.999.900,00							5.992.898,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	5.992.898,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						1.999.900,00							5.992.898,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	5.992.898,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.199.900,00							3.553.739,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.199.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	3.553.739,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.199.900,00							3.553.739,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.199.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	3.553.739,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.907.718.041,00					-		21.035.495.152,00	
		Laporan Administrasi Keuangan						18.907.718.041,00					-		21.035.495.152,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	49.517.750,00						5 Dokumen	29.344.838,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.513.500,00						4 Laporan	28.408.380,00	
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						12.481.000,00							5.384.453,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	12.481.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	5.384.453,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						719.800,00							5.992.898,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	719.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	5.992.898,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						33.305.475,00					-		53.666.682,00	
		Laporan Barang Milik Daerah						33.305.475,00					-		53.666.682,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	33.305.475,00						4 Laporan	53.666.682,00	
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						6.490.025,00							12.497.154,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	6.490.025,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	12.497.154,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						91.659.755,00					-		64.960.078,00	
		Jumlah ASN yang mendapat pelatihan						91.659.755,00					-		64.960.078,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang		29 Orang	29 Orang	77.230.455,00						29 Orang	54.191.172,00	
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						56.549.555,00							26.922.266,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang		29 Orang	9 Orang	56.549.555,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Orang	26.922.266,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						645.502.350,00					-		269.014.354,00	
		Laporan administrasi umum						645.502.350,00					-		269.014.354,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	19.050.000,00						20 Dokumen	21.537.813,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	43.500.000,00						4 Laporan	40.383.399,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	142.228.300,00						4 Laporan	64.613.437,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 Paket		73 Paket	73 Paket	75.759.750,00						73 Paket	28.886.481,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	26.732.300,00						16 Paket	23.925.925,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	46 Paket		46 Paket	46 Paket	24.359.000,00						46 Paket	19.669.409,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		29 Paket	29 Paket	313.873.000,00						29 Paket	69.997.890,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.529.000,00							4.146.029,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	46 Paket		46 Paket	5 Paket	4.529.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		46 Paket	4.146.029,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						81.339.000,00							10.768.906,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		29 Paket	8 Paket	81.339.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Paket	10.768.906,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						17.355.200,00							5.384.453,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 Paket		73 Paket	10 Paket	17.355.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		73 Paket	5.384.453,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.547.000,00							4.146.029,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	1 Paket	2.547.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Paket	4.146.029,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						3.600.000,00							2.692.227,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen		20 Dokumen	6 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Dokumen	2.692.227,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.800.000,00							5.384.453,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	5.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	5.384.453,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.472.500,00							10.768.906,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	10.472.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	10.768.906,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		442.051.716,00	
		jumlah sarana dan prasarana kantor						0,00					-		442.051.716,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	0,00						7 Unit	442.051.716,00	
	2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	80.000.000,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.828.203.300,00					-		2.914.970.232,00	
		jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						2.828.203.300,00					-		2.914.970.232,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	484.477.300,00						4 Laporan	521.753.508,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.502.000,00						4 Laporan	10.346.463,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						500.000,00							2.528.237,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	2.528.237,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						75.052.800,00							53.844.531,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	75.052.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	53.844.531,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						252.526.000,00					-		519.933.562,00	
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara						252.526.000,00					-		519.933.562,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	101.750.000,00						4 Unit	188.455.860,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	109.050.000,00						26 Unit	231.326.874,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	41.726.000,00						4 Unit	100.150.828,00	
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.810.000,00							53.844.531,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	3 Unit	21.810.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		26 Unit	53.844.531,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						18.500.000,00							26.922.266,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	18.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	26.922.266,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						6.740.000,00							17.768.695,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	6.740.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	17.768.695,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
131.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**733.053.092,00**							**2.141.220.000,00**	
		Terlindungi hak-hak dasar pekerja						***347.302.992,00***							***990.165.000,00***	
			999.Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasaranya	55843 Orang		53664 Orang	54201 Orang	347.302.992,00						54743 Orang	990.165.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						733.053.092,00					-		2.141.220.000,00	
		Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3						733.053.092,00					-		2.141.220.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	195 Perusahaan		135 Perusahaan	150 Perusahaan	539.573.032,00						165 Perusahaan	1.478.092.500,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	232 Perusahaan		192 Perusahaan	202 Perusahaan	153.309.260,00						212 Perusahaan	464.227.500,00	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						100.685.710,00							267.240.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	232 Perusahaan		192 Perusahaan	127 Perusahaan	100.685.710,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		212 Perusahaan	267.240.000,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						246.617.282,00							722.925.000,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	195 Perusahaan		135 Perusahaan	50 Perusahaan	246.617.282,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		165 Perusahaan	722.925.000,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Lombok
		Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa						**308.241.425,00**							**618.726.476,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**308.241.425,00**							**618.726.476,00**	
	2.07	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA**						**308.241.425,00**							**618.726.476,00**	
132.	**2.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**22.912.188.141,00**							**25.451.722.659,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***210.830.525,00***							***282.234.676,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	82.22 Skor		80.92 Skor	81.25 Skor	210.830.525,00						81.57 Skor	282.234.676,00	
	2.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						153.273.220,00					-		151.630.883,00	
		Laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						153.273.220,00					-		151.630.883,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.143.550,00						4 Dokumen	18.129.453,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.220.245,00						4 Dokumen	17.957.153,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	25.913.650,00						4 Dokumen	28.623.756,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	28.639.325,00						4 Dokumen	26.935.191,00	
	2.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						2.414.000,00							5.992.898,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	2.414.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	5.992.898,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						2.294.000,00							5.992.898,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	2.294.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	5.992.898,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.454.000,00							3.553.739,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.454.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	3.553.739,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.454.000,00							3.553.739,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.454.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	3.553.739,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						18.907.718.041,00					-		21.035.495.152,00	
		Laporan Administrasi Keuangan						18.907.718.041,00					-		21.035.495.152,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	49.517.750,00						5 Dokumen	29.344.838,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	6.513.500,00						4 Laporan	28.408.380,00	
	2.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						12.475.250,00							5.384.453,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	12.475.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	5.384.453,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.202.600,00							5.992.898,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	1.202.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	5.992.898,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						33.305.475,00					-		53.666.682,00	
		Laporan Barang Milik Daerah						33.305.475,00					-		53.666.682,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	33.305.475,00						4 Laporan	53.666.682,00	
	2.07.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						6.490.025,00							12.739.616,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	6.490.025,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	12.739.616,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						91.659.755,00					-		64.960.078,00	
		Jumlah ASN yang mendapat pelatihan						91.659.755,00					-		64.960.078,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang		29 Orang	29 Orang	77.230.455,00						29 Orang	54.191.172,00	
	2.07.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							5.384.453,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	29 Orang		29 Orang	15 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Orang	5.384.453,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						645.502.350,00					-		269.014.354,00	
		Laporan administrasi umum						645.502.350,00					-		269.014.354,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	19.050.000,00						20 Dokumen	21.537.813,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	43.500.000,00						4 Laporan	40.383.399,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	142.228.300,00						4 Laporan	64.613.437,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 Paket		73 Paket	73 Paket	75.759.750,00						73 Paket	28.886.481,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	26.732.300,00						16 Paket	23.925.925,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	46 Paket		46 Paket	46 Paket	24.359.000,00						46 Paket	19.669.409,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		29 Paket	29 Paket	313.873.000,00						29 Paket	69.997.890,00	
	2.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.214.000,00							4.146.029,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	46 Paket		46 Paket	5 Paket	3.214.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		46 Paket	4.146.029,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						49.534.000,00							10.768.906,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	29 Paket		29 Paket	7 Paket	49.534.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		29 Paket	10.768.906,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.292.150,00							5.384.453,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	73 Paket		73 Paket	18 Paket	15.292.150,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		73 Paket	5.384.453,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.490.000,00							2.153.781,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	3 Paket	2.490.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Paket	2.153.781,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						3.600.000,00							2.692.227,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	20 Dokumen		20 Dokumen	1 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Dokumen	2.692.227,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.800.000,00							5.384.453,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	5.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	5.384.453,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.472.500,00							10.768.906,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	10.472.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	10.768.906,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		442.051.716,00	
		jumlah sarana dan prasarana kantor						0,00					-		442.051.716,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	7 Unit	0,00						7 Unit	442.051.716,00	
	2.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	7 Unit		7 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	80.000.000,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.828.203.300,00					-		2.914.970.232,00	
		jumlah jasa Penunjang Urusan Pemerintahan						2.828.203.300,00					-		2.914.970.232,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	484.477.300,00						4 Laporan	521.753.508,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.502.000,00						4 Laporan	10.346.463,00	
	2.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						502.000,00							2.961.449,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	502.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	2.961.449,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						42.126.000,00							53.306.086,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	42.126.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	53.306.086,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						252.526.000,00					-		519.933.562,00	
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara						252.526.000,00					-		519.933.562,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	101.750.000,00						4 Unit	188.455.860,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	109.050.000,00						26 Unit	231.326.874,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	41.726.000,00						4 Unit	100.150.828,00	
	2.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.620.000,00							53.844.531,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	4 Unit	25.620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		26 Unit	53.844.531,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						18.500.000,00							26.922.266,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	18.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	26.922.266,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						7.350.000,00							17.768.695,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	1 Unit	7.350.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	17.768.695,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
133.	**2.07.06**	**PROGRAM PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN**						**733.053.092,00**							**2.141.220.000,00**	
		Terlindungi hak-hak dasar pekerja						***95.956.900,00***							***294.030.000,00***	
			999.Jumlah Tenaga kerja yang terlindungi hak-hak dasaranya	55843 Orang		53664 Orang	54201 Orang	95.956.900,00						54743 Orang	294.030.000,00	
	2.07.06.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan						733.053.092,00					-		2.141.220.000,00	
		Jumlah Perusahaan perusahaan yang menerapkan norma ketenagakerjaan dan K3						733.053.092,00					-		2.141.220.000,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	195 Perusahaan		135 Perusahaan	150 Perusahaan	539.573.032,00						165 Perusahaan	1.478.092.500,00	
			Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	232 Perusahaan		192 Perusahaan	202 Perusahaan	153.309.260,00						212 Perusahaan	464.227.500,00	
	2.07.06.1.01.0001	Pengawasan Pelaksanaan Norma Kerja di Perusahaan						52.623.550,00							196.987.500,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan Norma Ketenagakerjaan di Perusahaan (Termasuk Perusahaan yang Mempekerjakan TKA)	232 Perusahaan		192 Perusahaan	75 Perusahaan	52.623.550,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		212 Perusahaan	196.987.500,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
	2.07.06.1.01.0003	Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan						43.333.350,00							97.042.500,00	
		Terlaksananya Pelayanan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menerapkan K3	195 Perusahaan		135 Perusahaan	45 Perusahaan	43.333.350,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		165 Perusahaan	97.042.500,00	Balai Pengawasan Ketenagakerjaan, Keselamatan, dan Kesehatan Kerja Pulau Sumbawa
		Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan						**90.273.378.256,00**							**109.790.781.646,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**87.840.378.256,00**							**105.416.741.646,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**87.840.378.256,00**							**105.416.741.646,00**	
134.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**86.488.727.971,00**							**86.355.663.106,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***83.685.378.256,00***							***81.521.394.386,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor		81,54 Skor	82,35 Skor	83.685.378.256,00						83,18 Skor	81.521.394.386,00	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						201.040.200,00					-		304.500.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						201.040.200,00					-		304.500.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	5.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	3 Berita Acara		3 Berita Acara	3 Berita Acara	0,00						3 Berita Acara	21.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	0,00						2 Data	3.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	10.450.500,00						11 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	54.887.400,00						6 Dokumen	97.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	11.130.600,00						11 Dokumen	6.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	16.187.300,00						3 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	16.232.300,00						3 Dokumen	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	19.196.600,00						8 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	72.955.500,00						10 Laporan	100.000.000,00	
	2.11.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						54.887.400,00							97.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	54.887.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	97.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						15.712.300,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	15.712.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	15.712.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						15.667.300,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	15.667.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	15.667.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.450.500,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	11 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	10.450.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						11.130.600,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	11 Dokumen		11 Dokumen	1 Dokumen	11.130.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Dokumen	6.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						19.196.600,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	19.196.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						72.955.500,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	72.955.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	2 Data		2 Data	2 Data	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Data	3.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							5.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						0,00							21.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	3 Berita Acara		3 Berita Acara	3 Berita Acara	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Berita Acara	21.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						56.811.479.709,00					-		55.952.619.434,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						56.811.479.709,00					-		55.952.619.434,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	99.249.100,00						3 Dokumen	67.880.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	3.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	11.790.400,00						3 Laporan	14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	144 Laporan	44.317.000,00						144 Laporan	24.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	428 Orang/ Bulan		428 Orang/ Bulan	428 Orang/ Bulan	56.656.123.209,00						428 Orang/ Bulan	55.838.539.434,00	
	2.11.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						56.656.123.209,00							55.838.539.434,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	428 Orang/ Bulan		428 Orang/ Bulan	428 Orang/ Bulan	56.656.123.209,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		428 Orang/ Bulan	55.838.539.434,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						83.229.100,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	83.229.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	83.229.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						11.270.400,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	11.270.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	12.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	11.270.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	12.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						43.040.300,00							17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	18 Laporan	43.040.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		144 Laporan	17.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan		54 Laporan	18 Laporan	43.040.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	17.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	3.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						90.565.205,00					-		91.900.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah						90.565.205,00					-		91.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.980.000,00						2 Dokumen	42.300.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.499.800,00						1 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.780.600,00						3 Laporan	30.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.347.200,00						4 Laporan	9.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	14.957.605,00						3 Dokumen	3.500.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						90.565.205,00					-		91.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.980.000,00						2 Dokumen	42.300.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.499.800,00						1 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.780.600,00						3 Laporan	30.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.347.200,00						4 Laporan	9.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	14.957.605,00						3 Dokumen	3.500.000,00	
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						13.955.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	13.955.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	13.955.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						21.980.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	21.980.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	21.980.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						11.499.800,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.499.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	6.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						13.589.200,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	13.589.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	2 Laporan	13.589.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						20.085.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	20.085.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	22.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	20.085.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	22.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						13.417.360,00					-		12.500.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah						13.417.360,00					-		12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	335.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	13.082.360,00						3 Laporan	8.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						13.417.360,00					-		12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	335.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	13.082.360,00						3 Laporan	8.500.000,00	
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						12.461.360,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan		8 Laporan	12 Laporan	12.461.360,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	12.461.360,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						287.988.500,00					-		175.700.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						287.988.500,00					-		175.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	38.503.100,00						3 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	60.265.900,00						3 Dokumen	76.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	33.129.500,00						3 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	130 Orang	14.178.000,00						130 Orang	6.500.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	1 Paket	0,00						00 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang		35 Orang	35 Orang	141.912.000,00						35 Orang	80.000.000,00	
	2.11.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	0 Paket		0 Paket	550 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		00 Paket	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						32.809.500,00							4.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	32.809.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	4.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	32.809.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	4.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						37.853.000,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	37.853.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	4.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	37.853.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	4.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						59.935.900,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	59.935.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	59.935.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						141.912.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	35 Orang		35 Orang	35 Orang	141.912.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Orang	80.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						13.943.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	50 Orang	13.943.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	2.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	50 Orang	13.943.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	2.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						342.547.331,00					-		306.420.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	96 Dokumen	70.900.000,00						96 Dokumen	53.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	14.773.000,00						36 Laporan	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	173.337.000,00						38 Laporan	191.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	31.690.021,00						4 Paket	14.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	8.080.000,00						7 Paket	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	9.700.430,00						7 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	26.322.880,00						8 Paket	9.000.000,00	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						6.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	5 Paket	6.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	5 Paket	6.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.817.140,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	5 Paket	2.817.140,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	5 Paket	2.817.140,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	2.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						7.847.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	10 Paket	7.847.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	10 Paket	7.847.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	4.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						12.450.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	2 Paket	12.450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	8.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	12.450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	8.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						70.900.000,00							51.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	24 Dokumen	70.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Dokumen	51.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	24 Dokumen	70.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	51.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						11.873.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	11.873.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Laporan	6.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	11.873.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	6.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						151.700.000,00							164.400.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	36 Laporan	151.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Laporan	164.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	36 Laporan	151.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Laporan	164.400.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80 Dokumen		80 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.197.941.500,00					-		1.929.950.952,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah						1.197.941.500,00					-		1.929.950.952,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	77.900.000,00						8 Paket	102.500.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit		1 Unit	1 Unit	70.000.000,00						11 Unit	700.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		8 Unit	20 Unit	1.050.041.500,00						20 Unit	516.500.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	8 Unit	0,00						8 Unit	110.950.952,00	
	2.11.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							500.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						70.000.000,00							700.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	11 Unit		1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Unit	700.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						65.880.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	65.880.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	65.880.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						978.841.500,00							294.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	7 Unit	978.841.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	294.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		8 Unit	7 Unit	978.841.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	294.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							110.950.952,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	110.950.952,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	110.950.952,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						24.488.736.063,00					-		23.482.186.520,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.488.736.063,00					-		23.482.186.520,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		288 Laporan	288 Laporan	505.249.663,00						288 Laporan	833.432.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	23.973.280.000,00						6 Laporan	22.643.754.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	10.206.400,00						14 Laporan	5.000.000,00	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.046.400,00							3.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	12 Laporan	9.046.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	3.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	12 Laporan	9.046.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	3.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						354.000.000,00							169.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		288 Laporan	0 Laporan	354.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		288 Laporan	169.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	0 Laporan	354.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	169.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						23.970.880.000,00							22.638.954.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	4 Laporan	23.970.880.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	22.638.954.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan		80 Laporan	4 Laporan	23.970.880.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Laporan	22.638.954.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						725.702.247,00					-		940.850.000,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						725.702.247,00					-		940.850.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	412.132.247,00						3 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	57 Unit	233.340.000,00						57 Unit	295.910.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	0,00						16 Unit	3.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	37 Unit	80.230.000,00						37 Unit	176.440.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	0,00						8 Unit	140.000.000,00	
	2.11.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						164.100.000,00							238.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	21 Unit	164.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57 Unit	238.100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	21 Unit	164.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	238.100.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							2.250.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	9 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	2.250.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	9 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	2.250.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.480.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	30 Unit	15.480.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	22.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	30 Unit	15.480.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	22.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						412.132.247,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		8 Unit	1 Unit	412.132.247,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	412.132.247,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						342.547.331,00					-		306.420.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						342.547.331,00					-		306.420.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	-	7.744.000,00						-	0,00	
	2.11.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.744.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-		-	1 Paket	7.744.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
135.	**2.11.02**	**PROGRAM Perencanaan LINGKUNGAN HIDUP**						**128.220.000,00**							**750.000.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas kajian lingkungan untuk memitigasi dampak KRP						***128.220.000,00***							***750.000.000,00***	
			999.Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	128.220.000,00						100 Persentase	750.000.000,00	
	2.11.02.1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi						80.020.000,00					-		350.000.000,00	
		Meningkatnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) di Provinsi secara terencana						80.020.000,00					-		350.000.000,00	
			Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	80.020.000,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
	2.11.02.1.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi						80.020.000,00							350.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Telaahan kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	80.020.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.02.1.01.0003	Penyusunan dokumen rencana tematik berbasis arahan RPPLH						0,00							0,00	
		Tersedianya dokumen rencana tematik yang merupakan bagian arahan RPPLH	Jumlah dokumen RPPMA, RPPMU, RPPML, RPPEG,RPPKarst yang ditetapkan	2 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.02.1.01.0006	Peninjauan Kembali terhadap RPPLH Provinsi						0,00							0,00	
		RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	Dokumen RPPLH Provinsi yang dilakukan peninjauan kembali	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.02.1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi						48.200.000,00					-		400.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi						48.200.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	48.200.000,00						4 Dokumen	400.000.000,00	
	2.11.02.1.02.0007	Penyelenggaraan KLHS Rencana Tata Ruang						0,00							0,00	
		Tersusunnya KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut	Jumlah Dokumen KLHS Rencana Tata Ruang Provinsi yang Terintegrasi dengan Perencanaan Darat dan Laut yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.02.1.02.0009	Pembinaan, Penilaian, Evaluasi Terhadap KLHS Kabupaten/Kota						48.200.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	Jumlah dokumen telaahan kesesuaian kaidah dalam penyusunan KLHS kabupaten/kota	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	48.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	400.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
136.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**1.495.273.663,00**							**7.745.950.000,00**	
		Menurunnya pencemaran air dan udara						***479.120.000,00***							***4.020.000.000,00***	
			999.Jumlah permohonan pengujian yang dilayani	650 Permohonan		478 Permohonan	521 Permohonan	479.120.000,00						564 Permohonan	4.020.000.000,00	
			999.Jumlah seluruh pengujian yang dilakukan terhadap parameter	235 Kali		163 Kali	181 Kali	479.120.000,00						199 Kali	4.020.000.000,00	
			999.Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas air	22.53 %		15.39 %	16.93 %	479.120.000,00						18.62 %	4.020.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas air laut	100 %		100 %	100 %	479.120.000,00						100 %	4.020.000.000,00	
			999.Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas udara	100 %		100 %	100 %	479.120.000,00						100 %	4.020.000.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup						1.295.273.663,00					-		6.765.950.000,00	
		Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						1.295.273.663,00					-		6.765.950.000,00	
			Dokumen Neraca SDA-LH yang disusun sesuai kewenangannya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	133.040.000,00						2 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	230.000.000,00	
			Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.640.000,00						2 Dokumen	200.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	70.440.000,00						5 Laporan	1.720.000.000,00	
			Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	0,00						21 Laporan	440.000.000,00	
	2.11.03.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim						0,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	230.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.01.0006	Pelaksanaan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan						0,00							440.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan	Meningkatnya jumlah kegiatan sosialisasi, pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan upaya inventarisasi GRK, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	21 Laporan		21 Laporan	21 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		21 Laporan	440.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.01.0007	Pelaksanaan upaya adaptasi perubahan iklim tingkat provinsi						70.440.000,00							1.720.000.000,00	
		Terlaksananya upaya adaptasi perubahan iklim di tingkat provinsi	Jumlah pelaksanaan adaptasi perubahan iklim	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	70.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Laporan	1.720.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.03.1.01.0011	Pelaksanaan inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK						133.040.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya dokumen hasil inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK	Jumlah dokumen data inventarisasi GRK dan profil emisi GRK	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	133.040.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.01.0012	Penyusunan dokumen status lingkungan hidup daerah						75.640.000,00							200.000.000,00	
		Dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	Jumlah dokumen status lingkungan hidup daerah yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	75.640.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.01.0017	Penyusunan Neraca SDA-LH Provinsi						0,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Neraca SDA-LH sesuai kewenangan Provinsi	Dokumen Neraca SDA-LH yang disusun sesuai kewenangannya	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						200.000.000,00					-		980.000.000,00	
		Meningkatnya penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						200.000.000,00					-		980.000.000,00	
			Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00						10 Laporan	880.000.000,00	
			Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik		2 Titik	2 Titik	150.000.000,00						2 Titik	100.000.000,00	
	2.11.03.1.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat						50.000.000,00							880.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	880.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.03.1.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup						150.000.000,00							100.000.000,00	
		Sumber Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan	2 Titik		2 Titik	2 Titik	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Titik	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
137.	**2.11.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)**						**130.300.000,00**							**1.543.710.000,00**	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati						***130.300.000,00***							***1.543.710.000,00***	
			999.Persentase RTH	10.62 Persentase		10.20 Persentase	10.30 Persentase	130.300.000,00						10.41 Persentase	1.543.710.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.04.1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi						130.300.000,00					-		1.543.710.000,00	
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi						130.300.000,00					-		1.543.710.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	130.300.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30 Orang		30 Orang	30 Orang	0,00						30 Orang	50.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	5 Ha		5 Ha	5 Ha	0,00						5 Ha	1.493.710.000,00	
	2.11.04.1.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						130.300.000,00							0,00	
		Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	130.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.04.1.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)						0,00							1.493.710.000,00	
		Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang Dikelola	Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	5 Ha		5 Ha	5 Ha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Ha	1.493.710.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.04.1.01.0006	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati						0,00							50.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah Orang yang Meningkat Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30 Orang		30 Orang	1 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Orang	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.04.1.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati						0,00							0,00	
		Sarana dan Prasarana Keanekaragam Hayati yang Dikelola	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang Dikelola	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
138.	**2.11.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)**						**150.900.000,00**							**1.394.500.000,00**	
		Meningkatnya penanganan bahan berbahaya dan beracun (B3) limbah bahan berbahaya dan beracun (LIMBAH B3)						***150.900.000,00***							***1.394.500.000,00***	
			999.Persentase Limbah B3 yang Terkelola	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	150.900.000,00						100 Persentase	1.394.500.000,00	
	2.11.05.1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						150.900.000,00					-		1.394.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pengumpulan limbah B3 lintas daerah						150.900.000,00					-		1.394.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	357.000.000,00	
			Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	350.000.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	149 Usaha		11 Usaha	22 Usaha	100.900.000,00						55 Usaha	687.500.000,00	
	2.11.05.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan						50.000.000,00							357.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 Dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan Yang Bukan Kewenangan Provinsi Serta Pelaksanaan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Sesuai Kewenangannya	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	357.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.05.1.01.0003	Fasilitasi Pemenuhan Persetujuan Teknis Pengumpulan Limbah B3 skala provinsi yang terintegrasi dengan Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha						0,00							350.000.000,00	
		Terfasilitasinya pemenuhan persetujuan teknis pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	Jumlah fasilitasi pemenuhan persetujuan teknis Pengumpulan Limbah B3 skala Provinsi yang terintegrasi dengan persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasional, dan Perizinan Berusaha	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	350.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.05.1.01.0004	Pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala provinsi						100.900.000,00							687.500.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi	Jumlah pembinaan dan pemantauan pelaksanaan pengumpulan limbah B3 skala Provinsi yang dilakukan	149 Usaha		11 Usaha	22 Usaha	100.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55 Usaha	687.500.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
139.	**2.11.06**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)**						**211.140.000,00**							**1.662.760.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan usaha dan/kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan						***211.140.000,00***							***1.662.760.000,00***	
			999.Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah Provinsi	100 %		100 %	100 %	211.140.000,00						100 %	1.662.760.000,00	
	2.11.06.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						211.140.000,00					-		1.662.760.000,00	
		Meningkatnya pembinaan dan pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						211.140.000,00					-		1.662.760.000,00	
			Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	352 Usaha/Kegiatan		46 Usaha/Kegiatan	73 Usaha/Kegiatan	110.000.000,00						208 Usaha/Kegiatan	1.268.800.000,00	
			Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						2 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang		1 Orang	2 Orang	0,00						2 Orang	105.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	38 Dokumen		20 Dokumen	26 Dokumen	101.140.000,00						30 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum	6 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	153.960.000,00	
	2.11.06.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH						101.140.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kegiatan Fasilitasi Rekomendasi dan/atau Pemenuhan Ketentuan Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan 0perasi yang Diberikan	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan operasi yang diberikan	38 Dokumen		20 Dokumen	26 Dokumen	101.140.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		30 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.06.1.01.0005	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						0,00							105.000.000,00	
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang		1 Orang	2 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	105.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.06.1.01.0007	Pembentukan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup						0,00							60.000.000,00	
		Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah yang dibentuk	Jumlah PNS yang dibentuk dan diangkat menjadi Fungsional PPLHD	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.06.1.01.0009	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						110.000.000,00							1.268.800.000,00	
		Seluruh Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi yang diawasi	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	352 Usaha/Kegiatan		46 Usaha/Kegiatan	73 Usaha/Kegiatan	110.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		208 Usaha/Kegiatan	1.268.800.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.06.1.01.0010	Layanan Sarana Prasarana Penegakan Hukum bidang Lingkungan Hidup						0,00							153.960.000,00	
		Penyediaan Sarana Prasarana Penegakan Hukum Bidang Lingkungan Hidup	Jumlah Sarana Prasarana yang disediakan untuk Pengawas Lingkungan Hidup, Pengendali Dampak Lingkungan dan PPNS untuk menunjang Kinerja Penegakan Hukum	6 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	153.960.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
140.	**2.11.08**	**PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**202.113.274,00**							**1.264.640.000,00**	
		Meningkatnya partisipasi lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						***202.113.274,00***							***1.264.640.000,00***	
			999.Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	407 Unit		278 Unit	306 Unit	202.113.274,00						337 Unit	1.264.640.000,00	
	2.11.08.1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga KeMasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi						202.113.274,00					-		1.264.640.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kesadaran lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						202.113.274,00					-		1.264.640.000,00	
			Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	31 Lembaga		6 Lembaga	7 Lembaga	101.440.000,00						8 Lembaga	160.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	252 Orang		15 Orang	60 Orang	50.673.274,00						176 Orang	879.640.000,00	
			Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	251 Dokumen		26 Dokumen	40 Dokumen	50.000.000,00						45 Dokumen	225.000.000,00	
	2.11.08.1.01.0003	Penyelengaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi						50.673.274,00							879.640.000,00	
		Meningkatnya jumlah penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang Terlibat	252 Orang		15 Orang	60 Orang	50.673.274,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		176 Orang	879.640.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.08.1.01.0005	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat						101.440.000,00							160.000.000,00	
		Meningkatnya jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang peduli dan berbudaya lingkungan hidup skala provinsi yang terdaftar di Provinsi yang ditingkatkan kapasitas dan Kompetensi SDM nya	Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH	31 Lembaga		6 Lembaga	7 Lembaga	101.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Lembaga	160.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.08.1.01.0007	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup						50.000.000,00							225.000.000,00	
		Terlaksananya pengembangan generasi lingkungan melalui pembinaan, pendampingan, pembentukan dan pemberdayaan kader lingkungan, penyuluhan, dan pemberian penghargaan	Jumlah pembinaan dan pendampingan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	251 Dokumen		26 Dokumen	40 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		45 Dokumen	225.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
141.	**2.11.09**	**PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT**						**150.000.000,00**							**1.277.200.000,00**	
		Meningkatnya kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						***150.000.000,00***							***1.277.200.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang meningkat kinerjanya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	33.13 %		22.63 %	24.89 %	150.000.000,00						27.38 %	1.277.200.000,00	
	2.11.09.1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi						150.000.000,00					-		1.277.200.000,00	
		Meningkatnya pemberian penghargaan lingkungan hidup bagi masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang terlibat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup						150.000.000,00					-		1.277.200.000,00	
			Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	233 Entitas		43 Entitas	88 Entitas	150.000.000,00						182 Entitas	1.277.200.000,00	
	2.11.09.1.01.0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup						150.000.000,00							1.277.200.000,00	
		Terlaksananya Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantrophi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	233 Entitas		43 Entitas	88 Entitas	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		182 Entitas	1.277.200.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
142.	**2.11.10**	**PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP**						**0,00**							**1.611.140.000,00**	
		Meningkatnya penyelesaian sengketa/kasus tindak pidana lingkungan hidup						***0,00***							***1.611.140.000,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Sengketa/Kasus Tindak Pidana Lingkungan Hidup	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	0,00						100 Persentase	1.611.140.000,00	
	2.11.10.1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi						0,00					-		1.611.140.000,00	
		Meningkatnya kinerja pelayanan pengaduan masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi						0,00					-		1.611.140.000,00	
			Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	16 Perkara		0 Perkara	2 Perkara	0,00						4 Perkara	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	94 Sanksi		10 Sanksi	19 Sanksi	0,00						40 Sanksi	600.000.000,00	
			Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	94 Pengaduan		14 Pengaduan	20 Pengaduan	0,00						43 Pengaduan	645.000.000,00	
			Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00						2 Orang	26.140.000,00	
			Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	16 Perkara		0 Perkara	2 Perkara	0,00						4 Perkara	140.000.000,00	
	2.11.10.1.01.0005	Penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi						0,00							140.000.000,00	
		Diselesaikannya sengketa lingkungan hidup yang ditangani baik Melalui Pengadilan ataupun di Luar Pengadilan yang merupakan kewenangan Provinsi	Jumlah sengketa lingkungan hidup yang ditangani yang menjadi kewenangan Provinsi	16 Perkara		0 Perkara	2 Perkara	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Perkara	140.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.10.1.01.0006	Penyelesaian kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi						0,00							200.000.000,00	
		Diselesaikannya kasus tindak pidana lingkungan hidup yang merupakan kewenangan Provinsi sampai P-21	Jumlah kasus tindak pidana lingkungan hidup (P-21) yang merupakan kewenangan Provinsi	16 Perkara		0 Perkara	2 Perkara	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Perkara	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.10.1.01.0009	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi						0,00							645.000.000,00	
		Penanganan Pengelolaan pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	94 Pengaduan		14 Pengaduan	20 Pengaduan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		43 Pengaduan	645.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.10.1.01.0010	Penerapan sanksi administrasi yang menjadi kewenangan Provinsi						0,00							600.000.000,00	
		Diterapkannya sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggungjawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	Jumlah penerapan sanksi administratif yang dikenakan kepada penanggung jawab usaha/kegiatan yang tidak taat dan menjadi kewenangan Provinsi	94 Sanksi		10 Sanksi	19 Sanksi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Sanksi	600.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.10.1.01.0011	Pembentukan dan Peningkatan Kapasitas PPNS Daerah Bidang Lingkungan Hidup						0,00							26.140.000,00	
		PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	Jumlah PPNS Daerah bidang Lingkungan Hidup yang dibentuk dan ditingkatkan kapasitasnya	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	26.140.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
143.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**6.439.361.789,00**							**22.439.250.000,00**	
		Meningkatnya penanganan sampah dan pengurangan sampah						***2.703.206.726,00***							***10.017.897.260,00***	
			999.Persentase penanganan sampah	70 %		64.2 %	69.7 %	2.703.206.726,00						70 %	10.017.897.260,00	
			999.Persentase pengurangan sampah	30 %		29.11 %	30 %	2.703.206.726,00						30 %	10.017.897.260,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						6.439.361.789,00					-		22.439.250.000,00	
		Meningkatnya penanganan sampah di TPA Regional						6.439.361.789,00					-		22.439.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.463.206.726,00						1 Dokumen	5.447.900.117,00	
			Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	190.000.000,00	
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	0,00						6 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	490 Unit		113 Unit	219 Unit	1.240.000.000,00						129 Unit	3.869.997.143,00	
			Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	847.31 Ton		847.31 Ton	847.31 Ton	0,00						847.31 Ton	150.000.000,00	
			Jumlah tonase timbulan sampah regional yang ditangani lintas kabupaten/kota	114519 Ton		114519 Ton	114519 Ton	0,00						114519 Ton	200.000.000,00	
		Meningkatnya penanganan sampah melalui pemilahan dari sumbernya dan Meningkatnya kinerja pengolahan sampah metode 3R/BSF						6.439.361.789,00					-		22.439.250.000,00	
			Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.463.206.726,00						1 Dokumen	5.447.900.117,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	190.000.000,00	
			Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	0,00						6 Dokumen	60.000.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	490 Unit		113 Unit	219 Unit	1.240.000.000,00						129 Unit	3.869.997.143,00	
			Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	847.31 Ton		847.31 Ton	847.31 Ton	0,00						847.31 Ton	150.000.000,00	
			Jumlah tonase timbulan sampah regional yang ditangani lintas kabupaten/kota	114519 Ton		114519 Ton	114519 Ton	0,00						114519 Ton	200.000.000,00	
	2.11.11.1.01.0009	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi						0,00							190.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Provinsi	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah provinsi yang disusun dan ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	190.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.11.1.01.0010	Pelaksanaan pemantauan, pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional						0,00							60.000.000,00	
		Tersusunnya laporan pemantauan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah laporan pemantauan pembinaan, verifikasi dan pengawasan atas penerapan Rencana, Kebijakan dan Teknis pengelolaan Sampah Regional	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.11.1.01.0012	Pengadaan sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional						1.240.000.000,00							3.869.997.143,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	Jumlah sarana dan prasarana pengelolaan sampah regional	490 Unit		113 Unit	219 Unit	1.240.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		129 Unit	3.869.997.143,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.11.1.01.0014	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota						1.463.206.726,00							5.447.900.117,00	
		Terlaksananya koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.463.206.726,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.447.900.117,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.11.1.01.0015	Pelaksanaan Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah tonase Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus yang menjadi kewenangan provinsi yang ditangani	847.31 Ton		847.31 Ton	847,31 Ton	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		847.31 Ton	150.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.11.1.01.0016	Pelaksanaan penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya penanganan sampah regional lintas kabupaten/kota	Jumlah tonase timbulan sampah regional yang ditangani lintas kabupaten/kota	114519 Ton		114519 Ton	114,519 Ton	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		114519 Ton	200.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	2.11.11.1.01.0018	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Sampah spesifik atau pada Kondisi Khusus						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus	Jumlah Dokumen hasil Koordinasi, Sinkronisasi Penanganan Sampah Spesifik atau pada Kondisi Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.433.000.000,00**							**4.374.040.000,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**2.433.000.000,00**							**4.374.040.000,00**	
144.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**5.380.093.090,00**							**5.136.440.000,00**	
		Meningkatnya kinerja perlindungan hutan						***290.000.000,00***							***500.000.000,00***	
			999. Laju deforestasi (pertahun)	1247.33 Hektar		1901.13 Hektar	1711.01 Hektar	290.000.000,00						1539.91 Hektar	500.000.000,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
		Meningkatnya perlindungan terhadap hutan lindung dan hutan produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	310.000.000,00						9 Dokumen	580.005.200,00	
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	5.000.000,00						24 Operasi	120.000.000,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						290.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	290.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		9 Dokumen	500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	1 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Operasi	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Meningkatnya penanganan lahan kritis						***128.434.000,00***							***178.000.000,00***	
			999.Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	38.71 %		13.52 %	16.4 %	128.434.000,00						20.56 %	178.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
		Meningkatnya hutan dan lahan yang direhabilitasi						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.814.800,00						1 Dokumen	58.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	9 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	44.345.000,00						1 Laporan	130.000.000,00	
			Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha		2 Ha	2 Ha	60.645.000,00						2 Ha	30.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						23.444.000,00							18.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.444.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Dokumen	18.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.04.0004	Pembangunan Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara						60.645.000,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penghijauan Lingkungan di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Lahan yang Dihijaukan di Luar Kawasan Hutan Negara	2 Ha		2 Ha	2 Ha	60.645.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		2 Ha	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.04.0008	Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan						44.345.000,00							130.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	Jumlah Laporan Pembinaan dan/atau Pengawasan dalam Rangka Pengembangan Rehabilitasi Lahan	9 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	44.345.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Laporan	130.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Meningkatnya pengelolaan hutan melalui aspek perencanaan dan tata hutan hutan						***1.543.492.900,00***							***73.000.000,00***	
			999.Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	100 %		100 %	100 %	1.543.492.900,00						100 %	73.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	1.500.000.000,00						0 Dokumen	0,00	
			Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penggunaan kawasan hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Fungsi dan Peruntukan Hutan						1.500.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Usulan Perubahan Peruntukkan dan Fungsi Kawasan Hutan untuk Wilayah Provinsi	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.01.0010	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi persetujuan penggunaan Kawasan hutan (PPKH)						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya kegiatan monitoring dan evaluasi penggunaan kawasan hutan	Laporan data, informasi dan perkembangan pelaksanaan kegiatan penggunaan kawasan hutan	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
		Meningkatnya perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	163.492.900,00						23 Dokumen	368.000.000,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						43.492.900,00							23.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	43.492.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		23 Dokumen	23.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Meningkatnya produktivitas pemanfaatan hutan dan pengolahan hasil hutan						***149.507.100,00***							***240.000.000,00***	
			999.Kontribusi Sektor Kehutanan terhadap PDRB	1.11 Persentase		1.11 Persentase	1.11 Persentase	149.507.100,00						1.11 Persentase	240.000.000,00	
	3.28.03.1.03	Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung						50.823.600,00					-		135.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya pemanfaatan hutan di kawasan hutan produksi dan hutan lindung						50.823.600,00					-		135.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	0,00						5 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.823.600,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	3 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	20.000.000,00	
	3.28.03.1.03.0010	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi						0,00							30.000.000,00	
		Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan produksi	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Produksi yang Disahkan	3 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		3 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.03.0011	Pelayanan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung pada Blok Pemanfaatan Kecuali pada Wilayah Perum Perhutani						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	Jumlah Dokumen Analisis dalam Rangka Pemberian Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH)	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		5 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.03.0012	Penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Dilakukannya penilaian Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan Lindung yang Disahkan	2 Dokumen		0 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		2 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Produksi						50.823.600,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Produksi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.823.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.03.0014	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi Pemanfaatan Hutan di KPHL/P						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan dan evaluasi Pemanfaatan Hutan di wilayah KPHL/P	Jumlah laporan nilai PNBP dari pemanfaatan hutan di KPHL/P	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.03.0015	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan di Kawasan Hutan Lindung						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan PBPH Di Kawasan Hutan Lindung	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.06	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK)						0,00					-		40.000.000,00	
		Meningkatnya produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK)						0,00					-		40.000.000,00	
			Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	2 Unit Managemen		5 Unit Managemen	2 Unit Managemen	0,00						2 Unit Managemen	10.000.000,00	
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	5 Unit Managemen		5 Unit Managemen	5 Unit Managemen	0,00						5 Unit Managemen	25.000.000,00	
			Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	5 Unit Managemen		5 Unit Managemen	5 Unit Managemen	0,00						5 Unit Managemen	5.000.000,00	
	3.28.03.1.06.0005	Fasilitasi hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						0,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya hak akses SI-RPBBPHH bagi PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) Skala Kecil dan menengah	Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah yang memiliki Hak Akses SI-RPBBPHH	5 Unit Managemen		5 Unit Managemen	5 Unit Managemen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		5 Unit Managemen	5.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.06.0006	Fasilitasi PBPHH skala Kecil dan Menengah untuk akses sumber bahan baku (kayu dan/atau HHBK) dan Pasar						0,00							25.000.000,00	
		Terpenuhinya kebutuhan bahan baku dan akses Pasar bagi PBPHH Skala kecil dan menengah	Jumlah Unit managemen PBPHH (kayu dan/atau HHBK) skala Kecil dan menengah beroperasi	5 Unit Managemen		5 Unit Managemen	5 Unit Managemen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		5 Unit Managemen	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.06.0007	Fasilitasi Pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau HHBK skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya pelayanan Perizinan Berusaha Pengolahan Hasil Hutan (PBPHH) Kayu dan/atau Bukan Kayu skala dan menengah kecil yang menjadi kewenangan provinsi	Jumlah permohonan PBPHH Kayu dan/atau Bukan Kayu skala kecil dan menengah yang dilayani	2 Unit Managemen		5 Unit Managemen	2 Unit Managemen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		2 Unit Managemen	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.07	Pelaksanaan Pengolahan Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi <6000 m3/Tahun						98.683.500,00					-		160.000.000,00	
		Meningkatnya produksi hasil hutan kayu dengan Kapasitas Produksi						98.683.500,00					-		160.000.000,00	
			Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	98.683.500,00						3 Laporan	100.000.000,00	
			Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	5 Unit Managemen		0 Unit Managemen	5 Unit Managemen	0,00						5 Unit Managemen	50.000.000,00	
			Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	5 Unit Managemen		0 Unit Managemen	5 Unit Managemen	0,00						5 Unit Managemen	10.000.000,00	
	3.28.03.1.07.0004	Pembinaan dan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						98.683.500,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	Laporan Kegiatan pelaksanaan Pengawasan PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) untuk skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	98.683.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		3 Laporan	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.07.0005	Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah	Laporan kegiatan Pengendalian PBPHH (Kayu dan/atau HHBK) skala kecil dan menengah dan Tindaklanjutnya berupa pengenaan Sanksi Adminsitratif	5 Unit Managemen		0 Unit Managemen	5 Unit Managemen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		5 Unit Managemen	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.03.1.07.0006	Pemantauan Rencana Kerja Operasional Pengolahan Hasil Hutan (RKOPHH) untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah yang menjadi kewenangan provinsi						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan/Monitoring pelaporan RKOPHH untuk PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	Tertib pelaporan RKOPHH untuk Pemegang PBPHH (Kayu dan HHBK) skala usaha kecil dan menengah	5 Unit Managemen		0 Unit Managemen	5 Unit Managemen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		5 Unit Managemen	10.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
145.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**97.062.000,00**							**1.721.900.000,00**	
		meningkatnya kelestarian SDA hayati dan ekosistemnya						***97.062.000,00***							***1.240.000.000,00***	
			999.Indeks keanekaragaman hayati	0.32 Indeks		0.31 Indeks	0.31 Indeks	97.062.000,00						0.31 Indeks	1.240.000.000,00	
	3.28.04.1.02	Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi						24.408.000,00					-		70.000.000,00	
		Meningkatnya perlindungan terhadap tumbuhan dan satwa liar yang tidak dilindungi dan/atau tidak masuk dalam Lampiran (Appendix) CITES (Convension On International Trade In Endangered Species) untuk Kewenangan Daerah Provinsi						24.408.000,00					-		70.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	24.408.000,00						2 Laporan	70.000.000,00	
	3.28.04.1.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES						24.408.000,00							70.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Tumbuhan dan Satwa Liar (TSL) yang Tidak Dilindungi dan/atau Tidak Masuk dalam Lampiran CITES	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	24.408.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		2 Laporan	70.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.04.1.03	Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						72.654.000,00					-		1.170.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam						72.654.000,00					-		1.170.000.000,00	
			Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	250 Orang		100 Orang	100 Orang	37.834.000,00						150 Orang	360.000.000,00	
			Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha		29363.92 Ha	29363.92 Ha	34.820.000,00						29363.92 Ha	810.000.000,00	
	3.28.04.1.03.0005	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						37.834.000,00							360.000.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kelompok/Masyarakat yang Diberdayakan	250 Orang		100 Orang	100 Orang	37.834.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		150 Orang	360.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.04.1.03.0006	Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting Kewenangan Daerah Provinsi						34.820.000,00							810.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting	Luas Daerah Penyangga di Kawasan Bernilai Ekosistem Penting yang Dikelola	Ha		29363.92 Ha	29,363.92 Ha	34.820.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		29363.92 Ha	810.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
146.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**504.385.200,00**							**2.671.010.000,00**	
		Meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan						***154.140.000,00***							***337.000.000,00***	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	10 %		10 %	10 %	154.140.000,00						10 %	337.000.000,00	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10 %		10 %	10 %	154.140.000,00						10 %	337.000.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	127.074.000,00						8 Unit	1.525.873.000,00	
			Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	67 Orang		67 Orang	67 Orang	64.711.000,00						67 Orang	122.000.000,00	
			Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	280 Orang		280 Orang	280 Orang	27.447.000,00						280 Orang	105.000.000,00	
			Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar		100 Hektar	100 Hektar	38.873.000,00						100 Hektar	50.000.000,00	
	3.28.05.1.01.0004	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Penyuluh Kehutanan						64.711.000,00							122.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas untuk Penyuluh Kehutanan	Jumlah Penyuluh Kehutanan yang Dilakukan Peningkatan Kapasitas	67 Orang		67 Orang	67 Orang	64.711.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		67 Orang	122.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.05.1.01.0007	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM Bidang Kehutanan						27.447.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya SDM bidang Kehutanan yang Meningkat	Jumlah SDM bidang kehutanan yang meningkat kapasitasnya	280 Orang		280 Orang	280 Orang	27.447.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		280 Orang	105.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.05.1.01.0008	Penyiapan Perhutanan Sosial						38.873.000,00							50.000.000,00	
		Terfasilitasinya penerbitan persetujuan pengelolaan perhutanan sosial	Luas Kawasan yang disiapkan untuk Perhutanan Sosial	100 Hektar		100 Hektar	100 Hektar	38.873.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		100 Hektar	50.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						23.109.000,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	27 Unit	23.109.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		8 Unit	60.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
147.	**3.28.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)**						**70.364.000,00**							**1.711.040.000,00**	
		Meningkatnya kelestarian dan fungsi DAS						***70.364.000,00***							***1.511.040.000,00***	
			999.Persentase Tutupan Lahan pada Sempadan DAS	0.61 Persentase		0.61 Persentase	0.61 Persentase	70.364.000,00						0.61 Persentase	1.511.040.000,00	
	3.28.06.1.01	Pelaksanaan Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						70.364.000,00					-		1.711.040.000,00	
		Meningkatnya DAS yang dipelihara dan dipulihkan fungsinya						70.364.000,00					-		1.711.040.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.724.000,00						2 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	0,00						2 Lembaga	100.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	250 Orang		50 Orang	100 Orang	34.640.000,00						150 Orang	1.411.040.000,00	
	3.28.06.1.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS						34.640.000,00							1.411.040.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	Jumlah Orang yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Kegiatan Pengelolaan DAS	250 Orang		50 Orang	100 Orang	34.640.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	1.411.040.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.06.1.01.0005	Pengembangan Kelembagaan Pengelolaan DAS						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pembentukan dan Pengembangan Forum Pengelolaan DAS	Jumlah Lembaga yang Dibentuk dan Dikembangkan dalam Forum Pengelolaan DAS	2 Lembaga		2 Lembaga	2 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.06.1.01.0007	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan DAS Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan dalam Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah						0,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya dan ditetapkannya Rencana Pengelolaan DAS	Jumlah dokumen rencana pengelolaan DAS yang ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
	3.28.06.1.01.0008	Peningkatan Koordinasi dan Sinkronisasi Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS						35.724.000,00							100.000.000,00	
		Meningkatnya Optimalisasi Fungsi dan Daya Dukung Wilayah DAS	Jumlah dokumen sinkronisasi dan koordinasi optimalisasi DAS	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	35.724.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
		Balai Laboratorium Lingkungan						**1.479.753.522,00**							**4.349.067.920,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.479.753.522,00**							**4.349.067.920,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**1.479.753.522,00**							**4.349.067.920,00**	
148.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**86.488.727.971,00**							**86.355.663.106,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***462.559.859,00***							***656.617.920,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor		81,54 Skor	82,35 Skor	462.559.859,00						83,18 Skor	656.617.920,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						201.040.200,00					-		304.500.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						201.040.200,00					-		304.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	16.187.300,00						3 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	16.232.300,00						3 Dokumen	30.000.000,00	
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						520.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						520.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						56.811.479.709,00					-		55.952.619.434,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						56.811.479.709,00					-		55.952.619.434,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	99.249.100,00						3 Dokumen	67.880.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	11.790.400,00						3 Laporan	14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	144 Laporan	44.317.000,00						144 Laporan	24.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						11.580.000,00							8.940.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	11.580.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	8.940.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	11.580.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	8.940.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						520.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		8 Laporan	2 Laporan	520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						1.276.700,00							3.600.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	18 Laporan	1.276.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		144 Laporan	3.600.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan		54 Laporan	18 Laporan	1.276.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	3.600.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						90.565.205,00					-		91.900.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah						90.565.205,00					-		91.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.780.600,00						3 Laporan	30.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.347.200,00						4 Laporan	9.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	14.957.605,00						3 Dokumen	3.500.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						90.565.205,00					-		91.900.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.780.600,00						3 Laporan	30.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.347.200,00						4 Laporan	9.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	14.957.605,00						3 Dokumen	3.500.000,00	
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.002.605,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	1.002.605,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	1.002.605,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						758.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	758.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	758.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						4.095.600,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	4.095.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	5.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	4.095.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	5.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						13.417.360,00					-		12.500.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah						13.417.360,00					-		12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	335.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	13.082.360,00						3 Laporan	8.500.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						13.417.360,00					-		12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	335.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	13.082.360,00						3 Laporan	8.500.000,00	
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						335.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	335.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	335.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						621.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	621.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	621.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						287.988.500,00					-		175.700.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						287.988.500,00					-		175.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	38.503.100,00						3 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	60.265.900,00						3 Dokumen	76.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	33.129.500,00						3 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	130 Orang	14.178.000,00						130 Orang	6.500.000,00	
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						320.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	320.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	320.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						650.100,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	650.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	650.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						330.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	330.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	330.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						235.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	40 Orang	235.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	2.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	40 Orang	235.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	2.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						342.547.331,00					-		306.420.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						342.547.331,00					-		306.420.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	70.900.000,00						48 Dokumen	53.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	14.773.000,00						36 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	173.337.000,00						38 Laporan	191.400.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	31.690.021,00						8 Paket	14.500.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	8.080.000,00						8 Paket	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	9.700.430,00						7 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	26.322.880,00						12 Paket	9.000.000,00	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.080.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	2.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	2.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	5.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.883.290,00							500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	6.883.290,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	6.883.290,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						18.475.880,00							500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	18.475.880,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	18.475.880,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						19.240.021,00							6.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	19.240.021,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	6.500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	19.240.021,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	6.500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.260.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	1.260.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Dokumen	1.260.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.900.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan		96 Laporan	1 Laporan	2.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Laporan	2.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	2.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	2.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						21.637.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	1 Laporan	21.637.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Laporan	15.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	1 Laporan	21.637.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Laporan	15.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80 Dokumen		80 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Dokumen	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	1.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.197.941.500,00					-		1.929.950.952,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah						1.197.941.500,00					-		1.929.950.952,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	77.900.000,00						2 Paket	102.500.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	8 Unit	1.050.041.500,00						14 Unit	516.500.000,00	
	2.11.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						12.020.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	12.020.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	2.500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	12.020.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	2.500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						71.200.000,00							222.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		8 Unit	1 Unit	71.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	222.500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	1 Unit	71.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	222.500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						24.488.736.063,00					-		23.482.186.520,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.488.736.063,00					-		23.482.186.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	505.249.663,00						10 Laporan	833.432.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	23.973.280.000,00						6 Laporan	22.643.754.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	10.206.400,00						14 Laporan	5.000.000,00	
	2.11.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.160.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	1.160.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	1.500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.160.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.500.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						151.249.663,00							139.637.920,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	151.249.663,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	139.637.920,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		288 Laporan	3 Laporan	151.249.663,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		288 Laporan	139.637.920,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan		80 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Laporan	2.400.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	2.400.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						725.702.247,00					-		940.850.000,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						725.702.247,00					-		940.850.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	412.132.247,00						3 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	233.340.000,00						25 Unit	295.910.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	0,00						14 Unit	3.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	80.230.000,00						16 Unit	176.440.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	140.000.000,00	
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						69.240.000,00							39.810.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	3 Unit	69.240.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57 Unit	39.810.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	3 Unit	69.240.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	39.810.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							1.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	1.250.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	1.250.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						64.750.000,00							153.220.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	5 Unit	64.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	153.220.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	5 Unit	64.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	153.220.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	50.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	50.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	50.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	50.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
149.	**2.11.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**						**1.495.273.663,00**							**7.745.950.000,00**	
		Menurunnya pencemaran air dan udara						***1.016.153.663,00***							***3.625.950.000,00***	
			999.Jumlah permohonan pengujian yang dilayani	650 Permohonan		478 Permohonan	521 Permohonan	1.016.153.663,00						564 Permohonan	3.625.950.000,00	
			999.Jumlah seluruh pengujian yang dilakukan terhadap parameter	235 Kali		163 Kali	181 Kali	1.016.153.663,00						199 Kali	3.625.950.000,00	
			999.Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas air	22.53 %		15.39 %	16.93 %	1.016.153.663,00						18.62 %	3.625.950.000,00	
			999.Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas air laut	100 %		100 %	100 %	1.016.153.663,00						100 %	3.625.950.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase pemenuhan baku mutu parameter kualitas udara	100 %		100 %	100 %	1.016.153.663,00						100 %	3.625.950.000,00	
	2.11.03.1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkugan Hidup						1.295.273.663,00					-		6.765.950.000,00	
		Meningkatnya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup						1.295.273.663,00					-		6.765.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	164.020.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	852.133.663,00						1 Dokumen	3.525.950.000,00	
	2.11.03.1.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut						164.020.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	164.020.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
	2.11.03.1.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi						852.133.663,00							3.525.950.000,00	
		Terlaksananya pengujian di laboratorium lingkungan	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	852.133.663,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	3.525.950.000,00	Balai Laboratorium Lingkungan
		Balai KPH Wilayah I						**845.657.694,00**							**2.178.827.160,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**845.657.694,00**							**2.178.827.160,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**845.657.694,00**							**2.178.827.160,00**	
150.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**4.363.356.964,00**							**5.251.233.435,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***657.372.694,00***							***764.765.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor		81,54 Skor	82,35 Skor	657.372.694,00						83,18 Skor	764.765.000,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	19.220.800,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	47.967.294,00						3 Dokumen	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						1.295.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	1.295.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	1.295.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						502.600,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	502.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	502.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	59.435.100,00						3 Dokumen	39.520.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.699.500,00						3 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	144 Laporan	42.746.740,00						144 Laporan	24.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						4.440.000,00							4.940.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.670.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	1.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						2.547.500,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan		54 Laporan	18 Laporan	2.547.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	18 Laporan	2.547.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		144 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						2.991.400,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	2.991.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	2.991.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						3.600.000,00							4.700.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan		8 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.405.175,00						3 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00						3 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	5.702.350,00						8 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	400 Orang	2.900.000,00						400 Orang	20.000.000,00	
	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						3.807.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	3.807.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	3.807.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	6.600.000,00						48 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	46.620.500,00						36 Laporan	28.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	569.377.474,00						38 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.823.800,00						4 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	24.207.500,00						7 Paket	7.450.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	45.113.995,00						7 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	32.104.160,00						12 Paket	33.394.135,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						8.903.000,00							450.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	8.903.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	450.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	8.903.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	450.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						14.435.600,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	14.435.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	14.435.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						9.039.000,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	9.039.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	9.039.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.773.500,00							500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.773.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	1.773.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.950.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	4.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	4.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						20.128.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	5 Laporan	20.128.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Laporan	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	5 Laporan	20.128.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Laporan	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80 Dokumen		80 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	78.217.800,00						2 Paket	64.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	300.000.000,00						0 Unit	1.600.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	8 Unit	489.567.000,00						14 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	0 Unit	31.122.600,00						1 Unit	200.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	3 Unit	9.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		8 Unit	3 Unit	9.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	402.233.982,00						10 Laporan	394.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00						6 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	5.189.200,00						14 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						111.490.094,00							105.165.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		288 Laporan	3 Laporan	111.490.094,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		288 Laporan	105.165.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	111.490.094,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	105.165.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan		80 Laporan	10 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	10 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		8 Unit	8 Unit	1.365.920.000,00						16 Unit	1.400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	509.930.000,00						25 Unit	526.210.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	0,00						14 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	31.360.000,00						16 Unit	10.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	40.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						102.050.000,00							146.910.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	16 Unit	102.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	146.910.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	16 Unit	102.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57 Unit	146.910.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.750.000,00							1.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	2 Unit	9.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	2 Unit	9.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						345.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	345.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		8 Unit	1 Unit	345.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
151.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**5.380.093.090,00**							**5.136.440.000,00**	
		Meningkatnya kinerja perlindungan hutan						***115.000.000,00***							***199.754.160,00***	
			999. Laju deforestasi (pertahun)	1247.33 Hektar		1901.13 Hektar	1711.01 Hektar	115.000.000,00						1539.91 Hektar	199.754.160,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
		Meningkatnya perlindungan terhadap hutan lindung dan hutan produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	126.001.900,00						8 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	310.000.000,00						9 Dokumen	580.005.200,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	30.160.000,00						8 Operasi	100.000.000,00	
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	5.000.000,00						24 Operasi	120.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	89264 Ha	999.999.990,00						247422 Ha	1.781.434.800,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Dokumen	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						0,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	5 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Operasi	12.500.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						115.000.000,00							162.254.160,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	8,130 Ha	115.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		247422 Ha	162.254.160,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	1 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Operasi	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Meningkatnya penanganan lahan kritis						***27.500.000,00***							***138.000.000,00***	
			999.Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	38.71 %		13.52 %	16.4 %	27.500.000,00						20.56 %	138.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
		Meningkatnya hutan dan lahan yang direhabilitasi						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	8 Unit	1.000.000.000,00						8 Unit	432.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.814.800,00						1 Dokumen	58.000.000,00	
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	16 Unit	114.000.000,00						16 Unit	184.000.000,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	112 Ha	720.000.000,00						112 Ha	448.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						0,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						27.500.000,00							56.000.000,00	
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	14 Ha	27.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		112 Ha	56.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug						0,00							23.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	23.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan						0,00							54.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	54.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Meningkatnya pengelolaan hutan melalui aspek perencanaan dan tata hutan hutan						***15.000.000,00***							***115.000.000,00***	
			999.Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	100 %		100 %	100 %	15.000.000,00						100 %	115.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	8 Unit	30.683.000,00						8 Unit	400.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		8 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
		Meningkatnya perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	15.312.000,00						23 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	163.492.900,00						23 Dokumen	368.000.000,00	
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	23 Dokumen	25.131.400,00						0 Dokumen	0,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						15.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		23 Dokumen	45.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							0,00	
		Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
152.	**3.28.04**	**PROGRAM KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM HAYATI DAN EKOSISTEMNYA**						**97.062.000,00**							**1.721.900.000,00**	
		meningkatnya kelestarian SDA hayati dan ekosistemnya						***0,00***							***481.900.000,00***	
			999.Indeks keanekaragaman hayati	0.32 Indeks		0.31 Indeks	0.31 Indeks	0,00						0.31 Indeks	481.900.000,00	
	3.28.04.1.01	Pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Provinsi						0,00					-		481.900.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan Taman Hutan Raya (TAHURA) Kewenangan Provinsi						0,00					-		481.900.000,00	
			Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa		2 Desa	2 Desa	0,00						2 Desa	42.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	3150 Ha		3150 Ha	3150 Ha	0,00						3150 Ha	74.840.000,00	
			Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	100 Ha		38 Ha	38 Ha	0,00						43 Ha	350.060.000,00	
			Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
	3.28.04.1.01.0008	Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di sekitar TAHURA Provinsi						0,00							42.000.000,00	
		Terlaksanakannya Penguatan Kapasitas dan Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Tahura Provinsi	Jumlah Desa yang Diberdayakan Melalui Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	2 Desa		2 Desa	2 Desa	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Desa	42.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.04.1.01.0011	Perencanaan Pengelolaan TAHURA						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Perencanaan Tahura Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Tahura (Jangka Panjang dan Jangka Pendek) yang Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.04.1.01.0013	Pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa beserta habitatnya di Tahura Provinsi						0,00							350.060.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan jenis tumbuhan, satwa dan habitatnya di Tahura Provinsi	Luas kawasan TAHURA yang diinventarisasi dan Diverifikasi dengan nilai Kehati tinggi	100 Ha		38 Ha	38 Ha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		43 Ha	350.060.000,00	Balai KPH Wilayah I

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.04.1.01.0015	Pengamanan Kawasan TAHURA Provinsi						0,00							74.840.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Kawasan Tahura Provinsi	Luas Kawasan TAHURA Provinsi yang diamankan	3150 Ha		3150 Ha	3,150 Ha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3150 Ha	74.840.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.04.1.01.0016	Penataan kawasan Tahura Provinsi						0,00							0,00	
		Pelaksanan Penataan Blok TAHURA Provinsi	Tersedianya peta blok pengelolaan dan penataan wilayah kerja dari Tahura berdasarkan hasil penataan kawasan Tahura Provinsi	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah I
153.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**504.385.200,00**							**2.671.010.000,00**	
		Meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan						***30.785.000,00***							***446.908.000,00***	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	10 %		10 %	10 %	30.785.000,00						10 %	446.908.000,00	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10 %		10 %	10 %	30.785.000,00						10 %	446.908.000,00	
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	127.074.000,00						8 Unit	1.525.873.000,00	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						0,00							176.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	176.000.000,00	Balai KPH Wilayah I
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	246.280.200,00						-	868.137.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						30.785.000,00							270.908.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	86 Kelompok	30.785.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	270.908.000,00	Balai KPH Wilayah I
		Balai KPH Wilayah II						**775.657.694,00**							**1.180.744.880,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**775.657.694,00**							**1.180.744.880,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**775.657.694,00**							**1.180.744.880,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
154.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**4.363.356.964,00**							**5.251.233.435,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***497.370.794,00***							***569.530.800,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor		81,54 Skor	82,35 Skor	497.370.794,00						83,18 Skor	569.530.800,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	19.220.800,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	47.967.294,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	59.435.100,00						3 Dokumen	39.520.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.699.500,00						3 Laporan	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	144 Laporan	42.746.740,00						144 Laporan	24.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						4.440.000,00							4.940.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan		54 Laporan	18 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	18 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		144 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						500.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						3.600.000,00							4.700.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.405.175,00						3 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00						3 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.702.350,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	130 Orang	2.900.000,00						130 Orang	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						7.121.719,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	7.121.719,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	7.121.719,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	6.600.000,00						48 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	46.620.500,00						36 Laporan	28.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	569.377.474,00						38 Laporan	85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.823.800,00						4 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	24.207.500,00						7 Paket	7.450.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	45.113.995,00						7 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	32.104.160,00						12 Paket	33.394.135,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.315.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	5.315.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	5.315.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						9.093.875,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	9.093.875,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	9.093.875,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.190.000,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	3.190.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	3.190.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.900.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	2.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	2.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						60.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	5 Laporan	60.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Laporan	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	5 Laporan	60.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Laporan	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80 Dokumen		80 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	78.217.800,00						2 Paket	64.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	300.000.000,00						0 Unit	1.600.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	8 Unit	489.567.000,00						14 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	0 Unit	31.122.600,00						1 Unit	200.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						22.217.800,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	22.217.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	22.217.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						218.450.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	3 Unit	218.450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		8 Unit	3 Unit	218.450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	402.233.982,00						10 Laporan	394.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00						6 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	5.189.200,00						14 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						28.372.400,00							29.670.800,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		288 Laporan	3 Laporan	28.372.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		288 Laporan	29.670.800,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	28.372.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	29.670.800,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	10 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan		80 Laporan	10 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.365.920.000,00						3 Unit	1.400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	509.930.000,00						25 Unit	526.210.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	0,00						14 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	31.360.000,00						16 Unit	10.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	40.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						27.620.000,00							27.620.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	3 Unit	27.620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	27.620.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	3 Unit	27.620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57 Unit	27.620.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.440.000,00							1.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	2 Unit	2.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	2 Unit	2.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						93.610.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	93.610.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		8 Unit	1 Unit	93.610.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
155.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**5.380.093.090,00**							**5.136.440.000,00**	
		Meningkatnya kinerja perlindungan hutan						***205.001.900,00***							***112.516.080,00***	
			999. Laju deforestasi (pertahun)	1247.33 Hektar		1901.13 Hektar	1711.01 Hektar	205.001.900,00						1539.91 Hektar	112.516.080,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
		Meningkatnya perlindungan terhadap hutan lindung dan hutan produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	126.001.900,00						8 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	310.000.000,00						9 Dokumen	580.005.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	30.160.000,00						8 Operasi	100.000.000,00	
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	5.000.000,00						24 Operasi	120.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	89264 Ha	999.999.990,00						247422 Ha	1.781.434.800,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Dokumen	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						100.001.900,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	5 Laporan	100.001.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						0,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	2 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Operasi	12.500.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						105.000.000,00							75.016.080,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	3,759 Ha	105.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		247422 Ha	75.016.080,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	1 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Operasi	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Meningkatnya penanganan lahan kritis						***27.500.000,00***							***138.000.000,00***	
			999.Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	38.71 %		13.52 %	16.4 %	27.500.000,00						20.56 %	138.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
		Meningkatnya hutan dan lahan yang direhabilitasi						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	8 Unit	1.000.000.000,00						8 Unit	432.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.814.800,00						1 Dokumen	58.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	16 Unit	114.000.000,00						16 Unit	184.000.000,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	112 Ha	720.000.000,00						112 Ha	448.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						0,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						27.500.000,00							56.000.000,00	
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	14 Ha	27.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		112 Ha	56.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug						0,00							23.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	23.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan						0,00							54.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	54.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Meningkatnya pengelolaan hutan melalui aspek perencanaan dan tata hutan hutan						***15.000.000,00***							***65.000.000,00***	
			999.Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	100 %		100 %	100 %	15.000.000,00						100 %	65.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	8 Unit	30.683.000,00						8 Unit	400.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah II

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
		Meningkatnya perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	163.492.900,00						23 Dokumen	368.000.000,00	
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	23 Dokumen	25.131.400,00						0 Dokumen	0,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						15.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		23 Dokumen	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							0,00	
		Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah II
156.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**504.385.200,00**							**2.671.010.000,00**	
		Meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan						***30.785.000,00***							***262.198.000,00***	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	10 %		10 %	10 %	30.785.000,00						10 %	262.198.000,00	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10 %		10 %	10 %	30.785.000,00						10 %	262.198.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	127.074.000,00						8 Unit	1.525.873.000,00	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						0,00							176.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	176.000.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	246.280.200,00						-	868.137.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						30.785.000,00							86.198.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	20 Kelompok	30.785.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	86.198.000,00	Balai KPH Wilayah II
		Balai KPH Wilayah III						**812.657.694,00**							**1.502.156.780,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**812.657.694,00**							**1.502.156.780,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**812.657.694,00**							**1.502.156.780,00**	
157.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**4.363.356.964,00**							**5.251.233.435,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***614.372.694,00***							***637.538.500,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor		81,54 Skor	82,35 Skor	614.372.694,00						83,18 Skor	637.538.500,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	19.220.800,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	47.967.294,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						30.776.594,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	30.776.594,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	30.776.594,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						2.999.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	2.999.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	2.999.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	59.435.100,00						3 Dokumen	39.520.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.699.500,00						3 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	144 Laporan	42.746.740,00						144 Laporan	24.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						8.271.700,00							4.940.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	8.271.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	8.271.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.337.800,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	4.337.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	4.337.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						5.837.800,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	18 Laporan	5.837.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		144 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan		54 Laporan	18 Laporan	5.837.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						4.460.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	4.460.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	4.460.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.010.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	5.010.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	5.010.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						7.590.000,00							4.700.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.590.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	7.590.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						4.012.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	4.012.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	4.012.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.405.175,00						3 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00						3 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.702.350,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	130 Orang	2.900.000,00						130 Orang	20.000.000,00	
	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						4.900.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	4.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	4.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	6.600.000,00						48 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	46.620.500,00						36 Laporan	28.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	569.377.474,00						38 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.823.800,00						4 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	24.207.500,00						7 Paket	7.450.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	45.113.995,00						7 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	32.104.160,00						12 Paket	33.394.135,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.453.500,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	2.453.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	2.453.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.074.200,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	4.074.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	4.074.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						4.615.660,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	4.615.660,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	4.615.660,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.851.500,00							500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	2.851.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	2.851.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						3.480.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	3.480.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	3.480.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						45.020.840,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	5 Laporan	45.020.840,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Laporan	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	5 Laporan	45.020.840,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Laporan	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80 Dokumen		80 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	78.217.800,00						2 Paket	64.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	300.000.000,00						0 Unit	1.600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	8 Unit	489.567.000,00						14 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	0 Unit	31.122.600,00						1 Unit	200.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						65.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	3 Unit	65.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		8 Unit	3 Unit	65.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	402.233.982,00						10 Laporan	394.859.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00						6 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	5.189.200,00						14 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						670.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						51.282.100,00							62.438.500,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	51.282.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	62.438.500,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		288 Laporan	3 Laporan	51.282.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		288 Laporan	62.438.500,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan		80 Laporan	10 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	10 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.365.920.000,00						3 Unit	1.400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	509.930.000,00						25 Unit	526.210.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	0,00						14 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	31.360.000,00						16 Unit	10.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						54.290.000,00							62.860.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	8 Unit	54.290.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	62.860.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	8 Unit	54.290.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57 Unit	62.860.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.440.000,00							1.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	2 Unit	2.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	2 Unit	2.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		8 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
158.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**5.380.093.090,00**							**5.136.440.000,00**	
		Meningkatnya kinerja perlindungan hutan						***125.000.000,00***							***279.635.280,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999. Laju deforestasi (pertahun)	1247.33 Hektar		1901.13 Hektar	1711.01 Hektar	125.000.000,00						1539.91 Hektar	279.635.280,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
		Meningkatnya perlindungan terhadap hutan lindung dan hutan produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	126.001.900,00						8 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	310.000.000,00						9 Dokumen	580.005.200,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	30.160.000,00						8 Operasi	100.000.000,00	
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	5.000.000,00						24 Operasi	120.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	89264 Ha	999.999.990,00						247422 Ha	1.781.434.800,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Dokumen	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	5 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						0,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	3 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Operasi	12.500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						125.000.000,00							242.135.280,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	12,133 Ha	125.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		247422 Ha	242.135.280,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	1 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Operasi	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penanganan lahan kritis						***27.500.000,00***							***138.000.000,00***	
			999.Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	38.71 %		13.52 %	16.4 %	27.500.000,00						20.56 %	138.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
		Meningkatnya hutan dan lahan yang direhabilitasi						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	8 Unit	1.000.000.000,00						8 Unit	432.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.814.800,00						1 Dokumen	58.000.000,00	
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	16 Unit	114.000.000,00						16 Unit	184.000.000,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	112 Ha	720.000.000,00						112 Ha	448.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						0,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						27.500.000,00							56.000.000,00	
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	14 Ha	27.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		112 Ha	56.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug						0,00							23.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	23.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan						0,00							54.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	54.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Meningkatnya pengelolaan hutan melalui aspek perencanaan dan tata hutan hutan						***15.000.000,00***							***115.000.000,00***	
			999.Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	100 %		100 %	100 %	15.000.000,00						100 %	115.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	8 Unit	30.683.000,00						8 Unit	400.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
		Meningkatnya perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	15.312.000,00						23 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	163.492.900,00						23 Dokumen	368.000.000,00	
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	23 Dokumen	25.131.400,00						0 Dokumen	0,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						15.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		23 Dokumen	45.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							0,00	
		Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							20.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah III
159.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**504.385.200,00**							**2.671.010.000,00**	
		Meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan						***30.785.000,00***							***298.483.000,00***	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	10 %		10 %	10 %	30.785.000,00						10 %	298.483.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10 %		10 %	10 %	30.785.000,00						10 %	298.483.000,00	
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	127.074.000,00						8 Unit	1.525.873.000,00	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						0,00							181.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	181.500.000,00	Balai KPH Wilayah III
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	246.280.200,00						-	868.137.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						30.785.000,00							116.983.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	30 Kelompok	30.785.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	116.983.000,00	Balai KPH Wilayah III
		Balai KPH Wilayah IV						**847.657.396,00**							**1.662.906.520,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**847.657.396,00**							**1.662.906.520,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**847.657.396,00**							**1.662.906.520,00**	
160.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**4.363.356.964,00**							**5.251.233.435,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***567.161.406,00***							***688.400.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor		81,54 Skor	82,35 Skor	567.161.406,00						83,18 Skor	688.400.000,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	19.220.800,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	47.967.294,00						3 Dokumen	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						1.869.100,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	1.869.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	1.869.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						1.295.400,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	1.295.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	1.295.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	59.435.100,00						3 Dokumen	39.520.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.699.500,00						3 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	144 Laporan	42.746.740,00						144 Laporan	24.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						8.339.000,00							4.940.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	8.339.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	8.339.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.294.200,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	4.294.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	4.294.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						2.982.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	18 Laporan	2.982.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		144 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan		54 Laporan	18 Laporan	2.982.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.950.000,00							500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	1.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						431.500,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	431.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	431.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						7.901.300,00							4.700.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	7.901.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	7.901.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						2.894.700,00							500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	2.894.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	2.894.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.405.175,00						3 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00						3 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.702.350,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	130 Orang	2.900.000,00						130 Orang	20.000.000,00	
	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						1.395.350,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	1.395.350,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	1.395.350,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						1.943.456,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	1.943.456,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	1.943.456,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	6.600.000,00						48 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	46.620.500,00						36 Laporan	28.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	569.377.474,00						38 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.823.800,00						4 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	24.207.500,00						7 Paket	7.450.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	45.113.995,00						7 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	32.104.160,00						12 Paket	33.394.135,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						246.600,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	246.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	246.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						516.200,00							5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	516.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	516.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.534.000,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	1.534.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.534.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						410.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	410.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	410.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						3.600.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						1.209.200,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	1.209.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	1.209.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						175.130.800,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	5 Laporan	175.130.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Laporan	12.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	5 Laporan	175.130.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Laporan	12.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80 Dokumen		80 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	78.217.800,00						2 Paket	64.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	300.000.000,00						0 Unit	1.600.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	8 Unit	489.567.000,00						14 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	0 Unit	31.122.600,00						1 Unit	200.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						41.250.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		8 Unit	3 Unit	41.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	3 Unit	41.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						16.862.000,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	16.862.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	1 Unit	16.862.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	402.233.982,00						10 Laporan	394.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00						6 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	5.189.200,00						14 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						192.400,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	192.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	192.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						73.444.200,00							55.800.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		288 Laporan	3 Laporan	73.444.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		288 Laporan	55.800.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	73.444.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	55.800.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	10 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan		80 Laporan	10 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.365.920.000,00						3 Unit	1.400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	509.930.000,00						25 Unit	526.210.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	0,00						14 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	31.360.000,00						16 Unit	10.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	0,00						8 Unit	40.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						130.720.000,00							107.860.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	10 Unit	130.720.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57 Unit	107.860.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	10 Unit	130.720.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	107.860.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.440.000,00							1.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	2 Unit	2.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	2 Unit	2.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						84.310.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		8 Unit	1 Unit	84.310.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	84.310.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
161.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**5.380.093.090,00**							**5.136.440.000,00**	
		Meningkatnya kinerja perlindungan hutan						***149.999.990,00***							***434.249.520,00***	
			999. Laju deforestasi (pertahun)	1247.33 Hektar		1901.13 Hektar	1711.01 Hektar	149.999.990,00						1539.91 Hektar	434.249.520,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
		Meningkatnya perlindungan terhadap hutan lindung dan hutan produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	126.001.900,00						8 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	310.000.000,00						9 Dokumen	580.005.200,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	30.160.000,00						8 Operasi	100.000.000,00	
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	5.000.000,00						24 Operasi	120.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	89264 Ha	999.999.990,00						247422 Ha	1.781.434.800,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Dokumen	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	5 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						0,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	5 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Operasi	12.500.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						149.999.990,00							396.749.520,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	19,880 Ha	149.999.990,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		247422 Ha	396.749.520,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	1 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Operasi	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Meningkatnya penanganan lahan kritis						***84.710.800,00***							***138.000.000,00***	
			999.Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	38.71 %		13.52 %	16.4 %	84.710.800,00						20.56 %	138.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
		Meningkatnya hutan dan lahan yang direhabilitasi						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	8 Unit	1.000.000.000,00						8 Unit	432.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.814.800,00						1 Dokumen	58.000.000,00	
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	16 Unit	114.000.000,00						16 Unit	184.000.000,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	112 Ha	720.000.000,00						112 Ha	448.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						57.210.800,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.210.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						27.500.000,00							56.000.000,00	
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	14 Ha	27.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		112 Ha	56.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug						0,00							23.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	23.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan						0,00							54.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	54.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Meningkatnya pengelolaan hutan melalui aspek perencanaan dan tata hutan hutan						***15.000.000,00***							***110.000.000,00***	
			999.Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	100 %		100 %	100 %	15.000.000,00						100 %	110.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	8 Unit	30.683.000,00						8 Unit	400.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
		Meningkatnya perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	15.312.000,00						23 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	163.492.900,00						23 Dokumen	368.000.000,00	
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	23 Dokumen	25.131.400,00						0 Dokumen	0,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						15.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		23 Dokumen	60.000.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah IV
162.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**504.385.200,00**							**2.671.010.000,00**	
		Meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan						***30.785.200,00***							***263.757.000,00***	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	10 %		10 %	10 %	30.785.200,00						10 %	263.757.000,00	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10 %		10 %	10 %	30.785.200,00						10 %	263.757.000,00	
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	127.074.000,00						8 Unit	1.525.873.000,00	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						0,00							189.873.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	189.873.000,00	Balai KPH Wilayah IV
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	246.280.200,00						-	868.137.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						30.785.200,00							73.884.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	22 Kelompok	30.785.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	73.884.000,00	Balai KPH Wilayah IV
		Balai KPH Wilayah V						**821.657.694,00**							**1.467.294.600,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**821.657.694,00**							**1.467.294.600,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**821.657.694,00**							**1.467.294.600,00**	
163.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**4.363.356.964,00**							**5.251.233.435,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***618.372.694,00***							***632.080.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor		81,54 Skor	82,35 Skor	618.372.694,00						83,18 Skor	632.080.000,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	19.220.800,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	47.967.294,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						6.777.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	6.777.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	6.777.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						7.003.800,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	7.003.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	7.003.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	59.435.100,00						3 Dokumen	39.520.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.699.500,00						3 Laporan	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	144 Laporan	42.746.740,00						144 Laporan	24.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						7.940.000,00							4.940.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	7.940.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	7.940.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						8.152.500,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	8.152.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	8.152.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						9.475.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	18 Laporan	9.475.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		144 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan		54 Laporan	18 Laporan	9.475.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						7.415.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	7.415.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	7.415.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						11.889.694,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	11.889.694,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	11.889.694,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						16.195.000,00							4.700.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	16.195.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	16.195.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.405.175,00						3 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00						3 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.702.350,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	130 Orang	2.900.000,00						130 Orang	20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	6.600.000,00						48 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	46.620.500,00						36 Laporan	28.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	569.377.474,00						38 Laporan	85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.823.800,00						4 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	24.207.500,00						7 Paket	7.450.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	45.113.995,00						7 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	32.104.160,00						12 Paket	33.394.135,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.150.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	2.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	2.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						4.237.700,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	4.237.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	4.237.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.220.000,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	5.220.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	5.220.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						1.200.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	1.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.300.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan		96 Laporan	12 Laporan	20.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	12 Laporan	20.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						24.660.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	5 Laporan	24.660.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Laporan	12.500.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	5 Laporan	24.660.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Laporan	12.500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80 Dokumen		80 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	78.217.800,00						2 Paket	64.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	300.000.000,00						0 Unit	1.600.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		8 Unit	20 Unit	489.567.000,00						20 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	0 Unit	31.122.600,00						1 Unit	200.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						55.867.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	3 Unit	55.867.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		8 Unit	3 Unit	55.867.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						300.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	402.233.982,00						10 Laporan	394.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00						6 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	5.189.200,00						14 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.200.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	2.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						40.420.000,00							52.100.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		288 Laporan	3 Laporan	40.420.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		288 Laporan	52.100.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	3 Laporan	40.420.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	52.100.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan		80 Laporan	10 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	10 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.365.920.000,00						3 Unit	1.400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	509.930.000,00						25 Unit	526.210.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	0,00						14 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	31.360.000,00						16 Unit	10.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	40.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						78.100.000,00							55.240.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	6 Unit	78.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	55.240.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	6 Unit	78.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57 Unit	55.240.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.170.000,00							1.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	2 Unit	9.170.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	2 Unit	9.170.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
164.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**5.380.093.090,00**							**5.136.440.000,00**	
		Meningkatnya kinerja perlindungan hutan						***130.000.000,00***							***318.987.600,00***	
			999. Laju deforestasi (pertahun)	1247.33 Hektar		1901.13 Hektar	1711.01 Hektar	130.000.000,00						1539.91 Hektar	318.987.600,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
		Meningkatnya perlindungan terhadap hutan lindung dan hutan produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	126.001.900,00						8 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	310.000.000,00						9 Dokumen	580.005.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	30.160.000,00						8 Operasi	100.000.000,00	
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	5.000.000,00						24 Operasi	120.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	89264 Ha	999.999.990,00						247422 Ha	1.781.434.800,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Dokumen	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	5 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						0,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	2 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Operasi	12.500.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						130.000.000,00							281.487.600,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	14,105 Ha	130.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		247422 Ha	281.487.600,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	1 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Operasi	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Meningkatnya penanganan lahan kritis						***27.500.000,00***							***138.000.000,00***	
			999.Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	38.71 %		13.52 %	16.4 %	27.500.000,00						20.56 %	138.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
		Meningkatnya hutan dan lahan yang direhabilitasi						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	8 Unit	1.000.000.000,00						8 Unit	432.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.814.800,00						1 Dokumen	58.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	16 Unit	114.000.000,00						16 Unit	184.000.000,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	112 Ha	720.000.000,00						112 Ha	448.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						0,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						27.500.000,00							56.000.000,00	
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	14 Ha	27.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		112 Ha	56.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug						0,00							23.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	23.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan						0,00							54.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	54.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Meningkatnya pengelolaan hutan melalui aspek perencanaan dan tata hutan hutan						***15.000.000,00***							***95.000.000,00***	
			999.Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	100 %		100 %	100 %	15.000.000,00						100 %	95.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	8 Unit	30.683.000,00						8 Unit	400.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						203.936.300,00					-		408.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	15.312.000,00						23 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	163.492.900,00						23 Dokumen	368.000.000,00	
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	23 Dokumen	25.131.400,00						0 Dokumen	0,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						15.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	3 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		23 Dokumen	45.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							0,00	
		Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah V
165.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**504.385.200,00**							**2.671.010.000,00**	
		Meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan						***30.785.000,00***							***254.727.000,00***	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	10 %		10 %	10 %	30.785.000,00						10 %	254.727.000,00	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10 %		10 %	10 %	30.785.000,00						10 %	254.727.000,00	
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	127.074.000,00						8 Unit	1.525.873.000,00	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						0,00							187.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	187.000.000,00	Balai KPH Wilayah V
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	246.280.200,00						-	868.137.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						30.785.000,00							67.727.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	20 Kelompok	30.785.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	67.727.000,00	Balai KPH Wilayah V
		Balai KPH Wilayah VI						**1.288.657.694,00**							**1.455.462.400,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.288.657.694,00**							**1.455.462.400,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.288.657.694,00**							**1.455.462.400,00**	
166.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**4.363.356.964,00**							**5.251.233.435,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***344.086.294,00***							***578.270.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor		81,54 Skor	82,35 Skor	344.086.294,00						83,18 Skor	578.270.000,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	19.220.800,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	47.967.294,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						2.609.600,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	2.609.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	2.609.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						2.580.000,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	2.580.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	2.580.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	59.435.100,00						3 Dokumen	39.520.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.699.500,00						3 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	144 Laporan	42.746.740,00						144 Laporan	24.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						4.440.000,00							4.940.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.080.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	5.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	5.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						6.000.000,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		144 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan		54 Laporan	1 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						700.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						23.099.200,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	23.099.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	23.099.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.000.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						3.600.000,00							4.700.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	7.896.700,00						8 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						500.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						500.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.405.175,00						3 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00						3 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.702.350,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	130 Orang	2.900.000,00						130 Orang	20.000.000,00	
	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						500.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						2.500.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						5.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						2.900.000,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	50 Orang	2.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	50 Orang	2.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	6.600.000,00						48 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	46.620.500,00						36 Laporan	28.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	569.377.474,00						38 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.823.800,00						4 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	24.207.500,00						7 Paket	7.450.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	45.113.995,00						7 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	32.104.160,00						12 Paket	33.394.135,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						1.500.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						7.540.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	0 Paket	7.540.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	0 Paket	7.540.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.500.000,00							4.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.140.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	6.140.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan		96 Laporan	1 Laporan	6.140.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.500.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	1 Laporan	50.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Laporan	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	1 Laporan	50.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Laporan	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80 Dokumen		80 Dokumen	10 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	78.217.800,00						2 Paket	64.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	300.000.000,00						0 Unit	1.600.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	8 Unit	489.567.000,00						14 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	0 Unit	31.122.600,00						1 Unit	200.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	11 Unit	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		8 Unit	11 Unit	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						14.260.600,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	10 Unit	14.260.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	10 Unit	14.260.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	402.233.982,00						10 Laporan	394.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00						6 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	5.189.200,00						14 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						706.800,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	706.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	706.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						24.900.094,00							19.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		288 Laporan	1 Laporan	24.900.094,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		288 Laporan	19.600.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	1 Laporan	24.900.094,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	19.600.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						800.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan		80 Laporan	1 Laporan	800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.365.920.000,00						3 Unit	1.400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	509.930.000,00						25 Unit	526.210.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	0,00						14 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	31.360.000,00						16 Unit	10.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	40.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						31.430.000,00							31.430.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	11 Unit	31.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57 Unit	31.430.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	11 Unit	31.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	31.430.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						1.300.000,00							1.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	1 Unit	1.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	1 Unit	1.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						78.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	78.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		8 Unit	1 Unit	78.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
167.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**5.380.093.090,00**							**5.136.440.000,00**	
		Meningkatnya kinerja perlindungan hutan						***170.160.000,00***							***327.494.400,00***	
			999. Laju deforestasi (pertahun)	1247.33 Hektar		1901.13 Hektar	1711.01 Hektar	170.160.000,00						1539.91 Hektar	327.494.400,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
		Meningkatnya perlindungan terhadap hutan lindung dan hutan produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	126.001.900,00						8 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	310.000.000,00						9 Dokumen	580.005.200,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	30.160.000,00						8 Operasi	100.000.000,00	
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (llegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	5.000.000,00						24 Operasi	120.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	89264 Ha	999.999.990,00						247422 Ha	1.781.434.800,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Dokumen	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						10.160.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	1 Operasi	10.160.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Operasi	12.500.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						145.000.000,00							289.994.400,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	14,531 Ha	145.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		247422 Ha	289.994.400,00	Balai KPH Wilayah VI

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	20 Operasi	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Operasi	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Meningkatnya penanganan lahan kritis						***624.660.000,00***							***138.000.000,00***	
			999.Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	38.71 %		13.52 %	16.4 %	624.660.000,00						20.56 %	138.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
		Meningkatnya hutan dan lahan yang direhabilitasi						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	8 Unit	1.000.000.000,00						8 Unit	432.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.814.800,00						1 Dokumen	58.000.000,00	
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	16 Unit	114.000.000,00						16 Unit	184.000.000,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	112 Ha	720.000.000,00						112 Ha	448.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						5.160.000,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.160.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						27.500.000,00							56.000.000,00	
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	250 Ha	27.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		112 Ha	56.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug						92.000.000,00							23.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	60 Unit	92.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	23.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan						500.000.000,00							54.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	30 Unit	500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	54.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Meningkatnya pengelolaan hutan melalui aspek perencanaan dan tata hutan hutan						***86.126.400,00***							***110.000.000,00***	
			999.Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	100 %		100 %	100 %	86.126.400,00						100 %	110.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	8 Unit	30.683.000,00						8 Unit	400.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						30.683.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	10 Unit	30.683.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
		Meningkatnya perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	15.312.000,00						23 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	163.492.900,00						23 Dokumen	368.000.000,00	
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	23 Dokumen	25.131.400,00						0 Dokumen	0,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						15.000.000,00							60.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		23 Dokumen	60.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan						25.131.400,00							0,00	
		Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	15 Dokumen	25.131.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah VI
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan						15.312.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	1 Dokumen	15.312.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah VI
168.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**504.385.200,00**							**2.671.010.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan						***52.625.000,00***							***273.198.000,00***	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	10 %		10 %	10 %	52.625.000,00						10 %	273.198.000,00	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10 %		10 %	10 %	52.625.000,00						10 %	273.198.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	127.074.000,00						8 Unit	1.525.873.000,00	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						21.840.000,00							187.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	1 Unit	21.840.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	187.000.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	246.280.200,00						-	868.137.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						30.785.000,00							86.198.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	10 Kelompok	30.785.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	86.198.000,00	Balai KPH Wilayah VI
		Balai KPH Wilayah VII						**1.301.657.694,00**							**1.374.811.440,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.301.657.694,00**							**1.374.811.440,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.301.657.694,00**							**1.374.811.440,00**	
169.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**4.363.356.964,00**							**5.251.233.435,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***608.372.694,00***							***633.785.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor		81,54 Skor	82,35 Skor	608.372.694,00						83,18 Skor	633.785.000,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	19.220.800,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	47.967.294,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						3.140.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	3.140.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	3.140.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						3.340.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	3.340.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	3.340.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	59.435.100,00						3 Dokumen	39.520.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.699.500,00						3 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	144 Laporan	42.746.740,00						144 Laporan	24.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						17.124.400,00							4.940.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	17.124.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	17.124.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						3.165.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	3.165.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	3.165.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						2.404.440,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan		54 Laporan	1 Laporan	2.404.440,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	1 Laporan	2.404.440,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		144 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.370.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	2.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	2.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.758.800,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	10.758.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	10.758.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						15.558.800,00							4.700.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	15.558.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	15.558.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.405.175,00						3 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00						3 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.702.350,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	130 Orang	2.900.000,00						130 Orang	20.000.000,00	
	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	6.600.000,00						48 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	46.620.500,00						36 Laporan	28.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	569.377.474,00						38 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.823.800,00						4 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	24.207.500,00						7 Paket	7.450.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	45.113.995,00						7 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	32.104.160,00						12 Paket	33.394.135,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.189.400,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	3.189.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	3.189.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.216.420,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	5.216.420,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	5.216.420,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.542.500,00							4.200.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	5.542.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	5.542.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	4.200.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.588.800,00							500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	2.588.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	2.588.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.741.300,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan		96 Laporan	1 Laporan	4.741.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	4.741.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						150.937.834,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	1 Laporan	150.937.834,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Laporan	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	1 Laporan	150.937.834,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Laporan	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80 Dokumen		80 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	78.217.800,00						2 Paket	64.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	300.000.000,00						0 Unit	1.600.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	8 Unit	489.567.000,00						14 Unit	400.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	0 Unit	31.122.600,00						1 Unit	200.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		8 Unit	11 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	11 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	402.233.982,00						10 Laporan	394.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00						6 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	5.189.200,00						14 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						700.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						45.925.000,00							43.685.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	1 Laporan	45.925.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	43.685.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		288 Laporan	1 Laporan	45.925.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		288 Laporan	43.685.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan		80 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.365.920.000,00						3 Unit	1.400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	509.930.000,00						25 Unit	526.210.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	0,00						16 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	37 Unit	31.360.000,00						37 Unit	10.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	8 Unit	0,00						8 Unit	40.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						46.670.000,00							62.860.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	11 Unit	46.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	62.860.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	11 Unit	46.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57 Unit	62.860.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							1.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						285.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	285.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		8 Unit	1 Unit	285.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
170.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**5.380.093.090,00**							**5.136.440.000,00**	
		Meningkatnya kinerja perlindungan hutan						***120.000.000,00***							***230.299.440,00***	
			999. Laju deforestasi (pertahun)	1247.33 Hektar		1901.13 Hektar	1711.01 Hektar	120.000.000,00						1539.91 Hektar	230.299.440,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
		Meningkatnya perlindungan terhadap hutan lindung dan hutan produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	126.001.900,00						8 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	310.000.000,00						9 Dokumen	580.005.200,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	30.160.000,00						8 Operasi	100.000.000,00	
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	5.000.000,00						24 Operasi	120.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	89264 Ha	999.999.990,00						247422 Ha	1.781.434.800,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Dokumen	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						0,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						0,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	1 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Operasi	12.500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						120.000.000,00							192.799.440,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	9,661 Ha	120.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		247422 Ha	192.799.440,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	1 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Operasi	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Meningkatnya penanganan lahan kritis						***527.500.000,00***							***138.000.000,00***	
			999.Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	38.71 %		13.52 %	16.4 %	527.500.000,00						20.56 %	138.000.000,00	
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
		Meningkatnya hutan dan lahan yang direhabilitasi						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	8 Unit	1.000.000.000,00						8 Unit	432.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.814.800,00						1 Dokumen	58.000.000,00	
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	16 Unit	114.000.000,00						16 Unit	184.000.000,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	112 Ha	720.000.000,00						112 Ha	448.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						0,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						527.500.000,00							56.000.000,00	
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	250 Ha	527.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		112 Ha	56.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug						0,00							23.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	60 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	23.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan						0,00							54.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	30 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	54.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Meningkatnya pengelolaan hutan melalui aspek perencanaan dan tata hutan hutan						***15.000.000,00***							***95.000.000,00***	
			999.Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	100 %		100 %	100 %	15.000.000,00						100 %	95.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	8 Unit	30.683.000,00						8 Unit	400.000.000,00	
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
		Meningkatnya perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	15.312.000,00						23 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	163.492.900,00						23 Dokumen	368.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	23 Dokumen	25.131.400,00						0 Dokumen	0,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						15.000.000,00							45.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		23 Dokumen	45.000.000,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							0,00	
		Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	15 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah VII
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah VII
171.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**504.385.200,00**							**2.671.010.000,00**	
		Meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan						***30.785.000,00***							***249.227.000,00***	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	10 %		10 %	10 %	30.785.000,00						10 %	249.227.000,00	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10 %		10 %	10 %	30.785.000,00						10 %	249.227.000,00	
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	127.074.000,00						8 Unit	1.525.873.000,00	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						0,00							181.500.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	181.500.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	246.280.200,00						-	868.137.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						30.785.000,00							67.727.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	20 Kelompok	30.785.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	67.727.000,00	Balai KPH Wilayah VII
		Balai KPH Wilayah VIII						**1.288.657.694,00**							**1.295.379.655,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.288.657.694,00**							**1.295.379.655,00**	
	3.28	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEHUTANAN**						**1.288.657.694,00**							**1.295.379.655,00**	
172.	**3.28.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**4.363.356.964,00**							**5.251.233.435,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***436.257.694,00***							***584.864.135,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor		81,54 Skor	82,35 Skor	436.257.694,00						83,18 Skor	584.864.135,00	
	3.28.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						67.188.094,00					-		24.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	19.220.800,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	47.967.294,00						3 Dokumen	12.000.000,00	
	3.28.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						129.881.340,00					-		71.520.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	59.435.100,00						3 Dokumen	39.520.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.699.500,00						3 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	144 Laporan	42.746.740,00						144 Laporan	24.000.000,00	
	3.28.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						4.440.000,00							4.940.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	4.940.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						10.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan		54 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		144 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						171.995.294,00					-		225.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	42.883.800,00						2 Dokumen	160.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	61.645.100,00						3 Laporan	37.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.581.394,00						4 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.885.000,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
	3.28.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						490.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	490.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	490.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						19.784.600,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	19.784.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	19.784.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	20.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						10.500.000,00							3.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	10.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	3.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						3.600.000,00							4.700.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	4.700.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						8.396.700,00					-		8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	500.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	7.896.700,00						3 Laporan	4.000.000,00	
	3.28.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							500.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						490.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	490.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	490.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						33.007.525,00					-		48.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.405.175,00						3 Dokumen	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.000.000,00						3 Dokumen	16.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.702.350,00						3 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	400 Orang	2.900.000,00						400 Orang	20.000.000,00	
	3.28.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						940.000,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	940.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	940.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen		8 Dokumen	0 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	2.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							2.500.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	2.500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						735.347.429,00					-		222.644.135,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	96 Dokumen	6.600.000,00						96 Dokumen	12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.500.000,00						2 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	36 Laporan	46.620.500,00						36 Laporan	28.800.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	569.377.474,00						38 Laporan	85.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	9.823.800,00						4 Paket	4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	24.207.500,00						7 Paket	7.450.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	45.113.995,00						7 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	32.104.160,00						12 Paket	33.394.135,00	
	3.28.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						450.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.463.000,00							3.994.135,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	1.463.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	3.994.135,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	1.463.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	3.994.135,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						500.000,00							500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						1.500.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						2.900.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	36 Laporan		36 Laporan	1 Laporan	2.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		36 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	96 Laporan		96 Laporan	1 Laporan	2.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Laporan	3.600.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						42.500.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	1 Laporan	42.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Laporan	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	1 Laporan	42.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Laporan	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	80 Dokumen		80 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	1.500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah						898.907.400,00					-		2.264.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	2 Paket	78.217.800,00						2 Paket	64.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	300.000.000,00						0 Unit	1.600.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	8 Unit	489.567.000,00						14 Unit	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	0 Unit	31.122.600,00						1 Unit	200.000.000,00	
	3.28.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						41.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		2 Paket	1 Paket	41.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	41.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	8.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11 Unit		4 Unit	11 Unit	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		8 Unit	11 Unit	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	200.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	8 Unit		8 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		3 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						411.423.182,00					-		406.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	402.233.982,00						10 Laporan	394.859.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	4.000.000,00						6 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	5.189.200,00						14 Laporan	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						720.000,00							500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	720.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	720.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						26.400.094,00							26.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		288 Laporan	1 Laporan	26.400.094,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		288 Laporan	26.400.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	1 Laporan	26.400.094,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	26.400.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						3.200.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan		80 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	3.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	1.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						1.907.210.000,00					-		1.980.610.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	1.365.920.000,00						3 Unit	1.400.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	57 Unit	509.930.000,00						57 Unit	526.210.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	0,00						16 Unit	4.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	37 Unit	31.360.000,00						37 Unit	10.400.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	40.000.000,00	
	3.28.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						39.050.000,00							31.430.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	4 Unit	39.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	31.430.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	4 Unit	39.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57 Unit	31.430.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Unit	500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						3.820.000,00							1.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	1 Unit	3.820.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	1 Unit	3.820.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	1.300.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						180.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	180.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		8 Unit	1 Unit	180.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	175.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
173.	**3.28.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN HUTAN**						**5.380.093.090,00**							**5.136.440.000,00**	
		Meningkatnya kinerja perlindungan hutan						***161.000.000,00***							***188.503.520,00***	
			999. Laju deforestasi (pertahun)	1247.33 Hektar		1901.13 Hektar	1711.01 Hektar	161.000.000,00						1539.91 Hektar	188.503.520,00	
	3.28.03.1.05	Pelaksanaan Perlindungan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya perlindungan terhadap hutan lindung dan hutan produksi						1.471.161.890,00					-		2.661.440.000,00	
			Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	126.001.900,00						8 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	9 Dokumen	310.000.000,00						9 Dokumen	580.005.200,00	
			Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	30.160.000,00						8 Operasi	100.000.000,00	
			Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	8 Operasi	5.000.000,00						24 Operasi	120.000.000,00	
			Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	89264 Ha	999.999.990,00						247422 Ha	1.781.434.800,00	
	3.28.03.1.05.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan						15.000.000,00							10.005.200,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	Jumlah Laporan Pertemuan/Rapat Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Perlindungan Hutan	9 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Dokumen	10.005.200,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.03.1.05.0005	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						16.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah Laporan Patroli /Sosialisasi yang Dilaksanakan Dalam Satu Tahun	8 Laporan		8 Laporan	300 Laporan	16.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	10.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.03.1.05.0006	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan						20.000.000,00							12.500.000,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	Jumlah operasi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	8 Operasi		0 Operasi	0 Operasi	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Operasi	12.500.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.03.1.05.0007	Pencegahan dan Pemberantasan Kerusakan Kawasan Hutan						110.000.000,00							140.998.320,00	
		Tercegahnya Kerusakan Kawasan Hutan	Luas kawasan hutan yang dilakukan pengamanan hutan	6248445 Ha		84384 Ha	7200 Ha	110.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		247422 Ha	140.998.320,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.03.1.05.0009	Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Hasil Hutan Ilegal						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Peredaran Hasil Hutan Ilegal	Jumlah penanganan peredaran hasil hutan ilegal (Ilegal logging dan TSL)	40 Operasi		0 Operasi	1 Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Operasi	15.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Meningkatnya penanganan lahan kritis						***549.500.000,00***							***138.000.000,00***	
			999.Persentase Luas lahan kritis yang direhabilitasi	38.71 %		13.52 %	16.4 %	549.500.000,00						20.56 %	138.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.04	Pelaksanaan Rehabilitasi di Luar Kawasan Hutan Negara						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
		Meningkatnya hutan dan lahan yang direhabilitasi						2.024.804.800,00					-		1.282.000.000,00	
			Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	8 Unit	1.000.000.000,00						8 Unit	432.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.814.800,00						1 Dokumen	58.000.000,00	
			Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	16 Unit	114.000.000,00						16 Unit	184.000.000,00	
			Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	112 Ha	720.000.000,00						112 Ha	448.000.000,00	
	3.28.03.1.04.0001	Penyusunan Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)						0,00							5.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan (RTnRL)	Jumlah Dokumen Rencana Tahunan Rehabilitasi Lahan yang Disusun (RTnRL)	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.03.1.04.0002	Pembangunan Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara						27.500.000,00							56.000.000,00	
		Terbangunnya Hutan Rakyat di Luar Kawasan Hutan Negara	Luas Hutan Rakyat yang Dibangun di Luar Kawasan Hutan Negara	3800 Ha		112 Ha	14 Ha	27.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		112 Ha	56.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.03.1.04.0012	Pembangunan gully plug						22.000.000,00							23.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa gully plug	Jumlah Gully Plug yang Terbangun	316 Unit		0 Unit	2 Unit	22.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	23.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.03.1.04.0013	Pembangunan Dam Penahan						500.000.000,00							54.000.000,00	
		Terbangunnya bangunan konservasi tanah dan air berupa Dam Penahan	Jumlah Dam Penahan yang terbangun	108 Unit		0 Unit	1 Unit	500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	54.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Meningkatnya pengelolaan hutan melalui aspek perencanaan dan tata hutan hutan						***15.000.000,00***							***80.000.000,00***	
			999.Persentase dokumen perencanaan kehutanan yang tersusun dan disahkan	100 %		100 %	100 %	15.000.000,00						100 %	80.000.000,00	
	3.28.03.1.01	Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan rencana tata hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) kewenangan provinsi						1.530.683.000,00					-		450.000.000,00	
			Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	8 Unit	30.683.000,00						8 Unit	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.03.1.01.0002	Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan di Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L)	Jumlah Unit Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi/Lidung (KPHP/L) yang Telah Dilakukan Pembagian Blok	8 Unit		0 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	50.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.03.1.02	Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Konservasi (KPHK)						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
		Meningkatnya perencanaan pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan kecuali pada Kesatuan Pengelolaan						203.936.300,00					-		408.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	15.312.000,00						23 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	23 Dokumen	163.492.900,00						23 Dokumen	368.000.000,00	
			Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	23 Dokumen	25.131.400,00						0 Dokumen	0,00	
	3.28.03.1.02.0001	Penyusunan Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan						15.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Kesatuan Pengelolaan Hutan yang Tersusun	23 Dokumen		23 Dokumen	2 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		23 Dokumen	30.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.03.1.02.0005	Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							0,00	
		Diselenggarakannya Konsultasi Publik dalam Rangka Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Hasil Dokumen konsultasi Publik	0 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah VIII
	3.28.03.1.02.0006	Penyusunan Perubahan Dokumen Rencana Pengelolaan Hutan						0,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Pengelolaan Hutan	Jumlah Dokumen Perubahan	0 Dokumen		23 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23 Dokumen	0,00	Balai KPH Wilayah VIII
174.	**3.28.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**						**504.385.200,00**							**2.671.010.000,00**	
		Meningkatnya perekonomian masyarakat di sekitar kawasan hutan						***112.910.000,00***							***285.512.000,00***	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	10 %		10 %	10 %	112.910.000,00						10 %	285.512.000,00	
			999.Peningkatan nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Usaha Perhutanan Sosial	10 %		10 %	10 %	112.910.000,00						10 %	285.512.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.28.05.1.01	Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	8 Unit	127.074.000,00						8 Unit	1.525.873.000,00	
	3.28.05.1.01.0009	Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial						82.125.000,00							187.000.000,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kualitas KUPS	Jumlah KUPS yang ditingkatkan Kualitasnya	8 Unit		8 Unit	19 Unit	82.125.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	187.000.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Meningkatnya penyuluhan dan pemberdayaan masyarakat						504.385.200,00					-		2.671.010.000,00	
			Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	-	246.280.200,00						-	868.137.000,00	
	3.28.05.1.01.0011	Penguatan dan Pendampingan Kelembagaan Kelompok Tani Hutan						30.785.000,00							98.512.000,00	
		Peningkatan kelas Kelompok Tani Hutan	Jumlah Kelompok Tani Hutan yang Meningkat Kapasitas Kelembagaannya	-		-	30 Kelompok	30.785.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH SDA Kehutanan-Dana Reboisasi (DR)	-	-		-	98.512.000,00	Balai KPH Wilayah VIII
		Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB						**6.075.904.919,00**							**16.279.003.540,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**6.075.904.919,00**							**16.279.003.540,00**	
	2.11	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP**						**6.075.904.919,00**							**16.279.003.540,00**	
175.	**2.11.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**86.488.727.971,00**							**86.355.663.106,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***2.339.749.856,00***							***3.846.050.800,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84,85 Skor		81,54 Skor	82,35 Skor	2.339.749.856,00						83,18 Skor	3.846.050.800,00	
	2.11.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						201.040.200,00					-		304.500.000,00	
		Meningkatnya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						201.040.200,00					-		304.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	16.187.300,00						3 Dokumen	22.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	16.232.300,00						3 Dokumen	30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.11.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	4.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	4.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						56.811.479.709,00					-		55.952.619.434,00	
		Meningkatnya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						56.811.479.709,00					-		55.952.619.434,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	99.249.100,00						3 Dokumen	67.880.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	11.790.400,00						3 Laporan	14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	144 Laporan	44.317.000,00						144 Laporan	24.200.000,00	
	2.11.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						4.440.000,00							8.940.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	8.940.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	4.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	8.940.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							1.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	8 Laporan		8 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	1.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	1.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							3.600.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	144 Laporan		144 Laporan	18 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		144 Laporan	3.600.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	54 Laporan		54 Laporan	18 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	3.600.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						90.565.205,00					-		91.900.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah						90.565.205,00					-		91.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.980.000,00						2 Dokumen	42.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.780.600,00						3 Laporan	30.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.347.200,00						4 Laporan	9.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	14.957.605,00						3 Dokumen	3.500.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						90.565.205,00					-		91.900.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	21.980.000,00						2 Dokumen	42.300.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	27.780.600,00						3 Laporan	30.600.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	14.347.200,00						4 Laporan	9.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	14.957.605,00						3 Dokumen	3.500.000,00	
	2.11.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							2.300.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	2.300.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	2.300.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							4.500.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	4.500.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	4.500.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						3.600.000,00							3.600.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	3.600.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	8 Laporan		8 Laporan	12 Laporan	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	3.600.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						13.417.360,00					-		12.500.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah						13.417.360,00					-		12.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	335.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	13.082.360,00						3 Laporan	8.500.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						13.417.360,00					-		12.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	335.000,00						4 Dokumen	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	13.082.360,00						3 Laporan	8.500.000,00	
	2.11.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	1.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Laporan	2.500.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	2.500.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						287.988.500,00					-		175.700.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						287.988.500,00					-		175.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	38.503.100,00						3 Dokumen	7.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	60.265.900,00						3 Dokumen	76.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	33.129.500,00						3 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	130 Orang	14.178.000,00						130 Orang	6.500.000,00	
	2.11.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							1.700.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	1.700.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	1.700.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	500.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	8 Dokumen		8 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Dokumen	500.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	130 Orang		130 Orang	40 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		130 Orang	2.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	400 Orang		400 Orang	40 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		400 Orang	2.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						342.547.331,00					-		306.420.000,00	
		Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah						342.547.331,00					-		306.420.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	48 Dokumen	70.900.000,00						48 Dokumen	53.520.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	173.337.000,00						38 Laporan	191.400.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	8.080.000,00						7 Paket	13.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	9.700.430,00						7 Paket	6.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	26.322.880,00						12 Paket	9.000.000,00	
	2.11.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	3.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	3.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							3.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	3.500.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	3.500.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	4.500.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	4.500.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.260.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		48 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	1.260.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	96 Dokumen		96 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		96 Dokumen	1.260.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							12.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		85 Laporan	12.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38 Laporan		38 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		38 Laporan	12.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						24.488.736.063,00					-		23.482.186.520,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						24.488.736.063,00					-		23.482.186.520,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	505.249.663,00						10 Laporan	833.432.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	23.973.280.000,00						6 Laporan	22.643.754.000,00	
	2.11.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							524.594.600,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10 Laporan		10 Laporan	6 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	524.594.600,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	288 Laporan		288 Laporan	6 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		288 Laporan	524.594.600,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.400.000,00							2.400.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan		6 Laporan	24 Laporan	2.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	2.400.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	80 Laporan		80 Laporan	24 Laporan	2.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		80 Laporan	2.400.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						725.702.247,00					-		940.850.000,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						725.702.247,00					-		940.850.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	412.132.247,00						3 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	233.340.000,00						25 Unit	295.910.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	16 Unit	80.230.000,00						16 Unit	176.440.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	140.000.000,00	
	2.11.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	57 Unit		57 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		57 Unit	18.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Unit	18.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							1.220.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	37 Unit		37 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		37 Unit	1.220.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	16 Unit		16 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	1.220.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	32 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		16 Unit	50.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	50.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	8 Unit		8 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	40.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	40.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						2.329.309.856,00					-		3.159.036.200,00	
		Meningkatan Pelayanan BLUD						2.329.309.856,00					-		3.159.036.200,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.329.309.856,00						1 Unit Kerja	3.159.036.200,00	
	2.11.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						2.329.309.856,00							3.159.036.200,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	2.329.309.856,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit Kerja	3.159.036.200,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
176.	**2.11.11**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN**						**6.439.361.789,00**							**22.439.250.000,00**	
		Meningkatnya penanganan sampah dan pengurangan sampah						***3.736.155.063,00***							***12.421.352.740,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase penanganan sampah	70 %		64.2 %	69.7 %	3.736.155.063,00						70 %	12.421.352.740,00	
			999.Persentase pengurangan sampah	30 %		29.11 %	30 %	3.736.155.063,00						30 %	12.421.352.740,00	
	2.11.11.1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						6.439.361.789,00					-		22.439.250.000,00	
		Meningkatnya penanganan sampah di TPA Regional						6.439.361.789,00					-		22.439.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.214.900,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	44 Unit		44 Unit	44 Unit	3.665.315.499,00						44 Unit	1.174.902.740,00	
			Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	292000 Ton		115468 Ton	292000 Ton	0,00						292000 Ton	3.995.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	7.101.250.000,00	
			Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	803 Ton		438 Ton	548 Ton	35.624.664,00						621 Ton	100.000.000,00	
		Meningkatnya penanganan sampah melalui pemilahan dari sumbernya dan Meningkatnya kinerja pengolahan sampah metode 3R/BSF						6.439.361.789,00					-		22.439.250.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.214.900,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	44 Unit		44 Unit	44 Unit	3.665.315.499,00						44 Unit	1.174.902.740,00	
			Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	292000 Ton		115468 Ton	292000 Ton	0,00						292000 Ton	3.995.200.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	7.101.250.000,00	
			Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	803 Ton		438 Ton	548 Ton	35.624.664,00						621 Ton	100.000.000,00	
	2.11.11.1.01.0002	Pemrosesan Akhir di TPA/TPST Regional						0,00							3.995.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemrosesan Akhir Sampah dan residu di TPA/TPST Regional	Jumlah Sampah dan Residu yang Terproses akhir di TPA/TPST Regional	292000 Ton		115468 Ton	292000 Ton	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		292000 Ton	3.995.200.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.11.1.01.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional						3.665.315.499,00							1.174.902.740,00	
		Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan terpelihara dengan baik	Jumlah Fasilitasi TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	44 Unit		44 Unit	44 Unit	3.665.315.499,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		44 Unit	1.174.902.740,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.11.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						35.214.900,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.214.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.11.1.01.0007	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						0,00							7.101.250.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan sampah di TPA/TPST Regional yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	7.101.250.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
	2.11.11.1.01.0017	Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional						35.624.664,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	Jumlah tonase Sampah yang ditangani dari Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional yang Dilaksanakan	803 Ton		438 Ton	548 Ton	35.624.664,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		621 Ton	100.000.000,00	Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Sampah Regional Provinsi NTB
		Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil						**31.044.747.247,00**							**32.394.000.263,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**31.044.747.247,00**							**32.394.000.263,00**	
	2.12	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**						**546.135.000,00**							**2.073.874.500,00**	
177.	**2.12.02**	**PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK**						**139.203.700,00**							**736.617.600,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pendaftaran penduduk						***139.203.700,00***							***736.617.600,00***	
			1.Persentase kepemilikan Identitas Kependudukan Digital (IKD)	2.28 %		2.19 %	2.22 %	139.203.700,00						2.24 %	736.617.600,00	
			2.Persentase Kepemilikan Kartu Identitas Anak	53.71 Persentase		51.62 Persentase	52.13 Persentase	139.203.700,00						52.65 Persentase	736.617.600,00	
	2.12.02.1.01	Pelayanan Pendaftaran Kependudukan						0,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		196.819.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penduduk yang mendapatkan pelayanan pendaftaran penduduk						0,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		196.819.000,00	
			Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	127.044.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	69.775.000,00	
	2.12.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional						0,00							127.044.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional	Jumlah Dokumen Kebijakan Teknis di Bidang Pendaftaran Penduduk Berdasarkan Kebijakan Nasional yang Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	127.044.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.01.0002	Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi						0,00							69.775.000,00	
		Terlaksananya Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	Jumlah Dokumen Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan Lintas Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	69.775.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02	Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						139.203.700,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		317.632.800,00	
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk						139.203.700,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		317.632.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	139.203.700,00						1 Laporan	105.505.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	106.127.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	106.000.000,00	
	2.12.02.1.02.0001	Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk						139.203.700,00							105.505.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	139.203.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	105.505.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02.0002	Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk						0,00							106.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil sosialisasi Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	106.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.02.0004	Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk						0,00							106.127.600,00	
		Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi berkala Antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	106.127.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						0,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		222.165.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pendaftaran Kependudukan						0,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		222.165.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	116.843.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	105.322.000,00	
	2.12.02.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pendaftaran Penduduk						0,00							105.322.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	105.322.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.02.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pendaftaran Penduduk						0,00							116.843.800,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pendaftaran Penduduk	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	116.843.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
178.	**2.12.03**	**PROGRAM PENCATATAN SIPIL**						**138.835.600,00**							**444.889.600,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pencatatan sipil						***138.835.600,00***							***444.889.600,00***	
			1.Persentase Akta Kelahiran yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	99.97 Persentase		99.77 Persentase	99.82 Persentase	138.835.600,00						99.87 Persentase	444.889.600,00	
			2.Persentase Akta Perkawinan yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	138.835.600,00						100 Persentase	444.889.600,00	
			3.Persentase Akta Perceraian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	138.835.600,00						100 Persentase	444.889.600,00	
			4.Persentase Akta Kematian yang Diterbitkan bagi yang Melaporkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	138.835.600,00						100 Persentase	444.889.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.03.1.01	Pelayanan Pencatatan Sipil						138.835.600,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		221.559.000,00	
		Meningkatnya penduduk yang mendapatkan pelayanan Pencatatan Sipil						138.835.600,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		221.559.000,00	
			Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	110.332.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	138.835.600,00						1 Laporan	111.227.000,00	
	2.12.03.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil						0,00							110.332.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil	Jumlah Dokumen kebijakan Teknis di Bidang Pencatatan Sipil yang Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	110.332.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.01.0004	Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota						138.835.600,00							111.227.000,00	
		Terfasilitasinya Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Bidang Pencatatan Sipil di Kabupaten/Kota	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	138.835.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	111.227.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.03	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pencatatan Sipil						0,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		223.330.600,00	
		Meningkatnya kapasitas aparatur penyelenggara Pencatatan Sipil						0,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		223.330.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	117.500.000,00	
			Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	105.830.600,00	
	2.12.03.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasaan terkait Pencatatan Sipil						0,00							105.830.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	105.830.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.03.1.03.0002	Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil						0,00							117.500.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Bimbingan Teknis Terkait Pencatatan Sipil	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	117.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
179.	**2.12.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**						**268.095.700,00**							**744.941.300,00**	
		meningkatnya pemanfaatan informasi kependudukan						***268.095.700,00***							***744.941.300,00***	
			1.Persentase Informasi Kependudukan yang DImanfaatkan	27.78 Persentase		13.89 Persentase	19.44 Persentase	268.095.700,00						22.22 Persentase	744.941.300,00	
	2.12.04.1.02	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						175.491.800,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		529.434.300,00	
		Meningkatnya tata kelola Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						175.491.800,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		529.434.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	97.553.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	99.694.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.315.300,00	
			Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	100.424.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	175.491.800,00						1 Laporan	29.606.400,00	
			Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	59.010.200,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	122.830.000,00	
	2.12.04.1.02.0001	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						175.491.800,00							29.606.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	175.491.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	29.606.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.02.0002	Sosialisasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						0,00							122.830.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	122.830.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.02.0003	Komunikasi, Informasi dan Edukasi Kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat						0,00							99.694.500,00	
		Tersedianya Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Komunikasi, Informasi, dan Edukasi kepada Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	99.694.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.12.04.1.02.0004	Koordinasi Berkala antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga NonPemerintah Kewenangan Provinsi						0,00							20.315.300,00	
		Terlaksananya Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Berkala Antar lembaga Pemerintah dan Lembaga Non Pemerintah Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	20.315.300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.02.0005	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan						0,00							100.424.700,00	
		Terselenggarakannya Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil pemanfaatan data kependudukan	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	100.424.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.02.0006	Kerja Sama dengan Organisasi KeMasyarakatan dan Perguruan Tinggi						0,00							97.553.200,00	
		Terlaksananya Kerja Sama dengan Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	Jumlah Dokumen Hasil kerja sama Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	97.553.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.02.0007	Pemberian Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						0,00							59.010.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil konsultasi Penyelenggaraan Pengelolaan Infomasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	59.010.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						92.603.900,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		215.507.000,00	
		Meningkatnya kapsitas Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Provinsi						92.603.900,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		215.507.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.495.900,00						1 Laporan	104.980.800,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	50.108.000,00						40 Orang	110.526.200,00	
	2.12.04.1.03.0001	Pembinaan dan Pengawasan tekait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan						42.495.900,00							104.980.800,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	42.495.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	104.980.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.04.1.03.0002	Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan						50.108.000,00							110.526.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	Jumlah Sumber Daya Manusia yang Mengikuti Bimbingan Teknis Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pendayagunaan Data Kependudukan	40 Orang		40 Orang	40 Orang	50.108.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		40 Orang	110.526.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
180.	**2.12.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN**						**0,00**							**147.426.000,00**	
		meningkatnya kualitas profil kependudukan						***0,00***							***73.713.000,00***	
			999.Cakupan Pengelolaan Profil Kependudukan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	0,00						100 Persentase	73.713.000,00	
	2.12.05.1.01	Penyediaan Profil Kependudukan						0,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		147.426.000,00	
		Tesedianya Profil Kependudukan						0,00					Dukcapil Kabupaten/Kota		147.426.000,00	
			Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	73.713.000,00	
			Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	73.713.000,00	
	2.12.05.1.01.0001	Penyediaan Data Kependudukan Provinsi						0,00							73.713.000,00	
		Tersedianya Data Kependudukan Provinsi	Jumlah Dokumen data kependudukan Provinsi yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	73.713.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.12.05.1.01.0002	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi kependudukan serta Kebutuhan yang lain						0,00							73.713.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan Serta Kebutuhan Lain yang tersusun	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	73.713.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**						**30.498.612.247,00**							**30.320.125.763,00**	
181.	**2.13.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.187.540.547,00**							**16.091.671.463,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***12.187.540.547,00***							***16.056.671.463,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.88 Skor		80.84 Skor	80.85 Skor	12.187.540.547,00						80.86 Skor	16.056.671.463,00	
	2.13.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.935.000,00					DPMPD DUKCAPIL		189.224.900,00	
		Meningkatnya kualitas Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						40.935.000,00					DPMPD DUKCAPIL		189.224.900,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	27.373.300,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.088.000,00						1 Dokumen	29.080.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	26.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.822.000,00						1 Dokumen	25.300.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.522.000,00						1 Dokumen	26.796.800,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	27.080.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.503.000,00						1 Laporan	26.644.100,00	
	2.13.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						9.088.000,00							29.080.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.088.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	29.080.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						6.522.000,00							26.796.800,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.522.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	26.796.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						11.822.000,00							25.300.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	11.822.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	25.300.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							27.373.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	27.373.300,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							26.950.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	26.950.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							27.080.700,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	27.080.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						13.503.000,00							26.644.100,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.503.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	26.644.100,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						10.809.257.847,00					DPMPD DUKCAPIL		12.093.085.163,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah						10.809.257.847,00					DPMPD DUKCAPIL		12.093.085.163,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.605.000,00						1 Dokumen	233.707.600,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.483.200,00						1 Laporan	13.449.600,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/ Bulan		82 Orang/ Bulan	82 Orang/ Bulan	10.673.169.647,00						82 Orang/ Bulan	11.845.927.963,00	
	2.13.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						10.673.169.647,00							11.845.927.963,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	82 Orang/ Bulan		82 Orang/ Bulan	82 Orang/ Bulan	10.673.169.647,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		82 Orang/ Bulan	11.845.927.963,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						63.605.000,00							233.707.600,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.605.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	233.707.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						72.483.200,00							13.449.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	72.483.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	13.449.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						315.530.700,00					DPMPD DUKCAPIL		548.353.300,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						315.530.700,00					DPMPD DUKCAPIL		548.353.300,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	14.400.000,00						36 Dokumen	9.529.200,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	3.000.000,00						8 Dokumen	51.165.400,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen		1000 Dokumen	1000 Dokumen	0,00						1000 Dokumen	19.366.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00						12 Laporan	35.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	218.338.600,00						14 Laporan	246.492.400,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	0,00						100 Paket	51.472.200,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00						4 Paket	67.372.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.500.000,00						4 Paket	35.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	4.003.000,00						5 Paket	18.469.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	34.289.100,00						5 Paket	14.486.000,00	
	2.13.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.003.000,00							18.469.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	4.003.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Paket	18.469.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						34.289.100,00							14.486.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	34.289.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Paket	14.486.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							51.472.200,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Paket	51.472.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						11.500.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	11.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						14.400.000,00							9.529.200,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	14.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Dokumen	9.529.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							67.372.600,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	67.372.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	35.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						218.338.600,00							246.492.400,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	218.338.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Laporan	246.492.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							19.366.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1000 Dokumen		1000 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1000 Dokumen	19.366.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						3.000.000,00							51.165.400,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	8 Dokumen		8 Dokumen	0 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Dokumen	51.165.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						140.750.000,00					DPMPD DUKCAPIL		721.730.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Barang Milik Daerah						140.750.000,00					DPMPD DUKCAPIL		721.730.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	609.730.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	5 Unit	140.750.000,00						5 Unit	112.000.000,00	
	2.13.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							609.730.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	609.730.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						140.750.000,00							112.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit		0 Unit	5 Unit	140.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	112.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						753.207.000,00					DPMPD DUKCAPIL		1.869.984.400,00	
		Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						753.207.000,00					DPMPD DUKCAPIL		1.869.984.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	156.975.000,00						4 Laporan	264.536.800,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	596.232.000,00						12 Laporan	1.602.470.600,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	2.977.000,00	
	2.13.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							2.977.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	2.977.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						156.975.000,00							264.536.800,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	156.975.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	264.536.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						596.232.000,00							1.602.470.600,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	596.232.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.602.470.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						127.860.000,00					DPMPD DUKCAPIL		669.293.700,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						127.860.000,00					DPMPD DUKCAPIL		669.293.700,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	85.750.000,00						1 Unit	172.237.600,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	21.810.000,00						26 Unit	463.889.500,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	0,00						20 Unit	11.629.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	20.300.000,00						14 Unit	21.537.600,00	
	2.13.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						21.810.000,00							463.889.500,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	26 Unit		26 Unit	26 Unit	21.810.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		26 Unit	463.889.500,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							11.629.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Unit	11.629.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						20.300.000,00							21.537.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	14 Unit		14 Unit	14 Unit	20.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Unit	21.537.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						85.750.000,00							172.237.600,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	85.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	172.237.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
182.	**2.13.02**	**PROGRAM PENATAAN DESA**						**56.393.600,00**							**240.100.000,00**	
		Meningkatnya kualitas penataan desa						***56.393.600,00***							***240.100.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Penataan Desa	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	56.393.600,00						100 Persentase	240.100.000,00	
	2.13.02.1.01	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat						56.393.600,00					DESA		240.100.000,00	
		Meningkatnya Fasilitasi Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat						56.393.600,00					DESA		240.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	30 Dokumen		26 Dokumen	30 Dokumen	56.393.600,00						30 Dokumen	240.100.000,00	
	2.13.02.1.01.0003	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa						56.393.600,00							240.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	30 Dokumen		26 Dokumen	30 Dokumen	56.393.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		30 Dokumen	240.100.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
183.	**2.13.03**	**PROGRAM PENINGKATAN KERJA SAMA DESA**						**385.713.400,00**							**246.673.000,00**	
		Meningkatnya efektivitas kerja sama desa						***385.713.400,00***							***246.673.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Kerjasama Desa	12.38 Persentase		11.89 Persentase	12.01 Persentase	385.713.400,00						12.13 Persentase	246.673.000,00	
	2.13.03.1.01	Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi						385.713.400,00					DESA		246.673.000,00	
		Meningkatnya Fasilitasi Kerja Sama antar desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi						385.713.400,00					DESA		246.673.000,00	
			jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	238.311.800,00						1 Dokumen	98.757.800,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	101.960.800,00						1 Dokumen	72.920.600,00	
			Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.440.800,00						1 Dokumen	74.994.600,00	
	2.13.03.1.01.0001	Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota						101.960.800,00							72.920.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	101.960.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	72.920.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.03.1.01.0002	Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga						45.440.800,00							74.994.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama dengan pihak ketiga yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.440.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	74.994.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.03.1.01.0003	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan						238.311.800,00							98.757.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	238.311.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	98.757.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
184.	**2.13.04**	**PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA**						**15.615.941.700,00**							**1.407.133.900,00**	
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa						***15.615.941.700,00***							***1.202.660.500,00***	
			999.Persentase Aparatur Desa dan Anggota BPD yang Ditingkatkan Kapasitasnya	82.85 Persentase		79.62 Persentase	80.41 Persentase	15.615.941.700,00						81.22 Persentase	1.202.660.500,00	
			999.Persentase Fasilitasi Tata Kelola Desa	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	15.615.941.700,00						100 Persentase	1.202.660.500,00	
	2.13.04.1.01	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						15.615.941.700,00					DESA		1.407.133.900,00	
		Meningkatnya Kualitas Aparatur Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa						15.615.941.700,00					DESA		1.407.133.900,00	
			jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	130 Orang		90 Orang	100 Orang	115.025.400,00						110 Orang	127.200.000,00	
			jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	95.400.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	191.665.300,00						1 Dokumen	196.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.915.000,00						1 Dokumen	72.328.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	77.273.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	96.481.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.106.883.000,00						1 Dokumen	116.690.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50 Dokumen		28 Dokumen	32 Dokumen	20.673.500,00						38 Dokumen	141.128.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	77.273.400,00	
			Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.280.500,00						1 Dokumen	153.515.700,00	
			Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	130 Orang		90 Orang	100 Orang	0,00						110 Orang	127.200.000,00	
			jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	50 Orang		30 Orang	35 Orang	46.499.000,00						40 Orang	126.542.800,00	
	2.13.04.1.01.0002	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa						15.106.883.000,00							116.690.400,00	
		Terlaksananya Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.106.883.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	116.690.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0003	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa						34.280.500,00							153.515.700,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.280.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	153.515.700,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa						0,00							95.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	jumlah Dokumen hasi Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	95.400.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0005	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa						0,00							77.273.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	77.273.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0006	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa						0,00							77.273.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	77.273.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0007	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa						46.499.000,00							126.542.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	50 Orang		30 Orang	35 Orang	46.499.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		40 Orang	126.542.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0008	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan						191.665.300,00							196.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	191.665.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	196.100.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0009	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan						100.915.000,00							72.328.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.915.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	72.328.600,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0010	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa						115.025.400,00							127.200.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	130 Orang		90 Orang	100 Orang	115.025.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		110 Orang	127.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0011	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD						0,00							127.200.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	130 Orang		90 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		110 Orang	127.200.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0015	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa						0,00							96.481.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	96.481.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.04.1.01.0016	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa						20.673.500,00							141.128.400,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	50 Dokumen		28 Dokumen	32 Dokumen	20.673.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		38 Dokumen	141.128.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
185.	**2.13.05**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT**						**2.253.023.000,00**							**12.334.547.400,00**	
		Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat dalam pembangunan						***2.182.647.400,00***							***12.334.547.400,00***	
			1.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD)	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	2.182.647.400,00						100 Persentase	12.334.547.400,00	
			2.Persentase Fasilitasi Pemberdayaan Lembaga Adat Desa dan Lembaga Masyarakat Hukum Adat	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	2.182.647.400,00						100 Persentase	12.334.547.400,00	
			999.Jumlah BUMDes Maju	60 Bumdes		40 Bumdes	45 Bumdes	2.182.647.400,00						50 Bumdes	12.334.547.400,00	
			999.Persentase Posyantek Aktif	70.94 %		67.52 %	68.38 %	2.182.647.400,00						69.23 %	12.334.547.400,00	
	2.13.05.1.01	Pemberdayaan Lembaga keMasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota						2.253.023.000,00					LEMBAGA		12.334.547.400,00	
		Meningkatnya kualitas kelembagaan masyarakat dan pengembangan partisipasi masyarakat						2.253.023.000,00					LEMBAGA		12.334.547.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	223.300.000,00						1 Laporan	242.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	114.898.400,00						1 Dokumen	9.896.002.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	138.943.200,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.375.600,00						1 Dokumen	79.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.375.600,00						1 Dokumen	184.981.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00						1 Laporan	1.500.000.000,00	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	274.073.400,00						10 Lembaga	292.340.400,00	
	2.13.05.1.01.0001	Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat						70.375.600,00							79.500.000,00	
		Terlaksananya Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.375.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	79.500.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.13.05.1.01.0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						70.375.600,00								184.981.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.375.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	184.981.800,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.05.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat						274.073.400,00								292.340.400,00	
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Lembaga KeMasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	274.073.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Lembaga	292.340.400,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.05.1.01.0005	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa						114.898.400,00								9.896.002.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	114.898.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	9.896.002.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.05.1.01.0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna						223.300.000,00								242.780.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	223.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	242.780.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.05.1.01.0008	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa						0,00							138.943.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	138.943.200,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
	2.13.05.1.01.0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga						1.500.000.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Bagi Hasil (DBH)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	1.500.000.000,00	Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Dinas Perhubungan						**25.661.773.857,00**							**29.522.561.424,99**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**25.661.773.857,00**							**29.522.561.424,99**	
	2.15	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN**						**25.661.773.857,00**							**29.522.561.424,99**	
186.	**2.15.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**11.714.967.301,00**							**13.552.801.425,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***11.702.559.301,00***							***13.527.196.625,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	86.42 Skor		83.05 Skor	83.88 Skor	11.702.559.301,00						84.72 Skor	13.527.196.625,00	
	2.15.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						105.432.000,00					-		164.282.050,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggara n, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas, tepat waktu, serta selaras dengan arah kebijakan pembanguna n daerah dan nasional						105.432.000,00					-		164.282.050,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.884.000,00						1 Dokumen	2.274.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.074.000,00						1 Dokumen	23.367.300,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.884.000,00						1 Dokumen	2.274.800,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.524.000,00						1 Dokumen	23.330.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.524.000,00						1 Dokumen	23.330.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	19.468.000,00						2 Laporan	27.909.350,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.074.000,00						1 Laporan	61.795.800,00	
	2.15.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						10.074.000,00							23.367.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.074.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	23.367.300,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						10.524.000,00							23.330.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.524.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	23.330.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						10.524.000,00							23.330.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.524.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	23.330.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.884.000,00							2.274.800,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.884.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	2.274.800,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.884.000,00							2.274.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.884.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	2.274.800,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						19.468.000,00							27.909.350,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	19.468.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	27.909.350,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						51.074.000,00							61.795.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	51.074.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	61.795.800,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.767.667.261,00					-		9.364.320.825,00	
		Terwujudnya pengelolaan administrasi keuangan perangkat daerah yang tertib, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang undangan						8.767.667.261,00					-		9.364.320.825,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen		62 Dokumen	62 Dokumen	51.878.000,00						80 Dokumen	141.001.300,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.149.000,00						1 Laporan	15.712.400,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan		77 Orang/ Bulan	77 Orang/ Bulan	8.705.640.261,00						87 Orang/ Bulan	9.207.607.125,00	
	2.15.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.705.640.261,00							9.207.607.125,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	93 Orang/ Bulan		77 Orang/ Bulan	77 Orang/ Bulan	8.705.640.261,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		87 Orang/ Bulan	9.207.607.125,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						51.878.000,00							141.001.300,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	80 Dokumen		62 Dokumen	60 Dokumen	51.878.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		80 Dokumen	141.001.300,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.149.000,00							15.712.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.149.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	15.712.400,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						23.101.000,00					-		25.526.000,00	
		Terwujudnya pengelolaan dan administrasi Barang Milik Daerah yang tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan						23.101.000,00					-		25.526.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	21.817.000,00						2 Laporan	24.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.284.000,00						1 Dokumen	1.526.000,00	
	2.15.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.284.000,00							1.526.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.284.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	1.526.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						21.817.000,00							24.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	21.817.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	24.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						51.670.000,00					-		62.514.000,00	
		Meningkatny a pemahaman dan kesadaran masyarakat/ wajib retribusi terhadap kebijakan retribusi daerah untuk mendukung peningkatan kepatuhan dan penerimaan retribusi.						51.670.000,00					-		62.514.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.670.000,00						1 Laporan	62.514.000,00	
	2.15.01.1.04.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan KebijakanRetribusi Daerah						51.670.000,00							62.514.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	62.514.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						184.850.000,00					-		246.477.000,00	
		Terwujudnya pengelolaan administrasi kepegawaian yang tertib, akurat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan dalam rangka mendukung manajemen ASN yang efektif dan profesional.						184.850.000,00					-		246.477.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	123 Paket		122 Paket	108 Paket	102.850.000,00						120 Paket	125.477.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		2 Orang	2 Orang	82.000.000,00						2 Orang	121.000.000,00	
	2.15.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						102.850.000,00							125.477.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	123 Paket		122 Paket	121 Paket	102.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		120 Paket	125.477.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						82.000.000,00							121.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		2 Orang	2 Orang	82.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Orang	121.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						569.923.840,00					-		936.491.350,00	
		Terlaksanany a tertib administrasi umum dalam mendukung kelancaran operasional dan pelayanan perangkat daerah						569.923.840,00					-		936.491.350,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1320 Dokumen		1320 Dokumen	1320 Dokumen	3.600.000,00						1320 Dokumen	8.712.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.678.000,00						12 Laporan	12.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	295.888.000,00						12 Laporan	511.260.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.078.740,00						3 Paket	32.230.500,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	3 Paket	24.552.800,00						3 Paket	62.712.100,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.005.800,00						1 Paket	18.543.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		7 Paket	10 Paket	123.620.500,00						10 Paket	111.383.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	92.500.000,00						1 Paket	179.550.000,00	
	2.15.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						9.005.800,00							18.543.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.005.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	18.543.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						123.620.500,00							111.383.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket		7 Paket	7 Paket	123.620.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		10 Paket	111.383.750,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						92.500.000,00							179.550.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	92.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	179.550.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.078.740,00							32.230.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.078.740,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Paket	32.230.500,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.552.800,00							62.712.100,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		1 Paket	1 Paket	24.552.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Paket	62.712.100,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						3.600.000,00							8.712.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1320 Dokumen		1320 Dokumen	1500 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1320 Dokumen	8.712.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.678.000,00							12.100.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.678.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	12.100.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						295.888.000,00							511.260.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	295.888.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	511.260.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						55.500.000,00					-		235.578.500,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah yang memadai dan tepat guna untuk mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah secara efektif dan efisien						55.500.000,00					-		235.578.500,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.500.000,00						1 Paket	10.378.500,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	1 Unit	35.000.000,00						2 Unit	225.200.000,00	
	2.15.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						35.000.000,00							225.200.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		3 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	225.200.000,00	Dinas Perhubungan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						20.500.000,00							10.378.500,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	10.378.500,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.671.793.200,00					-		2.157.162.300,00	
		Tersedianya jasa penunjang yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggar aan urusan pemerintaha n secara efektif dan efisien.						1.671.793.200,00					-		2.157.162.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	351.835.200,00						12 Laporan	412.905.300,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.319.958.000,00						12 Laporan	1.744.257.000,00	
	2.15.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						351.835.200,00							412.905.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	351.835.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	412.905.300,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.319.958.000,00							1.744.257.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.319.958.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	1.744.257.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						285.030.000,00					-		360.449.400,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah penunjang urusan pemerintahan daerah dalam kondisi baik dan siap pakai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah						285.030.000,00					-		360.449.400,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	0 Unit	11.740.000,00						1 Unit	31.629.400,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	93.000.000,00						1 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		31 Unit	32 Unit	180.290.000,00						34 Unit	303.820.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	25.000.000,00	
	2.15.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	25.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						180.290.000,00							303.820.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	37 Unit		31 Unit	17 Unit	180.290.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		34 Unit	303.820.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						11.740.000,00							31.629.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	18 Unit	11.740.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	31.629.400,00	Dinas Perhubungan
	2.15.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						93.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	93.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	0,00	Dinas Perhubungan
187.	**2.15.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)**						**10.362.154.882,00**							**11.326.939.999,99**	
		Meningkatkan Kualitas Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui audit inspeksi, pemantauan dan penegakan standar keselamatan secara terencana						***6.954.007.196,00***							***7.955.828.399,99***	
			999.Rasio Fatalitas Lalu Lintas Jalan	1.3 Rasio		1.7 Rasio	1.6 Rasio	6.954.007.196,00						1.5 Rasio	7.955.828.399,99	
	2.15.02.1.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						5.140.158.196,00					Masyarakat pengguna jalan		5.842.550.000,00	
		Meningkatnya penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi						5.140.158.196,00					Masyarakat pengguna jalan		5.842.550.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2174 Unit		1416 Unit	1490 Unit	5.061.002.900,00						1790 Unit	5.744.375.000,00	
			Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	279 Unit		212 Unit	225 Unit	79.155.296,00						225 Unit	98.175.000,00	
	2.15.02.1.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi						5.061.002.900,00							5.744.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi yang Tersedia	2174 Unit		1416 Unit	1490 Unit	5.061.002.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1790 Unit	5.744.375.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan						79.155.296,00							98.175.000,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan terpelihara	279 Unit		212 Unit	225 Unit	79.155.296,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		225 Unit	98.175.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.05	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi						1.300.866.100,00					Masyarakat pengguna jalan		1.430.293.400,00	
		Meningkatnya kenyamanan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas jalan						1.300.866.100,00					Masyarakat pengguna jalan		1.430.293.400,00	
			Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	658.670.600,00						12 Laporan	750.262.900,00	
			Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	642.195.500,00						12 Laporan	680.030.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.05.0001	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi						642.195.500,00							680.030.500,00	
		Terlaksananya Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	642.195.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	680.030.500,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.05.0005	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi						658.670.600,00							750.262.900,00	
		Terlaksananya Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Provinsi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	658.670.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	750.262.900,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.06	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi						147.215.800,00					Masyarakat pengguna jalan		223.560.999,99	
		Terwujudnya rekomendasi teknis andalalin						147.215.800,00					Masyarakat pengguna jalan		223.560.999,99	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	83.500.400,00						12 Laporan	111.405.500,00	
			Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.715.400,00						12 Laporan	112.155.499,99	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.06.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin						83.500.400,00							111.405.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	83.500.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	111.405.500,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.06.0004	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin						63.715.400,00							112.155.499,99	
		Terawasinya Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	63.715.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	112.155.499,99	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.07	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						365.767.100,00					Terminal Tipe B, UPUBKB, Perusahaan Angkutan Umum, Perlengkapan Jalan, Jalan		459.424.000,00	
		Terlaksananya Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan						365.767.100,00					Terminal Tipe B, UPUBKB, Perusahaan Angkutan Umum, Perlengkapan Jalan, Jalan		459.424.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.249.000,00						1 Laporan	57.479.000,00	
			Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan		2 Laporan	2 Laporan	79.919.000,00						2 Laporan	128.040.150,00	
			Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	61.144.900,00						2 Laporan	59.944.900,00	
			Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00						2 Dokumen	127.895.500,00	
			Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	84.454.200,00						1 Dokumen	86.064.450,00	
	2.15.02.1.07.0003	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal						79.919.000,00							128.040.150,00	
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal	Laporan		2 Laporan	2 Laporan	79.919.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	128.040.150,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.07.0005	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						80.249.000,00							57.479.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	2 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	80.249.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	57.479.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.07.0006	Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas Kecepatan						60.000.000,00							127.895.500,00	
		Terlaksananya identifikasi dan pengawasan terhadap Implementasi Batas Kecepatan	Jumlah Ruas jalan yang diidentifikasi dan dilakukan pengawasan terhadap implementasi batas kecepatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	127.895.500,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.07.0013	Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum						84.454.200,00							86.064.450,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya dan Terbitnya Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah Sertifikat Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	84.454.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	86.064.450,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.07.0015	Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor						61.144.900,00							59.944.900,00	
		Terlaksananya Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah laporan Uji Petik terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	2 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	61.144.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	59.944.900,00	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Kelaikan Angkutan Jalan						***534.750.973,00***							***2.301.481.000,00***	
			999.Persentase Sarana Angkutan Umum dalam Kondisi Laik Jalan	50.9 %		42.5 %	44.31 %	534.750.973,00						46.27 %	2.301.481.000,00	
	2.15.02.1.08	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						282.973.973,00					-		1.685.953.600,00	
		Meningkatnya angkutan orang dalam trayek yang Laik Jalan						282.973.973,00					-		1.685.953.600,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	282.973.973,00						2 Unit	1.685.953.600,00	
	2.15.02.1.08.0003	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						282.973.973,00							1.685.953.600,00	
		Tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	2 Unit		2 Unit	65 Unit	282.973.973,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PKB	-	-		2 Unit	1.685.953.600,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.13	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						183.534.000,00					-		528.079.400,00	
		Meningkatnya angkutan orang dalam trayek yang Laik Jalan						183.534.000,00					-		528.079.400,00	
			Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	310 Unit		250 Unit	270 Unit	183.534.000,00						290 Unit	528.079.400,00	
	2.15.02.1.13.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						183.534.000,00							528.079.400,00	
		Tersedianya Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan perizinan	310 Unit		250 Unit	270 Unit	183.534.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		290 Unit	528.079.400,00	Dinas Perhubungan
	2.15.02.1.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						68.243.000,00					-		87.448.000,00	
		Meningkatnya Angkutan Orang Tidak Dalam trayek Yang Laik Jalan						68.243.000,00					-		87.448.000,00	
			Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	130 Unit		110 Unit	115 Unit	68.243.000,00						120 Unit	87.448.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.15.02.1.14.0004	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						68.243.000,00							87.448.000,00	
		Tersedianya Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	Jumlah Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai Wilayah kerja dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang memenuhi persyaratan perizinan	130 Unit		110 Unit	115 Unit	68.243.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		120 Unit	87.448.000,00	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Prasarana Terminal						***2.873.396.713,00***							***1.069.630.600,00***	
			999.Cakupan fasilitas Terminal Dalam Kondisi baik	48.5 %		42.5 %	44 %	2.873.396.713,00						45.5 %	1.069.630.600,00	
	2.15.02.1.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B						2.873.396.713,00					masyarakat pengguna terminal		1.069.630.600,00	
		Meningkatnya ketersediaan fasilitas terminal tipe B						2.873.396.713,00					masyarakat pengguna terminal		1.069.630.600,00	
			Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.873.396.713,00						1 Unit	1.069.630.600,00	
	2.15.02.1.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)						2.873.396.713,00							1.069.630.600,00	
		Terlaksananya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.873.396.713,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PKB	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	1.069.630.600,00	Dinas Perhubungan
188.	**2.15.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN**						**3.584.651.674,00**							**4.642.820.000,00**	
		Meningkatnya Keselamatan Angkutan Penyeberangan						***108.489.500,00***							***128.957.800,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Rasio Penurunan Kecelakaan Angkutan Penyeberangan	2.4 %		2.7 %	2.7 %	108.489.500,00						2.6 %	128.957.800,00	
	2.15.03.1.05	Penetapan Lintas Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal yang Melayani Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						108.489.500,00					-		128.957.800,00	
		Meningkatnya Pengendalian dan Pengawasan Kapal Angkutan Penyeberangan Lintas Antar Kabupaten/Kota Dalam Daerah Provinsi						108.489.500,00					-		128.957.800,00	
			Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	108.489.500,00						27 Laporan	128.957.800,00	
	2.15.03.1.05.0004	Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						108.489.500,00							128.957.800,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan terkendalinya dan terawasinya izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	Jumlah laporan pengendalian dan pengawasan Jaringan Lintas Sungai, Danau dan Penyeberangan dan Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan izin persetujuan pengoperasian angkutan Sungai, Danau dan penyeberangan Lintas Pelabuhan Antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi	27 Laporan		27 Laporan	27 Laporan	108.489.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		27 Laporan	128.957.800,00	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Persentase Infrastruktur Pelabuhan Dalam Kondisi Baik						***1.051.055.324,00***							***3.182.767.200,00***	
			999.Persentase Infrastruktur Pelabuhan yang beroperasi dalam kondisi baik	40 %		40 %	40 %	801.866.324,00						40 %	2.982.767.200,00	
	2.15.03.1.09	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						1.051.055.324,00					-		3.182.767.200,00	
		Meningkatnya Sarana Angkutan Perairan						1.051.055.324,00					-		3.182.767.200,00	
			Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	1 Unit	801.866.324,00						1 Unit	2.982.767.200,00	
	2.15.03.1.09.0003	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional						801.866.324,00							2.982.767.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Regional yang Beroperasi dan terpelihara	2 Unit		1 Unit	1 Unit	801.866.324,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PKB	-	-		1 Unit	2.982.767.200,00	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Perusahaan Angkutan Perairan sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)						***161.408.850,00***							***333.095.000,00***	
			999.Persentase Perusahaan angkutan perairan sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)	100 %		100 %	100 %	161.408.850,00						100 %	333.095.000,00	
	2.15.03.1.02	Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat bagi Orang Perorangan atau Badan Usaha yang Berdomisili dan yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional						58.630.950,00					-		66.895.000,00	
		Meningkatnya Perusahaan Angkutan Pelayaran Rakyat Sesuai SSU (Sertifikat Standar Usaha)						58.630.950,00					-		66.895.000,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	58.630.950,00						6 Laporan	66.895.000,00	
	2.15.03.1.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi						58.630.950,00							66.895.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	58.630.950,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	66.895.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.06	Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						102.777.900,00					-		266.200.000,00	
		Meningkatnya Perusahaan Jasa di Kawasan Pelabuhan (Bongkat Muat, Pengurusan Transportasi Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan, Depo Peti Kemas dll)						102.777.900,00					-		266.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	50 Laporan		42 Laporan	44 Laporan	102.777.900,00						46 Laporan	266.200.000,00	
	2.15.03.1.06.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas						102.777.900,00							266.200.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas	50 Laporan		42 Laporan	44 Laporan	102.777.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		46 Laporan	266.200.000,00	Dinas Perhubungan
		Meningkatnya Perusahaan yang bergerak di Angkutan Perairan						***1.114.753.324,00***							***3.380.767.200,00***	
			999.Persentase Perusahaan angkutan perairan yang memiliki Izin Usaha	100 %		100 %	100 %	312.887.000,00						100 %	398.000.000,00	
		Meningkatnya Sarana Angkutan Perairan						1.051.055.324,00					-		3.182.767.200,00	
			Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	249.189.000,00						12 Laporan	200.000.000,00	
	2.15.03.1.09.0004	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional						249.189.000,00							200.000.000,00	
		Terawasinya Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Laporan pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Regional	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	249.189.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	200.000.000,00	Dinas Perhubungan
	2.15.03.1.10	Pembangunan dan Penerbitan Izin Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						63.698.000,00					-		198.000.000,00	
		Terlaksananya Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan sungai, Danau dan Penyeberangan yang melayani Trayek antar Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						63.698.000,00					-		198.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	12 Unit		12 Unit	12 Unit	63.698.000,00						12 Unit	198.000.000,00	
	2.15.03.1.10.0009	Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						63.698.000,00							198.000.000,00	
		Terpenuhinya Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Fasilitas Pelayanan Angkutan Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan yang Tersedia	12 Unit		12 Unit	12 Unit	63.698.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) PKB	-	-		12 Unit	198.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Kajian Kelayakan Infrastruktur Transportasi Laut						***2.200.000.000,00***							***800.000.000,00***	
			999.Persentase dokumen yang digunakan sebagai dasar perencanaan anggaran atau pembangunan fisik	100 %		58.33 %	75 %	2.200.000.000,00						83.33 %	800.000.000,00	
	2.15.03.1.08	Penetapan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional						2.200.000.000,00					-		800.000.000,00	
		Tersusunnya kajian teknis pengembangan sarana dan prasarana transportasi laut yang layak dan potensial						2.200.000.000,00					-		800.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.200.000.000,00						1 Dokumen	800.000.000,00	
	2.15.03.1.08.0001	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional						2.200.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	Jumlah Dokumen Rencana Induk dan Daerah Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan Regional	1 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	2.200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	800.000.000,00	Dinas Perhubungan
		Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik						**22.949.717.283,41**							**28.439.190.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**22.949.717.283,41**							**28.439.190.000,00**	
	2.16	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**						**21.512.737.283,41**							**25.508.450.000,00**	
189.	**2.16.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.603.609.433,41**							**13.686.440.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***12.580.924.433,41***							***13.685.180.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	87.85 Skor		84.42 Skor	85.27 Skor	12.580.924.433,41						86.12 Skor	13.685.180.000,00	
	2.16.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						269.280.000,00					-		177.790.000,00	
		Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						269.280.000,00					-		177.790.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.005.500,00						1 Dokumen	1.260.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	62.199.000,00						2 Dokumen	23.470.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.439.500,00						1 Dokumen	1.260.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.685.000,00						1 Dokumen	21.740.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.685.000,00						1 Dokumen	21.050.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	159.266.000,00						19 Laporan	109.010.000,00	
	2.16.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						62.199.000,00							23.470.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	62.199.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	23.470.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						22.685.000,00							21.050.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.685.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.050.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						22.685.000,00							21.740.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.685.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	21.740.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.005.500,00							1.260.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.005.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.260.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.439.500,00							1.260.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.439.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.260.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						159.266.000,00							109.010.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	159.266.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		19 Laporan	109.010.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.053.425.833,41					-		8.794.700.000,00	
		Persentase Penyerapan Anggaran Perangkat Daerah						8.053.425.833,41					-		8.794.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	27.273.000,00						12 Dokumen	51.240.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.739.000,00						1 Laporan	27.820.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan		55 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	8.012.413.833,41						63 Orang/ Bulan	8.715.640.000,00	
	2.16.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.012.413.833,41							8.715.640.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	69 Orang/ Bulan		55 Orang/ Bulan	60 Orang/ Bulan	8.012.413.833,41	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		63 Orang/ Bulan	8.715.640.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						27.273.000,00							51.240.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	27.273.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	51.240.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						13.739.000,00							27.820.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.739.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	27.820.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						21.192.000,00					-		38.830.000,00	
		Persentase Barang Milik Daerah yang Diamankan						21.192.000,00					-		38.830.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	11.490.000,00						5 Laporan	12.070.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.702.000,00						2 Dokumen	26.760.000,00	
	2.16.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						9.702.000,00							26.760.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.702.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	26.760.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						11.490.000,00							12.070.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	11.490.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Laporan	12.070.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						12.958.200,00					-		27.280.000,00	
		Persentase Kinerja Pegawai Perangkat Daerah yang Bernilai Baik						12.958.200,00					-		27.280.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	120.000,00						12 Dokumen	4.850.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.838.200,00						1 Dokumen	22.430.000,00	
	2.16.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						12.838.200,00							22.430.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.838.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	22.430.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						120.000,00							4.850.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	4.850.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						525.818.100,00					-		664.110.000,00	
		Persentase Pelaksanaan Administrasi Umum yang tepat waktu						525.818.100,00					-		664.110.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	7.200.000,00						48 Dokumen	25.200.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.791.000,00						12 Dokumen	20.660.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.650.000,00						12 Laporan	56.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	358.571.000,00						12 Laporan	505.470.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.000.000,00						1 Paket	14.350.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.465.000,00						1 Paket	12.100.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	69.141.100,00						1 Paket	30.330.000,00	
	2.16.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						30.465.000,00							12.100.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	30.465.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	12.100.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						69.141.100,00							30.330.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	69.141.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	30.330.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.000.000,00							14.350.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	26.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	14.350.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						7.200.000,00							25.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	48 Dokumen		24 Dokumen	12 Dokumen	7.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		48 Dokumen	25.200.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						26.650.000,00							56.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	56.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						358.571.000,00							505.470.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	358.571.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	505.470.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						7.791.000,00							20.660.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.791.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	20.660.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						827.951.100,00					-		235.740.000,00	
		Persentase Pemenuhan Pengadaan Barang Milik Daerah						827.951.100,00					-		235.740.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		2 Paket	5 Paket	12.816.100,00						5 Paket	51.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	815.135.000,00						12 Unit	184.740.000,00	
	2.16.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						12.816.100,00							51.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		2 Paket	5 Paket	12.816.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	51.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						815.135.000,00							184.740.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12 Unit		12 Unit	12 Unit	815.135.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Unit	184.740.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.485.039.200,00					-		3.125.470.000,00	
		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan yang tepat waktu						2.485.039.200,00					-		3.125.470.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	162.877.200,00						12 Laporan	326.260.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.321.162.000,00						12 Laporan	2.797.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00						12 Laporan	1.610.000,00	
	2.16.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							1.610.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	1.610.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						162.877.200,00							326.260.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	162.877.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	326.260.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.321.162.000,00							2.797.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.321.162.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	2.797.600.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						407.945.000,00					-		622.520.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik (Terpelihara)						407.945.000,00					-		622.520.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	21.810.000,00						24 Unit	244.770.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit		55 Unit	55 Unit	36.150.000,00						55 Unit	52.750.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	349.985.000,00						1 Unit	300.000.000,00	
	2.16.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						21.810.000,00							244.770.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	21.810.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Unit	244.770.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						36.150.000,00							52.750.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit		55 Unit	55 Unit	36.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55 Unit	52.750.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						349.985.000,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	349.985.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	300.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
190.	**2.16.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK**						**6.636.422.600,00**							**7.507.010.000,00**	
		Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah						***6.636.422.600,00***							***7.507.010.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase tingkat kepuasan masyarakat terhadap akses dan kualitas informasi publik pemerintah daerah	95 %		89 %	76 %	6.636.422.600,00						92 %	7.507.010.000,00	
	2.16.02.1.01	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi						6.636.422.600,00					Masyarakat		7.507.010.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi pada Perangkat Daerah						6.636.422.600,00					Masyarakat		7.507.010.000,00	
			Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.080.000,00						1 Laporan	2.986.420.000,00	
	2.16.02.1.01.0014	Relasi Media						120.080.000,00							2.986.420.000,00	
		Terlaksananya Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Laporan	2.986.420.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Informasi pada Perangkat Daerah						6.636.422.600,00					Masyarakat		7.507.010.000,00	
			Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	-	11.693.400,00						-	13.750.000,00	
			Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	-	5.448.850.000,00						-	1.700.000.000,00	
			Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat di Kab/Kota yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	-	202.106.600,00						-	238.260.000,00	
			Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	-	86.800.000,00						-	90.300.000,00	
			Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	-	62.700.000,00						-	215.340.000,00	
			Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	-	72.282.600,00						-	0,00	
			Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	-	131.910.000,00						-	227.620.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	-	500.000.000,00						-	2.035.320.000,00	
	2.16.02.1.01.0026	Pelayanan Informasi Publik serta Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik						500.000.000,00							2.035.320.000,00	
		Tersedianya Pelayanan Informasi Publik bagi masyarakat dan terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Persentase permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	-		-	100 %	500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	2.035.320.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.1.01.0027	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik						11.693.400,00							13.750.000,00	
		Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	-		-	43 Orang	11.693.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	13.750.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.1.01.0028	Penyusunan Strategi Komunikasi Publik						72.282.600,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan Strategi Komunikasi Publik	Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun (strakom tematik dan strakom isu daerah)	-		-	2 Dokumen	72.282.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	0,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.1.01.0029	Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik						5.448.850.000,00							1.700.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi/Diseminasi Informasi serta Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah khalayak yang terpapar informasi publik	-		-	3.036.339 Orang	5.448.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	1.700.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.1.01.0030	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik						62.700.000,00							215.340.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini Publik, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	-		-	14 Rekomendasi	62.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	215.340.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.1.01.0031	Penyusunan Konten						86.800.000,00							90.300.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Konten	Jumlah Konten Komunikasi Publik	-		-	1150 Konten	86.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	90.300.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.1.01.0032	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat						131.910.000,00							227.620.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik	Persentase Pengelolaan dan Publikasi Pengaduan Pelayanan Publik	-		-	100 %	131.910.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	227.620.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.02.1.01.0033	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat						202.106.600,00							238.260.000,00	
		Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Komunitas Informasi Masyarakat di Kab/Kota yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	-		-	15 Komunitas	202.106.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	238.260.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
191.	**2.16.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA**						**2.272.705.250,00**							**4.315.000.000,00**	
		meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika						***2.272.705.250,00***							***4.315.000.000,00***	
			1.Tingkat Kematangan Teknologi Digital	4 Skor		3 Skor	3 Skor	2.272.705.250,00						3.5 Skor	4.315.000.000,00	
			999.Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen TDP	3.40 Skor		3 Skor	3 Skor	2.272.705.250,00						3.20 Skor	4.315.000.000,00	
			999.Tingkat Kematangan Strategi dan Rencana TDP	3.80 Skor		3 Skor	3.20 Skor	2.272.705.250,00						3.40 Skor	4.315.000.000,00	
		Meningkatnya Kematangan Kolaborasi Penerapan Pemerintah Digital						2.272.705.250,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		4.315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.340.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
		Meningkatnya Kematangan Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional						2.272.705.250,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		4.315.000.000,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.340.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
		Meningkatnya Kematangan Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi						2.272.705.250,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		4.315.000.000,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.340.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
		Meningkatnya Kematangan Strategi Transformasi Digital Pemerintah						2.272.705.250,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		4.315.000.000,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.340.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
		Meningkatnya Pemanfaatan Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah						2.272.705.250,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		4.315.000.000,00	
			Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.340.000,00						1 Laporan	110.000.000,00	
	2.16.03.1.02.0035	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE						73.340.000,00							110.000.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	73.340.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		1 Laporan	110.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.1.02	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi						2.272.705.250,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		4.315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kematangan Kolaborasi Penerapan Pemerintah Digital						2.272.705.250,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		4.315.000.000,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	775.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	271.711.250,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	177.274.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	-	193.890.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	781.490.000,00						-	205.000.000,00	
		Meningkatnya Kematangan Pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional						2.272.705.250,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		4.315.000.000,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	775.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	271.711.250,00						-	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	177.274.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	-	193.890.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	781.490.000,00						-	205.000.000,00	
		Meningkatnya Kematangan Pembangunan/ Pengembangan Aplikasi						2.272.705.250,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		4.315.000.000,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	775.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	271.711.250,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	177.274.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	-	193.890.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	781.490.000,00						-	205.000.000,00	
		Meningkatnya Kematangan Strategi Transformasi Digital Pemerintah						2.272.705.250,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		4.315.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	775.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	271.711.250,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	177.274.000,00						-	1.500.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	-	193.890.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	781.490.000,00						-	205.000.000,00	
		Meningkatnya Pemanfaatan Kematangan Layanan Jaringan Intra Pemerintah						2.272.705.250,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		4.315.000.000,00	
			Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	-	775.000.000,00						-	1.100.000.000,00	
			Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	-	271.711.250,00						-	400.000.000,00	
			Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	-	177.274.000,00						-	1.500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	-	193.890.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	-	781.490.000,00						-	205.000.000,00	
	2.16.03.1.02.0038	Koordinasi pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi						177.274.000,00							1.500.000.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan aplikasi, data/informasi, dan layanan pemerintah daerah berbasis elektronik yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	-		-	40 Layanan	177.274.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.500.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.1.02.0039	Penyediaan Akses Internet						781.490.000,00							205.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD, termasuk ruang publik dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	-		-	37 Titik	781.490.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	205.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.1.02.0040	Koordinasi Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah						775.000.000,00							1.100.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dalam rangka pemanfaatan Ekosistem Pusat Data Nasional dan Penyelenggaraan Pusat Kendali Pemerintah Daerah	Jumlah Aplikasi SPBE Pemerintah Daerah yang sudah ditempatkan di Ekosistem Pusat Data Nasional dan laporan operasionalisasi pusat kendali	-		-	206 Aplikasi	775.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.100.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.16.03.1.02.0041	Koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK						271.711.250,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi Pelaksanaan SPBE (Pemerintah Digital) yang meliputi tata kelola, manajemen SPBE, dan Audit TIK	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE yang meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, rencana dan anggaran, manajemem SPBE (Pemerintah Digital), serta hasil Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	-		-	3 Dokumen	271.711.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	400.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.16.03.1.02.0042	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi dan Keterhubungan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota ke Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi						193.890.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam lingkup Provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	-		-	48 Titik	193.890.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	1.000.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK**						**780.920.000,00**							**1.592.470.000,00**	
192.	**2.20.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL**						**780.920.000,00**							**1.592.470.000,00**	
		Tercapainya kolaborasi, integrasi,dan standardisasi dalam penyelenggaraan sistem statistik nasional (SSN)						***780.920.000,00***							***1.592.470.000,00***	
			999.Persentase Perangkat Daerah yang Memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	81 %		35 %	47 %	780.920.000,00						58 %	1.592.470.000,00	
		Meningkatnya Data Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia						780.920.000,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.592.470.000,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	126.580.000,00						1 Laporan	289.260.000,00	
			Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	43 Orang		43 Orang	43 Orang	142.390.000,00						43 Orang	264.370.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	95 %		75 %	80 %	132.900.000,00						85 %	245.710.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70 %		30 %	40 %	114.090.000,00						50 %	239.490.000,00	
			Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	70 %		30 %	40 %	103.580.000,00						50 %	286.150.000,00	
	2.20.02.1.01.0016	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia						114.090.000,00							239.490.000,00	
		Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	70 %		30 %	40 %	114.090.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 %	239.490.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20.02.1.01.0018	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar						103.580.000,00							286.150.000,00	
		Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	70 %		30 %	40 %	103.580.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 %	286.150.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20.02.1.01.0019	Peningkatan kualitas statistik sektoral						132.900.000,00							245.710.000,00	
		Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	95 %		75 %	80 %	132.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		85 %	245.710.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20.02.1.01.0020	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral						142.390.000,00							264.370.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	43 Orang		43 Orang	43 Orang	142.390.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		43 Orang	264.370.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20.02.1.01.0021	Koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik sektoral						126.580.000,00							289.260.000,00	
		Terlaksananya koordinasi dan kolaborasi dalam penyelenggaraan statistik melalui Forum Satu Data Daerah	Jumlah laporan penyelenggaraan forum satu data daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	126.580.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	289.260.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.20.02.1.01	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi						780.920.000,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.592.470.000,00	
		Meningkatnya Data Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia						780.920.000,00					Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.592.470.000,00	
			Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	-	161.380.000,00						-	267.490.000,00	
	2.20.02.1.01.0022	Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional						161.380.000,00							267.490.000,00	
		Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik pusat dan/atau daerah	-		-	40 %	161.380.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	267.490.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.21	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN**						**656.060.000,00**							**1.338.270.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
193.	**2.21.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI**						**656.060.000,00**							**1.338.270.000,00**	
		Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah						***656.060.000,00***							***1.338.270.000,00***	
			999.Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Persandian	3.5 Skor		2.3 Skor	2.51 Skor	656.060.000,00						2.7 Skor	1.338.270.000,00	
	2.21.02.1.01	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi						656.060.000,00					Perangkat Daerah		1.338.270.000,00	
		Meningkatnya Pengamanan Informasi Layanan pada Perangkat Daerah						656.060.000,00					Perangkat Daerah		1.338.270.000,00	
			Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	126.270.000,00						1 Dokumen	228.700.000,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	478.790.000,00						12 Laporan	500.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00						1 Laporan	609.570.000,00	
	2.21.02.1.01.0005	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik						478.790.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	478.790.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		12 Laporan	500.000.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.21.02.1.01.0007	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan						51.000.000,00							609.570.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	609.570.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
	2.21.02.1.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah						126.270.000,00							228.700.000,00	
		Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	126.270.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	228.700.000,00	Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
		Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						**15.754.917.388,00**							**0,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**15.754.917.388,00**							**0,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**15.754.917.388,00**							**0,00**	
194.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.979.827.188,00**							**1.024.500.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***12.629.827.188,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	79,78 Skor		76,67 Skor	77,44 Skor	12.629.827.188,00						78,21 Skor	0,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						173.864.200,00					-		25.000.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berkualitas						173.864.200,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	59.975.000,00						6 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.800.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.085.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.400.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	38.804.200,00						2 Laporan	15.000.000,00	
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						51.975.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	51.975.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Dokumen	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						13.800.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						9.085.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.085.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						12.800.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						34.400.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	34.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						22.940.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	22.940.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.478.910.108,00					-		15.000.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berkualitas						8.478.910.108,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	60.454.000,00						6 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.952.800,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	53.031.560,00						4 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan		62 Orang/ Bulan	62 Orang/ Bulan	8.315.471.748,00						62 Orang/ Bulan	0,00	
	2.17.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.315.471.748,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	64 Orang/ Bulan		62 Orang/ Bulan	12 laporan Orang/ Bulan	8.315.471.748,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		62 Orang/ Bulan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						52.454.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	5 Dokumen	52.454.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						49.952.800,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.952.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						49.999.860,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	49.999.860,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						26.667.560,00					-		21.000.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berkualitas						26.667.560,00					-		21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.111.750,00						3 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	13.631.760,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.924.050,00						3 Dokumen	15.000.000,00	
	2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						3.144.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	2 Dokumen	3.144.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						13.631.760,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	13.631.760,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						2.901.750,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	2.901.750,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						20.000.000,00					-		0,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berkualitas						20.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		Paket	60 Paket	0,00						60 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		2 Orang	2 Orang	20.000.000,00						3 Orang	0,00	
	2.17.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	60 Paket		Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		60 Paket	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						20.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Orang	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						388.508.980,00					-		87.000.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berkualitas						388.508.980,00					-		87.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.312.980,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.067.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	166.919.800,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	103.571.000,00						9 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	21.729.000,00						6 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	34.348.200,00						16 Paket	24.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	46.421.000,00						15 Paket	21.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	1.540.000,00						9 Paket	24.000.000,00	
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						19.081.600,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	8 Paket	19.081.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		16 Paket	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						46.421.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	10 Paket	46.421.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		15 Paket	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						1.540.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	6 Paket	1.540.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		9 Paket	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						70.893.550,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	6 Paket	70.893.550,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		9 Paket	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.729.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	4 Paket	14.729.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Paket	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						3.600.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.067.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.067.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						166.919.800,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	166.919.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.312.980,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.312.980,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						200.082.240,00					-		30.000.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berekualitas						200.082.240,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	45.232.240,00						3 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3 Unit	3 Unit	154.850.000,00						3 Unit	0,00	
	2.17.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		Unit	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						45.232.240,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	45.232.240,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						154.850.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit		3 Unit	3 Unit	154.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.311.065.100,00					-		531.000.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berekualitas						3.311.065.100,00					-		531.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	398.863.200,00						12 Laporan	196.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.900.153.000,00						12 Laporan	325.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	8.428.900,00						13 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.620.000,00						2 Laporan	6.000.000,00	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.100.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						302.863.200,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	302.863.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.428.900,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	6.428.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.897.633.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.897.633.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						380.729.000,00					-		315.500.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berkualitas						380.729.000,00					-		315.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	85.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	104.354.000,00						20 Unit	36.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	97.150.000,00						2 Unit	19.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit		Unit	6 Unit	585.000,00						6 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	70 Unit	78.640.000,00						70 Unit	55.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	45.000.000,00	
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						72.150.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	72.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						63.494.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	16 Unit	63.494.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Unit	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						585.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	6 Unit		Unit	6 Unit	585.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		6 Unit	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						44.370.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	55 Unit	44.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		70 Unit	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berekualitas						200.082.240,00					-		30.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.17.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berkualitas						380.729.000,00					-		315.500.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.17.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
195.	**2.17.02**	**PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM**						**404.683.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam						***404.683.000,00***							***0,00***	
			999.Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	5.31 Persentase		5.10 Persentase	5.15 Persentase	404.683.000,00						5.20 Persentase	0,00	
	2.17.02.1.01	Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						404.683.000,00					Unit Usaha Koperasi		0,00	
		Terwujudanya Layanan Izin Usaha Simpan Pinjam yang berkualiatas						404.683.000,00					Unit Usaha Koperasi		0,00	
			Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	15 Unit Usaha		15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	404.683.000,00						15 Unit Usaha	0,00	
	2.17.02.1.01.0002	Fasilitasi Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						404.683.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi Dengan Wilayah Keanggotaan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi yang Memiliki Usaha Simpan Pinjam	15 Unit Usaha		15 Unit Usaha	15 Unit Usaha	404.683.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		15 Unit Usaha	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
196.	**2.17.03**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**						**158.000.000,00**							**0,00**	
		meningkatnya pembinaan dan pengawasan koperasi						***158.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	158.000.000,00						100 Persentase	0,00	
		Terwujudnya Koperasi dengan Katagori Sehat						158.000.000,00					Unit Usaha Koperasi		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha		25 Unit Usaha	30 Unit Usaha	75.000.000,00						60 Unit Usaha	0,00	
	2.17.03.1.01.0003	Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi						75.000.000,00							0,00	
		Pelaksanaan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi	100 Unit Usaha		25 Unit Usaha	50 Unit Usaha	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		60 Unit Usaha	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.03.1.01	Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						158.000.000,00					Unit Usaha Koperasi		0,00	
		Terwujudnya Koperasi dengan Katagori Sehat						158.000.000,00					Unit Usaha Koperasi		0,00	
			Jumlah Koperasi yang diperiksa	-		-	-	83.000.000,00						-	0,00	
	2.17.03.1.01.0005	Pelaksanaan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						83.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah Koperasi yang diperiksa	-		-	40 Unit Usaha	83.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
197.	**2.17.04**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**						**217.000.000,00**							**0,00**	
		meningkatnya kinerja pengelolaan koperasi						***217.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Koperasi Aktif	56,91 Persentase		54,69 Persentase	55,23 Persentase	217.000.000,00						55,79 Persentase	0,00	
	2.17.04.1.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						217.000.000,00					Unit Usaha Koperasi		0,00	
		Persentase Koperasi Aktif						217.000.000,00					Unit Usaha Koperasi		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha		50 Unit Usaha	70 Unit Usaha	217.000.000,00						100 Unit Usaha	0,00	
	2.17.04.1.01.0003	Penilaian Kesehatan Koperasi Meliputi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan						217.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penilaian Kesehatan Koperasi Tata Kelola, Profil Risiko, Kinerja Keuangan, dan Permodalan	Jumlah Koperasi yang Diberikan Penilaian Kesehatan	150 Unit Usaha		50 Unit Usaha	50 Unit Usaha	217.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pajak Daerah	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		100 Unit Usaha	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
198.	**2.17.06**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**						**1.000.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Produktivitas Koperasi						***1.000.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	30 Persentase		10 Persentase	15 Persentase	1.000.000.000,00						20 Persentase	0,00	
	2.17.06.1.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1.000.000.000,00					Unit Usaha/Koperasi		0,00	
		Terwujudnya Koperasi Yang Produktif						1.000.000.000,00					Unit Usaha/Koperasi		0,00	
			Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendampingan restrukturisasi dan revitalisasi	-		-	-	750.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah koperasi yang menggunakanaplikasi digital	-		-	-	250.000.000,00						-	0,00	
	2.17.06.1.01.0011	Digitalisasi pencatatan transaksi dan operasional koperasi						250.000.000,00							0,00	
		Implementasi sistem pencatatan transaksi dan operasional koperasi	Jumlah koperasi yang menggunakanaplikasi digital	-		-	50 Koperasi	250.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.06.1.01.0012	Pendampingan dan Fasilitasi Koperasi						750.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujudnya restrukturisasi dan revitalisasi	Jumlah Koperasi yang mendapatkan pendampingan restrukturisasi dan revitalisasi	-		-	257 Koperasi	750.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
199.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**1.875.725.800,00**							**1.700.000.000,00**	
		meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri						***875.725.800,00***							***0,00***	
			999.Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	42.37 Persentase		38.68 Persentase	39.6 Persentase	875.725.800,00						40.13 Persentase	0,00	
			999.Pertumbuhan Wirausaha	4.72 Persentase		4.54 Persentase	4.58 Persentase	875.725.800,00						4.63 Persentase	0,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						1.875.725.800,00					UMKM		1.700.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan kontribusi ekonomi dan lapangan kerja						1.875.725.800,00					UMKM		1.700.000.000,00	
			Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	-	62.745.000,00						-	0,00	
			Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	-	51.407.000,00						-	0,00	
			Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	-	1.101.872.400,00						-	1.700.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	-	159.701.400,00						-	0,00	
			Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-		-	-	0,00						-	0,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	-	500.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penyelesaian Perkara Hukum	-		-	-	0,00						-	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	-	0,00						-	0,00	
	2.17.07.1.01.0013	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM						101.872.400,00							0,00	
		Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	48 Orang	101.872.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0014	Pembinaan dan Fasilitasi Pemulihan Usaha						500.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya perlindungan UMKM melalui Pemulihan Usaha dalam kondisi darurat melalui restrukturisasi kredit, rekonstruksi usaha, bantuan modal, dan/atau bantuan bentuk lain	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Pemulihan Usaha	-		-	150 Unit Usaha	500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0015	Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha						159.701.400,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kompetensi dan Kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)/Pelaku Usaha	Jumlah pelaku usaha yang memperoleh peningkatan kompetensi dan kapasitas SDM Usaha Mikro dan Kecil (UMK)	-		-	194 Orang	159.701.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0017	Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Perizinan Berusaha bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Perizinan Berusaha	-		-	48 Unit Usaha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0018	Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM						62.745.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Integrasi Basis Data Tunggal UMKM	Jumlah Kegiatan Hasil Fasilitasi Integrasi dan Sinkronisasi Data UMKM	-		-	1000 Kegiatan	62.745.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0021	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum						0,00							0,00	
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Pelaku Usaha dalam Literasi Hukum	Jumlah pelaku usaha yang meningkat pemahamannya dan pengetahuannya dalam literasi hukum	-		-	240 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0023	Layanan Bantuan Penyelesaian Perkara Hukum bagi Pelaku Usaha						0,00							0,00	
		Terfasilitasinya perlindungan Pelaku Usaha dalam Penyelesaian Perkara Hukum	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penyelesaian Perkara Hukum	-		-	100 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.07.1.01.0024	Perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM						51.407.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya perkuatan Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	Jumlah Kemitraan antara Instansi Pemerintah dengan Kelembagaan lainnya untuk pemberdayaan UMKM	-		-	400 Lembaga	51.407.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
200.	**2.17.08**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**						**419.681.400,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Daya Saing UMKM						***419.681.400,00***							***0,00***	
			999.Proporsi Usaha Kecil Menjalin Kemitraan dan Ekspor	88.03 %		68.03 %	73.03 %	419.681.400,00						78.03 %	0,00	
	2.17.08.1.01	Pengembangan Usaha Kecil dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah						419.681.400,00					UMKM		0,00	
		Terwujudnya UMKM yang Berdaya saing						419.681.400,00					UMKM		0,00	
			Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan perkuatan	-		-	-	17.000.000,00						-	0,00	
			Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	-	20.507.000,00						-	0,00	
			Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	-	30.875.000,00						-	0,00	
			Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	-	100.317.000,00						-	0,00	
			Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	-	63.654.400,00						-	0,00	
			Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	-	187.328.000,00						-	0,00	
	2.17.08.1.01.0007	Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM						20.507.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penguatan Operasional Pusat Layanan Usaha Terpadu bagi UMKM	Jumlah Pusat Layanan Usaha Terpadu yang mendapatkan Penguatan Operasional	-		-	61 Lembaga	20.507.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0009	Pembinaan Perkuatan Lembaga Inkubator						17.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perkuatan Lembaga Inkubator	Jumlah lembaga inkubator yang memperoleh pembinaan dan perkuatan	-		-	200 Lembaga	17.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0012	Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha						187.328.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Wirausaha untuk Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	Jumlah Wirausaha yang memperoleh Pengembangan melalui Inkubasi Usaha	-		-	363 Orang	187.328.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0015	Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada UMKM						63.654.400,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi kepada unit usaha UMKM	Jumlah Unit Usaha UMKM yang memperoleh pembinaan dan Fasilitasi Pemanfaatan Digitalisasi dan Teknologi Produksi	-		-	48 Unit Usaha	63.654.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0021	Penyediaan Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM						30.875.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Tempat Promosi dan Pengembangan Usaha pada Infrastruktur Publik bagi UMKM	Jumlah UMKM yang mendapatkan tempat promosi dan pengembangan usaha pada infrastruktur publik	-		-	20 Unit Usaha	30.875.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.08.1.01.0023	Pembinaan dan Fasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM						100.317.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	Jumlah UMKM yang terfasilitasi Penguatan Akses Pembiayaan bagi UMKM	-		-	10 Unit Usaha	100.317.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		-	0,00	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah						**1.400.000.000,00**							**3.924.500.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.400.000.000,00**							**3.924.500.000,00**	
	2.17	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**						**1.400.000.000,00**							**3.924.500.000,00**	
201.	**2.17.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**12.979.827.188,00**							**1.024.500.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***289.480.000,00***							***959.500.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	79,78 Skor		76,67 Skor	77,44 Skor	289.480.000,00						78,21 Skor	959.500.000,00	
	2.17.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						173.864.200,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		25.000.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berkualitas						173.864.200,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	59.975.000,00						6 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	38.804.200,00						2 Laporan	15.000.000,00	
	2.17.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						8.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen		6 Dokumen	4 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		6 Dokumen	10.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.864.200,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	15.864.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	15.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.478.910.108,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		15.000.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berkualitas						8.478.910.108,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	60.454.000,00						6 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	53.031.560,00						4 Laporan	5.000.000,00	
	2.17.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						8.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		6 Dokumen	10.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						3.031.700,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	18 Laporan	3.031.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Laporan	5.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						26.667.560,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berkualitas						26.667.560,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		21.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	5.111.750,00						3 Laporan	6.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	7.924.050,00						3 Dokumen	15.000.000,00	
	2.17.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						4.780.050,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	4.780.050,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Dokumen	15.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						2.210.000,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	2.210.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Laporan	6.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.17.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						388.508.980,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		87.000.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berkualitas						388.508.980,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		87.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	103.571.000,00						9 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	21.729.000,00						6 Paket	8.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	16 Paket	34.348.200,00						16 Paket	24.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	46.421.000,00						15 Paket	21.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	1.540.000,00						9 Paket	24.000.000,00	
	2.17.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.266.600,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	16 Paket		16 Paket	8 Paket	15.266.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		16 Paket	24.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	5 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		15 Paket	21.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							24.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	3 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		9 Paket	24.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						32.677.450,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	3 Paket	32.677.450,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		9 Paket	10.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						7.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	2 Paket	7.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		6 Paket	8.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						200.082.240,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		30.000.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berekualitas						200.082.240,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		30.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	45.232.240,00						3 Paket	30.000.000,00	
	2.17.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	5 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		3 Paket	30.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.311.065.100,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		531.000.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berekualitas						3.311.065.100,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		531.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	398.863.200,00						12 Laporan	196.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.900.153.000,00						12 Laporan	325.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	8.428.900,00						13 Laporan	4.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.620.000,00						2 Laporan	6.000.000,00	
	2.17.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.520.000,00							6.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	6.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						96.000.000,00							196.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	96.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	196.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.000.000,00							4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	12 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		13 Laporan	4.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.520.000,00							325.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		12 Laporan	325.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						380.729.000,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		315.500.000,00	
		Terwujdunya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Yang Berkualitas						380.729.000,00					Balai Diklat Koperasi UKM Provinsi NTB		315.500.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	104.354.000,00						20 Unit	36.500.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	2 Unit	97.150.000,00						2 Unit	19.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	70 Unit	78.640.000,00						70 Unit	55.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	75.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0 Unit	1 Unit	50.000.000,00						1 Unit	45.000.000,00	
	2.17.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							19.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	2 Unit		2 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	19.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						40.860.000,00							36.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit		20 Unit	4 Unit	40.860.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		20 Unit	36.500.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						34.270.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit		70 Unit	15 Unit	34.270.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		70 Unit	55.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							85.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	85.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	75.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
	2.17.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	45.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
202.	**2.17.05**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**						**100.000.000,00**							**1.200.000.000,00**	
		meningkatnya kualitas SDM perkoperasian						***100.000.000,00***							***1.200.000.000,00***	
			999.Persentase Koperasi yang Diberikan Dukungan Fasilitasi Pelatihan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	100.000.000,00						100 Persentase	1.200.000.000,00	
	2.17.05.1.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						100.000.000,00					Unit Usaha Koperasi (SDM Koperasi) Seluruh NTB		1.200.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas SDM Perkoperasian						100.000.000,00					Unit Usaha Koperasi (SDM Koperasi) Seluruh NTB		1.200.000.000,00	
			Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	500 Orang		180 Orang	230 Orang	100.000.000,00						300 Orang	1.200.000.000,00	
	2.17.05.1.01.0001	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi						100.000.000,00							1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	500 Orang		180 Orang	230 Orang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		300 Orang	1.200.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
203.	**2.17.07**	**PROGRAM Pemberdayaan USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**						**1.875.725.800,00**							**1.700.000.000,00**	
		meningkatnya kapasitas UMKM yang tangguh dan mandiri						***1.000.000.000,00***							***1.700.000.000,00***	
			999.Persentase Usaha Kecil yang Bertransformasi dari Informal ke Formal	42.37 Persentase		38.68 Persentase	39.6 Persentase	1.000.000.000,00						40.13 Persentase	1.700.000.000,00	
			999.Pertumbuhan Wirausaha	4.72 Persentase		4.54 Persentase	4.58 Persentase	1.000.000.000,00						4.63 Persentase	1.700.000.000,00	
	2.17.07.1.01	Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan						1.875.725.800,00					UMKM seluruh NTB		1.700.000.000,00	
		Terwujudnya Peningkatan kontribusi ekonomi dan lapangan kerja						1.875.725.800,00					UMKM seluruh NTB		1.700.000.000,00	
			Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	-	1.101.872.400,00						-	1.700.000.000,00	
	2.17.07.1.01.0013	Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM						1.000.000.000,00							1.700.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelatihan dan Pendampingan pemanfaataan Sistem Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan bagi pelaku UMKM	Jumlah pelaku UMKM yang mendapatkan Pelatihan dan Pendampingan Pelaporan Pembukuan Pencatatan Keuangan	-		-	180 Orang	1.000.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	1.700.000.000,00	Balai Pendidikan dan Pelatihan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
		Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu						**11.733.829.410,48**							**19.545.042.589,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**11.733.829.410,48**							**19.545.042.589,00**	
	2.18	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL**						**11.733.829.410,48**							**19.545.042.589,00**	
204.	**2.18.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8.620.248.510,48**							**14.264.578.446,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***8.620.248.510,48***							***14.264.578.446,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	91 Skor		87 Skor	88 Skor	8.620.248.510,48						89 Skor	14.264.578.446,00	
	2.18.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						404.032.100,00					Stakeholder		1.016.655.280,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						404.032.100,00					Stakeholder		1.016.655.280,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	28.965.400,00						1 Berita Acara	103.040.349,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	113.553.500,00						2 Dokumen	270.587.391,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	46.732.100,00						1 Dokumen	172.405.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	54.832.100,00						1 Dokumen	101.365.280,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	78.624.000,00						2 Dokumen	261.401.980,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	81.325.000,00						1 Laporan	107.855.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah berdasarkan Bidang Urusan yang diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perangkat Daerah						404.032.100,00					Stakeholder		1.016.655.280,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	28.965.400,00						1 Berita Acara	103.040.349,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	113.553.500,00						2 Dokumen	270.587.391,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	46.732.100,00						1 Dokumen	172.405.280,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	54.832.100,00						1 Dokumen	101.365.280,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	78.624.000,00						2 Dokumen	261.401.980,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	81.325.000,00						1 Laporan	107.855.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPAP-SKPD)						404.032.100,00					Stakeholder		1.016.655.280,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	28.965.400,00						1 Berita Acara	103.040.349,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	113.553.500,00						2 Dokumen	270.587.391,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	46.732.100,00						1 Dokumen	172.405.280,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	54.832.100,00						1 Dokumen	101.365.280,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	78.624.000,00						2 Dokumen	261.401.980,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	81.325.000,00						1 Laporan	107.855.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)						404.032.100,00					Stakeholder		1.016.655.280,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	28.965.400,00						1 Berita Acara	103.040.349,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	113.553.500,00						2 Dokumen	270.587.391,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	46.732.100,00						1 Dokumen	172.405.280,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	54.832.100,00						1 Dokumen	101.365.280,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	78.624.000,00						2 Dokumen	261.401.980,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	81.325.000,00						1 Laporan	107.855.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)						404.032.100,00					Stakeholder		1.016.655.280,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	28.965.400,00						1 Berita Acara	103.040.349,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	113.553.500,00						2 Dokumen	270.587.391,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	46.732.100,00						1 Dokumen	172.405.280,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	54.832.100,00						1 Dokumen	101.365.280,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	78.624.000,00						2 Dokumen	261.401.980,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	81.325.000,00						1 Laporan	107.855.000,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Tersusunnya Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD)						404.032.100,00					Stakeholder		1.016.655.280,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	28.965.400,00						1 Berita Acara	103.040.349,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	113.553.500,00						2 Dokumen	270.587.391,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	46.732.100,00						1 Dokumen	172.405.280,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	54.832.100,00						1 Dokumen	101.365.280,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	78.624.000,00						2 Dokumen	261.401.980,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	81.325.000,00						1 Laporan	107.855.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						404.032.100,00					Stakeholder		1.016.655.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	28.965.400,00						1 Berita Acara	103.040.349,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	113.553.500,00						2 Dokumen	270.587.391,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	46.732.100,00						1 Dokumen	172.405.280,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	54.832.100,00						1 Dokumen	101.365.280,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	78.624.000,00						2 Dokumen	261.401.980,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	81.325.000,00						1 Laporan	107.855.000,00	
	2.18.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						113.553.500,00							270.587.391,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	113.553.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	270.587.391,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						78.624.000,00							261.401.980,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	78.624.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	261.401.980,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						54.832.100,00							101.365.280,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	54.832.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	101.365.280,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						46.732.100,00							172.405.280,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	46.732.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	172.405.280,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						81.325.000,00							107.855.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	81.325.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	107.855.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						28.965.400,00							103.040.349,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	28.965.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Berita Acara	103.040.349,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						5.927.034.078,48					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern;		8.674.981.212,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						5.927.034.078,48					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern;		8.674.981.212,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.580.000,00						1 Dokumen	96.455.978,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.648.800,00						1 Laporan	103.013.533,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan		47 Orang/ Bulan	47 Orang/ Bulan	5.862.805.278,48						47 Orang/ Bulan	8.475.511.701,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN						5.927.034.078,48					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern;		8.674.981.212,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.580.000,00						1 Dokumen	96.455.978,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.648.800,00						1 Laporan	103.013.533,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan		47 Orang/ Bulan	47 Orang/ Bulan	5.862.805.278,48						47 Orang/ Bulan	8.475.511.701,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi dan Tersusunnya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.927.034.078,48					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern;		8.674.981.212,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.580.000,00						1 Dokumen	96.455.978,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.648.800,00						1 Laporan	103.013.533,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan		47 Orang/ Bulan	47 Orang/ Bulan	5.862.805.278,48						47 Orang/ Bulan	8.475.511.701,00	
	2.18.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						5.862.805.278,48							8.475.511.701,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan		47 Orang/ Bulan	47 Orang/ Bulan	5.862.805.278,48	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		47 Orang/ Bulan	8.475.511.701,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						20.580.000,00							96.455.978,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.580.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	96.455.978,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						43.648.800,00							103.013.533,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.648.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	103.013.533,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						9.000.000,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern;		64.656.839,00	
		Terselenggaranya Rekonsiliasi dan Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah						9.000.000,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern;		64.656.839,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	9.000.000,00						2 Laporan	64.656.839,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						9.000.000,00							64.656.839,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	9.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	64.656.839,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						38.303.640,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		40.483.803,00	
		Meningkatnya sarana dan prasarana disiplin pegawai						38.303.640,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		40.483.803,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	67 Paket		67 Paket	67 Paket	22.500.000,00						67 Paket	12.100.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.803.640,00						2 Unit	28.383.803,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapannya						38.303.640,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		40.483.803,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	67 Paket		67 Paket	67 Paket	22.500.000,00						67 Paket	12.100.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.803.640,00						2 Unit	28.383.803,00	
	2.18.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						15.803.640,00							28.383.803,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit		2 Unit	2 Unit	15.803.640,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Unit	28.383.803,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						22.500.000,00							12.100.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	67 Paket		67 Paket	64 Paket	22.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		67 Paket	12.100.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.120.321.672,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		2.458.873.898,00	
		Terfasilitasinya Kunjungan Tamu						1.120.321.672,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		2.458.873.898,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.306.000,00						1 Dokumen	140.759.356,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.700.000,00						1 Laporan	211.864.836,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	215.714.700,00						20 Laporan	272.111.867,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.490.400,00						1 Paket	185.198.445,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.546.000,00						1 Paket	81.453.224,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	156.786.972,00						1 Paket	282.466.187,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	387.927.600,00						4 Paket	1.112.565.994,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	56.850.000,00						1 Paket	172.453.989,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan						1.120.321.672,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		2.458.873.898,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.306.000,00						1 Dokumen	140.759.356,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.700.000,00						1 Laporan	211.864.836,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	215.714.700,00						20 Laporan	272.111.867,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.490.400,00						1 Paket	185.198.445,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.546.000,00						1 Paket	81.453.224,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	156.786.972,00						1 Paket	282.466.187,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	387.927.600,00						4 Paket	1.112.565.994,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	56.850.000,00						1 Paket	172.453.989,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor						1.120.321.672,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		2.458.873.898,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.306.000,00						1 Dokumen	140.759.356,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.700.000,00						1 Laporan	211.864.836,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	215.714.700,00						20 Laporan	272.111.867,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.490.400,00						1 Paket	185.198.445,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.546.000,00						1 Paket	81.453.224,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	156.786.972,00						1 Paket	282.466.187,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	387.927.600,00						4 Paket	1.112.565.994,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	56.850.000,00						1 Paket	172.453.989,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan						1.120.321.672,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		2.458.873.898,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.306.000,00						1 Dokumen	140.759.356,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.700.000,00						1 Laporan	211.864.836,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	215.714.700,00						20 Laporan	272.111.867,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.490.400,00						1 Paket	185.198.445,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.546.000,00						1 Paket	81.453.224,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	156.786.972,00						1 Paket	282.466.187,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	387.927.600,00						4 Paket	1.112.565.994,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	56.850.000,00						1 Paket	172.453.989,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor						1.120.321.672,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		2.458.873.898,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.306.000,00						1 Dokumen	140.759.356,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.700.000,00						1 Laporan	211.864.836,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	215.714.700,00						20 Laporan	272.111.867,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.490.400,00						1 Paket	185.198.445,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.546.000,00						1 Paket	81.453.224,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	156.786.972,00						1 Paket	282.466.187,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	387.927.600,00						4 Paket	1.112.565.994,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	56.850.000,00						1 Paket	172.453.989,00	
		Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor						1.120.321.672,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		2.458.873.898,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.306.000,00						1 Dokumen	140.759.356,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.700.000,00						1 Laporan	211.864.836,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	215.714.700,00						20 Laporan	272.111.867,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.490.400,00						1 Paket	185.198.445,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.546.000,00						1 Paket	81.453.224,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	156.786.972,00						1 Paket	282.466.187,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	387.927.600,00						4 Paket	1.112.565.994,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	56.850.000,00						1 Paket	172.453.989,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga						1.120.321.672,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		2.458.873.898,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.306.000,00						1 Dokumen	140.759.356,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.700.000,00						1 Laporan	211.864.836,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	215.714.700,00						20 Laporan	272.111.867,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.490.400,00						1 Paket	185.198.445,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.546.000,00						1 Paket	81.453.224,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	156.786.972,00						1 Paket	282.466.187,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	387.927.600,00						4 Paket	1.112.565.994,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	56.850.000,00						1 Paket	172.453.989,00	
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						1.120.321.672,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		2.458.873.898,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.306.000,00						1 Dokumen	140.759.356,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.700.000,00						1 Laporan	211.864.836,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	215.714.700,00						20 Laporan	272.111.867,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.490.400,00						1 Paket	185.198.445,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.546.000,00						1 Paket	81.453.224,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	156.786.972,00						1 Paket	282.466.187,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	387.927.600,00						4 Paket	1.112.565.994,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	56.850.000,00						1 Paket	172.453.989,00	
	2.18.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						156.786.972,00							282.466.187,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	156.786.972,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	282.466.187,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						387.927.600,00							1.112.565.994,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	387.927.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4 Paket	1.112.565.994,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.18.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						56.850.000,00							172.453.989,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	56.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	172.453.989,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						72.490.400,00							185.198.445,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	72.490.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	185.198.445,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.546.000,00							81.453.224,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	20.546.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Paket	81.453.224,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						85.306.000,00							140.759.356,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.306.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	140.759.356,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						124.700.000,00							211.864.836,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	211.864.836,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						215.714.700,00							272.111.867,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	215.714.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		20 Laporan	272.111.867,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		30.250.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya						0,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		30.250.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	30.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		30.250.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	30.250.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		30.250.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	30.250.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		30.250.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	30.250.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		30.250.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	30.250.000,00	
	2.18.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00							30.250.000,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	30.250.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						916.076.020,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		1.317.933.642,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						916.076.020,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		1.317.933.642,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	203.950.000,00						1 Laporan	302.130.263,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	664.306.020,00						1 Laporan	911.071.681,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	41.980.000,00						2 Laporan	86.170.202,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	5.840.000,00						2 Laporan	18.561.496,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor						916.076.020,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		1.317.933.642,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	203.950.000,00						1 Laporan	302.130.263,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	664.306.020,00						1 Laporan	911.071.681,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	41.980.000,00						2 Laporan	86.170.202,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	5.840.000,00						2 Laporan	18.561.496,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						916.076.020,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		1.317.933.642,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	203.950.000,00						1 Laporan	302.130.263,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	664.306.020,00						1 Laporan	911.071.681,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	41.980.000,00						2 Laporan	86.170.202,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	5.840.000,00						2 Laporan	18.561.496,00	
		Tersedianya Jasa Surat Menyurat						916.076.020,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		1.317.933.642,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	203.950.000,00						1 Laporan	302.130.263,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	664.306.020,00						1 Laporan	911.071.681,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	41.980.000,00						2 Laporan	86.170.202,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	5.840.000,00						2 Laporan	18.561.496,00	
	2.18.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.840.000,00							18.561.496,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	5.840.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	18.561.496,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						203.950.000,00							302.130.263,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	203.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	302.130.263,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						41.980.000,00							86.170.202,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	41.980.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Laporan	86.170.202,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						664.306.020,00							911.071.681,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	664.306.020,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Laporan	911.071.681,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						205.481.000,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		660.743.772,00	
		Terpeliharanya Aset Tetap Lainnya						205.481.000,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		660.743.772,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	128.100.000,00						25 Unit	296.424.141,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	0,00						25 Unit	59.132.925,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.844.000,00						1 Unit	165.976.320,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	26.537.000,00						1 Unit	139.210.386,00	
		Terpeliharanya dan Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						205.481.000,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		660.743.772,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	128.100.000,00						25 Unit	296.424.141,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	0,00						25 Unit	59.132.925,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.844.000,00						1 Unit	165.976.320,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	26.537.000,00						1 Unit	139.210.386,00	
		Terpeliharanya/Terehabilitasinya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						205.481.000,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		660.743.772,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	128.100.000,00						25 Unit	296.424.141,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	0,00						25 Unit	59.132.925,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.844.000,00						1 Unit	165.976.320,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	26.537.000,00						1 Unit	139.210.386,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						205.481.000,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		660.743.772,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	128.100.000,00						25 Unit	296.424.141,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	0,00						25 Unit	59.132.925,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.844.000,00						1 Unit	165.976.320,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	26.537.000,00						1 Unit	139.210.386,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						205.481.000,00					Stakeholder Intern OPD dan Stakeholder Ekstern		660.743.772,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	128.100.000,00						25 Unit	296.424.141,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	0,00						25 Unit	59.132.925,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.844.000,00						1 Unit	165.976.320,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	26.537.000,00						1 Unit	139.210.386,00	
	2.18.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							59.132.925,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit		25 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		25 Unit	59.132.925,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						128.100.000,00							296.424.141,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	25 Unit		25 Unit	17 Unit	128.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		25 Unit	296.424.141,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						50.844.000,00							165.976.320,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	50.844.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Unit	165.976.320,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						26.537.000,00							139.210.386,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		0 Unit	1 Unit	26.537.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	139.210.386,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
205.	**2.18.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL**						**1.086.194.500,00**							**1.954.670.298,00**	
		Meningkatnya kemudahan berinvestasi						***1.086.194.500,00***							***1.954.670.298,00***	
			999.Realisasi Total terhadap Target Investasi	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.086.194.500,00						100 Persentase	1.954.670.298,00	
	2.18.02.1.01	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						518.985.000,00					stakeholder dan Pelaku usaha		949.482.981,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi						518.985.000,00					stakeholder dan Pelaku usaha		949.482.981,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	80.654.000,00						1 Dokumen	293.283.282,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	357.691.000,00						1 Dokumen	449.426.328,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.640.000,00						1 Dokumen	206.773.371,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						518.985.000,00					stakeholder dan Pelaku usaha		949.482.981,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	80.654.000,00						1 Dokumen	293.283.282,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	357.691.000,00						1 Dokumen	449.426.328,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.640.000,00						1 Dokumen	206.773.371,00	
		Tersedianya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko						518.985.000,00					stakeholder dan Pelaku usaha		949.482.981,00	
			Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	80.654.000,00						1 Dokumen	293.283.282,00	
			Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	357.691.000,00						1 Dokumen	449.426.328,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.640.000,00						1 Dokumen	206.773.371,00	
	2.18.02.1.01.0001	Penetapan Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal						357.691.000,00							449.426.328,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Kebijakan Daerah dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi Dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	357.691.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	449.426.328,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.1.01.0003	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi						80.654.000,00							293.283.282,00	
		Terlaksananya Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	Jumlah Kesepakatan Kemitraan antara Usaha Besar (PMA/PMDN) dengan UMKM di daerah	1 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	80.654.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	293.283.282,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.1.01.0004	Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko						80.640.000,00							206.773.371,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Sektor Usaha yang Regulasinya Diharmonisasi Terkait Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.640.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	206.773.371,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.1.02	Pembuatan Peta Potensi Investasi Provinsi						567.209.500,00					Stakeholder, Pelaku usaha		1.005.187.317,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi						567.209.500,00					Stakeholder, Pelaku usaha		1.005.187.317,00	
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2 Daerah		2 Daerah	2 Daerah	104.150.000,00						2 Daerah	215.804.642,00	
		Terlaksananya Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)						567.209.500,00					Stakeholder, Pelaku usaha		1.005.187.317,00	
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2 Daerah		2 Daerah	2 Daerah	104.150.000,00						2 Daerah	215.804.642,00	
		Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi						567.209.500,00					Stakeholder, Pelaku usaha		1.005.187.317,00	
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2 Daerah		2 Daerah	2 Daerah	104.150.000,00						2 Daerah	215.804.642,00	
		Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi						567.209.500,00					Stakeholder, Pelaku usaha		1.005.187.317,00	
			Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2 Daerah		2 Daerah	2 Daerah	104.150.000,00						2 Daerah	215.804.642,00	
	2.18.02.1.02.0003	Pemutakhiran data potensi investasi daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)						104.150.000,00							215.804.642,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya data potensi investasi daerah yang termutakhirkan	Jumlah daerah yang telah dilaksanakan pemutakhiran data potensi investasi	2 Daerah		2 Daerah	2 Daerah	104.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Daerah	215.804.642,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi						567.209.500,00					Stakeholder, Pelaku usaha		1.005.187.317,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	-	279.880.000,00						-	301.556.195,00	
			Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha di Daerah dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	-		-	-	78.205.000,00						-	102.628.329,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	-		-	-	104.974.500,00						-	385.198.151,00	
		Terlaksananya Pemutakhiran Data Potensi Investasi Daerah pada Sistem PIR (Potensi Investasi Regional)						567.209.500,00					Stakeholder, Pelaku usaha		1.005.187.317,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	-	279.880.000,00						-	301.556.195,00	
			Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha di Daerah dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	-		-	-	78.205.000,00						-	102.628.329,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	-		-	-	104.974.500,00						-	385.198.151,00	
		Tersusunnya Peta Potensi Investasi Provinsi						567.209.500,00					Stakeholder, Pelaku usaha		1.005.187.317,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	-	279.880.000,00						-	301.556.195,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha di Daerah dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	-		-	-	78.205.000,00						-	102.628.329,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	-		-	-	104.974.500,00						-	385.198.151,00	
		Tersusunnya Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi						567.209.500,00					Stakeholder, Pelaku usaha		1.005.187.317,00	
			Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	-	279.880.000,00						-	301.556.195,00	
			Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha di Daerah dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	-		-	-	78.205.000,00						-	102.628.329,00	
			Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	-		-	-	104.974.500,00						-	385.198.151,00	
	2.18.02.1.02.0006	Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Provinsi						104.974.500,00							385.198.151,00	
		Tersusunnya Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	Jumlah Naskah Akademik/Peraturan Daerah (Perda) tentang RUPM Daerah Provinsi	-		-	1 Dokumen	104.974.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	385.198.151,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.1.02.0007	Penyusunan Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi						279.880.000,00							301.556.195,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	Jumlah Dokumen Peta Potensi dan Peluang Investasi Provinsi	-		-	2 Dokumen	279.880.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	301.556.195,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.02.1.02.0009	Fasilitasi Kemitraan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi						78.205.000,00							102.628.329,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM di Daerah dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	Jumlah Fasilitasi Kemitraan Usaha antara UMKM Milik Pengusaha di Daerah dengan Perusahaan PMA/PMDN yang Berskala Besar	-		-	1 UMKM	78.205.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		-	102.628.329,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
206.	**2.18.03**	**PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL**						**617.009.600,00**							**971.619.045,00**	
		Meningkatnya jangkauan promosi penanaman modal						***617.009.600,00***							***971.619.045,00***	
			999.Persentase Peningkatan Investor yang Berinvestasi	15 Persentase		11 Persentase	12 Persentase	617.009.600,00						13 Persentase	971.619.045,00	
	2.18.03.1.01	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						617.009.600,00					Stakeholder dan Pelaku Usaha		971.619.045,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						617.009.600,00					Stakeholder dan Pelaku Usaha		971.619.045,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	505.267.100,00						2 Dokumen	522.424.485,00	
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	111.742.500,00						1 Dokumen	449.194.560,00	
		Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						617.009.600,00					Stakeholder dan Pelaku Usaha		971.619.045,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	505.267.100,00						2 Dokumen	522.424.485,00	
			Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	111.742.500,00						1 Dokumen	449.194.560,00	
	2.18.03.1.01.0002	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						505.267.100,00							522.424.485,00	
		Terlaksananya Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	505.267.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	522.424.485,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.03.1.01.0003	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi						111.742.500,00							449.194.560,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	111.742.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		1 Dokumen	449.194.560,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
207.	**2.18.04**	**PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL**						**578.913.500,00**							**1.161.235.800,00**	
		Meningkatnya perizinan berusaha berbasis risiko						***578.913.500,00***							***1.161.235.800,00***	
			999.Persentase Pelaku Usaha yang Memperoleh Izin Sesuai Ketentuan	100 %		100 %	100 %	578.913.500,00						100 %	1.161.235.800,00	
	2.18.04.1.02	Penanaman Modal yang Menurut Ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						578.913.500,00					Stakeholder, Pelaku Usaha		1.161.235.800,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						578.913.500,00					Stakeholder, Pelaku Usaha		1.161.235.800,00	
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	18 Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	177.103.000,00						14 Kegiatan Usaha	453.942.635,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	550 Dokumen		350 Dokumen	400 Dokumen	188.365.000,00						450 Dokumen	207.242.615,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	86.925.000,00						0 Pelaku Usaha	65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha		3000 Pelaku Usaha	3500 Pelaku Usaha	126.520.500,00						4000 Pelaku Usaha	435.050.550,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko						578.913.500,00					Stakeholder, Pelaku Usaha		1.161.235.800,00	
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	18 Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	177.103.000,00						14 Kegiatan Usaha	453.942.635,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	550 Dokumen		350 Dokumen	400 Dokumen	188.365.000,00						450 Dokumen	207.242.615,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	86.925.000,00						0 Pelaku Usaha	65.000.000,00	
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha		3000 Pelaku Usaha	3500 Pelaku Usaha	126.520.500,00						4000 Pelaku Usaha	435.050.550,00	
		Tersedia dan Terkelolanya Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						578.913.500,00					Stakeholder, Pelaku Usaha		1.161.235.800,00	
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	18 Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	177.103.000,00						14 Kegiatan Usaha	453.942.635,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	550 Dokumen		350 Dokumen	400 Dokumen	188.365.000,00						450 Dokumen	207.242.615,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	86.925.000,00						0 Pelaku Usaha	65.000.000,00	
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha		3000 Pelaku Usaha	3500 Pelaku Usaha	126.520.500,00						4000 Pelaku Usaha	435.050.550,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Terintegrasi secara Elektronik						578.913.500,00					Stakeholder, Pelaku Usaha		1.161.235.800,00	
			Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	18 Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	177.103.000,00						14 Kegiatan Usaha	453.942.635,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	550 Dokumen		350 Dokumen	400 Dokumen	188.365.000,00						450 Dokumen	207.242.615,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	86.925.000,00						0 Pelaku Usaha	65.000.000,00	
			Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha		3000 Pelaku Usaha	3500 Pelaku Usaha	126.520.500,00						4000 Pelaku Usaha	435.050.550,00	
	2.18.04.1.02.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah						188.365.000,00							207.242.615,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Daerah Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penentapan Pemberian Fasilitas/Insentif yang menjadi Kewenangan Provinsi	550 Dokumen		350 Dokumen	1 Dokumen	188.365.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		450 Dokumen	207.242.615,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.02.0006	Penyediaan dan pengelolaan Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						86.925.000,00							65.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya dan Terkelolanya Layanan Konsultasi terhadap Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Pelaku Usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	0 Pelaku Usaha		0 Pelaku Usaha	0 Pelaku Usaha	86.925.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Pelaku Usaha	65.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.02.0007	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik						126.520.500,00							435.050.550,00	
		Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik	5000 Pelaku Usaha		3000 Pelaku Usaha	3500 Pelaku Usaha	126.520.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		4000 Pelaku Usaha	435.050.550,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.04.1.02.0008	Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko						177.103.000,00							453.942.635,00	
		Terlaksananya Pemantauan, Analisis, Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	Evaluasi, dan Pelaporan di Bidang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha	18 Kegiatan Usaha		10 Kegiatan Usaha	12 Kegiatan Usaha	177.103.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		14 Kegiatan Usaha	453.942.635,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
208.	**2.18.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**						**783.323.300,00**							**1.063.590.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya pelaksanaan penanaman modal						***783.323.300,00***							***1.063.590.000,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang Dihadapi Pelaku Usaha dalam Membuka Usaha	100 Persentase		70 Persentase	80 Persentase	783.323.300,00						90 Persentase	1.063.590.000,00	
	2.18.05.1.01	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						783.323.300,00					Stakeholder, Pelaku Usaha		1.063.590.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						783.323.300,00					Stakeholder, Pelaku Usaha		1.063.590.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan usaha		20 Kegiatan usaha	20 Kegiatan usaha	201.158.300,00						20 Kegiatan usaha	391.630.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	443.845.000,00						500 Pelaku Usaha	367.436.500,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan usaha		6 Kegiatan usaha	6 Kegiatan usaha	138.320.000,00						6 Kegiatan usaha	304.523.500,00	
		Terselenggaranya Pengawasan Penanaman Modal						783.323.300,00					Stakeholder, Pelaku Usaha		1.063.590.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan usaha		20 Kegiatan usaha	20 Kegiatan usaha	201.158.300,00						20 Kegiatan usaha	391.630.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	443.845.000,00						500 Pelaku Usaha	367.436.500,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan usaha		6 Kegiatan usaha	6 Kegiatan usaha	138.320.000,00						6 Kegiatan usaha	304.523.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselesaikannya Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam Merealisasikan Kegiatan Usahanya						783.323.300,00					Stakeholder, Pelaku Usaha		1.063.590.000,00	
			Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan usaha		20 Kegiatan usaha	20 Kegiatan usaha	201.158.300,00						20 Kegiatan usaha	391.630.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	443.845.000,00						500 Pelaku Usaha	367.436.500,00	
			Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan usaha		6 Kegiatan usaha	6 Kegiatan usaha	138.320.000,00						6 Kegiatan usaha	304.523.500,00	
	2.18.05.1.01.0004	Pengawasan Penanaman Modal						201.158.300,00							391.630.000,00	
		Terlaksananya Analisa dan Verifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Inspeksi Lapangan terhadap Kegiatan serta Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha Para Pelaku Usaha	Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku DIlakukan Inspeksi Lapangan ; serta DIlakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha	20 Kegiatan usaha		20 Kegiatan usaha	20 Kegiatan usaha	201.158.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		20 Kegiatan usaha	391.630.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.1.01.0005	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya						138.320.000,00							304.523.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya	6 Kegiatan usaha		6 Kegiatan usaha	6 Kegiatan usaha	138.320.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		6 Kegiatan usaha	304.523.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	2.18.05.1.01.0006	Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha						443.845.000,00							367.436.500,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Perizinan Berusaha Berbasis Risikodan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	500 Pelaku Usaha		500 Pelaku Usaha	500 Pelaku Usaha	443.845.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		500 Pelaku Usaha	367.436.500,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
209.	**2.18.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL**						**48.140.000,00**							**129.349.000,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan dan informasi, penanaman modal						***48.140.000,00***							***129.349.000,00***	
			999.Persentase Pemanfaatan Data dan Informasi Penanaman Modal	85 Persentase		68 Persentase	72 Persentase	48.140.000,00						77 Persentase	129.349.000,00	
	2.18.06.1.01	Urusan Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Provinsi						48.140.000,00					Stakeholder, Pelaku usaha		129.349.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berusaha yang Terkelola, Tertampil, dan Termanfaatkan melalui Sistem Pelayanan Terintegrasi Elektronik						48.140.000,00					Stakeholder, Pelaku usaha		129.349.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.140.000,00						2 Dokumen	129.349.000,00	
	2.18.06.1.01.0002	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						48.140.000,00							129.349.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	48.140.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		2 Dokumen	129.349.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Dinas Kebudayaan						**10.592.507.514,00**							**12.955.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**10.592.507.514,00**							**12.955.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**10.592.507.514,00**							**12.955.000,00**	
210.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**10.206.183.074,00**							**2.967.890.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***8.950.915.424,00***							***12.955.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.86 Skor		81.37 Skor	82.19 Skor	8.950.915.424,00						83.01 Skor	12.955.000,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110.949.785,00					-		57.758.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110.949.785,00					-		57.758.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	19.077.685,00						1 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00						2 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	0,00						3 Data	0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.203.000,00						1 Dokumen	4.434.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.313.000,00						2 Dokumen	12.955.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.417.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.203.000,00						4 Dokumen	2.217.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.073.000,00						4 Dokumen	4.434.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.569.100,00						1 Dokumen	4.434.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.547.000,00						3 Laporan	14.642.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.547.000,00						2 Laporan	14.642.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	2 Substansi		2 Substansi	2 Substansi	0,00						2 Substansi	0,00	
	2.22.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						12.313.000,00							12.955.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.313.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	12.955.000,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						11.573.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	11.573.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						9.469.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	9.469.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						9.469.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	9.469.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.313.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.313.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						12.313.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.313.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Data	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						19.077.685,00							0,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	19.077.685,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						8.417.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.417.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						0,00							0,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Berita Acara	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu						0,00							0,00	
		Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	2 Substansi		2 Substansi	2 Substansi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Substansi	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.888.523.429,00					-		39.726.000,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah						6.888.523.429,00					-		39.726.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	360.000,00						5 Dokumen	6.372.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	253.931.250,00						12 Dokumen	8.734.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	588.000,00						12 Dokumen	4.078.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	354 Dokumen		54 Dokumen	154 Dokumen	208.000,00						154 Dokumen	10.540.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.470.000,00						1 Laporan	2.946.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.047.000,00						4 Laporan	7.056.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1434 Orang/ Bulan		840 Orang/ Bulan	1434 Orang/ Bulan	6.621.919.179,00						1434 Orang/ Bulan	0,00	
	2.22.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.621.919.179,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1434 Orang/ Bulan		840 Orang/ Bulan	11434 Orang/ Bulan	6.621.919.179,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1434 Orang/ Bulan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						24.909.700,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.909.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	354 Dokumen		54 Dokumen	60 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		154 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						8.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						7.458.400,00					-		22.220.000,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.458.400,00					-		22.220.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	620.000,00						2 Laporan	2.946.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.530.400,00						4 Laporan	10.540.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.308.000,00						1 Dokumen	8.734.000,00	
	2.22.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		0,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah						0,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	542 Orang		542 Orang	542 Orang	0,00						542 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	0,00						150 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	0,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	2.22.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							0,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	542 Orang		542 Orang	542 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		542 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						236.396.840,00					-		308.965.000,00	
		Tersedianya Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						236.396.840,00					-		308.965.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	720 Dokumen	10.000.000,00						720 Dokumen	26.982.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	860.000,00						1 Dokumen	3.871.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	190.000,00						250 Dokumen	9.111.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.570.000,00						12 Laporan	29.356.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	76.504.580,00						3 Laporan	90.069.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	16.779.860,00						12 Paket	16.323.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	18.000.000,00						5 Paket	19.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	23.000.000,00						4 Paket	21.993.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	33.122.400,00						3 Paket	39.272.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	23.530.000,00						2 Paket	34.299.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.840.000,00						1 Paket	18.189.000,00	
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						10.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.999.860,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	9.999.860,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	720 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						19.450.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						26.384.580,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	26.384.580,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						247.000.000,00					-		333.782.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						247.000.000,00					-		333.782.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	82.000.000,00						3 Paket	34.330.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	88.553.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit		100 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00						1 Unit	131.330.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	55.000.000,00						20 Unit	79.569.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	2.22.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						35.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit		100 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.539.491.000,00					-		1.640.487.000,00	
		Tersedianya laporan pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.539.491.000,00					-		1.640.487.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	643.219.000,00						12 Laporan	442.766.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.891.852.000,00						12 Laporan	1.181.962.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	420.000,00						1 Laporan	4.890.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00						1 Laporan	10.869.000,00	
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						188.100.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	188.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.890.824.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.890.824.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						174.503.620,00					-		557.778.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						174.503.620,00					-		557.778.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00						1 Unit	21.188.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit	0 Unit	651.200,00						0 Unit	3.632.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	68.825.000,00						1 Unit	120.340.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.165.420,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	69.240.000,00						6 Unit	65.152.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	378.000,00						50 Unit	22.510.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		30 Unit	60 Unit	23.244.000,00						60 Unit	54.648.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.500.000,00						1 Unit	145.278.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.000.000,00						1 Unit	125.030.000,00	
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						4.165.420,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	4.165.420,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		30 Unit	60 Unit	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
211.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**3.193.609.000,00**							**2.920.692.000,00**	
		Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan						***1.412.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	100 %		83.33 %	83.33 %	1.412.000.000,00						91.66 %	0,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						845.005.000,00					-		982.801.000,00	
		Tersebarnya Jangkauan Pengelolaan Kebudayaan						845.005.000,00					-		982.801.000,00	
			Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	12 Kegiatan		12 Kegiatan	12 Kegiatan	0,00						12 Kegiatan	0,00	
			Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	12.000.000,00						10 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	0,00						10 Lembaga	0,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	7 Objek		7 Objek	7 Objek	15.000.000,00						7 Objek	0,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	775.255.000,00						100 Orang	679.188.000,00	
			Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	0,00	
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						300.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0010	Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelindungan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilindungi	7 Objek		7 Objek	100 Objek	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0011	Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Lembaga dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Lembaga dan Pranata Kebudayaan yang Dibina	10 Lembaga		10 Lembaga	10 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Lembaga	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0012	Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Provinsi berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyusunan, Pemutakhiran, Penetapan PPKD Provinsi Berdasarkan PPKD Kabupaten/Kota	Jumlah PPKD Provinsi yang Disusun, Dimutakhirkan dan Ditetapkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0013	Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Aktivitas/Kegiatan Pengembangan dan Pemanfaatan yang berkaitan dengan Objek Pemajuan Kebudayaan	12 Kegiatan		12 Kegiatan	12 Kegiatan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Kegiatan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0014	Pembinaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pembinaan Sumber Daya Manusia Bidang Kebudayaan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kebudayaan yang Dibina	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.01.0015	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) Kabupaten/Kota						12.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan PPKD Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen PPKD Kabupaten Kota yang Dipantau dan Dievaluasi	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						1.963.604.000,00					-		1.937.891.000,00	
		Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional						1.963.604.000,00					-		1.937.891.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	332.993.000,00						1 Laporan	298.917.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	1.630.611.000,00						1 Objek	1.638.974.000,00	
			Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat		20 Sertifikat	20 Sertifikat	0,00						20 Sertifikat	0,00	
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						610.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	610.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						90.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	90.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Penghargaan Kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan	20 Sertifikat		20 Sertifikat	20 Sertifikat	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Sertifikat	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.03	Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						385.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pranata Kebudayaan						385.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek		10 Objek	10 Objek	10.000.000,00						10 Objek	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	20 Unit		20 Unit	20 Unit	375.000.000,00						20 Unit	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	0,00	
	2.22.02.1.03.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat	Jumlah Objek Pemajuan Lembaga Adat yang telah Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	10 Objek		10 Objek	10 Objek	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.03.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina	50 Orang		50 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.02.1.03.0003	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat						375.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi	20 Unit		20 Unit	20 Unit	375.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
212.	**2.22.03**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL**						**107.500.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kesenian tradisional yang dikembangkan						***107.500.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase kesenian tradisional yang dikembangkan	100 %		50 %	50 %	107.500.000,00						75 %	0,00	
	2.22.03.1.01	Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota						107.500.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sanggar Sekolah/Sanggar Masyarakat						107.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	75 Lembaga		10 Lembaga	12 Lembaga	7.500.000,00						18 Lembaga	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	500 Orang		100 Orang	175 Orang	100.000.000,00						210 Orang	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	40 Sertifikat		5 Sertifikat	10 Sertifikat	0,00						12 Sertifikat	0,00	
	2.22.03.1.01.0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)	500 Orang		100 Orang	175 Orang	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		210 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.03.1.01.0002	Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan						0,00							0,00	
		Tersedianya Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisonal yang Mengikuti Proses Standarisasi	40 Sertifikat		5 Sertifikat	10 Sertifikat	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Sertifikat	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.03.1.01.0003	Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional						7.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya	75 Lembaga		10 Lembaga	12 Lembaga	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Lembaga	0,00	Dinas Kebudayaan
213.	**2.22.04**	**PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH**						**15.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya sejarah lokal yang dikembangkan						***7.500.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase sejarah lokal yang dikembangkan	100 %		50 %	50 %	7.500.000,00						75 %	0,00	
	2.22.04.1.01	Pembinaan Sejarah Lokal Provinsi						15.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pembinaan Komunitas Sejarah						15.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	4 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	4 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	20 Unit		2 Unit	5 Unit	7.500.000,00						8 Unit	0,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	300 Orang		50 Orang	75 Orang	7.500.000,00						100 Orang	0,00	
	2.22.04.1.01.0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi						7.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan	300 Orang		50 Orang	75 Orang	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.04.1.01.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah						7.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah	20 Unit		2 Unit	5 Unit	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Unit	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.04.1.01.0003	Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Data dan Informasi Sejarah						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data dan Informasi Sejarah yang Diakses Masyarakat	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Sejarah yang dapat diakses Masyarakat	4 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.04.1.01.0004	Fasilitasi Peningkatan Penulisan Sejarah Lokal						0,00							0,00	
		Terfasilitasinya Penulisan Sejarah Lokal	Jumlah Penulisan Sejarah LokalJumlah Dokumen Hasil Penulisan Sejarah Lokal	4 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Kebudayaan
214.	**2.22.05**	**PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA**						**30.310.090,00**							**0,00**	
		Meningkatnya warisan budaya yang dilestarikan						***10.310.090,00***							***0,00***	
			999.Persentase cagar budaya yang ditetapkan	4.88 %		4.53 %	4.62 %	10.310.090,00						4.71 %	0,00	
			999.Persentase warisan budaya tak benda yang ditetapkan	13.25 %		7.49 %	8.93 %	10.310.090,00						10.37 %	0,00	
			999.Persentase Warisan Budaya yang Dilestarikan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	10.310.090,00						100 Persentase	0,00	
	2.22.05.1.01	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						15.000.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya Tk. Provinsi						15.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	8 Objek		1 Objek	2 Objek	5.000.000,00						3 Objek	0,00	
			Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	8 Objek		1 Objek	2 Objek	5.000.000,00						2 Objek	0,00	
			Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	8 Objek		1 Objek	2 Objek	5.000.000,00						2 Objek	0,00	
	2.22.05.1.01.0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan	8 Objek		1 Objek	2 Objek	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.01.0002	Penetapan Cagar Budaya						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan	8 Objek		1 Objek	2 Objek	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.01.0003	Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengusulan Warisan Budaya Tak Benda	Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang Diusulkan	8 Objek		1 Objek	2 Objek	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Provinsi						15.310.090,00					-		0,00	
		Terlaksananya pengelolaan Cagar Budaya						15.310.090,00					-		0,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	8 Objek		1 Objek	2 Objek	5.000.000,00						2 Objek	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	8 Objek		1 Objek	1 Objek	5.310.090,00						2 Objek	0,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	8 Objek		1 Objek	2 Objek	5.000.000,00						2 Objek	0,00	
			Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang		25 Orang	50 Orang	0,00						75 Orang	0,00	
	2.22.05.1.02.0001	Pelindungan Cagar Budaya						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Cagar Budaya yang Diregistrasi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Diregistrasi	8 Objek		1 Objek	2 Objek	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02.0002	Pengembangan Cagar Budaya						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksanakannya Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan	8 Objek		1 Objek	2 Objek	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02.0003	Pemanfaatan Cagar Budaya						5.310.090,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan	8 Objek		1 Objek	1 Objek	5.310.090,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.02.0004	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Pelestari Cagar Budaya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Jumlah Tenaga Pelestari Cagar Budaya yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	200 Orang		25 Orang	50 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		75 Orang	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.03	Penerbitan Izin Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi						0,00					-		0,00	
		Tersedianya izin Membawa Cagar Budaya						0,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	6 Objek		1 Objek	1 Objek	0,00						2 Objek	0,00	
	2.22.05.1.03.0001	Penerbitan Izin membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi						0,00							0,00	
		Terbitnya Perizinan Membawa Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Mendapatkan Perizinan ke Luar Daerah Provinsi	6 Objek		1 Objek	1 Objek	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Objek	0,00	Dinas Kebudayaan
	2.22.05.1.03.0002	Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya Ke Luar Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Pengawasan Cagar Budaya ke Luar Daerah Provinsi	3 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Kebudayaan
		Taman Budaya						**2.301.129.650,00**							**4.957.615.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**2.301.129.650,00**							**4.957.615.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**2.301.129.650,00**							**4.957.615.000,00**	
215.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**10.206.183.074,00**							**2.967.890.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***529.520.650,00***							***1.419.041.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.86 Skor		81.37 Skor	82.19 Skor	529.520.650,00						83.01 Skor	1.419.041.000,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110.949.785,00					-		57.758.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110.949.785,00					-		57.758.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.203.000,00						1 Dokumen	4.434.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.203.000,00						4 Dokumen	2.217.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.073.000,00						4 Dokumen	4.434.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.569.100,00						1 Dokumen	4.434.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.547.000,00						3 Laporan	14.642.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.547.000,00						2 Laporan	14.642.000,00	
	2.22.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							2.217.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.217.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							2.217.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	2.217.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							2.217.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.217.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							2.217.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	2.217.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							7.321.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	7.321.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							7.321.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	7.321.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.888.523.429,00					-		39.726.000,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah						6.888.523.429,00					-		39.726.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	360.000,00						5 Dokumen	6.372.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	253.931.250,00						12 Dokumen	8.734.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	588.000,00						12 Dokumen	4.078.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	354 Dokumen		54 Dokumen	154 Dokumen	208.000,00						154 Dokumen	10.540.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.470.000,00						1 Laporan	2.946.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.047.000,00						4 Laporan	7.056.000,00	
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						223.097.650,00							4.367.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	223.097.650,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	4.367.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							5.270.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	354 Dokumen		54 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		154 Dokumen	5.270.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							1.473.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.473.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							3.186.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	3.186.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							3.528.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	3.528.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							2.039.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	2.039.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						7.458.400,00					-		22.220.000,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.458.400,00					-		22.220.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	620.000,00						2 Laporan	2.946.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.530.400,00						4 Laporan	10.540.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.308.000,00						1 Dokumen	8.734.000,00	
	2.22.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							4.367.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	4.367.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							5.270.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	5.270.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							1.473.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	1.473.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.860.000,00					-		7.174.000,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah						1.860.000,00					-		7.174.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00						0 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	1.860.000,00						0 Laporan	7.174.000,00	
	2.22.01.1.04.0005	Pengolahan Data Retribusi Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Laporan	0,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							3.587.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Laporan	3.587.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						236.396.840,00					-		308.965.000,00	
		Tersedianya Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						236.396.840,00					-		308.965.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	720 Dokumen	10.000.000,00						720 Dokumen	26.982.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	190.000,00						250 Dokumen	9.111.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.570.000,00						12 Laporan	29.356.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	76.504.580,00						3 Laporan	90.069.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	16.779.860,00						12 Paket	16.323.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	18.000.000,00						5 Paket	19.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	23.000.000,00						4 Paket	21.993.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	33.122.400,00						3 Paket	39.272.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	23.530.000,00						2 Paket	34.299.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.840.000,00						1 Paket	18.189.000,00	
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							20.061.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	20.061.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							15.429.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	15.429.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							7.171.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	7.171.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							7.150.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	2 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	7.150.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							11.896.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	2 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	11.896.000,00	Taman Budaya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							17.232.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	17.232.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	2 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	0,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							13.986.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	13.986.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							46.358.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	46.358.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							4.427.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	4.427.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						247.000.000,00					-		333.782.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						247.000.000,00					-		333.782.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	82.000.000,00						3 Paket	34.330.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	88.553.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00						1 Unit	131.330.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	55.000.000,00						20 Unit	79.569.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						67.000.000,00							16.707.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	67.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	16.707.000,00	Taman Budaya

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							14.183.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	14.183.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							88.553.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	88.553.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.539.491.000,00					-		1.640.487.000,00	
		Tersedianya laporan pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.539.491.000,00					-		1.640.487.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	643.219.000,00						12 Laporan	442.766.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.891.852.000,00						12 Laporan	1.181.962.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	420.000,00						1 Laporan	4.890.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00						1 Laporan	10.869.000,00	
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							4.563.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.563.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						232.279.000,00							221.383.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	232.279.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	221.383.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							2.445.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.445.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						0,00							617.436.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	617.436.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						174.503.620,00					-		557.778.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						174.503.620,00					-		557.778.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00						1 Unit	21.188.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	68.825.000,00						1 Unit	120.340.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	69.240.000,00						6 Unit	65.152.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	378.000,00						50 Unit	22.510.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		30 Unit	60 Unit	23.244.000,00						60 Unit	54.648.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.500.000,00						1 Unit	145.278.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.000.000,00						1 Unit	125.030.000,00	
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							32.576.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	4 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	32.576.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							11.255.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	60 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	11.255.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						7.144.000,00							27.324.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		30 Unit	60 Unit	7.144.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	27.324.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00							10.594.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	10.594.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							60.170.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	8 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	60.170.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							72.639.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	72.639.000,00	Taman Budaya
	2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							62.515.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	62.515.000,00	Taman Budaya
216.	**2.22.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN**						**3.193.609.000,00**							**2.920.692.000,00**	
		Meningkatnya Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan						***1.771.609.000,00***							***2.920.692.000,00***	
			999.Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang dikembangkan	100 %		83.33 %	83.33 %	1.771.609.000,00						91.66 %	2.920.692.000,00	
	2.22.02.1.01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						845.005.000,00					-		982.801.000,00	
		Tersebarnya Jangkauan Pengelolaan Kebudayaan						845.005.000,00					-		982.801.000,00	
			Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	775.255.000,00						100 Orang	679.188.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit		4 Unit	4 Unit	32.750.000,00						3 Unit	303.613.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.02.1.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan						475.255.000,00							679.188.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	100 Orang		100 Orang	268 Orang	475.255.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	-	-		100 Orang	679.188.000,00	Taman Budaya
	2.22.02.1.01.0003	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya						32.750.000,00							303.613.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	3 Unit		4 Unit	3 Unit	32.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	-	-		3 Unit	303.613.000,00	Taman Budaya
	2.22.02.1.02	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya Lintas Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi						1.963.604.000,00					-		1.937.891.000,00	
		Terlaksananya pelestarian kesenian tradisional						1.963.604.000,00					-		1.937.891.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	332.993.000,00						1 Laporan	298.917.000,00	
			Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	1.630.611.000,00						1 Objek	1.638.974.000,00	
	2.22.02.1.02.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya						1.020.611.000,00							1.638.974.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	1 Objek		1 Objek	1 Objek	1.020.611.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	-	-		1 Objek	1.638.974.000,00	Taman Budaya
	2.22.02.1.02.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional						242.993.000,00							298.917.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	242.993.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	-	-		1 Laporan	298.917.000,00	Taman Budaya
217.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**1.065.435.000,00**							**3.703.040.000,00**	
		Meningkatnya kunjungan museum						***0,00***							***567.800.000,00***	
			999.Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	0,00						100 Persentase	567.800.000,00	
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi						1.065.435.000,00					-		3.703.040.000,00	
		Tersedianya Koleksi Museum yang terawat						1.065.435.000,00					-		3.703.040.000,00	
			Jumlah kegiatan publik di taman budaya	5 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00						1 Kegiatan	25.000.000,00	
			Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya	4 Layanan		3 Layanan	1 Layanan	0,00						1 Layanan	25.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi	3 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						2 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	7 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						4 Unit	342.800.000,00	
	2.22.06.1.01.0006	Revitalisasi Taman Budaya						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Direvitalisasi	3 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Taman Budaya	-	-		2 Unit	200.000.000,00	Taman Budaya
	2.22.06.1.01.0007	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya						0,00							342.800.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Budaya	Jumlah Sarana dan Prasarana Taman Budaya yang Disediakan dan Dipelihara	7 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	342.800.000,00	Taman Budaya
	2.22.06.1.01.0011	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya						0,00							25.000.000,00	
		Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Taman Budaya	Jumlah kegiatan publik di taman budaya	5 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Kegiatan	25.000.000,00	Taman Budaya
	2.22.06.1.01.0012	Pengelolaan Operasional Taman Budaya						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Operasional Taman Budaya	Jumlah Layanan Operasional Taman Budaya	4 Layanan		3 Layanan	1 Layanan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Layanan	25.000.000,00	Taman Budaya
		Museum Negeri						**1.724.400.000,00**							**4.621.052.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**1.724.400.000,00**							**4.621.052.000,00**	
	2.22	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN**						**1.724.400.000,00**							**4.621.052.000,00**	
218.	**2.22.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**10.206.183.074,00**							**2.967.890.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***656.997.000,00***							***1.487.947.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.86 Skor		81.37 Skor	82.19 Skor	656.997.000,00						83.01 Skor	1.487.947.000,00	
	2.22.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110.949.785,00					-		57.758.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						110.949.785,00					-		57.758.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.203.000,00						1 Dokumen	4.434.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	11.203.000,00						4 Dokumen	2.217.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	13.073.000,00						4 Dokumen	4.434.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.569.100,00						1 Dokumen	4.434.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.547.000,00						3 Laporan	14.642.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.547.000,00						2 Laporan	14.642.000,00	
	2.22.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						1.569.100,00							2.217.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.569.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.217.000,00	Museum Negeri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						1.500.000,00							2.217.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	2.217.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						1.734.000,00							2.217.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.734.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.217.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.734.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	1.734.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						234.000,00							7.321.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	1 Laporan	234.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	7.321.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						234.000,00							7.321.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	234.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	7.321.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.888.523.429,00					-		39.726.000,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan Perangkat Daerah						6.888.523.429,00					-		39.726.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	360.000,00						5 Dokumen	6.372.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	253.931.250,00						12 Dokumen	8.734.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	588.000,00						12 Dokumen	4.078.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	354 Dokumen		54 Dokumen	154 Dokumen	208.000,00						154 Dokumen	10.540.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.470.000,00						1 Laporan	2.946.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.047.000,00						4 Laporan	7.056.000,00	
	2.22.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						5.923.900,00							4.367.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	1 Dokumen	5.923.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	4.367.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						208.000,00							5.270.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	354 Dokumen		54 Dokumen	10 Dokumen	208.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		154 Dokumen	5.270.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.470.000,00							1.473.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.470.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	1.473.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						360.000,00							3.186.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	360.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	3.186.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						2.047.000,00							3.528.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.047.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	3.528.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						588.000,00							2.039.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	588.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	2.039.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						7.458.400,00					-		22.220.000,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						7.458.400,00					-		22.220.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	620.000,00						2 Laporan	2.946.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.530.400,00						4 Laporan	10.540.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.308.000,00						1 Dokumen	8.734.000,00	
	2.22.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						308.000,00							4.367.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	308.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	4.367.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.530.400,00							5.270.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	1.530.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	5.270.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						620.000,00							1.473.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	12 Laporan	620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	1.473.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						1.860.000,00					-		7.174.000,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Administrasi Pendapatan Daerah						1.860.000,00					-		7.174.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan		0 Laporan	0 Laporan	1.860.000,00						0 Laporan	7.174.000,00	
	2.22.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						1.860.000,00							3.587.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	0 Laporan		0 Laporan	12 Laporan	1.860.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Laporan	3.587.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						236.396.840,00					-		308.965.000,00	
		Tersedianya Barang dan Jasa pada Pelaksanaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						236.396.840,00					-		308.965.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	720 Dokumen	10.000.000,00						720 Dokumen	26.982.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	860.000,00						1 Dokumen	3.871.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	250 Dokumen	190.000,00						250 Dokumen	9.111.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	25.570.000,00						12 Laporan	29.356.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	76.504.580,00						3 Laporan	90.069.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	16.779.860,00						12 Paket	16.323.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	18.000.000,00						5 Paket	19.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	23.000.000,00						4 Paket	21.993.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	33.122.400,00						3 Paket	39.272.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	23.530.000,00						2 Paket	34.299.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.840.000,00						1 Paket	18.189.000,00	
	2.22.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						28.122.400,00							19.211.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	2 Paket	28.122.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	19.211.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.530.000,00							18.870.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	3 Paket	13.530.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	18.870.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						3.840.000,00							11.018.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	3.840.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	11.018.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						6.780.000,00							9.173.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	350 Paket	6.780.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	9.173.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.000.000,00							10.097.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	10 Paket	8.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	10.097.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						5.000.000,00							9.750.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	720 Dokumen		720 Dokumen	48 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		720 Dokumen	9.750.000,00	Museum Negeri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						18.000.000,00							19.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	65 Paket	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	19.500.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						6.120.000,00							15.370.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	6.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	15.370.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						50.120.000,00							43.711.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	50.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	43.711.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						190.000,00							4.684.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	250 Dokumen		250 Dokumen	12 Dokumen	190.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		250 Dokumen	4.684.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						860.000,00							3.871.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	860.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	3.871.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						247.000.000,00					-		333.782.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah						247.000.000,00					-		333.782.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	82.000.000,00						3 Paket	34.330.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	88.553.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit		100 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00						1 Unit	131.330.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	20 Unit	55.000.000,00						20 Unit	79.569.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	2.22.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							17.623.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	17.623.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						30.000.000,00							65.386.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	20 Unit		20 Unit	4 Unit	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	65.386.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	0 Unit		100 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Unit	0,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						75.000.000,00							131.330.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	131.330.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.539.491.000,00					-		1.640.487.000,00	
		Tersedianya laporan pelaksanaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.539.491.000,00					-		1.640.487.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	643.219.000,00						12 Laporan	442.766.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.891.852.000,00						12 Laporan	1.181.962.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	420.000,00						1 Laporan	4.890.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00						1 Laporan	10.869.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.000.000,00							6.306.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	6.306.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						222.840.000,00							221.383.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	222.840.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	221.383.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						420.000,00							2.445.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	12 Laporan	420.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.445.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.028.000,00							564.526.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.028.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	564.526.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						174.503.620,00					-		557.778.000,00	
		Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						174.503.620,00					-		557.778.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	500.000,00						1 Unit	21.188.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit	0 Unit	651.200,00						0 Unit	3.632.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	68.825.000,00						1 Unit	120.340.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	69.240.000,00						6 Unit	65.152.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	378.000,00						50 Unit	22.510.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		30 Unit	60 Unit	23.244.000,00						60 Unit	54.648.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	5.500.000,00						1 Unit	145.278.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.000.000,00						1 Unit	125.030.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						69.240.000,00							32.576.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	6 Unit		6 Unit	4 Unit	69.240.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	32.576.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						378.000,00							11.255.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	50 Unit		50 Unit	60 Unit	378.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Unit	11.255.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.100.000,00							27.324.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		30 Unit	60 Unit	6.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	27.324.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						651.200,00							3.632.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	0 Unit		0 Unit	250 Unit	651.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	3.632.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						500.000,00							10.594.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	2 Unit	500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	10.594.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						63.825.000,00							60.170.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	8 Unit	63.825.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	60.170.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						5.500.000,00							72.639.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	5 Unit	5.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	72.639.000,00	Museum Negeri
	2.22.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						2.000.000,00							62.515.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	62.515.000,00	Museum Negeri
219.	**2.22.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN**						**1.065.435.000,00**							**3.703.040.000,00**	
		Meningkatnya kunjungan museum						***1.065.435.000,00***							***3.110.240.000,00***	
			999.Persentase Kunjungan Wisatawan ke Museum	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	1.065.435.000,00						100 Persentase	3.110.240.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.22.06.1.01	Pengelolaan Museum Provinsi						1.065.435.000,00					-		3.703.040.000,00	
		Tersedianya Koleksi Museum yang terawat						1.065.435.000,00					-		3.703.040.000,00	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	13 Unit		0 Unit	8 Unit	45.000.000,00						10 Unit	209.200.000,00	
			Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	2400 Unit		2000 Unit	2100 Unit	66.800.000,00						2200 Unit	575.526.000,00	
			Jumlah Layanan Operasional Museum	3 Layanan		0 Layanan	3 Layanan	50.000.000,00						3 Layanan	214.200.000,00	
			Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	500 Orang		100 Orang	200 Orang	250.000.000,00						300 Orang	224.200.000,00	
			Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	20 Unit		10 Unit	12 Unit	419.110.000,00						14 Unit	886.725.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	20 Unit		10 Unit	12 Unit	64.750.000,00						14 Unit	314.170.400,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	20 Unit		10 Unit	12 Unit	148.000.000,00						14 Unit	417.099.800,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang		10 Orang	20 Orang	21.775.000,00						30 Orang	269.118.800,00	
	2.22.06.1.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu						66.800.000,00							575.526.000,00	
		Terlaksananya Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan Koleksi Secara Terpadu	Jumlah Koleksi Museum yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfataan	2400 Unit		2000 Unit	2100 Unit	66.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	-	-		2200 Unit	575.526.000,00	Museum Negeri
	2.22.06.1.01.0002	Pembinaan dan Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman						21.775.000,00							269.118.800,00	
		Terlaksananya Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman	Jumlah Sumber Daya Manusia Permuseuman yang Ditingkatkan Mutu dan Kapasitasnya	50 Orang		10 Orang	20 Orang	21.775.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	-	-		30 Orang	269.118.800,00	Museum Negeri
	2.22.06.1.01.0003	Peningkatan Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum						419.110.000,00							886.725.000,00	
		Meningkatnya Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	Jumlah Pelayanan dan Akses Masyarakat terhadap Museum	20 Unit		10 Unit	12 Unit	419.110.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	-	-		14 Unit	886.725.000,00	Museum Negeri
	2.22.06.1.01.0004	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum						148.000.000,00							417.099.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Tersedia	20 Unit		10 Unit	12 Unit	148.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	-	-		14 Unit	417.099.800,00	Museum Negeri
	2.22.06.1.01.0005	Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum						64.750.000,00							314.170.400,00	
		Terlaksananya Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum	Jumlah Sarana dan Prasarana Museum yang Direvitalisasi	20 Unit		10 Unit	12 Unit	64.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	-	-		14 Unit	314.170.400,00	Museum Negeri
	2.22.06.1.01.0008	Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum						250.000.000,00							224.200.000,00	
		Terlibatnya Masyarakat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	Jumlah Orang yang Terlibat dalam Penyelenggaraan Kegiatan Publik di Museum	500 Orang		100 Orang	200 Orang	250.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300 Orang	224.200.000,00	Museum Negeri
	2.22.06.1.01.0010	Pengelolaan Operasional Museum						50.000.000,00							214.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Operasional Museum	Jumlah Layanan Operasional Museum	3 Layanan		0 Layanan	3 Layanan	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Layanan	214.200.000,00	Museum Negeri
	2.22.06.1.01.0013	Pengelolaan Koleksi Museum						45.000.000,00							209.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Koleksi Museum	Jumlah Koleksi Museum yang Dikelola	13 Unit		0 Unit	8 Unit	45.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	209.200.000,00	Museum Negeri
		Dinas Perpustakaan dan Kearsipan						**16.420.871.422,30**							**24.926.277.016,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**16.420.871.422,30**							**24.926.277.016,00**	
	2.23	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN**						**15.820.871.422,30**							**21.754.226.211,00**	
220.	**2.23.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**13.520.871.422,30**							**15.295.373.499,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***13.483.871.422,30***							***14.371.873.499,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85.55 Skor		82.21 Skor	83.03 Skor	13.483.871.422,30						83.86 Skor	14.371.873.499,00	
	2.23.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						172.034.250,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		359.500.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						172.034.250,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		359.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	4.000.000,00						2 Berita Acara	35.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00						2 Berita Acara	40.000.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data		20 Data	20 Data	1.000.000,00						20 Data	28.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	12.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	28.034.250,00						2 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00						3 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.000.000,00						3 Dokumen	32.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan		26 Laporan	26 Laporan	1.000.000,00						26 Laporan	7.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00						4 Laporan	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi		1 Substansi	1 Substansi	0,00						1 Substansi	500.000,00	
	2.23.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						28.034.250,00							40.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	28.034.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						17.000.000,00							32.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	17.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	32.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						10.000.000,00							12.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	12.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						1.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan		26 Laporan	3 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		26 Laporan	7.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						1.000.000,00							28.000.000,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	20 Data		20 Data	20 Data	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Data	28.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						4.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	4.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Berita Acara	35.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						1.000.000,00							5.000.000,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		2 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						0,00							40.000.000,00	
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	2 Berita Acara		2 Berita Acara	2 Berita Acara	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		2 Berita Acara	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.01.0013	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu						0,00							500.000,00	
		Terkoordinasikannya Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	1 Substansi		1 Substansi	1 Substansi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		1 Substansi	500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.469.047.172,30					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		12.065.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						11.469.047.172,30					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		12.065.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.431.350,00						2 Dokumen	6.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.960.000,00						12 Dokumen	26.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00						2 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.478.350,00						12 Dokumen	11.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.130.300,00						1 Laporan	16.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	1.000.000,00						18 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan		86 Orang/ Bulan	86 Orang/ Bulan	11.419.047.172,30						86 Orang/ Bulan	12.000.000.000,00	
	2.23.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						11.419.047.172,30							12.000.000.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan		86 Orang/ Bulan	86 Orang/ Bulan	11.419.047.172,30	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		86 Orang/ Bulan	12.000.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						23.960.000,00							26.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.960.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	26.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						7.478.350,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	7.478.350,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	11.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						3.431.350,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.431.350,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	6.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						12.130.300,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	12.130.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	16.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Laporan	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						26.901.000,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		31.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						26.901.000,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		31.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	1.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00						12 Laporan	22.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	1.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.901.000,00						2 Dokumen	1.500.000,00	
	2.23.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						4.901.000,00							1.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.901.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	1.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						2.000.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	1.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00							1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	1.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	1.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	1.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						20.000.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	22.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	1.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.579.000,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		25.000.000,00	
		Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						11.579.000,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	1.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.579.000,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00						3 Orang	3.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	86 Orang		86 Orang	86 Orang	0,00						86 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	2.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						5 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	2.000.000,00	
	2.23.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							2.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						11.579.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.579.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	1.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	1.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Orang	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	86 Orang		86 Orang	86 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		86 Orang	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							3.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	3 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		3 Orang	3.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						253.880.000,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		451.870.000,00	
		Terlaksananya Administrai Umum Perangkat Daerah						253.880.000,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		451.870.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	10.800.000,00						30 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	2.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	3.000.000,00						550 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	10.020.000,00						25 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	125.000.000,00						36 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	33.399.000,00						42 Paket	42.370.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00						4 Paket	2.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		10 Paket	10 Paket	16.500.000,00						15 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	36 Paket	33.161.000,00						40 Paket	40.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		22 Paket	22 Paket	22.000.000,00						25 Paket	25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00						5 Paket	5.000.000,00	
	2.23.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						33.161.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	36 Paket	33.161.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		40 Paket	40.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						22.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		22 Paket	22 Paket	22.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Paket	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	6 Paket		2 Paket	2 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Paket	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						33.399.000,00							42.370.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	35 Paket		35 Paket	35 Paket	33.399.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		42 Paket	42.370.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						16.500.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	20 Paket		10 Paket	10 Paket	16.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Paket	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						10.800.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	35 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	2.500.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.020.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	40 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	10.020.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Laporan	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						125.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	40 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	125.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Laporan	250.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						3.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	600 Dokumen		500 Dokumen	500 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		550 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						77.485.000,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		230.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						77.485.000,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		230.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket		5 Paket	5 Paket	19.985.000,00						6 Paket	30.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		11 Unit	11 Unit	57.500.000,00						12 Unit	200.000.000,00	
	2.23.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						19.985.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Paket		5 Paket	5 Paket	19.985.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Paket	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						57.500.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit		11 Unit	11 Unit	57.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Unit	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.154.193.000,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		1.254.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.154.193.000,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		1.254.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	419.403.000,00						12 Laporan	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	734.790.000,00						12 Laporan	800.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	2.000.000,00	
	2.23.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						419.403.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	419.403.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	450.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						734.790.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	734.790.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	800.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						355.752.000,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		879.003.499,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						355.752.000,00					Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Instansi terkait lainnya		879.003.499,00	
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00						4 Unit	2.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	200.000.000,00						3 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit		45 Unit	45 Unit	128.190.000,00						45 Unit	450.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	30.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	2.000.000,00						5 Unit	7.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		60 Unit	60 Unit	25.562.000,00						70 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	60.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00						3 Unit	60.003.499,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						128.190.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	48 Unit		45 Unit	45 Unit	128.190.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		45 Unit	450.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						0,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	2.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						2.000.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	7.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.562.000,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	100 Unit		60 Unit	60 Unit	25.562.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		70 Unit	70.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						200.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	60.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							60.003.499,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	60.003.499,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
221.	**2.23.02**	**PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN**						**2.190.000.000,00**							**3.884.431.611,00**	
		Meningkatnya Layanan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan						***2.190.000.000,00***							***2.284.431.611,00***	
			999.Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	67.17 Nilai		66.17 Nilai	66.42 Nilai	2.190.000.000,00						66.67 Nilai	2.284.431.611,00	
	2.23.02.1.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi						1.665.000.000,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan; Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); Perpustakaan Khusus/Instansi; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pengelola/pustakawan pada semua jenis perpustakaan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		2.684.431.611,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Perpustakaan sesuai Standar Nasional Perpustakaan						1.665.000.000,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan; Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); Perpustakaan Khusus/Instansi; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pengelola/pustakawan pada semua jenis perpustakaan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		2.684.431.611,00	
			Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	65 Indeks		62 Indeks	62.5 Indeks	0,00						63.5 Indeks	100.000.000,00	
			Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	67.17 Nilai		66.17 Nilai	66.42 Nilai	75.000.000,00						66.67 Nilai	100.000.000,00	
			Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	50000 Eksemplar		13000 Eksemplar	15000 Eksemplar	810.474.000,00						15000 Eksemplar	500.000.000,00	
			Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	44.431.611,00	
			Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	0,00						10 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	10000 Dokumen		10000 Dokumen	10000 Dokumen	133.276.000,00						10000 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	3000 Eksemplar		1000 Eksemplar	1100 Eksemplar	0,00						1200 Eksemplar	120.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan		5 Layanan	5 Layanan	40.000.000,00						5 Layanan	200.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00						1 Perpustakaan	150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	10 Perpustakaan		10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	6.250.000,00						10 Perpustakaan	170.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100 Perpustakaan		30 Perpustakaan	40 Perpustakaan	0,00						50 Perpustakaan	150.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	70 Perpustakaan		20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	100.000.000,00						40 Perpustakaan	150.000.000,00	
			Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	200 Perpustakaan		50 Perpustakaan	75 Perpustakaan	500.000.000,00						100 Perpustakaan	250.000.000,00	
			Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	500 Orang		100 Orang	200 Orang	0,00						300 Orang	200.000.000,00	
	2.23.02.1.01.0002	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Provinsi						500.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	Jumlah perpustakaan yang Dikembangkan dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan di wilayah provinsi sesuai kewenangannya	200 Perpustakaan		50 Perpustakaan	75 Perpustakaan	500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		100 Perpustakaan	250.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0003	Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi						0,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah koleksi perpustakaan khas daerah tingkat provinsi yang Dikembangkan	3000 Eksemplar		1000 Eksemplar	1.100 Eksemplar	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1200 Eksemplar	120.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus di Seluruh Wilayah Provinsi sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah dan Pendidikan khusus di seluruh wilayah provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada satuan Pendidikan menengah atas dan Pendidikan khsus yang Dibina sesuai kewenangan Provinsi dalam mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	100 Perpustakaan		30 Perpustakaan	40 Perpustakaan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		50 Perpustakaan	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0006	Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi						0,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas dan Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah tenaga perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Provinsi	500 Orang		100 Orang	200 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		300 Orang	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi						40.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Melalui Peningkatan Koleksi	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Daerah Provinsi yang Dikembangkan Melalui Peningkatan Koleksi	5 Layanan		5 Layanan	5 Layanan	40.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		5 Layanan	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0008	Pengembangan Perpustakaan Deposit						0,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Perpustakaan Deposit	Jumlah Perpustakaan Deposit yang Dikembangkan	1 Perpustakaan		1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Perpustakaan	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka						810.474.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Provinsi untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dikelola dan Dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	50000 Eksemplar		13000 Eksemplar	15.000 Eksemplar	810.474.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		15000 Eksemplar	500.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0011	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat						133.276.000,00							450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	Jumlah koleksi perpustakaan (cetak/digital) yang dimanfaatkan oleh masyarakat	10000 Dokumen		10000 Dokumen	10.000 Dokumen	133.276.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		10000 Dokumen	450.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0012	Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengukuran Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	Capaian Tingkat Gemar Membaca Masyarakat Tingkat Propinsi	67.17 Nilai		66.17 Nilai	66,42 Nilai	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		66.67 Nilai	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0013	Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	Capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Tingkat Provinsi	65 Indeks		62 Indeks	62,5 Indeks	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		63.5 Indeks	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0014	Kerjasama Peningkatan Kegemaran Membaca dan Literasi						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	Jumlah kerjasama peningkatan Kegemaran Membaca dan literasi	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		10 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0015	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik						6.250.000,00							170.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik dengan Manajemen Layanan TIK	Jumlah perpustakaan elektronik yang dikembangkan dan dipelihara dengan Manajemen Layanan TIK	10 Perpustakaan		10 Perpustakaan	10 Perpustakaan	6.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		10 Perpustakaan	170.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0016	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan						0,00							44.431.611,00	
		Terlaksananya Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Data dan informasi Perpustakaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1 Dokumen	44.431.611,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.01.0017	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Provinsi						100.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Perpustakaan umum dan khusus sesuai Kewenangan Provinsi dalam Mewujdukan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan umum dan khusus yang dibina sesuai kewenangan provinsi dalam mewujudkan standar nasional perpustakaan	70 Perpustakaan		20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		40 Perpustakaan	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi						525.000.000,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan; Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); Perpustakaan Khusus/Instansi; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pengelola/pustakawan pada semua jenis perpustakaan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		1.200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembudayaan Gemar Membaca di Masyarakat						525.000.000,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan; Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); Perpustakaan Khusus/Instansi; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pengelola/pustakawan pada semua jenis perpustakaan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		1.200.000.000,00	
			Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	22 Orang		10 Orang	22 Orang	0,00						22 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	100 Perpustakaan		20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	200.000.000,00						30 Perpustakaan	500.000.000,00	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	50 Lokus		10 Lokus	20 Lokus	325.000.000,00						30 Lokus	150.000.000,00	
			Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00						100 Orang	100.000.000,00	
			Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3 Perpustakaan		3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	0,00						3 Perpustakaan	300.000.000,00	
	2.23.02.1.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat						325.000.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Keterlibatan Satuan Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus dalam Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Pendidikan Tingkat Menengah dan Pendidikan Khusus	50 Lokus		10 Lokus	20 Lokus	325.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		30 Lokus	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.02.0002	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi						0,00							300.000.000,00	
		Terlaksananya Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi	3 Perpustakaan		3 Perpustakaan	3 Perpustakaan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3 Perpustakaan	300.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.02.0003	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	100 Orang		100 Orang	100 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		100 Orang	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial						200.000.000,00							500.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi	Jumlah Layanan Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Provinsi yang Dikembangkan	100 Perpustakaan		20 Perpustakaan	20 Perpustakaan	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		30 Perpustakaan	500.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.02.1.02.0006	Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi						0,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemilihan Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Duta Baca/Bunda Baca/Bunda Literasi Tingkat Daerah Provinsi yang dipilih dan didukung kegiatannya	22 Orang		10 Orang	22 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		22 Orang	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
222.	**2.23.03**	**PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO**						**110.000.000,00**							**2.574.421.101,00**	
		Meningkatnya pelestarian koleksi nasional dan naskah kuno						***50.000.000,00***							***1.774.421.101,00***	
			999.Persentase Pelestarian KCKR dan Naskah Kuno Milik Daerah	100 %		100 %	100 %	50.000.000,00						100 %	1.774.421.101,00	
	2.23.03.1.01	Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah di Daerah Provinsi						30.000.000,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan; Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); Perpustakaan Khusus/Instansi; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pengelola/pustakawan pada semua jenis perpustakaan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Daerah						30.000.000,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan; Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); Perpustakaan Khusus/Instansi; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pengelola/pustakawan pada semua jenis perpustakaan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		750.000.000,00	
			Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	5000 Eksemplar		500 Eksemplar	500 Eksemplar	30.000.000,00						1000 Eksemplar	500.000.000,00	
			Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	10 Penerbit		10 Penerbit	10 Penerbit	0,00						10 Penerbit	250.000.000,00	
	2.23.03.1.01.0001	Penghimpunan dan Pengelolaan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam						30.000.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penghimpunan dan Pengelolaan Karya Cetak dan Karya Rekam Serta Peningkatan Kepatuhan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Koleksi KCKR yang Dihimpun dan Dikelola Serta Kepatuhan Serah Simpan KCKR	5000 Eksemplar		500 Eksemplar	500 Eksemplar	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		1000 Eksemplar	500.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03.1.01.0002	Pemberian Penghargaan kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam						0,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	Jumlah Penerima Penghargaan Kepada Penerbit dan Produsen Karya Rekam yang Aktif Dalam Melaksanakan Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam	10 Penerbit		10 Penerbit	10 Penerbit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		10 Penerbit	250.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.03.1.02	Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah						40.000.000,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan; Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); Perpustakaan Khusus/Instansi; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pengelola/pustakawan pada semua jenis perpustakaan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		174.421.101,00	
		Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah dan Bibliografi Daerah						40.000.000,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan; Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); Perpustakaan Khusus/Instansi; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pengelola/pustakawan pada semua jenis perpustakaan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		174.421.101,00	
			Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1000 Naskah		300 Naskah	300 Naskah	20.000.000,00						350 Naskah	84.421.101,00	
			Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	10000 Entry		1000 Entry	2000 Entry	20.000.000,00						3000 Entry	90.000.000,00	
	2.23.03.1.02.0001	Penerbitan Katalog Induk Daerah						20.000.000,00							90.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penerbitan Katalog Induk Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen KID dan Literatur Sekunder Lainnya yang Diterbitkan	10000 Entry		1000 Entry	2.000 Entry	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		3000 Entry	90.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03.1.02.0002	Penerbitan Bibliografi Daerah						20.000.000,00							84.421.101,00	
		Terlaksananya Penerbitan Bibliografi Daerah Provinsi	Jumlah Bibliografi Daerah yang Diterbitkan	1000 Naskah		300 Naskah	300 Naskah	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		350 Naskah	84.421.101,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.23.03.1.03	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi						40.000.000,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan; Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); Perpustakaan Khusus/Instansi; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pengelola/pustakawan pada semua jenis perpustakaan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		850.000.000,00	
		Terlaksananya Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Provinsi						40.000.000,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan; Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); Perpustakaan Khusus/Instansi; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pengelola/pustakawan pada semua jenis perpustakaan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		850.000.000,00	
			Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	50 Orang		10 Orang	20 Orang	20.000.000,00						30 Orang	400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	50 Eksemplar		10 Eksemplar	15 Eksemplar	20.000.000,00						25 Eksemplar	450.000.000,00	
	2.23.03.1.03.0003	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan						20.000.000,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki Oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	Jumlah Naskah Kuno yang dimiliki masyarakat yang dilakukan pengembangan, pengolahan, pengalihmediaan untuk dilestarikan dan didayagunakan	50 Eksemplar		10 Eksemplar	15 Eksemplar	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		25 Eksemplar	450.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03.1.03.0004	Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno						20.000.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Peran serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	Jumlah masyarakat yang berperan dalam penyimpanan, perawatan, pelestarian dan pendaftaran naskah kuno	50 Orang		10 Orang	20 Orang	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		30 Orang	400.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03.1.04	Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						0,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan; Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); Perpustakaan Khusus/Instansi; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pengelola/pustakawan pada semua jenis perpustakaan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		800.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi						0,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang perpustakaan; Perpustakaan Umum (kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan); Perpustakaan Khusus/Instansi; Perpustakaan Sekolah; Perpustakaan Perguruan Tinggi; Pengelola/pustakawan pada semua jenis perpustakaan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		800.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	500 Eksemplar		50 Eksemplar	150 Eksemplar	0,00						200 Eksemplar	400.000.000,00	
			Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	500 Eksemplar		50 Eksemplar	150 Eksemplar	0,00						200 Eksemplar	400.000.000,00	
	2.23.03.1.04.0001	Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara						0,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diseleksi dan Dilakukan Pengadaan Oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	500 Eksemplar		50 Eksemplar	150 Eksemplar	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		200 Eksemplar	400.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.23.03.1.04.0002	Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara						0,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Diolah dan Dilakukan penyiangan oleh Perpustakaan Daerah Tingkat Provinsi	500 Eksemplar		50 Eksemplar	150 Eksemplar	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	-		200 Eksemplar	400.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN**						**600.000.000,00**							**3.172.050.805,00**	
223.	**2.24.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP**						**600.000.000,00**							**1.894.852.180,00**	
		Meningkatnya tata kelola arsip statis dan dinamis						***600.000.000,00***							***1.119.852.180,00***	
			999.Tingkat Ketersediaan Arsip	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	600.000.000,00						100 Persentase	1.119.852.180,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.02.1.01	Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						397.510.800,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		1.155.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Dinamis Provinsi						397.510.800,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		1.155.000.000,00	
			Jumlah arsiparis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	105 Orang		105 Orang	105 Orang	0,00						105 Orang	150.000.000,00	
			Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	10000 Arsip		10000 Arsip	10000 Arsip	39.737.200,00						10000 Arsip	75.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	1500 Arsip		500 Arsip	750 Arsip	0,00						800 Arsip	75.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip Dinamis	5000 Arsip		750 Arsip	750 Arsip	0,00						1000 Arsip	75.000.000,00	
			Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	32 Laporan		32 Laporan	32 Laporan	30.000.000,00						32 Laporan	100.000.000,00	
			Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	50 Lembaga		10 Lembaga	20 Lembaga	0,00						30 Lembaga	100.000.000,00	
			Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	75 Lembaga		24 Lembaga	30 Lembaga	100.354.000,00						35 Lembaga	200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	46 Instansi		46 Instansi	46 Instansi	50.819.600,00						46 Instansi	150.000.000,00	
			Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	5 Unit		5 Unit	10 Unit	176.600.000,00						10 Unit	200.000.000,00	
	2.24.02.1.01.0004	Penyusutan Arsip Dinamis						39.737.200,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusutan Arsip Dinamis	Jumlah arsip dinamis yang telah disusutkan	10000 Arsip		10000 Arsip	10.000 Arsip	39.737.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10000 Arsip	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.01.0005	Pelaksanaan Alih Media Arsip Dinamis dan Autentikasi						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Alih Media Arsip dan Autentikasi	Jumlah Arsip yang di Alih Mediakan dan diautentikasi	1500 Arsip		500 Arsip	750 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		800 Arsip	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.01.0006	Penciptaan dan Pemeliharaan Arsip Dinamis						0,00							75.000.000,00	
		Terciptanya dan Terpeliharanya Arsip Dinamis	Jumlah Daftar Arsip Dinamis	5000 Arsip		750 Arsip	750 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1000 Arsip	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.01.0007	Pemilihan Arsiparis Teladan						0,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemilihan arsiparis teladan	Jumlah arsiparis yang memiliki kompetensi dalam penyelenggaraan kearsipan yang diusulkan untuk mengikuti kegiatan pemilihan arsiparis teladan	105 Orang		105 Orang	105 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		105 Orang	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.01.0008	Pembinaan Kearsipan kewenangan Provinsi						50.819.600,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Implementasi Pengelolaan Arsip Dinamis pada ORMAS, ORPOL, OPD/SKPD, BUMD	Jumlah ORMAS, ORPOL, OPD/BUMD yang telah mengimplementasi pengelolaan arsip dinamis	46 Instansi		46 Instansi	46 Instansi	50.819.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		46 Instansi	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.01.0009	Penyusunan Database Arsiparis						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya penyusunan data dan informasi arsiparis	Jumlah arsiparis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.01.0010	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Arsip Statis						176.600.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	Jumlah prasarana dan sarana pengelolaan arsip statis	5 Unit		5 Unit	10 Unit	176.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Unit	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.02.1.01.0011	Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi						30.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya monitoring dan evaluasi	Jumlah laporan hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaran kearsipan	32 Laporan		32 Laporan	32 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		32 Laporan	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.01.0012	Penyelenggaraan pengawasan kearsipan yang menjadi kewenangan provinsi						100.354.000,00							200.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengawasan kearsipan pada OPD provinsi dan BUMD provinsi	Jumlah OPD dan BUMD yang telah mendapatkan pengawasan kearsipan	75 Lembaga		24 Lembaga	30 Lembaga	100.354.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		35 Lembaga	200.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.01.0013	Pemberian Penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya pemberian penghargaan Gerakan Sadar Tertib Arsip	Jumlah OPD, BUMD dan SDM Kearsipan yang mendapatkan penghargaan Tertib Arsip	50 Lembaga		10 Lembaga	20 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Lembaga	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.02.1.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						127.470.000,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		529.852.180,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Arsip Statis Daerah Provinsi						127.470.000,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		529.852.180,00	
			Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	750 Arsip		150 Arsip	250 Arsip	0,00						300 Arsip	100.000.000,00	
			jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	1500 Arsip		500 Arsip	700 Arsip	127.470.000,00						750 Arsip	175.000.000,00	
			Jumlah Orang yang diwawancarai	50 Orang		5 Orang	10 Orang	0,00						15 Orang	129.852.180,00	
			Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	50 Arsip		2 Arsip	2 Arsip	0,00						5 Arsip	75.000.000,00	
			Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	100 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	0,00						25 Arsip	50.000.000,00	
	2.24.02.1.02.0001	Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan dan Penyampaian Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga kepada ANRI	Jumlah Salinan Otentik Naskah Asli Arsip Terjaga yang dikumpulkan dan Disampaikan Kepada ANRI	100 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Arsip	50.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.02.0003	Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan						0,00							129.852.180,00	
		Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis Melalui Wawancara Sejarah Lisan	Jumlah Orang yang diwawancarai	50 Orang		5 Orang	10 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Orang	129.852.180,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.02.0004	Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip						0,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Khazanah Arsip Statis melalui Penerbitan naskah sumber Arsip	Jumlah penerbitan naskah sumber Arsip	50 Arsip		2 Arsip	2 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Arsip	75.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.02.0005	Akuisisi Arsip Statis						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Akuisisi Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang dilakukan Akuisisi	750 Arsip		150 Arsip	250 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		300 Arsip	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.02.1.02.0006	Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis						127.470.000,00							175.000.000,00	
		terlaksananya akuisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	jumlah arsip yang di akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis di Provinsi	1500 Arsip		500 Arsip	700 Arsip	127.470.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		750 Arsip	175.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.03	Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						75.019.200,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		210.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Simpul Jaringan dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Provinsi						75.019.200,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		210.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	12 Laporan		10 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	80.000.000,00	
			Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1000 Pengguna		250 Pengguna	250 Pengguna	75.019.200,00						500 Pengguna	130.000.000,00	
	2.24.02.1.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN						75.019.200,00							130.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Provinsi Melalui JIKN	1000 Pengguna		250 Pengguna	250 Pengguna	75.019.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		500 Pengguna	130.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.02.1.03.0002	Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi						0,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Provinsi	12 Laporan		10 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		12 Laporan	80.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
224.	**2.24.03**	**PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP**						**0,00**							**1.277.198.625,00**	
		Meningkatnya perlindungan dan penyelamatan arsip sesuai NSPK						***0,00***							***527.198.625,00***	
			999.Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	0,00						100 Persentase	527.198.625,00	
	2.24.03.1.01	Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						0,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun						0,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		300.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10000 Arsip		10000 Arsip	10000 Arsip	0,00						10000 Arsip	150.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10000 Berkas		10000 Berkas	10000 Berkas	0,00						10000 Berkas	150.000.000,00	
	2.24.03.1.01.0003	Pelaksaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi Di Bawah 10 Tahun						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun	Jumlah Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 Tahun yang Dimusnahkan	10000 Berkas		10000 Berkas	10 Berkas	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10000 Berkas	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03.1.01.0004	Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun						0,00							150.000.000,00	
		Tersusunnya Daftar Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	Jumlah Arsip yang dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	10000 Arsip		10000 Arsip	10.000 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10000 Arsip	150.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.03.1.02	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi						0,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		277.198.625,00	
		Terlaksananya Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Provinsi						0,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		277.198.625,00	
			Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	0,00						250 Arsip	135.000.000,00	
			Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	0,00						250 Arsip	142.198.625,00	
	2.24.03.1.02.0001	Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana						0,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		250 Arsip	135.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03.1.02.0002	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana						0,00							142.198.625,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	Jumlah Arsip yang dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		250 Arsip	142.198.625,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03.1.03	Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota						0,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		200.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Provinsi yang digabung dan/atau dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kabupaten/Kota						0,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		200.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	10 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	0,00						10 Arsip	100.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	10 Daftar		10 Daftar	10 Daftar	0,00						10 Daftar	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.03.1.03.0001	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi						0,00							100.000.000,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Provinsi	10 Daftar		10 Daftar	10 Daftar	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Daftar	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03.1.03.0002	Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi						0,00							100.000.000,00	
		Terkelolanya Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan Atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Provinsi	10 Arsip		10 Arsip	10 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Arsip	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03.1.04	Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi						0,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Autentifikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media yang Dikelola oleh Lembaga Kearsipan Provinsi						0,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		200.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	750 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	0,00						250 Arsip	100.000.000,00	
			Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip		250 Arsip	250 Arsip	0,00						500 Arsip	100.000.000,00	
	2.24.03.1.04.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentisitas Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip		250 Arsip	250 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		500 Arsip	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03.1.04.0002	Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Arsip yang dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	750 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		250 Arsip	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.03.1.05	Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang						0,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		300.000.000,00	
		Terlaksananya Pencarian Arsip Statis Provinsi yang Dinyatakan Hilang						0,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat sebagai pengguna layanan dibidang kearsipan; Lembaga Kearsipan Daerah; Arsiparis pada semua jenis kearsipan; Aparatur Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi NTB; Kalangan dunia usaha; Instansi terkait lainnya		300.000.000,00	
			Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	250 Arsip		150 Arsip	150 Arsip	0,00						250 Arsip	100.000.000,00	
			Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	250 Arsip		150 Arsip	150 Arsip	0,00						250 Arsip	100.000.000,00	
			Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	100 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	0,00						100 Arsip	100.000.000,00	
	2.24.03.1.05.0001	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Autentisitas Statis Arsip yang Dinyatakan Hilang Berdasarkan Penilaian dan penetapan	250 Arsip		150 Arsip	150 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		250 Arsip	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.24.03.1.05.0002	Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang dinyatakan Hilang						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media yang Dinyatakan Hilang	250 Arsip		150 Arsip	150 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		250 Arsip	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	2.24.03.1.05.0003	Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)						0,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)	Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman	100 Arsip		100 Arsip	100 Arsip	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Arsip	100.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Dinas Kelautan dan Perikanan						**39.597.120.675,00**							**42.321.154.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**39.597.120.675,00**							**42.321.154.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**39.597.120.675,00**							**42.321.154.000,00**	
225.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.547.669.925,00**							**33.216.155.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***28.529.389.500,00***							***29.904.155.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	88,24 Skor		84,80 Skor	85,65 Skor	28.529.389.500,00						86,51 Skor	29.904.155.000,00	
	3.25.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						129.351.000,00					-		477.000.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						129.351.000,00					-		477.000.000,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	53.475.000,00						1 Berita Acara	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00						1 Berita Acara	20.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.528.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	22.299.000,00						2 Dokumen	72.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.160.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.860.000,00						1 Dokumen	40.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.260.000,00						1 Laporan	45.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	29.644.000,00						4 Laporan	150.000.000,00	
	3.25.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						22.299.000,00							72.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	22.299.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	72.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						7.860.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.860.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						7.160.000,00							40.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.160.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	40.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.528.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.528.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.125.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.125.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.260.000,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.260.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	45.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						29.644.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	29.644.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						53.475.000,00							80.000.000,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	53.475.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	80.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.01.0012	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan						0,00							20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						23.517.559.500,00					-		24.580.917.000,00	
		Meningkatnya Sistem Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah						23.517.559.500,00					-		24.580.917.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00						2 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.690.000,00						4 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	123.180.000,00						1 Dokumen	150.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.450.000,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.607.500,00						2 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.994.000,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.720.000,00						12 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang/ Bulan		230 Orang/ Bulan	230 Orang/ Bulan	23.360.918.000,00						230 Orang/ Bulan	24.360.917.000,00	
	3.25.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						23.360.918.000,00							24.360.917.000,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	230 Orang/ Bulan		230 Orang/ Bulan	230 Orang/ Bulan	23.360.918.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		230 Orang/ Bulan	24.360.917.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						123.180.000,00							150.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	123.180.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						9.607.500,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	9.607.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						4.690.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.690.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						5.994.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.994.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						6.720.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.720.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						1.450.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
		Meningkatnya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	20.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00						1 Laporan	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	15.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.620.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
	3.25.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						100.000.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	115.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						10.000.000,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						10.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						620.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	8.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						28.591.000,00					-		85.000.000,00	
		Meningkatnya Sistem Pengelolaan Kepegawaian Perangkat Daerah						28.591.000,00					-		85.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.000.000,00						2 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	691.000,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	2.900.000,00						5 Orang	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	20.000.000,00	
	3.25.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						691.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	691.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						5.000.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						20.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						2.900.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	2.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Orang	5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.800.000,00						3 Dokumen	7.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.250.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.688.000,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	43.500.000,00						12 Laporan	75.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	26.375.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket		1 Paket	1 Paket	2.600.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		2 Paket	2 Paket	15.550.000,00						2 Paket	15.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	32.500.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	2.590.000,00						1 Paket	10.000.000,00	
	3.25.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						15.550.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		2 Paket	2 Paket	15.550.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						2.590.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	2.590.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.090.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	4.090.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						2.600.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	40 Paket		1 Paket	1 Paket	2.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						10.800.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	7.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						43.500.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	43.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						120.000.000,00							120.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	120.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	120.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						2.688.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.688.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						16.250.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					-		850.000.000,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						0,00					-		850.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	0,00						1 Paket	50.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	250.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						0 Unit	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	50.000.000,00	
	3.25.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							300.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	300.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							250.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	5 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	957.000.000,00						3 Laporan	940.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.905.000.000,00						3 Laporan	2.400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	7.500.000,00	
	3.25.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	7.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						299.100.000,00							310.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	299.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	310.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.905.000.000,00							2.400.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.905.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	2.400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.311.100.000,00					-		1.565.738.000,00	
		Meningkatnya Sistem Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan						1.311.100.000,00					-		1.565.738.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	5.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		6 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00						5 Unit	1.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit		33 Unit	33 Unit	152.000.000,00						34 Unit	225.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	20.738.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		5 Unit	20 Unit	0,00						20 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		2 Unit	3 Unit	9.100.000,00						4 Unit	20.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	125.000.000,00						2 Unit	250.000.000,00	
	3.25.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						152.000.000,00							225.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	35 Unit		33 Unit	33 Unit	152.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		34 Unit	225.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							20.738.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	11 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	20.738.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		5 Unit	20 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Unit	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	1 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.000.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5 Unit		6 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	1.000.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						9.100.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		2 Unit	3 Unit	9.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						125.000.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	125.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	250.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
226.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**3.303.700.000,00**							**2.968.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan						***3.273.700.000,00***							***2.753.500.000,00***	
			999.Persentase wilayah laut dan pesisir yang dikelola berkelanjutan	18 %		14.16 %	16 %	3.273.700.000,00						17 %	2.753.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						1.888.700.000,00					Masyarakat Pesisir		2.028.500.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						1.888.700.000,00					Masyarakat Pesisir		2.028.500.000,00	
			Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.900.000,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100 Orang		100 Orang	100 Orang	405.800.000,00						100 Orang	22.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	25 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	0,00						25 Pelaku Usaha	27.500.000,00	
			Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	2 Kelompok Masyarakat		2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	400.000.000,00						2 Kelompok Masyarakat	447.000.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	328590 Ha		249693.80 Ha	328590 Ha	670.000.000,00						328590 Ha	1.225.000.000,00	
			Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	10 Ha		10 Ha	10 Ha	402.500.000,00						10 Ha	182.000.000,00	
			Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	55.000.000,00	
			Volume produksi garam lokal pada SEGAR	175000 Ton		165000 Ton	170000 Ton	2.500.000,00						175000 Ton	50.000.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						640.000.000,00							1.025.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	328590 Ha		249693.80 Ha	395315,53 Ha	640.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		328590 Ha	1.025.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0003	Rehabilitasi Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						402.500.000,00							182.000.000,00	
		Terehabilitasinya Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Luasan Wilayah Perairan Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil yang Direhabilitasi	10 Ha		10 Ha	10 Ha	402.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Ha	182.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0004	Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						405.800.000,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau- Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Memperoleh Informasi Terkait Mitigasi Bencana Melalui Program Mitigasi Bencana Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	100 Orang		100 Orang	100 Orang	405.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100 Orang	22.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0008	Sosialisasi Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru						0,00							27.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersosialisasinya Perizinan Berusaha dalam rangka Pemanfaatan Ruang Laut mendukung Ekonomi Biru	Jumlah Pelaku usaha yang tersosialisasi dalam rangka Pemanfaat Ruang Laut Mendukung Ekonomi Biru	25 Pelaku Usaha		25 Pelaku Usaha	25 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		25 Pelaku Usaha	27.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0009	Penyediaan Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan						0,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Spasial Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove di luar kawasan hutan	Peta Tematik Padang Lamun dan Mangrove di luar Kawasan Hutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	55.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0010	Peningkatan kapasitas masyarakat pengelola ekosistem blue carbon						400.000.000,00							447.000.000,00	
		Meningkatnya kapasitas masyarakat pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	Kelompok masyarakat yang meningkat kapasitasnya terkait pengelolaan pengelola Ekosistem Blue Carbon Padang Lamun dan Mangrove diluar kawasan hutan	2 Kelompok Masyarakat		2 Kelompok Masyarakat	2 Kelompok Masyarakat	400.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Kelompok Masyarakat	447.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0012	Pengelolaan Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						2.500.000,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Sentra Ekonomi Garam Rakyat (SEGAR) Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Volume produksi garam lokal pada SEGAR	175000 Ton		165000 Ton	170000 Ton	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		175000 Ton	50.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.01.0015	Penyediaan Data dan Informasi Pergaraman						7.900.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Pergaraman	Jumlah data dan Informasi pergaraman yang tersedia	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.02	Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						0,00					Masyarakat Pesisir		30.000.000,00	
		Meningkatnya Penerbitan Izin Pemanfaatan Ruang Laut di Bawah 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						0,00					Masyarakat Pesisir		30.000.000,00	
			Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	15.000.000,00	
	3.25.02.1.02.0006	Pencatatan dan Pengadministrasian Perizinan Berusaha Pemanfaatan Sumber daya Pesisir dan Laut sebagai database perizinan berusaha						0,00							15.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercatat/terdokumentasikannya Perizinan Berusaha yang terbit sebagai database perizinan berusaha	Jumlah database perizinan Berusaha yang dicatat atau didokumentasikan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.02.0007	Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan						0,00							15.000.000,00	
		Tersedianya pertimbangan teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Pertimbangan Teknis Pengelolaan Perizinan Berusaha Sektor Kelautan dan Perikanan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.03	Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						1.415.000.000,00					Masyarakat Pesisir		910.000.000,00	
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						1.415.000.000,00					Masyarakat Pesisir		910.000.000,00	
			Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	40 Orang	5.000.000,00						40 Orang	60.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	5 Unit		5 Unit	5 Unit	805.000.000,00						5 Unit	450.000.000,00	
			Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	10 Unit		10 Unit	10 Unit	605.000.000,00						10 Unit	400.000.000,00	
	3.25.02.1.03.0001	Pengembangan Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil						5.000.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		30 Orang	40 Orang	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		40 Orang	60.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.03.0005	Penyediaan Sarana Usaha Pergaraman						605.000.000,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Pergaraman	Jumlah Sarana Usaha Pergaraman yang tersedia	10 Unit		10 Unit	10 Unit	605.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Unit	400.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.02.1.03.0007	Penyediaan Prasarana Usaha Pergaraman						805.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Usaha Pergaraman	Jumlah Prasarana Usaha Pergaraman yang tersedia	5 Unit		5 Unit	5 Unit	805.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Unit	450.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
227.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**3.115.170.000,00**							**5.092.000.000,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan						***3.085.700.000,00***							***4.557.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai Tukar Nelayan	101-105 %		101-105 %	101-105 %	3.085.700.000,00						101-105 %	4.557.000.000,00	
			999.Produksi Perikanan Tangkap	263873 Ton		253577 Ton	256113 Ton	3.085.700.000,00						258674 Ton	4.557.000.000,00	
	3.25.03.1.01	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Laut Sampai Dengan 12 Mil						2.310.400.000,00					Kelompok Nelayan		2.092.000.000,00	
		Meningkatnya Produksi Tangkap Non Pelabuhan						2.310.400.000,00					Kelompok Nelayan		2.092.000.000,00	
			Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.900.000,00						2 Dokumen	15.000.000,00	
			Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	20.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit		1 Unit	1 Unit	287.500.000,00						1 Unit	327.000.000,00	
			Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	60 Unit		60 Unit	60 Unit	2.015.000.000,00						60 Unit	1.730.000.000,00	
	3.25.03.1.01.0001	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan						7.900.000,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah data dan Informasi Sumber Daya Ikan yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Dokumen	15.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.01.0002	Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap						287.500.000,00							327.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	1 Unit		1 Unit	1 Unit	287.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	327.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.01.0006	Pengolahan data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya data dan informasi terkait dengan penangkapan ikan terukur	Jumlah data dan informasi yang tersedia untuk pelaksanaan penangkapan ikan terukur	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.01.0010	Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap						2.015.000.000,00							1.730.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia di Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil	60 Unit		60 Unit	60 Unit	2.015.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		60 Unit	1.730.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						799.470.000,00					Kelompok Nelayan		2.960.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						799.470.000,00					Kelompok Nelayan		2.960.000.000,00	
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	20 Layanan		20 Layanan	20 Layanan	39.470.000,00						20 Layanan	190.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	760.000.000,00						4 Unit	2.770.000.000,00	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						760.000.000,00							2.320.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	760.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Unit	2.320.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						10.000.000,00							135.000.000,00	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	20 Layanan		20 Layanan	20 Layanan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Layanan	135.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.09	Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						0,00					Kelompok Nelayan		20.000.000,00	
		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap Untuk Kapal Perikanan Berukuran Di Atas 10 GT Sampai Dengan 30 GT						0,00					Kelompok Nelayan		20.000.000,00	
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	65 Rekomendasi		65 Rekomendasi	65 Rekomendasi	0,00						65 Rekomendasi	10.000.000,00	
	3.25.03.1.09.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran di atas 10 GT sampai dengan 30 GT						0,00							10.000.000,00	
		Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang Menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.09.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						0,00							10.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	65 Rekomendasi		65 Rekomendasi	65 Rekomendasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		65 Rekomendasi	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.10	Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						5.300.000,00					Kelompok Nelayan		20.000.000,00	
		Meningkatnya Pendaftaran Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT Yang Beroperasi di Laut, Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						5.300.000,00					Kelompok Nelayan		20.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		50 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	250 Rekomendasi		250 Rekomendasi	250 Rekomendasi	5.300.000,00						250 Rekomendasi	10.000.000,00	
	3.25.03.1.10.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Pendaftaran Kapal Perikanan dengan Ukuran sampai dengan 10 GT						0,00							10.000.000,00	
		Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Buku Kapal Perikanan yang menjadi Kewenangan Provinsi	1 Dokumen		50 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.03.1.10.0003	Penerbitan surat rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)						5.300.000,00							10.000.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP)	Jumlah Rekomendasi Buku Kapal Perikanan (BKP) yang Diterbitkan	250 Rekomendasi		250 Rekomendasi	250 Rekomendasi	5.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		250 Rekomendasi	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
228.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**3.407.150.000,00**							**1.663.999.000,00**	
		Meningkatnya produksi budidaya dan kesejahteraan pembudidaya ikan						***3.222.900.000,00***							***1.368.999.000,00***	
			999.Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	101-105 %		101-105 %	101-105 %	3.222.900.000,00						101-105 %	1.368.999.000,00	
			999.Produksi Perikanan Budidaya	1060933 Ton		987164 Ton	1004561 Ton	3.222.900.000,00						1022623 Ton	1.368.999.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.1.01	Penerbitan Izin Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						12.900.000,00					Pembudidaya Ikan		53.999.000,00	
		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Perikanan Di Bidang Pembudidayaan Ikan Yang Usahanya Lintas Daerah Kab/Kota Dalam Satu Provinsi						12.900.000,00					Pembudidaya Ikan		53.999.000,00	
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000,00						1 Dokumen	43.500.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00						1 Rekomendasi	10.499.000,00	
	3.25.04.1.01.0001	Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan						0,00							10.499.000,00	
		Diterbitkannya Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan	Jumlah Rekomendasi Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Izin Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan yang Diterbitkan	1 Rekomendasi		1 Rekomendasi	1 Rekomendasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Rekomendasi	10.499.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.01.0003	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan						12.900.000,00							43.500.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Perikanan di Bidang Pembudidayaan Ikan di Laut Berdasarkan Skala Usaha dan Tingkat Risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	43.500.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						1.295.000.000,00					Pembudidaya Ikan		400.000.000,00	
		Meiningkatnya Produksi Budidaya Ikan Di Laut						1.295.000.000,00					Pembudidaya Ikan		400.000.000,00	
			Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Pembudidaya	30 Orang		30 Orang	30 Orang	0,00						30 Orang	5.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	6 Unit		2 Unit	2 Unit	210.000.000,00						2 Unit	135.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.075.000.000,00						10 Unit	210.000.000,00	
			Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	25.000.000,00	
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut						200.000.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	6 Unit		2 Unit	2 Unit	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Unit	125.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						1.000.000.000,00							200.000.000,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.000.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Unit	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.1.05.0007	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi						0,00							5.000.000,00	
		Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Laut dan di Kawasan Konservasi yang Dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Pembudidaya	30 Orang		30 Orang	30 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		30 Orang	5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0011	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						0,00							25.000.000,00	
		Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan dan Ikan	Jumlah Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan yang Tersedia	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.05.0013	Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						10.000.000,00							25.000.000,00	
		Termonitornya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya di Laut dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat						2.099.250.000,00					Pembudidaya Ikan		1.210.000.000,00	
		Meningkatnya Produksi Benih Ikan Unggul						2.099.250.000,00					Pembudidaya Ikan		1.210.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		3 Unit	4 Unit	600.000.000,00						5 Unit	310.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.499.250.000,00						10 Unit	900.000.000,00	
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota						1.400.000.000,00							800.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.400.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Unit	800.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota						600.000.000,00							160.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		3 Unit	4 Unit	600.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Unit	160.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
229.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**959.631.175,00**							**1.590.000.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan						***929.631.175,00***							***1.430.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	100 %		100 %	100 %	929.631.175,00						100 %	1.430.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						959.631.175,00					Pokmaswas dan Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan		1.570.000.000,00	
		Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil						959.631.175,00					Pokmaswas dan Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan		1.570.000.000,00	
			Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum		1 Forum	1 Forum	3.631.175,00						1 Forum	10.000.000,00	
			Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	175 Hari Operasi		150 Hari Operasi	175 Hari Operasi	0,00						175 Hari Operasi	100.000.000,00	
			Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	60.000.000,00						3 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	45.000.000,00						10 Pelaku Usaha	185.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	0,00						10 Pelaku Usaha	20.000.000,00	
			Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	0,00						10 Pelaku Usaha	20.000.000,00	
			Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	1 Perkara		1 Perkara	1 Perkara	0,00						1 Perkara	10.000.000,00	
			Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	45 Kelompok Masyarakat		60 Kelompok Masyarakat	65 Kelompok Masyarakat	810.000.000,00						70 Kelompok Masyarakat	800.000.000,00	
			Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	5 Orang		5 Orang	5 Orang	41.000.000,00						5 Orang	225.000.000,00	
	3.25.05.1.01.0007	Penanganan perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	Jumlah perkara Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) di wilayah kerja PPNS Perikanan Provinsi yang ditangani	1 Perkara		1 Perkara	1 Perkara	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Perkara	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0009	Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan						41.000.000,00							225.000.000,00	
		Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang dibentuk	5 Orang		5 Orang	5 Orang	41.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Orang	225.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0010	Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						0,00							100.000.000,00	
		Operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	Jumlah hari operasi Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan	175 Hari Operasi		150 Hari Operasi	175 Hari Operasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		175 Hari Operasi	100.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0011	Perawatan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan						60.000.000,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	Jumlah Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan yang dirawat	3 Unit		3 Unit	3 Unit	60.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Unit	200.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0013	Pengawasan Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						0,00							20.000.000,00	
		Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha pembudidayaan ikan di Laut sampai dengan 12 Mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	1 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Pelaku Usaha	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0014	Pengawasan Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi						0,00							20.000.000,00	
		Usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 Mil sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sampai dengan 12 mil yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Pelaku Usaha	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						15.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Pelaku Usaha	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0017	Penumbuhan dan Pengembangan Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS)						810.000.000,00							800.000.000,00	
		Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	Jumlah POKMASWAS yang ditumbuhkan, dan dikembangkan	45 Kelompok Masyarakat		60 Kelompok Masyarakat	65 Kelompok Masyarakat	810.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		70 Kelompok Masyarakat	800.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.05.1.01.0018	Koordinasi Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan (TPKP) tingkat Daerah						3.631.175,00							10.000.000,00	
		Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	Jumlah Forum Koordinasi Penanganan TPKP tingkat Daerah yang dilaksanakan	1 Forum		1 Forum	1 Forum	3.631.175,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Forum	10.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.05.1.02	Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00					Pokmaswas dan Pelaku Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan		20.000.000,00	
		Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Perikanan Di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Lintas Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00					Pokmaswas dan Pelaku Usaha di Bidang Kelautan dan Perikanan		20.000.000,00	
			Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	14 Pelaku Usaha		14 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	0,00						14 Pelaku Usaha	20.000.000,00	
	3.25.05.1.02.0004	Pengawasan Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi						0,00							20.000.000,00	
		Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan sesuai kewenangan provinsi yang diawasi	Jumlah pelaku Usaha Pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	14 Pelaku Usaha		14 Pelaku Usaha	14 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		14 Pelaku Usaha	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
230.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**611.238.900,00**							**1.830.000.000,00**	
		Meningkatnya konsumsi ikan dan nilai tambah produk perikanan						***540.800.000,00***							***1.305.000.000,00***	
			999.Angka Konsumsi Ikan	26 Kg/KAP/TH		24.5 Kg/KAP/TH	25 Kg/KAP/TH	540.800.000,00						25.5 Kg/KAP/TH	1.305.000.000,00	
			999.Produksi olahan hasil perikanan	191612.72 Ton		186897 Ton	186807 Ton	540.800.000,00						189710.86 Ton	1.305.000.000,00	
	3.25.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						20.800.000,00					Pengolah dan Pemasar Hasil Kelautan dan Perikanan		50.000.000,00	
		Meningkatnya Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						20.800.000,00					Pengolah dan Pemasar Hasil Kelautan dan Perikanan		50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.800.000,00						1 Dokumen	30.000.000,00	
			Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	15.000.000,00						3 Rekomendasi	20.000.000,00	
	3.25.06.1.01.0004	Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						5.800.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Subsektor Pengolahan Ikan, Subsektor Pemasaran Ikan, dan Usaha Jasa Pasca Panen Penangkapan Ikan berdasarkan skala usaha dan risiko	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	30.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.01.0005	Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	3 Rekomendasi		3 Rekomendasi	3 Rekomendasi	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Rekomendasi	20.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						590.438.900,00					Kelompok Pengolah dan Pemasar hasil Kelautan dan Perikanan		1.725.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						590.438.900,00					Kelompok Pengolah dan Pemasar hasil Kelautan dan Perikanan		1.725.000.000,00	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	570.438.900,00						2 Kegiatan	1.575.000.000,00	
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	20.000.000,00						2 Kegiatan	150.000.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						510.000.000,00							1.150.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	510.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Kegiatan	1.150.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						10.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Kegiatan	75.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.03	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00					Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Kelautan dan Perikanan		55.000.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota Dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00					Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Kelautan dan Perikanan		55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0,00						1 Unit Usaha	25.000.000,00	
			Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	0,00						1 Sistem Informasi	5.000.000,00	
	3.25.06.1.03.0001	Pemetaaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00							25.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pemetaan dan Pemantauan Kebutuhan Bahan Baku Usaha Pengolahan/Distribusi Ikan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.03.0002	Pemberian Insentif dan Fasilitasi bagi Pelaku Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						0,00							25.000.000,00	
		Diberikannya Insentif dan Fasilitasi bagi Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Unit Usaha Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi yang Diberikan Insentif dan Fasilitasi	1 Unit Usaha		1 Unit Usaha	1 Unit Usaha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit Usaha	25.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
	3.25.06.1.03.0005	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir						0,00							5.000.000,00	
		Terkoneksinya Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan dari hulu sampai hilir	Sistem Informasi Manajemen Logistik Ikan yang terkoneksi dari hulu sampai hilir	1 Sistem Informasi		1 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Sistem Informasi	5.000.000,00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Balai Pengembangan Perikanan Budidaya						**363.065.000,00**							**459.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**363.065.000,00**							**459.000.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**363.065.000,00**							**459.000.000,00**	
231.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.547.669.925,00**							**33.216.155.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***178.815.000,00***							***181.500.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	88,24 Skor		84,80 Skor	85,65 Skor	178.815.000,00						86,51 Skor	181.500.000,00	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
		Meningkatnya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.620.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.000.000,00	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	26.375.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	32.500.000,00	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	5.000.000,00	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.315.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	3.315.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	7.500.000,00	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						5.000.000,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	7.500.000,00	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	957.000.000,00						3 Laporan	940.000.000,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						166.500.000,00							165.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	166.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	165.000.000,00	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya
232.	**3.25.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA**						**3.407.150.000,00**							**1.663.999.000,00**	
		Meningkatnya produksi budidaya dan kesejahteraan pembudidaya ikan						***184.250.000,00***							***260.000.000,00***	
			999.Nilai Tukar Pembudidaya Ikan (NTPi)	101-105 %		101-105 %	101-105 %	184.250.000,00						101-105 %	260.000.000,00	
			999.Produksi Perikanan Budidaya	1060933 Ton		987164 Ton	1004561 Ton	184.250.000,00						1022623 Ton	260.000.000,00	
	3.25.04.1.05	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Laut						1.295.000.000,00					-		400.000.000,00	
		Meiningkatnya Produksi Budidaya Ikan Di Laut						1.295.000.000,00					-		400.000.000,00	
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	6 Unit		2 Unit	2 Unit	210.000.000,00						2 Unit	135.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.075.000.000,00						10 Unit	210.000.000,00	
	3.25.04.1.05.0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut						10.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Laut	6 Unit		2 Unit	2 Unit	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	10.000.000,00	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya
	3.25.04.1.05.0004	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut						75.000.000,00							10.000.000,00	
		Terjaminnya Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Laut	10 Unit		10 Unit	10 Unit	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	10.000.000,00	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya
	3.25.04.1.06	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan di Perairan Darat						2.099.250.000,00					-		1.210.000.000,00	
		Meningkatnya Produksi Benih Ikan Unggul						2.099.250.000,00					-		1.210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		3 Unit	4 Unit	600.000.000,00						5 Unit	310.000.000,00	
			Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		10 Unit	10 Unit	1.499.250.000,00						10 Unit	900.000.000,00	
	3.25.04.1.06.0003	Penyediaan Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota						99.250.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		10 Unit	10 Unit	99.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	100.000.000,00	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya
	3.25.04.1.06.0004	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota						0,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan di Air Payau dan Air Tawar Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10 Unit		3 Unit	4 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	150.000.000,00	Balai Pengembangan Perikanan Budidaya
		Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan						**174.578.900,00**							**591.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**174.578.900,00**							**591.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**174.578.900,00**							**591.500.000,00**	
233.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.547.669.925,00**							**33.216.155.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***104.140.000,00***							***84.000.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	88,24 Skor		84,80 Skor	85,65 Skor	104.140.000,00						86,51 Skor	84.000.000,00	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
		Meningkatnya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.620.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.000.000,00	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	26.375.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	32.500.000,00	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.500.000,00	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						3.440.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	3.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	7.500.000,00	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	7.500.000,00	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	957.000.000,00						3 Laporan	940.000.000,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						85.700.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	85.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Monjok Barat || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	70.000.000,00	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan
234.	**3.25.06**	**PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN**						**611.238.900,00**							**1.830.000.000,00**	
		Meningkatnya konsumsi ikan dan nilai tambah produk perikanan						***70.438.900,00***							***500.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Angka Konsumsi Ikan	26 Kg/KAP/TH		24.5 Kg/KAP/TH	25 Kg/KAP/TH	70.438.900,00						25.5 Kg/KAP/TH	500.000.000,00	
			999.Produksi olahan hasil perikanan	191612.72 Ton		186897 Ton	186807 Ton	70.438.900,00						189710.86 Ton	500.000.000,00	
	3.25.06.1.02	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						590.438.900,00					-		1.725.000.000,00	
		Meningkatnya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						590.438.900,00					-		1.725.000.000,00	
			Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	570.438.900,00						2 Kegiatan	1.575.000.000,00	
			Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	20.000.000,00						2 Kegiatan	150.000.000,00	
	3.25.06.1.02.0003	Pelaksanaan Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing						60.438.900,00							425.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	Jumlah Pembinaan, Fasilitasi, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan, dan Daya Saing serta Pemberdayaan Usaha dalam rangka Menghasilkan Produk yang Aman dan Bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan Berdaya Saing	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	60.438.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Kegiatan	425.000.000,00	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan
	3.25.06.1.02.0004	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Menengah dan Besar						10.000.000,00							75.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Terhadap Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	Kegiatan yang diberikan kepada unit usaha berupa pembinaan, fasilitasi, pemantauan, dan evaluasi terhadap mutu dan keamanan hasil perikanan yang berdaya saing serta pemberdayaan usaha dalam rangka menghasilkan produk yang aman dan bermutu untuk dikonsumsi atau digunakan, dan berdaya saing berdasarkan skala usaha dan risiko	2 Kegiatan		2 Kegiatan	2 Kegiatan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Kegiatan	75.000.000,00	Balai Laboratorium Pengujian dan Penerapan Mutu Hasil Perikanan dan Kelautan
		Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok						**123.220.000,00**							**231.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**123.220.000,00**							**231.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**123.220.000,00**							**231.500.000,00**	
235.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.547.669.925,00**							**33.216.155.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***110.720.000,00***							***109.000.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	88,24 Skor		84,80 Skor	85,65 Skor	110.720.000,00						86,51 Skor	109.000.000,00	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
		Meningkatnya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.620.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	26.375.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	32.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.500.000,00	Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						4.820.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	4.820.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	7.500.000,00	Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						7.500.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	7.500.000,00	Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	957.000.000,00						3 Laporan	940.000.000,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						94.400.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	94.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	95.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
236.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**3.115.170.000,00**							**5.092.000.000,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan						***12.500.000,00***							***115.000.000,00***	
			999.Nilai Tukar Nelayan	101-105 %		101-105 %	101-105 %	12.500.000,00						101-105 %	115.000.000,00	
			999.Produksi Perikanan Tangkap	263873 Ton		253577 Ton	256113 Ton	12.500.000,00						258674 Ton	115.000.000,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						799.470.000,00					-		2.960.000.000,00	
		Meningkatnya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						799.470.000,00					-		2.960.000.000,00	
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	20 Layanan		20 Layanan	20 Layanan	39.470.000,00						20 Layanan	190.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	760.000.000,00						4 Unit	2.770.000.000,00	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						0,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	100.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						12.500.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	20 Layanan		20 Layanan	2 Layanan	12.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Layanan	15.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Labuhan Lombok
		Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa						**147.070.000,00**							**406.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**147.070.000,00**							**406.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**147.070.000,00**							**406.500.000,00**	
237.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.547.669.925,00**							**33.216.155.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***132.070.000,00***							***124.000.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	88,24 Skor		84,80 Skor	85,65 Skor	132.070.000,00						86,51 Skor	124.000.000,00	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
		Meningkatnya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.620.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	26.375.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	32.500.000,00	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.500.000,00	Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.970.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	1.970.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	7.500.000,00	Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						7.500.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	7.500.000,00	Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	957.000.000,00						3 Laporan	940.000.000,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						117.600.000,00							110.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	117.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	110.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa
238.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**3.115.170.000,00**							**5.092.000.000,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan						***15.000.000,00***							***275.000.000,00***	
			999.Nilai Tukar Nelayan	101-105 %		101-105 %	101-105 %	15.000.000,00						101-105 %	275.000.000,00	
			999.Produksi Perikanan Tangkap	263873 Ton		253577 Ton	256113 Ton	15.000.000,00						258674 Ton	275.000.000,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						799.470.000,00					-		2.960.000.000,00	
		Meningkatnya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						799.470.000,00					-		2.960.000.000,00	
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	20 Layanan		20 Layanan	20 Layanan	39.470.000,00						20 Layanan	190.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	760.000.000,00						4 Unit	2.770.000.000,00	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						0,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	250.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						15.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	20 Layanan		20 Layanan	2 Layanan	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Layanan	25.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Wilayah Pulau Sumbawa
		Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu						**476.295.000,00**							**641.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**476.295.000,00**							**641.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**476.295.000,00**							**641.500.000,00**	
239.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.547.669.925,00**							**33.216.155.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***456.295.000,00***							***554.000.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	88,24 Skor		84,80 Skor	85,65 Skor	456.295.000,00						86,51 Skor	554.000.000,00	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
		Meningkatnya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.620.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	26.375.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	32.500.000,00	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							2.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.095.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	2.095.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	7.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	7.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	957.000.000,00						3 Laporan	940.000.000,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						39.200.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	39.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Bima || Kecamatan Palibelo || Desa Belo || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	40.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu
	3.25.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.236.095.425,00					-		1.650.000.000,00	
		Meningkatnya pelayanan BLUD						1.236.095.425,00					-		1.650.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja		3 Unit Kerja	3 Unit Kerja	1.236.095.425,00						3 Unit Kerja	1.650.000.000,00	
	3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						400.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja		3 Unit Kerja	1 Unit Kerja	400.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pendapatan dari BLUD	-	-		3 Unit Kerja	500.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu
240.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**3.303.700.000,00**							**2.968.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan						***10.000.000,00***							***50.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase wilayah laut dan pesisir yang dikelola berkelanjutan	18 %		14.16 %	16 %	10.000.000,00						17 %	50.000.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						1.888.700.000,00					-		2.028.500.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						1.888.700.000,00					-		2.028.500.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	328590 Ha		249693.80 Ha	328590 Ha	670.000.000,00						328590 Ha	1.225.000.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	328590 Ha		249693.80 Ha	395315,53 Ha	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		328590 Ha	50.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu
241.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**959.631.175,00**							**1.590.000.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan						***10.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	100 %		100 %	100 %	10.000.000,00						100 %	30.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						959.631.175,00					-		1.570.000.000,00	
		Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil						959.631.175,00					-		1.570.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	45.000.000,00						10 Pelaku Usaha	185.000.000,00	
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Bima-Dompu
		Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat						**518.590.425,00**							**846.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**518.590.425,00**							**846.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**518.590.425,00**							**846.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
242.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.547.669.925,00**							**33.216.155.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***498.590.425,00***							***714.000.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	88,24 Skor		84,80 Skor	85,65 Skor	498.590.425,00						86,51 Skor	714.000.000,00	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
		Meningkatnya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.620.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	26.375.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	32.500.000,00	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.095.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	2.095.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	7.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						7.500.000,00							7.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	7.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	957.000.000,00						3 Laporan	940.000.000,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						52.900.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	52.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	50.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat
	3.25.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.236.095.425,00					-		1.650.000.000,00	
		Meningkatnya pelayanan BLUD						1.236.095.425,00					-		1.650.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja		3 Unit Kerja	3 Unit Kerja	1.236.095.425,00						3 Unit Kerja	1.650.000.000,00	
	3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						436.095.425,00							650.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja		3 Unit Kerja	1 Unit Kerja	436.095.425,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pendapatan dari BLUD	-	-		3 Unit Kerja	650.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat
243.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**3.303.700.000,00**							**2.968.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan						***10.000.000,00***							***75.000.000,00***	
			999.Persentase wilayah laut dan pesisir yang dikelola berkelanjutan	18 %		14.16 %	16 %	10.000.000,00						17 %	75.000.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						1.888.700.000,00					-		2.028.500.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						1.888.700.000,00					-		2.028.500.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	328590 Ha		249693.80 Ha	328590 Ha	670.000.000,00						328590 Ha	1.225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	328590 Ha		249693.80 Ha	395315,53 Ha	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		328590 Ha	75.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat
244.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**959.631.175,00**							**1.590.000.000,00**	
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan						***10.000.000,00***							***50.000.000,00***	
			999.Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	100 %		100 %	100 %	10.000.000,00						100 %	50.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						959.631.175,00					-		1.570.000.000,00	
		Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil						959.631.175,00					-		1.570.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	45.000.000,00						10 Pelaku Usaha	185.000.000,00	
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						10.000.000,00							50.000.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Pelaku Usaha	50.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Sumbawa-Sumbawa Barat
		Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok						**466.170.000,00**							**661.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**466.170.000,00**							**661.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**466.170.000,00**							**661.500.000,00**	
245.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.547.669.925,00**							**33.216.155.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***446.170.000,00***							***549.000.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	88,24 Skor		84,80 Skor	85,65 Skor	446.170.000,00						86,51 Skor	549.000.000,00	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.620.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	26.375.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	32.500.000,00	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						1.970.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	1.970.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	7.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						5.000.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	7.500.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	957.000.000,00						3 Laporan	940.000.000,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						39.200.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	39.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	35.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok
	3.25.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						1.236.095.425,00					-		1.650.000.000,00	
		Meningkatnya pelayanan BLUD						1.236.095.425,00					-		1.650.000.000,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja		3 Unit Kerja	3 Unit Kerja	1.236.095.425,00						3 Unit Kerja	1.650.000.000,00	
	3.25.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						400.000.000,00							500.000.000,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	3 Unit Kerja		3 Unit Kerja	1 Unit Kerja	400.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pendapatan dari BLUD	-	-		3 Unit Kerja	500.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok
246.	**3.25.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL**						**3.303.700.000,00**							**2.968.500.000,00**	
		Meningkatnya kualitas ekosistem laut, pesisir, dan pulau-pulau kecil yang dikelola secara berkelanjutan						***10.000.000,00***							***75.000.000,00***	
			999.Persentase wilayah laut dan pesisir yang dikelola berkelanjutan	18 %		14.16 %	16 %	10.000.000,00						17 %	75.000.000,00	
	3.25.02.1.01	Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						1.888.700.000,00					-		2.028.500.000,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Ruang Laut Sampai Dengan 12 Mil di Luar Minyak dan Gas Bumi						1.888.700.000,00					-		2.028.500.000,00	
			Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	328590 Ha		249693.80 Ha	328590 Ha	670.000.000,00						328590 Ha	1.225.000.000,00	
	3.25.02.1.01.0002	Pengelolaan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat						10.000.000,00							75.000.000,00	
		Terkelolanya Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Berdasarkan Penetapan dari Pemerintah Pusat	Luasan Kawasan Konservasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang Terkelola	328590 Ha		249693.80 Ha	395315,53 Ha	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		328590 Ha	75.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok
247.	**3.25.05**	**PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**959.631.175,00**							**1.590.000.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan						***10.000.000,00***							***30.000.000,00***	
			999.Persentase kepatuhan pelaku usaha kelautan dan perikanan	100 %		100 %	100 %	10.000.000,00						100 %	30.000.000,00	
	3.25.05.1.01	Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan sampai dengan 12 Mil						959.631.175,00					-		1.570.000.000,00	
		Meningkatnya Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Sampai Dengan 12 Mil						959.631.175,00					-		1.570.000.000,00	
			Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	45.000.000,00						10 Pelaku Usaha	185.000.000,00	
	3.25.05.1.01.0016	Pengawasan usaha pemanfaatan sumber daya kelautan kewenangan provinsi						10.000.000,00							30.000.000,00	
		Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	Jumlah Pelaku usaha pemanfaatan sumber daya kelautan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan provinsi	10 Pelaku Usaha		10 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Pelaku Usaha	30.000.000,00	Balai Pengelolaan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Wilayah Pulau Lombok
		Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar						**78.450.000,00**							**201.500.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**78.450.000,00**							**201.500.000,00**	
	3.25	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN**						**78.450.000,00**							**201.500.000,00**	
248.	**3.25.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**30.547.669.925,00**							**33.216.155.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***76.480.000,00***							***79.000.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	88,24 Skor		84,80 Skor	85,65 Skor	76.480.000,00						86,51 Skor	79.000.000,00	
	3.25.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
		Meningkatnya Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah						142.620.000,00					-		215.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.620.000,00						1 Laporan	40.000.000,00	
	3.25.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	4.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar
	3.25.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						320.353.000,00					-		445.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00						12 Laporan	180.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	26.375.000,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	30.000.000,00						1 Paket	32.500.000,00	
	3.25.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	2.500.000,00	Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar
	3.25.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						2.580.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20 Paket		1 Paket	1 Paket	2.580.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	7.500.000,00	Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar
	3.25.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						7.500.000,00							7.500.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	7.500.000,00	Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar
	3.25.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
		Meningkatnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						3.862.000.000,00					-		3.347.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	957.000.000,00						3 Laporan	940.000.000,00	
	3.25.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						62.400.000,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	62.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	65.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar
249.	**3.25.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP**						**3.115.170.000,00**							**5.092.000.000,00**	
		Meningkatnya produksi perikanan tangkap dan kesejahteraan nelayan secara berkelanjutan						***1.970.000,00***							***115.000.000,00***	
			999.Nilai Tukar Nelayan	101-105 %		101-105 %	101-105 %	1.970.000,00						101-105 %	115.000.000,00	
			999.Produksi Perikanan Tangkap	263873 Ton		253577 Ton	256113 Ton	1.970.000,00						258674 Ton	115.000.000,00	
	3.25.03.1.06	Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						799.470.000,00					-		2.960.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Penetapan Lokasi Pembangunan serta Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Provinsi						799.470.000,00					-		2.960.000.000,00	
			Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	20 Layanan		20 Layanan	20 Layanan	39.470.000,00						20 Layanan	190.000.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	760.000.000,00						4 Unit	2.770.000.000,00	
	3.25.03.1.06.0002	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan						0,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan	Jumlah Sarana dan Prasarana Pelabuhan Perikanan yang Tersedia	4 Unit		4 Unit	4 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	100.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar
	3.25.03.1.06.0003	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan						1.970.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan	Fungsi Pemerintahan dan Pengusahaan Pelabuhan Perikanan yang Terlaksana	20 Layanan		20 Layanan	2 Layanan	1.970.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		20 Layanan	15.000.000,00	Pelabuhan Perikanan Tanjung Luar
		Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						**21.105.188.337,30**							**27.935.050.342,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**21.105.188.337,30**							**27.935.050.342,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**21.105.188.337,30**							**27.935.050.342,00**	
250.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**14.895.728.817,30**							**16.688.916.366,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***13.919.544.837,30***							***16.019.871.475,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85.31 Skor		81.99 Skor	82.81 Skor	13.919.544.837,30						83.63 Skor	16.019.871.475,00	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						198.513.035,00					-		383.261.794,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						198.513.035,00					-		383.261.794,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.300.600,00						2 Dokumen	12.627.362,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	67.213.600,00						4 Dokumen	80.815.119,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.685.800,00						2 Dokumen	12.627.362,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	17.859.200,00						2 Dokumen	12.627.362,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	37.548.535,00						2 Dokumen	12.627.362,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00						3 Laporan	126.273.622,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	68.905.300,00						3 Laporan	125.663.605,00	
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						49.196.600,00							60.708.942,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	49.196.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	60.708.942,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						27.785.535,00							9.485.772,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	27.785.535,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	9.485.772,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						16.282.100,00							9.485.772,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	16.282.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	9.485.772,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							9.485.772,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	9.485.772,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							9.485.772,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	9.485.772,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							94.857.721,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	94.857.721,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						58.928.000,00							94.247.704,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	58.928.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	94.247.704,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.643.696.842,30					-		10.354.745.128,00	
		Tersusunnya Dokumen Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.643.696.842,30					-		10.354.745.128,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	6.313.681,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	6.313.681,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	144.497.550,00						4 Dokumen	46.589.057,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.788.209,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	36.678.900,00						2 Dokumen	12.627.362,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.686.725,00						1 Laporan	6.313.681,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.070.040,00						1 Laporan	7.576.417,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan		75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	9.436.763.627,30						75 Orang/ Bulan	10.265.223.040,00	
	3.26.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9.436.763.627,30							10.265.223.040,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	75 Orang/ Bulan		75 Orang/ Bulan	75 Orang/ Bulan	9.436.763.627,30	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		75 Orang/ Bulan	10.265.223.040,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						109.321.600,00							34.998.060,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	109.321.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	34.998.060,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						36.678.900,00							9.485.772,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	36.678.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	9.485.772,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							4.742.886,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	4.742.886,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						9.686.725,00							4.742.886,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.686.725,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	4.742.886,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							4.742.886,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	4.742.886,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						6.010.440,00							5.691.463,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	6.010.440,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	5.691.463,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							2.845.732,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.845.732,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						657.324.800,00					-		27.780.196,00	
		Tersusunnya Laporan Admnistrasi Barang Milik Daerah						657.324.800,00					-		27.780.196,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	2.525.472,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.924.800,00						1 Dokumen	6.313.681,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	2.525.472,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00						1 Laporan	3.788.209,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	614.500.000,00						1 Laporan	6.313.681,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	2.525.472,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	12.900.000,00						1 Dokumen	3.788.209,00	
	3.26.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						12.900.000,00							2.845.732,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.845.732,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						5.924.800,00							4.742.886,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.924.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	4.742.886,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						24.000.000,00							2.845.732,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	2.845.732,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						0,00							1.897.154,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	1.897.154,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							1.897.154,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	1.897.154,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							4.742.886,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	4.742.886,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							1.897.154,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.897.154,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						36.785.300,00					-		43.271.592,00	
		Tersusunnya Dokumen Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						36.785.300,00					-		43.271.592,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.800.000,00						1 Dokumen	5.359.004,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.788.209,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.200.000,00						1 Dokumen	4.742.886,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00						2 Orang	6.313.681,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	3.788.209,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	7.914.977,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	13.620.300,00						1 Orang	6.313.681,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.165.000,00						1 Unit	5.050.945,00	
	3.26.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						7.165.000,00							3.794.309,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.165.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	3.794.309,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							6.344.182,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	6.344.182,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						10.200.000,00							3.172.091,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	3.172.091,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						5.800.000,00							4.416.527,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	4.416.527,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							2.845.732,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.845.732,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						13.620.300,00							4.742.886,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	13.620.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Orang	4.742.886,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							2.845.732,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Orang	2.845.732,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							4.742.886,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Orang	4.742.886,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						925.509.980,00					-		690.734.264,00	
		Tersusunnya laporan admnistrasi Umum Perangkat Daerah						925.509.980,00					-		690.734.264,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.200.000,00						1 Dokumen	3.661.935,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.254.724,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	243.400.000,00						7 Laporan	209.614.213,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	267.400.000,00						5 Laporan	131.324.567,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.322.200,00						1 Paket	37.882.086,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	39.588.100,00						1 Paket	5.556.040,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.485.000,00						1 Paket	8.839.153,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	231.114.680,00						3 Paket	243.346.822,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	25.254.724,00	
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						24.485.000,00							6.640.040,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.485.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	6.640.040,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						149.720.240,00							210.319.148,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	149.720.240,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	210.319.148,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							18.971.544,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	18.971.544,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						52.826.650,00							28.457.316,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.826.650,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	28.457.316,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						39.588.100,00							4.173.740,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	39.588.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	4.173.740,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						19.200.000,00							2.750.874,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	2.750.874,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						177.300.000,00							157.463.817,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	177.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		7 Laporan	157.463.817,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						205.800.000,00							98.652.030,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	205.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Laporan	98.652.030,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							18.971.544,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	18.971.544,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						25.537.640,00					-		233.667.201,00	
		Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						25.537.640,00					-		233.667.201,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.537.640,00						1 Paket	12.627.362,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	18.941.043,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	126.273.622,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17.000.000,00						1 Unit	9.485.772,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	28.457.316,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	37.882.086,00	
	3.26.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							94.857.721,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	94.857.721,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							14.228.658,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	14.228.658,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						0,00							9.485.772,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	9.485.772,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						17.000.000,00							9.485.772,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	17.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	9.485.772,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							28.457.316,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	28.457.316,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							28.457.316,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	28.457.316,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.190.044.220,00					-		4.727.311.490,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						3.190.044.220,00					-		4.727.311.490,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	217.800.000,00						12 Laporan	1.112.116.082,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.960.519.220,00						12 Laporan	3.569.841.111,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	23.761.508,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	11.725.000,00						2 Laporan	21.592.789,00	
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.725.000,00							16.220.670,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.725.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	16.220.670,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						217.800.000,00							1.112.116.082,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	217.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	1.112.116.082,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							15.866.555,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	15.866.555,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.960.519.220,00							3.569.841.111,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.960.519.220,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	3.569.841.111,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						218.317.000,00					-		228.144.701,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						218.317.000,00					-		228.144.701,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	29.464.686,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Unit	1 Unit	122.000.000,00						1 Unit	6.313.681,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	6.313.681,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	37.300.000,00						5 Unit	115.339.424,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	56.200.913,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	59.017.000,00						1 Unit	14.512.316,00	
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						122.000.000,00							4.742.886,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Unit	1 Unit	122.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	4.742.886,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							22.134.100,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	22.134.100,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							4.742.886,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	4.742.886,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						37.300.000,00							96.489.883,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	37.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	96.489.883,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							41.749.598,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	41.749.598,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						59.017.000,00							11.370.726,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	59.017.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	11.370.726,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
251.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**2.209.459.500,00**							**3.600.916.567,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata						***1.985.643.500,00***							***2.580.193.591,00***	
			999.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	6.05 Persentase		4.97 Persentase	5.22 Persentase	1.985.643.500,00						5.48 Persentase	2.580.193.591,00	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						95.000.000,00					-		442.277.613,00	
		Terkelolanya daya tarik wisata provinsi						95.000.000,00					-		442.277.613,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	103.364.352,00	
			Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	41.740.749,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	95.000.000,00						2 Lokasi	116.284.896,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	0,00						2 Lokasi	77.523.264,00	
			Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	103.364.352,00	
	3.26.02.1.01.0001	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi						0,00							77.523.264,00	
		Ditetapkannya Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Unggulan Provinsi	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Lokasi	77.523.264,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi						0,00							77.523.264,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Lokasi	77.523.264,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.01.0006	Perencanaan Daya Tarik Wisata Provinsi						0,00							103.364.352,00	
		Terlaksananya Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Provinsi yang sah dan legal ditetapkan Kepala Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	103.364.352,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						0,00							41.740.749,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Laporan hasil pelaksanaan Monitoring dan evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	41.740.749,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.01.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Provinsi						0,00							103.364.352,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Pengelola Daya Tarik Wisata yang ditingkatkan kapasitasnya	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang	103.364.352,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						291.739.500,00					-		1.502.590.223,00	
		Terkelolanya kawasan strategis pariwisata provinsi						291.739.500,00					-		1.502.590.223,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	51.682.176,00	
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	291.739.500,00						4 Lokasi	103.364.352,00	
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	77.523.264,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	898.986.381,00	
			Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	77.523.264,00	
			Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	293.510.786,00	
	3.26.02.1.02.0001	Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							77.523.264,00	
		Ditetapkannya Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	77.523.264,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							293.510.786,00	
		Terlaksananya Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	293.510.786,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							898.986.381,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	898.986.381,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.02.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						291.739.500,00							103.364.352,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	291.739.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Lokasi	103.364.352,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.02.0008	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							51.682.176,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	51.682.176,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						0,00							77.523.264,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang	77.523.264,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						1.636.648.000,00					-		1.470.161.115,00	
		Terkelolanya destinasi pariwisata provinsi						1.636.648.000,00					-		1.470.161.115,00	
			Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	0,00						2 Lokasi	51.682.176,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	103.364.352,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	51.682.176,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	310.255.000,00						1 Dokumen	129.205.440,00	
			Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00						1 Kegiatan	51.682.176,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	51.682.176,00	
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	440.118.000,00						4 Lokasi	465.139.584,00	
			Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	77.523.264,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	886.275.000,00						3 Unit	488.199.771,00	
	3.26.02.1.03.0001	Penetapan Destinasi Pariwisata Provinsi						0,00							51.682.176,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Destinasi Pariwisata Provinsi yang Ditetapkan	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Lokasi	51.682.176,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.03.0002	Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi						0,00							51.682.176,00	
		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	51.682.176,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						886.275.000,00							488.199.771,00	
		Tersedia dan Terpeliharanya Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi yang Tersedia dan Terpelihara	3 Unit		3 Unit	3 Unit	886.275.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Unit	488.199.771,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						311.302.000,00							310.093.056,00	
		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	311.302.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Lokasi	310.093.056,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.03.0008	Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi						0,00							103.364.352,00	
		Tersedianya Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Destinasi Pariwisata MICE Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	103.364.352,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.03.0009	Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi						310.255.000,00							129.205.440,00	
		Tersusunnya Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	310.255.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	129.205.440,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.03.0010	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi						0,00							77.523.264,00	
		Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Pengelola Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Provinsi yang Dikembangkan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang	77.523.264,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.03.0011	Penguatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata Tingkat Provinsi						0,00							51.682.176,00	
		Terlaksananya Tata Kelola Destinasi Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Kegiatan Jejaring Tata Kelola Destinasi Pariwisata	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Kegiatan	51.682.176,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.03.0012	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						0,00							51.682.176,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	51.682.176,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.02.1.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi						186.072.000,00					-		185.887.616,00	
		Terdaftarnya usaha pariwisata yang tanda usahanya telah ditetapkan						186.072.000,00					-		185.887.616,00	
			Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	10.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	25.841.088,00	
	3.26.02.1.04.0010	Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi						0,00							25.841.088,00	
		Meningkatnya Investasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	25.841.088,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.04.0011	Penyediaan Layanan Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi						0,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata di Tingkat Provinsi	Jumlah Dokumen Layanan Fasilitasi Konsultasi Pendaftaran Perizinan Berusaha Sektor Pariwisata ditingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	10.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Terdaftarnya usaha pariwisata yang tanda usahanya telah ditetapkan						186.072.000,00					-		185.887.616,00	
			Jumlah Industri/ Usaha Pariwisata yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	-		-	-	57.072.000,00						-	57.523.264,00	
			Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang telah menerima pembinaan dan pengawasan	-		-	-	129.000.000,00						-	5.000.000,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	-	0,00						-	87.523.264,00	
	3.26.02.1.04.0017	Pelaksanaan Pengawasan Perijinan Berusaha Berbasis Risiko						129.000.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Kepatuhan Pelaku Usaha dalam Melaksanakan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Standar Usaha Pariwisata	Jumlah Pelaku Usaha Pariwisata yang telah menerima pembinaan dan pengawasan	-		-	10 Pelaku Usaha	129.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	5.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.02.1.04.0018	Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha						0,00							87.523.264,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Pembinaan Pelaku Usaha	Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Advokasi dan Pendampingan Peningkatan Standardisasi dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata	-		-	10 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	87.523.264,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.02.1.04.0019	Fasilitasi Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)						57.072.000,00							57.523.264,00	
		Terfasilitasinya Pendampingan Penerbitan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pariwisata (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	Jumlah Industri/ Usaha Pariwisata yang Memperoleh Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Tingkat Risiko Menengah Tinggi)	-		-	10 Unit Usaha	57.072.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	57.523.264,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
252.	**3.26.03**	**PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA**						**4.000.000.000,00**							**2.968.780.000,00**	
		Meningkatnya Jangkauan Pemasaran Pariwisata						***4.000.000.000,00***							***2.968.780.000,00***	
			999.Persentase Peningkatan Media Pemasaran Pariwisata	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	4.000.000.000,00						100 Persentase	2.968.780.000,00	
	3.26.03.1.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi						4.000.000.000,00					-		2.968.780.000,00	
		Terlaksananya pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri						4.000.000.000,00					-		2.968.780.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	406.400.000,00						12 Dokumen	520.192.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	609.600.000,00						4 Dokumen	780.288.000,00	
			Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Kegiatan		12 Kegiatan	12 Kegiatan	2.984.000.000,00						12 Kegiatan	1.668.300.000,00	
	3.26.03.1.01.0001	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri						609.600.000,00							780.288.000,00	
		Terlaksananya Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	609.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	780.288.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.03.1.01.0005	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata						406.400.000,00							520.192.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	406.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	520.192.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.03.1.01.0006	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri						2.984.000.000,00							1.668.300.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	12 Kegiatan		12 Kegiatan	37 Kegiatan	2.984.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Kegiatan	1.668.300.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
253.	**3.26.04**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**						**600.000.000,00**							**2.204.701.607,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Ekosistem Kreatif						***600.000.000,00***							***1.586.249.295,00***	
			999.Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	63.81 Persentase		52.50 Persentase	55.13 Persentase	600.000.000,00						57.88 Persentase	1.586.249.295,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif						104.318.500,00					-		759.723.415,00	
			Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	111.536.784,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	335.883.636,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	167.305.176,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	144.997.819,00	
	3.26.04.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif						0,00							335.883.636,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengembangan Ruang Kreasi dan Jaringan Orang Kreatif	12 Laporan		12 Laporan	17 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	335.883.636,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.04.1.01.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar						0,00							167.305.176,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM dan Produksi dan Pasar	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Usaha Kreatif Sepanjang Rantai Produksi dengan Menyediakan Akses ke Sumber Permodalan atau Pasokan SDM Produksi dan Pasar	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	167.305.176,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.04.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula						0,00							144.997.819,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Usaha Kreatif Terutama bagi Usaha Pemula	1 Laporan		1 Laporan	6 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	144.997.819,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.04.1.01.0006	Perluasan Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik						0,00							111.536.784,00	
		Meluasnya Akses Pasar Produk Kreatif Baik di Pasar Ekspor maupun Pasar Domestik	Jumlah dokumen promosi yang dilakukan dalam rangka Perluasan Akses Pasar Produk Kreatif Baik Pasar Ekspor dan Pasar Domestik	3 Dokumen		3 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Dokumen	111.536.784,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif						495.681.500,00					-		1.444.978.192,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	223.073.568,00	
			Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	55.768.392,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	111.536.784,00	
			Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.000.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	542.683.920,00	
			Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	0,00						1 Lembaga	223.073.568,00	
			Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi		1 Promosi	1 Promosi	220.000.000,00						1 Promosi	111.536.784,00	
	3.26.04.1.02.0010	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						0,00							55.768.392,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Hasi Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	55.768.392,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.04.1.02.0011	Pengembangan Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual						0,00							223.073.568,00	
		Berkembangnya Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis Kekayaan Intelektual	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif berbasis kekayaan intelektual	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	223.073.568,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.04.1.02.0012	Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah						0,00							111.536.784,00	
		Tersedianya dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	111.536.784,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.04.1.02.0014	Pendukungan Pemasaran Ekonomi Kreatif						220.000.000,00							111.536.784,00	
		Terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungan pemasaran ekonomi kreatif	1 Promosi		1 Promosi	1 Promosi	220.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Promosi	111.536.784,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.04.1.02.0015	Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah						0,00							223.073.568,00	
		Terlaksananya penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	Jumlah lembaga/asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Lembaga	223.073.568,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.04.1.02.0016	Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah						0,00							5.000.000,00	
		Terselenggaranya Formulasi kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.04.1.02.0017	Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah						0,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.04.1.02.0019	Penyediaan Infrastruktur Ekonomi Kreatif						0,00							542.683.920,00	
		Tersedianya Infrastruktur Ekonomi Kreatif	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	542.683.920,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.04.1.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Kota Kreatif						104.318.500,00					-		759.723.415,00	
		Tersedianya sarana dan prasarana kota kreatif						104.318.500,00					-		759.723.415,00	
			Jumlah Prasarana Ruang Kreatif	-		-	-	104.318.500,00						-	0,00	
	3.26.04.1.01.0007	Fasilitasi Prasarana Melalui Revitalisasi Ruang Kreatif						104.318.500,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Prasarana Revitalisasi Ruang Kreatif	Jumlah Prasarana Ruang Kreatif	-		-	2 Unit	104.318.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	0,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.04.1.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif						495.681.500,00					-		1.444.978.192,00	
		Berkembangnya ekosistem ekonomi kreatif						495.681.500,00					-		1.444.978.192,00	
			Jumlah Orang yang Mendapatkan Konsultasi, Advokasi, dan Penguatan Kekayaan Intelektual	-		-	-	275.681.500,00						-	167.305.176,00	
	3.26.04.1.02.0024	Fasilitasi Kekayaan Intelektual						275.681.500,00							167.305.176,00	
		Terlaksananya Kegiatan Konsultasi, Advokasi, dan Penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah Orang yang Mendapatkan Konsultasi, Advokasi, dan Penguatan Kekayaan Intelektual	-		-	10 Orang	275.681.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	167.305.176,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
254.	**3.26.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF**						**600.000.000,00**							**3.053.810.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						***600.000.000,00***							***795.332.630,00***	
			999.Persentase Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang Aktif dan Tervalidasi	90.39 Persentase		86.86 Persentase	87.73 Persentase	600.000.000,00						88.61 Persentase	795.332.630,00	
	3.26.05.1.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Lanjutan						429.320.000,00					-		1.984.004.930,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan ekonomi tingkat lanjut						429.320.000,00					-		1.984.004.930,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	237.734.460,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	237.734.460,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.480.000,00						1 Laporan	118.867.230,00	
			Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	20 Orang		20 Orang	20 Orang	67.060.000,00						20 Orang	178.300.845,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	20 Orang		20 Orang	20 Orang	93.459.000,00						20 Orang	260.430.095,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	178.300.845,00	
			Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	10 Orang		10 Orang	10 Orang	165.609.000,00						10 Orang	178.300.845,00	
			Jumlah produk kreatif	17 Produk		17 Produk	17 Produk	0,00						17 Produk	237.734.460,00	
			Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang		20 Orang	20 Orang	76.712.000,00						20 Orang	178.300.845,00	
			Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	178.300.845,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.05.1.01.0004	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata						93.459.000,00							260.430.095,00	
		Terfasilitasinya Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	20 Orang		20 Orang	20 Orang	93.459.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang	260.430.095,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.01.0007	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata						0,00							237.734.460,00	
		Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan P3 Bidang Pariwisata	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	237.734.460,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.01.0008	Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif						0,00							237.734.460,00	
		Terfasilitasinya Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	237.734.460,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.01.0011	Pendampingan penciptaan produk kreatif (inkubasi)						0,00							237.734.460,00	
		Terciptanya produk kreatif memalui kegiatan pemdampingan	Jumlah produk kreatif	17 Produk		17 Produk	17 Produk	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		17 Produk	237.734.460,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.01.0012	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Bidang Pariwisata						0,00							178.300.845,00	
		Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA)	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Orang	178.300.845,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.01.0013	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Bidang Pariwisata						165.609.000,00							178.300.845,00	
		Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC)	10 Orang		10 Orang	10 Orang	165.609.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Orang	178.300.845,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.01.0014	Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata						67.060.000,00							178.300.845,00	
		Meningkatnya Kemampuan dan Pengetahuan Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	20 Orang		20 Orang	20 Orang	67.060.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang	178.300.845,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.01.0016	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI						0,00							178.300.845,00	
		Berkembangkan Kapasitas SDM Pariwisata berdasarkan pada SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		10 Orang	178.300.845,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.01.0017	Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif						76.712.000,00							178.300.845,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang mendapat Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	20 Orang		20 Orang	20 Orang	76.712.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang	178.300.845,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.01.0018	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif						26.480.000,00							118.867.230,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.480.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	118.867.230,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.02	Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif						170.680.000,00					-		1.069.805.070,00	
		Berkembangnya kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif						170.680.000,00					-		1.069.805.070,00	
			Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	0,00						5 Lembaga	178.300.845,00	
			Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	20 Orang		20 Orang	20 Orang	93.681.000,00						20 Orang	178.300.845,00	
			Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	178.300.845,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	178.300.845,00	
			Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00						20 Orang	178.300.845,00	
	3.26.05.1.02.0003	Standarisasi Usaha dan Sertifikasi Profesi di Bidang Ekonomi Kreatif						0,00							178.300.845,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Disertifikasi Kompetensi di Bidang Ekonomi Kreatif	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang	178.300.845,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.02.0004	Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif						0,00							178.300.845,00	
		Terlaksanya Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah orang yang mengikuti Pelatihan Perpanjangan Lisensi Asesor/Recognition Current Competencies (RCC) Subsektor Ekonomi Kreatif	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang	178.300.845,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.02.0005	Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif						0,00							178.300.845,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kapasitas Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan Asesor Kompetensi/Workplace Assesor (WPA) Subsektor Ekonomi Kreatif	20 Orang		20 Orang	20 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang	178.300.845,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.02.0006	Fasilitasi Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif						0,00							178.300.845,00	
		Terfasilitasinya Pendirian Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) P1 dan atau P3 Subsektor Ekonomi Kreatif yang terfasilitasi pendiriannya sampai sah dan legal	5 Lembaga		5 Lembaga	5 Lembaga	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Lembaga	178.300.845,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
	3.26.05.1.02.0007	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif						93.681.000,00							178.300.845,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang di fasilitasi sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	20 Orang		20 Orang	20 Orang	93.681.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Orang	178.300.845,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		Berkembangnya kapasitas pelaku Ekonomi Kreatif						170.680.000,00					-		1.069.805.070,00	
			Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	-	76.999.000,00						-	178.300.845,00	
	3.26.05.1.02.0008	Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif						76.999.000,00							178.300.845,00	
		Terlaksananya Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	-		-	20 Orang	76.999.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		-	178.300.845,00	Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
		UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena						**1.199.999.980,00**							**582.074.198,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.199.999.980,00**							**582.074.198,00**	
	3.26	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA**						**1.199.999.980,00**							**582.074.198,00**	
255.	**3.26.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**14.895.728.817,30**							**16.688.916.366,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***976.183.980,00***							***269.199.775,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85.31 Skor		81.99 Skor	82.81 Skor	976.183.980,00						83.63 Skor	269.199.775,00	
	3.26.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						198.513.035,00					-		383.261.794,00	
		Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah						198.513.035,00					-		383.261.794,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.300.600,00						2 Dokumen	12.627.362,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	67.213.600,00						4 Dokumen	80.815.119,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.685.800,00						2 Dokumen	12.627.362,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	17.859.200,00						2 Dokumen	12.627.362,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	37.548.535,00						2 Dokumen	12.627.362,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00						3 Laporan	126.273.622,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	68.905.300,00						3 Laporan	125.663.605,00	
	3.26.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						18.017.000,00							20.106.177,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	18.017.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	20.106.177,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						9.763.000,00							3.141.590,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	9.763.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	3.141.590,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						1.577.100,00							3.141.590,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	1.577.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	3.141.590,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.300.600,00							3.141.590,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	2.300.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	3.141.590,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.685.800,00							3.141.590,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	4.685.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	3.141.590,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							31.415.901,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	31.415.901,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						9.977.300,00							31.415.901,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	9.977.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Laporan	31.415.901,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.643.696.842,30					-		10.354.745.128,00	
		Tersusunnya Dokumen Admnistrasi Keuangan Perangkat Daerah						9.643.696.842,30					-		10.354.745.128,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	6.313.681,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	6.313.681,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	144.497.550,00						4 Dokumen	46.589.057,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.788.209,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	36.678.900,00						2 Dokumen	12.627.362,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.686.725,00						1 Laporan	6.313.681,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.070.040,00						1 Laporan	7.576.417,00	
	3.26.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						35.175.950,00							11.590.997,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	35.175.950,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Dokumen	11.590.997,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						0,00							3.141.590,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Dokumen	3.141.590,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							1.570.795,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.570.795,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							1.570.795,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	1.570.795,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							1.570.795,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.570.795,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						10.059.600,00							1.884.954,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.059.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	1.884.954,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							942.477,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	942.477,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						657.324.800,00					-		27.780.196,00	
		Tersusunnya Laporan Admnistrasi Barang Milik Daerah						657.324.800,00					-		27.780.196,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	2.525.472,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.924.800,00						1 Dokumen	6.313.681,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	2.525.472,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.000.000,00						1 Laporan	3.788.209,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	614.500.000,00						1 Laporan	6.313.681,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	2.525.472,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	Dokumen	12.900.000,00						1 Dokumen	3.788.209,00	
	3.26.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							942.477,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	942.477,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							1.570.795,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.570.795,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00							942.477,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-		1 Laporan	942.477,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.03.0004	Pembinaan, Pengawasan, dan PengendalianBarang Milik Daerah pada SKPD						0,00							628.318,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	628.318,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							628.318,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	628.318,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						614.500.000,00							1.570.795,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	614.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	1.570.795,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							628.318,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	628.318,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						36.785.300,00					-		43.271.592,00	
		Tersusunnya Dokumen Admnistrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						36.785.300,00					-		43.271.592,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.800.000,00						1 Dokumen	5.359.004,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	3.788.209,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.200.000,00						1 Dokumen	4.742.886,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00						2 Orang	6.313.681,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00						1 Orang	3.788.209,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	7.914.977,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	13.620.300,00						1 Orang	6.313.681,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	7.165.000,00						1 Unit	5.050.945,00	
	3.26.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							1.256.636,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	1.256.636,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							1.570.795,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	1.570.795,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							1.570.795,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	1.570.795,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						0,00							942.477,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	942.477,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						0,00							942.477,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	942.477,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							1.570.795,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		1 Orang	2 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Orang	1.570.795,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						0,00							942.477,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Orang		1 Orang	1 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Orang	942.477,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							1.570.795,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Orang	1.570.795,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						925.509.980,00					-		690.734.264,00	
		Tersusunnya laporan admnistrasi Umum Perangkat Daerah						925.509.980,00					-		690.734.264,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.200.000,00						1 Dokumen	3.661.935,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	25.254.724,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	243.400.000,00						7 Laporan	209.614.213,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	267.400.000,00						5 Laporan	131.324.567,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	100.322.200,00						1 Paket	37.882.086,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	39.588.100,00						1 Paket	5.556.040,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	24.485.000,00						1 Paket	8.839.153,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	231.114.680,00						3 Paket	243.346.822,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	25.254.724,00	
	3.26.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						0,00							2.199.113,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	2.199.113,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						81.394.440,00							33.027.674,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	81.394.440,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		3 Paket	33.027.674,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							6.283.180,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	6.283.180,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						47.495.550,00							9.424.770,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	47.495.550,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	9.424.770,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							1.382.300,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	1.382.300,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							911.061,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	911.061,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						66.100.000,00							52.150.396,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	7 Laporan		7 Laporan	5 Laporan	66.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		7 Laporan	52.150.396,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						61.600.000,00							32.672.537,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	61.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Laporan	32.672.537,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							6.283.180,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	6.283.180,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						25.537.640,00					-		233.667.201,00	
		Tersedianya unit barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah						25.537.640,00					-		233.667.201,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.537.640,00						1 Paket	12.627.362,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	18.941.043,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	126.273.622,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	37.882.086,00	
	3.26.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							31.415.901,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	31.415.901,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							4.712.385,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	4.712.385,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						8.537.640,00							3.141.590,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.537.640,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	3.141.590,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							9.424.770,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	9.424.770,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.190.044.220,00					-		4.727.311.490,00	
		Tersusunnya laporan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah						3.190.044.220,00					-		4.727.311.490,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	217.800.000,00						12 Laporan	1.112.116.082,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	23.761.508,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	11.725.000,00						2 Laporan	21.592.789,00	
	3.26.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							5.372.119,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	5.372.119,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	0,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							7.894.953,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Laporan	7.894.953,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						218.317.000,00					-		228.144.701,00	
		Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						218.317.000,00					-		228.144.701,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	29.464.686,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Unit	1 Unit	122.000.000,00						1 Unit	6.313.681,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	6.313.681,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	37.300.000,00						5 Unit	115.339.424,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	56.200.913,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	59.017.000,00						1 Unit	14.512.316,00	
	3.26.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							1.570.795,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	1.570.795,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.26.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							7.330.586,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	7.330.586,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							1.570.795,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	1.570.795,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							18.849.541,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		5 Unit	18.849.541,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							14.451.315,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Unit	14.451.315,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							3.141.590,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Unit	3.141.590,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
256.	**3.26.02**	**PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA**						**2.209.459.500,00**							**3.600.916.567,00**	
		Meningkatnya Daya Tarik Destinasi Pariwisata						***223.816.000,00***							***193.808.160,00***	
			999.Persentase Pertumbuhan Kunjungan Wisatawan	6.05 Persentase		4.97 Persentase	5.22 Persentase	223.816.000,00						5.48 Persentase	193.808.160,00	
	3.26.02.1.01	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Provinsi						95.000.000,00					-		442.277.613,00	
		Terkelolanya daya tarik wisata provinsi						95.000.000,00					-		442.277.613,00	
			Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	95.000.000,00						2 Lokasi	116.284.896,00	
	3.26.02.1.01.0005	Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi						95.000.000,00							38.761.632,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Provinsi yang dilakukan Pengadaan, Pemeliharaan, Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Provinsi	2 Lokasi		2 Lokasi	2 Lokasi	95.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		2 Lokasi	38.761.632,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
	3.26.02.1.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						1.636.648.000,00					-		1.470.161.115,00	
		Terkelolanya destinasi pariwisata provinsi						1.636.648.000,00					-		1.470.161.115,00	
			Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	440.118.000,00						4 Lokasi	465.139.584,00	
	3.26.02.1.03.0007	Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi						128.816.000,00							155.046.528,00	
		Diterapkannya Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	Jumlah Lokasi yang Menerapkan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi	4 Lokasi		4 Lokasi	4 Lokasi	128.816.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Lokasi	155.046.528,00	UPTD Destinasi Pariwisata Unggulan Gili Tramena
		Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan						**36.413.069.684,39**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**36.413.069.684,39**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**36.413.069.684,39**							**0,00**	
257.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**28.583.860.864,39**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***27.826.138.984,39***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85.47 Skor		82.22 Skor	83.04 Skor	27.826.138.984,39						83.85 Skor	0,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						474.980.100,00					-		0,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						474.980.100,00					-		0,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	46 Data		46 Data	46 Data	112.799.000,00						46 Data	0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.334.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	113.078.200,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.288.600,00						2 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	23.648.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.460.300,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	120.213.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	77.159.000,00						4 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						105.594.200,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	105.594.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						20.460.300,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	20.460.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						23.648.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	23.648.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.334.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	4.334.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.288.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	3.288.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						120.213.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	120.213.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						62.175.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	62.175.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						112.799.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	46 Data		46 Data	46 Data	112.799.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		46 Data	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.333.301.134,39					-		0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangakat Daerah						21.333.301.134,39					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	45.879.200,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.695.800,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.602.800,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.911.800,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/ Bulan		180 Orang/ Bulan	180 Orang/ Bulan	21.047.211.534,39						180 Orang/ Bulan	0,00	
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						21.047.211.534,39							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	180 Orang/ Bulan		180 Orang/ Bulan	180 Orang/ Bulan	21.047.211.534,39	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		180 Orang/ Bulan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						133.698.400,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	133.698.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						4.602.800,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.602.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						45.879.200,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	45.879.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						16.821.800,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	16.821.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						85.040.800,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah						85.040.800,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	16.355.800,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.685.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						16.355.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	16.355.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						28.685.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	28.685.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						47.526.900,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						47.526.900,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	47.526.900,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						0,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						22.527.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	22.527.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.620.100,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.620.100,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	23.383.100,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.536.200,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.800,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang		180 Orang	180 Orang	10.000.000,00						180 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket		180 Paket	180 Paket	0,00						180 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang		180 Orang	180 Orang	10.000.000,00						180 Orang	0,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	3.27.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							0,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	180 Paket		180 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Paket	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						2.700.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	2.700.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						4.173.100,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.173.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						12.535.800,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	12.535.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	180 Orang		180 Orang	180 Orang	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	180 Orang		180 Orang	180 Orang	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		180 Orang	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						456.217.950,00					-		0,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Administrasi Umum Pendapatan Daerah						456.217.950,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	528 Dokumen		528 Dokumen	528 Dokumen	16.500.000,00						528 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.050.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	115.690.000,00						50 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket		55 Paket	55 Paket	38.123.200,00						55 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	66.588.700,00						15 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket		10000 Paket	10000 Paket	23.231.400,00						10000 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	35.460.000,00						25 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	100.574.650,00						25 Paket	0,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						24.480.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	24.480.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Paket	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						50.917.750,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	50.917.750,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Paket	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.622.700,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket		55 Paket	25 Paket	15.622.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55 Paket	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.231.400,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket		10000 Paket	10000 Paket	14.231.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10000 Paket	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						16.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	528 Dokumen		528 Dokumen	528 Dokumen	16.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		528 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						66.588.700,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	15 Paket		15 Paket	15 Paket	66.588.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Paket	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						45.050.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	45.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						95.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	95.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	0 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						287.047.600,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah						287.047.600,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	65.047.600,00						100 Paket	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit		27 Unit	27 Unit	222.000.000,00						27 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						65.047.600,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	100 Paket		100 Paket	100 Paket	65.047.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100 Paket	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						222.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	27 Unit		27 Unit	27 Unit	222.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		27 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.126.420.280,00					-		0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah						5.126.420.280,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	881.099.300,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.225.042.500,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.779.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.499.480,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						581.100.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	581.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.225.042.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.225.042.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						703.706.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						703.706.000,00					-		0,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	374.810.000,00						6 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	126.000.000,00						40 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	60 Unit	53.046.000,00						60 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	149.850.000,00						7 Unit	0,00	
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-		1 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						126.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	10 Unit	126.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	5 Unit		5 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						27.920.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	0 Unit	27.920.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	2 Unit		2 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						299.885.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	299.885.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						149.850.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	7 Unit		7 Unit	7 Unit	149.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
258.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**7.101.795.047,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Hewan						***5.813.159.250,00***							***0,00***	
			999.Jumlah Populasi Ternak Kambing	521982 Ekor		520055 Ekor	520536 Ekor	5.813.159.250,00						521018 Ekor	0,00	
			999.Jumlah Populasi Ternak Kerbau	99260 Ekor		97333 Ekor	97815 Ekor	5.813.159.250,00						98296 Ekor	0,00	
			999.Jumlah Populasi Ternak Sapi	1347450 Ekor		1321286 Ekor	1327827 Ekor	5.813.159.250,00						1334368 Ekor	0,00	
			999.Jumlah Populasi Ternak Unggas	50488450 Ekor		49508092 Ekor	49753182 Ekor	5.813.159.250,00						49998271 Ekor	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						56.173.500,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Peredaran Sarana Peternakan						56.173.500,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.725.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.448.500,00						4 Laporan	0,00	
	3.27.02.1.01.0009	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Peternakan						25.448.500,00							0,00	
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil peternakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	25.448.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.01.0010	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Peternakan						30.725.000,00							0,00	
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Peternakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	30.725.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						383.827.900,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						383.827.900,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	152.159.900,00						10 Dokumen	0,00	
			Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	0,00	
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						122.240.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	10 Dokumen		10 Dokumen	4 Dokumen	122.240.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.04.0005	Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner	Jumlah Petugas Pengawas Bibit Ternak, Pengawas Mutu Pakan, Paramedik Veteriner, dan Medik Veteriner yang mengikuti pengembangan kapasitas	10 Orang		10 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Orang	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						699.154.625,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						699.154.625,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	95.992.440,00						4 Dokumen	0,00	
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan						45.998.900,00							0,00	
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	45.998.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.06	Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor						64.999.850,00					Toko, Distributor, Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Peredaran Obat Hewan di Tingkat Distributor						64.999.850,00					Toko, Distributor, Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	64.999.850,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	0,00						1 Kasus	0,00	
	3.27.02.1.06.0001	Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan						64.999.850,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	64.999.850,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.06.0002	Penindakan Atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penindakan atas Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan	Jumlah Penyimpangan Penyediaan dan Peredaran Obat Hewan yang Dilakukan Penindakan	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	-	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Kasus	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						5.573.744.672,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Tersedianya bibit/benih ternak yang unggul						5.573.744.672,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	5000 Ekor		5000 Ekor	5000 Ekor	5.498.747.000,00						5000 Ekor	0,00	
			Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	100 Ton		100 Ton	100 Ton	25.000.000,00						100 Ton	0,00	
	3.27.02.1.07.0002	Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						25.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Jumlah Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	100 Ton		100 Ton	10 Ton	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100 Ton	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						5.498.747.000,00							0,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	5000 Ekor		5000 Ekor	15000 Ekor	5.498.747.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5000 Ekor	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
259.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**304.963.300,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Pertanian						***254.988.500,00***							***0,00***	
			999.Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian	75 %		75 %	75 %	254.988.500,00						75 %	0,00	
		Tersedianya Fasilitasi Prasarana Pertanian						281.463.300,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	49.998.600,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	50.000.000,00						2 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	27.999.900,00						10 Unit	0,00	
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	103.490.000,00						1 Dokumen	0,00	
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						103.490.000,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	103.490.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0019	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Peternakan						50.000.000,00							0,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Peternakan	Jumlah prasarana pascapanen peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit		2 Unit	10 Unit	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0024	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan						49.998.600,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan terselenggaranya Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Pos Pemeriksaan Kesehatan Hewan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	49.998.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01.0026	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Peternakan						27.999.900,00							0,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Peternakan	Jumlah prasarana pengolahan hasil peternakan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	10 Unit		10 Unit	4 Unit	27.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-		10 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.02	Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						23.500.000,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Wilayahnya Lebih Dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						23.500.000,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	23.500.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	
	3.27.03.1.02.0001	Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak yang Dilestarikan dan Dimanfaatkan	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.02.0002	Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak						23.500.000,00							0,00	
		Terawasinya Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	Jumlah Pengawasan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	23.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						281.463.300,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Tersedianya Fasilitasi Prasarana Pertanian						281.463.300,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	-		-	10 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
260.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**1.836.849.406,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Status Kesehatan Hewan						***1.156.889.850,00***							***0,00***	
			999.Persentase Ternak Yang Terinfeksi PHMS	4 %		2 %	2 %	1.156.889.850,00						2 %	0,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						746.543.106,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)						746.543.106,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	334.659.300,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah kader zoonosis	100 Orang		100 Orang	100 Orang	15.000.000,00						100 Orang	0,00	
			Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	6 Kasus		0 Kasus	0 Kasus	0,00						6 Kasus	0,00	
			Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	137.058.550,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	10 Wilayah		10 Wilayah	10 Wilayah	97.825.000,00						10 Wilayah	0,00	
	3.27.04.1.01.0003	Penanggulangan Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular						334.659.300,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tertanggulanginya Daerah Terdampak Wabah Penyakit Hewan Menular	Jumlah Daerah Terdampak Wabah yang Terkendali	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	334.659.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.01.0004	Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						97.825.000,00							0,00	
		Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan	10 Wilayah		10 Wilayah	10 Wilayah	97.825.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Wilayah	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.01.0006	Pelaksanaan Manajemen Risiko Zoonosis						12.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya manajemen risiko zoonosis sesuai dengan status zoonosis daerah	Jumlah dokumen pelaksanaan manajemen risiko zoonosis	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.01.0007	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						137.058.550,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Menurunnya kasus penyakit hewan menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	137.058.550,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.01.0008	Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	6 Kasus		0 Kasus	6 Kasus	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		6 Kasus	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.01.0009	Pengelolaan Partisipasi Masyarakat dalam Pengendalian Zoonosis						15.000.000,00							0,00	
		Terbentuknya kader zoonosis	Jumlah kader zoonosis	100 Orang		100 Orang	30 Orang	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100 Orang	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.02	Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						403.906.000,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi						403.906.000,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	65.000.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	38.000.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	300.906.000,00						1 Laporan	0,00	
	3.27.04.1.02.0004	Pengawasan dan Pemeriksaan Kesehatan Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM) di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM						38.000.000,00							0,00	
		Terawasi dan terperiksanya kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	Jumlah pengawasan dan pemeriksaan kesehatan HPM di Perbatasan Tempat Pemeriksan HPM	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	38.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.02.0005	Analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	Jumlah analisis Risiko Penyakit Hewan, zoonosis, produk hewan dan media pembawa penyakit hewan lainnya	2 Laporan		2 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.02.0006	Pengawasan Peredaran Produk Hewan						65.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pengawasan peredaran produk hewan	Jumlah kegiatan pengawasan peredaran produk hewan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	65.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.02.0007	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						300.906.000,00							0,00	
		Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	300.906.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						605.002.800,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						605.002.800,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	50 Orang		0 Orang	50 Orang	0,00						50 Orang	0,00	
			Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	3 Produk		3 Produk	3 Produk	18.000.000,00						3 Produk	0,00	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	30.000.000,00						20 Unit Usaha	0,00	
			Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	0,00						10 Laporan	0,00	
			Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	0,00						20 Unit Usaha	0,00	
			Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	30.000.000,00						20 Unit Usaha	0,00	
			Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	27.043.500,00						10 Unit	0,00	
	3.27.04.1.03.0001	Pemenuhan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit						27.043.500,00							0,00	
		Terpenuhinya Persyaratan Teknis SertifikasiZona/Kompartemen Bebas Penyakit	Jumlah Zona/Kompartemen Bebas Penyakit yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi	10 Unit		10 Unit	10 Unit	27.043.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.03.0002	Pembinaan Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Unit Usaha Produk Hewan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbinanya Unit Usaha Produk Hewan Dalam Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi	Jumlah Unit Usaha Produk Hewan yang Memenuhi Persyaratan Teknis Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner	10 Laporan		10 Laporan	0 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.03.0004	Pendampingan penerapan teknis kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Produk Hewan						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya pendampingan penerapan teknis kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	Jumlah Unit Usaha yang telah dilakukan Pendampingan penerapan teknis Kesejahteraan pada Unit Usaha Produk Hewan	20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Unit Usaha	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.03.0005	Pembinaan Penerapan persyaratan higiene sanitasi pada unit usaha produk hewan						0,00							0,00	
		Terbinanya unit usaha produk hewan dalam penerapan persyaratan higiene sanitasi	Jumlah unit usaha produk hewan yang telah dibina untuk penerapan persyaratan higiene sanitasi	20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	0 Unit Usaha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Unit Usaha	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.03.0006	Pengawasan Unit Usaha Produk Hewan						30.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pengawasan pada unit usaha produk hewan	Jumlah unit usaha produk hewan yang diawasi terhadap penerapan cara yang baik	20 Unit Usaha		20 Unit Usaha	20 Unit Usaha	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Unit Usaha	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.03.0007	Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan Kesejahteraan Hewan						0,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan peningkatan kesadaran masyarakat	Jumlah masyarakat yang mengikuti kegiatan peningkatan kesadaran terhadap Kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan	50 Orang		0 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		50 Orang	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.03.0008	Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan						18.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya kegiatan Pembinaan dan pendampingan Pemenuhan Persyaratan registrasi Produk hewan segar berkemasan	Jumlah produk hewan segar berkemasan yang memenuhi Persyaratan registrasi Produk hewan	3 Produk		3 Produk	10 Produk	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Produk	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.04	Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						25.000.000,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksanan Sertifikasi Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner						25.000.000,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	10 Orang		10 Orang	10 Orang	0,00						10 Orang	0,00	
			Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	25 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	25.000.000,00						25 Dokumen	0,00	
	3.27.04.1.04.0003	Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)						25.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	25 Dokumen		25 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		25 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.04.0004	Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan	Jumlah Petugas Teknis Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan kesejehteraan hewan yang mengikuti pengembangan kompetensi	10 Orang		10 Orang	0 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Orang	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.05	Kesejahteraan Hewan						56.397.500,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya Pemotongan Betina Produktif di RPH/TPH						56.397.500,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1 Kasus		1 Kasus	1 Kasus	0,00						1 Kasus	0,00	
			Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10 Sertifikat		10 Sertifikat	10 Sertifikat	56.397.500,00						10 Sertifikat	0,00	
	3.27.04.1.05.0002	Penanganan atas Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya						0,00							0,00	
		Tertanganinya Pelanggaran Kesejahteraan Hewan sesuai Kewenangannnya	Jumlah Pelanggaran Kesejahteraan Hewan yang Ditangani	1 Kasus		1 Kasus	0 Kasus	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Kasus	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.04.1.05.0003	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)						56.397.500,00							0,00	
		Terkelolanya penerbitan sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	Jumlah sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV)	10 Sertifikat		10 Sertifikat	10 Sertifikat	56.397.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Sertifikat	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
261.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**68.228.000,00**							**0,00**	
		Terkendalinya Wilayah dari Wabah Penyakit Hewan						***68.228.000,00***							***0,00***	
			999.Jumlah Wilayah yang dilakukan pengendalian terhadap wabah penyakit hewan	10 Wilayah		10 Wilayah	10 Wilayah	68.228.000,00						10 Wilayah	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						68.228.000,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						68.228.000,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	68.228.000,00						4 Laporan	0,00	
	3.27.05.1.01.0006	Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan kesehatan hewan						68.228.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	Jumlah kegiatan Penanggulangan Bencana Alam Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	68.228.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
262.	**3.27.06**	**PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN**						**64.349.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Perizinan Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan						***64.349.000,00***							***0,00***	
			999.Jumlah Izin Usaha Peternakan dan Kesehatan Hewan yang diterbitkan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	64.349.000,00						10 Dokumen	0,00	
	3.27.06.1.01	Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						64.349.000,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota						64.349.000,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	64.349.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00						10 Unit	0,00	
	3.27.06.1.01.0004	Sertifikasi unit usaha Pembibitan/Budidaya Ternak						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		terlaksananya sertifikasi penerapan cara pembibitan/budidaya ternak yang baik di unit usaha pembibitan/ budidaya ternak	Jumlah unit usaha pembibitan/budidaya ternak yang mendapatkan sertifikat penerapan cara pembibitan/ budidaya ternak yang baik	10 Unit		10 Unit	10 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Unit	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.06.1.01.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian						64.349.000,00							0,00	
		Terbina dan terawasinya penerapan standar dan izin usaha pertanian	Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	64.349.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Laporan	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
263.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1.189.316.100,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Pengolahan dan Pemasaran Produk Peternakan						***1.189.316.100,00***							***0,00***	
			999.Produk Peternakan yang berhasil dipasarkan	95 %		80 %	85 %	1.189.316.100,00						90 %	0,00	
		Terlaksananya Pameran Produk Hasil Peternakan						1.189.316.100,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	359.316.000,00						4 Dokumen	0,00	
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						359.316.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	359.316.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						1.189.316.100,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Pameran Produk Hasil Peternakan						1.189.316.100,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	-		-	-	830.000.100,00						-	0,00	
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani						830.000.100,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	-		-	25 Kelompok	830.000.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan						0,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kelompok Berbasis Korporasi Peternakan						0,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang mendaptkan pembinaan	-		-	-	0,00						-	0,00	
	3.27.07.1.03.0008	Pembinaan kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang mendaptkan pembinaan	-		-	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Mataram || Kelurahan Punia || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	0,00	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading						**806.640.100,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**806.640.100,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**806.640.100,00**							**0,00**	
264.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**28.583.860.864,39**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***224.854.400,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85.47 Skor		82.22 Skor	83.04 Skor	224.854.400,00						83.85 Skor	0,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						474.980.100,00					-		0,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						474.980.100,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	113.078.200,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	77.159.000,00						4 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.492.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	2.492.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						10.004.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	10.004.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.333.301.134,39					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.333.301.134,39					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.695.800,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.911.800,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						24.997.800,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.997.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						85.040.800,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah						85.040.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.685.000,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						47.526.900,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						47.526.900,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	47.526.900,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.620.100,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.620.100,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	23.383.100,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.536.200,00						12 Dokumen	0,00	
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						9.210.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	9.210.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						456.217.950,00					-		0,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Administrasi Umum Pendapatan Daerah						456.217.950,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.050.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	115.690.000,00						50 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket		55 Paket	55 Paket	38.123.200,00						55 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket		10000 Paket	10000 Paket	23.231.400,00						10000 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	35.460.000,00						25 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	100.574.650,00						25 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.960.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	5 Paket	4.960.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Paket	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	5 Paket	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Paket	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket		55 Paket	10 Paket	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55 Paket	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket		10000 Paket	1000 Paket	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10000 Paket	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.002.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.002.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						10.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	4 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Laporan	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						287.047.600,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah						287.047.600,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.126.420.280,00					-		0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah						5.126.420.280,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	881.099.300,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.779.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.499.480,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						69.999.600,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	69.999.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.859.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.859.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						703.706.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						703.706.000,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	374.810.000,00						6 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	126.000.000,00						40 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	60 Unit	53.046.000,00						60 Unit	0,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Unit	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.880.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	10 Unit	4.880.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						49.950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	49.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
265.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**7.101.795.047,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Hewan						***528.810.700,00***							***0,00***	
			999.Jumlah Populasi Ternak Kambing	521982 Ekor		520055 Ekor	520536 Ekor	528.810.700,00						521018 Ekor	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Jumlah Populasi Ternak Kerbau	99260 Ekor		97333 Ekor	97815 Ekor	528.810.700,00						98296 Ekor	0,00	
			999.Jumlah Populasi Ternak Sapi	1347450 Ekor		1321286 Ekor	1327827 Ekor	528.810.700,00						1334368 Ekor	0,00	
			999.Jumlah Populasi Ternak Unggas	50488450 Ekor		49508092 Ekor	49753182 Ekor	528.810.700,00						49998271 Ekor	0,00	
	3.27.02.1.03	Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi						323.894.500,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan SDG Hewan						323.894.500,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	323.894.500,00						2 Laporan	0,00	
	3.27.02.1.03.0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan						323.894.500,00							0,00	
		Terlaksananya Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu SDG Hewan	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	323.894.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Dompu || Kecamatan Pekat || Desa Sori Tatanga || 1 || Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Laporan	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						383.827.900,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						383.827.900,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	152.159.900,00						10 Dokumen	0,00	
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						4.920.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	10 Dokumen		10 Dokumen	4 Dokumen	4.920.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Dokumen	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						699.154.625,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						699.154.625,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 laporan		12 laporan	12 laporan	478.168.285,00						12 laporan	0,00	
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						199.996.200,00							0,00	
		Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 laporan		12 laporan	12 laporan	199.996.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Bima || Kecamatan Woha || Desa Pandai || 1 || Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 laporan	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						5.573.744.672,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Tersedianya bibit/benih ternak yang unggul						5.573.744.672,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	5000 Ekor		5000 Ekor	5000 Ekor	5.498.747.000,00						5000 Ekor	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.07.0004	Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						0,00							0,00	
		Tersedianya bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah bibit ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	5000 Ekor		5000 Ekor	0 Ekor	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5000 Ekor	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
266.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**304.963.300,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Pertanian						***24.975.000,00***							***0,00***	
			999.Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian	75 %		75 %	75 %	24.975.000,00						75 %	0,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						281.463.300,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Tersedianya Fasilitasi Prasarana Pertanian						281.463.300,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	49.974.800,00						3 Unit	0,00	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						24.975.000,00							0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	24.975.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Sumbawa || Kecamatan Moyo Hilir || Desa Serading || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Unit	0,00	Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading
		Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak						**1.017.472.177,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.017.472.177,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.017.472.177,00**							**0,00**	
267.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**28.583.860.864,39**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***216.147.280,00***							***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85.47 Skor		82.22 Skor	83.04 Skor	216.147.280,00						83.85 Skor	0,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						474.980.100,00					-		0,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						474.980.100,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	113.078.200,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	77.159.000,00						4 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.500.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.333.301.134,39					-		0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangakat Daerah						21.333.301.134,39					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.695.800,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.911.800,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						2.590.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.590.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						85.040.800,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah						85.040.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.685.000,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						47.526.900,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						47.526.900,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	47.526.900,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						7.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.620.100,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.620.100,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	23.383.100,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.536.200,00						12 Dokumen	0,00	
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						5.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						456.217.950,00					-		0,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Administrasi Umum Pendapatan Daerah						456.217.950,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.050.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	115.690.000,00						50 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket		55 Paket	55 Paket	38.123.200,00						55 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket		10000 Paket	10000 Paket	23.231.400,00						10000 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	35.460.000,00						25 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	100.574.650,00						25 Paket	0,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	5 Paket	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Paket	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						19.656.900,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	5 Paket	19.656.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Paket	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.499.900,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket		55 Paket	10 Paket	7.499.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55 Paket	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket		10000 Paket	1000 Paket	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10000 Paket	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						4.991.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	10 Laporan	4.991.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Laporan	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						287.047.600,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah						287.047.600,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.126.420.280,00					-		0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah						5.126.420.280,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	881.099.300,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.779.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.499.480,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.999.480,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.999.480,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						105.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						703.706.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						703.706.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	374.810.000,00						6 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	126.000.000,00						40 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	60 Unit	53.046.000,00						60 Unit	0,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Unit	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						15.410.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	5 Unit	15.410.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
268.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**7.101.795.047,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Asal Hewan						***759.825.097,00***							***0,00***	
			999.Jumlah Populasi Ternak Kambing	521982 Ekor		520055 Ekor	520536 Ekor	759.825.097,00						521018 Ekor	0,00	
			999.Jumlah Populasi Ternak Kerbau	99260 Ekor		97333 Ekor	97815 Ekor	759.825.097,00						98296 Ekor	0,00	
			999.Jumlah Populasi Ternak Sapi	1347450 Ekor		1321286 Ekor	1327827 Ekor	759.825.097,00						1334368 Ekor	0,00	
			999.Jumlah Populasi Ternak Unggas	50488450 Ekor		49508092 Ekor	49753182 Ekor	759.825.097,00						49998271 Ekor	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.02.1.04	Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						383.827.900,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						383.827.900,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	152.159.900,00						10 Dokumen	0,00	
			Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 laporan		2 laporan	2 laporan	231.668.000,00						2 laporan	0,00	
	3.27.02.1.04.0001	Pemberian Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						24.999.900,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah Bimbingan Peningkatan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	10 Dokumen		10 Dokumen	1 Dokumen	24.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Dokumen	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.02.1.04.0004	Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi						231.668.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Produksi Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	2 laporan		2 laporan	2 laporan	231.668.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 laporan	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.02.1.05	Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						699.154.625,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan Kewenangan Provinsi						699.154.625,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 laporan		12 laporan	12 laporan	478.168.285,00						12 laporan	0,00	
			Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	95.992.440,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	124.993.900,00						4 Laporan	0,00	
	3.27.02.1.05.0003	Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak						124.993.900,00							0,00	
		Terawasinya Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	Jumlah Pengawasan Peredaran Benih/Bibit Ternak yang Beredar dan Bersertifikat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	124.993.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Laporan	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.02.1.05.0004	Pengendalian Penyediaan dan Produksi Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak						278.172.085,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya penyediaan dan produksi benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia dan yang diproduksi	12 laporan		12 laporan	12 laporan	278.172.085,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 laporan	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.02.1.05.0005	Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan HPT, Bahan Pakan, Pakan						49.993.540,00							0,00	
		Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan	Jumlah benih/bibit ternak dan HPT, bahan pakan, pakan yang beredar	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	49.993.540,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Dokumen	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
	3.27.02.1.07	Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						5.573.744.672,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Tersedianya bibit/benih ternak yang unggul						5.573.744.672,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	100 Dosis		100 Dosis	100 Dosis	49.997.672,00						100 Dosis	0,00	
	3.27.02.1.07.0003	Pengadaan Benih Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain						49.997.672,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	Jumlah benih ternak yang sumbernya dari daerah provinsi lain	100 Dosis		100 Dosis	100 Dosis	49.997.672,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		100 Dosis	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
269.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**304.963.300,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Pertanian						***24.999.800,00***							***0,00***	
			999.Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian	75 %		75 %	75 %	24.999.800,00						75 %	0,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						281.463.300,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Tersedianya Fasilitasi Prasarana Pertanian						281.463.300,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	49.974.800,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah laboratorium benih ternak yang dibangun dan dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						24.999.800,00							0,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	1 Unit	24.999.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Unit	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.03.1.01.0022	Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Benih atau Balai Benih Ternak Tingkat Provinsi (BIBD Provinsi)						0,00							0,00	
		Terbangun dan terpeliharanya laboratorium benih atau balai benih ternak	Jumlah laboratorium benih ternak yang dibangun dan dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Balai Inseminasi Buatan dan Pengembangan Pakan Ternak
		Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)						**912.179.756,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**912.179.756,00**							**0,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**912.179.756,00**							**0,00**	
270.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**28.583.860.864,39**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***244.220.200,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85.47 Skor		82.22 Skor	83.04 Skor	244.220.200,00						83.85 Skor	0,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						474.980.100,00					-		0,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						474.980.100,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	113.078.200,00						3 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	77.159.000,00						4 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						2.492.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	2.492.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						2.480.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.480.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						21.333.301.134,39					-		0,00	
		Terlaksananya Pelayanan Administrasi Keuangan Perangakat Daerah						21.333.301.134,39					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	208.695.800,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	26.911.800,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						24.999.600,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	24.999.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						2.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						85.040.800,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah						85.040.800,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	68.685.000,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						15.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						47.526.900,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						47.526.900,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	47.526.900,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						7.499.900,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	7.499.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.620.100,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						69.620.100,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	23.383.100,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	23.536.200,00						12 Dokumen	0,00	
	3.27.01.1.05.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian						5.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						3.000.400,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	3.000.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						456.217.950,00					-		0,00	
		Tersedianya Dokumen Laporan Administrasi Umum Pendapatan Daerah						456.217.950,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	60.050.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	50 Laporan	115.690.000,00						50 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket		55 Paket	55 Paket	38.123.200,00						55 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket		10000 Paket	10000 Paket	23.231.400,00						10000 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	35.460.000,00						25 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	100.574.650,00						25 Paket	0,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						3.020.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	5 Paket	3.020.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Paket	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	5 Paket	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		25 Paket	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.500.600,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	55 Paket		55 Paket	10 Paket	7.500.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		55 Paket	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	10000 Paket		10000 Paket	1000 Paket	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10000 Paket	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.998.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	4.998.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						4.999.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Laporan		50 Laporan	10 Laporan	4.999.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Laporan	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						287.047.600,00					-		0,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah						287.047.600,00					-		0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.126.420.280,00					-		0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa penunjang urusan pemerintah daerah						5.126.420.280,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	881.099.300,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.779.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.499.480,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						124.999.700,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	124.999.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						2.920.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.920.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						703.706.000,00					-		0,00	
		Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah						703.706.000,00					-		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	374.810.000,00						6 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	40 Unit	126.000.000,00						40 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	60 Unit	53.046.000,00						60 Unit	0,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	40 Unit		40 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		40 Unit	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						4.836.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	60 Unit		60 Unit	5 Unit	4.836.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		60 Unit	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						24.975.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	24.975.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
271.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**304.963.300,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Pemanfaatan Prasarana Pertanian						***0,00***							***0,00***	
			999.Tingkat Kemanfaatan Prasarana Pertanian	75 %		75 %	75 %	0,00						75 %	0,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						281.463.300,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Tersedianya Fasilitasi Prasarana Pertanian						281.463.300,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	49.974.800,00						3 Unit	0,00	
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Unit	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.03.1.01.0012	Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet						0,00							0,00	
		Terbangun, terehabilitasi, terpelihara, dan Terselenggaranya Laboratorium Keswan dan Kesmavet	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, Pemeliharaan, dan Penyelenggaraan Laboratorium Keswan dan Kesmavet	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.03.1.01.0021	Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan						0,00							0,00	
		Terbangunnya, terehabilitasi yang terpeliharanya Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	Jumlah Pembangunan, rehabilitasi, dan Pemeliharaan Rumah Sakit Hewan, Klinik Hewan, Ambulatori, Praktik Dokter Hewan Mandiri/Puskeswan Mandiri, atau Tempat Pelayanan Paramedik veteriner Keswan	1 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
272.	**3.27.04**	**PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER**						**1.836.849.406,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Status Kesehatan Hewan						***649.959.556,00***							***0,00***	
			999.Persentase Ternak Yang Terinfeksi PHMS	4 %		2 %	2 %	649.959.556,00						2 %	0,00	
	3.27.04.1.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						746.543.106,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)						746.543.106,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.256,00						12 Laporan	0,00	
	3.27.04.1.01.0005	Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan						150.000.256,00							0,00	
		Terlayaninya Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner Rumah Sakit Hewan dan Klinik Hewan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	150.000.256,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
	3.27.04.1.03	Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						605.002.800,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/ Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan						605.002.800,00					Kelompok Tani Ternak, Petugas dan Masyarakat		0,00	
			Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	499.959.300,00						6 Dokumen	0,00	
	3.27.04.1.03.0003	Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner						499.959.300,00							0,00	
		Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	499.959.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		6 Dokumen	0,00	Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV)
		Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan						**123.324.270.403,00**							**129.429.455.105,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**5.405.600.000,00**							**4.918.449.708,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**5.405.600.000,00**							**4.918.449.708,00**	
273.	**2.09.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN**						**500.000.000,00**							**834.300.000,00**	
		meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan						***500.000.000,00***							***834.300.000,00***	
			999.Persentase Jumlah Cadangan Pangan Masyarakat	40 %		20 %	25 %	500.000.000,00						30 %	834.300.000,00	
	2.09.02.1.01	Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi						500.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		834.300.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Infrastruktur Kemandirian Pangan						500.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		834.300.000,00	
			Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	5 Unit		2 Unit	3 Unit	500.000.000,00						3 Unit	834.300.000,00	
	2.09.02.1.01.0003	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya						500.000.000,00							834.300.000,00	
		Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	5 Unit		2 Unit	3 Unit	500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Unit	834.300.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
274.	**2.09.03**	**PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT**						**3.455.600.000,00**							**1.615.493.458,00**	
		Meningkatnya Ketersediaan Pangan Strategis						***360.600.000,00***							***405.000.000,00***	
			999.Angka Ketersediaan Energi	6891.7 Kkal/ Kapita/Hari		6492.12 Kkal/ Kapita/Hari	6590.15 Kkal/ Kapita/Hari	75.000.000,00						6689.66 Kkal/ Kapita/Hari	75.000.000,00	
			999.Angka Ketersediaan Protein	181.18 Gram/ Kapita/Hari		162.38 Gram/ Kapita/Hari	166.83 Gram/ Kapita/Hari	75.000.000,00						171.4 Gram/ Kapita/Hari	75.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal						385.600.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		480.000.000,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Informasi Pasokan dan Harga Komoditas Pangan Pokok						385.600.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		480.000.000,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
		Tersedinaya Informasi Analisis Ketersediaan Pangan						385.600.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		480.000.000,00	
			Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00						1 Dokumen	25.000.000,00	
			Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	2.09.03.1.01.0013	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)						50.000.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Neraca Bahan Makanan (NBM)	Informasi Neraca Bahan Makanan (NBM)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.01.0015	Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Provinsi	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swa sembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	25.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Nilai Asupan Kecukupan Gizi Masyarakat						***690.600.000,00***							***850.493.458,00***	
			999. Angka Konsumsi Energi	2100 Kkal/Kapita/Hari		2292.5 Kkal/Kapita/Hari	2228.3 Kkal/Kapita/Hari	390.600.000,00						2164.2 Kkal/Kapita/Hari	620.493.458,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Angka Konsumsi Protein	57 Gram/Kapita/Hari		66.60 Gram/Kapita/Hari	63.4 Gram/Kapita/Hari	390.600.000,00						60.2 Gram/Kapita/Hari	620.493.458,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal						385.600.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		480.000.000,00	
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.600.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Pasokan dan Harga Komoditas Pangan Pokok						385.600.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		480.000.000,00	
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.600.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
		Tersedinaya Informasi Analisis Ketersediaan Pangan						385.600.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		480.000.000,00	
			Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.600.000,00						1 Laporan	100.000.000,00	
			Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	2.09.03.1.01.0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal yang Tersedia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.01.0007	Pengembangan usaha Pengolahan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						35.600.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	Jumlah laporan Pengembangan usaha pengolahan pangan berbasis sumber daya lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	35.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.04	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi Melalui Media Provinsi						355.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		520.493.458,00	
		Terlaksananya Percepatan Penganekeragaman Konsumsi Pangan						355.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		520.493.458,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	330.000.000,00						1 Laporan	445.493.458,00	
			Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
	2.09.03.1.04.0001	Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal						0,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	Jumlah Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	2.09.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)						330.000.000,00							445.493.458,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Advokasi, Edukasi, dan Sosialisasi Konsumsi Pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	330.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	445.493.458,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.04.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi						25.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi dalam pencapaian Skor Pola Pangan Harapan Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Meningkatnya Stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah (CPPD) Provinsi						***2.715.000.000,00***							***590.000.000,00***	
			999.Rasio Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah (CBPD) terhadap jumlah CBPD	100 %		65.58 %	76.77 %	2.715.000.000,00						88.05 %	590.000.000,00	
	2.09.03.1.02	Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi						2.715.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		590.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan dan Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Provinsi						2.715.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		590.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	235.000.000,00						1 Laporan	25.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	90 Ton		30 Ton	40 Ton	2.470.000.000,00						40 Ton	525.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	20 Ton		20 Ton	20 Ton	10.000.000,00						20 Ton	40.000.000,00	
	2.09.03.1.02.0006	Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						10.000.000,00							40.000.000,00	
		Terlaksananya penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	20 Ton		20 Ton	20 Ton	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		20 Ton	40.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.02.0007	Pengadaaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						2.470.000.000,00							525.000.000,00	
		Terlaksananya pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	90 Ton		30 Ton	40 Ton	2.470.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		40 Ton	525.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.02.0008	Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi						235.000.000,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	Jumlah Koordinasi Penyelenggaran Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	235.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tertanganinya Fluktuasi Harga Komoditas Pangan Pokok Strategis						***360.600.000,00***							***405.000.000,00***	
			999.Nilai Koefisien Variasi Komoditas Pangan Pokok Strategis Bawang Merah	30 %		30 %	30 %	250.000.000,00						30 %	305.000.000,00	
			999.Nilai Koefisien Variasi Komoditas Pangan Pokok Strategis Beras	5 %		5 %	5 %	250.000.000,00						5 %	305.000.000,00	
			999.Nilai Koefisien Variasi Komoditas Pangan Pokok Strategis Cabai Rawit Merah	25 %		25 %	25 %	250.000.000,00						25 %	305.000.000,00	
			999.Nilai Koefisien Variasi Komoditas Pangan Pokok Strategis Telur Ayam Ras	5 %		5 %	5 %	250.000.000,00						5 %	305.000.000,00	
	2.09.03.1.01	Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan						385.600.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		480.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Bahan Pangan Lokal						385.600.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		480.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	230.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Pasokan dan Harga Komoditas Pangan Pokok						385.600.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		480.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	230.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
		Tersedinaya Informasi Analisis Ketersediaan Pangan						385.600.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		480.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00						1 Laporan	230.000.000,00	
			Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	50.000.000,00	
	2.09.03.1.01.0008	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan pokok strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan pokok strategis	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	50.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.01.0009	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi						250.000.000,00							230.000.000,00	
		Terlaksananya Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provinsi	Jumlah kegiatan Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Provins	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	230.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.03.1.03	Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat						0,00					-		25.000.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat						0,00					-		25.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	25.000.000,00	
	2.09.03.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal						0,00							25.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	25.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
275.	**2.09.04**	**PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN**						**1.300.000.000,00**							**2.203.556.250,00**	
		meningkatnya penanganan kerawanan pangan						***1.300.000.000,00***							***2.203.556.250,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	0 %		3.42 %	2.56 %	1.300.000.000,00						1.71 %	2.203.556.250,00	
	2.09.04.1.01	Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi						100.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		100.000.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Kewenangan Provinsi						100.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		100.000.000,00	
			Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
	2.09.04.1.01.0001	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan Provinsi yang Dimutakhirkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.04.1.02	Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						1.200.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		2.103.556.250,00	
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						1.200.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		2.103.556.250,00	
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	614.181.250,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000.000,00						1 Dokumen	1.389.375.000,00	
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
		Terlaksananya Koodinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan Provinsi						1.200.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		2.103.556.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	614.181.250,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000.000,00						1 Dokumen	1.389.375.000,00	
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
		Terlaksananya Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Provinsi						1.200.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		2.103.556.250,00	
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	614.181.250,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000.000,00						1 Dokumen	1.389.375.000,00	
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi						1.200.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		2.103.556.250,00	
			Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	614.181.250,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	30.000.000,00	
			Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000.000,00						1 Dokumen	1.389.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
	2.09.04.1.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						1.150.000.000,00							1.389.375.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan Yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan Pada Kerawanan Pangan yang Mencakup Lebih Dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	1.389.375.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.04.1.02.0003	Pelaksanaan Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi						0,00							614.181.250,00	
		Terlaksananya Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	Jumlah Intervensi Kewaspadaan Pangan dan Gizi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	614.181.250,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.04.1.02.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi						50.000.000,00							30.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	30.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.04.1.02.0005	Penyusunan Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi						0,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	Jumlah Peta Situasi Kewaspadaan Pangan dan Gizi Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	70.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
276.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**350.000.000,00**							**690.100.000,00**	
		Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Post Market dan Pre Market						***150.000.000,00***							***265.100.000,00***	
			999.Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan Post Market	100 %		100 %	100 %	150.000.000,00						100 %	265.100.000,00	
			999.Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan Pre Market	75 %		55 %	60 %	150.000.000,00						65 %	265.100.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		690.100.000,00	
		Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Post Market						350.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		690.100.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	170.100.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	95.000.000,00	
		Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Pre Market						350.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		690.100.000,00	
			Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	170.100.000,00	
			Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	95.000.000,00	
	2.09.05.1.01.0008	Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00							170.100.000,00	
		Penerbitan Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rekomendasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang diterbitkan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	170.100.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	2.09.05.1.01.0010	Penyediaan sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						50.000.000,00							95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sarana dan prasarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	95.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**117.918.670.403,00**							**124.511.005.397,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**117.918.670.403,00**							**124.511.005.397,00**	
277.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**58.134.543.698,00**							**70.651.854.338,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***52.257.171.403,00***							***64.777.728.338,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.63 Skor		80.83 Skor	81.03 Skor	52.257.171.403,00						81.23 Skor	64.777.728.338,00	
	3.27.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						614.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.957.625.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Evaluasi dan Data Statisik Sektoral						614.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.957.625.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	150.000.000,00						3 Data	1.422.600.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00						1 Dokumen	33.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	89.606.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00						1 Dokumen	33.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	57.969.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	58.150.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00						2 Laporan	88.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00						12 Laporan	175.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pengganggaran dan Evaluasi						614.000.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.957.625.000,00	
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	150.000.000,00						3 Data	1.422.600.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00						1 Dokumen	33.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00						2 Dokumen	89.606.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00						1 Dokumen	33.150.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	57.969.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	58.150.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00						2 Laporan	88.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00						12 Laporan	175.000.000,00	
	3.27.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						80.000.000,00							89.606.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Dokumen	89.606.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						50.000.000,00							58.150.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	58.150.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						50.000.000,00							57.969.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	57.969.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						8.000.000,00							33.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	33.150.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						11.000.000,00							33.150.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	33.150.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						80.000.000,00							88.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Laporan	88.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	7 Laporan		7 Laporan	2 Laporan	80.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		7 Laporan	88.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						185.000.000,00							175.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Laporan	175.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	22 Laporan		22 Laporan	12 Laporan	185.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		22 Laporan	175.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah						150.000.000,00							1.422.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	3 Data		3 Data	3 Data	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		3 Data	1.422.600.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					Pemerintah dan Masyarakat		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00						1 Laporan	18.512.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/ Bulan		399 Orang/ Bulan	399 Orang/ Bulan	48.110.149.403,00						399 Orang/ Bulan	52.248.429.338,00	
		Meningkatnya Realisasi Serapan Anggaran						48.258.911.403,00					Pemerintah dan Masyarakat		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	11.000.000,00						1 Laporan	18.512.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/ Bulan		399 Orang/ Bulan	399 Orang/ Bulan	48.110.149.403,00						399 Orang/ Bulan	52.248.429.338,00	
	3.27.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						48.110.149.403,00							52.248.429.338,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan		47 Orang/ Bulan	446 Orang/ Bulan	48.110.149.403,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		47 Orang/ Bulan	52.248.429.338,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	99 Orang/ Bulan		399 Orang/ Bulan	446 Orang/ Bulan	48.110.149.403,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		399 Orang/ Bulan	52.248.429.338,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						100.000.000,00							128.335.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	128.335.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						11.000.000,00							18.512.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Laporan	18.512.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	11.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	18.512.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5.000.000,00							7.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	7.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						15.510.000,00							11.025.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	15.510.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		14 Laporan	11.025.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		15.000.000,00	
		Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					-		15.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0 Paket	399 Paket	0,00						Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00						2 Orang	15.000.000,00	
	3.27.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Paket		0 Paket	399 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Paket	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	15.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						706.784.280,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.460.284.000,00	
		Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7.200.000,00						5 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	23.525.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	21.025.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.761.000,00						1 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	52.840.500,00						7 Paket	81.075.000,00	
		Tersedianya Informasi Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7.200.000,00						5 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	23.525.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	21.025.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	60.761.000,00						6 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.000.000,00							42.075.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Paket	42.075.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		7 Paket	42.075.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						35.000.000,00							33.331.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		7 Paket	33.331.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	33.331.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						35.000.000,00							53.100.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		7 Paket	53.100.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	35.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	53.100.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						7.200.000,00							13.525.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	13.525.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		5 Dokumen	13.525.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						50.000.000,00							48.563.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		6 Laporan	48.563.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	48.563.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						350.000.000,00							466.515.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		7 Laporan	466.515.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	466.515.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						10.000.000,00							16.025.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	16.025.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Dokumen	16.025.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							18.525.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Dokumen	18.525.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	18.525.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						668.299.000,00					-		4.885.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pengedaan Barang Milik Daerah						668.299.000,00					-		4.885.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00						1 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	4.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	277.000.000,00						1 Unit	135.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit		1 Unit	1 Unit	241.299.000,00						35 Unit	425.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah						668.299.000,00					-		4.885.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	150.000.000,00						4 Paket	150.000.000,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						1 Unit	4.000.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	5 Unit	0,00						5 Unit	175.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	277.000.000,00						2 Unit	135.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	4 Unit	241.299.000,00						4 Unit	425.000.000,00	
	3.27.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5 Unit		1 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	175.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						150.000.000,00							150.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	1 Paket	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	150.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						277.000.000,00							135.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	3 Unit	277.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Unit	135.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	3 Unit	277.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	135.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							4.000.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	4.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						151.000.000,00							335.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	5 Unit	151.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	335.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit		1 Unit	5 Unit	151.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	335.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	738.231.600,00						2 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	6.473.356.415,00						7 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	738.231.600,00						7 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	0,00						7 Laporan	16.000.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	8.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	8.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						172.900.000,00							431.902.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	172.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	431.902.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	172.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	431.902.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.072.412.000,00							2.276.616.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	2.072.412.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	2.276.616.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.072.412.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	2.276.616.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0 Unit	0 Unit	275.000.000,00						1 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	133.275.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		188 Unit	188 Unit	22.630.000,00						188 Unit	421.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0 Unit	0 Unit	275.000.000,00						1 Unit	2.000.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	11 Unit	25.000.000,00						11 Unit	133.275.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		188 Unit	188 Unit	22.630.000,00						188 Unit	421.300.000,00	
	3.27.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							133.275.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	11 Unit		11 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		11 Unit	133.275.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	133.275.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						167.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	0 Unit	167.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		134 Unit	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						10.000.000,00							113.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	9 Unit	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	113.500.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		188 Unit	9 Unit	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		188 Unit	113.500.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						275.000.000,00							2.000.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit		0 Unit	1 Unit	275.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	275.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	2.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					Pemerintah dan Masyarakat		52.460.636.338,00	
		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					Pemerintah dan Masyarakat		52.460.636.338,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	5.000.000,00	
		Meningkatnya Realisasi Serapan Anggaran						48.258.911.403,00					Pemerintah dan Masyarakat		52.460.636.338,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00						4 Laporan	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						5.000.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Laporan	5.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						77.331.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		105.825.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	13.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	13.000.000,00	
	3.27.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						0,00							13.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Laporan	13.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.460.284.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.000.000,00						2 Paket	12.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					Pemerintah dan Masyarakat		1.460.284.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	25.000.000,00						2 Paket	12.000.000,00	
	3.27.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						25.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Paket	12.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	20.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	20.000.000,00	
	3.27.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	20.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
278.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**24.767.723.000,00**							**25.518.249.059,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian						***23.171.132.000,00***							***22.175.127.059,00***	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura	1.08 Persentase		1.02 Persentase	1.04 Persentase	23.171.132.000,00						1.06 Persentase	22.175.127.059,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan	0.28 %		0.24 %	0.25 %	23.171.132.000,00						0.26 %	22.175.127.059,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0.61 Persentase		0.57 Persentase	0.58 Persentase	23.171.132.000,00						0.59 Persentase	22.175.127.059,00	
	3.27.02.1.01	Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						22.941.132.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		11.351.634.059,00	
		Jumlah Pengawasan Peredaran dan Penyediaan Sarana Pertanian						22.941.132.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		11.351.634.059,00	
			Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	75.000.000,00	
			Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.553.632.000,00						1 Laporan	7.023.934.059,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan		1 laporan	1 laporan	5.000.000,00						1 laporan	775.000.000,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	2.217.500.000,00						1 laporan	1.539.000.000,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	5.000.000,00						1 laporan	100.000.000,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan		0 laporan	1 laporan	5.000.000,00						1 laporan	100.000.000,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	5.000.000,00						1 laporan	1.474.000.000,00	
			Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan		1 laporan	laporan	75.000.000,00						laporan	264.700.000,00	
	3.27.02.1.01.0001	Pengawasan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian						20.553.632.000,00							7.023.934.059,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pengawasan Ketersediaan dan Sebaran Pupuk, Pestisida, Alsintan, dan Sarana Pendukung Pertanian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.553.632.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	7.023.934.059,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian						75.000.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	75.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.01.0003	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Perkebunan						2.217.500.000,00							1.539.000.000,00	
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen Perkebunan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	2.217.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 laporan	1.539.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.01.0004	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Tanaman Pangan						5.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen tanaman pangan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.01.0005	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Perkebunan						5.000.000,00							1.474.000.000,00	
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil Perkebunan	1 laporan		1 laporan	1 laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 laporan	1.474.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.01.0006	Pengawasan Sebaran Sarana Pascapanen Hortikultura						5.000.000,00							775.000.000,00	
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pascapanen hortikultura	1 laporan		1 laporan	1 laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 laporan	775.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.01.0007	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Hortikultura						5.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil hortikultura	1 laporan		0 laporan	1 laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 laporan	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.01.0008	Pengawasan Sebaran Sarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan						75.000.000,00							264.700.000,00	
		Terawasinya ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	Jumlah pengawasan ketersediaan dan sebaran sarana pengolahan hasil tanaman pangan	laporan		1 laporan	1 laporan	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		laporan	264.700.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						1.826.591.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		14.166.615.000,00	
		Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						1.826.591.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		14.166.615.000,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	7.150.000.000,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00						1 Laporan	226.463.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00						1 Laporan	3.642.030.000,00	
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan						100.000.000,00							196.463.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	196.463.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura						20.000.000,00							7.120.000.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	7.120.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan						200.000.000,00							3.607.030.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	3.607.030.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
279.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**42.009.169.000,00**							**40.527.321.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						***41.759.367.000,00***							***36.300.000.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	6.18 %		8.21 %	7.59 %	41.759.367.000,00						7.05 %	36.300.000.000,00	
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	66.80 Persentase		64.19 Persentase	64.84 Persentase	41.759.367.000,00						65.49 Persentase	36.300.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		40.527.321.000,00	
		Jumlah Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					Pemerintah dan Masyarakat		40.527.321.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.176.000.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.950.167.000,00						1 Dokumen	17.950.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.168.200.000,00						1 Dokumen	13.500.000.000,00	
			Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.560.000.000,00						1 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	3.270.000.000,00						10 Unit	2.100.000.000,00	
			Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	300.000.000,00						2 Unit	300.000.000,00	
			Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00						2 Unit	500.000.000,00	
			Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	200.000.000,00	
			Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	10.000.000,00						2 Dokumen	1.000.000.000,00	
			Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	237240 Ha		Ha	237240 Ha	100.000.000,00						237240 Ha	100.000.000,00	
			Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
	3.27.03.1.01.0001	Perencanaan Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian						10.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Tersusunnya Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	Jumlah Rencana Pengembangan Prasarana, Kawasan dan Komoditas Pertanian	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Dokumen	1.000.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jalan Usaha Tani						24.950.167.000,00							17.950.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jalan Usaha Tani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.950.167.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	17.950.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani						9.168.200.000,00							13.500.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Pengelolaan Jaringan Irigasi di Tingkat Usaha Tani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	9.168.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	13.500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0009	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya						2.176.000.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi dan Penataan Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.176.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	400.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0011	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Hortikultura						300.000.000,00							300.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Hortikultura	Jumlah prasarana pengolahan hasil hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Unit	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0013	Pengendalian dan Pemanfaatan Kawasan Pertanian						100.000.000,00							100.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya kawasan pertanian	Luas kawasan pertanian yang termanfaatkan	237240 Ha		Ha	237240 Ha	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		237240 Ha	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0014	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Hortikultura						1.560.000.000,00							300.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Hortikultura	Jumlah prasarana pascapanen hortikultura yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.560.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0015	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan secara numerik dan spasial di tingkat provinsi						75.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Ditetapkannya Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Penetapan Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0016	Penyusunan Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi						150.000.000,00							250.000.000,00	
		Tersusunnya Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	Peta Kawasan, Lahan dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0017	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Perkebunan						3.270.000.000,00							2.100.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Perkebunan	Jumlah prasarana pascapanen perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	10 Unit		10 Unit	10 Unit	3.270.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		10 Unit	2.100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0018	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi						100.000.000,00							100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di tingkat Provinsi	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola di tingkat Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0020	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Perkebunan						100.000.000,00							500.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Perkebunan	Jumlah prasarana pengolahan hasil perkebunan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Unit	500.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0023	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pascapanen Tanaman Pangan						0,00							300.000.000,00	
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pascapanen Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pascapanen tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Unit	300.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
	3.27.03.1.01.0025	Pengendalian dan Pemanfaatan Prasarana Pengolahan Hasil Tanaman Pangan						0,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendali dan termanfaatkannya prasarana pengolahan hasil Tanaman Pangan	Jumlah prasarana pengolahan hasil tanaman pangan yang dikendalikan dan dimanfaatkan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	200.000.000,00	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
		Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)						**1.833.239.895,00**							**8.385.080.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.833.239.895,00**							**8.385.080.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.833.239.895,00**							**8.385.080.000,00**	
280.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**58.134.543.698,00**							**70.651.854.338,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***619.428.195,00***							***715.244.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.63 Skor		80.83 Skor	81.03 Skor	619.428.195,00						81.23 Skor	715.244.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
		Meningkatnya Realisasi Serapan Anggaran						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						6.842.000,00							6.840.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.842.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	6.840.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.520.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.500.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						7.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	5.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
		Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	23.525.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	21.025.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.761.000,00						1 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
		Tersedianya Informasi Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	23.525.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	21.025.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.761.000,00						1 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.794.500,00							5.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	5.794.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	5.500.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	5.794.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	5.500.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.932.380,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	9.932.380,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	9.932.380,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	25.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.999.900,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	4.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	25.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	4.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	25.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	7.500.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.500.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						4.961.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.961.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	4.961.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	5.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	150.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	150.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	5.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	5.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	738.231.600,00						2 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	738.231.600,00						2 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	1.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	1.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						125.800.000,00							125.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	125.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	125.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	125.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	125.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						433.078.415,00							251.904.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	433.078.415,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	251.904.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	433.078.415,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	251.904.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	22.630.000,00						10 Unit	421.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	22.630.000,00						10 Unit	421.300.000,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	56 Unit	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		134 Unit	100.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		188 Unit	53 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		188 Unit	35.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	53 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	35.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
281.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**42.009.169.000,00**							**40.527.321.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						***0,00***							***1.050.000.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	6.18 %		8.21 %	7.59 %	0,00						7.05 %	1.050.000.000,00	
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	66.80 Persentase		64.19 Persentase	64.84 Persentase	0,00						65.49 Persentase	1.050.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					-		40.527.321.000,00	
		Jumlah Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					-		40.527.321.000,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	49.802.000,00						6 Unit	3.277.321.000,00	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						0,00							1.050.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	7 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	1.050.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
282.	**3.27.05**	**PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN**						**1.213.811.700,00**							**6.579.836.000,00**	
		Meningkatnya pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian						***1.213.811.700,00***							***6.579.836.000,00***	
			999.Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	73.67 %		70.79 %	71.50 %	1.213.811.700,00						72.22 %	6.579.836.000,00	
			999.Persentase Luas areal pengendalian dan penanggulangan bencana Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	85.97 %		82.61 %	83.44 %	1.213.811.700,00						84.27 %	6.579.836.000,00	
			999.Persentase Penurunan Emisi GRK	20.68 Persentase		15.31 Persentase	17.1 Persentase	1.213.811.700,00						18.89 Persentase	6.579.836.000,00	
	3.27.05.1.01	Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi						1.213.811.700,00					-		6.579.836.000,00	
		Jumlah Laporan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman dan Penanganan Dampak Perubahan Iklim						1.213.811.700,00					-		6.579.836.000,00	
			Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	75 Ha		75 Ha	75 Ha	50.104.000,00						75 Ha	826.525.000,00	
			Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3 Ha		0 Ha	3 Ha	0,00						3 Ha	450.000.000,00	
			Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	19060 Ha		14320 Ha	15751 Ha	1.163.707.700,00						17327 Ha	5.303.311.000,00	
	3.27.05.1.01.0001	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						1.163.707.700,00							5.303.311.000,00	
		Terkendalinya Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	19060 Ha		14320 Ha	15751 Ha	1.163.707.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-		17327 Ha	5.303.311.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.05.1.01.0002	Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						50.104.000,00							826.525.000,00	
		Tertanganinya Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Area Terdampak Perubahan Iklim Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Ditangani	75 Ha		75 Ha	75 Ha	50.104.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		75 Ha	826.525.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
	3.27.05.1.01.0003	Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan						0,00							450.000.000,00	
		Terlaksananya Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luasan Pencegahan, Penanganan Kebakaran Lahan, dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	3 Ha		0 Ha	3 Ha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Ha	450.000.000,00	Balai Perlindungan Tanaman Pertanian (BPTP)
		Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)						**1.447.945.500,00**							**1.355.738.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.447.945.500,00**							**1.355.738.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.447.945.500,00**							**1.355.738.000,00**	
283.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**58.134.543.698,00**							**70.651.854.338,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***1.235.445.500,00***							***755.738.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.63 Skor		80.83 Skor	81.03 Skor	1.235.445.500,00						81.23 Skor	755.738.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
		Meningkatnya Realisasi Serapan Anggaran						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						5.000.000,00							13.680.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	13.680.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.500.000,00							4.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	4.500.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						7.500.000,00							11.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	11.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
		Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.761.000,00						1 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
		Tersedianya Informasi Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.761.000,00						1 Laporan	84.588.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	10.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	10.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.000.000,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	40.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	40.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							7.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	7.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	7.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.500.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	7.500.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	5.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							30.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	30.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						668.299.000,00					-		4.885.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pengedaan Barang Milik Daerah						668.299.000,00					-		4.885.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit		1 Unit	1 Unit	241.299.000,00						35 Unit	425.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah						668.299.000,00					-		4.885.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit		1 Unit	1 Unit	241.299.000,00						35 Unit	425.000.000,00	
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	30.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	30.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	738.231.600,00						2 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	738.231.600,00						2 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	2.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	2.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						100.000.000,00							97.994.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	97.994.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	97.994.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.065.445.500,00							376.464.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	1.065.445.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	376.464.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1.065.445.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	376.464.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	22.630.000,00						10 Unit	421.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	22.630.000,00						10 Unit	421.300.000,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.000.000,00							100.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	15 Unit	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		134 Unit	100.600.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.500.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	9 Unit	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	50.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		188 Unit	9 Unit	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		188 Unit	50.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
284.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**24.767.723.000,00**							**25.518.249.059,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian						***130.000.000,00***							***440.000.000,00***	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura	1.08 Persentase		1.02 Persentase	1.04 Persentase	130.000.000,00						1.06 Persentase	440.000.000,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan	0.28 %		0.24 %	0.25 %	130.000.000,00						0.26 %	440.000.000,00	
			999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0.61 Persentase		0.57 Persentase	0.58 Persentase	130.000.000,00						0.59 Persentase	440.000.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						1.826.591.000,00					-		14.166.615.000,00	
		Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						1.826.591.000,00					-		14.166.615.000,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00						1 Laporan	7.150.000.000,00	
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	130.000.000,00						1 Laporan	226.463.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	230.000.000,00						1 Laporan	3.642.030.000,00	
			Jumlah Sertifikat Benih	280 Sertifikat		265 Sertifikat	270 Sertifikat	100.000.000,00						272 Sertifikat	375.000.000,00	
	3.27.02.1.02.0001	Pengelolaan Penerbitan Sertifikat Benih						100.000.000,00							375.000.000,00	
		Terkelolanya Penerbitan Sertifikat Benih	Jumlah Sertifikat Benih	280 Sertifikat		265 Sertifikat	11 Sertifikat	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		272 Sertifikat	375.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.02.1.02.0018	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Pangan						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman pangan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman pangan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.02.1.02.0019	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Hortikultura						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih Hortikultura	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Hortikultura yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	30.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
	3.27.02.1.02.0020	Pengawasan Mutu dan Peredaran Benih Tanaman Perkebunan						30.000.000,00							35.000.000,00	
		Terawasinya mutu, penyediaan dan peredaran benih tanaman Perkebunan	Jumlah benih unggul bersertifikat tanaman Perkebunan yang terawasi, tersedia dan beredar yang memenuhi standar mutu yang ditetapkan sesuai sasaran 6 tepat, yaitu tepat jenis/varietas, mutu, jumlah, waktu, tempat, dan harga	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	35.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
285.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**42.009.169.000,00**							**40.527.321.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						***10.000.000,00***							***100.000.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	6.18 %		8.21 %	7.59 %	10.000.000,00						7.05 %	100.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	66.80 Persentase		64.19 Persentase	64.84 Persentase	10.000.000,00						65.49 Persentase	100.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					-		40.527.321.000,00	
		Jumlah Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					-		40.527.321.000,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	49.802.000,00						6 Unit	3.277.321.000,00	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	100.000.000,00	Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih Pertanian (BPSB-P)
		Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)						**2.296.457.300,00**							**4.751.187.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**2.296.457.300,00**							**4.751.187.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**2.296.457.300,00**							**4.751.187.000,00**	
286.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**58.134.543.698,00**							**70.651.854.338,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***964.866.300,00***							***1.228.065.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.63 Skor		80.83 Skor	81.03 Skor	964.866.300,00						81.23 Skor	1.228.065.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
		Meningkatnya Realisasi Serapan Anggaran						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						5.000.000,00							15.340.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	15.340.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.500.000,00							5.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						7.501.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	7.501.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	10.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
		Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.761.000,00						1 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
		Tersedianya Informasi Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	57.625.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.761.000,00						1 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.546.000,00							10.500.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	5.546.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	10.500.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	5.546.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	10.500.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.000.500,00							24.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	7.000.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	24.500.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	24.500.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							20.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	20.500.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	20.500.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							7.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.200.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	7.200.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.800.000,00							10.025.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	10.025.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	5.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	10.025.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						55.800.000,00							75.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	55.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	75.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	75.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						668.299.000,00					-		4.885.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pengedaan Barang Milik Daerah						668.299.000,00					-		4.885.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit		1 Unit	1 Unit	241.299.000,00						35 Unit	425.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah						668.299.000,00					-		4.885.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit		1 Unit	1 Unit	241.299.000,00						35 Unit	425.000.000,00	
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.299.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit		1 Unit	1 Unit	30.299.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	30.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	30.299.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	30.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	738.231.600,00						2 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Informasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	738.231.600,00						2 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	2.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	2.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						89.999.800,00							88.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	89.999.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	88.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	89.999.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	88.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						734.790.000,00							615.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	734.790.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	615.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	734.790.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	615.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	22.630.000,00						10 Unit	421.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	22.630.000,00						10 Unit	421.300.000,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.000.000,00							200.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	30 Unit	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		134 Unit	200.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.630.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	21 Unit	2.630.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	115.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		188 Unit	21 Unit	2.630.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		188 Unit	115.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
287.	**3.27.02**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN**						**24.767.723.000,00**							**25.518.249.059,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian						***1.314.591.000,00***							***2.773.122.000,00***	
			999.Peningkatan Produksi Hortikultura	1.08 Persentase		1.02 Persentase	1.04 Persentase	1.314.591.000,00						1.06 Persentase	2.773.122.000,00	
			999.Peningkatan Produksi Perkebunan	0.28 %		0.24 %	0.25 %	1.314.591.000,00						0.26 %	2.773.122.000,00	
			999.Peningkatan Produksi Tanaman Pangan	0.61 Persentase		0.57 Persentase	0.58 Persentase	1.314.591.000,00						0.59 Persentase	2.773.122.000,00	
	3.27.02.1.02	Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						1.826.591.000,00					-		14.166.615.000,00	
		Jumlah Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman						1.826.591.000,00					-		14.166.615.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	19000 Batang		19000 Batang	19000 Batang	50.001.000,00						19000 Batang	265.580.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	8 Ton		8 Ton	8 Ton	50.000.000,00						8 Ton	330.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	5000 Anakan		5000 Anakan	5000 Anakan	1.000.000,00						5000 Anakan	450.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	6000 Batang		6000 Batang	6000 Batang	1.000.000,00						6000 Batang	449.026.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	50000 Gram		50000 Gram	50000 Gram	600.000,00						50000 Gram	30.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	10000 Mata		10000 Mata	10000 Mata	990.000,00						10000 Mata	120.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	10000 Setek		10000 Setek	10000 Setek	1.000.000,00						10000 Setek	35.000.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	104 Ton		104 Ton	104 Ton	1.200.000.000,00						104 Ton	1.081.516.000,00	
			Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	10000 Setek		10000 Setek	10000 Setek	12.000.000,00						10000 Setek	12.000.000,00	
	3.27.02.1.02.0006	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan						1.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Anakan	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Anakan	5000 Anakan		5000 Anakan	5000 Anakan	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5000 Anakan	450.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.02.1.02.0007	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang						50.001.000,00							265.580.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Hortikultura Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Batang yang diperbanyak	19000 Batang		19000 Batang	19000 Batang	50.001.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		19000 Batang	265.580.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.02.1.02.0008	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh						990.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Mata Tumbuh	10000 Mata		10000 Mata	10000 Mata	990.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10000 Mata	120.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.02.1.02.0009	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek						12.000.000,00							12.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk Setek yang diperbanyak	10000 Setek		10000 Setek	10000 Setek	12.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10000 Setek	12.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.02.1.02.0010	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek						1.000.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Setek	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek	10000 Setek		10000 Setek	10000 Setek	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10000 Setek	35.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.02.1.02.0011	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji						600.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Biji	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji	50000 Gram		50000 Gram	50000 Gram	600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50000 Gram	30.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.02.1.02.0012	Perbanyakan Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang						1.000.000,00							449.026.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat Perkebunan Berbentuk Batang	Jumlah benih bersertifikat Perkebunan Berbentuk Batang	6000 Batang		6000 Batang	6000 Batang	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6000 Batang	449.026.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.02.1.02.0013	Perbanyakan Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Biji/Benih						1.200.000.000,00							1.081.516.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya benih bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk biji/benih	Jumlah benih bersertifikat tanaman pangan berbentuk biji/benih yang diperbanyak	104 Ton		104 Ton	104 Ton	1.200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		104 Ton	1.081.516.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
	3.27.02.1.02.0014	Perbanyakan Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Umbi						50.000.000,00							330.000.000,00	
		Tersedianya benih bersertikat hortikultura Berbentuk Umbi	Jumlah benih bersertifikat hortikultura Berbentuk Umbi yang diperbanyak	8 Ton		8 Ton	8 Ton	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Ton	330.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
288.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**42.009.169.000,00**							**40.527.321.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						***10.000.000,00***							***750.000.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	6.18 %		8.21 %	7.59 %	10.000.000,00						7.05 %	750.000.000,00	
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	66.80 Persentase		64.19 Persentase	64.84 Persentase	10.000.000,00						65.49 Persentase	750.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					-		40.527.321.000,00	
		Jumlah Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					-		40.527.321.000,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	49.802.000,00						6 Unit	3.277.321.000,00	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						10.000.000,00							750.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	750.000.000,00	Balai Benih Induk Pertanian (BBI-P)
		Balai Pelatihan Pertanian						**1.401.183.000,00**							**6.174.768.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.401.183.000,00**							**6.174.768.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.401.183.000,00**							**6.174.768.000,00**	
289.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**58.134.543.698,00**							**70.651.854.338,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***681.193.000,00***							***753.768.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.63 Skor		80.83 Skor	81.03 Skor	681.193.000,00						81.23 Skor	753.768.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Realisasi Serapan Anggaran						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						5.000.000,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	8.500.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.500.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						7.500.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	5.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
		Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	7.200.000,00						5 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	60.761.000,00						6 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
		Tersedianya Informasi Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.761.000,00						1 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.500.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	3.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	3.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.000.000,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	7.500.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	7.500.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	6.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	6.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							7.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.200.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	7.200.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	5.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							95.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	95.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	95.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						668.299.000,00					-		4.885.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pengedaan Barang Milik Daerah						668.299.000,00					-		4.885.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit		1 Unit	1 Unit	241.299.000,00						35 Unit	425.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah						668.299.000,00					-		4.885.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit		1 Unit	1 Unit	241.299.000,00						35 Unit	425.000.000,00	
	3.27.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						30.000.000,00							30.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	45 Unit		1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		35 Unit	30.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit		4 Unit	1 Unit	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Unit	30.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	738.231.600,00						2 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	738.231.600,00						7 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	1.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	1.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						96.840.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	96.840.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	100.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	96.840.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	100.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						514.353.000,00							439.068.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	514.353.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	439.068.000,00	Balai Pelatihan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	514.353.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	439.068.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	22.630.000,00						10 Unit	421.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	22.630.000,00						10 Unit	421.300.000,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	26 Unit	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		134 Unit	100.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.500.000,00							49.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	86 Unit	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	49.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		188 Unit	86 Unit	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		188 Unit	49.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
290.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**42.009.169.000,00**							**40.527.321.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						***9.990.000,00***							***250.000.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	6.18 %		8.21 %	7.59 %	9.990.000,00						7.05 %	250.000.000,00	
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	66.80 Persentase		64.19 Persentase	64.84 Persentase	9.990.000,00						65.49 Persentase	250.000.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					-		40.527.321.000,00	
		Jumlah Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					-		40.527.321.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	49.802.000,00						6 Unit	3.277.321.000,00	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						9.990.000,00							250.000.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	9.990.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	250.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
291.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1.250.000.000,00**							**6.316.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian						***660.000.000,00***							***4.866.000.000,00***	
			999.Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	9 Persentase		14 Persentase	12 Persentase	660.000.000,00						11 Persentase	4.866.000.000,00	
			999.Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	15 %		15 %	15 %	660.000.000,00						15 %	4.866.000.000,00	
			999.Persentase SDM Petani yang meningkat kapasitasnya	1 %		1 %	1 %	660.000.000,00						1 %	4.866.000.000,00	
		SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya						220.000.000,00					-		1.534.000.000,00	
			Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	23 Unit		0 Unit	23 Unit	10.000.000,00						23 Unit	834.000.000,00	
	3.27.07.1.01.0003	Penguatan Kelembagaan penyuluhan pertanian						10.000.000,00							834.000.000,00	
		Terlaksananya peningkatan kapasitas dan pengelolaan kelembagaan penyuluhan pertanian	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	23 Unit		0 Unit	23 Unit	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23 Unit	834.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						920.000.000,00					-		3.632.000.000,00	
		Jumlah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dan Siswa Yang Bekerja Di Sektor Pertanian						920.000.000,00					-		3.632.000.000,00	
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000,00						3 Dokumen	2.132.000.000,00	
			Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	150 Kelompok		70 Kelompok	150 Kelompok	300.000.000,00						150 Kelompok	1.300.000.000,00	
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						50.000.000,00							882.000.000,00	
		Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-		3 Dokumen	882.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.07.1.02.0002	Pelaksanaan Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani						300.000.000,00							1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Pemberdayaan Petani	Jumlah Kelompok Petani yang Mendapat Penyuluhan dan Pemberdayaan	150 Kelompok		70 Kelompok	50 Kelompok	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-		150 Kelompok	1.300.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.07.1.01	Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian						220.000.000,00					-		1.534.000.000,00	
		SDM pertanian yang meningkat kapasitasnya						220.000.000,00					-		1.534.000.000,00	
			Jumlah Koordinasi kelembagaan penyuluhan pertanian lintas kabupaten/kota	-		-	-	10.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-		-	-	200.000.000,00						-	600.000.000,00	
	3.27.07.1.01.0005	Koordinasi kelembagaan penyuluhan pertanian pertanian lintas kabupaten/kota						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya koordinasi kelembagaan penyuluhan pertanian lintas kabupaten/kota	Jumlah Koordinasi kelembagaan penyuluhan pertanian lintas kabupaten/kota	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.07.1.01.0006	Pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota						200.000.000,00							600.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan penyuluh pertanian swadaya dan swasta lintas kabupaten/kota	Jumlah Penyuluh pertanian swadaya dan/atau penyuluh pertanian swasta yang mendapatkan pembinaan	-		-	60 Orang	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-		-	600.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
		Jumlah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dan Siswa Yang Bekerja Di Sektor Pertanian						920.000.000,00					-		3.632.000.000,00	
			Jumlah kegiatan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Lintas Kabupaten/Kota	-		-	-	10.000.000,00						-	100.000.000,00	
			Jumlah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan penyuluhan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	-		-	-	10.000.000,00						-	100.000.000,00	
	3.27.07.1.02.0003	Pelaksanaan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Lintas Kabupaten/Kota						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pengembangan Metode Penyuluhan Pertanian Lintas Kabupaten/Kota	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	100.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.07.1.02.0004	Sinkronisasi dan Koordinasi penyuluh pertanian (ASN, Swadaya dan Swasta) lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi						10.000.000,00							100.000.000,00	
		Terlaksananya sinkronisasi dan koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan penyuluhan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	Jumlah pelaksanaan sinkronisasi dan koordinasi pengawalan tugas, fungsi, dan peran penyuluh pertanian (ASN, Swadaya, dan Swasta) dalam pelaksanaan penyuluhan lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	-		-	1 Laporan	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-		-	100.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.07.1.03	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan						110.000.000,00					-		1.150.000.000,00	
		Jumlah pengembangan kapasitas kelembagaan ekonomi petani berbasis kawasan						110.000.000,00					-		1.150.000.000,00	
			Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang mendaptkan pembinaan	-		-	-	100.000.000,00						-	1.000.000.000,00	
			Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang telah membangun jejaring	-		-	-	10.000.000,00						-	150.000.000,00	
	3.27.07.1.03.0007	Penguatan jejaring kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota						10.000.000,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya penguatan jejaring kelembagaan petani dan KEP lintas kabupaten/kota di wilayah provinsi	Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang telah membangun jejaring	-		-	18 Unit	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	150.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
	3.27.07.1.03.0008	Pembinaan kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota						100.000.000,00							1.000.000.000,00	
		Terlaksananya pembinaan kelembagaan petani dan Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) lintas kabupaten/kota	Jumlah kelembagaan petani dan/atau Kelembagaan Ekonomi Petani (KEP) yang mendaptkan pembinaan	-		-	20 Unit	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	1.000.000.000,00	Balai Pelatihan Pertanian
		Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)						**1.535.606.000,00**							**1.836.348.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.535.606.000,00**							**1.836.348.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**1.535.606.000,00**							**1.836.348.000,00**	
292.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**58.134.543.698,00**							**70.651.854.338,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***1.225.794.000,00***							***1.114.772.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.63 Skor		80.83 Skor	81.03 Skor	1.225.794.000,00						81.23 Skor	1.114.772.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
		Meningkatnya Realisasi Serapan Anggaran						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						4.080.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	8.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						4.800.000,00							4.800.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	4.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	4.800.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.761.000,00						1 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	7 Paket	80.182.880,00						7 Paket	156.831.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
		Tersedianya Informasi Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.761.000,00						1 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.000.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	4.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	4.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	4.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.000.000,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.500.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	7.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	8.500.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							8.500.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.500.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	8.500.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							7.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.500.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	7.500.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	5.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	5.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							60.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	60.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	60.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	738.231.600,00						2 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	738.231.600,00						2 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	1.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	1.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						76.229.000,00							83.852.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	76.229.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	83.852.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	76.229.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	83.852.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.102.185.000,00							787.200.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	1.102.185.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	787.200.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1.102.185.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	787.200.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	22.630.000,00						10 Unit	421.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	22.630.000,00						10 Unit	421.300.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.000.000,00							99.120.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	3 Unit	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		134 Unit	99.120.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.500.000,00							43.800.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	3 Unit	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	43.800.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		188 Unit	3 Unit	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		188 Unit	43.800.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
293.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**42.009.169.000,00**							**40.527.321.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						***9.812.000,00***							***63.076.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	6.18 %		8.21 %	7.59 %	9.812.000,00						7.05 %	63.076.000,00	
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	66.80 Persentase		64.19 Persentase	64.84 Persentase	9.812.000,00						65.49 Persentase	63.076.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					-		40.527.321.000,00	
		Jumlah Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					-		40.527.321.000,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	49.802.000,00						6 Unit	3.277.321.000,00	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						9.812.000,00							63.076.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	9.812.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	63.076.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
294.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1.250.000.000,00**							**6.316.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian						***300.000.000,00***							***650.000.000,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	9 Persentase		14 Persentase	12 Persentase	300.000.000,00						11 Persentase	650.000.000,00	
			999.Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	15 %		15 %	15 %	300.000.000,00						15 %	650.000.000,00	
			999.Persentase SDM Petani yang meningkat kapasitasnya	1 %		1 %	1 %	300.000.000,00						1 %	650.000.000,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						920.000.000,00					-		3.632.000.000,00	
		Jumlah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dan Siswa Yang Bekerja Di Sektor Pertanian						920.000.000,00					-		3.632.000.000,00	
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000,00						3 Dokumen	2.132.000.000,00	
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						300.000.000,00							650.000.000,00	
		Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	650.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Mataram (SMKPPN Mataram)
		Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)						**942.145.300,00**							**2.579.134.000,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**942.145.300,00**							**2.579.134.000,00**	
	3.27	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN**						**942.145.300,00**							**2.579.134.000,00**	
295.	**3.27.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**58.134.543.698,00**							**70.651.854.338,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***674.645.300,00***							***900.889.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.63 Skor		80.83 Skor	81.03 Skor	674.645.300,00						81.23 Skor	900.889.000,00	
	3.27.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
		Meningkatnya Realisasi Serapan Anggaran						48.258.911.403,00					-		52.460.636.338,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	132.762.000,00						1 Dokumen	188.695.000,00	
	3.27.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						6.840.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.840.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	8.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
	3.27.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						77.331.000,00					-		105.825.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	57.811.000,00						14 Laporan	66.825.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	19.520.000,00						1 Dokumen	26.000.000,00	
	3.27.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.500.000,00							2.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	2.500.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
	3.27.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						7.500.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	14 Laporan		14 Laporan	1 Laporan	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Laporan	20.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
	3.27.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
		Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.761.000,00						1 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
		Tersedianya Informasi Pelayanan Administrasi Umum						706.784.280,00					-		1.460.284.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000,00						1 Dokumen	57.625.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	60.761.000,00						1 Laporan	84.588.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	405.800.000,00						1 Laporan	895.515.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	80.182.880,00						1 Paket	156.831.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	64.999.900,00						1 Paket	128.100.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	52.840.500,00						2 Paket	81.075.000,00	
	3.27.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						5.000.000,00							6.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	6.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	6.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
	3.27.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						7.250.000,00							18.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	18.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	7.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	18.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.27.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						5.000.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	8.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	8.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
	3.27.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							7.200.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	7.200.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	7.200.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
	3.27.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							6.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan		6 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Laporan	6.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	6.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
	3.27.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							19.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	19.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	19.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
	3.27.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	738.231.600,00						7 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						7.211.588.015,00					-		6.484.889.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	738.231.600,00						2 Laporan	1.010.601.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	6.473.356.415,00						2 Laporan	5.438.288.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	16.000.000,00	
	3.27.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							1.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	1.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	1.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
	3.27.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						76.462.800,00							83.853.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	76.462.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	83.853.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	76.462.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	83.853.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
	3.27.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						551.092.500,00							692.036.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	551.092.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	692.036.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	551.092.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	692.036.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
	3.27.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	22.630.000,00						10 Unit	421.300.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						597.630.000,00					-		3.282.595.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	134 Unit	275.000.000,00						134 Unit	728.020.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	22.630.000,00						10 Unit	421.300.000,00	
	3.27.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.000.000,00							28.300.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	134 Unit		134 Unit	3 Unit	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		134 Unit	28.300.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
	3.27.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.500.000,00							15.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		188 Unit	3 Unit	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		188 Unit	15.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	3 Unit	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	15.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
296.	**3.27.03**	**PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN**						**42.009.169.000,00**							**40.527.321.000,00**	
		Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian						***10.000.000,00***							***1.064.245.000,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Prasarana Pertanian	6.18 %		8.21 %	7.59 %	10.000.000,00						7.05 %	1.064.245.000,00	
			999.Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	66.80 Persentase		64.19 Persentase	64.84 Persentase	10.000.000,00						65.49 Persentase	1.064.245.000,00	
	3.27.03.1.01	Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					-		40.527.321.000,00	
		Jumlah Penataan Prasarana Pertanian						42.009.169.000,00					-		40.527.321.000,00	
			Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	49.802.000,00						6 Unit	3.277.321.000,00	
	3.27.03.1.01.0010	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rutin Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya						10.000.000,00							1.064.245.000,00	
		Terbangun, Terehabilitasi, dan Terpeliharanya Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya	Jumlah Gedung UPTD Pertanian serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Dipelihara dan Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	1.064.245.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
297.	**3.27.07**	**PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN**						**1.250.000.000,00**							**6.316.000.000,00**	
		Meningkatnya kapasitas SDM bidang penyuluhan pertanian						***250.000.000,00***							***600.000.000,00***	
			999.Persentase Kelembagaan Koperasi Tani yang Dibentuk dan Beroperasi	9 Persentase		14 Persentase	12 Persentase	250.000.000,00						11 Persentase	600.000.000,00	
			999.Persentase SDM penyuluh pertanian yang ditingkatkan kapasitasnya	15 %		15 %	15 %	250.000.000,00						15 %	600.000.000,00	
			999.Persentase SDM Petani yang meningkat kapasitasnya	1 %		1 %	1 %	250.000.000,00						1 %	600.000.000,00	
	3.27.07.1.02	Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian						920.000.000,00					-		3.632.000.000,00	
		Jumlah Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dan Siswa Yang Bekerja Di Sektor Pertanian						920.000.000,00					-		3.632.000.000,00	
			Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	600.000.000,00						3 Dokumen	2.132.000.000,00	
	3.27.07.1.02.0001	Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian						250.000.000,00							600.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Termanfaatkannya Teknologi Inovasi Pertanian yang Didesiminasikan oleh Penyuluh Pertanian	Jumlah Diseminasi Informasi Teknis, Sosial, Ekonomi dan Inovasi Pertanian	3 Dokumen		3 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	600.000.000,00	Sekolah Menengah Kejuruan Pembangunan Pertanian Negeri Bima (SMKPPN Bima)
		Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan						**442.632.500,00**							**696.534.000,00**	
	2	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**						**442.632.500,00**							**696.534.000,00**	
	2.09	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN**						**442.632.500,00**							**696.534.000,00**	
298.	**2.09.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**242.632.500,00**							**271.534.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***240.632.500,00***							***269.534.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85 Skor		83.04 Skor	83.04 Skor	240.632.500,00						84.02 Skor	269.534.000,00	
	2.09.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.935.000,00					-		6.700.000,00	
		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.935.000,00					-		6.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.935.000,00						1 Dokumen	4.700.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
		Meningkatnya Realisasi Serapan Anggaran						7.935.000,00					-		6.700.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.935.000,00						1 Dokumen	4.700.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
	2.09.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						5.935.000,00							4.700.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.935.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	4.700.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	2.000.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.000.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						1.500.000,00					-		2.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						1.500.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00						2 Laporan	2.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah						1.500.000,00					-		2.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.500.000,00						2 Laporan	2.000.000,00	
	2.09.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.500.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	2.000.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						7.000.000,00					-		4.000.000,00	
		Jumlah Laporan Pelayanan Administrasi Umum						7.000.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.000.000,00						2 Paket	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00						2 Paket	3.000.000,00	
		Tersedianya Informasi Pelayanan Administrasi Umum						7.000.000,00					-		4.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	2.000.000,00						2 Paket	1.000.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	5.000.000,00						2 Paket	3.000.000,00	
	2.09.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						2.000.000,00							1.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	1.000.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket		7 Paket	1 Paket	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	1.000.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						5.000.000,00							3.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	1 Paket	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Paket	3.000.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						223.697.500,00					-		257.334.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						223.697.500,00					-		257.334.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00						2 Laporan	37.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	183.697.500,00						2 Laporan	219.834.000,00	
		Tersedianya Informasi Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						223.697.500,00					-		257.334.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.000.000,00						2 Laporan	37.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	183.697.500,00						2 Laporan	219.834.000,00	
	2.09.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						40.000.000,00							37.500.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	37.500.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	40.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	37.500.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						183.697.500,00							219.834.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	183.697.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	219.834.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	183.697.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	219.834.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.500.000,00					-		1.500.000,00	
		Jumlah Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah						2.500.000,00					-		1.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	2.500.000,00						10 Unit	1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah						2.500.000,00					-		1.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	10 Unit	2.500.000,00						10 Unit	1.500.000,00	
	2.09.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.500.000,00							1.500.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		188 Unit	2 Unit	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		188 Unit	1.500.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	18 Unit		10 Unit	2 Unit	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	1.500.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
299.	**2.09.05**	**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**						**350.000.000,00**							**690.100.000,00**	
		Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Post Market dan Pre Market						***200.000.000,00***							***425.000.000,00***	
			999.Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan Post Market	100 %		100 %	100 %	200.000.000,00						100 %	425.000.000,00	
			999.Persentase pangan segar yang memenuhi syarat keamanan pangan Pre Market	75 %		55 %	60 %	200.000.000,00						65 %	425.000.000,00	
	2.09.05.1.01	Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota						350.000.000,00					-		690.100.000,00	
		Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Post Market						350.000.000,00					-		690.100.000,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	175.000.000,00	
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Sertifikat		1 Sertifikat	1 Sertifikat	150.000.000,00						1 Sertifikat	250.000.000,00	
		Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar di Pre Market						350.000.000,00					-		690.100.000,00	
			Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	175.000.000,00	
			Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Sertifikat		1 Sertifikat	1 Sertifikat	150.000.000,00						1 Sertifikat	250.000.000,00	
	2.09.05.1.01.0006	Sertifikasi Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan						150.000.000,00							250.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersertifikasinya keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah sertifikasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Sertifikat		1 Sertifikat	65 Sertifikat	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Sertifikat	250.000.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
	2.09.05.1.01.0009	Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan						50.000.000,00							175.000.000,00	
		terlaksananya penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	175.000.000,00	Balai Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan
		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral						**13.218.225.541,00**							**21.004.693.264,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**12.968.225.791,00**							**20.342.136.764,00**	
	3.29	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**						**12.968.225.791,00**							**20.342.136.764,00**	
300.	**3.29.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**11.001.109.101,00**							**12.360.733.264,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***11.001.109.101,00***							***12.308.733.264,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	86,33 Skor		82,96 Skor	83,79 Skor	11.001.109.101,00						84,63 Skor	12.308.733.264,00	
	3.29.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						588.267.825,00					okumen Perencanaan Perangkat Daerah		278.861.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja perangkat Daerah						588.267.825,00					okumen Perencanaan Perangkat Daerah		278.861.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.183.575,00						1 Dokumen	9.167.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	131.643.100,00						1 Dokumen	105.655.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.344.700,00						1 Dokumen	7.835.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.471.100,00						1 Dokumen	19.927.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.861.300,00						1 Dokumen	22.182.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	111.266.400,00						1 Laporan	24.744.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	150.497.650,00						1 Laporan	89.351.000,00	
	3.29.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						131.643.100,00							105.655.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	2 Dokumen	131.643.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	105.655.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						59.861.300,00							22.182.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.861.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	22.182.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						57.471.100,00							19.927.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	57.471.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	19.927.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						38.183.575,00							9.167.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.183.575,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	9.167.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						39.344.700,00							7.835.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	39.344.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	7.835.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						111.266.400,00							24.744.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	111.266.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	24.744.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						150.497.650,00							89.351.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	150.497.650,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	89.351.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.256.031.257,00					Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.043.203.464,00	
		Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						8.256.031.257,00					Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		10.043.203.464,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.612.400,00						1 Dokumen	16.044.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.529.800,00						1 Dokumen	76.328.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.934.350,00						1 Dokumen	3.447.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.698.200,00						1 Laporan	8.929.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan		78 Orang/ Bulan	80 Orang/ Bulan	8.166.256.507,00						82 Orang/ Bulan	9.914.455.464,00	
	3.29.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						8.166.256.507,00							9.914.455.464,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	86 Orang/ Bulan		78 Orang/ Bulan	70 Orang/ Bulan	8.166.256.507,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		82 Orang/ Bulan	9.914.455.464,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						48.529.800,00							76.328.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.529.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	76.328.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						5.934.350,00							3.447.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.934.350,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	3.447.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						21.612.400,00							16.044.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.612.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	16.044.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						13.698.200,00							8.929.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.698.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	8.929.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	8.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	8.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	8.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						18.963.195,00					Laporan Administrasi BMD		29.022.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						18.963.195,00					Laporan Administrasi BMD		29.022.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2.637.020,00						1 Dokumen	8.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.552.600,00						1 Dokumen	2.895.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.388.500,00						1 Laporan	10.110.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.329.400,00						1 Laporan	4.707.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.055.675,00						1 Dokumen	3.310.000,00	
	3.29.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						3.055.675,00							3.310.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.055.675,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	3.310.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						5.552.600,00							2.895.000,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.552.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	2.895.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						4.388.500,00							10.110.000,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.388.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	10.110.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						3.329.400,00							4.707.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.329.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	4.707.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						2.637.020,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		Dokumen	1 Dokumen	2.637.020,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	8.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						29.930.400,00					Laporan Administrasi Kepegawaian		24.492.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						29.930.400,00					Laporan Administrasi Kepegawaian		24.492.000,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.120.000,00						1 Dokumen	2.276.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket		Paket	0 Paket	0,00						0 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		Orang	1 Orang	25.000.000,00						1 Orang	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.810.400,00						1 Unit	2.216.000,00	
	3.29.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						2.810.400,00							2.216.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.810.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	2.216.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	75 Paket		Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		0 Paket	0,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						2.120.000,00							2.276.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	2.276.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						25.000.000,00							20.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	1 Orang		Orang	1 Orang	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Orang	20.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.690.960,00					Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		153.353.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah						162.690.960,00					Laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah		153.353.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.675.000,00						1 Laporan	8.924.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.595.000,00						1 Laporan	108.993.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	15.120.000,00						1 Paket	5.712.000,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.277.760,00						1 Paket	5.696.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	3.395.200,00						1 Paket	4.043.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	7.070.000,00						1 Paket	5.076.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	6.558.000,00						1 Paket	4.909.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		Paket	4 Paket	0,00						4 Paket	10.000.000,00	
	3.29.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						7.070.000,00							5.076.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	11 Paket	7.070.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	5.076.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.558.000,00							4.909.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	6.558.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	4.909.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						0,00							10.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket		Paket	4 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		4 Paket	10.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						15.120.000,00							5.712.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	4 Paket	15.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	5.712.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						3.395.200,00							4.043.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	7 Paket	3.395.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	4.043.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						3.277.760,00							5.696.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	7 Paket	3.277.760,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Paket	5.696.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						26.675.000,00							8.924.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.675.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	8.924.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						100.595.000,00							108.993.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.595.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	108.993.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						867.000.000,00					BMD		867.109.800,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						867.000.000,00					BMD		867.109.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		0 Paket	4 Paket	15.000.000,00						8 Paket	20.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	800.000.000,00						2 Unit	803.173.800,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		7 Unit	7 Unit	52.000.000,00						8 Unit	43.936.000,00	
	3.29.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						800.000.000,00							803.173.800,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	800.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		2 Unit	803.173.800,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						15.000.000,00							20.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	8 Paket		0 Paket	4 Paket	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		8 Paket	20.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						52.000.000,00							43.936.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	10 Unit		7 Unit	7 Unit	52.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		8 Unit	43.936.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						557.115.464,00					Jasa Penunjang		621.631.000,00	
		Meningkatnya Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						557.115.464,00					Jasa Penunjang		621.631.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	128.540.400,00						1 Laporan	163.093.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	404.628.664,00						1 Laporan	444.457.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	8.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.946.400,00						1 Laporan	6.081.000,00	
	3.29.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						23.946.400,00							6.081.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	23.946.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	6.081.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						128.540.400,00							163.093.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	3 Laporan	128.540.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	163.093.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	8.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						404.628.664,00							444.457.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	404.628.664,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	444.457.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						521.110.000,00					BMD yang dipelihara		343.061.000,00	
		Terlaksananya Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						521.110.000,00					BMD yang dipelihara		343.061.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00						1 Unit	63.739.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	128.000.000,00						6 Unit	163.169.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	12 Unit	66.910.000,00						12 Unit	56.153.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		7 Unit	7 Unit	26.200.000,00						7 Unit	60.000.000,00	
	3.29.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						66.910.000,00							56.153.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	12 Unit		12 Unit	7 Unit	66.910.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		12 Unit	56.153.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						128.000.000,00							163.169.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	8 Unit	128.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		6 Unit	163.169.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.200.000,00							60.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 Unit		7 Unit	5 Unit	26.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		7 Unit	60.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						300.000.000,00							63.739.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	63.739.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
301.	**3.29.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN ASPEK KEGEOLOGIAN**						**231.999.990,00**							**1.953.700.000,00**	
		Meningkatnya pengendalian pemanfaatan air tanah						***231.999.990,00***							***1.953.700.000,00***	
			999.Persentase izin pemanfaatan air tanah yang dikendalikan	25.21 %		15.79 %	18.42 %	231.999.990,00						21.05 %	1.953.700.000,00	
	3.29.02.1.01	Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						179.197.050,00					kajian teknis penetapan zona konservasi air tanah		1.516.340.000,00	
		Tersedianya kajian teknis sebagai bahan kebijakan penetapan zona konservasi air tanah						179.197.050,00					kajian teknis penetapan zona konservasi air tanah		1.516.340.000,00	
			Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.174.800,00						1 Dokumen	127.709.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	74.022.250,00						1 Laporan	149.438.000,00	
			Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	1.239.193.000,00	
	3.29.02.1.01.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						105.174.800,00							127.709.000,00	
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Terkait Data Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	105.174.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	127.709.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.01.0002	Penentuan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						0,00							1.239.193.000,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Zona Konservasi Air Tanah yang Ditetapkan dalam Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	1.239.193.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.01.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah						74.022.250,00							149.438.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya dan Terawasinya Pemanfaatan Zona Konservasi Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Zona Air Tanah pada Cekungan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	74.022.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	149.438.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.03	Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi						52.802.940,00					Kajian Teknis penetapan nilai perolehan air tanah		437.360.000,00	
		Tersedianya kajian teknis sebagai bahan kebijakan penetapan nilai perolehan air tanah						52.802.940,00					Kajian Teknis penetapan nilai perolehan air tanah		437.360.000,00	
			Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	127.565.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	52.802.940,00						1 Laporan	127.562.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	182.233.000,00	
	3.29.02.1.03.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah						0,00							127.565.000,00	
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Informasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi yang Terkumpul	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	127.565.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.02.1.03.0002	Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah						0,00							182.233.000,00	
		Terlaksananya Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Penghitungan, Perumusan dan Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	182.233.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.02.1.03.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pemanfaatan Air Tanah						52.802.940,00							127.562.000,00	
		Terkendalinya dan Terawasinya Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah Dalam Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Implementasi Nilai Perolehan Air Tanah dalam Daerah Provinsi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	52.802.940,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	127.562.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
302.	**3.29.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN MINERAL DAN BATUBARA**						**724.199.175,00**							**2.096.070.000,00**	
		Meningkatnya pengelolaan mineral dan batubara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku						***474.199.425,00***							***1.768.567.000,00***	
			999.Persentase izin usaha pertambangan yang dikendalikan	36.72 %		5.04 %	20.14 %	474.199.425,00						37.48 %	1.768.567.000,00	
	3.29.03.1.03	Penatausahaan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						224.199.875,00					izin usaha pertambangan yang dikendalikan		1.026.055.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang beralaku.						224.199.875,00					izin usaha pertambangan yang dikendalikan		1.026.055.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	99.199.900,00					1 Dokumen	573.968.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.999.975,00					1 Laporan	452.087.000,00	
	3.29.03.1.03.0003	Penyusunan Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						99.199.900,00							573.968.000,00	
		Tersusunnya Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Dokumen Rekomendasi Perizinan dan Informasi Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	99.199.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	573.968.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.03.0004	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut						124.999.975,00							452.087.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelaksanaan Perizinan Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang Berada dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi Termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 Mil Laut	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	124.999.975,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	452.087.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.04	Penatausahaan Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam, dan Batuan dalam Wilayah Pertambangan Rakyat						449.999.400,00					IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan		978.309.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan rakyat						449.999.400,00					IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan		978.309.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.999.950,00						1 Laporan	146.956.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.999.900,00						1 Laporan	419.875.000,00	
			Tersedianya laporan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.999.800,00						1 Laporan	83.975.000,00	
	3.29.03.1.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat						49.999.950,00							146.956.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam Rangka Penyusunan Usulan WPR dalam Penetapan Wilayah Pertambangan oleh Pemerintah Pusat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.999.950,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	146.956.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.04.0005	Pelaksanaan Reklamasi dan Pascatambang bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)						99.999.900,00							419.875.000,00	
		Terlaksananya Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	Jumlah Laporan Hasil Reklamasi dan Pascatambang Bersama Pemegang Izin Pertambangan Rakyat (IPR)	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	99.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	419.875.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.03.1.04.0008	Pelaksanaan dan Pelaporan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat						49.999.800,00							83.975.000,00	
		Terlaksananya dan terlaporkannya hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat	Tersedianya laporan hasil kegiatan pengelolaan lingkungan atas Iuran Pertambangan Rakyat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.999.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	83.975.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.03.1.07	Penetapan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						49.999.900,00					aporan pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan		91.706.000,00	
		Terlaksananya penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku						49.999.900,00					aporan pelaksanaan penetapan harga patokan mineral bukan logam dan batuan		91.706.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.999.900,00						1 Laporan	91.706.000,00	
	3.29.03.1.07.0003	Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan						49.999.900,00							91.706.000,00	
		Terlaksananya Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pelaksanaan Harga Patokan Mineral Bukan Logam	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	91.706.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
303.	**3.29.05**	**PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN**						**646.633.075,00**							**2.496.070.000,00**	
		Meningkatnya kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik						***646.633.075,00***							***1.881.506.500,00***	
			999.Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	15.50 %		14 %	14.50 %	646.633.075,00						15 %	1.881.506.500,00	
	3.29.05.1.06	Pengelolaan pemanfaatan Biomassa dan/atau Biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi						0,00					laporan pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi		96.497.500,00	
		Terlaksananya pengelolaan pemanfaatan biomassa dan/atau biogas sebagai bahan bakar dalam wilayah provinsi.						0,00					laporan pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi		96.497.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang terevitalisasi	25 Unit		25 Unit	25 Unit	0,00						25 Unit	56.567.500,00	
			Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	0,00						50 Unit	39.930.000,00	
	3.29.05.1.06.0001	Revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas						0,00							56.567.500,00	
		Terlaksananya revitalisasi infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang terevitalisasi	25 Unit		25 Unit	25 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		25 Unit	56.567.500,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.06.0003	Pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas						0,00							39.930.000,00	
		Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur biomassa dan/atau biogas	Jumlah unit infrastruktur biomassa dan/atau biogas yang dipelihara	50 Unit		50 Unit	50 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		50 Unit	39.930.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07	Pengelolaan aneka energi baru terbarukan berupa sinar matahari, angin, aliran dan terjunan air, gerakan dan perbedaan suhu lapisan laut dalam wilayah provinsi						320.263.625,00					laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan.		1.274.510.000,00	
		Terlaksananya pengelolaan aneka energi baru terbarukan dalam wilayah provinsi.						320.263.625,00					laporan pengelolaan aneka energi baru terbarukan.		1.274.510.000,00	
			Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.716.625,00						1 Dokumen	139.755.000,00	
			Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 unit		1 unit	unit	129.977.000,00						1 unit	500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	3 Unit		Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	495.000.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.570.000,00						1 Laporan	139.755.000,00	
			Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	1 unit		unit	unit	0,00						unit	0,00	
	3.29.05.1.07.0002	Pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah						125.570.000,00							139.755.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	Jumlah laporan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan aneka EBT (kapasitas terpasang, investasi) di daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	125.570.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Laporan	139.755.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07.0005	Revitalisasi infrastruktur aneka EBT						0,00							495.000.000,00	
		Terlaksananya revitalisasi infrastruktur aneka EBT	Jumlah infrastruktur aneka EBT yang terevitalisasi	3 Unit		Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Unit	495.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07.0007	Pelaksanaan kegiatan pemanfaatan aneka EBT						129.977.000,00							500.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya kegiatan pemanfaatan aneka EBT	Jumlah hasil kegiatan pemanfaatan aneka EBT	1 unit		1 unit	1 unit	129.977.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 unit	500.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07.0009	Pemeliharaan infrastruktur aneka EBT						0,00							0,00	
		Terlaksananya pemeliharaan infrastruktur aneka EBT	Jumlah unit infrastruktur aneka EBT yang dipelihara	1 unit		unit	0 unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		unit	0,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.07.0010	Penyusunan dan pemutakhiran data potensi aneka EBT di daerah						64.716.625,00							139.755.000,00	
		Terkumpulnya data potensi aneka EBT di daerah	Jumlah dokumen data potensi aneka EBT di daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	64.716.625,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	139.755.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.10	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Konservasi Energi yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di tingkat daerah provinsi						53.037.500,00					laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi di daerah.		166.375.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi di daerah						53.037.500,00					laporan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan konservasi energi di daerah.		166.375.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	1 laporan		1 laporan	1 laporan	53.037.500,00						1 laporan	166.375.000,00	
	3.29.05.1.10.0003	Sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat						53.037.500,00							166.375.000,00	
		Terlaksananya sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan sosialisasi konservasi energi kepada masyarakat	1 laporan		1 laporan	1 laporan	53.037.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 laporan	166.375.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.05	Pengelolaan penyediaan Biomassa dan/atau Biogas dalam wilayah provinsi						273.331.950,00					laporan pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi		958.687.500,00	
		Terlaksananya pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi.						273.331.950,00					laporan pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi		958.687.500,00	
			jumlah dokumen data potensi biomassa dan/atau biogas	-		-	-	43.515.000,00						-	139.755.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa dan/atau biogas	-		-	-	211.716.600,00						-	311.454.000,00	
			Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan/atau biogas	-		-	-	0,00						-	51.425.000,00	
			Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa dan/atau biogas	-		-	-	18.100.350,00						-	121.000.000,00	
	3.29.05.1.05.0009	Pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa dan/atau biogas						211.716.600,00							311.454.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya pasokan biomassa dan/atau biogas untuk dimanfaatkan sebagai energi terbarukan di wilayah provinsi	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan penyediaan biomassa dan/atau biogas	-		-	1 Laporan	211.716.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	311.454.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.05.0010	Pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan/atau biogas						0,00							51.425.000,00	
		Terlaksananya pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan/atau biogas	Jumlah laporan pelaksanaan pemberian bimtek, supervisi, evaluasi dan pelaporan biomassa dan/atau biogas	-		-	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	51.425.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.05.0011	Perencanaan kegiatan penyediaan biomassa dan/atau biogas						18.100.350,00							121.000.000,00	
		Tersusunnya rencana kegiatan penyediaan biomassa dan/atau biogas	Jumlah rencana kegiatan penyediaan biomassa dan/atau biogas	-		-	1 Dokumen	18.100.350,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	121.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.05.1.05.0012	Penyusunan dan pemuktahiran data potensi biomassa dan/atau biogas						43.515.000,00							139.755.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		terkumpulnya data potensi biomassa dan/atau biogas	jumlah dokumen data potensi biomassa dan/atau biogas	-		-	1 Dokumen	43.515.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	139.755.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
304.	**3.29.06**	**PROGRAM PENGELOLAAN KETENAGALISTRIKAN**						**614.284.200,00**							**2.098.120.000,00**	
		Meningkatnya cakupan layanan listrik bagi masyarakat tidak mampu						***614.284.200,00***							***2.098.120.000,00***	
			999.Persentase rumah tangga tidak mampu yang terlayani listrik PLN	87.14 %		86.48 %	86.59 %	614.284.200,00						86.73 %	2.098.120.000,00	
	3.29.06.1.06	Penganggaran untuk Kelompok Masyarakat Tidak Mampu, Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						537.182.500,00					masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan		1.963.988.000,00	
		Tersedianya layanan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan						537.182.500,00					masyarakat yang mendapatkan layanan listrik sesuai standar keselamatan ketenagalistrikan		1.963.988.000,00	
			Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.400.000,00						1 Dokumen	74.044.000,00	
			Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1547 Unit		325 Unit	687 Unit	485.782.500,00						945 Unit	1.889.944.000,00	
	3.29.06.1.06.0001	Pengumpulan dan Pengolahan Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu						51.400.000,00							74.044.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkumpulnya dan Terolahnya Data dan Informasi Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	Jumlah Dokumen Terkait Penerima Manfaat dari Kelompok Masyarakat Tidak Mampu	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	51.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		1 Dokumen	74.044.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.06.0006	Pembangunan Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan						485.782.500,00							1.889.944.000,00	
		Terbangunnya Sarana Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	Jumlah Sarana yang Terbangun dalam Penyediaan Tenaga Listrik Belum Berkembang, Daerah Terpencil dan Perdesaan	1547 Unit		325 Unit	687 Unit	485.782.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		945 Unit	1.889.944.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.01	Penatausahaan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Non Badan Usaha Milik Negara dan Penjualan Tenaga Listrik serta Penyewaan Jaringan kepada Penyedia Tenaga Listrik dalam Daerah Provinsi						77.101.700,00					izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku		134.132.000,00	
		Terlaksananya kegiatan usaha bidang ketenagalistrikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku						77.101.700,00					izin usaha yang melaksanakan kegiatan bidang ketenagalistrikan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku		134.132.000,00	
			Jumlah pelaksanaan perizinan usaha yang dibina dan diawasi	-		-	-	77.101.700,00						-	72.354.000,00	
			Jumlah rekomendasi kepada Badan Usaha dalam rangka Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pemerintah Pusat	-		-	-	0,00						-	61.778.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.29.06.1.01.0005	Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik						77.101.700,00							72.354.000,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan pelaksanaan perizinan usaha penyediaan tenaga listrik	Jumlah pelaksanaan perizinan usaha yang dibina dan diawasi	-		-	1 Laporan	77.101.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	72.354.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	3.29.06.1.01.0006	Penerbitan rekomendasi dalam rangka penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik						0,00							61.778.000,00	
		Terlaksananya penerbitan rekomendasi kepada badan usaha dalam rangka penerbitan penetapan wilayah usaha penyediaan tenaga listrik oleh Pemerintah Pusat	Jumlah rekomendasi kepada Badan Usaha dalam rangka Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pemerintah Pusat	-		-	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	61.778.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Dinas Perindustrian dan Perdagangan						**27.692.572.023,00**							**32.076.436,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**27.692.572.023,00**							**32.076.436,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**24.366.142.023,00**							**0,00**	
305.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.134.142.023,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***20.116.142.023,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	87.58 Skor		84.16 Skor	85.00 Skor	20.116.142.023,00						85.85 Skor	0,00	
	3.30.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						88.363.380,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						88.363.380,00					asn opd perangkat daerah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.010.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.245.480,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.382.900,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.110.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.465.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.050.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.100.000,00						1 Laporan	0,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						88.363.380,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.010.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	5.245.480,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.382.900,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.110.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.465.000,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.050.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.100.000,00						1 Laporan	0,00	
	3.30.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						5.245.480,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	5.245.480,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	5.245.480,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						32.465.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	32.465.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						15.110.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.110.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.010.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.010.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						1.382.900,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.382.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						16.050.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	16.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						16.100.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	16.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.237.869.683,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun						17.237.869.683,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.660.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.960.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.135.800,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	Laporan	8.500.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.314.500,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan		57 Orang/ Bulan	57 Orang/ Bulan	17.168.299.383,00						57 Orang/ Bulan	0,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.237.869.683,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.660.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.960.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.135.800,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	Laporan	8.500.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.314.500,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan		57 Orang/ Bulan	57 Orang/ Bulan	17.168.299.383,00						57 Orang/ Bulan	0,00	
	3.30.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						17.168.299.383,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	57 Orang/ Bulan		57 Orang/ Bulan	118 Orang/ Bulan	17.168.299.383,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		57 Orang/ Bulan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	61 Orang/ Bulan		61 Orang/ Bulan	118 Orang/ Bulan	17.168.299.383,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		61 Orang/ Bulan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						45.960.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	45.960.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	45.960.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						8.135.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	8.135.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						3.660.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.660.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	4 Dokumen	3.660.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						8.500.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	8.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	8.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						3.314.500,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.314.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	3.314.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						12.205.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah Dokumen barang milik daerah yang tersusun						12.205.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.085.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.120.000,00						1 Dokumen	0,00	
		Tersedianya Dokumen Barang Milik Daerah Perangkat Daerah						12.205.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	5.085.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.120.000,00						1 Dokumen	0,00	
	3.30.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						7.120.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.03.0003	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.085.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	5.085.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	5.085.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						199.242.260,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersusun						199.242.260,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	38.150.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.300.000,00						Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	105.800.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	595.000,00						30 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.000.000,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.630.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	17.975.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.792.260,00						2 Paket	0,00	
		tersedianya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah						199.242.260,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	38.150.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.300.000,00						Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	105.800.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	595.000,00						30 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.000.000,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.630.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	17.975.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.792.260,00						2 Paket	0,00	
	3.30.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						4.630.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	12 Paket	4.630.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	4.630.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						17.975.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	12 Paket	17.975.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	17.975.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						6.792.260,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	6.792.260,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						595.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	6 Paket	595.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	6 Paket	595.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	3 Paket	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Paket	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						38.150.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	38.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	12 Dokumen	38.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						10.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Laporan		300 Laporan	12 Laporan	10.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		300 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						105.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	105.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	105.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.465.161.700,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah jasa penunjang pemerintah daerah yang tersedia						2.465.161.700,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	345.856.800,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.116.884.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.420.900,00						1 Laporan	0,00	
		Tersedianya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.465.161.700,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	345.856.800,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.116.884.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.420.900,00						1 Laporan	0,00	
	3.30.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.420.900,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	2.420.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	2.420.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						345.856.800,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	48 Laporan	345.856.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	48 Laporan	345.856.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		48 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.116.884.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	12 Laporan	2.116.884.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.116.884.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.300.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara						131.300.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	89.200.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	36.000.000,00						5 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	0,00						15 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	6.100.000,00						10 Unit	0,00	
		Tersedianya dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.300.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	89.200.000,00						2 Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	36.000.000,00						5 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	0,00						15 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	6.100.000,00						10 Unit	0,00	
	3.30.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Unit	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 Unit		15 Unit	15 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Unit	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						6.100.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	32 Unit	6.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Unit	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		32 Unit	32 Unit	6.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		32 Unit	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						89.200.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	89.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	4 Unit	89.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
306.	**3.30.02**	**PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN**						**100.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kemudahan proses perizinan dan pendaftaran berusaha						***25.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase usaha perdagangan yang difasilitasi	100 %		100 %	100 %	25.000.000,00						100 %	0,00	
	3.30.02.1.01	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) bagi Distributor						25.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
		Meningkatnya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUPMB) bagi Distributor						25.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
			Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen		6 Dokumen	7 Dokumen	25.000.000,00						8 Dokumen	0,00	
	3.30.02.1.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						25.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Penerbitan SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah SIUP-MB Toko Bebas Bea dan Surat Rekomendasi SIUP-MB bagi Distributor yang Diterbitkan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	10 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		8 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.1.02	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar, Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya, dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Provinsi						25.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
		Meningkatnya Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2) Toko Bebas Bea dan Rekomendasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (B2) (SIUPMB) bagi Distributor						25.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
			Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00						8 Dokumen	0,00	
	3.30.02.1.02.0004	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Distributor Terdaftar melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik						25.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Jumlah Pemberian Surat Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perizinan Perdagangan Besar/Distributor Terdaftar Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	8 Dokumen		8 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		8 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.1.03	Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar						50.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
		Meningkatnya Pengendalian Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya Pengecer Terdaftar						50.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	25.000.000,00						8 Laporan	0,00	
			Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	8 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00						8 Dokumen	0,00	
	3.30.02.1.03.0002	Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya						25.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	Jumlah Pemenuhan Komitmen Pemeriksaan Sarana Distribusi Bahan Berbahaya Pedagang Besar/Distributor Bahan Berbahaya sebagai Lampiran Surat Rekomendasi Perdagangan Besar/Distributor Bahan Berbahaya melalui Online Single Submission	8 Dokumen		6 Dokumen	8 Dokumen	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		8 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.02.1.03.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	Jumlah Laporan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		8 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
307.	**3.30.03**	**PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN**						**1.150.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya fasilitasi sarana dan prasarana Perdagangan						***1.150.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase fasilitasi sarana dan prasarana Perdagangan	100 %		100 %	100 %	1.150.000.000,00						100 %	0,00	
	3.30.03.1.01	Pembangunan dan Pengelolaan Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi serta Pasar Lelang Komoditas						1.150.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
		Terbangunnya sarana dan prasarana perdagangan melalui sistem rekomendasi						1.150.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	195 Orang		175 Orang	180 Orang	300.000.000,00						185 Orang	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	68 Unit		50 Unit	60 Unit	850.000.000,00						65 Unit	0,00	
	3.30.03.1.01.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi						850.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Distribusi Regional dan Pusat Distribusi Provinsi	68 Unit		50 Unit	70 Unit	850.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		65 Unit	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.03.1.01.0003	Penataan, Pembinaan, dan Pengembangan Pasar Lelang Komoditas						300.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	Jumlah Pengguna Pasar Lelang Komoditas yang Berpartisipasi	195 Orang		175 Orang	90 Orang	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		185 Orang	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
308.	**3.30.04**	**PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG Kebutuhan POKOK DAN BARANG PENTING**						**550.000.000,00**							**0,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya stabilitas Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok						***500.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok	0-10 %		0-10 %	0-10 %	500.000.000,00						0-10 %	0,00	
	3.30.04.1.01	Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Provinsi						75.000.000,00					Masyarakat		0,00	
		Meningkatkan ketersediaan stok barang kebutuhan pokok dan penting di pasar pantauan						75.000.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	50.000.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 laporan		4 laporan	4 laporan	25.000.000,00						4 laporan	0,00	
	3.30.04.1.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.1.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting di Tingkat Distributor dan Sub Distributor						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Penting Pokok di Tingkat Distributor dan Sub Distributor	4 laporan		4 laporan	2 laporan	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.1.02	Pengendalian Harga, Informasi Ketersediaan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota yang Terintegrasi dalam Sistem Informasi Perdagangan						400.000.000,00					Masyarakat		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		meningkatkan Komoditi Bapokting Terkendali Stock dan Harga Di Kabupaten/ Kota Melalui Sistem Informasi						400.000.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	65 Laporan		50 Laporan	55 Laporan	350.000.000,00						60 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00						12 Laporan	0,00	
	3.30.04.1.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota						50.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang Lintas Kabupaten/Kota	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.1.02.0002	Operasi Pasar dalam rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi						350.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar dalam Rangka Stabilisasi Harga Pangan Pokok yang Dampaknya Beberapa Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	65 Laporan		50 Laporan	55 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		60 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.1.03	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Tingkat Daerah Provinsi dalam Melakukan Pelaksanaan Pengadaan, Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi di Wilayah Kerjanya						75.000.000,00					Masyarakat		0,00	
		Meningkatkan pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di tingkan provinsi						75.000.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	12 Laporan		6 Laporan	10 Laporan	15.000.000,00						10 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	10 Laporan		7 Laporan	8 Laporan	60.000.000,00						9 Laporan	0,00	
	3.30.04.1.03.0003	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi						60.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	Jumlah Laporan Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk Bersubsidi dengan Realisasi Minimal 90%	10 Laporan		7 Laporan	8 Laporan	60.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		9 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.04.1.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida						15.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pupuk Bersubsidi dan Pestisida	12 Laporan		6 Laporan	2 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		10 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
309.	**3.30.05**	**PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR**						**1.050.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya pertumbuhan komoditi non tambang						***1.050.000.000,00***							***0,00***	
			999.Pertumbuhan komoditi sub sektor prioritas (pertanian, perkebunan, perikanan, ekonomi kreatif)	2 Komoditas		2 Komoditas	2 Komoditas	300.000.000,00						2 Komoditas	0,00	
		Meningkatkan promosi komoditi unggulan daerah melalui pameran dagang dan misi dagang						1.050.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	15 Pelaku Usaha		12 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	0,00						14 Pelaku Usaha	0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	11 Pelaku Usaha		9 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	300.000.000,00						11 Pelaku Usaha	0,00	
		Persentase UKM berorientasi ekspor unggulan terpromosi dagang						1.050.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	15 Pelaku Usaha		12 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	0,00						14 Pelaku Usaha	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	11 Pelaku Usaha		9 Pelaku Usaha	10 Pelaku Usaha	300.000.000,00						11 Pelaku Usaha	0,00	
	3.30.05.1.01.0001	Pameran Dagang Internasional/Nasional						300.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Internasional/Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	11 Pelaku Usaha		9 Pelaku Usaha	9 Pelaku Usaha	300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		11 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.1.01.0002	Pameran Dagang Lokal						0,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	Jumlah Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pameran Dagang Lokal	15 Pelaku Usaha		12 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		14 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Meningkatnya Pertumbuhan negara destinasi ekspor						***1.050.000.000,00***							***0,00***	
			999.Pertumbuhan negara destinasi ekspor	2 Negara		2 Negara	2 Negara	750.000.000,00						2 Negara	0,00	
	3.30.05.1.01	Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam Provinsi						1.050.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatkan promosi komoditi unggulan daerah melalui pameran dagang dan misi dagang						1.050.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	40 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha	3540 Pelaku Usaha	600.000.000,00						40 Pelaku Usaha	0,00	
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	40 Produk		40 Produk	40 Produk	150.000.000,00						40 Produk	0,00	
		Persentase UKM berorientasi ekspor unggulan terpromosi dagang						1.050.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
			Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	40 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha	3540 Pelaku Usaha	600.000.000,00						40 Pelaku Usaha	0,00	
			Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	40 Produk		40 Produk	40 Produk	150.000.000,00						40 Produk	0,00	
	3.30.05.1.01.0003	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan						600.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pelaku Usaha yang Berorientasi Ekspor pada Pelaksanaan Misi Dagang	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan	40 Pelaku Usaha		30 Pelaku Usaha	13 Pelaku Usaha	600.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		40 Pelaku Usaha	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.05.1.01.0004	Peningkatan Citra Produk Ekspor						150.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Citra Produk Ekspor	Jumlah Produk Unggulan Ekspor Daerah yang Disusun menjadi Materi Promosi	40 Produk		40 Produk	11 Produk	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	3.Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	-		40 Produk	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
310.	**3.30.06**	**PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN**						**1.400.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Konsumen						***1.400.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Penyelesaian Sengketa Konsumen	100 %		100 %	100 %	1.400.000.000,00						100 %	0,00	
	3.30.06.1.01	Pelaksanaan Perlindungan Konsumen di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						1.300.000.000,00					Masyarakat		0,00	
		Meningkatnya persentase penanganan pengaduan kasus						1.300.000.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	6 BPSK		6 BPSK	6 BPSK	1.300.000.000,00						6 BPSK	0,00	
	3.30.06.1.01.0001	Pemberdayaan Konsumen dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen						1.300.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Keberdayaan dan Kelembagaan Perlindungan Konsumen	Jumah Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang Aktif	6 BPSK		6 BPSK	6 BPSK	1.300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		6 BPSK	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.06.1.02	Pelaksanaan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Produk di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						0,00					Masyarakat		0,00	
		Terlaksananya pengujian dan sertifikasi mutu produk						0,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah produk potensial yang dipantau	5 Produk		5 Produk	5 Produk	0,00						5 Produk	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.06.1.02.0006	Pemantauan Mutu Produk						0,00							0,00	
		Meningkatnya Kesesuaian Mutu Produk Terhadap Standar/persyaratan teknis yang berlaku	Jumlah produk potensial yang dipantau	5 Produk		5 Produk	5 Produk	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Produk	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.30.06.1.03	Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa di Seluruh Daerah Kabupaten/Kota						100.000.000,00					Masyarakat		0,00	
		Meninglatkan pengawasan barang beredar dan/jasa diseluruh kabupaten kota						100.000.000,00					Masyarakat		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00						12 Laporan	0,00	
	3.30.06.1.03.0003	Peningkatan Kapasitas dan Pelaksanaan Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga						100.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Pengawasan Barang Beredar dan/atau Jasa serta Kegiatan Perdagangan Sesuai Parameter Ketentuan Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Barang Beredar dan Jasa serta Kegiatan Perdagangan yang Diawasi	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
311.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**400.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri						***0,00***							***0,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %		100 %	100 %	0,00						100 %	0,00	
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						200.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
		Meningkatnya produk yang terpromosi						200.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	2000 UMKM		1000 UMKM	2000 UMKM	200.000.000,00						2000 UMKM	0,00	
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi						0,00							0,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	2000 UMKM		1000 UMKM	25 UMKM	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2000 UMKM	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**3.326.430.000,00**							**32.076.436,00**	
312.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**3.908.430.000,00**							**32.076.436,00**	
		Meningkatnya realisasi pembangungnan industri						***1.626.430.000,00***							***32.076.436,00***	
			999.realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	17780.73 Milyar Rupiah		12144.48 Milyar Rupiah	13358.93 Milyar Rupiah	1.626.430.000,00						14694.82 Milyar Rupiah	32.076.436,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						3.908.430.000,00					Pelaku Usaha		32.076.436,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri yang dievaluasi						3.908.430.000,00					Pelaku Usaha		32.076.436,00	
			Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.670.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.260.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	682.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00						1 Dokumen	32.076.436,00	
	3.31.02.1.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi						4.500.000,00							32.076.436,00	
		Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	32.076.436,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.1.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri						14.260.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	14.260.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.1.01.0003	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri						1.500.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	7 Dokumen	1.500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan membangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						100.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						1.500.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	20 Dokumen	1.500.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.02.1.01.0006	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri						7.670.000,00							0,00	
		Terevaluasinya Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
313.	**3.31.03**	**PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI**						**100.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian						***50.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	50.000.000,00						100 Persentase	0,00	
	3.31.03.1.01	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI), dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Provinsi						100.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
		Terfasilitasinya penerbitan izin usaha industri						100.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	3.31.03.1.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Provinsi						50.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	-Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang lokasinya lintas Kab./Kota, dan Industri Besar sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.03.1.01.0004	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)						50.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-TInggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi: 1) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Besar, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dan 2) Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah pada 1 (satu) hamparan lokasi yang sama namun lintas kabupaten/kota, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat.	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
314.	**3.31.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL**						**100.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya pemanfaatan informasi industri						***100.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase ketersediaan informasi industri secara lengkap, akurat dan terkini	100 %		100 %	100 %	100.000.000,00						100 %	0,00	
	3.31.04.1.01	Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI, dan IPKI Kewenangan Provinsi Berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						100.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
		Tersedianya informasi data industri						100.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	3.31.04.1.01.0001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)						40.000.000,00							0,00	
		Terfasilitasinya Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Provinsi Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.04.1.01.0002	Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas						50.000.000,00							0,00	
		Terdiseminasi dan terpublikasikannya Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINAS	Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Provinsi melalui SIINas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
	3.31.04.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas						10.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpantau dan Terevaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Provinsi dalam Penyampaian Data ke SIINas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah						**1.540.514.000,00**							**0,00**	
	3	**URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN**						**1.540.514.000,00**							**0,00**	
	3.30	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN**						**418.000.000,00**							**0,00**	
315.	**3.30.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**20.134.142.023,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***18.000.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	87.58 Skor		84.16 Skor	85.00 Skor	18.000.000,00						85.85 Skor	0,00	
	3.30.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.237.869.683,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun						17.237.869.683,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.960.000,00						1 Dokumen	0,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.237.869.683,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	45.960.000,00						1 Dokumen	0,00	
	3.30.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						0,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.30.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.300.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara						131.300.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	36.000.000,00						5 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	6.100.000,00						10 Unit	0,00	
		Tersedianya dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						131.300.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	36.000.000,00						5 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	6.100.000,00						10 Unit	0,00	
	3.30.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5 Unit		5 Unit	1 Unit	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Unit	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.30.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	32 Unit		32 Unit	6 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		32 Unit	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	6 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Unit	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.30.01.1.10	Peningkatan Pelayanan BLUD						0,00					Seluruh penerima pelayanan BLUD		0,00	
		Tersedianya Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						0,00					Seluruh penerima pelayanan BLUD		0,00	
			Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00						1 Unit Kerja	0,00	
	3.30.01.1.10.0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD						0,00							0,00	
		Tersedianya BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit Kerja	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
316.	**3.30.07**	**PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI**						**400.000.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya penggunaan dan pemasaran produk dalam negeri						***200.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Fasilitasi Peningkatan Kapasitas Pemasaran Kelompok UKM	100 %		100 %	100 %	200.000.000,00						100 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.30.07.1.01	Pelaksanaan Promosi Produk Dalam Negeri						200.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
		Meningkatnya produk yang terpromosi						200.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	2000 UMKM		1000 UMKM	2000 UMKM	200.000.000,00						2000 UMKM	0,00	
	3.30.07.1.01.0002	Fasilitasi Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi						200.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kepersertaan dan Partisipasi pada Pameran Produk Dalam Negeri	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kepersertaan dan partisipasi pada pameran produk dalam negeri	2000 UMKM		1000 UMKM	2000 UMKM	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2000 UMKM	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.30.07.1.02	Pelaksanaan Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri						200.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
		Meningkatnya pemasaran produk						200.000.000,00					Pelaku Usaha		0,00	
			Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	6000 UMKM		3000 UMKM	4000 UMKM	200.000.000,00						5000 UMKM	0,00	
	3.30.07.1.02.0002	Fasilitasi Pemasaran Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Provinsi						200.000.000,00							0,00	
		Meningkatnya Akses Pemasaran Produk Dalam Negeri Terutama Produk yang Dihasilkan oleh UMKM melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitasi pemasaran produk dalam negeri terutama produk yang dihasilkan oleh UMKM melalui kemitraan dengan retail, marketplace, perhotelan dan jasa akomodasi	6000 UMKM		3000 UMKM	4000 UMKM	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5000 UMKM	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31	**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN**						**1.122.514.000,00**							**0,00**	
317.	**3.31.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**340.514.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***340.514.000,00***							***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.99 Skor		81.67 Skor	82.49 Skor	340.514.000,00						83.31 Skor	0,00	
	3.31.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
		Tersedianya Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
	3.31.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tersusun						0,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
		Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						0,00					asn opd perangkat daerah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
	3.31.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						800.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah administrasi umum perangkat daerah yang tersusun						800.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	0,00						30 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	200.000,00						12 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	600.000,00						12 Paket	0,00	
		tersedianya laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah						800.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00						Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	0,00						30 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	3 Paket	0,00						3 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	200.000,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	600.000,00						12 Paket	0,00	
	3.31.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						200.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	20 Paket	200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	3.31.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						600.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	30 Paket	600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Paket	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	30 Paket		30 Paket	30 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Paket	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	6 Paket		6 Paket	30 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Paket	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket		3 Paket	5 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Paket	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Paket	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	5 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Laporan	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	300 Laporan		300 Laporan	12 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		300 Laporan	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	15 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	15 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						339.714.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah jasa penunjang pemerintah daerah yang tersedia						339.714.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	337.914.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
		Tersedianya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						339.714.000,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	337.914.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
	3.31.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	300 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	300 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						337.914.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	337.914.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan		48 Laporan	4 Laporan	337.914.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		48 Laporan	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.800.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
		Jumlah barang milik daerah yang terpelihara						0,00					asn opd perangkat daerah		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
		Tersedianya dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						0,00					asn opd perangkat daerah		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	3.31.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Unit	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	5 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
318.	**3.31.02**	**PROGRAM Perencanaan DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI**						**3.908.430.000,00**							**32.076.436,00**	
		Meningkatnya realisasi pembangungnan industri						***782.000.000,00***							***0,00***	
			999.realisasi investasi sektor industri dan kawasan industri	17780.73 Milyar Rupiah		12144.48 Milyar Rupiah	13358.93 Milyar Rupiah	782.000.000,00						14694.82 Milyar Rupiah	0,00	
	3.31.02.1.01	Penyusunan, Penerapan, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Provinsi						3.908.430.000,00					Pelaku Usaha		32.076.436,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Industri yang dievaluasi						3.908.430.000,00					Pelaku Usaha		32.076.436,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	682.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	1.700.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	3.31.02.1.01.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri						582.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	1 Dokumen		1 Dokumen	330 Dokumen	582.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
	3.31.02.1.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat						200.000.000,00							0,00	
		Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	-		1 Dokumen	0,00	Balai Kemasan, Promosi dan Pemasaran Produk Daerah
		Biro Umum dan Administrasi Pimpinan						**138.329.494.222,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**138.329.494.222,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**138.329.494.222,00**							**0,00**	
319.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**142.791.377.967,00**							**4.787.153.515,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***138.329.494.222,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.74 Skor		77.59 Skor	78.36 Skor	138.329.494.222,00						79.15 Skor	0,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					-		521.498.558,00	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					-		521.498.558,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	27.468.100,00						4 Dokumen	45.972.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	208.964.450,00						9 Dokumen	108.654.397,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	27.711.700,00						5 Dokumen	45.972.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	202.312.180,00						7 Dokumen	61.963.775,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	149.776.000,00						6 Dokumen	84.594.064,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	200.100.200,00						9 Laporan	118.895.500,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						79.598.150,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	2 Dokumen	79.598.150,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						65.090.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	65.090.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						107.435.200,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	3 Dokumen	107.435.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						5.573.400,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	5.573.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						6.765.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	2 Dokumen	6.765.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						93.751.800,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	3 Laporan	93.751.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					-		496.884.019,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					-		496.884.019,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	14.924.800,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	404.978.360,00						18 Dokumen	458.157.421,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3225 Dokumen		3100 Dokumen	3150 Dokumen	43.056.400,00						3175 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	76.238.900,00						4 Laporan	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	169.156.200,00						39 Laporan	29.726.598,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5600 Orang/ Bulan		5600 Orang/ Bulan	5600 Orang/ Bulan	74.017.883.290,00						5600 Orang/ Bulan	0,00	
	4.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						74.017.883.290,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5600 Orang/ Bulan		5600 Orang/ Bulan	5600 Orang/ Bulan	74.017.883.290,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5600 Orang/ Bulan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						181.800.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	12 Dokumen	181.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						43.056.400,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	3225 Dokumen		3100 Dokumen	3100 Dokumen	43.056.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3175 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						12.438.900,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	12.438.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						51.438.900,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	51.438.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						94.540.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan		39 Laporan	4 Laporan	94.540.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		39 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						214.485.925,00					-		74.939.132,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						214.485.925,00					-		74.939.132,00	
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.483.505,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	60.145.900,00						7 Laporan	61.699.409,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.856.520,00						4 Dokumen	13.239.723,00	
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						25.478.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	25.478.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						80.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						37.205.900,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		7 Laporan	2 Laporan	37.205.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						12.236.105,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	12.236.105,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						109.581.685,00					-		23.958.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah						109.581.685,00					-		23.958.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	109.581.685,00						4 Dokumen	23.958.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00						5 Orang	0,00	
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						24.593.625,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	2 Dokumen	24.593.625,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		4 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		5 Orang	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					-		1.666.308.685,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					-		1.666.308.685,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8593 Dokumen		8521 Dokumen	8593 Dokumen	187.700.000,00						8593 Dokumen	24.374.800,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13001 Dokumen		11001 Dokumen	11501 Dokumen	90.881.600,00						12001 Dokumen	8.728.964,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	7.826.699.000,00						39 Laporan	83.195.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	176 Laporan	2.873.508.200,00						176 Laporan	1.139.325.936,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	50 Paket	279.168.785,00						53 Paket	150.972.786,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	47 Paket	233.336.640,00						49 Paket	259.710.399,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	78.403.000,00						4 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	978.639.900,00						4 Paket	0,00	
	4.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						78.403.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	78.403.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						977.559.900,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	977.559.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						129.918.660,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	4 Paket	129.918.660,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		53 Paket	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						54.412.340,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	4 Paket	54.412.340,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		49 Paket	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						158.900.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8593 Dokumen		8521 Dokumen	8520 Dokumen	158.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8593 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						7.699.350.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	12 Laporan	7.699.350.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		39 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.593.391.500,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	160 Laporan	1.593.391.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		176 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						82.955.600,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13001 Dokumen		11001 Dokumen	11500 Dokumen	82.955.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12001 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					-		1.318.137.467,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					-		1.318.137.467,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	249.750.000,00						5 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00						2 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	166 Unit	1.305.106.000,00						159 Unit	1.248.137.467,00	
	4.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						400.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	2 Unit	400.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						172.350.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	4 Paket	172.350.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Paket	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						642.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	82 Unit	642.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		159 Unit	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					-		478.754.354,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					-		478.754.354,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	3.849.260.200,00						13 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	10.155.580.000,00						23 Laporan	346.421.554,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.047.900.000,00						12 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	42.420.000,00						15 Laporan	12.332.800,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						32.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	12 Laporan	32.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						3.777.260.200,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	12 Laporan	3.777.260.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		13 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.047.900.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.047.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						9.447.011.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan		23 Laporan	12 Laporan	9.447.011.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		23 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					-		206.673.300,00	
		Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					-		206.673.300,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit		14 Unit	14 Unit	1.970.675.000,00						14 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	168 Unit		166 Unit	168 Unit	1.791.352.500,00						168 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	15.145.252.500,00						20 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	323 Unit	356.250.000,00						327 Unit	206.673.300,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	325.000.000,00						3 Unit	0,00	
	4.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						15.145.252.500,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	20 Unit		20 Unit	20 Unit	15.145.252.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Unit	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						1.791.352.500,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	168 Unit		166 Unit	168 Unit	1.791.352.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		168 Unit	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						204.580.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	229 Unit	204.580.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		327 Unit	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						1.970.675.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	14 Unit		14 Unit	14 Unit	1.970.675.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Unit	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						325.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		3 Unit	3 Unit	325.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.11	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						5.999.722.147,00					-		0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						5.999.722.147,00					-		0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan		24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	3.765.766.824,00						24 Orang/ Bulan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan		28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	1.619.805.323,00						28 Orang/Bulan	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	614.150.000,00						4 Paket	0,00	
	4.01.01.1.11.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.619.805.323,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	28 Orang/Bulan		28 Orang/Bulan	28 Orang/Bulan	1.619.805.323,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		28 Orang/Bulan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.11.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						614.150.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	614.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.11.0004	Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						3.765.766.824,00							0,00	
		Tersedianya Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan		24 Orang/ Bulan	24 Orang/ Bulan	3.765.766.824,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Orang/ Bulan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.12	Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						3.880.388.805,00					-		0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah						3.880.388.805,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.810.556.500,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	867.538.905,00						12 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.202.293.400,00						12 Paket	0,00	
	4.01.01.1.12.0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah						1.810.556.500,00							0,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.810.556.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.12.0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah						1.202.293.400,00							0,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	1.202.293.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.12.0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah TanggaSekretariat Daerah						867.538.905,00							0,00	
		Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	867.538.905,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.13	Fasilitasi Materi dan Komunikasi Pimpinan						1.504.986.900,00					-		0,00	
		Meningkatnya Kualitas Materi dan Komunikasi Pimpinan						1.504.986.900,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	207.999.900,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.300.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.283.687.000,00						12 Laporan	0,00	
	4.01.01.1.13.0001	Penyiapan Materi Pimpinan						207.999.900,00							0,00	
		Terlaksananya Penyiapan Materi Pimpinan	Jumlah Dokumen Materi Pimpinan yang Disiapkan	12 Dokumen		12 Dokumen	2000 Dokumen	207.999.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.13.0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan						13.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	13.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.13.0003	Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan						1.283.687.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	Jumlah Laporan Pengelolaan Dokumentasi Pimpinan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.283.687.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.14	Fasilitasi Keprotokolan						6.275.239.500,00					-		0,00	
		Meningkatnya Kualitas Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						6.275.239.500,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.886.575.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.363.250.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.025.414.500,00						12 Laporan	0,00	
	4.01.01.1.14.0001	Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara						1.886.575.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi dan Koordinasi Pelaksanaan Acara	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.886.575.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.14.0002	Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah						1.363.250.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Kunjungan Tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.363.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
	4.01.01.1.14.0003	Pengelolaan Hubungan Keprotokolan						3.025.414.500,00							0,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	Jumlah Laporan Pengelolaan Hubungan Keprotokolan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	3.025.414.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	0,00	Biro Umum dan Administrasi Pimpinan
		Biro Organisasi						**2.145.213.400,00**							**0,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.145.213.400,00**							**0,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**2.145.213.400,00**							**0,00**	
320.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**142.791.377.967,00**							**4.787.153.515,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***625.455.400,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.74 Skor		77.59 Skor	78.36 Skor	625.455.400,00						79.15 Skor	0,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					Stakeholder pengguna layanan Biro Organisasi		521.498.558,00	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					Stakeholder pengguna layanan Biro Organisasi		521.498.558,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	27.468.100,00						4 Dokumen	45.972.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	208.964.450,00						9 Dokumen	108.654.397,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	27.711.700,00						5 Dokumen	45.972.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	202.312.180,00						7 Dokumen	61.963.775,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	149.776.000,00						6 Dokumen	84.594.064,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	200.100.200,00						9 Laporan	118.895.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	77.519.100,00						4 Laporan	55.445.822,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						43.073.000,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	2 Dokumen	43.073.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						17.022.800,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	17.022.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						30.224.700,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	1 Dokumen	30.224.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						8.370.900,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	8.370.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						8.104.900,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	8.104.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						43.615.100,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	43.615.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Laporan	0,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						26.837.000,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	26.837.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					Stakeholeder Pengguna Layanan Biro Organisasi		496.884.019,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					Stakeholeder Pengguna Layanan Biro Organisasi		496.884.019,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	14.924.800,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	404.978.360,00						18 Dokumen	458.157.421,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	169.156.200,00						39 Laporan	29.726.598,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						30.571.800,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	12 Dokumen	30.571.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						2.485.900,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	2.485.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						2.706.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan		39 Laporan	12 Laporan	2.706.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		39 Laporan	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						214.485.925,00					Pengadministrasian barang milik daerah pada Biro Organisasi		74.939.132,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						214.485.925,00					Pengadministrasian barang milik daerah pada Biro Organisasi		74.939.132,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	23.483.505,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	60.145.900,00						7 Laporan	61.699.409,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.856.520,00						4 Dokumen	13.239.723,00	
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.390.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	1.390.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.735.300,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	1.735.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						11.247.400,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	11.247.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						109.581.685,00					Pengguna layanan kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		23.958.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah						109.581.685,00					Pengguna layanan kepegawaian Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		23.958.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	109.581.685,00						4 Dokumen	23.958.000,00	
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						54.273.300,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	146 Dokumen	54.273.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					Layanan Administrasi Umum pada Biro Organisasi		1.666.308.685,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					Layanan Administrasi Umum pada Biro Organisasi		1.666.308.685,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8593 Dokumen		8521 Dokumen	8593 Dokumen	187.700.000,00						8593 Dokumen	24.374.800,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	7.826.699.000,00						39 Laporan	83.195.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	176 Laporan	2.873.508.200,00						176 Laporan	1.139.325.936,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	50 Paket	279.168.785,00						53 Paket	150.972.786,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	47 Paket	233.336.640,00						49 Paket	259.710.399,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	978.639.900,00						4 Paket	0,00	
	4.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						1.080.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	3 Paket	1.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Paket	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						14.426.100,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	12 Paket	14.426.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		53 Paket	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						31.026.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	12 Paket	31.026.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		49 Paket	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						3.600.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8593 Dokumen		8521 Dokumen	120 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8593 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						30.801.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	500 Laporan	30.801.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		39 Laporan	0,00	Biro Organisasi

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						89.872.700,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	50 Laporan	89.872.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		176 Laporan	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					Pengguna barang milik daerah pada perangkat daerah		1.318.137.467,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					Pengguna barang milik daerah pada perangkat daerah		1.318.137.467,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	166 Unit	1.305.106.000,00						159 Unit	1.248.137.467,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						145.171.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	12 Unit	145.171.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		159 Unit	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					Pengguna jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah		478.754.354,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					Pengguna jasa penunjang urusan pemerintahan daerah pada perangkat daerah		478.754.354,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	42.420.000,00						15 Laporan	12.332.800,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.920.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	500 Laporan	1.920.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Laporan	0,00	Biro Organisasi
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		206.673.300,00	
		Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah		206.673.300,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	323 Unit	356.250.000,00						327 Unit	206.673.300,00	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						25.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	18 Unit	25.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		327 Unit	0,00	Biro Organisasi
321.	**4.01.02**	**PROGRAM PENATAAN ORGANISASI**						**1.519.758.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Penataan Organisasi						***1.519.758.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Implementasi standar kompetensi jabatan	100 %		100 %	100 %	1.519.758.000,00						100 %	0,00	
			999.Persentase Ketatalaksanaan Implementasi Kab/Kota	100 %		100 %	100 %	1.519.758.000,00						100 %	0,00	
			999.Persentase Ketatalaksanaan Perangkat Daerah	100 %		100 %	100 %	1.519.758.000,00						100 %	0,00	
			999.Persentase Kualitas Pelayanan Publik	100 %		100 %	100 %	1.519.758.000,00						100 %	0,00	
			999.Persentase kualitas Penetapan Organisasi Kelembagaan Perangkat Daerah Prov dan Kab/Kota	100 %		100 %	100 %	1.519.758.000,00						100 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase kualitas Perangkat Daerah dengan kebutuhan ASN sesuai ANJAB dan ABK	100 %		100 %	100 %	1.519.758.000,00						100 %	0,00	
			999.Persentase Kualitas Tingkat Implementasi Pelayanan Publik Kab/Kota	100 %		100 %	100 %	1.519.758.000,00						100 %	0,00	
	4.01.02.1.01	Fasilitasi Kelembagaan dan Analisis Jabatan						542.132.300,00					Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan Provinsi Nusa Tenggara Barat		0,00	
		Tersedianya Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan, Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja dan Evaluasi Jabatan						542.132.300,00					Penataan Kelembagaan Provinsi, Kabupaten/Kota dan Analisis Jabatan Provinsi Nusa Tenggara Barat		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	70.672.500,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	242.044.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	229.415.800,00						7 Dokumen	0,00	
	4.01.02.1.01.0001	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Provinsi						229.415.800,00							0,00	
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	7 Dokumen		7 Dokumen	6 Dokumen	229.415.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.01.0002	Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota						70.672.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Kelembagaan Kabupaten/Kota	1 Dokumen		1 Dokumen	22 Dokumen	70.672.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.01.0003	Penataan Analisis Jabatan						242.044.000,00							0,00	
		Terlaksananya Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Evaluasi Jabatan	4 Dokumen		4 Dokumen	56 Dokumen	242.044.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02	Fasilitasi Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja						977.625.700,00					Penilaian RB Tematik, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Penilaian Budaya Kerja, Tatalaksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat		0,00	
		Terlaksananya Penyusunan dan Pendampingan Penguatan Pelaksanaan SAKIP PD Lingkup Provinsi NTB, Penyusunan SOP AP pada						977.625.700,00					Penilaian RB Tematik, SAKIP Perangkat Daerah dan Provinsi, Penilaian Budaya Kerja, Tatalaksana Pemerintahan, dan Pelayanan Publik Provinsi Nusa Tenggara Barat		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	251.937.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	247.505.100,00						2 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	234.265.800,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	202.447.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	41.470.800,00						2 Laporan	0,00	
	4.01.02.1.02.0001	Pembinaan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi						234.265.800,00							0,00	
		Terlaksananya Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	234.265.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0002	Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja						247.505.100,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	247.505.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0003	Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja						41.470.800,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Budaya Kerja	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	41.470.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0004	Pengelolaan Tatalaksana Pemerintahan						202.447.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Tata Laksana Pemerintahan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	202.447.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
	4.01.02.1.02.0005	Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik						251.937.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Publik	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	251.937.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Biro Organisasi
		Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia						**6.923.170.495,00**							**7.657.333.593,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**6.923.170.495,00**							**7.657.333.593,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**6.923.170.495,00**							**7.657.333.593,00**	
322.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**142.791.377.967,00**							**4.787.153.515,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***929.403.895,00***							***1.584.560.043,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.74 Skor		77.59 Skor	78.36 Skor	929.403.895,00						79.15 Skor	1.584.560.043,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					Kab/Kota se NTB		521.498.558,00	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					Kab/Kota se NTB		521.498.558,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	208.964.450,00						9 Dokumen	108.654.397,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	202.312.180,00						7 Dokumen	61.963.775,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	149.776.000,00						6 Dokumen	84.594.064,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	200.100.200,00						9 Laporan	118.895.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	77.519.100,00						4 Laporan	55.445.822,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						19.070.000,00							21.031.397,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	2 Dokumen	19.070.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Dokumen	21.031.397,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						19.611.200,00							21.628.564,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	19.611.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	21.628.564,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						18.064.180,00							19.998.275,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	1 Dokumen Dokumen	18.064.180,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Dokumen	19.998.275,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						19.203.500,00							21.269.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	19.203.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Laporan	21.269.000,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						24.822.100,00							8.760.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	24.822.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	8.760.000,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					Kab/Kota se NTB		496.884.019,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					Kab/Kota se NTB		496.884.019,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	404.978.360,00						18 Dokumen	458.157.421,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	169.156.200,00						39 Laporan	29.726.598,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						29.427.880,00							32.559.321,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	12 Dokumen	29.427.880,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Dokumen	32.559.321,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						18.797.000,00							20.726.598,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan		39 Laporan	12 Laporan	18.797.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		39 Laporan	20.726.598,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						214.485.925,00					Kab/Kota se NTB		74.939.132,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						214.485.925,00					Kab/Kota se NTB		74.939.132,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	60.145.900,00						7 Laporan	61.699.409,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.856.520,00						4 Dokumen	13.239.723,00	
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						11.988.020,00							13.239.723,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	11.988.020,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	13.239.723,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						3.935.000,00							3.379.409,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		7 Laporan	2 Laporan	3.935.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	3.379.409,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						109.581.685,00					Kab/Kota se NTB		23.958.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah						109.581.685,00					Kab/Kota se NTB		23.958.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	109.581.685,00						4 Dokumen	23.958.000,00	
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						21.714.760,00							23.958.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	21.714.760,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	23.958.000,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					Kab/Kota se NTB		1.666.308.685,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					Kab/Kota se NTB		1.666.308.685,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8593 Dokumen		8521 Dokumen	8593 Dokumen	187.700.000,00						8593 Dokumen	24.374.800,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13001 Dokumen		11001 Dokumen	11501 Dokumen	90.881.600,00						12001 Dokumen	8.728.964,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	7.826.699.000,00						39 Laporan	83.195.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	176 Laporan	2.873.508.200,00						176 Laporan	1.139.325.936,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	50 Paket	279.168.785,00						53 Paket	150.972.786,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	47 Paket	233.336.640,00						49 Paket	259.710.399,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						9.444.255,00							10.655.986,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	12 Paket	9.444.255,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		53 Paket	10.655.986,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						26.142.000,00							28.750.399,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	12 Paket	26.142.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		49 Paket	28.750.399,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						14.400.000,00							14.374.800,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8593 Dokumen		8521 Dokumen	72 Dokumen	14.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8593 Dokumen	14.374.800,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						16.616.000,00							18.367.800,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	12 Laporan	16.616.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		39 Laporan	18.367.800,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						292.500.000,00							401.085.936,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	12 Laporan	292.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		176 Laporan	401.085.936,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						7.926.000,00							8.728.964,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	13001 Dokumen		11001 Dokumen	12 Dokumen	7.926.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12001 Dokumen	8.728.964,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					Kab/Kota se NTB		1.318.137.467,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					Kab/Kota se NTB		1.318.137.467,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	166 Unit	1.305.106.000,00						159 Unit	1.248.137.467,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						95.544.000,00							620.591.017,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	55 Unit	95.544.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		159 Unit	620.591.017,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					Kab/Kota se NTB		478.754.354,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					Kab/Kota se NTB		478.754.354,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	10.155.580.000,00						23 Laporan	346.421.554,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						261.928.000,00							276.421.554,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan		23 Laporan	12 Laporan	261.928.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pajak Rokok	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		23 Laporan	276.421.554,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					Kab/Kota se NTB		206.673.300,00	
		Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					Kab/Kota se NTB		206.673.300,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	323 Unit	356.250.000,00						327 Unit	206.673.300,00	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						18.270.000,00							19.033.300,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	38 Unit	18.270.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		327 Unit	19.033.300,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
323.	**4.01.05**	**PROGRAM FASILITASI DAN KOORDINASI HUKUM**						**5.993.766.600,00**							**6.072.773.550,00**	
		Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum						***5.993.766.600,00***							***6.072.773.550,00***	
			999.Persentase Penyusunan Produk Hukum Daerah dan Penyelesaian Kasus-kasus Hukum	100 %		100 %	100 %	5.993.766.600,00						100 %	6.072.773.550,00	
	4.01.05.1.01	Fasilitasi Penyusunan Perundang-Undangan						2.913.806.700,00					Kab/Kota se NTB		2.684.796.606,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan evaluasi produk hukum daerah						2.913.806.700,00					Kab/Kota se NTB		2.684.796.606,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	892.057.000,00						150 Dokumen	981.355.848,00	
			Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	700 Dokumen		700 Dokumen	Dokumen	427.212.900,00						700 Dokumen	469.997.616,00	
			Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	593.877.300,00						40 Dokumen	731.294.784,00	
			Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	65 Dokumen		65 Dokumen	65 Dokumen	1.000.659.500,00						65 Dokumen	502.148.358,00	
	4.01.05.1.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPengaturan						593.877.300,00							731.294.784,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Pengaturan	Jumlah Produk Hukum Pengaturan yang Disusun	40 Dokumen		40 Dokumen	40 Dokumen	593.877.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		40 Dokumen	731.294.784,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.05.1.01.0002	Fasilitasi Penyusunan Produk HukumPenetapan						427.212.900,00							469.997.616,00	
		Terfasilitasinya Penyusunan Produk Hukum Penetapan	Jumlah Produk Hukum Penetapan yang Disusun	700 Dokumen		700 Dokumen	700 Dokumen	427.212.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		700 Dokumen	469.997.616,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.05.1.01.0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Naskah Hukum Lainnya						1.000.659.500,00							502.148.358,00	
		Terlaksananya Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum yang Didokumentasi dan Dikelola Informasi Hukumnya	65 Dokumen		65 Dokumen	65 Dokumen	1.000.659.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		65 Dokumen	502.148.358,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.05.1.01.0004	Fasilitasi dan Evaluasi Produk HukumKabupaten/Kota						892.057.000,00							981.355.848,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Produk Hukum Kabupaten/Kota	Jumlah Produk Hukum Kabupaten/Kota yang Difasilitasi dan Dievaluasi	150 Dokumen		150 Dokumen	150 Dokumen	892.057.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		150 Dokumen	981.355.848,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.05.1.02	Fasilitasi Bantuan Hukum						3.079.959.900,00					Kab/Kota se NTB		3.387.976.944,00	
		Terlaksananya fasilitasi penanganan kasus-kasus hukum						3.079.959.900,00					Kab/Kota se NTB		3.387.976.944,00	
			Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	4 Kasus		4 Kasus	4 Kasus	2.815.476.800,00						4 Kasus	3.097.030.200,00	
			Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	4 Kasus		4 Kasus	4 Kasus	264.483.100,00						4 Kasus	290.946.744,00	
	4.01.05.1.02.0001	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum						2.815.476.800,00							3.097.030.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Hukum	Jumlah Masalah Hukum yang Diselesaikan	4 Kasus		4 Kasus	4 Kasus	2.815.476.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Kasus	3.097.030.200,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
	4.01.05.1.02.0002	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM						264.483.100,00							290.946.744,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyelesaian Masalah Non Litigasi dan HAM	Jumlah Masalah Non Litigasi dan HAM yang Diselesaikan	4 Kasus		4 Kasus	4 Kasus	264.483.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Kasus	290.946.744,00	Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia
		Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah						**1.294.634.000,00**							**1.291.500.000,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.294.634.000,00**							**1.291.500.000,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.294.634.000,00**							**1.291.500.000,00**	
324.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**142.791.377.967,00**							**4.787.153.515,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***273.454.000,00***							***326.500.000,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.74 Skor		77.59 Skor	78.36 Skor	273.454.000,00						79.15 Skor	326.500.000,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					Perangkat daerah provinsi		521.498.558,00	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					Perangkat daerah provinsi		521.498.558,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	202.312.180,00						7 Dokumen	61.963.775,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	149.776.000,00						6 Dokumen	84.594.064,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	200.100.200,00						9 Laporan	118.895.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	77.519.100,00						4 Laporan	55.445.822,00	
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						7.060.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	7.060.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	8.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						7.060.000,00							8.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	1 Dokumen	7.060.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Dokumen	8.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						7.060.000,00							8.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	7.060.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Laporan	8.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.060.000,00							8.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	7.060.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	8.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					Perangkat daerah provinsi		496.884.019,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					Perangkat daerah provinsi		496.884.019,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	404.978.360,00						18 Dokumen	458.157.421,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						14.400.000,00							18.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	1 Dokumen	14.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Dokumen	18.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					Perangkat daerah provinsi		1.666.308.685,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					Perangkat daerah provinsi		1.666.308.685,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	7.826.699.000,00						39 Laporan	83.195.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	176 Laporan	2.873.508.200,00						176 Laporan	1.139.325.936,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	50 Paket	279.168.785,00						53 Paket	150.972.786,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	47 Paket	233.336.640,00						49 Paket	259.710.399,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						25.281.000,00							28.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	25 Paket	25.281.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		53 Paket	28.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						14.956.000,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	20 Paket	14.956.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		49 Paket	21.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						5.932.000,00							6.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	1 Laporan	5.932.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		39 Laporan	6.500.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						105.184.000,00							140.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	1 Laporan	105.184.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		176 Laporan	140.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					Perangkat daerah provinsi		1.318.137.467,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					Perangkat daerah provinsi		1.318.137.467,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	166 Unit	1.305.106.000,00						159 Unit	1.248.137.467,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						45.000.000,00							35.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	3 Unit	45.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		159 Unit	35.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					Perangkat daerah provinsi		478.754.354,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					Perangkat daerah provinsi		478.754.354,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	10.155.580.000,00						23 Laporan	346.421.554,00	
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						36.641.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan		23 Laporan	1 Laporan	36.641.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		23 Laporan	70.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					Perangkat daerah provinsi		206.673.300,00	
		Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					Perangkat daerah provinsi		206.673.300,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	323 Unit	356.250.000,00						327 Unit	206.673.300,00	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						19.000.000,00							21.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	16 Unit	19.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		327 Unit	21.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
325.	**4.01.03**	**PROGRAM PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH**						**1.000.000.000,00**							**920.000.000,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Pemerintahan dan Otonomi Daerah						***1.000.000.000,00***							***855.000.000,00***	
			999.Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	3.415 %		3.052 %	3.165 %	1.000.000.000,00						3.245 %	855.000.000,00	
			999.Persentase efektifitas kerja sama daerah	90 %		78 %	80 %	1.000.000.000,00						83 %	855.000.000,00	
	4.01.03.1.01	Pelaksanaan Tugas Pemerintahan						240.000.000,00					Pemerintah Provinsi/Kab/Kota		270.000.000,00	
		Meningkatnya penyelesaian pelaksanaan tugas pemerintahan						240.000.000,00					Pemerintah Provinsi/Kab/Kota		270.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00						1 Dokumen	105.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00						1 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00						1 Dokumen	70.000.000,00	
	4.01.03.1.01.0001	Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan						65.000.000,00							70.000.000,00	
		Terkelolanya Administrasi Kebijakan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kebijakan Pemerintahan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	65.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	70.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.01.0002	Fasilitasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum						85.000.000,00							95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pemerintahan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	85.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	95.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.01.0003	Fasilitasi Penataan Wilayah						90.000.000,00							105.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penataan Wilayah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penataan Wilayah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	90.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	105.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02	Pelaksanaan Otonomi Daerah						320.000.000,00					Pemerintah Provinsi/Kab/Kota		335.000.000,00	
		Meningkatnya penyelesaian pelaksanaan otonomi daerah						320.000.000,00					Pemerintah Provinsi/Kab/Kota		335.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	35 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	80.000.000,00						30 Dokumen	90.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00						2 Laporan	195.000.000,00	
	4.01.03.1.02.0001	Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD						80.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Administrasi Kepala Daerah dan DPRD	35 Dokumen		25 Dokumen	25 Dokumen	80.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Dokumen	90.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.1.02.0002	Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan						40.000.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Otonomi dan Penataan Urusan yang Dilaksanakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	40.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.02.0003	Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan						200.000.000,00							195.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi dan Penyelenggaraan Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	195.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.03	Fasilitasi Kerja Sama Daerah						440.000.000,00					Pemerintah Provinsi/Kab/Kota		315.000.000,00	
		Meningkatnya pelaksanaan fasilitasi kerja sama daerah						440.000.000,00					Pemerintah Provinsi/Kab/Kota		315.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen		25 Dokumen	26 Dokumen	165.000.000,00						27 Dokumen	185.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	30 Dokumen		25 Dokumen	26 Dokumen	187.000.000,00						27 Dokumen	65.000.000,00	
			Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	20 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	88.000.000,00						15 Laporan	65.000.000,00	
	4.01.03.1.03.0001	Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah						165.000.000,00							185.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Antar Pemerintah	Jumlah Kerja Sama Antar Pemerintah yang Difasilitasi	30 Dokumen		25 Dokumen	20 Dokumen	165.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		27 Dokumen	185.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.03.1.03.0002	Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta						187.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama Badan Usaha/Swasta	Jumlah Kerja Sama Badan Usaha/Swasta yang Difasilitasi	30 Dokumen		25 Dokumen	20 Dokumen	187.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		27 Dokumen	65.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
	4.01.03.1.03.0003	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama						88.000.000,00							65.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Kerja Sama yang Dievaluasi	20 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	88.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Laporan	65.000.000,00	Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah
		Biro Kesejahteraan Rakyat						**54.779.322.234,00**							**195.790.100,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**54.779.322.234,00**							**195.790.100,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**54.779.322.234,00**							**195.790.100,00**	
326.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**142.791.377.967,00**							**4.787.153.515,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***1.190.800.470,00***							***151.201.600,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.74 Skor		77.59 Skor	78.36 Skor	1.190.800.470,00						79.15 Skor	151.201.600,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		521.498.558,00	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		521.498.558,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	27.468.100,00						4 Dokumen	45.972.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	208.964.450,00						9 Dokumen	108.654.397,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	27.711.700,00						5 Dokumen	45.972.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	202.312.180,00						7 Dokumen	61.963.775,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	149.776.000,00						6 Dokumen	84.594.064,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	200.100.200,00						9 Laporan	118.895.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	77.519.100,00						4 Laporan	55.445.822,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						18.290.400,00							17.303.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	3 Dokumen	18.290.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Dokumen	17.303.000,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						15.000.000,00							16.637.500,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Dokumen	16.637.500,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						15.000.000,00							16.637.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	1 Dokumen	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Dokumen	16.637.500,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						9.000.000,00							12.644.500,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	12.644.500,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						9.000.000,00							12.644.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	12.644.500,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.000.000,00							15.306.500,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Laporan	15.306.500,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.000.000,00							15.306.500,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	15.306.500,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		496.884.019,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		496.884.019,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	404.978.360,00						18 Dokumen	458.157.421,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	76.238.900,00						4 Laporan	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	169.156.200,00						39 Laporan	29.726.598,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						41.640.000,00							89.310.100,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	1 Dokumen	41.640.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Dokumen	89.310.100,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						15.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						47.250.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan		39 Laporan	18 Laporan	47.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		39 Laporan	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						214.485.925,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		74.939.132,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						214.485.925,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		74.939.132,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	60.145.900,00						7 Laporan	61.699.409,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	50.856.520,00						4 Dokumen	13.239.723,00	
	4.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						12.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	12.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						12.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	12.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						109.581.685,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		23.958.000,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah						109.581.685,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		23.958.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	109.581.685,00						4 Dokumen	23.958.000,00	
	4.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						9.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	9.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		1.666.308.685,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		1.666.308.685,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	7.826.699.000,00						39 Laporan	83.195.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	176 Laporan	2.873.508.200,00						176 Laporan	1.139.325.936,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	50 Paket	279.168.785,00						53 Paket	150.972.786,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	47 Paket	233.336.640,00						49 Paket	259.710.399,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						66.013.970,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	10 Paket	66.013.970,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		53 Paket	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						60.005.100,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	10 Paket	60.005.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		49 Paket	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						37.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	1 Laporan	37.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		39 Laporan	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						411.360.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	1 Laporan	411.360.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		176 Laporan	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		1.318.137.467,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		1.318.137.467,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	166 Unit	1.305.106.000,00						159 Unit	1.248.137.467,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						206.991.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	10 Unit	206.991.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		159 Unit	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		478.754.354,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		478.754.354,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	10.155.580.000,00						23 Laporan	346.421.554,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	42.420.000,00						15 Laporan	12.332.800,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						5.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Laporan	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						210.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan		23 Laporan	1 Laporan	210.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		23 Laporan	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		206.673.300,00	
		Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat		206.673.300,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	323 Unit	356.250.000,00						327 Unit	206.673.300,00	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	20 Unit	50.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		327 Unit	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
327.	**4.01.04**	**PROGRAM KESEJAHTERAAN RAKYAT**						**53.498.521.764,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Kebijakan Kesejahteraan Rakyat						***53.498.521.764,00***							***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Kesejahteraan Rakyat Dari Segi Mental Spiritual, Pelayanan Dasar dan Non Pelayanan Dasar	100 %		100 %	100 %	53.498.521.764,00						100 %	0,00	
	4.01.04.1.01	Fasilitasi Pembinaan Mental Spiritual						26.198.214.699,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat		0,00	
		Tercapainya Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dari segi Mental Spiritual						26.198.214.699,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat		0,00	
			Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	9.947.084.334,00						3 Lembaga	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	12 Unit		12 Unit	12 Unit	16.251.130.365,00						12 Unit	0,00	
	4.01.04.1.01.0001	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Spiritual						16.251.130.365,00							0,00	
		Terkelolanya Sarana dan Prasarana Spiritual	Jumlah Sarana dan Prasarana Spiritual yang Dikelola	12 Unit		12 Unit	12 Unit	16.251.130.365,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Unit	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.01.0002	Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual						9.947.084.334,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kelembagaan Bina Spiritual	Jumlah Lembaga Bina Spiritual yang Difasilitasi	3 Lembaga		3 Lembaga	3 Lembaga	9.947.084.334,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Lembaga	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Pelayanan Dasar						27.016.815.565,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat		0,00	
		Tercapainya Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dari segi Pelayanan Dasar						27.016.815.565,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	167.500.000,00						2 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	18.909.315.565,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.940.000.000,00						2 Dokumen	0,00	
	4.01.04.1.02.0001	Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan						18.909.315.565,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pendidikan	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	18.909.315.565,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan						167.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kesehatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	167.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.02.0003	Fasilitasi, Koordinasi dan Sinkronisasi, Evaluasi dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial						7.940.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi, Koordinasi, Sinkronisasi, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Sosial	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.940.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		2 Dokumen	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03	Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat Non Pelayanan Dasar						283.491.500,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat		0,00	
		Tercapainya Persentase Fasilitasi Pengembangan Kesejahteraan Rakyat dari segi Non Pelayanan Dasar						283.491.500,00					Masyarakat Nusa Tenggara Barat		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	97.500.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.500.100,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	122.491.400,00						2 Dokumen	0,00	
	4.01.04.1.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata						97.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	97.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja						122.491.400,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Transmigrasi dan Tenaga Kerja	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	122.491.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
	4.01.04.1.03.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan						63.500.100,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kesejahteraan Rakyat Bidang Komunikasi, Informatika, Statistik, Persandian, dan Perhubungan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	63.500.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan						**4.633.580.380,00**							**5.005.435.871,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**4.633.580.380,00**							**5.005.435.871,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**4.633.580.380,00**							**5.005.435.871,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
328.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**142.791.377.967,00**							**4.787.153.515,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***482.448.580,00***							***1.514.033.722,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.74 Skor		77.59 Skor	78.36 Skor	482.448.580,00						79.15 Skor	1.514.033.722,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					-		521.498.558,00	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					-		521.498.558,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	27.468.100,00						4 Dokumen	45.972.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	208.964.450,00						9 Dokumen	108.654.397,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	27.711.700,00						5 Dokumen	45.972.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	202.312.180,00						7 Dokumen	61.963.775,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	149.776.000,00						6 Dokumen	84.594.064,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	200.100.200,00						9 Laporan	118.895.500,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	77.519.100,00						4 Laporan	55.445.822,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						14.885.500,00							58.320.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	1 Dokumen	14.885.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Dokumen	58.320.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						8.002.500,00							23.328.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	1 Dokumen	8.002.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	23.328.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						8.002.500,00							2.328.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	1 Dokumen	8.002.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	2.328.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							23.328.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	23.328.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							23.328.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	23.328.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						16.976.800,00							58.320.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	16.976.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Laporan	58.320.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.800.000,00							23.379.322,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	3.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	23.379.322,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					-		496.884.019,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					-		496.884.019,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	404.978.360,00						18 Dokumen	458.157.421,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						87.198.680,00							198.288.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	1 Dokumen	87.198.680,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Dokumen	198.288.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						214.485.925,00					-		74.939.132,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						214.485.925,00					-		74.939.132,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	60.145.900,00						7 Laporan	61.699.409,00	
	4.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						5.269.700,00							58.320.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7 Laporan		7 Laporan	1 Laporan	5.269.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Laporan	58.320.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					-		1.666.308.685,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					-		1.666.308.685,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	7.826.699.000,00						39 Laporan	83.195.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	176 Laporan	2.873.508.200,00						176 Laporan	1.139.325.936,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	50 Paket	279.168.785,00						53 Paket	150.972.786,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	47 Paket	233.336.640,00						49 Paket	259.710.399,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						10.451.200,00							72.316.800,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	5 Paket	10.451.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		53 Paket	72.316.800,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.224.200,00							174.960.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	13 Paket	10.224.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		49 Paket	174.960.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							23.328.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	10 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		39 Laporan	23.328.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						113.800.000,00							408.240.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	1 Laporan	113.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		176 Laporan	408.240.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					-		1.318.137.467,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					-		1.318.137.467,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	166 Unit	1.305.106.000,00						159 Unit	1.248.137.467,00	
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						0,00							433.900.800,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	9 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		159 Unit	433.900.800,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					-		478.754.354,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					-		478.754.354,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	10.155.580.000,00						23 Laporan	346.421.554,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	42.420.000,00						15 Laporan	12.332.800,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.500.000,00							2.332.800,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Laporan	2.332.800,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	23 Laporan		23 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		23 Laporan	0,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					-		206.673.300,00	
		Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					-		206.673.300,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	323 Unit	356.250.000,00						327 Unit	206.673.300,00	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						9.340.000,00							116.640.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	20 Unit	9.340.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		327 Unit	116.640.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
329.	**4.01.06**	**PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN**						**3.477.144.300,00**							**2.496.205.749,00**	
		Meningkatnya kualitas kebijakan bidang perekonomian						***3.477.144.300,00***							***2.426.205.749,00***	
			999.Persentase rekomendasi bidang perekonomian yang ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	3.477.144.300,00						100 %	2.426.205.749,00	
	4.01.06.1.01	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Perekonomian						860.792.500,00					-		994.665.096,00	
		Tersusunnya rumusan kebijakan bidang kebijakan dan koordinasi perekonomian; Total Dana Pihak Ketiga / PDRB; Total Kredit / PDRB; Aset Perbankan Syariah / PDRB; Nilai Transaksi Saham per provinsi berupa nila Rata-Rata Tahunan; Jumlah Produk Tersertifikasi Halal; Indeks Zakat Nasional; Aset Dana Pensiun/PDRB						860.792.500,00					-		994.665.096,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	557.447.400,00						11 Dokumen	583.200.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	303.345.100,00						5 Dokumen	411.465.096,00	
	4.01.06.1.01.0001	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro						557.447.400,00							583.200.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Makro	11 Dokumen		11 Dokumen	11 Dokumen	557.447.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		11 Dokumen	583.200.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.06.1.01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro						303.345.100,00							411.465.096,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Kebijakan Ekonomi Mikro	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	303.345.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Dokumen	411.465.096,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.06.1.02	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi Sumber Daya Alam						1.593.729.400,00					-		291.600.000,00	
		Tersusunnya rumusan kebijakan Sumber Daya Alam						1.593.729.400,00					-		291.600.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	85.290.300,00						5 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	108.439.100,00						5 Dokumen	70.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.400.000.000,00						10 Dokumen	151.600.000,00	
	4.01.06.1.02.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan						1.400.000.000,00							151.600.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.400.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Bagi Hasil (DBH) DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	-	-		10 Dokumen	151.600.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.06.1.02.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup						108.439.100,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	108.439.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Dokumen	70.000.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.06.1.02.0003	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air						85.290.300,00							70.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	85.290.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Dokumen	70.000.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.06.1.03	Pengelolaan Kebijakan dan Koordinasi BUMD dan BLUD						1.022.622.400,00					-		1.209.940.653,00	
		Tersusunnya rumusan kebijakan bidang BUMD dan BLUD						1.022.622.400,00					-		1.209.940.653,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	353.797.600,00						10 Dokumen	451.780.653,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	132.184.800,00						14 Dokumen	408.240.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	536.640.000,00						10 Dokumen	349.920.000,00	
	4.01.06.1.03.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha						536.640.000,00							349.920.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Jasa Keuangan dan Aneka Usaha	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	536.640.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Dokumen	349.920.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.06.1.03.0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi						132.184.800,00							408.240.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah Air Minum, Limbah dan Sanitasi	14 Dokumen		14 Dokumen	14 Dokumen	132.184.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		14 Dokumen	408.240.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.06.1.03.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah						353.797.600,00							451.780.653,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring, dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	353.797.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		10 Dokumen	451.780.653,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
330.	**4.01.08**	**PROGRAM KEBIJAKAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**						**665.985.000,00**							**808.572.400,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		meningkatnya kualitas administrasi kebijakan pembangunan						***665.985.000,00***							***808.572.400,00***	
			999.Jumlah rekomendasi hasil pengendalian pembangunan yang ditindaklanjuti	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	665.985.000,00						6 Dokumen	808.572.400,00	
		Tersusunnya rumusan kebijakan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah						533.470.000,00					-		208.123.347,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	383.470.000,00						5 Laporan	208.123.347,00	
	4.01.08.1.01.0001	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD						383.470.000,00							208.123.347,00	
		Terkendalinya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBD	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	383.470.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		5 Laporan	208.123.347,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.02	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						132.515.000,00					-		600.449.053,00	
		Tersusunnya dokumen hasil pelaporan pelaksanaan pembangunan daerah						132.515.000,00					-		600.449.053,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00						4 Dokumen	358.865.053,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	132.515.000,00						19 Laporan	241.584.000,00	
	4.01.08.1.02.0002	Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah						132.515.000,00							241.584.000,00	
		Tersusunnya Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	132.515.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		19 Laporan	241.584.000,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.02.0003	Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah						0,00							358.865.053,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Perumusan Kebijakan Teknis Pembangunan Daerah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	358.865.053,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
	4.01.08.1.01	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah						533.470.000,00					-		208.123.347,00	
		Tersusunnya rumusan kebijakan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah						533.470.000,00					-		208.123.347,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	-		-	-	150.000.000,00						-	0,00	
	4.01.08.1.01.0002	Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN						150.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalianya Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Administrasi Pelaksanaan Pembangunan APBN	-		-	5 Laporan	150.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Bagi Hasil (DBH)	-	-		-	0,00	Biro Perekonomian dan Administrasi Pembangunan
		Biro Pengadaan Barang dan Jasa						**1.810.121.500,00**							**3.838.255.650,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.810.121.500,00**							**3.838.255.650,00**	
	4.01	**SEKRETARIAT DAERAH**						**1.810.121.500,00**							**3.838.255.650,00**	
331.	**4.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**142.791.377.967,00**							**4.787.153.515,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***841.138.900,00***							***725.645.650,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	80.74 Skor		77.59 Skor	78.36 Skor	841.138.900,00						79.15 Skor	725.645.650,00	
	4.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					-		521.498.558,00	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						893.851.730,00					-		521.498.558,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	27.468.100,00						4 Dokumen	45.972.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	208.964.450,00						9 Dokumen	108.654.397,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	27.711.700,00						5 Dokumen	45.972.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	202.312.180,00						7 Dokumen	61.963.775,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	6 Dokumen	149.776.000,00						6 Dokumen	84.594.064,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	200.100.200,00						9 Laporan	118.895.500,00	
	4.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						34.047.400,00							12.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10 Dokumen		9 Dokumen	2 Dokumen	34.047.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Dokumen	12.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						17.989.500,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	6 Dokumen		6 Dokumen	2 Dokumen	17.989.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Dokumen	15.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						16.525.600,00							15.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	7 Dokumen		7 Dokumen	1 Dokumen	16.525.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Dokumen	15.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						4.523.800,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	4.523.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	10.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						3.841.800,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	1 Dokumen	3.841.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Dokumen	10.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						4.493.000,00							16.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	9 Laporan		9 Laporan	1 Laporan	4.493.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		9 Laporan	16.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					-		496.884.019,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						74.726.237.950,00					-		496.884.019,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	18 Dokumen	404.978.360,00						18 Dokumen	458.157.421,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	76.238.900,00						4 Laporan	9.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan		39 Laporan	39 Laporan	169.156.200,00						39 Laporan	29.726.598,00	
	4.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						19.940.000,00							120.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	18 Dokumen		18 Dokumen	1 Dokumen	19.940.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		18 Dokumen	120.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						9.800.000,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	9.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	9.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						5.863.200,00							9.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	39 Laporan		39 Laporan	18 Laporan	5.863.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		39 Laporan	9.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					-		1.666.308.685,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Umum Perangkat Daerah						12.548.337.125,00					-		1.666.308.685,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8593 Dokumen		8521 Dokumen	8593 Dokumen	187.700.000,00						8593 Dokumen	24.374.800,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	38 Laporan	7.826.699.000,00						39 Laporan	83.195.800,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	176 Laporan	2.873.508.200,00						176 Laporan	1.139.325.936,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	50 Paket	279.168.785,00						53 Paket	150.972.786,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	47 Paket	233.336.640,00						49 Paket	259.710.399,00	
	4.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						23.633.600,00							40.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	56 Paket		49 Paket	4 Paket	23.633.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		53 Paket	40.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						36.571.000,00							35.000.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	55 Paket		46 Paket	3 Paket	36.571.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		49 Paket	35.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						10.800.000,00							10.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	8593 Dokumen		8521 Dokumen	2 Dokumen	10.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8593 Dokumen	10.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						36.500.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	41 Laporan		38 Laporan	1 Laporan	36.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		39 Laporan	35.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						267.400.000,00							190.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	176 Laporan		169 Laporan	1 Laporan	267.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		176 Laporan	190.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					-		1.318.137.467,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						1.954.856.000,00					-		1.318.137.467,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	249.750.000,00						5 Paket	70.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	166 Unit	1.305.106.000,00						159 Unit	1.248.137.467,00	
	4.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						77.400.000,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	2 Paket	77.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	70.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						170.400.000,00							158.645.650,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	223 Unit		110 Unit	10 Unit	170.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		159 Unit	158.645.650,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					-		478.754.354,00	
		Meningkatnya Kualitas Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						15.095.160.200,00					-		478.754.354,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	3.849.260.200,00						13 Laporan	120.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	42.420.000,00						15 Laporan	12.332.800,00	
	4.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.000.000,00							10.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	15 Laporan		15 Laporan	1 Laporan	1.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		15 Laporan	10.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						72.000.000,00							120.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	13 Laporan		13 Laporan	1 Laporan	72.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		13 Laporan	120.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					-		206.673.300,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						19.588.530.000,00					-		206.673.300,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	323 Unit	356.250.000,00						327 Unit	206.673.300,00	
	4.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						28.410.000,00							50.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	330 Unit		312 Unit	21 Unit	28.410.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		327 Unit	50.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
332.	**4.01.07**	**PROGRAM KEBIJAKAN DAN PELAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA**						**968.982.600,00**							**2.903.610.000,00**	
		Meningkatnya kualitas layanan pengadaan barang dan jasa						***968.982.600,00***							***1.903.610.000,00***	
			999.Indeks Tata Kelola Pengadaan	95 Indeks		85 Indeks	87.5 Indeks	968.982.600,00						90 Indeks	1.903.610.000,00	
	4.01.07.1.01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa						350.929.500,00					-		560.000.000,00	
		Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang teapat waktu sesuai SOP						350.929.500,00					-		560.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	218.070.000,00						1 Laporan	400.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00						1 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	77.859.500,00						1 Laporan	70.000.000,00	
	4.01.07.1.01.0001	Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa						77.859.500,00							70.000.000,00	
		Terkelolanya Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Strategi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	77.859.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	70.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01.0002	Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa						218.070.000,00							400.000.000,00	
		Terlaksananya Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	218.070.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	400.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.01.0003	Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa						55.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	55.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	90.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.02	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik						135.283.000,00					-		750.000.000,00	
		Persentase Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang sesuai standar						135.283.000,00					-		750.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.193.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	52.693.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.397.000,00						1 Laporan	250.000.000,00	
	4.01.07.1.02.0001	Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik						52.693.000,00							250.000.000,00	
		Terkelolanya Sistem Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	52.693.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.02.0002	Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						37.397.000,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengembangan Sistem Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.397.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.02.0003	Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa						45.193.000,00							250.000.000,00	
		Terkelolanya Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	45.193.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa						482.770.100,00					-		1.593.610.000,00	
		Nilai Kematangan UKPBJ dimensi kelembagaan						482.770.100,00					-		1.593.610.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	214.503.100,00						1 Dokumen	1.093.610.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	144.757.500,00						1 Dokumen	250.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang		3 Orang	3 Orang	123.509.500,00						3 Orang	250.000.000,00	
	4.01.07.1.03.0001	Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa						123.509.500,00							250.000.000,00	
		Terbinanya Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa	3 Orang		3 Orang	150 Orang	123.509.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Orang	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
	4.01.07.1.03.0002	Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa						144.757.500,00							250.000.000,00	
		Terlaksananya Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	144.757.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	250.000.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.01.07.1.03.0003	Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa						214.503.100,00							1.093.610.000,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	214.503.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	1.093.610.000,00	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah						**114.907.341.260,00**							**151.126.085.682,00**	
	4	**UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**						**114.907.341.260,00**							**151.126.085.682,00**	
	4.02	**SEKRETARIAT DPRD**						**114.907.341.260,00**							**151.126.085.682,00**	
333.	**4.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**72.712.687.860,00**							**89.790.375.682,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***72.702.457.860,00***							***89.785.375.682,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	76.48 Skor		73.50 Skor	74.23 Skor	72.702.457.860,00						74.98 Skor	89.785.375.682,00	
	4.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						282.993.860,00					Pemerintah Daerah Provinsi NTB		774.802.810,00	
		Meningkatnya Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun						282.993.860,00					Pemerintah Daerah Provinsi NTB		774.802.810,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.780.200,00						1 Dokumen	41.145.850,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	216.663.200,00						2 Dokumen	236.418.700,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.883.100,00						1 Dokumen	59.781.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.457.300,00						1 Dokumen	127.825.800,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.806.660,00						1 Dokumen	87.193.660,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.751.100,00						3 Laporan	64.686.400,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	7.652.300,00						17 Laporan	157.751.400,00	
	4.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						216.663.200,00							236.418.700,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	216.663.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	236.418.700,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						8.806.660,00							87.193.660,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.806.660,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	87.193.660,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						14.457.300,00							127.825.800,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	14.457.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	127.825.800,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						7.780.200,00							41.145.850,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.780.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	41.145.850,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						20.883.100,00							59.781.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.883.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	59.781.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.751.100,00							64.686.400,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	6.751.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	64.686.400,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						7.652.300,00							157.751.400,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	17 Laporan		17 Laporan	17 Laporan	7.652.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		17 Laporan	157.751.400,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.651.601.140,00					ASN, Perangkat Daerah		14.079.566.005,00	
		Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.651.601.140,00					ASN, Perangkat Daerah		14.079.566.005,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	102.189.900,00						1 Dokumen	6.138.400,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	106.042.000,00						1 Dokumen	210.211.100,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7500 Dokumen		7500 Dokumen	7500 Dokumen	152.293.800,00						7500 Dokumen	270.143.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.020.000,00						1 Laporan	79.486.800,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/ Bulan		106 Orang/ Bulan	106 Orang/ Bulan	12.290.055.440,00						106 Orang/ Bulan	13.513.586.705,00	
	4.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.290.055.440,00							13.513.586.705,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	106 Orang/ Bulan		106 Orang/ Bulan	106 Orang/ Bulan	12.290.055.440,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		106 Orang/ Bulan	13.513.586.705,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						106.042.000,00							210.211.100,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	106.042.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	210.211.100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						152.293.800,00							270.143.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	7500 Dokumen		7500 Dokumen	7500 Dokumen	152.293.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7500 Dokumen	270.143.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						1.020.000,00							79.486.800,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.020.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	79.486.800,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						102.189.900,00							6.138.400,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	102.189.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	6.138.400,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						1.160.000,00					ASN, Perangkat Daerah		14.000.000,00	
		Meningkatnya Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah						1.160.000,00					ASN, Perangkat Daerah		14.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	700.000,00						4 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	230.000,00						2 Laporan	5.000.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	230.000,00						2 Dokumen	4.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						230.000,00							4.000.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	230.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	4.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						230.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	230.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	5.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						700.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	5.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						101.384.500,00					ASN, DPRD, Perangkat Daerah		857.420.200,00	
		Meningkatnya Jumlah Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah						101.384.500,00					ASN, DPRD, Perangkat Daerah		857.420.200,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.824.500,00						1 Dokumen	46.519.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	60.000.000,00						24 Orang	181.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00						1 Paket	80.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	8.000.000,00						4 Orang	90.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	6.560.000,00						1 Unit	459.901.000,00	
	4.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						6.560.000,00							459.901.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	6.560.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	459.901.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							80.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	0 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	80.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						26.824.500,00							46.519.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.824.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	46.519.200,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						8.000.000,00							90.000.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	4 Orang		4 Orang	4 Orang	8.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Orang	90.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						60.000.000,00							181.000.000,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	24 Orang		24 Orang	24 Orang	60.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Orang	181.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						834.137.400,00					Pemerintah Daerah Provinsi NTB		6.213.208.055,00	
		Meningkatnya Cakupan pelayanan administrasi umum perangkat daerah						834.137.400,00					Pemerintah Daerah Provinsi NTB		6.213.208.055,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	143.900.000,00						7 Dokumen	180.280.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	93.030.000,00						1 Dokumen	179.896.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.107.900,00						1 Dokumen	35.736.500,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	145.400.000,00						4 Laporan	2.705.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	222.800.000,00						4 Laporan	1.877.630.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	98.187.000,00						2 Paket	444.761.100,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	60.812.500,00						2 Paket	202.303.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	38.400.000,00						2 Paket	142.822.000,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	8.500.000,00						2 Paket	444.779.455,00	
	4.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						38.400.000,00							142.822.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	38.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	142.822.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.500.000,00							444.779.455,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	8.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	444.779.455,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						98.187.000,00							444.761.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	98.187.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	444.761.100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						60.812.500,00							202.303.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	60.812.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	202.303.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						143.900.000,00							180.280.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	143.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Dokumen	180.280.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						145.400.000,00							2.705.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	145.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	2.705.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						222.800.000,00							1.877.630.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	222.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	1.877.630.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						23.107.900,00							35.736.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.107.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	35.736.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						93.030.000,00							179.896.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	93.030.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	179.896.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						51.770.000,00					Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB		2.618.496.130,00	
		Meningkatnya Jumlah pengadaan Barang Milik Daerah						51.770.000,00					Pemerintah Daerah Provinsi NTB dan DPRD Provinsi NTB		2.618.496.130,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	270.000,00						2 Paket	592.243.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00						2 Unit	70.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.500.000,00						1 Unit	715.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		40 Unit	9 Unit	50.000.000,00						9 Unit	1.241.252.330,00	
	4.02.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						1.500.000,00							715.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	1.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	715.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							70.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		0 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	70.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						270.000,00							592.243.800,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	270.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	592.243.800,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						50.000.000,00							1.241.252.330,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	9 Unit		40 Unit	9 Unit	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Unit	1.241.252.330,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						5.374.827.500,00					Pemerintah Daerah Provinsi NTB		6.804.695.520,00	
		Meningkatnya Cakupan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						5.374.827.500,00					Pemerintah Daerah Provinsi NTB		6.804.695.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	382.242.500,00						4 Laporan	893.645.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.934.635.000,00						1 Laporan	5.179.300.520,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	41.300.000,00						2 Laporan	589.595.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.650.000,00						4 Laporan	142.155.000,00	
	4.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						16.650.000,00							142.155.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	16.650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	142.155.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						382.242.500,00							893.645.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	382.242.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	893.645.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						41.300.000,00							589.595.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	41.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	589.595.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						4.934.635.000,00							5.179.300.520,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.934.635.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	5.179.300.520,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						256.790.000,00					Pemerintah Daerah Provinsi NTB		3.528.472.000,00	
		Meningkatnya Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						256.790.000,00					Pemerintah Daerah Provinsi NTB		3.528.472.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00						1 Unit	35.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit	3 Unit	37.000.000,00						3 Unit	2.300.364.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit		66 Unit	66 Unit	18.000.000,00						66 Unit	687.470.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	167.600.000,00						5 Unit	192.600.000,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	70 Unit		50 Unit	70 Unit	180.000,00						70 Unit	17.500.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	228 Unit		123 Unit	228 Unit	24.010.000,00						228 Unit	295.538.000,00	
	4.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						167.600.000,00							192.600.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5 Unit		5 Unit	5 Unit	167.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Unit	192.600.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						18.000.000,00							687.470.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	66 Unit		66 Unit	66 Unit	18.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		66 Unit	687.470.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						180.000,00							17.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70 Unit		50 Unit	70 Unit	180.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		70 Unit	17.500.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.010.000,00							295.538.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	228 Unit		123 Unit	228 Unit	24.010.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		228 Unit	295.538.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						10.000.000,00							35.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	35.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						37.000.000,00							2.300.364.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit	3 Unit	37.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	2.300.364.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.1.15	Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD						52.517.139.560,00					Anggota DPRD Provinsi NTB		54.011.326.360,00	
		Meningkatnya Jumlah jenis layanan keuangan DPRD						52.517.139.560,00					Anggota DPRD Provinsi NTB		54.011.326.360,00	
			Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan		65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	52.498.991.360,00						65 Orang/ Bulan	52.723.576.360,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang		65 Orang	65 Orang	8.148.200,00						65 Orang	390.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00						2 Paket	897.750.000,00	
	4.02.01.1.15.0001	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD						52.498.991.360,00							52.723.576.360,00	
		Tersedianya Hak Keuangan Anggota DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD	65 Orang/ Bulan		65 Orang/ Bulan	65 Orang/ Bulan	52.498.991.360,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		65 Orang/ Bulan	52.723.576.360,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.15.0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD						10.000.000,00							897.750.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	897.750.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.15.0003	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD						8.148.200,00							390.000.000,00	
		Terlaksananya Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD	65 Orang		65 Orang	65 Orang	8.148.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		65 Orang	390.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.01.1.16	Layanan Administrasi DPRD						640.883.900,00					Anggota DPRD Provinsi NTB		888.388.602,00	
		Meningkatnya Jumlah jenis layanan administrasi DPRD						640.883.900,00					Anggota DPRD Provinsi NTB		888.388.602,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	76.461.100,00						4 Laporan	298.814.320,00	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	84.422.800,00						4 Laporan	109.578.600,00	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	480.000.000,00						12 Paket	479.995.682,00	
	4.02.01.1.16.0002	Fasilitasi Fraksi DPRD						76.461.100,00							298.814.320,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	76.461.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	298.814.320,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.16.0003	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD						84.422.800,00							109.578.600,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	84.422.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	109.578.600,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.01.1.16.0004	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD						480.000.000,00							479.995.682,00	
		Terlaksananya Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan	12 Paket		12 Paket	12 Paket	480.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Paket	479.995.682,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
334.	**4.02.02**	**PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD**						**42.194.653.400,00**							**61.335.710.000,00**	
		Meningkatnya kualitas fasilitasi dan dukungan Sekretariat DPRD dalam penyelenggaraan dan pengawasan DPRD Provinsi NTB guna memperkuat partisipasi masyarakat dan kualitas demookrasi daerah						***42.174.011.850,00***							***60.934.501.490,00***	
			999.Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik/KIP	92 Nilai		90 Nilai	91 Nilai	42.174.011.850,00						91 Nilai	60.934.501.490,00	
			999.Persentase ketepatan waktu penetapan Peraturan Daerah yang didukung oleh kajian dan dokumen pendukung	100 %		100 %	100 %	42.174.011.850,00						100 %	60.934.501.490,00	
			999.Persentase ketepatan waktu penyelesaian pembahasan anggaran yang difasilitasi tepat waktu dan sesuai kebutuhan	100 %		100 %	100 %	42.174.011.850,00						100 %	60.934.501.490,00	
			999.Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan DPRD terhadap eksekutif yangdifasilitasi dengan data dan dokumen pendukung	100 %		100 %	100 %	42.174.011.850,00						100 %	60.934.501.490,00	
			999.Tingkat kepuasan anggota DPRD terhadap pelayanan Sekretariat DPRD	82 Nilai		80 Nilai	81 Nilai	42.174.011.850,00						81 Nilai	60.934.501.490,00	
	4.02.02.1.01	Pembentukan Perda dan Peraturan DPRD						1.285.382.100,00					DPRD, Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.905.531.600,00	
		Meningkatnya Jumlah pembentukan Perda dan Peraturan DPRD yang difasilitasi						1.285.382.100,00					DPRD, Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.905.531.600,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	32.994.000,00						7 Dokumen	86.379.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.056.291.600,00						10 Dokumen	1.012.033.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	60.000.000,00						7 Dokumen	403.255.000,00	
			Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	89.432.500,00						1 Dokumen	368.088.000,00	
			Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	46.664.000,00						1 Dokumen	35.776.100,00	
	4.02.02.1.01.0001	Penyusunan dan Pembahasan ProgramPembentukan Peraturan Daerah						1.056.291.600,00							1.012.033.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	1.056.291.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Dokumen	1.012.033.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.01.0002	Pembahasan Rancangan Perda						32.994.000,00							86.379.500,00	
		Terlaksananya Pembahasan Rancangan Perda	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Perda	7 Dokumen		7 Dokumen	7 Dokumen	32.994.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Dokumen	86.379.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan						89.432.500,00							368.088.000,00	
		Terselenggaranya Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	89.432.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	368.088.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.01.0004	Fasilitasi Penyusunan Naskah Akademik						60.000.000,00							403.255.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi	7 Dokumen		7 Dokumen	5 Dokumen	60.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Dokumen	403.255.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.01.0005	Penyusunan Tata Tertib DPRD						46.664.000,00							35.776.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	46.664.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	35.776.100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.02	Pembahasan Kebijakan Anggaran						690.997.700,00					DPRD, Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.307.197.500,00	
		Meningkatnya Jumlah laporan rekomendasi kebijakan anggaran						690.997.700,00					DPRD, Perangkat Daerah dan Masyarakat		1.307.197.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	134.608.000,00						1 Dokumen	128.393.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.163.000,00						1 Dokumen	409.368.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	94.633.200,00						1 Dokumen	105.489.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.208.500,00						1 Dokumen	105.489.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	103.258.500,00						1 Dokumen	179.779.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	148.126.500,00						1 Dokumen	378.678.500,00	
	4.02.02.1.02.0001	Pembahasan KUA dan PPAS						110.163.000,00							409.368.500,00	
		Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	110.163.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	409.368.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.02.0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS						148.126.500,00							378.678.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	148.126.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	378.678.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.02.0003	Pembahasan APBD						134.608.000,00							128.393.500,00	
		Terlaksananya Pembahasan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	134.608.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	128.393.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.02.0004	Pembahasan Perubahan APBD						103.258.500,00							179.779.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Perubahan APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	103.258.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	179.779.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.02.0005	Pembahasan Laporan Semester						94.633.200,00							105.489.000,00	
		Terlaksananya Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	94.633.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	105.489.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.02.0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD						100.208.500,00							105.489.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.208.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	105.489.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.03	Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan						402.320.750,00					DPRD, Perangkat Daerah dan Masyarakat		727.252.930,00	
		Meningkatnya Jumlah laporan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan						402.320.750,00					DPRD, Perangkat Daerah dan Masyarakat		727.252.930,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.198.550,00						4 Laporan	98.573.170,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	79.674.250,00						4 Laporan	332.960.250,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.637.950,00						4 Laporan	98.573.170,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	81.344.650,00						4 Laporan	98.573.170,00	
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.465.350,00						4 Laporan	98.573.170,00	
	4.02.02.1.03.0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum						79.674.250,00							332.960.250,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	79.674.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	332.960.250,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.03.0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur						80.198.550,00							98.573.170,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.198.550,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	98.573.170,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.03.0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat						80.465.350,00							98.573.170,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.465.350,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	98.573.170,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.03.0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian						80.637.950,00							98.573.170,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	80.637.950,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	98.573.170,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.03.0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam						81.344.650,00							98.573.170,00	
		Terlaksananya Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	81.344.650,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	98.573.170,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.1.04	Peningkatan Kapasitas DPRD						4.116.793.200,00					DPRD, Perangkat Daerah dan Masyarakat		7.427.257.320,00	
		Meningkatnya Jumlah anggota DPRD yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas						4.116.793.200,00					DPRD, Perangkat Daerah dan Masyarakat		7.427.257.320,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	2.283.939.500,00						4 Dokumen	4.190.328.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	67.750.000,00						1 Dokumen	58.730.000,00	
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	964.200.000,00						4 Dokumen	1.734.638.620,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	7.979.500,00						0 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	582 Orang		582 Orang	582 Orang	401.800.000,00						582 Orang	986.600.000,00	
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang		8 Orang	8 Orang	391.124.200,00						8 Orang	456.960.200,00	
	4.02.02.1.04.0002	Pendalaman Tugas DPRD						2.283.939.500,00							4.190.328.500,00	
		Terlaksananya Pendalaman Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	3 Dokumen	2.283.939.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	4.190.328.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.04.0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli						401.800.000,00							986.600.000,00	
		Tersedianya Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli	582 Orang		582 Orang	582 Orang	401.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		582 Orang	986.600.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.04.0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi						391.124.200,00							456.960.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	8 Orang		8 Orang	8 Orang	391.124.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Orang	456.960.200,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.04.0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat						67.750.000,00							58.730.000,00	
		Terselenggaranya Hubungan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	67.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	58.730.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.04.0007	Penyusunan Program Kerja DPRD						7.979.500,00							0,00	
		Tersusunnya Rencana Kerja DPRD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD	0 Dokumen		0 Dokumen	0 Dokumen	7.979.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Dokumen	0,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.04.0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD						964.200.000,00							1.734.638.620,00	
		Terlaksananya Publikasi dan Dokumentasi DPRD	Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	964.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	1.734.638.620,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.05	Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat						31.388.348.950,00					DPRD, Perangkat Daerah dan Masyarakat		40.094.816.260,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Jumlah laporan penyerapan dan penghimpunan aspirasi masyarakat						31.388.348.950,00					DPRD, Perangkat Daerah dan Masyarakat		40.094.816.260,00	
			Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	11.656.736.550,00						3 Dokumen	21.087.465.960,00	
			Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.538.000,00						2 Dokumen	160.740.300,00	
			Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.802.480.000,00						4 Laporan	4.846.610.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	19500 Orang		19500 Orang	19500 Orang	16.868.594.400,00						19500 Orang	14.000.000.000,00	
	4.02.02.1.05.0001	Kunjungan Kerja dalam Daerah						2.802.480.000,00							4.846.610.000,00	
		Terselenggaranya Kunjungan Kerja DPRD	Jumlah Laporan Hasil Kunjungan Kerja DPRD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	2.802.480.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	4.846.610.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.05.0002	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD						60.538.000,00							160.740.300,00	
		Tersusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	60.538.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	160.740.300,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.05.0003	Pelaksanaan Reses						11.656.736.550,00							21.087.465.960,00	
		Terlaksananya Reses	Jumah Dokumen Hasil Pelaksanaan Reses	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	11.656.736.550,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	21.087.465.960,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	4.02.02.1.05.0004	Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah						16.868.594.400,00							14.000.000.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah	19500 Orang		19500 Orang	19500 Orang	16.868.594.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		19500 Orang	14.000.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.06	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD						41.283.100,00					Anggota DPRD Provinsi NTB		66.882.890,00	
		Meningkatnya Jumlah laporan pelaksanaan dan pengawasan kode etik DPRD						41.283.100,00					Anggota DPRD Provinsi NTB		66.882.890,00	
			Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.641.550,00						1 Dokumen	28.914.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.641.550,00						1 Laporan	37.967.940,00	
	4.02.02.1.06.0001	Penyusunan Kode Etik DPRD						20.641.550,00							28.914.950,00	
		Tersusunnya Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.641.550,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	28.914.950,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.06.0002	Pengawasan Kode Etik DPRD						20.641.550,00							37.967.940,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	20.641.550,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	37.967.940,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.08	Fasilitasi Tugas DPRD						4.269.527.600,00					DPRD, Perangkat Daerah dan Masyarakat		9.806.771.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Jumlah jenis fasilitasi tugas DPRD						4.269.527.600,00					DPRD, Perangkat Daerah dan Masyarakat		9.806.771.500,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	93.895.400,00						4 Dokumen	124.787.100,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	87.000.000,00						1 Dokumen	79.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	763.989.200,00						4 Dokumen	827.110.900,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.300.000.000,00						4 Dokumen	8.742.730.000,00	
			Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.643.000,00						1 Laporan	33.143.500,00	
	4.02.02.1.08.0001	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD						3.300.000.000,00							8.742.730.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	3.300.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	8.742.730.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.08.0002	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD						24.643.000,00							33.143.500,00	
		Tersusunnya Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.643.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	33.143.500,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.08.0003	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah						93.895.400,00							124.787.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	93.895.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	124.787.100,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.08.0004	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD						763.989.200,00							827.110.900,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	763.989.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	827.110.900,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
	4.02.02.1.08.0005	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus						87.000.000,00							79.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	87.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	79.000.000,00	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
		Badan Perencanaan Pembangunan Daerah						**35.162.246.087,00**							**52.997.975.638,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**35.162.246.087,00**							**52.997.975.638,00**	
	5.01	**PERENCANAAN**						**35.162.246.087,00**							**52.997.975.638,00**	
335.	**5.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**23.702.118.587,00**							**37.369.031.507,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***23.702.118.587,00***							***37.369.031.507,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	86 Skor		84.6 Skor	84.94 Skor	23.702.118.587,00						85.2 Skor	37.369.031.507,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						355.705.700,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh Provinsi NTB		219.100.464,00	
		Tercapainya Persentase LHP yang ditindaklanjuti						355.705.700,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh Provinsi NTB		219.100.464,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.728.800,00						1 Dokumen	14.726.181,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	97.801.800,00						2 Dokumen	52.723.402,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.180.000,00						1 Dokumen	12.500.762,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	98.463.800,00						1 Dokumen	42.493.988,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.258.800,00						1 Dokumen	34.181.094,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	68.272.500,00						2 Laporan	62.475.037,00	
	5.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						97.801.800,00							52.723.402,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	97.801.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	52.723.402,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						59.258.800,00							34.181.094,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.258.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	34.181.094,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						98.463.800,00							42.493.988,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	98.463.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	42.493.988,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						16.728.800,00							14.726.181,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	16.728.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	14.726.181,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						15.180.000,00							12.500.762,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	15.180.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	12.500.762,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						68.272.500,00							62.475.037,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	68.272.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	62.475.037,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						17.173.912.667,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemda Prov. NTB		24.137.379.877,00	
		Tercapainya Persentase Laporan Keuangan yang akrual dan akuntabel						17.173.912.667,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemda Prov. NTB		24.137.379.877,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	16.895.800,00						3 Dokumen	8.893.030,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.664.800,00						4 Dokumen	8.915.499,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	64.002.800,00						2 Dokumen	42.711.953,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	48.135.800,00						5 Dokumen	6.923.700,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	34.802.280,00						3 Laporan	26.864.860,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan		110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	16.989.411.187,00						110 Orang/ Bulan	24.043.070.835,00	
	5.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						16.989.411.187,00							24.043.070.835,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	110 Orang/ Bulan		110 Orang/ Bulan	110 Orang/ Bulan	16.989.411.187,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		110 Orang/ Bulan	24.043.070.835,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						64.002.800,00							42.711.953,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	64.002.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	42.711.953,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						48.135.800,00							6.923.700,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	48.135.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	6.923.700,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						20.664.800,00							8.915.499,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	20.664.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	8.915.499,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						34.802.280,00							26.864.860,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	34.802.280,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	26.864.860,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						16.895.800,00							8.893.030,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	16.895.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	8.893.030,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						79.444.000,00					Internal Bappeda Prov. NTB, Perangkat Daerah Lingkup Prov. NTB		106.470.000,00	
		Tercapainya Persentase Laporan BMD yang akrual dan akuntabel						79.444.000,00					Internal Bappeda Prov. NTB, Perangkat Daerah Lingkup Prov. NTB		106.470.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	51.077.200,00						2 Laporan	68.250.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	28.366.800,00						2 Dokumen	38.220.000,00	
	5.01.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						28.366.800,00							38.220.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	28.366.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	38.220.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						51.077.200,00							68.250.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		0 Laporan	2 Laporan	51.077.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	68.250.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						163.636.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB		524.587.873,00	
		Tersusunnya Indeks Profesionalitas ASN lingkup PD						163.636.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB		524.587.873,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.367.500,00						1 Dokumen	132.300.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.465.900,00						1 Dokumen	59.349.405,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		0 Orang	50 Orang	7.268.300,00						50 Orang	16.275.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang		50 Orang	55 Orang	59.434.500,00						60 Orang	238.937.218,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	29.100.000,00						1 Unit	77.726.250,00	
	5.01.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						29.100.000,00							77.726.250,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	29.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	77.726.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						47.465.900,00							59.349.405,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	47.465.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	59.349.405,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						20.367.500,00							132.300.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.367.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	132.300.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						59.434.500,00							238.937.218,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Orang		50 Orang	55 Orang	59.434.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Orang	238.937.218,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						7.268.300,00							16.275.000,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50 Orang		0 Orang	50 Orang	7.268.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Orang	16.275.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.737.498.820,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal Seluruh NTB		3.346.774.190,00	
		Tercapainya Persentase Kepuasan layanan internal administrasi umum						1.737.498.820,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal Seluruh NTB		3.346.774.190,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.400.000,00						1 Dokumen	141.561.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.012.400,00						1 Dokumen	219.070.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00						2 Dokumen	65.781.611,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	121.001.000,00						2 Laporan	469.665.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.150.950.000,00						2 Laporan	1.825.827.913,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	172.978.500,00						2 Paket	414.473.519,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.763.500,00						2 Paket	116.300.961,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	53.646.320,00						8 Paket	60.831.408,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	28.747.100,00						1 Paket	33.262.778,00	
	5.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						100.763.500,00							116.300.961,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	100.763.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	116.300.961,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						53.646.320,00							60.831.408,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	53.646.320,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Paket	60.831.408,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						28.747.100,00							33.262.778,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	10 Paket	28.747.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	33.262.778,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						172.978.500,00							414.473.519,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	172.978.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	414.473.519,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						50.400.000,00							141.561.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	50.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	141.561.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						121.001.000,00							469.665.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	121.001.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	469.665.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.150.950.000,00							1.825.827.913,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.150.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	1.825.827.913,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						0,00							65.781.611,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	65.781.611,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						59.012.400,00							219.070.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.012.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	219.070.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						336.826.000,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal Seluruh NTB		2.890.458.035,00	
		Tercapainya Persentase pelayanan pemilihan penyedia barang/jasa yang tepat waktu sesuai SOP						336.826.000,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal Seluruh NTB		2.890.458.035,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	22.500.000,00						4 Paket	286.993.035,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit		20 Unit	25 Unit	314.326.000,00						30 Unit	2.526.290.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	77.175.000,00	
	5.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						22.500.000,00							286.993.035,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket		4 Paket	4 Paket	22.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Paket	286.993.035,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						314.326.000,00							2.526.290.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	40 Unit		20 Unit	25 Unit	314.326.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Unit	2.526.290.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		0 Unit	0,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							77.175.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	77.175.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.233.840.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal Seluruh NTB		3.562.767.260,00	
		Tercapainya Persentase realisasi fisik dan keuangan						3.233.840.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal Seluruh NTB		3.562.767.260,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	575.470.000,00						1 Laporan	674.652.494,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.578.681.000,00						1 Laporan	2.735.633.250,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.786.000,00						1 Laporan	67.954.715,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.903.200,00						1 Laporan	84.526.801,00	
	5.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						49.903.200,00							84.526.801,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	49.903.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	84.526.801,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						575.470.000,00							674.652.494,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	575.470.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	674.652.494,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						29.786.000,00							67.954.715,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.786.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	67.954.715,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.578.681.000,00							2.735.633.250,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.578.681.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	2.735.633.250,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						621.255.000,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal Seluruh NTB		2.581.493.808,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tercapainya Persentase realisasi fisik dan keuangan						621.255.000,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal Seluruh NTB		2.581.493.808,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	253.975.000,00						1 Unit	1.592.566.533,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit		70 Unit	70 Unit	211.860.000,00						70 Unit	738.961.650,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	70 Unit		50 Unit	55 Unit	7.500.000,00						60 Unit	39.965.625,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit		35 Unit	40 Unit	147.920.000,00						45 Unit	210.000.000,00	
	5.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						211.860.000,00							738.961.650,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	70 Unit		70 Unit	70 Unit	211.860.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		70 Unit	738.961.650,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						7.500.000,00							39.965.625,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	70 Unit		50 Unit	55 Unit	7.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Unit	39.965.625,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						147.920.000,00							210.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55 Unit		35 Unit	40 Unit	147.920.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		45 Unit	210.000.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						253.975.000,00							1.592.566.533,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	253.975.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	1.592.566.533,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
336.	**5.01.02**	**PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH**						**6.087.388.300,00**							**5.402.750.912,00**	
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah						***5.528.288.300,00***							***4.673.312.988,00***	
			1.Komponen tingkat sinergi dan kualitas dokumen perencanaan pemerintah daerah	85.75 Nilai		83.6 Nilai	84 Nilai	5.528.288.300,00						84.3 Nilai	4.673.312.988,00	
	5.01.02.1.01	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan						5.237.977.600,00					Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota		3.680.175.917,00	
		Meningkatnya keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah						5.237.977.600,00					Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota		3.680.175.917,00	
			Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	14.365.700,00						1 Berita Acara	314.561.885,00	
			Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	232.344.700,00						1 Berita Acara	365.585.770,00	
			Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	1.481.806.900,00						2 Berita Acara	1.820.067.722,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	307.060.900,00						2 Dokumen	468.415.200,00	
			Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen		Dokumen	2 Dokumen	3.095.445.700,00						2 Dokumen	153.896.270,00	
			Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	106.953.700,00						3 Dokumen	557.649.070,00	
	5.01.02.1.01.0001	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah						3.095.445.700,00							153.896.270,00	
		Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen		Dokumen	3 Dokumen	3.095.445.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	153.896.270,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.01.0002	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya						106.953.700,00							557.649.070,00	
		Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	106.953.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	557.649.070,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Konsultasi Publik						232.344.700,00							365.585.770,00	
		Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	232.344.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	365.585.770,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah						14.365.700,00							314.561.885,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	2 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	14.365.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Berita Acara	314.561.885,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi						1.481.806.900,00							1.820.067.722,00	
		Terlaksananya Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	2 Berita Acara		1 Berita Acara	2 Berita Acara	1.481.806.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Berita Acara	1.820.067.722,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.01.0006	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi						307.060.900,00							468.415.200,00	
		Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	307.060.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	468.415.200,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.02	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						128.797.900,00					Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota		192.664.851,00	
		Meningkatnya pemenuhan analisis data dan informasi pada perencanaan pembangunan						128.797.900,00					Pemerintah Pusat, Perangkat Daerah Provinsi, Perangkat Daerah Kab/Kota		192.664.851,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	128.797.900,00						2 Dokumen	192.664.851,00	
	5.01.02.1.02.0001	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah						128.797.900,00							192.664.851,00	
		Terinputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen		2 Dokumen	3 Dokumen	128.797.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		2 Dokumen	192.664.851,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.04	Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						161.512.800,00					Pemerintah Kab/Kota Lingkup Prov. NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB		800.472.220,00	
		Meningkatnya Penerapan SIPD di bidang pembangunan daerah						161.512.800,00					Pemerintah Kab/Kota Lingkup Prov. NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB		800.472.220,00	
			Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.034.600,00						1 Dokumen	315.941.110,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	84.918.000,00						1 Dokumen	270.897.811,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.560.200,00						1 Dokumen	213.633.299,00	
	5.01.02.1.04.0001	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						28.034.600,00							315.941.110,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	28.034.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	315.941.110,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.04.0002	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah						48.560.200,00							213.633.299,00	
		Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	48.560.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	213.633.299,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.04.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi						84.918.000,00							270.897.811,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	84.918.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	270.897.811,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya kualitas pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan daerah						***559.100.000,00***							***729.437.924,00***	
			999.Persentase hasil pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan daerah yang ditindaklanjuti	86 %		83.5 %	84 %	559.100.000,00						85 %	729.437.924,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.02.1.03	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah						559.100.000,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		729.437.924,00	
		Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi capaian pembangunan daerah						559.100.000,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		729.437.924,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	30 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	185.370.000,00						20 Dokumen	320.166.000,00	
			Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	195 Kerja Sama		173 Kerja Sama	183 Kerja Sama	104.671.500,00						193 Kerja Sama	81.902.189,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	174.943.100,00						8 Laporan	244.393.380,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	94.115.400,00						2 Laporan	82.976.355,00	
	5.01.02.1.03.0001	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi						94.115.400,00							82.976.355,00	
		Terlaksananya Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	94.115.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	82.976.355,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.03.0002	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah						104.671.500,00							81.902.189,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkendalinya Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	195 Kerja Sama		173 Kerja Sama	1 Kerja Sama	104.671.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		193 Kerja Sama	81.902.189,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.03.0003	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah						174.943.100,00							244.393.380,00	
		Tersusunnya Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	12 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	174.943.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	244.393.380,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.02.1.03.0004	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota						185.370.000,00							320.166.000,00	
		Terfasilitasi/Evaluasinya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	30 Dokumen		20 Dokumen	30 Dokumen	185.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Dokumen	320.166.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
337.	**5.01.03**	**PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH**						**5.372.739.200,00**							**10.226.193.219,00**	
		Meningkatnya Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek						***5.372.739.200,00***							***9.465.468.219,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek Bidang IK	100 %		100 %	100 %	168.581.000,00						100 %	377.589.712,00	
			999.Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek Bidang P2M	100 %		100 %	100 %	168.581.000,00						100 %	377.589.712,00	
			999.Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek Bidang PSDA	100 %		100 %	100 %	168.581.000,00						100 %	377.589.712,00	
	5.01.03.1.01	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia						1.117.835.600,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh Provinsi NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		2.088.615.912,00	
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek bidang P2M						1.117.835.600,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh Provinsi NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		2.088.615.912,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.983.200,00						1 Laporan	129.527.212,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.018.200,00						1 Laporan	33.075.000,00	
		Meningkatnya keselarasan Perencanaan perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2M) terhadap perencanaan pembangunan daerah						1.117.835.600,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh Provinsi NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		2.088.615.912,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.983.200,00						1 Laporan	129.527.212,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.018.200,00						1 Laporan	33.075.000,00	
		Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan perangkat daerah bidang P2M						1.117.835.600,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh Provinsi NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		2.088.615.912,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.983.200,00						1 Laporan	129.527.212,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.018.200,00						1 Laporan	33.075.000,00	
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						22.018.200,00							33.075.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	22.018.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	33.075.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	22.018.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	33.075.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						28.983.200,00							129.527.212,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	28.983.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	129.527.212,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	28.983.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	129.527.212,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02	Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)						3.396.589.400,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		6.265.995.357,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek bidang PSDA						3.396.589.400,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		6.265.995.357,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	29.617.500,00						3 Laporan	99.225.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	29.888.700,00						2 Laporan	99.225.000,00	
		Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) terhadap perencanaan pembangunan daerah						3.396.589.400,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		6.265.995.357,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	29.617.500,00						3 Laporan	99.225.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	29.888.700,00						2 Laporan	99.225.000,00	
		Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan perangkat daerah bidang PSDA						3.396.589.400,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		6.265.995.357,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.617.500,00						1 Laporan	99.225.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.888.700,00						1 Laporan	99.225.000,00	
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						29.617.500,00							99.225.000,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	29.617.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	99.225.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	29.617.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	99.225.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						29.888.700,00							99.225.000,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	29.888.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	99.225.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	29.888.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	99.225.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek bidang IK						858.314.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		1.871.581.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.860.700,00						1 Laporan	49.612.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.212.700,00						1 Laporan	66.150.000,00	
		Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK) terhadap perencanaan Pembangunan daerah						858.314.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		1.871.581.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.860.700,00						1 Laporan	49.612.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.212.700,00						1 Laporan	66.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan perangkat daerah bidang IK						858.314.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		1.871.581.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	28.860.700,00						3 Laporan	49.612.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.212.700,00						1 Laporan	66.150.000,00	
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						28.860.700,00							49.612.500,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	28.860.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	49.612.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	28.860.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	49.612.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						29.212.700,00							66.150.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	29.212.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	66.150.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	29.212.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	66.150.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah terhadap perencanaan pembangunan daerah						***5.372.739.200,00***							***9.465.468.219,00***	
			999.Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang IK yang selaras	100 %		100 %	100 %	1.085.676.100,00						100 %	1.589.251.537,00	
			999.Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang P2M yang selaras	100 %		100 %	100 %	1.085.676.100,00						100 %	1.589.251.537,00	
			999.Persentase dokumen perencanaan perangkat daerah Bidang PSDA yang selaras	100 %		100 %	100 %	1.085.676.100,00						100 %	1.589.251.537,00	
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek bidang P2M						1.117.835.600,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh Provinsi NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		2.088.615.912,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	153.405.900,00						2 Dokumen	431.661.825,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	109.013.300,00						2 Dokumen	63.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.983.200,00						1 Laporan	129.527.212,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	22.018.200,00						3 Laporan	33.075.000,00	
		Meningkatnya keselarasan Perencanaan perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2M) terhadap perencanaan pembangunan daerah						1.117.835.600,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh Provinsi NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		2.088.615.912,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	153.405.900,00						2 Dokumen	431.661.825,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	109.013.300,00						2 Dokumen	63.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.983.200,00						1 Laporan	129.527.212,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.018.200,00						1 Laporan	33.075.000,00	
		Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan perangkat daerah bidang P2M						1.117.835.600,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh Provinsi NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		2.088.615.912,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	153.405.900,00						2 Dokumen	431.661.825,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	109.013.300,00						2 Dokumen	63.375.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.983.200,00						1 Laporan	129.527.212,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	22.018.200,00						1 Laporan	33.075.000,00	
	5.01.03.1.01.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						109.013.300,00							63.375.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	109.013.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	63.375.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						22.018.200,00							33.075.000,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	22.018.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	33.075.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	22.018.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	33.075.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						153.405.900,00							431.661.825,00	
		Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	153.405.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	431.661.825,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						28.983.200,00							129.527.212,00	
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	28.983.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	129.527.212,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	28.983.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	129.527.212,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek bidang PSDA						3.396.589.400,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		6.265.995.357,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	168.773.800,00						2 Dokumen	330.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	165.950.600,00						2 Dokumen	330.750.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.617.500,00						1 Laporan	99.225.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.888.700,00						1 Laporan	99.225.000,00	
		Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) terhadap perencanaan pembangunan daerah						3.396.589.400,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		6.265.995.357,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	168.773.800,00						2 Dokumen	330.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	165.950.600,00						2 Dokumen	330.750.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.617.500,00						1 Laporan	99.225.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.888.700,00						1 Laporan	99.225.000,00	
		Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan perangkat daerah bidang PSDA						3.396.589.400,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		6.265.995.357,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	168.773.800,00						2 Dokumen	330.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	165.950.600,00						2 Dokumen	330.750.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.617.500,00						1 Laporan	99.225.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.888.700,00						1 Laporan	99.225.000,00	
	5.01.03.1.02.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						168.773.800,00							330.750.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	168.773.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	330.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						29.617.500,00							99.225.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	29.617.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	99.225.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	29.617.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	99.225.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						165.950.600,00							330.750.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	165.950.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	330.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						29.888.700,00							99.225.000,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	3 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	29.888.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	99.225.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	29.888.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	99.225.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek bidang IK						858.314.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		1.871.581.950,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	158.425.900,00						2 Dokumen	330.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	161.525.600,00						2 Dokumen	385.875.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.860.700,00						1 Laporan	49.612.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	29.212.700,00						1 Laporan	66.150.000,00	
		Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK) terhadap perencanaan Pembangunan daerah						858.314.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		1.871.581.950,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	158.425.900,00						2 Dokumen	330.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	161.525.600,00						2 Dokumen	385.875.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	28.860.700,00						1 Laporan	49.612.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	29.212.700,00						3 Laporan	66.150.000,00	
		Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan perangkat daerah bidang IK						858.314.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		1.871.581.950,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	158.425.900,00						2 Dokumen	330.750.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	161.525.600,00						2 Dokumen	385.875.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	28.860.700,00						3 Laporan	49.612.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	29.212.700,00						3 Laporan	66.150.000,00	
	5.01.03.1.03.0001	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						158.425.900,00							330.750.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	158.425.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	330.750.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03.0002	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						28.860.700,00							49.612.500,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	28.860.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	49.612.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	28.860.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	49.612.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03.0005	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)						161.525.600,00							385.875.000,00	
		Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	161.525.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	385.875.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.03.0006	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						29.212.700,00							66.150.000,00	
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan		3 Laporan	2 Laporan	29.212.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	66.150.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Terasistensinya Perangkat Daerah dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	1 Laporan		1 Laporan	2 Laporan	29.212.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	66.150.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Meningkatnya Kinerja Pengendalian dan Evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan Perangkat Daerah						***5.372.739.200,00***							***9.465.468.219,00***	
			999.Persentase Hasil pengendalian dan Evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan Perangkat Daerah Bidang IK yang ditindak Lanjuti	85.7 %		82.25 %	84 %	4.287.063.100,00						84.5 %	7.876.216.682,00	
			999.Persentase Hasil pengendalian dan Evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan Perangkat Daerah Bidang P2M yang ditindak Lanjuti	85.7 %		82.25 %	84 %	4.287.063.100,00						84.5 %	7.876.216.682,00	
			999.Persentase Hasil pengendalian dan Evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan Perangkat Daerah Bidang PSDA yang ditindak Lanjuti	85.7 %		82.25 %	84 %	4.287.063.100,00						84.5 %	7.876.216.682,00	
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek bidang P2M						1.117.835.600,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh Provinsi NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		2.088.615.912,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	178.221.800,00						5 Laporan	273.938.175,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	125.534.300,00						5 Laporan	77.175.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	430.594.400,00						3 Laporan	993.096.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	70.064.500,00						2 Laporan	86.766.750,00	
		Meningkatnya keselarasan Perencanaan perangkat daerah bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (P2M) terhadap perencanaan pembangunan daerah						1.117.835.600,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh Provinsi NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		2.088.615.912,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	178.221.800,00						5 Laporan	273.938.175,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	125.534.300,00						5 Laporan	77.175.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	430.594.400,00						3 Laporan	993.096.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	70.064.500,00						2 Laporan	86.766.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan perangkat daerah bidang P2M						1.117.835.600,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Provinsi NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh Provinsi NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		2.088.615.912,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	178.221.800,00						5 Laporan	273.938.175,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	125.534.300,00						5 Laporan	77.175.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	430.594.400,00						3 Laporan	993.096.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	70.064.500,00						2 Laporan	86.766.750,00	
	5.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan						125.534.300,00							77.175.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	125.534.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	77.175.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan						70.064.500,00							86.766.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	70.064.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	86.766.750,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia						178.221.800,00							273.938.175,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	178.221.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	273.938.175,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.01.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia						430.594.400,00							993.096.950,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	3 Laporan		3 Laporan	4 Laporan	430.594.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	993.096.950,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek bidang PSDA						3.396.589.400,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		6.265.995.357,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	125.129.900,00						5 Laporan	192.937.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	179.343.400,00						5 Laporan	1.775.025.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.307.575.000,00						3 Laporan	1.005.310.987,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	390.310.500,00						3 Laporan	2.432.771.870,00	
		Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA) terhadap perencanaan pembangunan daerah						3.396.589.400,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		6.265.995.357,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	125.129.900,00						5 Laporan	192.937.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	179.343.400,00						5 Laporan	1.775.025.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.307.575.000,00						3 Laporan	1.005.310.987,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	390.310.500,00						3 Laporan	2.432.771.870,00	
		Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan perangkat daerah bidang PSDA						3.396.589.400,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		6.265.995.357,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	125.129.900,00						5 Laporan	192.937.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	179.343.400,00						5 Laporan	1.775.025.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.307.575.000,00						3 Laporan	1.005.310.987,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	390.310.500,00						3 Laporan	2.432.771.870,00	
	5.01.03.1.02.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian						125.129.900,00							192.937.500,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	125.129.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	192.937.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian						2.307.575.000,00							1.005.310.987,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	2.307.575.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	1.005.310.987,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA						179.343.400,00							1.775.025.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	179.343.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	1.775.025.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.02.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA						390.310.500,00							2.432.771.870,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	390.310.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Laporan	2.432.771.870,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan						858.314.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		1.871.581.950,00	
		Keselarasan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Menengah dengan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah jangka Pendek bidang IK						858.314.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		1.871.581.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	74.763.400,00						5 Laporan	115.762.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	71.885.400,00						5 Laporan	154.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	139.195.500,00						1 Laporan	96.832.575,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	194.445.000,00						2 Laporan	672.249.375,00	
		Meningkatnya keselarasan perencanaan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (IK) terhadap perencanaan Pembangunan daerah						858.314.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		1.871.581.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	74.763.400,00						5 Laporan	115.762.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	71.885.400,00						5 Laporan	154.350.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	139.195.500,00						1 Laporan	96.832.575,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	194.445.000,00						2 Laporan	672.249.375,00	
		Meningkatnya kinerja pengendalian dan evaluasi Capaian Pembangunan Tematik dan perangkat daerah bidang IK						858.314.200,00					Internal Bappeda Provinsi NTB, Perangkat Daerah Lingkup Pemprov NTB, Pemerintah Kab/Kota Seluruh NTB, Instansi Vertikal di Provinsi NTB		1.871.581.950,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	74.763.400,00						5 Laporan	115.762.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	71.885.400,00						5 Laporan	154.350.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	139.195.500,00						1 Laporan	96.832.575,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	194.445.000,00						2 Laporan	672.249.375,00	
	5.01.03.1.03.0003	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur						74.763.400,00							115.762.500,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	74.763.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	115.762.500,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03.0004	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur						139.195.500,00							96.832.575,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	139.195.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	96.832.575,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	5.01.03.1.03.0007	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan						71.885.400,00							154.350.000,00	
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	71.885.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	154.350.000,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.01.03.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan						194.445.000,00							672.249.375,00	
		Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	194.445.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	672.249.375,00	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
		Badan Keuangan dan Aset Daerah						**1.043.386.997.593,87**							**1.210.749.589.460,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.043.386.997.593,87**							**1.210.749.589.460,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.043.386.997.593,87**							**1.210.749.589.460,00**	
338.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**32.812.246.663,00**							**45.775.298.571,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***32.316.435.773,00***							***44.940.530.250,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	86.15 Skor		82.79 Skor	83.62 Skor	32.316.435.773,00						84.46 Skor	44.940.530.250,00	
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						326.453.380,00					BKAD Provinsi NTB		737.127.240,00	
		Meningkatanya Kualitas Perencanaan dan Penganggaran SKPD						326.453.380,00					BKAD Provinsi NTB		737.127.240,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.688.200,00						1 Dokumen	43.027.986,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	59.151.480,00						3 Dokumen	234.660.522,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.180.000,00						1 Dokumen	29.371.659,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56.621.600,00						1 Dokumen	92.074.586,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.060.300,00						1 Dokumen	125.289.258,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.611.800,00						1 Laporan	83.229.444,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	71.140.000,00						1 Laporan	129.473.785,00	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						59.151.480,00							234.660.522,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	59.151.480,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	234.660.522,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						43.060.300,00							125.289.258,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	43.060.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	125.289.258,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						56.621.600,00							92.074.586,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	56.621.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	92.074.586,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						13.688.200,00							43.027.986,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.688.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	43.027.986,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						12.180.000,00							29.371.659,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.180.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	29.371.659,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						70.611.800,00							83.229.444,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	70.611.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	83.229.444,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						71.140.000,00							129.473.785,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	71.140.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	129.473.785,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.249.023.623,00					BKAD Provinsi NTB		35.214.810.176,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD						27.249.023.623,00					BKAD Provinsi NTB		35.214.810.176,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	270.237.700,00						24 Dokumen	269.295.989,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1500 Dokumen		1500 Dokumen	1500 Dokumen	27.418.000,00						1500 Dokumen	64.959.979,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	23.855.400,00						2 Dokumen	27.357.714,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.809.700,00						1 Laporan	84.107.290,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	63.240.250,00						4 Laporan	74.669.559,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/ Bulan		160 Orang/ Bulan	160 Orang/ Bulan	26.815.462.573,00						160 Orang/ Bulan	34.694.419.645,00	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						26.815.462.573,00							34.694.419.645,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	160 Orang/ Bulan		160 Orang/ Bulan	150 Orang/ Bulan	26.815.462.573,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		160 Orang/ Bulan	34.694.419.645,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						27.418.000,00							64.959.979,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1500 Dokumen		1500 Dokumen	1500 Dokumen	27.418.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1500 Dokumen	64.959.979,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						223.690.700,00							204.990.089,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	223.690.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Dokumen	204.990.089,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						48.809.700,00							84.107.290,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	48.809.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	84.107.290,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						63.240.250,00							74.669.559,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	63.240.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	74.669.559,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						23.855.400,00							27.357.714,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	23.855.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	27.357.714,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						49.799.900,00					BKAD Provinsi NTB		233.756.770,00	
		Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada SKPD						49.799.900,00					BKAD Provinsi NTB		233.756.770,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.941.450,00						1 Laporan	120.393.026,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.466.450,00						12 Laporan	52.269.215,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.392.000,00						3 Dokumen	61.094.529,00	
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						5.392.000,00							61.094.529,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	5.392.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	61.094.529,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						19.466.450,00							52.269.215,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	19.466.450,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	52.269.215,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						24.941.450,00							120.393.026,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.941.450,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	120.393.026,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						448.829.800,00					BKAD Provinsi NTB		1.151.857.365,00	
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Kepegawaian						448.829.800,00					BKAD Provinsi NTB		1.151.857.365,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.496.600,00						12 Dokumen	52.211.662,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	9.000.000,00						5 Orang	8.383.393,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	311.906.000,00						100 Orang	1.015.806.918,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	70.000.000,00						5 Orang	22.061.561,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit		2 Unit	2 Unit	23.427.200,00						2 Unit	53.393.831,00	
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						23.427.200,00							53.393.831,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit		2 Unit	2 Unit	23.427.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	53.393.831,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						34.496.600,00							52.211.662,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	34.496.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	52.211.662,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						70.000.000,00							22.061.561,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	70.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Orang	22.061.561,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						311.906.000,00							1.015.806.918,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang		100 Orang	100 Orang	311.906.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		100 Orang	1.015.806.918,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						9.000.000,00							8.383.393,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	9.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Orang	8.383.393,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.157.473.720,00					BKAD Provinsi NTB		3.034.055.158,00	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik						1.157.473.720,00					BKAD Provinsi NTB		3.034.055.158,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	56.400.000,00						50 Dokumen	39.290.400,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	39.967.100,00						5 Dokumen	73.751.246,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	140000 Dokumen		140000 Dokumen	140000 Dokumen	99.898.500,00						140000 Dokumen	188.625.555,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	376.448.000,00						1 Laporan	1.166.400.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	85 Laporan	276.905.700,00						85 Laporan	837.003.642,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	279.862.200,00						25 Paket	621.210.243,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	12.489.800,00						8 Paket	28.385.508,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	15.502.420,00						27 Paket	79.387.964,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						12.489.800,00							28.385.508,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	12.489.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Paket	28.385.508,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						15.502.420,00							79.387.964,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	27 Paket		27 Paket	27 Paket	15.502.420,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		27 Paket	79.387.964,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						24.912.700,00							181.031.895,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	24.912.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Paket	181.031.895,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						52.800.000,00							33.782.400,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	52.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Dokumen	33.782.400,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						292.398.000,00							998.217.900,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	292.398.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	998.217.900,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						214.590.950,00							694.113.969,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	85 Laporan	214.590.950,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		85 Laporan	694.113.969,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						99.898.500,00							188.625.555,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	140000 Dokumen		140000 Dokumen	140000 Dokumen	99.898.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		140000 Dokumen	188.625.555,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						39.967.100,00							73.751.246,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	39.967.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	73.751.246,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						72.041.000,00					BKAD Provinsi NTB		253.561.516,00	
		Meningkatnya Pengadaan Barang Milik Daerah pada SKPD						72.041.000,00					BKAD Provinsi NTB		253.561.516,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit		30 Unit	35 Unit	72.041.000,00						40 Unit	253.561.516,00	
	5.02.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						72.041.000,00							253.561.516,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit		30 Unit	35 Unit	72.041.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		40 Unit	253.561.516,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.087.550.240,00					BKAD Provinsi NTB		3.805.731.289,00	
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran						3.087.550.240,00					BKAD Provinsi NTB		3.805.731.289,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	746.160.600,00						1 Laporan	1.358.120.713,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.331.950.000,00						1 Laporan	2.190.241.267,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	233.373.809,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.439.640,00						1 Laporan	23.995.500,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.780.000,00							14.647.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	3.780.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	14.647.200,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						746.160.600,00							1.358.120.713,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	746.160.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	1.358.120.713,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							233.373.809,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	233.373.809,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.331.950.000,00							2.190.241.267,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.331.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	2.190.241.267,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						421.075.000,00					BKAD Provinsi NTB		1.344.399.057,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD						421.075.000,00					BKAD Provinsi NTB		1.344.399.057,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	71.583.000,00						4 Unit	479.458.386,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit		50 Unit	50 Unit	217.440.000,00						50 Unit	535.842.219,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit		19 Unit	19 Unit	25.000.000,00						19 Unit	44.950.430,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit		200 Unit	200 Unit	10.000.000,00						200 Unit	68.942.379,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	82.782.000,00						20 Unit	88.246.243,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	14.270.000,00						4 Unit	126.959.400,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							44.950.430,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	19 Unit		19 Unit	19 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		19 Unit	44.950.430,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						217.440.000,00							535.842.219,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	50 Unit		50 Unit	50 Unit	217.440.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Unit	535.842.219,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						10.000.000,00							68.942.379,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	200 Unit		200 Unit	200 Unit	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		200 Unit	68.942.379,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						58.362.000,00							88.246.243,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	58.362.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Unit	88.246.243,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						71.583.000,00							479.458.386,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	71.583.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	479.458.386,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						10.000.000,00							122.604.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	10.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	122.604.000,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
339.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**1.010.985.808.435,87**							**1.164.603.647.528,00**	
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Manajemen Pengelolaan Kas Daerah						***1.006.464.625.285,87***							***1.158.080.415.906,00***	
			999.Persentase realisasi belanja terhadap APBD	95 %		95 %	95 %	1.006.464.625.285,87						95 %	1.158.080.415.906,00	
	5.02.02.1.05	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah						1.006.464.625.285,87					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		1.158.080.415.906,00	
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan kewajiban dan transfer keuangan daerah						1.006.464.625.285,87					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		1.158.080.415.906,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	18.030.812.906,00						13 Laporan	11.325.618.096,00	
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	146.673.500.000,00						10 Laporan	31.503.451.923,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	819.760.312.379,87						4 Laporan	1.109.877.153.734,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	15.000.000.000,00						10 Laporan	5.374.192.153,00	
	5.02.02.1.05.0004	Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah						18.030.812.906,00							11.325.618.096,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Pelaksanaan Pembayaran Cicilan Pokok dan Bunga Pinjaman Pemerintah Daerah	0 Laporan		13 Laporan	13 Laporan	18.030.812.906,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		13 Laporan	11.325.618.096,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan						146.673.500.000,00							31.503.451.923,00	
		Tersedianya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	146.673.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	31.503.451.923,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak						15.000.000.000,00							5.374.192.153,00	
		Terkelolanya Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	15.000.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	5.374.192.153,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.05.0010	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi						819.760.312.379,87							1.109.877.153.734,00	
		Terkelolanya Dana Bagi Hasil Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Bagi Hasil Provinsi	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	819.760.312.379,87	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Bagi Hasil (DBH) Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	1.109.877.153.734,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						***600.000.000,00***							***1.051.822.873,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase ketepatan waktu penyampaian hasil evaluasi Raperda APBD/Perubahan APBD dan Raperda Pertanggungjawaban APBD Kabupaten/Kota	100 %		100 %	100 %	600.000.000,00						100 %	1.051.822.873,00	
	5.02.02.1.02	Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota						600.000.000,00					Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB		1.051.822.873,00	
		Meningkatnya kepatuhan Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan evaluasi APBD						600.000.000,00					Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB		1.051.822.873,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	115.049.300,00						2 Dokumen	87.024.562,00	
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	26.732.900,00						10 Dokumen	326.014.834,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	89.600.000,00						10 Laporan	174.681.893,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	85.650.000,00						10 Laporan	158.903.361,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	249.743.400,00						10 Laporan	154.720.574,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33.224.400,00						1 Laporan	150.477.649,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						600.000.000,00					Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB		1.051.822.873,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	115.049.300,00						2 Dokumen	87.024.562,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	26.732.900,00						10 Dokumen	326.014.834,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	89.600.000,00						10 Laporan	174.681.893,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	85.650.000,00						10 Laporan	158.903.361,00	
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	249.743.400,00						10 Laporan	154.720.574,00	
			Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33.224.400,00						1 Laporan	150.477.649,00	
	5.02.02.1.02.0002	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota						249.743.400,00							154.720.574,00	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	249.743.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		10 Laporan	154.720.574,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0003	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota						85.650.000,00							158.903.361,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	85.650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	158.903.361,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0004	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota						89.600.000,00							174.681.893,00	
		Terlaksananya Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	89.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	174.681.893,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0005	Asistensi Pengelolaan Keuangan Kabupaten/Kota						26.732.900,00							326.014.834,00	
		Terlaksanannya Asistensi Pengeloaan Keuangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen yang Mendapatkan Layanan Asistensi	10 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	26.732.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Dokumen	326.014.834,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0006	Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan Daerah						33.224.400,00							150.477.649,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Regulasi Bidang Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	33.224.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	150.477.649,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.02.0012	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah						115.049.300,00							87.024.562,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian Provinsi dan Kabupaten/Kota dan Statistik Keuangan Pemerintahan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	115.049.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	87.024.562,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Terpenuhinya kesesuaian alokasi belanja wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						***2.450.000.000,00***							***3.371.448.962,00***	
			999.Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40 Persentase		37.55 Persentase	40 Persentase	306.308.550,00						40 Persentase	242.780.313,00	
			999.Persentase belanja kesehatan	25.5 %		23.5 %	24 %	306.308.550,00						24.5 %	242.780.313,00	
			999.Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30 Persentase		32.89 Persentase	30 Persentase	306.308.550,00						30 Persentase	242.780.313,00	
			999.Persentase belanja pendidikan	13.5 %		11.5 %	12 %	306.308.550,00						12.5 %	242.780.313,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						2.450.000.000,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.371.448.962,00	
		Terpenuhinya penganggaran belanja pegawai pada perangkat daerah, Terpenuhinya penganggaran sub kegiatan utama dan pendukung belanja infrastruktur pada perangkat daerah, Terpenuhinya penandaan dan penganggaran belanja pendidikan pada perangkat daerah, Terpenuhinya penandaan dan penganggaran belanja kesehatan pada perangkat daerah						2.450.000.000,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.371.448.962,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	135.040.000,00						2 Dokumen	107.812.507,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	116.631.950,00						2 Dokumen	85.569.113,00	
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	1.498.900,00						43 Dokumen	10.168.509,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	129 Dokumen		129 Dokumen	129 Dokumen	1.450.000,00						129 Dokumen	4.730.686,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	129 Dokumen		129 Dokumen	129 Dokumen	25.238.200,00						129 Dokumen	14.574.702,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	26.449.500,00						43 Dokumen	19.924.796,00	
		Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan verifikasi dokumen penganggaran perangkat daerah						2.450.000.000,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.371.448.962,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	135.040.000,00						2 Dokumen	107.812.507,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	116.631.950,00						2 Dokumen	85.569.113,00	
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	1.498.900,00						43 Dokumen	10.168.509,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	129 Dokumen		129 Dokumen	129 Dokumen	1.450.000,00						129 Dokumen	4.730.686,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	129 Dokumen		129 Dokumen	129 Dokumen	25.238.200,00						129 Dokumen	14.574.702,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	26.449.500,00						43 Dokumen	19.924.796,00	
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						135.040.000,00							107.812.507,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	135.040.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	107.812.507,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUAdan Perubahan PPAS						116.631.950,00							85.569.113,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	116.631.950,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	85.569.113,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD						26.449.500,00							19.924.796,00	
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	26.449.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		43 Dokumen	19.924.796,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						25.238.200,00							14.574.702,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	129 Dokumen		129 Dokumen	129 Dokumen	25.238.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		129 Dokumen	14.574.702,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD						1.498.900,00							10.168.509,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	1.498.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		43 Dokumen	10.168.509,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						1.450.000,00							4.730.686,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	129 Dokumen		129 Dokumen	129 Dokumen	1.450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		129 Dokumen	4.730.686,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Terwujudnya Kepatuhan Penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah						***600.000.000,00***							***1.088.382.126,00***	
			999.Persentase Ketepatan waktu penyampaian Laporan Keuangan Perangkat Daerah dan BLUD	100 %		100 %	100 %	600.000.000,00						100 %	1.088.382.126,00	
	5.02.02.1.04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah						600.000.000,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		1.088.382.126,00	
		Meningkatnya kepatuhan pelaksanaan rekonsiliasi pelaporan keuangan perangkat daerah						600.000.000,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		1.088.382.126,00	
			Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	22 Lembaga		22 Lembaga	22 Lembaga	34.633.300,00						22 Lembaga	124.256.697,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	258 Dokumen		258 Dokumen	258 Dokumen	94.662.100,00						258 Dokumen	133.574.880,00	
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.123.000,00						1 Dokumen	75.839.525,00	
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	169.708.700,00						7 Laporan	281.189.019,00	
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	87.974.100,00						18 Laporan	54.539.989,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	86 Orang		86 Orang	86 Orang	31.133.000,00						86 Orang	32.063.505,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	139.898.200,00						2 Dokumen	359.502.607,00	
			Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.867.600,00						1 Dokumen	27.415.904,00	
	5.02.02.1.04.0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban						94.662.100,00							133.574.880,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban	258 Dokumen		258 Dokumen	258 Dokumen	94.662.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		258 Dokumen	133.574.880,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran						87.974.100,00							54.539.989,00	
		Tersedianya Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	87.974.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Laporan	54.539.989,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUDdan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						169.708.700,00							281.189.019,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	169.708.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	281.189.019,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi						139.898.200,00							359.502.607,00	
		Tersedianya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	139.898.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	359.502.607,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah						20.123.000,00							75.839.525,00	
		Tersedianya Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	20.123.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	75.839.525,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0010	Penyusunan Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah						21.867.600,00							27.415.904,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem dan Prosedur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.867.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	27.415.904,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi						31.133.000,00							32.063.505,00	
		Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Provinsi	86 Orang		86 Orang	86 Orang	31.133.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		86 Orang	32.063.505,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.04.0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi						34.633.300,00							124.256.697,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Provinsi	Jumlah BLUD Provinsi yang Dibina	22 Lembaga		22 Lembaga	22 Lembaga	34.633.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		22 Lembaga	124.256.697,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Terwujudnya Ketepatan Waktu Penyusunan Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai dengan tahapan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan						***2.795.926.975,00***							***3.862.211.725,00***	
			999.Persentase ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD dan Raperda Perubahan APBD sesuai tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	100 %		100 %	100 %	2.795.926.975,00						100 %	3.862.211.725,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya penganggaran belanja pegawai pada perangkat daerah, Terpenuhinya penganggaran sub kegiatan utama dan pendukung belanja infrastruktur pada perangkat daerah, Terpenuhinya penandaan dan penganggaran belanja pendidikan pada perangkat daerah, Terpenuhinya penandaan dan penganggaran belanja kesehatan pada perangkat daerah						2.450.000.000,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.371.448.962,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	135.040.000,00						2 Dokumen	107.812.507,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	116.631.950,00						2 Dokumen	85.569.113,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.534.146.550,00						3 Dokumen	1.652.206.864,00	
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	1.498.900,00						43 Dokumen	10.168.509,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	215 Orang		215 Orang	215 Orang	117.868.700,00						215 Orang	98.379.317,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	184.429.200,00						2 Dokumen	618.383.570,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	307.247.000,00						5 Dokumen	759.698.898,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	129 Dokumen		129 Dokumen	129 Dokumen	1.450.000,00						129 Dokumen	4.730.686,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	129 Dokumen		129 Dokumen	129 Dokumen	25.238.200,00						129 Dokumen	14.574.702,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	26.449.500,00						43 Dokumen	19.924.796,00	
		Terwujudnya ketepatan waktu penyusunan dan verifikasi dokumen penganggaran perangkat daerah						2.450.000.000,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.371.448.962,00	
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	135.040.000,00						2 Dokumen	107.812.507,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	116.631.950,00						2 Dokumen	85.569.113,00	
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.534.146.550,00						3 Dokumen	1.652.206.864,00	
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	1.498.900,00						43 Dokumen	10.168.509,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	215 Orang		215 Orang	215 Orang	117.868.700,00						215 Orang	98.379.317,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	184.429.200,00						2 Dokumen	618.383.570,00	
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	307.247.000,00						5 Dokumen	759.698.898,00	
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	129 Dokumen		129 Dokumen	129 Dokumen	1.450.000,00						129 Dokumen	4.730.686,00	
			Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	129 Dokumen		129 Dokumen	129 Dokumen	25.238.200,00						129 Dokumen	14.574.702,00	
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	26.449.500,00						43 Dokumen	19.924.796,00	
	5.02.02.1.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS						135.040.000,00							107.812.507,00	
		Tersusunnya KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	135.040.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		2 Dokumen	107.812.507,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUAdan Perubahan PPAS						116.631.950,00							85.569.113,00	
		Tersusunnya Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	116.631.950,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		2 Dokumen	85.569.113,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA- SKPD						26.449.500,00							19.924.796,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Verifikasi RKA-SKPD	Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	26.449.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		43 Dokumen	19.924.796,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0004	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan RKA-SKPD						25.238.200,00							14.574.702,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Perubahan RKA-SKPD yang Diverifikasi	129 Dokumen		129 Dokumen	129 Dokumen	25.238.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		129 Dokumen	14.574.702,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA- SKPD						1.498.900,00							10.168.509,00	
		Terlaksananya Verifikasi DPA- SKPD	Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi	43 Dokumen		43 Dokumen	43 Dokumen	1.498.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		43 Dokumen	10.168.509,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD						1.450.000,00							4.730.686,00	
		Terlaksananya Verifikasi Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi	129 Dokumen		129 Dokumen	129 Dokumen	1.450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		129 Dokumen	4.730.686,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.02.1.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						184.429.200,00							618.383.570,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	184.429.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	618.383.570,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD						307.247.000,00							759.698.898,00	
		Tersusunnya Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	307.247.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Dokumen	759.698.898,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran						1.534.146.550,00							1.652.206.864,00	
		Tersusunnya Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	1.534.146.550,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	1.652.206.864,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi						117.868.700,00							98.379.317,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Provinsi	215 Orang		215 Orang	215 Orang	117.868.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		215 Orang	98.379.317,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.06	Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah						345.926.975,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		490.762.763,00	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan data dan efektivitas penerapan sistem informasi keuangan daerah dalam mendukung ketepatan waktu penyampaian Raperda APBD						345.926.975,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		490.762.763,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	84.237.000,00						1 Dokumen	189.980.783,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	213.681.900,00						2 Dokumen	122.380.969,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	48.008.075,00						50 Orang	178.401.011,00	
	5.02.02.1.06.0001	Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah						213.681.900,00							122.380.969,00	
		Terlaksananya Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	213.681.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	122.380.969,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.06.0002	Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah						84.237.000,00							189.980.783,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	84.237.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	189.980.783,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.02.1.06.0003	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi						48.008.075,00							178.401.011,00	
		Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi	50 Orang		50 Orang	50 Orang	48.008.075,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Orang	178.401.011,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Meningkatnya efektivitas pengelolaan kewajiban dan transfer keuangan daerah						1.006.464.625.285,87					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		1.158.080.415.906,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-		-	-	7.000.000.000,00						-	0,00	
	5.02.02.1.05.0007	Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi						7.000.000.000,00							0,00	
		Tersusunnya Kebijakan dan Alokasi Subsidi	Jumlah Laporan Hasil Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi	-		-	1 Laporan	7.000.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
340.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**988.942.310,00**							**3.253.975.114,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan						***600.009.560,00***							***1.726.226.580,00***	
			999.Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	0.43 Indeks		0.39 Indeks	0.4 Indeks	600.009.560,00						0.41 Indeks	1.726.226.580,00	
			999.Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD	0.11 Indeks		0.07 Indeks	0.08 Indeks	600.009.560,00						0.09 Indeks	1.726.226.580,00	
			999.Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD	0.18 Indeks		0.14 Indeks	0.15 Indeks	600.009.560,00						0.16 Indeks	1.726.226.580,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	0.46 Indeks		0.42 Indeks	0.43 Indeks	600.009.560,00						0.44 Indeks	1.726.226.580,00	
			999.Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD	0.38 Indeks		0.34 Indeks	0.35 Indeks	600.009.560,00						0.36 Indeks	1.726.226.580,00	
			999.Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	0.36 Indeks		0.32 Indeks	0.33 Indeks	600.009.560,00						0.34 Indeks	1.726.226.580,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.253.975.114,00	
		Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pembinaan BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00						3 Dokumen	36.956.465,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	51.560.000,00						2 Laporan	27.320.904,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.228.600,00						1 Laporan	97.461.644,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	660.000,00						1 Laporan	34.208.352,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	201.899.900,00						2 Laporan	21.151.332,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	81.650.000,00						150 Laporan	110.638.425,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	122.438.425,00						1 Laporan	724.872.970,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang		74 Orang	74 Orang	1.020.000,00						74 Orang	12.869.316,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	62.417.835,00						1 Dokumen	72.832.786,00	
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.525.000,00						1 Dokumen	54.921.468,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.362.400,00						1 Dokumen	100.247.950,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00						3 Dokumen	36.956.465,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	51.560.000,00						2 Laporan	27.320.904,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.228.600,00						1 Laporan	97.461.644,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	660.000,00						1 Laporan	34.208.352,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	201.899.900,00						2 Laporan	21.151.332,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	81.650.000,00						150 Laporan	110.638.425,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	122.438.425,00						1 Laporan	724.872.970,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang		74 Orang	74 Orang	1.020.000,00						74 Orang	12.869.316,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	62.417.835,00						1 Dokumen	72.832.786,00	
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.525.000,00						1 Dokumen	54.921.468,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.362.400,00						1 Dokumen	100.247.950,00	
		Meningkatnya retribusi daerah yang bersumber dari pemanfaatann BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.253.975.114,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00						3 Dokumen	36.956.465,00	
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	51.560.000,00						2 Laporan	27.320.904,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.228.600,00						1 Laporan	97.461.644,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	660.000,00						1 Laporan	34.208.352,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	201.899.900,00						2 Laporan	21.151.332,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	81.650.000,00						150 Laporan	110.638.425,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	122.438.425,00						1 Laporan	724.872.970,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang		74 Orang	74 Orang	1.020.000,00						74 Orang	12.869.316,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	62.417.835,00						1 Dokumen	72.832.786,00	
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.525.000,00						1 Dokumen	54.921.468,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.362.400,00						1 Dokumen	100.247.950,00	
		Tersertifikasinya aset tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
			Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00						3 Dokumen	36.956.465,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	51.560.000,00						2 Laporan	27.320.904,00	
			Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.228.600,00						1 Laporan	97.461.644,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	660.000,00						1 Laporan	34.208.352,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	201.899.900,00						2 Laporan	21.151.332,00	
			Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	81.650.000,00						150 Laporan	110.638.425,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	122.438.425,00						1 Laporan	724.872.970,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang		74 Orang	74 Orang	1.020.000,00						74 Orang	12.869.316,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	62.417.835,00						1 Dokumen	72.832.786,00	
			Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.525.000,00						1 Dokumen	54.921.468,00	
			Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.362.400,00						1 Dokumen	100.247.950,00	
	5.02.03.1.01.0001	Penyusunan Standar Harga						35.362.400,00							100.247.950,00	
		Tersedianya Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	35.362.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	100.247.950,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0002	Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah						2.525.000,00							54.921.468,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.525.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	54.921.468,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0003	Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah						62.417.835,00							72.832.786,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	62.417.835,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	72.832.786,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0004	Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah						300.000,00							36.956.465,00	
		Tersedianya Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	36.956.465,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah						122.438.425,00							724.872.970,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	122.438.425,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	724.872.970,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0006	Inventarisasi Barang Milik Daerah						1.228.600,00							97.461.644,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Inventarisasi Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.228.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	97.461.644,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0008	Penilaian Barang Milik Daerah						201.899.900,00							21.151.332,00	
		Terlaksananya Penilaian Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	201.899.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	21.151.332,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0009	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah						660.000,00							34.208.352,00	
		Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	660.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	34.208.352,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						38.947.400,00							432.744.968,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	36 Dokumen	38.947.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	432.744.968,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	38.947.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Dokumen	432.744.968,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						81.650.000,00							110.638.425,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	150 Laporan		150 Laporan	150 Laporan	81.650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		150 Laporan	110.638.425,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0012	Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah						51.560.000,00							27.320.904,00	
		Tersusunnya Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	51.560.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	27.320.904,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
	5.02.03.1.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota						1.020.000,00							12.869.316,00	
		Terlaksananya Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	74 Orang		74 Orang	74 Orang	1.020.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		74 Orang	12.869.316,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya realisasi PAD atas pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang produktif						***600.009.560,00***							***1.726.226.580,00***	
			999.Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	0.26 Indeks		0.22 Indeks	0.23 Indeks	38.947.400,00						0.24 Indeks	432.744.968,00	
		Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pembinaan BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
		Meningkatnya retribusi daerah yang bersumber dari pemanfaatann BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
		Tersertifikasinya aset tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						38.947.400,00							432.744.968,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen		36 Dokumen	36 Dokumen	38.947.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Dokumen	432.744.968,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	36 Dokumen	38.947.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	432.744.968,00	Badan Keuangan dan Aset Daerah
		Tertibnya administrasi pengamanan BMD						***600.009.560,00***							***1.726.226.580,00***	
		Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah						**600.000.000,00**							**1.875.081.091,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**600.000.000,00**							**1.875.081.091,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**600.000.000,00**							**1.875.081.091,00**	
341.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**32.812.246.663,00**							**45.775.298.571,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***211.067.250,00***							***347.332.557,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	86.15 Skor		82.79 Skor	83.62 Skor	211.067.250,00						84.46 Skor	347.332.557,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						27.249.023.623,00					UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah		35.214.810.176,00	
		Meningkatnya Kualitas Pelaporan Keuangan SKPD						27.249.023.623,00					UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah		35.214.810.176,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	270.237.700,00						24 Dokumen	269.295.989,00	
	5.02.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						46.547.000,00							64.305.900,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	24 Dokumen		24 Dokumen	12 Dokumen	46.547.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Dokumen	64.305.900,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.157.473.720,00					UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah		3.034.055.158,00	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik						1.157.473.720,00					UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah		3.034.055.158,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen		50 Dokumen	50 Dokumen	56.400.000,00						50 Dokumen	39.290.400,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	376.448.000,00						1 Laporan	1.166.400.600,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	85 Laporan	276.905.700,00						85 Laporan	837.003.642,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	279.862.200,00						25 Paket	621.210.243,00	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						33.315.500,00							52.156.884,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	12 Paket	33.315.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Paket	52.156.884,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						3.600.000,00							5.508.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	50 Dokumen		50 Dokumen	12 Dokumen	3.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Dokumen	5.508.000,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						32.800.000,00							74.434.500,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	32.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	74.434.500,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						62.314.750,00							142.889.673,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	85 Laporan		85 Laporan	3 Laporan	62.314.750,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		85 Laporan	142.889.673,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.087.550.240,00					UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah		3.805.731.289,00	
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran						3.087.550.240,00					UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah		3.805.731.289,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.439.640,00						1 Laporan	23.995.500,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.800.000,00							3.682.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	4 Laporan	3.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	3.682.200,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						421.075.000,00					UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah		1.344.399.057,00	
		Meningkatnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada SKPD						421.075.000,00					UPTB Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah		1.344.399.057,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	20 Unit	82.782.000,00						20 Unit	88.246.243,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	4 Unit	14.270.000,00						4 Unit	126.959.400,00	
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						24.420.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit		20 Unit	2 Unit	24.420.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		20 Unit	0,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
	5.02.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						4.270.000,00							4.355.400,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit		4 Unit	5 Unit	4.270.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	4.355.400,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
342.	**5.02.03**	**PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH**						**988.942.310,00**							**3.253.975.114,00**	
		Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan Barang Milik Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan						***388.932.750,00***							***1.527.748.534,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai Indeks Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD terkait BMD	0.43 Indeks		0.39 Indeks	0.4 Indeks	198.854.250,00						0.41 Indeks	389.879.700,00	
			999.Nilai Indeks Ketepatan waktu penetapan RKBMD	0.11 Indeks		0.07 Indeks	0.08 Indeks	198.854.250,00						0.09 Indeks	389.879.700,00	
			999.Nilai Indeks Ketepatan waktu penyampaian Laporan BMD	0.18 Indeks		0.14 Indeks	0.15 Indeks	198.854.250,00						0.16 Indeks	389.879.700,00	
			999.Nilai Indeks Ketepatan waktu Penyampaian Laporan Pengawasan Pengendalian	0.46 Indeks		0.42 Indeks	0.43 Indeks	198.854.250,00						0.44 Indeks	389.879.700,00	
			999.Nilai Indeks Tindak lanjut Pengelolaan BMD	0.38 Indeks		0.34 Indeks	0.35 Indeks	198.854.250,00						0.36 Indeks	389.879.700,00	
			999.Nilai Indeks Tindak lanjut rekomendasi temuan BPK RI terkait BMD	0.36 Indeks		0.32 Indeks	0.33 Indeks	198.854.250,00						0.34 Indeks	389.879.700,00	
		Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pembinaan BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
		Meningkatnya retribusi daerah yang bersumber dari pemanfaatann BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
		Tersertifikasinya aset tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						198.854.250,00							389.879.700,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	198.854.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	389.879.700,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen		36 Dokumen	1 Dokumen	198.854.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Dokumen	389.879.700,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
		Meningkatnya realisasi PAD atas pemanfaatan barang milik daerah (BMD) yang produktif						***388.932.750,00***							***1.527.748.534,00***	
			999.Nilai Indeks Realisasi penerimaan atas pemanfaatan BMD	0.26 Indeks		0.22 Indeks	0.23 Indeks	198.854.250,00						0.24 Indeks	389.879.700,00	
		Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pembinaan BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
		Meningkatnya retribusi daerah yang bersumber dari pemanfaatann BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
		Tersertifikasinya aset tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	237.801.650,00						1 Dokumen	822.624.668,00	
	5.02.03.1.01.0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah						198.854.250,00							389.879.700,00	
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	36 Dokumen		36 Dokumen	1 Dokumen	198.854.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Dokumen	389.879.700,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah
		Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	198.854.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	389.879.700,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tertibnya administrasi pengamanan BMD						***388.932.750,00***							***1.527.748.534,00***	
			999.Nilai Indeks Sertifikasi dokumen kepemilikan BMD	0.29 Indeks		0.25 Indeks	0.26 Indeks	190.078.500,00						0.27 Indeks	1.137.868.834,00	
	5.02.03.1.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	
		Meningkatnya kualitas penatausahaan dan pembinaan BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	190.078.500,00						1 Laporan	1.137.868.834,00	
		Meningkatnya kualitas perencanaan BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	190.078.500,00						1 Laporan	1.137.868.834,00	
		Meningkatnya retribusi daerah yang bersumber dari pemanfaatann BMD						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	190.078.500,00						1 Laporan	1.137.868.834,00	
		Tersertifikasinya aset tanah dan bangunan milik atau dikuasai Pemerintah Provinsi						988.942.310,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB, Masyarakat Umum		3.253.975.114,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	190.078.500,00						1 Laporan	1.137.868.834,00	
	5.02.03.1.01.0007	Pengamanan Barang Milik Daerah						190.078.500,00							1.137.868.834,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	190.078.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	1.137.868.834,00	Balai Pemanfaatan dan Pengamanan Aset Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Pelayanan Perbendaharaan						**799.999.815,00**							**1.008.250.662,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**799.999.815,00**							**1.008.250.662,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**799.999.815,00**							**1.008.250.662,00**	
343.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**32.812.246.663,00**							**45.775.298.571,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***274.743.640,00***							***487.435.764,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	86.15 Skor		82.79 Skor	83.62 Skor	274.743.640,00						84.46 Skor	487.435.764,00	
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						1.157.473.720,00					UPTB Pelayanan Perbendaharaan		3.034.055.158,00	
		Meningkatnya Sarana dan Prasarana Pelayanan Publik						1.157.473.720,00					UPTB Pelayanan Perbendaharaan		3.034.055.158,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	376.448.000,00						1 Laporan	1.166.400.600,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	25 Paket	279.862.200,00						25 Paket	621.210.243,00	
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						221.634.000,00							388.021.464,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	25 Paket		25 Paket	12 Paket	221.634.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Paket	388.021.464,00	Pelayanan Perbendaharaan
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						51.250.000,00							93.748.200,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	93.748.200,00	Pelayanan Perbendaharaan
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						3.087.550.240,00					UPTB Pelayanan Perbendaharaan		3.805.731.289,00	
		Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran						3.087.550.240,00					UPTB Pelayanan Perbendaharaan		3.805.731.289,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.439.640,00						1 Laporan	23.995.500,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						1.859.640,00							5.666.100,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.859.640,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	5.666.100,00	Pelayanan Perbendaharaan
344.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**1.010.985.808.435,87**							**1.164.603.647.528,00**	
		Meningkatnya Kualitas dan Efektivitas Manajemen Pengelolaan Kas Daerah						***525.256.175,00***							***520.814.898,00***	
			999.Persentase realisasi belanja terhadap APBD	95 %		95 %	95 %	525.256.175,00						95 %	520.814.898,00	
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						525.256.175,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		520.814.898,00	
		Meningkatnya Kualitas Penatausahaan Keuangan Daerah						525.256.175,00					OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB		520.814.898,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	162.388.900,00						12 Dokumen	284.306.481,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	76.205.100,00						20 Dokumen	7.512.798,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	260 Dokumen		260 Dokumen	260 Dokumen	5.782.500,00						260 Dokumen	3.165.399,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.720.000,00						1 Dokumen	16.635.597,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	288 Dokumen		288 Dokumen	288 Dokumen	142.630.000,00						288 Dokumen	47.790.541,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.138.175,00						12 Dokumen	50.654.986,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.510.000,00						1 Laporan	2.557.471,00	
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	21.087.500,00						14 Laporan	24.025.434,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	3.787.000,00						10 Orang	5.482.106,00	
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	96.007.000,00						1 Dokumen	78.684.085,00	
	5.02.02.1.03.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah						162.388.900,00							284.306.481,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	162.388.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	284.306.481,00	Pelayanan Perbendaharaan
	5.02.02.1.03.0002	Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya						2.510.000,00							2.557.471,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terkelolanya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.510.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	2.557.471,00	Pelayanan Perbendaharaan
	5.02.02.1.03.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD						142.630.000,00							47.790.541,00	
		Terlaksananya Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD	288 Dokumen		288 Dokumen	288 Dokumen	142.630.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		288 Dokumen	47.790.541,00	Pelayanan Perbendaharaan
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						76.205.100,00							7.512.798,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	20 Dokumen		20 Dokumen	20 Dokumen	76.205.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Dokumen	7.512.798,00	Pelayanan Perbendaharaan
	5.02.02.1.03.0006	Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank						5.782.500,00							3.165.399,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Pelaksanaan Kerja Sama dan Pemantauan Transaksi Non Tunai dengan Lembaga Keuangan Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank	260 Dokumen		260 Dokumen	260 Dokumen	5.782.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		260 Dokumen	3.165.399,00	Pelayanan Perbendaharaan
	5.02.02.1.03.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)						21.087.500,00							24.025.434,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	14 Laporan		14 Laporan	14 Laporan	21.087.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Laporan	24.025.434,00	Pelayanan Perbendaharaan
	5.02.02.1.03.0008	Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas						3.720.000,00							16.635.597,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Pelaksanaan Piutang dan Utang Daerah yang Timbul Akibat Pengelolaan Kas, Pelaksanaan Analisis Pembiayaan dan Penempatan Uang Daerah sebagai Optimalisasi Kas	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.720.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	16.635.597,00	Pelayanan Perbendaharaan
	5.02.02.1.03.0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait						11.138.175,00							50.654.986,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	11.138.175,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	50.654.986,00	Pelayanan Perbendaharaan
	5.02.02.1.03.0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan						96.007.000,00							78.684.085,00	
		Tersedianya Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	96.007.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	78.684.085,00	Pelayanan Perbendaharaan
	5.02.02.1.03.0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota						3.787.000,00							5.482.106,00	
		Terlaksananya Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota	10 Orang		10 Orang	10 Orang	3.787.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Orang	5.482.106,00	Pelayanan Perbendaharaan
		Badan Pendapatan Daerah						**105.615.932.382,20**							**122.758.151.146,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**105.615.932.382,20**							**122.758.151.146,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**105.615.932.382,20**							**122.758.151.146,00**	
345.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**105.555.455.062,20**							**122.758.151.146,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***101.173.136.382,20***							***122.706.391.146,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85 Skor		85 Skor	85 Skor	101.173.136.382,20						85 Skor	122.706.391.146,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						389.610.000,00					-		409.520.000,00	
		Tersedianya hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah yang valid dan akurat						389.610.000,00					-		409.520.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.000,00						1 Dokumen	8.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	94.675.000,00						2 Dokumen	104.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.000,00						1 Dokumen	8.760.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.130.000,00						1 Dokumen	43.000.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	58.705.000,00						1 Dokumen	43.000.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	77.930.000,00						1 Laporan	78.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	85.670.000,00						2 Laporan	124.000.000,00	
	5.02.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						94.675.000,00							104.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	94.675.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	104.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						58.705.000,00							43.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	58.705.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	43.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						55.130.000,00							43.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.130.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	43.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						8.750.000,00							8.760.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	8.760.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						8.750.000,00							8.760.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	8.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	8.760.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						77.930.000,00							78.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	77.930.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	78.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						85.670.000,00							124.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	85.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	124.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						84.897.681.772,20					Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran		94.985.946.497,00	
		Terlaksananya penyerapan anggaran secara efektif dan tepat waktu						84.897.681.772,20					Persentase pemenuhan pelayanan administrasi dan operasional perkantoran		94.985.946.497,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.570.000,00						1 Dokumen	26.560.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.320.000,00						12 Dokumen	5.100.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	55.750.000,00						24 Dokumen	57.260.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen		1100 Dokumen	1100 Dokumen	179.960.000,00						1100 Dokumen	494.267.200,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.380.000,00						1 Laporan	54.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	46.350.000,00						18 Laporan	58.060.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/ Bulan		360 Orang/ Bulan	360 Orang/ Bulan	84.546.351.772,20						360 Orang/ Bulan	94.290.699.297,00	
	5.02.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						84.546.351.772,20							94.290.699.297,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	360 Orang/ Bulan		360 Orang/ Bulan	360 Orang/ Bulan	84.546.351.772,20	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	Dana Alokasi Umum (DAU)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		360 Orang/ Bulan	94.290.699.297,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						4.320.000,00							5.100.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	4.320.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Dokumen	5.100.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						108.680.000,00							494.267.200,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen		1100 Dokumen	1100 Dokumen	108.680.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1100 Dokumen	494.267.200,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						43.380.000,00							54.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	43.380.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Laporan	54.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						21.570.000,00							26.560.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	21.570.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen	26.560.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						46.350.000,00							58.060.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	46.350.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		18 Laporan	58.060.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						55.750.000,00							57.260.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	24 Dokumen		24 Dokumen	24 Dokumen	55.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		24 Dokumen	57.260.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.391.000,00					-		392.355.000,00	
		Terwujudnya tertib administrasi BMD						171.391.000,00					-		392.355.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.434.000,00						12 Laporan	252.355.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	47.202.000,00						2 Laporan	62.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.755.000,00						2 Dokumen	77.500.000,00	
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						38.520.000,00							77.500.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	38.520.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	77.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						40.920.000,00							62.500.000,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	40.920.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	62.500.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						35.514.000,00							252.355.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	35.514.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	252.355.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah						180.890.000,00					-		538.570.000,00	
		Terwujudnya tertib administrasi pengelolaan retribusi daerah						180.890.000,00					-		538.570.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.270.000,00						1 Dokumen	425.010.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	92.620.000,00						4 Laporan	113.560.000,00	
	5.02.01.1.04.0001	Perencanaan Pengelolaan Retribusi Daerah						88.270.000,00							425.010.000,00	
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Retribusi Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	88.270.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	425.010.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.04.0007	Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah						92.620.000,00							113.560.000,00	
		Tersedianya Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	92.620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	113.560.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						173.635.000,00					-		0,00	
		Terwujudnya tertib administrasi kepegawaian perangkat daerah						173.635.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	4.320.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	17.900.000,00						4 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	50.000.000,00						150 Orang	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	76.895.000,00						150 Orang	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		7 Orang	7 Orang	7.120.000,00						7 Orang	0,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6 Unit		6 Unit	6 Unit	17.400.000,00						6 Unit	0,00	
	5.02.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						17.400.000,00							0,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	6 Unit		6 Unit	2 Unit	17.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						17.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	17.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		4 Dokumen	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						4.320.000,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	4 Dokumen		4 Dokumen	12 Dokumen	4.320.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Dokumen	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						7.120.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	7 Orang		7 Orang	7 Orang	7.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Orang	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan						76.895.000,00							0,00	
		Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	150 Orang	76.895.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						50.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	150 Orang		150 Orang	7 Orang	50.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		150 Orang	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.812.451.990,00					-		6.267.445.260,00	
		Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah						3.812.451.990,00					-		6.267.445.260,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	175.000.000,00						3 Dokumen	773.950.000,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen		1200 Dokumen	1200 Dokumen	8.063.000,00						1200 Dokumen	39.095.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	313.200.000,00						12 Laporan	735.795.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.391.670.000,00						12 Laporan	1.361.400.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	42 Paket	818.244.740,00						42 Paket	1.419.102.460,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	1.019.519.000,00						24 Paket	1.812.348.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	86.755.250,00						50 Paket	125.754.800,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.547.000,00							125.754.800,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	14.547.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Paket	125.754.800,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						151.521.810,00							1.419.102.460,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	42 Paket	151.521.810,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		42 Paket	1.419.102.460,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						943.023.500,00							1.812.348.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	943.023.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	1.812.348.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						104.400.000,00							735.795.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	104.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	735.795.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						674.950.000,00							1.361.400.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	674.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	1.361.400.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						8.063.000,00							39.095.000,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1200 Dokumen		1200 Dokumen	1200 Dokumen	8.063.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1200 Dokumen	39.095.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						175.000.000,00							773.950.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	175.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Dokumen	773.950.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						80.000.000,00					-		100.000.000,00	
		Terwujudnya tertib administrasi pengadaan bmd penunjang						80.000.000,00					-		100.000.000,00	
			Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	80.000.000,00						1 Unit	100.000.000,00	
	5.02.01.1.07.0008	Pengadaan Aset Tak Berwujud						80.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	1 Unit		2 Unit	1 Unit	80.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		1 Unit	100.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						14.228.889.500,00					-		16.154.044.389,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						14.228.889.500,00					-		16.154.044.389,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	2.028.115.000,00						132 Laporan	1.885.139.989,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	12.160.774.500,00						132 Laporan	14.155.548.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	40.000.000,00						132 Laporan	113.356.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						8.000.000,00							113.356.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	113.356.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						513.840.000,00							1.885.139.989,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	513.840.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	1.885.139.989,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						12.160.774.500,00							14.155.548.400,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	12 Laporan	12.160.774.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	14.155.548.400,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.620.905.800,00					-		3.910.270.000,00	
		Terpeliharanya kualitas dan fungsionalitas BMD sesuai standar						1.620.905.800,00					-		3.910.270.000,00	
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	128.000.000,00						4 Unit	85.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	388.890.000,00						6 Unit	850.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		190 Unit	190 Unit	653.250.000,00						190 Unit	2.289.250.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	25.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	695 Unit		695 Unit	695 Unit	450.765.800,00						695 Unit	661.020.000,00	
	5.02.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						302.850.000,00							2.289.250.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		190 Unit	20 Unit	302.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		190 Unit	2.289.250.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						146.495.800,00							661.020.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	695 Unit		695 Unit	125 Unit	146.495.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		695 Unit	661.020.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud						128.000.000,00							85.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	128.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		4 Unit	85.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						89.250.000,00							850.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	89.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	850.000.000,00	Badan Pendapatan Daerah
346.	**5.02.02**	**PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**						**122.480.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pendapatan Dana Bagi Hasil dan Pendapatan Daerah Lainnya						***122.480.000,00***							***0,00***	
			999.Proporsi Dana Transfer terhadap Pendapatan Daerah	52.98 %		54.27 %	53.96 %	122.480.000,00						53.64 %	0,00	
	5.02.02.1.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah						80.810.000,00					Penyelesaian dokumen perencanaan pendapatan tepat waktu		0,00	
		Tersusunnya dokumen rancangan kebijakan umum anggaran pendapatan daerah						80.810.000,00					Penyelesaian dokumen perencanaan pendapatan tepat waktu		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	80.810.000,00						2 Dokumen	0,00	
	5.02.02.1.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan						80.810.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	80.810.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.02.1.03	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah						41.670.000,00					Penyelesaian dokumen perencanaan pendapatan tepat waktu		0,00	
		Meningkatnya pendapatan transfer ke daerah						41.670.000,00					Penyelesaian dokumen perencanaan pendapatan tepat waktu		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	41.670.000,00						2 Dokumen	0,00	
	5.02.02.1.03.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya						41.670.000,00							0,00	
		Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya	2 Dokumen		2 Dokumen	4 Dokumen	41.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Sekarbela || Kelurahan Kekalik Jaya || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Dokumen	0,00	Badan Pendapatan Daerah
347.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**11.764.535.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah						***4.307.246.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	49.93 %		49.29 %	49.45 %	4.307.246.000,00						49.63 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						11.764.535.000,00					Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		0,00	
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah						11.764.535.000,00					Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah		0,00	
			Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan		1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	27.090.000,00						1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	0,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	64 Dokumen Ketetapan		64 Dokumen Ketetapan	64 Dokumen Ketetapan	2.039.220.000,00						64 Dokumen Ketetapan	0,00	
			Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	228.350.000,00						5 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD		84 Dokumen SSPD	84 Dokumen SSPD	1.194.905.000,00						84 Dokumen SSPD	0,00	
			Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	6.370.000,00						12 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	64.770.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	64 Laporan		64 Laporan	64 Laporan	773.930.000,00						64 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	54 Laporan		54 Laporan	54 Laporan	2.408.220.000,00						54 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	135.060.000,00						12 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	197.379.000,00						24 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	111.620.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	273.280.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	43.760.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana		50 Sarana dan Prasarana	50 Sarana dan Prasarana	4.260.581.000,00						50 Sarana dan Prasarana	0,00	
	5.02.04.1.01.0001	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah						228.350.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	5 Dokumen		5 Dokumen	16 Dokumen	228.350.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Dokumen	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah						111.620.000,00							0,00	
		Tersedianya Analisa dan Terlaksananya Pengembangan Pajak Daerah, serta Tersusunnya Kebijakan Pajak Daerah.	Jumlah Laporan Pengembangan Pajak daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	5 Laporan		5 Laporan	6 Laporan	111.620.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		5 Laporan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						83.179.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	83.179.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		24 Laporan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						2.383.677.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana		50 Sarana dan Prasarana	125 Sarana dan Prasarana	2.383.677.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		50 Sarana dan Prasarana	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						725.030.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	64 Laporan		64 Laporan	12 Laporan	725.030.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		64 Laporan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0006	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah						135.060.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	135.060.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Laporan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						63.720.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	64 Dokumen Ketetapan		64 Dokumen Ketetapan	1000 Dokumen Ketetapan	63.720.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		64 Dokumen Ketetapan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0008	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah						43.760.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Laporan Permasalahan yang Telah Ditindaklanjuti dan Belum Ditindaklanjuti.	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	43.760.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Laporan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0009	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah						6.370.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	4 Dokumen	6.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		12 Dokumen	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						40.920.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD		84 Dokumen SSPD	1000 Dokumen SSPD	40.920.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		84 Dokumen SSPD	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0011	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah						27.090.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Keberatan yang Telah Ditindaklanjuti	1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan		1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	10 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	27.090.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		1 Dokumen Surat Persetujuan/Penolakan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						120.420.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	54 Laporan		54 Laporan	10 Laporan	120.420.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		54 Laporan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0013	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah						64.770.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	64.770.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		4 Laporan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
	5.02.04.1.01.0014	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah						273.280.000,00							0,00	
		Terlaksananya Upaya Mengubah Transaksi Tunai Menjadi Non Tunai	Jumlah Laporan Perkembangan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	273.280.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	6.Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	-		2 Laporan	0,00	Badan Pendapatan Daerah
		Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I						**3.781.597.050,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.781.597.050,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.781.597.050,00**							**0,00**	
348.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**105.555.455.062,20**							**122.758.151.146,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***1.211.217.050,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85 Skor		85 Skor	85 Skor	1.211.217.050,00						85 Skor	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						84.897.681.772,20					-		94.985.946.497,00	
		Terlaksananya penyerapan anggaran secara efektif dan tepat waktu						84.897.681.772,20					-		94.985.946.497,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen		1100 Dokumen	1100 Dokumen	179.960.000,00						1100 Dokumen	494.267.200,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						16.560.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen		1100 Dokumen	1200 Dokumen	16.560.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1100 Dokumen	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.391.000,00					-		392.355.000,00	
		Terwujudnya tertib administrasi BMD						171.391.000,00					-		392.355.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.434.000,00						12 Laporan	252.355.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	47.202.000,00						2 Laporan	62.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.755.000,00						2 Dokumen	77.500.000,00	
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.647.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.647.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.694.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.694.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						11.220.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.220.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.812.451.990,00					-		6.267.445.260,00	
		Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah						3.812.451.990,00					-		6.267.445.260,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	313.200.000,00						12 Laporan	735.795.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.391.670.000,00						12 Laporan	1.361.400.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	42 Paket	818.244.740,00						42 Paket	1.419.102.460,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	1.019.519.000,00						24 Paket	1.812.348.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	86.755.250,00						50 Paket	125.754.800,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						19.005.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	12 Paket	19.005.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						164.998.050,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	75 Paket	164.998.050,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		42 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						18.243.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	12 Paket	18.243.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						29.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						114.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	114.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						14.228.889.500,00					-		16.154.044.389,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						14.228.889.500,00					-		16.154.044.389,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	2.028.115.000,00						132 Laporan	1.885.139.989,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	40.000.000,00						132 Laporan	113.356.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						9.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132 Laporan		132 Laporan	24 Laporan	9.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						538.950.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	12 Laporan	538.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.620.905.800,00					-		3.910.270.000,00	
		Terpeliharanya kualitas dan fungsionalitas BMD sesuai standar						1.620.905.800,00					-		3.910.270.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	388.890.000,00						6 Unit	850.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		190 Unit	190 Unit	653.250.000,00						190 Unit	2.289.250.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	695 Unit		695 Unit	695 Unit	450.765.800,00						695 Unit	661.020.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						88.290.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		190 Unit	3 Unit	88.290.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		190 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						96.610.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	695 Unit		695 Unit	50 Unit	96.610.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		695 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						100.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	100.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
349.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**11.764.535.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah						***2.570.380.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	49.93 %		49.29 %	49.45 %	2.570.380.000,00						49.63 %	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						11.764.535.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah						11.764.535.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	64 Dokumen Ketetapan		64 Dokumen Ketetapan	64 Dokumen Ketetapan	2.039.220.000,00						64 Dokumen Ketetapan	0,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD		84 Dokumen SSPD	84 Dokumen SSPD	1.194.905.000,00						84 Dokumen SSPD	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	64 Laporan		64 Laporan	64 Laporan	773.930.000,00						64 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	54 Laporan		54 Laporan	54 Laporan	2.408.220.000,00						54 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	197.379.000,00						24 Laporan	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana		50 Sarana dan Prasarana	50 Sarana dan Prasarana	4.260.581.000,00						50 Sarana dan Prasarana	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						32.750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	32.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		24 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						739.475.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana		50 Sarana dan Prasarana	19 Sarana dan Prasarana	739.475.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		50 Sarana dan Prasarana	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						12.650.000,00							0,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	64 Laporan		64 Laporan	12 Laporan	12.650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		64 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						675.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	64 Dokumen Ketetapan		64 Dokumen Ketetapan	1000 Dokumen Ketetapan	675.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		64 Dokumen Ketetapan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						374.055.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD		84 Dokumen SSPD	22500 Dokumen SSPD	374.055.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		84 Dokumen SSPD	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						736.450.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	54 Laporan		54 Laporan	12 Laporan	736.450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah I
		Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II						**1.473.484.420,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.473.484.420,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.473.484.420,00**							**0,00**	
350.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**105.555.455.062,20**							**122.758.151.146,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***683.784.920,00***							***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85 Skor		85 Skor	85 Skor	683.784.920,00						85 Skor	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						84.897.681.772,20					-		94.985.946.497,00	
		Terlaksananya penyerapan anggaran secara efektif dan tepat waktu						84.897.681.772,20					-		94.985.946.497,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen		1100 Dokumen	1100 Dokumen	179.960.000,00						1100 Dokumen	494.267.200,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						13.680.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen		1100 Dokumen	1200 Dokumen	13.680.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1100 Dokumen	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.391.000,00					-		392.355.000,00	
		Terwujudnya tertib administrasi BMD						171.391.000,00					-		392.355.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.434.000,00						12 Laporan	252.355.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	47.202.000,00						2 Laporan	62.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.755.000,00						2 Dokumen	77.500.000,00	
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.147.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.147.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.147.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.147.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						6.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.812.451.990,00					-		6.267.445.260,00	
		Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah						3.812.451.990,00					-		6.267.445.260,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	313.200.000,00						12 Laporan	735.795.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.391.670.000,00						12 Laporan	1.361.400.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	42 Paket	818.244.740,00						42 Paket	1.419.102.460,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	1.019.519.000,00						24 Paket	1.812.348.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	86.755.250,00						50 Paket	125.754.800,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.348.250,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	12 Paket	14.348.250,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						107.991.170,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	75 Paket	107.991.170,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		42 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						8.183.500,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	3 Paket	8.183.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						20.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	20.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						88.120.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	88.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						14.228.889.500,00					-		16.154.044.389,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						14.228.889.500,00					-		16.154.044.389,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	2.028.115.000,00						132 Laporan	1.885.139.989,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	40.000.000,00						132 Laporan	113.356.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.500.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132 Laporan		132 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						312.025.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	12 Laporan	312.025.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.620.905.800,00					-		3.910.270.000,00	
		Terpeliharanya kualitas dan fungsionalitas BMD sesuai standar						1.620.905.800,00					-		3.910.270.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	388.890.000,00						6 Unit	850.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		190 Unit	190 Unit	653.250.000,00						190 Unit	2.289.250.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	695 Unit		695 Unit	695 Unit	450.765.800,00						695 Unit	661.020.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						44.670.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		190 Unit	1 Unit	44.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		190 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						26.570.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	695 Unit		695 Unit	25 Unit	26.570.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		695 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						35.950.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	1 Unit	35.950.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
351.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**11.764.535.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah						***788.552.500,00***							***0,00***	
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	49.93 %		49.29 %	49.45 %	788.552.500,00						49.63 %	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						11.764.535.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah						11.764.535.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	64 Dokumen Ketetapan		64 Dokumen Ketetapan	64 Dokumen Ketetapan	2.039.220.000,00						64 Dokumen Ketetapan	0,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD		84 Dokumen SSPD	84 Dokumen SSPD	1.194.905.000,00						84 Dokumen SSPD	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	64 Laporan		64 Laporan	64 Laporan	773.930.000,00						64 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	54 Laporan		54 Laporan	54 Laporan	2.408.220.000,00						54 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	197.379.000,00						24 Laporan	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana		50 Sarana dan Prasarana	50 Sarana dan Prasarana	4.260.581.000,00						50 Sarana dan Prasarana	0,00	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						12.850.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	12.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						174.927.500,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana		50 Sarana dan Prasarana	5 Sarana dan Prasarana	174.927.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		50 Sarana dan Prasarana	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	64 Laporan		64 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		64 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						218.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	64 Dokumen Ketetapan		64 Dokumen Ketetapan	1000 Dokumen Ketetapan	218.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		64 Dokumen Ketetapan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						136.525.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD		84 Dokumen SSPD	1000 Dokumen SSPD	136.525.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		84 Dokumen SSPD	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						240.350.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	54 Laporan		54 Laporan	12 Laporan	240.350.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		54 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah II
		Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III						**1.413.911.790,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**1.413.911.790,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**1.413.911.790,00**							**0,00**	
352.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**105.555.455.062,20**							**122.758.151.146,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***601.455.790,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85 Skor		85 Skor	85 Skor	601.455.790,00						85 Skor	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						84.897.681.772,20					-		94.985.946.497,00	
		Terlaksananya penyerapan anggaran secara efektif dan tepat waktu						84.897.681.772,20					-		94.985.946.497,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen		1100 Dokumen	1100 Dokumen	179.960.000,00						1100 Dokumen	494.267.200,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						13.680.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen		1100 Dokumen	1200 Dokumen	13.680.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1100 Dokumen	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.391.000,00					-		392.355.000,00	
		Terwujudnya tertib administrasi BMD						171.391.000,00					-		392.355.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.434.000,00						12 Laporan	252.355.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	47.202.000,00						2 Laporan	62.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.755.000,00						2 Dokumen	77.500.000,00	
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.147.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.147.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.147.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.147.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						6.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	6.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.812.451.990,00					-		6.267.445.260,00	
		Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah						3.812.451.990,00					-		6.267.445.260,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	313.200.000,00						12 Laporan	735.795.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.391.670.000,00						12 Laporan	1.361.400.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	42 Paket	818.244.740,00						42 Paket	1.419.102.460,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	1.019.519.000,00						24 Paket	1.812.348.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	86.755.250,00						50 Paket	125.754.800,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						10.255.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	12 Paket	10.255.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						120.375.290,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	75 Paket	120.375.290,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		42 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						10.898.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	3 Paket	10.898.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						29.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	29.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						111.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	111.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						14.228.889.500,00					-		16.154.044.389,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						14.228.889.500,00					-		16.154.044.389,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	2.028.115.000,00						132 Laporan	1.885.139.989,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	40.000.000,00						132 Laporan	113.356.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						4.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132 Laporan		132 Laporan	12 Laporan	4.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						151.750.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	12 Laporan	151.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.620.905.800,00					-		3.910.270.000,00	
		Terpeliharanya kualitas dan fungsionalitas BMD sesuai standar						1.620.905.800,00					-		3.910.270.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	388.890.000,00						6 Unit	850.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		190 Unit	190 Unit	653.250.000,00						190 Unit	2.289.250.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	695 Unit		695 Unit	695 Unit	450.765.800,00						695 Unit	661.020.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						62.670.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		190 Unit	1 Unit	62.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		190 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						37.990.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	695 Unit		695 Unit	25 Unit	37.990.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		695 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						40.690.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	3 Unit	40.690.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
353.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**11.764.535.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah						***811.309.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	49.93 %		49.29 %	49.45 %	811.309.000,00						49.63 %	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						11.764.535.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah						11.764.535.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	64 Dokumen Ketetapan		64 Dokumen Ketetapan	64 Dokumen Ketetapan	2.039.220.000,00						64 Dokumen Ketetapan	0,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD		84 Dokumen SSPD	84 Dokumen SSPD	1.194.905.000,00						84 Dokumen SSPD	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	64 Laporan		64 Laporan	64 Laporan	773.930.000,00						64 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	54 Laporan		54 Laporan	54 Laporan	2.408.220.000,00						54 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	197.379.000,00						24 Laporan	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana		50 Sarana dan Prasarana	50 Sarana dan Prasarana	4.260.581.000,00						50 Sarana dan Prasarana	0,00	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						12.850.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	12.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						180.484.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana		50 Sarana dan Prasarana	6 Sarana dan Prasarana	180.484.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		50 Sarana dan Prasarana	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						5.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	64 Laporan		64 Laporan	12 Laporan	5.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		64 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						236.100.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	64 Dokumen Ketetapan		64 Dokumen Ketetapan	1000 Dokumen Ketetapan	236.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		64 Dokumen Ketetapan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						136.525.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD		84 Dokumen SSPD	1000 Dokumen SSPD	136.525.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		84 Dokumen SSPD	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						240.350.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	54 Laporan		54 Laporan	12 Laporan	240.350.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		54 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah III
		Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV						**2.111.908.320,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**2.111.908.320,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**2.111.908.320,00**							**0,00**	
354.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**105.555.455.062,20**							**122.758.151.146,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***784.651.320,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85 Skor		85 Skor	85 Skor	784.651.320,00						85 Skor	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						84.897.681.772,20					-		94.985.946.497,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penyerapan anggaran secara efektif dan tepat waktu						84.897.681.772,20					-		94.985.946.497,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen		1100 Dokumen	1100 Dokumen	179.960.000,00						1100 Dokumen	494.267.200,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						13.680.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen		1100 Dokumen	1200 Dokumen	13.680.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1100 Dokumen	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.391.000,00					-		392.355.000,00	
		Terwujudnya tertib administrasi BMD						171.391.000,00					-		392.355.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.434.000,00						12 Laporan	252.355.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	47.202.000,00						2 Laporan	62.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.755.000,00						2 Dokumen	77.500.000,00	
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.147.000,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.147.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.147.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.147.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						8.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	8.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.812.451.990,00					-		6.267.445.260,00	
		Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah						3.812.451.990,00					-		6.267.445.260,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	313.200.000,00						12 Laporan	735.795.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.391.670.000,00						12 Laporan	1.361.400.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	42 Paket	818.244.740,00						42 Paket	1.419.102.460,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	1.019.519.000,00						24 Paket	1.812.348.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	86.755.250,00						50 Paket	125.754.800,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	12 Paket	14.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						113.645.320,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	75 Paket	113.645.320,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		42 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						18.269.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	3 Paket	18.269.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						43.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	43.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						167.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	167.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						14.228.889.500,00					-		16.154.044.389,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						14.228.889.500,00					-		16.154.044.389,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	2.028.115.000,00						132 Laporan	1.885.139.989,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	40.000.000,00						132 Laporan	113.356.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						6.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132 Laporan		132 Laporan	12 Laporan	6.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						212.300.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	12 Laporan	212.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.620.905.800,00					-		3.910.270.000,00	
		Terpeliharanya kualitas dan fungsionalitas BMD sesuai standar						1.620.905.800,00					-		3.910.270.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	388.890.000,00						6 Unit	850.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		190 Unit	190 Unit	653.250.000,00						190 Unit	2.289.250.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	695 Unit		695 Unit	695 Unit	450.765.800,00						695 Unit	661.020.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						66.480.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		190 Unit	2 Unit	66.480.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		190 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						61.130.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	695 Unit		695 Unit	25 Unit	61.130.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		695 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						58.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	3 Unit	58.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
355.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**11.764.535.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah						***1.326.110.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	49.93 %		49.29 %	49.45 %	1.326.110.000,00						49.63 %	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						11.764.535.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah						11.764.535.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	64 Dokumen Ketetapan		64 Dokumen Ketetapan	64 Dokumen Ketetapan	2.039.220.000,00						64 Dokumen Ketetapan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD		84 Dokumen SSPD	84 Dokumen SSPD	1.194.905.000,00						84 Dokumen SSPD	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	64 Laporan		64 Laporan	64 Laporan	773.930.000,00						64 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	54 Laporan		54 Laporan	54 Laporan	2.408.220.000,00						54 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	197.379.000,00						24 Laporan	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana		50 Sarana dan Prasarana	50 Sarana dan Prasarana	4.260.581.000,00						50 Sarana dan Prasarana	0,00	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						23.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	23.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-	-		24 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						374.495.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana		50 Sarana dan Prasarana	8 Sarana dan Prasarana	374.495.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		50 Sarana dan Prasarana	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						8.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	64 Laporan		64 Laporan	12 Laporan	8.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		64 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						357.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	64 Dokumen Ketetapan		64 Dokumen Ketetapan	1000 Dokumen Ketetapan	357.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		64 Dokumen Ketetapan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						213.315.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD		84 Dokumen SSPD	1000 Dokumen SSPD	213.315.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		84 Dokumen SSPD	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						349.600.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	54 Laporan		54 Laporan	12 Laporan	349.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah IV
		Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V						**3.045.636.100,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**3.045.636.100,00**							**0,00**	
	5.02	**KEUANGAN**						**3.045.636.100,00**							**0,00**	
356.	**5.02.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**105.555.455.062,20**							**122.758.151.146,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***1.083.551.600,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	85 Skor		85 Skor	85 Skor	1.083.551.600,00						85 Skor	0,00	
	5.02.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						84.897.681.772,20					-		94.985.946.497,00	
		Terlaksananya penyerapan anggaran secara efektif dan tepat waktu						84.897.681.772,20					-		94.985.946.497,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen		1100 Dokumen	1100 Dokumen	179.960.000,00						1100 Dokumen	494.267.200,00	
	5.02.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						13.680.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1100 Dokumen		1100 Dokumen	1200 Dokumen	13.680.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1100 Dokumen	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						171.391.000,00					-		392.355.000,00	
		Terwujudnya tertib administrasi BMD						171.391.000,00					-		392.355.000,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	79.434.000,00						12 Laporan	252.355.000,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	47.202.000,00						2 Laporan	62.500.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.755.000,00						2 Dokumen	77.500.000,00	
	5.02.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						1.147.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	1.147.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						1.147.000,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.147.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						11.100.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	11.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						3.812.451.990,00					-		6.267.445.260,00	
		Terwujudnya tertib administrasi umum perangkat daerah						3.812.451.990,00					-		6.267.445.260,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	313.200.000,00						12 Laporan	735.795.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.391.670.000,00						12 Laporan	1.361.400.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	42 Paket	818.244.740,00						42 Paket	1.419.102.460,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	24 Paket	1.019.519.000,00						24 Paket	1.812.348.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	86.755.250,00						50 Paket	125.754.800,00	
	5.02.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.400.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	12 Paket	14.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						159.713.100,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	42 Paket		42 Paket	75 Paket	159.713.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		42 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						20.901.500,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket		24 Paket	3 Paket	20.901.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		24 Paket	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						87.000.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	87.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						234.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	234.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						14.228.889.500,00					-		16.154.044.389,00	
		Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintah daerah						14.228.889.500,00					-		16.154.044.389,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	2.028.115.000,00						132 Laporan	1.885.139.989,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132 Laporan		132 Laporan	132 Laporan	40.000.000,00						132 Laporan	113.356.000,00	
	5.02.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	132 Laporan		132 Laporan	12 Laporan	7.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						299.250.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	132 Laporan		132 Laporan	12 Laporan	299.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		132 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.620.905.800,00					-		3.910.270.000,00	
		Terpeliharanya kualitas dan fungsionalitas BMD sesuai standar						1.620.905.800,00					-		3.910.270.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	6 Unit	388.890.000,00						6 Unit	850.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		190 Unit	190 Unit	653.250.000,00						190 Unit	2.289.250.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	695 Unit		695 Unit	695 Unit	450.765.800,00						695 Unit	661.020.000,00	
	5.02.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						88.290.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	190 Unit		190 Unit	3 Unit	88.290.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		190 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.02.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						81.970.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	695 Unit		695 Unit	26 Unit	81.970.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		695 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						64.300.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	6 Unit		6 Unit	3 Unit	64.300.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		6 Unit	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
357.	**5.02.04**	**PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**						**11.764.535.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dan ketersediaan sumber Pendanaan Daerah						***1.960.937.500,00***							***0,00***	
			999.Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah diluar DAK	49.93 %		49.29 %	49.45 %	1.960.937.500,00						49.63 %	0,00	
	5.02.04.1.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah						11.764.535.000,00					-		0,00	
		Meningkatnya Penerimaan Pendapatan Asli Daerah						11.764.535.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	64 Dokumen Ketetapan		64 Dokumen Ketetapan	64 Dokumen Ketetapan	2.039.220.000,00						64 Dokumen Ketetapan	0,00	
			Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD		84 Dokumen SSPD	84 Dokumen SSPD	1.194.905.000,00						84 Dokumen SSPD	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	64 Laporan		64 Laporan	64 Laporan	773.930.000,00						64 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	54 Laporan		54 Laporan	54 Laporan	2.408.220.000,00						54 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	197.379.000,00						24 Laporan	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana		50 Sarana dan Prasarana	50 Sarana dan Prasarana	4.260.581.000,00						50 Sarana dan Prasarana	0,00	
	5.02.04.1.01.0003	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah						32.750.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	24 Laporan		24 Laporan	12 Laporan	32.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri	-	-		24 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.04.1.01.0004	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah						407.522.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	50 Sarana dan Prasarana		50 Sarana dan Prasarana	12 Sarana dan Prasarana	407.522.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		50 Sarana dan Prasarana	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.04.1.01.0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah						18.250.000,00							0,00	
		Tersedianya Data Objek Pajak, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subyek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	64 Laporan		64 Laporan	12 Laporan	18.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		64 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.04.1.01.0007	Penetapan Wajib Pajak Daerah						487.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	64 Dokumen Ketetapan		64 Dokumen Ketetapan	1000 Dokumen Ketetapan	487.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		64 Dokumen Ketetapan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.04.1.01.0010	Penagihan Pajak Daerah						293.565.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Tertanggihnya WP yang Memiliki Piutang Pajak.	84 Dokumen SSPD		84 Dokumen SSPD	1000 Dokumen SSPD	293.565.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri	-	-		84 Dokumen SSPD	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
	5.02.04.1.01.0012	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah						721.050.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	54 Laporan		54 Laporan	12 Laporan	721.050.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		54 Laporan	0,00	Unit Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah Wilayah V
		Badan Kepegawaian Daerah						**17.978.808.440,00**							**22.022.948.651,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**17.978.808.440,00**							**22.022.948.651,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**17.978.808.440,00**							**22.022.948.651,00**	
358.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**15.909.166.340,00**							**16.904.417.704,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***15.833.792.440,00***							***16.581.082.738,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	82.79 Skor		79.97 Skor	80.35 Skor	15.833.792.440,00						81.16 Skor	16.581.082.738,00	
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						217.719.700,00					ASN		239.283.460,00	
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						217.719.700,00					ASN		239.283.460,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.450.000,00						1 Dokumen	13.996.800,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.369.700,00						2 Dokumen	51.866.892,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.870.000,00						1 Dokumen	13.996.800,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.900.000,00						1 Dokumen	13.996.800,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.850.000,00						1 Dokumen	13.996.800,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	31.800.000,00						12 Laporan	72.817.768,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	81.480.000,00						4 Laporan	58.611.600,00	
	5.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						44.369.700,00							51.866.892,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	44.369.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	51.866.892,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						23.850.000,00							13.996.800,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	23.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	13.996.800,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						11.900.000,00							13.996.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	13.996.800,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						11.450.000,00							13.996.800,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.450.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	13.996.800,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						12.870.000,00							13.996.800,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	12.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	13.996.800,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						31.800.000,00							72.817.768,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	31.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	72.817.768,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						81.480.000,00							58.611.600,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	81.480.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		4 Laporan	58.611.600,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.777.144.140,00					ASN		13.073.305.505,00	
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.777.144.140,00					ASN		13.073.305.505,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.700.000,00						1 Dokumen	14.259.842,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.700.000,00						1 Dokumen	21.758.160,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	67.680.000,00						12 Dokumen	129.151.646,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.810.000,00						1 Laporan	45.794.326,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	80.376.800,00						12 Laporan	92.825.249,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan		90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	12.557.877.340,00						90 Orang/ Bulan	12.769.516.282,00	
	5.03.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						12.557.877.340,00							12.769.516.282,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	90 Orang/ Bulan		90 Orang/ Bulan	90 Orang/ Bulan	12.557.877.340,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		90 Orang/ Bulan	12.769.516.282,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan danPengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						67.680.000,00							129.151.646,00	
		Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	67.680.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	129.151.646,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						13.600.000,00							12.841.893,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	13.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	12.841.893,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						41.700.000,00							14.259.842,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	41.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	14.259.842,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						74.376.800,00							47.544.640,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	74.376.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	47.544.640,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						11.700.000,00							21.758.160,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	11.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Dokumen	21.758.160,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						66.600.000,00					ASN		146.846.618,00	
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah						66.600.000,00					ASN		146.846.618,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00						1 Dokumen	113.604.218,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	63.600.000,00						1 Laporan	33.242.400,00	
	5.03.01.1.03.0002	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD						3.000.000,00							113.604.218,00	
		Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	113.604.218,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						63.600.000,00							33.242.400,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	63.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	33.242.400,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						39.002.100,00					ASN		93.312.000,00	
		Meningkatnya kualitas Dokumen laporan pelaksanaan Kepegawaian perangkat daerah						39.002.100,00					ASN		93.312.000,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	39.002.100,00						10 Orang	93.312.000,00	
	5.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						39.002.100,00							93.312.000,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	10 Orang		10 Orang	10 Orang	39.002.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Orang	93.312.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						942.257.000,00					ASN		1.592.896.434,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah						942.257.000,00					ASN		1.592.896.434,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	52.200.000,00						12 Dokumen	54.694.362,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	53.320.000,00						12 Dokumen	64.114.092,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.080.000,00						12 Dokumen	41.960.075,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	117.000.000,00						12 Laporan	37.299.706,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	460.550.000,00						1 Laporan	1.141.645.748,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	146.203.000,00						1 Paket	187.802.403,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.078.500,00						1 Paket	12.433.235,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.597.500,00						1 Paket	37.020.653,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.228.000,00						1 Paket	15.926.160,00	
	5.03.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						25.228.000,00							15.926.160,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	25.228.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	15.926.160,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						124.536.600,00							166.357.679,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	124.536.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		1 Paket	166.357.679,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						46.250.000,00							18.649.853,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	18.649.853,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						52.200.000,00							54.694.362,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	52.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	54.694.362,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						10.078.500,00							12.433.235,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	10.078.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	12.433.235,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						117.000.000,00							37.299.706,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	117.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Laporan	37.299.706,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						423.400.000,00							1.071.661.748,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	423.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	1.071.661.748,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						25.080.000,00							41.960.075,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	25.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	41.960.075,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						53.320.000,00							64.114.092,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	53.320.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		12 Dokumen	64.114.092,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						341.393.400,00					Penyedia Barang dan Jasa		298.283.526,00	
		Meningkatnya kualitas pengadaan Barang Milik Daerah						341.393.400,00					Penyedia Barang dan Jasa		298.283.526,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.229.400,00						1 Paket	67.299.706,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit		50 Unit	50 Unit	127.164.000,00						50 Unit	137.671.820,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	93.312.000,00	
	5.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						14.229.400,00							67.299.706,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.229.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	67.299.706,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						127.164.000,00							137.671.820,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	50 Unit		50 Unit	50 Unit	127.164.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Unit	137.671.820,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							93.312.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	93.312.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.002.538.000,00					Penyediaan Jasa Penunjang		1.048.442.666,00	
		Meningkatnya kualitas penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah						1.002.538.000,00					Penyediaan Jasa Penunjang		1.048.442.666,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	477.630.000,00						12 Laporan	492.617.376,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	514.353.000,00						12 Laporan	551.249.410,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.555.000,00						12 Laporan	4.575.880,00	
	5.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						10.555.000,00							4.575.880,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	10.555.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	4.575.880,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						477.630.000,00							492.617.376,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	477.630.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	492.617.376,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						514.353.000,00							551.249.410,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	514.353.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	551.249.410,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						522.512.000,00					ASN		412.047.495,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya kualitas Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpelihara						522.512.000,00					ASN		412.047.495,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	316.392.000,00						1 Unit	174.332.350,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit		27 Unit	27 Unit	153.720.000,00						27 Unit	186.498.525,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	6.216.620,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	52.400.000,00						4 Unit	45.000.000,00	
	5.03.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						153.720.000,00							186.498.525,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	27 Unit		27 Unit	27 Unit	153.720.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		27 Unit	186.498.525,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							6.216.620,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	50 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	6.216.620,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						52.400.000,00							45.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	4 Unit		4 Unit	4 Unit	52.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Unit	45.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						316.392.000,00							174.332.350,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	316.392.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	174.332.350,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya kualitas pengadaan Barang Milik Daerah						341.393.400,00					Penyedia Barang dan Jasa		298.283.526,00	
			Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	-	200.000.000,00						-	0,00	
	5.03.01.1.07.0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						200.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	-		-	1 Unit	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		-	0,00	Badan Kepegawaian Daerah
359.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**2.311.766.000,00**							**5.745.670.593,00**	
		Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karier ASN						***302.504.800,00***							***1.059.811.850,00***	
			999.Nilai NSPK Elemen Pengembangan Karier	4.3 Poin		3.8 Poin	3.9 Poin	302.504.800,00						4 Poin	1.059.811.850,00	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Konseling ASN						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	160 Orang		80 Orang	100 Orang	68.531.000,00						120 Orang	278.261.280,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	81.966.000,00						12 Dokumen	99.785.330,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.500.000,00						12 Dokumen	354.105.050,00	
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	350 Orang		350 Orang	350 Orang	111.507.800,00						350 Orang	327.660.190,00	
		Terlaksananya fasilitasi Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar bagi ASN sesuai ketentuan pemberian Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	160 Orang		80 Orang	100 Orang	68.531.000,00						120 Orang	278.261.280,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	81.966.000,00						12 Dokumen	99.785.330,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.500.000,00						12 Dokumen	354.105.050,00	
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	350 Orang		350 Orang	350 Orang	111.507.800,00						350 Orang	327.660.190,00	
		Terlaksananya pembinaan jabatan fungsional ASN secara berkelanjutan untuk mendukung profesionalitas dan pengembangan karier						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	160 Orang		80 Orang	100 Orang	68.531.000,00						120 Orang	278.261.280,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	81.966.000,00						12 Dokumen	99.785.330,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.500.000,00						12 Dokumen	354.105.050,00	
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	350 Orang		350 Orang	350 Orang	111.507.800,00						350 Orang	327.660.190,00	
		Terlaksananya pemetaan kebutuhan Diklat Dasar dan Diklat Manajerial bagi ASN secara rutin						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	160 Orang		80 Orang	100 Orang	68.531.000,00						120 Orang	278.261.280,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	81.966.000,00						12 Dokumen	99.785.330,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.500.000,00						12 Dokumen	354.105.050,00	
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	350 Orang		350 Orang	350 Orang	111.507.800,00						350 Orang	327.660.190,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya penilaian Kompetensi untuk mendukung Manajemen Talenta						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	160 Orang		80 Orang	100 Orang	68.531.000,00						120 Orang	278.261.280,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	81.966.000,00						12 Dokumen	99.785.330,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.500.000,00						12 Dokumen	354.105.050,00	
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	350 Orang		350 Orang	350 Orang	111.507.800,00						350 Orang	327.660.190,00	
		Terlaksananya penyusunan administrasi jabatan fungsional ASN secara tertib sesuai pedoman pembinaan jabatan fungsional						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	160 Orang		80 Orang	100 Orang	68.531.000,00						120 Orang	278.261.280,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	81.966.000,00						12 Dokumen	99.785.330,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.500.000,00						12 Dokumen	354.105.050,00	
			Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	350 Orang		350 Orang	350 Orang	111.507.800,00						350 Orang	327.660.190,00	
	5.03.02.1.03.0003	Pengeloaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN						40.500.000,00							354.105.050,00	
		Terkelolanya Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Diklat dan Sertifikasi ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	40.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	354.105.050,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN						81.966.000,00							99.785.330,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pendidikan Lanjutan ASN yang Dikelola	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	81.966.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	99.785.330,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.03.0008	Penyusunan Administrasi Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional						68.531.000,00							278.261.280,00	
		Terlaksananya Penyusunan Kebutuhan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	Jumlah ASN yang Mendapatkan Layanan Diklat dan Sertifikasi Jabatan Fungsional	160 Orang		80 Orang	100 Orang	68.531.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		120 Orang	278.261.280,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.03.0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN						111.507.800,00							327.660.190,00	
		Meningkatnya Pembinaan Jabatan Fungsional ASN	Jumlah Fungsional ASN yang Dibina	350 Orang		350 Orang	1000 Orang	111.507.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		350 Orang	327.660.190,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatkan Kualitas Penilaian kinerja, penghargaan, disiplin, cuti, kode etik, pemberhentian, serta penggajian, tunjangan, dan fasilitas						***639.525.000,00***							***1.182.825.770,00***	
			999.Nilai NSPK Elemen Penilaian kinerja, penghargaan, disiplin, cuti, kode etik, pemberhentian, serta penggajian, tunjangan, dan fasilitas	28.75 Poin		26.09 Poin	26.94 Poin	639.525.000,00						27.64 Poin	1.182.825.770,00	
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						639.525.000,00					ASN		1.182.825.770,00	
		Meningkatnya Kualitas Disiplin, Kode Etik dan Cuti						639.525.000,00					ASN		1.182.825.770,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	352.493.000,00						5 Orang	415.301.470,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 Orang		150 Orang	150 Orang	33.000.000,00						150 Orang	74.095.600,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	58.018.600,00						20 Orang	207.056.880,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	123.597.000,00						12 Dokumen	470.541.720,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	72.416.400,00						1 Dokumen	15.830.100,00	
		Meningkatnya Kualitas Penghargaan ASN						639.525.000,00					ASN		1.182.825.770,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	352.493.000,00						5 Orang	415.301.470,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 Orang		150 Orang	150 Orang	33.000.000,00						150 Orang	74.095.600,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	58.018.600,00						20 Orang	207.056.880,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	123.597.000,00						12 Dokumen	470.541.720,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	72.416.400,00						1 Dokumen	15.830.100,00	
		Meningkatnya Kualitas Penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, dan fasilitas						639.525.000,00					ASN		1.182.825.770,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang		5 Orang	5 Orang	352.493.000,00						5 Orang	415.301.470,00	
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 Orang		150 Orang	150 Orang	33.000.000,00						150 Orang	74.095.600,00	
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	58.018.600,00						20 Orang	207.056.880,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	123.597.000,00						12 Dokumen	470.541.720,00	
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	72.416.400,00						1 Dokumen	15.830.100,00	
	5.03.02.1.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur						123.597.000,00							470.541.720,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	123.597.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	470.541.720,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai						352.493.000,00							415.301.470,00	
		Terlaksananya Pemberian Penghargaan bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan	5 Orang		5 Orang	9 Orang	352.493.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Orang	415.301.470,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai						33.000.000,00							74.095.600,00	
		Terlaksananya Pemberian Tanda Jasa bagi ASN	Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa	150 Orang		150 Orang	150 Orang	33.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		150 Orang	74.095.600,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0007	Pembinaan Disiplin ASN						58.018.600,00							207.056.880,00	
		Meningkatnya Disiplin ASN	Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan	20 Orang		20 Orang	20 Orang	58.018.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Orang	207.056.880,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.04.0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai						72.416.400,00							15.830.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai	Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	72.416.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	15.830.100,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya ASN yang terpetakan kompetensinya untuk mendorong peningkatan kualitas pengembangan karir yang disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir						***302.504.800,00***							***1.059.811.850,00***	
		Meningkatnya kualitas pengelolaan jabatan, pangkat, pola karier, dan mutasi ASN.						***724.595.700,00***							***1.832.172.472,00***	
			999.Nilai NSPK Elemen Jabatan, Pangkat, Pola Karier, dan Mutasi.	17.9 Poin		16.3 Poin	16.7 Poin	724.595.700,00						17.1 Poin	1.832.172.472,00	
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN						724.595.700,00					ASN		1.832.172.472,00	
		Meningkatnya Kualitas Mutasi ASN						724.595.700,00					ASN		1.832.172.472,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	118.063.100,00						12 Dokumen	233.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	448.933.400,00						4 Dokumen	1.300.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	157.599.200,00						12 Laporan	298.547.472,00	
		Meningkatnya Kualitas pengelolaan jabatan, dan Pola Karier ASN						724.595.700,00					ASN		1.832.172.472,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	118.063.100,00						12 Dokumen	233.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	448.933.400,00						4 Dokumen	1.300.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	157.599.200,00						12 Laporan	298.547.472,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						724.595.700,00					ASN		1.832.172.472,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	118.063.100,00						12 Dokumen	233.625.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	448.933.400,00						4 Dokumen	1.300.000.000,00	
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	157.599.200,00						12 Laporan	298.547.472,00	
	5.03.02.1.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN						118.063.100,00							233.625.000,00	
		Terlaksananya Mutasi ASN yang Meliputi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Antar Daerah	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	118.063.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	233.625.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN						157.599.200,00							298.547.472,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	157.599.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	298.547.472,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN						448.933.400,00							1.300.000.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	448.933.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	1.300.000.000,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Meningkatnya kualitas penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengangkatan ASN, jaminan pensiun dan hari tua, pensiun, serta perlindungan ASN.						***478.390.500,00***							***1.231.753.421,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai NSPK Elemen penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengangkatan ASN, jaminan pensiun dan hari tua, pensiun, serta perlindungan ASN.	39.87 Poin		38 Poin	38.35 Poin	478.390.500,00						38.7 Poin	1.231.753.421,00	
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN						478.390.500,00					ASN		1.231.753.421,00	
		Meningkatkan Kualitas Perlindungan						478.390.500,00					ASN		1.231.753.421,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	65.181.000,00						12 Dokumen	93.067.040,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	117.061.900,00						12 Dokumen	358.774.131,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	229.535.200,00						2 Dokumen	621.977.500,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	66.612.400,00						1 Lembaga	157.934.750,00	
		Meningkatkan Kualitas Sistem Informasi yang terintegrasi						478.390.500,00					ASN		1.231.753.421,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	65.181.000,00						12 Dokumen	93.067.040,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	117.061.900,00						12 Dokumen	358.774.131,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	229.535.200,00						2 Dokumen	621.977.500,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	66.612.400,00						1 Lembaga	157.934.750,00	
		Meningkatnya kualitas pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua, dan pensiun						478.390.500,00					ASN		1.231.753.421,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	65.181.000,00						12 Dokumen	93.067.040,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	117.061.900,00						12 Dokumen	358.774.131,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	229.535.200,00						2 Dokumen	621.977.500,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	66.612.400,00						1 Lembaga	157.934.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas penyusunan dan penetapan kebutuhan ASN, pengadaan ASN, pengangkatan ASN						478.390.500,00					ASN		1.231.753.421,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	65.181.000,00						12 Dokumen	93.067.040,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	117.061.900,00						12 Dokumen	358.774.131,00	
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	229.535.200,00						2 Dokumen	621.977.500,00	
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	66.612.400,00						1 Lembaga	157.934.750,00	
	5.03.02.1.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK						229.535.200,00							621.977.500,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	229.535.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	621.977.500,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian						65.181.000,00							93.067.040,00	
		Terlaksananya Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	65.181.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	93.067.040,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN						66.612.400,00							157.934.750,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terfasilitasinya Lembaga Profesi ASN	Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi	1 Lembaga		1 Lembaga	1 Lembaga	66.612.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Lembaga	157.934.750,00	Badan Kepegawaian Daerah
	5.03.02.1.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian						117.061.900,00							358.774.131,00	
		Terkelolanya Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	117.061.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	358.774.131,00	Badan Kepegawaian Daerah
		Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)						**242.123.900,00**							**627.139.646,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**242.123.900,00**							**627.139.646,00**	
	5.03	**KEPEGAWAIAN**						**242.123.900,00**							**627.139.646,00**	
360.	**5.03.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**15.909.166.340,00**							**16.904.417.704,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***75.373.900,00***							***188.032.566,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	82.79 Skor		79.97 Skor	80.35 Skor	75.373.900,00						81.16 Skor	188.032.566,00	
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.777.144.140,00					ASN		13.073.305.505,00	
		Meningkatnya kualitas Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						12.777.144.140,00					ASN		13.073.305.505,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.810.000,00						1 Laporan	45.794.326,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	80.376.800,00						12 Laporan	92.825.249,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.03.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						4.210.000,00							32.952.433,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	4.210.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	32.952.433,00	Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)
	5.03.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						6.000.000,00							45.280.609,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Laporan		12 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	45.280.609,00	Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						942.257.000,00					-		1.592.896.434,00	
		Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah						942.257.000,00					-		1.592.896.434,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	460.550.000,00						1 Laporan	1.141.645.748,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	146.203.000,00						1 Paket	187.802.403,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	52.597.500,00						1 Paket	37.020.653,00	
	5.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						21.666.400,00							21.444.724,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	2 Paket	21.666.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	21.444.724,00	Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)
	5.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						6.347.500,00							18.370.800,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	6.347.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Paket	18.370.800,00	Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)
	5.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						37.150.000,00							69.984.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	37.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		1 Laporan	69.984.000,00	Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)
361.	**5.03.02**	**PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH**						**2.311.766.000,00**							**5.745.670.593,00**	
		Meningkatkan Kualitas Pengembangan Karier ASN						***166.750.000,00***							***439.107.080,00***	
		Meningkatnya ASN yang terpetakan kompetensinya untuk mendorong peningkatan kualitas pengembangan karir yang disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan rencana pengembangan karir						***166.750.000,00***							***439.107.080,00***	
			999.Presentase ASN yang sudah terpetakan Kompetensinya	100 %		56.06 %	67.03 %	166.750.000,00						78.01 %	439.107.080,00	
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Konseling ASN						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	22.550.000,00						50 Orang	6.895.174,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	144.200.000,00						4 Dokumen	432.211.906,00	
		Terlaksananya fasilitasi Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar bagi ASN sesuai ketentuan pemberian Tugas Belajar dan Pencantuman Gelar						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	22.550.000,00						50 Orang	6.895.174,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	144.200.000,00						4 Dokumen	432.211.906,00	
		Terlaksananya pembinaan jabatan fungsional ASN secara berkelanjutan untuk mendukung profesionalitas dan pengembangan karier						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	22.550.000,00						50 Orang	6.895.174,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	144.200.000,00						4 Dokumen	432.211.906,00	
		Terlaksananya pemetaan kebutuhan Diklat Dasar dan Diklat Manajerial bagi ASN secara rutin						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	22.550.000,00						50 Orang	6.895.174,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	144.200.000,00						4 Dokumen	432.211.906,00	
		Terlaksananya penilaian Kompetensi untuk mendukung Manajemen Talenta						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	22.550.000,00						50 Orang	6.895.174,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	144.200.000,00						4 Dokumen	432.211.906,00	
		Terlaksananya penyusunan administrasi jabatan fungsional ASN secara tertib sesuai pedoman pembinaan jabatan fungsional						469.254.800,00					ASN		1.498.918.930,00	
			Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	22.550.000,00						50 Orang	6.895.174,00	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	144.200.000,00						4 Dokumen	432.211.906,00	
	5.03.02.1.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN						22.550.000,00							6.895.174,00	
		Meningkatnya Kapasitas ASN	Jumlah ASN yang Meningkat Kapasitasnya	50 Orang		50 Orang	50 Orang	22.550.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Orang	6.895.174,00	Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)
	5.03.02.1.03.0002	Pengelolaan Assessment Center						144.200.000,00							432.211.906,00	
		Terkelolanya Assessment Center	Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center	4 Dokumen		4 Dokumen	4 Dokumen	144.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Dokumen	432.211.906,00	Unit Pelayanan Penilaian Kompetensi (UPPK)
		Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah						**27.310.086.122,00**							**37.338.170.711,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**27.310.086.122,00**							**37.338.170.711,00**	
	5.04	**PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**						**27.310.086.122,00**							**37.338.170.711,00**	
362.	**5.04.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**17.213.996.822,00**							**20.762.430.711,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***17.213.996.822,00***							***19.679.930.711,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.98 Skor		78.78 Skor	79.57 Skor	17.213.996.822,00						80.37 Skor	19.679.930.711,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						221.587.000,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		705.000.000,00	
		Terlaksananya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						221.587.000,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		705.000.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	78.330.000,00						1 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	15.666.000,00						2 Dokumen	115.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00						1 Dokumen	100.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.011.000,00						1 Dokumen	82.500.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	18.902.000,00						1 Dokumen	82.500.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan		26 Laporan	26 Laporan	6.060.000,00						26 Laporan	115.000.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	14.618.000,00						5 Laporan	115.000.000,00	
	5.04.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						15.666.000,00							115.000.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	5 Dokumen	15.666.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	115.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						18.902.000,00							82.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	18.902.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	82.500.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						13.011.000,00							82.500.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	13.011.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	82.500.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						78.330.000,00							95.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	78.330.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	95.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						75.000.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	100.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						6.060.000,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	26 Laporan		26 Laporan	20 Laporan	6.060.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		26 Laporan	115.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						14.618.000,00							115.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Laporan		5 Laporan	10 Laporan	14.618.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	115.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.425.459.013,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		15.404.090.711,00	
		Terlaksanannya Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						14.425.459.013,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		15.404.090.711,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	64.297.500,00						12 Dokumen	117.693.711,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.490.000,00						1 Laporan	60.000.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	26.563.800,00						18 Laporan	175.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan		88 Orang/ Bulan	88 Orang/ Bulan	14.310.107.713,00						88 Orang/ Bulan	15.051.397.000,00	
	5.04.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						14.310.107.713,00							15.051.397.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	88 Orang/ Bulan		88 Orang/ Bulan	88 Orang/ Bulan	14.310.107.713,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		88 Orang/ Bulan	15.051.397.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						64.297.500,00							117.693.711,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	64.297.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	117.693.711,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						24.490.000,00							60.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.490.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	60.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						26.563.800,00							175.000.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Laporan		18 Laporan	18 Laporan	26.563.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		18 Laporan	175.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		215.000.000,00	
		Terlaksananya Kebutuhan Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		215.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00						3 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	0,00						10 Paket	45.000.000,00	
			Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 Orang		4 Orang	4 Orang	0,00						4 Orang	55.000.000,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00						2 Unit	65.000.000,00	
	5.04.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							65.000.000,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	2 Unit		2 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	65.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							45.000.000,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Paket	45.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							50.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	3 Dokumen		3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Dokumen	50.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.05.0006	Pemulangan Pegawai yang Pensiun						0,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	5 Orang		4 Orang	4 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Orang	55.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						259.338.325,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.023.500.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah						259.338.325,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.023.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000,00						2 Dokumen	55.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	52.513.000,00						2 Dokumen	125.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		75 Laporan	85 Laporan	136.735.000,00						95 Laporan	354.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	46.496.575,00						1 Paket	159.500.000,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.800.000,00						2 Paket	115.000.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	11.587.750,00						10 Paket	115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket		70 Paket	70 Paket	6.000,00						70 Paket	100.000.000,00	
	5.04.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.587.750,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	3 Paket	11.587.750,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Paket	115.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						6.000,00							100.000.000,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	70 Paket		70 Paket	0 Paket	6.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		70 Paket	100.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						46.496.575,00							159.500.000,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	3 Paket	46.496.575,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Paket	159.500.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						4.800.000,00							115.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket		2 Paket	2 Paket	4.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Paket	115.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						7.200.000,00							55.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	7.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	55.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						136.735.000,00							354.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	110 Laporan		75 Laporan	75 Laporan	136.735.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		95 Laporan	354.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						52.513.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	52.513.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	125.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.04.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						78.300,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		890.000.000,00	
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						78.300,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		890.000.000,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Paket		7 Paket	10 Paket	18.000,00						15 Paket	235.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit		5 Unit	7 Unit	300,00						8 Unit	115.000.000,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit		25 Unit	30 Unit	60.000,00						35 Unit	225.000.000,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						2 Unit	315.000.000,00	
	5.04.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						300,00							115.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	9 Unit		5 Unit	0 Unit	300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Unit	115.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						18.000,00							235.000.000,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	25 Paket		7 Paket	0 Paket	18.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Paket	235.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						60.000,00							225.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	45 Unit		25 Unit	0 Unit	60.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		35 Unit	225.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							315.000.000,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3 Unit		1 Unit	0 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	315.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.092.134.948,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.973.760.000,00	
		Terpenuhinya Pengadaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						2.092.134.948,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.973.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	658.033.948,00						12 Laporan	551.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.431.101.000,00						12 Laporan	1.405.760.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00						2 Laporan	17.000.000,00	
	5.04.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						3.000.000,00							17.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	3.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	17.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						658.033.948,00							551.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	658.033.948,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	551.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.431.101.000,00							1.405.760.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.431.101.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.405.760.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						197.639.236,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		511.000.000,00	
		Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						197.639.236,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		511.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit	2 Unit	7.929.236,00						3 Unit	145.000.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	6 Unit	72.000.000,00						6 Unit	145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	21 Unit	25.000.000,00						21 Unit	96.000.000,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit		105 Unit	110 Unit	92.710.000,00						115 Unit	125.000.000,00	
	5.04.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						25.000.000,00							96.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	21 Unit		21 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		21 Unit	96.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						72.000.000,00							145.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6 Unit		6 Unit	3 Unit	72.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Unit	145.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						92.710.000,00							125.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	125 Unit		105 Unit	90 Unit	92.710.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		115 Unit	125.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						7.929.236,00							145.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit		2 Unit	1 Unit	7.929.236,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3 Unit	145.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						17.760.000,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		40.080.000,00	
		Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						17.760.000,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		40.080.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	-	17.760.000,00						-	40.080.000,00	
	5.04.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						17.760.000,00							40.080.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-		-	4 Dokumen	17.760.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	40.080.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
363.	**5.04.02**	**PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA**						**10.096.089.300,00**							**16.575.740.000,00**	
		Meningkatnya Kapasitas ASN melalui Pengembangan Kompetensi Fungsional						***8.517.605.200,00***							***14.675.740.000,00***	
			999.Persentase Meningkatnya Kompetensi ASN melalui Pengembangan Kompetensi Fungsional	16 %		8 %	10 %	6.691.789.300,00						12 %	11.612.740.000,00	
		Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan dalam Provinsi						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3600 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	257.716.200,00						50 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3600 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	3218 Orang	6.206.744.900,00						20 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3600 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	257.716.200,00						50 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Terlaksnanya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	3218 Orang	6.206.744.900,00						20 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Terlaksnanya Pengembangan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3750 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	14 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00						12 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3750 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	257.716.200,00						50 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3600 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	257.716.200,00						50 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3600 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	14 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00						12 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional						257.716.200,00							330.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Dokumen	330.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	14 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	330.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Dokumen	330.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional						227.328.200,00							290.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	7 Dokumen	227.328.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Dokumen	290.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						6.206.744.900,00							10.992.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	386 Orang	6.206.744.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Orang	10.992.740.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3600 Orang		3364 Orang	386 Orang	6.206.744.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3500 Orang	10.992.740.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3750 Orang		3364 Orang	386 Orang	6.206.744.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3500 Orang	10.992.740.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Meningkatnya Kapasitas ASN melalui Pengembangan Kompetensi Manajerial						***8.517.605.200,00***							***14.675.740.000,00***	
			999.Persentase Meningkatnya Kompetensi ASN melalui Pengembangan Kompetensi Manajerial	6.86 %		14.66 %	12.70 %	6.691.789.300,00						6.86 %	11.612.740.000,00	
		Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan dalam Provinsi						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3600 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3750 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	257.716.200,00						50 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3750 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	14 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00						12 Dokumen	330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3750 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	14 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00						12 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Terlaksanaya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3600 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	257.716.200,00						50 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Terlaksnanya Pengembangan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	3218 Orang	6.206.744.900,00						20 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	14 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00						12 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3750 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	14 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00						12 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3750 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3750 Orang		3364 Orang	3426 Orang	6.206.744.900,00						3500 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	227.328.200,00						25 Dokumen	290.000.000,00	
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional						257.716.200,00							330.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	14 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	330.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Dokumen	330.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Dokumen	330.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0006	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional						227.328.200,00							290.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran, Pengembangan Kompetensi Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional yang Disusun	35 Dokumen		15 Dokumen	7 Dokumen	227.328.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Dokumen	290.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						6.206.744.900,00							10.992.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3750 Orang		3364 Orang	386 Orang	6.206.744.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3500 Orang	10.992.740.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	386 Orang	6.206.744.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Orang	10.992.740.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3600 Orang		3364 Orang	386 Orang	6.206.744.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3500 Orang	10.992.740.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Meningkatnya Kapasitas ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis						***1.578.484.100,00***							***1.900.000.000,00***	
			999.Persentase Meningkatnya Kompetensi ASN melalui Pengembangan Kompetensi Teknis	32.14 %		12.34 %	17.30 %	1.520.000.000,00						26.14 %	1.720.000.000,00	
	5.04.02.1.01	Pengembangan Kompetensi Teknis						1.578.484.100,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.900.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis dan Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi Teknis						1.578.484.100,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.900.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	300 Orang		180 Orang	210 Orang	1.345.000.000,00						240 Orang	1.515.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	85.000.000,00						10 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	90.000.000,00						10 Dokumen	110.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						1.578.484.100,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.900.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	300 Orang		180 Orang	210 Orang	1.345.000.000,00						240 Orang	1.515.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	85.000.000,00						10 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	90.000.000,00						10 Dokumen	110.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						1.578.484.100,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.900.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	300 Orang		180 Orang	210 Orang	1.345.000.000,00						240 Orang	1.515.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	85.000.000,00						10 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	90.000.000,00						10 Dokumen	110.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						1.578.484.100,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.900.000.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	300 Orang		180 Orang	210 Orang	1.345.000.000,00						240 Orang	1.515.000.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	85.000.000,00						10 Dokumen	95.000.000,00	
			Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen		9 Dokumen	9 Dokumen	90.000.000,00						10 Dokumen	110.000.000,00	
	5.04.02.1.01.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						85.000.000,00							95.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen		9 Dokumen	12 Dokumen	85.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Dokumen	95.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.01.0002	Penyusunan Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						90.000.000,00							110.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknis umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum yang Disusun	12 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	90.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Dokumen	110.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.01.0003	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						1.345.000.000,00							1.515.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi	300 Orang		180 Orang	250 Orang	1.345.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		240 Orang	1.515.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Meningkatnya Kapasitas ASN melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai						***10.096.089.300,00***							***16.575.740.000,00***	
			999.Persentase peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai	7 %		3 %	4 %	1.884.300.000,00						5 %	3.243.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Kompetensi Teknis dan Evaluasi Pasca Pengembangan Kompetensi Teknis						1.578.484.100,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	15 Dokumen		8 Dokumen	9 Dokumen	58.484.100,00						10 Dokumen	180.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan Bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						1.578.484.100,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	15 Dokumen		8 Dokumen	9 Dokumen	58.484.100,00						10 Dokumen	180.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						1.578.484.100,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	15 Dokumen		8 Dokumen	9 Dokumen	58.484.100,00						10 Dokumen	180.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						1.578.484.100,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		1.900.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	15 Dokumen		8 Dokumen	9 Dokumen	58.484.100,00						10 Dokumen	180.000.000,00	
	5.04.02.1.01.0004	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum						58.484.100,00							180.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknisumum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi	15 Dokumen		8 Dokumen	5 Dokumen	58.484.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Dokumen	180.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02	Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
		Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan dalam Provinsi						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	275 Orang		150 Orang	180 Orang	200.413.400,00						230 Orang	470.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	25 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	138.650.000,00						15 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	56.772.500,00						6 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	521.324.500,00						25 Dokumen	1.060.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	275 Orang		150 Orang	180 Orang	200.413.400,00						230 Orang	470.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	56.772.500,00						6 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	521.324.500,00						25 Dokumen	1.060.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	275 Orang		150 Orang	180 Orang	200.413.400,00						230 Orang	470.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	25 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	138.650.000,00						15 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	56.772.500,00						6 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	521.324.500,00						25 Dokumen	1.060.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	275 Orang		150 Orang	180 Orang	200.413.400,00						230 Orang	470.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	56.772.500,00						6 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	521.324.500,00						25 Dokumen	1.060.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	275 Orang		150 Orang	180 Orang	200.413.400,00						230 Orang	470.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	56.772.500,00						6 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	521.324.500,00						25 Dokumen	1.060.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Terlaksnanya Pengembangan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	275 Orang		150 Orang	180 Orang	200.413.400,00						230 Orang	470.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	56.772.500,00						6 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	521.324.500,00						25 Dokumen	1.060.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	275 Orang		150 Orang	180 Orang	200.413.400,00						230 Orang	470.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	25 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	138.650.000,00						15 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	56.772.500,00						6 Dokumen	80.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	521.324.500,00						25 Dokumen	1.060.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	275 Orang		150 Orang	180 Orang	200.413.400,00						230 Orang	470.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	56.772.500,00						6 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	521.324.500,00						25 Dokumen	1.060.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	275 Orang		150 Orang	180 Orang	200.413.400,00						230 Orang	470.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	8 Dokumen		4 Dokumen	5 Dokumen	56.772.500,00							6 Dokumen	80.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40 Dokumen		15 Dokumen	20 Dokumen	521.324.500,00							25 Dokumen	1.060.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00							10 Laporan	1.266.000.000,00	
	5.04.02.1.02.0002	Pengelolaan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi						56.772.500,00								80.000.000,00	
		Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi	Jumlah Dokumen Lembaga Sertifikasi	8 Dokumen		4 Dokumen	1 Dokumen	56.772.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		6 Dokumen	80.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0003	Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota						200.413.400,00								470.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	Jumlah ASN Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Tersertifikasi	275 Orang		150 Orang	180 Orang	200.413.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan.	-		230 Orang	470.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						908.655.500,00								1.266.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	20 Laporan		7 Laporan	5 Laporan	908.655.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.266.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	5 Laporan	908.655.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	1.266.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0005	Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga						521.324.500,00							1.060.000.000,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Antar Lembaga	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kerja Sama Antar Lembaga	40 Dokumen		15 Dokumen	40 Dokumen	521.324.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Dokumen	1.060.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						138.650.000,00							187.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	25 Dokumen		9 Dokumen	5 Dokumen	138.650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Dokumen	187.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	138.650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Dokumen	187.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Meningkatnya Kemampuan Dasar CPNS dan PPPK dalam melaksanakan tugas jabatan					***8.517.605.200,00***								***14.675.740.000,00***	
			999.Persentase CPNS dan PPPK yang lulus pelatihan dasar	65.50 %		50.50 %	50.85 %	6.464.461.100,00						60 %	11.322.740.000,00	
		Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan dalam Provinsi						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	3218 Orang	6.206.744.900,00						20 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
		Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	3218 Orang	6.206.744.900,00						20 Orang	10.992.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan					8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	3218 Orang	6.206.744.900,00						20 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	3218 Orang	6.206.744.900,00						20 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	3218 Orang	6.206.744.900,00						20 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
		Terlaksnanya Pengembangan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	3218 Orang	6.206.744.900,00						20 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	3218 Orang	6.206.744.900,00						20 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	3218 Orang	6.206.744.900,00						20 Orang	10.992.740.000,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	3218 Orang	6.206.744.900,00						20 Orang	10.992.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	12 Dokumen	257.716.200,00						14 Dokumen	330.000.000,00	
	5.04.02.1.02.0001	Penyusunan Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, serta Jabatan Fungsional						257.716.200,00							330.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	2 Dokumen		2 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Dokumen	330.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	18 Dokumen		10 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Dokumen	330.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional	Jumlah Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, dan Pengembangan Kompetensi,	14 Dokumen		9 Dokumen	10 Dokumen	257.716.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	330.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0007	Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						6.206.744.900,00							10.992.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3600 Orang		3364 Orang	386 Orang	6.206.744.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3500 Orang	10.992.740.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	3750 Orang		3364 Orang	386 Orang	6.206.744.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		3500 Orang	10.992.740.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan	20 Orang		3140 Orang	386 Orang	6.206.744.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Orang	10.992.740.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui coaching dan mentoring						***8.517.605.200,00***							***14.675.740.000,00***	
			999.Persentase peningkatan kompetensi ASN melalui coaching dan mentoring	9 %		5 %	6 %	1.047.305.500,00						7 %	1.453.000.000,00	
		Terkelolanya Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan dalam Provinsi						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan					8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Terlaksananya Sertifikasi Kompetensi di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Terlaksnanya Pengembangan Kelembagaan Tenaga Pengembang Kompetensi dan Sumber Belajar						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Terselenggaranya Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis dan Rencana Sertifikasi Kompetensi, Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, Sumber Belajar, Kerjasama, Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan dan Prajabatan, Sertajabatan Fungsional						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
		Tersusunnya Standar Perangkat Pembelajaran Pemerintahan Dalam Negeri bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, dan Jabatan Fungsional						8.517.605.200,00					ASN Pemerintah Provinsi dan ASN Kabupaten/Kota		14.675.740.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	7 Dokumen	138.650.000,00						9 Dokumen	187.000.000,00	
			Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	8 Laporan	908.655.500,00						10 Laporan	1.266.000.000,00	
	5.04.02.1.02.0004	Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar						908.655.500,00							1.266.000.000,00	
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	15 Laporan		6 Laporan	5 Laporan	908.655.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	1.266.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengembangan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	Jumlah Laporan Pengelolaan Kelembagaan, Tenaga Pengembang Kompetensi, dan Sumber Belajar	20 Laporan		7 Laporan	5 Laporan	908.655.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	1.266.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
	5.04.02.1.02.0008	Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan						138.650.000,00							187.000.000,00	
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	17 Dokumen		5 Dokumen	5 Dokumen	138.650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Dokumen	187.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Terlaksananya Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pelaksanaan Sertifikasi, Pengelolaan Kelembagaan dan Tenaga Pengembang Kompetensi, Pengelolaan Sumber Belajar, dan Kerja Sama, serta Pengembangan Kompetensi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Kepemimpinan, dan Prajabatan	25 Dokumen		9 Dokumen	5 Dokumen	138.650.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kota Mataram || Kecamatan Selaprang || Kelurahan Dasan Agung Baru || 0	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Dokumen	187.000.000,00	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
		Badan Riset dan Inovasi Daerah						**12.314.068.376,00**							**0,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**12.314.068.376,00**							**0,00**	
	5.05	**PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN**						**12.314.068.376,00**							**0,00**	
364.	**5.05.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8.419.841.776,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***8.419.841.776,00***							***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	81.34 Skor		78.17 Skor	78.95 Skor	8.419.841.776,00						79.74 Skor	0,00	
	5.05.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						89.730.100,00					-		0,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						89.730.100,00					-		0,00	
			Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	7.900.000,00						1 Berita Acara	0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.557.500,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.166.800,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.890.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.730.800,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.485.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
	5.05.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						24.166.800,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	24.166.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						27.730.800,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	27.730.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						6.557.500,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	6.557.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						7.890.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.890.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						15.485.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	15.485.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0009	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						7.900.000,00							0,00	
		Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Berita Acara		1 Berita Acara	1 Berita Acara	7.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Berita Acara	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0010	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.01.0011	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.730.641.026,00					-		0,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						4.730.641.026,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.100.800,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.098.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.033.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan		33 Orang/ Bulan	33 Orang/ Bulan	4.670.409.226,00						33 Orang/ Bulan	0,00	
	5.05.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						4.670.409.226,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/ Bulan		33 Orang/ Bulan	33 Orang/ Bulan	4.670.409.226,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		33 Orang/ Bulan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						34.100.800,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	34.100.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						9.098.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	9.098.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						17.033.000,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	17.033.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran						0,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						28.668.700,00					-		0,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						28.668.700,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.048.600,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.620.100,00						1 Dokumen	0,00	
	5.05.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						2.620.100,00							0,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.620.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD						26.048.600,00							0,00	
		Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	26.048.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.01.1.03.0007	Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						22.741.500,00					-		0,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						22.741.500,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.282.700,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	0,00						2 Orang	0,00	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	2 Orang	15.458.800,00						2 Orang	0,00	
			Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
	5.05.01.1.05.0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana DisiplinPegawai						0,00							0,00	
		Tersedianya Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta AtributKelengkapannya						0,00							0,00	
		Tersedianya Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.05.0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian KinerjaPegawai						7.282.700,00							0,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.282.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						15.458.800,00							0,00	
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	2 Orang		2 Orang	1 Orang	15.458.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	2 Orang		2 Orang	1 Orang	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Orang	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						571.070.450,00					-		0,00	
		Jumlah Dokumen Administrasi Umum Perangkat Daerah						571.070.450,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.875.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.345.900,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	126.150.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	175.795.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.544.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.838.000,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00						1 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.522.550,00						1 Paket	0,00	
	5.05.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						14.838.000,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	14.838.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						8.522.550,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	8.522.550,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						23.544.000,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	23.544.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						7.875.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	7.875.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0007	Penyediaan Bahan/Material						0,00							0,00	
		Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						126.150.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	126.150.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						175.795.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	175.795.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD						4.345.900,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.345.900,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.06.0011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD						210.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	210.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						224.500.000,00					-		0,00	
		Jumlah Dokumen Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						224.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	49.750.000,00						1 Paket	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00						0 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.900.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	171.850.000,00						1 Unit	0,00	
	5.05.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0 Unit		0 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		0 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.07.0004	Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						0,00							0,00	
		Tersedianya Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Unit Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Disediakan	2 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						49.750.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Paket		1 Paket	1 Paket	49.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Paket	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya						2.900.000,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	2.900.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.07.0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						171.850.000,00							0,00	
		Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	171.850.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.200.233.000,00					-		0,00	
		Jumlah Dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						2.200.233.000,00					-		0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	339.192.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.861.041.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						339.192.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	339.192.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat || Kab. Lombok Barat || Kecamatan Kediri || Desa Lelede || 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						1.861.041.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.861.041.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						552.257.000,00					-		0,00	
		Jumlah Dokumen Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						552.257.000,00					-		0,00	
			Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	219.655.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	83.430.000,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	10 Unit	31.772.000,00						10 Unit	0,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	192.400.000,00						1 Unit	0,00	
			Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha		1 Ha	1 Ha	0,00						1 Ha	0,00	
	5.05.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						83.430.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	5 Unit	83.430.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09.0004	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor						25.000.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						31.772.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	10 Unit		10 Unit	1 Unit	31.772.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						219.655.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	219.655.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						192.400.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	192.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.01.1.09.0012	Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah						0,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah	Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi	1 Ha		1 Ha	1 Ha	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Ha	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
365.	**5.05.02**	**PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH**						**2.843.726.600,00**							**0,00**	
		meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimbingan teknis dan supervisi terkait penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan di daerah						***530.025.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Penelitian, Pengembangan, Pengkajian dan Penerapan di Daerah	10 Persentase		10 Persentase	10 Persentase	530.025.000,00						10 Persentase	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.02.1.04	Pengembangan Inovasi dan Teknologi						530.025.000,00					-		0,00	
		terlaksananya pengembangan inovasi dan teknologi						530.025.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	440.800.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	89.225.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
	5.05.02.1.04.0001	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.04.0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi						440.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	440.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.04.0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif						0,00							0,00	
		Terlaksananya Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.04.0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan						89.225.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	89.225.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.04.0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		meningkatnya kajian yang bermanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah						***920.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	100 Persentase		60 Persentase	70 Persentase	920.000.000,00						80 Persentase	0,00	
	5.05.02.1.02	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan						920.000.000,00					-		0,00	
		Persentase Kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan dalam penyelesaian permasalahan daerah						920.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	521.093.400,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.421.300,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.597.500,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	122.887.800,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
	5.05.02.1.02.0001	Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial						521.093.400,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	521.093.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.02.0003	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan						122.887.800,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	122.887.800,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.02.0005	Penelitian dan Pengembangan Pariwisata						125.597.500,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pariwisata	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	125.597.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.02.0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan						150.421.300,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	150.421.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.02.0009	Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potesi unggulan						***870.000.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	30 Persentase		10 Persentase	15 Persentase	870.000.000,00						20 Persentase	0,00	
	5.05.02.1.03	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan						970.000.000,00					-		0,00	
		Persentase Kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan daerah						970.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	495.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
	5.05.02.1.03.0001	Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah						190.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0002	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan						30.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan						495.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	495.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0005	Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0006	Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0008	Penelitian dan Pengembangan Kehutanan						55.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.03.0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum						0,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		meningkatnya pemanfaatan hasil kelitbangan dalam perencanaan pembangunan						***423.701.600,00***							***0,00***	
			999.Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	100 Persentase		60 Persentase	70 Persentase	423.701.600,00						80 Persentase	0,00	
	5.05.02.1.01	Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan						423.701.600,00					-		0,00	
		Persentase Kajian yang dimanfaatkan sebagai kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah						423.701.600,00					-		0,00	
			Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	103.701.600,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00						1 Laporan	0,00	
	5.05.02.1.01.0002	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.02.1.01.0003	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan						120.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Kelembagaan dan Ketatalaksanaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	120.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.01.0004	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi						103.701.600,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	103.701.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.01.0012	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan						200.000.000,00							0,00	
		Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Dokumen Data Kelitbangan dan Peraturan yang Dikelola	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.02.1.01.0014	Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan						0,00							0,00	
		Terlaksananya Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
366.	**5.05.03**	**PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH**						**1.050.500.000,00**							**0,00**	
		meningkatnya fasilitasi, pembinaan, bimtek, dan supervisi terkait riset dan inovasi daerah						***1.050.500.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Fasilitasi, Pembinaan, Bimbingan Teknis dan Supervisi terkait Riset dan Inovasi di Daerah	10 Persentase		10 Persentase	10 Persentase	210.000.000,00						10 Persentase	0,00	
		Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan		1 Pelatihan	1 Pelatihan	100.000.000,00						1 Pelatihan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Penelitian, Pengembangan, Kajian dan Penerapan						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan		1 Pelatihan	1 Pelatihan	100.000.000,00						1 Pelatihan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
	5.05.03.1.01.0001	Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.01.0004	Bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						100.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Pelatihan		1 Pelatihan	1 Pelatihan	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Pelatihan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02	Invensi dan Inovasi						950.500.000,00					-		0,00	
		jumlah invensi dan inovasi						950.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	1 Pelatihan		0 Pelatihan	1 Pelatihan	0,00						1 Pelatihan	0,00	
			Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00						1 Kegiatan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
		Jumlah laporan Invensi dan Inovasi						950.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	1 Pelatihan		0 Pelatihan	1 Pelatihan	0,00						1 Pelatihan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00						1 Kegiatan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.03.1.02.0001	Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0002	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kemitraan antar kelembagaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0004	Bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	Jumlah kegiatan bimbingan teknis dan supervisi, kerja sama, serta kemitraan invensi dan inovasi	1 Pelatihan		0 Pelatihan	1 Pelatihan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Pelatihan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0006	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan sarana pendukung Riset dan Inovasi di daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0010	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyediaan anggaran Riset dan Inovasi (skema insentif bagi innovator)	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0011	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyesuaian kebijakan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0015	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.						110.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan praktik baik kepada pelaku inovasi dan diseminasi hasil Riset dan Inovasi kepada pelaku inovasi.	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	110.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0016	Fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk promosi dan kampanye Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.03.1.02.0019	Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah						0,00								0,00	
		Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	1 Kegiatan		1 Kegiatan	1 Kegiatan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Kegiatan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0021	Fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penguatan kerjasama internasional	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0024	Fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk inventarisasi, pengembangan, dan perlindungan pengetahuan dan/atau teknologi masyarakat	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0025	Fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk peningkatan perlindungan dan pemanfaatan kekayaan intelektual (pelatihan perlindungan KI, fasilitas perlindungan KI)	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam pengembangan potensi unggulan						***1.050.500.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Pengembangan Potensi Unggulan yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah	30 Persentase		10 Persentase	15 Persentase	40.500.000,00						20 Persentase	0,00	
		Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						100.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah		1 Naskah	Naskah	0,00						Naskah	0,00	
		Jumlah Penelitian, Pengembangan, Kajian dan Penerapan						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah		1 Naskah	Naskah	0,00						Naskah	0,00	
	5.05.03.1.01.0003	Penyusunan kebijakan berbasis hasil riset						0,00							0,00	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan berbasis hasil riset	Jumlah naskah kebijakan berbasis hasil riset	Naskah		1 Naskah	1 Naskah	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Naskah	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		jumlah invensi dan inovasi						950.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Laporan		1 Laporan	Laporan	40.500.000,00						Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
		Jumlah laporan Invensi dan Inovasi						950.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Laporan		1 Laporan	Laporan	40.500.000,00						Laporan	0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
	5.05.03.1.02.0014	Fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset						40.500.000,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk pengembangan perusahaan pemula berbasis riset	Laporan		1 Laporan	1 Laporan	40.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0018	Fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penyelenggaraan pengembangan klaster Inovasi berbasis produk unggulan daerah daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah						***1.050.500.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah	100 Persentase		60 Persentase	70 Persentase	800.000.000,00						80 Persentase	0,00	
		Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
		Jumlah Penelitian, Pengembangan, Kajian dan Penerapan						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
	5.05.03.1.01.0006	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		jumlah invensi dan inovasi						950.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	1 Naskah		0 Naskah	1 Naskah	0,00						1 Naskah	0,00	
		Jumlah laporan Invensi dan Inovasi						950.500.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	1 Naskah		0 Naskah	1 Naskah	0,00						1 Naskah	0,00	
	5.05.03.1.02.0003	Penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya penyusunan kebijakan di bidang invensi dan inovasi	Jumlah naskah kebijakan di bidang invensi dan inovasi	1 Naskah		0 Naskah	1 Naskah	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Naskah	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0017	Fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah						800.000.000,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk prakarsa pengembangan Riset dan Inovasi di daerah berdasarkan kebutuhan daerah untuk promosi produk unggulan daerah dan/atau mengatasi permasalahan daerah	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	800.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		meningkatnya pemanfaatan dan inovasi daerah dalam pembangunan						***1.050.500.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	0,00						100 Persentase	0,00	
	5.05.03.1.01	Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						100.000.000,00					-		0,00	
		Jumlah Laporan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan						100.000.000,00					-		0,00	
			Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
		Jumlah Penelitian, Pengembangan, Kajian dan Penerapan						100.000.000,00					-		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	0,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
	5.05.03.1.01.0002	Koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah untuk menghasilkan dokumen Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Jumlah dokumen koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah dalam bentuk Rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Dokumen		0 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.01.0005	Pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan						0,00							0,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	Laporan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		jumlah invensi dan inovasi						950.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi		0 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	0,00						1 Sistem Informasi	0,00	
		Jumlah laporan Invensi dan Inovasi						950.500.000,00					-		0,00	
			Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00						1 Laporan	0,00	
			Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi		0 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	0,00						1 Sistem Informasi	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.05.03.1.02.0009	Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0012	Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah						0,00							0,00	
		Terlaksananya pembangunan, pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	Tersedianya sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah	1 Sistem Informasi		0 Sistem Informasi	1 Sistem Informasi	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Sistem Informasi	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0013	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi						0,00							0,00	
		Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	Jumlah laporan penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan invensi dan inovasi	1 Laporan		0 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
	5.05.03.1.02.0023	Fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi						0,00							0,00	
		Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk penataan basis data Riset dan Inovasi	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	0,00	Badan Riset dan Inovasi Daerah
		Badan Penghubung Daerah						**13.145.473.063,00**							**24.737.662.000,00**	
	5	**UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**						**13.145.473.063,00**							**24.737.662.000,00**	
	5.07	**PENGELOLAAN PENGHUBUNG**						**13.145.473.063,00**							**24.737.662.000,00**	
367.	**5.07.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**11.074.136.363,00**							**19.104.142.200,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***11.074.136.363,00***							***19.102.053.200,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	77 Skor		76 Skor	76.25 Skor	3.502.197.304,00						76.5 Skor	11.708.229.722,00	
	5.07.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						15.133.500,00					Aparatur dan unit kerja pada Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.		44.372.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Dokumen Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tersusun						15.133.500,00					Aparatur dan unit kerja pada Perangkat Daerah dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja.		44.372.000,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	2.089.000,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	11.257.500,00						2 Dokumen	11.724.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	2.089.000,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.729.000,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	5.924.000,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	11.348.000,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.876.000,00						4 Laporan	5.469.000,00	
	5.07.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						11.257.500,00							11.724.000,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	11.257.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	11.724.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						0,00							5.924.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	5.924.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						0,00							5.729.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	5.729.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						0,00							2.089.000,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	2.089.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						0,00							2.089.000,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	2.089.000,00	Badan Penghubung Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.07.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						0,00							11.348.000,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Laporan		2 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	11.348.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						3.876.000,00							5.469.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	3.876.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	5.469.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.556.805.559,00					ASN dan Non-ASN pada Perangkat Daerah serta pejabat pengelola keuangan dalam rangka mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.		7.351.540.478,00	
		Cakupan Pengelolaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						7.556.805.559,00					ASN dan Non-ASN pada Perangkat Daerah serta pejabat pengelola keuangan dalam rangka mendukung tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.		7.351.540.478,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	0,00						120 Dokumen	2.013.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	120.388.725,00						12 Dokumen	30.353.000,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00						2 Laporan	2.041.611,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00						4 Laporan	1.985.000,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan		47 Orang/ Bulan	47 Orang/ Bulan	7.436.416.834,00						47 Orang/ Bulan	7.315.147.867,00	
	5.07.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						7.436.416.834,00							7.315.147.867,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan		47 Orang/ Bulan	48 Orang/ Bulan	7.436.416.834,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		47 Orang/ Bulan	7.315.147.867,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						120.388.725,00							30.353.000,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	120.388.725,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	30.353.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						0,00							2.013.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	120 Dokumen		120 Dokumen	120 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		120 Dokumen	2.013.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						0,00							2.041.611,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	2.041.611,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD						0,00							1.985.000,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	1.985.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						0,00					Pejabat dan pengelola Barang Milik Daerah serta unit kerja pengguna barang dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.		13.438.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Pengelolaan Administrasi BMD Perangkat Daerah						0,00					Pejabat dan pengelola Barang Milik Daerah serta unit kerja pengguna barang dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan akuntabilitas pengelolaan aset daerah.		13.438.000,00	
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	13.438.000,00	
	5.07.01.1.03.0001	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD						0,00							13.438.000,00	
		Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	5 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	13.438.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						58.641.500,00					Aparatur dan unit kerja Perangkat Daerah serta instansi dan tamu kedinasan yang memanfaatkan layanan administrasi umum dan sarana prasarana Wisma NTB.		2.723.357.578,00	
		Persentase Penyelesaian Jenis Pelayanan Administrasi Umum						58.641.500,00					Aparatur dan unit kerja Perangkat Daerah serta instansi dan tamu kedinasan yang memanfaatkan layanan administrasi umum dan sarana prasarana Wisma NTB.		2.723.357.578,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00						12 Dokumen	36.643.378,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	0,00						60 Laporan	410.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	0,00						60 Laporan	504.737.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	0,00						50 Paket	257.837.900,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	0,00						8 Paket	17.747.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	17.509.500,00						20 Paket	173.265.750,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	41.132.000,00						60 Paket	1.323.125.750,00	
	5.07.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						17.509.500,00							173.265.750,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	20 Paket		20 Paket	20 Paket	17.509.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Paket	173.265.750,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						41.132.000,00							1.323.125.750,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60 Paket		60 Paket	60 Paket	41.132.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Paket	1.323.125.750,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						0,00							257.837.900,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	50 Paket		50 Paket	50 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		50 Paket	257.837.900,00	Badan Penghubung Daerah

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.07.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						0,00							17.747.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	8 Paket		8 Paket	8 Paket	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Paket	17.747.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						0,00							36.643.378,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12 Dokumen		12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Dokumen	36.643.378,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						0,00							410.000.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	410.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						0,00							504.737.800,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60 Laporan		60 Laporan	60 Laporan	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		60 Laporan	504.737.800,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					Kendaraan Dinas Pimpinan dan Oprasional Perangkat Daerah		1.782.782.800,00	
		Jumlah Unit Kendaraan Operasional Atau Lapangan Yang Disediakan						0,00					Kendaraan Dinas Pimpinan dan Oprasional Perangkat Daerah		1.782.782.800,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		3 Unit	2 Unit	0,00						Unit	1.782.782.800,00	
	5.07.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							1.782.782.800,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit		3 Unit	2 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		Unit	1.782.782.800,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						2.843.195.804,00					Aparatur, tenaga pendukung, dan unit kerja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung kelancaran operasional dan pelayanan pemerintahan.		4.133.672.344,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah						2.843.195.804,00					Aparatur, tenaga pendukung, dan unit kerja Perangkat Daerah dalam rangka mendukung kelancaran operasional dan pelayanan pemerintahan.		4.133.672.344,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	447.984.000,00						12 Laporan	767.642.400,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.331.811.804,00						12 Laporan	3.225.429.944,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	34.400.000,00						15 Laporan	103.600.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	29.000.000,00						30 Laporan	37.000.000,00	
	5.07.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						29.000.000,00							37.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	30 Laporan		30 Laporan	30 Laporan	29.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		30 Laporan	37.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						447.984.000,00							767.642.400,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	447.984.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	767.642.400,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						34.400.000,00							103.600.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	34.400.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Laporan	103.600.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						2.331.811.804,00							3.225.429.944,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	2.331.811.804,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	3.225.429.944,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						600.360.000,00					Barang Milik Daerah dalam rangka mendukung kelancaran operasional dan pelayanan pemerintahan.		2.854.979.000,00	
		Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Terpelihara						600.360.000,00					Barang Milik Daerah dalam rangka mendukung kelancaran operasional dan pelayanan pemerintahan.		2.854.979.000,00	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	13 Unit	0,00						13 Unit	39.000.000,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	155.750.000,00						2 Unit	2.030.999.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit		31 Unit	31 Unit	444.610.000,00						31 Unit	770.170.000,00	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	14.810.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	5.07.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						444.610.000,00							770.170.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit		31 Unit	23 Unit	444.610.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		31 Unit	770.170.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.09.0007	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya						0,00							39.000.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	13 Unit		13 Unit	13 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		13 Unit	39.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						155.750.000,00							2.030.999.000,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit		2 Unit	2 Unit	155.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Unit	2.030.999.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya						0,00							14.810.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Unit	14.810.000,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Aparatur Sipil Negara serta pengelola kepegawaian dalam rangka mendukung tertib administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Perangkat Daerah.		200.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Laporan Pelaksanaan Kepegawaian Perangkat Daerah						0,00					Aparatur Sipil Negara serta pengelola kepegawaian dalam rangka mendukung tertib administrasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia Perangkat Daerah.		200.000.000,00	
			Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	-	0,00						-	200.000.000,00	
	5.07.01.1.05.0003	Pendataan dan Pengolahan AdministrasiKepegawaian						0,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	-		-	25 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	200.000.000,00	Badan Penghubung Daerah
368.	**5.07.02**	**PROGRAM PELAYANAN PENGHUBUNG**						**2.071.336.700,00**							**5.633.519.800,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terpenuhinya pelayanan publik yang adaptif dan berorientasi pada kepuasan pengguna layanan Badan Penghubung Daerah Provinsi NTB						***2.071.336.700,00***							***5.633.519.800,00***	
	5.07.02.1.01	Pelaksanaan Pelayanan Penghubung						2.071.336.700,00					Perangkat Daerah, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, serta pemangku kepentingan yang difasilitasi dalam rangka pelayanan penghubung dan representasi daerah.		5.633.519.800,00	
		-						2.071.336.700,00					Perangkat Daerah, instansi pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, serta pemangku kepentingan yang difasilitasi dalam rangka pelayanan penghubung dan representasi daerah.		5.633.519.800,00	
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.366.162.500,00						12 Laporan	877.900.600,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	204.431.700,00						12 Laporan	498.243.500,00	
			Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.742.500,00						12 Laporan	4.257.375.700,00	
	5.07.02.1.01.0002	Pelayanan Kelembagaan Aparatur danMasyarakat						204.431.700,00							498.243.500,00	
		Terlaksananya Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Kelembagaan Aparatur dan Masyarakat	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	204.431.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	498.243.500,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.02.1.01.0003	Peningkatan Fasilitasi Promosi ProdukUnggulan dan Pelestarian Seni Budaya						500.742.500,00							4.257.375.700,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Peningkatan Fasilitasi Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya	Jumlah Laporan Hasil Promosi Produk Unggulan dan Pelestarian Seni Budaya yang Ditingkatkan	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	500.742.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	4.257.375.700,00	Badan Penghubung Daerah
	5.07.02.1.01.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi PelaksanaanPelayanan Penghubung						1.366.162.500,00							877.900.600,00	
		Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung	12 Laporan		12 Laporan	12 Laporan	1.366.162.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		12 Laporan	877.900.600,00	Badan Penghubung Daerah
		Inspektorat						**36.618.800.428,00**							**0,00**	
	6	**UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**						**36.618.800.428,00**							**0,00**	
	6.01	**INSPEKTORAT DAERAH**						**36.618.800.428,00**							**0,00**	
369.	**6.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**27.082.670.428,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***27.082.670.428,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	84.29 Skor		84.13 Skor	84.17 Skor	27.082.670.428,00						84.21 Skor	0,00	
	6.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						270.286.700,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						270.286.700,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.858.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	181.994.400,00						2 Dokumen	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.527.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	55.510.000,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.426.100,00						1 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	23.971.200,00						4 Laporan	0,00	
	6.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						181.994.400,00							0,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	181.994.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						3.426.100,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.426.100,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						55.510.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	55.510.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						2.858.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.858.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						2.527.000,00							0,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	3 Dokumen	2.527.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Dokumen	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						23.971.200,00							0,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	1 Laporan	23.971.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						19.773.295.710,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan yang Tepat Waktu						19.773.295.710,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen		15 Dokumen	15 Dokumen	95.250.000,00						15 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.328.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang/ Bulan		133 Orang/ Bulan	135 Orang/ Bulan	19.627.717.710,00						137 Orang/ Bulan	0,00	
	6.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						19.627.717.710,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	141 Orang/ Bulan		133 Orang/ Bulan	125 Orang/ Bulan	19.627.717.710,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		137 Orang/ Bulan	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						95.250.000,00							0,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	15 Dokumen		15 Dokumen	12 Dokumen	95.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Dokumen	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						50.328.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	50.328.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						8.685.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset yang Tepat Waktu						8.685.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	8.685.000,00						4 Laporan	0,00	
	6.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						8.685.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan		4 Laporan	2 Laporan	8.685.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah						2.243.564.000,00					Pengawasan		0,00	
		Terselenggaranya Pendidikan Profesional Berkelanjutan Minimal 120 jam per tahun						2.243.564.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang		125 Orang	125 Orang	2.243.564.000,00						125 Orang	0,00	
	6.01.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi						2.243.564.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	125 Orang		125 Orang	125 Orang	2.243.564.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		125 Orang	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						2.266.977.610,00					Pengawasan		0,00	
		Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Umum Perangkat Daerah						2.266.977.610,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	39.200.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan		20 Laporan	20 Laporan	300.189.000,00						20 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	15 Laporan	1.176.390.500,00						15 Laporan	0,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160 Paket		160 Paket	160 Paket	337.248.000,00						160 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	9 Paket	250.558.300,00						9 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	70.138.200,00						14 Paket	0,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	93.253.610,00						14 Paket	0,00	
	6.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						70.138.200,00							0,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	1 Paket	70.138.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		14 Paket	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	6.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						93.253.610,00							0,00	
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	14 Paket		14 Paket	14 Paket	93.253.610,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		14 Paket	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						337.248.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	160 Paket		160 Paket	3 Paket	337.248.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		160 Paket	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						250.558.300,00							0,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	9 Paket		9 Paket	3 Paket	250.558.300,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Paket	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						39.200.000,00							0,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	2 Dokumen		2 Dokumen	12 Dokumen	39.200.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						300.189.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	20 Laporan		20 Laporan	12 Laporan	300.189.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		20 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						1.176.390.500,00							0,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan		15 Laporan	12 Laporan	1.176.390.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		15 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						22.113.000,00					Pengawasan		0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Sarana dan Prasarana						22.113.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	189 Paket		177 Paket	180 Paket	22.113.000,00						183 Paket	0,00	
	6.01.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel						22.113.000,00							0,00	
		Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	189 Paket		177 Paket	1 Paket	22.113.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		183 Paket	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						1.289.614.408,00					Pengawasan		0,00	
		Terpenuhinya Kebutuhan Pelayanan Administrasi, Kebersihan, Keamanan, Air, Listrik dan Komunikasi						1.289.614.408,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	478.800.000,00						4 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29 Laporan		29 Laporan	29 Laporan	803.014.408,00						29 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	7.800.000,00						6 Laporan	0,00	
	6.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						7.800.000,00							0,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 Laporan		6 Laporan	12 Laporan	7.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						478.800.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	12 Laporan	478.800.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						803.014.408,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	29 Laporan		29 Laporan	12 Laporan	803.014.408,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		29 Laporan	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Kualitas BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.208.134.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	24 Unit	213.240.000,00						24 Unit	0,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit		25 Unit	25 Unit	37.100.000,00						25 Unit	0,00	
			Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit		45 Unit	45 Unit	3.750.000,00						45 Unit	0,00	
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit		91 Unit	91 Unit	88.350.000,00						91 Unit	0,00	
	6.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						37.100.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	25 Unit		25 Unit	1 Unit	37.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		25 Unit	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						213.240.000,00							0,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	24 Unit		24 Unit	12 Unit	213.240.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		24 Unit	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0005	Pemeliharaan Mebel						3.750.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	45 Unit		45 Unit	31 Unit	3.750.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		45 Unit	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya						88.350.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	91 Unit		91 Unit	44 Unit	88.350.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		91 Unit	0,00	Inspektorat
	6.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.208.134.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Kualitas BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						1.208.134.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	-	865.694.000,00						-	0,00	
	6.01.01.1.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya						865.694.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	-		-	1 Unit	865.694.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		-	0,00	Inspektorat
370.	**6.01.02**	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN**						**7.906.780.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/ Pengawasan di Wilayah Binaan Itban I						***7.426.540.000,00***							***0,00***	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			999.Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban I	6 %		5 %	6 %	4.920.610.000,00						6 %	0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/Pengawasan pada 8 Area Intervensi MCSP						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban I						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban II						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban III						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	143.370.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban IV						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas LPPD Pemerintah Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan PBJ Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						1.698.370.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						3.078.870.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		5 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		19 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		23 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan		6 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan TeknisKabupaten/Kota						143.370.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	12 Laporan		9 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/ Pengawasan di Wilayah Binaan Itban II						***7.426.540.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban II	9.5 %		7.5 %	8 %	4.920.610.000,00						8.5 %	0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/Pengawasan pada 8 Area Intervensi MCSP						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban I						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban II						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban III						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban IV						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas LPPD Pemerintah Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan PBJ Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.698.370.000,00						7 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						1.698.370.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						3.078.870.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan		6 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		19 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		5 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		23 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan TeknisKabupaten/Kota						143.370.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	12 Laporan		9 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Laporan	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pencegahan Korupsi						***7.426.540.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	79 %		78 %	78 %	1.698.370.000,00						79 %	0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/Pengawasan pada 8 Area Intervensi MCSP						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban I						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban II						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban III						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban IV						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas LPPD Pemerintah Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan PBJ Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						1.698.370.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Kepatuhan Penerapan Kriteria Dalam Penyusunan LPPD						***7.426.540.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Kehandalan Capaian IKK LPPD Pemerintah Daerah	100 %		100 %	100 %	51.970.000,00						100 %	0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/Pengawasan pada 8 Area Intervensi MCSP						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban I						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban II						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban III						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban IV						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas LPPD Pemerintah Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan PBJ Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						51.970.000,00							0,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	77 Laporan	51.970.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	77 Laporan	51.970.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Kepatuhan Perangkat Daerah Dalam Proses PBJ						***7.426.540.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Kepatuhan Proses Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	50 %		30 %	35 %	1.744.540.000,00						40 %	0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/Pengawasan pada 8 Area Intervensi MCSP						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban I						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban II						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban III						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban IV						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas LPPD Pemerintah Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan PBJ Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						1.698.370.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						46.170.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Kerjasama antara APIP dan APH dalam Rangka Penanganan Kasus Tipikor						***480.240.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Permintaan Audit Tujuan Tertentu atas Tipikor yang Ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	480.240.000,00						100 %	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu						480.240.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	394.670.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	85.570.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Tuntutan Ganti Rugi yang Ditindaklanjuti						480.240.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	394.670.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	85.570.000,00						5 Laporan	0,00	
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						85.570.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	85.570.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	0,00	Inspektorat
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	5 Laporan	85.570.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.02.0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						394.670.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	2 Laporan		2 Laporan	15 Laporan	394.670.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Unsur Pengawasan						***7.426.540.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Komponen Evaluasi Internal	16.21 Nilai		15.37 Nilai	15.58 Nilai	1.750.340.000,00						15.79 Nilai	0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/Pengawasan pada 8 Area Intervensi MCSP						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.698.370.000,00						7 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban I						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban II						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban III						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.698.370.000,00						7 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.698.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.698.370.000,00						7 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.970.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban IV						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.698.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.970.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.970.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.698.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas LPPD Pemerintah Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.698.370.000,00						7 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan PBJ Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.698.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.970.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.698.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.970.000,00						6 Laporan	0,00	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						1.698.370.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						51.970.000,00							0,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	77 Laporan	51.970.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	77 Laporan	51.970.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						***7.426.540.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Rekomendasi Hasil Reviu LKPD yang Ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	46.170.000,00						100 %	0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/Pengawasan pada 8 Area Intervensi MCSP						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	46.170.000,00						8 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban I						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban II						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban III						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	46.170.000,00						8 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	46.170.000,00						8 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	46.170.000,00						8 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban IV						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	46.170.000,00						8 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan		8 Laporan	8 Laporan	46.170.000,00						8 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas LPPD Pemerintah Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan PBJ Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00						1 Laporan	0,00	
	6.01.02.1.01.0004	Reviu Laporan Keuangan						46.170.000,00							0,00	
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	8 Laporan		8 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		8 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Reviu Laporan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	46.170.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK dan APIP						***7.426.540.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Rata-Rata Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI dan APIP	90 %		86 %	87 %	2.407.790.000,00						88 %	0,00	
	6.01.02.1.01	Penyelenggaraan Pengawasan Internal						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/Pengawasan pada 8 Area Intervensi MCSP						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.090.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.654.700.000,00						2 Kesepakatan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban I						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban II						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban III						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.090.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.654.700.000,00						2 Kesepakatan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.090.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.654.700.000,00						2 Kesepakatan	0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.090.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.654.700.000,00						2 Kesepakatan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban IV						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.090.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.654.700.000,00						2 Kesepakatan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.090.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.654.700.000,00						2 Kesepakatan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.090.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.654.700.000,00						2 Kesepakatan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas LPPD Pemerintah Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.090.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.654.700.000,00						2 Kesepakatan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan PBJ Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.090.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.654.700.000,00						2 Kesepakatan	0,00	
		Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.090.000,00						2 Dokumen	0,00	
			Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.654.700.000,00						2 Kesepakatan	0,00	
	6.01.02.1.01.0006	Kerjasama Pengawasan Internal						1.654.700.000,00							0,00	
		Terlaksananya Kerja Sama Pengawasan Internal	Jumlah Kesepakatan Pengawasan Internal yang Terbentuk	2 Kesepakatan		2 Kesepakatan	2 Kesepakatan	1.654.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Kesepakatan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP						753.090.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	753.090.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Dokumen	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Tuntutan Ganti Rugi yang Diselesaikan						***480.240.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Tuntutan Ganti Rugi yang Diselesaikan	100 %		100 %	100 %	85.570.000,00						100 %	0,00	
	6.01.02.1.02	Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu						480.240.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Kualitas Hasil Audit Dengan Tujuan Tertentu						480.240.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	85.570.000,00						5 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Tuntutan Ganti Rugi yang Ditindaklanjuti						480.240.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	85.570.000,00						5 Laporan	0,00	
	6.01.02.1.02.0001	Penanganan Penyelesaian KerugianNegara/Daerah						85.570.000,00							0,00	
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	85.570.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tertanganinya Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani	2 Laporan		2 Laporan	5 Laporan	85.570.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat
		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban III						***7.426.540.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban III	5 %		5 %	5 %	4.972.580.000,00						5 %	0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/Pengawasan pada 8 Area Intervensi MCSP						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00						23 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.698.370.000,00						7 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	143.370.000,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban I						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban II						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban III						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.078.870.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.970.000,00						6 Laporan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.078.870.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.698.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	143.370.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00						23 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.698.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	143.370.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	51.970.000,00						1 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban IV						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	12 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	143.370.000,00						9 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.970.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.078.870.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	1.698.370.000,00						10 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	12 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	143.370.000,00						9 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.970.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00						23 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.698.370.000,00						7 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	12 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	143.370.000,00						9 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.970.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas LPPD Pemerintah Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00						23 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.970.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan PBJ Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	12 Laporan		9 Laporan	9 Laporan	143.370.000,00						9 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.970.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.078.870.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	1.698.370.000,00						10 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	143.370.000,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	51.970.000,00						6 Laporan	0,00	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						1.698.370.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						3.078.870.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		23 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan		6 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		5 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		19 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0003	Reviu Laporan Kinerja						51.970.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	1 Laporan		1 Laporan	77 Laporan	51.970.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Reviu Laporan Kinerja	6 Laporan		6 Laporan	77 Laporan	51.970.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan TeknisKabupaten/Kota						143.370.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	12 Laporan		9 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	0,00	Inspektorat
		Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban IV						***7.426.540.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Penurunan Nilai Kerugian Negara/Daerah pada Perangkat Daerah Wilayah Binaan Itban IV	1.35 %		1.15 %	1.20 %	4.920.610.000,00						1.25 %	0,00	
		Meningkatnya Efektifitas Pembinaan/Pengawasan pada 8 Area Intervensi MCSP						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.078.870.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	1.698.370.000,00						10 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	143.370.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban I						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban II						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban III						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00						23 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.698.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	143.370.000,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.698.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	143.370.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00						23 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	143.370.000,00						5 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Efektivitas Pembinaan/Pengawasan Internal Daerah Itban IV						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.078.870.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	1.698.370.000,00						10 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	143.370.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00						23 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	1.698.370.000,00						10 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	143.370.000,00						5 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.078.870.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	1.698.370.000,00						2 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	143.370.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas LPPD Pemerintah Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	19 Laporan	3.078.870.000,00						19 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	10 Laporan	1.698.370.000,00						10 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	143.370.000,00						6 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pengawasan PBJ Perangkat Daerah						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan		6 Laporan	6 Laporan	3.078.870.000,00						6 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	1.698.370.000,00						1 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	143.370.000,00						2 Laporan	0,00	
		Meningkatnya Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK						7.426.540.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	3.078.870.000,00						5 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	7 Laporan	1.698.370.000,00						7 Laporan	0,00	
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	5 Laporan	143.370.000,00						5 Laporan	0,00	
	6.01.02.1.01.0001	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah						1.698.370.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Laporan		2 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	10 Laporan		10 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		10 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	1 Laporan		1 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		1 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	7 Laporan		7 Laporan	79 Laporan	1.698.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		7 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah						3.078.870.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	19 Laporan		19 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		19 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	23 Laporan		23 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		23 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	5 Laporan		5 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	6 Laporan		6 Laporan	23 Laporan	3.078.870.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	0,00	Inspektorat
	6.01.02.1.01.0005	Pengawasan Umum dan TeknisKabupaten/Kota						143.370.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	4 Laporan		4 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	12 Laporan		9 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		9 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	5 Laporan		5 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		5 Laporan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	6 Laporan		2 Laporan	8 Laporan	143.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		2 Laporan	0,00	Inspektorat
371.	**6.01.03**	**PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI**						**1.629.350.000,00**							**0,00**	
		Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Pencegahan Korupsi						***1.598.610.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Nilai MCSP di Atas Rata-Rata Nasional	79 %		78 %	78 %	1.411.700.000,00						79 %	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.411.700.000,00						4 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan SPIP Terintegrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.411.700.000,00						4 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung LPPD						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.411.700.000,00						4 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung SAKIP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	1.411.700.000,00						11 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Penerapan ZI Menuju WBK/WBBM						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	1.411.700.000,00						11 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reformasi Birokrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.411.700.000,00						4 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya Nilai MCSP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	1.411.700.000,00						11 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya Nilai Pemenuhan Stranas PK						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	4 Kegiatan	1.411.700.000,00						4 Kegiatan	0,00	
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						1.411.700.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	9 Kegiatan	1.411.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Kegiatan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	9 Kegiatan	1.411.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		11 Kegiatan	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Unsur Pengawasan						***1.598.610.000,00***							***0,00***	
			999.Nilai AKIP Komponen Evaluasi Internal	16.21 Nilai		15.37 Nilai	15.58 Nilai	57.770.000,00						15.79 Nilai	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan SPIP Terintegrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung LPPD						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung SAKIP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Penerapan ZI Menuju WBK/WBBM						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reformasi Birokrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Nilai MCSP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Nilai Pemenuhan Stranas PK						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah						57.770.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Perangkat Daerah	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah						***1.598.610.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Rekomendasi Hasil Reviu LKPD yang Ditindaklanjuti	100 %		100 %	100 %	57.770.000,00						100 %	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan SPIP Terintegrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung LPPD						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung SAKIP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Penerapan ZI Menuju WBK/WBBM						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reformasi Birokrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Nilai MCSP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Nilai Pemenuhan Stranas PK						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah						57.770.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Perangkat Daerah	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Kualitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah						***1.598.610.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan SPIP Terintegrasi	100 %		100 %	100 %	138.140.000,00						100 %	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	80.370.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan SPIP Terintegrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	80.370.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung LPPD						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	80.370.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung SAKIP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	80.370.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Penerapan ZI Menuju WBK/WBBM						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	80.370.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reformasi Birokrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	80.370.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Nilai MCSP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	80.370.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Nilai Pemenuhan Stranas PK						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	80.370.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah						57.770.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Perangkat Daerah	0,00	Inspektorat
	6.01.03.1.02.0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, danPenilaian Reformasi Birokrasi						80.370.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	5 Perangkat Daerah	80.370.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Perangkat Daerah	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Mutu dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan						***30.740.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Peningkatan Nilai Hasil Telaah Sejawat Internal	3.4 %		2.11 %	2.76 %	30.740.000,00						3.09 %	0,00	
	6.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan dan Fasilitasi Pengawasan						30.740.000,00					Pengawasan		0,00	
		Meningkatnya Mutu dan Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Elemen Peran dan Layanan						30.740.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16 Rekomendasi		16 Rekomendasi	16 Rekomendasi	30.740.000,00						16 Rekomendasi	0,00	
	6.01.03.1.01.0001	Perumusan Kebijakan Teknis di BidangPengawasan						30.740.000,00							0,00	
		Terlaksananya Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun	16 Rekomendasi		16 Rekomendasi	5 Rekomendasi	30.740.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		16 Rekomendasi	0,00	Inspektorat

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen LPPD						***1.598.610.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Perangkat Daerah yang Mendapat Pendampingan Perumusan Dokumen LPPD	100 %		100 %	100 %	57.770.000,00						100 %	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan SPIP Terintegrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung LPPD						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung SAKIP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Penerapan ZI Menuju WBK/WBBM						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reformasi Birokrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Nilai MCSP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Nilai Pemenuhan Stranas PK						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00						36 Perangkat Daerah	0,00	
	6.01.03.1.02.0001	Pendampingan dan Asistensi UrusanPemerintahan Daerah						57.770.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	36 Perangkat Daerah		36 Perangkat Daerah	36 Perangkat Daerah	57.770.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		36 Perangkat Daerah	0,00	Inspektorat
		Meningkatnya Perangkat Daerah yang Memenuhi Kriteria Menuju WBK/ WBBM						***1.598.610.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Perangkat Daerah yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM	67 %		67 %	67 %	48.770.000,00						67 %	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah		6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	48.770.000,00						6 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan SPIP Terintegrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah		6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	48.770.000,00						6 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung LPPD						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah		6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	48.770.000,00						6 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung SAKIP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah		6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	48.770.000,00						6 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Penerapan ZI Menuju WBK/WBBM						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah		6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	48.770.000,00						6 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reformasi Birokrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah		6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	48.770.000,00						6 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Nilai MCSP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah		6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	48.770.000,00						6 Perangkat Daerah	0,00	
		Meningkatnya Nilai Pemenuhan Stranas PK						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah		6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	48.770.000,00						6 Perangkat Daerah	0,00	
	6.01.03.1.02.0004	Pendampingan, Asistensi dan VerifikasiPenegakan Integritas						48.770.000,00							0,00	
		Terlaksananya Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	6 Perangkat Daerah		6 Perangkat Daerah	6 Perangkat Daerah	48.770.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		6 Perangkat Daerah	0,00	Inspektorat
		Persentase Nilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)						***1.598.610.000,00***							***0,00***	
			999.Persentase Nilai Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK)	75 %		55 %	60 %	1.411.700.000,00						65 %	0,00	
	6.01.03.1.02	Pendampingan dan Asistensi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Sesuai Akun						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	1.411.700.000,00						11 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan dan Pengawasan SPIP Terintegrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	1.411.700.000,00						11 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung LPPD						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	1.411.700.000,00						11 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya kualitas pendampingan Perangkat Daerah dalam Perumusan Dokumen Pendukung SAKIP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	1.411.700.000,00						11 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Penerapan ZI Menuju WBK/WBBM						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	1.411.700.000,00						11 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya Kualitas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reformasi Birokrasi						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	1.411.700.000,00						11 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya Nilai MCSP						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	1.411.700.000,00						11 Kegiatan	0,00	
		Meningkatnya Nilai Pemenuhan Stranas PK						1.598.610.000,00					Pengawasan		0,00	
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	11 Kegiatan	1.411.700.000,00						11 Kegiatan	0,00	
	6.01.03.1.02.0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi						1.411.700.000,00							0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	4 Kegiatan		4 Kegiatan	9 Kegiatan	1.411.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		4 Kegiatan	0,00	Inspektorat
		Terlaksananya Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	11 Kegiatan		11 Kegiatan	9 Kegiatan	1.411.700.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	7.Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	-		11 Kegiatan	0,00	Inspektorat
		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri						**26.808.575.659,00**							**22.724.432.321,00**	
	8	**UNSUR PEMERINTAHAN UMUM**						**26.808.575.659,00**							**22.724.432.321,00**	
	8.01	**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**						**26.808.575.659,00**							**22.724.432.321,00**	
372.	**8.01.01**	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI**						**8.044.414.459,00**							**2.020.894.797,00**	
		Meningkatnya Kualitas Akuntabilitas Kinerja Pada Perangkat Daerah						***8.044.414.459,00***							***1.972.088.731,00***	
			999.Nilai AKIP Perangkat Daerah	76.42 Skor		73.44 Skor	74.17 Skor	8.044.414.459,00						74.91 Skor	1.972.088.731,00	
	8.01.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						240.973.900,00					Nilai AKIP Perangkat Daerah		248.662.026,00	
		Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						240.973.900,00					Nilai AKIP Perangkat Daerah		248.662.026,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.465.000,00						1 Dokumen	3.811.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.080.000,00						1 Dokumen	65.028.294,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.895.000,00						1 Dokumen	5.384.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.250.000,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.362.500,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.856.400,00						4 Laporan	71.825.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	52.065.000,00						2 Laporan	5.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						240.973.900,00					Nilai AKIP Perangkat Daerah		248.662.026,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.465.000,00						1 Dokumen	3.811.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.080.000,00						1 Dokumen	65.028.294,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.895.000,00						1 Dokumen	5.384.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.250.000,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.362.500,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.856.400,00						4 Laporan	71.825.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	52.065.000,00						2 Laporan	5.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						240.973.900,00					Nilai AKIP Perangkat Daerah		248.662.026,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.465.000,00						1 Dokumen	3.811.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.080.000,00						1 Dokumen	65.028.294,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.895.000,00						1 Dokumen	5.384.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.250.000,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.362.500,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.856.400,00						4 Laporan	71.825.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	52.065.000,00						2 Laporan	5.000.000,00	
		Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						240.973.900,00					Nilai AKIP Perangkat Daerah		248.662.026,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.465.000,00						1 Dokumen	3.811.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.080.000,00						1 Dokumen	65.028.294,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.895.000,00						1 Dokumen	5.384.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.250.000,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.362.500,00						1 Dokumen	48.806.066,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.856.400,00						4 Laporan	71.825.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	52.065.000,00						2 Laporan	5.000.000,00	
		Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD						240.973.900,00					Nilai AKIP Perangkat Daerah		248.662.026,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.465.000,00						1 Dokumen	3.811.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.080.000,00						1 Dokumen	65.028.294,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.895.000,00						1 Dokumen	5.384.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.250.000,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.362.500,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.856.400,00						4 Laporan	71.825.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	52.065.000,00						2 Laporan	5.000.000,00	
		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						240.973.900,00					Nilai AKIP Perangkat Daerah		248.662.026,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.465.000,00						1 Dokumen	3.811.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.080.000,00						1 Dokumen	65.028.294,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.895.000,00						1 Dokumen	5.384.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.250.000,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.362.500,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.856.400,00						4 Laporan	71.825.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	52.065.000,00						2 Laporan	5.000.000,00	
		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						240.973.900,00					Nilai AKIP Perangkat Daerah		248.662.026,00	
			Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.465.000,00						1 Dokumen	3.811.500,00	
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.080.000,00						1 Dokumen	65.028.294,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.895.000,00						1 Dokumen	5.384.500,00	
			Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.250.000,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.362.500,00						1 Dokumen	48.806.066,00	
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	44.856.400,00						4 Laporan	71.825.600,00	
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	2 Laporan	52.065.000,00						2 Laporan	5.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	8.01.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah						59.080.000,00							65.028.294,00	
		Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	59.080.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	65.028.294,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD						38.362.500,00							48.806.066,00	
		Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.362.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	48.806.066,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan DokumenPerubahan RKA-SKPD						38.250.000,00							48.806.066,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	38.250.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	48.806.066,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD						3.465.000,00							3.811.500,00	
		Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	3.465.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	3.811.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD						4.895.000,00							5.384.500,00	
		Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	4.895.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.384.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD						44.856.400,00							71.825.600,00	
		Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan		4 Laporan	3 Laporan	44.856.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	71.825.600,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						52.065.000,00							5.000.000,00	
		Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2 Laporan		2 Laporan	1 Laporan	52.065.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		2 Laporan	5.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						6.488.720.359,00					ASN		67.196.550,00	
		Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan						6.488.720.359,00					ASN		67.196.550,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	525.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.195.000,00						1 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00						1 Dokumen	40.613.650,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.074.000,00						1 Laporan	20.557.900,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan		50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	6.402.951.359,00						50 Orang/ Bulan	0,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						6.488.720.359,00					ASN		67.196.550,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	525.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.195.000,00						1 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00						1 Dokumen	40.613.650,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.074.000,00						1 Laporan	20.557.900,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan		50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	6.402.951.359,00						50 Orang/ Bulan	0,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN						6.488.720.359,00					ASN		67.196.550,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	525.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.195.000,00						1 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00						1 Dokumen	40.613.650,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.074.000,00						1 Laporan	20.557.900,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan		50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	6.402.951.359,00						50 Orang/ Bulan	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						6.488.720.359,00					ASN		67.196.550,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	525.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.195.000,00						1 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00						1 Dokumen	40.613.650,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.074.000,00						1 Laporan	20.557.900,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan		50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	6.402.951.359,00						50 Orang/ Bulan	0,00	
		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN						6.488.720.359,00					ASN		67.196.550,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	525.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.195.000,00						1 Dokumen	5.500.000,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00						1 Dokumen	40.613.650,00	
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.074.000,00						1 Laporan	20.557.900,00	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan		50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	6.402.951.359,00						50 Orang/ Bulan	0,00	
	8.01.01.1.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						6.402.951.359,00							0,00	
		Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50 Orang/ Bulan		50 Orang/ Bulan	50 Orang/ Bulan	6.402.951.359,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	-		50 Orang/ Bulan	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.02.0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan TugasASN						49.500.000,00							40.613.650,00	
		Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	49.500.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	40.613.650,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD						26.195.000,00							5.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	26.195.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	5.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						10.074.000,00							20.557.900,00	
		Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	10.074.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	20.557.900,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.02.0006	Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan						0,00							525.000,00	
		Tersedianya Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	525.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah padaPerangkat Daerah						24.749.700,00					Administrasi Perkantoran		26.691.500,00	
		Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD						24.749.700,00					Administrasi Perkantoran		26.691.500,00	
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.749.700,00						1 Laporan	26.691.500,00	
	8.01.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah padaSKPD						24.749.700,00							26.691.500,00	
		Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	24.749.700,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	26.691.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah						407.038.000,00					Administrasi Perkantoran		388.932.721,00	
		Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan						407.038.000,00					Administrasi Perkantoran		388.932.721,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.187.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	119.515.000,00						1 Laporan	102.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	179.000.000,00						1 Laporan	179.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.267.000,00						12 Paket	8.133.708,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	3 Paket	39.573.000,00						3 Paket	26.565.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		3 Paket	8 Paket	11.140.000,00						8 Paket	6.092.240,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.000.000,00						5 Paket	10.752.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		8 Paket	8 Paket	17.356.000,00						7 Paket	5.889.273,00	
		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu						407.038.000,00					Administrasi Perkantoran		388.932.721,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.187.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	119.515.000,00						1 Laporan	102.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	179.000.000,00						1 Laporan	179.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.267.000,00						12 Paket	8.133.708,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	3 Paket	39.573.000,00						3 Paket	26.565.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		3 Paket	8 Paket	11.140.000,00						8 Paket	6.092.240,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.000.000,00						5 Paket	10.752.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		8 Paket	8 Paket	17.356.000,00						7 Paket	5.889.273,00	
		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD						407.038.000,00					Administrasi Perkantoran		388.932.721,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.187.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	119.515.000,00						1 Laporan	102.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	179.000.000,00						1 Laporan	179.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.267.000,00						12 Paket	8.133.708,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	3 Paket	39.573.000,00						3 Paket	26.565.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		3 Paket	8 Paket	11.140.000,00						8 Paket	6.092.240,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.000.000,00						5 Paket	10.752.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		8 Paket	8 Paket	17.356.000,00						7 Paket	5.889.273,00	
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan						407.038.000,00					Administrasi Perkantoran		388.932.721,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.187.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	119.515.000,00						1 Laporan	102.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	179.000.000,00						1 Laporan	179.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.267.000,00						12 Paket	8.133.708,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	3 Paket	39.573.000,00						3 Paket	26.565.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		3 Paket	8 Paket	11.140.000,00						8 Paket	6.092.240,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.000.000,00						5 Paket	10.752.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		8 Paket	8 Paket	17.356.000,00						7 Paket	5.889.273,00	
		Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan						407.038.000,00					Administrasi Perkantoran		388.932.721,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.187.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	119.515.000,00						1 Laporan	102.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	179.000.000,00						1 Laporan	179.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.267.000,00						12 Paket	8.133.708,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	3 Paket	39.573.000,00						3 Paket	26.565.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		3 Paket	8 Paket	11.140.000,00						8 Paket	6.092.240,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.000.000,00						5 Paket	10.752.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		8 Paket	8 Paket	17.356.000,00						7 Paket	5.889.273,00	
		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan						407.038.000,00					Administrasi Perkantoran		388.932.721,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.187.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	119.515.000,00						1 Laporan	102.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	179.000.000,00						1 Laporan	179.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.267.000,00						12 Paket	8.133.708,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	3 Paket	39.573.000,00						3 Paket	26.565.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		3 Paket	8 Paket	11.140.000,00						8 Paket	6.092.240,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.000.000,00						5 Paket	10.752.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		8 Paket	8 Paket	17.356.000,00						7 Paket	5.889.273,00	
		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						407.038.000,00					Administrasi Perkantoran		388.932.721,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.187.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	119.515.000,00						1 Laporan	102.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	179.000.000,00						1 Laporan	179.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.267.000,00						12 Paket	8.133.708,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	3 Paket	39.573.000,00						3 Paket	26.565.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		3 Paket	8 Paket	11.140.000,00						8 Paket	6.092.240,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.000.000,00						5 Paket	10.752.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		8 Paket	8 Paket	17.356.000,00						7 Paket	5.889.273,00	
		Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan						407.038.000,00					Administrasi Perkantoran		388.932.721,00	
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.187.000,00						1 Dokumen	50.000.000,00	
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	119.515.000,00						1 Laporan	102.500.000,00	
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	179.000.000,00						1 Laporan	179.000.000,00	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.267.000,00						12 Paket	8.133.708,00	
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	3 Paket	39.573.000,00						3 Paket	26.565.000,00	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		3 Paket	8 Paket	11.140.000,00						8 Paket	6.092.240,00	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.000.000,00						5 Paket	10.752.500,00	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		8 Paket	8 Paket	17.356.000,00						7 Paket	5.889.273,00	
	8.01.01.1.06.0001	Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor						11.140.000,00							6.092.240,00	
		Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 Paket		3 Paket	8 Paket	11.140.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		8 Paket	6.092.240,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor						13.000.000,00							10.752.500,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5 Paket		5 Paket	5 Paket	13.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		5 Paket	10.752.500,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga						17.356.000,00							5.889.273,00	
		Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	7 Paket		8 Paket	8 Paket	17.356.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7 Paket	5.889.273,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor						5.267.000,00							8.133.708,00	
		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	10 Paket		10 Paket	10 Paket	5.267.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		12 Paket	8.133.708,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan						39.573.000,00							26.565.000,00	
		Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket		3 Paket	3 Paket	39.573.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Paket	26.565.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan PeraturanPerundang-Undangan						22.187.000,00							50.000.000,00	
		Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	22.187.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Dokumen	50.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu						119.515.000,00							102.500.000,00	
		Terlaksananya Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	119.515.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	102.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi danKonsultasi SKPD						179.000.000,00							179.000.000,00	
		Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	179.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	179.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah PenunjangUrusan Pemerintah Daerah						0,00					Administrasi Perkantoran		400.000.000,00	
		Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan						0,00					Administrasi Perkantoran		400.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	Unit	0,00						Unit	0,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	400.000.000,00	
		Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan						0,00					Administrasi Perkantoran		400.000.000,00	
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	Unit	0,00						Unit	0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	400.000.000,00	
	8.01.01.1.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							400.000.000,00	
		Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						0,00							0,00	
		Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit		2 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		Unit	0,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang UrusanPemerintahan Daerah						736.832.500,00					Administrasi Perkantoran		769.552.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan						736.832.500,00					Administrasi Perkantoran		769.552.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	97.600.000,00						3 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	608.412.500,00						4 Laporan	656.732.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	28.820.000,00						4 Laporan	20.820.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan						736.832.500,00					Administrasi Perkantoran		769.552.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	97.600.000,00						3 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	608.412.500,00						4 Laporan	656.732.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	28.820.000,00						4 Laporan	20.820.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan						736.832.500,00					Administrasi Perkantoran		769.552.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	97.600.000,00						3 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	608.412.500,00						4 Laporan	656.732.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	28.820.000,00						4 Laporan	20.820.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat						736.832.500,00					Administrasi Perkantoran		769.552.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	97.600.000,00						3 Laporan	90.000.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	608.412.500,00						4 Laporan	656.732.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	28.820.000,00						4 Laporan	20.820.000,00	
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00						1 Laporan	2.000.000,00	
	8.01.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat						2.000.000,00							2.000.000,00	
		Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	2.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Laporan	2.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik						97.600.000,00							90.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan		3 Laporan	3 Laporan	97.600.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		3 Laporan	90.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.08.0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor						28.820.000,00							20.820.000,00	
		Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	28.820.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	20.820.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor						608.412.500,00							656.732.000,00	
		Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	4 Laporan		4 Laporan	4 Laporan	608.412.500,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		4 Laporan	656.732.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						146.100.000,00					Administrasi Perkantoran		119.860.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya						146.100.000,00					Administrasi Perkantoran		119.860.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	146.100.000,00						10 Unit	94.860.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	25.000.000,00	
		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya						146.100.000,00					Administrasi Perkantoran		119.860.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	146.100.000,00						10 Unit	94.860.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	25.000.000,00	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi						146.100.000,00					Administrasi Perkantoran		119.860.000,00	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	146.100.000,00						10 Unit	94.860.000,00	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00						1 Unit	25.000.000,00	
	8.01.01.1.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						0,00							25.000.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	1 Unit		1 Unit	1 Unit	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1 Unit	25.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						146.100.000,00							94.860.000,00	
		Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit		10 Unit	10 Unit	146.100.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		10 Unit	94.860.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
373.	**8.01.02**	**PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN**						**2.091.774.200,00**							**1.864.181.740,00**	
		Meningkatnya kesadaran masyarakat akan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan						***2.091.774.200,00***							***1.864.181.740,00***	
			999.Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	92 Persentase		83.00 Persentase	85 Persentase	2.091.774.200,00						87 Persentase	1.864.181.740,00	
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun						2.091.774.200,00					Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda		1.864.181.740,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	55.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	82.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	11.641.200,00						500 Orang	22.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	64 Orang		64 Orang	64 Orang	1.533.485.000,00						64 Orang	1.533.485.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						2.091.774.200,00					Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda		1.864.181.740,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	55.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	82.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	11.641.200,00						500 Orang	22.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	64 Orang		64 Orang	64 Orang	1.533.485.000,00						64 Orang	1.533.485.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						2.091.774.200,00					Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda		1.864.181.740,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	55.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	82.500.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	11.641.200,00						500 Orang	22.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	64 Orang		64 Orang	64 Orang	1.533.485.000,00						64 Orang	1.533.485.000,00	
		Jumlah Paskibraka						2.091.774.200,00					Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda		1.864.181.740,00	
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	55.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00						1 Laporan	82.500.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang		500 Orang	500 Orang	11.641.200,00						500 Orang	22.000.000,00	
			Jumlah Paskibraka	64 Orang		64 Orang	64 Orang	1.533.485.000,00						64 Orang	1.533.485.000,00	
	8.01.02.1.01.0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						0,00							55.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Dokumen	55.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.02.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						11.641.200,00							22.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	500 Orang		500 Orang	50 Orang	11.641.200,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		500 Orang	22.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.02.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						200.000.000,00							82.500.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	200.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Laporan	82.500.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.02.1.01.0012	Pembentukan Paskibraka						1.533.485.000,00							1.533.485.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terbentuknya pasukan pengibar bendera pusaka	Jumlah Paskibraka	64 Orang		64 Orang	30 Orang	1.533.485.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		64 Orang	1.533.485.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.02.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan						2.091.774.200,00					Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda		1.864.181.740,00	
		Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun						2.091.774.200,00					Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda		1.864.181.740,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	346.648.000,00						-	226.141.740,00	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						2.091.774.200,00					Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda		1.864.181.740,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	346.648.000,00						-	226.141.740,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						2.091.774.200,00					Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda		1.864.181.740,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	346.648.000,00						-	226.141.740,00	
		Jumlah Paskibraka						2.091.774.200,00					Pelajar, Mahasiswa, dan Pemuda		1.864.181.740,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	-	346.648.000,00						-	226.141.740,00	
	8.01.02.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						346.648.000,00							226.141.740,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	-		-	300 Orang	346.648.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	226.141.740,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
374.	**8.01.03**	**PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK**						**7.572.795.000,00**							**9.913.358.000,00**	
		Meningkatnya etika dan budaya politik						***7.572.795.000,00***							***9.913.358.000,00***	
			999.Cakupan Pendidikan Politik kepada Masyarakat, Ormas, Lembaga Pendidikan	82 %		71.6 %	76.3 %	7.572.795.000,00						78 %	9.913.358.000,00	
	8.01.03.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik						7.572.795.000,00					Partai Politik, Toga, Toma, Toda, Topem, Perempuan, Lembaga Pemerintahan, Pelajar		9.913.358.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						7.572.795.000,00					Partai Politik, Toga, Toma, Toda, Topem, Perempuan, Lembaga Pemerintahan, Pelajar		9.913.358.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	116.050.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	130.042.000,00						200 Orang	330.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	475.445.000,00						200 Orang	400.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						7.572.795.000,00					Partai Politik, Toga, Toma, Toda, Topem, Perempuan, Lembaga Pemerintahan, Pelajar		9.913.358.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	116.050.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	130.042.000,00						200 Orang	330.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	475.445.000,00						200 Orang	400.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						7.572.795.000,00					Partai Politik, Toga, Toma, Toda, Topem, Perempuan, Lembaga Pemerintahan, Pelajar		9.913.358.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	116.050.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	130.042.000,00						200 Orang	330.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	475.445.000,00						200 Orang	400.000.000,00	
	8.01.03.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						475.445.000,00							400.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	475.445.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		200 Orang	400.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.03.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					130.042.000,00							330.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	130.042.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		200 Orang	330.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.03.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					100.000.000,00							116.050.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Laporan	116.050.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah					7.572.795.000,00					Partai Politik, Toga, Toma, Toda, Topem, Perempuan, Lembaga Pemerintahan, Pelajar		9.913.358.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-		-	-	6.867.308.000,00						-	9.067.308.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						7.572.795.000,00					Partai Politik, Toga, Toma, Toda, Topem, Perempuan, Lembaga Pemerintahan, Pelajar		9.913.358.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-		-	-	6.867.308.000,00						-	9.067.308.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						7.572.795.000,00					Partai Politik, Toga, Toma, Toda, Topem, Perempuan, Lembaga Pemerintahan, Pelajar		9.913.358.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-		-	-	6.867.308.000,00						-	9.067.308.000,00	
	8.01.03.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah						6.867.308.000,00							9.067.308.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun	-		-	1 Dokumen	6.867.308.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	9.067.308.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
375.	**8.01.04**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN**						**3.399.339.000,00**							**1.776.783.433,00**	
		Meningkatnya ketertiban organisasi kemasyarakatan						***3.399.339.000,00***							***1.576.783.433,00***	
			999.Persentase Organisasi Kemasyarakatan yang Aktif	61.89 Persentase		59.47 Persentase	60.07 Persentase	3.399.339.000,00						60.67 Persentase	1.576.783.433,00	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						3.399.339.000,00					Ormas		1.776.783.433,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	845.947.400,00						200 Orang	346.783.433,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	173.391.600,00						100 Orang	200.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						3.399.339.000,00					Ormas		1.776.783.433,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	845.947.400,00						200 Orang	346.783.433,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	173.391.600,00						100 Orang	200.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						3.399.339.000,00					Ormas		1.776.783.433,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00						1 Laporan	200.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	845.947.400,00						200 Orang	346.783.433,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	173.391.600,00						100 Orang	200.000.000,00	
	8.01.04.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						173.391.600,00							200.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	100 Orang		100 Orang	150 Orang	173.391.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		100 Orang	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.04.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						845.947.400,00							346.783.433,00	
		Terlaksananya Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	845.947.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		200 Orang	346.783.433,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.04.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						350.000.000,00							200.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Laporan	200.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.04.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan						3.399.339.000,00					Ormas		1.776.783.433,00	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						3.399.339.000,00					Ormas		1.776.783.433,00	
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-		-	-	2.030.000.000,00						-	1.030.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						3.399.339.000,00					Ormas		1.776.783.433,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-		-	-	2.030.000.000,00						-	1.030.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						3.399.339.000,00					Ormas		1.776.783.433,00	
			Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-		-	-	2.030.000.000,00						-	1.030.000.000,00	
	8.01.04.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah						2.030.000.000,00							1.030.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Kebijakan Dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun	-		-	1 Dokumen	2.030.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		-	1.030.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
376.	**8.01.05**	**PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA**						**631.258.000,00**							**1.912.784.865,00**	
		Meningkatnya ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat						***631.258.000,00***							***1.912.784.865,00***	
			999.Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	73.35-73.64 Indeks		71.96-72.02 Indeks	72.24-72.35 Indeks	631.258.000,00						72.51-72.67 Indeks	1.912.784.865,00	
			999.Persentase Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Dilaksanakan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	631.258.000,00						100 Persentase	1.912.784.865,00	
	8.01.05.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya						631.258.000,00					Masyarakat		1.912.784.865,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun						631.258.000,00					Masyarakat		1.912.784.865,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	728.784.865,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	380.251.400,00						200 Orang	979.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	151.006.600,00						100 Orang	150.000.000,00	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						631.258.000,00					Masyarakat		1.912.784.865,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	728.784.865,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	380.251.400,00						200 Orang	979.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	151.006.600,00						100 Orang	150.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						631.258.000,00					Masyarakat		1.912.784.865,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	728.784.865,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	380.251.400,00						200 Orang	979.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	151.006.600,00						100 Orang	150.000.000,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						631.258.000,00					Masyarakat		1.912.784.865,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00						1 Dokumen	728.784.865,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00						1 Laporan	55.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang		200 Orang	200 Orang	380.251.400,00						200 Orang	979.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	151.006.600,00						100 Orang	150.000.000,00	
	8.01.05.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						0,00							728.784.865,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Dokumen	728.784.865,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.05.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						151.006.600,00							150.000.000,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	100 Orang		100 Orang	300 Orang	151.006.600,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		100 Orang	150.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.05.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						380.251.400,00							979.000.000,00	
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	200 Orang		200 Orang	260 Orang	380.251.400,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		200 Orang	979.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.05.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah						100.000.000,00							55.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Laporan	55.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
377.	**8.01.06**	**PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL**						**5.068.995.000,00**							**5.236.429.486,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan						***5.068.995.000,00***							***5.236.429.486,00***	
			999.Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	100 Persentase		100 Persentase	100 Persentase	5.068.995.000,00						100 Persentase	5.236.429.486,00	
	8.01.06.1.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial						5.068.995.000,00					Masyarakat		5.236.429.486,00	
		Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi						5.068.995.000,00					Masyarakat		5.236.429.486,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.421.120.000,00						1 Dokumen	2.239.920.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00						2 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00						1 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	311.895.000,00						100 Orang	495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.705.980.000,00						100 Orang	1.881.509.486,00	
		Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun						5.068.995.000,00					Masyarakat		5.236.429.486,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.421.120.000,00						1 Dokumen	2.239.920.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00						2 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00						1 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	311.895.000,00						100 Orang	495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.705.980.000,00						100 Orang	1.881.509.486,00	
		Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						5.068.995.000,00					Masyarakat		5.236.429.486,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.421.120.000,00						1 Dokumen	2.239.920.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00						2 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00						1 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	311.895.000,00						100 Orang	495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.705.980.000,00						100 Orang	1.881.509.486,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						5.068.995.000,00					Masyarakat		5.236.429.486,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.421.120.000,00						1 Dokumen	2.239.920.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00						2 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00						1 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	311.895.000,00						100 Orang	495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.705.980.000,00						100 Orang	1.881.509.486,00	
		Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						5.068.995.000,00					Masyarakat		5.236.429.486,00	
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.421.120.000,00						1 Dokumen	2.239.920.000,00	
			Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	2 Dokumen	450.000.000,00						2 Dokumen	450.000.000,00	
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00						1 Laporan	170.000.000,00	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	311.895.000,00						100 Orang	495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	100 Orang	1.705.980.000,00						100 Orang	1.881.509.486,00	
	8.01.06.1.01.0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						450.000.000,00							450.000.000,00	
		Tersusunnya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun	2 Dokumen		2 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		2 Dokumen	450.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.06.1.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						1.705.980.000,00							1.881.509.486,00	
		Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	150 Orang	1.705.980.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		100 Orang	1.881.509.486,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.06.1.01.0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						311.895.000,00							495.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	100 Orang		100 Orang	200 Orang	311.895.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		100 Orang	495.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.06.1.01.0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah						180.000.000,00							170.000.000,00	
		Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan		1 Laporan	1 Laporan	180.000.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Laporan	170.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
	8.01.06.1.01.0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi PimpinanDaerah Provinsi						2.421.120.000,00							2.239.920.000,00	
		Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi	1 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	2.421.120.000,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).	-		1 Dokumen	2.239.920.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri
			Persentase kontribusi energi baru	-		-	14.50 %	0,00						-	335.053.500,00	
			Persentase izin usaha pertambangan yang dikendalikan.	-		-	20.14 %	249.999.750,00						-	327.503.000,00	
			999.Persentase kontribusi energi baru terbarukan dalam pembangkit listrik	-		-	14.50 %	0,00						-	335.053.500,00	
			999.Persentase izin usaha pertambangan yang dikendalikan	-		-	20.14 %	249.999.750,00						-	327.503.000,00	
378.	**-**	**-**						**724.199.175,00**							**2.096.070.000,00**	
379.	**-**	**-**						**646.633.075,00**							**2.496.070.000,00**	
	-	**-**						**249.999.750,00**							**662.556.500,00**	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
	-	-						**249.999.750,00**							**662.556.500,00**	
		Terlaksananya pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi.						273.331.950,00					laporan pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi		958.687.500,00	
		Terlaksananya pembinaan dan pengawasan usaha pertambangan rakyat						449.999.400,00					IPR yang melaksanakan kegiatan pertambangan		978.309.000,00	
			-	-		-	-	124.999.775,00						-	159.553.000,00	
			-	-		-	-	0,00						-	22.873.500,00	
	-	-						273.331.950,00					laporan pengelolaan penyediaan biomassa dan/atau biogas dalam wilayah provinsi		958.687.500,00	
	-	-						124.999.975,00							167.950.000,00	
	-	-						124.999.775,00							159.553.000,00	
	-	-						0,00							139.755.000,00	
	-	-						0,00							139.755.000,00	
	-	-						0,00							121.000.000,00	
	-	-						0,00							22.873.500,00	
		-	-	-		-	-	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	22.873.500,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-	-	-		-	-	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	51.425.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		-	-	-		-	-	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	121.000.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		-	-	-		-	-	0,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	139.755.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR	TARGET AKHIR RENSTRA	REALISASI 2025	PRAKIRAAN 2026	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU 2028		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2027	PAGU INDIKATIF	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF	
											NASIONAL	DAERAH				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		-	-	-		-	-	124.999.775,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	159.553.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		-	-	-		-	-	124.999.975,00	Provinsi Nusa Tenggara Barat	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	-		-	167.950.000,00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
	-	-						0,00							51.425.000,00	
	J U M L A H							**6.060.657.280.402,28**							**5.261.846.062.085,99**	